

Consistent Transformation Toward Fit^{for} Future

Konsisten Bertransformasi untuk Menuju Masa Depan yang Sehat



Metode Penyusunan Dan Tentang Laporan Tahunan

Preparation Method And About The Annual Report

Laporan Tahunan 2024 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk diterbitkan bersamaan dengan Laporan Keberlanjutan 2024 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk memberikan gambaran secara utuh tentang Perseroan, sehingga membantu Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan memahami tujuan strategis Perseroan dan perkembangannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.

Laporan Tahunan 2024, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk disusun berdasarkan pada Anggaran Dasar Perusahaan; Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan oleh Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam rangka menerapkan praktik terbaik prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), penyampaian laporan ini juga mengacu pada pedoman praktik tata kelola yang berlaku di lingkup nasional, yaitu Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (GCG) tahun 2021, dan pedoman yang berlaku di lingkup regional ASEAN, yaitu *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

Laporan Tahunan ini terdiri dari beberapa bab, meliputi Ikhtisar Kinerja, Laporan Manajemen, Profil Perusahaan, Analisis dan Pembahasan Manajemen, Tinjauan Pendukung Bisnis, Tata Kelola Perusahaan, dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Penyebutan kata "WIKA" dan "Perseroan" didefinisikan sebagai PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang menjalankan bisnis utamanya di bidang konstruksi.

Laporan Tahunan disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di portal resmi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk www.WIKA.co.id.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 2024 Annual Report of is published along with its 2024 Sustainability Report, in which both are actually inseparable in providing a complete overview of the Company's risks, opportunities and prospects in the future, thereby assisting Shareholders and Stakeholders understand the strategic objectives of the Company and its development in creating sustainable value.

The 2024 Annual Report of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is prepared in accordance with the Company's Articles of Association; Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation and stipulated by Law No. 6 of 2023 Determination of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation becoming Law; Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies; and Financial Services Authority Circular no. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

In the framework of best practices towards the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, this report refers to the guidelines for governance practices that apply at national level, namely General Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesia (PUGKI) issued by the National Committee on Governance Policy (GCG) in 2021, and the guidelines that apply in ASEAN region, namely ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) parameter.

This Annual Report consists of several chapters, covering Performance Highlights, Management Report, Company Profile, Management Discussion and Analysis, Business Support Review, Corporate Governance, and Social and Environmental Responsibility.

The currency "Rupiah", "Rp" or "IDR" refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dolar" or USD refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The mention of the words "WIKA" and "Company" is defined as PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, which is engaged in the construction sector as its main business.

This Annual Report is presented in two languages, namely Bahasa Indonesia and English using styles and fonts that are easy to read and printed with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on the official website of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, www.WIKA.co.id

Sanggahan Dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer And Limitations Of Liability

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang WIKA serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, karena hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Perseroan.

Laporan tahunan ini memuat kata "WIKA" dan "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang menjalankan bisnis utamanya di bidang konstruksi.

This Annual Report contains statements of financial conditions, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws, except for historical matters. These statements have the prospect of risk, uncertainty, and can result in actual developments that are materially different from those reported.

Prospective statements in this Annual Report are based on various assumptions regarding current and future conditions of WIKA and business environment in which the Company conducts its business activities. The statements contained in this Annual Report are not a guarantee of future performance, as actual results in the future may be different as they can be influenced by several factors outside the Company's control.

The words "WIKA" and "Company" contained in this report is defined as PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, which is engaged in the construction sector as its main business.

Consistent Transformation Toward Fit^{for} Future

Konsisten Bertransformasi untuk Menuju Masa Depan yang Sehat



Penjelasan Tema

Theme Description

Di tahun 2024, WIKA masih terus fokus dan konsisten dalam bertransformasi menjalankan langkah-langkah strategis dengan mengupayakan efisiensi operasi di seluruh proyek yang dijalankan Perseroan. WIKA secara aktif menerapkan *lean construction* dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi pada proyek-proyek berjalan. Melalui peningkatan daya saing dan eksekusi proyek yang lebih efisien, WIKA menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya bertahan pada kondisi yang tidak pasti ini, tetapi juga menciptakan peluang baru melalui inisiatif di sektor industri dan infrastruktur. Selain itu, langkah penyehatan dan perbaikan yang tengah dijalankan WIKA saat ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan demi mengakselerasi upaya Perseroan untuk mampu *sustain* dan bertumbuh dengan baik menuju masa depan bisnis WIKA yang lebih sehat.

In 2024, WIKA continues to focus and remain consistent in its transformation by implementing strategic measures aimed at improving operational efficiency across all projects undertaken by the Company. WIKA actively applies lean construction and digitalization to enhance efficiency in ongoing projects. Through increased competitiveness and more efficient project execution, WIKA demonstrates its commitment not only to survive in these uncertain conditions but also to create new opportunities through initiatives in the industrial and infrastructure sectors. Additionally, the ongoing restructuring and improvements at WIKA will continue to be carried out sustainably to accelerate the Company's efforts to remain resilient and grow effectively, paving the way for a healthier future for WIKA's business.



Kesinambungan Tema

Theme Continuity

MEMPERKUAT FONDASI UNTUK MENJAGA KEBERLANJUTAN BISNIS

Strengthen Fundamental Ensuring Sustainable Business



Tahun 2023 menjadi tahun penguatan fundamental usaha WIKA. Setelah beberapa tahun sebelumnya WIKA menghadapi badai tantangan usaha yang cukup berat terutama akibat pandemi COVID-19, dimana *order book* konstruksi dan penjualan properti mengalami tekanan karena aktivitas ekonomi yang menurun serta daya belanja masyarakat yang melemah; para pemberi kerja atau pemilik proyek mengalami kesulitan keuangan sehingga mempengaruhi *collecting* piutang WIKA; hingga akhirnya berujung pada meningkatnya beban utang.

The year 2023 was a year for WIKA to strengthen its business fundamentals. After facing significant business challenges in the previous years, particularly due to the COVID-19 pandemic, where WIKA experienced pressure on its construction order book and property sales due to decreased economic activity and weakened consumer spending; project owners faced financial difficulties, impacting WIKA's receivables collectability, ultimately leading to an extraordinary increase in WIKA's debt burden.

Sepanjang tahun 2023 WIKA melakukan kajian dan analisis secara mendalam dan menyeluruh terhadap setiap aspek usaha WIKA. WIKA melakukan inisiatif strategis berupa penguatan fundamental usaha melalui transformasi. Prioritas utama transformasi WIKA berfokus kepada penyehatan kondisi keuangan perusahaan dengan objek transformasi meliputi *People, Culture, dan System*.

Throughout 2023, WIKA conducted in-depth and comprehensive studies and analyses on every aspect of its business. WIKA carried out strategic initiatives in the form of strengthening its business fundamentals through transformation. The main priority of WIKA's transformation is to focus on the revitalization of the Company's financial conditions, with the transformation objects encompassing People, Culture, and Systems.

MEMPERTAJAM FOKUS DAN BERTRANSFORMASI LEBIH KUAT UNTUK MEWUJUDKAN NILAI YANG BERKESINAMBUNGAN

Sharpening Focus, Transforming Stronger For Sustaining Value



Komitmen WIKA untuk terus tumbuh sehat dan berkelanjutan tetap tinggi meski di tengah beratnya tantangan perekonomian yang silih berganti di sepanjang tahun 2022. Upaya tersebut dilakukan melalui penajaman fokus pada pencapaian target Usaha yang selaras dengan Visi dan Misi WIKA, terutama dalam membangun keberlanjutan bisnis WIKA. Semangat untuk bertransformasi menjadi perusahaan yang adaptif yang dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Bangsa, menjadi kekuatan besar yang menuntun WIKA untuk senantiasa menjadi entitas usaha yang dinamis, responsif, adaptif, inovatif untuk menghasilkan karya yang mampu mendorong terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sekaligus mempertahankan nilai-nilai keberlanjutan yang dikembangkan WIKA.

WIKA's commitment to continue to grow in a sound and sustainable manner remains high even in the midst of ever-changing economic challenges throughout the year of 2022. The efforts made through sharpening the focus on achieving business targets that are in line with WIKA's Vision and Mission, especially in building WIKA's business sustainability. The spirit to transform into an adaptive company that can provide the best contribution to the Nation, becomes a great force that guides WIKA to always be a dynamic, responsive, adaptive, innovative business entity and to produce works that can encourage the realization of sustainable development goals, while maintaining the sustainability values developed by WIKA.

2021



BERANI MENGALAHKAN TANTANGAN, MEMPERTAHAKAN KEUNGGULAN

Dare To Beat The Challenge, Maintaining Excellence

WIKA memutuskan untuk terus memberikan kontribusi sekaligus berpartisipasi bersama pemerintah mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, WIKA menjadikan tahun 2021 sebagai momentum untuk berani mengalahkan tantangan dengan tetap menjaga keunggulan “Berani Mengalahkan Tantangan, Mempertahankan Keunggulan”.

WIKA decided to continually contributing and participating with the government in realizing Indonesia's aspirations to become a developed, well-off, and prosperous country. Therefore, WIKA made the year of 2021 as a momentum to dare to beat challenges while maintaining the excellence.

2020



KUAT DI TENGAH TANTANGAN, SOLID MERAHAI PELUANG

Strong Amid The Challenges, Solid Seizes Opportunities

Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia pada awal tahun 2020 menyebabkan perlambatan di berbagai sektor usaha secara global maupun nasional, termasuk sektor konstruksi. Sebagai perusahaan publik yang bergerak dalam industri konstruksi, WIKA merespon dan beradaptasi dengan cepat melalui penguatan strategi dan inovasi-inovasi, sehingga WIKA tetap kuat dan tangguh di tengah tantangan dan mampu bersaing, meraih peluang pertumbuhan berkelanjutan, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di pasar internasional.

The COVID-19 pandemic that started to spread throughout the world in early 2020 brought about a slowdown in many business sectors globally and nationally, including the construction sector. As a public company engaged in the infrastructure/construction industry, WIKA responded to the circumstances and adapted quickly by strengthening its strategies and innovations, ensuring WIKA remained strong and resilient during these challenging times, and was able to compete, seize opportunities for sustainable growth, not only domestically, but also in the international market.

2019



MEMBANGUN KUALITAS KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK

Building A Better Quality Of Life

Di tahun 2019 WIKA kembali memasuki fase yang baru seiring dengan diluncurkannya Visi WIKA 2030, yaitu “Terdepan dalam Investasi dan EPC berkelanjutan untuk Kualitas Kehidupan yang Lebih Baik”. Visi baru ini mempertegas keberadaan WIKA yang bukan hanya sekedar membangun infrastruktur, tapi lebih dari itu, pembangunan yang dilakukan oleh WIKA harus membawa kebaikan dan menjadikan kualitas hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. WIKA meyakini, Visi WIKA 2030 merupakan wujud nyata dari harmonisasi aspek *people*, *planet* dan *profit* dan juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

In 2019, WIKA entered a new phase in line with the launch of WIKA Vision 2030 “A Leader in Sustainable Investment and EPC for a Better Quality of Life”. This new vision highlights that WIKA is more than just building infrastructure, but that WIKA's development must bring about goodness and a better quality of life than before. WIKA believes the WIKA 2030 Vision will demonstrate that bringing together the people, planet and profit aspects in line with the sustainable development goals

Daftar Isi

Table Of Contents

2	Metode Penyusunan Dan Tentang Laporan Tahunan Preparation Method And About The Annual Report
3	Sanggahan Dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer And Limitations Of Liability
5	Penjelasan Tema Theme Description
6	Kesinambungan Tema Theme Continuity
8	Daftar Isi Table Of Contents
10	Transformasi WIKA: Upaya Penguatan Fundamental Bisnis WIKa's Transformation: Strengthening Business Fundamentals
17	Fokus Bisnis WIKa Pada Lini Bisnis EPCC WIKa Business Focus On Epcc
20	Keunggulan Kompetitif WIKa WIKa Competitive Advantages
22	Komitmen dan Inisiatif Hijau WIKa WIKa Green Commitment And Initiatives
37	Dukungan Keberlanjutan Melalui Produk Sustainability Support Through Products
49	Internalisasi Budaya Integritas dan Etika Bisnis Internalization of Integrity Culture and Business Ethics
52	Inisiatif Penguatan Governansi WIKa di 2024 WIKa Governance Strengthening Initiative in 2024
62	Sekilas Tentang WIKa WIKa at a Glance
64	Pencapaian WIKa 2024 WIKa's Achievement In 2024
66	Penghargaan dan Pengakuan Eksternal Awards and External Recognition
70	Kontribusi Untuk Negeri Contribution For The Nation
82	Demografi Proyek Berjalan Tahun 2024 Demographics of Ongoing Projects in 2024
84	Jejak Langkah Milestones

01 Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performa Highlight	
90	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights
100	Ikhtisar Operasional Operational Highlights
102	Ikhtisar Saham Shares Highlights
105	Informasi mengenai obligasi dan sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar Information on Outstanding Bonds, Sharia Bonds, or Convertible Bonds
115	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya Information on other Sources of Funding
02 Laporan Manajemen Management Report	
118	Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris
132	Laporan Direksi Board of Directors Report
150	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Statement Letter of Board of Commissioners On Accountability for the Fiscal Year 2024 Annual Report of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
151	Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Statement of Board of Directors On Accountability for the Fiscal Year 2024 Annual Report of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
03 Profil Perusahaan Company Profile	
154	Informasi Umum Perusahaan General Information About the Company
158	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company
163	Identitas Perusahaan Company Identity
164	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Values
207	Kegiatan Usaha Lines of Business
212	Wilayah Operasional Operational Area

214	Struktur Organisasi Perusahaan Struktur Organisasi Perusahaan
216	Daftar Keanggotaan Asosiasi Association Membership
217	Peristiwa Penting Event Highlights
222	Profil Direksi Board of Directors Profile
236	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
244	Profil Pejabat Eksekutif Executives Profile
252	Pengelolaan <i>Human Capital</i> Human Capital Management
273	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholders Structure and Composition
274	Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Pada Awal dan Akhir Tahun Buku Shareholders and Percentage of Ownership at The Beginning and end of The Fiscal Year
279	Nama Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik Memiliki Pengendalian Bersama Entitas, Beserta Persentase Kepemilikan Saham, Bidang Usaha, Total Aset, dan Status Operasi Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama Name of Subsidiaries, Associated Entities, Joint Venture Companies Where The Issuer or Public Company Has Joint Control of The Entity, and The Percentage of Share Ownership, Business Fields, Total Assets, and Operational Status of Subsidiaries, Associated Entities, Joint Venture Companies
294	Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure
295	Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham Chronology of Share Listing and/or Issuance
297	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Issuance and/or Listing
307	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountant and Public Accounting Firm
308	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Supporting Institutions and/or Professionals
310	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications
318	Informasi <i>Website</i> Perusahaan Information on Corporate Website

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis	
324	Tinjauan Umum General Overview
327	Tinjauan Operasional Operational Overview
345	Tinjauan Keuangan Financial Overview
374	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
376	Tinjauan Keuangan Lainnya Other Financial Overview
05 Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function	
404	Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance
06 Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	
422	Pernyataan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Statement of Corporate Governance Implementation
433	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan Sustainable Implementation of Corporate Governance
446	Struktur dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Corporate Governance Structure and Mechanism
449	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
476	Direksi Board of Directors
526	Dewan Komisaris Board of Commissioners
554	Komisaris Independen Independent Commissioner
557	Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners Nomination and Remuneration
563	Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners Performance Appraisal
566	Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Policy on Board of Commissioners and Board of Directors Diversity

574	Organ Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs
646	Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris Other Committees Under Board of Commissioners
646	Komite di bawah Direksi Committees Under Board of Directors
660	Organ Pendukung Direksi Supporting Organs of Board of Directors
678	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
685	Manajemen Risiko Risk Management
707	Auditor Eksternal External Auditor
714	Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Perusahaan Entitas Anak, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Legal Issues with Material Impact Faced by the Company, Subsidiaries, Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners
718	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data
722	Kode Etik Code of Conduct
727	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan Antara Lain Berupa Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen (<i>Management Stock Ownership Program/MSOP</i>) dan/atau Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (<i>Employee Stock Ownership Program/ESOP</i>) Policy of Performance-Based Long-Term Compensation for Management and/or Employees, Among Others in the Form of Management Stock Option Plan/MSOP And/Or Employee Stock Option Plan/ESOP
727	Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Kerja Setelah Terjadinya Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan atas Saham Perusahaan Terbuka Share Ownership of Members of Board of Directors and Board of Commissioners No Later Than 3 (Three) Working Days After the Occurrence of Ownership or Any Changes of Ownership of Shares of Public Companies
729	Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
738	Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy

740	Pengendalian Gratifikasi Gratification Control
744	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Condition
744	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Funding for Social and Political Activities
745	Pencegahan Transaksi Orang dalam (<i>Insider Trading</i>) Prevention of Insider Transactions
745	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Management of State Official Wealth Report (LHKPN)
747	Transparansi Praktik <i>Bad Governance</i> Bad Governance Practices Transparency
750	Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles in Compliance with Financial Service Authority Provisions
776	Penerapan <i>Asean Corporate Governance Scorecards</i> Asean Corporate Governance Scorecard Application
804	Penerapan 8 (Delapan) Prinsip Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 Implementation of 8 (Eight) Principles of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) 2021
07 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility	
828	Tata Kelola Program Keberlanjutan Perseroan The Company's Sustainability Program Governance
836	Pelaksanaan Program Keberlanjutan Perseroan Implementation of the Company's Sustainability Program
08 Laporan Keuangan Financial Report	
1054	Referensi Silang SEOJK No. 16 / SEOJK.04/2021: Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies

Transformasi WIKA: Upaya Penguatan Fundamental Bisnis

WIKA's Transformation: Strengthening Business Fundamentals

Transformasi bisnis WIKA dimulai pada tahun 2023, ditandai dengan dibentuknya *Transformation & Business Strategy Division* yang bertanggung jawab mengawal pelaksanaan program transformasi serta menyusun strategi bisnis perusahaan.

WIKA's business transformation journey began in 2023, marked by the formation of "Transformation & Business Strategy Division", which is in charge of overseeing the implementation of transformation program and developing business strategy of the Company.

“Menjadi Perusahaan Terpercaya di Bidang Infrastruktur dan EPC yang Berkelanjutan”
“To Become a Trusted Company in Sustainable Infrastructure and EPC”

VISI WIKA 2030
WIKA'S VISION 2030



ROADMAP TRANSFORMASI WIKA

Rencana perjalanan transformasi dituangkan ke dalam sebuah “Roadmap” dengan target yaitu penyehatan, perbaikan tata kelola, dan peningkatan daya saing perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tahun 2024 menjadi tahun penting bagi WIKA untuk melanjutkan transformasi secara konsisten demi mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan dan memastikan daya saing perusahaan tetap relevan di tengah dinamika industri konstruksi yang terus berkembang. Setelah berhasil melakukan penguatan fundamental usaha pada tahun sebelumnya, WIKA melanjutkan langkah dengan memperkuat transformasi yang berfokus pada keberlanjutan, efisiensi, dan inovasi.

Transformasi di tahun 2024 diarahkan pada pengembangan inisiatif strategis yang bertujuan menjadikan WIKA sebagai perusahaan yang lebih adaptif dan tangguh, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan global, termasuk dekarbonisasi, digitalisasi, dan peningkatan daya saing di pasar internasional. Fokus utama transformasi ini mencakup penguatan sistem tata kelola berbasis ESG, akselerasi adopsi teknologi digital untuk mendukung operasional yang lebih efektif, serta pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.

WIKA TRANSFORMATION ROADMAP

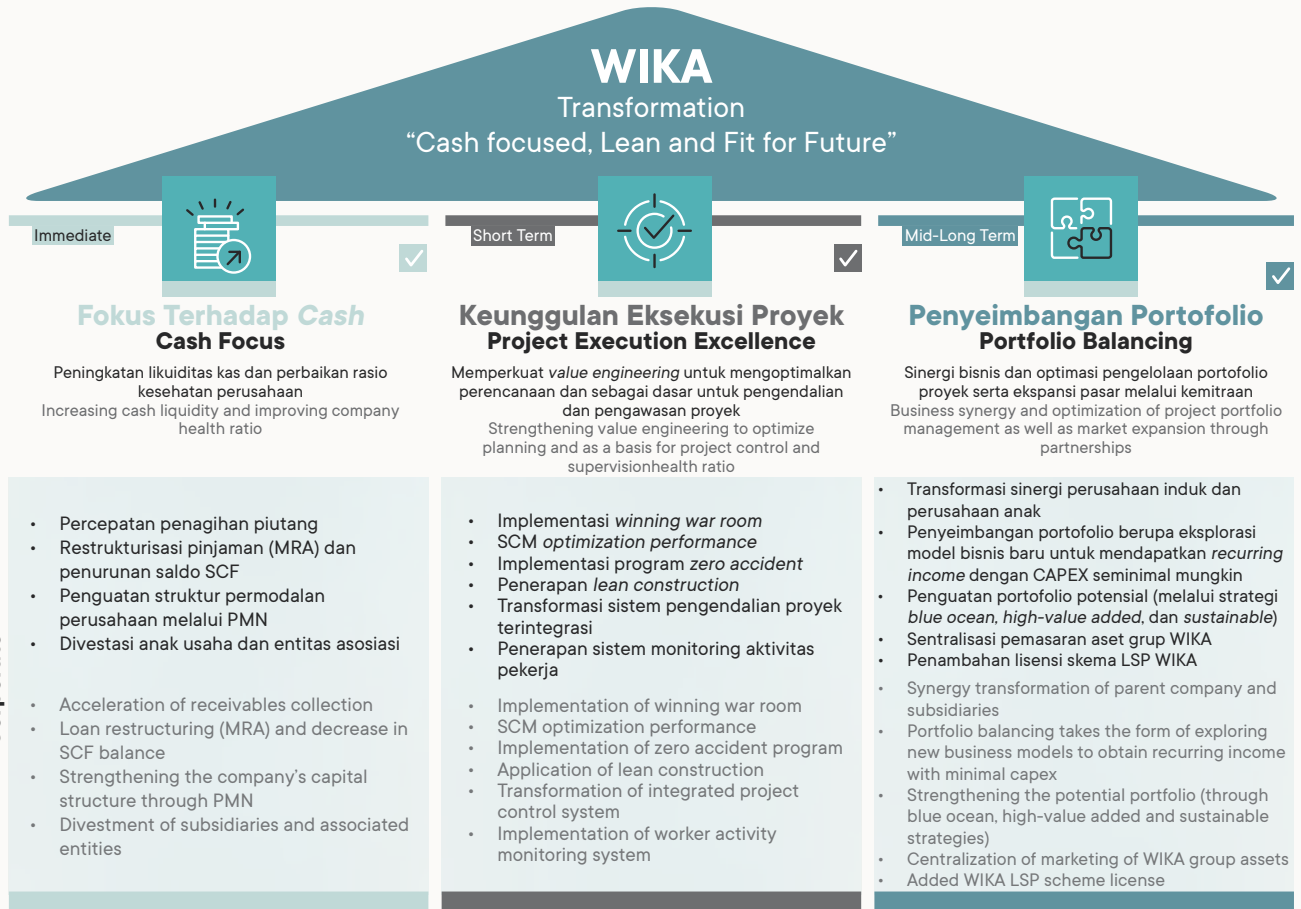
The transformation journey plan is outlined in a “Roadmap” with the target of restructuring, improving governance, and enhancing the Company's competitiveness over the next 5 (five) years.

2024 is an important year for WIKA to continue its transformation consistently in preparation for future challenges and to ensure the Company's competitiveness remains relevant amid the evolving dynamics of construction industry. After successfully strengthening its business fundamentals in the previous year, WIKA is moving forward with reinforcing its transformation with a focus on sustainability, efficiency, and innovation.

The transformation in 2024 is aimed at developing strategic initiatives that will make WIKA a more adaptive and resilient company, capable of facing various global challenges, including decarbonization, digitalization, and improving competitiveness in international markets. The main focus of this transformation includes strengthening ESG-based governance systems, accelerating the adoption of digital technologies to support more effective operations, and developing human capital capabilities aligned with future needs.

STRATEGI PENGUATAN FUNDAMENTAL BISNIS MELALUI TRANSFORMASI

STRENGTHENING BUSINESS FUNDAMENTALS THROUGH TRANSFORMATION



Pilar/Enabler

Sasaran Strategis
Strategic Objectives

Inisiatif Strategis
Strategic Initiatives

House of Transformation WIKA

Untuk menjawab keberlanjutan bisnis perusahaan, pada tahun 2023 PT Wijaya Karya telah memulai perjalanan transformasi bisnis bersama **"Transformation & Business Strategy Division"** yang bertanggung jawab mengawal pelaksanaan program transformasi serta menyusun strategi bisnis perusahaan.

Dengan menggandeng McKinsey & Company sebagai konsultan mitra, proses transformasi digambarkan melalui **"House of Transformation"** dengan penguatan pada 4 (empat) pondasi *enabler* dan 3 (tiga) pilar untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu *cash focused*, *lean and fit for future*.

Rencana program perjalanan transformasi dituangkan ke dalam sebuah **"Roadmap"** untuk tujuan penyehatan, perbaikan tata kelola, dan peningkatan daya saing perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Departing from the challenge to address the sustainability of its business, in 2023, PT Wijaya Karya has embarked on a Business Transformation journey marked by the formation of **"Transformation & Business Strategy Division"**, which is in charge of overseeing the implementation of transformation program and developing business strategy of the Company.

By collaborating with McKinsey & Company as a partner consultant, the transformation process is described through the **"House of Transformation"** by strengthening 4 (four) enablers and 3 (three) pillars to achieve 3 main goals, namely cash focused, lean and fit for future.

The transformation program plan is outlined in a **"Roadmap"** for the purpose of improving the Company's health, governance and increasing its competitiveness in the next 5 (five) years.

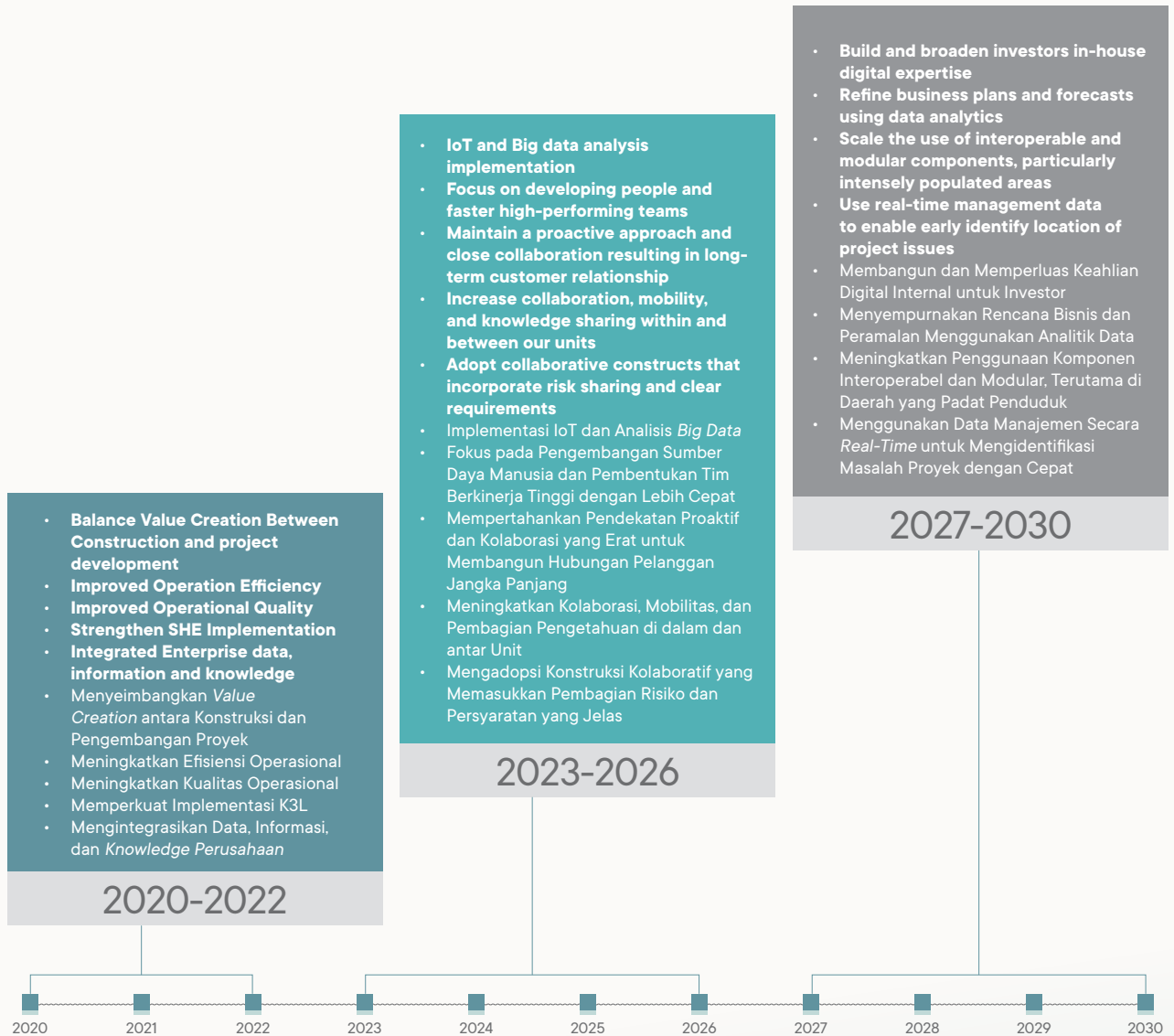
Roadmap Transformasi WIKA WIKA Transformation Roadmap


 Target Progress Transformasi/Tahun
 Transformation Progress Target/Year


Transformasi WIKA dijalankan selaras dalam kerangka "Rumah Transformasi WIKA" dengan pilar dan pondasi yang kemudian diterjemahkan menjadi program inisiatif strategis untuk mencapai tujuan penyehatan perusahaan. Langkah tersebut diambil oleh perusahaan sebagai langkah strategis yang diambil untuk memperkuat langkah perusahaan dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan.

WIKa's transformation is carried out in alignment with the framework of "WIKa House of Transformation," with pillars and foundations that are then translated into strategic initiative programs to achieve the Company's revitalization goals. This step is taken by the Company as a strategic measure to strengthen its efforts in running a sustainable business.

Grand Strategy WIKa 2030



Inisiatif strategis ini telah berkembang dari tahun sebelumnya dari 25 menjadi 61 program inisiatif strategis. Diantara inisiatif-inisiatif strategis yang telah dan sedang dijalankan Perseroan adalah sebagai berikut:

This strategic initiative has grown from the previous year from 25 to 61 strategic initiative programs. Among the strategic initiatives that have been and are being implemented by the Company are as follows:

Pilar Pillar	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target Target
Fokus terhadap Cash Cash Focus	1.1 Percepatan Penagihan Piutang 1.1 Acceleration of Receivables Collection	Mempercepat waktu dalam proses penagihan piutang Shorten the time in the receivables collection process
	1.2 Restrukturisasi Pinjaman (MRA) dan Penurunan saldo SCF 1.2 Loan Restructuring (MRA) and Reduction of SCF Balance	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan pemenuhan kesepakatan pada MRA Meningkatkan kemampuan pembayaran ke mitra dan mengurangi porsi <i>unsustain</i> pada neraca WIKA <ol style="list-style-type: none"> Ensure the fulfillment of agreements in the MRA Increase payment capacity to partners and reduce the unsustainable portion on WIKA's balance sheet
	1.3 Penguatan Struktur Permodalan Perusahaan melalui PMN 1.3 Strengthening the Company's Capital Structure through PMN	Memperoleh PMN sebesar Rp2 triliun pada tahun 2025 Obtain PMN of Rp2 trillion in 2025
	1.4 Divestasi Anak Usaha dan Entitas Asosiasi 1.4 Divestment of Subsidiaries and Associated Entities	<p>Divestasi pada bisnis yang tidak mendukung bisnis inti konstruksi secara langsung seperti WTJJ, PP Semarang Demak, & CMLJ pada tahun 2025; Jasa Marga Balikpapan Samarinda pada tahun 2026; WSP pada tahun 2028</p> <p>Divestment in businesses that do not directly support the core construction business such as WTJJ, PP Semarang Demak, & CMLJ in 2025; Jasa Marga Balikpapan Samarinda in 2026; WSP in 2028</p>

Pilar Pillar	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target Target
Keunggulan Eksekusi Proyek Project Execution Excellence	2.1 Implementasi <i>Winning War Room</i> 2.1 Implementation of Winning War Room	Meningkatkan persentase kemenangan tender Increase tender winning percentage
	2.2 <i>SCM Optimization Performance</i> 2.2 SCM Optimization Performance	Mengoptimalkan efektivitas SCM untuk mendapatkan mutu dan harga terbaik Optimize SCM effectiveness to obtain the best quality and price
	2.3 Implementasi Program <i>ZeroAccident</i> 2.3 Implementation of ZeroAccident Program	Mencapai <i>zero accident</i> untuk semua proyek Achieve zero accident for all projects
	2.4 Transformasi Sistem Pengendalian Proyek Terintegrasi 2.4 Transformation of Integrated Project Control System	Meningkatkan efisiensi dan menghilangkan pemborosan pada seluruh tahapan proyek Increase efficiency and eliminate waste at all stages of the project
	2.5 Divestasi Anak Usaha dan Entitas Asosiasi 2.5 Divestment of Subsidiaries and Associated Entities	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan secara digital Improve digital control and supervision
	2.6 Penerapan Sistem <i>Monitoring</i> Aktivitas Pekerja 2.6 Implementation of Employee Activity Monitoring System	

Pilar Pillar	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target Target
Penyeimbangan Portofolio Portfolio Balancing	3.1 Transformasi Sinergi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak 3.1 Transformation of Synergy of Parent Company and Subsidiary Company	Meningkatkan omzet kontrak konsolidasi Increase consolidated contract turnover
	3.2 Penyeimbangan portofolio berupa eksplorasi model bisnis baru untuk mendapatkan <i>recurring income</i> dengan CAPEX seminimal mungkin 3.2 Portfolio balancing in the form of exploration of new business models to obtain recurring income with minimal CAPEX	peningkatan kompetensi dan pendapatan perusahaan increase the company's competency and revenue
	3.3 Penguatan portofolio potensial (melalui strategi <i>blue ocean, high-value added, dan sustainable</i>) 3.3 Strengthening potential portfolio (through blue ocean, high-value added, and sustainable strategies)	Meningkatkan portofolio bisnis perusahaan dengan menciptakan pasar baru Increase business portfolio of the company by creating new markets
	3.4 Sentralisasi Pemasaran Aset WIKA Group 3.4 Centralization of WIKA Group Asset Marketing	Meningkatkan omzet kontrak baru Increase new contract turnover
	3.5 Penambahan Lisensi Skema LSP WIKA 3.5 Addition of WIKA LSP Scheme License	Meningkatkan omzet kontrak konsolidasi Increase consolidated contract turnover

Pilar Pillar	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target Target
Organisasi Lean Lean organization	4.1 Organisasi <i>Lean</i> 4.1 Lean Organization	Pengambilan keputusan lebih cepat dan responsif Faster and more responsive decision making
	4.2 Penerapan <i>Shared Service</i> WIKA Group 4.2 Implementation of WIKA Group Shared Service	Menurunkan biaya dan mengurangi duplikasi fungsi Reduce costs and reduce duplication of functions
	4.3 Penerapan <i>Lean Office</i> 4.3 Implementation of Lean Office	Meningkatkan produktivitas dan penurunan <i>overhead cost</i> perusahaan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya Increase productivity and reduce overhead costs of the company by optimizing resource utilization

Pilar Pillar	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target Target
Manajemen Risiko Risk Management	5.1 Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak 5.1 Integrated Governance of Parent Company and Subsidiaries	Peningkatan akuntabilitas dan kemudahan pengendalian bisnis WIKA yang efisien Increase accountability and ease of efficient WIKA business control
	5.2 Implementasi Manajemen Kontrak dan Klaim Terintegrasi 5.2 Implementation of Integrated Contract and Claim Management	Meningkatkan Manajemen Perubahan dalam <i>variation, order, claim, dan anti-claim</i> Improve Change Management in variation, order, claim, and anti-claim
	5.3 Transformasi Tata Kelola JO 5.3 Transformation of JO Governance	Meningkatkan Efisiensi Pelaksanaan Proyek JO Improve Efficiency of JO Project Implementation
	5.4 Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (<i>Internal Control over Financial Reporting</i>) 5.4 Internal Control over Financial Reporting	Mengurangi risiko terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam proses pelaporan keuangan melalui prosedur kontrol yang memadai. Reduce the risk of fraud or error in the financial reporting process through adequate control procedures.
	5.5 Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan Terintegrasi di Seluruh Anak Perusahaan 5.5 Strengthening Integrated Governance and Supervision in All Subsidiaries	Meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Improve the effectiveness of supervision and compliance with the principles of Good Corporate Governance

Pilar Pillar	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target Target
IT/Digitalisasi IT/Digitization	6.1 Transformasi digital proses bisnis untuk mendukung arah pengembangan bisnis dan operasional proyek 6.1 Digital transformation of business processes to support the direction of business development and project operations	Peningkatan produktivitas pegawai dan efisiensi proses bisnis perusahaan secara digital Increase employee productivity and efficiency of the company's business processes digitally
	6.2 Integrasi IT Governance Induk dengan Anak Perusahaan 6.2 Integration of Parent IT Governance with Subsidiaries	Terpenuhinya standar keandalan IT dan keamanan data induk dengan anak perusahaan Meet IT reliability standards and master data security with subsidiaries
	6.3 Integrasi, penguatan, dan pembaruan ERP terhadap semua platform pada <i>back office</i> , <i>off-site</i> , dan <i>on-site</i> 6.3 Integration, strengthening, and updating of ERP to all platforms in the back office, off-site, and on-site	Meningkatkan efisiensi operasional, transparansi data, dan sinkronisasi proses bisnis di seluruh organisasi Increase operational efficiency, data transparency, and business process synchronization across the organization
	6.4 Implementasi big data dan pemanfaatan AI 6.4 Implementation of big data and utilization of AI	Meningkatkan efisiensi, akurasi keputusan, serta inovasi layanan guna memperkuat daya saing perusahaan Increase efficiency, decision accuracy, and service innovation to strengthen the company's competitiveness

Pilar Pillar	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target Target
Human Capital Management (Insan WIKA berkarakter AKHLAK) Human Capital Management (WIKAs people with AKHLAK character)	7.1 Transformasi pengelolaan <i>knowledge management</i> WIKAs 7.1 Transformation of WIKAs's knowledge management	Meningkatkan kualitas pekerjaan dengan memanfaatkan <i>knowledge management</i> Improving the quality of work by utilizing knowledge management
	7.2 Pengembangan Profil Kompetensi <i>talent</i> 7.2 Development of Talent Competency Profiles	Memenuhi kompetensi <i>talent</i> yang sesuai dengan posisinya Meeting talent competencies that match their positions
	7.3 <i>Change Leader</i> 7.3 Change Leader	terciptanya transformasi bisnis dan program perbaikan budaya perusahaan yang meningkatkan kemampuan dan citra perusahaan Creating business transformation and corporate culture improvement programs that improve the company's capabilities and image
	7.4 Transformasi Program Pengembangan Pegawai tersistem 7.4 Transformation of Systematic Employee Development Programs	integrasi aksesibilitas pengetahuan karyawan secara <i>realtime</i> Integrating employee knowledge accessibility in real time

Fokus Bisnis WIKA Pada Lini Bisnis EPCC

WIKA Business Focus On EPCC

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) melalui operasional bisnisnya membuat langkah yang sistematis, tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan tetapi telah melembaga dan berkomitmen untuk memberi nilai bersama dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. WIKA telah menetapkan *Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning* (EPCC) sebagai fokus bisnis utama untuk menjawab tren kebutuhan proyek nasional dan global di masa mendatang. Kebijakan ini didasarkan pada dua faktor utama yaitu arah kebijakan strategis pemerintah dan tren proyek masa depan yang lebih kompleks dan berbasis teknologi tinggi, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pemerintah dan Strategis Nasional

WIKA sebagai bagian dari BUMN karya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang saat ini diarahkan pada pembangunan berkelanjutan melalui program strategis seperti Ketahanan dan Transisi Energi, Hilirisasi Mineral, dan Perumahan Rakyat. Proyek-proyek dalam program ini, seperti pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), CCUS (*Carbon Capture, Utilization, and Storage*), hilirisasi mineral, dan revitalisasi sektor energi, semuanya memerlukan kemampuan EPCC yang terintegrasi. Dengan mengarahkan fokus bisnis ke EPCC, WIKA dapat memaksimalkan perannya dalam mendukung program prioritas pemerintah sekaligus memperluas peluang bisnis di sektor industri bernilai tambah.

2. Tren Proyek Masa Depan

Proyek masa depan semakin mengarah pada kebutuhan pembangunan kompleks yang memerlukan penguasaan teknologi tinggi dan integrasi lintas fungsi, seperti pembangkit listrik EBT, transmisi listrik, kilang bioethanol dan biodiesel, serta hilirisasi nikel, tembaga, dan bauksit. Proyek-proyek ini memerlukan pendekatan EPCC yang mampu mengintegrasikan perencanaan, pengadaan, konstruksi, dan pengujian dalam satu kesatuan proses. WIKA, dengan pengalaman panjang di bidang konstruksi, memiliki kemampuan untuk bertransformasi menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan proyek-proyek berbasis EPCC.

Dengan mengadopsi EPCC sebagai fokus bisnis, WIKA tidak hanya memperkuat posisinya di pasar domestik, tetapi juga membuka peluang ekspansi di pasar internasional, mengingat tren global yang juga bergerak ke arah pengembangan infrastruktur berbasis energi bersih dan industri hilirisasi. Langkah ini mencerminkan strategi WIKA untuk tetap relevan dan kompetitif di era perubahan pasar yang dinamis, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), through its business operations, takes systematic measures, not barely to meet demands but has institutionalized and committed to delivering shared value in supporting the Sustainable Development Goals (SDGs). WIKA has established Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) as its main business focus to address the trends of national and global project needs in the future. This policy is based on two main factors: the strategic direction of government policy and the trend of more complex, high-tech projects in the future, as explained below:

1. Government Policy and National Strategic Direction

As part of State-Owned construction companies, WIKA is highly dependent on government policies, which are currently directed toward sustainable development through strategic programs, include Energy Resilience and Transition, Mineral Downstreaming, and Public Housing. Projects within these programs, such as the construction of new renewable energy (EBT) power plants, CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage), mineral downstreaming, and energy sector revitalization, all require integrated EPCC capabilities. By focusing its business on EPCC, WIKA can maximize its role in supporting the government's priority programs while expanding business opportunities in the value-added industry sector.

2. Future Project Trends

In the future, projects are increasingly moving toward the need for complex development that requires advanced technology mastery and cross-functional integration, such as EBT power plants, electricity transmission, bioethanol and biodiesel refineries, and the downstreaming of nickel, copper, and bauxite. These projects require an EPCC approach that can integrate planning, procurement, construction, and testing into a unified process. WIKA, with its extensive experience in the construction sector, has the capability to transform into a major player in the implementation of EPCC-based projects.

By adopting EPCC as its business focus, WIKA does not only strengthen its position in the domestic market but also opens expansion opportunities in the international market, considering the global trend moving toward the development of infrastructure based on clean energy and downstream industries. This step reflects WIKA's strategy to remain relevant and competitive in an era of dynamic market changes, while also supporting the sustainable development goals set by the government.

WIKA sebagai Champion di bidang EPCC

WIKA as Champion in EPCC

Peringkat Karya berdasarkan *cumulative revenue, investment value, human resources, dan market reputation*

Ranks of State-Owned construction companies based on cumulative revenue, investment value, human resources, and market reputation

Sector	Segment	BUMN Karya A	BUMN Karya B	BUMN Karya C	BUMN Karya D	WIKA	Key Takeaways
Building	Resi & Related	3	5	4	1	2	BUMN Karya D menjadi pemimpin ranking pada segmen Building BUMN Karya D became ranking leader in Building segment
	Roads & Related building2	2	1	5	4	3	
	Water & Dams	5	4	1	3	2	
Infra	Rail & HSR3	3	5	2	4	1	BUMN Karya D & WIKA memiliki ranking yang hampir sama pada segmen infra BUMN Karya D & WIKA becomes the ranking leader in infra segment
	Seaport	4	5	3	1	2	
	Airport	3	2	3	1	5	
Power	Power & Renewables	4	3	5	1	2	WIKA menjadi pemimpin ranking pada segmen EPCC WIKA becomes the ranking leader in EPCC segment
	Power (spezialized)	4	3	5	1	2	
Industrial	Industrial5	5	4	3	2	1	
	Metal & Mining	4	3	5	2	1	

1. Cumulative revenue ditentukan oleh revenue dari 2015-2021; 2. Termasuk kelembagaan; WIKA memiliki investasi strategis dalam kereta api cepat pertama di Indonesia; 4. Dinilai dengan tenaga listrik, termasuk transmisi dan batu bara; Minyak & gas, kimia & farmasi, pengolahan, telekomunikasi, manufaktur lainnya
 Sumber: Data yang dilaporkan Karya, analisis BCG

1. Cumulative revenue is determined by revenue from 2015-2021; 2. Including institutional; WIKA has a strategic investment in the first high-speed train in Indonesia; 4. Assessed by electric power, including transmission and coal; Oil & gas, chemical & formation, processing, telecommunications, other manufacturing
 Source: Karya reported data, BCG analysis

Ranking 1-2 (H) 3 (M) 4-5 (L)

WIKA memiliki posisi yang strategis sebagai pemimpin di segmen *Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning* (EPCC) dibandingkan BUMN karya lainnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Boston Consulting Group (BCG) pada tahun 2021, WIKA menduduki peringkat tertinggi di kategori EPCC, khususnya dalam sektor industrial dan power, yang mencakup proyek-proyek seperti energi baru terbarukan (EBT) dan hilirisasi mineral.

Peringkat ini dicapai melalui evaluasi terhadap beberapa aspek utama, yaitu *cumulative revenue, investment value, human resources, dan market reputation*. Analisis ini menunjukkan bahwa WIKA memiliki kemampuan unggul dalam mengelola proyek-proyek kompleks berbasis teknologi tinggi, yang memerlukan integrasi menyeluruh mulai dari perencanaan hingga *commissioning*.

Keunggulan ini diperkuat oleh rekam jejak WIKA dalam menyelesaikan proyek EPCC berskala besar dan strategis, seperti PLTU Cilacap, PLTU Kalimantan Selatan, PLTGU Cilegon, PLTGU Grati Jawa Timur dan proyek proyek energi lainnya. Posisi ini tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis dan manajerial WIKA, tetapi juga reputasi pasar yang solid sebagai mitra terpercaya dalam proyek nasional dan internasional.

Dengan posisi yang kuat di segmen EPCC, WIKA berada pada jalur yang tepat untuk mendukung kebutuhan proyek masa depan yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat daya saing perusahaan di pasar global. Hal ini menjadikan WIKA pilihan utama untuk pelaksanaan proyek strategis pemerintah yang mendukung transformasi energi, hilirisasi, dan pembangunan infrastruktur industri.

WIKA holds a strategic position as a leader in the *Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning* (EPCC) segment compared to other state-owned construction companies. Based on an analysis conducted by Boston Consulting Group (BCG) in 2021, WIKA ranks the highest in the EPCC category, particularly in the industrial and power sectors, which include projects such as new renewable energy (EBT) and mineral downstreaming.

This ranking was achieved through an evaluation of several key aspects, including cumulative revenue, investment value, human resources, and market reputation. The analysis indicates that WIKA has superior capabilities in managing complex, high-tech projects that require comprehensive integration from planning to commissioning.

This advantage is further reinforced by WIKA's track record in completing large-scale and strategic EPCC projects, such as Cilacap Coal-Fired Power Plant (PLTU), South Kalimantan Coal-Fired Power Plant (PLTU), Cilegon Gas-Fired Power Plant (PLTGU), Grati East Java Gas-Fired Power Plant (PLTGU), and other energy projects. This position not only reflects WIKA's technical and managerial expertise but also its solid market reputation as a trusted partner in both national and international projects.

With a strong position in the EPCC segment, WIKA is on the right track to support the increasingly complex project needs of the future, while also strengthening its competitiveness in the global market. This makes WIKA the preferred choice for executing the government's strategic projects that support energy transformation, downstreaming, and industrial infrastructure development.



PLTU Palu 2x50MW

Keunggulan Kompetitif WIKA

WIKA Competitive Advantages



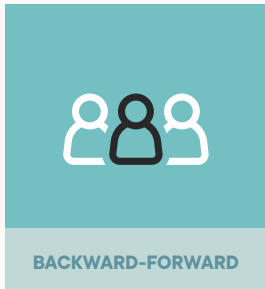
Merupakan *value creator* yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Memulai usaha dari instalatur listrik kemudian tumbuh berkembang menjadi *Engineering, Procurement, Construction (EPC)* dan *Investment Company* pada banyak sektor antara lain pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan dan industri transportasi.

Is a *value creator* that can adapt to changing times. Starting a business from an electrical installer then grew to become *Engineering, Procurement, Construction (EPC)* and *Investment Company* in many sectors including power plants, toll roads, ports and the transportation industry.



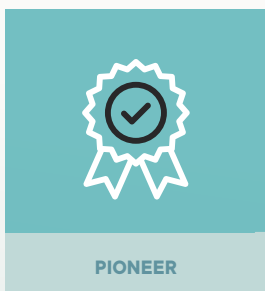
Pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan, WIKA mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* ke dalam seluruh strategi dan operasional bisnis, menjadikannya salah satu keunggulan kompetitif utama perusahaan. Pada aspek lingkungan, WIKA berfokus pada pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan material ramah lingkungan. Dalam aspek sosial, WIKA mendukung kesejahteraan karyawan, masyarakat lokal, dan SDGs melalui infrastruktur strategis. Di bidang tata kelola, WIKA menerapkan GCG dengan transparansi, anti-korupsi, dan pengadaan hijau, menciptakan nilai ekonomi serta dampak sosial dan lingkungan yang positif.

A leader in sustainable development, WIKA integrates the *Environmental, Social, and Governance (ESG)* principles into all business strategies and operations, making it one of the company's key competitive advantages. In the environmental aspect, WIKA focuses on reducing carbon emissions, energy efficiency, and the use of eco-friendly materials. In the social aspect, WIKA supports the well-being of employees, local communities, and the SDGs through strategic infrastructure. In the governance area, WIKA implements *Good Corporate Governance (GCG)* with transparency, anti-corruption practices, and green procurement, creating economic value as well as positive social and environmental impacts.



Mampu bertransformasi menjadi sebuah kelompok usaha dengan ragam pilar bisnis, pengembangan entitas anak, entitas asosiasi yang masing-masing fokus menggarap segmen-segmen usaha tertentu. Akan tetapi, tetap berintegrasi satu sama lain melalui strategi integrasi vertikal (*backward-forward integration*).

Being able to transform into a business group with a variety of business pillars, development of subsidiaries, associates. Each of which focuses on working on certain business segments, yet still integrates with each other through a *backward-forward integration* strategy.



Pelopor industri beton pertama di Tanah Air yang kemunculannya ditandai dengan pembangunan pabrik produk beton pracetak di beberapa wilayah Nusantara mulai akhir dekade 1970-an. Kini, WIKA Beton terus berkembang dengan beroperasinya 14 pabrik produk beton dengan kapasitas produksi 4,66 juta ton/tahun. Seluruh Pabrik Produk Beton (PPB) senantiasa menghasilkan ragam produk beton pracetak (tiang pancang, tiang listrik, box girder, bantalan rel kereta api, span terowongan MRT, sodetan, track work dan signaling, serta produk lain-lain) untuk berbagai proyek-proyek monumental.

The pioneer of first precast concrete industry developer in the country as marked by the construction of *Precast Concrete Plants* in several regions of the archipelago in the late 1970s. Now, WIKA Beton continues to grow with the operation of 14 concrete product plants with a production capacity of 4.66 million tons/year. All *Concrete Product Plants (PPB)* continue to produce a variety of precast concrete products (piles, electric poles, box girders, railway sleepers, MRT tunnel spans, diversions, track work and signaling, and other products) for various monumental projects.



Memiliki *leadership* yang kuat dan kemampuan memilih human capital yang tepat dalam mewujudkan arah bisnis ke depan.

Having strong *leadership* and the ability to choose the right human capital in realizing the business direction going forward.



Selalu menjadi yang terdepan dalam teknologi konstruksi dan perluasan bisnis unit (*Mass Rapid Transit, Oil and Gas, serta Teknologi Power Plant*).

Always leading in construction technology and business unit expansion (*Mass Rapid Transit, Oil and Gas, and Power Plant technology*).



Terdepan dalam mengembangkan *Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning* (EPCC), serta berinvestasi dan mengembangkan sejumlah proyek infrastruktur, khususnya proyek-proyek yang menjadi program Pemerintah terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Leading in developing *Engineering, Procurement, Construction and Commissioning* (EPCC), as well as investing and developing a number of infrastructure projects, especially projects that are Government programs related to the State Budget (APBN).



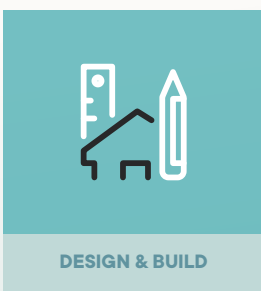
Terdepan dalam memanfaatkan teknologi terkemuka *Building Information Modelling* (BIM) yang mampu memberikan gambaran menyeluruh secara 3 dimensi tentang proyek yang akan dikerjakan. Dengan pemanfaatan BIM, WIKA dapat menyusun perencanaan dengan lebih tepat dan meminimalisir risiko yang muncul pada tahapan pengerjaan proyek tersebut.

A leader in leveraging leading technology *Building Information Modeling* (BIM) that is able to provide a comprehensive 3-dimensional picture of the project to be carried out. With the use of BIM, WIKA can make more precise planning and minimize the risks that arise during the phase of project implementation.



Inovasi dan pengembangan *intangible assets, knowledge management* (KH-WIKA), Sistem Manajemen WIKA (ISO 9001, ISO 14100, ISO 45001, ISO 37001, ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 19650-1, ISO 21500, ISO 31000 dan, Sistem Manajemen Pengamanan) dan Sistem informasi WIKA yang sudah terintegrasi.

Innovation and development of *intangible assets; knowledge management* (KM-WIKA), WIKA Management System (ISO 9001, ISO 14100, ISO 31000, OHSAS 18001, Security Management System) and WIKA Information System that has been integrated.



Mampu mengerjakan proyek konstruksi sipil dengan metode rancang bangun (*design and build*) mulai dari proses perencanaan proyek hingga proses konstruksi.

Able to work on civil construction projects with design and build methods starting from the project planning process to the construction process.

Komitmen dan Inisiatif Hijau WIKA

WIKA Green Commitment And Initiatives

KOMITMEN KEBERLANJUTAN WIKA

WIKA SUSTAINABILITY COMMITMENT



WIKA mempraktikkan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan *community development* yang bertanggung jawab sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. *Roadmap* untuk keberlanjutan berdasar pada aspek-aspek *Five Bottom Line* yaitu *planet, people, prosperity, peace, dan partnership*.

WIKA practices sustainable development through a responsible community development approach in line with the Company's vision, mission and values. The roadmap for sustainability is based on the Five Bottom Line aspects, namely planet, people, prosperity, peace and partnership.



WIKASATRIAN

5 ASPEK KEBERLANJUTAN WIKA

WIKA 5 SUSTAINABILITY ASPECTS



Sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menerapkan Kebijakan Keberlanjutan sebagai pedoman strategis dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Kebijakan Keberlanjutan WIKA telah ditetapkan pada tanggal 13 November 2023. Kebijakan ini mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Dengan kebijakan ini, WIKA tidak hanya berfokus pada keberhasilan bisnis, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan melalui pendekatan keberlanjutan yang menyeluruh.

Kebijakan Keberlanjutan WIKA mengarahkan perusahaan untuk menjadi:

- 1. Perusahaan Ramah Lingkungan (*Environmental Champion Company*)**
Perusahaan yang memiliki kapabilitas yang bertanggung jawab terhadap *Construction Life Cycle*, serta menjadi mitra terpercaya bagi para pemangku kepentingan.
- 2. Perusahaan yang Bertanggung Jawab Sosial (*Social Caring Company*)**
Perusahaan berkomitmen pada tanggung jawab sosial dengan mendukung pembangunan berkelanjutan, pengembangan SDM, kearifan lokal, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- 3. Perusahaan dengan Tata Kelola yang Baik (*Excellent Governance Company*)**
Perusahaan yang memastikan kepatuhan terhadap tata kelola yang baik dan patuh pada hukum yang berlaku di seluruh wilayah operasinya.

As part of its commitment to sustainable development, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) implements Sustainability Policy as a strategic guide in all its operational activities. WIKA's Sustainability Policy was established on November 13, 2023. This policy integrates Environmental, Social, and Governance (ESG) principles to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). With this policy, WIKA not only focuses on business success but also creates long-term value for stakeholders through a comprehensive sustainability approach.

WIKA's Sustainability Policy directs the company to become:

- 1. Environmental Champion Company**
A company with the capability to be responsible for the entire *Construction Life Cycle*, and a trusted partner for stakeholders.
- 2. Social Caring Company**
A company committed to social responsibility by supporting sustainable development, human resources development, local wisdom, and respecting human rights.
- 3. Excellent Governance Company**
A company that ensures compliance with good governance practices and adherence to applicable laws throughout its operational area.

KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY POLICY

 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk Jl. D.I. Purandari-Kar. 9-10, Jakarta	No. DM: WKAJHS-SP-01/04 No. Rev: 01 Tgl Berlaku: 13 November 2023 Tgl Review Berkurusi: 14 November 2024
--	---

**PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN
(SUSTAINABILITY POLICY)**

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, melakukan kegiatan keberlanjutan sebagai tanggung jawab perusahaan pada konstruksi berkelanjutan, dan mendapatkan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan melalui praktik berkelanjutan dalam seluruh bisnis WKA, serta mengintegrasikan strategi dan aktivitasnya ke dalam tanggung jawab terhadap Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (Environment, Social & Governance). Kebijakan keberlanjutan ini adalah komponen integral dari keunggulan operasional (Grup WKA untuk berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk regards sustainability policy as the company's responsibility for sustainable construction, and ensuring long term value for stakeholders through sustainable practices for all WKA's business, and integrating all strategies and activities into responsibility for the Environment, Social and Corporate Governance (ESG). This sustainability policy contributes to the attainment of the Sustainable Development Goals and is an essential element of the operational excellence of WKA Group.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menerapkan prinsip-prinsip ESG terintegrasi dalam seluruh aktivitas operasinya sehingga menjadikan WKA sebagai :

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk implements integrated ESG principles in every operational activity, for:

- 1. Perusahaan Ramah Lingkungan (Environmental Champion Company)**
 Perusahaan yang memiliki kapabilitas yang bertanggung jawab terhadap Construction Lifecycle, serta menjadi mitra terpercaya bagi para pemangku kepentingan untuk mendukung agenda bisnis global dan menjadi teladan dalam menerapkan sistem manajemen lingkungan dalam seluruh aktivitas operasinya.
The company has the responsible capability for the Construction Lifecycle and serves as a trusted partner for stakeholders to support the global climate initiatives agenda and sets an example by implementing an environmental management system in every operational activity.
- 2. Perusahaan yang Bertanggung Jawab Sosial (Social Caring Company)**
 Perusahaan yang berambisi untuk menangkan standar tertinggi dalam menerapkan tanggung jawab sosial, dan senantiasa mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, mempromosikan dan melindungi upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, berkualitas lokal, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
The company is committed to implementing the highest standards in practicing social responsibility. It consistently promotes sustainable social and economic development, supports and values sustainable human resource development, localisation and principles of human rights.
- 3. Perusahaan dengan Tata Kelola yang Baik (Excellent Governance Company)**
 Perusahaan yang memastikan kebutuhan terhadap tata kelola yang baik dan patuh pada hukum yang berlaku di seluruh wilayah operasinya. Menegakkan praktik anti-korupsi dan anti-penyusutan untuk seluruh pemangku kepentingan perusahaan.
The company ensures compliance with good governance and adherence to applicable laws across all operational areas. It upholds anti-corruption and anti-bribery practices for all stakeholders involved in the company.

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk bertanggung jawab menjamin implementasi kebijakan ini dengan melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.
PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk is responsible for ensuring the implementation of this policy by making continuous improvement efforts.

Ditetapkan di / Issued in:
Jakarta / Jakarta
 Pada tanggal / on the date of:
13 Nov 2023 / Nov 13th, 2023

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

Waskito

Agung Budi Waskito
Direktur Utama / President Director

--	--	--	--	--	--	--	--

INTEGRASI KEBERLANJUTAN KE DALAM STRATEGI DAN PROSES BISNIS PERUSAHAAN

Pada pilar “keberlanjutan”, WIKA berupaya keras untuk untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG) ke dalam strategi bisnisnya guna menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sejalan dengan keputusan Rapat Direksi pada 16 Oktober 2023, implementasi program keberlanjutan berada di bawah naungan *Transformation and Business Strategy Division*.

Untuk memastikan penerapan yang sistematis dan terukur, WIKA telah menetapkan kebijakan keberlanjutan yang mencakup tiga aspek utama:

1. Lingkungan (*Environment*)

Transisi Energi Terbarukan dan Solusi Rendah Karbon: Strategi proaktif dalam mengelola risiko dan peluang perubahan iklim di seluruh rantai nilai. **Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab:** Menerapkan kebijakan terkait efisiensi energi, pengurangan emisi, pengelolaan limbah, serta konservasi keanekaragaman hayati. **Produk dan Layanan Berkelanjutan:** Mengembangkan inovasi dalam konstruksi yang ramah lingkungan dan berdaya guna tinggi.

2. Sosial (*Social*)

Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Masyarakat: Menyediakan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi karyawan serta mendukung pengembangan komunitas lokal. **Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3):** Memastikan penerapan sistem identifikasi potensi bahaya, pengendalian risiko, serta pelatihan K3 bagi seluruh karyawan.

3. Tata Kelola (*Governance*)

Tata Kelola Keberlanjutan: Mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam seluruh aspek operasional dan strategis perusahaan. **Pengadaan yang Bertanggung Jawab:** Memastikan rantai pasok perusahaan memenuhi standar lingkungan dan sosial. **Inklusivitas Pemangku Kepentingan:** Mendorong transparansi, keterlibatan multi-stakeholder, dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*).

INTEGRATION OF SUSTAINABILITY INTO THE COMPANY'S STRATEGY AND BUSINESS PROCESSES

Under the "sustainability" pillar, WIKA strives to integrate the principles of *Environment, Social, and Governance* (ESG) into its business strategy to create long-term value for stakeholders and contribute to the *Sustainable Development Goals* (SDGs). In line with the decision of Board of Directors' Meeting on October 16, 2023, the implementation of sustainability program falls under the *Transformation and Business Strategy Division*.

To ensure systematic and measurable implementation, WIKA has established a sustainability policy covering three main aspects:

1. Environment

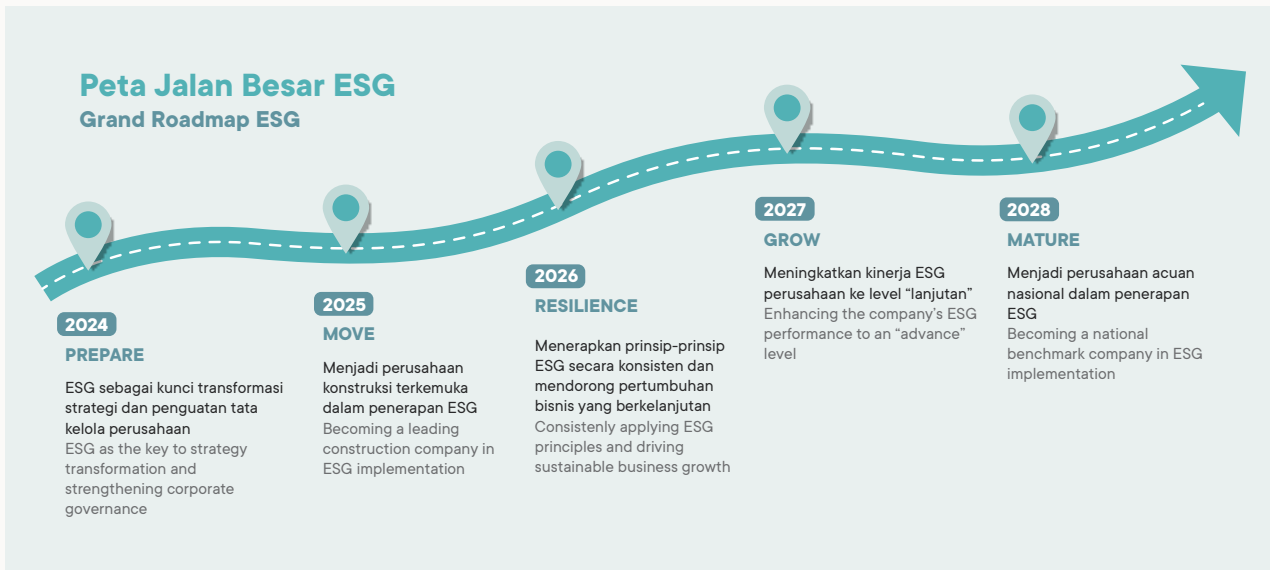
Renewable Energy Transition and Low Carbon Solutions: A proactive strategy to manage climate change risks and opportunities across the value chain. **Responsible Environmental Management:** Implementing policies related to energy efficiency, emission reduction, waste management, and biodiversity conservation. **Sustainable Products and Services:** Developing innovations in environmentally friendly construction with high utility.

2. Social

Human Capital Development and Community Welfare: Providing ongoing training and education programs for employees and supporting the development of local communities. **Occupational Health and Safety (OHS):** Ensuring the implementation of hazard identification systems, risk control, and OHS training for all employees.

3. Governance

Sustainability Governance: Integrating ESG principles into all operational and strategic aspects of the Company. **Responsible Procurement:** Ensuring the Company's supply chain meets environmental and social standards. **Stakeholder Inclusivity:** Promoting transparency, multi-stakeholder engagement, and strengthening good corporate governance (*Good Corporate Governance - GCG*).



WIKA juga menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi transformasi perusahaan melalui *Grand Roadmap ESG* yang dijalankan bertahap hingga 2028. Dimulai dari tahap *Prepare* (2024) dengan menjadikan ESG sebagai kunci transformasi strategi dan penguatan tata kelola, WIKA kemudian menargetkan posisi sebagai perusahaan konstruksi terdepan dalam implementasi ESG pada tahap *Move* (2025). Pada *Resilience* (2026), WIKA fokus pada penerapan prinsip ESG secara konsisten untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Selanjutnya, tahap *Grow* (2027) bertujuan meningkatkan kinerja ESG ke level yang lebih maju melalui digitalisasi dan inovasi teknologi ramah lingkungan, hingga akhirnya pada *Mature* (2028), WIKA menargetkan diri sebagai *benchmark* nasional dalam implementasi ESG.

Dalam implementasinya, WIKA berfokus pada tiga pilar utama. Dari sisi lingkungan, WIKA menerapkan pengurangan jejak karbon melalui material ramah lingkungan, efisiensi sumber daya dengan *Building Information Modeling* (BIM), serta pembangunan infrastruktur hijau dan energi terbarukan. Dari aspek sosial, WIKA berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat melalui program CSR berkelanjutan, penerapan standar K3, serta pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok. Sementara dari sisi tata kelola, WIKA memperkuat kebijakan anti-korupsi, meningkatkan transparansi melalui digitalisasi manajemen risiko, serta mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan langkah-langkah ini, WIKA tidak hanya berusaha menjadi pemimpin dalam industri konstruksi, tetapi juga berkontribusi aktif terhadap pembangunan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.

Manajemen Risiko ESG dan *Emerging Risk*

WIKA berkomitmen dalam implementasi keberlanjutan (ESG) sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Komitmen ini tidak hanya diwujudkan dalam kebijakan dan inisiatif perusahaan, tetapi juga diterapkan ke seluruh unit kerja dengan menetapkan peran spesifik untuk setiap divisi dalam mendukung ESG.

WIKA also places sustainability as part of the Company's transformation strategy through the *Grand Roadmap ESG*, which will be carried out in stages until 2028. Starting with the *Prepare* phase (2024), where ESG is made as the key to strategic transformation and governance strengthening, WIKA then targets a position as the leading construction company in ESG implementation in the *Move* phase (2025). In the *Resilience* phase (2026), WIKA focuses on consistently applying ESG principles to support sustainable business growth. The *Grow* phase (2027) aims to enhance ESG performance to a more advanced level through digitalization and environmentally friendly technological innovation. Finally, in the *Mature* phase (2028), WIKA targets itself as a national benchmark in ESG implementation.

In its implementation, WIKA focuses on three main pillars. From an environmental perspective, WIKA applies carbon footprint reduction through environmentally friendly materials, resource efficiency with *Building Information Modeling* (BIM), as well as the construction of green infrastructure and renewable energy. From a social aspect, WIKA is committed to improving worker and community welfare through sustainable CSR programs, the implementation of OHS standards, and the empowerment of SMEs within the supply chain. On the governance side, WIKA strengthens anti-corruption policies, increases transparency through risk management digitalization, and encourages stakeholder involvement in strategic decision-making. With these steps, WIKA not only strives to become a leader in the construction industry but also actively contributes to greener, more inclusive, and sustainable development.

ESG Risk Management and *Emerging Risk*

WIKA is committed to implementing sustainability (ESG) as part of its business strategy. This commitment is not only realized in the Company's policies and initiatives but is also applied across all work units by assigning specific roles for each division to support ESG.

PERAN UNIT KERJA DALAM IMPLEMENTASI ESG THE ROLE OF WORK UNITS IN ESG IMPLEMENTATION

<p>Corsec</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengelola komunikasi eksternal terkait ESG, termasuk publikasi keberlanjutan pada website dan media sosial. Menyusun Sustainability Report sesuai standar global (TCFD, IFRS S1 & S2). Mengukur dampak kegiatan sosial masyarakat melalui SROI dan/atau IKM. Memantau pelaksanaan ESG terkait publikasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai ISO 26000. Manage external communications related to ESG, including sustainability publications on websites and social media. Prepare Sustainability Reports according to global standards (TCFD, IFRS S1 & S2). Measure the impact of social activities on the community through SROI and/or IKM. Monitor the implementation of ESG related to publications and community empowerment according to ISO 26000. 	<p>Internal Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ESG dan implementasi standar keberlanjutan. Mengawasi penerapan tata kelola ESG di seluruh unit kerja. Mengevaluasi efektivitas program ESG dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ensure compliance with ESG policies and implementation of sustainability standards. Monitor the implementation of ESG governance across all work units. Evaluate the effectiveness of ESG programs and provide recommendations for improvement. 	<p>Finance</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan diversifikasi sumber pendanaan berkelanjutan. Memantau pelaksanaan ESG terkait penerapan keuangan berkelanjutan dalam proyek-proyek perusahaan. Melaporkan kinerja keuangan terkait proyek-proyek berkelanjutan. Conduct sustainable funding source diversification planning. Monitor ESG implementation related to sustainable finance implementation in company projects. Report financial performance related to sustainable projects. 	<p>SCM</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengawasi pelaksanaan ESG terkait isu <i>green procurement</i>. Melakukan penilaian dan pembinaan terhadap subkontraktor dan/atau <i>supplier</i> untuk memastikan penerapan <i>green procurement</i>. Menyusun klasifikasi <i>green product</i>. Monitor the implementation of ESG related to green procurement issues. Conduct assessments and coaching of subcontractors and/or suppliers to ensure the implementation of green procurement. Prepare green product classifications.
<p>HC</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi ESG bagi karyawan. Memonitor pelaksanaan ESG terkait pengelolaan dan pemberdayaan karyawan sesuai ISO 30414:2018. Menurunkan <i>turnover rate</i> pegawai melalui program pelatihan, pengembangan, dan <i>well-being</i>. Mengelola keterwakilan perempuan di level manajemen. Conduct ESG training and certification for employees. Monitor ESG implementation related to employee management and empowerment according to ISO 30414:2018. Reduce employee turnover rate through training, development, and well-being programs. Manage female representation at the management level. 	<p>IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan memelihara sistem informasi yang digunakan untuk pelaporan dan pemantauan kinerja ESG. Mengawasi dan melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data terkait ESG. Develop and maintain information systems used for ESG performance reporting and monitoring. Monitor and conduct regular internal audits to ensure compliance with information security policies. Maintain the security and confidentiality of ESG-related data. 	<p>Risk Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kerangka manajemen risiko berbasis ESG. Menganalisis dampak risiko iklim dan strategi adaptasi-mitigasi perubahan iklim di seluruh SBU. Memasukkan risiko ESG ke dalam matriks manajemen risiko korporasi. Develop an ESG-based risk management framework. Analyze the impact of climate risk and climate change adaptation-mitigation strategies across SBUs. Incorporate ESG risks into the corporate risk management matrix. 	<p>Legal</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan seluruh regulasi terkait ESG sesuai dengan regulasi nasional dan global. Memonitor pelaksanaan ESG terkait tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Mendukung penyelesaian temuan audit dan laporan <i>whistleblowing</i>. Ensure all ESG regulations are in accordance with national and global regulations. Monitor the implementation of ESG related to corporate governance in accordance with applicable legal principles. Support the resolution of audit findings and whistleblowing reports.
<p>CQHSE</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengawasi implementasi sistem manajemen K3L sesuai ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018. Mengelola penanganan limbah cair dan padat, pengendalian pencemaran udara, dan kebisingan. Melakukan inventarisasi dan pelaporan emisi GRK. Melakukan penanganan risiko iklim melalui pengurangan emisi karbon. Supervise the implementation of the HSE management system according to ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018. Manage the handling of liquid and solid waste, control of air pollution, and noise. Conduct inventory and reporting of GHG emissions. Handle climate risks through carbon emission reduction. 	<p>Corp. Marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> Memasarkan produk dan/atau layanan berbasis ESG kepada klien ataupun investor. Menjalin kemitraan strategis dengan mitra bisnis berlandaskan <i>creating shared value</i> (CSV). Meningkatkan branding WIKA sebagai <i>pioneer</i> dan <i>leader</i> implementasi ESG di sektor konstruksi. Marketing ESG-based products and/or services to clients or investors. Establishing strategic partnerships with business partners based on creating shared value (CSV). Improving WIKA's branding as a pioneer and leader in ESG implementation in the construction sector. 	<p>TBSD</p> <ul style="list-style-type: none"> Merancang strategi dan <i>roadmap</i> ESG. Menetapkan KPI implementasi ESG Perusahaan. Memonitor pelaksanaan ESG yang diimplementasikan oleh seluruh unit kerja. Memastikan sistem monitoring dan peningkatan skor ESG. Mengembangkan sistem monitoring ESG berbasis digitalisasi. Menyusun peta jalan dekarbonisasi untuk mencapai target NZE. Design ESG strategy and roadmap. Determine KPI for the Company's ESG implementation. Monitor the implementation of ESG by all work units. Ensure the monitoring system and score improvement of ESG. Develop a digital-based ESG monitoring system. Develop a decarbonization roadmap to achieve NZE targets. 	
<p>Divisi Operasi/Operations Division</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan konstruksi hijau dan efisiensi energi, di antaranya dengan mengadopsi prinsip <i>Lean Construction</i>. Mendorong pengurangan emisi karbon dari proyek konstruksi. Mengoptimalkan konsep <i>circular economy</i> dalam konstruksi. Memastikan pemenuhan standar ESG dalam desain dan eksekusi proyek. Applying green construction and energy efficiency, including by adopting the principles of Lean Construction. Encouraging carbon emission reduction from construction projects. Optimizing the concept of circular economy in construction. Ensuring compliance with ESG standards in project design and execution. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #e0e0e0;">Infra 1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #e0e0e0;">Infra 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #e0e0e0;">EPCC</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #e0e0e0;">Building</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #e0e0e0;">Asset Management</div> </div>			

Salah satu divisi yang memiliki peran penting dalam implementasi ESG adalah *Risk Management*. Divisi ini bertanggung jawab dalam mengembangkan kerangka manajemen risiko berbasis ESG, menganalisis dampak risiko iklim, serta memasukkan risiko ESG dalam matriks manajemen risiko korporasi.

One of the divisions that plays an important role in ESG implementation is Risk Management. This division is responsible for developing an ESG-based risk management framework, analyzing the impact of climate risk, and including ESG risk in the corporate risk management matrix.

EMERGING RISK

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) is committed to reporting emerging risks as part of its comprehensive long-term risk management approach. The identified risks are derived from a broad, cross-functional risk assessment process. These emerging risks, disclosed in public documents, are newly identified risks that have not yet materialized but pose significant long-term impacts on the company's operations and strategy.

Furthermore, the reported emerging risks meet key requirements, including a significant potential impact on the company's operations, long-term implications, external origin of the risks, and the availability of mitigation actions formulated to reduce future impacts. This report provides stakeholders with valuable insights into WIKA's preparedness for unforeseen long-term challenges.

No	Potential Risk	Risk Event Category	Impact	Mitigation Plan	Entity
1	Infrastructure budget repositioning that may affect project prioritization, funding unpreparedness that causes delayed tendering schedule	Market and Macroeconomics	Impairment of contract turnover	4. Seek market share outside of APBN funding. 5. Coordinate with the Ministry of BUMN to obtain information related to BUMN CAPEX related to WIKAS core business. 6. Improve the effectiveness of supply chain management related to vendors who provide competitive prices so as to increase the effectiveness of tender acquisition.	All WIKA Entities
2	Limiting carbon emissions in construction industry	Social and Environmental	Decreased company reputation, loss of stakeholder trust	1. Adopt environmentally friendly technologies and sustainable building materials and implement efficient green construction practices. 2. Identify baselining and develop a company decarbonization roadmap. 3. Increase awareness and capabilities needed to support carbon emission reduction.	All WIKA Entities
3	Macroeconomic geopolitical conditions that have the potential to increase raw material prices	Market and Macroeconomics	1. Realization of the project RAB exceeded the plan due to an increase in the main raw material (rebar & profile steel) 2. Project RAB realization exceeded the plan due to an increase in import-export logistics costs	1. Renegotiate with steel and rebar factories that have contracted with WIKAS. 2. Conduct VA/VE related to the use of steel, rebar in coordination with the project team and operations division. 3. Expanding vendor network through vendor engagement program.	All WIKA Entities

WIKAS juga telah memetakan *emerging risk* dalam lima tahun ke depan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan perusahaan. Identifikasi risiko ini diperbarui secara berkala dalam *risk register*, memastikan bahwa WIKAS dapat mengembangkan strategi mitigasi yang lebih proaktif. Beberapa risiko utama yang telah diidentifikasi meliputi pembatasan emisi karbon di industri konstruksi, kondisi geopolitik yang berdampak pada harga bahan baku, serta perubahan kebijakan anggaran infrastruktur. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, dokumen *emerging risk* ini telah diunggah di situs resmi WIKAS dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

WIKAS has also mapped emerging risks for the next five years as a step to anticipate risks that may affect the Company's sustainability. This risk identification is regularly updated in the risk register, ensuring that WIKAS can develop more proactive mitigation strategies. Some of the main risks that have been identified include carbon emission restrictions in the construction industry, geopolitical conditions affecting raw material prices, and changes in infrastructure budget policies. To support transparency and accountability, this emerging risk document has been uploaded to WIKAS's official website and can be accessed by all stakeholders.

RATING ESG WIKA

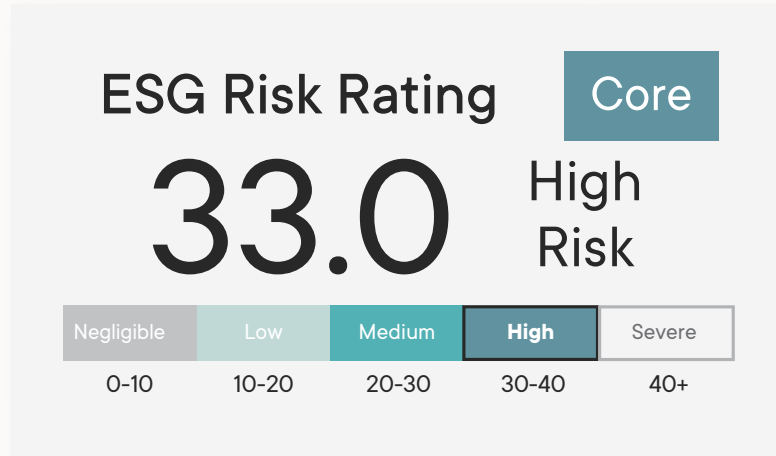
Rating Sustainalytics

Peringkat ESG yang dilakukan oleh Sustainalytics memberikan informasi yang jelas tentang risiko ESG WIKA yang terdiri dari 20 *framework* isu ESG.

WIKA ESG RATING

Sustainalytics Ratings

The ESG rating conducted by Sustainalytics provides clear information on WIKA's ESG risks consisting of 20 ESG issue frameworks.



WIKA terus menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan melalui penerapan prinsip ESG. Sepanjang 2023-2024, WIKA mencatat kemajuan signifikan dalam pengelolaan risiko ESG, yang tercermin dari skor ESG menurut penilaian Sustainalytics, yang sejalan dengan fokus perusahaan pada keberlanjutan.

WIKA continues to demonstrate its commitment to sustainability through the implementation of ESG principles. Throughout year of 2023-2024, WIKA recorded significant progress in ESG risk management, as reflected in the ESG score according to the Sustainalytics assessment, which is in line with the Company's focus on sustainability.

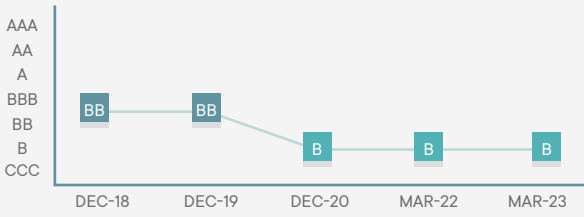
Pada **Q3 2023**, WIKA memulai langkahnya dengan skor **ESG 29,8**, menandai langkah awal yang kuat dalam mengelola keberlanjutan secara terstruktur. Di **Q1 2024**, WIKA berhasil menurunkan skornya menjadi **28,2**, mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif, termasuk peningkatan manajemen emisi, pengelolaan limbah, dan penguatan tata kelola perusahaan.

In **Q3 2023**, WIKA started its journey with an **ESG score of 29.8**, marking a strong initial step in managing sustainability in a structured manner. In **Q1 2024**, WIKA's score was lower to **28.2**, reflecting the success of various initiatives, including improving emission management, waste management, and strengthening corporate governance.

Memasuki **Q3 2024**, WIKA semakin menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi dinamika industri dengan terus menguatkan implementasi ESG. Penutupan tahun pada **Q4 2024** dengan skor **33,0** menjadi bukti dedikasi WIKA dalam membangun fondasi keberlanjutan yang kuat, sekaligus menunjukkan upaya proaktif perusahaan dalam menyelaraskan strategi dengan tren global keberlanjutan.

Entering **Q3 2024**, WIKA is increasingly demonstrating its resilience in facing industry dynamics by continuing to strengthen ESG implementation. Closing the year in **Q4 2024** with a score of **33.0** is proof of WIKA's dedication to building a strong sustainability foundation, while also demonstrating the Company's proactive efforts in aligning its strategy with global sustainability trends.

ESG Rating history



ESG Rating history shows five most recent rating actions

MSCI

B

ESG RATINGS

CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
-----	---	----	-----	---	----	-----

Selain Sustainalytics, WIKA juga memperoleh penilaian ESG Rating dari MSCI (Morgan Stanley Capital International). Hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan WIKA dalam mengimplementasikan ESG dalam bisnis perusahaan. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKI) memperoleh penilaian ESG Rating dari MSCI dengan peringkat B pada laporan terbaru yang diperbarui pada 18 Oktober 2024.

Penilaian rating ESG bukanlah hal yang baru bagi WIKA. Berdasarkan catatan ESG Rating dari MSCI, WIKA telah menerima peringkat ESG sejak lama, dengan peringkat BB yang pertama kali dicatat pada Desember 2018. Hal ini membuktikan bahwa WIKA terus meningkatkan upaya implementasi ESG sebagai bagian dari strategi utama perusahaan. WIKA menyadari bahwa penerapan ESG yang kuat bukan hanya untuk meningkatkan peringkat, tetapi juga penting untuk keberlanjutan bisnis di tengah tantangan industri konstruksi yang dinamis. Peringkat saat ini menjadi dasar bagi WIKA untuk mempercepat inovasi dan meluncurkan inisiatif strategis guna memperkuat keberlanjutan, memberikan dampak positif, dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global.

Melalui perjalanan ESG rating ini, WIKA tidak hanya mencerminkan keberhasilan langkah strategisnya tetapi juga komitmennya untuk terus berinovasi dan berkolaborasi guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi WIKA untuk menjadi pemimpin dalam industri konstruksi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

In addition to Sustainalytics, WIKA also received an ESG Rating from MSCI (Morgan Stanley Capital International). This shows WIKA's commitment and seriousness in implementing ESG in its business operations. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKI) received an ESG Rating from MSCI with a B rating in the latest report updated on October 18, 2024.

ESG rating assessments are nothing new for WIKA. Based on ESG Rating records from MSCI, WIKA has received ESG rating for a long time, with a BB rating first recorded in December 2018. This proves that WIKA continues to enhance ESG implementation efforts as part of the company's main strategy. WIKA realizes that strong ESG implementation is not only to aimed at improving ratings, but is also crucial for business sustainability amidst the dynamic challenges of construction industry. The current rating serves as a foundation for WIKA to accelerate innovation and launch strategic initiatives to strengthen sustainability, deliver positive impacts, and increase the company's competitiveness in the global market.

Through this ESG rating journey, WIKA not only reflects the success of its strategic steps but also its commitment to continuously innovate and collaborate to achieve sustainable development goals. This is in line with WIKA's vision to become a leader in the sustainable and highly competitive construction industry.

RATING SUSTAINALYTICS

RATING SUSTAINALYTICS

S&P Global ESG Score

53/100

Data Availability: ■ **Very High**

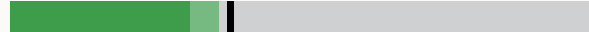
Last updated: March 20, 2025

Update annually or in response to major developments

Score breakdown

■ ESG Score ■ Industry ESG Score Average

Environmental



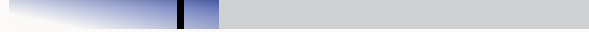
CSA Score 29 | ESG Score 34 | Average 35

Social



CSA Score 77 | ESG Score 79 | Average 34

Governance & Economic



CSA Score 77 | ESG Score 79 | Average 34

WIKA mencatatkan pencapaian signifikan dalam peringkat ESG dari S&P Global dengan skor keseluruhan sebesar 53, yang terdiri dari *Environmental* (E) sebesar 29, *Social* (S) sebesar 77, dan *Governance* (G) sebesar 47.

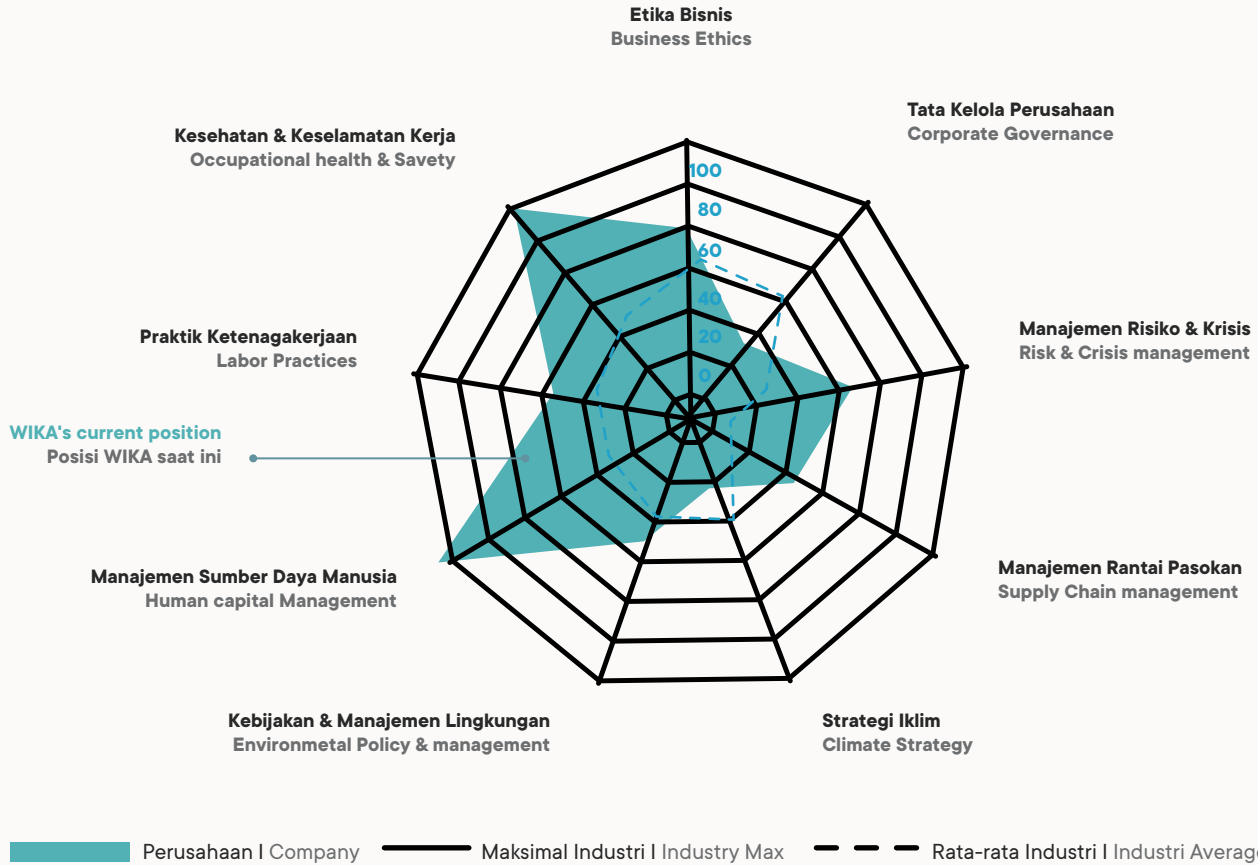
WIKA recorded significant achievements in the ESG ranking from S&P Global with an overall score of 53, consisting of *Environmental* (E) of 29, *Social* (S) of 77, and *Governance* (G) of 47.

Pencapaian ini menempatkan WIKA sebagai pemimpin industri konstruksi di Indonesia, peringkat ke-12 di Asia Pasifik, dan ke-25 secara global dari total 148 perusahaan konstruksi yang dinilai.

This achievement places WIKA as the leader of construction industry in Indonesia, ranked 12th in Asia Pacific, and 25th globally out of a total of 148 construction companies assessed.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan skor 33, terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 20 poin. Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan Perseroan dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan, sejalan dengan praktik terbaik global dan ekspektasi pemangku kepentingan.

Compared to the previous year which recorded a score of 33, there was a very significant increase of 20 points. This success is the result of the Company's ongoing commitment to improving sustainability performance, in line with global best practices and stakeholder expectations.



Score yang cukup baik merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen perusahaan terhadap beberapa aspek utama dalam ESG, khususnya aspek sosial yang menyumbang skor terbesar dalam penilaian ESG Wika. Langkah-langkah ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan skor, terutama dalam aspek Social (S) yang menyumbangkan poin terbesar dalam penilaian ESG Wika. Berikut merupakan inisiatif yang telah dilakukan Wika di setiap kriteria utama, yaitu *Environmental (E)*, *Social (S)*, dan *Governance (G)*.

Lingkungan (*Environmental - E*)

Wika telah menunjukkan kinerja yang baik dalam lima indikator utama, yaitu:

- *Environmental Policy & Management*
- *Energy*
- *Water*
- *Biodiversity*
- *Product Stewardship*

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan skor pada indikator ini meliputi:

- **Kebijakan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati:** Wika memiliki komitmen yang jelas terhadap aspek lingkungan yang dituangkan dalam kebijakan perusahaan yakni Kebijakan Keanekaragaman Hayati dan Restorasi Lahan No Dok. Wika TFO-KP-01.01 yang memastikan bahwa keanekaragaman hayati dan restorasi lahan terjaga dengan baik di lokasi proyek. Selain itu, melalui Kebijakan K3L No. Dok. Wika-HSE-KP-01.01 juga menekankan terkait pentingnya menjaga lingkungan dari dampak proyek yang dilakukan, salah satunya adalah penerapan konsep 3R.

A fairly good score is the result of hard work and commitment of the Company to several key aspects of ESG, especially the social aspect that contributes the largest score in Wika's ESG assessment. These steps directly contribute to increasing the score, especially in the Social (S) aspect, which contributes the largest points in Wika's ESG assessment. The following are initiatives that Wika has taken in each main criterion, namely *Environmental (E)*, *Social (S)*, and *Governance (G)*.

Environmental (E)

Wika has shown good performance in five main indicators, namely:

- *Environmental Policy & Management*
- *Energy*
- *Water*
- *Biodiversity*
- *Product Stewardship*

The steps that have been taken to improve the score on this indicator include:

- **Environmental and Biodiversity Policy:** Wika has a clear commitment to environmental aspects as outlined in the Company's policy, i.e. the Biodiversity and Land Restoration Policy No. Doc. Wika TFO-KP-01.01 which ensures that biodiversity and land restoration are well maintained at the project site. In addition, the HSE Policy No. Doc. Wika-HSE-KP-01.01 also emphasizes the importance of protecting the environment from the impacts of project being carried out, one of which is the application of the 3R concept.

- **Efisiensi Penggunaan Air:** Implementasi *recycling Sewage Treatment Plan* (STP) untuk flushing toilet dan penyiraman taman, pemasangan sensor otomatis pada keran wastafel dan urinal, serta penggunaan 100% air PDAM di kantor pusat.
- **Pengelolaan Energi:** Penggunaan teknologi hemat energi seperti lampu dengan sensor otomatis, serta pengurangan penggunaan AC di ruang kantor. Selain itu, WIKA berkontribusi pada penggunaan solar panel di kantor pusat.

Sosial (Social – S)

Seluruh indikator dalam aspek sosial telah berada di atas rata-rata industri, meliputi:

- *Labor Practice*
- *Human Rights*
- *Human Capital Management*
- *Occupational Health & Safety*
- *Customer Relation*

Langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- **Komitmen terhadap Keselamatan Karyawan:** Kebijakan K3 No Dok. WIKA-HSE-KP-01.01 yang diterapkan secara ketat menjadi landasan implementasi K3 yang baik di proyek.
- **Komitmen terhadap Hak Asasi Karyawan:** WIKA melalui Kebijakan Hak Asasi Manusia No Dok. WIKA-TFO-KP-02.01 menjamin Hak Asasi Manusia di lingkungan operasional WIKA baik di Kantor Pusat maupun di Proyek
- **Kesetaraan Gender:** Memberikan ruang bagi pekerja wanita untuk berkariir di level manajerial sebagai implementasi dari Kebijakan RWP No Dok. WIKA-HCE-KP-01.01
- **Peningkatan Kompetensi Karyawan:** WIKA menyediakan program sertifikasi dan pelatihan bagi seluruh karyawan untuk menunjang pengembangan diri.

Tata Kelola Perusahaan (Governance – G)

Enam indikator utama dalam tata kelola yang telah menunjukkan hasil baik meliputi:

- *Transparency Reporting*
- *Materiality*
- *Risk Management*
- *Business Ethics*
- *Supply Chain Management (SCM)*
- *IT & Cybersecurity*

Langkah-langkah utama yang telah dilakukan:

- **Pelaporan Transparan:** Penyampaian kinerja melalui *Annual Report* dan *Sustainability Report*, serta keterbukaan informasi di situs resmi WIKA.
- **Manajemen Risiko yang Proaktif:** Penyusunan *Risk Register* secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko perusahaan.
- **Keberlanjutan dalam Rantai Pasok:** *Assessment* vendor secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip keberlanjutan.
- **Keamanan dan Integrasi IT:** Implementasi sistem IT terintegrasi dengan sertifikasi ISO 27001.

- **Efficient Water Use:** Implementation of *recycling Sewage Treatment Plan* (STP) for flushing toilets and watering gardens, installation of automatic sensors on sink taps and urinals, and the use of 100% PDAM water at the head office.
- **Energy Management:** Use of energy-saving technology such as lamps with automatic sensors, and reduction in the use of air conditioning in office spaces. In addition, WIKA contributes to the use of solar panels at the head office.

Sosial (S)

All indicators in the social aspect have been above the industry average, including:

- *Labor Practice*
- *Human Rights*
- *Human Capital Management*
- *Occupational Health & Safety*
- *Customer Relations*

The steps that have been taken include:

- **Commitment to Employee Safety:** The OHS Policy No. Doc. WIKA-HSE-KP-01.01 which is strictly implemented is the basis for good OHS implementation in the project.
- **Commitment to Employee Human Rights:** Through the Human Rights Policy No. Doc. WIKA-TFO-KP-02.01, WIKA guarantees the Human Rights in WIKA's operational environment both at the Head Office and in the Project
- **Gender Equality:** Providing space for female workers to pursue careers at managerial level as an implementation of RWP Policy No. Doc. WIKA-HCE-KP-01.01
- **Employee Competency Improvement:** WIKA provides certification and training programs for all employees to support self-development.

Governance (G)

The six main indicators in governance that have shown good results include:

- *Transparency Reporting*
- *Materiality*
- *Risk Management*
- *Business Ethics*
- *Supply Chain Management (SCM)*
- *IT & Cybersecurity*

Main steps that have been taken:

- **Transparent Reporting:** Submission of performance through the *Annual Report* and *Sustainability Report*, as well as openness of information on WIKA's official website.
- **Proactive Risk Management:** Preparation of a *Risk Register* periodically to identify and manage company risks.
- **Sustainability in the Supply Chain:** Periodic vendor assessments to ensure compliance with sustainability principles.
- **IT Security and Integration:** Implementation of an integrated IT system with ISO 27001 certification.

Ruang Perbaikan

Meskipun telah menunjukkan pencapaian yang baik, WIKA terus berupaya mengidentifikasi dan memperbaiki area yang masih dapat ditingkatkan. Beberapa indikator ESG masih berada di bawah rata-rata industri, sehingga diperlukan strategi dan langkah konkret untuk memperkuat kinerja keberlanjutan perusahaan di masa mendatang.

Lingkungan (E)

Dua indikator yang masih berada di bawah rata-rata industri:

- *Waste & Pollutant*
- *Climate Strategy*

Langkah peningkatan yang akan dilakukan:

- **Pengelolaan Limbah:** Memastikan pelaporan limbah dilakukan secara berkala dan terstruktur.
- **Strategi Dekarbonisasi:** Melakukan baselining emisi karbon serta menyusun roadmap dekarbonisasi untuk mengurangi dampak operasional terhadap lingkungan.

Sosial (S)

Meskipun seluruh indikator telah berada di atas rata-rata industri, skor terendah ada pada *Labor Practice*. Upaya yang akan dilakukan meliputi:

- **Kesetaraan Hak Karyawan:** Meningkatkan inklusivitas tanpa memandang ras, etnis, dan gender.
- **Pelaporan Komprehensif:** Meningkatkan detail pelaporan terkait distribusi karyawan.

Tata Kelola Perusahaan (G)

Dua indikator yang masih membutuhkan peningkatan:

- *Corporate Governance*
- *Policy Influence*

Langkah yang akan dilakukan:

- **Peningkatan Tata Kelola BOD:** Memastikan kinerja Dewan Direksi lebih terukur melalui penetapan KPI yang berfokus pada keberlanjutan.
- **Pelaporan Dana Politik:** Meningkatkan transparansi dalam pelaporan dana yang berkaitan dengan kebijakan publik.

WIKA berkomitmen untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan guna mereduksi dan mensubstitusi emisi karbon yang dihasilkan dari proses bisnis Perseroan. WIKA sudah membuat Peta Jalan Dekarbonisasi yang dimulai sejak tahun 2022 dengan beberapa program yang sudah dijalankan dan dicanangkan sehingga ditargetkan pada tahun 2030 WIKA sudah bisa mencapai *Net Zero Emissions*. Beberapa program strategis WIKA dalam program dekarbonisasi di antaranya :

- WIKA sudah memiliki Kebijakan Keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap konstruksi berkelanjutan, menciptakan nilai jangka panjang bagi para *stakeholders* melalui praktik berkelanjutan, serta mengintegrasikan strategi dan aktivitasnya ke dalam tata kelola perusahaan (*Environmental, Social, Governance*)

Room for Improvement

Although has shown good achievements, WIKA continues to identify and improve areas that can still be improved. Several ESG indicators are still below the industry average, hence concrete strategies and actions are needed to strengthen the Company's sustainability performance in the future.

Environment (E)

Two indicators that are still below the industry average:

- *Waste & Pollutant*
- *Climate Strategy*

Improvement steps to be taken:

- **Waste Management:** Ensure waste reporting is carried out regularly and in a structured manner.
- **Decarbonization Strategy:** Conduct carbon emission baselines and prepare a decarbonization roadmap to reduce operational impacts on the environment.

Social (S)

Although all indicators are above the industry average, the lowest score is in *Labor Practice*. Efforts to be taken include:

- **Employee Rights Equality:** Increase inclusiveness regardless of race, ethnicity, and gender.
- **Comprehensive Reporting:** Improve reporting details related to employee distribution.

Governance (G)

Two indicators that still need improvement:

- *Corporate Governance*
- *Policy Influence*

Steps to be taken:

- **Improved BOD Governance:** Ensure that the performance of Board of Directors is more measurable through the establishment of KPIs that focus on sustainability.
- **Political Fund Reporting:** Improve transparency in reporting funds related to public policy.

WIKA is committed to playing an active role in environmental preservation in order to reduce and substitute carbon emissions generated from the Company's business processes. WIKA has created a Decarbonization Roadmap, which began in 2022 with several programs that have been implemented and planned, aiming for WIKA to Net Zero Emissions by 2030. Some of WIKA's strategic programs in the decarbonization program include:

- WIKA already has a Sustainability Policy as a form of the Company's responsibility towards sustainable construction, creating long-term value for stakeholders through sustainable practices, and integrating its strategies and activities into corporate governance (*Environmental, Social, Governance*)

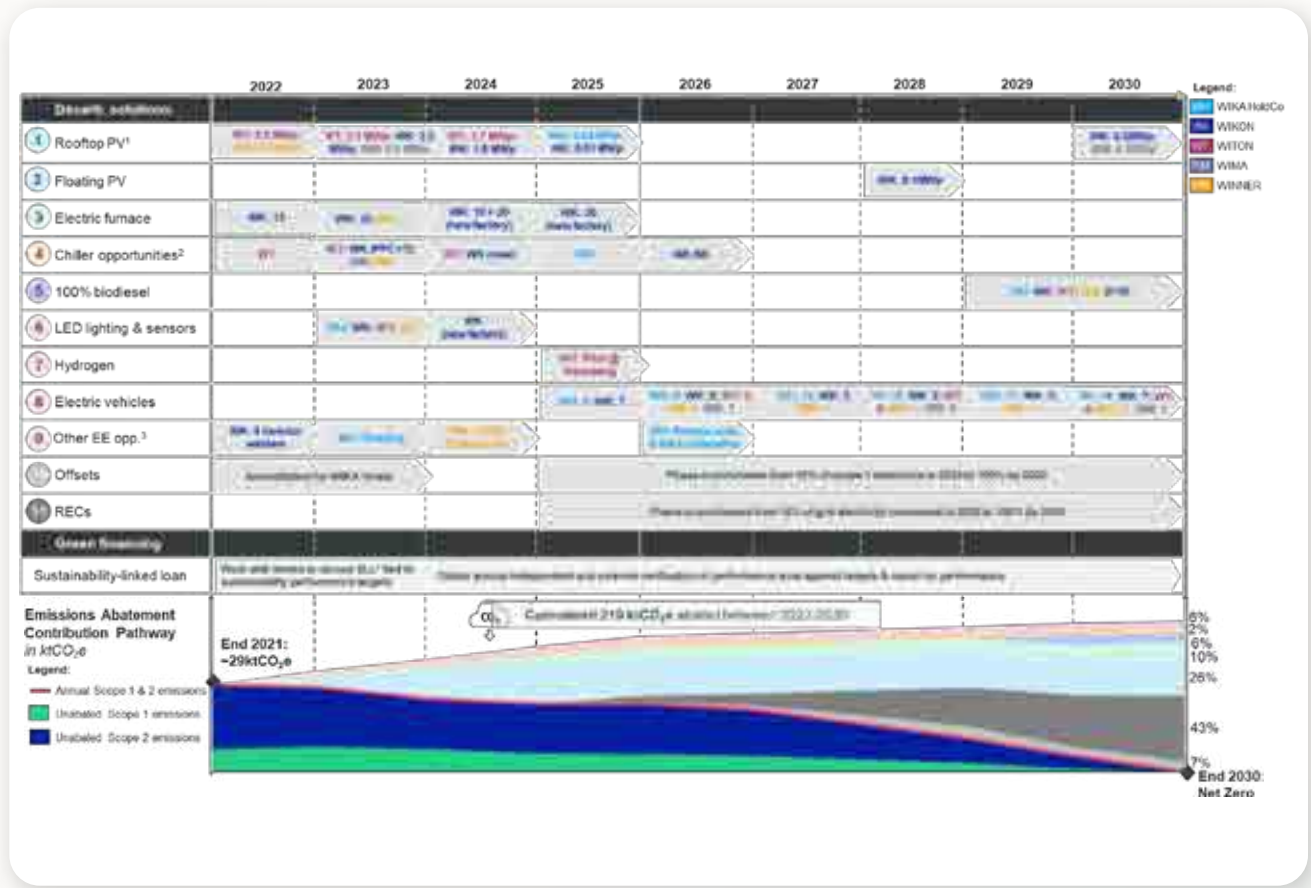
PETA JALAN DEKARBONISASI WIKA

- Penggunaan bahan material yang ramah lingkungan seperti penggunaan semen non OPC, Beton Porous (beton tembus air), dan lain-lain
- Menghasilkan produk-produk energi terbarukan seperti motor listrik Gesits, WIKA Solar Water Heater, photovoltaic, dan lain-lain
- Instalasi listrik tenaga surya sebesar 12,8 MWp akan dilakukan pada tahun 2030 termasuk 11,5 MW pada tahun 2025
- Penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional manajemen puncak, serta pada tahun 2030 seluruh kendaraan operasional akan dikonversi menjadi kendaraan biodiesel dan listrik
- WIKA melakukan akreditasi untuk hutan WIKA di Gadog, Bogor, Jawa Barat.

WIKA DECARBONIZATION ROADMAP

- Use of environmentally friendly materials such as non-OPC cement, Porous Concrete (water-permeable concrete), and others
- Production of renewable energy products such as Gesits electric motors, WIKA Solar Water Heaters, photovoltaics, and others
- Solar power installation of 12.8 MWp will be carried out in 2030 including 11.5 MW in 2025
- Use of electric vehicles as operational vehicles for top management, and in 2030 all operational vehicles will be converted into biodiesel and electric vehicles
- Wika is conduction accreditation for Wika forest in Gadog, Bogor, West Java.

Peta Jalan Dekarbonisasi WIKA
Wika Decarbonization Roadmap



DERMAGA DONGGALA



Dukungan Keberlanjutan Melalui Produk

Sustainability Support Through Products

PRODUK RAMAH LINGKUNGAN OLEH WIKA BETON

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS BY WIKA BETON

Sumur Resapan Pracetak | Precast Infiltration Wells

Gambar 1 dan 2.
Sumur Resapan
Tipe Buis
Figures 1 and 2. Buis
Type Infiltration Well



Gambar 3 dan 4.
Produk Sumur
Resapan Pracetak
Tipe Segmental
Figures 3 and 4.
Segmental Type
Precast Infiltration
Well Products



Produk sumur resapan berfungsi untuk menampung air hujan dan kemudian diresapkan ke dalam tanah. Fungsi sumur resapan adalah mengurangi limpasan air hujan, menambah volume air tanah, serta mengurangi potensi genangan air dan banjir.

Infiltration well products are used to collect rainwater and then infiltrate it into the ground. The function of infiltration wells is to reduce rainwater runoff, increase the volume of groundwater, and reduce the potential for waterlogging and flooding.

Produk sumur resapan tipe buis beton diperuntukan untuk lokasi yang akses jalannya dapat dilalui oleh kendaraan berat.

Concrete buis type infiltration well products are intended for locations where the access road can be passed by heavy vehicles

Produk sumur resapan tipe segmental diperuntukan untuk lokasi yang memiliki akses jalan yang sempit dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan berat. Berat segmen produk lebih ringan sehingga dapat dipasang menggunakan tenaga manusia.

Segmental type infiltration well products are intended for locations where road access is narrow and cannot be passed by heavy vehicles. The weight of the product segment is lighter, hence can be installed using human power.

Dekarbonisasi WIKa Beton | Decarbonization of WIKa Beton



Dalam mewujudkan konsep industri hijau, WIKa Beton menjalankan program dekarbonisasi di sejumlah pabrik produk beton.

In realizing the green industry concept, WIKa Beton is implementing the decarbonization program in a number of concrete plants.

Konsep industri hijau sendiri merupakan pilar utama dari *Green Growth* yang menjadi tren Global sehingga pemerintah Indonesia menetapkan Standar Industri Hijau (SIH) melalui peraturan menteri perindustrian No.51/M-IND/PER/6/2015.

The concept of green industry itself is the main pillar of *Green Growth* that has become a global trend, leading to the establishment of Green Industry Standards (SIH) by Indonesian Government through Minister of Industry Regulation No. 51/M-IND/PER/6/2015.

Dalam mendukung industri hijau, WIKa Beton menjalankan program dekarbonisasi yang diinisiasi oleh WIKa Group dengan cara memanfaatkan energi surya sebagai energi terbarukan dalam operasional produksi di sejumlah pabrik beton, salah satunya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

To support the green industry, WIKa Beton is carrying out the decarbonization program initiated by WIKa Group by utilizing solar energy as renewable energy in the operations at a number of concrete plants, one of which is through the Solar Power Plant (PLTS).

Dalam penerapannya, Pabrik Produk Beton (PPB) Bogor dan PPB Majalengka menjadi pilot project dengan cara:

In its implementation, Bogor and Majalengka Concrete Plant (PPB) have become pilot projects by:

1. Menggunakan panel surya untuk penerangan lampu jalan dan penerangan di area stockyard pabrik beton.
2. Memasang PLTS di PPB Bogor dengan kapasitas 440 kWP dan PPB Majalengka dengan kapasitas 242 kWP.

1. Using solar panels for street lights and lighting in the concrete plant stockyard area.
2. installing PLTS at PPB Bogor with a capacity of 440 kWP and PPB Majalengka with a capacity of 242 kWP.

Harapannya, program ini dapat mengurangi emisi CO₂ dari sumber energi dan dapat mengganti sistem yang bergantung pada bahan bakar fosil dengan sumber daya rendah karbon.

The hope is that this program can reduce CO₂ emissions from energy sources and can replace systems that depend on fossil fuels with low-carbon resources.

Penggunaan Limbah Sisa Batu Bara | Utilizing Coal Waste



Penggunaan semen ramah lingkungan dilakukan dengan mencampur *Supplementary Cementitious Materials* dan Semen Portland dalam proses manufaktur atau menambahkan *Supplementary Cementitious Materials* secara terpisah sebagai bahan pensubstitusi sebagian berat semen Portland dalam campuran beton.

WIKA beton sudah menggunakan beton ramah lingkungan dengan menggunakan material *cementitious* sebagai pengganti sebagian semen dalam campuran beton seperti *fly ash* yang merupakan hasil dari limbah pembakaran batu bara dan mengganti semen OPC dengan semen PCC yang lebih ramah lingkungan. Dengan penggunaan *fly ash* dan semen PCC dapat mereduksi emisi CO2 dalam campuran beton.

Dengan program penggunaan material ramah lingkungan, pada tahun 2024 WIKA Beton telah mendapatkan sertifikasi produk ramah lingkungan berupa EPD (*Environmental Product Declaration*) yg tercantum di web Internasional.

The use of environmentally friendly cement is done by mixing *Supplementary Cementitious Materials* and Portland Cement in the manufacturing process or adding *Supplementary Cementitious Materials* separately as a substitute for part of the weight of Portland cement in the concrete mixture.

WIKA Beton has used environmentally friendly concrete by using cementitious materials as a substitute for part of the cement in the concrete mixture such as fly ash which is the result of coal combustion waste and replacing OPC cement with PCC cement that is more environmentally friendly. The use of fly ash and PCC cement can reduce CO2 emissions in the concrete mixture.

With the program of using environmentally friendly materials, in 2024 WIKA Beton has obtained an environmentally friendly product certification in the form of EPD (*Environmental Product Declaration*) which is listed on the International website.

Beton Porous | Pervious Concrete



Beton Porous | Pervious Concrete

Kegiatan CSR WIKA Beton dengan Beton Porous di SD 09 Cipinang - Cempedak
WIKA Beton's CSR Activities with Pervious Concrete at SD 09 Cipinang - Cempedak

Beton Porous/*pervious concrete* merupakan jenis beton yang memiliki pori-pori atau rongga pada struktur betonnya, sehingga memungkinkan cairan/air mengalir melalui rongga-rongga tersebut.

Keuntungan penggunaan beton porous :

1. Menangkap air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah sehingga menambah volume air tanah
2. Mengurangi area kedap air, sehingga mencegah terjadinya genangan air/banjir
3. Mengurangi volume limpasan sehingga mengurangi beban drainase (sistem drainase bisa dibuat lebih efisien)
4. Penggunaan lahan menjadi lebih efisien karena mengurangi kebutuhan kolam retensi dan sarana pengelolaan air hujan lainnya

Aplikasi penggunaan beton porous :

1. Produk pracetak untuk resapan air atau drainase seperti U-Ditch, box culvert, sumur resapan, dll
2. Area luar mall, gedung perkantoran, pekarangan rumah, dan area taman
3. Jalan-jalan perumahan
4. Trotoar untuk pejalan kaki

Pervious pavement untuk lantai parkir kendaraan dengan volume lalu lintas rendah

Pervious concrete is a type of concrete that has pores or cavities in its concrete structure, allowing liquid/water to flow through these cavities.

Advantages of using pervious concrete:

1. Captures rainwater and absorbs it into the ground, thereby increasing the volume of groundwater
2. Reduces watertight areas, thereby preventing puddles/floods
3. Reduces runoff volume, thereby reducing drainage load (drainage systems can be made more efficient)
4. Land use becomes more efficient because it reduces the need for retention ponds and other rainwater management facilities

Applications for using pervious concrete:

1. Precast products for water absorption or drainage such as U-Ditch, box culvert, absorption wells, etc.
2. Outside areas of malls, office buildings, yards, and park areas
3. Residential roads
4. Sidewalks for pedestrians

Pervious pavement for parking floors with low traffic volumes

Beton Geopolimer | Geopolymer Concrete



Beton Geopolimer merupakan Jenis beton yang tidak menggunakan semen sama sekali sebagai material pengikat (100% non semen). Material pengikat dalam campuran beton menggunakan material yang mengandung silika (Si) dan Alumunium (Al) seperti fly ash, slag, dan atau material lainnya.

Geopolymer Concrete is a type of concrete that does not use cement at all as a binding material (100% non-cement). The binding material in the concrete mixture uses materials containing silica (Si) and aluminum (Al) such as fly ash, slag, and/or other materials.

Keuntungan Beton Geopolimer :

1. Tidak menggunakan semen sama sekali (100% non semen)
2. Mereduksi 70-80% emisi CO2 dalam campuran beton jika dibandingkan dengan beton normal dengan mutu yang sama sehingga ramah lingkungan
3. Memiliki durabilitas yang lebih baik dibandingkan beton normal. Lebih tahan terhadap serangan sulfat dan alkali

Advantages of Geopolymer Concrete:

1. Does not use cement at all (100% non-cement)
2. Reduces 70-80% of CO2 emissions in the concrete mixture when compared to normal concrete with the same quality so it is environmentally friendly
3. Has better durability than normal concrete. More resistant to sulfate and alkali attacks

Kelemahan Beton Geopolimer :

1. Harga beton geopolimer jauh lebih mahal dibandingkan beton normal/ beton konvensional
2. Ketersediaan material NaOH sebagai material aktivator dalam beton geopolimer di Indonesia saat ini masih impor dari luar negeri sehingga ketersediaannya terbatas dan harganya mahal.

Disadvantages of Geopolymer Concrete:

1. The price of geopolymer concrete is much more expensive than normal concrete/conventional concrete
2. The availability of NaOH material as an activator material in geopolymer concrete in Indonesia is currently still imported from abroad so its availability is limited and its price is expensive.

PRODUK GREEN ENERGY

Zero Waste Modular oleh WIKA Gedung

Konstruksi sirkular adalah sebuah strategi dalam sektor konstruksi dimana penggunaan energi dan prinsip daur ulang menjadi dasar dalam pemilihan material dan metode.

Tujuannya adalah menekan penggunaan sumber daya dalam upaya mengurangi dampak terhadap iklim dan lingkungan (*net zero emissions*).

Transisi menuju ekonomi sirkular mengacu pada :

- Reuse and Recycling
- Remanufacturing
- Efisiensi Proses Produksi

Metode konstruksi modular merupakan solusi akan permasalahan tingginya emisi yang dihasilkan di sektor konstruksi. Modular WEGE berkomitmen untuk mengembangkan metode konstruksi ini dengan tujuan *Net Zero Emissions*. Konstruksi yang berkelanjutan menjadi fokus utama Modular WEGE untuk kehidupan yang lebih baik.

GREEN ENERGY PRODUCTS

Zero Waste Modular by WIKA Gedung

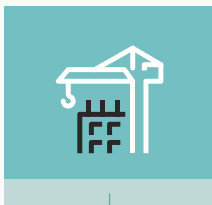
Circular construction is a strategy in the construction sector where energy use and recycling principles are the basis for selecting materials and methods.

The aim is to reduce resource use in an effort to reducing the impact on climate and the environment (*net zero emissions*).

The transition to a circular economy refers to:

- Reuse And Recycling
- Remanufacturing
- Production Process Efficiency

The modular construction method is a solution to the problem of high emissions produced in the construction sector. Modular WEGE is committed to developing this construction method with the goal of Net Zero Emissions. Sustainable construction is the main focus of Modular WEGE for a better life.



Offsite Construction
Offsite Construction

- Kualitas lebih stabil
- Safety meningkat
- Proses pekerjaan lebih terukur & minim gangguan
- More stable quality
- Safety increases
- More measurable work processes with minimal disruption



Efisiensi Energi
Energy Efficiency

- Masa konstruksi cepat
- Tidak banyak alat berat, energi lebih rendah
- Mengurangi emisi gas rumah kaca 17-30%
- Fast construction period
- Less heavy equipment, lower energy
- Reduce greenhouse gas emissions by 17-30%



Ramah Lingkungan
Environmentally friendly

- Minim limbah & sisa material
- Minim polusi suara & udara
- Dapat dipindah & digunakan kembali
- Minimal waste & remaining materials
- Minimal noise & air pollution
- Can be moved & reused



Lokal
Local

- Karya anak bangsa (tim R&D internal WEGE)
- Mengutamakan pemilihan material lokal
- Difabrikasi di *workshop* WEGE sendiri
- The work of children of the nation (WEGE's internal R&D team)
- Prioritize the selection of local materials
- Fabricated in WEGE's own workshop

Metode konstruksi ramah lingkungan yang merupakan salah satu solusi pengurangan penggunaan emisi di seluruh lini prosesnya mulai dari produksi/prefabrikasi sampai proses pemasangan di lokasi.

Menurut studi oleh para akademisi dari University of Cambridge dan Edinburgh Napier University, **Konstruksi Modular menghasilkan CO2 41-45% lebih rendah dibanding metode konvensional** dalam membangun rumah.

Mengapa kita harus mengubah cara kita membangun?

1. Perubahan Iklim
Suhu rata-rata permukaan bumi tahun 2023 meningkat 1,5°C yang berdampak pada kekeringan, kelangkaan air, kebakaran, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, bencana badai dan penurunan keanekaragaman hayati. (Sumber : news.un.org)
2. Tingginya emisi industri konstruksi
Bangunan beroperasi dan industri konstruksi menghasilkan 40% emisi CO2 global tahunan. (Sumber : architecture2030.org)
3. Tingginya sampah industri konstruksi
Sampah industri konstruksi secara global mencapai 2 miliar metrik ton/tahun. (Sumber : Global waste generation statistics & facts, 2020)

A green construction method is a solution to reduce the use of emissions throughout the entire lines/processes from production/prefabrication to the installation process on site.

According to a study by academics from the University of Cambridge and Edinburgh Napier University, **Modular construction produces 41-45% less CO2 than conventional methods** of building houses.

Why should we change the way we build?

1. Climate change
The average temperature of the earth's surface by 2023 increased by 1.5°C, which has led to droughts, water scarcity, fires, rising sea level, flooding, melting polar ice, hurricane disasters and a decrease in biodiversity. (Source: news.un.org)
2. High emissions from the construction industry
Buildings in operation and the construction industry account for 40% of global annual CO2 emissions. (Source: architecture2030.org)
3. High waste from the construction industry
The construction industry generates approximately 2 billion metric tons of waste per year globally. (Source: Global waste generation statistics & facts, 2020)



PPVC
is method, not a product

Prefabricated Prefinished Volumetric Construction



Metode konstruksi dimana material dan/atau komponen disatukan di luar lokasi sebelum dirakit pada posisi yang telah ditentukan.

1. Prefabrikasi
 2. Preassembly
 3. Modul
- Tatum (1987)

A construction method where materials and/or components are put together off-site before being assembled in a predetermined position.

1. Prefabrication
 2. Preassembly
 3. Modules
- Tatum (1987)

Konstruksi Modular menghasilkan CO2 41-45% lebih rendah dibanding metode konvensional dalam membangun rumah, menurut studi oleh para akademisi dari University of Cambridge dan Edinburgh Napier University.

Modular construction produces 41-45% less CO2 than conventional methods of building a house, according to a study by academics from the University of Cambridge and Edinburgh Napier University.

Sumber : www.sillencehurn.co.uk, www.unlocknetzero.co.uk



Modular WEGE berkomitmen untuk mengembangkan metode konstruksi ini dengan tujuan *Net Zero Emissions* di 2030.

Modular WEGE is committed to developing this construction method with the goal of *Net Zero Emissions* by 2030.

Sistem Modular WEGE

Sistem konstruksi modular WIKA Gedung telah melalui serangkaian proses riset dan uji dari berbagai aspek serta merupakan karya anak bangsa yang patut dibanggakan. Proses Produksi sistem modular juga dilakukan dengan tetap mengedepankan kaidah-kaidah yang berlaku dan sudah melalui pengujian.

WEGE Modular System

WIKA Gedung's modular construction system has gone through a series of research and testing processes from various aspects and is a work of the nation that we can be proud of. The production process of the modular system is also carried out while adhering to applicable standards and has undergone testing.



Prefabrikasi berskala ISO

Nilai TKDN tinggi (SPN)

Memiliki Hak Cipta

Lulus uji teknik

Metode proses riset panjang

Divisi Modular WEGE terus berinovasi dalam mengembangkan metode-metode terbaik untuk menjawab tantangan industri konstruksi. Saat ini ada 3 sistem konstruksi modular yang sudah dikembangkan yaitu :

WEGE Modular Division continues to innovate in developing the best methods to answer the challenges of the construction industry. Currently there are 3 modular construction systems that have been developed:



MOLI (MODULAR LITE)



WG FLATPACK



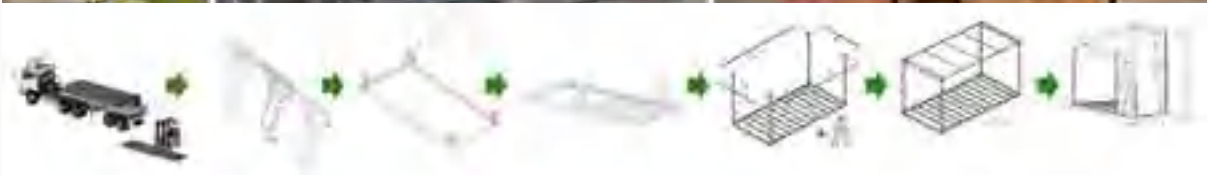
VOLUMETRIK

1. MOLI (Modular Lite) – 1D

Sistem konstruksi modular ringan untuk maksimal 2 lantai, dengan perakitan tanpa alat berat. Dikirim berupa bagian terkecil/ batang rangka.

1. MOLI (Modular Lite) – 1D

Lightweight modular construction system for up to 2 floors, in which the assembly is done without heavy equipment. Delivered in the form of the smallest parts/frames.

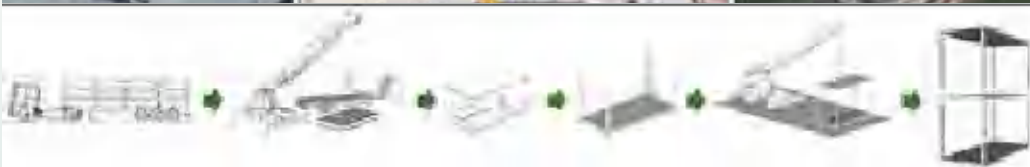


2. WG Flatpack – 2D

Sistem konstruksi modular cepat dan praktis untuk maksimal 4 lantai. Dikirim dalam bentuk panel/modul lantai, modul atap, kolom dan panel dinding.

2. WG Flatpack – 2D

Fast and practical modular construction system for up to 4 floors. Delivered in the form of floor panels/modules, roof modules, columns and wall panels.



3. Volumetrik – 3D

Sistem konstruksi modular yang 90% dipabrikasi, untuk bangunan 5 lantai ke atas. Studi saat ini sudah mencapai 14 lantai. Dikirim dalam bentuk 3D satu ruangan lengkap dengan interior dan instalasi MEP terpasang.

3. Volumetric – 3D

A 90% prefabricated modular construction system for buildings of 5 floors and above. Current studies have reached 14 floors. Delivered in 3D form of one room complete with interior and MEP installations installed.



Modular Circular

Divisi Modular WEGE kolaborasi dengan berbagai pihak yang kompeten di bidangnya baik dari segi R&D, Pemasaran, substitusi material, maupun publikasi dan *sharing knowledge* dalam rangka *campaign eco-friendly construction*.

Modular Circular

WEGE Modular Division collaborates with various competent parties in their fields in terms of R&D, Marketing, material substitution, as well as publication and knowledge sharing in the context of an eco-friendly construction campaign.

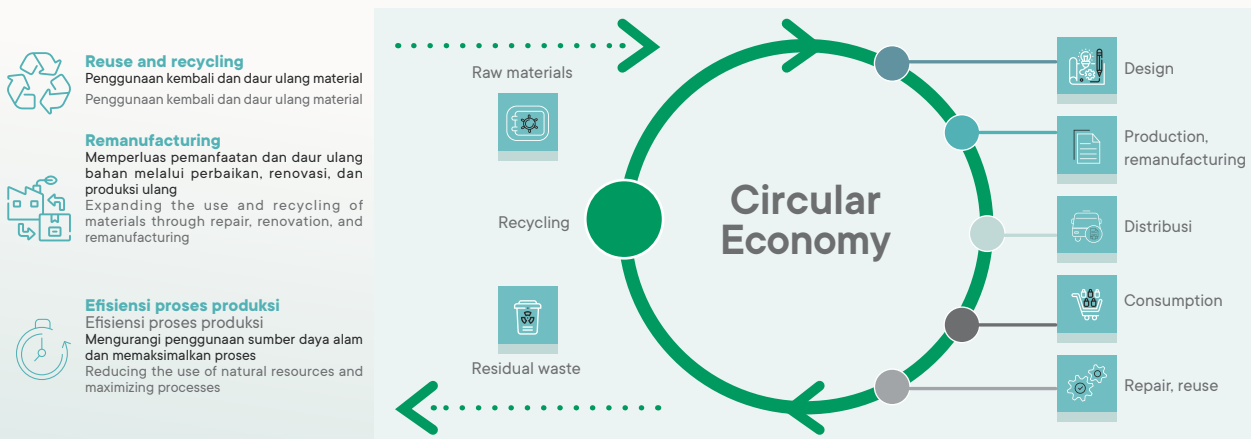


Program Modular Circular

Konstruksi sirkular adalah strategi dimana penggunaan energi dan prinsip daur ulang menjadi dasar dalam pemilihan material dan metode dengan tujuan menekan penggunaan sumber daya dalam upaya mengurangi dampak terhadap iklim dan lingkungan (*nett zero emission*).

Circular Modular Program

Circular construction is a strategy, in which energy utilization and recycling principles are the basis for selecting materials and methods with the aim of reducing resource use in an effort to reduce the impact on climate and environment (net zero emissions).



COPYRIGHT WIKA GEDUNG 2025

Program Sertifikasi NZE (WIKA GEDUNG X DEX)

NZE Certification Program (WIKA GEDUNG X DEX)

Environmental Product Declaration

Greenship Solution Endorsement

Greenship Service Quality

Greenship Netzero

Greenship New Building & Existing Building

Greenship Neighborhood

Dedicated Corporate member

- Become Corporate member of GBC Indonesia
- Actively sponsoring & participate in GBC-I events/product/training
- Has been certifying many of its corporate buildings with Greenship

Corporate Commitment Signatory Towards Net Zero

- Having a clear roadmap and strategy towards Net Zero, GBCI will facilitate the corporation to sign the Corporate Commitment towards Net Zero to World GBC.

ESG Rating

- Provides measurable & strong evidence to create a sound ESG Report and increase ESG score



Lighter Building

Dengan perencanaan optimal dan pemilihan material yang tepat, berat bangunan lebih ringan. With optimal planning and proper material selection, the building weight is lighter.



Lighter Foundation

Dengan bangunan yang ringan berakibat pada desain pondasi yang lebih ringan pula. With a lightweight building, the foundation design will also be lighter.



Efficient

Efisiensi penggunaan material yang berdampak pada berkurangnya emisi. Efficient use of materials resulting in reduced emissions.

Less Steel

Less Concrete

Climate Protection

Jenis Bangunan Building Type	Rumah Sakit 1 Lantai Hospital 1 Floor			Rumah Sakit 2 Lantai Hospital 2 Floors			Paddock 3 Lantai Paddock 3 Floors			HPK 4 Lantai HPK 4 Floors			Rusun 12 Lantai Flat 12 Floors			
	Beton Concrete	Baja Steel	Modular Modular	Beton Concrete	Baja Steel	Modular Modular	Beton Concrete	Baja Steel	Modular Modular	Beton Concrete	Baja Steel	Modular Modular	Beton Concrete	Baja Steel	Modular Modular	
Luas Lantai Floor Area	2400,08			4311,18			12644,22			1622,4			14231,28			
Berat Bangunan (ton) Building Weight (tons)	1422,7	952,31	208,38	2228,06	1700,66	757,08	9679,34	3104,96	770,43	1125,39	922,76	306,91	11555,46	9235,27	9682,06	
Berat Baja (ton) Steel Weight (tons)	51,24	174,83	131,73	97,61	264,18	188,45	233,90	769,04	528,36	36,912	105,35	69,35	303,84	2231,67	1311,76	
Pondasi Foundation	Beton (m3) Concrete (m3)	720,02	720,02	480,06	1430,44	1430,44	953,63	1643,34	1643,34	894,52	443,716	443,716	354,97	2005,08	1225,22	984,48
	Tulangan (ton) Reinforcement (ton)	86,40	86,40	57,61	171,65	171,65	114,44	197,20	197,20	107,34	53,25	53,25	42,60	13459,77	7849,31	4745,54

Indonesia : How optimised design in the construction industry can reduce emissions

The production and processing of metals, minerals and other materials is a major contributor to climate change. In fact, according to the International Resource Panel (IRP), it accounts for almost one quarter of the world's greenhouse gas emissions. Going beyond energy efficiency and using materials more efficiently offers both environmental and economic benefits – and it's key to achieving the goals of the Paris Agreement.

In its 2020 report on resource efficiency and climate change, IRP set out seven strategies that public and private sector stakeholders can use to achieve greater material efficiency and faster climate action



Using less material by design



Fabrication yield improvements



Product lifetime extension



Material Substitution



Enhanced end-of-life recovery and recycling of materials



More intensive use



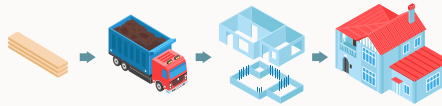
Recovery, remanufacturing & reuse of components

The Indonesian company WIKI Gedung reduces emissions by using less materials in their adapted construction process. While this is a small contribution in the grand scheme of things, the combined efforts of enterprises play a major role in addressing climate change



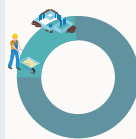
Using less material by design

WIKI Gedung uses a modular system in which many building parts are manufactured off-site and assembled on-site. This method saves up to 90% of time and uses less concrete and steel. This in turn means that the building foundations have to support less weight and therefore need less concrete as well. The lighter modules requires less steel, while still guaranteeing a safe and stable structure complies with standard building codes.



An example of modular construction

In a two-storey hospital build by WIKI Gedung, the modular construction method saved around one third of the concrete used for the foundation of the structure, as well as 28% of steel compared to a conventional building. This avoided 3551 CO₂e during construction – as important contribution to climate protection.



Savings through material efficiency in the construction of a two-storey building



-335 t CO₂e'

Tackle Climate Change..
.. by making material efficiency part of your climate strategies.

Studi dilakukan di 4 negara :

Argentina

Argentina's Institute for Standardisation and Certification (CIRSOC)

How recycling of material in the construction industry can reduce emissions

Savings 21000 t CO₂e

Indonesia

WIKI Gedung (Modular)

How optimized design in the construction industry can reduce emissions

Savings 355 t CO₂e

Mexico

Rusave

How optimized design in the leather industry can reduce emissions

Savings 3900 kg CO₂e

Ecuador

CKG Brand

How optimized design in the leather industry can reduce emissions

Savings 3900 kg CO₂e

- Metode konstruksi modular merupakan solusi akan permasalahan tingginya emisi yang dihasilkan di sektor konstruksi.
- Modular WEGE berkomitmen untuk mengembangkan metode konstruksi ini dengan tujuan *Nett Zero Emissions* di 2030.
- Konstruksi yang berkelanjutan menjadi fokus utama Modular WEGE untuk kehidupan masa depan yang lebih baik.
- The modular construction method is a solution to the problem of high emissions produced in the construction sector.
- Modular WEGE is committed to developing this construction method with the goal of *Nett Zero Emissions* by 2030.
- Sustainable construction is the main focus of Modular WEGE for a better future life.

Innovation for Energy Sustainability oleh WIKA Industri Energi

Inovasi untuk Keberlanjutan Energi oleh WIKA Industri Energi



WIKA Industri Energi menghadirkan berbagai inovasi Water Heater yang efisien dan ramah lingkungan. **Electric Water Heater** dirancang dengan konsumsi daya rendah untuk mendukung efisiensi energi rumah tangga. **Smart Water Heater** memanfaatkan energi matahari dan teknologi IoT untuk penghematan energi serta optimalisasi konsumsi. **Aircon Water Heater** menggunakan panas buangan AC tanpa tambahan energi, sementara **Heat Pump Water Heater** menawarkan efisiensi tinggi dengan teknologi sirkulasi gas refrigerant. Semua solusi ini mendukung pengurangan emisi karbon dan transisi energi berkelanjutan, sejalan dengan prinsip keberlanjutan global.

WIKA Industri Energi presents various efficient and environmentally friendly Water Heater innovations. **Electric Water Heater** is designed with low power consumption to support household energy efficiency. **Smart Water Heater** utilizes solar energy and IoT technology for energy savings and consumption optimization. **Aircon Water Heater** uses AC waste heat without additional energy, while **Heat Pump Water Heater** offers high efficiency with refrigerant gas circulation technology. All of these solutions support carbon emission reduction and sustainable energy transition, in line with global sustainability principles.



Menghadirkan inovasi Photovoltaic sebagai solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan. **PLTS** memanfaatkan fotovoltaik untuk listrik bersih di berbagai skala, mendukung diversifikasi energi nasional dan transisi ke energi bersih. **LTSHE** menyediakan penerangan untuk daerah terpencil dengan panel surya, mendukung akses energi berkelanjutan. **PJUTS** dan **PJU SE** menawarkan penerangan jalan hemat energi berbasis surya, dengan teknologi LED yang efisien untuk mengurangi emisi karbon dan biaya operasional, sejalan dengan visi WIKA dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan.

Presenting Photovoltaic innovation as an environmentally friendly renewable energy solution. **PLTS** utilizes photovoltaics for clean electricity at various scales, supporting national energy diversification and the transition to clean energy. **LTSHE** provides lighting for remote areas with solar panels, supporting sustainable energy access. **PJUTS** and **PJU SE** offer energy-efficient solar-based street lighting, with efficient LED technology to reduce carbon emissions and operational costs, in line with WIKA's vision in developing sustainable infrastructure.



WIKA Battery mendukung transisi energi berkelanjutan dengan penyimpanan energi yang efisien. Produk ini digunakan pada kendaraan listrik untuk mobilitas rendah karbon, sebagai penyimpanan portabel untuk akses energi di lokasi terpencil, dan dalam sistem *Energy Storage System* (ESS) untuk menyimpan serta menstabilkan energi terbarukan, mendukung integrasi energi bersih dalam jaringan listrik nasional.

WIKA Battery supports sustainable energy transition with efficient energy storage. The product is used in electric vehicles for low-carbon mobility, as portable storage for energy access in remote locations, and in Energy Storage Systems (ESS) to store and stabilize renewable energy, supporting the integration of clean energy into the national electricity grid.



Sustainable Mobility oleh WIKA Industri Manufaktur

GESITS adalah sepeda motor listrik yang dirancang oleh WIKA Industri Manufaktur untuk mendukung mobilitas berkelanjutan dengan efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon. Kendaraan ini menawarkan performa tinggi, fitur modern, dan menggunakan sebagian besar komponen lokal, mencerminkan komitmen terhadap transportasi ramah lingkungan serta penguatan industri dalam negeri.

Sustainable Mobility by WIKA Industri Manufaktur

GESITS is an electric motorcycle designed by WIKA Industri Manufaktur to support sustainable mobility with energy efficiency and reduced carbon emissions. This vehicle offers high performance, modern features, and uses most local components, reflecting a commitment to environmentally friendly transportation and strengthening domestic industry.

PRODUK INOVATIF GREEN ENERGY

INNOVATIVE GREEN ENERGY PRODUCTS



Solar Water Heater



Perumahan Citra Raya Sentul Citra Raya Sentul Housing

Sentul – Bogor

Terpasang kapasitas 130L dengan jumlah 263 unit

- Pemanas Air Tenaga Surya yang ramah lingkungan dengan ketersediaan energi yang stabil, hemat energi, efisien dan pemeliharaan yang minimal
- Kapasitas tersedia 100L, 130L, 150L, 180L dan 300L

Sentul – Bogor

Installed capacity of 130L with a total of 263 units

- Eco-friendly Solar Water Heater with stable energy availability, energy saving, efficient and minimal maintenance
- Available capacities of 100L, 130L, 150L, 180L and 300L



Heat Pump Water Heater



Hotel Ambarukmo Ambarukmo Hotel

Yogyakarta

Terpasang kapasitas 36 Kwp dengan jumlah 9 unit

- Efisiensi energi tinggi, biaya operasional rendah (konsumsi listrik hanya 25%-30%)
- Performa konsisten untuk kebutuhan pemanas air yang besar
- Ramah lingkungan dengan memanfaatkan panas udara luar

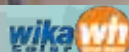
Yogyakarta

Installed capacity of 36 Kwp with 9 units

- High energy efficiency, low operational costs (electricity consumption only 25%-30%)
- Consistent performance for large water heating needs
- eco-friendly by utilizing outside air heat



Electric Water Heater



Ibu Kota Negara (IKN), Gedung Rusun Paspampers National Capital (IKN), Paspampers Flats Building

Kalimantan

Terpasang Kapasitas 30 L dengan jumlah 540 unit

- Manajemen energi yang dapat menjamin ketersediaan air panas cepat dengan daya rendah (hemat energi listrik)
- Efisiensi biaya awal
- Kapasitas tersedia 15L & 30L

Kalimantan

Installed Capacity 30 L with a total of 540 units

- Energy management that can guarantee the availability of fast hot water with low power (saving electricity)
- Initial cost efficiency
- Available capacity 15L & 30L



Aircon Water Heater



Apartemen Tamansari Iswara Tamansari Iswara Apartment

Jakarta

Terpasang Kapasitas 50 L dengan jumlah 300 unit

- Sistem pemanas air yang memanfaatkan panas dari buang unit pendingin AC
- Pemanas air tanpa biaya energi
- Ramah lingkungan
- Kapasitas 50L & 100L

Jakarta

Installed Capacity 50 L with a total of 300 units

- Water heating system that utilizes heat from exhaust from AC cooling units
- Water heater without energy costs
- Environmentally friendly
- Capacity 50L & 100L

Internalisasi Budaya Integritas dan Etika Bisnis

Internalization of Integrity Culture and Business Ethics

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) memahami bahwa integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap hukum, tetapi merupakan bagian fundamental dari strategi bisnis yang mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan, baik dari segi reputasi, operasional, maupun keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, WIKA telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk memastikan nilai-nilai integritas terinternalisasi dalam seluruh aspek bisnis perusahaan.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) understands that integrity is not just compliance with the law but a fundamental part of the business strategy that can bring positive impacts for the Company, both in terms of reputation, operations, and long-term sustainability. Therefore, WIKA has implemented a number of policies to ensure that integrity values are internalized in all aspects of the Company's business.



Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, WIKA telah menyusun dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*). Pedoman GCG berfungsi sebagai panduan utama dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dokumen ini memberikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di dalam perusahaan agar setiap keputusan bisnis yang diambil selaras dengan standar tata kelola yang baik dan mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Sementara itu, Pedoman Etika dan Perilaku memastikan bahwa seluruh karyawan WIKA mematuhi standar moral dan etika dalam menjalankan tugasnya. Dokumen ini mencakup pedoman perilaku yang harus dijalankan oleh setiap individu di dalam perusahaan, mulai dari kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam pengambilan keputusan, hingga pencegahan konflik kepentingan. Dengan adanya dua pedoman ini, WIKA berupaya untuk menanamkan budaya integritas sebagai fondasi utama dalam setiap proses bisnisnya.

As a concrete manifestation of this commitment, WIKA has prepared and applied the Code of Good Corporate Governance (GCG) and Code of Conduct. The Code of GCG serves as the primary guideline in conducting business in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. This document provides direction for all stakeholders in the Company, ensuring that every business decision taken is in line with good governance standards and supports sustainable long-term growth. Meanwhile, the Code of Conduct ensures that all WIKA People comply with moral and ethical standards in carrying out their duties. This document includes behavioral guidelines that must be carried out by every individual in the Company, ranging from compliance with regulations, transparency in decision-making, to preventing conflicts of interest. With these two guidelines, WIKA strives to instill a culture of integrity as the main foundation in every business process.

PILAR TATA KELOLA DALAM HOUSE OF SUSTAINABILITY WIKA

Integritas juga telah menjadi fokus utama WIKA dalam keberlanjutan perusahaan ke depan, sebagaimana tercantum dalam pilar tata kelola dalam *House of Sustainability* WIKA. Pilar ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk etika bisnis, pengadaan yang bertanggung jawab, serta inklusivitas pemangku kepentingan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi keberlanjutan perusahaan. Dengan mengintegrasikan integritas ke dalam aspek keberlanjutan, WIKA memastikan bahwa seluruh kebijakan dan proses bisnis yang dijalankan tidak hanya mematuhi standar tata kelola terbaik, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan jangka panjang yang berkelanjutan.

GOVERNANCE PILLARS IN WIKA'S HOUSE OF SUSTAINABILITY

Integrity has also become WIKA's main focus in the Company's future sustainability, as stated in the Governance pillars in WIKA's House of Sustainability. This pillar emphasizes that good governance principles, including business ethics, responsible procurement, and stakeholder inclusiveness, are an integral part of the Company's sustainability strategy. By integrating integrity into sustainability aspects, WIKA ensures that all policies and business processes carried out do not only comply with the best governance standards, but also support the achievement of sustainable long-term goals.

<p>Skor/Score</p> <p>95,116</p>	<p>Kategori/Category</p> <p>“SANGAT BAIK” “VERY GOOD”</p>
<p>Skor/Score</p> <p>94,02</p>	<p>Kategori/Category</p> <p>“SANGAT BAIK” “VERY GOOD”</p>
<p>Skor/Score</p> <p>87,60</p>	<p>Kategori/Category</p> <p>“SANGAT TERPERCAYA” “THE MOST TRUSTED COMPANY”</p>

Upaya WIKA dalam menginternalisasi prinsip integritas juga tercermin dari pencapaian perusahaan dalam berbagai penilaian *Good Corporate Governance* (GCG). Pada tahun 2022, hasil *Self-Assessment* Implementasi GCG yang telah diverifikasi oleh BPKP menunjukkan bahwa WIKA memperoleh skor 95,116 dengan kategori “Sangat Baik”. Selain itu, dalam *Asean Corporate Governance Scorecard* yang dilakukan oleh Indonesian *Institute for Corporate Directorship* (IICD), WIKA memperoleh skor 94,02 dengan kategori “Level 4 - Sangat Baik”, yang mencerminkan standar tata kelola yang tinggi di lingkungan perusahaan. WIKA juga mendapatkan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan kategori “Sangat Terpercaya” atau “The Most Trusted Company”, yang menunjukkan bahwa WIKA diakui sebagai perusahaan yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi dalam aspek tata kelola dan etika bisnis.

WIKA's efforts in internalizing the principle of integrity are also reflected in the Company's achievements in various Good Corporate Governance (GCG) assessments. In 2022, the results of GCG Self-Assessment verified by BPKP showed that WIKA scored 95.116 in “Very Good” category. In addition, in the Asean Corporate Governance Scorecard conducted by the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), WIKA scored 94.02 in “Level 4 - Very Good” category, reflecting high governance standards in the corporate environment. WIKA also received the Corporate Governance Perception Index (CGPI) in “The Most Trusted Company” category, indicating that WIKA is recognized as a company that has a high level of trust in the governance and business ethics aspects.

Lebih lanjut, implementasi integritas dalam tata kelola perusahaan yang kuat telah memberikan dampak positif terhadap reputasi WIKA. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diterima, di antaranya peringkat 2nd – *The Best Indonesia GCG for Public Company 2023* dari The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) serta penghargaan Predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat RI tahun 2023. Tidak hanya itu, WIKA juga telah memperoleh berbagai apresiasi di bidang tata kelola dan lingkungan, seperti penghargaan di ajang *Indonesia Most Trusted Companies 2024* serta peringkat pertama dalam *The Best Indonesia GCG Award-VI-2021* untuk kategori *Building & Construction - SOE and Subsidiaries Listed Company* dengan predikat "Gold". Pencapaian ini membuktikan bahwa implementasi integritas dalam strategi bisnis tidak hanya menjadi sebuah kepatuhan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi WIKA dalam mempertahankan kredibilitasnya di industri konstruksi serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan berbagai kebijakan, pencapaian, dan penghargaan tersebut, WIKA terus menunjukkan komitmennya untuk menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan bisnis. Budaya tata kelola yang kuat tidak hanya menjaga kepercayaan *stakeholder* tetapi juga memastikan bahwa WIKA dapat terus beroperasi dengan prinsip yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Furthermore, the implementation of integrity in strong corporate governance has had a positive impact on WIKA's reputation. This is proven by the variety of awards that have been received, including the 2nd rank - *The Best Indonesia GCG for Public Company 2023* from The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) and the Informative Public Agency Predicate award from the Indonesian Central Information Commission in 2023. Not only that, WIKA has also received a number of appreciations in the fields of governance and the environment, such as awards at the *Indonesia Most Trusted Companies 2024* event and first place in *The Best Indonesia GCG Award-VI-2021* for the *Building & Construction - SOE and Subsidiaries Listed Company* category with the predicate "Gold". These achievements prove that the implementation of integrity in business strategy is not merely a form of compliance, but also provides added value for WIKA in maintaining its credibility in the construction industry and supporting sustainable growth.

With these policies, achievements, and awards, WIKA continues to demonstrate its commitment to making integrity the main foundation in running a business. A strong governance culture does not only sustain stakeholder trust but also ensures that WIKA can continue to operate with transparent, accountable, and sustainable principles.

Inisiatif Penguatan Governansi WIKA di 2024

WIKA Governance Strengthening Initiative in 2024

Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi WIKA dalam memperkuat tata kelola perusahaan sebagai bagian dari perjalanan menuju penyehatan WIKA. Dalam fase perbaikan dan stabilisasi ini, WIKA mengarahkan seluruh sumber daya dan inovasi untuk membangun fondasi tata kelola yang lebih kokoh dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal.

Sejalan dengan fase ini, WIKA telah mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis yang terukur untuk memperkuat struktur tata kelola. Salah satu langkah utamanya adalah melakukan pengembangan digitalisasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam kegiatan bisnis WIKA secara terintegrasi mulai dari proses pengadaan proyek yang dirancang untuk menciptakan rantai pasok yang lebih transparan, responsif, dan terintegrasi, monitoring proses bisnis yang memberikan visibilitas penuh terhadap progres proyek secara *real-time*, hingga proses monitoring dan evaluasi yang lebih responsif dan transparan guna meningkatkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan praktik yang beretika di seluruh lini perusahaan.

Selain itu, dalam aspek manajemen risiko, WIKA mengadopsi pendekatan *four eyes principle*, memastikan bahwa setiap keputusan penting melewati proses evaluasi ganda untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Sistem ini diperkuat dengan penerapan *three lines of defense* model, sebagai sistem yang mencakup pengawasan dan perkuatan dari penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Lebih lengkapnya Berikut adalah rincian inisiatif perkuatan tata Kelola Perusahaan yang telah dilaksanakan WIKA di tahun 2024 :

1. Perkuatan Tata Kelola terintegrasi

- Dalam surat keputusan Direksi Nomor SK.01.01/A.DIR.00022.A/2024 tanggal 29 November 2024 ditetapkan Direktur Pembina untuk setiap Anak Perusahaan dan menegaskan tugas seluruh Direksi untuk fungsi Tata Kelola Terintegrasi.
- Direksi telah menetapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01
- Tahun 2024 telah dilakukan penyempurnaan Struktur Tata Kelola Terintegrasi dengan menunjuk Direktur Keuangan, *Human Capital*, Keuangan dan Risiko Anak Perusahaan sebagai Direktur Penanggung Jawab dan Sekretaris Perusahaan sebagai Koordinator Tata Kelola Terintegrasi Anak Perusahaan.
- Telah dilaksanakan pertemuan dalam rangka sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-QM-01.01 pada tanggal 22 Januari 2024 yang diikuti oleh seluruh pengurus Anak Perusahaan termasuk Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

The year 2024 is an important milestone for WIKA in strengthening corporate governance as part of the journey towards WIKA's restructuring. In this improvement and stabilization phase, WIKA directs all resources and innovations to build a stronger governance foundation in facing internal and external challenges.

In line with this phase, WIKA has implemented various measurable strategic initiatives to strengthen the governance structure. One of the main steps is to develop digitalization to improve accuracy and efficiency in WIKA's business activities in an integrated manner, starting from the project procurement process designed to create a more transparent, responsive and integrated supply chain, monitoring business processes that provide full visibility of project progress in real-time, to a more responsive and transparent monitoring and evaluation process to improve effective supervisory mechanisms to ensure ethical practices throughout the Company.

In addition, in the risk management aspect, WIKA adopts the four eyes principle approach, ensuring that every important decision goes through a double evaluation process to minimize risk and improve decision-making accuracy. This system is strengthened by the implementation of the three lines of defense model, as a system that includes supervision and reinforcement of the implementation of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. In more detail, here are the details of the Corporate Governance strengthening initiatives carried out by WIKA in 2024:

1. Strengthening integrated Governance

- In the decree of Board of Directors Number SK.01.01/A.DIR.00022.A/2024 dated November 29, 2024, a Supervisory Director is appointed for each Subsidiary and confirms the duties of the entire Board of Directors for the Integrated Governance function.
- Board of Directors has established an Integrated Governance Policy as Document Number WIKA-SUB-KP.01.01 and Guidelines for Subsidiary Management Principles and Integrated Governance as Document Number WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01.
- In 2024, the Integrated Governance Structure has been improved by appointing the Director of Finance, Human Capital, Finance and Risk of Subsidiary as the Director in Charge and the Corporate Secretary as the Coordinator of Integrated Governance of Subsidiary.
- A meeting has been held in order to socialize the Guidelines for Subsidiary Management Principles and Integrated Governance Number WIKA-SUB-QM-01.01 on 22 January 2024 which was attended by all management of Subsidiaries including Members of Integrated Governance Committee.

- Direksi WIKA selaku Pemegang Saham Mayoritas dan Pengendali kemudian dalam periode Februari – Juni 2024 melakukan proses ratifikasi Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan melalui RUPS Tahunan dan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat
- Ratifikasi Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah seluruhnya selesai pada bulan Juni 2024.
- Telah dilakukan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi program Tata Kelola Terintegrasi di WIKA Group pada tanggal 17 Oktober 2024 dan 16 Desember 2024 yang diikuti oleh seluruh Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris Induk dan Direktur Pembina Anak Perusahaan.
- Telah dilaksanakannya Tata Kelola Terintegrasi pada semester II di tahun 2024 dengan rencana program kerja Tata Kelola Terintegrasi di setiap fungsi/ aspek yang meliputi fungsi/ aspek Internal Audit, fungsi/ aspek Manajemen Risiko, fungsi/ aspek *Finance*, fungsi/ aspek Sinergi Bisnis, fungsi/ aspek Pengadaan, fungsi/ aspek *Human Capital*, fungsi/ aspek *Corporate Secretariat*, fungsi/ aspek Legal, fungsi/ aspek CQHSE, dan fungsi/ aspek *Information Technology*.
- Then in the period February - June 2024, Board of Directors of WIKA as the Major and Controlling Shareholder carried out the ratification process of the Subsidiary Management Guidelines through the Annual GMS and Shareholder Decree in lieu of the Meeting.
- Ratification of the Subsidiary Management Guidelines by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk has been fully completed in June 2024.
- Integrated Governance Committee Meetings have been held to monitor and evaluate the Integrated Governance program in WIKA Group on October 17, 2024 and December 16, 2024, which were attended by all Integrated Governance Committee Members, Parent Board of Commissioners and Subsidiary Supervisory Directors.
- Integrated Governance has been implemented in the second semester of 2024 with an Integrated Governance work program plan in each function/aspect which includes Internal Audit function/aspect, Risk Management function/aspect, Finance function/aspect, Business Synergy function/aspect, Procurement function/aspect, Human Capital function/aspect, Corporate Secretariat function/aspect, Legal function/aspect, CQHSE function/aspect, and Information Technology function/aspect.

2. Penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

- Tujuan SMAP adalah membantu organisasi mencegah, mendeteksi dan menangani penyuapan dan komitmen sukarela yang sesuai dengan aktivitas dalam sistem manajemen.
- Telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan persyaratan ISO 37001:2016 dengan mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku tentang suap dan korupsi dengan melibatkan seluruh pegawai dalam mendeteksi dan menanggapi penyuapan serta melakukan peningkatan secara berkelanjutan.
- Memiliki kebijakan Sistem manajemen Anti Penyuapan *Policy of Anti Bribery Management System* PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- Telah menetapkan wewenang dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan sesuai dengan surat keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk nomor: SK.01.01/A.DIR.00006/2023
- Memiliki program kerja SMAP yang terdiri dari: Pelatihan Awareness ISO 37001:2016, Sosialisasi SMAP ke internal perusahaan, *vendor*, *owner*/ pelanggan. Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai, uji kelayakan personil, *vendor* dan proyek/ transaksi yang sedang berjalan, pemantauan *Whistle Blowing System* (WBS), audit internal SMAP, rapat tinjauan FKAP, tinjauan manajemen SMAP serta tinjauan Dewan Pengarah.

3. Pengelolaan Laporan Pelanggaran pada Whistle Blowing System (WBS)

- Tujuan dari WBS adalah menyediakan media pelaporan bagi pihak internal apabila mengetahui adanya pelanggaran atau penyuapan tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*)
- Menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang berlaku untuk seluruh Unit Kerja dan pegawai PT Wijaya Karya (Persero) Tbk serta seluruh *stakeholder* Perseroan.

2. Implementation of ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System (ABMS)

- The purpose of SMAP is to help organizations prevent, detect and address bribery and voluntary commitments in accordance with the activities in the management system.
- Has implemented an Anti-Bribery Management System in accordance with the requirements of ISO 37001:2016 by complying with applicable laws and regulations on bribery and corruption by involving all employees in detecting and responding to bribery and making continuous improvements.
- Has a policy of Anti Bribery Management System Policy of Anti Bribery Management System PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- Has determined the authority and independence of Anti-Bribery Compliance Function in accordance with the joint decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk number: SK.01.01/A.DIR.00006/2023
- Has a SMAP work program consisting of: ISO 37001:2016 Awareness Training, SMAP Socialization to internal companies, vendors, owners/customers, Signing of integrity pact of all employees, due diligence of personnel, vendors and ongoing projects/transactions, monitoring of Whistle Blowing System (WBS), SMAP internal audit, FKAP review meeting, SMAP management review and Governing Board review.

3. Management of Violation Reports on the Whistle Blowing System (WBS)

- The purpose of the WBS is to provide a reporting medium for internal parties if they are aware of violations or bribery, the availability of an early warning system.
- Implement a violation reporting system that applies to all Work Units and employees of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and all stakeholders of the Company.

- Memiliki lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh sistem pelaporan pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perseroan yang meliputi: Penyuaan (Terintegrasi dengan iWeb KPK), Penyalahgunaan wewenang, Penyelewengan/ pelanggaran/ penyimpangan dan pedoman etika dan perilaku perusahaan (*Code of Conduct*) serta *Harassment*
- Hasil laporan WBS pada tahun 2024 terdapat 17 (tujuh belas) laporan pelanggaran dengan 11 (sebelas) laporan pengaduan ditolak karena tidak memiliki cukup bukti untuk dilakukan pemrosesan dan 6 (enam) pengaduan telah ditindaklanjuti.

4. Penilaian ICORPAX oleh BPKP

- Tujuan dari penilaian ICORPAX adalah untuk mengukur akuntabilitas koperasi sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan (KNYD) dalam rangka mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN
- ICORPAX merupakan instrumen yang menghasilkan rancangan pengukuran yang mencakup seluruh parameter pengukuran individual atas peran BUMN sebagai korporasi milik negara
- Telah melaksanakan pencapaian penilaian ICORPAX pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun 2024 atas tahun buku 2023 yang dilakukan oleh BPKP perwakilan provinsi DKI Jakarta dengan hasil sebesar 79,42% dalam kategori BAIK
- Telah melaksanakan Penilaian yang mencakup 5 dimensi antara lain: Akuntabilitas korporasi pada pembangunan nasional, Akuntabilitas korporasi pada keuangan negara, kepatuhan dan efektivitas operasional, Efektivitas sistem tata kelola korporasi dan Efektifitas pengendalian *Fraud*.

5. Penerapan WIKA *Integrated Smart E-Procurement* (WISE)

WISE adalah sistem e-Procurement yang diterapkan oleh PT Wijaya Karya (WIKA) untuk mendigitalisasi proses pengadaan barang dan jasa secara *end-to-end*. Sistem ini terintegrasi dengan sistem ERP perusahaan, yaitu SAP, serta aplikasi pendukung lainnya seperti *Vendor Management System* (VMS) dan *Human Capital Management System* (HCMS). WISE dirancang untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi seluruh proses pengadaan, mulai dari kualifikasi vendor, proses tender, hingga pembuatan kontrak atau *Purchase Order* (PO).

Tujuan Penerapan WISE

- Mempercepat Proses Pengadaan: Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa.
- Mengurangi Ketergantungan pada Dokumen Fisik dan Proses Manual: Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi kesalahan dan inefisiensi.
- Meningkatkan Transparansi: Setiap tahapan proses pengadaan dapat dipantau secara *real-time*, mengurangi potensi penyimpangan.
- Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan seluruh proses pengadaan sesuai dengan regulasi internal perusahaan dan peraturan pemerintah.
- Mengurangi Risiko Kesalahan Manusia: Otomatisasi proses mengurangi risiko *human error* dan penyimpangan.

- Having the scope of complaints that will be followed up by the violation reporting system is an action that can harm the Company which includes: Bribery (Integrated with iWeb KPK), Abuse of authority, Misappropriation/violation/deviation and the Company's Code of Conduct and Harassment.
- The results of WBS report in 2024 were 17 (seventeen) reports of violations with 11 (eleven) complaints rejected because they did not have enough evidence for processing and 6 (six) complaints have been followed up.

4. ICORPAX Assessment by BPKP

- The purpose of the ICORPAX assessment is to measure the accountability of cooperatives as managers of separated state assets (KNYD) in order to support development in accordance with the aims and objectives of the establishment of SOEs.
- ICORPAX is an instrument that produces a measurement design that includes all individual measurement parameters for the role of SOEs as state-owned corporations.
- Has carried out the achievement of ICORPAX assessment on PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in 2024 for fiscal year 2023 conducted by BPKP representative of DKI Jakarta province with a result of 79.42% in GOOD category.
- Has carried out an assessment that includes 5 dimensions, among others: Corporate accountability to national development, corporate accountability to state finances, compliance and operational effectiveness, effectiveness of corporate governance systems and effectiveness of fraud control.

5. Implementation of WIKA *Integrated Smart E-Procurement* (WISE)

WISE is an e-Procurement system implemented by PT Wijaya Karya (WIKA) to digitize the end-to-end procurement process of goods and services. This system is integrated with the Company's ERP system, namely SAP, as well as other supporting applications such as *Vendor Management System* (VMS) and *Human Capital Management System* (HCMS). WISE is designed to simplify and automate the entire procurement process, from vendor qualification, tender process, to contract or *Purchase Order* (PO) creation.

Objectives of WISE Implementation

- Speed up the Procurement Process: Reduce the time required to complete the procurement process.
- Reduce Reliance on Physical Documents and Manual Processes: Optimize the use of technology to reduce errors and inefficiencies.
- Increase Transparency: Every stage of the procurement process can be monitored in real-time, reducing the potential for irregularities.
- Ensure Regulatory Compliance: Ensure the entire procurement process complies with internal company regulations and government regulations.
- Reduce the Risk of Human Error: Process automation reduces the risk of human error and irregularities.

Realisasi Implementasi WISE

WISE telah diimplementasikan di seluruh proyek non-Kerja Sama Operasi (non-KSO) WIKA sejak diluncurkan pada 7 Mei 2024. Implementasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan migrasi dari sistem SAP ke WISE. Selain itu, pada 27 November 2024, WISE telah diperbarui dengan fitur-fitur tambahan untuk meningkatkan fungsionalitasnya. Beberapa fitur utama yang telah diimplementasikan meliputi:

- Tender Elektronik: Proses tender yang dilakukan secara online untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- Uskep *Online*: Proses usulan keputusan (uskep) yang dilakukan secara digital.
- Penunjukan Langsung: Mekanisme pengadaan tanpa tender untuk kasus-kasus tertentu.
- Pembelian Langsung: Proses pembelian barang/jasa dengan nilai tertentu yang dapat dilakukan secara langsung.

Manfaat yang Diharapkan :

- Efisiensi Operasional: Proses pengadaan yang lebih cepat dan akurat
- Penghematan Biaya: Mengurangi biaya administrasi dan operasional terkait pengadaan
- Peningkatan Akuntabilitas: Setiap tahapan proses dapat dilacak dan diaudit dengan mudah
- Kepatuhan Regulasi: Memastikan seluruh proses pengadaan mematuhi peraturan yang berlaku.

Dengan implementasi WISE, WIKA berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi proses bisnis, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

6. Penerapan Aplikasi Vendor Management System (VMS)

Vendor Management System (VMS) adalah sistem digital yang diterapkan oleh WIKA untuk mengelola vendor secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. VMS menggantikan proses manual dalam pemilihan, pengawasan, dan evaluasi kinerja vendor dengan sistem berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem *e-Procurement* (WISE).

VMS berperan sebagai pusat data vendor yang mendukung seluruh proses pengadaan di WIKA. Sistem ini mencakup registrasi vendor, kualifikasi, pemantauan kinerja, hingga evaluasi berkelanjutan, memastikan bahwa setiap vendor memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Tujuan Penerapan VMS

- Meningkatkan Transparansi & Akuntabilitas – Setiap proses registrasi dan evaluasi vendor dilakukan secara digital, meminimalkan potensi kecurangan dan konflik kepentingan
- Standardisasi & Pengelolaan Data Terpusat – Semua data vendor terdokumentasi dalam satu sistem, memastikan konsistensi dan akurasi
- Mempercepat Proses Registrasi & Kualifikasi – Dengan sistem digital, proses onboarding vendor menjadi lebih cepat dan efisien
- Meningkatkan Keamanan Data – Pengelolaan vendor dilakukan dalam sistem yang aman, mengurangi risiko kehilangan atau manipulasi data.

WISE Implementation Realization

WISE has been implemented in all of PT WIKA's non-Joint Operations (non-JO) projects since its launch on May 7, 2024. This implementation is carried out through several stages of migration from SAP system to WISE. In addition, on November 27, 2024, WISE has been updated with additional features to improve its functionality. Some of the main features that have been implemented include:

- Electronic Tendering: A tender process conducted online to improve efficiency and transparency.
- Online Uskep: A proposed decision (uskep) process that is conducted digitally.
- Direct Appointment: A procurement mechanism without a tender for certain cases.
- Direct Purchase: The process of purchasing goods/services with a certain value that can be done directly.

Expected Benefits:

- Operational Efficiency: Faster and more accurate procurement process
- Cost Savings: Reduced administrative and operational costs related to procurement
- Increased Accountability: Every stage of the process can be easily tracked and audited
- Regulatory Compliance: Ensure that the entire procurement process complies with applicable regulations.

With the implementation of WISE, PT Wijaya Karya is committed to continuing to innovate in improving the quality and efficiency of business processes, especially in the field of goods and services procurement.

6. Implementation of Vendor Management System (VMS) Application

Vendor Management System (VMS) is a digital system implemented by PT Wijaya Karya to manage vendors more efficiently, transparently, and accountably. VMS replaces manual processes in selecting, monitoring, and evaluating vendor performance with a digital-based system integrated with the *e-Procurement* system (WISE).

VMS acts as a vendor data center that supports the entire procurement process at PT Wijaya Karya. The system covers vendor registration, qualification, performance monitoring, and continuous evaluation, ensuring that each vendor meets the set standards.

VMS Implementation Objectives

- Increase Transparency & Accountability – Every vendor registration and evaluation process is done digitally, minimizing the potential for fraud and conflicts of interest.
- Standardization & Centralized Data Management – All vendor data is documented in one system, ensuring consistency and accuracy.
- Accelerate Registration & Qualification Process – With digital system, vendor onboarding process becomes faster and more efficient.
- Improve Data Security – Vendor management is done in a secure system, reducing the risk of data loss or manipulation.

Realisasi Implementasi VMS

VMS telah diterapkan di seluruh proses pengadaan WIKA dan menjadi sistem utama dalam pengelolaan vendor. Sejak implementasinya, VMS telah:

- Digunakan oleh seluruh vendor yang ingin bekerja sama dengan WIKA
- Terintegrasi dengan WISE untuk memastikan hanya vendor yang telah memenuhi syarat yang dapat mengikuti proses pengadaan
- Memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja vendor secara berkala melalui dashboard yang dapat diakses oleh tim terkait.

7. We-office

Digitalisasi manajemen persuratan melalui konsep berupa Platform (*web based and mobile*) pada sistem persuratan WIKA yang berorientasi pada peningkatan efektifitas dan kemudahan pada karyawan WIKA. Melalui platform ini, diharapkan dapat mengoptimalkan tata laksana pembuatan surat, *approval* sampai dengan penugasan (*disposisi*) dan keterpaduan pertukaran informasi antar unit kerja di lingkungan Perusahaan. Karena kondisi saat ini yang terjadi adalah:

- Dokumen persuratan masih dalam bentuk kertas (*Hard Copy*)
- Terjadi penumpukan kertas yang memerlukan tempat penyimpanan
- Proses *disposisi* yang memakan waktu lebih lama karena menunggu perputaran dokumen fisik
- Penandatanganan dilakukan secara basah dan dibutuhkan kehadiran fisik orang yang menandatangani dokumen tersebut.

Dengan adanya We-Office diharapkan:

- Meminimalisir penggunaan kertas di aktivitas persuratan dan menciptakan budaya *paperless* di lingkungan Perusahaan
- Menghemat tempat penyimpanan, karena dokumen digital bisa disimpan melalui penyimpanan external seperti flashdisk atau sistem penyimpanan online (*cloud*) serta memudahkan tingkat ketelusuran dokumen persuratan tersebut.

8. Penerapan sistem WIKA Document Filing System (WDFS)

Digitalisasi manajemen penyimpanan dokumen proyek dengan pengklasifikasian Dokumen secara Digital dan alih media (*Scanning* dan *Submit* ke Sistem). Sistem penyimpanan dokumen WDFS WIKA berorientasi untuk meningkatkan efektifitas dan kemudahan pada penyimpanan dokumen-dokumen yang ada di lingkungan perusahaan.

Pada saat ini kondisi teraktual adalah sebagai berikut:

- Penyimpanan dokumen yang terbagi dengan Divisi Legal sehingga dokumen yang belum waktunya dimusnahkan menjadi menumpuk, ruang dan fasilitas penyimpanan juga menjadi terbatas
- Penyimpanan dokumen masih dilakukan secara manual dan masih terjadi kesulitan dalam mencari dokumen
- Variasi kondisi dokumen yang disampaikan ke Divisi Legal dalam sistem WIKA Document Filing System (WDFS) sudah dalam kondisi terjilid sehingga menyulitkan proses *scanning*.

VMS Implementation Realization

VMS has been implemented throughout PT Wijaya Karya's procurement process and has become the main system in vendor management. Since its implementation, VMS has:

- Used by all vendors who want to work with WIKA
- Integrated with WISE to ensure only vendors who have met the requirements can participate in the procurement process
- Facilitates regular monitoring and evaluation of vendor performance through a dashboard that can be accessed by the relevant team.

7. We-office

Digitalization of correspondence management through the concept of a Platform (*web based and mobile*) on WIKA correspondence system which is oriented towards increasing effectiveness and convenience for WIKA employees. This platform is expected to be able to optimize the management of letter making, approval up to assignment (*disposition*) and integration of information exchange between work units within the Company. Because the current conditions that occur are:

- The correspondence document is still in paper form (*Hard Copy*)
- There is an accumulation of paper that requires storage
- The disposition process that takes longer because it waits for the rotation of physical documents
- Signing is done wet and requires the physical presence of the person signing the document.

With the We-Office, it is expected that:

- Minimizing the use of paper in correspondence activities and creating a *paperless* culture in the Company environment.
- Save storage space, because digital documents can be stored via external storage such as flash drives or online storage systems (*cloud*) and facilitate the level of traceability of correspondence document.

8. Implementation of WIKA Document Filing System (WDFS) system

Digitalization of project document storage management with Digital Document classification and media transfer (*Scanning and Submitting* to the System). The WDFS WIKA document storage system is oriented to increase the effectiveness and convenience of storing documents within the Company's environment.

At this time, the actual conditions are as follows:

- Document storage is divided with the Legal Division so that documents that are not yet destroyed accumulate, space and storage facilities are also limited.
- Document storage is still done manually and there are still difficulties in finding documents.
- Variations in the condition of documents submitted to the Legal Division in the WIKA Document Filing System (WDFS) system are already in a bound condition making the scanning process difficult.

Dengan adanya WDFS kondisi yang akan diharapkan adalah:

- a. Adanya tambahan infrastruktur penyimpanan dokumen yang memadai. Dengan menggunakan WDFS, perusahaan atau individu dapat menghemat ruang penyimpanan
- b. WDFS sebagai arsip digital dapat menyimpan dokumen secara elektronik agar memudahkan akses dan pengambilan kembali dokumen tersebut, serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik
- c. Dokumen yang disampaikan ke Divisi Legal, selain dalam bentuk sudah terjilid, sudah disertakan juga bentuk *soft-file* dokumen asli tersebut.

9. Audit ICOFR

Berdasarkan Laporan KAP Heliantono & Rekan (Parker Russell) No. 00151/2.0459/JT/03/0916-1/1/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, terdapat 4 (empat) hal utama yang KAP Heliantono & Rekan rekomendasikan, yakni sebagai berikut:

a. Kebijakan

- Kebijakan dan pedoman akuntansi perlu dibuat lebih spesifik berbasis aturan (*rule based*), tidak sebatas berbasis prinsip (*principle-based*) untuk meminimalisir interpretasi yang berbeda oleh pelaku kontrol atas penerapan kebijakan.
- Entitas anak perlu mengadopsi dan menyelaraskan kebijakan dan pedoman akuntansi yang disusun dan berlaku di Entitas Induk (WIKA).
- Kebijakan yang ada, terutama terkait pengendalian internal, penguatan manajemen risiko, dan Teknologi Informasi, perlu diselaraskan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- Kebijakan dan prosedur pada Entitas Anak perlu dibuat sesuai dengan ekspektasi pengendalian internal best practice dari pemetaan COBIT.

b. Prosedur

Konsultan merekomendasikan agar membuat prosedur teknis yang lebih jelas dan rinci terkait gap teridentifikasi yang disebabkan oleh belum adanya prosedur seperti *Impairment* Persediaan dan *Impairment* PDPK, atau belum rincinya prosedur teknis seperti pencadangan Tagihan Bruto dan Piutang Usaha.

c. Orang/Pelaku Kontrol

Secara reguler mengadakan sosialisasi terkait kebijakan, pedoman, prosedur, dan/atau instruksi kerja lainnya yang relevan terhadap pelaporan keuangan. Hal ini perlu dilakukan sehubungan terdesentralisasinya *key control* dan pelaku kontrol di level Divisi dan Proyek.

Pelaku kontrol dimudahkan dalam mengakses kebijakan, pedoman, prosedur, dan/atau instruksi kerja lainnya. Penguatan lini kedua dalam model tiga lini (*Three-Lines Model*) dalam melakukan monitoring terhadap gap-gap *critical* seperti pembebanan atas saldo akun-akun di neraca yang tidak memiliki manfaat di masa depan, pencegahan *cost overrun* dan pra-evaluasi atas penutupan kode proyek.

With WDFS, the conditions that will be expected are:

- a. Additional adequate document storage infrastructure. By using WDFS, companies or individuals can save storage space.
- b. WDFS as a digital archive can store documents electronically to facilitate access and retrieval of these documents, and reduce dependence on physical documents.
- c. Documents submitted to the Legal Division, apart from being in a bound form, have also included a soft-file form of the original document.

9. ICOFR Audit

Based on PAF Heliantono & Partners (Parker Russell) Report No. 00151/2.0459/JT/03/0916-1/1/XII/2023 dated December 29, 2023, there are 4 (four) main issues recommended by PAF Heliantono & Partners, as follows:

a. Policy

- Accounting policies and guidelines need to be made more specific rule-based, not limited to principle-based, to minimize different interpretations by control actors on the application of policies.
- Subsidiaries need to adopt and harmonize accounting policies and guidelines prepared and applicable in Parent Entity (WIKA).
- Existing policies, especially those related to internal control, strengthening risk management, and Information Technology, need to be harmonized with the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
- Policies and procedures at Subsidiaries need to be made in accordance with best practice internal control expectations from COBIT mapping.

b. Procedures

The consultant recommends making clearer and more detailed technical procedures related to the identified gaps caused by the absence of procedures such as Inventory Impairment and PDPK Impairment, or the lack of detailed technical procedures such as provisioning for Gross Receivables and Accounts Receivable.

c. People/Controllers

Regularly conduct socialization related to policies, guidelines, procedures, and/or other work instructions relevant to financial reporting. This needs to be done due to the decentralization of key controls and control actors at the Division and Project levels.

Control actors are facilitated in accessing policies, guidelines, procedures, and/or other work instructions. Strengthening the second line in the Three-Lines Model in monitoring critical gaps such as encumbrance of balance sheet accounts that have no future benefits, prevention of cost overruns and pre-evaluation of project code closure.

d. Sistem

Perlunya peningkatan atas sistem ERP *in house* yang masih digunakan pada tahun 2022 agar sistem secara keseluruhan dapat terintegrasi, melakukan proses *updating* secara *real time*, dapat menggantikan pengendalian internal yang selama ini dilakukan secara manual, serta adanya audit log atas koreksi-koreksi pencatatan yang terjadi. WIKA telah menerapkan SAP sejak bulan Maret 2023, WITON pada bulan Juni 2023, WIKA Realty pada bulan September 2023, dan WEGE pada bulan Oktober 2023, sehingga pengendalian internal yang sebelumnya masih bersifat manual telah terotomatisasi di dalam sistem. Entitas anak yang belum menerapkan SAP agar juga menerapkan sistem ERP berbasis *online* yang memungkinkan pengecekan secara *real time* dan penerapan pengendalian internal yang *embedded* di dalam sistem. Selain itu, modul-modul di SAP harus digunakan secara menyeluruh dan tidak diintervensi oleh jurnal manual.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pekerjaan penerapan prosedur yang disepakati (*agreed upon procedure*) terhadap evaluasi internal control dalam proses pembuatan laporan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan, Perseroan telah menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN sebagaimana Surat Perseroan Nomor : TP.03.09/A.DIR.00001/2024 tanggal 18 Januari 2024, dengan uraian laporan sebagai berikut :

- a. Konsultan telah melakukan analisis entitas signifikan termasuk evaluasi proses bisnis yang teridentifikasi atas akun-akun yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Konsultan telah melaksanakan evaluasi rancangan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dengan memahami risiko-risiko pelaporan keuangan utama yang relevan, proses bisnis secara *end-to-end*, sistem teknologi informasi yang digunakan dan pengendalian internal terkait pelaporan keuangan WIKA Grup berdasarkan dokumen-dokumen berupa kebijakan, pedoman, prosedur, instruksi kerja, dan surat edaran yang berlaku pada periode 2016 sampai dengan 2022.
- c. Untuk mempertajam pemahaman konsultan atas hal-hal pada butir 1 dan butir 2, telah dilaksanakan *inquiry* dan *workshop* dalam 41 sesi yang dimulai pada tanggal 30 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 26 Oktober 2023.
- d. Konsultan telah memperoleh dan mempelajari bukti atas pelaksanaan proses bisnis dan pengendalian internal dengan melakukan *walkthrough*. Gap pada tahap ini diidentifikasi dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengendalian internal yang memitigasi risiko yang teridentifikasi (*missing control*) atau jika pengendalian internal yang dijalankan saat ini belum mampu memitigasi potensi risiko yang ada.
- e. Berdasarkan *key control* yang telah ditentukan dan disepakati dengan manajemen, Konsultan melakukan pengujian atas pelaksanaan pengendalian/ *test of control* (ToC). ToC dilakukan atas 436 *key control* dalam 1 (satu) tahun dengan periode pengujian dari 2016 sampai dengan 2022 untuk menguji apakah pelaksanaan pengendalian internal telah berjalan efektif dan konsisten sesuai kebijakan dan pedoman yang berlaku.

d. System

The need to upgrade the in-house ERP system that is still in use in 2022 so that the overall system can be integrated, carry out the updating process in real time, can replace internal controls that have been carried out manually, and there is an audit log of recording corrections that occur. WIKA has implemented SAP since March 2023, WITON in June 2023, WIKA Realty in September 2023, and WEGE in October 2023, hence internal controls that were previously manual have been automated in the system. Subsidiaries that have not implemented SAP should also implement an online-based ERP system that allows real time checking and implementation of internal controls embedded in the system. In addition, modules in SAP must be used thoroughly and not intervened by manual journals.

As a follow-up to the results of the work on the implementation of agreed upon procedures for the evaluation of internal control in the process of preparing the financial statements of the Company and its subsidiaries, the Company has submitted a report to the Deputy of Finance and Risk Management of the Ministry of SOEs as per the Company's Letter Number: TP.03.09/A.DIR.00001/2024 dated January 18, 2024, with the following report description:

- a. The consultant has conducted an analysis of significant entities including an evaluation of the business processes identified for the accounts set out in the agreement.
- b. The consultant has carried out an evaluation of the design of internal control over financial reporting by understanding the main relevant financial reporting risks, end-to-end business processes, information technology systems used and internal controls related to WIKA Group financial reporting based on documents in the form of policies, guidelines, procedures, work instructions, and circulars that apply in the period 2016 to 2022.
- c. To sharpen the consultant's understanding of the matters in point 1 and point 2, inquiries and workshops have been carried out in 41 sessions starting on August 30, 2023 and ending on October 26, 2023.
- d. The consultant has obtained and studied evidence of the implementation of business processes and internal controls by conducting walkthroughs. Gaps at this stage are identified with the aim of knowing whether or not there are internal controls that mitigate the identified risks (*missing controls*) or if the current internal controls are not able to mitigate the potential risks.
- e. Based on the key controls that have been determined and agreed with management, the Consultant conducts tests of control (ToC). ToC is conducted on 436 key controls in 1 (one) year with a testing period from 2016 to 2022 to test whether the implementation of internal controls has been running effectively and consistently in accordance with applicable policies and guidelines.

- f. Konsultan juga melakukan revidi atas ITGC (*Information & Technology General Control*) yang ada pada WIKA Group untuk menguji keandalan sistem *Information and Technology* dalam mendukung efektivitas pengendalian internal pada proses penyusunan laporan keuangan di level transaksional.
- g. Berdasarkan pemahaman terhadap Siklus Proyek, *inquiry, walkthrough*, dan pengujian pengendalian, Konsultan telah mengidentifikasi adanya gap-gap signifikan dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan, prosedur, pelaku control dan sistem.
- h. Penyampaian tindak lanjut dan mitigasi (baik yang telah atau yang akan dilakukan) atas gap yang teridentifikasi, terutama atas penyempurnaan sistem dan prosedur dan pengimplementasian ERP berbasis online. Penyelesaian atas gap yang masih terjadi akan terus diperbaiki baik secara prosedur maupun dengan tingkat kematangan ERP

Pelaku kontrol dan manajemen telah mengkonfirmasi setiap gap yang teridentifikasi kepada Konsultan, baik dari sisi substansi maupun penulisan. Gap yang teridentifikasi oleh Konsultan, sebagian telah dilakukan perbaikan oleh manajemen pada tahun 2023. Secara umum, manajemen baik di entitas induk maupun entitas anak akan merencanakan dan melaksanakan poin-poin rekomendasi yang belum diperbaiki pada tahun 2023 sebagai bagian dari perbaikan pengendalian internal WIKA Grup dalam proses pelaporan keuangan. Selain itu penguatan lini kedua dalam Model Tiga Lini, pemenuhan ketentuan yang berlaku dan penguatan sistem TI akan menjadi prioritas-prioritas utama kedepannya.

10. Perkuatan manajemen risiko berupa penerapan **Three lines defense**

Tata Kelola Risiko Tiga Lini merupakan model koordinasi Manajemen Risiko di dalam organisasi yang membagi fungsi-fungsi menjadi tiga lini.

Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik dalam membantu pencapaian tujuan dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Model ini dapat diterapkan pada semua organisasi dan telah dioptimalkan dengan cara:

- a. Mengadopsi pendekatan berbasis prinsip-prinsip dan menyesuaikan model tersebut dengan tujuan dan lingkungan organisasi
- b. Berfokus pada kontribusi manajemen risiko dalam membantu pencapaian tujuan dan penciptaan nilai, dan juga pada hal-hal yang terkait dengan “pertahanan” dan perlindungan nilai
- c. Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang direpresentasikan dalam model ini dan hubungan-hubungan diantara mereka. Menerapkan langkah-langkah untuk memastikan aktivitas dan tujuan telah selaras dengan kepentingan utama dari pemangku kepentingan.

- f. The consultant also reviews the ITGC (*Information & Technology General Control*) in WIKA Group to test the reliability of the *Information and Technology* system in supporting the effectiveness of internal control in the process of preparing financial statements at the transactional level.
- g. Based on an understanding of the Project Cycle, *inquiries, walkthroughs*, and control testing, the Consultant has identified significant gaps and provided recommendations regarding policies, procedures, and controllers and systems.
- h. Submission of follow-up and mitigation (both those that have been or will be carried out) for identified gaps, especially for improving systems and procedures and implementing online-based ERP. The resolution of gaps that still occur will continue to be improved both in terms of procedures and the level of ERP maturity

Controllers and management have confirmed each identified gap to the Consultant, both in terms of substance and writing. The gaps identified by the Consultant have been partially corrected by management in 2023. In general, management in both the parent entity and subsidiaries will plan and implement the recommendation points that have not been corrected in 2023 as part of improving WIKA Group's internal control in the financial reporting process. In addition, strengthening the second line in the Three Lines Model, compliance with applicable provisions and strengthening the IT system will be the main priorities going forward.

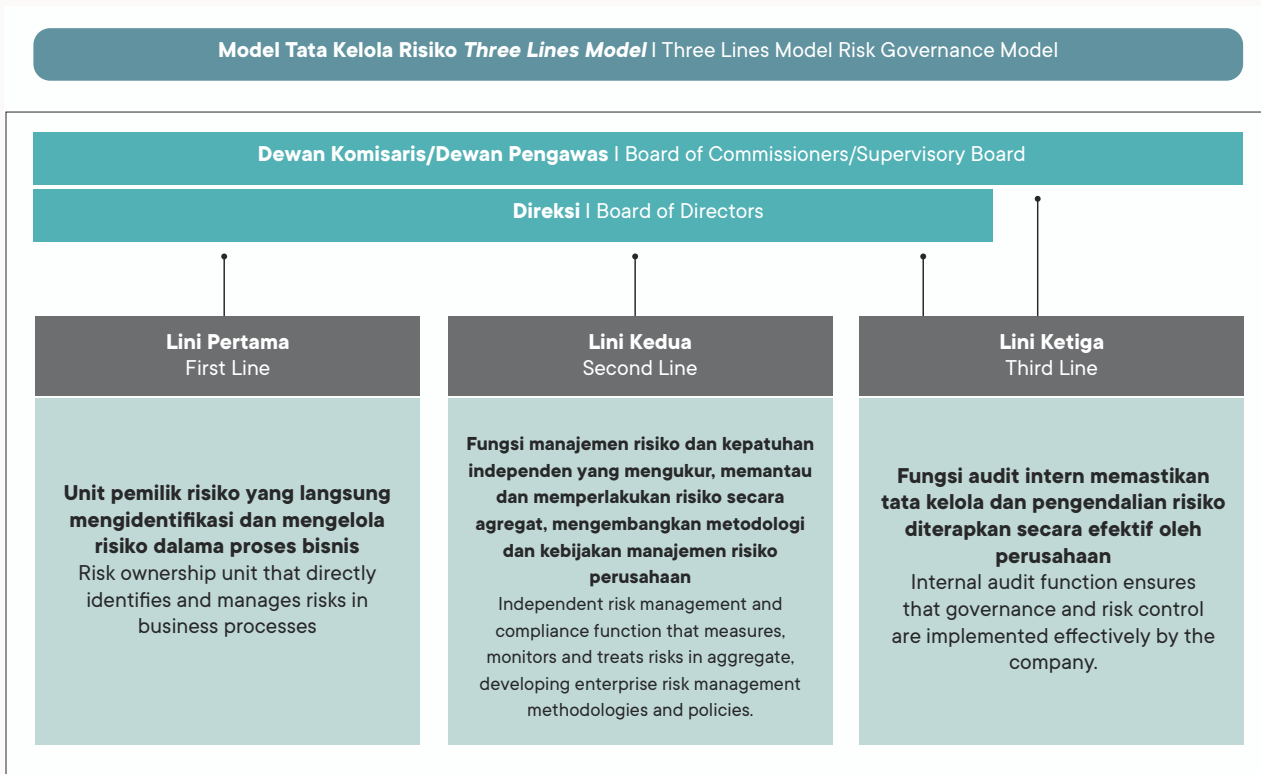
10. Strengthening risk management in the form of implementing **Three lines of defense**

Three Lines of Risk Governance is a Risk Management coordination model within an organization that divides functions into three lines.

The Three Lines Model helps organizations identify the structures and processes that best support the achievement of objectives and facilitate strong governance and risk management. The model is applicable to all organizations and has been optimized by:

- a. Adopting a principles-based approach and tailoring the model to the organization's objectives and environment
- b. Focusing on the contribution of risk management to the achievement of objectives and value creation, as well as on the “defense” and protection of value
- c. Clearly understanding the roles and responsibilities represented in the model and the relationships between them. Implementing measures to ensure that activities and objectives are aligned with the primary interests of stakeholders.

Gambar. 12. Three Lines Model
Figure 12. Three Lines Model



- Lini pertama sebagai unit pemilik Risiko
Bertindak sebagai Lini Pertama dalam Manajemen Risiko PT Wijaya Karya (Persero) Tbk adalah Pelaksana Pengelolaan Usaha (PPU), Penanggung Jawab Pengelolaan Usaha (PjPU), Penanggung Jawab Fungsi Korporasi (PjFK), Penanggung Jawab Fungsional (PjFs), dan Lini Pertama Anak Perusahaan.
- Lini kedua sebagai fungsi Manajemen Risiko
Bertindak sebagai Lini Kedua dalam Manajemen Risiko PT Wijaya Karya (Persero) Tbk adalah PjFK Risk Management dan Lini Kedua Anak Perusahaan.
- Lini ketiga sebagai fungsi Audit Intern
Bertindak sebagai Lini Ketiga dalam Manajemen Risiko PT Wijaya Karya (Persero) Tbk adalah Internal Audit.

- First line as a Risk Owner Unit
Acting as the First Line in Risk Management of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk are Business Management Implementer (PPU), Business Management Responsible Person (PjPU), Corporate Function Responsible Person (PjFK), Functional Responsible Person (PjFs), and the First Line of Subsidiaries.
- Second line as a Risk Management function
Acting as the Second Line in Risk Management of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk are PjFK Risk Management and the Second Line of Subsidiaries.
- Third line as an Internal Audit function
Acting as the Third Line in Risk Management of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is Internal Audit.

11. Perkuatan risk opinion berupa penerapan 4 eyes principle

Selain Tata Kelola *Three Lines Model* PT Wijaya Karya (Persero) Tbk juga menerapkan *Four Eyes Principle*. Metode *four eyes principles* diimplementasikan dimana unit manajemen risiko ikut andil dalam memberikan opini risiko (*risk review*) selama proses pengambilan keputusan. Fokus penerapan *four eyes principles* dilakukan oleh fungsi manajemen risiko (dapat berbentuk Komite sesuai *threshold*), melalui *review* dan pemberian rekomendasi/persetujuan sesuai *threshold*. Persetujuan ini dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang pemegang kewenangan yaitu, 1 (satu) orang dari unit bisnis dan 1 (satu) orang dari unit manajemen risiko.

11. Strengthening risk opinion in the form of implementing the 4 eyes principle

In addition to the *Three Lines Model* Governance, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk also applies the *Four Eyes Principle*. The *four eyes principles* method is implemented where the risk management unit participates in providing risk opinions (*risk reviews*) during the decision-making process. The focus of the implementation of the *four eyes principles* is carried out by the risk management function (can be in the form of a Committee according to the threshold), through review and provision of recommendations/approvals according to the threshold. This approval is carried out by a minimum of 2 (two) authorized persons, namely, 1 (one) person from the business unit and 1 (one) person from the risk management unit.

Sebagai contoh pada tahap perolehan kontrak *Four Eyes Principles* merupakan prinsip pemberian rekomendasi yang melibatkan sinergi antara unit bisnis yang bertanggung jawab dalam pencapaian sasaran laba dan unit risiko yang bertanggung jawab untuk melakukan *assessment* (Pengguna Jasa, seleksi Mitra KSO, dan seleksi proyek di luar kriteria *Green Lane*), minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat yang masing-masing berasal dari Unit Bisnis dan Unit Risiko yang saling independen satu dengan lain.

12. Inisiasi risiko berupa pembentukan *Risk Champion*

Risk Champion merupakan tim sentral khusus atau terdapat dukungan inisiatif Risiko dari setiap Unit Bisnis yang memberikan komentar atau masukan secara efektif sebagai Lini Kedua bagi Unit Bisnis.

Risk Champion memberikan standar dan pedoman Manajemen Risiko untuk korporasi secara independen.

13. Perkuatan *Dual Control (Digital Invoicing dan PO dalam SAP) - WDIGI*

WDIGI adalah sistem informasi untuk melakukan pengelolaan invoice sampai dengan pembayaran secara elektronik yang terintegrasi dengan ERP WIKA. WDIGI juga dapat melakukan pelacakan posisi status pembayaran secara *realtime* serta melakukan dokumentasi digital atas berkas tagihan dan kelengkapan tagihan

Tujuan Penerapan WDIGI:

- Mampu mempercepat proses *approval* tagihan vendor
- Mampu menelusuri posisi tagihan vendor
- Meningkatkan transparansi proses tagihan vendor
- Mengurangi kesalahan yang mengakibatkan hilangnya dokumen tagihan vendor.
- pengajuan pembayaran oleh tim proyek sudah bisa dilakukan online tanpa datang ke WIKA Pusat.

Realisasi Implementasi:

WDIGI sudah diimplementasikan untuk proyek non-JO pada Maret 2024 dan beberapa proyek JO di Januari 2025 serta seluruh divisi WIKA Pusat dimulai Oktober 2024. Fitur-fitur yang diimplementasikan di WDIGI adalah:

- Upload dokumen PO, GR/SES, BAP sampai dengan Invoice
- Approval* di setiap tahapan transaksi
- Integrasi pembukuan jurnal utang, retensi, uang muka dan parsial *payment* dengan SAP
- Laporan utang vendor.

Manfaat yang diharapkan:

- Efisiensi waktu dalam proses *approval* tagihan vendor

For example, at the contract acquisition stage, the Four Eyes Principles is a recommendation-making principle that involves synergy between the business unit responsible for achieving profit targets and the risk unit responsible for conducting assessments (Service Users, selection of KSO Partners, and selection of projects outside the Green Lane criteria), carried out by a minimum of 2 (two) officials, each from the Business Unit and Risk Unit which are independent of each other.

12. Risk initiation in the form of formation of Risk Champion

The Risk Champion is a special central team or there is support for Risk initiatives from each Business Unit that provides comments or input effectively as the Second Line for the Business Unit.

The Risk Champion provides Risk Management standards and guidelines for corporations independently.

13. Strengthening Dual Control (Digital Invoicing and PO in SAP) - WDIGI

WDIGI is an information system for managing invoices up to electronic payments that is integrated with WIKA ERP. WDIGI can also track payment status positions in real time and perform digital documentation of billing files and billing completeness.

The purposes of Implementing WDIGI:

- Able to accelerate the vendor billing approval process
- Able to trace the vendor billing position
- Increase transparency of the vendor billing process
- Reduce errors that result in the loss of vendor billing documents.
- Payment submissions by the project team can now be done online without coming to WIKA Center.

Implementation Realization:

WDIGI has been implemented for non-JO projects in March 2024 and several JO projects in January 2025 and all divisions at WIKA Parent starting in October 2024. The features implemented in WDIGI are:

- Upload PO, GR/SES, BAP documents to Invoice
- Approval at every stage of the transaction
- Integration of debt journal bookkeeping, retention, down payment and partial payment with SAP
- Vendor debt report.

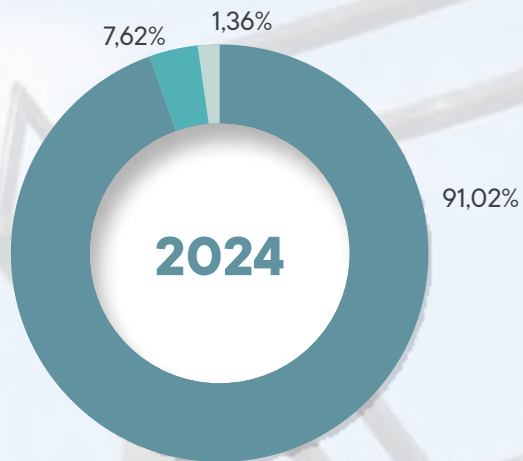
Expected benefits:

- Time efficiency in the vendor bill approval process

Sekilas Tentang WIKA

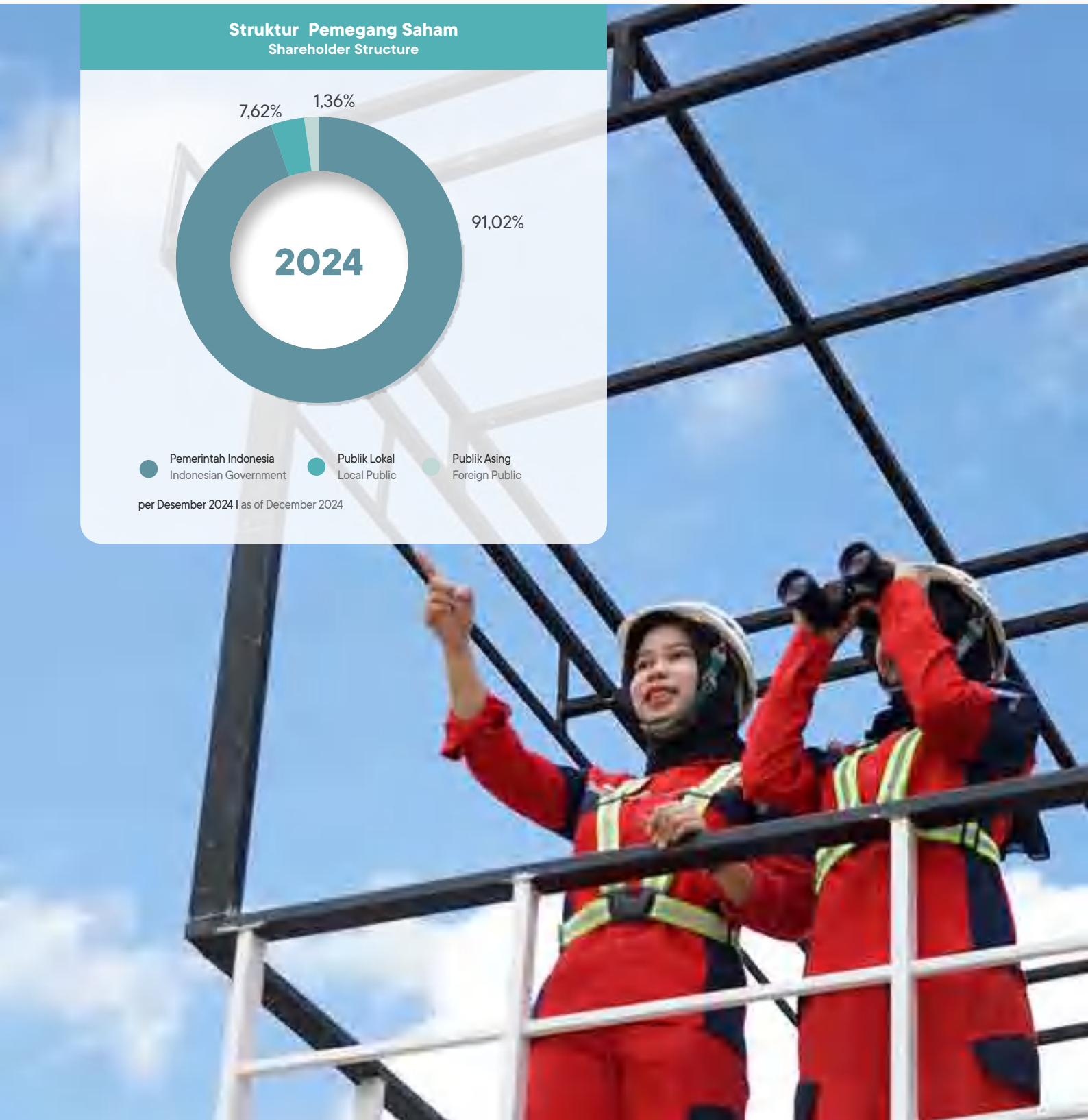
WIKA at a Glance

Struktur Pemegang Saham Shareholder Structure



● Pemerintah Indonesia / Indonesian Government
 ● Publik Lokal / Local Public
 ● Publik Asing / Foreign Public

per Desember 2024 | as of December 2024



LINI BISNIS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN WIKA LINES OF BUSINESS AND THEIR CONTRIBUTION TO WIKA'S REVENUE



Infrastruktur & Gedung | Infrastructure and Buildings

Terdiri dari bidang usaha jasa konstruksi sipil umum yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jetty, bendungan, *railway* serta bangunan gedung.

Consists of general civil construction services business sector, which includes the construction of roads, bridges, ports, airports, jetties, dams, railways and buildings.



Energi & Industrial Plant | Energy & Industrial Plant

Meliputi bidang usaha jasa konstruksi bidang energi dan EPC serta jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik.

Includes energy and EPC construction services business sector as well as power plant operation and maintenance services.



Industri | Industry

Merupakan kegiatan perusahaan pada usaha industri beton precast serta jasa penunjang lainnya, seperti tiang pancang, girder, bantalan rel kereta api, konstruksi baja, spare part otomotif, produk konversi energi, dan industri pertambangan.

The Company's activities in precast concrete industry and other supporting services, such as piles, girders, railway sleepers, steel construction, automotive spare parts, energy conversion products, and mining industry.



Realti & Properti | Realty & Property

Merupakan kegiatan perusahaan pada usaha properti yang terdiri dari usaha landed housing dan *high rise building* seperti apartemen, serta pengelolaan gedung, kondotel dan perhotelan.

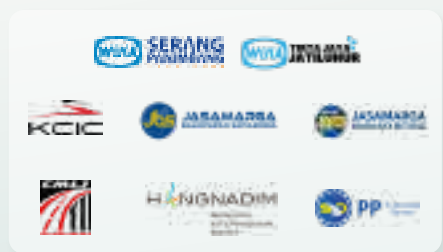
The Company's activities in property business, consist of landed housing and high rise building business such as apartments as well as building, condotel and hotel management.



Investasi | Investment

Merupakan kegiatan investasi perusahaan pada beberapa sektor, meliputi jalan tol, bandara serta *Water Treatment Plant*, serta kereta cepat Jakarta-Bandung.

The Company's investment activities in several sectors, including toll roads, airports and Water Treatment Plants, as well as the Jakarta-Bandung High-speed rail.



Pencapaian WIKA 2024

WIKA's Achievement In 2024

KINERJA KEUANGAN | FINANCIAL PERFORMANCE

Pendapatan Revenue



Rp19.242 

Miliar | Billion

Atau Menurun Sebesar 15% Dari Tahun 2023.
A Decrease of 15% From 2023.

Jumlah Aset Total assets



Rp63.556 

Miliar | Billion

Atau Menurun Sebesar 3,67% dari Tahun 2023.
A Decreased by, or 3.67%, From 2023.

Total Ekuitas Total Equity



Rp11.871 

Miliar | Billion

Atau naik sebesar 24,03% dari tahun 2023.
A Decrease of 24.03 % From 2023.

Laba Kotor Gross Profit



Rp1.518 

Miliar | Billion

Atau Turun Sebesar 18,47% dari Tahun 2023.
A Decrease Of 18.47% From 2023.

Kontrak Baru New Contract

Memperoleh Kontrak Baru sebesar:
New Contract reached

Rp20.659

Miliar | Billion

Atau Menurun Sebesar 29,02% dari Tahun 2023.
Or Decreased by 29.02% From 2023.

Kontrak Dihadapi Order Book

Memperoleh Kontrak Dihadapi sebesar:
Order Book amounted to

Rp65.057

Miliar | Billion

Atau Menurun Sebesar 11,97% dari Tahun 2023.
Or Decreased by 11.97% From 2023.

Assessment GCG GCG Assessment

Skor | Score

92,35

Kategori | Category:
“Sangat Baik”
“Very Good”

ASEAN Corporate Governance
Scorecard by Indonesian Institute for
Corporate Directorship (IICD)

Skor | Score

87,61

Kategori | Category:
“Sangat Terpercaya”
“Very Trusted”

Corporate Governance Perception
Index (CGPI) by The Indonesian
Institute for Corporate Governance
(IICG)

Skor | Score

79,42

Kategori | Category:
“Baik”
“Good”

Indonesia Corporate Accountability
Index (ICORPAX) Tahun 2024 oleh
BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Penghargaan dan Pengakuan Eksternal

Awards and External Recognition

Nasional



BCOMS 2024

Best Internal Communications

Kementerian BUMN
Ministry of SOE

07 Maret 2024
March 07, 2024

Penghargaan Listrik Indonesia 2024

Indonesian Electricity Award 2024

The Most Active State Owned Company in Industrial and Mineral Construction

Majalah Listrik Indonesia (MLI)
Listrik Indonesia Magazine

06 Mei 2024
May 06, 2024

Penghargaan Transparansi dan Penurunan Emisi Korporasi Terbaik Tahun 2024

Best Corporate Transparency and Emission Reduction Award 2024

Predikat "**Green**" untuk Transparansi Penurunan Emisi Korporasi
Predikat "**Platinum**" untuk Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi.
"**Green**" Predicate for Corporate Emission Reduction Transparency
"**Platinum**" Predicate for Corporate Emission Calculation Transparency.

Bumi Global Karbon (BGK) Foundation yang bekerjasama dengan Investortrust

Bumi Global Karbon (BGK) Foundation in collaboration with Investortrust

03 Juni 2024
June 03, 2024



IDX Channel Anugerah ESG 2024

Kategori **Infrastruktur** melalui pengimplementasian ESG dalam Strategi Transformasi WIKA
Category of **Infrastructure** through ESG implementation in WIKA Transformation Strategy

IDX Channel

26 Juli 2024
July 26, 2024

Anugerah Ekonomi Hijau Detik.com

Anugerah Ekonomi Hijau Detik.com

Penggunaan Material Bangunan Ramah Lingkungan
Use of Environmentally Friendly Building Materials

Detik.com

30 Juli 2024
July 30, 2024

Predikat Konstruksi Berkelanjutan

Sustainable Construction Predicate

Predikat **UTAMA** untuk dua proyek strategis WIKA, yaitu Proyek Bendungan Sadawarna dan Proyek Pembangunan Jembatan Kretek 2 Lot 3
First Place for two WIKA's strategic projects, namely the Sadawarna Dam Project and the Kretek 2 Lot 3 Bridge Construction Project

Kementerian PUPR
Ministry of PUPR

22 Agustus 2024
August 22, 2024



Indonesia QHSE Sustainability For Business Awards (IQSA)

The Best Company Concerned QHSE (Engineering Procurement Construction & Investment) - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKAMANYAR Smelter Project)

The Best Director QHSE Excellent - Bapak Harum Akhmad Zuhdi

The Best Manager QHSE - Hendra Wijaya

Majalah Businessasia Indonesia bekerjasama dengan Forum QHSE BUMN Konstruksi

Businessasia Indonesia Magazine in collaboration with the SOE Construction QHSE Forum

04 Oktober 2024
October 04, 2024

Anugerah The Asset Manager 2024

Anugerah The Asset Manager 2024

Juara 2 Kategori MASTER
2nd Place MASTER Category

Lembaga Manajemen Aset Negara

State Asset Management Institute

08 Oktober 2024
October 08, 2024

Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024

Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024

Gold Rank

National Center for Corporate Reporting (NCCR) bekerja sama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioner (ICSP)

National Center for Corporate Reporting (NCCR) in collaboration with the Institute of Certified Sustainability Practitioner (ICSP)

21 Oktober 2024
October 21, 2024



Customer Gathering - Creativity in Action Towards The Future 2024

The Most Awesome in Talent Management kategori BUMN
The Most Awesome in Talent Management for SOE category

PPM Manajemen

06 November 2024
November 06, 2024

Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2024

Indonesia Most Trusted Companies 2024

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan Majalah SWA

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA Magazine

25 November 2024
November 25, 2024

The 15th IICD Corporate Governance Conference and Award 2024

Top 50 Emiten dengan kategori Kapitalisasi Pasar Menengah (Middle Capitalization Public Listed Company)
Top 50 Issuers with Middle Capitalization Public Listed Company Category

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

25 November 2024
November 25, 2024



Indonesia CSR Award (ICA) 2024

Predikat Platinum
Platinum Predicate

Corporate Forum for CSR Development (CFCD)

28 November 2024
November 28, 2024

Top Digital Awards 2024
Top Digital Awards 2024

1. Golden Trophy PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2. Top Digital Implementation 2024 # Stars 5
3. Top Leader on Digital Implementation 2024
4. Top CIO on Digital Implementation 2024
5. Top IT Manager in Digital Implementation 2024

Majalah ItWorks
ItWorks Magazine

05 Desember 2024
December 05, 2024

Indonesia Knowledge Management Summit 2024

KM WIKA Raih Penghargaan Gold
KM WIKA Wins Gold Award

PT Kilang Pertamina Internasional

13 Desember 2024
December 13, 2024



4th Anniversary Indonesia Best Corporate Secretary Award

Indonesia 20 Best Corporate Secretary Awards 2024
Indonesia 20 Best Corporate Secretary Awards 2024

The Economics

17 Desember 2024
December 17, 2024

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Award of Transparency of Public Agency Information

Badan Publik "Informatif"
"Informative" Public Agency

Komisi Informasi Pusat (KIP)
Central Information Commission (KIP)

17 Desember 2024
December 17, 2024

Investortrust BUMN Awards 2024

Penghargaan Spesial "Excellence in Corporate Turn Around & Restructuring"
Special Award "Excellence in Corporate Turn Around & Restructuring"

Investortrust.id

19 Desember 2024
December 19, 2024

Internasional



Going Digital Awards in Infrastructure 2024

Finalis Top 3 dalam kategori Facilities, Campuses, and Cities untuk Proyek KSO WIKA di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Melalui presentasi yang dipimpin oleh Rizky Yusuf Ramadhan sebagai BIM Strategist, Octob Bhayu Hanggoro Putro sebagai BIM Lead, dan Davin Pradipta sebagai BIM Coordinator.

Founders' Honor Going Digital Awards untuk Proyek Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 3B & 3B-2 dan Proyek Sumbu Kebangsaan Sisi Timur

Top 3 Finalists in the Facilities, Campuses, and Cities category for WIKA JO Project in the New National Capital (IKN).

Through a presentation led by Rizky Yusuf Ramadhan as BIM Strategist, Octob Bhayu Hanggoro Putro as BIM Lead, and Davin Pradipta as BIM Coordinator.

Founders' Honor Going Digital Awards for the IKN Nusantara Toll Road Project Section 3B & 3B-2 and the East Side National Axis Project

Bentley Systems USA di Vancouver, Kanada

Bentley Systems USA di Vancouver, Kanada

09 Oktober 2024

October 09, 2024



2023/24 Vision Award Annual Report Competition

1. Platinum Award
2. Top 100 Reports Worldwide
3. Technical Achievement Award"
 1. Platinum Award
 2. Top 100 Reports Worldwide
 3. Technical Achievement Award

LACP

17 Februari 2025
February 17, 2025

Kontribusi Untuk Negeri

Contribution For The Nation

WIKA Rampungkan Spam Jatiluhur 1 WIKA Completed Jatiluhur 1 Drinking Water Supply System (SPAM)

WIKA telah berhasil melanjutkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur 1, yang kini memiliki kapasitas untuk menyediakan air bersih hingga 4.750 liter per detik. Proyek ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang terus meningkat di wilayah Jabodetabek, kawasan dengan tingkat urbanisasi tinggi. Dengan kapasitas tersebut, SPAM Jatiluhur 1 diharapkan dapat melayani lebih dari 1,5 juta penduduk, sekaligus mendukung kebutuhan air bersih untuk sektor industri, yang merupakan salah satu penggerak utama ekonomi regional.

Proyek ini memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek. Dari sisi sosial, SPAM Jatiluhur 1 memastikan akses masyarakat terhadap air bersih yang aman dan berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi ekonomi, keberadaan infrastruktur ini memberikan stabilitas pasokan air bagi sektor industri, yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan operasional perusahaan di wilayah Jabodetabek.

Selain manfaat langsung dalam penyediaan air bersih, proyek ini memiliki kontribusi besar terhadap pelestarian lingkungan. Dengan mengurangi ketergantungan pada penggunaan air tanah, SPAM Jatiluhur 1 berperan penting dalam mengatasi permasalahan penurunan permukaan tanah yang sering terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh eksploitasi air tanah berlebih dapat memicu banjir, merusak infrastruktur, dan mengancam keberlanjutan ekosistem perkotaan.

WIKA has successfully continued the development of the Jatiluhur 1 Drinking Water Supply System (SPAM), which now has the capacity to provide clean water up to 4,750 liters per second. This project is part of the government's strategic effort to meet the growing demand for clean water in Jabodetabek area, a region with a high level of urbanization. With this capacity, Jatiluhur 1 SPAM is expected to serve more than 1.5 million people, while also supporting the clean water needs of industrial sector, which is a key driver of the regional economy.

This project brings significant benefits in various aspects. From a social perspective, Jatiluhur 1 SPAM ensures access to safe and quality clean water for the community, ultimately improving the quality of life. From an economic standpoint, the existence of this infrastructure provides stability in water supply for the industrial sector, supporting productivity and the sustainability of Company operations in Jabodetabek area.

In addition to its direct benefits in providing clean water, this project also makes a significant contribution to environmental preservation. By reducing reliance on groundwater, Jatiluhur 1 SPAM plays a crucial role in addressing the issue of land subsidence, which frequently occurs in Jakarta and its surroundings. Land subsidence caused by excessive groundwater extraction can trigger flooding, damage infrastructure, and threaten the sustainability of urban ecosystems.



Sebagai kontraktor utama, WIKA menerapkan teknologi canggih dan ramah lingkungan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan proyek. Teknologi seperti *clarifier hydropack* digunakan untuk mempercepat proses sedimentasi, sementara *hydrofill* diaplikasikan untuk filtrasi pasir yang lebih efisien. Selain itu, proyek ini dilengkapi dengan sistem *Internet of Things (IoT)* yang memungkinkan deteksi kebocoran secara *real-time* serta pemantauan kualitas air secara berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya memastikan kualitas air tetap terjaga tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi potensi kerugian akibat kebocoran.

SPAM Jatiluhur 1 juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Proyek ini menciptakan lapangan kerja selama tahap konstruksi, memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar, serta mendukung pengembangan bisnis terkait pengelolaan air bersih. Dengan keberadaan infrastruktur ini, wilayah Jabodetabek akan memiliki solusi jangka panjang untuk kebutuhan air bersih yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

Melalui proyek ini, WIKA tidak hanya membuktikan kemampuannya dalam mengelola proyek infrastruktur besar tetapi juga menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Dengan teknologi mutakhir dan pendekatan ramah lingkungan, SPAM Jatiluhur 1 menjadi contoh nyata bagaimana inovasi dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Proyek ini merupakan langkah penting dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Jabodetabek dan Indonesia secara keseluruhan.

As the main contractor, WIKA employs advanced and environmentally friendly technologies to ensure the efficiency and sustainability of the project. Technologies such as the clarifier hydropack are used to accelerate the sedimentation process, while hydrofill is applied for more efficient sand filtration. Additionally, the project is equipped with an Internet of Things (IoT) system that enables real-time leak detection and continuous monitoring of water quality. This system not only ensures that the water quality is maintained but also enhances operational efficiency and reduces potential losses from leaks.

Jatiluhur 1 SPAM also provides broad economic impacts. This project creates jobs during the construction phase, offers new economic opportunities for local communities, and supports the development of businesses related to clean water management. With this infrastructure in place, Jabodetabek area will have a long-term solution to the growing demand for clean water, in line with population growth and urbanization.

Through this project, WIKA not only demonstrates its ability to manage large-scale infrastructure projects but also reaffirms its commitment to sustainable development. With cutting-edge technology and an environmentally friendly approach, Jatiluhur 1 SPAM stands as a concrete example of how innovation can support the fulfillment of basic community needs while maintaining ecological balance. This project is an important step in building a better future for the Jabodetabek community and Indonesia as a whole.



Gedung Respirasi Ibu dan Anak RS Persahabatan Mother and Child Respiratory Building, Persahabatan Hospital

WIKA telah berhasil menyelesaikan pembangunan Gedung Respirasi Ibu dan Anak di RS Persahabatan, Jakarta, yang dirancang untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi ibu dan anak sebagai kelompok rentan. Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang rawat intensif khusus anak, ruang persalinan, dan ruang *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), yang dirancang untuk memberikan perawatan yang optimal, aman, dan nyaman bagi pasien. Sebagai kontraktor utama yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, WIKA mengerjakan seluruh aspek konstruksi, mulai dari struktur dan arsitektur hingga lanskap dan fasilitas pendukung. Dalam pembangunannya, WIKA juga menerapkan desain pasif yang hemat energi dengan memanfaatkan pencahayaan alami, ventilasi efisien, dan material ramah lingkungan, sehingga gedung ini tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga nyaman bagi penggunanya.

Gedung ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, terutama bagi ibu dan anak. Dengan fasilitas modern dan layanan terintegrasi, RS Persahabatan kini mampu menangani kasus medis kompleks yang sebelumnya memerlukan rujukan ke fasilitas lain. Proyek ini juga mendukung program kesehatan nasional dengan berkontribusi pada upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang. Selain itu, kehadiran gedung ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, baik melalui penciptaan lapangan kerja selama tahap konstruksi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Proyek ini juga mencerminkan komitmen WIKA terhadap keberlanjutan dan efisiensi energi. Dengan penerapan teknologi hemat energi dan material ramah lingkungan, gedung ini berkontribusi pada pengurangan jejak karbon sekaligus memastikan kenyamanan bagi pasien dan tenaga medis. Pembangunan ini menjadi bukti kemampuan bangsa dalam mengelola konstruksi fasilitas kesehatan berstandar tinggi dan menjadi inspirasi bagi pengembangan infrastruktur kesehatan lainnya di Indonesia. Dengan rampungnya Gedung Respirasi Ibu dan Anak, RS Persahabatan kini memiliki fasilitas yang lebih representatif untuk memberikan pelayanan holistik dan berkualitas, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

WIKA has successfully completed the construction of the Maternal and Child Respiratory Building at RS Persahabatan, Jakarta, which is designed to provide the best healthcare services for mothers and children as vulnerable groups. This building is equipped with modern facilities, such as a pediatric intensive care unit, delivery rooms, and a Neonatal Intensive Care Unit (NICU), all designed to provide optimal, safe, and comfortable care for patients. As the main contractor appointed by the Ministry of Health, WIKA handled all aspects of construction, from structure and architecture to landscaping and supporting facilities. In its construction, WIKA also implemented an energy-efficient passive design by utilizing natural lighting, efficient ventilation, and eco-friendly materials, making the building not only environmentally friendly but also comfortable for its users.

This building is expected to improve public access to quality healthcare services, especially for mothers and children. With modern facilities and integrated services, RS Persahabatan is now able to handle complex medical cases that previously required referrals to other facilities. This project also supports the national health program by contributing to efforts to reduce maternal and infant mortality rates and improve the quality of life for future generations. In addition, the presence of this building provides positive impacts for the surrounding community, both through job creation during the construction phase and the improvement of community welfare through better healthcare services.

This project also reflects WIKA's commitment to sustainability and energy efficiency. With the application of energy-saving technology and eco-friendly materials, this building contributes to reducing its carbon footprint while ensuring comfort for patients and medical staff. This development is a testament to the nation's ability to manage the construction of high-standard healthcare facilities and serves as an inspiration for the development of other healthcare infrastructure projects in Indonesia. With the completion of Maternal and Child Respiratory Building, RS Persahabatan now has more representative facilities to provide holistic and high-quality services, thus contributing to the overall improvement of public welfare.

GED
RES
RUM



UNG PELAYANAN KESEHATAN SPIRASI IBU DAN ANAK AH SAKIT PERSAHABATAN JAKARTA



WIKA Wujudkan Istana Negara Di IKN, Ikon Masa Depan Indonesia Yang Berkelanjutan

WIKA menyelesaikan pembangunan salah satu proyek strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu Istana Negara, yang dirancang sebagai ikon baru Indonesia menuju negara maju dan berkelanjutan. Proyek ini menggunakan teknologi *Building Information Modeling* (BIM) Level 5D, yang memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi berjalan lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. Dengan konsep arsitektur yang memadukan kearifan lokal dan modernitas, Istana Negara diharapkan menjadi simbol identitas budaya sekaligus visi masa depan Indonesia.

Sebagai pusat pemerintahan baru, Istana Negara memiliki peran penting dalam memperkuat fungsi pemerintahan, diplomasi, dan pelayanan publik. Bangunan ini tidak hanya menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan nasional, tetapi juga ruang kerja yang ramah lingkungan, modern, dan efisien. Dengan desain arsitektur yang mendukung pembangunan berkelanjutan, Istana Negara memperkuat komitmen Indonesia terhadap pengurangan jejak karbon melalui penggunaan material lokal, sistem hemat energi, dan teknologi hijau.

Proyek ini memberikan berbagai manfaat signifikan, mulai dari penguatan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja selama tahap konstruksi hingga peningkatan infrastruktur pendukung di kawasan IKN. Istana Negara juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan dengan fasilitas yang representatif, seperti ruang serbaguna untuk kegiatan kenegaraan, diplomasi internasional, dan pengambilan keputusan strategis.

Melalui keterlibatan WIKA, proyek ini menjadi bukti kemampuan bangsa dalam mengelola pembangunan infrastruktur berkelas dunia. Penggunaan teknologi mutakhir seperti BIM 5D tidak hanya memastikan efisiensi dalam manajemen sumber daya, tetapi juga meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal dan mendorong inovasi di sektor konstruksi nasional.

Dengan selesainya pembangunan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara akan memiliki ikon yang merepresentasikan semangat kebangsaan, inovasi, dan keberlanjutan. Proyek ini menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang siap menghadapi tantangan masa depan dan menjadi contoh bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

WIKA has completed the construction of one of the strategic projects in the new capital city (IKN), namely the National Palace, which is designed as a new icon for Indonesia's journey toward a developed and sustainable nation. This project uses Building Information Modeling (BIM) Level 5D technology, which allows for more efficient, accurate, and integrated planning and construction execution. With an architectural concept that blends local wisdom and modernity, the National Palace is expected to become a symbol of cultural identity as well as Indonesia's vision for the future.

As the new center of government, the National Palace plays a crucial role in strengthening government functions, diplomacy, and public services. This building not only serves as a symbol of sovereignty and national pride but also as a modern, environmentally friendly, and efficient workspace. With its architecture supporting sustainable development, the National Palace reinforces Indonesia's commitment to reducing its carbon footprint through the use of local materials, energy-saving systems, and green technologies.

This project brings significant benefits, ranging from strengthening local economy through job creation during the construction phase to improving supporting infrastructure in the IKN area. The National Palace is also designed to meet the operational needs of the government with representative facilities such as multifunctional rooms for state activities, international diplomacy, and strategic decision-making.

Through WIKA's involvement, this project is a testament to the nation's ability to manage world-class infrastructure development. The use of advanced technology such as BIM 5D not only ensures resource management efficiency but also enhances the skills of the local workforce and fosters innovation in the national construction sector.

With the completion of the National Palace, the new capital city will have an iconic landmark that represents the spirit of nationalism, innovation, and sustainability. This project is an important step in strengthening Indonesia's position as a country ready to face future challenges and sets an example for sustainable development at the global level.





istana kepresidenanan IKN
IKN presidential palace

WIKA Penuhi Kebutuhan Air Di Sumatera Utara Melalui Bendungan Lau Simeme WIKA Meets North Sumatera's Water Needs Through The Lau Simeme Dam

Bendungan Lau Simeme di Sumatera Utara, yang dirancang untuk memiliki kapasitas tampung sebesar 21,07 juta m³. Bendungan ini akan menyediakan pasokan air baku hingga 3.000 liter per detik, yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan domestik, pertanian, dan industri di wilayah Medan serta sekitarnya. Dengan adanya bendungan ini, akses terhadap sumber air yang stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor pertanian, dan mendukung keberlanjutan industri lokal.

Selain itu, Bendungan Lau Simeme memiliki fungsi strategis dalam pengendalian banjir, yang dapat mengurangi risiko kerugian ekonomi dan sosial akibat banjir yang sering melanda kawasan tersebut. Dengan pengelolaan air yang lebih baik, wilayah di sekitar bendungan diharapkan dapat lebih terlindungi dari dampak bencana banjir, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Proyek ini juga menjadi bagian penting dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan suplai air yang lebih terjamin, produktivitas lahan pertanian di kawasan irigasi bendungan dapat ditingkatkan, sehingga mendukung keberlanjutan sektor agrikultur yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah.

Keterlibatan WIKA dalam proyek ini mencerminkan kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Dengan menerapkan teknologi modern dan keahlian terbaik, WIKA memastikan bahwa pembangunan Bendungan Lau Simeme berjalan sesuai dengan target waktu dan standar kualitas tertinggi. Selain itu, proyek ini juga memberikan manfaat langsung berupa penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat selama proses konstruksi, serta peluang ekonomi baru yang akan muncul dari pengelolaan sumber daya air yang lebih baik.

Dengan selesai dan beroperasinya Bendungan Lau Simeme, Sumatera Utara akan memiliki infrastruktur vital yang mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah, ketahanan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

The Lau Simeme Dam in North Sumatra, designed to have a storage capacity of 21.07 million m³. This dam will provide a raw water supply of up to 3,000 liters per second, which is essential to meet the domestic, agricultural, and industrial needs of Medan area and its surroundings. With the presence of this dam, access to a stable water source will support economic growth, strengthen the agricultural sector, and sustain local industries.

In addition, Lau Simeme Dam plays a strategic role in flood control, which can reduce the economic and social risks caused by frequent flooding in the region. With better water management, the areas surrounding the dam are expected to be better protected from the impacts of flood disasters, providing a sense of security for the community.

This project is also an important part of the efforts to support national food security. With a more reliable water supply, agricultural productivity in the dam's irrigation area can be improved, thus supporting the sustainability of agricultural sector, which is one of the main pillars of the region's economy.

WIKA's involvement in this project reflects the Company's concrete contribution to supporting national water and food security. By applying modern technology and the best expertise, WIKA ensures that the construction of Lau Simeme Dam meets the targeted timelines and the highest quality standards. Additionally, this project also provides direct benefits such as job creation for local community during the construction phase, as well as new economic opportunities that will arise from better water resource management.

With the completion and operation of Lau Simeme Dam, North Sumatra will have vital infrastructure that supports the sustainability of regional development, environmental resilience, and the well-being of its people.





Bendungan Lau Simeme
Lau Simeme Dam

WIKA Bangun Pelabuhan Patimban Untuk Masa Depan Logistik WIKA Builds Patimban Port For The Future Of Indonesia's Logistics

Pelabuhan Patimban, yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dirancang untuk memperkuat sistem logistik Indonesia. Dibangun dengan tujuan untuk mengurangi beban pelabuhan Tanjung Priok dan meningkatkan efisiensi distribusi barang, Pelabuhan Patimban memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan industri nasional, khususnya otomotif.

Pelabuhan ini dirancang dengan kapasitas terminal peti kemas mencapai 7,5 juta TEUs (*twenty-foot equivalent units*) pada tahap akhir, serta kapasitas terminal kendaraan yang mampu menampung 600.000 unit kendaraan per tahun. Hal ini menjadikan Pelabuhan Patimban sebagai pusat logistik utama untuk ekspor kendaraan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok otomotif global.

Dalam pembangunan proyek ini, WIKA berperan sebagai salah satu kontraktor utama yang bertanggung jawab atas pengerjaan berbagai aspek infrastruktur, termasuk konstruksi terminal peti kemas, dermaga kendaraan, akses jalan, serta fasilitas pendukung lainnya. Dengan pengalaman panjang di bidang konstruksi, WIKA memastikan bahwa pembangunan Pelabuhan Patimban dilakukan dengan standar internasional, teknologi terkini, dan mengedepankan prinsip keberlanjutan.

The Patimban Port, located in Subang, West Java, is one of Indonesia's strategic national projects designed to strengthen the country's logistics system. Built with the aim of reducing the burden on Tanjung Priok Port and improving the efficiency of goods distribution, Patimban Port plays a vital role in supporting the growth of the national trade and industry sectors, particularly in the automotive sector.

This port is designed with a container terminal capacity of up to 7.5 million TEUs (twenty-foot equivalent units) at its final stage, as well as a vehicle terminal capable of accommodating 600,000 vehicles per year. This makes Patimban Port a key logistics hub for vehicle exports, further strengthening Indonesia's position as an important player in the global automotive supply chain.

In the development of this project, WIKA plays a role as one of the main contractors responsible for various aspects of infrastructure work, including the construction of container terminal, vehicle wharf, access roads, and other supporting facilities. With extensive experience in the construction field, WIKA ensures that the development of Patimban Port is carried out to international standards, using the latest technology, while emphasizing sustainability principles.



Pelabuhan Patimban Paket 6
Patimban Port Package 6

WIKA Bangun Jalan Tol IKN Seksi 3b-2 untuk Dukung Konektivitas dan Mobilitas di Ibu Kota Negara Baru

WIKA Builds IKN Toll Road Section 3b-2 to Support Connectivity and Mobility in The New National Capital

Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 Segmen KKT Kariangau-Sp. Tempadung merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis yang sedang dikerjakan oleh WIKA. Proyek ini menjadi bagian dari pengembangan IKN Nusantara yang dirancang untuk mendukung kelancaran mobilitas dan konektivitas di wilayah baru tersebut. Dengan panjang ruas 7,3 kilometer, proyek ini menjadi bagian dari mainroad tol Seksi 3B yang menghubungkan KKT Kariangau hingga Simpang Tempadung, sebuah jalur strategis yang mendukung konektivitas di kawasan IKN.

Proyek ini juga akan menciptakan efisiensi waktu dan biaya transportasi dengan mengurangi waktu tempuh antarwilayah secara signifikan dan mengurangi beban jalan arteri yang sebelumnya digunakan sebagai jalur utama. Hal ini akan memberikan kenyamanan dan meningkatkan keselamatan berkendara bagi masyarakat. Selain itu, jalan tol ini menjadi bagian penting dari pengembangan infrastruktur modern di IKN Nusantara, yang dirancang untuk menjadi kota masa depan yang efisien, modern, dan ramah lingkungan, sekaligus mendukung sistem transportasi yang terintegrasi.

Keberadaan proyek ini juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal melalui peluang kerja selama proses konstruksi serta akses yang lebih baik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah proyek.

The IKN Toll Road Section 3B-2 Kariangau-KKT to Tempadung Intersection is one of the strategic infrastructure projects currently being undertaken by WIKA. This project is part of the development of the New Capital City (IKN), designed to support smooth mobility and connectivity in the new region. With a road length of 7.3 kilometers, this project is part of the main toll road of Section 3B that connects KKT Kariangau to Tempadung Intersection, a strategic route that supports connectivity in IKN area.

This project will also create efficiencies in time and transportation costs by significantly reducing travel time between regions and alleviating the burden on arterial roads that were previously used as main routes. This will provide convenience and improve road safety for the public. Additionally, this toll road is an essential part of the development of modern infrastructure in IKN Nusantara, designed to be an efficient, modern, and environmentally friendly city, while supporting an integrated transportation system.

The presence of this project also provides direct benefits to local community through job opportunities during the construction process, as well as improved access, which is expected to enhance the quality of life for people in the surrounding areas.



Jalan Tol IKN 3B-2
IKN 3B-2 Toll Road

Bendungan I Dam



Bendungan Tiga Dihaji Paket 4 | Tiga Dihaji Dam Package 4

Bendungan pertama di Sumatera Selatan yang akan meningkatkan area irigasi untuk tanah agraris seluas 25.423 hektar.
The first dam in South Sumatra which will increase the irrigation area for agricultural land covering an area of 25,423 hectares.

Progres Tahun 2024: 100%
Lokasi: Sumatera Selatan
Biaya: Rp596 Miliar

Progress in 2024: 100%
Location: South Sumatra
Cost: Rp596 billion

WIKA telah membangun 51 bendungan (17,46%) dari total 292 bendungan yang dibangun di Indonesia.
WIKA has built 51 dams (17,46%) of the total 292 dams built in Indonesia

Jalan Tol I Toll Road



Jalan Tol Pekanbaru – Padang I Pekanbaru – Padang Toll Road

Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menghubungkan Bangkinang dengan area Pangkalan dengan panjang bagian seksi 78,7 km.
One of the National Strategic Projects (PSN) which will connect Bangkinang with Pangkalan area with a section length of 78.7 km.

Progres Tahun 2024: 100%
Lokasi: Sumatera Barat
Biaya: Rp3,47 Triliun

Progress in 2024: 100%
Location: West Sumatra
Cost: Rp3.47 Trillion

WIKA telah membangun 864,8 kilometer (29,89%) dari total 2.893 kilometer tol yang dibangun di Indonesia.
WIKA has built 864.8 kilometers (29,89%) of the total 2,893 kilometers built in Indonesia.



Pembangkit Listrik I Power Plant

PLTU Palu 2x50MW I PLTU Palu 2x50MW

Salah satu portofolio pembangkit listrik yang dikembangkan WIKA
One of the power plant portfolios developed by WIKA

Progres Tahun 2024: 92,14%
Lokasi: Sulawesi Tengah
Biaya: Rp2,09 Triliun

Progress in 2024: 92,14%
Location: Central Sulawesi
Budget: Rp2.09 trillion

WIKA telah membangun 14.750,9 MW (20,8%) dari total 152.164 MW yang dibangun di Indonesia.
WIKA has built 14,750.9 MW (20,8%) of the total 152,164 MW built in Indonesia.

Jalan Tol (IKN) | Toll Road (IKN)



Jalan Tol IKN Kariangau - Sp Tempadung IKN Kariangau - Sp Tempadung Toll Road

Proyek ini merupakan bagian dari Jalan Tol Balikpapan-IKN.
This project is part of the Balikpapan-IKN Toll Road.

Progres Tahun 2024: 51,35% Progress in 2024: 51.35%
Lokasi: Kalimantan Timur Location: East Kalimantan
Biaya: Rp632,46 Miliar Budget: Rp632.46 billion

Akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang membentang sepanjang 7,3 km.
Access to the Central Government Core Area (KIPP) which stretches for 7.3 km

Gedung (IKN) | Building (IKN)



Istana Negara IKN | IKN Presidential Palace

WIKA turut serta dalam pembangunan Istana Negara IKN di Kalimantan Timur.

WIKA participated in the construction of the IKN Presidential Palace in East Kalimantan.

Progres Tahun 2024: 100% Progress in 2024: 100%
Lokasi: Kalimantan Timur Location: East Kalimantan
Biaya: Rp543,49 Miliar Budget: Rp543.49 billion

Istana Negara IKN akan difungsikan sebagai tempat tinggal, kantor resmi, tempat acara kenegaraan Presiden di IKN.
The IKN State Palace will function as a residence, official office, and venue for the President's state events at IKN.



Industrial Plant | Industrial Plant

Manyar Smelter Gresik | Manyar Smelter Gresik

Salah satu portofolio PSN WIKA yang berfungsi sebagai fasilitas pemurnian serta pengolahan konsentrat tembaga, dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti *Precious Metal Refinery (PMR)*.
One of WIKA's PSN portfolios that functions as a refining and processing facility for copper concentrate, and is equipped with supporting facilities such as the Precious Metal Refinery (PMR).

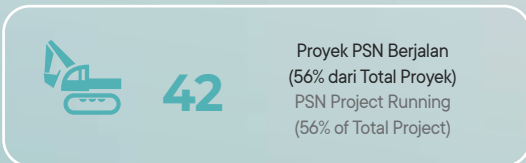
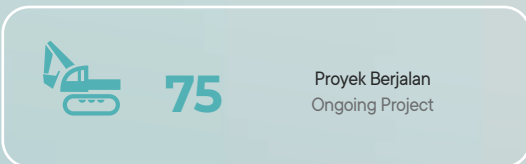
Progres Tahun 2024: 95,12%
Lokasi: Jawa Timur
Biaya: Rp1,08 Triliun

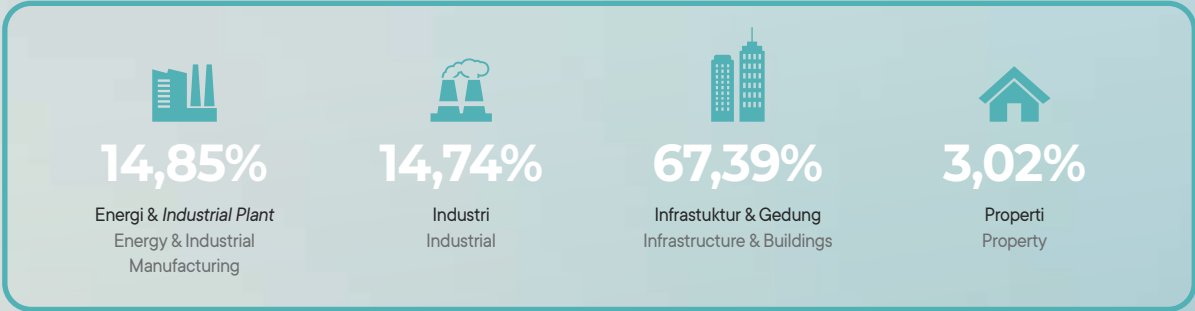
Progress in 2024: 95.12%
Location: East Java
Budget: Rp1.08 Trillion

Fasilitas PMR berfungsi untuk mengolah lumpur anoda dari hasil olahan pemurnian konsentrat tembaga menjadi emas dan perak.
PMR facility functions to process anode sludge from the results of refining copper concentrate into gold and silver

Demografi Proyek Berjalan Tahun 2024

Demographics of Ongoing Projects in 2024





Jejak Langkah

Milestones

1960-1970



- Berdiri pada tahun 1960 berdasarkan PP No. 2 tahun 1960 dan SK Menteri PUTL No. 5 Tanggal 11 Maret 1960 dengan nama PN Widjaja Karja dengan bidang usaha instalasi listrik dan air.
- Dalam perkembangan kegiatan usaha, berubah menjadi PT Wijaya Karya (1972).
- Tercatat beberapa lokasi pernah digunakan WIKA pada awal operasinya, mulai dari Jl. Johar No. 10 Jakarta Pusat (1960-1962), Jl. Hayam Wuruk 111 Jakarta Pusat (1962-1979) dan Kavling 9, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (1979-saat ini).
- Pada dekade 1960-1970-an, WIKA menangani berbagai proyek, antara lain pemasangan jaringan listrik Asahan dan irigasi Jatiluhur.
- Was founded in 1960 based on the Government Regulation No. 2 of 1960 and the Decree of Minister of Public Works and Public Housing No. 5 on March 11th, 1960 which named PN Widjaja Karja with electricity and water installation business fields.
- In developing its business, turned into PT Wijaya Karya (1972).
- Several locations were used by WIKA at the beginning of its operations, starting from Jl. Johar No.10, Central Jakarta (1960-1962), Jl. Hayam Wuruk 111, Central Jakarta (1962-1979) and Kaveling 9th, Cipinang Cempedak, East Jakarta (1979-now).
- On a decade from 1960-1970, WIKA carried out a variety of projects, including the installation of Asahan Electrical Works and Jatiluhur Project Dam & Irrigation.

1971-1980



- Membangun serentak 6 pabrik beton yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
- Perkembangan WIKA selalu lebih unggul dibandingkan kompetitor, hal itu salah satunya dibuktikan dengan meluncurkan produk beton pertama, tiang listrik pra tegang berpenampang H.
- Membangun proyek-proyek *Signature*, antara lain: Gedung Pusat LIPI Jakarta (Gedung tinggi pertama yang dibangun WIKA).
- Simultaneously established 6 concrete factories spread across West Java, Central Java and East Java.
- WIKA has always been more advance comparing to competitors, as proven by launching the first concrete products, a pretensioned electric pole with H profile.
- Worked on the construction of signature projects, including: LIPI Building at Central Jakarta (the first high-rise building built by WIKA).

1991-2000



- Mendirikan Anak Perusahaan yang pertama, PT WIKA Beton (1997).
- Mendirikan Anak Perusahaan WIKA Intrade (2000) yang merupakan peleburan dari Divisi Produk Metal dan Divisi Perdagangan, kemudian bertransformasi menjadi PT WIKA Industri & Konstruksi (2013).
- Mendirikan Anak Perusahaan PT WIKA Realty (2000) yang bergerak pada bidang pengembangan bisnis realti, manajemen properti dan jasa konstruksi.
- Menerapkan untuk kali pertama teknologi *Incremental Launching Method* (ILM) Flyover Sudirman dan K.S. Tubun, Jakarta.
- Membangun Kawasan hunian pertama, Tamansari Persada Raya di Bekasi, Jawa Barat.
- Membangun beberapa proyek kebanggaan di tanah air, antara lain: PLTU Grati 800 MW, Jembatan Bareleng, Jalan Layang KA Jabotabek, Terminal Petikemas Koja, Bank Indonesia.
- Mencanangkan Visi WIKA Star 2010 sebagai garis besar transformasi perusahaan menuju perusahaan terkemuka dalam industri konstruksi dan *engineering* di Asia Tenggara dengan pendekatan revitalisasi 8 (delapan) paradigma (perubahan, pasar, pelanggan, kepemimpinan, pengetahuan & kompetensi, *value creation*, kecepatan dan teknologi)
- Established the first subsidiary company, PT WIKA Beton (1997).
- Continued to establish other subsidiary company; WIKA Intrade (2000) for business of metal products division and the trade division, then transformed into PT WIKA Industri & Konstruksi (2013).
- Established other subsidiary company, PT WIKA Realty (2000) that focuses on the development of realty business, property management and construction services.
- Applying for the first-time technology incremental launching method (ILM) Flyover Sudirman and K.S. Tubun, Jakarta.
- Building the first residential area, Tamansari Persada Raya in Bekasi, West Java.
- Built some "Pride of Nations" project, such are: Grati Power Plant of 800 MW, Bareleng Bridge, Jabotabek Railway Flyover, Koja Container Terminal, Bank Indonesia.
- Launched the Vision of WIKA Star 2010 as an outline of corporate transformation towards leading companies in the construction and engineering industry in Southeast Asia with the 8 (eight) paradigm revitalization approach (change, market, customers, leadership, knowledge and competence, value creation, speed and technology).

1981-1990



- Memperkenalkan pertama kali model pilar bisnis organisasi perusahaan.
- Membangun divisi baru: Sipil Umum, Bangunan & Gedung, Produk Beton dan Metal, Konstruksi Industri, Energi, dan Perdagangan.
- Melahirkan produk PC Piles, memelopori produk railway sleepers beton pertama di Indonesia.
- Menyelesaikan beberapa proyek strategis, antara lain: Jalan Lintas Sumbawa-NTB, PLTA Garung Wonosobo, Bendung Klambu Grobogan dan Bendung Gerak Serayu Banyumas.
- Introducing the Company's first pillar business model.
- Established several divisions: General Civil, Architectural, Concrete and Metal Products, Construction Industry, Energy and Commerce.
- Developed PC Piles Product, pioneering the first concrete railway sleepers in Indonesia.
- Completed several strategic projects, including: Sumbawa-NTB Trans Road, Garung Wonosobo Hydroelectric Power Plant, Klambu Grobogan Dam and Gerak Serayu Banyumas Dam.

2001-2010



- Melaksanakan Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) pada 2007. Sejak saat itu Pemerintah Indonesia memegang 65% saham. Bersamaan dengan itu identitas perusahaan menjadi PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
 - Menyelesaikan jalan layang Pasupati, Bandung dengan struktur box girder terberat di Indonesia dan mengerjakan Jembatan Cikubang pada ruas Tol Cipularang sebagai jembatan dengan Pilar tertinggi di Indonesia (2005).
 - Memulai masuk dan merintis pasar luar negeri dengan menjadi mitra COJAAL (Consortium Japonais de l'autoroute algerienne) guna membangun jalan tol East West Motorway di Aljazair. Proyek sipil terbesar di dunia pada masa itu adalah juga momentum awal WIKA menjejakkan ekspansinya ke luar negeri (2007).
 - Mendirikan Anak Perusahaan PT WIKA Gedung (2008).
 - Menjadi *leader* dalam Konsorsium BUMN Karya untuk menyelesaikan Jembatan Terpanjang di Indonesia, Jembatan Suramadu (2009).
 - Melahirkan Visi 2020, menjadi perusahaan EPC dan Investasi Terintegrasi dan Terbaik di Asia Tenggara.
- Conducted an Initial Public Offering (IPO) in 2007. Since then, the Indonesian Government holds a 65% stake. At the same time the corporate identity became PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
 - Completed the Pasupati Bridge, Bandung with the heaviest box girder structure in Indonesia and worked on the Cikubang Bridge on Cipularang Toll Road as the bridge with the highest pier in Indonesia (2005)
 - Started entering and pioneering overseas markets by becoming a COJAAL (Consortium Japonais de l'autoroute algerienne) partner to build the East West Motorway toll road in Algeria. The largest civil works project in the world at the same time was also the initial momentum of WIKA setting up its expansion abroad (2007).
 - Established of subsidiary company, PT WIKA Gedung (2008).
 - As a leader of state-owned construction company consortium to complete the longest bridge in Indonesia, Suramadu Bridge (2009).
 - Raising the vision of 2020, becoming an EPC and Integrated Investment Company in Southeast Asia.

2011- 2015



- Melaksanakan *Commercial Operation Date (COD) PLTD Marine Fuel Oil 50 MW Bali* yang merupakan proyek investasi pertama WIKA pada bidang energi.
 - Mengakuisisi PT Catur Insan Pertiwi (2008) yang kemudian bertransformasi menjadi PT WIKA Rekayasa Konstruksi (2013).
 - Menyerahkan secara resmi PLTU Amurang kepada PT PLN (2013) PLTU Amurang menjadi salah satu titik ungit WIKA pada portofolio EPC Power Plant.
 - WIKA mengakuisisi PT Sarana Karya yang kemudian bertransformasi menjadi PT WIKA Bitumen (2013).
 - Memantapkan ekspansi proyek-proyek luar negeri, selain Aljazair (2007) antara lain: Timor Leste (2012), Myanmar (2013), Malaysia (2014), Arab Saudi (2016), Dubai (2017), Filipina (2018), Niger (2018), Taiwan (2019), Senegal (2019).
 - Meresmikan Pusat Kepemimpinan WIKA, WIKAsatrian di Bogor (2014).
 - PT WIKA Beton mencatatkan perdagangan saham perdananya di lantai bursa (2014).
- Carried out Commercial Operation Date (COD) Diesel Marine Fuel Oil 50 MW Bali, which is the first investment project of WIKA in energy field.
 - Acquired PT Catur Insan Pertiwi (2008) then transformed into PT WIKA Rekayasa Konstruksi (2013).
 - Officially handed over the Amurang Coal Steam Power Plant to PLN (2013). The Amurang Coal Steam Power Plant is one of WIKA's leverage points on the EPC Power Plant portfolio.
 - WIKA acquired PT Sarana Karya which was transformed into PT WIKA Bitumen (2013).
 - Strengthening the expansion of overseas projects, in addition to Algeria (2007) including: Timor Leste (2012), Myanmar (2013), Malaysia (2014), Saudi Arabia (2016), Dubai (2017), Philippines (2018), Niger (2018), Taiwan (2019), Senegal (2019).
 - Established WIKA Leadership Center, WIKAsatrian in Bogor (2014).
 - PT WIKA Beton registered its first share trade on Indonesia Stock Exchange (2014).

2016-2024



- Menyelesaikan jembatan terpanjang di Sumatera (Jembatan Dompok), Kalimantan (Jembatan Tayan) dan Maluku (Jembatan Merah Putih) pada tahun 2016.
- Presiden melaksanakan *groundbreaking* kereta cepat pertama di Asia Tenggara, di mana WIKA berperan strategis dalam membangun dan melaksanakan penyelenggaraan jasa kereta cepat trase Jakarta-Bandung (2016).
- PT WIKA Beton Tbk dan PT WIKA Gedung membentuk *joint venture* PT WIKA Pracetak Gedung untuk menangkap potensi beton pracetak gedung hunian vertikal (2016).
- WIKA membentuk PT WIKA Serang Panimbang (2017) sebagai Badan Usaha Jalan Tol sekaligus membangun jalan tol tersebut.
- Menyelesaikan Simpang Susun Semanggi (2017) sebagai jalan lingkar layang dengan lengkung terpanjang di Indonesia dan ikon kedua Jakarta, setelah Monumen Nasional (Monas).
- Menyelesaikan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta sebagai terminal penumpang terbesar di Tanah Air (2017).
- Menyelesaikan bendungan terbesar kedua di Tanah Air yang dibangun setelah masa kemerdekaan, Bendungan Jatigede, Sumedang (2017).
- Sukses menerbitkan Komodo Bonds yang tercatat di London Stock Exchange, di mana Komodo Bonds WIKA mengalami oversubscribed 2,5 kali.
- Membangun venues olahraga terbaik level dunia untuk Asian Games 2018; Jakarta International Velodrome, Jakarta International Equestrian Park, GBK Venues: Stadion Madya, Softball, Baseball, Basketball, Squash dan Wisma Atlet Kemayoran.
- Menyelesaikan Moda Raya Terpadu (MRT) sebagai moda transportasi kereta api pertama dan termodern di Jakarta yang menghubungkan Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia berjarak 16 km. 11. Mencatatkan prestasi dengan menyelesaikan jalan tol pertama di Kalimantan (Balikpapan-Samarinda), Sulawesi (Manado - Bitung), underpass New Yogyakarta International Airport 14,3 km yang merupakan underpass terpanjang di Indonesia.
- Menggulirkan Visi Misi WIKA 2030 dengan cita-cita menjadi perusahaan Investasi dan EPC berkelanjutan yang mampu menghadirkan kualitas kehidupan yang lebih baik.
- WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Wijaya Karya dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp4.000.000.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I Wijaya Karya dengan total dana Sukuk sebesar Rp1.000.000.000.000.
- WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp3.500.000.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah II Wijaya Karya dengan total dana Sukuk sebesar Rp1.500.000.000.000.
- Pada tahun 2021 WIKA melakukan ekspansi dengan masuk ke bidang investasi kebandarudaraan melalui pembentukan Badan Usaha Pelaksana (BUP) bernama PT Bandara Internasional Batam.
- Pada tahun 2022 WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp4.000.000.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Wijaya Karya dengan total dana Sukuk sebesar Rp1.000.000.000.000
- WIKA melakukan divestasi Jalan Tol Kunciran Cengkareng dan salah satu entitas asosiasi di bidang pelabuhan yaitu PT Terminal Petikemas
- WIKA berhasil menyelesaikan 3 PSN yaitu bendungan Randugunting di Blora, Bendungan Sukamahi Jawa Barat dan Terminal Kijing serta proyek pendukung G20 yaitu Revitalisasi Bandara VVIP Halim, terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan preservasi jalan dan jembatan koridor jalan nasional Badung Bali.
- WIKA berhasil menyelesaikan proyek PSN, Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang menjadi Kereta Cepat Pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.
- Dalam mendukung perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023, WIKA tuntaskan proyek revitalisasi Jakarta Convention Center (JCC) selama 72 hari
- WIKA menyelesaikan proyek pembangunan sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mengatasi banjir dari hulu hingga hilir.
- Upaya WIKA dalam menunjukkan komitmennya terhadap dekarbonisasi dengan melaksanakan penanaman 6.300 bibit pohon mangrove
- Perseroan melakukan pemutakhiran sistem ERP secara menyeluruh baik di proyek yang dikerjakan WIKA dengan mekanisme KSO (kerjasama operasi) dan non KSO untuk meningkatkan pengendalian biaya demi mendongkrak profitabilitas
- WIKA menyelesaikan proyek Istana Negara di ibu kota baru, Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menerapkan teknologi Building Information Modeling (BIM) untuk mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek
- WIKA berhasil menyelesaikan SPAM Jatiluhur 1 sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyediakan air bersih untuk wilayah Jakarta, Bekasi, Karawang, dan Kabupaten Bekasi
- WIKA berkontribusi dalam solusi pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan yang berlokasi di Jakarta Utara dan nantinya akan tercatat sebagai fasilitas pengolahan sampah RDF terbesar di dunia
- WIKA berhasil menyelesaikan proyek produksi katoda tembaga pertama, Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) Manyar yang menandai pencapaian penting dalam industri pertambangan nasional
- WIKA menerapkan sistem SAP (*Systems, Applications, and Products*) untuk meningkatkan efisiensi operasional dan integrasi data di seluruh proses bisnis, guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat
- WIKA menerapkan transformasi digital untuk meningkatkan inovasi, efisiensi, dan daya saing perusahaan, dengan mengoptimalkan teknologi terbaru dalam setiap aspek operasional dan pengelolaan proyek.
- WIKA melakukan restrukturisasi keuangan dengan menandatangani master restructuring agreement dengan 15 perbankan / lembaga keuangan
- WIKA mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara melalui PMHMETD II sebanyak Rp6 Triliun
- di 2024 WIKA melakukan pelunasan obligasi/sukuk dan call options sebesar Rp1,27 Triliun



- Completed the Longest Bridge in Sumatra (Dompak Bridge), Kalimantan (Tayan Bridge), and Maluku (Merah Putih Bridge) in 2016.
- The President of Republic of Indonesia conducted the first high speed train project groundbreaking in Southeast Asia, where WIKA has a strategic role in building and implementing the Jakarta-Bandung trace high speed train service (2016).
- PT WIKA Beton Tbk and PT WIKA Gedung Tbk formed a joint venture PT WIKA Pracetak Gedung to capture the potential of precast concrete vertical residential buildings (2016).
- WIKA established PT WIKA Serang Panimbang (2017) as a toll road business while simultaneously building the toll road.
- Completed the Semanggi Interchange (2017) as the longest curved ring road in Indonesia and the second icon of Jakarta, after the Monument National (Monas).
- Completed the 3rd Terminal of Soekarno Hatta International Airport as the largest terminal in the country (2017).
- Completed the second largest Dam that built after Indonesia independent day, Jatigede Dam, Sumedang (2017).
- Successfully issued Komodo Bonds on the London Stock Exchange, where WIKA's Komodo Bonds were oversubscribed 2.5 times.
- Built the world's best sports venues for the 2018 Asian Games; Jakarta International Velodrome, Jakarta International Equestrian Park, GBK Venues: Madya Stadium, Softball, Baseball, Basketball, Squash and Wisma Atlet Kemayoran.
- Completed Moda Raya Terpadu (MRT) as the first and most modern railway transportation mode in Jakarta that connects Lebak Bulus - Hotel Indonesia Roundabout with a distance of 16 km.
- Completed the first toll road in Kalimantan (Balikpapan-Samarinda), Sulawesi (Manado-Bitung), the 14.3 km New Yogyakarta International Airport underpass, the longest underpass in Indonesia.
- Introduced WIKA 2030 Vision and Mission with the goal of becoming a Leader in Sustainable Investments and EPC for a Better Quality of Life.
- WIKA issued a Sustainable Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase I 2020 with a principal amount of Rp1,500,000,000,000 and Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase I 2020 with a total funds of Rp500,000,000,000.
- WIKA issued a Sustainable Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds II with a principal amount of Rp3,500,000,000,000 and Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II with a total funds of Rp1,500,000,000,000.
- In 2021, WIKA expanded its business expand by entering the airport investment sector through the establishment of an Implementing Business Entity (BUP), PT Batam International Airport.
- In 2022, WIKA issued a Sustainable Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds III with a principal amount of Rp4,000,000,000,000 and Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds III with a total funds of Rp1,000,000,000,000
- WIKA divested Kunciaran Cengkareng Toll Road and one of the associated entities in the port sector, namely PT Terminal Petikemas
- WIKA has succeeded in completing 3 PSNs, namely Randugunting Dam in Blora, Sukamahi Dam in West Java and Kijing Terminal, as well as the G20 supporting project, namely Revitalization of VVIP Halim Airport, VVIP Terminal of I Gusti Ngurah Rai Airport in Bali and preservation of roads and bridges in Badung Bali national road corridor.
- WIKA successfully completed the PSN project, Jakarta Bandung High Speed Train (KCJB), which became the first high speed train in Indonesia and Southeast Asia.
- To support the 2023 ASEAN High Level Conference (KTT), WIKA completed the Jakarta Convention Center (JCC) revitalization project for 72 days
- WIKA has completed the construction project of Ciliwung waterway to East Flood Canal (KBT), which is part of the Government's efforts to overcome flooding from upstream to downstream.
- WIKA's efforts to demonstrate its commitment to decarbonization by planting 6,300 mangrove tree seedlings in
- The Company has thoroughly updated the ERP system in projects carried out by WIKA using JO (joint operation) and non-JO mechanisms to improve cost control in order to boost profitability
- WIKA completed the State Palace project in the new capital city (IKN) by implementing Building Information Modeling (BIM) technology to optimize project planning, implementation, and management
- WIKA successfully completed the Jatiluhur 1 SPAM as one of the National Strategic Projects (PSN) that provides clean water for Jakarta, Bekasi, Karawang, and Bekasi Regency areas
- WIKA contributed to waste management solutions through the construction of the Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan facility located in North Jakarta and will later be recorded as the largest RDF waste processing facility in the world
- WIKA successfully completed the first copper cathode production project, PT Freeport Indonesia (PTFI) Manyar Smelter which marks an important achievement in the national mining industry
- WIKA implemented the SAP (Systems, Applications, and Products) system to improve operational efficiency and data integration throughout the business process, to support faster and more accurate decision making
- WIKA implementing digital transformation to improve innovation, efficiency, and competitiveness of the company, by optimizing the latest technology in every aspect of operations and project management.
- WIKA conducted financial restructuring by signing a master restructuring agreement with 15 banks/financial institutions
- WIKA received State Capital Participation funds through PMHMETD II of Rp6 trillion
- In 2024 WIKA made a settlement of bonds/sharia bonds and call options of Rp1.27 trillion







Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlights



Dengan EPCC sebagai fokus bisnis, WIKA memperkuat posisi di pasar domestik sekaligus membuka peluang ekspansi global, seiring tren infrastruktur menuju energi bersih dan industri hilirisasi. Langkah ini menunjukkan WIKA tetap relevan dan kompetitif di tengah dinamika industri.

With EPCC as its business focus, WIKA strengthens its position in the domestic market while opening up opportunities for global expansion, in line with the infrastructure trend towards clean energy and downstream industries. This move demonstrates that WIKA remains relevant and competitive amidst the dynamics of the industry.



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Highlights

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
 In million of Rupiah, unless otherwise stated

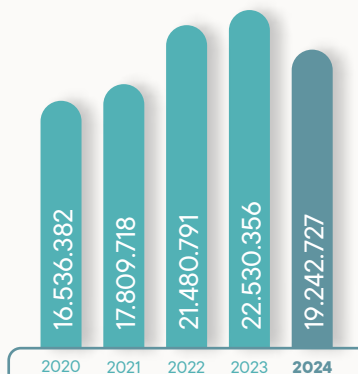
Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)	
Pendapatan Bersih Net Revenue	19.242.727	22.530.356	21.480.791	17.809.718	16.536.382	-15%	3%	⬇️
Infrastruktur dan Gedung Infrastructure and Buildings	9.415.344	11.857.978	10.792.249	9.430.244	8.492.523	-21%	2%	⬇️
Industri Industry	5.295.532	5.017.322	5.689.399	4.601.080	5.061.921	6%	1%	⬆️
Energi dan Industri Plant Energy and Industrial Plants	3.334.976	4.101.581	3.875.611	3.313.902	2.448.889	-19%	6%	⬇️
Realti dan Properti Realty and Property	1.042.061	1.469.609	933.072	457.895	533.049	-29%	14%	⬇️
Investasi Investment	154.811	83.865	190.460	6.597	-	85%	120%	⬆️
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(17.724.124)	(20.668.209)	(19.278.402)	(16.115.148)	(15.011.596)	-13%	3%	⬇️
Laba Kotor Gross Profit	1.518.602	1.861.146	2.202.389	1.694.570	1.524.785	-18%	-1%	⬇️
Beban Penjualan Selling Expenses	(20.059)	(10.271)	(4.762)	(8.579)	(11.276)	95%	12%	⬆️
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(1.223.876)	(973.998)	(722.177)	(779.834)	(883.293)	26%	7%	⬆️
Pendapatan Lain-Lain Other Revenue	5.445.707	697.835	1.557.288	1.471.688	3.202.359	680%	11%	⬆️
Beban Lain-Lain Other Expenses	(3.734.348)	(5.404.164)	(1.317.587)	(1.254.859)	(2.368.633)	-32%	9%	⬇️
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	1.986.001	(3.831.082)	1.715.152	1.122.984	1.463.942	-152%	6%	⬇️
Beban dari Pendanaan Financing Costs	(3.282.891)	(3.206.109)	(1.371.878)	(1.157.284)	(1.221.502)	2%	22%	⬆️
Beban Pajak Penghasilan Final Final Income Tax Expenses	(336.804)	(500.558)	(374.564)	(412.524)	(400.877)	-33%	-3%	⬇️
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) from Associates	(221.037)	(91.144)	(99.355)	(28.886)	(3.459)	143%	130%	⬆️
Bagian Laba (Rugi) Entitas Ventura Bersama Share in Profit (Loss) from Joint Ventures	(606.662)	(139.283)	306.726	672.373	472.172	336%	-205%	⬇️
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	(2.461.392)	(7.765.545)	176.081	196.664	310.276	-68%	-251%	⬇️

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In million of Rupiah, unless otherwise stated

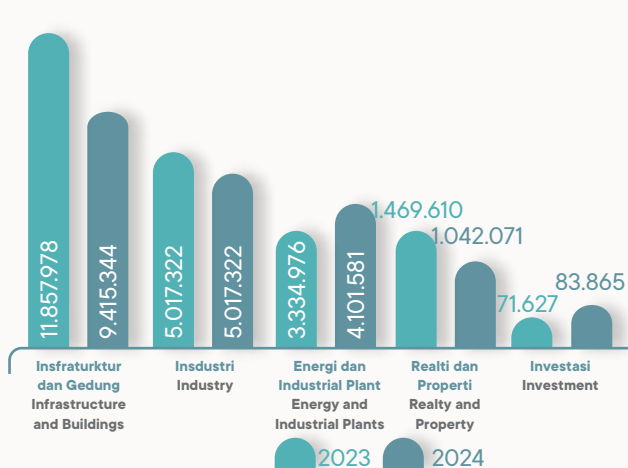
Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)		CAGR 2020-2024 (%)	
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefits (Expenses)	(52.422)	(58.994)	(163.495)	17.760	12.067	-11%	▼	-234%	▼
Laba (Rugi) Neto Net Profit (Loss)	(2.513.814)	(7.824.539)	12.586	214.425	322.343	-68%	▼	-251%	▼
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Loss)									
Penghasilan Komprehensif Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba (Rugi): Other Comprehensive Income Not Reclassified to Profit (Loss):									
Pengukuran Kembali Program Imbal Kerja Pasti Remeasurement of Defined Employee Benefit Plans	(76.438)	(74.777)	4.600	24.444	(21.158)	2%	▲	29%	▲
Pajak Penghasilan Terkait Income Tax Related	(2.777)	381	684	(2.069)	383	-829%	▼	-249%	▼
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak Other Comprehensive Income for the Year After Tax	(79.214)	(74.396)	5.284	22.375	(20.775)	6%	▲	31%	▲
Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for the Year	(2.593.029)	(7.898.935)	17.871	236.800	301.567	-67%	▼	-254%	▼
Laba (Rugi) Neto yang Dapat Diatribusikan kepada: Net Profit (Loss) Attributable to:									
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	(2.266.814)	(7.128.264)	(59.596)	117.667	185.766	-68%	▼	-265%	▼
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	(247.000)	(696.275)	72.183	96.758	136.576	-65%	▼	-213%	▼
Jumlah Total	(2.513.814)	(7.824.539)	12.586	214.425	322.343	-68%	▼	-251%	▼
Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income (Loss) Attributable to:									
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	(2.338.245)	(7.196.040)	(84.618)	129.946	173.794	-68%	▼	-268%	▼
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	(254.738)	(702.895)	102.488	106.855	127.774	-64%	▼	-215%	▼
Jumlah Total	(2.593.029)	(7.898.935)	17.871	236.800	301.567	-67%	▼	-254%	▼
Laba (Rugi) Per Saham Dasar (Nilai Penuh) Earnings Per Share (Full Rupiah)	(117,63)	(794,68)	(6,64)	13,12	20,71	-85%	▼	-242%	▼



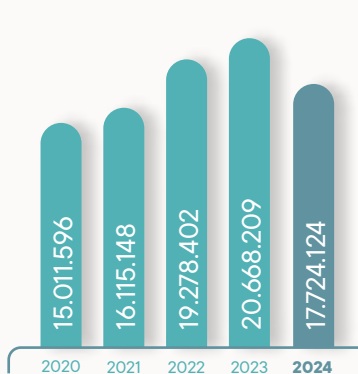
Pendapatan Bersih (Rp-juta)
Net Revenue (Rp-Million)



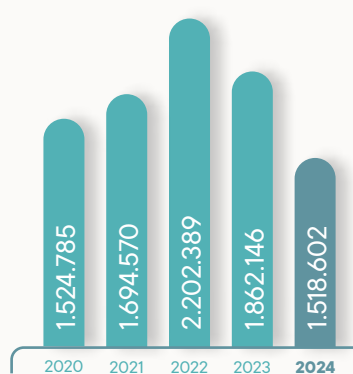
Pendapatan Segmen Usaha (Rp-juta)
Revenue per Business Segment (Rp-Million)



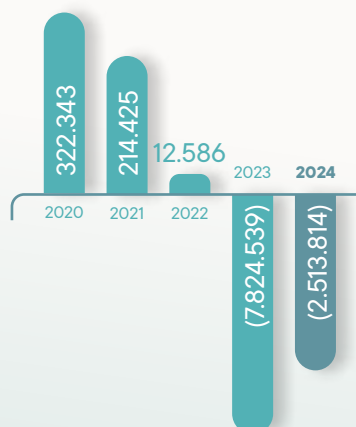
Beban Pokok Pendapatan (Rp-juta)
Cost of Revenue (Rp-Million)



Labanya Kotor (Rp-juta)
Gross Profit (Rp-Million)



Labanya Labanya (Rugi) (Rp-juta)
Net Profit (Loss) (Rp-Million)



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)		CAGR 2020-2024 (%)	
ASET ASSETS									
ASET LANCAR CURRENT ASSETS									
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	5.753.796	3.233.071	5.669.693	6.983.870	14.951.761	78	▲	-17%	▼
Piutang Usaha - Neto Account Receivables - Net									
Pihak Berelasi Related Parties	854.345	1.594.510	1.199.475	589.277	580.230	-46%	▼	8%	▲
Pihak Ketiga Third Parties	1.475.906	1.715.811	1.628.923	1.677.558	1.595.324	-14%	▼	-2%	▼
Piutang Retensi - Neto Retention Receivables - Net									
Pihak Berelasi Related Parties	521.174	684.996	596.617	653.842	803.182	-24%	▼	-8%	▼
Pihak Ketiga Third Parties	762.631	887.100	667.536	602.976	846.406	-14%	▼	-2%	▼
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Neto Gross Amount Due from Customers - Net									
Pihak Berelasi Related Parties	1.030.279	1.171.733	1.864.495	2.928.283	2.507.912	-12%	▼	-16%	▼
Pihak Ketiga Third Parties	713.227	1.291.316	2.673.484	1.139.385	1.816.322	-45%	▼	-17%	▼
Piutang yang Belum Ditagih Unbilled Receivables	709.597	754.219	1.316.134	2.214.485	2.301.754	-6%	▼	-21%	▼
Piutang Lain-Lain - Bagian Lancar Other Receivables - Current									
Pihak Berelasi Related Parties	257.196	277.628	1.281.473	1.062.498	4.790.456	-7%	▼	-44%	▼
Pihak Ketiga Third Parties	146.818	22.168	28.366	21.250	35.726	562%	▲	33%	▲
Persediaan Inventories	11.507.714	11.411.411	12.012.496	10.934.221	9.813.054	1%	▲	3%	▲
Uang Muka Advances	594.733	879.097	1.095.052	773.692	862.323	-32%	▼	-7%	▼
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	1.309.123	1.567.878	1.547.097	1.724.203	2.139.156	-17%	▼	-9%	▼
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	649.384	965.397	1.280.008	929.061	806.886	-33%	▼	-4%	▼
Jaminan Usaha Business Guarantees	372.139	342.873	339.807	111.047	97.722	9%	▲	31%	▲
Pekerjaan dalam Proses Work in Progress									
Pihak Berelasi Related Parties	1.590.623	2.687.489	3.413.724	2.518.333	2.005.193	-41%	▼	-5%	▼
Pihak Ketiga Third Parties	1.721.925	1.314.955	3.020.414	2.322.655	2.027.540	31%	▲	-3%	▼
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	30.238.518	30.801.656	39.634.795	37.186.634	47.980.946	-2%	▼	-9%	▼



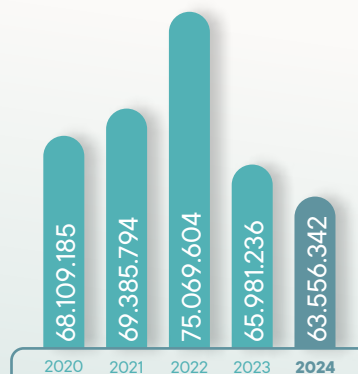
Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)		CAGR 2020-2024 (%)		
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS										
Piutang Lain-Lain - Bagian Tidak Lancar Other Receivables - Non-Current										
Pihak Berelasi Related Parties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uang Muka - Bagian Tidak Lancar Advances - Non-Current	-	-	-	3.885.355	280.000	-	-	-	-	-
Tanah untuk Pengembangan Real Estate Assets	1.438.576	2.103.448	2.081.813	2.033.627	1.215.038	-32%	▼	3%	▲	
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associates	2.708.297	1.854.701	2.059.784	1.864.824	1.709.108	46%	▲	10%	▲	
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture	11.388.953	12.022.212	11.636.485	6.371.991	4.622.540	-5%	▼	20%	▲	
Properti Investasi - Neto Investment Properties - Net	1.319.968	1.308.363	1.978.946	1.919.753	1.869.383	1%	▲	-7%	▼	
Aset Tetap - Neto Fixed Assets - Net	5.330.447	8.115.700	8.305.834	8.832.862	5.026.010	-34%	▼	1%	▲	
Aset Kerja Sama Operasi Joint Operation Assets	256.993	267.839	920.306	422.499	297.970	-4%	▼	-3%	▼	
Goodwill	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847	0%	-	0%	-	
Investasi Jangka Panjang Lainnya Other Long-Term Investments	1.034.566	1.029.675	1.010.545	1.044.858	781.391	0%	-	6%	▲	
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	9.138.764	7.601.854	6.484.152	5.128.200	3.864.332	20%	▲	19%	▲	
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	18.260	32.193	68.072	90.880	63.689	43%	▲	-25%	▼	
Aset Lain-Lain Other Assets	678.151	838.747	884.027	589.627	393.931	19%	▲	11%	▲	
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	33.317.824	35.179.580	35.434.809	32.199.160	20.128.239	-5%	▼	11%	▲	
Jumlah Aset Total Assets	63.556.342	65.981.236	75.069.604	69.385.794	68.109.185	-4%	▼	-1%	▼	
Liabilitas Liabilities										
Liabilitas Jangka Pendek CURRENT LIABILITIES										
Pinjaman Jangka Pendek Short-Term Loans										
Pihak Berelasi Related Parties	350.000	12.759.484	9.590.664	8.469.066	6.577.119	-96%	▼	-41%	▼	
Pihak Ketiga Third Parties	203.143	4.853.650	5.192.068	5.620.879	8.786.232	-92%	▼	-47%	▼	
Utang Usaha Trade Payables										
Pihak Berelasi Related Parties	1.154.633	2.582.665	8.187.203	5.573.777	246.707	-55%	▼	36%	▲	
Pihak Ketiga Third Parties	4.899.634	6.757.179	4.628.996	7.250.374	13.994.784	-27%	▼	-19%	▼	

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)		CAGR 2020-2024 (%)	
Utang Lain-Lain Other Payables									
Pihak Berelasi Related Parties	750.726	803.549	736.079	819.710	-	-7%	▼	-2%	-
Pihak Ketiga Third Parties	268.969	138.739	487.972	401.620	475.183	94%	▲	-11%	▼
Utang Pajak Tax Liabilities	316.513	757.470	367.499	409.939	329.076	-58%	▼	-1%	▼
Uang Muka dari Pelanggan Advances from Customers	1.284.705	602.422	297.056	645.718	1.495.257	113%	▲	-3%	▼
Beban Akrua Accrued Expenses	5.515.315	5.399.695	5.731.969	5.776.223	6.503.697	2%	▲	-3%	▼
Pendapatan Diterima di Muka Unearned Revenues	183.079	294.179	196.106	93.115	111.220	-38%	▼	10%	▼
Bagian Jangka Pendek dari: Short Term Portion of:									
Pinjaman Jangka Menengah Medium-Term Notes	-	1.545.000	255.000	1.345.000	5.605.000	-100%	▼	-100%	▼
Liabilitas Sewa Lease Payables	30.605	44.130	73.170	100.152	44.194	-31%	▼	-7%	▼
Pinjaman Jangka Panjang Long-Term Loans	1.651.001	189.334	391.546	463.998	44.062	773%	▲	98%	▲
Obligasi Bonds	1.733.750	1.066.000	-	-	-	63%	▲	63%	▲
Sukuk Mudharabah Mudharabah Sharia Bonds	681.225	643.800	-	-	-	6%	▲	6%	▲
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	19.023.299	38.437.294	36.135.331	36.969.570	44.212.530	-50%	▼	-15%	▼
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities									
Liabilitas Imbalan Pascakerja Post-employment Benefits Liabilities	272.216	269.871	163.441	219.811	180.733	1%	▲	9%	▲
Liabilitas Pajak Tanggahan Deferred Tax Liabilities	102.580	77.042	116.144	91.021	98.483	32%	▲	31%	▲
Uang Muka dari Pelanggan Advances from Customers	77.806	239.969	448.831	317.844	-	-68%	▼	-30%	-
Uang Muka Proyek Jangka Panjang Advances for Long-Term Projects	856.919	1.390.092	2.001.511	1.262.797	1.434.956	-38%	▼	-10%	▼
Utang Lain-Lain Other Payables	378.872	108.251	129.491	124.514	304.164	250%	▲	4%	▲
Bagian Jangka Panjang - Setelah Dikurang Bagian Jangka Pendek: Long-Term Portion Net of Short-Term Portion:									
Pinjaman Jangka Menengah Medium-Term Notes	1.705.000	235.000	595.000	545.000	1.789.410	626%	▲	-1%	▼
Liabilitas Sewa Lease Payables	9.821	110.643	178.933	248.981	116.620	-91%	▼	-39%	▼
Pinjaman Jangka Panjang Long-Term Loans	21.309.859	5.723.225	4.730.088	4.186.190	1.323.633	272%	▲	74%	▲
Utang Ventura Bersama Joint Venture Debts	84.764	77.287	681.249	528.702	-	10%	▲	-37%	▼

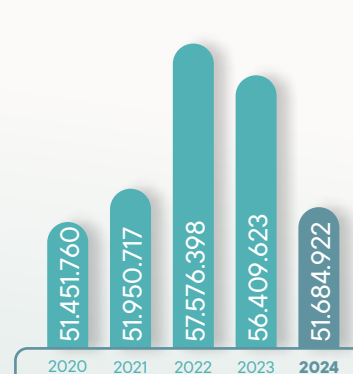


Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)		CAGR 2020-2024 (%)	
Obligasi Bonds	6.272.696	7.602.943	8.664.562	5.706.287	1.491.232	-17%	▼	33%	▲
Sukuk <i>Mudharabah</i> Mudharabah Sharia Bonds	1.591.090	2.138.015	2.781.815	1.750.000	500.000	-25%	▼	25%	▲
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	32.661.623	17.972.329	21.441.067	14.981.147	7.239.230	81%	▲	35%	▲
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	51.684.922	56.409.623	57.576.398	51.950.717	51.451.760	-8%	▼	0%	▲
Ekuitas EQUITY									
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal Saham Nilai Nominal Rp100 (Nilai Penuh) per Saham Modal Dasar - 35.000.000.000 Lembar Saham Equity Attributable to Owners of Parent Entity Share Capital Par Value Rp100 (Full Value) per Share Authorized Capital - 35,000,000,000 Shares									
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 8.969.951.372 Lembar Saham Issued and Fully Paid-Up Capital - 8,969,951,372 Shares	3.987.306	896.995	896.995	896.995	896.995	345%	▲	35%	▲
Modal Saham Diperoleh Kembali Treasury Stocks	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	-	-	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	9.040.356	6.555.499	6.555.499	6.555.499	6.555.499	38%	▲	6%	▲
Perubahan Ekuitas Entitas Anak Changes in Equity of Subsidiaries	1.003.022	1.121.144	1.139.037	1.139.372	1.238.084	-11%	▼	-2%	▼
Saldo Laba Retained Earnings	(5.497.654)	(2.823.649)	4.372.391	4.457.009	4.390.063	76%	▲	-202%	▼
Sub Total Sub Total	8.868.681	5.749.878	12.963.812	13.047.083	13.678.131	54%	▲	-8%	▼
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling interests	3.002.739	3.821.735	4.529.393	4.387.995	2.979.294	-21%	▼	-20%	▼
Total Ekuitas Total Equity	11.871.492	9.571.613	17.493.206	17.435.078	16.657.425	24%	▲	-7%	▼
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	63.556.342	65.981.236	75.069.604	69.385.794	68.109.185	-3%	▼	-1%	▼

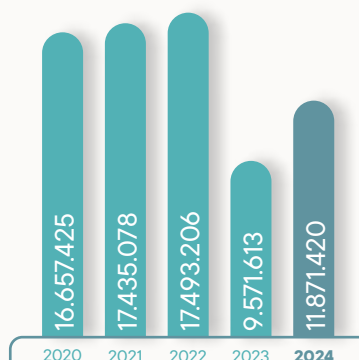
Jumlah Aset (Rp-juta)
Total Assets (Rp-million)



Jumlah Liabilitas (Rp-juta)
Total Liabilities (Rp-million)



Jumlah Ekuitas (Rp-juta) Total Equity (Rp-million)



Kas dan Setara Kas (Rp-juta) Cash and Cash Equivalents (Rp-million)



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED CASH FLOWS

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In million of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)	CAGR 2020-2024 (%)	
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Provided by (Used for) Operating Activities	68.223	(3.165.150)	(2.881.595)	(3.740.044)	314.191	98% ▲	-18%	▼
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities	(3.818.677)	(1.066.129)	(1.967.043)	(3.711.048)	(5.232.493)	186% ▲	-6%	▼
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by (Used for) Financing Activities	3.987.533	1.806.126	3.572.203	(524.062)	9.477.948	120% ▲	-16%	▼
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	237.079	(2.425.153)	(1.321.435)	(7.975.154)	4.559.647	-111% ▼	-43%	▼
Kas dan Setara Kas dari Akuisisi Entitas Anak Cash and Cash Equivalents from Acquisition of Subsidiaries	-	-	-	-	4.432	-	-	-
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Impact of Exchange Differences	4.013	(11.469)	7.258	7.262	40.949	-135% ▼	-37%	▼
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	3.233.071	5.669.693	6.983.870	14.951.761	10.346.734	-43% ▼	-21%	▼
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode Cash and Cash Equivalents at End of the Year	3.361.002	3.233.071	5.669.693	6.983.870	14.951.761	5% ▲	-26%	▼



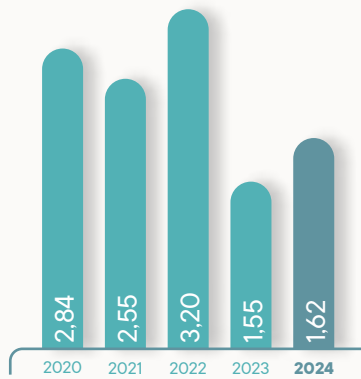
RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

KEY FINANCIAL RATIOS

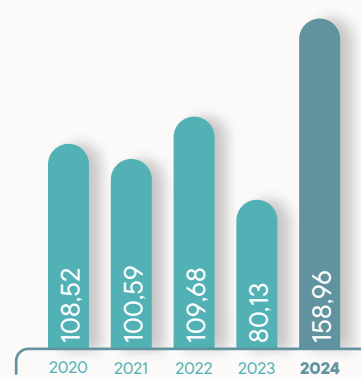
Dalam %, kecuali dinyatakan lain
 Dalam %, kecuali dinyatakan lain

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Profitabilitas Profitability					
Imbal Hasil terhadap Ekuitas Return on Equity	(21,18)	(40,52)	0,07	1,29	2,10
Imbal Hasil Investasi Return on Investment	1,62	1,55	3,20	2,55	2,84
Imbal Hasil terhadap Aset Return on Assets	(3,96)	(0,12)	0,02	0,28	0,46
Likuiditas Liquidity					
Rasio Kas Cash Ratio	17,67	8,41	15,69	18,89	33,82
Rasio Lancar Current Ratio	158,62	80,13	109,68	100,59	108,52
Quick Ratio	32,04	50,45	76,44	71,01	86,33
Aktivitas ACTIVITY					
Periode Penagihan (hari) Collection Period (days)	76	88	48	46	48
Perputaran Aset (kali) Assets Turnover (times)	31,94	68,40	28,65	25,70	24,28
Struktur Modal Kerja Capital Structure					
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	4,35	5,89	3,29	2,98	3,09
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Aset Debt to Assets Ratio	0,81	0,85	0,77	0,75	0,76
Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas Gearing Ratio	2,99	3,85	1,91	1,63	1,58
Rasio Ekuitas terhadap Jumlah Aset Equity to Assets Ratio	0,19	0,15	0,23	0,25	0,24
Marjin Margin					
Marjin Laba Kotor Gross Profit Margin	7,89	8,27	10,25	9,51	9,22
Marjin Laba Usaha Operating Profit Margin	1,43	3,90	7,98	10,08	11,71
Marjin Laba Bersih Net Profit Margin	(13,06)	(34,73)	0,06	1,20	1,95
Pertumbuhan Growth					
Penjualan Sales	(14,59)	(14,25)	20,61	7,70	(39,23)
Laba Usaha Operating Income	(151,87)	(8,05)	52,73	(7,27)	(44,50)
Laba yang Dapat Diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk Income Attributable to Owners of Parent Entity	(68,20)	(14,324)	(150,65)	(36,66)	(91,87)
Jumlah Aset Total Assets	(3,68)	(13,77)	8,19	1,87	9,66
Jumlah Ekuitas Total Equity	24,03	(82,77)	0,33	4,67	(13,31)

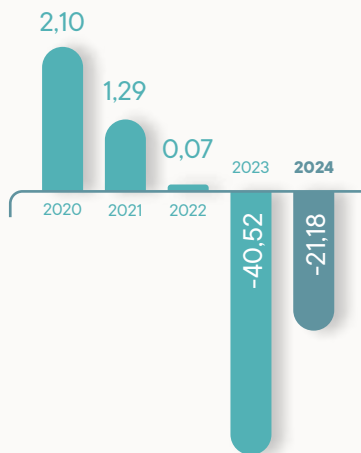
Rasio Imbal Hasil Investasi (ROI) (%)
Return on Investment Ratio (%)



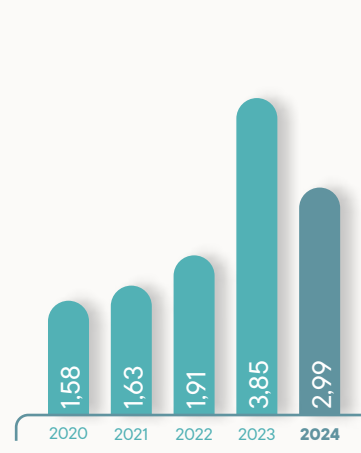
Rasio Lancar (%)
Current Ratio (%)



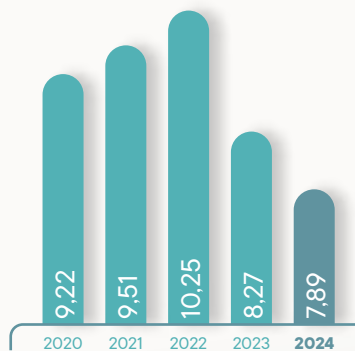
Rasio Imbal Hasil terhadap Ekuitas (%)
Return on Equity Ratio (%)



Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas (%)
Gearing Ratio (%)



Marjin Laba Kotor (%)
Gross Profit Margin (%)





Ikhtisar Operasional

Operational Highlights



Fly Over Aloha Sidoarjo

PRODUKTIVITAS KONTRAK BARU DAN KONTRAK DIHADAPI

PRODUCTIVITY OF NEW CONTRACTS AND ORDER BOOK

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
 In billion Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth (%)	
Kontrak Baru New Contract	20.656	29.244	-29.37%	▼
Kontrak Dihadapi Order Book	65.058	73.904	-11.97%	▼

KINERJA OPERASIONAL SEGMENT INFRASTRUKTUR DAN GEDUNG

INFRASTRUCTURE AND BUILDING SEGMENT PERFORMANCE

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
 In billion Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth (%)	
Omzet Kontrak Baru New Contracts	8.687	15.396	-43,58%	▼
Omzet Kontrak Dihadapi Order Book	40.795	49.632	-17,81%	▼

KINERJA OPERASIONAL SEGMENT ENERGI DAN INDUSTRIAL PLANT

ENERGY AND INDUSTRIAL PLANT SEGMENT PERFORMANCE

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In billion Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth (%)	
Omzet Kontrak Baru New Contracts	4.050	4.923	-17,73%	▼
Omzet Kontrak Dihadapi Order Book	9.663	9.717	-0,56%	▼

KINERJA OPERASIONAL SEGMENT INDUSTRI

INDUSTRY SEGMENT PERFORMANCE

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In billion Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth (%)	
Omzet Kontrak Baru New Contracts	6.540	7.497	-12,77	▼
Omzet Kontrak Dihadapi Order Book	9.590	8.962	7,01	▲

KINERJA OPERASIONAL SEGMENT REALTI DAN PROPERTI

REALTY AND PROPERTY SEGMENT PERFORMANCE

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In billion Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth (%)	
Omzet Kontrak Baru New Contracts	1.292	1.346	-4,02	▼
Omzet Kontrak Dihadapi Order Book	2.013	2.012	0,07	▼

KINERJA OPERASIONAL SEGMENT INVESTASI

INVESTMENT SEGMENT PERFORMANCE

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In billion Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan Growth (%)	
Omzet Kontrak Baru New Contracts	86	85	1,05	▲
Omzet Kontrak Dihadapi Order Book	3.047	3.526	-13,60	▼



Ikhtisar Saham

Shares Highlights



INFORMASI KINERJA SAHAM

INFORMATION ON SHARES PERFORMANCE

Kode Saham: WIKA

Bursa Perdagangan Saham: Bursa Efek Indonesia (BEI)

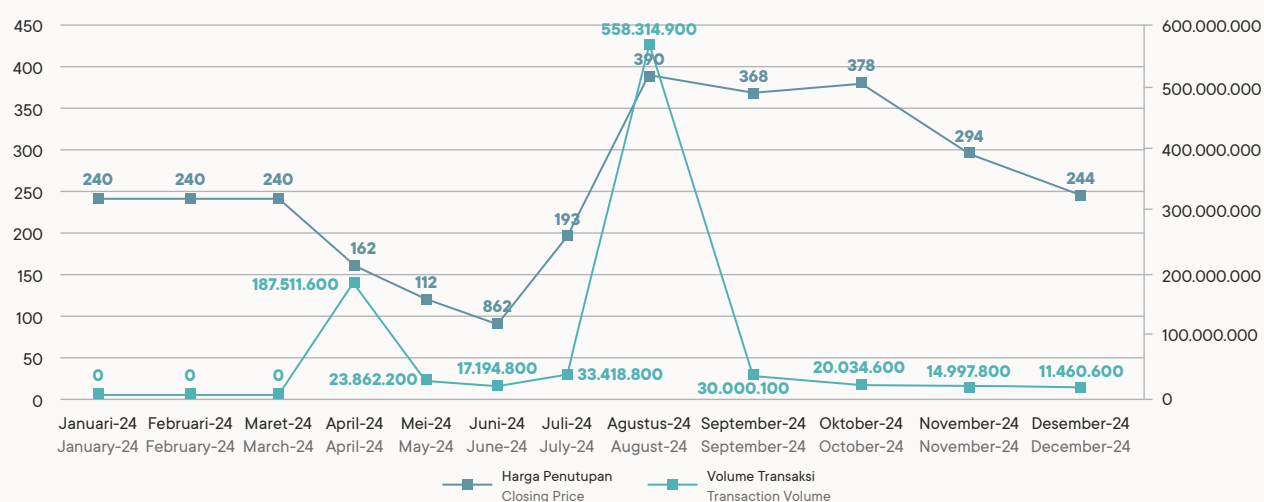
Stock Code: WIKA

Stock Trading Exchange: Indonesia Stock Exchange (IDX)

2024	Harga Saham Share Price (Rp)				Jumlah Saham Beredar (juta lembar) Number of Outstanding Shares (million shares)	Volume Transaksi (saham) Transaction Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp-miliar) Capitalization (Rp-billion)
	Pembukaan Opening	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Triwulan I 1 st Quarter	240	240	240	240	8.969,95	0	2.152,56
Triwulan II 2 nd Quarter	85	88	83	86	39.873,06	17.194.800	3.429,17
Triwulan III 3 rd Quarter	384	418	392	402	39.873,06	30.000.100	16.628,97
Triwulan IV 4 th Quarter	246	246	236	244	39.873,06	11.460.600	9.810,00

Kode Saham: WIKA
Bursa Perdagangan Saham: Bursa Efek Indonesia (BEI)
Stock Code: WIKA
Stock Trading Exchange: Indonesia Stock Exchange (IDX)

2023	Harga Saham Share Price (Rp)				Jumlah Saham Beredar (juta lembar) Number of Outstanding Shares (million shares)	Volume Transaksi (saham) Transaction Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp-miliar) Capitalization (Rp-billion)
	Pembukaan Opening	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Triwulan I 1 st Quarter	515	525	510	515	8.969,95	8.572.500	4.619,05
Triwulan II 2 nd Quarter	510	515	498	505	8.969,95	10.182.100	4.259,36
Triwulan III 3 rd Quarter	464	472	454	458	8.969,95	16.621.500	4.107,81
Triwulan IV 4 th Quarter	240	240	240	240	8.969,95	0	2.152,56



Grafik Pergerakan Harga Penutupan Saham Triwulanan 2023-2024

Grafik Pergerakan Harga Penutupan Saham Triwulanan 2023-2024

PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSION) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (DELISTING)

Menjelang akhir tahun 2023, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mengalami penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) pada tanggal 18 Desember 2023. Penghentian ini disebabkan oleh penundaan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahun 2020 seri A (SMWIKAO1ACN1) yang jatuh tempo pada hari yang sama. Penundaan ini terjadi karena WIKA masih dalam proses finalisasi Perjanjian Restrukturisasi (Master Restructuring Agreement) dan berada dalam status standstill, sehingga pembayaran pokok kepada pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening yang seharusnya dilakukan pada 18 Desember 2023 ditunda.

Saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dibuka kembali setelah suspensi pada 30 April 2024. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut keputusan penghentian sementara perdagangan saham WIKA yang telah berlaku sejak 18 Desember 2023. Pembukaan suspensi ini terjadi setelah WIKA memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh BEI, termasuk pembayaran terkait Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I.

SUSPENSION AND/OR DELISTING OF SHARES

Towards the end of 2023, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) experienced a temporary suspension of stock trading on December 18, 2023. This suspension was due to the postponement of principal payments for the Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sukuk I 2020 series A (SMWIKAO1ACN1) which matured on the same day. This delay occurred because WIKA is still in the process of finalizing the Master Restructuring Agreement and is in standstill status, so that the principal payment to Sharia Bond holders through the Account Holders that should have been made on December 18, 2023, was postponed.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) shares were reopened after the suspension on April 30, 2024. The Indonesia Stock Exchange (IDX) revoked the decision to temporarily suspend the trading of WIKA shares, which has been in effect since December 18, 2023. The suspension was lifted after WIKA fulfilled several conditions set by the IDX, including payments related to Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I.



AKSI KORPORASI YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERUBAHAN PADA SAHAM

Pada tahun 2024, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA melakukan aksi korporasi berupa penambahan modal melalui HMETD. PMHMETD ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas pendanaan. Dalam aksi korporasi ini, WIKA menawarkan hak kepada pemegang sahamnya untuk membeli saham baru dengan harga yang telah ditentukan. Tujuan utama dari PMHMETD ini adalah untuk mendapatkan dana segar yang akan digunakan untuk mendukung berbagai proyek strategis perusahaan, termasuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Realisasi perolehan dana dari PMHMETD adalah sebesar Rp 6.087.913.159.742, dengan rincian Rp 6.000.000.000.000 berasal dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara dan Rp 87.913.159.742 merupakan dana PMHMETD dari masyarakat. Melalui aksi korporasi ini, terjadi perubahan pada komposisi kepemilikan saham dan peningkatan modal perusahaan. Jumlah saham beredar sebelum PMHMETD adalah 8.969.951.372 lembar saham, dan setelah PMHMETD, jumlahnya meningkat menjadi 39.873.063.858 lembar saham.

1. tanggal pelaksanaan aksi korporasi PMHMETD 2024;
 - a. Cum Date : 16 April 2024
 - b. Ex Date : 17 April 2024
 - c. Rec Date : 18 April 2024
 - d. Trading Start : 22 April 2024
 - e. Trading End : 26 April 2024
2. rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; selama tahun 2024, WIKA tidak melakukan pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham;
3. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah PMHMETD 2024;
 - a. Saham beredar sebelum aksi korporasi: 8.969.951.372
 - b. Saham beredar sesudah aksi korporasi : 39.751.174.834
4. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;
 - a. Sebelum aksi korporasi: Rp204/lembar
 - b. Setelah aksi korporasi : Rp204/lembar

DIVIDEN SAHAM

Berdasarkan keputusan RUPS, Pemegang Saham memutuskan untuk tidak membagikan dividen saham di tahun 2024 dari hasil kinerja usaha tahun buku 2023. Begitupun di tahun 2023, Pemegang Saham memutuskan untuk tidak membagikan dividen saham atas hasil kinerja usaha tahun buku 2022.

CORPORATE ACTIONS CAUSING CHANGES IN SHARES

In 2024, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk or WIKA took corporate action in the form of capital increase through HMETD. This PMHMETD is part of the Company's strategy to strengthen its capital structure and increase funding capacity. In this corporate action, WIKA offers its shareholders the right to buy new shares at a predetermined price. The main purpose of PMHMETD is to obtain fresh funds that will be used to support the Company's various strategic projects, including the completion of the National Strategic Project (PSN) and projects in the new National Capital City (IKN). The realization of funds from the PMHMETD amounted to Rp6,087,913,159,742, with details of Rp6,000,000,000,000 coming from the government through State Capital Participation and Rp87,913,159,742 is PMHMETD funds from the public. Through this corporate action, there were changes in the composition of share ownership and an increase in the Company's capital. The number of outstanding shares before PMHMETD was 8,969,951,372 shares, and after PMHMETD, the number increased to 39,873,063,858 shares.

1. implementation date of corporate action of rights issue in 2024;
 - a. Cum Date : April 16, 2024
 - b. Ex Date : April 17, 2024
 - c. Rec Date : April 18, 2024
 - d. Trading Start : April 22, 2024
 - e. Trading End : April 26, 2024
2. ratio of stock split, reverse stock, stock dividend, bonus shares, number of convertible securities issued, and changes in nominal value of shares; during 2024, WIKA did not conduct stock split, reverse stock, stock dividend, bonus shares, number of convertible securities issued, and changes in nominal value of shares;
3. number of shares outstanding before and after rights issue in 2024;
 - a. Outstanding shares before corporate action: 8,969,951,372
 - b. Outstanding shares after corporate action: 39,751,174,834
4. stock price before and after corporate action;
 - a. Before corporate action: Rp204/share
 - b. After corporate action: Rp204/share

SHARE DIVIDEND

Based on the GMS resolution, the Shareholders decided not to distribute share dividends in 2024 from the results of business performance of fiscal year 2023. Likewise, in 2023, Shareholders decided not to distribute share dividends on the results of 2022 fiscal year's business performance.

Informasi mengenai obligasi dan sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar

Information on Outstanding Bonds, Sharia Bonds, or Convertible Bonds

INFORMASI OBLIGASI

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

Pada 18 Desember 2020, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020. Jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

1. Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp331.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh satu miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Obligasi Seri A telah diperpanjang selama 2 tahun sejak tanggal emisi, dengan adanya opsi beli (call option) yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2024, dengan total sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). sehingga sisa pokok Obligasi Seri A kini menjadi Rp231.000.000.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar rupiah).
2. Seri B : Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.000.000.000 (empat ratus dua puluh sembilan miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
3. Seri C : Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

INFORMATION ON BONDS

Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase I 2020

On December 18 2020, WIKA conducted a Continuous Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase I 2020. The principal amount of the Bonds was IDR 1,500,000,000,000 and consist of 3 (three) series:

1. Series A: The principal amount of Series A Bonds offered is Rp331,000,000,000 (three hundred and thirty-one billion rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.60% (eight point six zero percent) per year with a term of 3 (three) years. Series A Bonds have been extended for 2 years from the issuance date, with a call option that was exercised 2 times in 2024, with a total of Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah). As a result, the remaining principal of Series A Bonds is now Rp231,000,000,000 (two hundred and thirty-one billion rupiah).
2. Series B: The Principal Amount of Series B Bonds offered was Rp429,000,000,000 (four hundred twenty nine billion Rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.25% (nine point two five percent) per annum, with a term of 5 (five) years from the Issuance Date.
3. Series C: The Principal Amount of Series C Bonds offered was Rp740,000,000,000 (seven hundred and forty billion Rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.85% (nine point eight five percent) per annum, with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang Masih Beredar Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase I 2020 that is still Outstanding

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2023	2024	
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase I 2020	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	18 Desember 2020 December 18, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Seri A 5 Tahun Seri B 5 tahun Seri C: 7 tahun Series A: 5 years Series B: 5 years Series C: 7 years 	Rp	1400	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 18 Desember 2025 Seri B: 18 Desember 2025 Seri C: 18 Desember 2027 Series A: December 18, 2023 Series B: December 18, 2025 Series C: December 18, 2027 	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 8,60% Seri B: 9,25% Seri C: 9,85% Series A : 8.60% Series B : 9.25% Series C : 9.85% 	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021

Pada 3 Maret 2021, WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021. Jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.500.000.000.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

1. Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun yang telah dilakukan perpanjangan selama 2 tahun sejak tanggal emisi sejak Tanggal Emisi dengan opsi beli (call option).
2. Seri B : Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp745.500.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
3. Seri C : Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.259.500.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase II 2021

On March 3, 2021, WIKA conducted the Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase II 2021. The principal amount of the Bonds is Rp2,500,000,000,000 and consists of 3 (three) series:

1. Series A: The Principal Amount of Series A Bonds offered was Rp495,000,000,000 (four hundred and ninety-five billion rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.50% (eight point five zero percent) per year with a term of 3 (three) years, which has been extended for 2 years from the issuance date with a call option.
2. Series B: The Principal Amount of Series B Bonds offered was Rp745,500,000,000 (seven hundred forty five billion five hundred million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.10% (nine point one zero percent) per year with a term of 5 (five) years from the Issuance Date.
3. Series C: The Principal Amount of Series C Bonds offered was Rp1,259,500,000,000 (one trillion two hundred fifty-nine billion five hundred million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.75% (nine point seven five percent) per year with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 yang Masih Beredar

Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase II 2021 that is still Outstanding

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2023	2024	
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase II 2021	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	3 Maret 2021 March 3, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Seri A: 5 Tahun • Seri B: 5 Tahun • Seri C: 7 Tahun • Series A: 5 years • Series B: 5 years • Series C: 7 years 	Rp	2.500	<ul style="list-style-type: none"> • Seri A: 3 Maret 2026 • Seri B: 3 Maret 2026 • Seri C: 3 Maret 2028 • Series A : March 3, 2024 • Series B : March 3, 2026 • Series C : March 3, 2028 	<ul style="list-style-type: none"> • Seri A: 8,50% • Seri B: 9,10% • Seri C: 9,75% • Series A : 8.50% • Series B : 9.10% • Series C : 9.75% 	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

Pada 8 September 2021, WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021. Jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.750.000.000.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

1. Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp571.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yang telah dilakukan pelunasan pada 8 September 2024. WIKA telah melakukan pelunasan jatuh tempo seri A pada September 2024.
2. Seri B: Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp197.000.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
3. Seri C : Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp982.000.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021

On September 8, 2021, WIKA issued Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021. The principal amount of the Bonds is Rp1,750,000,000,000 and consists of 3 (three) series:

1. Series A: The Principal Amount of Series A Bonds offered was Rp571,000,000,000 (five hundred and seventy-one billion rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.25% (eight point two five percent) per year with a term of 3 (three) years from the Issuance Date, which has been paid off on September 8, 2024. WIKA already paid off the maturity of Series A in September 2024.
2. Series B: The principal amount of Series B Bonds offered was Rp197,000,000,000 (one hundred ninety-seven billion rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.55% (nine point one zero percent) per year with a term of 5 (five) years from the Issuance Date.
3. Series C: The Principal Amount of Series C Bonds offered was Rp982,000,000,000 (nine hundred and eighty-two billion rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.25% (nine point two five percent) per year with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang Masih Beredar Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021 that is still Outstanding

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2023	2024	
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase II Year 2021	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	8 September 2021 September 8, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 3 Tahun (lunas) Seri B: 5 Tahun Seri C: 7 Tahun Series A : 3 years (paid) Series B : 5 years Series C : 7 years 	Rp	1.156	<ul style="list-style-type: none"> Seri B: 8 September 2026 (Lunas) Seri C: 8 September 2028 Series B : September 8, 2026 (paid) Series C : September 8, 2028 	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 8,25% Seri B: 8,55% Seri C: 9,25% Series A : 8,25% Series B : 8,55% Series C : 9,25% 	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Continuous Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022

Pada 18 Februari 2022, WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022. Jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.750.000.000.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

1. Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp593.950.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
2. Seri B : Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp730.900.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
3. Seri C : Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.150.000.000 (empat ratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022

On February 18, 2022, WIKA issued a Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022. The principal amount of the Bonds is Rp1,750,000,000,000 and consists of 3 (three) series:

1. Series A: The principal amount of Series A Bonds offered is Rp593,950,000,000 (five hundred ninety three billion nine hundred and fifty million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 6.50% (six point five zero percent) per year with a term of 3 (three) years from the Issuance Date.
2. Series B: The principal amount of the Series B Bonds offered is Rp425,150,000,000 (four hundred twenty five billion one hundred and fifty million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 7.75% (seven point seventy five percent) per year with a term of 5 (five) years from the Issuance Date.
3. Series C: The principal amount of Series C Bonds offered is Rp730,900,000,000 (seven hundred thirty billion nine hundred million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.30% (eight point three zero percent) per year with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 yang Masih Beredar

Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022 that is still Outstanding

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2023	2024	
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	18 Februari 2022 February 18, 2022	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 3 Tahun Seri B: 5 Tahun Seri C: 7 Tahun Series A: 3 years Series B: 5 years Series C: 7 years 	Rp	1.750	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 18 Februari 2025 Seri B: 18 Februari 2027 Seri C: 18 Februari 2029 Series A: February 18, 2025 Series B: February 18, 2027 Series C: February 18, 2029 	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 6,50% Seri B: 7,75% Seri C: 8,30% Series A: 6.50% Series B: 7.75% Series C: 8.30% 	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022

Pada 3 November 2022, WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022. Jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.204.880.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

1. Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp497.800.000.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah). Dengan bunga Obligasi sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
2. Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp275.230.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
3. Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp449.850.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds III Phase I 2022

On November 3, 2022, WIKA issued a Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds III Phase I 2022. These bonds are denominated in Rp1,204,880,000,000 consisting of 3 (three) series:

1. Series A: The principal amount of Series A Bonds offered is Rp497,800,000,000 (four hundred ninety seven billion eight hundred million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.90% (nine point nine zero percent) per year with a term of 3 (three) years from the Issuance Date.
2. Series B: The principal amount of Series B Bonds offered is Rp275,230,000,000 (two hundred seventy five billion two hundred thirty million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 10.50% (ten point five zero percent) per year with a term of 5 (five) years from the Issuance Date.
3. Series C: The principal amount of Series C Bonds offered is Rp449,850,000,000 (four hundred forty nine billion eight hundred and fifty million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 10.90% (ten point nine zero percent) per year with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 yang Masih Beredar Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds III Phase I 2022 that is still Outstanding

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2023	2024	
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds III Phase I 2022	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	3 November 2022 September 3, 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Seri A: 3 Tahun • Seri B: 5 Tahun • Seri C: 7 Tahun • Series A: 3 years • Series B: 5 years • Series C: 7 years 	Rp	1.205	<ul style="list-style-type: none"> • Seri A: 8 November 2025 • Seri B: 8 November 2027 • Seri C: 8 November 2029 • Series A: November 8, 2025 • Series B: November 8, 2027 • Series C: November 8, 2029 	<ul style="list-style-type: none"> • Seri A: 9,90% • Seri B: 10,50% • Seri C: 10,90% • Series A: 9.90% • Series B: 10.50% • Series C: 10.90% 	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

Pada 18 Desember 2020, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020. Jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

1. Seri A : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp184.000.000.000 (seratus delapan puluh empat miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 35,83% (tiga puluh lima koma delapan tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. (Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A, telah lunas sesuai dengan tanggal jatuh tempo 18 Desember 2023).
2. Seri B : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp159.000.000.000 (seratus lima puluh sembilan miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 38,54% (tiga puluh delapan koma lima empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
3. Seri C : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp157.000.000.000 (seratus lima puluh tujuh miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 41,04% (empat puluh satu koma nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Information on Sharia Bonds Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase I 2020

On December 18, 2020, WIKA conducted a Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase I 2020. Total funds of the Mudharabah Sharia Bonds amounting to Rp 500,000,000,000 and consisting of 3 (three) series:

1. Series A: The Principal Amount of Series A Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp184,000,000,000 (one hundred and eighty four billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder's Ratio, where the ratio is 35, 83% (thirty five point eight three percent) of the Shared Income with an indication of the profit sharing equivalent to 8.60% (eight point six zero percent) per year. The term of Series A Mudharabah Sharia Bonds is 3 (three) years from the Issuance Date. (The Public Offering of Shelf-Registration of Sukuk Mudharabah I Wijaya Karya Phase I Year 2020 Series A was already fully paid in accordance with the due date of December 18, 2023).
2. Series B: The Principal Amount of Series B Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp159,000,000,000 (one hundred and fifty nine billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder's Ratio, where the ratio was 38.54% (thirty eight point five four percent) of the Shared Income with an indication of the profit sharing equivalent to 9.25% (nine point two five percent) per year. The term of Series A Mudharabah Sharia Bonds is 5 (five) years from the Issuance Date.
3. Series C: The Principal Amount of Series C Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp157,000,000,000 (one hundred and fifty seven billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder's Ratio, where the ratio was 41.04% (forty one point zero four one seven percent) of the Shared Income with an indication of the profit sharing equivalent to 9.85% (nine point two eight percent) per year. The term of Series C Mudharabah Sharia Bonds is 7 (seven) years from the Issuance Date.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase I 2020

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2023	2024	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase I 2020	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	18 Desember 2020 December 18, 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Seri A: 3 Tahun (lunas) • Seri B: 5 Tahun • Seri C: 7 Tahun • Series A : 3 years (paid) • Series B : 5 years • Series C : 7 years 	Rp	316	<ul style="list-style-type: none"> • Seri A: 18 Desember 2023 (lunas) • Seri B: 18 Desember 2025 • Seri C: 18 Desember 2027 • Series A : December 18, 2023 (paid) • Series B : December 18, 2025 • Series C : December 18, 2027 	<ul style="list-style-type: none"> • Seri A: 8,60% • Seri B: 9,25% • Seri C: 9,85% • Series A : 8.60% • Series B : 9.25% • Series C : 9.85% 	Pefindo : IdD (sy) (Default syariah)	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021

Pada 3 Maret 2021, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021. Jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

1. Seri A: Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp134.300.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 37,28% (tiga puluh tujuh koma dua delapan persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun dan diperpanjang 2 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan opsi beli (call option).
2. Seri B: Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp211.600.000.000 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 39,91% (tiga puluh sembilan koma sembilan satu persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
3. Seri C: Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp154.100.000.000 (seratus lima puluh empat miliar seratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 42,76% (empat puluh dua koma tujuh enam persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Wijaya KarSustainable Mudharabah Sharia Bonds I ya Phase II 2021

On March 3, 2021, WIKA held a Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase II 2021. Total funds of the Mudharabah Sharia Bonds amounting to Rp 500,000,000,000 and consisting of 3 (three) series:

1. Series A: The principal amount of Series A Mudharabah Sharia Bonds offered was Rp134,300,000,000 (one hundred and thirty four billion three hundred million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds Holders Ratio, where the amount is the ratio is 37.28% (thirty seven point two eight percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equivalent to 8.50% (eight point five zero percent) per year. The term of Series A Mudharabah Sharia Bonds is 3 (three) years from the Issuance Date, with call option.
2. Series B: The principal amount of Series B Mudharabah Sharia Bonds offered was Rp211.6 billion (two hundred and eleven billion six hundred million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds holders ratio, where the ratio is is 39.91% (thirty nine point nine one percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equal to 9.10% (nine point one zero percent) per year. The term of Series B Mudharabah Sharia Bonds is 5 (five) years from the Issuance Date.
3. Series C: The principal amount of Series C Mudharabah Sharia Bonds offered was Rp154.1 billion (one hundred and fifty four billion one hundred million rupiahs) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds holders ratio, where the ratio is is 42.76% (forty two point seven six percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equal to 9.75% (nine point seven five percent) per year. The term of Series C Mudharabah Sharia Bonds is 7 (seven) years from the Issuance Date.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase II 2021

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2023	2024	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase II 2021	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	3 Maret 2021 March 3, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 5 Tahun Seri B: 5 Tahun Seri C: 7 Tahun Series A: 5 years Series B: 5 years Series C: 7 years 	Rp	500	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 3 Maret 2026 Seri B: 3 Maret 2026 Seri C: 3 Maret 2028 Series A: March 3, 2026 Series B: March 3, 2026 Series C: March 3, 2028 	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 8.50% Seri B: 9.10% Seri C: 9.75% Series A: 8.50% Series B: 9.10% Series C: 9.75% 	Pefindo: IdCCC (sy) (Credit Watch syariah)	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk



Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

Pada 8 September 2021, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021. Jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp750.000.000.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

1. Seri A : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp325.500.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 58,92% (lima puluh delapan koma sembilan dua persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yang telah dilakukan pelunasan pada 8 September 2024. WIKA telah melakukan pelunasan jatuh tempo seri A pada September 2024.
2. Seri B : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp91.500.000.000,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 61,07% (enam puluh satu koma nol tujuh persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
3. Seri C : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp333.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 66,07% (enam puluh enam koma nol tujuh persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase I 2021

On September 8, 2021, WIKA conducted a Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase I 2021. Total funds of the Mudharabah Sharia Bonds amounting to Rp750,000,000,000,000 and consisting of 3 (three) series:

1. Series A: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series A offered was Rp325,500,000,000 (three hundred and twenty five billion five hundred million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Ratio of Mudharabah Sharia Bonds Holders, where the amount of the ratio is 58.92% (fifty eight point nine two percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equivalent to 8.25% (eight point two five percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series A is 3 (three) years from the Issuance Date, which has been paid off on September 8, 2024. WIKA already paid off the maturity of Series A in September 2024.
2. Series B: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series B offered was Rp91,500,000,000 (ninety one billion five hundred million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds holders ratio, where the ratio is 61.07% (sixty one point zero seven percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equivalent to 8.55% (eight point five five percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series B is 5 (five) years from the Issuance Date.
3. Series C: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series C offered was Rp333,000,000,000 (three hundred and thirty three billion rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds holders ratio, where the ratio is 66.07% (sixty six point zero seven percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equal to 9.25% (nine point two five percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series C is 7 (seven) years from the Issuance Date.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase I 2021

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2023	2024	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase I 2021	Bursa Efek Indonesia Stock Exchange	8 September 2021 September 8, 2021	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 3 Tahun (lunas) Seri B: 5 Tahun Seri C: 7 Tahun Series A : 3 years (lunas) Series B : 5 years Series C : 7 years 	Rp	337	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 8 September 2024 (lunas) Seri B: 8 September 2026 Seri C: 8 September 2028 Series A : September 8, 2024 (paid) Series B : September 8, 2026 Series C : September 8, 2028 	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 8,25% Seri B: 8,55% Seri C: 9,25% Series A : 8,25% Series B : 8,55% Series C : 9,25% 	Pefindo: IdCCC (sy) (Credit Watch syariah)	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022

Pada 18 Februari 2022, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022. Jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp750.000.000.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

1. Seri A: Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp412.900.000.000,- (empat ratus dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 51,17% (lima puluh satu koma satu tujuh persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
2. Seri B: Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp176.050.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima puluh juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 64,58% (enam puluh empat koma lima delapan persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
3. Seri C: Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp161.050.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar lima puluh juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 69,17% (enam puluh sembilan koma satu tujuh persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase II 2022

On February 18, 2022, WIKA conducted a Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase II 2022. Total funds of the Mudharabah Sharia Bonds amounting to Rp750,000,000,000,000 and consisting of 3 (three) series:

1. Series A: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series A offered is Rp412,900,000,000 (four hundred and twelve billion nine hundred million rupiahs) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing which is calculated based on the multiplication between the Nisbah of Mudharabah Sharia Bonds Holders, where the ratio is 51.17% (fifty one point one seven percent) of Revenue which is generated with an indication of profit sharing equivalent to 6.50% (six point five zero percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series A is 3 (three) years from the Issuance Date.
2. Series B: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series B offered is Rp176,050,000,000 (one hundred seventy six billion and fifty million rupiahs) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds Holder Nisbah, where the ratio is 64.58% (sixty four point five eight percent) of the Revenue which is generated with an indication of profit sharing equivalent to 7.75% (seven point seven five percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series B is 5 (five) years from the Issuance Date.
3. Series C: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series C offered is Rp 161,050,000,000 (one hundred sixty one billion and fifty million rupiahs) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing which is calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds Holder Nisbah, where the ratio is 69.17% (sixty nine point one seven percent) of the income that is shared with an indication of profit sharing equivalent to 8.30% (eight point three zero percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series C is 7 (seven) years from the date of issuance.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase II 2022

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2023	2024	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase II 2022	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	18 Februari 2022 February 18, 2022	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 3 Tahun Seri B: 5 Tahun Seri C: 7 Tahun Series A: 3 years Series B: 5 years Series C: 7 years 	Rp	750	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 18 Februari 2025 Seri B: 18 Februari 2027 Seri C: 18 Februari 2029 Series A: February 18, 2025 Series B: February 18, 2027 Series C: February 18, 2029 	<ul style="list-style-type: none"> Seri A: 6,50% Seri B: 7,75% Seri C: 8,30% Series A: 6.50% Series B: 7.75% Series C: 8.30% 	Pefindo: IdCCC (sy) (Credit Watch syariah)	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk



Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022

Pada 3 November 2022, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022. Sukuk Mudharabah ini memiliki denominasi total sebesar Rp281.815.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

1. Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp109.325.000.000 (seratus sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 66,00% (enam puluh enam koma nol nol persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,90% (sembilan koma sembilan nol) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
2. Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp140.490.000.000 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
3. Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 72,67% (tujuh puluh dua koma enam tujuh persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds III Phase I 2022

On November 3, 2022, WIKA conducted a Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds III I 2022. This Mudharabah Sharia Bonds has a total denomination of Rp281,815,000,000 consisting of 3 (three) series, namely:

1. Series A: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series A offered is Rp109,325,000,000 (one hundred nine billion three hundred and twenty five million rupiahs) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds Holders Nisbah, where the amount of the ratio is 66.00% (sixty-six point zero zero percent) of Revenue which is generated with an indication of profit sharing equivalent to 9.90% (nine point nine zero) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series A is 3 (three) years from the Issuance Date.
2. Series B: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series B offered is Rp140,490,000,000 (one hundred forty billion four hundred and ninety million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds Holders Ratio, where the amount of the ratio is 70.00% (seventy point zero zero percent) of Revenue which is generated with an indication of profit sharing equivalent to 10.50% (ten point five zero percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series B is 5 (five) years from the Issuance Date.
3. Series C: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series C offered is Rp32,000,000,000 (thirty-two billion rupiahs) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bondholders Nisbah, where the ratio is 72.67% (seventy-two point six seven percent) of Revenue that is generated with an indication of profit sharing equivalent to 10.90% (ten point nine zero percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series C is 7 (seven) years from the date of issuance.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds III I 2022

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (miliar) Value (Billions)	Tanggal jatuh tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2023	2024	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Wijaya Karya Mudharabah Sharia Bonds III Phase I 2022	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	3 November 2022 November 3, 2022	• Seri A: 3 Tahun • Seri B: 5 Tahun • Seri C: 7 Tahun • Series A : 3 years • Series B : 5 years • Series C : 7 years	Rp	282	• Seri A: 3 November 2025 • Seri B: 3 November 2027 • Seri C: 3 November 2029 • Series A : November 3, 2025 • Series B : November 3, 2027 • Series C : November 3, 2029	• Seri A: 9,90% • Seri B: 10,50% • Seri C: 10,90% • Series A: 9,90% • Series B: 10,50% • Series C: 10,90%	Pefindo: IdCCC (sy) (Credit Watch syariah)	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Information on other Sources of Funding

MEDIUM TERM NOTES

WIKA Realty dan Entitas Anak

Berikut rincian *Medium Term Notes* (MTN) WIKA Realty dan Entitas Anak yang masih beredar:

MEDIUM TERM NOTES

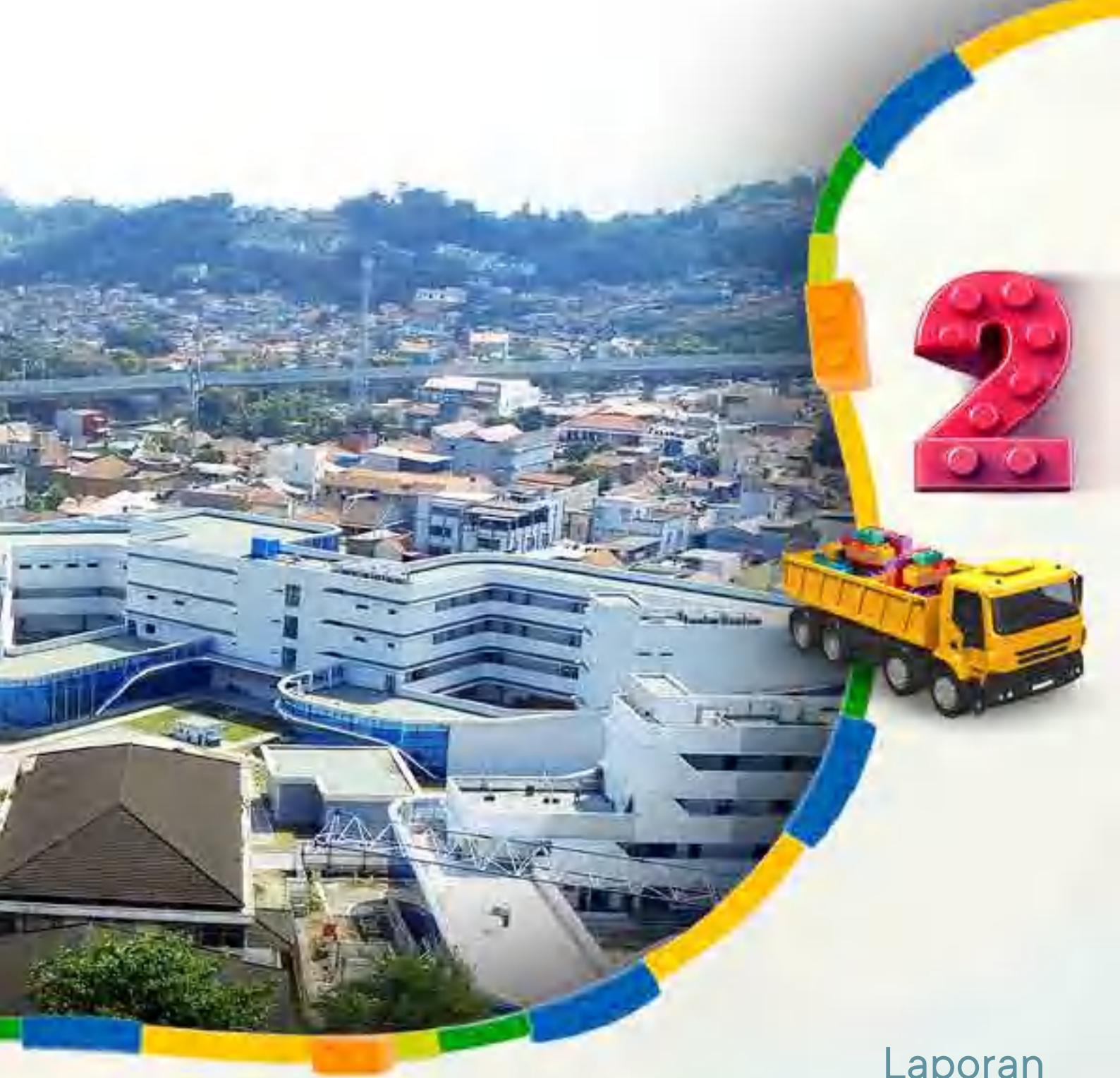
WIKA Realty and Subsidiaries

The details of *Medium Term Notes* (MTN) of MTN WIKA Realty and Subsidiaries that are still outstanding is as follows

Nama Efek Name	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor Tenor	Mata Uang Mata Uang Currency	Nilai (miliar) Value (billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee
								2023	2024	
WIKA Realty										
MTN IX WIKA Realty Tahun 2019 WIKA Realty MTN IX 2019	23 Agustus 2019 August 23, 2019	5 Tahun 5 years	Rp	545	28 Agustus 2024 August 28, 2024	12,00%	Belum Lunas Not Yet Paid	idBB+	idBBB	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Obligasi dengan Opsi Konversi I WIKA Realty Tahun 2019 WIKA Realty Convertible Option Bonds I 2019	19 Desember 2019 December 19, 2019	14 tahun 14 years	Rp	950	30 Desember 2038 December 30, 2038	11,20%	Belum Lunas Not Yet Paid	idBB+ (cg)	BBB	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
MTN IX WIKA Realty Tahun 2019 WIKA Realty MTN IX 2019	26 Juli 2019 July 26, 2019	9 Tahun 9 years	Rp	300	26 Juli 2028 July 26, 2028	12,00%	Belum Lunas Not Yet Paid	Non Rating	Non Rating	PT Bank Bukopin Tbk
Entitas Anak WIKA Realty										
MTN IV PT Hotel Indonesia Natour Tahun 2017 PT Hotel Indonesia Natour MTN IV 2017	28 Juli 2017 July 28, 2017	7 Tahun 7 years	Rp	50	20 Juli 2024 July 20, 2024	12,85%	Belum Lunas Not Yet Paid	Non Rating	Non Rating	PT Bank Bukopin Tbk

Universitas Universitas Jendral A. Yani Bandung
Universitas Universitas Jendral A. Yani Bandung





Laporan Manajemen

Management Report



Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa bersinergi untuk memperkuat bisnis WIKA dan melanjutkan proses transformasi untuk memperkuat ketahanan bisnis. Dengan strategi yang adaptif dan implementasi tata kelola yang solid, WIKA berkomitmen untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners and Board of Directors consistently synergize to strengthen WIKA's business and continue the transformation process to enhance business resilience. With an adaptive strategy and solid governance implementation, WIKA is committed to creating long-term value for stakeholders.

Laporan Dewan Komisaris

Laporan Dewan Komisaris



Jarot
Widnyoko

Komisaris Utama
President Commissioner

MENJAGA ARAH, MEMASTIKAN TATA KELOLA, DAN MENGAWASI KEBERLANJUTAN

Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan sekaligus momentum reflektif bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam melakukan transformasi fundamental. Dewan Komisaris memandang bahwa strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Direksi telah menunjukkan arah yang progresif, dengan tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas komitmen Direksi dalam menjaga keberlangsungan usaha, khususnya melalui pelaksanaan restrukturisasi keuangan dan operasional yang terukur, serta upaya adaptif menghadapi proses hukum yang muncul sebagai konsekuensi dinamika industri konstruksi nasional.

Dewan Komisaris senantiasa mencermati dan mengawasi secara berkala kebijakan strategis Direksi dalam menjawab tantangan tahun 2024, termasuk proses restrukturisasi usaha dan keuangan serta penyelesaian kewajiban kepada para mitra usaha dan kreditur. Dewan Komisaris memandang bahwa langkah Direksi untuk mengelola proses PKPU secara terbuka dan bertanggung jawab merupakan wujud komitmen terhadap keberlanjutan usaha dan integritas tata kelola.

Dalam menjalankan pengawasan, Dewan Komisaris menilai bahwa kebijakan penjadwalan ulang kewajiban, penataan portofolio proyek, serta efisiensi operasional merupakan langkah realistis yang perlu diiringi dengan komunikasi efektif kepada seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan telah menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat fondasi tata kelola yang sehat dan transparan, antara lain melalui penguatan struktur internal, implementasi sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, serta penegasan prinsip etika dalam proses bisnis.

Dewan Komisaris menilai bahwa pengembangan *House of Sustainability* sebagai kerangka strategis keberlanjutan, serta inisiasi *Grand Roadmap ESG 2024–2028*, merupakan langkah penting yang mencerminkan keseriusan Perseroan dalam mewujudkan visi sebagai perusahaan infrastruktur dan EPC yang terpercaya dan berkelanjutan.

MAINTAINING DIRECTION, ENSURING GOVERNANCE, AND OVERSEEING SUSTAINABILITY

The year 2024 is a challenging period and a reflective moment for PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in its fundamental transformation. Board of Commissioners views that the strategies and policies undertaken by the Board of Directors have shown a progressive direction, while still being grounded in the principles of prudence, sustainability, and good governance.

Board of Commissioners highly appreciates the Board of Directors' commitment in maintaining business continuity, especially through the implementation of measured financial and operational restructuring, as well as adaptive efforts in dealing with legal processes that arise as a consequence of the dynamics in national construction industry.

Board of Commissioners continuously monitors and periodically oversees the Board of Directors' strategic policies in addressing the challenges of 2024, including the business and financial restructuring processes and the settlement of obligations to business partners and creditors. Board of Commissioners notices that the Board of Directors' approach in managing the PKPU (Suspension of Debt Payment Obligation) process in an open and responsible manner as a manifestation of commitment to business continuity and governance integrity.

In carrying out the oversight, Board of Commissioners assesses that the policies of debt rescheduling, project portfolio restructuring, and operational efficiency are realistic measures that need to be accompanied by effective communication to all stakeholders.

The Company has taken tangible steps in strengthening the foundation of healthy and transparent governance, including the strengthening of internal structures, the implementation of a more integrated monitoring system, and the affirmation of ethical principles in business processes.

Board of Commissioners considers the development of the House of Sustainability as a strategic framework for sustainability, as well as the initiation of the Grand Roadmap ESG 2024–2028, as important steps that reflect the Company's earnestness in realizing its vision as a trusted and sustainable infrastructure and EPC company.



Kami juga mencatat bahwa seluruh fungsi dan unit kerja di Perseroan telah dilibatkan dalam agenda keberlanjutan secara aktif. Penugasan khusus kepada Direktur SDM & Transformasi sebagai penanggung jawab aspek keberlanjutan, serta pembentukan Komite ESG yang terdiri atas lintas fungsi strategis, menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan lagi sekadar inisiatif, melainkan bagian dari *core strategy* yang harus dijaga kontinuitas dan akuntabilitasnya dalam pelaksanaan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang telah melaksanakan tugas dengan efektif. Evaluasi terhadap penerapan *Good Corporate Governance*, penguatan *Whistleblowing System*, serta pelaksanaan audit internal dan ICORPAX, menjadi perhatian penting dalam rangka menjaga integritas dan transparansi perusahaan.

Dewan Komisaris juga memantau inisiatif manajemen dalam penguatan pengendalian internal berbasis risiko (*risk-based internal control*), termasuk langkah preventif melalui pengembangan *risk register* berbasis ESG dan penerapan prinsip *Three Lines of Defense*.

Dewan Komisaris menyadari bahwa keberhasilan WIKA ke depan sangat ditentukan oleh keberanian dalam bertransformasi dan menjaga konsistensi dalam tata kelola. Kami percaya bahwa keberlanjutan yang dibangun di atas fondasi integritas dan akuntabilitas akan menjadi keunggulan bersaing yang melekat pada WIKA. Kami juga meyakini bahwa dengan arah kebijakan yang adaptif dan kolaboratif antara Direksi dan Dewan Komisaris, serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, WIKA dapat membangun kembali fondasi usaha yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan. Untuk itu, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan berjalan dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan bertanggung jawab.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan laporan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dijalankan Direksi, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya. Laporan Dewan Komisaris ini diantaranya mencakup penilaian kami atas kinerja Direksi dalam pengelolaan Perseroan, pandangan kami atas prospek usaha Perseroan yang disusun oleh Direksi dan pandangan kami atas penerapan Tata Kelola.

KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI KONSTRUKSI TAHUN 2024

Ekonomi global kembali tumbuh melambat di tahun 2024. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi global tahun 2024 tumbuh 3,2% atau lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 3,3%. Konflik geopolitik yang berkepanjangan di Eropa, Timur Tengah dan Asia Timur serta perang dagang antara Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok telah membuat ekonomi global sulit untuk berkembang di tahun 2024.

Selain itu, tingkat suku bunga yang tinggi juga menghambat laju pertumbuhan sektor usaha. Hal tersebut dikarenakan beban modal usaha menjadi semakin tinggi dan likuiditas perusahaan menjadi semakin ketat.

We also note that all functions and work units within the Company have been actively involved in the sustainability agenda. The special assignment to the Director of HC & Transformation as the person responsible for sustainability aspects, as well as the formation of ESG Committee consisting of cross-functional strategic leaders, shows that sustainability is no longer just an initiative but has become a part of the core strategy that must be maintained for continuity and accountability in its implementation.

In performing its oversight function, Board of Commissioners is supported by committees under Board of Commissioners, which have carried out their duties effectively. The evaluation of Good Corporate Governance implementation, Whistleblowing System strengthening, as well as internal audits and ICORPAX implementation are important areas of focus to maintain the Company's integrity and transparency.

Board of Commissioners also monitors the management's initiatives in strengthening risk-based internal control, including preventive measures through the development of an ESG-based risk register and the application of the Three Lines of Defense principle.

Board of Commissioners recognizes that WIKA's success going forward is determined by the courage to transform and maintain consistency in governance. We believe that sustainability, built on the foundations of integrity and accountability, will be a competitive advantage inherent in WIKA. We are also confident that with an adaptive and collaborative policy direction between Board of Directors and Board of Commissioners, along with full support from all stakeholders, WIKA can rebuild a healthy, resilient, and sustainable business foundation. Therefore, Board of Commissioners is committed to continuing to play an active role in ensuring that all decision-making processes are carried out with the principles of prudence, transparency, and responsibility.

On this occasion, we would like to present our supervisory report on the management of the Company performed by the Board of Directors, as a form of accountability to the Shareholders and all other stakeholders. This report from Board of Commissioners includes our assessment on the Board of Directors' performance in managing the company, our views on business prospects of the Company as prepared by the Board of Directors, and our views on the implementation of governance.

ECONOMIC AND CONSTRUCTION INDUSTRY CONDITIONS IN 2024

Global economic growth slowed down again in 2024. The International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth in 2024 to be 3,2%, lower than the previous year's 3,3%. The prolonged geopolitical conflicts in Europe, the Middle East, and East Asia, as well as the trade war between the United States, Europe, and China, have made it difficult for the global economy to grow in 2024.

In addition, high-interest rates have also hindered business sector growth. This is due to the increasing cost of capital and tighter company liquidity.

Demikian juga dengan ekonomi Indonesia. Kendati tumbuh cukup solid sebesar 5,03%, namun sejumlah tantangan tetap membayangi perekonomian Indonesia. Beberapa indikator ekonomi Indonesia juga mengalami tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, sektor konstruksi nasional pada tahun 2024 menunjukkan dinamika yang cukup menantang. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi anggaran infrastruktur dan fokus pada penyelesaian proyek-proyek besar, termasuk jalan tol dan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam situasi tersebut, para pelaku industri melakukan antisipasi terhadap kebijakan strategis pemerintah yang akan berdampak langsung pada arah pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi perencanaan perolehan proyek baru, tetapi juga menuntut penyesuaian operasional dan strategi perusahaan agar tetap relevan dalam lingkungan yang dinamis.

Industri konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional yang dilakukan Pemerintah. Meskipun demikian, menjelang akhir tahun 2024 terdapat perubahan kebijakan dan prioritas pemerintah dengan dicanangkannya program Asta Cita, di mana fokus Pemerintah beralih kepada pembangunan sumber daya manusia dan tata Kelola berkelanjutan, sehingga para pelaku industri harus mengelola risiko dan inovasi untuk menghadapi kondisi industri konstruksi kedepannya.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dewan Komisaris sangat memahami tantangan yang dihadapi Direksi dalam mengelola Perseroan di tahun 2024. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi upaya yang dilakukan Direksi untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Dewan Komisaris mengapresiasi langkah-langkah yang dijalankan Direksi dalam menyikapi kondisi dan dinamika ekonomi sepanjang tahun 2024. Berbagai inisiatif dan kebijakan strategis yang dijalankan Direksi terbukti mampu membawa WIKA meraih kinerja yang baik di tahun 2024.

Di tahun 2024, dalam upaya penyehatan perusahaan Direksi terus berupaya untuk tetap menjaga stabilitas perusahaan serta menjaga kepercayaan para investor dan *stakeholders*. Dewan Komisaris menilai, upaya penyehatan WIKA yang dilakukan Direksi yang masih berfokus dalam menjalankan program 8 *stream* penyehatan Keuangan, yaitu 1) Restrukturisasi Keuangan, 2) Perbaikan Tata Kelola dan Manajemen Risiko, 3) Percepatan Penagihan Piutang Bermasalah, 4) *Asset Recycling*, 5) Perbaikan Portfolio *Orderbook*, 6) Penurunan *Operating Expense*, 7) Penurunan Saldo Pinjaman Talangan *Supplier*, 8) Penguatan Struktur Permodalan.

The same goes for Indonesia's economy. Although grew solidly by 5.03%, several challenges still loom over Indonesia's economy. Some economic indicators in Indonesia also showed a declining trend compared to the previous year.

In line with the slowdown in economic growth, the national construction sector in 2024 faced quite a challenging dynamic. The government adopted a policy to reduce the infrastructure budget and focus on completing major projects, including toll roads and infrastructure in the National Capital City (IKN).

In this situation, industry players were anticipating the government's strategic policies, which will directly impact the direction of infrastructure development in Indonesia. This condition did not only affect the planning of new project acquisitions but also demanded operational and strategic adjustments to remain relevant in a dynamic environment.

The construction industry plays a strategic role in supporting national development carried out by the Government. However, by the end of 2024, there were policy and priority changes by the government with the launch of the Asta Cita program, shifting the government's focus to human resource development and sustainable governance. As a result, industry players must manage risks and conduct innovations to face future conditions in the construction industry.

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF BOARD OF DIRECTORS AND THE BASIS FOR ASSESSMENT

Board of Commissioners fully understands the challenges faced by the Board of Directors in managing the Company in 2024. These challenges significantly influenced the efforts made by the Board of Directors to achieve the established targets.

Amidst these challenges, Board of Commissioners appreciates the measures taken by the Board of Directors in responding to the economic conditions and dynamics throughout 2024. Various initiatives and strategic policies executed by the Board of Directors have proven to bring WIKA to achieve good performance in 2024.

In 2024, in its efforts to improve the Company's condition, the Board of Directors continued to work on maintaining the Company's stability as well as maintaining investor and stakeholder trust. Board of Commissioners assesses that the efforts made by the Board of Directors to restructure WIKA, with a focus on running the 8-stream financial recovery program, which includes: 1) Financial Restructuring, 2) Improvement of Governance and Risk Management, 3) Acceleration of Problematic Receivables Collection, 4) Asset Recycling, 5) Improvement of Orderbook Portfolio, 6) Reduction of Operating Expenses, 7) Reduction of Supplier Bailout Loan Balances, and 8) Strengthening of Capital Structure, have been effective.



Selain itu, Dewan Komisaris juga menilai Direksi telah melakukan upaya efisiensi, antara lain dengan melakukan integrasi ERP guna mendapatkan kebutuhan data dan informasi yang lebih akurat.

Berkenaan dengan kriteria/indikator penilaian yang dilakukan dalam mengukur kinerja Direksi, setiap tahun Direksi diberikan target *Key Performance indicators* (KPI) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. KPI tersebut diatur format dan pokok-pokok indikatornya oleh Kementerian BUMN sehingga tetap dalam koridor peraturan yang berlaku.

Dalam KPI tersebut kami menilai Direksi dari 5 perspektif, yaitu:

1. Nilai Ekonomi Dan Sosial
2. Inovasi Model Bisnis
3. Kepemimpinan Teknologi
4. Peningkatan Investasi
5. Pengembangan Talenta

Selain itu, Dewan Komisaris juga mengevaluasi kinerja korporat melalui penilaian tingkat kesehatan. Kemudian untuk memastikan pencapaian RKAP terpantau secara berkala sebagai *early warning system*, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas hasil usaha WIKA setiap bulan melalui rapat bulanan bersama Direksi.

Dari aspek keuangan, Dewan Komisaris menilai Direksi telah berhasil membawa WIKA membukukan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2024, WIKA membukukan pendapatan neto sebesar Rp19.243 miliar dan mencatat rugi neto sebesar Rp2.514 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya, rugi neto Perseroan mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2023 Perseroan membukukan rugi neto sebesar Rp7.824 miliar. Hal tersebut tak lepas dari keberhasilan upaya Direksi dalam melakukan restrukturisasi utang Perseroan kepada pihak perbankan.

Atas berbagai pencapaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi beserta jajarannya yang telah membawa Perseroan meraih hasil yang baik di tengah dinamika ekonomi yang diwarnai ketidakpastian sepanjang tahun 2024.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dijalankan Direksi, Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan sepanjang tahun 2024. Pengawasan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, antara lain terkait penerapan strategi dan kebijakan strategis Perseroan, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan aspek-aspek lain yang terkait dengan Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan nasihat, rekomendasi serta persetujuan terhadap hal-hal yang disampaikan Direksi.

In addition, Board of Commissioners also assesses that the Board of Directors has carried out efficiency efforts, including integrating ERP to obtain more accurate data and information.

Regarding the criteria/indicators used to assess the Board of Directors' performance, the Board of Directors is given an annual *Key Performance Indicator* (KPI) target set by Board of Commissioners. The KPI is formatted and its key indicators are determined by the Ministry of SOEs to remain within the applicable regulatory framework.

In the KPI, we assess the Board of Directors from 5 perspectives, namely:

1. Economic and Social Value
2. Business Model Innovation
3. Technological Leadership
4. Investment Growth
5. Talent Development

Additionally, Board of Commissioners evaluates corporate performance through an assessment of the Company's health level. To ensure the achievement of the Work Plan and Budget (RKAP) is monitored periodically as an *early warning system*, Board of Commissioners supervises WIKA's performance results every month through monthly meetings with the Board of Directors.

From a financial perspective, Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has succeeded in bringing WIKA to record better performance compared to the previous year. In 2024, WIKA recorded net revenue of Rp19,243 billion and a net loss of Rp2,514 billion. Compared to the previous year, the Company's net loss decreased significantly, as in 2023 the Company recorded a net loss of Rp7,824 billion. This success is a result of the Board of Directors' successful efforts in restructuring the Company's debt to the banking sector.

For these achievements, Board of Commissioners extends high appreciation to the Board of Directors and its team for bringing the Company to achieve good results amidst the economic dynamics marked by uncertainty throughout 2024.

THE IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES

As the organ in charge of overseeing the management of the Company carried out by the Board of Directors, Board of Commissioners has performed a variety of supervisory activities throughout 2024. The supervision covers various aspects, including those related to the implementation of the Company's strategies and strategic policies, the implementation of good corporate governance principles and other aspects related to the Company. In addition, Board of Commissioners has also provided advice, recommendations and approval for matters submitted by the Board of Directors.

Pengawasan Terhadap Perumusan Strategi

Kendati tidak terlibat dalam kegiatan operasional Perseroan, Dewan Komisaris menjalankan pengawasan secara aktif mulai proses perumusan strategi perusahaan. Dewan Komisaris dapat memberikan arahan kepada Direksi untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan strategis Perseroan telah sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan serta aspirasi pemegang saham.

Pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui mekanisme rapat bersama Direksi atau dengan menugaskan Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris juga akan memberikan persetujuan terhadap strategi dan kebijakan strategis serta target yang disusun Direksi sebelum disampaikan kepada pemegang saham.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang, tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dijalankan Direksi, termasuk dalam implementasi strategi Perseroan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disampaikan Direksi dan mendapat persetujuan dari Pemegang Saham sebagai acuan pengawasan.

Terhadap inisiatif strategis yang dijalankan Direksi di tahun 2024, Dewan Komisaris menilai telah sejalan dengan rencana yang ditetapkan dalam RKAP 2024, terutama terkait peningkatan pengelolaan *cashflow*, proaktif dalam melakukan manajemen risiko sebagai *tools* pengelolaan bisnis perusahaan, serta upaya peningkatan *competitiveness* melalui efisiensi *cost* dan upaya pemilihan proyek dan mitra yang lebih selektif. Selain itu juga dilakukan integrasi ERP sebagai upaya efisiensi operasional dan audit ICOFR sebagai upaya untuk mempertahankan kepercayaan investor dan kesehatan keuangan melalui evaluasi pengendalian internal.

Fokus Pengawasan Dewan Komisaris di tahun 2024 adalah pada 8 stream upaya penyehatan Keuangan Perusahaan, antara lain dengan penyerapan PMN tahun anggaran 2024. Dewan Komisaris mengingatkan agar Direksi melakukan Upaya percepatan sehingga penyerapan PMN tahun anggaran 2024 sesuai dengan target akhir tahun. Terkait rencana perubahan/relokasi PMN tahun anggaran 2024, Direksi diminta untuk segera melaporkan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya dapat diajukan usulan kepada Kementerian BUMN.

Dewan Komisaris menyarankan agar perlu dilakukan pendetailan target-target atas 8 *stream* penyehatan Keuangan pertahun sehingga dapat dilakukan evaluasi tahunan serta mitigasi risiko jika target tahunan tidak dapat tercapai.

Supervision on Strategy Formulation

Although not directly involved in the Company's operational activities, Board of Commissioners actively supervises the process of formulating the Company's strategy. Board of Commissioners can provide guidance to the Board of Directors to ensure that the Company's strategy and strategic policies align with the Company's vision, mission, and objectives, as well as the shareholders' aspirations.

The supervision carried out by Board of Commissioners can be done through joint meetings with the Board of Directors or by assigning committees under Board of Commissioners.

Board of Commissioners will also approve the strategy, strategic policies, and targets prepared by the Board of Directors before being presented to the shareholders.

Supervision on Strategy Implementation

In accordance with the mandate of the Law, the main duty of Board of Commissioners is to supervise the management of the Company carried out by the Board of Directors, including the implementation of the Company's strategy. In exercising its supervisory function, Board of Commissioners adheres to the Company Work Plan and Budget (RKAP) submitted by the Board of Directors and approved by Shareholders as a reference for supervision.

As for the strategic initiatives carried out by the Board of Directors in 2024, Board of Commissioners considers that they are in line with the plans set out in the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP), especially related to improving cash flow management, being proactive in conducting risk management as a tool for managing the Company's business, and efforts to increase competitiveness through cost efficiency and more selective project and partner selection. In addition, ERP integration is carried out as an effort to improve operational efficiency and ICOFR audits as an effort to maintain investor confidence and financial health through internal control evaluations.

The focus of Board of Commissioners' oversight in 2024 is on the 8 streams of the Company's financial recovery efforts, including the absorption of PMN in the 2024 fiscal year. Board of Commissioners reminded the Board of Directors to make efforts to accelerate the absorption of PMN in the 2024 fiscal year to meet the end-of-year target. Regarding the plan to change/relocate PMN in the 2024 fiscal year, the Board of Directors was asked to immediately report to Board of Commissioners so that a proposal could then be submitted to the Ministry of SOEs.

Board of Commissioners suggested that it is necessary to detail the targets for the 8 financial recovery streams per year so that an annual evaluation can be carried out as well as risk mitigation if the annual target cannot be achieved.



Mekanisme dan Frekuensi Pengawasan

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara rutin atas kinerja Direksi, mekanisme yang dilakukan diantaranya dengan melakukan pembahasan internal bulanan antara Dewan Komisaris dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi, Remunerasi & GCG atas pencapaian kinerja WIKA. Selanjutnya dilakukan pembahasan minimal sebulan sekali antara Dewan Komisaris dengan Direksi, dimana dalam rapat gabungan tersebut Dewan Komisaris menyampaikan saran dan nasehat bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan.

Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan program pengawasan fisik ke lapangan untuk memastikan proyek-proyek yang dibangun oleh WIKA Grup sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Direksi. Melalui program tersebut diharapkan Dewan Komisaris dapat memperoleh gambaran yang lebih luas atas tantangan dan peluang yang dimiliki WIKA.

Rapat Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Dewan Komisaris telah membagi pembedangan tugas pengawasan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris. Hal tersebut dimaksudkan agar semua aspek operasional Perseroan tak luput dari pengawasan Dewan Komisaris. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing Dewan Komisaris, dilaksanakan rapat internal Dewan Komisaris yang sekaligus untuk mempersiapkan materi yang akan dibahas dalam rapat bersama Direksi.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris melaksanakan rapat internal sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat internal Dewan Komisaris dengan rata-rata kehadiran anggota di atas kuorum rapat. Selain itu, Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat bersama Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Perseroan dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris juga menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal tersebut.

Kunjungan Lapangan

Dewan Komisaris juga mengupayakan melakukan kunjungan ke lapangan untuk memastikan proyek-proyek yang dibangun oleh WIKA Grup sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Direksi. *Site visit* ke lapangan dapat membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh gambaran yang lebih luas atas tantangan dan peluang yang dimiliki WIKA, serta mampu berinteraksi dengan karyawan di proyek sehingga memperoleh input dari sisi para pekerja. Dewan Komisaris juga dibantu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dalam melakukan evaluasi dan reviu atas kinerja yang telah berjalan dan rencana kerja ke depan.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris melakukan kunjungan lapangan sebanyak 5 (lima) kali, antara lain Proyek Paket Rancang Bangun SPAM Regional Jatiluhur 1 Bekasi Jawa Barat, Proyek Pembangunan Jalan Tol IKN 3B-2 Segmen KKT Kariangau - SP. Tempadung, Proyek Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur Tahap 2, Proyek Tol Jakarta - Cikampek Selatan 2A, dan Proyek RDF Plant Rorotan Jakarta.

Mechanism and Frequency of Supervision

Board of Commissioners conducts routine supervision on the Board of Directors' performance. The mechanisms include monthly internal discussions between Board of Commissioners and Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination, Remuneration & GCG Committee to review WIKA's performance achievements. Additionally, discussions are held at least once a month between Board of Commissioners and Board of Directors, where in these joint meetings, Board of Commissioners provides suggestions and advice to Board of Directors in managing the Company's business activities.

Furthermore, Board of Commissioners also conducts physical site monitoring programs to ensure that the projects built by WIKA Group align with the reports provided by Board of Directors. Through this program, it is expected that Board of Commissioners can gain a broader perspective on the challenges and opportunities that WIKA faces.

Board of Commissioners Meetings

To enhance the effectiveness of supervision, Board of Commissioners has divided the supervisory tasks among its members. This is intended to ensure that all operational aspects of the Company are under the Board of Commissioners' supervision. As a follow-up to the supervision carried out by each member of Board of Commissioners, internal Board of Commissioners meetings are held to prepare the materials to be discussed in joint meetings with the Board of Directors.

Throughout 2024, Board of Commissioners held 10 (ten) internal meetings, with the average attendance of members exceeding the quorum. Additionally, Board of Commissioners held 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors. In these forums, Board of Commissioners can request explanations from the Board of Directors regarding the Company's performance achievements and any challenges faced. Board of Commissioners also provides their views and offers advice to the Board of Directors on these matters.

Site Visits

Board of Commissioners also makes efforts to conduct site visits to ensure that the projects built by WIKA Group align with the reports provided by the Board of Directors. Site visits help Board of Commissioners gain a broader perspective on the challenges and opportunities possessed by WIKA, and also allow for interaction with employees at the project sites to gather input from the workers' side. Board of Commissioners is also assisted by Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination, Remuneration, and GCG Committee in evaluating and reviewing past performance and future work plans.

Throughout 2024, Board of Commissioners made 5 (five) site visits, including to Regional SPAM Jatiluhur 1 Bekasi West Java Project, IKN 3B-2 Toll Road Development Project Segment KKT Kariangau - SP. Tempadung, National Axis Eastern Side Stage 2 Toll Road Project, Jakarta - Cikampek Selatan 2A Toll Road Project, and RDF Plant Rorotan Jakarta Project.

Tanggapan, Nasihat dan Rekomendasi

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Dewan Komisaris dapat memberikan tanggapan, nasihat dan rekomendasi kepada Direksi. Beberapa tanggapan dan rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi:

- Direksi diminta untuk melakukan pengelolaan *cashflow* secara hati-hati dengan memastikan arus kas aktifitas operasi tetap positif serta meningkatkan *cost awareness* melalui efisiensi biaya dan pengeluaran berdasarkan skala prioritas.
- Direksi diminta memaksimalkan *collection period* melalui penyelesaian piutang dengan menggunakan pendekatan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
- Tagihan bruto agar segera diproses administrasinya, sehingga tidak menjadi permasalahan hukum dan atau peningkatan piutang bermasalah Perseroan di kemudian hari.
- Pengelolaan dan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan hasil *rights issue* oleh Perseroan agar dilakukan dengan hati-hati, sesuai peruntukannya dan memberikan imbal hasil serta nilai tambah yang terbaik bagi Perseroan.
- Direksi agar meningkatkan Pengawasan terhadap entitas asosiasi sehingga memperoleh nilai tambah atas nilai investasi Perseroan.
- Direksi agar senantiasa berusaha meningkatkan system tata Kelola internal melalui reviu dan perbaikan pedoman dan prosedur secara periodik dengan mengedepankan pengambilan Keputusan secara *four eyes* serta mengimplementasikan perbaikan tata Kelola manajemen risiko sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/09/2023.
- Direksi agar menyusun analisa sensitifitas bisnis terhadap kondisi terkini dan menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk mendukung pencapaian target di tahun 2024.
- Dekom mendukung rencana implementasi SAP pada Anak Perusahaan, dan perlu ada prioritas penerapan SAP pada Anak Perusahaan yang dimulai dengan Anak Perusahaan yang memiliki jumlah asset dan utang terbanyak.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

IMF memproyeksi ekonomi global tahun 2025 akan tumbuh stabil dari tahun 2024 sebesar 3,2%. Namun demikian, masih terdapat sejumlah risiko yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global, seperti ketegangan geopolitik di beberapa kawasan dan tingkat suku bunga yang masih relatif tinggi.

Ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2024. Bank Indonesia memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 4,7%-5,5%, sedangkan pemerintah pada APBN 2025 menargetkan untuk meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.

Di tengah kondisi tersebut, industri konstruksi masih memiliki potensi yang cukup baik. Namun demikian, Dewan Komisaris menilai WIKA ke depan harus dapat menyelaraskan strategi pengembangan usahanya dengan program strategis Kementerian BUMN (KBUMN) yang berfokus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Responses, Advice and Recommendations

In accordance with statutory provisions, Board of Commissioners may provide responses, advice and recommendations to Board of Directors. Some of the responses and recommendations provided by Board of Commissioners to Board of Directors are:

- The Board of Directors is requested to manage cash flow carefully by ensuring that the cash flow from operating activities remains positive and to increase cost awareness through cost and expenditure efficiency based on the scale of priorities.
- The Board of Directors is requested to maximize the collection period through the settlement of receivables using an effective and efficient approach in accordance with applicable laws and regulations.
- The administration of gross receivables should be processed immediately, to avoid legal problems and/or an increase in the Company's bad debts in the future.
- The management and use of State Capital Participation (PMN) funds and the results of rights issues by the Company should be carried out carefully, in accordance with their designation and provide the best possible returns and added value for the Company.
- The Board of Directors to improve supervision of associated entities so as to obtain added value on the Company's investment value.
- The Board of Directors to always strive to improve the internal governance system through periodic review and improvement of guidelines and procedures by prioritizing four eyes decision making and implementing improvements to risk management governance in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/09/2023.
- The Board of Directors is required to analyze business sensitivity to current conditions and implement adequate risk management to support the achievement of targets in 2024.
- The Board of Commissioners supports SAP implementation plans at Subsidiaries, and there needs to be a priority for SAP implementation at Subsidiaries starting with those that have the most assets and debt.

VIEWS ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The IMF projected that the global economy in 2025 will grow steadily from 2024 by 3.2%. However, there are still a number of risks that could hamper global economic growth, such as geopolitical tensions in some regions and relatively high interest rates.

The Indonesian economy is projected to grow better than in 2024. Bank Indonesia predicted that the Indonesian economy would grow in the range of 4.7% -5.5%, while the government in the 2025 State Budget targeted economic growth of 5.2%.

In the midst of this condition, the construction industry still has good potential. However, Board of Commissioners believes that in the future, WIKA must be able to align its business development strategy with the strategic program of the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) which focuses on supporting economic growth.



WIKA menyelaraskan 3 (tiga) program utama: Perumahan Rakyat, Hilirisasi Mineral, dan Ketahanan & Transisi Energi. Dewan Komisaris menilai terdapat sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan dari tiga program tersebut. Di bidang perumahan rakyat Perseroan dapat mengambil peluang dalam proyek pembangunan 3 juta rumah bersubsidi dan permintaan hunian inklusif. Di bidang hilirisasi mineral, terdapat peluang di proyek ramah lingkungan dan dukungan dekarbonisasi nasional. Sedangkan di bidang ketahanan & transisi energi, terbuka akses pembiayaan berkelanjutan dan regulasi pro transisi energi.

Untuk itu, Dewan Komisaris telah menyampaikan saran dan nasihat kepada Direksi agar dapat mewujudkan kinerja tahun 2025 yang lebih baik, antara lain:

1. Melanjutkan upaya penyehatan keuangan Perseroan secara konsisten yang dilakukan melalui 8 (delapan) *stream* penyehatan WIKA yang merupakan bagian dari transformasi sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023.
2. Direksi agar melakukan pengelolaan *cashflow* secara hati-hati dengan memastikan arus kas aktifitas operasi tetap positif serta meningkatkan *cost awareness* melalui efisiensi biaya dan pengeluaran berdasarkan skala prioritas.
3. Direksi diminta memaksimalkan *collection period* melalui penyelesaian piutang dengan menggunakan pendekatan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
4. Tagihan bruto agar segera diproses administrasinya, sehingga tidak menjadi permasalahan hukum dan atau peningkatan piutang Perseroan dikemudian hari.
5. Seluruh rencana pengembangan usaha, aksi korporasi dan investasi Perseroan diarahkan sebagai berikut:
 - a. Dalam pelaksanaannya, wajib memperhatikan kemampuan finansial, mitigasi risiko serta tidak mengganggu kegiatan utama Perseroan yang berlangsung dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, *Board Manual* Investasi dan/atau *best practice* yang berlaku.
 - b. Realisasi dari program pengembangan usaha dan investasi agar dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris pada setiap pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi.
6. Pengendalian proyek dengan pola kerjasama operasi (KSO/JO) perlu diperjelas pengaturannya dalam perjanjian antara lain: Hak dan Kewajiban, Pengakhiran KSO/JO dan Perpajakan sehingga penyelesaian pengakhiran KSO/JO tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
7. Setiap penarikan/pemanfaatan fasilitas pinjaman dan/atau penerbitan surat utang agar dilakukan dengan cermat dan hati-hati, memperhatikan kecukupan kapasitas dan kemampuan keuangan Perusahaan untuk melakukan repayment, ketepatan waktu penarikan dengan kebutuhan penggunaan dana, serta terhindar dari terms and conditions yang dapat memberatkan kinerja keuangan Perseroan.
8. Dalam hal terdapat aset-aset Perseroan yang tidak berkinerja baik/tidak memberikan imbal hasil yang optimal dan/atau tidak berdampak terhadap peningkatan produktivitas Perseroan, Direksi agar melakukan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WIKA aligns three main programs: Public Housing, Mineral Downstreaming, and Energy Security & Transition. Board of Commissioners assesses that there are a number of potentials that can be optimized from the three programs. In the field of public housing, the Company can take advantage of the opportunity in the 3 million subsidized housing development project and the demand for inclusive housing. In the field of mineral downstreaming, there are opportunities in environmentally friendly projects and support for national decarbonization. Meanwhile, in the field of energy security & transition, access to sustainable financing and pro-energy transition regulations are open.

For this reason, Board of Commissioners has provided suggestions and advice to Board of Directors in order to realize better performance in 2025, including:

1. Continuing the Company's consistent financial recovery efforts through 8 (eight) streams of WIKA recovery which are part of the transformation as approved at the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
2. The Board of Directors is requested to manage cash flow carefully by ensuring that the cash flow from operating activities remains positive and increasing cost awareness through cost and expenditure efficiency based on a scale of priorities.
3. The Board of Directors is requested to maximize the collection period by settling receivables using an effective and efficient approach in accordance with applicable laws and regulations.
4. The administration of gross receivables should be processed immediately, to avoid legal problems and/or an increase in the Company's receivables in the future.
5. All of the Company's business development plans, corporate actions and investments are directed as follows:
 - a. In its implementation, it is mandatory to pay attention to financial capabilities, risk mitigation and not to interfere with the Company's main activities that take place while still paying attention to the applicable laws and regulations, Articles of Association, Investment Board Manual and/or best practices.
 - b. The realization of business development and investment programs should be reported periodically to Board of Commissioners at every Board of Commissioners Meeting that includes Board of Directors.
6. The control of projects with a cooperation operation pattern (KSO/JO) needs to clarify the arrangements in the agreement, including: Rights and Obligations, Termination of KSO/JO and Taxation so that the termination of KSO/JO does not become a legal issue in the future.
7. Every withdrawal/utilization of loan facilities and/or issuance of debt securities must be carried out carefully and cautiously, paying attention to the adequacy of the Company's capacity and financial capability to make repayments, the timeliness of withdrawals with the need for the use of funds, and avoiding terms and conditions that can burden the Company's financial performance.
8. In the event that there are assets of the Company that do not perform well/do not provide optimal returns and/or do not have an impact on increasing the productivity of the Company, the Board of Directors is requested to take the necessary anticipatory steps to resolve these problems in accordance with the provisions of the laws and regulations.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 9. Direksi agar memastikan Entitas Anak memiliki analisa sensitifitas bisnis terhadap kondisi terkini dan melakukan mitigasi risiko yang memadai untuk mendukung pencapaian target RKAP tahun 2025. 10. Peningkatan pengawasan Entitas Anak melalui keterlibatan SPI Perseroan sebagai Auditor Internal sesuai dengan Piagam SPI Perseroan. 11. Direksi agar meningkatkan pengawasan terhadap Entitas Asosiasi sehingga memperoleh nilai tambah atas nilai investasinya. 12. Penerapan Pedoman Tata Kelola Induk Anak (<i>Subsidiary Governance</i>) dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap Entitas Anak. 13. <i>Key Performance Indicator</i> (KPI), Tingkat Kesehatan Perseroan dan aspirasi pemegang saham yang menjadi tolak ukur kinerja Perseroan dalam Kontrak Manajemen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Buku RKAP tahun 2025. 14. Direksi agar senantiasa berusaha meningkatkan sistem tata kelola internal melalui reviu dan perbaikan pedoman dan prosedur secara periodik dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara <i>four eyes</i> serta mengimplementasikan perbaikan tata kelola manajemen risiko sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023. 15. Dalam penyaluran dana TJSJ agar memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan mengutamakan alokasi di bidang sosial, kemanusiaan, dan pendidikan serta memperhatikan protokol kesehatan. 16. Direksi agar menyusun analisa sensitifitas bisnis terhadap kondisi terkini dan melakukan mitigasi risiko yang memadai untuk mendukung pencapaian target RKAP tahun 2025. | <ol style="list-style-type: none"> 9. The Board of Directors to ensure that Subsidiaries have a business sensitivity analysis of current conditions and carry out adequate risk mitigation to support the achievement of the 2025 RKAP target. 10. Increased supervision of Subsidiaries through the involvement of the Company's SPI as Internal Auditor in accordance with the Company's SPI Charter. 11. The Board of Directors to increase supervision of Associated Entities so as to obtain added value on the investment value. 12. The implementation of the Parent Subsidiary Governance Guidelines (<i>Subsidiary Governance</i>) in order to improve supervision of Subsidiaries. 13. The Key Performance Indicators (KPI), the Company's Health Level and the aspirations of shareholders which are the benchmarks for the Company's performance in the Management Contract are an integral part of the 2025 RKAP Book. 14. The Board of Directors should always strive to improve the internal governance system by periodically reviewing and improving guidelines and procedures by prioritizing four eyes decision making and implementing improvements in risk management governance in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023. 15. In the distribution of CSR funds, attention should be paid to the principles of prudence and priority allocation in the social, humanitarian, and educational fields, as well as attention to health protocols. 16. The Board of Directors should prepare a business sensitivity analysis of current conditions and carry out adequate risk mitigation to support the achievement of the 2025 RKAP target. |
|---|--|

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

WIKA senantiasa memperkuat komitmen untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten di setiap kegiatan operasional Perseroan.

Dewan Komisaris menilai penerapan prinsip tata kelola perusahaan di tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan saat ini WIKA telah melakukan peningkatan Pemahaman Pegawai terhadap *Good Corporate Governance*, Anti Penyuapan dan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) dengan diadakannya pelatihan *awareness* dan audit ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan, pelatihan PELUIT integritas anti korupsi dari KPK.

Selain itu, WIKA juga menerapkan prinsip tata kelola perusahaan dengan menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan manajemen risiko dalam proses bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi, pembaharuan dalam struktur organisasi perusahaan serta terus memperkuat integritas perusahaan secara keseluruhan.

WIKA juga telah berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku dan menerapkan standar etika bisnis yang tinggi dalam setiap aktivitas proses bisnis.

Setiap aspek TKT di perusahaan terus melaksanakan program TKT yang berlaku dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di setiap aspek masing-masing fungsi

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

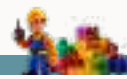
WIKA constantly strengthens its commitment for consistent implementation and enforcement of the principles of good corporate governance (GCG) in every operational activity of the Company.

Board of Commissioners assesses that the implementation of corporate governance principles in 2024 has been going well and currently WIKA has increased employee understanding of Good Corporate Governance, Anti-Bribery and Integrated Governance (TKT) by holding awareness training and ISO 37001:2016 audits on anti-bribery management systems, PELUIT anti-corruption integrity training from the Corruption Eradication Commission (KPK).

In addition, WIKA also applies the principles of corporate governance by implementing the principles of transparency, accountability and risk management in business processes and compliance with regulations, renewal in the company's organizational structure and continues to strengthen the integrity of the company as a whole.

WIKA is also committed to complying with all applicable laws and applying high standards of business ethics in every business process activity.

Every aspect of TKT in the Company continues to execute the applicable TKT program and report the implementation of activities in every aspect of each function



Dewan Komisaris selalu mengingatkan Direksi untuk selalu memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam semua tindakan yang dilakukan, selain itu Dewan Komisaris juga rutin melakukan pembahasan bersama dengan Komisaris Utama Anak Perusahaan yang tergabung dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk mengawasi kinerja anak Perusahaan.

Pandangan Dewan Komisaris atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Perseroan

Dewan Komisaris menilai penerapan manajemen risiko di WIKA tahun 2024 telah berjalan dengan baik, dimana telah dilakukan manajemen risiko yang proaktif untuk mengantisipasi risiko akibat transisi pemerintahan dan penurunan anggaran infrastruktur dengan identifikasi risiko sejak fase lelang, mitigasi melalui klausul kontrak adaptif, dan kolaborasi strategis untuk memastikan proyek tetap *On Time and On Budget*.

Perbaikan Tata Kelola dan Manajemen Risiko juga dilakukan dengan Penerapan ERP digital berbasis SAP, mekanisme *four eyes principles* berbasis manajemen risiko untuk perolehan dan *monitoring* proyek, pembuatan *dashboard* keuangan dan *Digital Control Tower (DCT)* untuk *real time monitoring* produksi, serta melakukan penerapan tata kelola terintegrasi untuk bisnis induk dan anak usaha.

Dewan Komisaris telah mengingatkan Direksi agar selalu memperhatikan pelaksanaan manajemen risiko pada semua proyek dan kegiatan yang akan dilakukan, dan dalam pelaksanaannya, Direksi telah menyampaikan laporan manajemen risiko secara berkala.

Pandangan atas Penerapan dan Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) Perseroan dan Peran Dewan Komisaris

Sistem pengendalian internal pada tahun 2024 berjalan cukup baik, antara lain dengan WIKA telah menerapkan audit ICOFR dengan tujuan antara lain untuk mempertahankan kepercayaan investor dan menjaga kesehatan keuangan melalui evaluasi pengendalian internal, terutama dalam situasi pengetatan anggaran dan volatilitas ekonomi.

Sesuai dengan tugasnya, Dewan Komisaris mengingatkan Direksi agar melaksanakan pengendalian internal yang lebih baik untuk memperbaiki kondisi keuangan dan meningkatkan kinerja Perusahaan ke depannya.

Evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dilakukan oleh manajemen Perseroan pada setiap jenjang organisasi. Internal Audit melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengawasan *Intern* secara menyeluruh dan pengawasan yang dilakukan untuk mendukung asersi Direksi tentang efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang diterapkan. Evaluasi yang telah dilakukan ini disampaikan kepada Manajemen serta ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan Sistem Pengendalian *Intern* telah cukup memadai dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perseroan.

Board of Commissioners keeps reminding the Board of Directors to always pay attention to the principles of Good Corporate Governance in all actions taken. In addition, Board of Commissioners also routinely conducts joint discussions with the President Commissioner of Subsidiaries who are members of Integrated Governance Committee to oversee the performance of Subsidiaries.

Board of Commissioners' View on the Effectiveness of the Company's Internal Control System and Risk Management

Board of Commissioners assesses that the implementation of risk management at WIKA in 2024 has been effective, with proactive risk management being carried out to anticipate risks arising from government transitions and a reduction in infrastructure budgets. This includes risk identification from the tender phase, mitigation through adaptive contract clauses, and strategic collaborations to ensure projects remain *On Time and On Budget*.

Improvements in Governance and Risk Management have also been made through the implementation of an ERP digital system based on SAP, a four-eyes principle mechanism based on risk management for procurement and project monitoring, the creation of financial dashboards, and a Digital Control Tower (DCT) for real-time production monitoring. Additionally, integrated governance has been applied for both the parent company and subsidiaries.

Board of Commissioners has reminded the Board of Directors to always pay attention to the implementation of risk management on all projects and activities to be undertaken, and in its implementation, the Board of Directors has provided periodic risk management reports.

Views on the Implementation and Management of the Company's Whistleblowing System (WBS) and the Role of Board of Commissioners

The internal control system in 2024 has functioned quite well, including the implementation of ICOFR audits at WIKA, aimed at maintaining investor trust and ensuring financial health through internal control evaluations, especially in situations of budget tightening and economic volatility.

In line with its duties, Board of Commissioners reminds the Board of Directors to carry out better internal controls to improve the financial condition and enhance the Company's performance moving forward.

The implementation of Internal Control System is evaluated by the Company's management at every level of the organization. Internal Audit evaluates the adequacy and effectiveness of the Internal Control System comprehensively and the oversight conducted to support the Board of Directors' assertions on the effectiveness of the Company's Internal Control System. The evaluation that has been carried out is communicated to Management and followed up on, with its implementation being monitored to ensure that the Internal Control System is sufficiently adequate to support the achievement of the Company's goals and objectives.

Pandangan atas Penerapan dan Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) Perseroan dan Peran Dewan Komisaris

WIKA telah memiliki prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblower. Saat ini WIKA telah menerapkan *Whistleblowing system* yang telah disosialisasikan dan dapat digunakan oleh anak Perusahaan yang belum memiliki kanal WBS sendiri. *Whistleblowing system* sendiri dijalankan oleh SPI WIKA dimana dalam hal pengawasan *counterpart*-nya adalah Komite Audit, dan Komite Audit secara rutin melakukan review dan pembahasan bersama SPI termasuk pembahasan yang meliputi reuiv atas *Whistleblowing system* yang selama ini telah berjalan.

Dewan Komisaris memiliki peran dalam mekanisme WBS Perseroan yakni melakukan pengawasan secara umum terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan, melalui tinjauan berkala terhadap hasil tinjauan FKAP dan tinjauan manajemen yang dilakukan Manajemen Puncak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, No. SK.01.01/A. DIR.01726/2020 tanggal 28 September 2020.

Pandangan Dewan Komisaris Terhadap Penerapan Prinsip ESG

Sebagai bagian dari transformasi strategis, WIKA telah menetapkan visi untuk menjadi perusahaan yang berorientasi pada prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Visi ini diimplementasikan di seluruh lini bisnis WIKA Grup, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lingkungan: Integrasi strategi dekarbonisasi dan efisiensi energi dalam operasional proyek.
2. Sosial: Pelaksanaan program tanggung jawab sosial (TJSL) untuk mendukung pemberdayaan komunitas, pengembangan usaha kecil dan *Human Rights* dalam lingkungan kerja.
3. Tata Kelola: Penerapan kebijakan anti-penyuapan, transparansi dalam pengadaan, serta pengelolaan anak perusahaan yang berbasis prinsip tata kelola yang baik.

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan ESG di WIKA pada tahun 2024 sangat baik, hal ini dapat terlihat dari beberapa hal berikut:

1. Program Strategis KBUMN 2024: WIKA berkontribusi pada 6 program prioritas pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi nasional, meliputi ketahanan pangan, perumahan rakyat, penguatan UMKM, hilirisasi mineral, ketahanan energi, dan pertahanan.
2. Inisiatif Lingkungan: Implementasi *Net-Zero Growth Housing* untuk mengurangi jejak karbon sektor properti, serta peningkatan penggunaan kendaraan listrik (*electric vehicle*) pada operasional proyek dan dinas perusahaan.
3. Integrasi ESG: Penerapan prinsip ESG di tingkat divisi, proyek, dan anak perusahaan melalui program terukur sesuai target keberlanjutan.
4. Standar Internasional: Pelaksanaan ESG mengacu pada kerangka kerja lembaga global seperti S&P *Global, Sustainalytics, IFRS Sustainability*, dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD).

Views on the Implementation and Management of the Company's Whistleblowing System (WBS) and the Role of Board of Commissioners

WIKA already has procedures for Gratification Control and Whistleblower. Currently, WIKA has implemented a Whistleblowing System that has been socialized and can be used by subsidiaries that do not yet have their own WBS channel. The Whistleblowing System itself is run by WIKA's SPI, where Audit Committee is the counterpart in terms of supervision, and Audit Committee routinely conducts reviews and discussions with SPI, including discussions that include reviews of the Whistleblowing System that has been running so far.

Board of Commissioners has a role in the Company's WBS mechanism, which is to carry out general supervision of the Anti-Bribery Management System, through periodic reviews of the results of FKAP reviews and management reviews carried out by Top Management as stated in the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, No. SK.01.01/A. DIR.01726/2020 dated September 28, 2020.

Board of Commissioners' View on the Implementation of ESG Principles

As part of its strategic transformation, WIKA has established a vision to become a company that is oriented toward Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. This vision is implemented across the entire lines of business of WIKA Group, with the following steps:

1. Environment: Integration of decarbonization strategies and energy efficiency in project operations.
2. Social: Implementation of social responsibility programs (CSR) to support community empowerment, the development of small businesses, and human rights in the workplace.
3. Governance: Implementation of anti-bribery policies, transparency in procurement, and management of subsidiaries based on good governance principles.

Board of Commissioners assesses that the implementation of ESG at WIKA in 2024 is very good, which can be seen from the following aspects:

1. 2024 Ministry of SOE Strategic Program: WIKA contributed to 6 priority government programs for national economic growth, including food security, affordable housing, strengthening SMEs, mineral downstreaming, energy security, and defense.
2. Environmental Initiatives: Implementation of *Net-Zero Growth Housing* to reduce the carbon footprint of the property sector, as well as increased use of electric vehicles in project operations and company service.
3. ESG Integration: Implementation of ESG principles at the division, project, and subsidiary levels through measurable programs according to sustainability targets.
4. International Standards: The implementation of ESG refers to the frameworks of global institutions such as S&P *Global, Sustainalytics, IFRS Sustainability*, and the *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD).



Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan Direksi bahwa dalam mengimplementasikan bisnis berbasis ESG, tetap perlu memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu sangat penting untuk terus melakukan inovasi secara kontinu agar produk berbasis ESG dapat bersaing secara kualitas dan harga.

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris yang meliputi Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG.

Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas kinerja dari setiap komite sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Kriteria penilaian Komite di bawah yaitu *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris dengan metode penilaian sendiri (*self assessment*) dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2024 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menilai kinerja komite tersebut memuaskan karena senantiasa memberikan *feedback* yang memadai kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas Pengawasan, dan telah menjalankan tugas dan fungsi komite sesuai dengan Piagam Komite.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Di tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, sesuai keputusan RUPS Tahun yang diselenggarakan pada 15 Mei 2024 yang memberhentikan dengan hormat Satya Bhakti Parikesit yang telah habis masa jabatannya pada 30 April 2024, sehingga anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 6 (enam) orang. Komposisi tersebut terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris, dan 4 (empat) Komisaris Independen. Komposisi ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun susunan Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Jarot Widyoko	Komisaris Utama President Commissioner	8 Juni 2020 – RUPST 2025 June 8, 2000 – AGMS 2025	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Resolution of Annual GMS dated June 8, 2020
Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner	8 Juni 2020 – RUPST 2025 June 8, 2000 – AGMS 2025	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Resolution of Annual GMS dated June 8, 2020

Board of Commissioners continually reminds the Board of Directors that when implementing an ESG-based business, attention must still be paid to the quality of the products. Additionally, it is very important to continuously innovate so that ESG-based products can compete in terms of both quality and price.

Board of Commissioners' Assessment on the Performance of Committees under Board of Commissioners

To improve the effectiveness of supervision, Board of Commissioners is assisted by supporting organs of Board of Commissioners which include Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination, Remuneration, and GCG Committee.

Board of Commissioners periodically assesses the performance of each committee in accordance with the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The assessment criteria for the Committees are the Key Performance Indicators that have been set for each Committee under Board of Commissioners with a self-assessment method and approved by Board of Commissioners in accordance with the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises. Board of Commissioners considered that, in 2024, the Committees have carried out their duties and responsibilities effectively.

Throughout 2024, Board of Commissioners assessed that the committees' performance was satisfactory for consistently providing adequate feedback to Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties, and for performing the committees' duties and functions in accordance with the Committee Charter.

Changes in Board of Commissioners Composition

In 2024, there were changes in the composition of Board of Commissioners, according to the resolution of Annual GMS held on May 15, 2024, which honorably dismissed Satya Bhakti Parikesit whose term of office expired on April 30, 2024, bringing the total number of members of the Company's Board of Commissioners to 6 (six). The composition consists of 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 4 (four) Independent Commissioners. This composition has fulfilled the provisions stipulated in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Number of Members of the Company's Board of Commissioners. The composition of Board of Commissioners as of December 31, 2024, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Rusmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	2 September 2021 – RUPST 2026 September 2, 2021 – AGMS 2026	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2021 Resolution of Extraordinary GMS dated September 2, 2021
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	4 Mei 2023 – RUPST 2028 May 4, 2023 – AGMS 2028	Ke-2 2nd	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Mei 2023 Resolution of Annual GMS dated May 4, 2023
Harris Arthur Hedar	Komisaris Independen Independent Commissioner	8 Juni 2020 – RUPST 2025 June 8, 2000 – AGMS 2025	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Resolution of Annual GMS dated June 8, 2020
Firdaus Ali	Komisaris Commissioner	8 Juni 2020 – RUPST 2025 June 8, 2000 – AGMS 2025	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Resolution of Annual GMS dated June 8, 2020

Atas nama Perseroan, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Satya Bhakti Parikesit atas dedikasinya dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris WIKA.

APRESIASI DAN PENUTUP

Tantangan demi tantangan telah berhasil dilalui Perseroan dengan baik. Tantangan tersebut menjadi pelajaran yang akan membuat WIKA menjadi semakin kuat dimasa mendatang. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi kepada Perseroan sehingga WIKA dapat sampai pada tahapan ini, khususnya kepada Direksi beserta seluruh Insan Perseroan yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi.

Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungannya sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan kepada Perseroan. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan di masa mendatang.

On behalf of the Company, we would like to express our appreciation and gratitude to Satya Bhakti Parikesit for the dedication and contribution given during his tenure as a member of WIKA's Board of Commissioners.

APPRECIATION AND CLOSING REMARKS

The Company has successfully overcome challenge after challenge. These challenges have become valuable lessons that will make WIKA stronger in the future. Board of Commissioners would like express an appreciation to all parties who have contributed to the Company, allowing WIKA to reach this stage, especially to the Board of Directors and all Company People who have worked hard and with full dedication.

Board of Commissioners would also like to extend a gratitude to the Shareholders for their trust and support, which has allowed Board of Commissioners to carry out its duties and responsibilities effectively. We would also like to extend an appreciation to all stakeholders who have placed their trust in the Company. We hope that this good cooperation can continue and be further enhanced in the future.

Jakarta, 26 Maret 2025

Jakarta, March 26, 2025

Atas Nama Dewan Komisaris

On behalf of Board of Commissioners



Jarot Widyoko

Komisaris Utama

President Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report



Agung Budi
Waskito

Direktur Utama
President Director

Tahun 2024 merupakan tonggak penting bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam memperkuat transformasi dan menegaskan arah baru sebagai perusahaan konstruksi dan EPC yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Komitmen ini sejalan dengan visi WIKA untuk menjadi "The Trusted and Sustainable Integrated Infrastructure and EPC Services Company", serta upaya berkelanjutan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah strategis dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Perseroan mengembangkan kerangka *House of Sustainability* dan meluncurkan *Grand Roadmap ESG 2024–2028*. Kedua inisiatif ini dirancang untuk mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan, sekaligus menjawab ekspektasi pemangku kepentingan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan strategi tersebut, WIKA menempatkan keberlanjutan sebagai tanggung jawab strategis lintas fungsi. Direktur SDM & Transformasi ditunjuk sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan ESG di Perseroan, didukung oleh Komite ESG yang terdiri dari pimpinan lintas divisi. Struktur ini memastikan bahwa keberlanjutan tidak hanya bersifat normatif, melainkan menjadi bagian integral dari cara kerja dan arah pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Direksi meyakini bahwa penerapan keberlanjutan dan tata kelola yang kuat akan memperkuat daya saing dan memperkokoh kepercayaan pemangku kepentingan, sekaligus membangun fondasi bisnis yang adaptif dan resilien terhadap risiko di masa depan.

Pada kesempatan ini, izinkan kami mewakili jajaran Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan atas kinerja Perseroan tahun buku 2024 beserta Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material. Dalam laporan ini kami memberikan informasi secara lengkap, baik tentang kinerja Direksi, prospek usaha hingga pencapaian kami atas penerapan ESG.

TINJAUAN PEREKONOMIAN

Ekonomi global masih menghadapi sejumlah tantangan di tahun 2024. Konflik geopolitik yang berkepanjangan di Eropa Timur, Timur Tengah dan Asia Timur menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi global. Perang yang berkepanjangan telah mengakibatkan gangguan pada arus perdagangan dunia dan fluktuasi harga komoditas dunia, khususnya komoditas energi.

The year 2024 marks an important milestone for PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in strengthening its transformation and reaffirming its new direction as a construction and EPC company that prioritizes sustainability principles. This commitment is in line with WIKA's vision to become "The Trusted and Sustainable Integrated Infrastructure and EPC Services Company," as well as its ongoing efforts to ensure that every policy and strategic actions is carried out with a strong emphasis on integrity, transparency, and accountability.

As part of its long-term strategy, the Company has developed the House of Sustainability framework and launched the Grand Roadmap ESG 2024–2028. These two initiatives are designed to integrate Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into all business processes and decision-making, while also addressing stakeholder expectations amidst the evolving global dynamics.

To ensure successful implementation of this strategy, WIKA places sustainability as a cross-functional strategic responsibility. The Director of HC & Transformation has been appointed as the primary person in charge for the implementation of ESG at the Company, supported by the ESG Committee consisting of leaders from various divisions. This structure ensures that sustainability is not only normative but also an integral part of the Company's operational framework and long-term growth direction.

Board of Directors is confident that the application of sustainability and strong governance will enhance competitiveness, strengthen stakeholder trust, and build a business foundation that is adaptive and resilient to future risks.

On this occasion, please allow us, on behalf of the Board of Directors, to present the Annual Report on the Company's performance for the fiscal year 2024, along with the Financial Statements audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, which received an unqualified opinion. In this report, we provide complete information regarding the Company's performance business prospects, up to our achievements related to ESG implementation.

ECONOMIC OVERVIEW

The global economy continues to face several challenges in 2024. Prolonged geopolitical conflicts in Eastern Europe, the Middle East, and East Asia remain major factors hindering global economic growth. The ongoing wars have disrupted global trade flows and caused fluctuations in global commodity prices, particularly energy commodities.



Selain itu, kendati tingkat inflasi global telah mengalami moderasi, namun belum serta merta membuat tingkat suku bunga mengalami penurunan. Sebagian besar Bank Sentral di dunia masih mempertahankan kebijakan *higher for longer* sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung melambat.

Kondisi tersebut semakin diperberat dengan semakin memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok. Kondisi ini telah membuat ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan sehingga berdampak pada perekonomian negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok, termasuk Indonesia.

Dana Moneter Internasional (IMF), dalam laporan *World Economic Outlook* yang terbit pada Januari 2025 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tetap lemah, dengan proyeksi pertumbuhan PDB dunia sekitar 3,2%. Di negara-negara maju, pertumbuhan diperkirakan meningkat sedikit dari 1,6% pada tahun 2023 menjadi 1,7% pada tahun 2024. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, pertumbuhan diproyeksikan melambat dari 4,3% pada tahun 2023 menjadi 4,2% pada tahun 2024.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global juga tercermin dari Indeks PMI Manufaktur yang telah berada di bawah 50 di hampir semua negara. Ini menunjukkan tren perlambatan ekonomi terjadi di semua negara.

Di tengah tekanan kondisi global, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh dengan solid. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), tahun 2024 ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% pada 2024, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,05% dan berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,2%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi hingga 54,04% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan tumbuh sebesar 4,94% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, ekonomi Indonesia juga ditunjang oleh kinerja ekspor yang masih terjaga dengan baik. Pada tahun 2024, nilai ekspor Indonesia mencapai USD264,70 miliar, naik 2,29% dibandingkan 2023. Indonesia juga mencatatkan surplus sebesar USD31,04 miliar pada 2024. Surplus tersebut dihasilkan dari surplus nonmigas sebesar USD51,44 miliar dan defisit migas sebesar USD 20,40 miliar. Surplus tahunan ini melanjutkan tren surplus untuk lima tahun berturut-turut sejak 2020.

Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (BI) berhasil mencapai sasaran inflasi pada 2024 sebesar 1,57%, yang terjaga dalam rentang sasaran 2,5% dengan toleransi kurang lebih 1%.

Additionally, while global inflation has moderated, this has not necessarily led to a reduction in interest rates. Most central banks worldwide have maintained a "higher for longer" policy, which is causing economic growth to slow down.

This situation is further exacerbated by the escalating trade war between the United States, Europe, and China. This has led to a slowdown in China's economy, which in turn affects the economies of countries with trade relations with China, including Indonesia.

The International Monetary Fund (IMF), in its *World Economic Outlook* report released in January 2025, projected global economic growth to remain weak, with a global GDP growth forecast of around 3.2%. In developed countries, growth is expected to slightly increase from 1.6% in 2023 to 1.7% in 2024. Conversely, in emerging markets, growth is expected to slow from 4.3% in 2023 to 4.2% in 2024.

The slowdown in global economic growth is also reflected in the Manufacturing PMI Index, which has been below 50 in almost all countries, indicating a trend of global economic slowdown.

Amid the pressures of global situation, Indonesia's economy has still managed to grow solidly. According to data from the National Statistics Agency (BPS), Indonesia's economy grew by 5.03% in 2024, slightly lower than the previous year's growth of 5.05%, and below the government's target of 5.2%.

Indonesia's economic growth is primarily supported by household consumption, which contributed 54.04% to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) and grew by 4.94% compared to the previous year.

In addition, Indonesia's economy has been supported by strong export performance. In 2024, Indonesia's export value reached USD 264.70 billion, an increase of 2.29% compared to 2023. Indonesia also recorded a surplus of USD 31.04 billion in 2024, driven by a non-oil and gas surplus of USD 51.44 billion and an oil and gas deficit of USD 20.40 billion. This annual surplus continues the trend of surpluses for five consecutive years since 2020.

The Indonesian government and Bank Indonesia (BI) successfully achieved the inflation target of 1.57% in 2024, within the target range of 2.5%, with a tolerance of approximately 1%.

POSISI PERSEROAN DALAM INDUSTRI

Tahun 2024, sektor konstruksi nasional berada dalam fase yang penuh tantangan dan dinamika, terutama situasi *wait and see* yang dihadapi para pelaku industri mencerminkan sikap antisipatif terhadap kebijakan strategis pemerintah yang akan berdampak langsung pada arah pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi perencanaan perolehan proyek baru, tetapi juga menuntut penyesuaian operasional dan strategi perusahaan agar tetap relevan dalam lingkungan yang dinamis.

Sebagai salah satu sektor penggerak utama perekonomian, industri konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, di tengah perubahan kebijakan dan prioritas pemerintah yang masih dalam tahap penyesuaian, banyak pelaku industri yang harus mengelola risiko dan inovasi untuk menghadapi kondisi industri konstruksi kedepannya.

Tantangan ini karena adanya penurunan fokus pemerintah pada sektor infrastruktur dan beralih kepada pembangunan sumber daya manusia dan tata kelola berkelanjutan melalui program Asta Cita. Namun demikian, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh positif sebesar 4,61% yang didorong oleh peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN. Demikian juga dengan pertumbuhan modal pemerintah yang positif.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN PERSEROAN

Dinamika ekonomi dan politik di tahun 2024 sangat mempengaruhi perkembangan bisnis konstruksi di Indonesia. Di tahun 2024, pemerintah mengurangi anggaran untuk infrastruktur sehingga pasar konstruksi yang berasal dari APBN mengalami penurunan. Disaat yang sama, Indonesia juga tengah menggelar pesta demokrasi yang salah satu agenda utamanya adalah pergantian pemimpin nasional. Hal tersebut membuat banyak pelaku usaha yang memilih untuk mengambil sikap *wait and see*.

Menyikapi kondisi yang berkembang dan juga mempertimbangkan tantangan yang dihadapi, Direksi telah menerapkan sejumlah inisiatif strategis yang fokus utamanya adalah melakukan pembenahan dan mempersiapkan landasan yang kokoh agar WIKA dapat kembali tinggal landas di tahun mendatang.

Beberapa inisiatif strategis yang dijalankan Perseroan tahun 2024 antara lain:

1. Optimalisasi *Supply Chain Management* (SCM), seperti WISE, VMS, dan E-Proc
Menghadapi kenaikan biaya bahan baku global dan persaingan proyek infrastruktur yang terbatas (akibat peralihan fokus pemerintah ke Asta Cita), WIKA meningkatkan efisiensi rantai pasok melalui diversifikasi pemasok dan digitalisasi proses pengadaan untuk menjaga efisiensi operasional.
2. Manajemen Risiko Proaktif
Antisipasi risiko akibat transisi pemerintahan dan penurunan anggaran infrastruktur dengan identifikasi risiko sejak fase lelang, mitigasi melalui klausul kontrak adaptif, dan kolaborasi strategis untuk memastikan proyek tetap *On Time and On Budget*.

THE COMPANY'S POSITION IN THE INDUSTRY

In 2024, the national construction sector was in a challenging and dynamic phase, especially the *wait and see* situation faced by industry players, reflecting an anticipatory attitude towards the government's strategic policies that would have a direct impact on the direction of infrastructure development in Indonesia. This condition not only affected the planning of new projects, but also demanded adjustments to the Company's operations and strategies to remain relevant in a dynamic environment.

As one of the main drivers of the economy, the construction industry has a strategic role in supporting national development. However, amid changes in government policies and priorities that are still in the adjustment stage, many industry players must manage risk and innovation to face the conditions of construction industry in the future.

This challenge is due to the government's decreased focus on the infrastructure sector and a shift to human resource development and sustainable governance through the Asta Cita program. However, the Gross Fixed Capital Formation (GFCF) component grew positively by 4.61%, driven by an increase in the realization of PMA and PMDN investments. Likewise, government capital growth was positive.

STRATEGIC STRATEGIES AND POLICIES ESTABLISHED BY THE COMPANY

The economic and political dynamics in 2024 greatly influenced the development of construction business in Indonesia. In 2024, the government reduced the budget for infrastructure, causing the construction market derived from the state budget to decline. At the same time, Indonesia was also holding a democratic election, one of the main agendas of which was the change of national leadership. This has caused many business people to choose to take a *wait and see* attitude.

In response to the developing conditions and also considering the challenges faced, Board of Directors has implemented a number of strategic initiatives whose main focus is to make improvements and prepare a solid foundation so that WIKA can take off again in the coming year.

Some of the strategic initiatives undertaken by the Company in 2024 include:

1. Optimization of *Supply Chain Management* (SCM), such as WISE, VMS, and E-Proc
Faced with rising global raw material costs and limited infrastructure project competition (due to the government's shift in focus to Asta Cita), WIKA is improving supply chain efficiency through supplier diversification and digitization of the procurement process to maintain operational efficiency.
2. Proactive Risk Management
Anticipate risks due to government transition and declining infrastructure budgets by identifying risks from the auction phase, mitigating through adaptive contract clauses, and strategic collaboration to ensure projects remain *On Time* and *On Budget*.



3. Integrasi ERP di Seluruh Anak Usaha
Efisiensi operasional di tengah minimnya proyek baru dengan sinkronisasi proses bisnis dalam WIKA Grup, bertujuan mengalokasikan sumber daya optimal, dan penghematan biaya operasional.
4. Audit ICOFR
Mempertahankan kepercayaan investor dan kesehatan keuangan melalui evaluasi pengendalian internal, terutama dalam situasi pengetatan anggaran dan volatilitas ekonomi.

Strategi ini dirancang untuk mengatasi tantangan global (gejolak harga material) dan nasional (penurunan proyek infrastruktur) dengan fokus pada efisiensi, mitigasi risiko, serta penguatan tata kelola untuk menjaga keberlanjutan bisnis WIKA.

Sejalan dengan menjalankan inisiatif strategis tersebut, WIKA masih berfokus dalam menjalankan program 8 (delapan) *stream* penyehatan keuangan, diantaranya:

1. Restrukturisasi Keuangan
 - Keringanan pembayaran pokok dan/atau bunga dari kreditur
 - Penandatanganan perjanjian kredit baru (MRA) dan perpanjangan pokok obligasi/sukuk
2. Perbaikan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
 - Penerapan ERP digital berbasis SAP
 - Mekanisme *four eyes principles* berbasis manajemen risiko untuk perolehan dan *monitoring* proyek
 - Pembuatan *dashboard* keuangan dan *Digital Control Tower* (DCT) untuk *real time monitoring* produksi
 - Penerapan tata kelola terintegrasi untuk bisnis induk dan anak usaha
3. Percepatan Penagihan Piutang Bermasalah (penurunan piutang bermasalah 21% dari fy 2023)
 - Pembentukan unit khusus penagihan piutang
 - Menjalankan proses klaim baik melalui negosiasi bilateral, dan/atau mediasi lembaga yang berwenang (BANI, Jamdatun, dan BPKP)
4. *Asset Recycling*
 - Melakukan *asset recycling* atau divestasi atas aset-aset investasi Perseroan dalam rangka mendapatkan dana tunai untuk penyelesaian kewajiban dan perkuatan modal Perseroan
5. Perbaikan Portfolio *Orderbook* (*monthly progress payment* proyek per 2024 adalah 94,43%)
Perbaikan portfolio kontrak, *refocusing* kepada proyek dengan pembayaran bulanan sehingga mengurangi defisit kas dan pinjaman untuk modal kerja
6. Penurunan *Operating Expense* (realisasi penurunan biaya usaha Rp15M/bulan)
 - Reorganisasi menyesuaikan dengan fokus bisnis perusahaan
 - Menerapkan *negative growth* bagi karyawan yang pensiun
 - Penerapan metode *Lean Construction*
7. Penurunan Saldo Pinjaman Talangan *Supplier*
Perseroan menerapkan tidak ada lagi pembayaran mitra kerja melalui utang. Semuanya berasal dari pendanaan mandiri proyek.
8. Penguatan Struktur Permodalan
Penguatan struktur permodalan melalui *rights issue* atau penerbitan saham baru melalui mekanisme HMETD.

3. ERP Integration Across Subsidiaries
Operational efficiency amid a lack of new projects with synchronization of business processes within WIKA Group, aiming to allocate optimal resources and operational cost savings.
4. ICOFR Audit
Maintaining investor confidence and financial health through internal control evaluations, especially in situations of budget tightening and economic volatility.

These strategies are designed to overcome global (material price volatility) and national (decline in infrastructure projects) challenges with a focus on efficiency, risk mitigation, and governance strengthening to maintain the sustainability of WIKA's business.

In line with these strategic initiatives, WIKA is still focused on implementing eight (8) streams of financial recovery, including:

1. Financial Restructuring
 - Relief from principal and/or interest payments from creditors
 - Signing of new credit agreements (MRA) and extension of bond/sukuk principal
2. Governance and Risk Management Improvement
 - Implementation of SAP-based digital ERP
 - Risk management-based four eyes principles mechanism for project acquisition and monitoring
 - Creation of a financial dashboard and Digital Control Tower (DCT) for real-time production monitoring
 - Implementation of integrated governance for parent and subsidiary businesses
3. Acceleration of Problem Debt Collection (21% reduction in problem debt by FY 2023)
 - Establishment of a special debt collection unit
 - Carrying out the claim process both through bilateral negotiations and/or mediation by authorized institutions (BANI, Jamdatun, and BPKP)
4. Asset Recycling
 - Conduct asset recycling or divestment of the Company's investment assets in order to obtain cash funds for the settlement of obligations and strengthening of the Company's capital
5. Improvement of Orderbook Portfolio (*monthly progress payment* of projects by 2024 is 94.43%)
Improvement of contract portfolio, *refocusing* on projects with monthly payments to reduce cash deficits and loans for working capital
6. Reduction in Operating Expenses (realization of a decrease in operating costs of Rp15M/month)
 - Reorganization in line with the Company's business focus
 - Implementation of *negative growth* for retiring employees
 - Implementation of *Lean Construction* methods
7. Reduction in Supplier Bailout Loan Balance
The Company no longer makes payments to partners through debt. Everything comes from the project's independent funding.
8. Strengthening the Capital Structure
Strengthening the capital structure through a *rights issue* or issuance of new shares through the pre-emptive rights mechanism.

Dari 8 (delapan) *stream* penyehatan tersebut, poin pertama dan kedelapan yang bersifat jangka pendek dan mendesak. Karena itu, di tahun 2024 WIKA telah menyelesaikan proses restrukturisasi hutang senilai Rp21 triliun dengan pihak perbankan. Selain itu, Perseroan juga menerima penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp6 triliun. PMN diberikan kepada Perseroan sebagai penguatan struktur permodalan dalam rangka penyelesaian proyek-proyek strategis nasional (PSN). Sebagaimana diketahui, saat ini WIKA mengerjakan 42 proyek yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN), diantaranya yaitu PLTU Palu dengan progres 92% per Desember 2024, Pelabuhan Patimban dengan progres 55% per Desember 2024, SPAM Jatiluhur dengan progres 100% per Desember 2024 dan PSN lainnya yang masih dikerjakan WIKA hingga 2024.

Tahun 2024, WIKA juga terus berupaya untuk meningkatkan integrasi bagi seluruh WIKA Grup. Setiap lini bisnis dan anak perusahaan dalam WIKA Grup memiliki peran spesifik untuk mendukung proses konstruksi secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Agar *value chain* ini berjalan sinergis dan optimal, WIKA telah menyusun Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan & Tata Kelola Terintegrasi, yang bertujuan untuk menciptakan harmoni, transparansi, dan efisiensi di antara seluruh lini bisnis.

PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN LANGKAH MONITORING YANG DIJALANKAN

Perumusan strategi, implementasi dan evaluasi dari penerapan strategi di WIKA merupakan proses yang saling berkait satu dengan lainnya. Sejalan dengan proses transformasi yang dijalankan Perseroan, WIKA mengembangkan mekanisme yang terintegrasi yang dikenal sebagai L0 hingga L5. Setiap tahapan ini dirancang secara sistematis untuk memberikan kejelasan proses, pengendalian yang terukur, serta evaluasi yang berkelanjutan, sehingga mampu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan strategis perusahaan.

1. L0: Ide Awal
Penyaringan ide dari manajemen/mitra strategis sesuai visi perusahaan.
2. L1: Formulasi Inisiatif
Ide dikembangkan menjadi inisiatif konkret dengan analisis dampak dan relevansi.
3. L2: Validasi Rencana
Direksi memvalidasi rencana lintas fungsi (Keuangan, TI, dll.) berdasarkan justifikasi bisnis dan kesiapan eksekusi.
4. L3: Implementasi
Pengawasan pelaksanaan inisiatif sesuai jadwal, anggaran, dan tujuan, didukung monitoring berbasis data.
5. L4: Evaluasi Kinerja
Analisis dampak inisiatif menggunakan KPI untuk menilai efektivitas operasional & strategis.
6. L5: Publikasi & Apresiasi
Publikasi hasil sukses untuk citra positif dan pemberian penghargaan kepada tim pelaksana.

Direksi terlibat secara aktif dalam setiap tahapan tersebut. Direksi menentukan arah perusahaan dan melakukan analisis risiko manajemen di bidang keuangan, non keuangan dan peninjauan terhadap prospek usaha perusahaan. Hasil akhir perumusan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk saran dan pertimbangan.

Of the eight (8) recovery streams, the first and eighth points are short-term and urgent. Therefore, in 2024 WIKA has completed the debt restructuring process worth Rp21 trillion with the banking sector. In addition, the Company also received state capital participation (PMN) amounting to Rp6 trillion. PMN was granted to the Company to strengthen its capital structure in the context of completing national strategic projects (PSN). As is well known, WIKA is currently working on 42 projects that fall under the category of National Strategic Projects (PSN), including Palu Coal Fired Power Plant with 92% progress as of December 2024, Patimban Port with 55% progress as of December 2024, Jatiluhur Drinking Water Supply System with 100% progress as of December 2024 and other National Strategic Projects that WIKA is still working on until 2024.

In 2024, WIKA has also continued to strive to improve integration for the entire WIKA Group. Each line of business and subsidiary in WIKA Group has a specific role to support the overall construction process from upstream to downstream. In order for this value chain to run synergistically and optimally, WIKA has compiled Guidelines for the Principles of Subsidiary Management & Integrated Governance, which aims to create harmony, transparency, and efficiency among all lines of business.

THE ROLE OF BOARD OF DIRECTORS IN STRATEGY FORMULATION AND MONITORING MEASURES IMPLEMENTED

The formulation of strategy, implementation and evaluation of strategy application at WIKA are interrelated processes. In line with the transformation process carried out by the Company, WIKA developed an integrated mechanism known as L0 to L5. Each stage is systematically designed to provide clarity of process, measurable control and continuous evaluation, so as to support successful implementation of the Company's strategic policies.

1. L0: Initial Idea
Screening of ideas from management/strategic partners in accordance with the company's vision.
2. L1: Initiative Formulation
Ideas are developed into concrete initiatives with impact and relevance analysis.
3. L2: Plan Validation
Board of Directors validates cross-functional plans (Finance, IT, etc.) based on business justification and readiness for execution.
4. L3: Implementation
Supervision of initiative implementation according to schedule, budget, and objectives, supported by data-based monitoring.
5. L4: Performance Evaluation
Initiative impact analysis using KPIs to assess operational & strategic effectiveness.
6. L5: Publication & Appreciation
Publication of successful results for a positive image and awarding of the implementation team.

Board of Directors is actively involved in each of these stages. Board of Directors determines the direction of the Company and conducts management risk analysis in the financial and non-financial fields and exploration of the Company's business prospects. The final formulation results are submitted to the Board of Commissioners for advice and consideration.



Dalam melakukan *monitoring*, Direksi dibantu oleh team manajemen, unit Internal Audit dan *Corporate Secretary*, selalu memantau penerapan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi perekonomian.

Direksi memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan strategi dilaksanakan sesuai rencana. Termasuk dalam perumusan strategi dalam pencapaian visi dan misi Perseroan. Dimana pernyataan visi dan misi WIKA 2030 memuat aspirasi Perseroan untuk dapat berkembang secara optimal sebagai emiten konstruksi terdepan di Indonesia dan menetapkan perannya dalam mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh Pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Nasional.

KENDALA YANG DIHADAPI DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA

Tahun 2024, WIKA menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi kinerja Perseroan. Kebijakan pemerintah yang mengurangi anggaran infrastruktur membuat perolehan kontrak baru dan penjualan di tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan WIKA harus mencari target pasar pengganti seperti sektor EPCC dan Industri, namun hal ini sangat bergantung pada ketersediaan Capex BUMN dan Swasta.

Selain itu, kondisi Perseroan yang masih mencatat kerugian akibat proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sesuai porsi WIKA di proyek tersebut secara *equity method*. Karena itu, pemulihan penyertaan dan modal kerja WIKA pada Proyek KCJB menjadi salah satu kunci utama perbaikan keuangan WIKA di masa mendatang.

WIKA telah mendapat tambahan PMN sebesar Rp6 triliun pada tahun anggaran 2024 untuk modal kerja PSN, namun Penyaluran atas Dana PMN tersebut masih memiliki keterbatasan dimana beberapa Proyek yang menjadi sasaran PMN tersebut telah selesai atau tidak lagi menjadi PSN sesuai PerKemenko, sehingga diperlukan Perubahan Peruntukan PMN agar dapat di lakukan *disbursement*.

Sejak pre Covid-19, WIKA banyak melakukan ekspansi bisnis properti penunjang TOD sehingga persediaan properti WIKA meningkat signifikan. Namun saat ini industri properti tengah menghadapi kondisi *over supply*, penurunan daya beli dan adanya ketidakpastian ekonomi global, sehingga hal tersebut juga menjadi tantangan bagi Perseroan. Terlebih WIKA juga masih memiliki beban bunga yang cukup tinggi akibat pinjaman berbunga yang dilakukan WIKA untuk membiayai proyek investasi penugasan yang belum membuahkan hasil.

Menghadapi kondisi tersebut, Perseroan harus lebih selektif dalam mengikuti tender. Perseroan harus memastikan proyek baru yang dikerjakan memiliki sistem pembayaran yang sehingga tidak membebani *cash flow* Perseroan.

In monitoring, assisted by the management team, Internal Audit unit and Corporate Secretary, Board of Directors constantly monitors the implementation of established strategies and policies and makes necessary adjustments in line with changes in the economic situation and conditions.

Board of Directors has a very strategic role in ensuring that the strategy is implemented according to plan. Including in the formulation of strategies in achieving the Company's vision and mission. In which the WIKA 2030 vision and mission statement contains the Company's aspiration to optimally develop as a leading construction issuer in Indonesia and establish its role in supporting the infrastructure development acceleration program initiated by the Government to increase the pace of national economic growth.

CONSTRAINTS FACED AND RESOLUTION STRATEGIES

In 2024, WIKA encountered a number of challenges that affected the Company's performance. Government policies that reduced the infrastructure budget caused a decline in new contract acquisitions and sales in 2024 and projections for 2025. This caused WIKA to look for replacement target markets such as the EPCC and Industrial sectors, but this depended heavily on the availability of SOE and Private Capex.

In addition, the Company continued to record losses due to Jakarta-Bandung High-Speed Rail (KCJB) project according to WIKA's portion in the project using the equity method. Therefore, the recovery of WIKA's participation and working capital in the KCJB Project is one of the main keys to WIKA's financial improvement in the future.

WIKA has received an additional state equity participation (PMN) of Rp6 trillion in the 2024 fiscal year for PSN working capital, but the distribution of PMN funds still has limitations where several of the projects targeted by the PMN have been completed or are no longer PSNs according to the Coordinating Ministry for Economic Affairs, requiring a change in the allocation of PMN in order for the disbursement to be made.

Since pre-Covid-19, WIKA has expanded its TOD supporting property business, resulting in a significant increase in WIKA's property inventory. However, the property industry is currently facing over-supply, a decline in purchasing power, and global economic uncertainty, which also pose challenges for the Company. Moreover, WIKA still has a high interest burden due to interest-bearing loans taken out to finance assignment investment projects that have not yet yielded results.

To deal with this situation, the Company must be more selective in participating in tenders. The Company must ensure that new projects have payment systems that do not burden its cash flow.

TANTANGAN HUKUM DAN RESTRUKTURISASI USAHA

Tantangan lain yang cukup signifikan yang dihadapi Perseroan adalah beban keuangan dan kewajiban usaha kepada mitra dan kreditor. Dalam situasi ini, Perseroan memilih untuk bersikap terbuka dan bertanggung jawab melalui langkah penyelesaian yang terukur dan terstruktur.

Perseroan menghadapi beberapa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pihak ketiga melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perseroan memandang bahwa proses ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah, dan menanggapi dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, serta semangat penyelesaian yang konstruktif.

Sebagian besar permohonan PKPU tersebut telah berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai antara Perseroan dan pihak pemohon. Perseroan juga terus membangun komunikasi intensif dengan para kreditor dan mitra kerja untuk menjaga kepercayaan dan kelangsungan kerja sama jangka panjang.

Sebagai bagian dari respons atas tantangan tersebut, Perseroan melaksanakan program restrukturisasi usaha dan keuangan secara menyeluruh, yang mencakup: Penataan portofolio proyek, dengan prioritas pada percepatan penyelesaian proyek strategis nasional dan evaluasi atas proyek nonproduktif; Penjadwalan ulang kewajiban keuangan, melalui restrukturisasi pinjaman dan negosiasi ulang dengan lembaga keuangan; dan Efisiensi operasional dan penguatan arus kas, guna mendukung keberlanjutan operasional yang sehat.

Restrukturisasi ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi transformasi jangka panjang untuk menjadikan WIKA lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Direksi memastikan bahwa seluruh proses ini dilaksanakan secara bertanggung jawab, dengan tetap menjaga kelangsungan layanan, operasional, dan hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan juga berkomitmen untuk menjalankan seluruh proses ini dengan mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance*, serta secara rutin menyampaikan keterbukaan informasi kepada regulator, pemegang saham, dan publik. Segala langkah penyelesaian kewajiban ditempuh dengan semangat kehati-hatian, keterbukaan, dan semangat menjunjung prinsip tata kelola yang baik.

Berikut ini ringkasan proses hukum dan upaya restrukturisasi yang dilakukan Perseroan di sepanjang tahun 2024.

LEGAL CHALLENGES AND BUSINESS RESTRUCTURING

Another significant challenge faced by the Company is the financial burden and business obligations to partners and creditors. In this situation, the Company chose to adopt an open and responsible approach through measured and structured resolution steps.

The Company faced several requests for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) by third parties through the Central Jakarta Commercial Court. The Company views this process as part of a legitimate legal mechanism, and responding with the principles of caution, openness, and a constructive resolution spirit.

Most of these PKPU requests have been successfully resolved through peace agreements between the Company and the petitioning parties. The Company also continues to build intensive communication with creditors and business partners to maintain trust and the continuity of long-term cooperation.

As part of its response to these challenges, the Company has executed a comprehensive business and financial restructuring program, which includes: Project portfolio restructuring, with a focus on accelerating the completion of national strategic projects and evaluating non-productive projects; Rescheduling financial obligations through loan restructuring and renegotiation with financial institutions; and Operational efficiency and strengthening cash flow to support healthy operational sustainability.

This restructuring is not only reactive but also part of a long-term transformation strategy to make WIKA more resilient, adaptive, and sustainable. Board of Directors ensures that the entire process is carried out responsibly while maintaining the continuity of services, operations, and relationships with all stakeholders.

The Company is also committed to carrying out this entire process by prioritizing the principles of Good Corporate Governance, while regularly providing information transparency to regulators, shareholders, and the public. All efforts to resolve obligations are undertaken with a spirit of caution, openness, and upholding good governance principles.

The following is a summary of the legal process and restructuring efforts undertaken by the Company throughout 2024.

Pringkasan Proses Hukum dan Upaya Restrukturisasi Usaha Summary of Legal Process and Business Restructuring Efforts

Kategori Category	Uraian Description	Status Terkini Current Status
Permohonan PKPU PKPU Application	Beberapa permohonan PKPU diajukan oleh pihak ketiga melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait keterlambatan pembayaran kewajiban usaha. Several PKPU applications were filed by third parties through the Central Jakarta Commercial Court regarding late payment of business obligations.	Sebagian besar diselesaikan melalui kesepakatan damai Mostly resolved through peace agreements

Pringkasan Proses Hukum dan Upaya Restrukturisasi Usaha

Summary of Legal Process and Business Restructuring Efforts

Kategori Category	Uraian Description	Status Terkini Current Status
Restrukturisasi Keuangan Financial Restructuring	Penjadwalan ulang kewajiban melalui negosiasi dengan kreditur dan lembaga keuangan. Rescheduling of obligations through negotiations with creditors and financial institutions.	Sedang berlangsung, dengan skema restrukturisasi bertahap Ongoing, with a phased restructuring scheme
Evaluasi Portofolio Proyek Project Portfolio Evaluation	Evaluasi terhadap proyek nonproduktif dan percepatan dalam proyek strategis nasional. Evaluation of non-productive projects and acceleration of national strategic projects.	Sedang dalam proses implementasi In the process of being implemented
Transformasi Operasional Operational Transformation	Efisiensi proses bisnis dan penguatan arus kas. Efficiency of business processes and strengthening of cash flow.	Dilaksanakan secara bertahap sejak Q2 2024 To be implemented in stages from Q2 2024
Komitmen Tata Kelola Governance Commitment	Transparansi terhadap regulator dan pemangku kepentingan dalam seluruh proses hukum dan restrukturisasi. Transparency to regulators and stakeholders in the entire legal and restructuring process.	Dilaksanakan secara berkelanjutan To be implemented continuously

PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2024, WIKA dapat membukukan kinerja yang positif. Pencapaian ini merupakan modal yang sangat berarti bagi Perseroan untuk dapat meraih pertumbuhan usaha yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.

Tahun 2024, WIKA meraih kontrak baru sebesar Rp20.656 miliar. Kendati lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29.246 miliar, namun pencapaian tersebut merupakan hasil yang cukup optimal jika melihat kondisi pasar yang tengah mengalami penurunan dan likuiditas Perseroan yang relatif terbatas. Selain itu, di tahun 2024, Perseroan juga lebih selektif dalam mendapatkan kontrak dimana WIKA saat ini lebih memilih kontrak dengan kualitas baik yang memiliki kepastian pembayaran, terdapat uang muka dan monthly payment, sehingga cash flow Perseroan dapat tetap terjaga.

Kontribusi terbesar pada perolehan kontrak baru tersebut berasal dari segmen infrastruktur & building sebesar 42,06%, disusul segmen industri dengan kontribusi sebesar 31,66% dan segmen energi & industrial plant yang memberikan kontribusi sebesar 19,61%. Sementara segmen realty & property dan segmen investasi masing-masing memberikan kontribusi sebesar 6,25% dan 0,42%. Sementara dari sisi pemberi kerja, sebagian besar proyek yang diraih oleh WIKA berasal dari BUMN dan Pemerintah.

Kendati pencapaian kontrak baru yang diraih WIKA tahun 2024 mengalami penurunan, namun Perseroan dapat tetap mempertahankan kepemimpinannya di pasar jasa konstruksi nasional dengan meraih market share sebesar 18,40% dari total pasar sebesar Rp282 triliun di tahun 2024.

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS OF THE COMPANY

In the midst of various challenges faced throughout 2024, WIKA managed to record a positive performance. This achievement is a significant foundation for the Company to be able to achieve even better business growth in the coming years.

In 2024, WIKA won new contracts amounting to Rp20,656 billion. Although lower than the previous year amounting to Rp29,246 billion, this achievement is a fairly optimal result considering the declining market conditions and the Company's relatively limited liquidity. In addition, in 2024, the Company was also more selective in obtaining contracts, preferring good-quality contracts with payment certainty, down payments and monthly payments, so that the Company's cash flow could be maintained.

The largest contribution to the acquisition of new contracts came from the infrastructure & building segment at 42.06%, followed by the industrial segment with a contribution of 31.66% and the energy & industrial plant segment which contributed 19.61%. Meanwhile, the realty & property segment and the investment segment each contributed 6.25% and 0.42%. Whereas in terms of employers, most of the projects won by WIKA came from SOEs and the Government.

Despite the decline in new contracts won by WIKA in 2024, the Company was able to maintain its leadership in the national construction services market by capturing an 18.40% market share of the total market of Rp282 trillion in 2024.

Sejalan dengan penurunan perolehan kontrak baru, pendapatan WIKA juga turun menjadi Rp19.242 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp22.530 miliar. Namun demikian, WIKA berhasil menurunkan kerugian menjadi sebesar Rp2.513 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.824 miliar. Penurunan kerugian tersebut merupakan hasil dari program efisiensi yang dijalankan Perseroan dan penurunan beban keuangan sejalan dengan program restrukturisasi hutang yang dijalankan tahun 2024.

Per 31 Desember 2024, total aset Perseroan tercatat sebesar Rp63.533 miliar, mengalami penurunan Rp2.334 miliar atau 3% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp65.981 miliar. Penurunan ini lebih disebabkan oleh penurunan persediaan dan pekerjaan dalam proses Perseroan.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Sepanjang tahun 2024, WIKA telah menjalankan berbagai inisiatif strategis dalam upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024. Namun demikian, kondisi pasar dan tantangan yang dihadapi Perseroan sepanjang tahun 2024 sangat berbeda dengan asumsi yang digunakan dalam penyusunan target tersebut, sehingga secara umum kinerja WIKA tahun 2024 belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Perolehan kontrak baru WIKA tahun 2024 yang sebesar Rp20.656 miliar hanya mencapai 66% dari target RKAP yang ditetapkan sebesar Rp31.074 miliar. Sementara itu, dari sisi pendapatan juga masih belum sesuai dengan target, di mana angka RKAP 2024 sebesar Rp38.364 miliar, sedangkan realisasinya sebesar Rp19.242 miliar atau dengan pencapaian sebesar 50%.

Tidak tercapainya target RKAP tersebut utamanya disebabkan adanya pergeseran kebijakan pemerintah ke program Asta Cita (fokus pada SDM dan tata kelola berkelanjutan) yang mengurangi alokasi proyek infrastruktur skala besar, sehingga memangkas perolehan proyek baru WIKA yang sebelumnya mengandalkan kontrak pemerintah. Di sisi keuangan, kenaikan biaya bahan baku global, beban keuangan yang masih tinggi, serta penyerapan dana PMN 2024 yang belum optimal memperburuk tekanan likuiditas dan menghambat percepatan proyek strategis.

Volatilitas ekonomi global (inflasi, geopolitik, fluktuasi nilai tukar) dan persaingan ketat akibat minimnya proyek baru juga menjadi faktor yang menghambat Perseroan untuk memenuhi target RKAP, karena hal tersebut semakin menekan margin serta meningkatkan biaya operasional. Meski demikian, strategi seperti optimalisasi SCM dan penguatan tata kelola diharapkan menjadi fondasi pemulihan, meski kolaborasi intensif dengan pemerintah tetap diperlukan untuk memaksimalkan penyerapan PMN dan proyek berkelanjutan sesuai prioritas nasional.

In line with the decline in new contract acquisitions, WIKA's revenue also fell to Rp19,242 billion from the previous year's figure of Rp22,530 billion. However, WIKA managed to reduce its losses to Rp2,513 billion from the previous year's figure of Rp7,824 billion. The decrease in losses was the result of the Company's efficiency program and a decrease in financial expenses in line with the debt restructuring program performed in 2024.

As of December 31, 2024, the Company's total assets were recorded at Rp63,533 billion, a decrease of Rp2,334 billion or 3% compared to the previous year's figure of Rp65,981 billion. This decrease was mainly due to a decline in the Company's inventory and work in progress.

COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION

Throughout 2024, WIKA has carried out various strategic initiatives in an effort to achieve the targets set in the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP). However, market conditions and challenges faced by the Company throughout 2024 were very different from the assumptions used in setting these targets, and as a result, in general, WIKA's performance in 2024 has not been able to meet the targets set.

WIKA's new contract acquisition in 2024, which amounted to Rp20,656 billion, only reached 66% of the established work plan and budget target of Rp31,074 billion. Meanwhile, in terms of revenue, the target was also not met, where the 2024 work plan and budget figure was Rp38,364 billion, while the realization was Rp19,242 billion, or 50%.

The failure to achieve the RKAP target was mainly due to the shift in government policy to the Asta Cita program (focusing on human resources and sustainable governance) which reduced the allocation of large-scale infrastructure projects, thus cutting the acquisition of new projects by WIKA, which previously relied on government contracts. In terms of finance, the increase in global raw material costs, continuing high financial expenses, and suboptimal absorption of the 2024 State-Owned Enterprises Fund have worsened liquidity pressures and hampered the acceleration of strategic projects.

Global economic volatility (inflation, geopolitics, exchange rate fluctuations) and fierce competition due to the lack of new projects are also factors that hinder the Company from meeting the RKAP target, as this puts further pressure on margins and increases operational costs. However, strategies such as SCM optimization and governance strengthening are expected to be the foundation for recovery, although intensive collaboration with the government is still needed to maximize the absorption of state capital and sustainable projects according to national priorities.



PROSPEK USAHA TAHUN 2025

Sejalan dengan tantangan yang dihadapi, ekonomi global dan nasional belum akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun 2025. Kebijakan The Fed untuk menurunkan suku bunga diyakini akan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi global. IMF memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh stabil di level 3,2%, sedangkan pemerintah Indonesia menargetkan untuk meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.

WIKA sangat optimis menghadapi tahun 2025. Namun demikian, kebijakan pemerintah melalui program Asta Cita membuat WIKA harus menyesuaikan fokus pengembangan usahanya di tahun 2025. Selain itu, WIKA akan menyelaraskan strateginya di tahun 2025 dengan program strategis Kementerian BUMN (KBUMN) yang berfokus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

WIKA menyelaraskan tiga program utama, yaitu:

1. Perumahan Rakyat
 - Peluang: Target pemerintah membangun 3 juta rumah bersubsidi hingga 2025 dan permintaan hunian inklusif.
 - Tantangan: Persaingan ketat (*Red Ocean Market*) dan tuntutan emisi rendah/*net zero*.
 - Strategi:
 - Pengembangan Modular *Net Zero Growth Housing* dengan teknologi *Smart Housing*.
 - Sinergi internal WIKA Grup (akses jalan, kawasan, solar panel) untuk perumahan bersubsidi.
2. Hilirisasi Mineral
 - Peluang: Permintaan proyek ramah lingkungan dan dukungan dekarbonisasi nasional.
 - Tantangan: Kompleksitas proyek, investasi besar, dan standar lingkungan ketat.
 - Strategi:
 - Integrasi prinsip ESG dalam proyek hilirisasi.
 - Kolaborasi dengan mitra strategis dan teknologi berkelanjutan.
3. Ketahanan & Transisi Energi
 - Peluang: Akses pembiayaan berkelanjutan dan regulasi pro-transisi energi.
 - Tantangan: Kompleksitas proyek EBT dan resistensi pasar.
 - Strategi:
 - Pengembangan proyek energi terbarukan (solar panel, CCUS) dan peningkatan SDM di bidang EPCC.
 - Optimalisasi pengalaman WIKA dalam proyek infrastruktur energi (contoh: PLTU Cilacap, PLTGU Grati).

WIKA berkomitmen mendukung kebijakan KBUMN melalui inovasi, kolaborasi, dan penerapan prinsip berkelanjutan dalam setiap proyek.

BUSINESS PROSPECTS FOR 2025

In line with the challenges faced, the global and national economies are not expected to experience significant growth in 2025. The Fed's policy to lower interest rates is believed to be a stimulus for global economic growth. The IMF projected that the global economy would grow steadily at a level of 3.2%, while the Indonesian government targeted economic growth of 5.2%.

WIKA is very optimistic about 2025. However, government policies through the Asta Cita program require WIKA to adjust the focus of its business development in 2025. In addition, WIKA will align its strategy in 2025 with the strategic program of the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) which focuses on supporting economic growth.

WIKA aligns three main programs, namely:

1. Public Housing
 - Opportunities: The government's target of building 3 million subsidized houses by 2025 and the demand for inclusive housing.
 - Challenges: Tough competition (*Red Ocean Market*) and demands for low emissions/*net zero*.
 - Strategy:
 - Development of Modular *Net Zero Growth Housing* with *Smart Housing* technology.
 - WIKA Group internal synergy (road access, area, solar panels) for subsidized housing.
2. Mineral Downstreaming
 - Opportunities: Demand for environmentally friendly projects and support for national decarbonization.
 - Challenges: Project complexity, large investments, and strict environmental standards.
 - Strategy:
 - Integration of ESG principles in downstream projects.
 - Collaboration with strategic partners and sustainable technology.
3. Energy Resilience & Transition
 - Opportunities: Access to sustainable financing and pro-energy transition regulations.
 - Challenges: The complexity of EBT projects and market resistance.
 - Strategy:
 - Development of renewable energy projects (solar panels, CCUS) and human capital development in the EPCC field.
 - Optimization of WIKA's experience in energy infrastructure projects (e.g. Cilacap Coal Fired Power Plant, Grati Combined Cycle Power Plant).

WIKA is committed to supporting the State-Owned Enterprises (SOEs) policy through innovation, collaboration, and the application of sustainable principles in every project.

PERKEMBANGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2024

WIKA meyakini bahwa penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi Perseroan dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai dalam jangka panjang, serta membangun kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, GCG diimplementasikan tidak sekadar sebagai bentuk kepatuhan, tetapi sebagai sistem nilai yang melekat dalam setiap proses bisnis Perseroan.

Sepanjang tahun 2024, penerapan GCG WIKA telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Tahun 2024, WIKA telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik di seluruh entitas WIKA Grup. Langkah tersebut diikuti dengan peningkatan Pemahaman Pegawai terhadap GCG, Anti Penyuapan, dan TKT dengan diadakannya pelatihan *awareness* dan audit ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan, pelatihan PELUIT integritas anti korupsi dari KPK.

Penerapan aspek integritas dari prinsip GCG menjadi landasan dalam struktur keberlanjutan WIKA, ebagaimana tercermin dalam pilar *Governance* pada kerangka *House of Sustainability*. Pilar ini mencakup aspek pengadaan yang bertanggung jawab, keterlibatan pemangku kepentingan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi sistem pengendalian internal.

Penerapan GCG didukung oleh pedoman internal yang mencakup Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta Code of Conduct yang berlaku bagi seluruh insan perusahaan. Pedoman ini tidak hanya mengatur kepatuhan terhadap peraturan, namun juga menanamkan prinsip etika dan integritas dalam pengambilan keputusan serta interaksi bisnis sehari-hari.

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, WIKA menempatkan tata kelola sebagai fondasi strategis dalam membangun perusahaan yang resilien dan berintegritas, bukan sekadar kewajiban normatif. Hal ini tercermin dari penandatanganan Pernyataan Komitmen GCG dan Pedoman SMAP oleh seluruh jajaran Komisaris dan Direksi, selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

Untuk memperkuat aspek akuntabilitas, WIKA melakukan pengukuran Indeks Akuntabilitas Perusahaan Indonesia (ICORPAX) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi DKI Jakarta. ICORPAX digunakan untuk mengukur akuntabilitas korporasi dalam beberapa dimensi, yaitu akuntabilitas korporasi pada pembangunan nasional, akuntabilitas korporasi pada keuangan negara, kepatuhan dan efektivitas operasional, efektivitas sistem tata kelola, Efektivitas pengendalian fraud. Hasil penilaian WIKA mencapai skor 79,42% atau dalam kategori "BAIK".

Pada tahun 2024, WIKA juga mengintensifkan sosialisasi terkait GCG, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System* (WBS) dan TKT ke seluruh unit kerja, direktorat, serta entitas anak perusahaan. Selain itu, peningkatan transparansi operasional dilakukan melalui digitalisasi sistem, meliputi: Sistem digitalisasi *invoice* (WDIGI), Sistem

THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN 2024

WIKA believes that consistent implementation of Good Corporate Governance (GCG) will strengthen the Company's position in facing business competition, improve the effectiveness and efficiency in managing resources, maximize long-term value, and build trust from all stakeholders. Therefore, the implementation of GCG is not only as a form of compliance, but as a value system inherent in every business process of the Company.

Throughout 2024, the implementation of GCG at WIKA has shown very good progress. In 2024, WIKA established the Integrated Governance Committee (TKT) to ensure the application of good governance across all entities within WIKA Group. This step was followed by increasing employee understanding of GCG, Anti-Bribery, and TKT through awareness training and ISO 37001:2016 anti-bribery management system audits, as well as anti-corruption integrity training (PELUIT) from the Corruption Eradication Commission (KPK).

The implementation of the integrity aspect of GCG principle is the foundation of WIKA's sustainability structure, as reflected in Governance pillar of the House of Sustainability framework. This pillar includes the aspects of responsible procurement, stakeholder involvement, and strengthening transparency and accountability through digitalization of internal control system.

The implementation of GCG is supported by internal guidelines that include the Code of Good Corporate Governance and the Code of Conduct that apply to all Company People. These codes do not only regulate compliance with regulations, but also instill ethical and integrity principles in decision-making and daily business interactions.

As part of its sustainability strategy, WIKA places governance as a strategic foundation in building a resilient and integrity-based company, not merely a normative obligation. This is reflected in the signing of Statement on GCG Commitment and SMAP Guidelines by all levels of Commissioners and Directors, in line with the provisions of the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023.

To strengthen the accountability aspect, WIKA conducted a measurement of the Indonesian Company Accountability Index (ICORPAX) by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) representative office of DKI Jakarta Province. ICORPAX is used to measure corporate accountability in several dimensions, namely corporate accountability in national development, corporate accountability in state finances, compliance and operational effectiveness, effectiveness of governance systems, effectiveness of fraud control. WIKA's assessment results reached a score of 79.42% or in "GOOD" category.

In 2024, WIKA also intensified socialization related to GCG, the Code of Conduct, the Whistleblowing System (WBS), and TKT to all work units, directorates, and subsidiaries. Additionally, operational transparency was enhanced through the digitization of systems, including digital invoice system (WDIGI), electronic procurement



pengadaan elektronik (WISE) yang terintegrasi dengan SAP, Vendor Management System (VMS) dan e-Catalogue untuk standarisasi sumber daya serta pricebook sebagai database harga material historis.

Inisiatif lain yang dilakukan adalah penerapan WIKA Document Filing System (WDFS), yaitu untuk memastikan pengelolaan dokumen secara sistematis dan efisien serta Audit Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) yang bertujuan untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang lebih akurat dan terpercaya.

Dalam pengelolaan risiko strategis, WIKA juga mengembangkan kerangka risiko berbasis ESG yang mencakup identifikasi risiko perubahan iklim, transisi energi, serta tuntutan emisi karbon di sektor konstruksi. Sebagai langkah antisipatif, WIKA emerging risk register yang diperbarui secara berkala, untuk mengantisipasi risiko sistemik seperti perubahan regulasi, ketidakpastian pembiayaan proyek, dan ketegangan geopolitik.

Untuk memperkuat manajemen risiko, WIKA telah menerapkan berbagai inisiatif strategis, antara lain, penerapan *Three Lines of Defense* untuk meningkatkan pengawasan dan mitigasi risiko secara menyeluruh; penguatan risk opinion melalui penerapan *4 Eyes Principle*, yang memastikan setiap keputusan bisnis telah melalui evaluasi mendalam oleh lebih dari satu pihak yang berwenang; serta melakukan inisiasi pembentukan risk *champion*, yang bertugas sebagai agen perubahan dalam mengelola dan memitigasi risiko secara proaktif.

Atas upaya WIKA dalam memperkuat tata kelola, WIKA berhasil mempertahankan predikat "*Most Trusted Company*" berdasarkan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) oleh Indonesia *Institute for Corporate Governance* (IICG), serta berada pada level 4 dengan nilai 92,35 berdasarkan penilaian dari *Asean Corporate Governance*. WIKA juga meraih penghargaan "Top 50 Emiten dengan kategori Kapitalisasi Pasar Menengah (*Middle Capitalization Public Listed Company*)" dalam ajang The 15th IICD *Corporate Governance Conference and Award 2024*, serta penghargaan "Badan Publik *"Informatif"*" dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pusat Informasi (KIP).

KOMITMEN TERHADAP ESG

Salah satu fokus penting dalam transformasi organisasi WIKA adalah penerapan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) sebagai bagian dari pengelolaan GCG. Sebagai perusahaan terbuka, WIKA memiliki kewajiban yang besar untuk melaksanakan pengelolaan bisnis dengan selalu memperhatikan keseimbangan lingkungan, kesejahteraan sosial dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2024, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip ESG dalam setiap aktivitasnya. WIKA mendukung Program Strategis KBUMN 2024 dengan berkontribusi pada 6 program prioritas pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi nasional, meliputi ketahanan pangan, perumahan rakyat, penguatan UMKM, hilirisasi mineral, ketahanan energi, dan pertahanan.

system (WISE) integrated with SAP, Vendor Management System (VMS), and e-Catalogue for resource standardization as well as a price book for historical material price databases.

Other initiatives are the implementation of WIKA Document Filing System (WDFS) to ensure systematic and efficient document management, as well as Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) audits to ensure more accurate and reliable financial reporting.

In strategic risk management, WIKA also develops an ESG-based risk framework that includes identification of climate change risks, energy transitions, and carbon emission demands in the construction sector. As an anticipatory step, WIKA's emerging risk register is updated regularly, to anticipate systemic risks such as regulatory changes, project financing uncertainty, and geopolitical tensions.

To strengthen risk management, WIKA has carried out several strategic initiatives, including the application of the Three Lines of Defense to improve risk oversight and mitigation comprehensively; strengthening risk opinion through the application of the 4 Eyes Principle, which ensures that every business decision undergoes a thorough evaluation by more than one authorized party; and initiating the formation of risk champions, who act as agents of change in proactively managing and mitigating risks.

For its efforts in strengthening governance, WIKA has maintained the title of "Most Trusted Company" based on the Corporate Governance Perception Index (CGPI) by the Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG), and achieved level 4 with a score of 92.35 based on the assessment from ASEAN Corporate Governance. WIKA also received the "Top 50 Issuers in the Middle Capitalization Public Listed Company" award at the 15th IICD Corporate Governance Conference and Award 2024, as well as the "Public Body 'Informative'" award at the Public Information Openness Award event organized by the Central Information Commission (KIP).

COMMITMENT TO ESG

One of the key focuses in WIKA's organizational transformation is the implementation of ESG (Environmental, Social, Governance) principles as part of the management of Good Corporate Governance (GCG). As a publicly listed company, WIKA has a significant responsibility to manage its business while always considering the balance between environmental sustainability, social welfare, and compliance with applicable laws and regulations.

Throughout 2024, the Company has continued its efforts to improve the implementation of ESG principles in every activity. WIKA supported the 2024 Strategic SOE Program by contributing to 6 priority government programs for national economic growth, including food security, public housing, strengthening MSMEs, mineral downstreaming, energy security, and defense.

Tahun 2024, WIKA telah mengimplementasikan *Net-Zero Growth Housing* untuk mengurangi jejak karbon sektor properti, serta peningkatan penggunaan kendaraan listrik (*electric vehicle*) pada operasional proyek dan dinas Perseroan.

Untuk mengarahkan langkah strategis keberlanjutan secara jangka panjang, Perseroan telah menyusun Grand Roadmap ESG 2024–2028 yang terdiri dari lima fase: *Prepare* (2024), *Move* (2025), *Resilience* (2026), *Grow* (2027), dan *Mature* (2028). *Roadmap* ini menjadi panduan utama dalam mengintegrasikan ESG ke seluruh aspek operasional dan bisnis, serta menetapkan WIKA sebagai *benchmark* nasional implementasi ESG pada tahun 2028.

Sementara itu, agar pelaksanaan ESG berjalan efektif dan terarah, WIKA menetapkan Direktur SDM & Transformasi sebagai pengampu kebijakan keberlanjutan, serta membentuk Komite ESG lintas divisi. Komite ini bertugas menyusun kebijakan, mengawal implementasi, dan mengevaluasi kinerja ESG secara berkala, sekaligus menjadi forum strategis dalam menyikapi dinamika regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan.

WIKA juga telah mengintegrasikan ESG di tingkat divisi, proyek, dan anak perusahaan melalui program terukur sesuai target keberlanjutan. Pelaksanaan ESG mengacu pada kerangka kerja lembaga global seperti S&P Global, *Sustainalytics*, IFRS *Sustainability*, dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD).

PERKEMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN TI

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI) yang andal merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan bisnis Perseroan. Untuk itu, WIKA berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang dimilikinya.

Tahun 2024, pengelolaan SDM WIKA berfokus pada penguatan *Employee Value Proposition* dan *Attract Retain* Pegawai serta menjaga *Engagement* (keterlibatan) pegawai kepada perusahaan, sehingga diharapkan semua lini dapat membantu percepatan upaya penyehatan perusahaan. Dalam rangka penyehatan, WIKA menetapkan kebijakan SDM *negative employee growth* dan peningkatan produktivitas, antara lain melalui perkuatan digitalisasi dan ERP.

Perseroan juga fokus dalam pengembangan karyawan yang dilakukan dengan menguatkan kompetensi inti perusahaan serta diselaraskan dengan arah bisnis perusahaan yang didasarkan dari pemetaan kompetensi karyawan. Pengembangan dilakukan tidak hanya melalui pelatihan, namun juga mendorong program *coaching* dan *mentoring*, *shadowing* dan *assignment* melalui rotasi pegawai. Selain itu juga mendorong pegawai untuk melakukan pembelajaran mandiri (*self learning*) dengan menggunakan *platform Learning Management System* (LMS).

Hal yang juga tidak kalah penting adalah membangun budaya kerja yang sesuai dengan nilai perusahaan. Manajemen telah melakukan penguatan implementasi AKHLAK sebagai program kerja strategis di masing-masing lini bisnis, sehingga dapat *core value* AKHLAK dapat terinternalisasi ke seluruh pegawai. Direksi terlibat dan

In 2024, WIKA has implemented Net-Zero Growth Housing to reduce the carbon footprint of property sector, as well as increased the use of electric vehicles in project operations and company services.

To direct long-term strategic measures for sustainability, the Company has compiled the ESG Grand Roadmap 2024–2028 which consists of five phases: Prepare (2024), Move (2025), Resilience (2026), Grow (2027), and Mature (2028). This roadmap serves as the main references in integrating ESG into all operational and business aspects, and establishing WIKA as the national benchmark for ESG implementation by 2028.

Meanwhile, to ensure that ESG implementation is effective and well-directed, WIKA has appointed the Director of Human Capital & Transformation as the sustainability policy manager and formed a cross-divisional ESG Committee. This committee is tasked with formulating policies, overseeing implementation, and periodically evaluating ESG performance, as well as serving as a strategic forum for addressing regulatory dynamics and stakeholder expectations.

WIKA has also integrated ESG at the division, project, and subsidiary levels through measurable programs aligned with sustainability targets. The implementation of ESG follows the frameworks of global institutions such as S&P Global, Sustainalytics, IFRS Sustainability, and Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

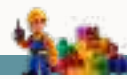
HC AND IT MANAGEMENT AND DEVELOPMENT PROGRAMS

Reliable Human Capital (HC) and Information Technology (IT) are essential factors for the continuity of the Company's business. Therefore, WIKA strives to continuously improve the quality and capacity of its human capital.

In 2024, WIKA's HC management focused on strengthening the Employee Value Proposition and Attracting & Retaining Employees, as well as maintaining employee engagement with the Company. It is expected that all departments can support the acceleration of the Company's recovery efforts. As part of the recovery, WIKA has established a negative employee growth policy and productivity improvement initiatives, including strengthening digitalization and ERP systems.

The Company also focused on employee development by reinforcing the core competencies of the Company, which are aligned with the Company's business direction based on employee competency mapping. Development is carried out not only through training but also by encouraging coaching and mentoring programs, shadowing, and assignments through employee rotations. Additionally, employees are encouraged to engage in self-learning through the Learning Management System (LMS) platform.

Equally important is building a work culture that aligns with the corporate values. The management has strengthened the implementation of AKHLAK as a strategic work program in each line of business, ensuring that the core value of AKHLAK is internalized by all employees. Board of Directors is directly involved in driving



turun langsung dalam mendorong implementasi perilaku AKHLAK dengan melakukan kunjungan ke setiap unit kerja dan melakukan wawancara langsung kepada karyawan utk memastikan karyawan telah memahami dan menjalankan perilaku AKHLAK.

Di bidang TI, tahun 2024 WIKA telah mengembangkan ROSI (Robot Sistem Informasi) yang merupakan pengembangan AI WIKA terkait prosedur internal. Selain itu, Perseroan juga memperkenalkan We Digi, sebuah sistem pemrosesan pembayaran melalui faktur digital, serta we-office, yang berfungsi sebagai sistem surat-menyurat digital. Pengembangan IT lainnya adalah penerapan SAP dalam grup WIKA.

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi WIKA dibantu oleh organ di bawah Direksi, yaitu Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyeksi Strategis dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan. Keberadaan Komite tersebut ditujukan untuk membantu efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh Direksi dalam mengambil keputusan.

Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis dibentuk pada tanggal 1 November 2023 melalui Surat Keputusan No. SK.02.01/A/DIR.01615/2023 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Proyek Strategis PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pembentukan komite ini juga merupakan respon dari surat Tim Percepatan Perbaikan Kesehatan Keuangan BUMN Sektor Konstruksi dan Jalan Tol No. SPMO/HPL.003/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 perihal Permohonan Tindak Lanjut atas Kesepakatan Tim terhadap Batasan Kewenangan, Matriks Keputusan untuk Proyek Konstruksi dan Investasi, Batasan Kewenangan Pembelian Aset Lahan dan Perubahan Nomenklatur Direksi di BUMN Sektor Konstruksi dan Jalan Tol.

Sedangkan untuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 26/DK/WIKA/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Struktur Organisasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta mengoptimalkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan.

Tahun 2024, Direksi menilai kedua organ tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukannya.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Tahun 2024, komposisi dan nomenklatur Direksi WIKA mengalami perubahan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 15 Mei 2024, dengan ringkasan keputusan sebagai berikut:

the implementation of AKHLAK behavior by visiting each work unit and conducting direct interviews with employees to ensure that employees understand and practice AKHLAK behavior.

In the IT sector, in 2024, WIKA developed ROSI (Robot System Information), which is an AI development related to internal procedures. Additionally, the Company introduced We Digi, a payment processing system via digital invoices, as well as we-office, which functions as a digital correspondence system. Other IT developments is the implementation of SAP within WIKA Group.

ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its duties and responsibilities, WIKA's Board of Directors is assisted by organs under the Board of Directors, namely Investment and Strategic Project Risk Management Committee and Anti-Bribery Compliance Function. The existence of these Committees is aimed at assisting the effectiveness of the Board of Directors' duties and responsibilities through advice and recommendations that can be used as a reference by the Board of Directors in making decisions.

The Investment and Strategic Project Risk Management Committee was formed on November 1, 2023, through Decree No. SK.02.01 / A / DIR.01615 / 2023 concerning the Formation of Risk Management and Strategic Project Committee of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. The formation of this committee is also a response to the letter of Acceleration Team for Improving the Financial Health of SOEs in the Construction and Toll Road Sector No. SPMO/HPL.003/V/2021 dated May 6, 2021, regarding the Request for Follow-up on the Team's Agreement on Authority Limitations, Decision Matrix for Construction and Investment Projects, Limitations on the Authority to Purchase Land Assets and Changes in the Nomenclature of Board of Directors in State-Owned Enterprises in the Construction and Toll Road Sector.

Meanwhile, the Anti-Bribery Compliance Function was established based on the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 26/DK/WIKA/2023 dated March 31, 2023, concerning the Organizational Structure of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

The Anti-Bribery Compliance Function was formed to improve operational efficiency and effectiveness and optimize the Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Company.

In 2024, the Board of Directors assessed that both organs had carried out their duties and responsibilities properly in accordance with the purpose of their formation.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS

In 2024, the composition and nomenclature of WIKA's Board of Directors changed in accordance with the resolution of Annual General Meeting of Shareholders held on May 15, 2024, with the following summary of decisions:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Memberhentikan dengan hormat Rudy Hartono sebagai Direktur Operasi III dan Ayu Widya Kiswari sebagai Direktur <i>Quality, Health, Safety, and Environment</i>.</p> <p>2. Mengubah nomenklatur jabatan beberapa Direksi menjadi sebagai berikut:</p> | <p>1. Honorably dismiss Rudy Hartono as Operations Director III and Ayu Widya Kiswari as Quality, Health, Safety, and Environment Director.</p> <p>2. Change the nomenclature of positions of several Directors to the following:</p> |
|---|---|

No	Semula Previously	Menjadi Previously After
1	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Direktur Keuangan Finance Director Direktur Manajemen Risiko dan Legal Risk Management and Legal Director
2	Direktur Human Capital Management Human Capital Management Director	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Human Capital Management and Transformation Director
3	Direktur <i>Quality, Safety, Health and Environment</i> Director of Quality, Safety, Health and Environment	-
4	Direktur Operasi III Operations Director III	-

- | | |
|--|---|
| <p>3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:</p> | <p>3. To assign the names below as members of the Company's Board of Directors:</p> |
|--|---|

No	Nama Name	Jabatan Semula Previous Position	Jabatan Baru New Position
1	Adityo Kusumo	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Direktur Keuangan Finance Director
	Hadjar Seti Adji	Direktur Human Capital Management Human Capital Management Director	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Human Capital Management and Transformation

- | | |
|--|---|
| <p>4. Mengangkat Sumadi sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal Perseroan.</p> | <p>4. To appoint Sumadi as the Company's Director of Risk Management and Legal.</p> |
|--|---|

Dengan demikian, komposisi Direksi WIKA menjadi sebagai berikut: Thus, the composition of WIKA Board of Directors is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director	8 Juni 2020 - RUPST 2025 June 8, 2020 - AGMS 2025	Ke-1 1st	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Keputusan RUPS Tahunan tanggal 04 Mei 2023 Resolution of the Annual GMS dated June 8, 2020 Resolution of the Annual GMS dated May 4, 2023
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Finance Director	4 Februari 2022 - RUPST 2027 February 4, 2022 - AGMS 2027	Ke-1 1st	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 4 Februari 2022 Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2024 Resolution of the Extraordinary GMS dated February 4, 2022 Resolution of the Annual GMS dated May 15, 2024
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Human Capital Management and Transformation Director	5 Agustus 2022 - RUPST 2027 August 5, 2022 - AGMS 2027	Ke-1 1st	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 5 Agustus 2022 Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2024 Resolution of the Extraordinary GMS dated August 5, 2022 Resolution of the Annual GMS s dated May 15, 2024
Hananto Aji	Direktur Operasi I Operations Director I	8 Juni 2020 - RUPST 2025 June 8, 2020 - AGMS 2025	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Resolution of the Annual GMS dated June 8, 2020



Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Operations Director II	8 Juni 2020 - RUPST 2025 June 8, 2020 - AGMS 2025	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Resolution of the Annual GMS dated June 8, 2020
Sumadi	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Risk Management and Legal Director	15 Mei 2024 - RUPST 2029 May 15, 2024 - 2029 AGM	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Resolution of the Annual GMS dated May 15, 2024

Atas nama Perseroan, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Rudy Hartono dan Ayu Widya Kiswari atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

APRESIASI

Tahun 2024, telah berhasil dilalui WIKA dengan baik. Di tengah situasi internal dan eksternal yang masih memberikan tantangan, Perseroan mampu merealisasikan kinerja yang baik. Karena itu, Direksi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemegang Saham serta arahan dan masukan Dewan Komisaris dalam mendukung jalannya kegiatan usaha tersebut.

Kami juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja sama seluruh tim manajemen dan karyawan dalam meraih pencapaian kinerja yang baik untuk tahun 2024. Direksi juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan lain, baik regulator, pelanggan, mitra kerja dan pihak lainnya. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, terutama untuk mengoptimalkan kinerja Perseroan serta mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik.

On behalf of the Company, please allow us to extend an appreciation and gratitude to Rudy Hartono and Ayu Widya Kiswari for their dedication and contributions during their tenure as members of the Company's Board of Directors.

APPRECIATION

The year 2024 has been successfully navigated by WIKA. Despite internal and external challenges, the Company has been able to achieve good performance. Therefore, the Board of Directors would like to extend a gratitude for the trust given by the Shareholders, as well as the guidance and input from the Board of Commissioners in supporting the business activities.

We would also like to thank the entire management teams and employees for their dedication and cooperation in achieving good performance in 2024. The Board of Directors would also like to extend the utmost appreciation to other stakeholders, including regulators, customers, business partners, and others. Thank you for the support provided, particularly in optimizing the Company's performance and implementing good corporate governance.

Jakarta, 26 Maret 2025
 Jakarta, March 26, 2025
 Atas Nama Direksi
 On behalf of Board of Directors



Agung Budi Waskito
 Direktur Utama
 President Director



Jalan Labuan Bajo-Tanah Mori
Jalan Labuan Bajo-Tanah Mori

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

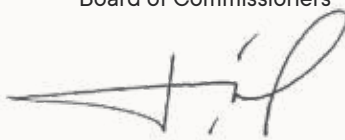
Statement Letter of Board of Commissioners On Accountability for the Fiscal Year 2024 Annual Report of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2024 telah dimuat secara lengkap serta bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dimaksud.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Maret 2025
Jakarta, March 26, 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Jarot Widyoko
Komisaris Utama
President Commissioner



Firdaus Ali
Komisaris
Commissioner



Suryo Hapsoro Tri Utomo
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Adityawarman
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Harris Arthur Hedar
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Rusmanto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

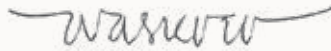
Statement of Board of Directors On Accountability for the Fiscal Year 2024 Annual Report of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for Fiscal Year 2024 has been presented in its entirety and are solely accountable responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 26 Maret 2025
Jakarta, March 26, 2025

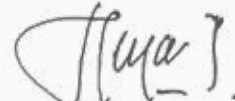
Direksi
Board of Directors



Agung Budi Waskito
Direktur Utama
President Director



Adityo Kusumo
Direktur Keuangan
Director of Finance




Hadjar Seti Adji
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi
Director of Human Capital Management and Transformation



Sumadi
Direktur Manajemen Risiko dan Legal
Director of Risk Management and Legal



Hananto Aji
Direktur Operasi I
Director of Operation I



Harum Akhmad Zuhdi
Direktur Operasi II
Director of Operation II

Istana Negara IKN
IKN State Palace





Profil Emiten atau Perusahaan Publik

Company Profile






WIKA berupaya memastikan keberlanjutan bisnis sekaligus memperkuat perannya sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional dengan tujuan strategis utama memperkuat kembali fondasi internal sebagai perusahaan karya BUMN untuk menjadi pilar pembangunan negara


WIKA strives to ensure business sustainability while strengthening its role as a key pillar in national development, with the main strategic goal of reinforcing its internal foundations as an SOE Karya to become a pillar of national development.



Informasi Umum Perusahaan

General Information About the Company


 <p>Nama dan Domisili Emiten Name and Domicile</p> <p>Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Disingkat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Timur</p> <p>Limited Liability Company PT Wijaya Karya Tbk Abbreviated as PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Domiciled in East Jakarta</p>	 <p>Bidang Usaha Business Field</p> <p>Konstruksi Construction</p>	 <table border="1"> <tr> <td>Tanggal Pendirian Date of Establishment</td> <td>Tanggal Go Public Public Listing</td> </tr> <tr> <td>11 Maret 1960 March 11, 1960</td> <td>29 Oktober 2007 October 29, 2007</td> </tr> </table>	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Tanggal Go Public Public Listing	11 Maret 1960 March 11, 1960	29 Oktober 2007 October 29, 2007
Tanggal Pendirian Date of Establishment	Tanggal Go Public Public Listing					
11 Maret 1960 March 11, 1960	29 Oktober 2007 October 29, 2007					

Informasi Perubahan Nama Emiten
Information on Name Changes of Issuer

Sejak berdiri hingga tahun 2024, WIKA mengalami perubahan nama sebanyak 2 (dua) kali. Informasi lebih rinci mengenai perubahan nama terdapat pada pembahasan Riwayat Singkat Perusahaan, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

Since its establishment until 2024, WIKA has changed its name 2 (two) times. More detailed information regarding the name changes can be found in the discussion regarding Brief History of the Company, Company Profile Chapter of this Annual Report.



Dasar Hukum Pendirian
Establishment Legal Basis

Akta Perseroan Terbatas No.110 tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pada waktu itu pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan Perubahan Naskah Pendirian Perseroan Terbatas "PT Wijaya Karya" berdasarkan akta No.106, tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.YA.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 21 September 1973, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.683.

Limited Liability Company Deed No. 110 dated December 20, 1972 before Dian Paramita Tamzil, alternate to Djojo Muljadi, S.H., Notary in Jakarta and Amended on the Establishment of Limited Liability Company "PT Wijaya Karya" based on deed No. 106, dated April 17, 1973 before Kartini Muljadi, SH, Notary in Jakarta, approved by the Republic of Indonesia Minister of Justice Decree No. YA.5/165/14 dated May 8, 1973, and announced in the Republic of Indonesia State Gazette No. 76 on September 21, 1973, Addendum No. 683.



Jumlah Karyawan
Number of Employees

2.064 orang (2024)
2,064 employees (2024)




Nama Bursa Stock Exchange	Kode Saham Stock Code
Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	WIKA




Jaringan Usaha
Business Network

- 8 Entitas Anak
- 18 Entitas Anak Tidak Langsung
- 11 Entitas Asosiasi
- 8 Subsidiaries
- 18 Indirect Subsidiaries
- 11 Associated Entities




Jaringan Kantor
Office Network

- 1 Kantor Pusat
- 7 Wilayah Operasi
- 3 Kantor Perwakilan Luar Negeri
- 2 Pusat Pelatihan
- 1 Head Office
- 7 Operational Areas
- 3 Overseas Representative Offices
- 2 Training Centers



Kepemilikan Saham
Share Ownership



Modal Dasar Authorized Capital	Rp3.500.000.000.000 Rp3,500,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital	Rp3.987.306.385.800 Rp3,987,306,385,800
Total Aset Tahun 2024 Total Assets in 2024	Rp63.553.125.266.000 Rp63,553,125,266,000

● **Pemerintah Republik Indonesia 91,02%**
The Government of The Republic of Indonesia 91.02%
 ● **Publik 8,98%**
Public 8.98%





AKSES TERHADAP PERUSAHAAN TERMASUK KANTOR CABANG ATAU PERWAKILAN

COMPANY ACCESS INCLUDING BRANCH OR REPRESENTATIVE OFFICES

JARINGAN KANTOR OFFICE NETWORK	ALAMAT ADDRESS	
Kantor Pusat Head Office	WIKA Tower 1 & 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9 10 Jakarta 13340 Indonesia Phone: +6221 8067 9200 Faximile : +6221 2289 3830 E-mail : adwijaya@wika.co.id	
Situs Web Website	www.wika.co.id	
Kontak Perusahaan Company Contact	Corporate Secretary WIKA Tower 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10 Lt.1 Jakarta 13340 Indonesia Investor Relations (khusus <i>Capital Market</i>) Investor Relations (specific for Capital Market) WIKA Tower 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10 Lt.1 Jakarta 13340 Indonesia E: investor.relations@wika.co.id	Customer Care E: adwijaya@wika.co.id Media Sosial Facebook: PT Wijaya Karya Twitter: @PTWijayaKarya Instagram: ptwijayakarya YouTube: PT Wijaya Karya

ANAK PERUSAHAAN SUBSIDIARIES	ALAMAT ADDRESS	
PT Wijaya Karya Beton Tbk		
Kantor Pusat Head Office	Gedung WIKA Tower 1 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9, Jakarta 13340 Phone: (+6221) 8192 802 (hunting) Fax: (+6221) 8590 3872 Website: www.wikabeton.co.id E-mail: sekper@wika-beton.co.id marketing@wika-beton.co.id	
Pabrik Produk Beton Sumatera Utara North Sumatra Concrete Product Factory	Jl. Binjai KM. 15,5 No. 1 Diski, Deli Serdang 20351 Phone: (+6261) 8821 543	
Pabrik Produk Beton Lampung Lampung Concrete Product Factory	Jl. Raya Tegineneng KM. 34,5 Desa Bumi Agung, Tegineneng, Pesawaran 35363	
Pabrik Produk Beton Lampung Selatan South Lampung Concrete Product Factory	Jl. Wijaya Karya Beton (Jl. Lintas Timur Sumatera Km. 4) Desa Sumur, Ketapang, Lampung Selatan 35596	
Pabrik Produk Beton Bogor Bogor Concrete Product Factory	Jl. Raya Narogong Km. 26 Cileungsi, Bogor 16820 Phone: (+6221) 8674 010	
Pabrik Produk Beton Subang Plant Karawang Karawang Concrete Product Factory	Jl. Surya Madya III Kav. I-34, Kawasan Industri Surya Cipta, Karawang 41361 Phone: (+6221) 8911 5167, (0267) 8630 315, Fax: (+62267) 8610 259	
Pabrik Produk Beton Subang Subang Concrete Product Factory	Jl. Raya Cipeundeuy Pabuaran KM. 3,6 Desa Karang Mukti, Kec. Cipeundeuy, Subang 41272	
Pabrik Produk Beton Majalengka Majalengka Concrete Product Factory	Jl. Raya Burujul Kulon Tromol Pos 02, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat 45454 Phone: (+62233) 881 425	
Pabrik Produk Beton Boyolali Boyolali Concrete Product Factory	Jl. Raya Boyolali - Solo Km. 4,5, Mojosongo, Boyolali 57322 Phone: (+62276) 321138	
Pabrik Produk Beton Pasuruan Pasuruan Concrete Products Factory	Jl. Raya Kejapanan No. 323, Gempol, Pasuruan 67155 Phone: (+62343) 851488, 853161, 852130	



ANAK PERUSAHAAN SUBSIDIARIES	ALAMAT ADDRESS
Pabrik Produk Beton Sulawesi Selatan South Sulawesi Concrete Products Factory	Jl. Kima Raya II Kav. S/4-5-6 Kawasan Industri Makassar, Makassar 90241 Phone: (+62411) 511764
PT Wijaya Karya Realty	
Kantor Pusat Head Office	Tamansari Hive Office, 12th Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Cawang, Jakarta Timur 13340 Phone: (+6221) 2101 1200, 2101 1201 Website: www.wikarealty.co.id E-mail: corsec@wikarealty.co.id
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	
Kantor Pusat Head Office	Tamansari Hive Office Lt. 8 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Cawang Cipinang Cempedak, Jakarta Timur 13340 Phone: (+6221) 221 131 22 Website: www.wikaikon.co.id
Pabrik Plastic, Pressing & Casting Bogor Bogor Plastic, Pressing & Casting Manufacturing Factory	Jl. Raya Narogong KM. 26, Cileungsi Kab. Bogor 16820
Pabrik Pembuatan Baja Tangerang Tangerang Steel Manufacturing Factory	Jl. Raya Serang KM. 27, Desa Tobat Balaraja Tangerang, Banten
Workshop Alat Berat Heavy Equipment Workshop	Jl. Raya Cirebon, Bandung KM. 31, Desa Cisambeng, Kec. Palasah, Kab. Majalengka
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	
Kantor Pusat Head Office	Tamansari Hive Office Lt. 5&11 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur 13340 Phone: (+6221) 2286 4446 Website: www.wikarekon.co.id
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	
Kantor Pusat Head Office	WIKA Tower 1, 7th-10th Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta Timur 13340 Phone: (+6221) 8690 9003 (+6221) 8590 8862 (Hunting) Fax: (+6221) 8590 4146 E-mail: corsec@WIKAgedung.co.id Website: www.wikagedung.co.id
Pabrik Modular Modular Factory	Komplek Industri Kembang Kuning. Jl. Raya Narogong KM. 26,5, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat Website: www.modular.co.id E-mail: modular@wikagedung.id
PT Wijaya Karya Bitumen	
Kantor Pusat Head Office	Signature Park Lt 3 Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav. 22-23, RT.10 / RW.09 Tebet Timur, Kec. Tebet Jakarta Selatan-Jakarta 12820 Phone: (+6221) 8590 9416 Website: www.wikabitumen.co.id E-Mail: Info@wikabitumen.co.id

ANAK PERUSAHAAN SUBSIDIARIES	ALAMAT ADDRESS
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	
Kantor Pusat Head Office	Tamansari Hive Office Lt. 3 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur 13340 Phone: (+6221) 2280 7100 Website: www.wikaserangpanimbang.com
Kantor Operasional Operational Office	Plaza Tol Rangkasbitung KM90+500 Tol Serang Panimbang, Rangkasbitung, Banten 42318 Phone: (+6252) 5560 065 Website: www.wikaserangpanimbang.com
PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur	
Kantor Pusat Head Office	Jl. Mayor Madmuin Hasibuan RT.004/RW.024, Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113 Phone: (021) 3831 9068 E-mail: humas@wikatirtajaya.com Website: www.wikatirtajajatiluhur.id
Wilayah Operasi Dalam Negeri Domestic Operational Area	
Infrastruktur Operasi I Operation Infrastructure I	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu & Kepulauan Bangka Belitung
Infrastruktur Operasi II Operation Infrastructure II	DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, & Jawa Timur
Infrastruktur Operasi III Operation Infrastructure III	Kalimantan
Infrastruktur Operasi IV Operation Infrastructure IV	Sulawesi, Bali, Lombok, NTB, & NTT
Building Operasi I Operation Building I	DKI Jakarta, Banten, Sumatera, Malaysia
Building Operasi II Operation Building II	Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua
Kantor Perwakilan Luar Negeri Overseas Representative Offices	
Kantor Perwakilan Dubai Dubai Representative Office	The Onyx Tower I, No. 1108, 11th Floor, Sheikh Zayed Road, Dubai, Uae
Kantor Perwakilan Malaysia Malaysia Representative Office	Wijaya Karya Persero Sdn. Bhd. (1114450-T) Lot 382, 2nd Floor, Section 5 Wisma Polarwood KTLJ Jl. Satok Kuching
Kantor Perwakilan Republik Demokratik Timor Leste Democratic Republic of Timor Leste Representative Office	Zero V, Fatuhada Dom Alexio, Dili
Pusat Pelatihan Training Center	
WIKASATRIAN	Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor Phone: (+62251) 825 7600
WIKA Pratama	Jl. Kelapa Dua Wetan No. 6, Ciracas, Jakarta Timur Phone: (+6221) 364 78750



Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company



WIKA tetap optimis dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan. Perbaikan yang terus dilakukan dalam setiap tahapan proyek diharapkan dapat mempercepat pencapaian hasil yang lebih maksimal dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional.

WIKA remains optimistic about achieving the targets that have been set. Continuous improvements in each phase of the project are expected to accelerate the achievement of more optimal results and contribute positively to national development.



PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut WIKA atau Perseroan) didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara/PN Widjaja Karja. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961 ini, PN Widjaja Karja lahir merupakan hasil peleburan dari perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang bernama Naamloze Vennootschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Visen Co. yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No. 5 tanggal 11 Maret 1960. Kemudian, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tanggal 22 Juli 1971, PN Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 Undang- Undang No. 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 40 tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2904).

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, (hereinafter referred to as WIKA or Company) was established on March 29, 1961 based on 1960 Law No. 19 juncto 1961 Government Regulation No. 64 dated March 29, 1961 concerning the Establishment of State Company/PN Widjaja Karja. Pursuant to the 1961 Government Regulation No. 64, PN Widjaja Karja was merged with the former Dutch-owned building company Naamloze Vennootschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co. that had been nationalized based on 1960 Government Regulation No. 2 and the Ministry of Public Works and Electric Power (PUTL) Decree No. 5 dated March 11, 1960. Afterward, based on Government Regulation No. 40 dated July 22, 1971, PN Widjaja Karja was declared as dissolved and transformed into a Limited Liability Company (Persero), as published in article 2, paragraph 3 of Law No. 9/1969 (Republic of Indonesia State Gazette No. 40 of 1969, Republic of Indonesia Gazette Supplement 2904).

Selanjutnya, Perseroan dinamakan “PT Wijaya Karya”, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pada waktu itu pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan Perubahan Naskah Pendirian Perseroan Terbatas “PT Wijaya Karya” berdasarkan akta No. 106, tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 1973, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 683.

Pada awal pendiriannya, kegiatan usaha yang dijalankan WIKA adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air, sebelum menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan di tahun 70-an. WIKA juga turut berperan serta dalam proyek pembangunan Gelanggang Olahraga Bung Karno dalam rangka penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) dan Asian Games ke-4 di Jakarta.

Tahun 1982, WIKA mendiversifikasi usahanya secara signifikan melalui pembentukan beberapa divisi baru, yakni Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan Gedung, Divisi Sarana Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi Industri, Divisi Energi, dan Divisi Perdagangan. Dengan semakin banyaknya proyek yang ditanganinya, maka semakin banyak anak perusahaan yang didirikan sehingga WIKA tumbuh menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi dan saling bersinergi. Dalam bidang konstruksi, sejak 1997, WIKA mulai mengembangkan diri dengan mendirikan beberapa anak perusahaan mandiri yang mengkhususkan diri dalam menciptakan produknya masing-masing, yakni WIKA Beton, WIKA Intrade, dan WIKA Realty. Keberhasilannya dalam mencapai pertumbuhan yang cukup pesat mendapat apresiasi yang tinggi dari publik.

Pada 27 Oktober 2007, WIKA melakukan Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) di Bursa Efek Indonesia dengan melepas 28,46 persen saham ke publik, sementara sisanya masih dipegang Pemerintah Republik Indonesia. Selepas memperoleh dana dari IPO, WIKA semakin leluasa untuk tumbuh dan berkembang. Langkah-langkah inovatif semakin mudah diwujudkan. WIKA pun tetap kokoh tatkala menghadapi berbagai krisis, baik krisis global maupun nasional. WIKA terus mengembangkan kemampuan *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*. Pasarnya diperluas hingga ke mancanegara. WIKA tak pernah melewatkan kesempatan menggarap proyek-proyek menantang, baik dari swasta maupun Pemerintah yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya adalah Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura yang manfaatnya kian dirasakan oleh seluruh penduduk Jawa dan Madura.

Di tahun 2014, WIKA hadir dengan paradigma baru. WIKA mengklasifikasi ulang segmen bisnisnya menjadi 5 (lima) pilar, yakni Industri, Infrastruktur & Gedung, Energi dan Industrial Plant, Realty dan Properti, dan Investasi. Posisi WIKA pun semakin mantap sebagai salah satu pemain di industri kelistrikan dan migas berkat kontrak-kontrak baru di industri tersebut yang berhasil dimenangkannya. Tahun 2015 menandai dimulainya babak baru WIKA dengan menggarap proyek infrastruktur berskala mega. Proyek ini tak hanya menantang, namun mempertaruhkan nama baik Bangsa, yakni proyek MRT (*Mass Rapid Transportation*) Jurusan Bundaran HI-Lebak Bulus di Jakarta.

Subsequently the Company name was changed to “PT Wijaya Karya,” based on Limited Liability Company Deed No. 110 dated December 20, 1972, before Dian Paramita Tamzil, an alternate for Djojo Muljadi, S.H., Notary in Jakarta and Amendments to the Scripts of Establishment of Limited Liability Company “PT Wijaya Karya” based on Deed No. 106 dated April 17, 1973, before Kartini Muljadi SH., Notary in Jakarta, with both being approved by the Republic of Indonesia Minister of Justice through Decree No. Y.A.5/165/14 dated May 8, 1973 and published in the Republic Indonesia State Gazette No. 76 dated September 21, 1973, additional of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 683.

On its establishment, WIKA's business activities were electrical and plumbing installation work, before becoming a civil and building contractor company in the 70s. WIKA also participated in the Bung Karno Sports Center development project, organizing the Games of the New Emerging Forces (GANEFO) and the 4th Asian Games in Jakarta.

In 1982, WIKA significantly diversified its business through the establishment of new divisions such as General Civil Division, Building Division, Housing Facilities Division, Concrete and Metal Product Division, Industrial Construction Division, Energy Division, and Trade Division. As more projects undertaken, more subsidiary companies were established and WIKA grew into an integrated and synergized infrastructure company. In the construction business started in 1997, WIKA began to expand by establishing some independent subsidiary companies for specialized products, namely WIKA Beton, WIKA Intrade and WIKA Realty. Its ability to grow quite rapidly gained a high appreciation from the public.

On October 27, 2007, WIKA conducted an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange releasing 28.46 percent of its shares to the public, while the Government of the Republic of Indonesia held the remainder. Having obtained IPO funds through the IPO, WIKA had more flexibility to grow and develop itself. Innovative measures were more easily realized. WIKA stood strong when facing various crises, both global and national. WIKA continued to develop its competencies in Engineering, Procurement and Construction (EPC). As its markets extended to foreign countries, WIKA never passed up any opportunity for investment in, and development of challenging infrastructure projects, whether private or government projects financed by the State, as well those in the Local Budgets and Expenditure. One of which was the Suramadu bridge that connects Java and Madura Islands providing many benefits to the people.

In 2014, WIKA developed a new paradigm. WIKA restructured its business segments into 5 (five) pillars namely: Industry, Infrastructure & Building, Energy & Industrial Plant, Realty & Property, and Investment. By obtaining new contracts in the power generation and oil and gas sectors, WIKA further solidified itself as one of the players in the industry. 2015 marked the start of WIKA's new era with mega infrastructure projects, which were not only challenging, but risked the nation's reputation, namely the Bundaran HI-Lebak Bulus MRT (Mass Rapid transportation) Route in Jakarta.



Pada tahun 2016, WIKA melakukan penawaran saham umum terbatas kepada para pemegang saham lama, sehingga jumlah saham beredar WIKA menjadi sebanyak 8.969.951.372. Dana hasil penawaran umum terbatas tersebut selanjutnya digunakan untuk mendanai beberapa proyek strategis seperti pembangunan jalan tol dan pembangkit listrik. Di tahun 2017, WIKA melakukan transformasi terhadap *corporate value* dari yang sebelumnya adalah CIBERTI (*Commitment, Innovation, Balance, Excellence, Relationship, Teamwork* dan *Integrity*) menjadi ACE (*Agility, Caring, dan Excellence*) sebagai bentuk respon WIKA untuk menghadapi tantangan bisnis yang dinamis.

Di tahun 2018, WIKA menghimpun dana sebesar Rp5,4 triliun dari penerbitan obligasi global berdenominasi rupiah atau Komodo Bond di Singapore Exchange dan London Stock Exchange. Komodo Bond WIKA mengalami *oversubscribed* 2,5x yang menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para investor global untuk berinvestasi di sektor infrastruktur Indonesia. Di tahun yang sama, WIKA yang sebelumnya memfokuskan bisnisnya pada bidang konstruksi, kini mulai memperkuat bisnisnya pada bidang investasi, seperti di sektor jalan tol, *power plant* dan *transit oriented development* untuk memperbesar porsi *recurring income*. Selanjutnya di tahun 2019, WIKA semakin memperkuat posisinya di kancah global melalui andil besarnya pada Indonesia Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019. Pada forum internasional ini, WIKA menjadi satu-satunya perusahaan konstruksi Indonesia yang memperkenalkan dan melakukan peninjauan pengembangan bisnis dengan para pimpinan negara-negara di benua Afrika. WIKA pun eksis di 10 negara yang tersebar di benua Asia dan Afrika. Tahun 2019 juga diisi dengan kesuksesan WIKA dalam menyelesaikan sejumlah signature project di antaranya MRT Jakarta Bundaran HI-Lebak Bulus, LRT Jakarta Kelapa Gading-Velodrome, serta Bandar Udara Aeroportto Internacional De Oecusse Rota do Sandolo di Timor Leste.

Memasuki tahun 2020, WIKA menghadapi perlambatan yang sulit dihindarkan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak secara nasional dan global. Banyak proyek pembangunan yang harus tertunda karena adanya kebijakan dan/atau imbauan pembatasan sosial, realokasi anggaran Kementerian teknis serta perekonomian global yang belum bergerak normal. Sebagai perusahaan publik, WIKA memahami, menerima, dan merespon dengan sigap berkenaan dengan kinerja yang akan terus dipantau kapan pun dan di mana pun. WIKA telah merapatkan barisan dan duduk bersama dengan seluruh pemangku kepentingan menyiapkan rencana kerja dan strategi sebagai bentuk tanggung jawab profesional kepada publik.

Pada tahun 2021, WIKA terus berupaya maksimal dalam menyelesaikan proyek-proyek yang telah dipercayakan dengan tepat waktu dan sebaik-baiknya. WIKA berhasil menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional, di antaranya yaitu Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Paselloreng, Bendungan Tugu dan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi I. Selain itu, WIKA berhasil meraih beberapa proyek strategis seperti proyek Jalan Tol Cisumdawu Seksi IV, Bandara Dhoho Kediri, serta beberapa proyek infrastruktur dan gedung. Pada tahun ini pula, WIKA memperkuat portofolio bisnisnya di bidang investasi pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selanjutnya, WIKA masuk ke bidang investasi kebandarudaraan melalui pembentukan Badan Usaha Pelaksana

In 2016, WIKA undertook a limited public offering to its old shareholders, raising WIKA's outstanding shares to 8,969,951,372. The proceeds were used to finance several strategic projects such as toll road development and power plant. In 2017, WIKA transformed its corporate values from CIBERTI (*Commitment, Innovation, Balance, Excellence, Relationship, Teamwork and Integrity*) to ACE (*Agility, Caring and Excellence*) as WIKA's response to the dynamic business challenges.

In 2018, WIKA raised funds amounting to Rp5.4 trillion through the issuance of rupiah-denominated global bonds or Komodo Bonds on the Singapore Exchange and the London Stock Exchange. WIKA's Komodo Bonds were oversubscribed 2.5x showing the high enthusiasm from global investors to invest in Indonesia's infrastructure sector. In the same year, WIKA, which previously focused its business in the construction sector, now began to strengthen its business in the investment sector, such as in toll roads, power plants and transit oriented development sectors to increase the recurring income portion. Later in 2019, WIKA further strengthened its position in the global arena through its large share in the 2019 Indonesia Africa Infrastructure Dialogue (IAID). At this international forum, WIKA was the only Indonesian construction company that introduced and explored business development with leaders of countries on the African continent. WIKA exists in 10 countries spread across the continents of Asia and Africa. 2019 also saw WIKA's success in completing a number of signature projects including the Jakarta MRT Roundabout HI-Lebak Bulus, Jakarta Kelapa Gading- Velodrome LRT, and Aeroportto Internacional De Oecusse Rota do Sandolo Airport in Timor Leste.

Entering 2020, WIKA faced an unavoidable slowdown due to the Covid-19 pandemic that brought significant impact both nationally and globally. Many development projects had to be postponed due to policies and/or calls for social restrictions, budget reallocations by the technical ministries, and abnormal global economies. As a public company, WIKA understood, accepted, and responded swiftly with regard to performance that would continue to be monitored anytime and at anywhere. WIKA took stock and worked together with its stakeholders to prepare plans and strategies as a form of professional responsibility to the public.

Throughout 2021, WIKA's maximum efforts continued to be seen in completing the projects that have been entrusted in a timely and optimal manner. WIKA has successfully completed several national strategic projects, including the Kuningan Dam, Bendo Dam, Paselloreng Dam, Tugu Dam and Serang-Panimbang Toll Road Section I. In addition, WIKA has won several strategic projects such as the Cisumdawu Toll Road project Section IV, Dhoho Airport Kediri, as well as several infrastructure and building projects. Also this year, WIKA strengthened its investment business portfolio in Drinking Water Supply Systems (SPAM). Afterward, WIKA also entered the airport investment sector through the establishment of an Implementing Business Entity (BUP) PT Batam International

(BUP) bernama PT Bandara Internasional Batam (BIB). BIB dibentuk WIKA bersama PT Angkasa Pura I (Persero) dan Incheon International Airport Corporation (IIAC). Ketiganya tergabung dalam konsorsium pemenang lelang proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Bandara Hang Nadim, Batam.

Di tahun 2022, WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 pada 18 Februari 2022, dan Penawaran Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I tahun 2022 pada 3 November 2022. Dana hasil penawaran umum obligasi dan penawaran umum berkelanjutan sukuk mudharabah tersebut digunakan untuk modal kerja proyek-proyek infrastruktur dan gedung yang dikerjakan oleh WIKA.

Posisi WIKA didukung oleh kepercayaan Pemerintah terhadap WIKA, sehingga di sepanjang tahun 2022, WIKA memperoleh kepercayaan untuk mengerjakan berbagai proyek persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dilaksanakan pada 15-16 November 2022 di Bali. Proyek-proyek tersebut, antara lain, Revitalisasi Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Revitalisasi Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan SP Tanamori, dan Preservasi Jalan dan Jembatan Nasional di Badung, Bali. Sementara itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berhasil diselesaikan di tahun 2022, di antaranya yaitu, Terminal Kijing, Bendungan Sukamahi dan Bendungan Randugunting. WIKA juga meraih kepercayaan untuk mengerjakan beberapa proyek Ibu Kota Negara (IKN), di antaranya, pembangunan jalan tol KKT Kariangau-Tempadung, Kantor Kepresidenan, Istana Kepresidenan, serta Hunian Pekerja.

WIKA mengawali tahun 2023 dengan terus mencatatkan progres yang positif dalam menggarap berbagai proyek strategis nasional yang dipercayakan di antaranya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara dengan mengerjakan 3 (tiga) stasiun kereta cepat, yaitu stasiun Halim, Karawang, dan Padalarang. Pada proyek ini, WIKA menjadi satu-satunya kontraktor utama yang berasal dari dalam negeri yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunannya, dengan bergabung dalam konsorsium yang melibatkan kontraktor luar negeri yang memiliki pengalaman panjang pada pembangunan kereta cepat di berbagai negara.

WIKA juga berhasil merampungkan proyek Sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) yang merupakan sebuah langkah Pemerintah dalam meminimalisir potensi banjir secara komprehensif di wilayah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Keberhasilan lainnya, yaitu pembangunan bendungan Kuwil Kawangkoan, jalan tol Semarang-Demak, jalan tol Cisumdawu dan beberapa proyek lainnya. Di tahun ini pula, WIKA memasuki masa transformasi untuk langkah penyehatan Perseroan baik dari sisi penyehatan keuangan, maupun tata kelola dan operasi perusahaan. WIKA tetap mampu beroperasi dengan baik di tengah situasi yang penuh tantangan. Hal ini dibuktikan dengan proses produksi yang tetap berjalan. Dalam kondisi tersebut, WIKA tetap mampu mencatatkan peningkatan penjualan. Hal ini diraih selaras dengan langkah transformasi WIKA yang terdiri dari tiga pilar yaitu fokus terhadap kas, keunggulan eksekusi proyek, dan penyeimbangan portofolio.

Airport (BIB). BIB was formed by WIKA together with PT Angkasa Pura I (Persero) and Incheon International Airport Corporation (IIAC). The three of them are part of the consortium that won the Public Private Partnership (PPP) project tender for Hang Nadim Airport, Batam.

In 2022, WIKA issued Sustainable Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds and Mudharabah Sharia Bonds II Phase II 2022 on February 18, 2022, and Sustainable Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds and Mudharabah Sharia Bonds III Phase I 2022 on November 3 2022. The proceeds from bonds public offering and mudharabah sharia bonds sustainable public offering were used for working capital for infrastructure and building projects undertaken by WIKA.

WIKA's strong stance is supported by the Government's trust in WIKA, hence throughout 2022 WIKA was entrusted with working on various preparatory projects for the G20 Summit held on November 15-16, 2022 in Bali. These projects include the Revitalization of Halim Perdana Kusuma Airport, Jakarta, Revitalization of VVIP Terminal at I Gusti Ngurah Rai Airport, Bali, improvement and construction of SP Tanamori road and bridge, and Preservation of National Roads and Bridges in Badung, Bali. Meanwhile, the National Strategic Projects (PSN) that have been successfully completed in 2022 among them are Kijing Terminal, Sukamahi Dam and Randugunting Dam. WIKA has also won the trust to work on several National Capital (IKN) projects, project, including the construction of Kariangau-Tempadung KKT toll road, Presidential Office, Presidential Palace, and Workers' Residence.

Starting year 2023, WIKA continued to record positive performance and progress in various national strategic projects entrusted, including the Jakarta-Bandung High-Speed Train (KCJB), which is the first high-speed train in Southeast Asia, by working on three high-speed train stations, namely Halim, Karawang, and Padalarang. In this project, WIKA was the sole domestic main contractor involved in the construction, participating in a consortium with foreign contractors with extensive experience in high-speed train construction in various countries.

WIKA also completed the Sodetan Ciliwung to East Flood Canal (KBT) project, a government initiative to comprehensively minimize the potential for floods in Jakarta, Bekasi, and surrounding areas. Other accomplishment was the construction of Kuwil Kawangkoan dam, Semarang-Demak toll road, Cisumdawu toll road, and several other projects. In the same year, WIKA entered a transformation phase to improve the company's health, both financially and in terms of governance and operations. WIKA remained capable of operating effectively amid challenging conditions, as evidenced by the continuing production process. During this period, WIKA still managed to increase sales, aligning with the Company's transformation strategy consisting of three pillars: focus on cash, project execution excellence, and portfolio balancing.



Pada tahun 2024 WIKA berhasil menyelesaikan proyek sebanyak 45 proyek, 15 di antaranya adalah Proyek Strategis Nasional yaitu IKN Istana Negara, IKN Kantor Presiden, Manyar Smelter Desalination Plant, Manyar Desalination, Pabrik Gula Assembagoes PTPN XI, Bendungan Komerling II / Tiga Dihaji 4, Tol Tempino-Jambi JTTS, SPAM Jatiluhur, Karian Dam, Reservoir DC Pondok Kopi, Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau-Sp. Tempadung, Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur, Bendungan Pamukkulu, dan Bandar Udara Banggai. Keberhasilan WIKA menyelesaikan berbagai Proyek Strategis Nasional ini merupakan langkah penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui berbagai langkah strategis yang telah diambil, WIKA berhasil menunjukkan kinerja yang progresif dan terus berupaya meningkatkan efisiensi operasional, meskipun tantangan yang ada masih memerlukan waktu untuk sepenuhnya diselesaikan. Dengan fokus pada penyelesaian tepat waktu dan sesuai anggaran, WIKA tetap optimis dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan. Perbaikan yang terus dilakukan dalam setiap tahapan proyek diharapkan dapat mempercepat pencapaian hasil yang lebih maksimal dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional.

In 2024, WIKA successfully completed 45 projects, 15 of which were National Strategic Projects, including the IKN Presidential Palace, IKN Presidential Office, Manyar Smelter Desalination Plant, Manyar Desalination, Assembagoes Sugar Factory PTPN XI, Komerling II/ Tiga Dihaji Dam 4, Tempino-Jambi JTTS Toll Road, Jatiluhur SPAM, Karian Dam, Pondok Kopi DC Reservoir, IKN Toll Road Segment KKT Kariangau-Sp. Tempadung, Eastern National Axis Road Development, Pamukkulu Dam, and Banggai Airport. WIKA's success in completing these National Strategic Projects is a significant step in supporting the government's efforts to drive economic growth and equitable development, in order to achieve the welfare of society.

Through various strategic measures, WIKA has demonstrated progressive performance and continues to strive to improve operational efficiency, despite challenges that still require time to be fully resolved. With a focus on on-time completion and adherence to the budget, WIKA remains optimistic about achieving the targets that have been set. Continuous improvements in each phase of the project are expected to accelerate the achievement of more optimal results and contribute positively to national development.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA EMITEN PADA TAHUN BUKU

INFORMATION ON THE COMPANY'S NAME CHANGES IN THE FISCAL YEAR

Tahun Year	Nama Name	Akta Deed
1960	Perusahaan Negara/PN Widjaja Karja	Undang-Undang No. 19 tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara/PN "Widjaja Karja". Law No. 19 of 1960 juncto Government Regulation No. 64 of 1961 dated March 29, 1961 concerning the Establishment of State Company/PN "Widjaja Karja".
1972	PT Wijaya Karya (Persero)	Akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972. Limited Liability Company Deed No. 110 dated December 20, 1972

Sejak berdiri pada 11 Maret 1960 hingga laporan tahunan ini diterbitkan, WIKA mengalami satu kali perubahan nama dan badan hukum dari semula bernama PN Widjaja Karja menjadi PT Wijaya Karya (Persero). Perubahan ini efektif berlaku pada 20 Desember 1972 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pada waktu itu pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan Perubahan Naskah Pendirian Perseroan Terbatas "PT Wijaya Karya" berdasarkan akta No. 106, tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta.

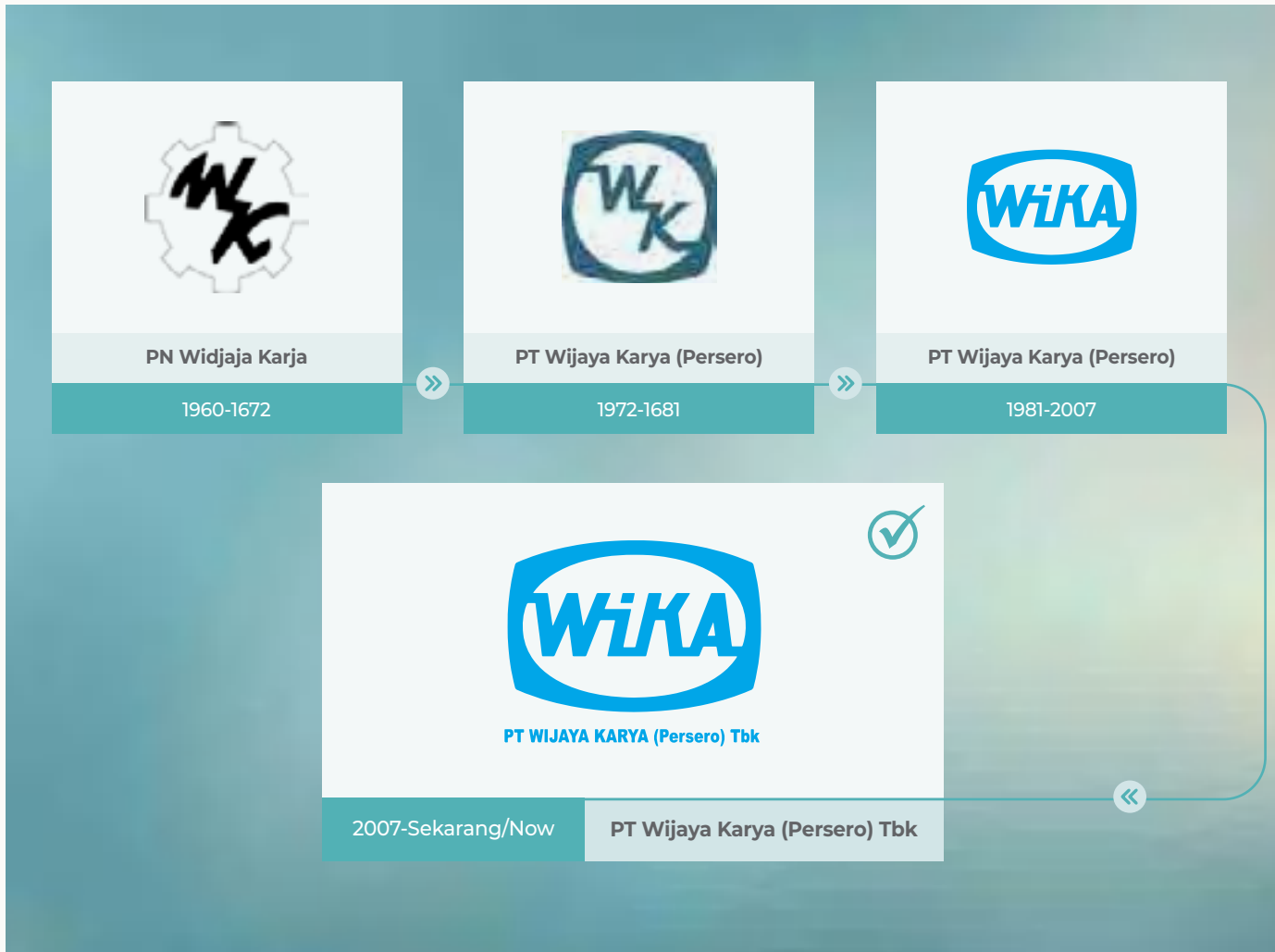
Since its establishment on March 11, 1960 until the publication of this annual report, WIKA underwent name change and legal entity for one time, from previously PN Widjaja Karya to PT Wijaya Karya (Persero). This change became effective on December 20, 1972 based on Limited Liability Company Deed No. 110 dated December 20, 1972 before Dian Paramita Tamzil, an alternate of Djojo Muljadi, S.H., Notary in Jakarta and Amendment to the Establishment of Limited Liability Company "PT Wijaya Karya" based on Deed No. 106, April 17, 1973 before Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta.

Kemudian, WIKA juga mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Terbuka, yang efektif berlaku pada 27 Oktober 2007 seiring dengan aksi korporasi yang dijalankan Perseroan dengan melakukan Penawaran Umum Perdana di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, nama yang digunakan saat ini adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Then WIKA also changed its status and become a Public Company, which took effect on October 27, 2007, in line with the Company's corporate action of Initial Public Offering on the Indonesia Stock Exchange. Thus, the name currently used is PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Identitas Perusahaan

Company Identity



Identitas brand WIKA terdiri dari simbol, huruf logo, warna dan tagline. Secara sederhana masing-masing item dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bentuk *frame* melebar elips, seperti peta dunia yang digelar secara horizontal. Hal ini menggambarkan betapa WIKA tumbuh berkembang menjadi perusahaan besar dengan ragam produk dan jasa, ekspansi usaha, serta pendapatan;
- Adanya perubahan penulisan identitas dari WK menjadi WIKA, ditujukan sebagai diferensiasi *brand* dengan BUMN karya lain yang memiliki inisial identitas sama. Penyusunan kata WIKA disusun menyambung sebagai cermin Perseroan yang tumbuh berkembang;
- Penulisan dibuat miring (*italic*) mengadopsi posisi pelari yang condong ke depan saat melakukan start, maksudnya bahwa WIKA siap berlari cepat dalam mengejar cita-cita;
- Warna *frame* berubah menjadi biru langit melambangkan cita-cita WIKA yang akan diraih setinggi langit.

WIKA's brand identity consists of symbols, logo letters, colors and taglines. In simple terms, each item can be explained as follows:

- The shape of the frame extends to an ellipse, like a world map laid out horizontally. This illustrates how WIKA grew to become a big company with a variety of products and services, business expansion, as well as income;
- There is a change in writing identity from WK to WIKA, intended as a brand differentiation with SOEs other works that have the same identity initials. The wording WIKA is arranged as a connection a mirror of a growing company;
- The writing is made italic, adopting the position of a runner that leans forward at the start. It means that WIKA is ready to run fast in pursuit of its goals;
- The color of the frame changes to sky blue, symbolizing WIKA's goals are to be achieved as high as the sky.



Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission and Corporate Values

Visi dan Penjelasan Visi

Vision and Its Explanation



■ Visi WIKA 2030 | WIKA 2030 Vision

“Menjadi Perusahaan Terpercaya di Bidang Infrastruktur dan EPC yang Berkelanjutan”

"To Become a Trusted Company in Sustainable Infrastructure and EPC."

■ Penjelasan Visi | Vision Explanation

Sebelumnya WIKA memiliki Visi 2030 untuk menjadi perusahaan terdepan dalam investasi dan EPC untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Visi tersebut merupakan wujud nyata dari harmonisasi aspek *people, planet, profit* dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah. Misi yang dimiliki oleh WIKA saat ini merupakan penurunan dari visi yang dimiliki sebagai bentuk *action* dalam mewujudkan visi perusahaan.

Namun, melihat kondisi perusahaan saat ini, dengan adanya proses restrukturisasi manajemen Perusahaan, maka perlu adanya reviu terhadap visi, misi serta *value* yang dimiliki oleh Perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya *turn around strategy* untuk dapat memperbaiki keadaan perusahaan. Mengingat terdapat beberapa aspek perusahaan yang perlu dilakukan perbaikan ataupun peningkatan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada Gambar 1, perlu adanya penyesuaian visi dan misi perusahaan untuk tercapainya perusahaan yang kuat sehingga, bisnis ke depannya bisa berkelanjutan dengan berfokus pada pertumbuhan dan perbaikan terhadap kondisi perusahaan.

Memperkuat kembali internal sebagai perusahaan karya BUMN untuk menjadi pilar pembangunan negara merupakan salah satu tujuan perusahaan yang baru dengan tetap menerapkan *Value* AKHLAK BUMN sebagai *value* perusahaan.

Previously, WIKA had a Vision 2030 to become a leading company in investment and EPC for better quality of life. This vision is a tangible manifestation of the harmonization of people, planet, profit aspects, and sustainable development goals set by the government. The mission currently held by WIKA is a derivative of the vision, serving as an action plan to realize the Company's vision.

However, considering the current state of the Company, with the ongoing management restructuring process, it is necessary to review the Company's vision, mission, and values. Based on this, a turnaround strategy is needed to improve the Company's situation, given that there are several aspects of the Company that require improvement or enhancement.

Based on the evaluation conducted in Figure 1, adjustments to the Company's vision and mission are necessary to achieve a strong company so that the business can be sustainable in the future, focusing on growth and improvement of the Company's condition.

Reinforcing the internal organization as a state-owned enterprise (SOE) in order to become a pillar of national development is one of the new goals of the Company, while still applying the SOE's AKHLAK values as the Company's core values.

Gambar 1 Perubahan Tema Strategis
Gambar 1 Perubahan Tema Strategis

VISI, MISI & VALUE 2024 / VISION, MISSION & VALUE 2024



VISI VISION

Terdepan dalam investasi dan EPC berkelanjutan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik

Becoming a leading company in investment and EPC for better quality of life



MISI/MISSION

1. Menyediakan jasa dan produk EPC yang terintegrasi berlandaskan pada prinsip kualitas, keselamatan, kesehatan dan lingkungan;
 2. Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dengan portofolio investasi strategis;
 3. Melakukan pengembangan karwasan terpadu demi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat
 4. Memberikan layanan kolaboratif yang melampaui ekspektasi/harapan pemangku kepentingan;
 5. Menciptakan rekam jejak di kancah global melalui inovasi dan teknologi termutakhir;
 6. Mengimplementasikan budaya belajar dan berinovasi untuk memenuhi kompetensi global;
 7. Menumbuhkan kearifan lokal melalui praktik kepemimpinan untuk membangun kesejahteraan yang menyeluruh
1. Providing integrated EPC services and products based on the principles of quality, safety, health and environment;
 2. Ensure sustainable growth with a strategic investment portfolio;
 3. Conducting integrated neighborhood development for a better life for the community;
 4. Deliver collaborative services that exceed stakeholder expectations;
 5. Creating a global footprint through innovation and cutting-edge technology;
 6. Implementing a culture of learning and innovation to meet global competencies;
 7. Cultivating local wisdom through leadership practices to build comprehensive welfare;



VALUE

AKHLAK

Amanah
Trustworthy

Kompeten
Competent

Harmonis
Harmonious

Loyal
Loyal

Adaptif
Adaptive

Kolaboratif
Collaborative

VISI RJPP 2025-2029 / VISION OF RJPP 2025-2029



VISI VISION

Menjadi Perusahaan Terpercaya di Bidang Infrastruktur dan EPC yang Berkelanjutan

Becoming The Trusted and Sustainable Infrastructure and EPC Services Company



MISI/MISSION

1. Memberikan layanan dan produk EPC yang terintegrasi dan berkelanjutan berdasarkan prinsip Kualitas, Keselamatan, kesehatan, dan Lingkungan yang berstandar global
2. Mengimplementasikan budaya belajar dan inovasi untuk menyediakan solusi terbaik bagi *stakeholders*, serta memastikan tingkat kepuasan yang tinggi
3. Berkomitmen untuk menjalankan proses bisnis dengan standar kualitas tertinggi dan penggunaan teknologi terbaik
4. Memperkuat ketahanan dan pertumbuhan finansial dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai profitabilitas yang berkelanjutan
5. Mengimplementasikan pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, praktik etis, transparansi, akuntabilitas dan inovasi berkelanjutan dalam semua aspek operasi perusahaan
6. Membangun sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional berbasis budaya perusahaan



VALUE

AKHLAK

Amanah
Trustworthy

Kompeten
Competent

Harmonis
Harmonious

Loyal
Loyal

Adaptif
Adaptive

Kolaboratif
Collaborative

Visi ini mencerminkan tekad WIKA dalam menghadirkan layanan dan produk yang unggul, terintegrasi, serta sesuai dengan standar global dalam kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Sebagai perusahaan yang mengakar kuat di Indonesia, WIKA tidak hanya bertujuan untuk menjadi pelaku utama di sektor domestik tetapi juga untuk memberikan dampak nyata dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kepercayaan dari para pemangku kepentingan menjadi inti dari operasional WIKA. Dengan mengutamakan inovasi, penerapan teknologi terkini, dan keberlanjutan, WIKA memastikan setiap proses bisnis dijalankan secara efisien dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Kolaborasi strategis, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, dan penguatan sinergi di seluruh ekosistem bisnis menjadi langkah nyata perusahaan dalam memperkokoh posisinya sebagai pemimpin pasar domestik.

Komitmen terhadap keberlanjutan terwujud dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan nasional. Proyek-proyek ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam setiap langkahnya, WIKA menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, memastikan kepercayaan *stakeholder* terjaga sekaligus mewujudkan kepuasan pelanggan di berbagai lini bisnis.

This vision reflects WIKA's determination to deliver superior and integrated services and products that align with global standards in quality, safety, health, and the environment. As a company deeply rooted in Indonesia, WIKA aims not only to be a key player in the domestic sector but also to make a tangible impact on sustainable national development.

Trust from stakeholders is at the core of WIKA's operations. By prioritizing innovation, adopting the latest technologies, and emphasizing sustainability, WIKA ensures that every business process is carried out efficiently while providing significant added value. Strategic collaboration, efficient resource management, and strengthened synergy across the business ecosystem are concrete measures taken by the Company to solidify its position as a domestic market leader.

The commitment to sustainability is realized through the projects designed to support equitable national development. These projects do not only drive economic growth but also create broad positive impacts for the environment and society. In every endeavor, WIKA adheres to principles of high transparency and accountability, ensuring stakeholder trust is maintained while achieving customer satisfaction across various lines of business.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, WIKA mengintegrasikan keberlanjutan dalam seluruh aspek operasional perusahaan. Pendekatan ini tidak hanya mencakup keberlanjutan ekonomi tetapi juga berfokus pada pelestarian lingkungan dan pembangunan sosial. Dengan menanamkan nilai-nilai perusahaan yang kuat, WIKA terus mendorong inovasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Perusahaan bertekad menjadi mitra strategis bagi semua pihak yang terlibat, membantu menciptakan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan relevan di tingkat nasional maupun internasional. Melalui visi ini, WIKA menunjukkan komitmen jangka panjang untuk terus menjadi pilar utama pembangunan di Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

Dalam Visi WIKA, terdapat beberapa kata kunci penting yang menjadi tujuan atau sasaran dari Perseroan beserta indikator pengukurannya, yaitu sebagaimana berikut:

As part of its social responsibility, WIKA integrates sustainability into all aspects of its operations. This approach not only encompasses economic sustainability but also focuses on environmental conservation and social development. By instilling strong corporate values, WIKA continues to drive innovation to face future challenges. The Company is committed to becoming a strategic partner for all involved parties, helping to create inclusive, competitive, and relevant development on both national and international levels. Through this vision, WIKA demonstrates its long-term commitment to remain a cornerstone of Indonesia's development by upholding the principles of sustainability and responsibility for future generations.

In WIKA's Vision, several key terms reflect the Company's goals or objectives along with their measurement indicators, as follows:



• **Terpercaya :**

Menjadi mitra strategis yang andal bagi *stakeholder* melalui pelaksanaan proyek dengan kualitas terbaik, transparansi, dan akuntabilitas tinggi.

» **Indikator Pengukuran:**

- Tingkat kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index*).
- Tingkat kepercayaan mitra kerja (*Stakeholder Trust Score*).
- Tingkat penyelesaian proyek sesuai target (*On-time Delivery Rate*).



• **Infrastruktur Berkelanjutan (*Sustainable Infrastructure*) :**

Menyediakan solusi infrastruktur yang ramah lingkungan dan mendukung efisiensi energi untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan.

» **Indikator Pengukuran:**

- Penggunaan material ramah lingkungan dalam proyek (% penggunaan material hijau).
- Jumlah proyek yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon (Proyek *Net Zero Emission*).
- Tingkat efisiensi energi dalam pelaksanaan proyek (% penghematan energi)
- Jumlah inovasi penggunaan sistem dan teknologi terbaru



• **EPC Berkelanjutan**

Melaksanakan kegiatan EPC yang dapat menghasilkan margin perusahaan yang lebih tinggi dari pertumbuhan industri, meningkatkan kompetensi untuk memenuhi harapan pelanggan serta menghasilkan *repeat order*.

» **Indikator pengukuran:**

- Margin dan pertumbuhan omzet kontrak.
- Tingkat ESG Rating

• **Trusted :**

To become a reliable strategic partner for stakeholders through the execution of projects with the best quality, high transparency, and accountability.

» **Measurement Indicators:**

- Customer Satisfaction Index.
- Stakeholder Trust Score.
- On-time Delivery Rate for project completion.

• **Sustainable Infrastructure**

Providing environmentally friendly infrastructure solutions that support energy efficiency to enhance sustainable development.

» **Measurement Indicators:**

- Percentage of green materials used in projects.
- Number of projects contributing to carbon emissions reduction (*Net Zero Emission Projects*).
- Energy efficiency levels in project execution (percentage of energy savings).
- Number of innovations in the use of the latest systems and technologies.

• **Sustainable EPC**

Conducting EPC activities that yield higher company margins than industry growth, enhance competencies to meet customer expectations, and secure repeat orders.

» **Measurement Indicators:**

- Margin and contract revenue growth.
- ESG Rating Level.



Misi dan Penjelasan Misi

Mission and Its Explanation



■ Misi WIKA 2030 | WIKA 2030 Mission

- Memberikan layanan dan produk EPC yang terintegrasi dan berkelanjutan berdasarkan prinsip Kualitas, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan yang berstandar global.
- Mengimplementasikan budaya belajar dan inovasi untuk menyediakan solusi terbaik bagi *stakeholders*, serta memastikan tingkat kepuasan yang tinggi.
- Berkomitmen untuk menjalankan proses bisnis dengan standar kualitas tertinggi dan penggunaan teknologi terbaik.
- Memperkuat ketahanan dan pertumbuhan finansial dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai profitabilitas yang berkelanjutan
- Mengimplementasikan pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, praktik etis, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi berkelanjutan dalam semua aspek operasi Perusahaan.
- Membangun sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional berbasis budaya perusahaan.
- Providing integrated and sustainable EPC services and products based on the principles of Quality, Safety, Health, and Environment that adhere to global standards.
- Implementing a culture of learning and innovation to deliver the best solutions for stakeholders and ensure high level of satisfaction.
- Committed to conducting business processes with the highest quality standards and utilizing the best technology.
- Strengthening financial resilience and growth by optimizing resource utilization to achieve sustainable profitability.
- Implementing environmental management, social responsibility, ethical practices, transparency, accountability, and sustainable innovation in all aspects of the Company's operations.
- Developing human capital with integrity and professionalism based on corporate culture.

■ Penjelasan Misi | Mission Explanation

Sebagai perusahaan yang telah berakar kuat di Indonesia, WIKA terus berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam industri infrastruktur dan EPC melalui pendekatan yang inovatif, integratif, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks, WIKA memahami pentingnya menciptakan solusi yang tidak hanya berorientasi pada kualitas, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian nasional. Dengan memegang teguh nilai-nilai perusahaan, WIKA bertekad untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

As a company with strong roots in Indonesia, WIKA remains committed to becoming a leader in the infrastructure and EPC industry through an innovative, integrated, and sustainable approach. Facing the increasingly complex market dynamics, WIKA recognizes the importance of creating solutions that do not only focus on quality but also deliver positive impacts on the environment, society, and national economy. Upholding the corporate core values, WIKA is determined to achieve inclusive and competitive development at both national and international levels.

Melalui misi perusahaan, WIKA menegaskan langkah strategisnya untuk menghadirkan layanan yang mendukung keberlanjutan, memberdayakan sumber daya manusia, dan mengadopsi teknologi terbaik untuk memastikan keberhasilan operasional serta kepuasan pelanggan. Berikut adalah misi WIKA yang diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan layanan dan produk EPC yang terintegrasi dan berkelanjutan berdasarkan prinsip Kualitas, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan yang berstandar global.

Kata kunci dan indikator pengukuran

a. Layanan dan Produk EPC yang Terintegrasi (Integrated EPC Services and Products)

Menyediakan layanan dan produk EPC yang terintegrasi, mengutamakan efisiensi dan sinergi antara berbagai disiplin ilmu serta tahapan proyek untuk mencapai hasil terbaik.

- » Indikator Pengukuran:
 - Tingkat efisiensi pelaksanaan proyek (Rasio waktu dan biaya terhadap rencana).
 - Persentase keberhasilan implementasi integrasi teknologi lintas tahapan EPC (% implementasi teknologi).

b. Keberlanjutan dalam EPC (Sustainability in EPC)

Melaksanakan kegiatan EPC dengan pendekatan keberlanjutan yang mendukung pelestarian lingkungan dan mendukung prinsip ekonomi sirkular.

- » Indikator Pengukuran:
 - Jumlah proyek yang mematuhi standar keberlanjutan internasional (ISO 14001).
 - Persentase material ramah lingkungan yang digunakan dalam proyek EPC (% penggunaan material hijau).
 - Tingkat penurunan emisi karbon dari proyek EPC (% pengurangan emisi karbon).

c. Kualitas (Quality)

Menjamin hasil layanan dan produk EPC sesuai standar kualitas global yang diakui, dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan *zero defect*.

- » Indikator Pengukuran:
 - Jumlah sertifikasi kualitas yang diperoleh (ISO 9001).
 - Indeks kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index*).
 - Tingkat kegagalan proyek atau *defect ratio* (Rasio kegagalan proyek).

Through its mission, WIKA emphasizes its strategic steps to deliver services that support sustainability, empower human capital, and adopt the best technologies to ensure operational success and customer satisfaction. Below is a detailed explanation of WIKA's mission:

1. Deliver integrated and sustainable EPC services and products based on global standards of Quality, Safety, Health, and Environment.

Keywords and Measurement Indicators:

a. Integrated EPC Services and Products

Delivering integrated EPC services and products, prioritizing efficiency and synergy across disciplines and project phases to achieve optimal results.

- » Measurement Indicators:
 - Project execution efficiency (Time and cost ratio against plan).
 - Percentage of successful implementation of cross-phase EPC technology integration (% technology integration implemented).

b. Sustainability in EPC

Conducting EPC activities with a sustainability approach that supports environmental preservation and circular economy principles.

- » Measurement Indicators:
 - Number of projects complying with international sustainability standards (ISO 14001).
 - Percentage of eco-friendly materials used in EPC projects (% green material usage).
 - Reduction in carbon emissions from EPC projects (% carbon emissions reduction).

c. Quality

Ensuring EPC services and products meet globally recognized quality standards, with a focus on customer satisfaction and zero defects.

- » Measurement Indicators:
 - Number of quality certifications obtained (ISO 9001).
 - Customer Satisfaction Index.
 - Project failure or defect ratio.



d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Occupational Health and Safety*)

Menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat untuk memastikan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh karyawan dan mitra kerja.

- » Indikator Pengukuran:
 - Jumlah insiden keselamatan kerja (*Total Recordable Incident Rate/TRIR*).
 - Tingkat penerapan sistem manajemen K3 (Sertifikasi OHSAS 18001/ISO 45001).
 - Jumlah pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan (% karyawan terlatih).

e. Pengelolaan Lingkungan (*Environmental Management*)

Mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dalam setiap tahap pelaksanaan proyek EPC untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

- » Indikator Pengukuran:
 - Persentase proyek yang mematuhi regulasi lingkungan (% kepatuhan lingkungan).
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya seperti air dan energi (% penghematan sumber daya).
 - Luas area hijau yang direhabilitasi atau dilestarikan dari pelaksanaan proyek (Hektar area hijau).

2. Mengimplementasikan budaya belajar dan inovasi untuk menyediakan solusi terbaik bagi *stakeholders*, serta memastikan tingkat kepuasan yang tinggi.

Kata kunci dan indikator pengukuran

a. Budaya Belajar Berkelanjutan (*Continuous Learning Culture*)

Mendorong pembelajaran berkelanjutan di seluruh tingkatan organisasi untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan mendukung pengembangan solusi inovatif.

- » Indikator Pengukuran:
 - Jumlah program pelatihan dan pengembangan karyawan yang dilaksanakan (% karyawan yang mengikuti pelatihan).
 - Tingkat peningkatan kompetensi karyawan berdasarkan evaluasi pelatihan (Skor evaluasi kompetensi).
 - Jumlah sertifikasi kompetensi karyawan yang diperoleh (% karyawan bersertifikasi).

b. Inovasi dalam Solusi (*Innovation in Solutions*)

Meningkatkan kapasitas inovasi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan yang relevan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan *stakeholders*.

- » Indikator Pengukuran:
 - Jumlah inovasi baru yang diterapkan dalam proyek (% inovasi yang diimplementasikan).
 - Jumlah paten atau hak kekayaan intelektual yang didaftarkan oleh perusahaan.
 - Tingkat efisiensi operasional yang dihasilkan dari penerapan inovasi (% peningkatan efisiensi).

d. Occupational Health and Safety

Implementing strict occupational health and safety principles to ensure a safe working environment for employees and partners.

- » Measurement Indicators:
 - Total Recordable Incident Rate (TRIR).
 - Implementation rate of OHS management system certification (OHSAS 18001/ISO 45001).
 - Number of occupational health and safety training sessions conducted (% trained employees).

e. Environmental Management

Integrating environmentally friendly principles into every stage of EPC project implementation to minimize negative environmental impacts.

- » Measurement Indicators:
 - Percentage of projects complying with environmental regulations (% environmental compliance).
 - Efficiency in resource usage such as water and energy (% resource savings).
 - Green area rehabilitated or preserved from project implementation (Hectares of green area).

2. Implementing a Culture of Learning and Innovation to provide the best solutions for stakeholders and ensure a high level of satisfaction.

Keywords and Measurement Indicators

a. Continuous Learning Culture

Promoting continuous learning across all organizational levels to enhance employee competencies and support the development of innovative solutions.

- » Measurement Indicators:
 - Number of employee training and development programs conducted (% of employees participating in training).
 - Improvement in employee competencies based on training evaluations (Competency evaluation score).
 - Number of employee competency certifications obtained (% of certified employees).

b. Innovation in Solutions

Enhancing the Company's innovation capacity to create relevant, efficient products and services that are oriented to stakeholders' needs.

- » Measurement Indicators:
 - Number of new innovations implemented in projects (% of innovations implemented).
 - Number of patents or intellectual property rights registered by the company.
 - Operational efficiency improvements resulting from innovation (% increase in efficiency).

c. Solusi Terbaik bagi Stakeholders (Stakeholder-Focused Solutions)

Menyediakan layanan dan produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* dengan standar kualitas tinggi dan memberikan nilai tambah.

- » Indikator Pengukuran:
 - Indeks kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index*).
 - Tingkat penyelesaian proyek sesuai jadwal dan anggaran (*On-time and On-budget Rate*).
 - Tingkat retensi pelanggan (*Customer Retention Rate*).

d. Kepuasan Stakeholders (Stakeholder Satisfaction)

Memastikan bahwa kebutuhan dan harapan *stakeholders* terpenuhi melalui komunikasi efektif, kualitas layanan, dan implementasi solusi inovatif.

- » Indikator Pengukuran:
 - Tingkat keluhan pelanggan yang berhasil diselesaikan (% penyelesaian keluhan).
 - Survei kepuasan *stakeholders* yang menunjukkan peningkatan skor tahunan.
 - Jumlah penghargaan atau pengakuan yang diterima terkait pelayanan pelanggan dan inovasi.

3. Berkomitmen untuk menjalankan proses bisnis dengan standar kualitas tertinggi dan penggunaan teknologi terbaik.

Kata kunci dan indikator pengukuran

a. Standar Kualitas Tertinggi (Highest Quality Standards)

Menjamin pelaksanaan proses bisnis sesuai dengan standar kualitas global yang diakui, sehingga menghasilkan layanan dan produk yang memenuhi atau melampaui ekspektasi pelanggan.

- » Indikator Pengukuran:
 - Kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO 9001 (% proyek yang mematuhi ISO).
 - Tingkat defect atau kesalahan dalam proses bisnis (*Defect Rate*).
 - Jumlah sertifikasi kualitas yang diterima perusahaan.

b. Penggunaan Teknologi Terbaik (Best Technology Adoption)

Mengintegrasikan teknologi terbaru dan tercanggih dalam proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan.

- » Indikator Pengukuran:
 - Persentase proyek yang menggunakan teknologi digital atau berbasis otomatisasi (% adopsi teknologi).
 - Jumlah investasi dalam teknologi baru (% anggaran untuk teknologi).
 - Tingkat efisiensi operasional yang dicapai setelah penerapan teknologi (% pengurangan waktu atau biaya).

c. Stakeholder-Focused Solutions

Providing services and products designed to meet *stakeholders*' needs with high-quality standards and added value.

- » Measurement Indicators:
 - Customer Satisfaction Index (CSI).
 - Project completion rate within the planned schedule and budget (On-time and On-budget Rate).
 - Customer retention rate.

d. Stakeholder Satisfaction

Ensuring *stakeholders*' needs and expectations are met through effective communication, quality services, and innovative solution implementation.

- » Measurement Indicators:
 - Resolution rate of customer complaints (% of complaints resolved).
 - Annual improvement in stakeholder satisfaction survey score.
 - Number of awards or recognitions received for customer service and innovation.

3. Committed to running business processes with the highest quality standards and the use of the best technology.

Keywords and measurement indicators

a. Highest Quality Standards

Ensure the implementation of business processes in accordance with recognized global quality standards, resulting in services and products that meet or exceed customer expectations.

- » Measurement Indicators:
 - Compliance with international standards such as ISO 9001 (% of projects complying with ISO).
 - Defect or error rate in business processes (Defect Rate).
 - Number of quality certifications received by the company.

b. Best Technology Adoption

Integrating the latest and most advanced technology into business processes to improve the company's efficiency, productivity, and competitiveness.

- » Measurement Indicators:
 - Percentage of projects using digital or automation-based technology (% of technology adoption).
 - Amount of investment in new technology (% of budget for technology).
 - Level of operational efficiency achieved after implementing technology (% reduction in time or cost).



4. Memperkuat ketahanan dan pertumbuhan finansial dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai profitabilitas yang berkelanjutan.

Kata kunci dan indikator pengukuran

a. Ketahanan Finansial (*Financial Resilience*)

Memastikan perusahaan memiliki struktur keuangan yang kuat dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi pasar.

» Indikator Pengukuran:

- Rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*).
- Rasio likuiditas perusahaan (*Current Ratio* dan *Quick Ratio*).
- Tingkat kemampuan melunasi utang (*Interest Coverage Ratio*).

b. Pertumbuhan Finansial (*Financial Growth*)

Meningkatkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan untuk mendukung visi jangka panjang.

» Indikator Pengukuran:

- Pertumbuhan pendapatan tahunan (% *Year-on-Year Revenue Growth*).
- Tingkat laba bersih perusahaan (*Net Profit Margin*).
- Tingkat pengembalian ekuitas (*Return on Equity/ROE*).

c. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal (*Optimal Resource Utilization*)

Mengelola aset dan sumber daya perusahaan dengan efisien untuk mendukung produktivitas dan memaksimalkan hasil.

» Indikator Pengukuran:

- Rasio efisiensi penggunaan aset (*Asset Turnover Ratio*).
- Tingkat utilisasi sumber daya manusia (% tenaga kerja yang digunakan secara optimal).
- Tingkat efisiensi operasional (*Operational Cost Efficiency Ratio*).

d. Profitabilitas Berkelanjutan (*Sustainable Profitability*)

Mencapai tingkat keuntungan yang stabil dan berkelanjutan melalui strategi diversifikasi pendapatan dan inovasi dalam layanan.

» Indikator Pengukuran:

- Tingkat laba operasional (*Operating Profit Margin*).
- Pendapatan dari proyek berkelanjutan (% pendapatan dari proyek ramah lingkungan).
- Tingkat pertumbuhan *recurring income* (Pendapatan Berulang).

5. Mengimplementasikan pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, praktik etis, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi berkelanjutan dalam semua aspek operasi perusahaan.

Kata kunci dan indikator pengukuran

a. Pengelolaan Lingkungan (*Environmental Management*)

Mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dalam seluruh aktivitas perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

4. Strengthening financial resilience and growth by optimizing the use of resources to achieve sustainable profitability.

Keywords and measurement indicators

- Financial Resilience

Ensuring the company has a strong financial structure and is able to survive in various market conditions.

» Measurement Indicators:

- Debt to Equity Ratio.
- Liquidity ratio (*Current Ratio* and *Quick Ratio*).
- Interest Coverage Ratio.

a. Financial Growth

Increasing the company's revenue and profitability sustainably to support the long-term vision.

» Measurement Indicators:

- Annual revenue growth (% *Year-on-Year Revenue Growth*).
- Net profit margin.
- Return on Equity (ROE).

b. Optimal Resource Utilization

Manage the company's assets and resources efficiently to support productivity and maximize results.

» Measurement Indicators:

- Asset Turnover Ratio.
- Human resource utilization rate (% of workforce used optimally).
- Operational Cost Efficiency Ratio.

c. Sustainable Profitability

Achieve stable and sustainable profit levels through revenue diversification strategies and innovation in services.

» Measurement Indicators:

- Operating Profit Margin.
- Revenue from sustainable projects (% of revenue from environmentally friendly projects).
- Recurring income growth rate.

5. Implement environmental management, social responsibility, ethical practices, transparency, accountability, and sustainable innovation in all aspects of the company's operations.

Keywords and measurement indicators

a. Environmental Management

Integrating environmentally friendly principles into all activities of the company to minimize negative impacts on the environment.

- » Indikator Pengukuran:
 - Persentase proyek yang mematuhi standar lingkungan internasional (% kepatuhan ISO 14001).
 - Jumlah proyek yang mendukung pengurangan emisi karbon (% penurunan emisi).
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya alam seperti air dan energi (% penghematan energi dan air).

b. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)
Berkontribusi kepada masyarakat melalui program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial di sekitar area operasional perusahaan.

- » Indikator Pengukuran:
 - Jumlah program CSR yang dilaksanakan setiap tahun.
 - Anggaran CSR sebagai persentase dari pendapatan (% alokasi anggaran CSR).
 - Jumlah penerima manfaat dari program sosial (% peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal).

c. Praktik Etis (Ethical Practices)

Menjalankan semua aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip etika dan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjaga integritas perusahaan.

- » Indikator Pengukuran:
 - Tingkat penyelesaian laporan pelanggaran kode etik melalui *whistleblowing system* (% penyelesaian laporan).
 - Skor audit tata kelola perusahaan (*Governance Audit Score*).
 - Jumlah pelatihan kode etik untuk karyawan (% karyawan yang dilatih).

d. Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency and Accountability)

Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dengan memastikan transparansi dalam pelaporan, proses bisnis, dan pengambilan keputusan.

- » Indikator Pengukuran:
 - Tingkat kepatuhan terhadap pelaporan berstandar internasional (*GRI Standards*).
 - Publikasi laporan keberlanjutan yang diterbitkan setiap tahun.
 - Tingkat audit kepatuhan terhadap prosedur internal (*Internal Audit Compliance Score*).

e. Inovasi Berkelanjutan (Sustainable Innovation)

Menciptakan inovasi yang mendukung keberlanjutan di semua aspek operasional untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan lingkungan.

- » Indikator Pengukuran:
 - Jumlah inovasi baru yang mendukung keberlanjutan (% inovasi berkelanjutan).
 - Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam operasional (% proyek dengan teknologi hijau).
 - Dampak efisiensi dari implementasi inovasi (% peningkatan efisiensi atau pengurangan biaya).

» Measurement Indicators:

- Percentage of projects that comply with international environmental standards (% ISO 14001 compliance).
- Number of projects that support carbon emission reduction (% emission reduction).
- Level of efficiency in the use of natural resources such as water and energy (% energy and water savings).

b. Corporate Social Responsibility

Contributing to the community through empowerment programs and improving social welfare around the company's operational areas.

- » Measurement Indicators:
 - Number of CSR programs carried out each year.
 - CSR budget as a percentage of revenue (% CSR budget allocation).
 - Number of beneficiaries of social programs (% improvement in local community welfare).

c. Ethical Practices

Carrying out all business activities in accordance with ethical principles and good corporate governance to maintain the integrity of the company.

- » Measurement Indicators:
 - Level of completion of code of conduct violation reports through the whistleblowing system (% of report completion).
 - Governance audit score.
 - Number of code of conduct training for employees (% of employees trained).

d. Transparency and Accountability

Increase stakeholder trust by ensuring transparency in reporting, business processes, and decision-making.

- » Measurement Indicators:
 - Level of compliance with international reporting standards (*GRI Standards*).
 - Annual publication of sustainability reports.
 - Level of compliance audits with internal procedures (*Internal Audit Compliance Score*).

e. Sustainable Innovation

Creating innovations that support sustainability in all aspects of operations to provide added value to the company and the environment.

- » Measurement Indicators:
 - Number of new innovations that support sustainability (% sustainable innovation).
 - Use of environmentally friendly technology in operations (% projects with green technology).
 - Impact of efficiency from innovation implementation (% increased efficiency or cost reduction).



f. Integrasi Keberlanjutan di Operasi Perusahaan (Sustainability Integration)

Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap tahapan operasional perusahaan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

- » Indikator Pengukuran:
 - Jumlah proyek yang memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan (% proyek berkelanjutan).
 - Tingkat kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG Contribution Score).
 - Skor keberlanjutan dalam audit eksternal perusahaan (ESG Rating).

6. Membangun sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional berbasis budaya perusahaan.

Kata kunci dan indikator pengukuran

a. Pengembangan Kompetensi (Competency Development)

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan melalui pelatihan dan program pengembangan profesional yang berkesinambungan.

- » Indikator Pengukuran:
 - Jumlah jam pelatihan per karyawan per tahun (Average Training Hours per Employee).
 - Persentase karyawan yang mengikuti program sertifikasi profesional (% karyawan bersertifikasi).
 - Tingkat peningkatan hasil evaluasi kompetensi karyawan (Competency Assessment Improvement Score).

b. Integritas Sumber Daya Manusia (Integrity of Human Resources)

Menanamkan nilai-nilai perusahaan untuk menciptakan budaya kerja yang berlandaskan integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan.

- » Indikator Pengukuran:
 - Jumlah pelanggaran kode etik yang ditangani (% penyelesaian kasus pelanggaran).
 - Tingkat partisipasi karyawan dalam pelatihan nilai-nilai perusahaan (% karyawan yang dilatih).
 - Survei integritas internal yang mengukur kepatuhan terhadap nilai perusahaan (Integrity Index).

c. Profesionalisme Karyawan (Employee Professionalism)

Menciptakan tenaga kerja yang profesional melalui peningkatan keterampilan teknis dan *soft skills* yang relevan dengan kebutuhan perusahaan.

- » Indikator Pengukuran:
 - Tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja karyawan (Customer Feedback on Employee Professionalism).
 - Penilaian kinerja individu berdasarkan KPI tahunan (Individual Performance Score).

d. Retensi dan Kesejahteraan Karyawan (Employee Retention and Well-Being)

Meningkatkan tingkat retensi karyawan melalui program kesejahteraan, penghargaan, dan keseimbangan kerja.

f. Sustainability Integration in Company Operations (Sustainability Integration)

Integrating sustainability principles in every stage of the company's operations to create sustainable positive impact.

- » Measurement Indicators:
 - Number of projects that meet sustainable development criteria (% sustainable projects).
 - Level of contribution to the Sustainable Development Goals (SDG Contribution Score).
 - Sustainability score in the company's external audit (ESG Rating).

6. Building human resources with integrity and professionalism based on corporate culture.

Keywords and measurement indicators

a. Competency Development

Improving employee capabilities and skills through continuous training and professional development programs.

- » » Measurement Indicators:
 - Average Training Hours per Employee.
 - Percentage of employees participating in professional certification programs (% of certified employees).
 - Level of improvement in employee competency assessment results (Competency Assessment Improvement Score).

b. Integrity of Human Resources

Instilling corporate values to create a work culture based on integrity, responsibility, and trust.

- » Measurement Indicators:
 - Number of code of conduct violations handled (% of violation cases resolved).
 - Level of employee participation in corporate values training (% of employees trained).
 - Internal integrity surveys that measure compliance with corporate values (Integrity Index).

c. Employee Professionalism

Creating professional workforce by improving technical and soft skills that are relevant to the company's needs.

- » Measurement Indicators:
 - Level of customer satisfaction with employee performance (Customer Feedback on Employee Professionalism).
 - Individual performance assessment based on annual KPI (Individual Performance Score).

d. Employee Retention and Well-Being

Increase employee retention rate through welfare programs, rewards, and work-life balance.

- » Indikator Pengukuran:
 - Tingkat retensi karyawan (% karyawan yang tetap bekerja di perusahaan).
 - Survei kepuasan karyawan terhadap lingkungan kerja dan kesejahteraan (*Employee Engagement Index*).
 - Tingkat turnover karyawan tahunan (*Employee Turnover Rate*). *Review Visi dan Misi* oleh Direksi/ Dewan Komisaris

- » Measurement Indicators:
 - Employee retention rate (% of employees who remain with the company).
 - Employee satisfaction survey on work environment and well-being (*Employee Engagement Index*).
 - Annual Employee Turnover Rate.

REVIEW VISI DAN MISI OLEH DIREKSI/DEWAN KOMISARIS

Pernyataan Visi dan Misi WIKA 2030 memuat aspirasi Perseroan untuk dapat berkembang secara optimal sebagai perusahaan konstruksi terdepan di Indonesia dan menetapkan perannya dalam mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh Pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Nasional.

Pada tahun 2024, WIKA melakukan penyesuaian visi dan misi WIKA 2030 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. WIKA-MKP-KP-01.01 Tanggal 14 Oktober 2024. Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian dan review terhadap visi dan misi Perseroan tersebut, dan menyatakan bahwa visi dan misi tersebut relevan untuk kondisi saat ini dan sesuai dengan tantangan dan peluang yang dihadapi Perseroan ke depan.

Pada Gambar 2, WIKA menuju EPC yang *Advanced*, mahir konstruksi pada *Strategic Frontiers* dengan margin lebih tinggi dan minim kompetitor, diawali dengan stabilisasi internal untuk bertahan selama 5 tahun ke depan.

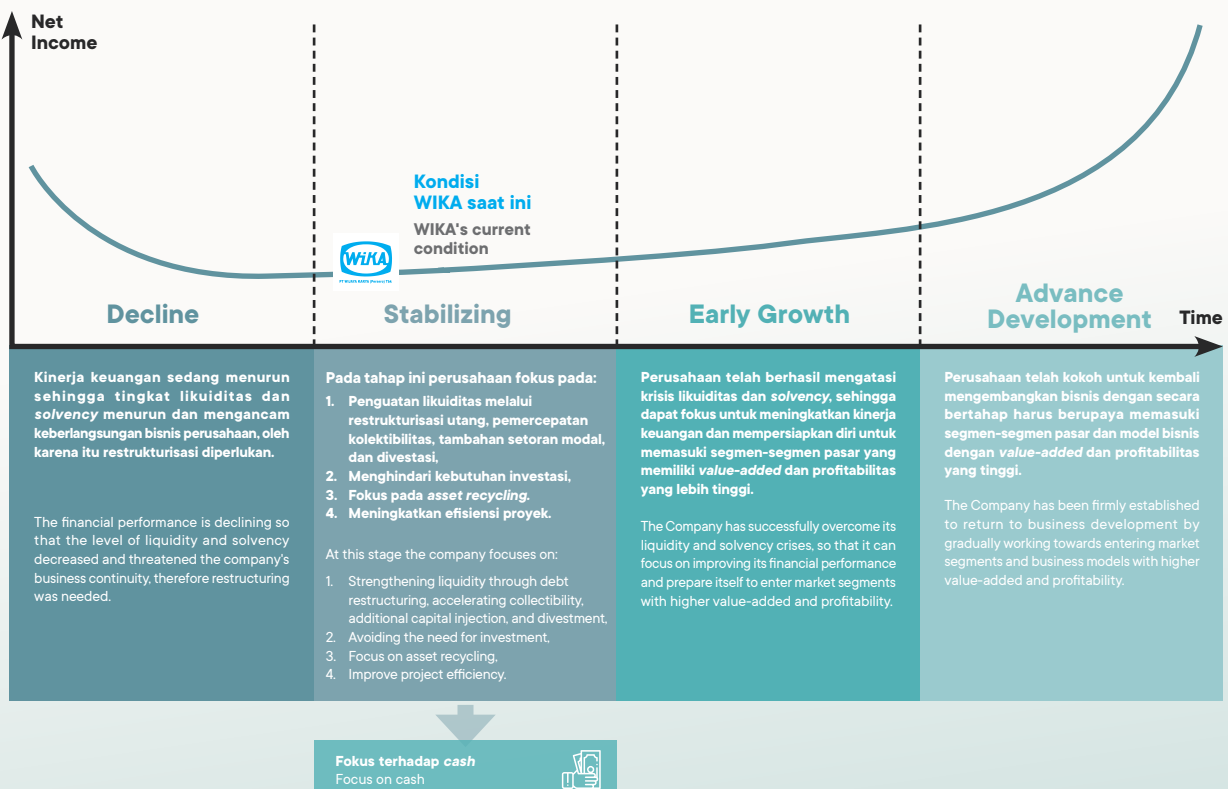
VISION AND MISSION REVIEW BY BOARD OF DIRECTORS/BOARD OF COMMISSIONERS

WIKA's Vision and Mission 2030 outline the Company's aspiration to optimally grow as Indonesia's leading construction company, playing a pivotal role in supporting the government-initiated infrastructure development acceleration program to enhance national economic growth.

In 2024, WIKA updated its Vision and Mission 2030, approved and signed by the Board of Directors in Board of Directors Decree No. WIKA-MKP-KP-01.01 dated October 14, 2024. The Board of Commissioners and Board of Directors have reviewed and assessed the relevance of the vision and mission to current conditions, challenges, and opportunities faced by the Company.

In Figure 2, WIKA is heading towards Advanced EPC, proficient construction on Strategic Frontiers with higher margins and minimal competitors, starting with internal stabilization to survive for the next 5 years.

Gambar 2 Grand Roadmap WIKA
Figure 2 WIKA Grand Roadmap



Langkah awal untuk menjaga keberlanjutan bisnis pada fase stabilisasi yang mana menjadi fokus RJPP 5 tahun ini adalah sebagai berikut:

- Implement Financial Recovery:** Langkah-langkah pemulihan keuangan diimplementasikan untuk memperkuat kesehatan finansial perusahaan dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.
- Enhance Company's Profitability:** Fokus diberikan pada penguatan profitabilitas bisnis melalui pengembangan sistem operasi yang efektif dan efisien, bertujuan untuk meningkatkan kinerja finansial secara keseluruhan.

Adanya keterbatasan kemampuan kapabilitas dan pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam pemenuhan setiap fase pengembangan sehingga, fokus bisnis WIKA memiliki keterbatasan pada setiap fasenya. sebagaimana yang dijelaskan pada gambar 3.

The initial steps to maintain business sustainability in the stabilization phase, which is the focus of this 5-year RJPP, are as follows:

- Implement Financial Recovery:** Financial recovery measures are implemented to strengthen the Company's financial health and support long-term business sustainability.
- Enhance Company's Profitability:** Focus is placed on strengthening business profitability through the development of effective and efficient operating systems, aiming to improve overall financial performance.

There are limitations to the capabilities and funding owned by the Company in fulfilling each phase of development, hence WIKA's business focus has limitations on each phase, as explained in figure 3.

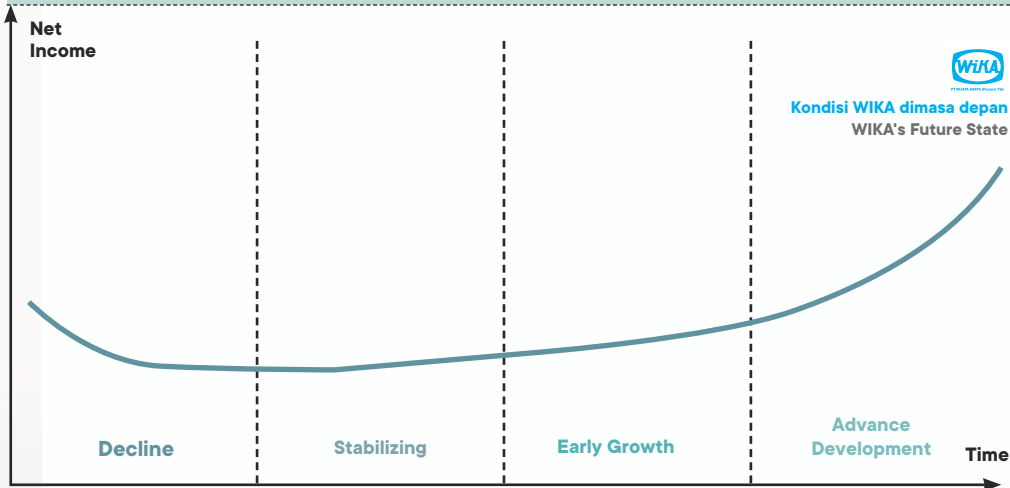
Gambar 3 Capability Gap to Grab the Market
Figure 3 Capability Gap to Grab the Market

Opsi Pengembangan Bisnis WIKA
WIKA's Business Development Options

- 1 Construction Market Segment**
 - Thriving Sector:** jalan, gedung, air, dan bandara melalui peningkatan eksekusi proyek secara excellence dan efisien.
 - Strategic Frontiers:** pembangkit & transmisi, pertambangan & metal, dan minyak & gas melalui peningkatan kapabilitas, teknologi, dan inovasi.
- 2 Extensiveness of Role**
 - a. Position in the Value Chain**
 - Single-Chain Players
 - Multiple-Chain Players
 - End-to-End Players
 - Professional Service
 - b. Leadership**
 - Lead
 - Non-lead

Batasan yang dimiliki WIKA/WIKA's limitations

- Keuangan:** keterbatasan likuiditas kas menjadi pertimbangan untuk pemilihan segmen pasar proyek dan investasi
- Financial: limited cash liquidity is a consideration for the selection of project and investment market segments
- Kompetensi:** kemampuan teknis dan pengalaman pada setiap Value chain dan kemampuan perannya sebagai lead atau non-lead
- Competence: technical ability and experience in each value chain and the ability to play a lead or non-lead role.



Adanya keterbatasan WIKA saat ini maka fokus bisnisnya dibatasi pada setiap fasenya

- WIKA mempertahankan posisinya pada infrastruktur dan gedung dengan mengoptimalkan efisiensi operasional.
- Pararel mempersiapkan kapabilitas perusahaan untuk masuk ke strategic frontiers.

Due to WIKAs current limitations, its business focus is limited to each phase.

- WIKA maintains its position in infrastructure and building by optimizing operational efficiency.
- Parallel to preparing the Company's capabilities to enter strategic frontiers.

Sebagai bagian dari transformasi strategis, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKa) telah memperbarui visinya dari "Terdepan dalam investasi dan EPC berkelanjutan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik" menjadi "Menjadi perusahaan terpercaya di bidang infrastruktur dan EPC yang berkelanjutan." Perubahan ini mencerminkan respons WIKa terhadap dinamika industri, kebutuhan pasar, serta komitmen perusahaan dalam menjawab tantangan bisnis saat ini dan di masa depan.

As part of its strategic transformation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKa) has updated its vision from "A leader in sustainable investment and EPC for a better quality of life" to "Becoming a trusted and sustainable infrastructure and EPC services company." This change reflects WIKa's response to industry dynamics, market needs, and the Company's commitment to addressing current and future business challenges.

Visi baru ini menegaskan fokus WIKA pada perannya sebagai penyedia layanan infrastruktur dan EPC yang terpercaya, dengan menjadikan kepercayaan sebagai inti dari hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Kepercayaan yang dibangun melalui pelaksanaan proyek yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan standar global menjadi elemen kunci dalam memperkuat posisi WIKA di pasar domestik dan internasional.

Selain itu, penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan visi perusahaan dengan fokus inti bisnis yang lebih tajam. Sebelumnya, visi yang mencakup "investasi" dan "kualitas kehidupan yang lebih baik" memiliki cakupan yang luas, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih terarah untuk menjawab tantangan yang dihadapi perusahaan, khususnya dalam konteks stabilisasi keuangan, efisiensi operasional, dan penguatan eksekusi proyek. Dengan menempatkan infrastruktur dan EPC sebagai inti visi, WIKA memprioritaskan keunggulan dalam sektor-sektor yang memberikan dampak nyata terhadap pembangunan nasional.

Keberlanjutan tetap menjadi elemen utama dalam visi ini, dengan pendekatan yang terintegrasi pada setiap proyek yang dilaksanakan. Komitmen WIKA terhadap keberlanjutan tercermin dalam upaya menciptakan nilai tambah yang seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan terus berupaya untuk mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia sekaligus menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Langkah strategis ini juga sejalan dengan arahan Kementerian BUMN yang mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, inovasi berkelanjutan, serta peningkatan daya saing. Melalui visi yang baru, WIKA menempatkan dirinya sebagai mitra strategis yang andal bagi pemerintah, mitra bisnis, dan masyarakat, sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan Indonesia Emas 2045.

Dengan visi yang lebih terarah, sederhana, dan relevan, WIKA mempertegas komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan menjadi mitra yang terpercaya di setiap langkah perjalanan bisnisnya. Penyesuaian visi ini mencerminkan langkah strategis WIKA untuk menghadapi tantangan masa kini dengan fokus yang lebih kuat pada keberlanjutan dan kepercayaan, sebagai landasan menuju pertumbuhan yang lebih besar di masa depan.

STRATEGI PENCAPAIAN VISI DAN MISI

Sebagai langkah upaya dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, WIKA menerapkan beberapa langkah strategis sesuai dengan program kerja manajemen, antara lain:

Secara keseluruhan strategi perusahaan dapat digambarkan dalam sebuah "strategy house" yang terdiri dari fondasi dan balok-balok pembangun yang ditata sedemikian rupa sehingga saling mendukung antara satu bagian dengan bagian lainnya. Fondasi dan balok-balok pembangun tersebut saling menopang antara satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan sebuah struktur yang komprehensif dan koheren, dengan target-target yang terukur dan strategi-strategi yang didefinisikan dengan jelas.

This new vision emphasizes WIKA's focus on its role as a trusted provider of infrastructure and EPC services, with trust at the core of its relationships with all stakeholders. Trust, built through the execution of quality projects, on-time delivery, and adherence to global standards, becomes a key element in strengthening WIKA's position in both domestic and international markets.

Additionally, this adjustment aligns the Company's vision with a sharper focus on its core business. Previously, the vision that encompassed "investment" and "better quality of life" was broad in scope and required a more directed approach to address the challenges faced by the company, particularly in the context of financial stabilization, operational efficiency, and strengthening project execution. By placing infrastructure and EPC as the core of its vision, WIKA prioritizes excellence in sectors that have a tangible impact on national development.

Sustainability remains a central element in this vision, with an integrated approach in every project undertaken. WIKA's commitment to sustainability is reflected in efforts made to create balanced added value between economic, social, and environmental interests. The Company continues to work towards promoting equitable development in Indonesia while preserving the environment for future generations.

This strategic move also aligns with the direction of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE), which encourages the application of good corporate governance, continuous innovation, and enhanced competitiveness. Through this new vision, WIKA positions itself as a reliable strategic partner for the government, business partners, and the public, while contributing to the achievement of Indonesia's Golden Vision 2045.

With a more focused, simplified, and relevant vision, WIKA reaffirms its commitment to continuing support for sustainable infrastructure development and becoming a trusted partner in every step of its business journey. This adjustment reflects WIKA's strategic steps to face current challenges with a stronger focus on sustainability and trust as the foundation for greater growth in the future.

STRATEGY FOR ACHIEVING VISION AND MISSION

As an effort to achieve the established vision and mission, WIKA implements several strategic steps in line with the management's work programs, including:

Overall, the Company's strategy can be depicted in a "strategy house" consisting of a foundation and supporting pillars arranged in such a way that each part supports the others. These foundations and supporting pillars work together to create a comprehensive and coherent structure, with measurable targets and clearly defined strategies.



Perumusan strategi dilakukan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal perusahaan. Strategi perusahaan merupakan strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan, dengan tujuan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan dan manajemen berbagai macam bisnis. Strategi perusahaan memiliki kaitan erat dengan visi, misi dan sasaran strategis organisasi, sehingga sering disebut sebagai *grand strategy* yang mencakup bisnis-bisnis dan pengendaliannya dalam organisasi tersebut.

Penyusunan *strategy house* WIKA Holding didasarkan pada visi, misi serta *value* yang akan dijalankan oleh WIKA selama 5 tahun ke depan. (Gambar 4). Dengan adanya visi baru yang mencerminkan upaya perbaikan kondisi internal WIKA dengan menargetkan perbaikan pada sisi *gross profit margin*, *Debt to EBITDA* serta *operation cash flow* yang baik. Maka, pembentukan *strategy house* tersebut terdiri dari 3 pilar utama serta 4 *enabler* dalam mewujudkan visi baru WIKA Holding. Selaras dengan melanjutkan Rencana Penyehatan Keuangan tahun 2023, 8 *stream* penyehatan WIKA dimasukkan menjadi bagian inisiatif strategis dari tiap pilar dan *enabler*.

Fokus terhadap *cash*, keunggulan eksekusi proyek dan penyeimbangan portofolio perusahaan dengan melakukan adaptasi terhadap perkembangan inovasi dan transformasi di sektor konstruksi serta infrastruktur sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan keberlanjutan Perusahaan. Tentunya, dalam upaya implementasi strategi pilar utama dibutuhkan pula strategi pendukung yang dilakukan oleh Perusahaan dengan melakukan pengembangan organisasi yang lebih efisien dan *agile*, pengembangan IT yang berdampak pada peningkatan pekerjaan karyawan serta adanya pengembangan *talent* yang dimiliki oleh perusahaan.

Strategi *enabler* merupakan strategi pendukung yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan Perusahaan dalam menjalankan strategi pilar utama. Oleh sebab itu, perlu adanya dukungan dari seluruh karyawan dan direksi perusahaan untuk dapat mengimplementasikan *Strategy House* tersebut 5 tahun ke depan.

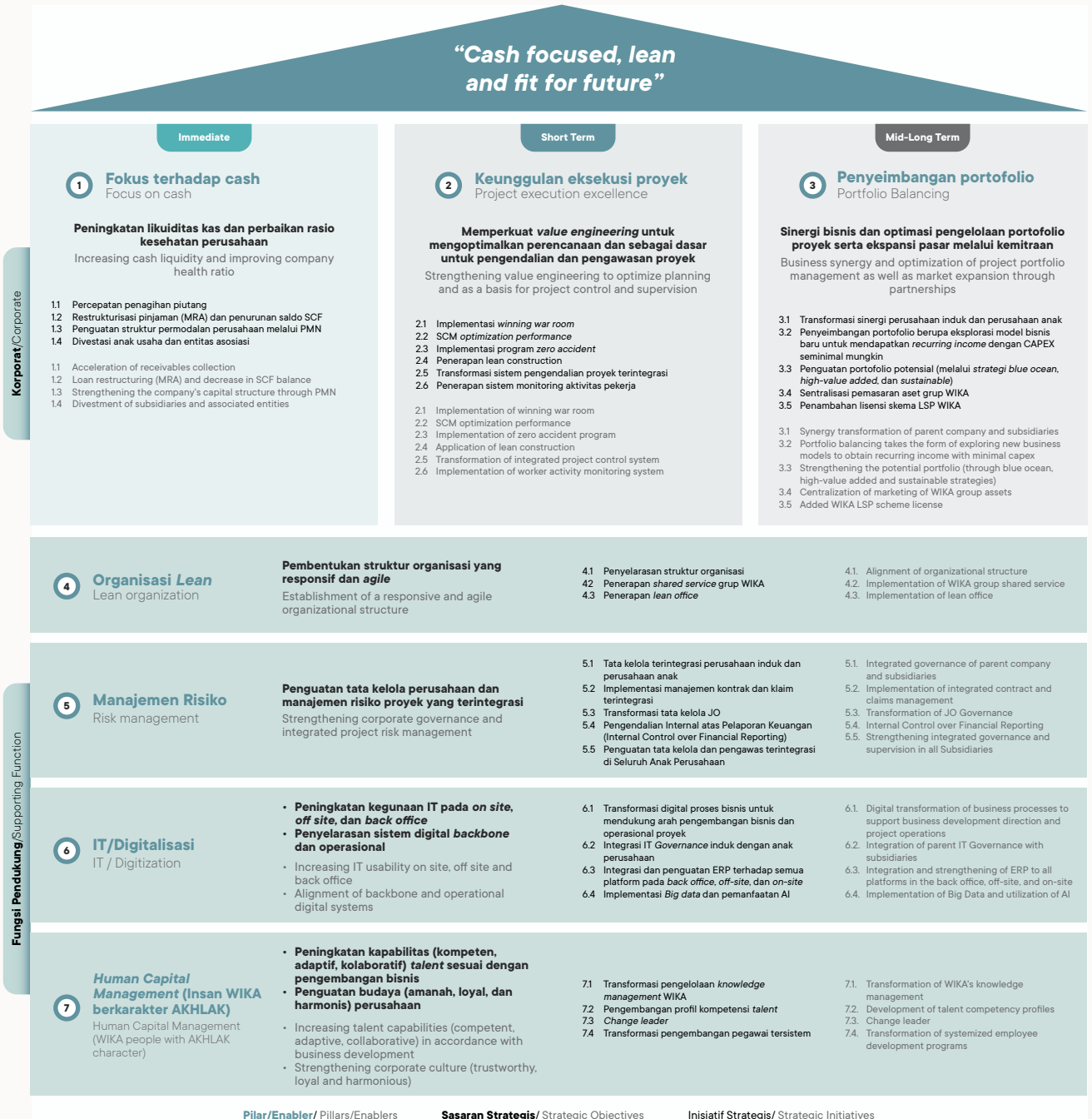
The strategy is formulated based on the analysis of the Company's internal and external conditions. The Company's strategy reflects the overall direction of the Company, with the goal of creating growth for the Company as a whole and managing various business operations. The Company's strategy is closely related to the vision, mission, and strategic objectives of the organization, often referred to as the grand strategy, which encompasses all the businesses and management within the organization.

The development of WIKA Holding strategy house is based on the vision, mission, and values that WIKA will implement over the next 5 years (Figure 4). With the new vision reflecting efforts to improve WIKA's internal condition, aiming for improvements in gross profit margin, Debt to EBITDA ratio, and healthy operating cash flow, the strategy house is structured around three main pillars and four enablers to realize the new vision of WIKA Holding. In line with continuing the Financial Recovery Plan for 2023, the 8 WIKA recovery streams are incorporated as part of the strategic initiatives within each pillar and enabler.

Focus on cash, excellence in project execution, and portfolio balancing by adapting to innovations and transformations in the construction and infrastructure sectors are essential for the Company's sustainable growth. Certainly, in implementing the main pillar strategies, supporting strategies are also required, including organizational development to be more efficient and agile, IT development impacting employee performance, and the development of talents within the Company.

Enabler strategies are supportive strategies that can significantly impact the Company's success in executing the main pillar strategies. Therefore, support from all employees and Board of Directors of the Company is crucial for implementing this Strategy House over the next 5 years.

Gambar 4 Strategy House WIKA
Figure 4 Strategy House WIKA



1. Inisiatif Strategis WIKA yang telah dilaksanakan di 2024

1.1 Fokus terhadap cash

Fokus terhadap *cash* memiliki sasaran strategis berupa peningkatan likuiditas kas dan perbaikan rasio kesehatan perusahaan. Terdapat 4 inisiatif strategis untuk mencapai sasaran strategis tersebut seperti pada Tabel 1. Terdapat 5 *stream* penyehatan WIKA yang relevan berada pada pilar ini, yaitu restrukturisasi keuangan, percepatan penagihan piutang bermasalah, *asset recycling*, penurunan saldo pinjaman talangan *supplier*, dan penguatan struktur permodalan.

1. WIKA's Strategic Initiatives Carried Out in 2024

1.1 Focus on Cash

Focus on cash has a strategic target of increasing cash liquidity and improving the Company's health ratio. There are 4 strategic initiatives to achieve these strategic targets as in Table 1. There are 5 relevant WIKA health streams in this pillar, namely financial restructuring, accelerating the collection of problematic receivables, *asset recycling*, reducing supplier advance loan balances, and strengthening the capital structure.

Tabel 1 Target Inisiatif Strategis - Fokus Terhadap Cash
Table 1 Strategic Initiative Targets - Focus on Cash

Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target
1.1 Percepatan Penagihan Piutang* 1.1 Acceleration of Receivables Collection*	Mempersingkat waktu dalam proses penagihan piutang Shorten the time in the receivables collection process
1.2 Restrukturisasi Pinjaman (MRA) dan Penurunan saldo SCF* 1.2 Loan Restructuring (MRA) and Reduction of SCF Balance*	a. Memastikan pemenuhan kesepakatan pada MRA b. Meningkatkan kemampuan pembayaran ke mitra dan mengurangi porsi unsustainable pada neraca WIKA a. Ensure the fulfillment of agreements on MRA b. Increase payment capacity to partners and reduce the unsustainable portion on WIKA's balance sheet
1.3 Penguatan Struktur Permodalan Perusahaan melalui PMN 1.3 Strengthening the Company's Capital Structure through PMN	Memperoleh PMN sebesar Rp 2 triliun pada tahun 2025 Obtain PMN of IDR 2 trillion in 2025
1.4 Divestasi Anak Usaha dan Entitas Asosiasi* 1.4 Divestment of Subsidiaries and Associated Entities*	Divestasi pada bisnis yang tidak mendukung bisnis inti konstruksi secara langsung seperti WTJJ, PP Semarang Demak, & CMLJ pada tahun 2025; Jasa Marga Balikpapan Samarinda pada tahun 2026; WSP pada tahun 2028 Divestment in businesses that do not directly support the core construction business such as WTJJ, PP Semarang Demak, & CMLJ in 2025; Jasa Marga Balikpapan Samarinda in 2026; WSP in 2028

Keterangan/Note:

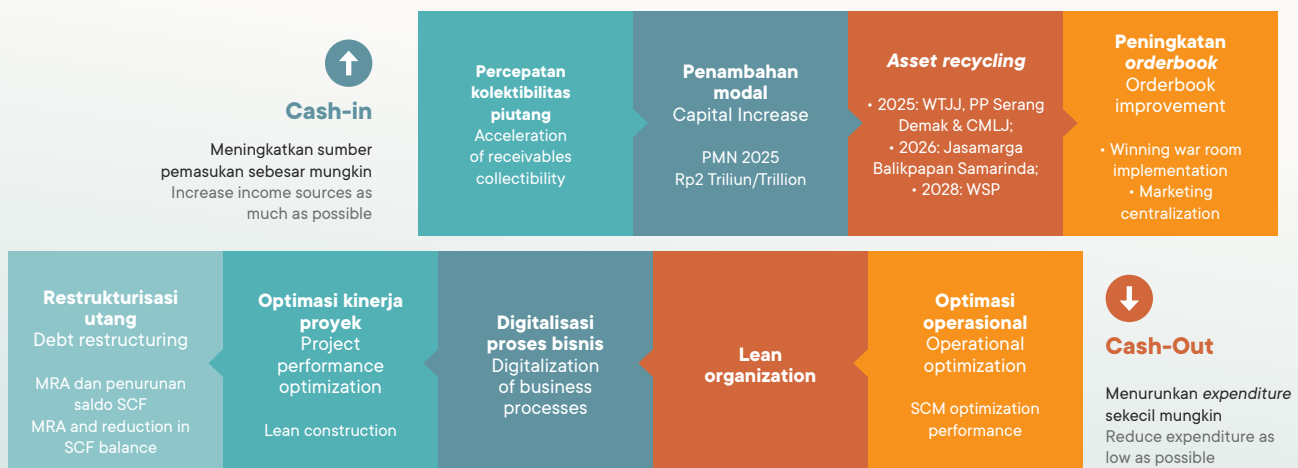
*Bagian dari 8 stream pada Rencana Penyehatan Keuangan WIKA

*Part of 8 streams in WIKA's Financial Recovery Plan

Peningkatan likuiditas kas dan perbaikan rasio kesehatan perusahaan dicapai dengan peningkatan *cash-in* dan penurunan *cash-out* seoptimal mungkin seperti Gambar 5. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk fokus pada *cash*, strategi ini biasanya mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan aliran kas perusahaan, memperkuat posisi keuangan, dan mengurangi risiko kekurangan likuiditas. Hal ini dapat mencakup pengelolaan ketat terhadap siklus penagihan dan pembayaran, peningkatan efisiensi dalam pengeluaran operasional, pengendalian persediaan dan investasi modal, serta strategi pendanaan yang cermat. Fokus pada *cash* juga sering melibatkan upaya untuk meningkatkan pengelolaan risiko keuangan, termasuk perlindungan terhadap fluktuasi nilai tukar atau suku bunga, serta diversifikasi sumber pendanaan. Dengan mengutamakan *cash*, perusahaan berupaya untuk memastikan keberlangsungan operasional yang stabil, memperkuat daya tahan finansial, dan meningkatkan fleksibilitas untuk menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin muncul.

Increasing cash liquidity and improving the Company's health ratio is achieved by increasing cash-in and decreasing cash-out as optimally as possible as in Figure 5. When a company decides to focus on cash, this strategy usually includes a series of actions aimed at optimizing the company's cash flow, strengthening its financial position, and reducing the risk of liquidity shortages. This can include tight management of collection and payment cycle, increasing efficiency in operating expenses, controlling inventory and capital investment, and careful funding strategies. Focusing on cash also often involves efforts to improve financial risk management, including protection against exchange rate or interest rate fluctuations, and diversifying funding sources. By prioritizing cash, the company seeks to ensure stable operational continuity, strengthen financial resilience, and increase flexibility to face economic challenges that may arise.

Gambar 5 Fokus terhadap cash
Figure 5 Focus on cash



Untuk perusahaan konstruksi, fokus pada aliran kas (*cash flow*) adalah kunci untuk memastikan kelangsungan operasional yang stabil dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi yang efektif dalam hal ini melibatkan manajemen proyek yang cermat untuk meminimalkan penundaan dan biaya tambahan, negosiasi kontrak yang tepat untuk memastikan pembayaran tepat waktu, dan pengelolaan persediaan dan pembayaran vendor dengan efisien. Fokus yang kuat pada *cash flow* juga memungkinkan perusahaan untuk memiliki fleksibilitas finansial yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tak terduga dan memanfaatkan peluang pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, strategi perusahaan konstruksi yang terpusat pada *cash flow* tidak hanya memastikan kesehatan keuangan saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan masa depan.

1.2 Keunggulan eksekusi proyek

Keunggulan eksekusi proyek memiliki sasaran strategis yaitu memperkuat *value engineering* untuk mengoptimalkan perencanaan dan sebagai dasar untuk pengendalian dan pengawasan proyek. Terdapat 6 inisiatif strategis untuk mencapai sasaran strategis tersebut seperti pada Tabel 2. Terdapat 3 *stream* penyehatan WIKA yang relevan berada pada pilar ini, yaitu penurunan *operating expense*, perbaikan portfolio *orderbook*, perbaikan tata kelola dan manajemen risiko.

Dalam industri konstruksi, strategi keunggulan eksekusi proyek menjadi fokus utama perusahaan untuk memenangkan dan menyelesaikan proyek dengan efisiensi dan kualitas yang tinggi. Ini melibatkan pendekatan yang terencana dan terorganisir untuk mengelola semua aspek proyek, mulai dari perencanaan dan pengadaan hingga pelaksanaan dan penyelesaian. Perusahaan konstruksi yang berhasil sering kali menonjol dalam efisiensi manajemen waktu dan biaya, penggunaan teknologi canggih untuk pemantauan dan pelaporan proyek secara *real-time*, kolaborasi yang kuat antara tim internal dan mitra eksternal, serta fokus yang kuat pada kualitas.

For construction companies, focusing on cash flow is key to ensuring stable operational continuity and sustainable growth. In this regard, effective strategy involves careful project management to minimize delays and additional costs, proper contract negotiation to ensure timely payment, and efficient management of inventory and vendor payments. A strong focus on cash flow also allows companies to have the financial flexibility needed to overcome unexpected challenges and take advantage of long-term growth opportunities. Thus, construction companies with a strategy that focuses on cash flow not only ensures current financial health but also builds a strong foundation for future growth.

1.2 Project execution excellence

Project execution excellence has strategic goals, namely strengthening value engineering to optimize planning and to serve as a basis for project control and supervision. There are 6 strategic initiatives to achieve these strategic goals as shown in Table 2. There are also 3 WIKA recovery streams that are relevant in this pillar, namely reducing operating expenses, improving orderbook portfolio, improving governance and risk management.

In the construction industry, the strategy of project execution excellence is the company's main focus to win and complete projects with high efficiency and quality. It involves a planned and organized approach to managing all aspects of a project, from planning and procurement to execution and completion. Successful construction companies often stand out for their efficiency in time and cost management, use of advanced technology for real-time project monitoring and reporting, strong collaboration between internal teams and external partners, and a strong focus on quality.

Tabel 2 Target Inisiatif Strategis - Keunggulan Eksekusi Proyek
Table 2 Strategic Initiative Targets - Project Execution Excellence

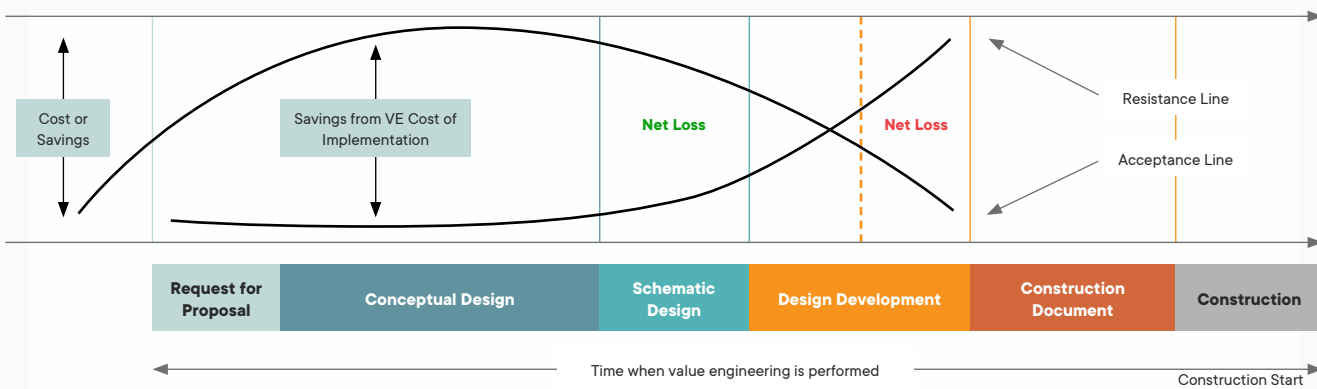
Inisiatif Strategis	Target Target
2.1 Implementasi <i>Winning War Room</i> * 2.1 Implementation of <i>Winning War Room</i> *	Meningkatkan persentase kemenangan tender Increase tender winning percentage
2.2 <i>SCM Optimization Performance</i> * 2.2 <i>SCM Optimization Performance</i> *	Mengoptimalkan efektivitas SCM untuk mendapatkan mutu dan harga terbaik Optimize SCM effectiveness to get the best quality and price
2.3 Implementasi Program <i>Zero Accident</i> * 2.3 Implementation of <i>Zero Accident Program</i> *	Mencapai <i>zero accident</i> untuk semua proyek Achieve zero accident for all projects
2.4 Transformasi Sistem Pengendalian Proyek Terintegrasi 2.4 Transformation of Integrated Project Control System	Meningkatkan efisiensi dan menghilangkan pemborosan pada seluruh tahapan proyek Increase efficiency and eliminate waste at all stages of the project
2.5 Divestasi Anak Usaha dan Entitas Asosiasi* 2.5 Divestment of Subsidiaries and Associated Entities*	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan secara digital Improve digital control and supervision
2.6 Penerapan Sistem Monitoring Aktivitas Pekerja 2.6 Implementation of Worker Activity Monitoring System	

Keterangan/Note:
*Bagian dari 8 *stream* pada Rencana Penyehatan Keuangan WIKA
*Part of 8 streams in WIKA's Financial Recovery Plan

Pada Gambar 6, Strategi perusahaan konstruksi yang menerapkan *value engineering* untuk mengoptimalkan perencanaan dan sebagai dasar untuk pengendalian dan pengawasan proyek memiliki fokus utama pada identifikasi dan implementasi solusi yang memberikan nilai terbaik dengan biaya yang optimal. Dengan menggunakan pendekatan ini, perusahaan konstruksi dapat menyelaraskan tujuan proyek dengan kebutuhan klien sambil mengurangi biaya produksi dan waktu pelaksanaan. *Value engineering* memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi alternatif desain, bahan, atau metode konstruksi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek. Selain itu, dengan menggunakan *value engineering* sebagai dasar untuk pengendalian dan pengawasan proyek, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam proses konstruksi mempertahankan fokus pada nilai yang ditetapkan dan meminimalkan kemungkinan perubahan yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi jadwal dan anggaran proyek. Dengan demikian, strategi ini memungkinkan perusahaan konstruksi untuk mencapai hasil yang optimal dalam hal kualitas, biaya, dan waktu pelaksanaan proyek.

In Figure 6, the construction company's strategy that applies value engineering to optimize planning and as a basis for project control and supervision focuses primarily on identifying and implementing solutions that provide the best value with optimal costs. By using this approach, the construction company can align the project's objectives with the client's needs while reducing production costs and execution time. Value engineering enables the company to identify alternative designs, materials, or construction methods that can enhance efficiency and quality. Furthermore, by using value engineering as a basis for project control and supervision, the company can ensure that every step in the construction process maintains a focus on the established value and minimizes the likelihood of unexpected changes that could affect the project's schedule and budget. Thus, this strategy allows the construction company to achieve optimal results in terms of quality, cost, and project execution time.

Gambar 6 Value engineering
Figure 6 Value engineering



WIKA menjalankan Inisiatif Strategis dengan fokus pada Optimasi Operasional dan Efisiensi Biaya. Salah satu program utama yang diterapkan adalah Optimasi Rantai Pasok, di mana perusahaan berkomitmen untuk mengoptimalkan jaringan transportasi dan distribusi dengan prinsip *On-time In-Full* (OTIF). Melibatkan pula pengoptimalan dalam proses *sourcing* bahan baku dan pengadaan, tujuannya adalah untuk memastikan kualitas, kuantitas, dan biaya yang sesuai dengan standar perusahaan.

WIKA is implementing Strategic Initiatives with a focus on Operational Optimization and Cost Efficiency. One of the main programs is Supply Chain Optimization, where the Company is committed to optimizing transportation and distribution networks with the *On-time In-Full* (OTIF) principle. This involves optimizing the sourcing of raw materials and procurement processes to ensure quality, quantity, and costs align with the company's standards.

Selanjutnya, WIKA menitikberatkan pada Optimasi Eksekusi Proyek, dengan fokus pada memastikan bahwa setiap proyek dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Langkah ini diarahkan untuk meminimalisir aktivitas yang mungkin menimbulkan pemborosan biaya dan waktu. Terakhir, program optimasi *overhead cost* mengedepankan prinsip *negative employee growth*, baik untuk pegawai tetap maupun pegawai kontrak, sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Furthermore, WIKA emphasizes Project Execution Optimization, focusing on ensuring that each project is carried out according to the established plan. This step aims to minimize activities that may result in cost and time wastage. Lastly, the overhead cost optimization program prioritizes the principle of *negative employee growth*, both for permanent and contract employees, as a step to improve operational efficiency.

Tujuan dari ketiga program ini adalah meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mencakup proses konstruksi, distribusi, dan manajemen persediaan. Dengan mengurangi biaya produksi, persediaan, dan distribusi melalui pemilihan rute transportasi yang optimal dan manajemen persediaan yang efektif, WIKA berupaya

The goal of these three programs is to enhance the Company's operational efficiency, including construction processes, distribution, and inventory management. By reducing production, inventory, and distribution costs through the selection of optimal transportation routes and effective inventory management, WIKA aims to minimize

meminimalisir pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan material serta tenaga kerja. Dengan demikian, perusahaan bertujuan mencapai peningkatan signifikan dalam tingkat profitabilitas yang berkelanjutan.

waste and optimize the use of materials and labor. Thus, the Company aims to achieve significant improvements in sustainable profitability levels.

Gambar 7 Inefisiensi yang Terjadi Pada Level Eksekusi Proyek
Figure 7 Inefficiencies that Occur at the Project Execution Level



Pada Gambar 7, WIKA harus meningkatkan efisiensi operasional dan eksekusi proyek guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara *cost-efficient* dan tepat waktu, menghadapi persaingan pasar yang ketat. Peningkatan efisiensi tersebut menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan tenaga kerja, peralatan, dan material perusahaan, dengan potensi mereduksi biaya produksi, mempercepat siklus proyek, dan meningkatkan daya saing. Selain itu, peningkatan eksekusi proyek yang tepat waktu menjadi faktor kritis, sehingga optimasi jadwal proyek dapat mengurangi risiko keterlambatan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membuka peluang mendapatkan proyek tambahan.

In Figure 7, WIKA must enhance operational efficiency and project execution to optimize the cost-effective and timely use of resources while facing intense market competition. This efficiency improvement is key to optimizing labor, equipment, and material use, with the potential to reduce production costs, accelerate project cycles, and increase competitiveness. Additionally, improving timely project execution becomes a critical factor, as optimizing project schedules can reduce the risk of delays, increase customer satisfaction, and open opportunities for additional projects.

WIKA menjalankan optimasi operasional secara menyeluruh, melibatkan rantai pasok, eksekusi proyek, dan biaya *overhead* untuk mencapai efisiensi biaya yang lebih optimal. Dengan fokus pada pemaksimalan efisiensi diseluruh aspek operasional perusahaan, termasuk dalam pengelolaan rantai pasok yang *On-time In-Full* (OTIF), eksekusi proyek sesuai rencana, dan peningkatan efisiensi *overhead* dengan prinsip *negative employee growth*, WIKA bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Langkah-langkah ini diarahkan untuk mengurangi biaya produksi, persediaan, dan distribusi melalui pemilihan rute transportasi optimal, manajemen persediaan yang efektif, serta eliminasi pemborosan biaya dan optimalisasi penggunaan material dan tenaga kerja. Dengan demikian, WIKA berupaya mencapai peningkatan signifikan dalam profitabilitas melalui strategi optimasi operasional yang holistik.

WIKA carries out comprehensive operational optimization, involving supply chain, project execution, and overhead costs to achieve more optimal cost efficiency. By focusing on maximizing efficiency across all operational aspects of the Company, including the management of On-time In-Full (OTIF) supply chain, project execution according to plan, and overhead efficiency improvements with the principle of negative employee growth, WIKA aims to increase the Company's profitability. These steps are directed at reducing production, inventory, and distribution costs through optimal transportation route selection, effective inventory management, as well as eliminating cost waste and optimizing the use of materials and labor. Therefore, WIKA strives to achieve significant profitability improvements through a holistic operational optimization strategy.

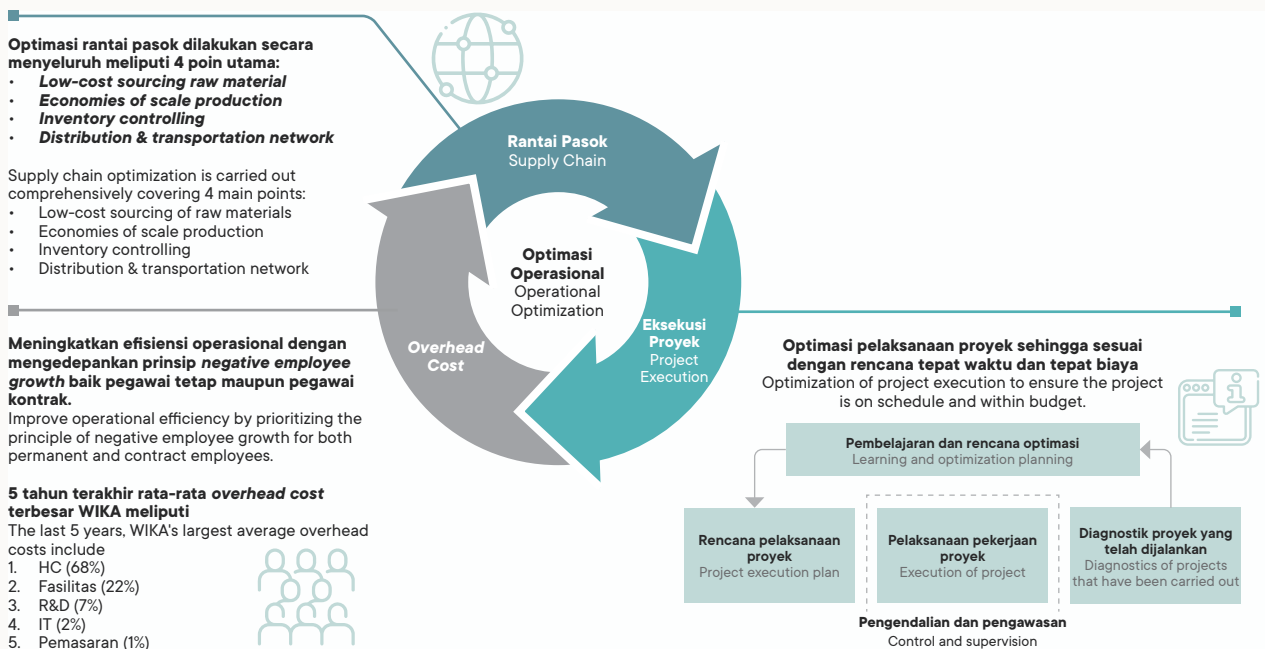
Dalam industri konstruksi, strategi optimasi operasional melibatkan pendekatan terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam tiga area kunci: rantai pasok, biaya *overhead*, dan eksekusi

In the construction industry, operational optimization strategies involve an integrated approach to enhancing efficiency and productivity in three key areas: supply chain, overhead costs, and

proyek. Pertama, dengan memperbaiki rantai pasok, perusahaan dapat mengurangi waktu tunggu untuk bahan dan peralatan, serta meminimalkan risiko gangguan pasokan. Ini dapat dicapai melalui kemitraan yang kuat dengan pemasok terpercaya dan penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan proses logistik. Kedua, pengurangan biaya *overhead*, seperti biaya administrasi dan biaya operasional non-esensial lainnya, dapat dilakukan melalui pembaruan sistem administrasi dan penggunaan teknologi untuk otomatisasi tugas-tugas rutin. Terakhir, meningkatkan eksekusi proyek melalui manajemen waktu yang ketat, pengawasan yang efisien, dan penggunaan teknologi terkini seperti *Building Information Modeling* (BIM), dapat membantu mempercepat waktu siklus proyek dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan hasil akhir yang lebih baik. Dengan menyatukan strategi ini, perusahaan konstruksi dapat mencapai kinerja operasional yang optimal dan bersaing secara efektif di pasar yang semakin ketat, ilustrasi terlihat pada Gambar 8.

project execution. First, by improving the supply chain, companies can reduce wait times for materials and equipment, as well as minimize the risk of supply disruptions. This can be achieved through strong partnerships with trusted suppliers and the use of technology to optimize logistics processes. Second, overhead cost reduction, such as administrative costs and other non-essential operational expenses, can be achieved through system updates and the use of technology to automate routine tasks. Lastly, improving project execution through tight time management, efficient supervision, and the use of latest technology such as Building Information Modeling (BIM), can help speed up project cycles and improve customer satisfaction with better final results. By combining these strategies, construction companies can achieve optimal operational performance and effectively compete in an increasingly competitive market, as illustrated in Figure 8.

Gambar 8 Optimasi Operasional
Figure 8: Operational Optimization



1.3 Penyeimbangan Portofolio

Penyeimbangan portofolio memiliki sasaran strategis yaitu sinergi bisnis dan optimasi pengelolaan portofolio proyek serta ekspansi pasar melalui kemitraan. Terdapat 5 inisiatif strategis untuk mencapai sasaran strategis tersebut seperti pada Tabel 3. Terdapat 1 *stream* penyehatan WIKA yang relevan berada pada pilar ini, yaitu perbaikan *portfolio orderbook*.

1.3 Portfolio Balancing

Portfolio balancing has a strategic goal of business synergy and optimization of project portfolio management, as well as market expansion through partnerships. There are 5 strategic initiatives to achieve these strategic objectives as shown in Table 3. There is 1 relevant WIKA recovery streams located in this pillar, namely the improvement of orderbook portfolio.

Dalam industri konstruksi, strategi penyeimbangan portofolio merupakan pendekatan penting untuk mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan. Perusahaan konstruksi sering memiliki beragam proyek dengan tingkat kompleksitas, ukuran, dan risiko yang berbeda. Dengan menerapkan strategi penyeimbangan portofolio, perusahaan dapat menyeimbangkan risiko dengan keuntungan yang diharapkan dari proyek-proyek tersebut. Ini melibatkan

In the construction industry, portfolio balancing strategy is an important approach to managing risks and maximizing profits. Construction companies often have a variety of projects with different levels of complexity, size, and risks. By applying a portfolio balancing strategy, companies can balance the risks with the expected returns from these projects. This involves the smart allocation of resources across diverse projects, considering factors

alokasi sumber daya yang cerdas di antara proyek-proyek yang beragam, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti skala proyek, jadwal, kebutuhan keuangan, dan kapasitas perusahaan. Dengan mengelola portofolio proyek secara efektif, perusahaan dapat mengurangi risiko ketika proyek-proyek tertentu mengalami kendala atau perubahan, sambil tetap memastikan diversifikasi yang cukup untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dan profitabilitas jangka panjang.

such as project scale, schedules, financial needs, and the company's capacity. By managing the project portfolio effectively, companies can reduce the risks when certain projects face obstacles or changes, while still ensuring enough diversification to achieve stable growth and long-term profitability.

Tabel 3 Target Inisiatif Strategis - Penyeimbangan portofolio
Table 3 Strategic Initiative Targets - Portfolio Balancing

Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target
3.1 Transformasi Sinergi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak 3.1 Transformation of Synergy between Parent Company and Subsidiary Company	Meningkatkan omzet kontrak konsolidasi Increase consolidated contract turnover
3.2 Penyeimbangan portofolio berupa eksplorasi model bisnis baru untuk mendapatkan <i>recurring income</i> dengan CAPEX seminimal mungkin* 3.2 Portfolio balancing by exploring new business models to obtain recurring income with minimal CAPEX*	peningkatan kompetensi dan pendapatan perusahaan Increase company competency and revenue
3.3 Penguatan portofolio potensial (melalui strategi <i>blue ocean, high-value added, dan sustainable</i>)* 3.3 Strengthening potential portfolio (through blue ocean, high-value added, and sustainable strategies)*	Meningkatkan portofolio bisnis perusahaan dengan menciptakan pasar baru Increase company business portfolio by creating new markets
3.4 Sentralisasi Pemasaran Aset WIKA Group 3.4 Centralization of WIKA Group Asset Marketing	Meningkatkan omzet kontrak baru Increase new contract turnover
3.5 Penambahan Lisensi Skema LSP WIKA 3.5 Addition of WIKA LSP Scheme License	Meningkatkan skema jabatan keahlian dan penyediaan sertifikasi hingga manajer proyek Increase expertise position scheme and certification provision up to project manager

Keterangan/Note:

*Bagian dari 8 *stream* pada Rencana Penyehatan Keuangan WIKA

*Part of 8 streams in WIKA's Financial Recovery Plan

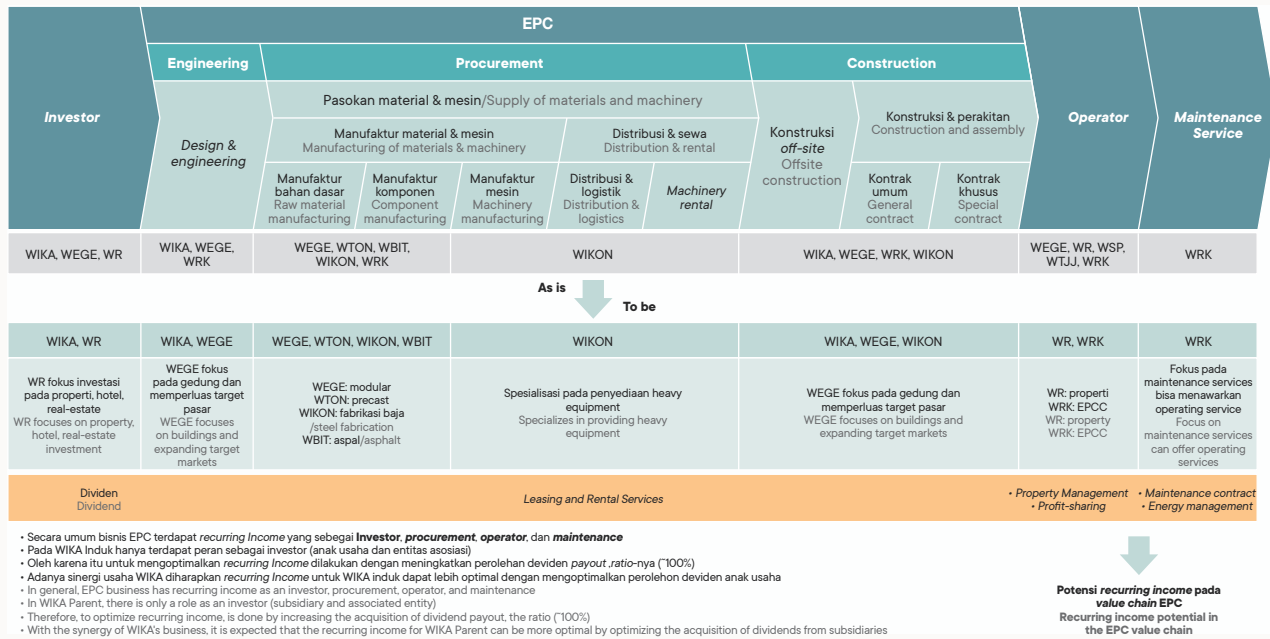
Langkah awal penyeimbangan portofolio adalah melakukan transformasi sinergi ekosistem bisnis WIKA (Gambar 9) yang memerlukan sinergi induk dan anak usaha untuk menciptakan harmonisasi serta menghindari persaingan internal sehingga bisa meningkatkan *recurring income* dan dividen ke induk. Dalam upaya untuk mengembangkan ekosistem bisnis secara holistik, perusahaan WIKA *pre-construction* merancang strategi yang mengutamakan sinergi antara unit induk dan anak usaha pada seluruh tahapan proyek, mulai dari hingga *operation and maintenance* (O&M). Tujuan utama dari strategi ini adalah menciptakan harmonisasi di antara berbagai entitas dalam grup perusahaan serta menghindari potensi persaingan internal yang tidak produktif.

The initial step in portfolio balancing is to carry out the transformation of WIKA's business ecosystem synergy (Figure 9), which requires synergy between the parent company and subsidiaries to create harmony and avoid internal competition, thus increasing recurring income and dividends for the parent company. In efforts to develop the business ecosystem holistically, WIKA *pre-construction* designs strategies that prioritize synergy between the parent company and subsidiaries at every stage of the project, from planning to operation and maintenance (O&M). The main goal of this strategy is to create harmony among the various entities within the company group and avoid potential unproductive internal competition.

Koordinasi dan kolaborasi antara induk dan anak usaha dilakukan dengan menetapkan pembagian porsi yang jelas. Hal ini dimulai dari fase *pre-construction*, di mana perencanaan awal proyek dilakukan, hingga tahapan *operation and maintenance*, yang melibatkan pemeliharaan dan pengelolaan proyek yang telah selesai. Memastikan bahwa setiap unit bisnis, baik itu induk maupun anak usaha, memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas. Porsi tanggung jawab masing-masing unit bisnis akan ditetapkan secara hati-hati untuk menghindari tumpang tindih dan potensi konflik internal. Hal ini akan mencakup pembagian tugas yang jelas mulai dari perencanaan dan desain hingga konstruksi dan operasional.

Coordination and collaboration between the parent company and subsidiaries are carried out by establishing clear divisions of roles. This starts from the *pre-construction* phase, where the initial planning of project is carried out, to the operation and maintenance phase, which involves the upkeep and management of completed projects. Ensuring that each business unit, whether the parent or subsidiary, has a clearly defined role is key. Each business unit's responsibilities will be carefully allocated to avoid overlap and potential internal conflicts. This will include clear division of tasks from planning and design to construction and operations.

Gambar 9 Transformasi Sinergi Ekosistem Bisnis WIKA
Figure 9 WIKA Business Ecosystem Synergy Transformation



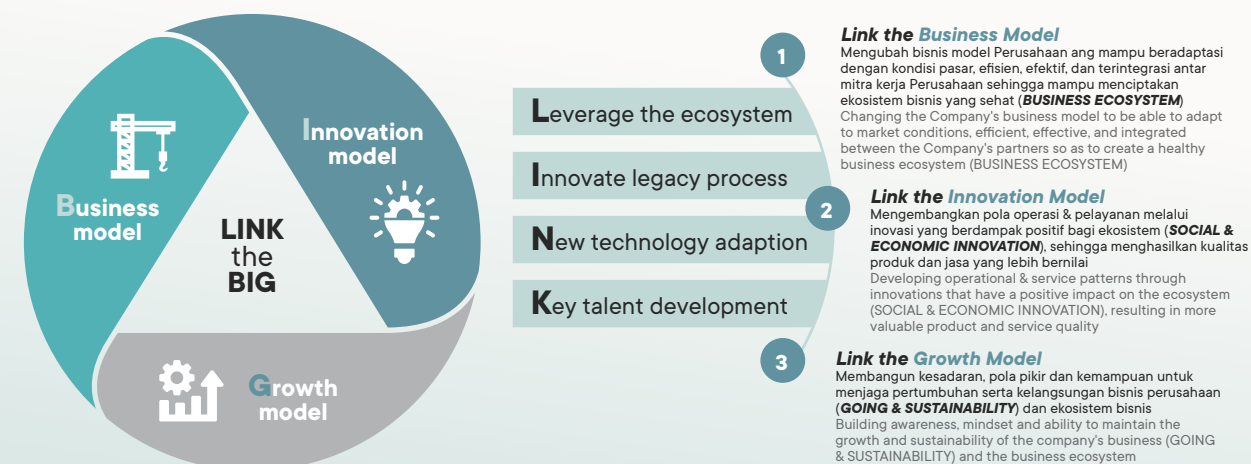
Berdasarkan pengalaman, kredibilitas, dan jaringan mitra WIKA maka potensi *recurring income* pada WIKA induk bisa mengoptimalkan dengan: Meningkatkan dividen dari anak usaha, *Construction service by monthly payment*, *Commission fee* dari pembiayaan, dan *Profit sharing* dari laba bisnis kerja sama.

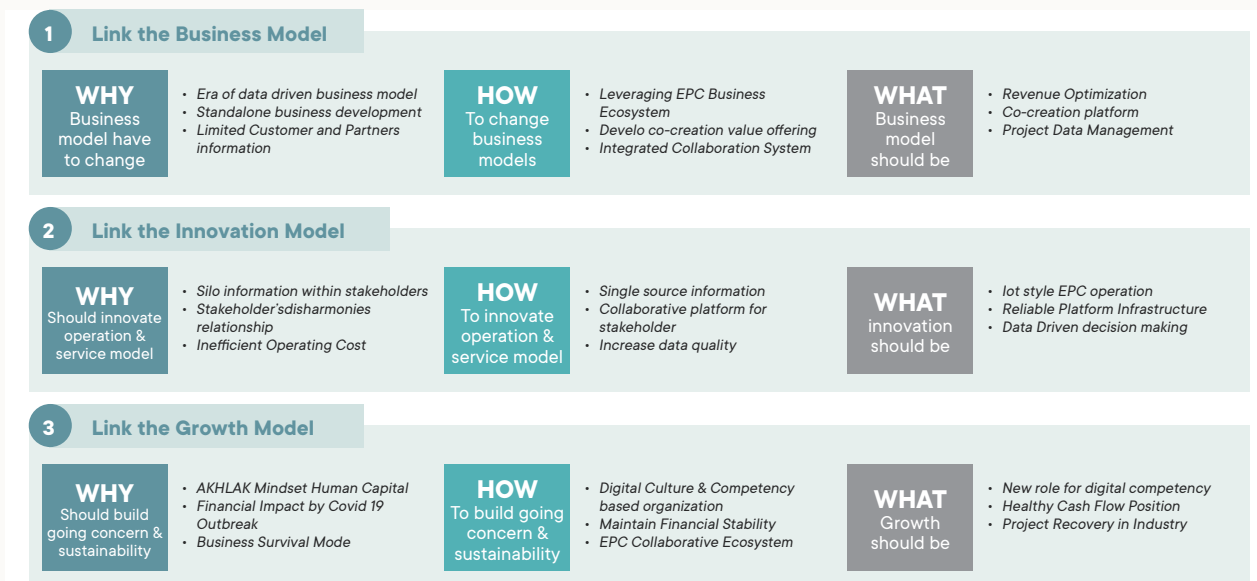
Based on experience, credibility, and WIKA's network of partners, the potential for recurring income for WIKA's parent company can be optimized by: increasing dividends from subsidiaries, construction services through monthly payments, commission fees from financing, and profit sharing from joint venture business profits.

Penyeimbangan portofolio perlu didukung adanya inovasi untuk memastikan *sustainability* bisnis WIKA. Model Kolaborasi Inovasi Terintegrasi (*Integrated Innovation Collaboration Model*) adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan proyek konstruksi (lihat pada Gambar 10). Dalam model ini, perusahaan konstruksi bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama termasuk arsitek, insinyur, subkontraktor, dan pemasok untuk mengintegrasikan berbagai teknologi dan praktik terbaru dalam setiap tahap proyek.

Portfolio balancing needs to be supported by innovation to ensure the sustainability of WIKA's business. The Integrated Innovation Collaboration Model is a strategic approach used by construction companies to improve the efficiency, quality, and sustainability of construction projects (see Figure 10). In this model, construction companies collaborate with key stakeholders including architects, engineers, subcontractors, and suppliers to integrate various technologies and best practices at every stage of the project.

Gambar 10 Integrated Innovation Collaboration Model
Figure 10 Integrated Innovation Collaboration Model





Ini melibatkan penggunaan teknologi digital seperti *Building Information Modeling (BIM)* untuk merencanakan dan mengelola proyek secara lebih efisien, serta penerapan metode konstruksi yang inovatif seperti modular *construction* atau *green building practices* untuk meningkatkan keberlanjutan dan kualitas hasil akhir. Kolaborasi erat antara semua pihak terlibat memungkinkan pertukaran ide dan pengetahuan yang lebih baik, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi kemungkinan kesalahan atau konflik selama pelaksanaan proyek. Dengan menerapkan Model Kolaborasi Inovasi Terintegrasi, perusahaan konstruksi dapat mencapai hasil yang lebih baik secara keseluruhan dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Model kolaborasi inovasi yang terintegrasi dengan model bisnis dan pertumbuhan akan mengoptimalkan pembentukan ekosistem bisnis berkelanjutan sesuai dengan tren pasar di Indonesia (*Green Energi & net zero emission*). Menjadikan ekosistem bisnis lebih terintegrasi dan terkoneksi antar *stakeholder* melalui perubahan pada seluruh model bisnis, operasi, pelayanan hingga pola kerja yang didasari oleh *digital collaboration*.

This involves the use of digital technologies such as Building Information Modeling (BIM) to plan and manage projects more efficiently, as well as the application of innovative construction methods such as modular construction or green building practices to enhance sustainability and quality of final output. The close collaboration between all involved parties allows for better exchange of ideas and knowledge, accelerates decision-making, and reduces the likelihood of errors or conflicts during project execution. By applying the Integrated Innovation Collaboration Model, construction companies can achieve better overall results and meet the increasingly complex and rapidly changing market demands. The integrated innovation collaboration model, aligned with the business model and growth, will optimize the formation of a sustainable business ecosystem in accordance with market trends in Indonesia (Green Energy & Net Zero Emissions). This will make the business ecosystem more integrated and connected among stakeholders through changes in the entire business model, operations, services, and work patterns based on digital collaboration.

1.4 Organisasi Lean

Organisasi *Lean* memiliki sasaran strategis berupa pembentukan struktur organisasi yang responsif dan *agile*. Terdapat 3 inisiatif strategis untuk mencapai sasaran strategis tersebut seperti pada Tabel 4. Terdapat 1 *stream* penyehatan WIKA yang relevan berada pada pilar ini, yaitu penurunan *operating expense*.

1.4 Lean Organization

A Lean organization has strategic goals focused on forming a responsive and agile organizational structure. There are 3 strategic initiatives to achieve these goals as shown in Table 4. One relevant stream of WIKA's rehabilitation falls under this pillar, which is reducing operating expenses.

Strategi organisasi *lean* dalam perusahaan konstruksi melibatkan penerapan prinsip-prinsip *lean manufacturing* kedalam proses konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Ini mencakup pemfokusan pada eliminasi pemborosan seperti kelebihan persediaan bahan, waktu tunggu, atau gerakan yang tidak perlu, dengan tujuan untuk mengoptimalkan aliran kerja dan memaksimalkan nilai tambah. Perusahaan konstruksi yang menganut filosofi *lean* juga mempromosikan kolaborasi yang erat antara tim proyek, mendorong komunikasi yang terbuka dan transparan, serta mendorong inovasi berkelanjutan dalam teknologi dan metode konstruksi. Dengan demikian, organisasi *lean* membantu perusahaan konstruksi meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penyediaan proyek yang lebih efisien, terkendali, dan tepat waktu.

The lean organization strategy in construction companies involves applying lean manufacturing principles into construction processes to improve efficiency, reduce waste, and increase value for customers. This includes focusing on eliminating waste such as excess inventory, waiting time, or unnecessary movements, aiming to optimize workflow and maximize added value. Construction companies adopting a lean philosophy also promote close collaboration among project teams, encourage open and transparent communication, and drive continuous innovation in technology and construction methods. Thus, a lean organization helps construction companies enhance productivity, reduce costs, and improve customer satisfaction by delivering more efficient, controlled, and timely projects.

Tabel 4 Target Inisiatif Strategis - Organisasi Lean
Table 4 Strategic Initiative Targets - Lean Organization

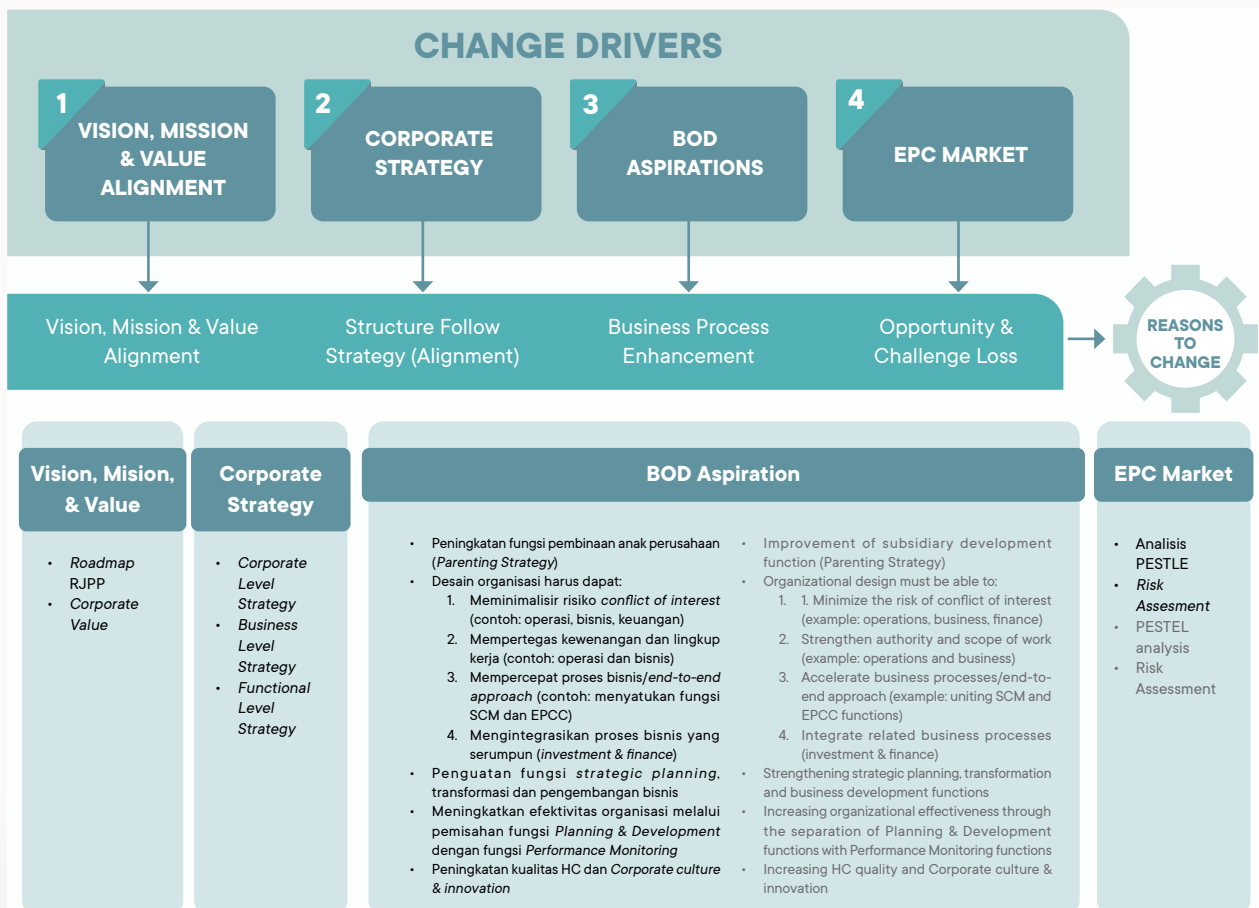
Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target
4.1 Organisasi <i>Lean</i> *	Pengambilan keputusan lebih cepat dan responsif Faster and more responsive decision making
4.2 Penerapan <i>Shared Service WIKA Group</i> * 4.2 Implementation of WIKA Group <i>Shared Service</i> *	Menurunkan biaya dan mengurangi duplikasi fungsi Reduce costs and reduce duplication of functions
4.3 Penerapan <i>Lean Office</i> * 4.3 Implementation of <i>Lean Office</i> *	Meningkatkan produktivitas dan penurunan <i>overhead</i> cost perusahaan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya Increase productivity and reduce company overhead costs by optimizing resource use

Keterangan/Note:

*Bagian dari 8 *stream* pada Rencana Penyehatan Keuangan WIKA

*Part of 8 streams in WIKA's Financial Recovery Plan

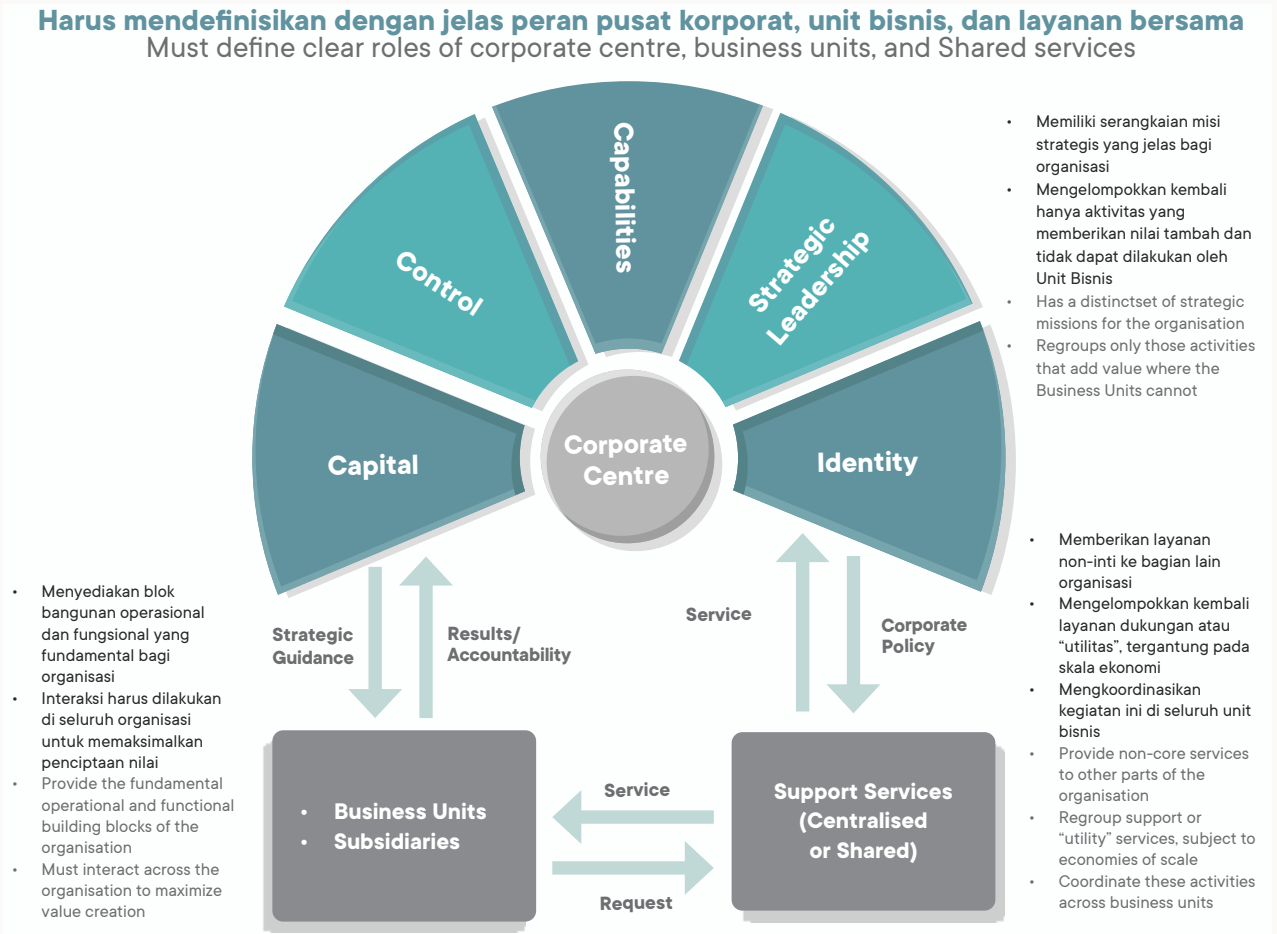
Gambar 11 Analisis Kondisi & Kebutuhan Restrukturisasi Organisasi
Figure 11 Analysis of Conditions and Needs for Organizational Restructuring



Pendekatan terstruktur diperlukan untuk menentukan apa yang harus ada dalam organisasi *Shared Services* (Gambar 12). Kerangka konseptual dalam struktur organisasi dan manajemen, ini menggambarkan hubungan dan fungsi antara pusat korporat, layanan dukungan, dan unit bisnis dalam suatu organisasi yang lebih besar. Model segitiga ini menekankan keterkaitan antara ketiga komponen ini dan pentingnya kolaborasi untuk kesuksesan keseluruhan organisasi. Komunikasi dan koordinasi yang efisien antara pusat korporat, layanan dukungan, dan unit bisnis kritis untuk mencapai tujuan organisasi dan menjaga daya saing di dunia bisnis. Ketiganya saling berinteraksi dengan memiliki 3 sifat yaitu:

A structured approach is required to determine what should be included in a *Shared Services* organization (Figure 12). The conceptual framework in organizational structure and management illustrates the relationships and functions between corporate center, support services, and business units within a larger organization. This triangular model emphasizes the interconnection between these three components and the importance of collaboration for overall success of the organization. Efficient communication and coordination between corporate center, support services, and business units are critical to achieving organizational goals and maintaining competitiveness in the business world. The three components interact with each other and possess three characteristics, which are:

Gambar 12 Pendekatan Penerapan Shared Services pada WIKA
Figure 12 Shared Services Implementation Approach at WIKA



- Komunikasi dan Koordinasi:** Pusat korporat berkomunikasi arahan strategis kepada unit bisnis, yang pada gilirannya memberikan umpan balik dan pembaruan tentang realitas operasional. Layanan dukungan bekerja sama dengan pusat korporat dan unit bisnis untuk memastikan dukungan yang efisien dan efektif.
- Keselaran:** Organisasi yang sukses memastikan keselaran antara pusat korporat, layanan dukungan, dan unit bisnis untuk mencapai pendekatan yang koheren dan bersatu dalam mencapai tujuan organisasi.
- Alokasi Sumber Daya:** Pusat korporat mengalokasikan sumber daya berdasarkan prioritas strategis, sementara layanan dukungan menyediakan sumber daya dan keahlian esensial, dan unit bisnis memanfaatkan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan tertentu.

Visi WIKA saat ini arah strategis dan tujuan transformasi perusahaan tertuju "Perusahaan terpercaya yang menyediakan layanan infrastruktur dan EPC terintegrasi yang berkelanjutan", pembentukan organisasi mengharuskan fungsi-fungsinya berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai *best-practice* organisasi. Terdapat beberapa poin analisa potensi inefisiensi organisasi eksisting. Restrukturisasi organisasi dibutuhkan atas penyesuaian efisiensi biaya dan optimalisasi fungsi organisasi saat ini. Perspektif Penyelarasan Organisasi atas 3 hal: *streamlining* dan efisiensi, penyehatan keuangan dan penguatan manajemen risiko, dan transformasi dan inovasi bisnis & *engineering*.

- Communication and Coordination:** The corporate center communicates strategic direction to business units, which in turn provide feedback and updates on operational realities. Support services work closely with corporate center and business units to ensure efficient and effective support.
- Alignment:** Successful organizations ensure alignment between corporate center, support services, and business units to achieve a coherent and unified approach to achieving organizational goals.
- Resource Allocation:** The corporate center allocates resources based on strategic priorities, while support services provide essential resources and expertise, and business units utilize the allocated resources to achieve specific goals.

WIKA's current vision, strategic direction, and corporate transformation goals are focused on becoming "A trusted company providing integrated, sustainable infrastructure and EPC services." The formation of organization requires its functions to operate effectively, efficiently, and in accordance with organizational best practices. There are several points of analysis regarding the potential inefficiencies of existing organization. Organizational restructuring is necessary to align cost efficiency and optimize the functions of current organization. The perspective for Organizational Alignment focuses on three aspects: *streamlining* and efficiency, financial health and strengthening risk management, and business & engineering transformation and innovation.

1.5 Manajemen Risiko

Manajemen Risiko memiliki sasaran strategis berupa penguatan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko proyek yang terintegrasi. Terdapat 3 inisiatif strategis untuk mencapai sasaran strategis tersebut seperti pada Tabel 5. Terdapat 1 *stream* penyehatan WIKA yang *relevan* berada pada pilar ini, yaitu perbaikan tata kelola dan manajemen risiko.

Dalam industri konstruksi, manajemen risiko menjadi kunci penting untuk mengurangi dampak negatif dari berbagai potensi ancaman yang dapat memengaruhi proyek konstruksi. Perusahaan konstruksi cenderung menghadapi risiko seperti keterlambatan dalam pengiriman bahan, fluktuasi biaya material, perubahan regulasi, atau kegagalan teknis. Strategi manajemen risiko yang efektif dalam konteks ini melibatkan identifikasi risiko secara proaktif sejak tahap perencanaan proyek, penggunaan kontrak yang jelas untuk membagi risiko dengan pihak lain seperti kontraktor atau pemasok, diversifikasi pasokan bahan untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok, serta penerapan teknologi seperti pemodelan informasi bangunan (BIM) untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik desain sebelum mereka menjadi masalah di lapangan. Selain itu, perusahaan konstruksi juga dapat mempertimbangkan asuransi konstruksi untuk melindungi proyek dari risiko kegagalan atau keterlambatan, sementara memastikan kepatuhan penuh terhadap standar keselamatan dan peraturan lingkungan. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik terhadap manajemen risiko, perusahaan konstruksi dapat meningkatkan peluang kesuksesan proyek sambil meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-risiko yang muncul.

1.5 Risk Management

Risk Management has a strategic goal of strengthening corporate governance and integrated project risk management. There are three strategic initiatives to achieve this goal, as shown in Table 5. One relevant stream of WIKA's revitalization is located in this pillar, namely, improving governance and risk management.

In the construction industry, risk management is crucial for reducing the negative impact of various potential threats that may affect construction projects. Construction companies tend to face risks such as delays in material delivery, fluctuations in material costs, regulatory changes, or technical failures. An effective risk management strategy in this context involves proactively identifying risks from the planning stage, using clear contracts to share risks with other parties such as contractors or suppliers, diversifying material supply sources to reduce dependency on a single supplier, and applying technologies like Building Information Modeling (BIM) to identify and manage potential design conflicts before they become issues on-site. Additionally, construction companies can consider construction insurance to protect projects from risks such as failure or delays, while ensuring full compliance with safety standards and environmental regulations. By adopting a holistic approach to risk management, construction companies can enhance the chances of project success while minimizing the potential negative impacts of emerging risks.

Tabel 5 Target Inisiatif Strategis - Manajemen Risiko
Table 5: Strategic Initiative Targets - Risk Management

Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target Target
5.1 Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak* 5.1 Integrated Governance of Parent and Subsidiary Companies*	Peningkatan akuntabilitas dan kemudahan pengendalian bisnis WIKA yang efisien. Implementasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesamaan persepsi antara WIKA dan Perusahaan Anak terkait aspek-aspek/fungsi diintegrasikan dalam aktivitas Pengelolaan Anak Perusahaan 2. Adanya acuan dalam Aktivitas hubungan interaksi bagi WIKA dan Anak Perusahaan 3. Terciptanya sinergi dan komunikasi yang efektif untuk memberikan nilai tambah bagi WIKA Group 4. Adanya keterbukaan dari Anak Perusahaan dalam sinergi audit gabungan antara WIKA Holding dan Entitas Anak 5. Pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi tim audit Anak Perusahaan untuk proses standarisasi kompetensi antara WIKA Holding dan entitas Anak Perusahaan. 6. Penyelarasan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian internal antara Internal Audit Holding dan Entitas Anak. 7. Internal Audit Holding mampu mengawasi dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal di entitas anak. 8. Internal Audit Holding dan Entitas Anak mampu menyusun laporan dengan kualitas informasi terkait kondisi obyek audit yang sebenarnya
	Increased accountability and ease of efficient WIKA business control. Implementation: <ol style="list-style-type: none"> 1. There is a common perception between WIKA and Subsidiaries regarding aspects/functions integrated in Subsidiary Management activities 2. There is a reference in the Activity of interactive relationships for WIKA and Subsidiaries 3. The creation of effective synergy and communication to provide added value for the WIKA Group 4. There is openness from Subsidiaries in the joint audit synergy between WIKA Holding and Subsidiaries 5. Mapping the needs for developing the competency of the Subsidiary audit team for the competency standardization process between WIKA Holding and Subsidiary entities. 6. Alignment in the application of good governance principles, risk management, and internal control between Internal Audit Holding and Subsidiaries. 7. Internal Audit Holding is able to supervise and evaluate the effectiveness and efficiency of the internal control system in subsidiaries. 8. Internal Audit Holding and Subsidiaries are able to prepare reports with quality information related to the actual condition of the audit object

Tabel 5 Target Inisiatif Strategis - Manajemen Risiko
Table 5: Strategic Initiative Targets - Risk Management

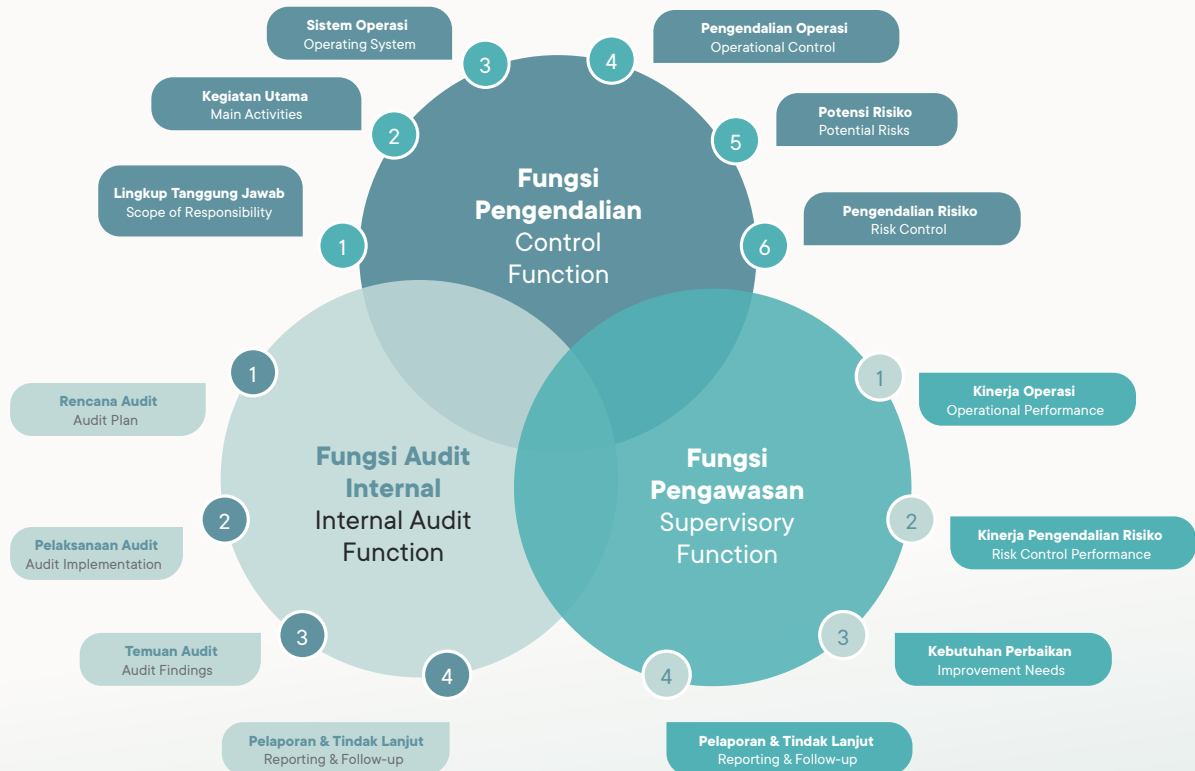
Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target Target
5.2 Implementasi Manajemen Kontrak dan Klaim Terintegrasi 5.2 Implementation of Integrated Contract and Claim Management	Meningkatkan Manajemen Perubahan dalam <i>variation, order, claim, dan anti-claim</i> Improve Change Management in <i>variation, order, claim, and anti-claim</i>
5.3 Transformasi Tata Kelola JO* 5.3 Transformation of JO Governance*	Meningkatkan Efisiensi Pelaksanaan Proyek JO* Improve Project Execution Efficiency JO*

Keterangan/Note:
*Bagian dari 8 stream pada Rencana Penyehatan Keuangan WIKA
*Part of 8 streams in WIKA's Financial Recovery Plan

Dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan untuk periode 2025-2029, strategi inisiatif utama yang diusung adalah Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko. Fokus utama dari strategi ini adalah melalui satu program kunci, yakni Peningkatan Fungsi Pengendalian, Pengawasan, dan Audit Internal (lihat pada Gambar 13). Program ini dirancang untuk memperkuat mekanisme kontrol internal di WIKA, meningkatkan efektivitas pengawasan operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku.

In order to achieve the Company's vision and mission for the period 2025-2029, the main initiative strategy carried out is Improving Governance and Risk Management. The main focus of this strategy is through one key program, namely Improving Internal Control, Supervision, and Audit Functions (see Figure 13). This program is designed to strengthen internal control mechanisms at WIKA, improve the effectiveness of operational supervision, and ensure compliance with applicable standards and regulations.

Gambar 13 Arah dan Prinsip Pengembangan Tata Kelola & Manajemen Risiko
Figure 13 Direction and Principles of Governance & Risk Management Development



Dengan mengimplementasikan program ini, perusahaan berupaya mengurangi risiko bisnis dan operasional yang mungkin timbul. Penguatan fungsi pengendalian akan membantu dalam memitigasi potensi ketidakpatuhan, peningkatan efisiensi operasional, dan menciptakan lingkungan yang lebih terstruktur. Upaya ini sejalan dengan komitmen WIKA untuk menjaga integritas perusahaan serta memberikan kepercayaan kepada *stakeholder*.

By implementing this program, the Company aims to reduce the potential business and operational risks that may arise. Strengthening the control functions will help mitigate the risk of non-compliance, improve operational efficiency, and create a more structured environment. This effort aligns with WIKA's commitment to maintaining corporate integrity while gaining the trust of stakeholders.

Dengan menurunkan risiko bisnis dan operasional, WIKA bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dan ketangguhan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan di lingkungan bisnis yang dinamis. Program ini bukan hanya sebuah langkah strategis, tetapi juga wujud komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang terintegrasi sebagai bagian integral dari perjalanan menuju keberhasilan jangka panjang.

Perseroan senantiasa melakukan penilaian risiko usaha untuk menyusun strategi mitigasi yang tepat. Penerapan sistem manajemen risiko di Perseroan telah mengacu pada kebijakan yang berasal dari Direksi dan berlaku di WIKA Group. Untuk memastikan implementasi manajemen risiko yang terstruktur, Divisi Manajemen Risiko selaku Divisi yang menaungi pelaksanaan manajemen risiko di WIKA Group telah menyusun:

1. Kebijakan Manajemen Risiko.
2. Pedoman Sistem Manajemen Risiko.
3. Prosedur Manajemen Risiko.
4. Instruksi Kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko.

Terdapat 3 (tiga) program yang telah dibentuk oleh Divisi Manajemen Risiko WIKA, meliputi:

1. Pelaksanaan pengukuran Maturitas Manajemen Risiko.
2. Peningkatan kompetensi PIC Risk di lingkungan WIKA Group
3. Workshop Manajemen Risiko.

WIKA mengukur tingkat kematangan penerapan sistem manajemen risiko menggunakan mekanisme Risk Maturity Level (RML). Evaluasi ini memberikan gambaran tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Perseroan, yang dikategorikan dalam 5 (lima) kategori dengan skala sebagai berikut:

By reducing business and operational risks, WIKA aims to achieve better sustainability and resilience in facing challenges in a dynamic business environment. This program is not only a strategic step but also a manifestation of the Company's commitment to good governance and integrated risk management as an integral part of its journey toward long-term success.

The Company continuously conducts business risk assessments to develop appropriate mitigation strategies. The implementation of risk management systems at the Company refers to policies established by Board of Directors and applies to WIKA Group. To ensure the structured implementation of risk management, the Risk Management Division, as the division overseeing risk management at WIKA Group, has developed:

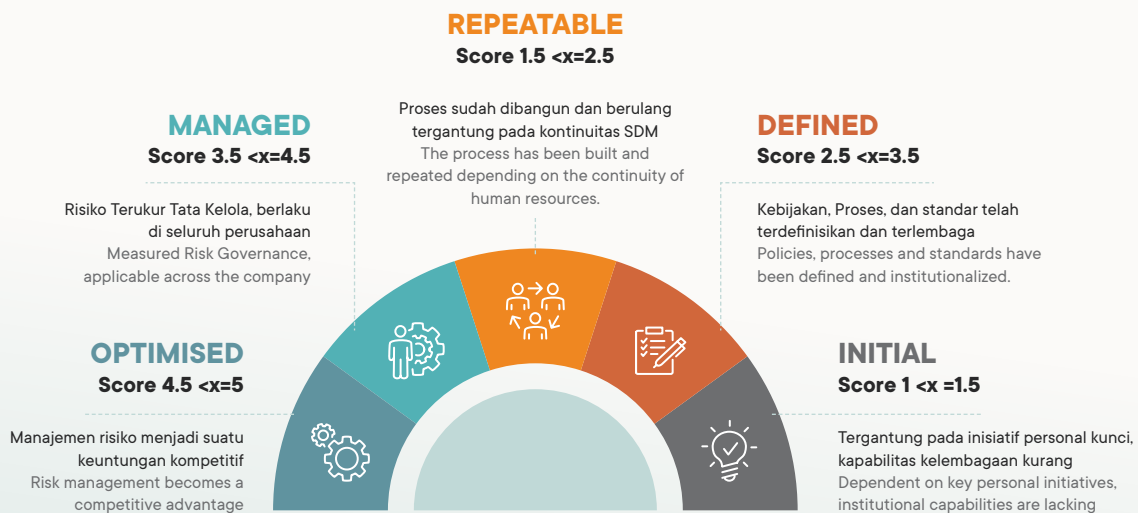
1. Risk Management Policy.
2. Risk Management System Guidelines.
3. Risk Management Procedures.
4. Work Instructions related to the implementation of Risk Management.

There are three (3) programs that have been established by WIKA's Risk Management Division, including:

1. Implementation of Risk Management Maturity Measurement.
2. Enhancing the competency of Risk PIC within WIKA Group.
3. Risk Management Workshops.

WIKA measures the maturity level of its risk management system using the Risk Maturity Level (RML) mechanism. This evaluation provides an overview of the maturity level of risk management implementation within the Company, which is categorized into five (5) levels with the following scale:

Gambar 14 Skala Risk Maturity Level (RML) [1]
Figure 14 Risk Maturity Level (RML) Scale [1]



1.6 IT/Digitalisasi

Dalam perusahaan konstruksi yang berfokus pada bidang infrastruktur dan EPC, sasaran strategis teknologi informasi (TI) menjadi kunci dalam menyelaraskan keunggulan teknologi dengan strategi bisnis perusahaan. Sasaran strategis TI yang efektif mencakup tiga aspek utama, yaitu: peningkatan kegunaan TI di lokasi proyek (*on-site*), kantor pusat (*off-site*), dan *back office*, serta penyelarasan sistem digital *backbone* dan operasional yang terintegrasi. Saat ini, terdapat tempat inisiatif strategis (Tabel 6) untuk mendukung 8 *stream* penyehatan WIKA, yang menjadikan TI sebagai *enabler* dalam membangun fondasi transformasi digital WIKA guna meningkatkan daya saing dan pencapaian strategi bisnis ke depan.

1.6 IT/Digitization

In a construction company focused on infrastructure and EPC, the strategic objectives of information technology (IT) play a key role in aligning technological excellence with the company's business strategy. Effective IT strategic objectives include three main aspects: enhancing the usability of IT on project sites (*on-site*), at the head office (*off-site*), and in the back office, as well as aligning the digital backbone systems with integrated operations. Currently, there are four strategic initiatives (Table 6) to support WIKA's eight revitalization streams, positioning IT as an enabler in building WIKA's digital transformation foundation to enhance competitiveness and achieve future business strategies.

Tabel 6 Target Inisiatif Strategis - IT / Digitalisasi
Table 6 Strategic Initiative Targets - IT/Digitization

Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target Target
6.1 Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak* 6.1 Integrated Governance of Parent Company and Subsidiaries*	Peningkatan akuntabilitas dan kemudahan pengendalian bisnis WIKA yang efisien Increasing accountability and ease of efficient WIKA business control
6.2 Integrasi IT Governance Induk dengan Anak Perusahaan 6.2 Integration of IT Governance of Parent Company with Subsidiaries	Terpenuhinya standar keandalan IT dan keamanan data induk dengan anak perusahaan Fulfillment of IT reliability standards and master data security with subsidiaries
6.3 Integrasi dan penguatan ERP terhadap semua platform pada back office, off-site, dan on-site 6.3 Integration and strengthening of ERP to all platforms in back office, off-site, and on-site	Meningkatkan efisiensi operasional, transparansi data, dan sinkronisasi proses bisnis di seluruh organisasi Increasing operational efficiency, data transparency, and business process synchronization across the organization
6.4 Implementasi <i>big data</i> dan pemanfaatan AI 6.4 Implementation of big data and utilization of AI	Meningkatkan efisiensi, akurasi keputusan, serta inovasi layanan guna memperkuat daya saing perusahaan Increasing efficiency, decision accuracy, and service innovation to strengthen the company's competitiveness
6.5 <i>Dual Control</i> (<i>Digital Invoicing</i> dan PO dalam SAP) 6.5 Dual Control (Digital Invoicing and PO in SAP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dokumen tagihan secara digital. 2. Informasi status dokumen tagihan tersedia secara waktu nyata (<i>realtime</i>) melalui platform W-Digi. 3. Proses validasi tagihan secara digital (<i>eSignature</i>) melalui platform W-Digi 4. Pengelolaan jurnal pembayaran di SAP dapat diperbaharui secara waktu nyata (<i>realtime</i>). 5. Informasi status tagihan dapat diakses oleh mitra (<i>penyedia barang dan jasa</i>). <ol style="list-style-type: none"> 1. Digital billing document management. 2. Billing document status information is available in real time through the W-Digi platform. 3. Digital billing validation process (<i>eSignature</i>) through the W-Digi platform 4. Payment journal management in SAP can be updated in real time. 5. Billing status information can be accessed by partners (goods and services providers).

Keterangan/Note:

*Bagian dari 8stream pada Rencana Penyehatan Keuangan WIKA

*Part of 8streams in WIKA's Financial Recovery Plan

Sebagai *enabler*, TI memfasilitasi peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui penerapan teknologi mutakhir. Dilokasi proyek, penggunaan teknologi seperti *Building Information Modeling* (BIM), sistem manajemen konstruksi berbasis *cloud*, serta integrasi data ERP dengan *Internet of Things* (IoT) dan perangkat atau sensor yang terhubung memungkinkan pemantauan dan pengelolaan proyek secara *real-time*. Hal ini juga meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Di kantor pusat, teknologi informasi mendukung analisis *big data* untuk perencanaan strategis dan manajemen proyek yang lebih efektif, sementara otomatisasi proses administratif di *back office* melalui sistem ERP meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan platform kolaborasi digital untuk memfasilitasi komunikasi antara semua pemangku kepentingan proyek.

As an enabler, IT facilitates improvements in efficiency and productivity through the implementation of cutting-edge technologies. On project sites, the use of technologies such as Building Information Modeling (BIM), cloud-based construction management systems, as well as the integration of ERP data with Internet of Things (IoT) and connected devices or sensors, enables real-time project monitoring and management. This also improves accuracy and speed in decision-making. At the head office, information technology supports big data analysis for strategic planning and more effective project management, while automation of administrative processes in the back office through ERP systems enhances operational efficiency and accuracy. Additionally, the company can leverage digital collaboration platforms to facilitate communication between all project stakeholders.



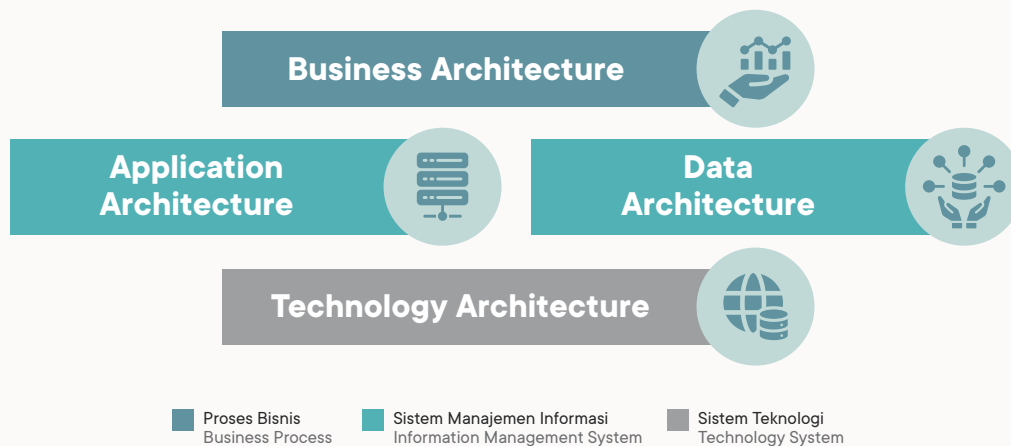
Dengan memanfaatkan teknologi informasi serta tata kelola dan digitalisasi yang terintegrasi pada setiap tahapan rantai nilai, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat siklus proyek, meningkatkan kualitas hasil kerja, serta memberikan layanan yang inovatif, efisien, dan berkualitas tinggi.

By utilizing information technology, along with integrated governance and digitization at every stage of the value chain, the company can improve operational efficiency, speed up project cycles, enhance work quality, and provide innovative, efficient, and high-quality services.

Arsitektur bisnis merupakan langkah awal dalam upaya meningkatkan kapabilitas IT (Gambar 15). Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan bahwa elemen-elemen lain dalam proses transformasi memiliki dasar yang kokoh yang mengintegrasikan keseluruhan sistem dari tiap fungsi. Transformasi digital proses bisnis tersebut direncanakan, dikembangkan, dan dikelola secara terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis serta mengoptimalkan produktivitas kinerja. Lingkupnya mencakup beberapa aspek kunci, termasuk model tipologi bisnis yang menggambarkan cakupan bisnis utama dan wilayah operasional, model proses bisnis yang merinci struktur proses manajemen dan operasional, model alur kewenangan yang menjelaskan proses pengambilan keputusan dan pengendalian sesuai dengan struktur organisasi, serta model kompetensi yang menguraikan kemampuan sumber daya manusia yang diperlukan dalam melaksanakan transformasi industri. Dengan merinci setiap aspek dalam Arsitektur bisnis, WIKA bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi transformasi industri, sehingga setiap langkah yang diambil secara terpadu mendukung visi dan misi perusahaan.

Business architecture is the first step in improving IT capabilities (Figure 15). This approach is applied to ensure that other elements in the transformation process have a solid foundation that integrates the entire system of each function. The digital transformation of business processes is planned, developed, and managed in an integrated manner with the aim of improving process efficiency and optimizing performance productivity. Its scope includes several key aspects, such as the business typology model that outlines the main business areas and operational regions, the business process model that details the management and operational process structure, the authority flow model that describes the decision-making and control processes in accordance with the organizational structure, and the competency model that outlines the human resource capabilities required for industry transformation. By detailing each aspect in the Business Architecture, WIKA aims to build a strong foundation for industry transformation, ensuring that every step taken is integrated to support the company's vision and mission.

Gambar 15 Business Architecture
Figure 15 Business Architecture



Sementara itu, pengembangan kapabilitas digital akan difokuskan pada peningkatan kompetensi pegawai, transformasi proses bisnis, dan penguatan infrastruktur digital. Upaya peningkatan kompetensi pegawai dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan keterampilan digital yang relevan, termasuk pemahaman terhadap teknologi terbaru, perangkat analitik, dan metodologi manajemen proyek. Program pelatihan yang dirancang harus bersifat komprehensif, mencakup pelatihan internal, pembelajaran daring (*e-learning*), serta sertifikasi, yang disertai dengan penciptaan budaya pembelajaran berkelanjutan yang mendorong pegawai untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dengan demikian, program pelatihan dan pengembangan keahlian digital ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesiapan pegawai dalam beradaptasi secara cepat terhadap teknologi baru dan metode kerja modern.

Meanwhile, the development of digital capabilities will focus on improving employee competencies, transforming business processes, and strengthening digital infrastructure. Efforts to enhance employee competencies begin with identifying the relevant digital skill needs, including understanding the latest technologies, analytical tools, and project management methodologies. The training programs designed must be comprehensive, including internal training, e-learning, and certifications, accompanied by the creation of a continuous learning culture that encourages employees to continually develop and adapt to technological changes. Thus, this training and digital skill development program is expected to increase productivity and readiness for employees to quickly adapt to new technologies and modern working methods.

Selain itu, pengembangan budaya inovasi yang dinamis akan mendorong kreativitas dan eksperimen, sehingga menghasilkan ide-ide baru yang berpotensi menciptakan keunggulan kompetitif, serta memastikan perusahaan tetap berada di garis depan industri konstruksi, dengan kemampuan beradaptasi cepat terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pasar global yang dinamis.

Transformasi proses bisnis memerlukan analisis mendalam terhadap proses yang ada untuk mengidentifikasi potensi otomatisasi dan peningkatan efisiensi. Penetapan tujuan transformasi yang jelas, seperti pengurangan biaya atau peningkatan pengalaman pelanggan, menjadi kunci dalam memilih dan menerapkan teknologi baru yang mendukung tujuan tersebut. Dalam proses ini, manajemen perubahan yang efektif sangat penting untuk memastikan pegawai mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap hasil transformasi juga harus dilakukan untuk mengukur dampaknya terhadap kinerja bisnis, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Penguatan dan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan skalabilitas guna mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan, dengan memanfaatkan solusi berbasis *cloud* yang menawarkan fleksibilitas dan kapasitas yang lebih besar. Selain itu, dalam transformasi digital, keamanan siber harus menjadi prioritas utama untuk melindungi data dan informasi sensitif perusahaan. Implementasi strategi keamanan siber yang komprehensif, termasuk enkripsi data, sistem deteksi ancaman, strategi pemulihan bencana, dan kontrol akses yang ketat, akan menjaga integritas dan kerahasiaan informasi di lingkungan digital yang semakin kompleks.

Kepemimpinan dalam penerapan teknologi strategis global melibatkan adopsi teknologi mutakhir sesuai dengan standar internasional. Pemenuhan INDI 4.0 memberikan peluang besar untuk otomatisasi dan digitalisasi proses yang memanfaatkan teknologi IoT (*Internet of Things*), *artificial intelligence* serta *big data analytic* sehingga perusahaan akan mampu mengoptimalkan pengelolaan data secara *real-time*, meningkatkan kemampuan untuk *predictive analysis*, dan membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, dalam penerapan teknologi global diperlukan kerja sama strategis dengan penyedia teknologi internasional, memanfaatkan inovasi terbaru dan praktik terbaik untuk memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi proyek-proyek besar dan kompleks di pasar global.

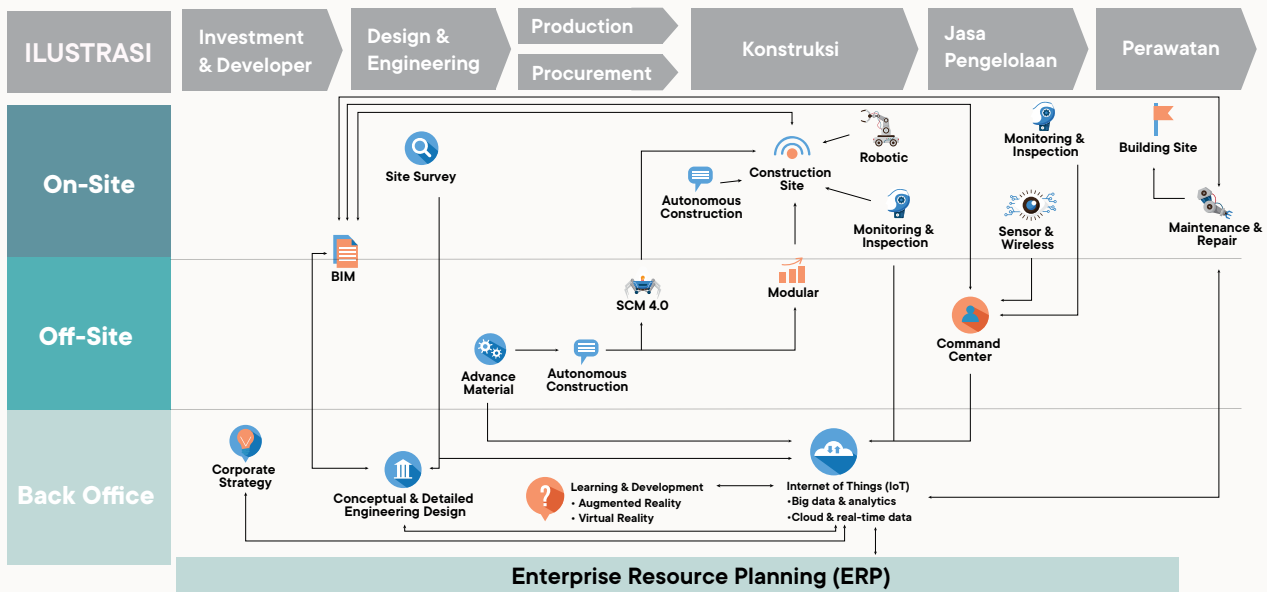
In addition, the development of a dynamic innovation culture will encourage creativity and experimentation, leading to new ideas that have the potential to create competitive advantages, while ensuring the company remains at the forefront of the construction industry, with the ability to quickly adapt to technological changes and the dynamic demands of the global market.

Business process transformation requires a deep analysis of existing processes to identify potential automation and efficiency improvements. Setting clear transformation goals, such as cost reduction or enhanced customer experience, is key in selecting and implementing new technologies that support those objectives. In this process, effective change management is crucial to ensure that employees are able to adapt to the changes. Regular monitoring and evaluation of transformation outcomes must also be conducted to measure its impact on business performance and make necessary adjustments.

Strengthening and building infrastructure must consider scalability to support future business growth, by leveraging cloud-based solutions that offer greater flexibility and capacity. Additionally, in digital transformation, cybersecurity must be a top priority to protect the company's sensitive data and information. Implementing a comprehensive cybersecurity strategy, including data encryption, threat detection systems, disaster recovery strategies, and strict access controls, will maintain the integrity and confidentiality of information in an increasingly complex digital environment.

Leadership in the adoption of global strategic technologies involves adopting cutting-edge technologies in line with international standards. Meeting the requirements of Industry 4.0 presents a significant opportunity for automation and digitalization of processes that leverage IoT (*Internet of Things*), artificial intelligence, and big data analytics, enabling the company to optimize real-time data management, enhance predictive analysis capabilities, and make faster and more accurate decisions. Furthermore, in the application of global technologies, strategic cooperation with international technology providers is necessary, utilizing the latest innovations and best practices to strengthen the company's ability to tackle large and complex projects in the global market.

Gambar 16 Value Chain Digitalization
 Figure 16 Value Chain Digitalization



1.7 Human Capital Management (Insan WIKA berkarakter AKHLAK)

Human Capital Management (Insan WIKA berkarakter AKHLAK) memiliki sasaran strategis berupa peningkatan kapabilitas (kompeten, adaptif, kolaboratif) talent sesuai dengan pengembangan bisnis, serta penguatan budaya (amanah, loyal, dan harmonis) perusahaan. Terdapat 4 inisiatif strategis untuk mencapai sasaran strategis tersebut seperti pada Tabel 7. Enabler ini akan mendukung secara keseluruhan kedelapan stream penyehatan WIKA. Peningkatan kapabilitas (kompeten, adaptif, kolaboratif) talent sesuai dengan pengembangan bisnis serta penguatan budaya (amanah, loyal, dan harmonis) perusahaan. Penguatan digital talent dan budaya sadar risiko merupakan prioritas untuk mendukung kesuksesan enabler lainnya.

Strategi Human Capital Management pada perusahaan konstruksi seperti WIKA menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter AKHLAK, sebuah akronim yang mencakup nilai-nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Strategi ini bertujuan untuk membangun tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang tinggi, tetapi juga integritas dan moral yang kuat, yang diperlukan untuk menghadapi tantangan industri konstruksi yang dinamis dan penuh risiko. Dengan menanamkan nilai-nilai AKHLAK, perusahaan berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa setiap karyawan berkontribusi secara optimal terhadap tujuan dan keberlanjutan perusahaan. Pendekatan ini juga melibatkan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, evaluasi kinerja berbasis nilai, serta inisiatif yang mendorong kesejahteraan dan keterlibatan karyawan.

1.7 Human Capital Management (WIKA People with AKHLAK Character)

Human Capital Management (WIKA People with AKHLAK Character) has strategic objectives aimed at increasing the capabilities (competent, adaptive, collaborative) of talent in line with business development, as well as strengthening the company culture (trustworthy, loyal, and harmonious). There are 4 strategic initiatives to achieve these objectives as outlined in Table 7. This enabler will overall support the eight streams of WIKA's restructuring. The improvement of talent capabilities (competent, adaptive, collaborative) in line with business development and the strengthening of corporate culture (trustworthy, loyal, and harmonious) will be prioritized, with a focus on digital talent and a culture of risk awareness to support the success of other enablers.

Human Capital Management strategy in a construction company like WIKA emphasizes the development of human resources with AKHLAK character, an acronym that encompasses the values of Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative. This strategy aims to build a workforce that not only has high technical skills but also strong integrity and ethics, necessary to face the dynamic and high-risk challenges of the construction industry. By instilling AKHLAK values, the company aims to create a positive work environment, increase productivity, and ensure that each employee contributes optimally to the company's goals and sustainability. This approach also involves continuous training and development programs, performance evaluations based on values, and initiatives that encourage employee well-being and engagement.

Tabel 7 Target Inisiatif Strategis - Human Capital Management (Insan WIKA berkarakter AKHLAK)
Table 7: Strategic Initiatives Target - Human Capital Management (WIKa People with AKHLAK Character)

Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Target
7.1 Transformasi pengelolaan <i>knowledge management</i> WIKa 7.1 Transformation of WIKa's <i>knowledge management</i>	Meningkatkan kualitas pekerjaan dengan memanfaatkan <i>knowledge management</i> Improving the quality of work by utilizing <i>knowledge management</i>
7.2 Pengembangan Profil Kompetensi <i>talent</i> 7.2 Development of <i>Talent Competency Profile</i>	Memenuhi kompetensi <i>talent</i> yang sesuai dengan posisinya Meeting <i>talent</i> competencies that match their positions
7.3 <i>Change Leader</i>	terciptanya transformasi bisnis dan program perbaikan budaya perusahaan yang meningkatkan kemampuan dan citra perusahaan Creating business transformation and corporate culture improvement programs that improve the company's capabilities and image
7.4 Transformasi Program Pengembangan Pegawai tersistem 7.4 Transformation of Systematic Employee Development Program	integrasi aksesibilitas pengetahuan karyawan secara <i>realtime</i> Integrating employee knowledge accessibility in real time

Keterangan/Note:
*Bagian dari 8 stream pada Rencana Penyehatan Keuangan WIKa
*Part of 8 streams in WIKa's Financial Recovery Plan

Program untuk meningkatkan maturitas *Human Capital* (HC) dalam suatu perusahaan, yang terbagi menjadi empat tingkatan maturitas (lihat Gambar 17). Tingkatan ini mencerminkan sejauh mana fungsi *Human Capital* telah terintegrasi dengan bisnis dan sistem perusahaan. Dari keempat tingkatan tersebut, yang tertinggi adalah tingkatan di mana *Human Capital* terintegrasi secara sempurna dengan bisnis dan sistem perusahaan.

1. Tingkatan 1 - Maturitas HC Awal

Pada tingkatan ini, fungsi *Human Capital* mungkin masih beroperasi secara terpisah dan tidak sepenuhnya terintegrasi dengan strategi bisnis dan sistem perusahaan.

2. Tingkatan 2 - Peningkatan Integrasi HC

Terdapat upaya untuk meningkatkan integrasi *Human Capital* dengan bisnis dan sistem perusahaan. Beberapa aspek seperti kebijakan dan prosedur SDM dapat sudah terlihat terkait dengan tujuan bisnis.

3. Tingkatan 3 - Integrasi HC yang Signifikan:

Human Capital telah mengalami integrasi yang lebih signifikan dengan bisnis dan sistem perusahaan. Beberapa proses dan kebijakan SDM mungkin sudah mendukung tujuan bisnis dengan lebih baik.

4. Tingkatan 4 - HC Terintegrasi Sempurna:

Pada tingkatan ini, *Human Capital* terintegrasi secara sempurna dengan bisnis dan sistem perusahaan. Ini mencakup aspek-aspek seperti kebijakan SDM yang mendukung strategi bisnis, sistem otomatisasi yang efisien, serta keterlibatan HR dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Tingkatan keempat menunjukkan bahwa fungsi *Human Capital* tidak hanya berperan sebagai pendukung administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memiliki dampak signifikan pada pencapaian tujuan bisnis. Integrasi yang sempurna memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia secara holistik. Program ini bertujuan untuk membawa perusahaan mencapai tingkatan maturitas HC yang paling tinggi, menciptakan sinergi yang kuat antara keberhasilan SDM dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan.

Programs to increase the maturity of *Human Capital* (HC) within a company, which are divided into four levels of maturity (see Figure 17). These levels reflect the extent to which the *Human Capital* function has been integrated with the company's business and systems. Of these four levels, the highest is the level where *Human Capital* is fully integrated with the company's business and systems.

1. Level 1 - Initial HC Maturity

At this level, the *Human Capital* function may still operate separately and not fully integrated with the company's business strategy and systems.

2. Level 2 - Increased HC Integration

Efforts are made to increase the integration of *Human Capital* with the company's business and systems. Some aspects, such as HC policies and procedures, may already be aligned with business goals.

3. Level 3 - Significant HC Integration

Human Capital has undergone more significant integration with the company's business and systems. Some HC processes and policies may now better support business objectives.

4. Level 4 - Fully Integrated HC

At this level, *Human Capital* is fully integrated with the company's business and company. This includes aspects such as HC policies that support business strategies, efficient automation systems, and HC involvement in strategic business decision-making.

The fourth level indicates that the *Human Capital* function not only plays an administrative support role but also acts as a strategic partner with a significant impact on achieving business goals. Full integration allows the company to respond quickly to changes, enhance productivity, and optimize human resources' potential holistically. This program aims to bring the company to the highest level of HC maturity, creating strong synergy between the success of human capital and overall business success.

Gambar 17 Human Capital Maturity Models
Figure 17 Human Capital Maturity Models



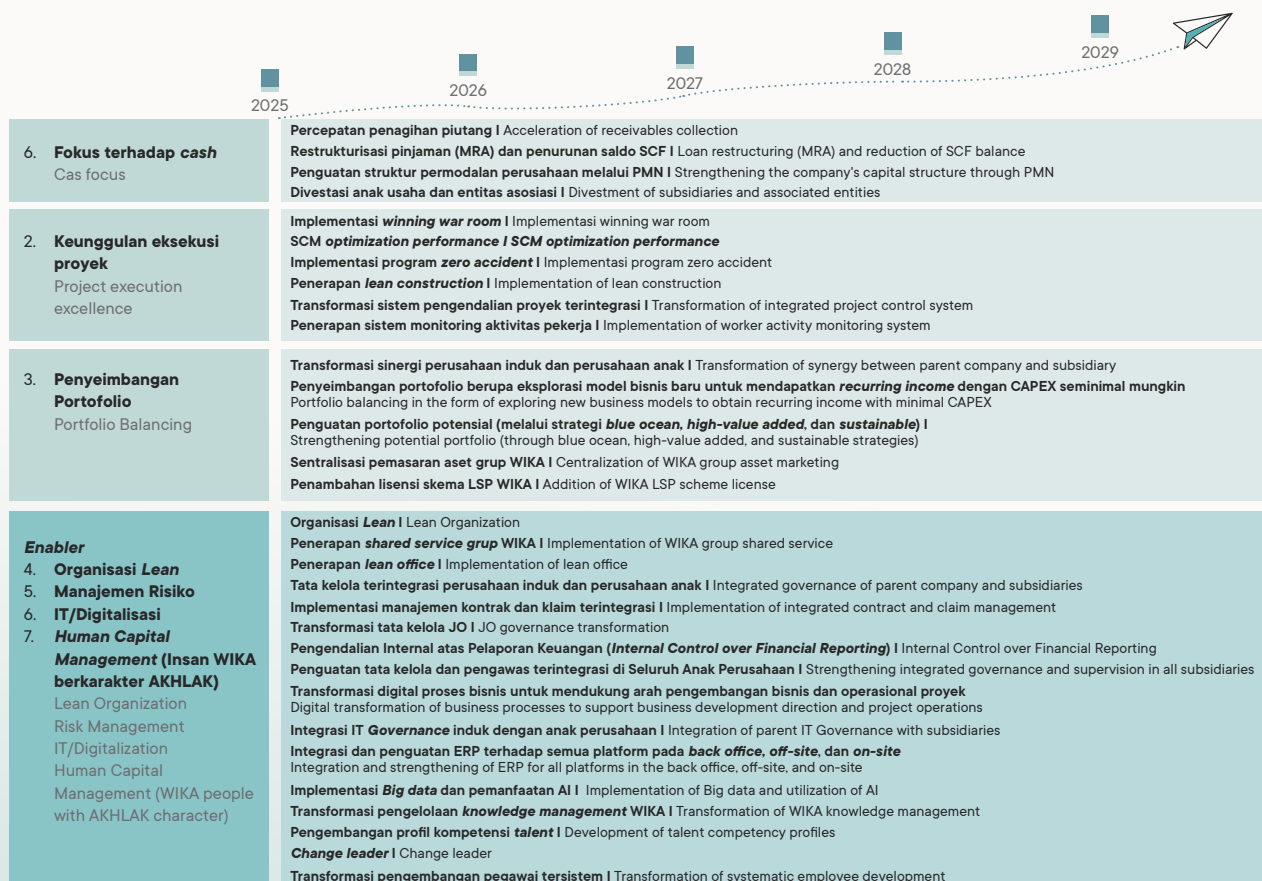
2. Strategy Roadmap

Berdasarkan *strategy house* yang telah disusun, sebagai mana digambarkan pada Gambar 18, maka, selanjutnya dilakukan rangkaian penjelasan dari setiap inisiatif strategi beserta lama waktu yang ditargetkan. Diharapkan keseluruhan inisiatif dapat dijalankan secara paralel dari sejak awal tahun 2025 dan secara dilakukan *monitoring* berkala untuk *consinuous improvement* perusahaan. Berikut merupakan target waktu beserta inisiatif strategi yang disusun oleh perusahaan:

2. Strategy Roadmap

Based on the *strategy house* that has been developed, as shown in Figure 18, the next step is to provide an explanation of each strategic initiative along with the targeted timeline. It is expected that all initiatives can be implemented in parallel starting from the beginning of 2025, with regular monitoring conducted for continuous improvement of the company. Below is the timeline and strategic initiatives developed by the Company:

Gambar 18 Roadmap RJPP WIKA Induk Tahun 2025–2029
Figure 18 Roadmap of WIKA Parent's RJPP for 2025–2029



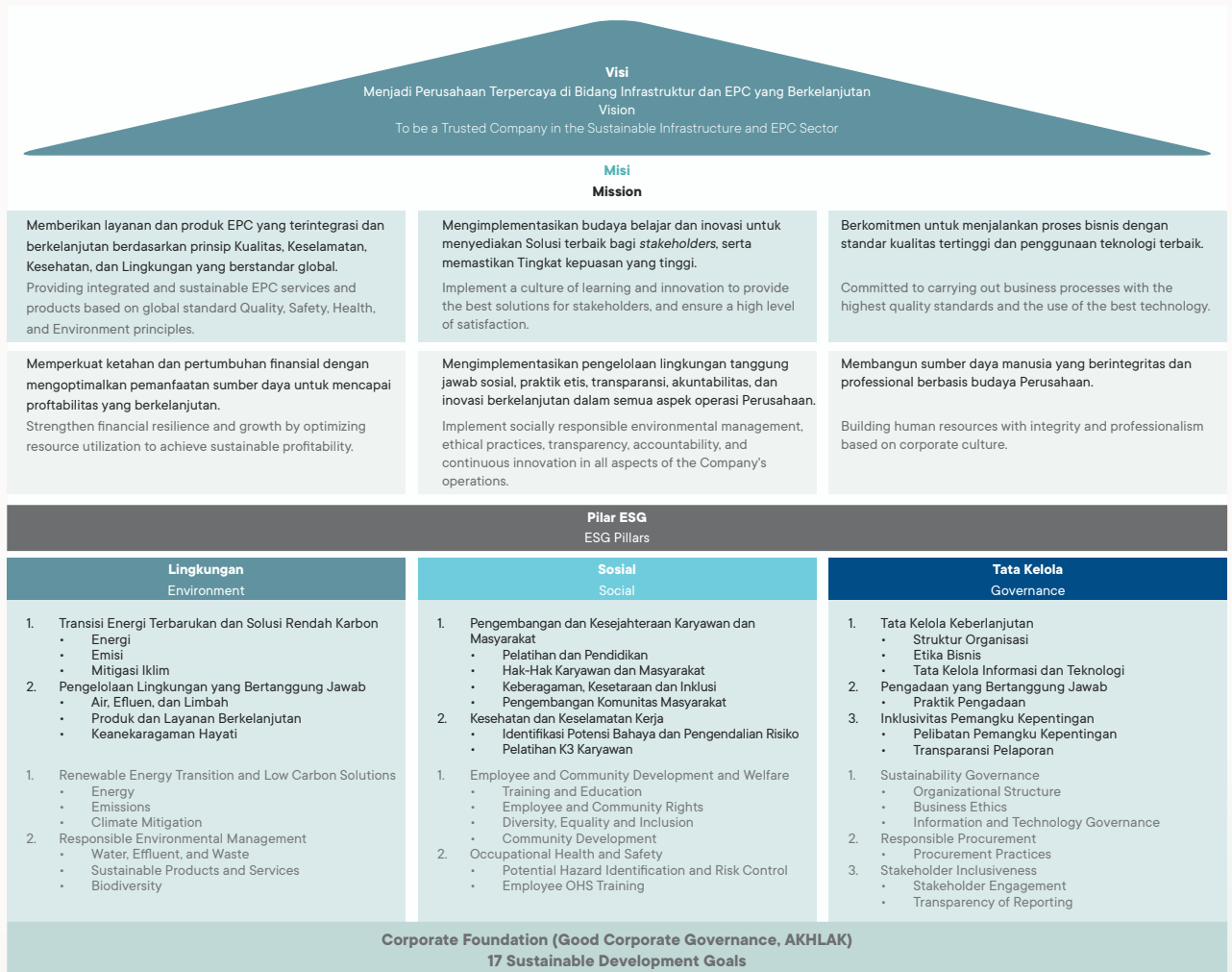
IMPLEMENTASI VISI & MISI MELALUI STRATEGI KEBERLANJUTAN DAN TATA KELOLA

Visi WIKA, yaitu " Menjadi Perusahaan Terpercaya di Bidang Infrastruktur dan EPC yang Berkelanjutan " menegaskan komitmen WIKA dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, dengan memastikan bahwa seluruh operasional perusahaan mendukung prinsip keberlanjutan. Komitmen ini juga tercermin dalam misi perusahaan, yang menekankan pada penyediaan layanan dan produk EPC yang terintegrasi dan berkelanjutan, berbasis standar global dalam aspek kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, WIKA terus mendorong budaya inovasi dan pembelajaran, memastikan kepuasan pemangku kepentingan, serta menerapkan standar etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses bisnisnya.

IMPLEMENTATION OF VISION & MISSION THROUGH SUSTAINABILITY AND GOVERNANCE STRATEGY

WIKA's vision, which is to become The Trusted and Sustainable Integrated Infrastructure and EPC Services Company, reaffirms WIKA's commitment to running a sustainable business by ensuring that all Company operations support sustainability principles. This commitment is also reflected in the Company's mission, which emphasizes the provision of integrated and sustainable EPC services and products, based on global standards in quality, safety, health, and the environment. In addition, WIKA continues to promote a culture of innovation and learning, ensuring stakeholder satisfaction, and applying ethical standards, transparency, and accountability in all its business processes.

ESG Sustainability House



Sebagai wujud nyata dari visi dan misi tersebut, WIKA mengembangkan *House of Sustainability* sebagai kerangka strategis dalam mengimplementasikan keberlanjutan di seluruh aspek bisnisnya. Kerangka ini menjadi panduan bagi perusahaan dalam mengelola aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) secara sistematis dan terintegrasi, guna memastikan bahwa setiap aktivitas operasional memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan

As a concrete manifestation of the vision and mission, WIKA has developed the House of Sustainability as a strategic framework in implementing sustainability in all aspects of its business. This framework serves as a guide for the Company in managing environmental, social, and governance (ESG) aspects in a systematic and integrated manner, to ensure that every operational activity bring positive impacts for the entire stakeholders.

PERAN UNIT KERJA DALAM IMPLEMENTASI ESG THE ROLE OF WORK UNITS IN ESG IMPLEMENTATION

<p>Corsec</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengelola komunikasi eksternal terkait ESG, termasuk publikasi keberlanjutan pada website dan media sosial. Menyusun <i>Sustainability Report</i> sesuai standar global (TCFD, IFRS S1 & S2). Mengukur dampak kegiatan sosial masyarakat melalui SROI dan/atau IKM. Memantau pelaksanaan ESG terkait publikasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai ISO 26000. Manage external communications related to ESG, including sustainability publications on websites and social media. Prepare Sustainability Reports according to global standards (TCFD, IFRS S1 & S2). Measure the impact of social activities on the community through SROI and/or IKM. Monitor the implementation of ESG related to publications and community empowerment according to ISO 26000. 	<p>Internal Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ESG dan implementasi standar keberlanjutan. Mengawasi penerapan tata kelola ESG di seluruh unit kerja. Mengevaluasi efektivitas program ESG dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ensure compliance with ESG policies and implementation of sustainability standards. Monitor the implementation of ESG governance across all work units. Evaluate the effectiveness of ESG programs and provide recommendations for improvement. 	<p>Finance</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan diversifikasi sumber pendanaan berkelanjutan. Memantau pelaksanaan ESG terkait penerapan keuangan berkelanjutan dalam proyek-proyek perusahaan. Melaporkan kinerja keuangan terkait proyek-proyek berkelanjutan. Conduct sustainable funding source diversification planning. Monitor ESG implementation related to sustainable finance implementation in company projects. Report financial performance related to sustainable projects. 	<p>SCM</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengawasi pelaksanaan ESG terkait isu <i>green procurement</i>. Melakukan penilaian dan pembinaan terhadap subkontraktor dan/atau <i>supplier</i> untuk memastikan penerapan <i>green procurement</i>. Menyusun klasifikasi <i>green product</i>. Monitor the implementation of ESG related to green procurement issues. Conduct assessments and coaching of subcontractors and/or suppliers to ensure the implementation of green procurement. Prepare green product classifications.
--	---	--	---

<p>HC</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi ESG bagi karyawan. Memonitor pelaksanaan ESG terkait pengelolaan dan pemberdayaan karyawan sesuai ISO 30414:2018. Menurunkan <i>turnover rate</i> pegawai melalui program pelatihan, pengembangan, dan <i>well-being</i>. Mengelola keterwakilan perempuan di level manajemen. Conduct ESG training and certification for employees. Monitor ESG implementation related to employee management and empowerment according to ISO 30414:2018. Reduce employee turnover rate through training, development, and well-being programs. Manage female representation at the management level. 	<p>IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan memelihara sistem informasi yang digunakan untuk pelaporan dan pemantauan kinerja ESG. Mengawasi dan melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data terkait ESG. Develop and maintain information systems used for ESG performance reporting and monitoring. Monitor and conduct regular internal audits to ensure compliance with information security policies. Maintain the security and confidentiality of ESG-related data. 	<p>Risk Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kerangka manajemen risiko berbasis ESG. Menganalisis dampak risiko iklim dan strategi adaptasi-mitigasi perubahan iklim di seluruh SBU. Memasukkan risiko ESG ke dalam matriks manajemen risiko korporasi. Develop an ESG-based risk management framework. Analyze the impact of climate risk and climate change adaptation-mitigation strategies across SBUs. Incorporate ESG risks into the corporate risk management matrix. 	<p>Legal</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan seluruh regulasi terkait ESG sesuai dengan regulasi nasional dan global. Memonitor pelaksanaan ESG terkait tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Mendukung penyelesaian temuan audit dan laporan <i>whistleblowing</i>. Ensure all ESG regulations are in accordance with national and global regulations. Monitor the implementation of ESG related to corporate governance in accordance with applicable legal principles. Support the resolution of audit findings and whistleblowing reports.
--	---	--	--

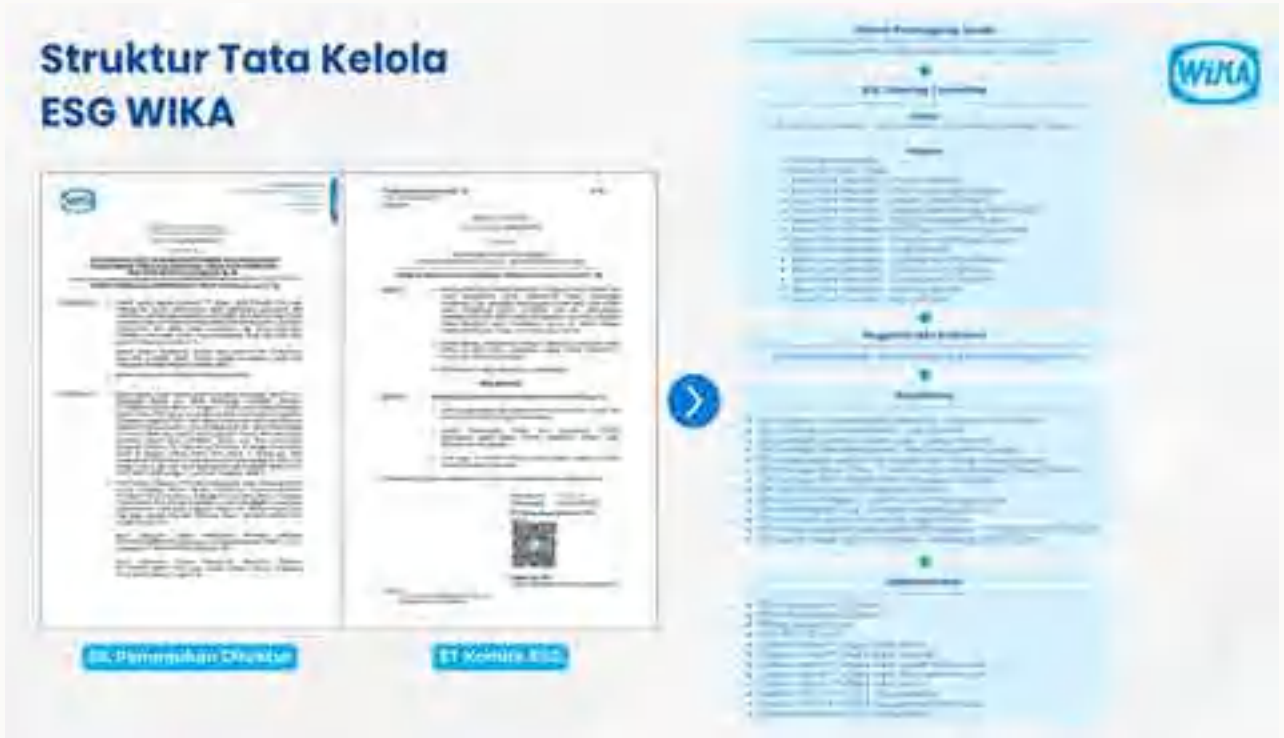
<p>CQHSE</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengawasi implementasi sistem manajemen K3L sesuai ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018. Mengelola penanganan limbah cair dan padat, pengendalian pencemaran udara, dan kebisingan. Melakukan inventarisasi dan pelaporan emisi GRK. Melakukan penanganan risiko iklim melalui pengurangan emisi karbon. Supervise the implementation of the HSE management system according to ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018. Manage the handling of liquid and solid waste, control of air pollution, and noise. Conduct inventory and reporting of GHG emissions. Handle climate risks through carbon emission reduction. 	<p>Corp. Marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> Memasarkan produk dan/atau layanan berbasis ESG kepada klien ataupun investor. Menjalin kemitraan strategis dengan mitra bisnis berlandaskan <i>creating shared value</i> (CSV). Meningkatkan branding WIKA sebagai <i>pioneer</i> dan <i>leader</i> implementasi ESG di sektor konstruksi. Marketing ESG-based products and/or services to clients or investors. Establishing strategic partnerships with business partners based on creating shared value (CSV). Improving WIKA's branding as a pioneer and leader in ESG implementation in the construction sector. 	<p>TBSD</p> <ul style="list-style-type: none"> Merancang strategi dan <i>roadmap</i> ESG. Menetapkan KPI implementasi ESG Perusahaan. Memonitor pelaksanaan ESG yang diimplementasikan oleh seluruh unit kerja. Memastikan sistem monitoring dan peningkatan skor ESG. Mengembangkan sistem monitoring ESG berbasis digitalisasi. Menyusun peta jalan dekarbonisasi untuk mencapai target NZE. Design ESG strategy and roadmap. Determine KPI for the Company's ESG implementation. Monitor the implementation of ESG by all work units. Ensure the monitoring system and score improvement of ESG. Develop a digital-based ESG monitoring system. Develop a decarbonization roadmap to achieve NZE targets.
--	---	---

Divisi Operasi/Operations Division

<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan konstruksi hijau dan efisiensi energi, di antaranya dengan mengadopsi prinsip <i>Lean Construction</i>. Mendorong pengurangan emisi karbon dari proyek konstruksi. Mengoptimalkan konsep <i>circular economy</i> dalam konstruksi. Memastikan pemenuhan standar ESG dalam desain dan eksekusi proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> Applying green construction and energy efficiency, including by adopting the principles of <i>Lean Construction</i>. Encouraging carbon emission reduction from construction projects. Optimizing the concept of circular economy in construction. Ensuring compliance with ESG standards in project design and execution. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #e0e0e0;">Infra 1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #e0e0e0;">Infra 2</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #e0e0e0;">EPCC</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #e0e0e0;">Building</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #e0e0e0;">Asset Management</div> </div>
---	---

Untuk mendukung visi keberlanjutan ini, WIKA memastikan bahwa setiap divisi memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaannya. Setiap fungsi dalam perusahaan diarahkan untuk berkontribusi dalam pencapaian target keberlanjutan, baik dalam aspek efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, maupun implementasi tata kelola yang berlandaskan prinsip integritas dan transparansi.

To support this sustainability vision, WIKA ensures that each division has a significant role in its implementation. Each function in the Company is directed to contribute to achieving sustainability targets, both in terms of energy efficiency, carbon emission reduction, compliance with environmental regulations, and implementation of governance based on the principles of integrity and transparency.



Dalam memastikan akuntabilitas implementasi visi keberlanjutan, WIKA telah menunjuk Direktur SDM & Transformasi sebagai Direktur yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan aspek keberlanjutan di perusahaan. Direktur ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan inisiatif keberlanjutan yang dijalankan oleh perusahaan sejalan dengan standar global, regulasi nasional, serta ekspektasi pemangku kepentingan.

To ensure the accountability of the sustainability vision implementation, WIKA has appointed the Director of HC & Transformation as the director directly responsible for managing sustainability aspects within the Company. This director plays a strategic role in ensuring that all policies, programs, and sustainability initiatives undertaken by the Company align with global standards, national regulations, and stakeholder expectations.

Sebagai bentuk penguatan tata kelola keberlanjutan, Direktur SDM & Transformasi ini juga didukung oleh Komite ESG, yang beranggotakan para pemimpin lintas divisi yang memiliki keahlian di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola. Komite ESG bertugas untuk merumuskan kebijakan keberlanjutan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tren global, memastikan implementasi yang konsisten di seluruh lini operasional, serta melakukan evaluasi berkala terhadap capaian keberlanjutan perusahaan. Selain itu, komite ini juga berperan dalam memberikan rekomendasi strategis kepada manajemen untuk mengoptimalkan kinerja ESG perusahaan.

As part of sustainability governance strengthening, the Director of HC & Transformation is also supported by the ESG Committee, which consists of leaders from various divisions with expertise in environmental, social, and governance sector. The ESG Committee is tasked with formulating sustainability policies that meet business needs and global trends, ensuring consistent implementation across all operational lines, and conducting regular evaluations of the Company's sustainability achievements. Furthermore, the committee plays a role in providing strategic recommendations to management to optimize the Company's ESG performance.

Dengan adanya struktur ini, WIKA memastikan bahwa seluruh inisiatif keberlanjutan dijalankan secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Tidak hanya itu, pendekatan ini juga memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi dan ekspektasi global terhadap aspek ESG, meningkatkan daya saing perusahaan, serta memperkuat reputasi WIKA sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

With this structure in place, WIKA ensures that all sustainability initiatives are carried out systematically, measurably, and accountably. Moreover, this approach also enables the Company to adapt to regulatory changes and global expectations regarding ESG aspects, enhancing the Company's competitiveness, and strengthening WIKA's reputation as a responsible and sustainability-oriented company.



BUDAYA PERUSAHAAN

WIKA menyadari pentingnya penerapan budaya perusahaan karena dapat mendorong kinerja Perseroan secara signifikan. WIKA senantiasa memastikan bahwa budaya kerja perusahaan tetap relevan dengan lingkungan eksternal dan ekosistem bisnis yang dinamis dan berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Budaya Perseroan saat ini adalah AKHLAK yang secara berurutan merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta diikuti dengan penjelasan panduan perilaku, *framework*, dan tahapan implementasi AKHLAK sebagai fondasi dari budaya perusahaan Perseroan.

CORPORATE CULTURE

WIKA recognizes the importance of implementing a corporate culture as it can significantly boost the Company's performance. The Company ensures that the corporate culture remains relevant to the external environment and the dynamic and ever-changing business ecosystem in line with the developments in time and technology. As a State-Owned Enterprise, the current corporate culture of the Company is defined by the acronym AKHLAK, which sequentially stands for Amanah (Trustworthy), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal (Loyal), Adaptif (Adaptive), and Kolaboratif (Collaborative). This is followed by an explanation of behavioral guidelines, *framework*, and the stages of implementing AKHLAK as the foundation of the Company's corporate culture.

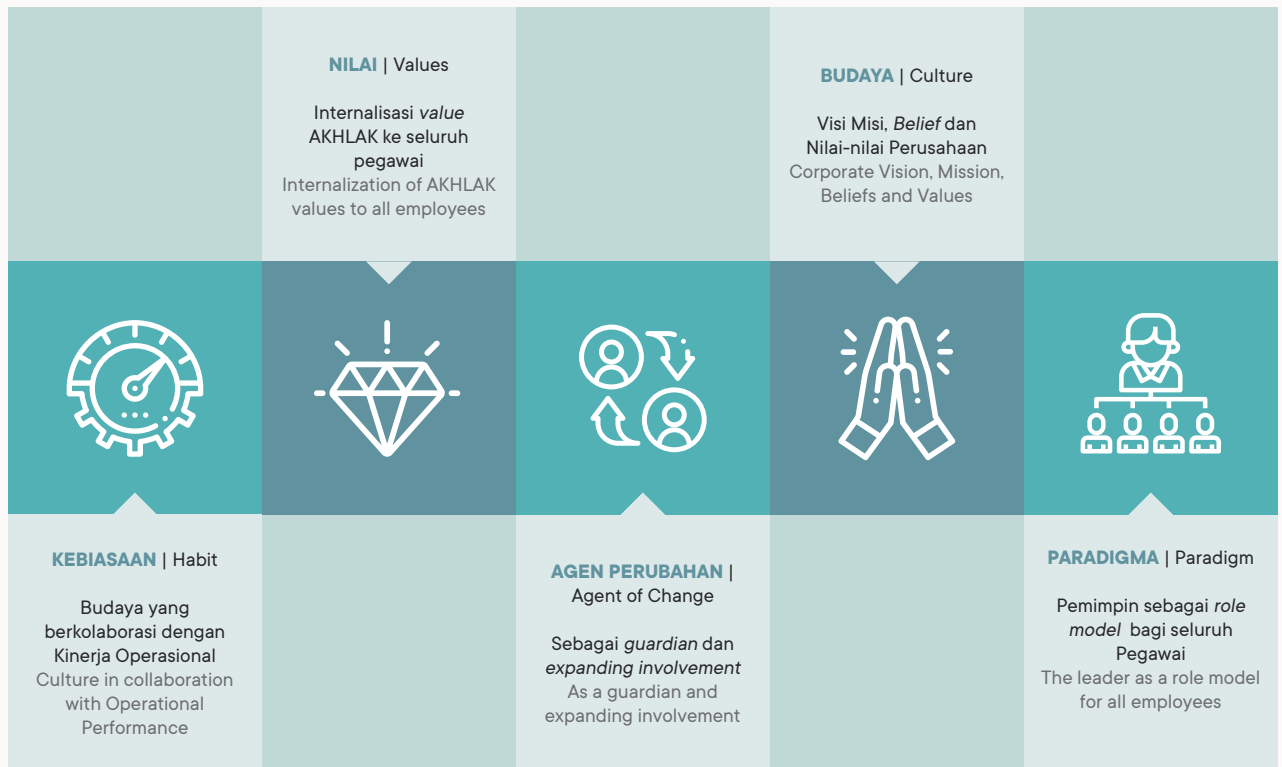



PANDUAN PERILAKU “AKHLAK”
“AKHLAK” BEHAVIORAL GUIDANCE

Nilai Inti Core Values	Kalimat Afirmatif Affirmative Sentence	Kata Kunci Keywords	Panduan Perilaku Behavioral Guidance
Amanah Trustworthy	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan Uphold the trust given	<ul style="list-style-type: none"> Integritas Tulus Konsisten Dapat dipercaya Integrity Sincerity Consistent Can be trusted 	Memenuhi janji dan komitmen Fulfill promises and commitments
			Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan Responsible for the tasks, decisions, and actions performed
Kompeten Competent	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continue to learn and develop capabilities	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja terbaik Sukses Keberhasilan Learning agility Ahli di bidangnya Best performance Success Success Learning agility Experts in their fields 	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Improve self-competence to respond to ever-changing challenges
			Membantu orang lain belajar Help others learn
Harmonis Harmonious	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan Mutual care and respect for differences	<ul style="list-style-type: none"> Peduli (<i>caring</i>) Perbedaan (<i>diversity</i>) Caring Diversity 	Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Respect everyone regardless of their background
			Suka menolong orang lain Like to help others
Loyal Loyal	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen Dedikasi (rela berkorban) Kontribusi Commitment Dedication (self-sacrificing) Contribution 	Membangun lingkungan kerja yang kondusif Build a conducive work environment
			Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara Maintain the good name of fellow employees, leaders, BUMN, and the State
Adaptif Adaptive	Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing changes	<ul style="list-style-type: none"> Inovasi Antusias terhadap perubahan Proaktif Innovation Enthusiastic about change Proactive 	Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar Willing to sacrifice to achieve a greater goal
			Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika Obey the leadership as long as it is not against the law and ethics
Kolaboratif Collaborative	Kami membangun kerja sama yang sinergis Build synergistic cooperation	<ul style="list-style-type: none"> Kesediaan bekerja sama Sinergi untuk hasil yang lebih baik Willingness to cooperate Synergy for better results 	Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik Quickly adjust to be better
			Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi Continuously make improvements following technological developments
Kolaboratif Collaborative	Kami membangun kerja sama yang sinergis Build synergistic cooperation	<ul style="list-style-type: none"> Kesediaan bekerja sama Sinergi untuk hasil yang lebih baik Willingness to cooperate Synergy for better results 	Bertindak proaktif Be proactive
			Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Provide opportunities for other parties to contribute
Kolaboratif Collaborative	Kami membangun kerja sama yang sinergis Build synergistic cooperation	<ul style="list-style-type: none"> Kesediaan bekerja sama Sinergi untuk hasil yang lebih baik Willingness to cooperate Synergy for better results 	Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah Open up in working together to generate added value
			Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama Mobilizing the use of various resources for common goals

FRAMEWORK BUDAYA “AKHLAK”

FRAMEWORK OF “AKHLAK” CULTURE



TAHAPAN IMPLEMENTASI “AKHLAK”

STAGES OF IMPLEMENTATION OF “AKHLAK”



SOSIALISASI DAN INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN

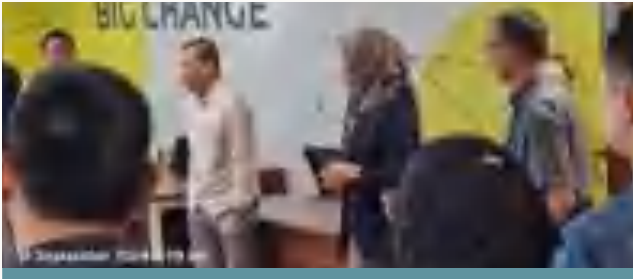
WIKA melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya “AKHLAK” yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Human Capital Division sebagai upaya untuk memperkenalkan dan menyebarkan budaya “AKHLAK” kepada seluruh Pegawai maupun pihak eksternal Perseroan agar setiap individu memahami dan mengimplementasikan budaya tersebut di setiap kegiatan usaha sehari-hari.

SOCIALIZATION AND INTERNALIZATION OF CORPORATE VALUES

WIKA carries out the socialization and internalization of “AKHLAK” culture, coordinated by the Human Capital Division, as efforts to introduce and disseminate “AKHLAK” culture to all employees and external parties of the Company with the aim that everyone can comprehend and then implement this culture in daily business activities.

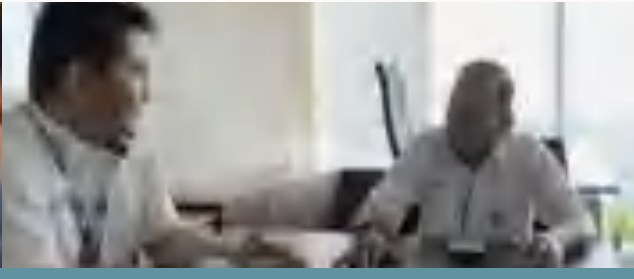
Program Change Leader – Cross Visit (Agustus – November 2024)

- Koordinator *Change Agent* dari SVP yang berkunjung dipersilahkan untuk ikut serta dalam kunjungan ini dengan harapan mendapatkan inspirasi untuk membuat program inisiatif lainnya di unit kerja masing-masing



Change Leader Program – Cross Visit (August – November 2024)

- *Change Agent* Coordinators from SVP who were visiting are invited to participate in this visit with the hope of getting inspiration to create other initiative programs in their respective work units.



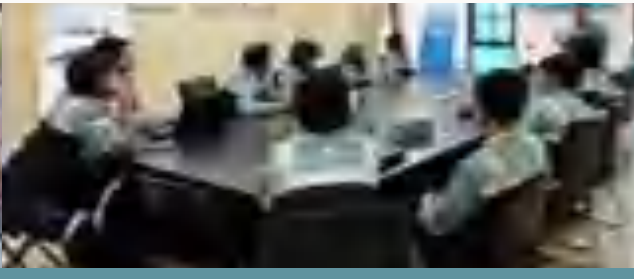
Project Visit Periode Pertama (Juli – September 2024)

- Kegiatan terdiri dari 5 tim kunjungan yang dipimpin oleh 2 Direksi dan 3 SVP, dan melakukan kunjungan ke 15 Proyek
- Penilaian terdiri peran *Change Leader* & Implementasi perilaku spesifik AKHLAK, HSE, 5R



First Period Project Visit (July – September 2024)

- The activity consists of 5 visiting teams led by 2 Directors and 3 SVPs, and visits to 15 Projects
- The assessment consists of the role of *Change Leader* & Implementation of specific behaviors AKHLAK, HSE, 5R



Change Agent Program: Semarak Budaya AKHLAK

- Implementasi program budaya AKHLAK yang dilakukan di area proyek dengan menggunakan Trello sebagai bahan penilaian dengan mengumpulkan dokumentasi program AKHLAK

Change Agent Program: The Excitement of AKHLAK Culture

- Implementation of the AKHLAK culture program carried out in the project area using Trello as an assessment material by collecting documentation of the AKHLAK program



Kegiatan Usaha

Lines of Business



KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Merujuk pada Akta Anggaran Dasar sebagaimana dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 7 tanggal 17 Januari 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.-0003965.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 18 Januari 2024 (“Anggaran Dasar Perseroan”), maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggara perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, *engineering procurement construction*, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa engineering dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the Deed of Articles of Association as stated in the Statement of Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 7 dated January 17, 2024, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta and received notification of amendment to the Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.-0003965.AH.01.02.TAHUN 2024 dated January 18, 2024 (“the Company’s Articles of Association”), the purposes and objectives of the Company are to engaged in the business of construction industry, manufacturing industry, leasing services, agency services, investment, agro-industry, energy industry, renewable energy and energy conversion, railway operators, port operations, airport operations, logistics, trade, engineering procurement construction, area development and management, capacity building services in the field of construction services, information technology, engineering and planning services, investment and/or business management in basic infrastructure and facilities, to produce goods and/or services of high quality and with strong competitiveness in order to obtain/pursue profits and increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.



KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang tertera pada Anggaran Dasar Perusahaan tersebut, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan pada tahun 2024 antara lain adalah:

BUSINESS ACTIVITIES IN THE FISCAL YEAR

In order to achieve the purposes and objectives stated in the Company's Articles of Association, the business activities carried out by the Company in 2024 include:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on Articles of Association

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pada Tahun 2024 Information on Business Activities In 2024

Sudah Has Been Conducted	Belum Has Not Yet Conducted
--------------------------------	-----------------------------------

Kegiatan Usaha Utama Main Business Activities		Sudah Has Been Conducted	Belum Has Not Yet Conducted
1. Pekerjaan pelaksanaan konstruksi a. Pekerjaan sipil b. Pekerjaan gedung c. Pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringan dan investasi d. Radio, telekomunikasi dan instrumentasi Construction work a. Civil work b. Building work c. Electrical mechanical work, including network and investment d. Radio, telecommunication and instrumentation	✓ ✓ ✓ ✓		
2. Pelaksanaan pekerjaan EPC (<i>engineering procurement construction</i>) termasuk investasi EPC (<i>engineering procurement construction</i>) work, including investment	✓		
3. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi pada pekerjaan-pekerjaan di atas Repair/maintenance/renovation of the above works	✓		
4. <i>Operation</i> dan <i>maintenance</i> termasuk investasi Operation and maintenance, including investment	✓		
5. Kegiatan usaha penyelenggaraan perkeretaapian Railway business activities	✓		
6. Kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus termasuk investasi General port and special port business activities, including investment	✓		
7. Kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi Airport business activities, including investment	✓		
8. Kegiatan usaha logistik termasuk investasi Logistics business activities, including investment			✓
9. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan ekonomi Khusus termasuk investasi Development and Management of Special Economic Zones including investment			✓
Kegiatan Usaha Penunjang/Pendukung Supporting Business Activities		Sudah Has Been Conducted	Belum Has Not Yet Conducted
1. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan radio, telekomunikasi dan instrumentasi serta perbaikan, pemeliharaan dan konsultasi Planning and supervision of construction work, which includes civil work, building work and electrical mechanical work, radio work, telecommunications and instrumentation as well as repairs, maintenance and consultation	✓		
2. Pengukuran, penggambaran, perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal (<i>quantity surveying</i>) dan laboratorium beton dan tanah <i>soil investigation</i> Measurement, drawing, calculation and determination of the cost of construction work which includes civil work, building work and electrical mechanical work (<i>quantity surveying</i>) and concrete and soil laboratory soil investigation			✓
3. Layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen proyek konstruksi, rekayasa industri, enjinerig dan perencanaan Management consulting services, construction project management, industrial engineering, engineering and planning	✓		
4. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi Carrying out rental business and providing services in the field of construction equipment	✓		

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar
Business Activities Based on Articles of Association

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pada Tahun 2024
Information on Business Activities In 2024

	Sudah Has Been Conducted	Belum Has Not Yet Conducted
5. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa <i>handling</i> impor, ekspor, jasa ekspedisi/angkutan darat serta perdagangan umum. Carrying out supplier business, agency services, import and export handling services, expedition/land transportation services and general trading.	✓	
6. Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula, biodiesel, biothanol, biogas dan biomassa <i>energy</i> termasuk pengoperasian produksi, pemeliharaan serta pendistribusian Carrying out business in the field of agro-industry, which includes palm oil, sugar, biodiesel, biothanol, biogas and biomass energy factories including production operations, maintenance and distribution	✓	
7. Melakukan usaha pengembangan dan pengelolaan kawasan termasuk sarana dan prasarannya, pembangunan dan penjualan di bidang realti serta melakukan pengusahaan dan pengelolaan di bidang properti Carrying out areas business development and management, including facilities and infrastructure, construction and sales in the realty sector as well as carrying out business and management in the property sector	✓	
8. Melaksanakan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi Carrying out business in the field of services and information technology		✓
9. <i>Building Management</i>	✓	
10. <i>System Development</i>		✓
11. Industri Pabrikasi Manufacturing Industry		✓
12. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi Fabrication of construction components and equipment		✓
13. Penyedia jasa pengembangan sistem informasi Provider of information systems development services		✓
14. Penyelenggara pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta riset teknologi terapan, pengembangan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja Organizer of training and development of human resources as well as applied technology research, development of occupational health safety management systems	✓	
15. Penyedia pekerjaan <i>maintenance, repair, dan overhaul</i> (MRO) kebandarudaraan Provider of airport maintenance, repair and overhaul (MRO) work	✓	
16. Usaha usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas Other businesses that directly support the Company's main business as mentioned above	✓	



PRODUK DAN/ATAU JASA YANG DIHASILKAN

WIKA merupakan perusahaan konstruksi terintegrasi yang memiliki 5 (lima) lini bisnis utama, segmen pasar yang dibidik WIKA adalah proyek-proyek konstruksi dan turunannya, baik yang dikembangkan oleh Pemerintah maupun oleh pihak swasta. Sesuai dengan Anggaran Dasar terakhir, produk dan jasa yang ditawarkan oleh WIKA adalah sebagai berikut:



Infrastruktur dan Gedung Infrastructure and Buildings



Lini bisnis ini terdiri dari bidang usaha jasa konstruksi sipil dan konstruksi gedung. Segmen pasar yang dibidik WIKA di lini bisnis ini adalah proyek konstruksi sipil dan gedung berskala nasional dan berteknologi tinggi.

Lini bisnis konstruksi sipil membawahi sejumlah sub bidang usaha yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, irigasi, sistem pengelolaan air minum dan prasarana perhubungan. Kini pekerjaannya tidak sekedar sebagai kontraktor melainkan juga mencakup rancang bangun (*design and build*) dari mulai proses perencanaan hingga proses konstruksi.

Sedangkan bidang konstruksi gedung meliputi pembangunan hunian dan bangunan fasilitas publik. Bidang konstruksi gedung WIKA telah mampu melakukan pekerjaan rancang bangun atau *design and build* sejak proses perencanaan sampai proses konstruksi. Sub bidang usaha jasa konstruksi bangunan hunian meliputi pembangunan apartemen, kondominium, hotel, rumah susun, dan kompleks perumahan.

GOODS AND/OR SERVICES

WIKA is an integrated construction company with 5 (five) main lines of business. The market segments targeted by WIKA include construction and derivative involving the Government and the private parties. In accordance with the latest Articles of Association, WIKA's products and services are as follows:

This line of business consists of civil construction and building construction services business. The market segments targeted by WIKA include high-tech and national-scale civil and building construction projects.

The civil construction sector oversees a number of sub-business sectors that include the construction of facilities and infrastructure such as roads, bridges, irrigation and transportation infrastructure. Nowadays, the works carried out do not only involves being a contractor, but also include the design and build from the planning process to the construction process.

Meanwhile, the building construction sector includes the construction of housing and public facilities. WIKA's building construction sector has been able to conduct design and build from the planning to construction process. The residential building construction service sub-business includes the construction of apartments, condos, hotels, flats and housing complexes.



Energi dan Industrial Plant Energy and Industrial Plant



Lini bisnis ini terdiri dari bidang usaha Energi dan Industrial Plant. Bidang usaha energi ini meliputi jasa EPC (*Engineering, Procurement dan Construction*) di bidang ketenagalistrikan. Berbagai jenis pembangkit listrik telah mampu dihasilkan oleh WIKA antara lain PLTU, PLTG/MU, PLTA, PLTD/MG, PLTP, PLTS dan lain sebagainya.

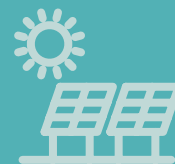
Sedangkan pada bidang usaha Industrial Plant berfokus pada membangun suatu processing plant, yang terdiri atas fasilitas bangunan, serangkaian fasilitas mesin, peralatan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya sehingga dapat terbentuk suatu proses produksi dari raw material menjadi produk tertentu, di antaranya Alumina Plant, Ferronickel Plant, Cement Plant, CPO Plant, Sugar Plant, Steel Plant, Copper Smelter Plant, NPK Granulation Plant dan lain sebagainya. Kompetensi WIKA dalam bidang usaha ini juga meliputi sektor Oil & Gas. Berbagai fasilitas Oil & Gas yang telah dihasilkan oleh WIKA antara lain pipeline, tank terminal, gas processing facility, serta refinery.

This line of business consists of Energy and Industrial Plant business. The energy business sector includes EPC (Engineering, Procurement and Construction) services in the electricity sector. WIKA has been able to produce different types of power plants, including PLTU, PLTG/MU, PLTA, PLTD/MG and others.

Whereas the Industrial Plant business sector focuses on building processing plants, consisting of building facilities, a series of machine facilities, equipment and other supporting facilities so that a production process can be formed from raw materials to certain products, including the Alumina Plant, Ferronickel Plant, Cement Plant, CPO Plant, Sugar Plant, Steel Plant, Copper Smelter Plant, NPK Granulation Plant and others. WIKA's competency in this business sector also includes the Oil & Gas sector. A number of Oil & Gas facilities have been produced by WIKA including pipelines, tank terminals, gas processing facilities, and refineries.



Industri Industry



Lini bisnis industri merupakan pilar pendukung dari kompetensi inti WIKA. Dalam lini bisnis industri ini terdapat berbagai variasi dari produk-produk pendukung aktivitas konstruksi yang dihasilkan, seperti:

- Beton, yaitu: produk beton pra cetak, seperti *PC Poles, PC Piles, Railway Sleeper CP, Bridge Concrete, Sheet Pile, PC Pipes, RC Box Culvert, Marine Structure CP, HCS, PC Cylinder dan Rigid Pavement Fabricated*;
- Industri, yaitu: fabrikasi baja dengan menghasilkan produk konstruksi baja, struktur rangka baja, conveyor, *pipe rack, tower telekomunikasi, tower transmisi listrik, jembatan rangka baja, tanki baja, silo, hopper, pressure vessel, welded beam dan steel plate work* lainnya serta *aluminium casting dan plastic injection*;
- Bitumen, yaitu: *granular asphalt dan extraction asphalt*.
- *Renewable Energy*, yaitu: *solar PV Modules & Components, Rooftop System, Solar Centralized Hybrid System, Solar Pump System, Solar Home System, Solar Street Lights, Electric Vehicle battery, Portable Energy Storage, Energy Storage System, Solar Water Heater, AirCob Water Heater, Heatpump, Electric Water Heater, LED Lightings, LTSHE*.

The Industry line of business supports the pillars of WIKA's core competencies. In this business, there a number of products that support the construction activities, such as:

- Precast, namely: Precast concrete products, such as PC Polishing, PC Piles, Railway Sleeper CP, Bridge Concrete, Sheet Pile, PC Pipes, RC Box Culvert, Marine Structure CP, HCS, PC Cylinder and Rigid Pavement Fabricated.
- Industrial, namely: steel fabrication by producing steel construction products, aluminium casting, steel frame structure, conveyor, pipe rack, telecommunication tower, electricity transmission tower, steel frame bridge, steel tank, silo, hopper, pressure vessel, welded beam and other steel plate work, aluminium casting and plastic injection.
- Bitumen, namely: granular asphalt, extraction asphalt.
- Renewable Energy, namely: solar PV Modules & Components, Rooftop System, Solar Centralized Hybrid System, Solar Pump System, Solar Home System, Solar Street Lights, Electric Vehicle battery, Portable Energy Storage, Energy Storage System, Solar Water Heater, AirCob Water Heaters, Heatpumps, Electric Water Heaters, LED Lightings, LTSHE.



Realti dan Properti Realty and Property



Melalui lini bisnis Realty dan Properti, WIKA berkomitmen untuk menghadirkan properti yang berkualitas dan ideal untuk berbagai segmen pasar. Lini bisnis ini menjadi andalan dalam menyambut peluang besar, seperti pengembangan kota baru dan program Pemerintah dalam mendorong pemenuhan kebutuhan hunian untuk masyarakat. WIKA melalui anak usahanya yaitu WIKA Realty telah sukses mengembangkan produk unggulan "Tamansari". Dengan mengusung makna di balik nama Tamansari yang berarti peristirahatan raja, WIKA Realty berhasil menggabungkan keindahan arsitektur, unsur alam dan kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia sehingga tercipta konsep hunian yang asri dan nyaman.

Through the Realty and Property line of business, WIKA is committed to presenting high quality and ideal properties in various market segments. This business is the mainstay in maximizing huge opportunities, such as the development of new cities and Government programs for fulfilling the housing needs in the communities. WIKA through its subsidiary, WIKA Realty, has successfully developed the flagship product "Tamansari". By carrying out the meaning behind the name Tamansari which means king's retreat, WIKA Realty managed to combine the beauty of architecture, natural elements and local wisdom in various regions in Indonesia to create a beautiful and comfortable residential concept.



Investasi Investment



Sebagai salah satu strategi guna memiliki bisnis yang lebih stabil kedepannya, WIKA kini semakin aktif dalam melakukan kegiatan investasi. Melalui berbagai investasi yang dijalankan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan porsi *recurring income* WIKA. Investasi yang dilakukan Perseroan mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, energi, transportasi serta pengembangan kawasan. Dalam melakukan kegiatan investasi tersebut, Perseroan juga berafiliasi dengan beberapa perusahaan lain sebagai upaya untuk memperoleh portofolio investasi yang semakin besar.

As one of the strategies to create a more stable business in the future, WIKA is now increasingly active in investment activities. Through the investments carried out, the Company wants to enlarge the recurring income portion. Investments made by the Company cover various sectors such as infrastructure, energy, transportation and regional development. In carrying out these investment activities, the Company is also affiliated with several other companies in an effort to obtain a larger investment portfolio.



Wilayah Operasional

Operational Area



WILAYAH-WILAYAH JARINGAN BISNIS DAN OPERASIONAL WIKA DI 2024

WIKA'S BUSINESS NETWORK AND
OPERATIONAL AREAS IN 2024



Dalam Negeri Domestic

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Sumatera Utara/North Sumatra | 11. Bali |
| 2. Sumatera Selatan/South Sumatra | 12. Papua |
| 3. Sumatera Barat/West Sumatra | 13. Jawa Timur/East Java |
| 4. Jambi | 14. Jawa Tengah/Central Java |
| 5. Kepulauan Riau/Riau Islands | 15. Jawa Barat/West Java |
| 6. Kalimantan Timur/East Kalimantan | 16. Banten |
| 7. Kalimantan Tengah/Central Kalimantan | 17. DKI Jakarta |
| 8. Sulawesi Selatan/South Sulawesi | 18. NTT/East Nusa Tenggara |
| 9. Sulawesi Tengah/Central Sulawesi | 19. NTB/West Nusa Tenggara |
| 10. Sulawesi Tenggara/Southeast Sulawesi | 20. Kalimantan Barat/West Kalimantan |





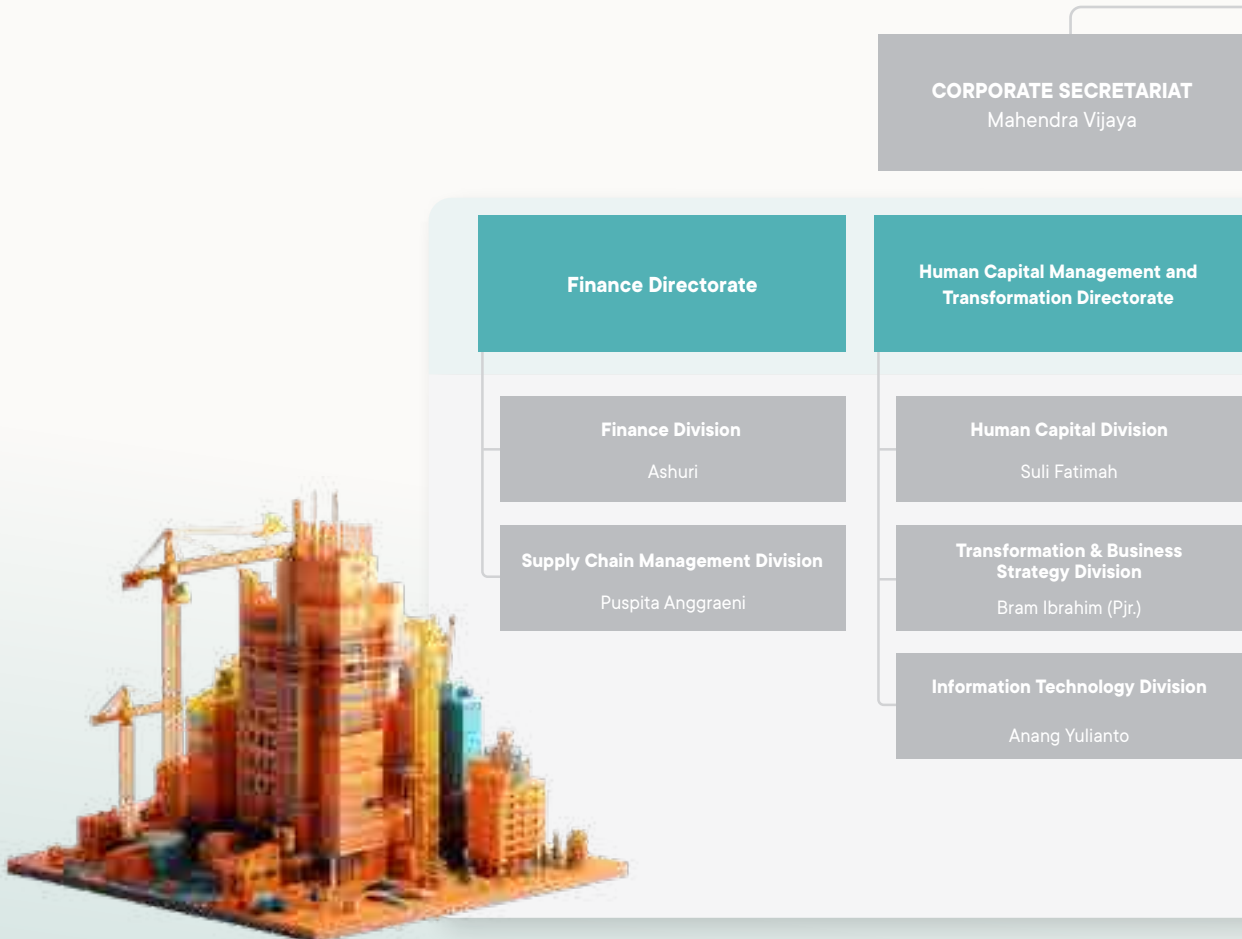
Struktur Organisasi Perusahaan

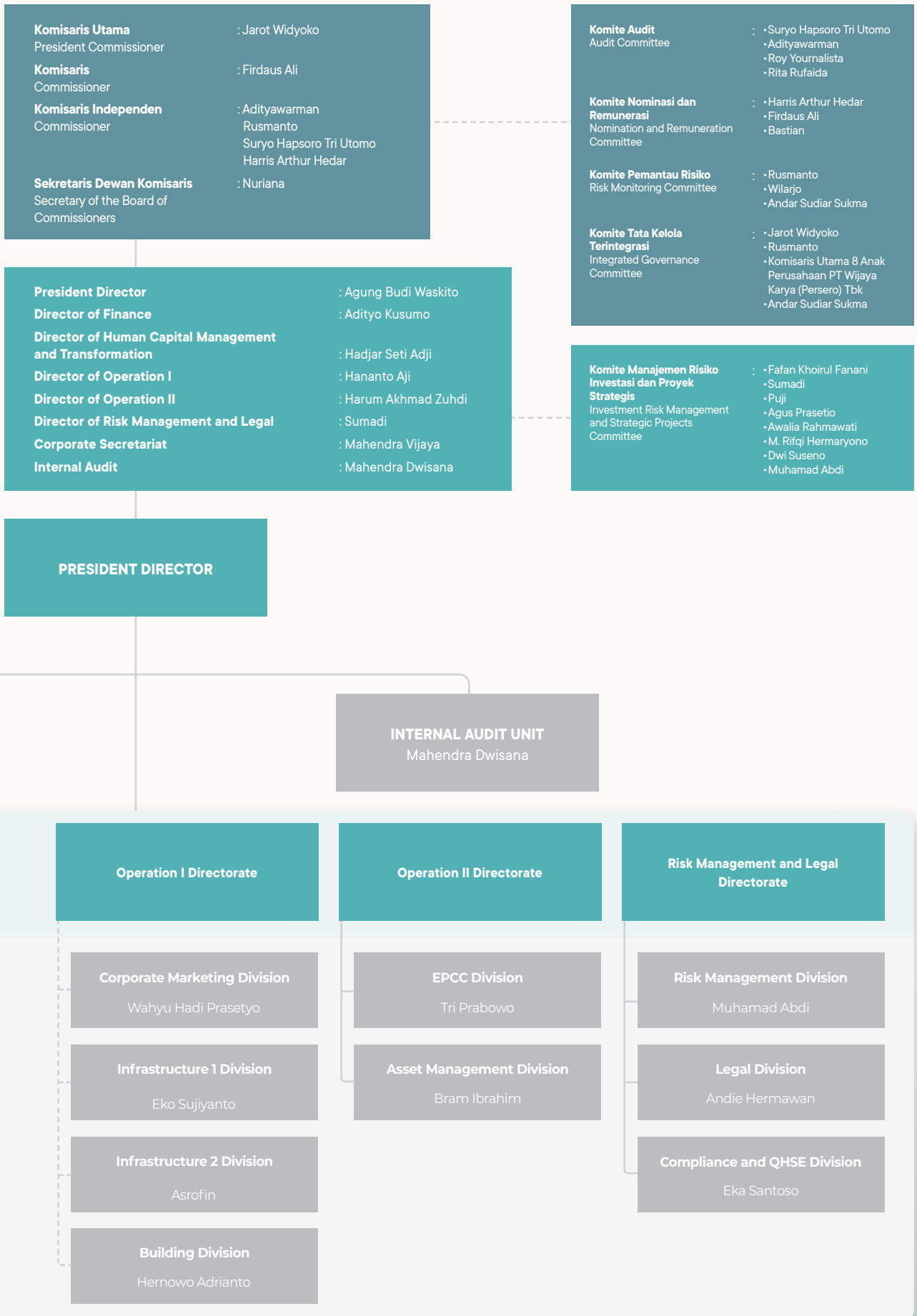
Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi WIKA per 31 Desember 2024, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan No.SK.01.01/A.DIR.00016/2024 tanggal 29 November 2024. Berikut struktur tata kelola dan organisasi WIKA:

The organizational structure of WIKA as of December 31, 2024, has been established through Decree No. No. SK.01.01/A.DIR.00016/2024 dated November 29, 2024. Below is the governance and organizational structure of WIKA:

Struktur Organisasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2024 Organizational Structure of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as of December 31, 2024







Daftar Keanggotaan Asosiasi

Association Membership

WIKA terus memperluas jaringan bisnis serta menjalin komunikasi yang lebih luas dengan berpartisipasi secara aktif sebagai anggota asosiasi dan organisasi serta diharapkan juga dapat meningkatkan kredibilitas Perseroan di industri sejenis. Keanggotaan dalam asosiasi dan organisasi ini juga menjadi bagian dari upaya pelibatan pemangku kepentingan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan operasional. Hingga tahun 2024, Perseroan telah tergabung dalam keanggotaan asosiasi industri, yakni sebagai berikut:

WIKA continues to expand its business network and establish broader communication by actively participating as a member of associations and organizations, which is also expected to enhance the Company's credibility in the industry. Membership in these associations and organizations is also part of the Company's efforts to involve stakeholders in solving any issues encountered in carrying out its operational activities. Until 2024, the Company is incorporated in the following industry associations:

Nama Organisasi/Asosiasi Name of Organization/ Association	Posisi Keikutsertaan Position	Jatuh Tempo Keanggotaan Expiration of Membership
Nasional National		
AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia) AKI (Association of Indonesian Contractors)	Anggota Member	31 Desember 2024 December 31, 2024
AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia) AKLI (Association of Indonesian Electrical and Mechanical Contractors)	Anggota Member	31 Desember 2024 December 31, 2024
PAKTI (Asosiasi Perusahaan Perkumpulan Pengusaha Konstruksi Terintegrasi) PAKTI (Association of Integrated Construction Entrepreneurs Association)	Anggota Member	31 Desember 2024 December 31, 2024
KADIN (Kamar Dagang dan Industri) KADIN (Chamber of Commerce and Industry)	Anggota Member	31 Desember 2024 December 31, 2024
KNI – BB (Komite Nasional Indonesia Untuk Bendungan Besar) KNI BB (Indonesian National Committee for Big Dams)	Anggota Member	31 Desember 2024 December 31, 2024
GAPENRI (Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia) GAPENRI (Association of Indonesian National Design and Build Companies)	Anggota Member	31 Desember 2024 December 31, 2024
GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) GAPENSI (Indonesian Association of National Construction Implementers)	Anggota Member	31 Desember 2023 December 31, 2023
ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional) ASPEKNAS (Association of National Construction Implementation)	Anggota Member	31 Desember 2024 December 31, 2024
AKTI (Asosiasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia) AKTI (Indonesian Association of Integrated Contractors)	Anggota Member	31 Desember 2023 December 31, 2023

Peristiwa Penting

Event Highlights

Januari/January



WIKA Selenggarakan RUPSLB

Pada awal tahun 2024, WIKA menyelenggarakan RUPSLB untuk meminta persetujuan para pemegang saham terkait dengan Persetujuan atas Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

WIKA Held Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

At the beginning of 2024, WIKA held an EGMS to seek approval from shareholders regarding the Approval for Capital Increase with Pre-Emptive Rights (PMHMETD) and amendments to the Company's Articles of Association.



Peresmian Bendungan Karian

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Karian yang terletak di Pasirtanjung, Rangkasbitung, Lebak Regency, Banten pada (08/01). Bendungan Karian merupakan Proyek Strategis Nasional dengan luas sebesar 1,74 Ha dan daya tampung air mencapai 314,7 juta meter kubik, serta mampu menyediakan kebutuhan pasokan air masyarakat sekitar Banten.

Inauguration of Karian Dam

President Jokowi inaugurated the Karian Dam located in Pasirtanjung, Rangkasbitung, Lebak Regency, Banten on January 8th. Karian Dam is a National Strategic Project with an area of 1.74 hectares and a water capacity of 314.7 million cubic meters, capable of supplying water to the surrounding Banten community.

Februari/February



WIKA Mengadakan Seminar Peduli Stunting

WIKA mengadakan seminar tentang pencegahan stunting dalam rangka meningkatkan kesadaran, khususnya di kalangan orang tua, tentang pencegahan stunting dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi anak.

WIKA Organized Stunting Awareness Seminar

WIKA organized a seminar on stunting prevention to raise awareness, particularly among parents, about stunting prevention and prioritize fulfilling children's nutritional needs.



Peresmian Pabrik Amonium Nitrat BUMN Pertama di Indonesia Oleh Presiden Jokowi

Presiden Jokowi meresmikan Proyek Pabrik Amonium Nitrat pertama di Indonesia karya WIKA yang terletak di kawasan KIE, Bontang, Kalimantan Timur. Pabrik ini dibangun dengan kapasitas produksi Amonium Nitrat sebesar 75.000 ton/tahun dan Asam Nitrat sebesar 60.000 ton/tahun.

Inauguration of the First Ammonium Nitrate Plant by SOE in Indonesia by President Jokowi

President Jokowi inaugurated the first Ammonium Nitrate Plant in Indonesia, built by WIKA, located in the KIE area, Bontang, East Kalimantan. This plant has an annual production capacity of 75,000 tons of Ammonium Nitrate and 60,000 tons of Nitric Acid.

Maret/March



HUT WIKA Ke-64

Merayakan perjalanan 64 tahun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk terus bertransformasi menjadi perusahaan konstruksi terkemuka yang berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, WIKA berkomitmen untuk menciptakan karya terbaik yang mendukung kemajuan bangsa.

WIKA's 64th Anniversary

Celebrating its 64th anniversary, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk continues to transform into a leading construction company contributing to sustainable development. With a spirit of innovation and collaboration, WIKA is committed to creating the best works that support national progress.



Presiden Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas 1

Presiden Jokowi meresmikan duplikasi Jembatan Kapuas 1 di Kota Pontianak yang merupakan simbol baru kemajuan infrastruktur di Kalimantan Barat. Duplikasi Jembatan Kapuas 1 sepanjang 430 meter dan lebar 8 meter tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas serta konektivitas antara berbagai wilayah di Kota Pontianak dan sekitarnya.

President Jokowi Inaugurated Kapuas 1 Bridge Duplication

President Jokowi inaugurated the duplication of Kapuas 1 Bridge in Pontianak City, a new symbol of infrastructure progress in West Kalimantan. The duplication of the 430-meter-long and 8-meter-wide Kapuas 1 Bridge aims to improve accessibility and connectivity between various regions in Pontianak and its surroundings.



April/April



WIKA Gelar Pasar Sembako Murah di IKN

WIKA menggelar pasar sembako murah bagi masyarakat dalam rangka Safari Ramadhan BUMN 2024 bersama PT Pembangunan Perumahan (PTPP) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pasar murah tersebut menyediakan 1.000 paket sembako berisi beras, gula, dan minyak goreng yang dijual seharga Rp 50.000.

WIKA Organized Affordable Basic Goods Market at IKN

WIKA held an affordable basic goods market for the community as part of the 2024 SOE Ramadhan Safari, in collaboration with PT Pembangunan Perumahan (PTPP) and PT Adhi Karya (Persero) Tbk in Ibu Kota Nusantara (IKN), East Kalimantan. The market provided 1,000 basic goods packages containing rice, sugar, and cooking oil sold at Rp50,000.



WIKA bersama BUMN Berangkatkan 550 Lebih Peserta Mudik

Lebih dari 550 peserta mudik diberangkatkan oleh WIKA sebagai bagian dari Program Mudik Asyik Bersama BUMN yang digelar oleh Kementerian BUMN untuk menyambut Idul Fitri 1445 H. Peserta mudik dilepas langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir menuju daerah tujuannya dengan menggunakan bus yang diberangkatkan dari Monas Jakarta.

WIKA and SOEs Facilitated 550+ Participants for Mudik

Over 550 participants were sent by WIKA as part of the Mudik Asyik Bersama BUMN program organized by the Ministry of SOE for the upcoming Idul Fitri 1445 H. The mudik participants were sent directly by the Minister of SOE, Erick Thohir, to their destinations using buses departing from Monas, Jakarta.

Mei/May



Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro Karya WIKA KSO

Presiden RI Joko Widodo meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Ameroro yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bendungan Ameroro merupakan bendungan ke-40 yang berhasil dibangun Pemerintah untuk mencegah krisis air di Indonesia melalui peningkatan kapasitas air dan pengendalian banjir sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Konawe.

President Jokowi Inaugurated Ameroro Dam by WIKA JO

President Joko Widodo inaugurated the Ameroro Dam, a National Strategic Project located in Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Ameroro Dam is the 40th dam built by the government to prevent water crises in Indonesia through increased water capacity and flood control, benefiting the Konawe community.



WIKA Luncurkan Platform WISE

Sejalan dengan strategi penguatan tata kelola Perusahaan yang termasuk dalam "8 Stream Method" restrukturisasi, WIKA memperkenalkan platform WIKA Integrated Smart E-Procurement (WISE) sebagai terobosan baru dalam fungsi pengadaan Supply Chain Management (SCM) yang semakin transparan. Platform berbasis web tersebut diluncurkan pada Selasa (7/5) dan dapat diakses oleh publik.

WIKA Launched WISE Platform

In line with the company's governance strengthening strategy, part of the "8 Stream Method" restructuring, WIKA introduced the WIKA Integrated Smart E-Procurement (WISE) platform as an innovation in the Supply Chain Management (SCM) procurement function, making it more transparent. The web-based platform was launched on Tuesday, May 7th and is publicly accessible.

Juni/June



WIKA Gelar Sharing Session bersama Wakil Menteri BUMN

Dalam rangka mensukseskan langkah transformasi, WIKA menggelar sharing session bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dengan tema Transformation Journey towards Turnaround's WIKA Strategy.

WIKA Held Sharing Session with Deputy Minister of SOE

To support its transformation efforts, WIKA held a sharing session with Deputy Minister of SOE Kartika Wirjoatmodjo, themed "Transformation Journey towards Turnaround's WIKA Strategy."

Juli/July



Peresmian Bendungan Pamukkulu

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Pamukkulu yang terletak di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bendungan Pamukkulu nantinya akan menampung dan mengelola air untuk mendukung produktivitas pertanian di Sulawesi Selatan.

Inauguration of Pamukkulu Dam

President Jokowi inaugurated the Pamukkulu Dam located in Takalar Regency, South Sulawesi. Pamukkulu Dam will store and manage water to support agricultural productivity in South Sulawesi.



Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin Resmikan Bendungan Cipanas Karya WIKA KSO

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meresmikan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Bendungan Cipanas memiliki kapasitas tampung air sebesar 250,81 juta meter kubik untuk memenuhi kebutuhan irigasi seluas 9.273 hektar di wilayah Sumedang dan Indramayu, serta sebagai pengendali banjir di wilayah hilir Pantai Utara Indramayu.

Vice President Ma'ruf Amin Inaugurated Cipanas Dam by WIKA JO

Vice President KH Ma'ruf Amin inaugurated the Cipanas Dam in Sumedang Regency, West Java. Cipanas Dam has a water capacity of 250.81 million cubic meters to fulfill irrigation needs across 9,273 hectares in Sumedang and Indramayu, and also serves as a flood control system for the northern coastal region of Indramayu.

Agustus/August



WIKA Tingkatkan Fasilitas Pendidikan dan Salurkan Sembako di Yayasan Sayap Ibu

WIKA salurkan bantuan pendidikan dan paket sembako kepada anak didik dan anak binaan Yayasan Sayap Ibu, termasuk diantaranya anak-anak berkebutuhan khusus/disabilitas berusia 0 sd 18 th. Bantuan yang disalurkan berupa renovasi ruang PAUD Yayasan Sayap Ibu yang siswanya merupakan anak asuh dari panti asuhan dan warga sekitar yang tergolong keluarga prasejahtera. Total bantuan yang diberikan berupa perbaikan infrastruktur dan paket sembako senilai Rp45 juta.

WIKA Enhanced Educational Facilities and Distributes Basic Goods at Sayap Ibu Foundation

WIKA distributed educational aid and basic goods packages to students and children under the care of Sayap Ibu Foundation, including children with special needs aged 0 to 18 years. The aid included renovations to the PAUD (Early Childhood Education) room, serving children from orphanages and underprivileged families. Total aid granted, including infrastructure improvements and basic goods, amounted to Rp45 million.



Peresmian RSUP Persahabatan

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Pernapasan Ibu dan Anak di RSUP Persahabatan, Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam pembangunannya, WIKA sangat memperhatikan aspek desain pasif rumah sakit, sehingga bangunan tersebut dapat meminimalkan penggunaan energi sekaligus memaksimalkan kenyamanan pengguna.

Inauguration of RSUP Persahabatan

President Joko Widodo inaugurated the Mother and Child Respiratory Health Services Building at RSUP Persahabatan, Rawamangun, East Jakarta. In its construction, WIKA paid close attention to the hospital's passive design aspects to minimize energy usage while maximizing user comfort.

September/September



Peresmian Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (RS Kemenkes) Surabaya

Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (RS Kemenkes) Surabaya. Dengan luas 163.380 meter persegi, rumah sakit ini terdiri dari empat gedung, termasuk pusat medis sebagai gedung utama dan tiga sayap khusus untuk menangani kanker, penyakit jantung, dan stroke.

Inauguration of the Ministry of Health's Hospital (RS Kemenkes) Surabaya

President Joko Widodo inaugurated the Ministry of Health's Hospital (RS Kemenkes) Surabaya. Covering 163,380 square meters, this hospital consists of four buildings, including the main medical center and three specialized wings for cancer, heart disease, and stroke treatment.



Peresmian Flyover Djuanda di Sidoarjo

Presiden Joko Widodo meresmikan Flyover Djuanda di Sidoarjo. Flyover Djuanda merupakan bagian dari proyek peningkatan infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di persimpangan jalan raya nasional, Jalan Raya Waru, jalan akses menuju Bandara Juanda, dan Simpang Bangah.

Inauguration of Djuanda Flyover in Sidoarjo

President Joko Widodo inaugurated the Djuanda Flyover in Sidoarjo. Djuanda Flyover is part of an infrastructure improvement project aimed at reducing traffic congestion at the national road intersection, Waru Road, the access road to Juanda Airport, and Simpang Bangah.



Oktober/October



Peresmian Istana Negara IKN

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan Istana Negara di ibu kota baru, Ibu Kota Nusantara (IKN). WIKA menerapkan teknologi Building Information Modeling (BIM) untuk mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek.

Inauguration of IKN State Palace

President Joko Widodo inaugurated the IKN State Palace in the new capital city, Ibu Kota Nusantara (IKN). WIKA applied Building Information Modeling (BIM) technology to optimize planning, execution, and project management.



Peresmian Bendungan Lau Simene

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Lau Simene yang berfungsi untuk mereduksi risiko banjir, penyedia air baku, serta sumber irigasi lahan pertanian di Kota Medan dan sekitarnya.

Lau Simene Dam Inauguration

President Jokowi inaugurated the Lau Simene Dam, which functions to reduce the risk of flooding, provide raw water, and as sources of irrigation for agricultural land in Medan City and its surroundings.

November/November



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama WIKA dengan BRIN

Dalam upaya meningkatkan kompetensinya di bidang konstruksi berkelanjutan, dengan berfokus pada penerapan prinsip *Environment, Social, dan Governance* (ESG), WIKA melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan BRIN terkait dengan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pemanfaatannya di Kawasan Wikasatrian.

Signing of Cooperation Agreement between WIKA and BRIN

To enhance its competence in sustainable construction, focusing on Environment, Social, and Governance (ESG) principles, WIKA signed a Cooperation Agreement with BRIN regarding Biodiversity Conservation and Utilization in the Wikasatrian Area.



Public Expose 2024

WIKA telah melaksanakan acara Public Expose 2024 pada hari Kamis, 28 November 2024 secara virtual melalui media aplikasi zoom dan youtube. Public Expose Live ini merupakan bagian dari acara Public Expose Live 2024 yang diselenggarakan bersama Stockbit. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi terbaru terkait kinerja dan rencana strategis WIKA.

Public Expose 2024

WIKA held its Public Expose 2024 event on Thursday, November 28th, 2024, virtually via Zoom and YouTube. This Public Expose Live event, organized in collaboration with Stockbit, aimed to provide the latest information regarding WIKA's performance and strategic plans.

Desember/December



WIKA Kembali Raih Kualifikasi Badan Publik Informatif

WIKA kembali dinobatkan sebagai Badan Publik Informatif pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) setelah berhasil meningkatkan kebijakan layanan informasi publik melalui penguatan sistem internal diantaranya digitalisasi, monitoring dan evaluasi berkala. WIKA juga berinovasi untuk mempercepat waktu pemenuhan informasi publik melalui layanan PPID WIKA.

WIKA Once Again Earned the Public Agency Informative Qualification

WIKA has once again been recognized as an Informative Public Agency in the monitoring and evaluation of Public Information Disclosure (KIP), after successfully enhancing its public information service policies through strengthening internal systems, including digitalization, regular monitoring, and evaluation. WIKA has also innovated to accelerate the public information fulfillment process through WIKA's PPID services.



WIKA & Wika Realty Menanam 100 Pohon di Tamansari Laswi City

WIKA bersama Wika Realty berkolaborasi menyelenggarakan Aksi Penanaman Pohon yang bertepatan "Seratus Pohon, Satu Langkah untuk Melestarikan Lingkungan & Warisan Budaya" di Tamansari Laswi City.

WIKA & Wika Realty Planted 100 Trees at Tamansari Laswi City

WIKA, together with Wika Realty, collaborated to organize a Tree Planting Action themed "One Hundred Trees, One Step to Preserve the Environment & Cultural Heritage" at Tamansari Laswi City.

RDF Rorotan, Jakarta
RDF Rorotan, Jakarta





Profil Direksi

Board of Directors Profile



Agung Budi Waskito

Direktur Utama
President Director

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama | Legal Basis of Appointment

Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Operasi I berdasarkan keputusan RUPST 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2018, dan diaktakan dengan Akta RUPST Nomor 94 Tanggal 26 April 2018.

Diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama WIKA berdasarkan keputusan RUPST 8 Juni 2020 yang kemudian dikukuhkan melalui Akta RUPST No. 33 Tanggal 16 Juni 2020, dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan sebelumnya sebagai Direktur Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yaitu 2018-2023. Beliau efektif menjabat pada 8 Juni 2020.

Appointed for the first time as Director of Operations I based on the resolution of 2017 AGMS held on April 24 2018, and notarized by AGMS Deed Number 94 dated April 26, 2018.

Appointed for the first time as WIKA's President Director based on the AGMS resolution on June 8, 2020 as stated in the Deed of the Company's Annual GMS Resolution No. 33 dated June 16 2020, with a term of office continuing previous term of office as PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's Director of Operations I, i.e. 2018-2023. Effectively took office on June 8, 2020.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir | Legal Basis for Final Appointment

Diangkat kembali sebagai Direktur Utama WIKA berdasarkan RUPST 2022 yang diselenggarakan pada 4 Mei 2023 dan diaktakan dengan Akta RUPST 2022 Nomor 06 Tanggal 04 Mei 2023.

Reappointed as WIKA's President Director of based on the 2022 AGMS held on May 4, 2023 and notarized with the 2022 AGMS Deed Number 06 dated May 04, 2023.

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian
Usia 53 tahun per 31 Desember 2024
53 years old, as of December 31, 2024

Domisili | Domicile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan | Term of Office

8 Juni 2020 - RUPST 2025, Periode Kedua
June 8, 2020 AGMS 2025, Second Period

Riwayat Pendidikan

- Magister di Engineering Civil, Indian Institute Technology Roorkee (2002);
- Sarjana Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada tahun (1995).

Educational Background

- Master in Civil Engineering, Indian Institute Technology, Roorkee (2002).
- Bachelor of Civil Engineering, Gadjah Mada University (1995);

Sertifikasi

- Workshop Toll Road oleh Kementerian BUMN RI dan BNI Sekuritas bersama BPJT & Bina Marga dari BNI Sekuritas (2022);
- Workshop Assessment Implementasi GCG dari BPKP (2021);
- Webinar Keunggulan BUMN Karya dari Kementerian BUMN (2020);
- Workshop Self Assessment dari BPKP (2020);
- Webinar Penanggulangan Paham Radikalisme di Lingkungan BUMN dari Kementerian BUMN (2020);
- Webinar Indonesia Infrastructure Week dari Indonesia Infrastructure Week (IIW) (2020);
- INACOLD/KNI-BB the 6th Webinar Series Seminar National 2020 edition dari INACOLD-KNI BB (2020);
- Self Driving Training dari Ary Ginanjar (2017);
- Cross Cultural Leadership Program dari Blue Vision, Australia (2017);
- Pelatihan Keuangan Untuk Pejabat Non Keuangan dari WIKA, Jakarta (2010);
- Sertifikasi Value Engineering dari Himpunan Ahli Value Engineering Indonesia (2008);

Certification

- Toll Road Workshop by Indonesian Ministry of SEOs and BNI Sekuritas together with BPJT & Bina Marga from BNI Sekuritas (2022);
- GCG Assessment Workshop from BPKP (2021);
- Webinar on the Advantages of SOE Karya from Ministry of SEOs (2020);
- Self Assessment Workshop from BPKP (2020);
- Webinar on Combating Radicalism in SOEs from Ministry of SEOs (2020);
- Indonesia Infrastructure Week webinar from Indonesia Infrastructure Week (IIW) (2020);
- INACOLD/KNI-BB the 6th Webinar Series Seminar National 2020 edition from INACOLD-KNI BB (2020);
- Self Driving Training from Ary Ginanjar (2017);
- Cross Cultural Leadership Program from Blue Vision, Australia (2017);
- Financial for Non-Financial Officers Training from WIKA, Jakarta (2010);
- Value Engineering Certification from the Association of Indonesian Value Engineering Experts (2008);



- Couching Mentoring & Counselling dari Iradat Consultant, Jakarta (2004);
- Asean Chartered Professional Engineer (ACPE) dari Myanmar;
- Satria Pratama Batch 5 dari Wikasatrian, Indonesia;
- Asian International Water Week dari Korea Selatan;
- Leader Development Acceleration Program: Developing Strategic Mindset Cross Cultural Leadership Program dari Blue Vision, Australia;
- Leadership & Strategic Skill dari PPM Manajemen, Jakarta;
- Corporate Care Batch-3 dari Asia Works, Jakarta
- Pelatihan Quantity Surveyor (1999);
- Sistem Management Mutu ISO 9000 dari Prosys (1996).

- Couching Mentoring & Counseling from Iradat Consultant, Jakarta (2004);
- ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) from Myanmar
- Satria Pratama Batch 5 from Wikasatrian, Indonesia
- Asian International Water Week from South Korea
- Leader Development Acceleration Program: Developing Strategic Mindset Cross Cultural Leadership Program from Blue Vision, Australia;
- Leadership & Strategic Skill from PPM Management, Jakarta;
- Corporate Care Batch-3 from Asia Works, Jakarta
- Quantity Surveyor Training (1999);
- ISO 9000 Quality Management System from Prosys (1996).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2018-2020);
- General Manager Departemen Sipil Umum I (2017-2018);
- General Manager Departemen Sinergi Bisnis (2016-2017);
- Manajer Divisi Operasi 4 Sipil Umum II (2014-2015).

Employment History

- Director of Operation I at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, (2018-2020).
- General Manager of Civil Construction I Department (2017-2018);
- General Manager of Business Sinergy Department, (2016-2017);
- Operation 4 Division Manager of General Civil II, (2014-2015).

Rangkap Jabatan

-

Concurrent Position

-

Penghargaan

- Most Popular CEO Awards dari The Iconomics (2023);
- The Most Committed GRC Leader (2022);
- Top Leader on CSR Commitment 2022 dari TOP CSR Award 2022 (2022);
- The Best Leadership on CSR Program dari First Indonesia Magazine (2022);
- Top Leader on CSR Commitment (2021);
- The Best CEO Focus on HC (2021);
- The Most Committed GRC Leader (2021);
- Special Mention Strategic Marketing CMO of The Year (2020);
- The Most Committed GRC Leader (2020);
- Top Leader on Digital Implementation dari IT Works (2020);
- Terpopuler di Media Digital Kategori Pemimpin BUMN Tbk (2020);
- Top Most Committed GRC Leader 2020 dari Top Business (2020);
- ASEAN Outstanding Engineering Achievement (2019);
- Best Marketing dari PII (2019);
- Best Employee of The Year dari Direktur Utama (2012);
- Innovation Award dari Direktur Utama (2011);
- Zero Accident Award dari Direktur Utama (2010);
- The Best Project Performance of The Year dari PT Jasa Marga (2008).

Award

- Most Popular CEO Awards from The Iconomics (2023);
- The Most Committed GRC Leader (2022);
- Top Leader on CSR Commitment 2022 from TOP CSR Award 2022 (2022);
- The Best Leadership on CSR Program from First Indonesia Magazine (2022);
- Top Leader on CSR Commitment (2021);
- The Best CEO Focus on HC (2021);
- The Most Committed GRC Leader (2021);
- Special Mention Strategic Marketing CMO of The Year (2020);
- The Most Committed GRC Leader (2020);
- Top Leader on Digital Implementation from IT Works (2020);
- Most Popular in Digital Media, SOE Tbk Leader Category (2020);
- Top Most Committed GRC Leader 2020 from Top Business (2020);
- ASEAN Outstanding Engineering Achievement (2019);
- Best Marketing from PII (2019);
- Best Employee of the Year from the President Director (2012);
- Innovation Award from the President Director (2011);
- Zero Accident Award from the President Director (2010);
- The Best Project Performance of the Year from PT Jasa Marga (2008).

Kepemilikan Saham

0.0036% (1.424.200 lembar saham).

Shareholding

0.0036% (1,424,200 shares)



Adityo Kusumo

Direktur Keuangan
Director of Finance

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama | Legal Basis of Appointment

- Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa pada 4 Februari 2022 yang kemudian dikukuhkan dalam Akta Keputusan RUPSLB No. 3 tanggal 4 Februari 2022.
- Kemudian dialih tugaskan sebagai Direktur Keuangan Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2024 yang kemudian dikukuhkan dalam Akta No. 08 pada 06 Juni 2024, seiring dengan perubahan nomenklatur jabatan Direksi.
- Appointed for the first time as WIKA's Director of Finance and Risk Management based on the Extraordinary GMS resolution on February 4, 2022, as stated in the Deed of EGMS Resolution No. 3 dated February 4, 2022.
- Afterwar reassigned as the Director of Finance of the Company based on the resolution of Annual General Meeting of Shareholders on May 15, 2024, which was subsequently formalized in Deed No. 08 dated June 06, 2024 along with the changes in the nomenclature of the Board of Directors' positions.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir | Legal Basis for Final Appointment

-

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian
Usia 42 tahun per 31 Desember 2024
42 years old, as of December 31, 2024

Domisili | Domicile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan | Term of Office

4 Februari 2022 - RUPST 2027, Periode Pertama
February 4, 2020 AGMS 2027, First Period

Riwayat Pendidikan

- Magister of Business Administration (MBA), UCLA Anderson School of Management Finance (2014);
- Sarjana (S1) Teknik Elektro, Universitas Indonesia (2004).

Educational Background

- Master of Business Administration (MBA), UCLA Anderson School of Management - Finance (2014).
- Bachelor of Electrical Engineering, University of Indonesia (2004);

Sertifikasi

- Workshop Wakil Menteri BUMN "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future dari Kementerian BUMN (2024);
- Workshop Penyusunan Petunjuk Teknis ICOFR BUMN dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024)
- Workshop KBUMN dari Kementerian BUMN (2024);
- Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani dari Kementerian BUMN (2024);
- Expert Talks ESG : Embracing the Future Business Environment bersama Prof Rhenald Kasali (2023)
- Conference Restructuring, Insolvency & Governance dari PT Perusahaan Pengelola Aset (2023)
- Vicon Pelatihan GRC Masterclass Program 2023, topik CG Methodology & Environmental & Social Management Systems dari BSE (2023)
- Vicon Pelatihan GRC Masterclass Program 2023, topik Joint Venture between SOE and Private Sector dari BSE (2023)
- Vicon Pelatihan GRC Masterclass Program 2023, topik GRC Integrated Information For Supervisory Board dari BSE (2023)
- Vicon Pelatihan GRC Masterclass Program 2023, topik ESG for Boards Governance of ESG dari BSE (2023)
- Forum Penguatan Governansi dan Integritas Pelaporan Keuangan dari Kementerian BUMN (2023)
- Vicon Sharing Session Manajemen Risiko dengan tema Peningkatan Daya Saing Perusahaan melalui Penerapan Governance, Risk and Compliance (GRC), (2023)
- Vicon Pelatihan GRC Masterclass Program 2023, topik Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN dari BSE (2023)
- Vicon Pelatihan GRC Masterclass Program 2023, topik Introduction to ESG & IFC Performance Standards dari BSE (2023)
- Vicon Pelatihan GRC Masterclass Program 2023, topik Presentasi Peningkatan dan Penerbitan Efek Bersefat Utang & Sukuk (EBUS) dari BSE (2023);
- Sosialisasi IFRS Sustainability Disclosure Standards dari KBUMN (2023);

Certification

- Workshop on the Deputy Minister of SOEs "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future from the Ministry of SOEs (2024);
- Workshop on Preparation of Technical Instructions for BUMN ICOFR from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024)
- Workshop on KBUMN from the Ministry of SOEs (2024);
- Strategic Business Workshop of the Deputy Minister of SOEs Rosan Roeslani from the Ministry of SOEs (2024);
- Expert Talks ESG: Embracing the Future Business Environment with Prof Rhenald Kasali (2023)
- Restructuring, Insolvency & Governance Conference from PT Perusahaan Pengelola Aset (2023)
- Vicon GRC Masterclass Program 2023 Training, with the topic CG Methodology & Environmental & Social Management Systems from BSE (2023)
- GRC Masterclass Program Training Vicon 2023, with the topic Joint Venture between SOE and Private Sector from BSE (2023)
- Vicon GRC Masterclass Program 2023 Training, with the topic GRC Integrated Information For Supervisory Board from BSE (2023)
- Vicon Training GRC Masterclass Program 2023, with the topic ESG for Boards Governance of ESG from BSE (2023)
- Forum for Strengthening Governance and Financial Reporting Integrity from the Ministry of SOE (2023)
- Vicon Sharing Session on Risk Management with the theme Increasing Company Competitiveness through the Implementation of Governance, Risk and Compliance (GRC), (2023)
- Vicon GRC Masterclass Program 2023 Training, with the topic Socialization of SOE & SOE Subsidiary Rating from BSE (2023)
- GRC Masterclass Program Training Vicon 2023, with the topic Introduction to ESG & IFC Performance Standards from BSE (2023)
- GRC Masterclass Program Training Vicon 2023, with the topic Presentation on Rating and Issuance of Debt Securities & Sukuk (EBUS) from BSE (2023);
- Socialization of IFRS Sustainability Disclosure Standards from Ministry of SOE (2023);

- Sosialisasi Permen BUMN dari KBUMN (2023);
- Global Islamic Finance Summit 2023 dari Bank Syariah Indonesia (2023);
- Mandiri Investment Forum 2023 – Prevailing Over Turbulence dari Bank Mandiri (2023);
- Vicon Peran Organ Pengelola Risiko dalam Risk Management – Program Masterclass GRC Foundation dari BLMI (2022);
- Workshop Self Assessment Implementasi GCG tahun 2022 dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (2022);
- Vicon Peran Strategis CFO & CRO – Program Masterclass GRC Foundation dari BLMI (2022);
- Vicon Governance Risk Compliance – Program GRC Masterclass dari BLMI (2022);
- Halfday Seminar Mobilising sustainable Finance & Sustainability Reporting toward a Green Economy dari BPKP (2022);
- BUMN Legal Summit dari KBUMN (2022);
- Young BUMN Leadership Summit dari KBUMN (2022);
- HSBC Summit 2022 Powering the transition to net zero dari Bank HSBC (2022);
- Half Day Seminar Leading in Dynamics for Millennial Leaders dari KBUMN (2022);
- Vicon Program Onboarding Directorship Program angkatan ke-5 tahun 2022 dari KBUMN & FHCI (2022);
- Workshop Toll Road Perkembangan Kondisi Usaha Jalan Tol dari BNI Sekuritas (2022);
- Workshop SAP dari WIKA (2022);
- Vicon CFO School 2 dari KBUMN (2022);
- Leadership Forum dari KBUMN (2022);
- Mandiri Investment Forum dari Bank Mandiri (2022);
- Effective Presentation Skills dari The Boston Consulting Group/Jakarta (2018);
- TTT Middle Management Development Program (2017);
- Middle Management Development Program (Modul 3) dari Mandiri University - Michigan Ross & Jiao Tong/Shanghai (2016);
- Middle Management Development Program (Modul 2) dari Mandiri University/Jakarta (2016);
- Middle Management Development Program (Modul 2) dari Mandiri University/Bogor (2016);
- TTT Change & Culture Academy - Modul Induction untuk Pelaksana dari Training Center Bank Mandiri/Jakarta (2011);
- Workshop Aplikasi Mandiri SLA Quality Check (MSQC) dari Training Center Bank Mandiri/Jakarta (2011);
- Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level 1 dari Bank Mandiri/Jakarta (2011);
- Team Work Session dari Training Center Bank Mandiri/Jakarta (2011);
- TTT Change & Culture Academy dari Training Center Bank Mandiri/Jakarta (2010);
- Sosialisasi Project PPA One GL dari Training Center Bank Mandiri/ Jakarta (2009);
- Acceleration to outperform the market dari Bank Mandiri & TASS Consulting/Jakarta (2009);
- Effective Decision Making dari Training Center Bank Mandiri/ Jakarta(2009);
- SOS Program Aliansi untuk Segmen Commercial Banking dari Training Center Bank Mandiri/Jakarta (2008);
- Training Insurance & Retirement dari Training Center Bank Mandiri/ Jakarta (2008);
- Fundamental Financial Planning & Investment dari Training Center Bank Mandiri/Jakarta (2007);
- Cash Management Training dari Training Center Bank Mandiri/Jakarta (2006).
- Socialization of SOE Ministerial Regulations from Ministry of SOE (2023);
- Global Islamic Finance Summit 2023 from Bank Syariah Indonesia (2023);
- Mandiri Investment Forum 2023 – Prevailing Over Turbulence from Bank Mandiri (2023);
- Vicon on the Role of Risk Management Organs in Risk Management – GRC Foundation Masterclass Program from BLMI (2022);
- 2022 GCG Self Assessment Workshop from BPKP DKI Jakarta Province Representative (2022);
- Vicon Strategic Roles of CFO & CRO – GRC Foundation Masterclass Program from BLMI (2022);
- Vicon Governance Risk Compliance – GRC Masterclass Program from BLMI (2022);
- Halfday Seminar Mobilizing sustainable Finance & Sustainability Reporting toward a Green Economy from BPKP (2022);
- SOE Legal Summit from Ministry of SOE (2022);
- Young SOE Leadership Summit from Ministry of SOE (2022);
- HSBC Summit 2022 Powering the transition to net zero from HSBC Bank (2022);
- Half Day Seminar Leading in Dynamics for Millennial Leaders from Ministry of SOE (2022);
- Vicon Program Onboarding Directorship Program 5th batch of 2022 from Ministry of SOE & FHCI (2022);
- Toll Road Workshop on Development of Toll Road Business Conditions from BNI Sekuritas (2022);
- SAP Workshop from WIKA (2022);
- Vicon CFO School 2 from Ministry of SOE (2022);
- Leadership Forum from Ministry of SOE (2022);
- Mandiri Investment Forum from Bank Mandiri (2022);
- Effective Presentation Skills from The Boston Consulting Group/Jakarta (2018);
- TTT Middle Management Development Program (2017);
- Middle Management Development Program (Module 3) from Mandiri University - Michigan Ross & Jiao Tong/Shanghai (2016);
- Middle Management Development Program (Module 2) from Mandiri University/Jakarta (2016);
- Middle Management Development Program (Module 2) from Mandiri University/Bogor (2016);
- TTT Change & Culture Academy - Induction Module for Executor from Bank Mandiri/Jakarta Training Center (2011);
- Workshop on Independent SLA Quality Check (MSQC) Application from Bank Mandiri Training Center/Jakarta (2011);
- Risk Management Competency Certification Level 1 from Bank Mandiri/Jakarta (2011);
- Team Work Session from Bank Mandiri/Jakarta Training Center (2011);
- TTT Change & Culture Academy from Bank Mandiri/Jakarta Training Center (2010);
- Socialization of PPA One GL Project from Bank Mandiri/Jakarta Training Center (2009);
- Acceleration to outperform the market from Bank Mandiri & TASS Consulting/Jakarta (2009);
- Effective Decision Making from Bank Mandiri/Jakarta Training Center (2009);
- SOS Alliance Program for Commercial Banking Segment from Bank Mandiri/Jakarta Training Center (2008);
- Insurance & Retirement Training from Bank Mandiri/Jakarta Training Center (2008);
- Fundamental Financial Planning & Investment from Bank Mandiri/Jakarta Training Center (2007);
- Cash Management Training from Bank Mandiri/Jakarta Training Center (2006).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024-sekarang);
- Komisaris Utama PT Wijaya Karya Realty (2022-2023);
- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022-2023);
- Executive Assistant Wakil Menteri BUMN II, Kementerian BUMN (2019-2022);
- Vice President, Head of Mergers & Acquisitions (M&A) Department, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk(2017-2019);
- Assistant Vice President, Project Leader Mergers & Acquisitions (M&A), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2017).

Employment History

- Finance Director of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024-present);
- President Commissioner of PT Wijaya Karya Realty (2022-2023);
- Director of Finance and Risk Management, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022-present);
- Executive Assistant Deputy Minister of SOE II, Ministry of SOE (2019-February 2022).
- Vice President, Head of Mergers & Acquisitions (M&A) Department, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2019);
- Assistant Vice President, Project Leader Mergers & Acquisitions (M&A), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2017);=

Rangkap Jabatan

-

Concurrent Position

-

Penghargaan

- Mandiri Best Employee, kategori AVP dari Bank Mandiri (2017);
- Mandiri Best Employee, kategori Senior Manager dari Bank Mandiri (2010).

Award

- Mandiri Best Employee, AVP category from Bank Mandiri (2017);
- Mandiri Best Employee, Senior Manager category from Bank Mandiri (2010).

Kepemilikan Saham

0,0013% (510.000 lembar saham).

Shareholding

0,0013%(510,000 shares)



Hadjar Seti Adji

Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi
Director of Human Capital Management and Transformation

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama | Legal Basis of Appointment

- Diangkat pertama kali sebagai Direktur Human Capital Management berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa pada 5 Agustus 2022, yang kemudian dikukuhkan melalui Akta Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan No. 3 Tanggal 5 Agustus Tahun 2022.
- Kemudian dialih tugaskan sebagai Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2024 yang kemudian dikukuhkan dalam Akta No. 08 pada 06 Juni 2024, seiring dengan perubahan nomenklatur jabatan Direksi.
- Appointed for the first time as WIKA's Director of Human Capital and Development based on the Extraordinary GMS resolution on August 5, 2022, as stated in the Deed of EGMS Resolution No. 3 dated August 5, 2022
- Afterward reassigned as the Director of Human Capital Management and Transformation of the Company based on the resolution of Annual General Meeting of Shareholders on May 15, 2024, which was then formalized in Deed No. 08 dated June 06, 2024 along with the changes in the nomenclature of the Board of Directors' positions.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir | Legal Basis for Final Appointment

-

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian
Usia 59 tahun per 31 Desember 2024
59 years old, as of December 31, 2024

Domisili | Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Periode Jabatan | Term of Office

5 Agustus 2022 - RUPST 2027, Periode Pertama
August 5, 2022-AGMS 2027, First Period

Riwayat Pendidikan

- Master of Engineering Science, University of New South Wales, Sydney (2002);
- Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Diponegoro (1991).

Educational Background

- Master of Engineering Science, University of New South Wales, Sydney (2002).
- Bachelor of Civil Engineering, Diponegoro University (1991);

Sertifikasi

- Vicon Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan TI BUMN dari Kementerian BUMN (2024)
- Vicon Sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 76/SE/DK/2024 tentang Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Kementerian PUPR (2024)
- Vicon Sosialisasi Profiling Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dari Kementerian BUMN (2024)
- Sosialisasi Bimtek Pengisian LHKPN tahun lapor 2023 (Hybrid) dari KPK (2024)
- Engineering Mastery Workshop dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024)
- Mini Workshop Upgrading CoP dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024)
- Vicon Program Pelatihan dan Sertifikasi CRGP (Certified Risk Governance Professional Level 4) dari LSPMR (2024)
- Seminar "Analisis Kinerja BUMN 2024 dan Prospek BUMN Masa Depan" Diselenggarakan oleh BUMN Research Centre (BRG) LMFEBUI dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024)
- Seminar Kesehatan dengan tema "Optimizing Employee Health and Wellness Through Vaccination" kerjasama dg Biofarma, TJSL & Srikandi WIKA dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024)
- Expert Talks ESG : Embracing the Future Business Environment (2023)
- Seminar Merger dan Akuisisi di BUMN (2023)
- Workshop Module 2 CHRO School tahun 2023 (2023)
- The 14th Indonesia Human Capital Summit 2023 (2023)
- Webinar Change your breath, Change your Life dari Tujuhub (2023)
- Seminar Kepemimpinan Perempuan "Breaking the Glass Ceiling : When Women Makes It to The Top" (2023)
- Vicon Pelatihan GRC Masterclass, topik CG Methology & Environmental & Social Management Systems dari BSE (2023)
- Workshop Modul 1 CHRO School tahun 2023 (2023)

Certification

- Vicon Socialization of SOE IT Implementation Policy from the Ministry of SOE (2024)
- Vicon Socialization of Circular Letter of the Director General of Construction Development No. 76/SE/DK/2024 concerning Guidelines for the Use of Foreign Construction Workers in the Ministry of Public Works and Public Housing from the Ministry of PUPR (2024)
- Vicon Socialization of Profiling of the Implementation of the Personal Data Protection Law from the Ministry of SOE (2024)
- Socialization of the 2023 LHKPN Report Year (Hybrid) Completion Technical Guidance from the KPK (2024)
- Engineering Mastery Workshop from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024)
- Mini Workshop Upgrading CoP from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024)
- Vicon CRGP (Certified Risk Governance Professional Level 4) Training and Certification Program from LSPMR (2024)
- Seminar "SOE Performance Analysis 2024 and SOE Future Prospects" Organized by the SOE Research Center (BRG) LMFEBUI from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024)
- Health Seminar with the theme "Optimizing Employee Health and Wellness Through Vaccination" in collaboration with Biofarma, TJSL & Srikandi WIKA from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024)
- Expert Talks ESG: Embracing the Future Business Environment (2023)
- Seminar on Mergers and Acquisitions at SOE (2023)
- CHRO School Module 2 Workshop in 2023 (2023)
- The 14th Indonesia Human Capital Summit 2023 (2023)
- Webinar Change your breath, Change your Life from Tujuhub (2023)
- Women's Leadership Seminar "Breaking the Glass Ceiling: When Women Make It to the Top" (2023)
- Vicon GRC Masterclass Training, with the topic CG Methology & Environmental & Social Management Systems from BSE (2023)
- 2023 CHRO School Module 1 Workshop (2023)

- Vicon Pelatihan GRC Masterclass, topik GRC Integrated Information for Supervisory Board dari BSE (2023)
- Vicon Pelatihan GRC Masterclass, topik ESG for Boards-Governance of ESG dari BSE (2023)
- Vicon Pelatihan GRC Masterclass, topik Sosialisasi Pemingkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN, dari BSE (2023)
- Vicon Sharing Session episode I, topik Peran budaya AKHLAK dalam menyukseskan transformasi organisasi dan peningkatan kinerja perusahaan dari FHCI (2023)
- Vicon Pelatihan dan pembekalan untuk program FIDIC in House Training BUMN (2023)
- Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN dari Kementerian BUMN (2023)
- Vicon CBDO Innovation School dari BLMI (2023)
- Workshop CBDO Innovation School Cohort 1 dari BLMI (2023)
- BLMI Masterclass – CHRO dari BLMI (2023)
- Vicon Peran Organ Pengelola Risiko dalam Risk Management, Program Mascterclass GRC Foundation, dari BLMI (2022)
- Workshop Self Assessment Implementasi GCG tahun 2022, dari BPKP (2022)
- Vicon Sharing Session Co-operation and Integration dari FHCI (2022)
- Sosialisasi Program Digital Talent BUMN dan Sharing Session Keamanan Data BUMN dari Kementerian BUMN (2022)
- Workshop Portal HC BUMN Klaster Jasa Infrastruktur dari Kementerian BUMN (2022)
- Lean Construction Implementation dari ITB (2020);
- L&D Insight Session by Cegos dari PT Cegos Indonesia (2020);
- The 6th Indonesia HR Director Summit dari Inti Pesan (2020);
- Pengenalan ISO SNI 37001 ttg sistem dari Visi Integritas (2019);
- Media Training Direksi PT Waskita Karya dari Edelman (2019);
- CEO talks, Visi, Misi, Budaya Perusahaan dari Waskita Karya (2018);
- Sharing Session : Talent Mobility & People Analytics in Implementation dari FHCI (2018);
- Gratifikasi di lingkungan Waskita Karya dari Waskita Karya (2018);
- Business strategy dari Prasetya Mulya Business School (2017);
- Training Capacity building Batch 1 dari PT PP (Persero) Tbk (2016);
- Motivasi Smart Leadership dari PT PP (Persero) Tbk (2016);
- Competency Assessment Training dari Bina Potensia (2016);
- HR for Non HR dari Lutan Edukasi (2014);
- Leadership Practies dari Learning resources (2009);
- Sertifikasi Assessment Skill dari Jakarta Perspective (2008);
- Talent Pool Program dari PT Bina Potensi (2006);
- Managerial Skills Assessment dari PT Bina Potensi (2006);
- Managing with NLP dari Indo NLP (2006);
- Seminar Geoteknik dari FT UI (1999);
- Review Engineering dari Puslatjkon PPU (1999);
- Int Conf Long Span Bridge dari PT PP (1999).
- Vicon GRC Masterclass Training, with the topic GRC Integrated Information for Supervisory Board from BSE (2023)
- Vicon GRC Masterclass Training, with the topic ESG for Boards-Governance of ESG from BSE (2023)
- Vicon GRC Masterclass Training, with the topic Socialization on SOE & SOE Subsidiaries Rating, from BSE (2023)
- Vicon Sharing Session episode I, with the topic The role of AKHLAK culture in making organizational transformation successful and improving company performance from FHCI (2023)
- Vicon Training and briefing for the SOE FIDIC in House Training program (2023)
- Socialization of SOE Ministerial Regulations from the Ministry of SOE (2023)
- Vicon CBDO Innovation School from BLMI (2023)
- CBDO Innovation School Cohort 1 Workshop from BLMI (2023)
- BLMI Masterclass – CHRO from BLMI (2023)
- Vicon on the Role of Risk Management Organs in Risk Management, GRC Foundation Masterclass Program, from BLMI (2022)
- 2022 GCG Self Assessment Workshop, from BPKP (2022)
- Vicon Sharing Session Co-operation and Integration from FHCI (2022)
- Socialization of the SOE Digital Talent Program and SOE Data Security Sharing Session from the Ministry of SOE (2022)
- SOE HC Portal Workshop Infrastructure Services Cluster from the Ministry of SOE (2022)
- Lean Construction Implementation from ITB (2020);
- L&D Insight Session by Cegos from PT Cegos Indonesia (2020);
- The 6th Indonesia HR Director Summit from Inti Pesan (2020);
- Introduction of ISO SNI 37001 regarding systems from Visi Integritas (2019);
- Media Training Directors of PT Waskita Karya by Edelman (2019);
- CEO talks, Vision, Mission, Corporate Culture from Waskita Karya (2018);
- Sharing Session: Talent Mobility & People Analytics in Implementation from FHCI (2018);
- Gratification within Waskita Karya from Waskita Karya (2018);
- Business strategy from Prasetya Mulya Business School (2017);
- Capacity building training Batch 1 from PT PP (Persero) Tbk (2016);
- Smart Leadership Motivation from PT PP (Persero) Tbk (2016);
- Competency Assessment Training from Bina Potensia (2016);
- HR for Non HR from Lutan Education (2014);
- Leadership Practices from Learning resources (2009);
- Certification of Assessment Skills from Jakarta Perspective (2008);
- Talent Pool Program from PT Bina Potensi (2006);
- Managerial Skills Assessment from PT Bina Potensi (2006);
- Managing with NLP from Indo NLP (2006);
- Geotechnical Seminar from FT UI (1999);
- Engineering Review from Puslatjkon PPU (1999);
- Int Conf Long Span Bridge from PT PP (1999).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024-sekarang);
- Komisaris Utama PT Wijaya Karya Rekrutasi (2022-2023)
- Direktur Human Capital Management PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023-sekarang);
- Direktur Human Capital & Pengembangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022-2023);
- Director of HCM & System Development PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2019-2022);
- Director of HCM PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2018-2019);
- Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT PP (Persero) Tbk (2016-2018);
- Kepala Divisi Riset & Teknologi PT PP (Persero) Tbk (2014-2018);
- Kepala Divisi Manajemen Risiko PT PP (Persero) Tbk (2014-2015).

Employment History

- Director of Human Capital Management and Transformation of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024-present);
- Director of Human Capital Management, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023-present);
- Director of Human Capital & Development, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022-2023);
- Director of HCM & System Development, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2019-2022);
- Director of HCM, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2018-2019);
- Head of Business Development Division, PT PP (Persero) Tbk (2016-2018);
- Head of Research & Technology Division, PT PP (Persero) Tbk (2014-2018);
- Head of Risk Management Division, PT PP (Persero) Tbk (2014-2015).

Rangkap Jabatan

-

Concurrent Position

-

Penghargaan

- Lifetime Achievement GreenShip Award 2023 dari Green Building Council Indonesia (2023);
- Best Tbk Company - Revolusi Mental Award 2019 dari BUMN Track (2019);
- #2 Special Mention in Content Marketing, BUMN Marketeers Award 2017 dari Markplus Inc. (2017);
- ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award for Year 2016 dari ASEAN Federation of Engineering Organization (2015);
- Marketeers of The Year, Jakarta 2015 dari Markplus Inc. (2015);
- Gold Winner - Adhilestari Rekrutasi, 2014 dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) (2014).

Award

- Lifetime Achievement GreenShip Award 2023 from the Green Building Council Indonesia (2023);
- Best Tbk Company - Mental Revolution Award 2019 from BUMN Track (2019);
- #2 Special Mention in Content Marketing, SOE Marketeers Award 2017 from Markplus Inc. (2017);
- ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award for Year 2016 from ASEAN Federation of Engineering Organizations (2015);
- Marketeers of The Year, Jakarta 2015 from Markplus Inc. (2015);
- Gold Winner - Adhilestari Rekrutasi, 2014 from Indonesian Engineers Association (PII) (2014).

Kepemilikan Saham

0.0013% (510.000 lembar saham).

Shareholding

0.0013%(510,000 shares)



Hananto Aji

Direktur Operasi I
 Director of Operation I

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama | Legal Basis of Appointment

Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Operasi I WIKA berdasarkan keputusan RUPST 8 Juni 2020, yang kemudian dikukuhkan melalui Akta Keputusan RUPS Tahunan Perseroan No. 33 tanggal 16 Juni 2020. Beliau efektif menjabat pada 8 Juni 2020.

Appointed for the first time as WIKA's Director of Operations I based on the AGMS resolution on June 8, 2020, as stated in the Deed of the Company's Annual GMS Resolution No. 33 dated June 16, 2020. Effectively took office on June 8, 2020.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir | Legal Basis for Final Appointment

-

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian
 Usia 50 tahun per 31 Desember 2024
 50 years old, as of December 31, 2024

Domisili | Domicile

Banjarsari, Surakarta, Indonesia
 Banjarsari, Surakarta, Indonesia

Periode Jabatan | Term of Office

8 Juni 2020 - RUPST 2025, Periode Pertama
 June 8, 2020-AGMS 2025, First Period

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Profesi Insinyur (Teknik Sipil), Universitas Gadjah Mada (2020);
- Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1997).

Educational Background

- Engineer Professional Education (Civil Engineering), Gadjah Mada University (2020).
- Bachelor of Civil Engineering, Sebelas Maret University, Surakarta (1997).

Sertifikasi

- Certified Risk Governance Professional dari RAP Learning Center (2024);
- Strengthening Leadership for Transformation By Ignasius Jonan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024);
- Transformation Talk Bersama Wamen KBUMN dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024);
- Sosialisasi Kebijakan serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024);
- Seminar Expert Talks ESG : Embracing the Future Business Environment dengan Narasumber Pak Rhenald Kasali bersama dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023);
- CG Methodology and Environmental and Social Management System dari Kementerian BUMN (2023);
- GRC Integrated information for Supervisory Board dari Kementerian BUMN (2023);
- ESG For Boards - Governance Of ESG dari Kementerian BUMN (2023);
- Strategi Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani dari Kementerian BUMN (2023);
- Webinar Sharing Session Cyber Security Guideline BUMN dari Kementerian BUMN (2023);
- Penyusunan Strategi Komunikasi BUMN Karya tahun 2023 dari Kementerian BUMN (2023);
- Vicon Sosialisasi LHKPN dari KPK (2022);
- Masterclass GRC Foundation "Peran Organ Pengelola Risiko dalam Risk Management" dari Kementerian BUMN (2022);
- Webinar Kajian Akademis Masalah Hukum dan Manajemen, "Mencegah Kriminalisasi Direksi BUMN" dari Kementerian BUMN (2022);
- Leadership Forum dari Kementerian BUMN (2022);
- FGD Direktorat Operasi Infrastruktur dari Divisi HC PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022);
- CEO Sharing Session Direktorat 1 dari Divisi Infrastruktur 1 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022);
- ICOLD 27TH Congress and 90TH Annual Meeting dari ICOLD-CIGB/Perancis (2022);

Certification

- Certified Risk Governance Professional from RAP Learning Center (2024);
- Strengthening Leadership for Transformation By Ignasius Jonan from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024);
- Transformation Talk with Deputy Minister of State-Owned Enterprises from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024);
- Socialization of Policy and Guidelines for Subsidiary Management Principles and Integrated Governance from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024);
- Expert Talks ESG Seminar: Embracing the Future Business Environment with Speaker Mr. Rhenald Kasali from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023);
- CG Methodology and Environmental and Social Management System from the Ministry of State-Owned Enterprises (2023);
- GRC Integrated information for Supervisory Board from the Ministry of State-Owned Enterprises (2023);
- ESG For Boards - Governance Of ESG from the Ministry of SOEs (2023);
- Business Workshop Strategy of Deputy Minister of SOEs Rosan Roeslani from the Ministry of SOEs (2023);
- Webinar Sharing Session Cyber Security Guideline SOEs from the Ministry of SOEs (2023);
- Preparation of Communication Strategy of SOE Karya in 2023 from the Ministry of SOEs (2023);
- Vicon Socialization of LHKPN from the KPK (2022);
- Masterclass GRC Foundation "The Role of Risk Management Organs in Risk Management" from the Ministry of SOEs (2022);
- Webinar Academic Study of Legal and Management Issues, "Preventing Criminalization of SOE Directors" from the Ministry of SOEs (2022);
- Leadership Forum from the Ministry of SOEs (2022);
- FGD of Infrastructure Operations Directorate of HC Division of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022);
- CEO Sharing Session of Directorate 1 of Infrastructure Division 1 of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022);
- ICOLD 27TH Congress and 90TH Annual Meeting of ICOLD-CIGB/France (2022);

- Peserta Workshop Assessment Implementasi GCG dari WIKA Group dan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (2021);
- Pelantikan Insinyur Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada (2021);
- Virtual Inhouse Training Professional Directors Program WIKA dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (2020);
- Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada Kementerian BUMN dari Kementerian BUMN dan International Financial Corporation (IFC) (2020);
- FGD Pemasaran dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Wikasatrian Gadog (2020);
- Strategic Implementation Batch 4 Modul 1 dari Jakarta (2019);
- Strategic Investment Batch 1 dari Jakarta (2019);
- Developing Business Savvy Attributes For Top Executives dari Bangkok (2019);
- Effective Business Execution Strategic Mindset Level MD dari Jakarta (2018);
- Good Corporate Governance dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Wikasatrian Gadog (2017);
- Ahli K3 Kebakaran Kelas C+D dari ISC Learning Center (2017);
- Sertifikasi Keterampilan Operator Mesin Excavator dari Balai Material dan Peralatan Konstruksi (2017);
- Corporate Finance For Non-Finance Batch dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Wikasatrian Gadog (2017);
- Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi Muda dari Proyek Jalan Tol Manado-Bitung, Sulawesi Utara (2017);
- Sharing Session: Digital Leadership dari Holiday Inn, Kemayoran (2017);
- Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Sanggar Prathivi Building Jakarta Pusat (2017);
- Sertifikasi Asean Chartered Profesional Engineer (ACPE) dari Cambodia (2017);
- Sharring Session: Marketing dari JS Luwansa Hotel Kuningan, Jakarta (2017);
- Sertifikasi Pengawas K3 Migas dari Permata Kuningan Jakarta (2017);
- Sertifikasi K3 Scaffolding Inspector dari Gedung LPMP Jakarta (2017);
- Sharring Session: Global Leadership dari The Hermitage Hotel Jakarta Pusat (2017);
- Seminar Avoiding Dissaster of Mega Project dari Seminar PT Daya Dimensi Indonesia (2017);
- Sertifikasi Ahli K3 Listrik dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017);
- Pelatihan Auditor SMK3 Tersertifikasi Kemenaker RI dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017);
- Middle Management Development Program Modul 2 - Marketing & Networking dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Wikasatrian Gadog (2017);
- Middle Management Development Program Modul 1 - Strategic Business Management dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Wikasatrian Gadog (2016).
- Participant in GCG Assessment Workshop from WIKA Group and BPKP Representative for DKI Jakarta Province (2021);
- Inauguration of Engineers for Engineering Profession Program, Faculty of Engineering, from Gadjah Mada University (2021);
- Virtual Inhouse Training Professional Directors WIKA Program from Indonesian Institute for Corporate Directorship (2020);
- Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Ministry of SOE from the Ministry of SOE and International Financial Corporation (IFC) (2020);
- Marketing FGD from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Wikasatrian Gadog (2020);
- Strategic Implementation Batch 4 Module 1 from Jakarta (2019);
- Strategic Investment Batch 1 from Jakarta (2019);
- Developing Business Savvy Attributes For Top Executives from Bangkok (2019);
- Effective Business Execution Strategic Mindset Level MD from Jakarta (2018);
- Good Corporate Governance from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Wikasatrian Gadog (2017);
- Class C+D Fire Safety Expert from ISC Learning Center (2017);
- Excavator Machine Operator Skill Certification from Center for Construction Materials and Equipment (2017);
- Corporate Finance For Non-Finance Batch from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Wikasatrian Gadog (2017);
- Junior Construction OHS Expert Certification from Manado- Bitung Toll Road Project, North Sulawesi (2017);
- Sharing Session: Digital Leadership from Holiday Inn, Kemayoran (2017);
- Certification of Expertise in Government Procurement of Goods/Services from Sanggar Prathivi Building, Central Jakarta (2017);
- ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) Certification from Cambodia (2017);
- Sharing Session: Marketing from JS Luwansa Hotel Kuningan, Jakarta (2017);
- Oil and Gas OHS Superintendent Certification from Permata Kuningan Jakarta (2017);
- Scaffolding Inspector OHS Certification from LPMP Jakarta Building (2017);
- Sharing Session: Global Leadership from The Hermitage Hotel Central Jakarta (2017);
- Seminar on Avoiding Disaster of Mega Project Seminar from PT Daya Dimensi Indonesia (2017);
- Electricity OHS Expert Certification from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017);
- Training of Certified OHSMS Auditor from Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017);
- Middle Management Development Program Module 2 - Marketing & Networking from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Wikasatrian Gadog (2017);
- Middle Management Development Program Module 1 - Strategic Business Management from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Wikasatrian Gadog (2016).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Operasi 1 (2020-sekarang);
- General Manager Sinergi Bisnis (2019-2020);
- Manajer Divisi 5 Divisi Sipil Umum 3 (2017-2019);
- Manajer Divisi 4 Departemen Sipil Umum 2 (2017);
- Manajer (Tersus) Departemen Sipil Umum 2 (2016-2017);
- Manajer Divisi 4 Departement Sipil Umum 2 (2016-2017);
- Manajer Divisi 2 Departement Sipil Umum 1 (2015);
- Manajer Divisi 4 Departement Sipil Umum 2 (2015-2017)
- Manajer DSU 2 DOT 1 Departement Sipil Umum 2 (2015).

Employment History

- Director of Operations 1 (2020-present);
- General Manager of Business Synergy (2019-2020);
- Manager of Division 5, General Civil Division 3 (2017-2019);
- Manager of Division 4, General Civil Division 2 (2017);
- Manager (Tersus), General Civil Division 2 (2016-2017);
- Manager of Division 4, General Civil Department 2 (2016-2017);
- Manager of Division 2, General Civil Department 1 (2015);
- Manager of Division 4, General Civil Department 2 (2015-2017);
- Manager of DSU 2 DOT 1, General Civil Department 2 (2015);

Rangkap Jabatan

- Komisaris Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2021-sekarang);
- Komisaris PT. Jasamarga Gedebage Cilacap (2022);
- Komisaris Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (2020-sekarang);
- Komisaris Utama PT. Wijaya Karya Serang Panimbang (2020-2021).

Concurrent Position

- President Commissioner at PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Tbk) (2021-present);
- Commissioner at PT. Jasamarga Gedebage Cilacap (2022);
- President Commissioner at PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (2020-present).
- President Commissioner at PT. Wijaya Karya Serang Panimbang (2020-2021).

Penghargaan

Business Improvement Leader dari Departemen Human Capital PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019)

Award

Business Improvement Leader from the Human Capital Department of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019)

Kepemilikan Saham

0.0032% (1.269.000 lembar saham).

Shareholding

0.0032% (1,269,000 shares)



Harum Akhmad Zuhdi

Direktur Operasi II

Director of Operation II

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama | Legal Basis of Appointment

Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Operasi II WIKA berdasarkan keputusan RUPST 8 Juni 2020, yang kemudian dikukuhkan melalui Akta Keputusan RUPS Tahunan Perseroan No. 33 tanggal 16 Juni 2020. Beliau efektif menjabat pada 8 Juni 2020.

Appointed for the first time as WIKA's Director of Operations II based on the AGMS on June 8, 2020, as stated in the Deed of the Company's Annual GMS Resolution No. 33 dated June 16, 2020. Effectively took office on June 8, 2020.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir | Legal Basis for Final Appointment

-

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian
 Usia 54 tahun per 31 Desember 2024
 54 years old, as of December 31, 2024

Domisili | Domicile

Malang, Jawa Timur, Indonesia
 Malang, East Java, Indonesia

Periode Jabatan | Term of Office

8 Juni 2020 - RUPST 2025, Periode Pertama
 June 8, 2020-AGMS 2025, First Period

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1994).

Educational Background

Bachelor of Civil Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology (1994).

Sertifikasi

- Certified Risk Governance Professional dari RAP Learning Center (2024);
- Diklat Manajemen Umum Dana Pensiun dari Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (2022);
- Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk & KPK (2022);
- Workshop Assessment Implementasi GCG Tahun 2021 dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk & BPKP DKI Jakarta (2021);
- AKHLAK Based Leadership (Leaders as a Meaning Maker) oleh Bp. Ary Ginandjara Agustian dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk & ACT Consultant (2021);
- Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk & KPK (2021);
- Forum Engineering WIKA dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020);
- Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN dari Kementerian BUMN (2020);
- Pendidikan Program Sertifikasi Profesi Insinyur dari Universitas Gadjah Mada (UGM) (2020);
- Virtual Inhouse Training Professional Directors Program dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (2020);
- Strategic Implementation Batch 6 Modul 1 dari Strategic Implementation Batch 6 Modul 1 (2019);
- Strategic Implementation Batch 6 Modul 2 dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019);
- Strategic Implementation Batch 6 Modul 3 dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019);
- Strategic Investment Batch 2 dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019);
- Effective Business Execution Strategic Mindset Level Md dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2018);
- Pre-Strategic Mindset: Effective Business Execution 1 dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017);

Certification

- Certified Risk Governance Professional from RAP Learning Center (2024);
- Training for General Management of Pension Funds from Pension Fund Professional Certification Agency (2022);
- Socialization & Technical Guidance for Completing LHKPN from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk & KPK (2022);
- 2021 GCG Assessment Workshop from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk & BPKP DKI Jakarta (2021);
- AKHLAK Based Leadership (Leaders as a Meaning Maker) by Ary Ginandjara Agustian from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk & ACT Consultant (2021);
- Socialization & Technical Guidance for Completing LHKPN from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk & KPK (2021);
- WIKA Engineering Forum from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020);
- Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) for SOEs from Ministry of SOEs (2020);
- Education for Engineer Professional Certification Program from Gadjah Mada University (UGM) (2020);
- Virtual Inhouse Training Professional Directors Program from Indonesian Institute for Corporate Directorship (2020);
- Strategic Implementation Batch 6 Module 1 from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019);
- Strategic Implementation Batch 6 Module 2 from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019);
- Strategic Implementation Batch 6 Module 3 from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019);
- Strategic Investment Batch 2 from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019);
- Effective Business Execution Strategic Mindset Level Md from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2018);
- Pre-Strategic Mindset: Effective Business Execution 1 from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017);

- Pre-Strategic Mindset: Effective Business Execution 2 dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017);
- Pre-Strategic Mindset: Effective Business Execution 2 dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017);
- Advanced Leadership Program – Finland dari Finlandia (2016);
- Metode Pengendalian Proyek (Komersial & Keuangan) dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2014);
- Pelatihan SHE Commite WIKA 2013 dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2013);
- Basic Training Asiaworks dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2009);
- Pelatihan Keuangan Untuk Pejabat Non Keuangan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2009);
- Pendidikan Bahasa Arab dan Terjemahan Al Qur'an dari Yayasan Syuhada (2006);
- Risk Management Berbasis IT dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2006);
- Coaching Mentoring & Counselling dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2005);
- Training Business Process & Context Diagram dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2001);
- Tata Krama Pergaulan & Penampilan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (1995).

- Pre-Strategic Mindset: Effective Business Execution 2 from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017);
- Pre-Strategic Mindset: Effective Business Execution 2 from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017);
- Advanced Leadership Program – Finland from Finland (2016);
- Project Control Method (Commercial & Financial) from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2014);
- 2013 WIKA SHE Committee Training from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2013);
- Asiaworks Basic Training from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2009);
- Financial for Non-Financial Officers Training from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2009);
- Arabic Language Education and Translation of the Qur'an from Syuhada Foundation (2006);
- IT-Based Risk Management from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2006);
- Coaching Mentoring & Counseling from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2005);
- Business Process & Context Diagram Training from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2001);
- Social Manners & Appearance from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (1995).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Operasi 2 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020-sekarang);
- General Manager Departemen Powerplant & Energy PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019-2020);
- Manager Divisi Operasi EPC Departemen PPE PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-2018);
- Manajer Bidang Operasi Bidang Pemasaran PEE PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016-2017).

Employment History

- Director of Operations 2 at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020-present);
- Powerplant & Energy Department General Manager at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019-2020).
- PPE Department EPC Operations Division Manager at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-2018);
- PEE Marketing Operations Manager at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016-2017);

Rangkap Jabatan

Komisaris Utama PT Wijaya Karya Beton (2022-sekarang).

Concurrent Position

President Commissioner at PT Wijaya Karya Beton (2022-present).

Penghargaan

- Satya Karya 25 Tahun dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2021);
- Bendera Emas Award (Wakil Proyek) eksternal dari Pemerintah (2016);
- SHE Award Internal Proyek PLTU Ketapang dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2015);
- Quality Award internal Proyek Ketapang dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2015);
- Inspirator Award dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2011);
- Excellence Award Proyek PLTU Labuan Marine Work dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2009);
- Komersial Award Proyek Tuban Aromatic dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2005).

Award

- 25 Years Satya Karya from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2021);
- External Gold Flag Award (Project Representative) from the Government (2016);
- Internal SHE Award for Ketapang PLTU Project from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2015);
- Internal Quality Award for Ketapang Project from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2015);
- Inspirator Award from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2011);
- Excellence Award for PLTU Labuan Marine Work Project from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2009);
- Commercial Award for Tuban Aromatic Project from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2005).

Kepemilikan Saham

0.0032% (1.269.000 lembar saham).

Shareholding

0.0032% (1,269,000 shares)



Sumadi

Direktur Manajemen Risiko dan Legal
Director of Risk Management and Legal

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama | Legal Basis of Appointment

Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal WIKA berdasarkan keputusan RUPST 15 Mei 2024, yang kemudian dikukuhkan melalui Akta Keputusan RUPS Tahunan Perseroan No. 08 tanggal 06 Juni 2024. Beliau efektif menjabat pada 15 Mei 2024.

First appointed as the Director of Risk Management and Legal of WIKA based on the resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 15, 2024, which was subsequently formalized through Deed of the Annual General Meeting of Shareholders No. 08 dated June 06, 2024 Effectively took office on May 15, 2024.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir | Legal Basis for Final Appointment

-

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian
Usia 52 tahun per 31 Desember 2024
52 years old, as of December 31, 2024

Domisili | Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Periode Jabatan | Term of Office

15 Mei 2024 - RUPST 2029, Periode Pertama
May 15, 2024 - AGMS 2029, First Period

Riwayat Pendidikan

Magister Manajemen Keuangan Binus Business School tahun (2023)

Educational Background

Master of Financial Management, Binus Business School (2023)

Sertifikasi

- Certified Risk Governance Professional dari RAP Learning Center (2024);
- Program Pathways to Chartered Account Indonesia dari Kementerian BUMN (2024);
- Komisariss Profesional dari PT Inti Pesan (2022);
- Running Apps Platform SAP dari Soltius (2022).

Certification

- Certified Risk Governance Professional from RAP Learning Center (2024);
- Pathways to Chartered Account Indonesia Program from the Ministry of SOEs (2024);
- Professional Commissioner from PT Inti Pesan (2022);
- Running Apps Platform SAP from Soltius (2022).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024-saat ini);
- Senior Vice President Finance Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022-2024);
- General Manager Akuntansi & Pajak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020-2022).

Employment History

- Director of Risk Management and Legal, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024-present);
- Senior Vice President, Finance Division, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022-2024)
- General Manager, Accounting & Tax, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020-2022)

Rangkap Jabatan

-

Concurrent Position

-

Penghargaan

- Satya Karya 30 Tahun dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024);
- Change Leader dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024);
- Agent of Changes dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019).

Award

- 30 Years Satya Karya from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024);
- Change Leader of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024);
- Agent of Changes of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019).

Kepemilikan Saham

0,0021% (850.000 lembar saham).

Shareholding

0.0021% (850,000 shares)

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI

AFFILIATION OF BOARD OF DIRECTORS

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi
Affiliation of Board of Directors
Financial, Family and Managerial Relation of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relation with						Hubungan Keluarga Dengan Family Relation with						Hubungan Kepengurusan Managerial Relation	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama dan Pengendali Major and Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama dan Pengendali Major and Controlling Shareholder		Ya Yes	Tidak No
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Director of Finance		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hananto Aji	Direktur Operasi I Director of Operation I		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operation II		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sumadi	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2024, Komposisi anggota Direksi Perseroan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sebagaimana penjelasan berikut.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS AND REASONS FOR THESE CHANGES

Throughout 2024, the composition of the Company's Board of Directors underwent changes in accordance with the Company's needs, as explained below.



KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI SEBELUM RUPS TAHUNAN 2024

Komposisi Direksi sebelum RUPS Tahunan 2024 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Operasi I, 1 (satu) orang Direktur Operasi II, 1 (satu) orang Direktur Operasi III, 1 (satu) orang Direktur *Quality, Health, Safety, and Environment*, 1 (satu) orang Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dan 1 (satu) orang Direktur *Human Capital Management*. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

COMPOSITION AND BASIS FOR APPOINTMENT OF BOARD OF DIRECTORS BEFORE THE 2024 ANNUAL GMS

Before the 2024 Annual GMS, the Board of Directors was composed of 7 (seven) members, consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Director of Operations I, 1 (one) Director of Operations II, 1 (one) Director of Operations III, 1 (one) Director of Quality, Health, Safety, and Environment, 1 (one) Director of Finance and Risk Management, and 1 (one) Director of Human Capital Management. The composition and basis for appointment of Board of Directors can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sebelum RUPS Tahunan 2024
 Composition and Basis for Appointment of Board of Directors Before the 2024 Annual GMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Tanggal Efektif
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 dan diangkat kembali melalui Keputusan RUPS Tahunan tanggal 04 Mei 2023 Annual GMS Resolution dated June 8, 2020 and reappointed by virtue of Annual GMS Resolution dated May 04, 2023	8 Juni 2020 June 8, 2020
Hananto Aji	Direktur Operasi I Director of Operation I	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Annual GMS Resolution dated June 8, 2020	8 Juni 2020 June 8, 2020
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operation II	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Annual GMS Resolution dated June 8, 2020	8 Juni 2020 June 8, 2020
Rudy Hartono	Direktur Operasi III Director of Operation III	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2021 Extraordinary GMS Resolution dated September 2, 2021	2 September 2021 September 2, 2021
Ayu Widya Kiswari	Direktur Quality, Health, Safety, and Environment Director of Quality, Health, Safety and Environment	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2021 Extraordinary GMS Resolution dated September 2, 2021	2 September 2021 September 2, 2021
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 4 Februari 2022 Extraordinary GMS Resolution dated February 4, 2022	4 Februari 2022 February 4, 2022
Hadjar Seti Adji	Direktur Human Capital Management Director of Human Capital and Development	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 5 Agustus 2022 Extraordinary GMS Resolution dated August 5, 2022	5 Agustus 2022 August 5, 2022

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI SETELAH RUPS TAHUNAN 2024

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2024. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. RUPS Tahunan 2024 memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Rudy Hartono sebagai Direktur Operasi III;
2. Memberhentiikan dengan hormat Ayu Widya Kiswari sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment;
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

COMPOSITION AND BASIS FOR APPOINTMENT OF BOARD OF DIRECTORS AFTER THE 2024 ANNUAL GMS

During 2024, there have been changes to the composition of members of Board of Directors based on the Annual GMS on May 15, 2024. Changes to the composition of Board of Directors were carried out based on the needs of the Company. The 2024 Annual GMS decided to:

1. Respectfully dismiss Rudy Hartono as Director of Operations III;
2. Respectfully dismiss Ayu Widya Kiswari as Director of Quality, Health, Safety and Environment;
3. Change the nomenclature of positions for members of the Company's Board of Directors as follows:

No	Semula/Previously	Menjadi/Becoming
1	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Direktur Keuangan Director of Finance Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal
2	Direktur Human Capital Management Director of Human Capital Management	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation
3	Direktur Quality, Safety, Health and Environment Director of Quality, Safety, Health and Environment	-
4	Direktur Operasi III Director of Operations III	-

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

4. Reassign the following individuals as members of the Company's Board of Directors as follows:

No	Nama/Name	Semula/Previously	Menjadi/Becoming
1	Adityo Kusumo	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Direktur Keuangan Director of Finance
2	Hadjar Seti Adji	Direktur Human Capital Management Director of Human Capital Management	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation

5. Mengangkat Sumadi sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal.

5. Appoint Sumadi as the Director of Risk Management and Legal.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Tahunan 2024
Composition and Basis for Appointment of Board of Directors After the 2024 Annual GMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Tanggal Efektif
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 dan diangkat kembali melalui Keputusan RUPS Tahunan tanggal 04 Mei 2023 Resolution of Annual GMS on June 8, 2020, and reappointed through the Resolution of Annual GMS on May 4, 2023	8 Juni 2020 June 8, 2020
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan RUPS Luar Biasa pada 4 Februari 2022 Resolution of Extraordinary GMS on February 4, 2022	4 Februari 2022 February 4, 2022
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation	Keputusan RUPS Luar Biasa pada 5 Agustus 2022 Resolution of Extraordinary GMS on August 5, 2022	5 Agustus 2022 August 5, 2022
Hananto Aji	Direktur Operasi I Director of Operation I	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Resolution of Annual GMS on June 8, 2020	8 Juni 2020 June 8, 2020
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operation II	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Resolution of Annual GMS on June 8, 2020	8 Juni 2020 June 8, 2020
Sumadi	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2024 Resolution of Annual GMS on May 15, 2024	15 Mei 2024



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Jarot Widyoko

Komisaris Utama

President Commissioner

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama | Legal Basis of Appointment

Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2020, yang kemudian dikukuhkan dalam Akta Keputusan RUPS Tahunan Perseroan No. 33 Tanggal 16 Juni 2020.

Appointed for the first time as President Commissioner based on the Annual General Meeting of Shareholders resolution for 2019 Fiscal Year held on June 8, 2020, as stated in the Deed of AGMS Resolution No. 33 dated June 16, 2020.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir | Legal Basis for Final Appointment

-

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian
 Usia 61 tahun per 31 Desember 2024
 61 years old, as of December 31, 2024

Domisili | Domicile

Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia
 Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia

Periode Jabatan | Term of Office

8 Juni 2020 - RUPST 2025, Periode Pertama
 June 8, 2020 AGMS 2025, First Period

Riwayat Pendidikan

- Magister Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, Institut Teknologi Bandung tahun (1993);
- Insinyur Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada tahun (1987).

Educational Background

- Bachelor of Civil Engineering, Gadjah Mada University (1987);
- Master in Water Resources Development, Bandung Institute of Technology (1993).

Sertifikasi

Certificate Risk Governance Professional (CRGP) (2024)

Certification

Certificate Risk Governance Professional (CRGP) (2024)

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020-2023);
- Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2018-2020);
- Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017-2018).

Employment History

- Director General of Water Resources, Ministry of Public Works and Public Housing (2020-2023);
- Director of Rivers and Coasts, Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works and Public Housing (2018-2020);
- Head of Ciliwung Cisadane River Basin Center, Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works and Public Housing (2017-2018).

Rangkap Jabatan

- Jabatan Fungsional, Pengelola Sumber Daya Air Ahli Utama Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2024-sekarang);
- Jabatan Fungsional, Teknik Pengairan Ahli Utama Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2023-2024).

Concurrent Position

- Functional Position, Water Resources Manager, Main Expert, Sekretariat of Directorate General, Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works and Public Housing (2024-present);
- Functional Position, Water Resources Engineering, Main Expert, Sekretariat of Directorate General, Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works and Public Housing (2023-2024).

Penghargaan

- Satyalancana Karya Satya XXX (2018);
- Satyalancana Karya Satya XX (2008);
- Satyalancana Karya Satya X (1998).

Award

- Satyalancana Karya Satya XXX (2018);
- Satyalancana Karya Satya XX (2008);
- Satyalancana Karya Satya X (1998).

Kepemilikan Saham

0,0001% (31.000 lembar saham).

Shareholding

0.0001% (31,000 shares).



Adityawarman

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama | Legal Basis of Appointment

Ditetapkan pertama kalinya sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2020, yang kemudian dikukuhkan dalam Akta Keputusan RUPS Tahunan Perseroan No. 33 Tanggal 16 Juni 2020.

Appointed for the first time as Independent Commissioner based on the Annual General Meeting of Shareholders resolution for 2019 Fiscal Year held on June 8, 2020, as stated in the Deed of AGMS Resolution No. 33 dated June 16, 2020.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir | Legal Basis for Final Appointment

-

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian
Usia 69 tahun per 31 Desember 2024
69 years old, as of December 31, 2024

Domisili | Domicile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan | Term of Office

8 Juni 2020 - RUPST 2025, Periode Pertama
June 8, 2020 AGMS 2025, First Period

Riwayat Pendidikan

- Magister Manajemen, Universitas Trisakti tahun (2005);
- Sarjana Teknik Sipil, Universitas Diponegoro tahun (1982).

Educational Background

- Bachelor of Civil Engineering, Diponegoro University (1982);
- Master in Management, Trisakti University (2005).

Sertifikasi

Certificate Risk Governance Professional (CRGP) (2024).

Certification

Certificate Risk Governance Professional (CRGP) (2024).

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris PT Utama Karya (Persero) (2016-2020);
- Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2012-2016);
- Direktur Operasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2008-2012).

Employment History

- Commissioner at PT Utama Karya (Persero) (2016-2020);
- President Director at PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2012-2016);
- Operation Director at PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2008-2012).

Rangkap Jabatan

-

Concurrent Position

-

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Beliau telah menyatakan Independensinya sebagai Komisaris Independen melalui Surat Pernyataan Independensi yang dibuat dan ditandatangani pada 15 Mei 2024. Secara rinci, Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

Statement of Independence of Independent Commissioner

Has declared Independence as an Independent Commissioner through a Declaration of Independence made and signed on May 15, 2024. In detail, the Declaration of Independence of Independent Commissioner is disclosed in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report

Penghargaan

-

Award

-

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Shareholding

Does not hold shares in PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.



Rusmanto

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama | Legal Basis of Appointment

Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2021, yang kemudian dikukuhkan dalam Akta Keputusan RUPSLB No. 3 tanggal 2 September 2021.

Appointed for the first time as an Independent Commissioner based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders resolution held on September 2, 2021, as stated in the Deed of EGMS Resolution No. 3 dated September 2, 2021.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir | Legal Basis for Final Appointment

-

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian
Usia 67 tahun per 31 Desember 2024
67 years old, as of December 31, 2024

Domisili | Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Periode Jabatan | Term of Office

2 September 2021 - RUPST 2026, Periode Pertama
September 2, 2021 AGMS 2026, First Period

Riwayat Pendidikan

- PPSA XVIII Lemhannas RI (2012);
- Sekolah Staf dan Komando TNI (2002);
- Sekolah Staf dan Komando AD (1996);
- Akabri Darat - Sarjana Teknik Elektro (1983).

Educational Background

- PPSA XVIII Lemhannas RI (2012);
- TNI Staff and Command School (2002);
- AD Staff and Command School (1996);
- Army Academy - Bachelor of Electrical Engineering (1983).

Sertifikasi

Certified Risk Executive Leader (CREL) (2023)

Certification

Certified Risk Executive Leader (CREL) (2023)

Riwayat Pekerjaan

- Staf Khusus Kabin Bidang Intelijen Teknologi, Badan Inteligen Negara (BIN) (2017-2024);
- Staf Ahli Bidang Sosial Budaya, Kementerian Pertahanan RI (2015);
- Korschahli Kasad, TNI Angkatan Darat (2014).

Employment History

- Special Staff of the Intelligence Technology Division, State Intelligence Agency (BIN) (2017-2024);
- Expert Staff of the Socio-Cultural Division, Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (2015);
- Expert Advisor to the Chief of Staff of the Army, Indonesian Army (2014).

Rangkap Jabatan

-

Concurrent Position

-

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Beliau telah menyatakan Independensinya sebagai Komisaris Independen melalui Surat Pernyataan Independensi yang dibuat dan ditandatangani pada 15 Mei 2024. Secara rinci, Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

Statement of Independence of Independent Commissioner

Has declared Independence as an Independent Commissioner through a Declaration of Independence made and signed on May 15, 2024. In detail, the Declaration of Independence of Independent Commissioner is disclosed in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report

Penghargaan

- Bintang Yudha Dharma Nararya (2013);
- Bintang Kartika Eka Paksi Nararya (2009);
- SL Dwidya Sista (1996);
- UN Medal (1993);
- SL. Santi Dharma (1993).

Award

- Bintang Yudha Dharma Nararya (2013);
- Bintang Kartika Eka Paksi Nararya (2009);
- SL Dwidya Sista (1996);
- UN Medal (1993);
- SL. Santi Dharma (1993).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Shareholding

Does not hold shares in PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.



Suryo Hapsoro Tri Utomo

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama | Legal Basis of Appointment

Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2018, yang kemudian dikukuhkan dalam Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 94 Tanggal 26 April 2018.

Appointed for the first time as Independent Commissioner based on the Annual General Meeting of Shareholders resolution for 2017 Fiscal Year held on April 24, 2018, as stated in the Deed of AGMS Resolution No. 94 dated April 26, 2018.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir | Legal Basis for Final Appointment

Pemberhentian dan Pengangkatan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Perseroan No 7 tanggal 04 Mei 2023.

Dismissal and Appointment as Independent Commissioner based on the Deed of Resolution of the Company's Annual GMS No. 7 dated May 4, 2023.

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian
Usia 68 tahun per 31 Desember 2024
68 years old, as of December 31, 2024

Domisili | Domicile

Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia
Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia

Periode Jabatan | Term of Office

04 Mei 2023 - RUPST 2028, Periode Kedua
May 04, 2023-AGMS 2028, Second Period

Riwayat Pendidikan

- Profesi Insinyur, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (2020);
- Ph.D. (Doctor of Philosophy), Faculty of Engineering, University of Newcastle upon Tyne, UK (1996);
- Sarjana Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada (1984).

Educational Background

- Engineering Profession, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University (2020);
- Ph.D. (Doctor of Philosophy), Faculty of Engineering, University of Newcastle upon Tyne, UK (1996);
- Bachelor of Civil Engineering, Gadjah Mada University (1984).

Sertifikasi

- Certificate Risk Governance Professional (CRGP) (2024);
- Ahli Teknik Bangunan Gedung (Level 9) Bidang Jasa Konstruksi (2023);
- Ahli Utama Teknik Jembatan (Level 9) Bidang Jasa Konstruksi (2023);
- Ahli Utama Manajemen Konstruksi (Level 9) Bidang Jasa Konstruksi (2023);
- Ahli Utama Teknik Sumber Daya Air (Level 9) Bidang Jasa Konstruksi (2023);
- Ahli Utama Teknik Jalan (Level 9) Bidang Jasa Konstruksi (2023);
- ASEAN Engineer (ASEAN Eng.) (2021).

Certification

- Certificate Risk Governance Professional (CRGP) (2024);
- Building Engineering Expert (Level 9) in Construction Services (2023);
- Bridge Engineering Senior Expert (Level 9) in Construction Services (2023);
- Construction Management Senior Expert (Level 9) in Construction Services (2023);
- Water Resources Engineering Senior Expert (Level 9) in Construction Services (2023);
- Road Engineering Senior Expert (Level 9) in Construction Services (2023);
- ASEAN Engineer (ASEAN Eng.) (2021).

Riwayat Pekerjaan

- Sekretaris merangkap Anggota Komite Audit Universitas Gadjah Mada (2022-sekarang);
- Dosen Program Studi Magister Teknik Sipil dan Program Doktor Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (1996-sekarang);
- Dosen Program Studi Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (1996-sekarang);
- Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (1985-sekarang).

Employment History

- Secretary and Member of Audit Committee of Gadjah Mada University (2022-present);
- Lecturer of Civil Engineering Master Program and Civil Engineering Doctoral Program, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University (1996-present);
- Lecturer of Transportation Systems and Engineering Master Program, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University (1996-present);
- Lecturer of Civil and Environmental Engineering Department, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University (1985-present).

Rangkap Jabatan

Dosen Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (1985-sekarang)

Concurrent Position

Lecturer, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University (1985-present)

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Beliau telah menyatakan Independensinya sebagai Komisaris Independen melalui Surat Pernyataan Independensi yang dibuat dan ditandatangani pada 15 Mei 2024. Secara rinci, Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

Statement of Independence of Independent Commissioner

Has declared Independence as an Independent Commissioner through a Declaration of Independence made and signed on May 15, 2024. In detail, the Declaration of Independence of Independent Commissioner is disclosed in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report

Penghargaan

- Professors Go To Fronties, Dewan Guru Besar UGM (2024);
- Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2017);
- Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2007);
- Makarti Bhakti Nagari (2006);
- Satyalancana Karya Satya 10 Tahun (2002);
- Satyalancana Dwidya Sistha (2001).

Award

- Professors Go To Fronties, UGM Board of Professors (2024);
- 30-Years Satyalancana Karya Satya (2017);
- 20-Years Satyalancana Karya Satya (2007);
- Makarti Bhakti Nagari (2006);
- 10-Years Satyalancana Karya Satya (2002);
- Satyalancana Dwidya Sistha (2001)

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Shareholding

Does not hold shares in PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.



Harris Arthur Hedar

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama | Legal Basis of Appointment

Ditetapkan pertama kalinya sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2020, yang kemudian dikukuhkan dalam Akta Keputusan RUPS Tahunan Perseroan No. 33 Tanggal 16 Juni 2020.

Appointed for the first time as an Independent Commissioner based on the Annual General Meeting of Shareholders resolution for 2019 Fiscal Year held on June 8, 2020, as stated in the Deed of AGMS Resolution No. 33 dated June 16, 2020.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir | Legal Basis for Final Appointment

-

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian
Usia 62 tahun per 31 Desember 2024
62 years old, as of December 31, 2024

Domisili | Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan | Term of Office

8 Juni 2020 - RUPST 2025, Periode Pertama
June 8, 2020 AGMS 2025, First Period

Riwayat Pendidikan

- Guru Besar dalam Bidang Hukum Kebijakan Publik, Universitas Negeri Makassar (2023);
- Doktor Hukum, Universitas Jayabaya (2014);
- Magister Hukum, Universitas Narotama (2008);
- Sarjana Hukum, Universitas Narotama (2007)

Educational Background

- Professor in Public Policy Law, Makassar State University (2023);
- Doctor of Law, Jayabaya University (2014);
- Master of Law, Narotama University (2008);
- Bachelor of Law, Narotama University (2007)

Sertifikasi

- TAPLAI LEHAMNAS (2023)
- Certified Risk Executive Leader (CREL) (2023)

Certification

- TAPLAI LEHAMNAS (2023)
- Certified Risk Executive Leader (CREL) (2023)

Riwayat Pekerjaan

- Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta (2024-2028);
- Advokat pada Kantor Advokat Dr. Harris Arthur Hedar S.H, M.H dan Rekan (2013-sekarang);
- Corporate Legal Lion Air Group (2006-sekarang).

Employment History

- Vice Chancellor of Jayabaya University, Jakarta (2024-2028);
- Advokat pada Kantor Advokat Dr. Harris Arthur Hedar S.H, M.H dan Rekan (2013-sekarang);
- Corporate Legal Lion Air Group (2006-sekarang).

Rangkap Jabatan

- Dosen Tetap Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Jakarta (2015-sekarang);

Concurrent Position

- Permanent Lecturer in Postgraduate Program at Jayabaya University, Jakarta (2015-present);

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Beliau telah menyatakan Independensinya sebagai Komisaris Independen melalui Surat Pernyataan Independensi yang dibuat dan ditandatangani pada 15 Mei 2024. Secara rinci, Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen diungkapkan pada Bab Tata Kelola Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

Statement of Independence of Independent Commissioner

Has declared Independence as an Independent Commissioner through a Declaration of Independence made and signed on May 15, 2024. In detail, the Declaration of Independence of Independent Commissioner is disclosed in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Penghargaan

Penghargaan Peniti Emas sebagai 5 Pengembang Terbaik Provinsi Bali dari Presiden RI melalui Menteri Perumahan Rakyat (1998).

Award

Peniti Emas Award as the 5 Best Developers in Bali Province from the President of the Republic of Indonesia through the Minister of Public Housing (1998).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Shareholding

Does not hold shares in PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.



Firdaus Ali

Komisaris
Commissioner

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama | Legal Basis of Appointment

Diangkat pertama kalinya sebagai Anggota Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2020, yang kemudian dikukuhkan dalam Akta Keputusan RUPS Tahunan Perseroan No. 33 Tanggal 16 Juni 2020. Appointed for the first time as a Commissioner based on the Annual General Meeting of Shareholders resolution for 2019 Fiscal Year held on June 8, 2020, as stated in the Deed of AGMS Resolution No. 33 dated June 16, 2020.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir | Legal Basis for Final Appointment

-

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia | Indonesian
Usia 63 tahun per 31 Desember 2024
63 years old, as of December 31, 2024

Domisili | Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan | Term of Office

8 Juni 2020 - RUPST 2025, Periode Pertama
June 8, 2020 AGMS 2025, First Period

Riwayat Pendidikan

- Doktor Filosofi Teknik Lingkungan, University of Wisconsin- Madison, Amerika Serikat (2002);
- Master of Science Teknik Lingkungan, University of Wisconsin- Madison, Amerika Serikat (1998);
- Sarjana Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung tahun (1988).

Educational Background

- Doctor of Environmental Technology, University of Wisconsin Madison, USA, (2002).
- Masters in Environmental Technology, University of Wisconsin Madison, USA, (1998);
- Bachelor of Environmental Engineering, Bandung Institute of Technology (1988);

Sertifikasi

Certificate Risk Governance Professional (CRGP) (2024)

Certification

Certificate Risk Governance Professional (CRGP) (2024)

Riwayat Pekerjaan

- Dewan Direktur International Water Resources Association (2025-2027);
- Penasihat Senior Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (2015-2019) dan (2019-2024);
- Wakil Presiden Asia Water Council (2016-sekarang);
- Pendiri dan Ketua Indonesia Water Institute (2009-sekarang).

Employment History

- Board of Directors of the International Water Resources Association (2025-2027);
- Senior Advisor for Water Resources Management to the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia (2015-2019) and (2019-2024);
- Vice President of the Asia Water Council (2016-present);
- Founder and Chairman of the Indonesia Water Institute (2009-present).

Rangkap Jabatan

Dosen dan Peneliti Program Studi Teknik Lingkungan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (1988-sekarang).

Concurrent Position

Lecturer and Researcher, Environmental Engineering Study Program, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Indonesia (1988-present).

Penghargaan

Satyalancana Karya Satya XXX Tahun dari Presiden Republik Indonesia (2021).

Award

Satyalancana Karya Satya 30 Years from the President of the Republic of Indonesia (2021)

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Shareholding

Does not hold shares in PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.



HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

AFFILIATION OF BOARD OF COMMISSIONERS

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris
 Affiliation of Board of Commissioners
 Financial, Family, and Managerial Relation of Borad of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Managerial Relation	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama dan Pengendali Major and Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama dan Pengendali Major and Controlling Shareholder		Ya Yes	Tidak No
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Jarot Widyoko	Komisaris Utama President Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Rusmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Harris Arthur Hedar	Komisaris Independen Independent Commissioner	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Firdaus Ali	Komisaris Commissioner	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2024, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sebagaimana penjelasan berikut.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS SEBELUM RUPS TAHUNAN 2024

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan 2024 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris, dan 4 (empat) orang Komisaris Independen. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND REASONS FOR THE CHANGES

Throughout 2024, the composition of the Board of Commissioners of the Company underwent changes in accordance with the Company's needs, as explained below.

COMPOSITION AND BASIS FOR APPOINTMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS BEFORE THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

Before the 2024 AGMS, the composition of Board of Commissioners consisted of 7 (seven) members, comprising 1 (one) President Commissioner, 2 (two) Commissioners, and 4 (four) Independent Commissioners. The composition and basis for appointment of Board of Commissioners can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan 2024 Composition and Basis for Appointment of Board of Commissioners Before the 2024 Annual GMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Tanggal Efektif
Jarot Widyoko	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 8, 2020	8 Juni 2020 June 8, 2020
Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 April 2019 Annual GMS Resolution on April 30, 2019	30 April 2019 April 30, 2019
Firdaus Ali	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 8, 2020	8 Juni 2020 June 8, 2020
Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 8, 2020	8 Juni 2020 June 8, 2020
Harris Arthur Hedar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 8, 2020	8 Juni 2020 June 8, 2020
Rusmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2021 Extraordinary GMS Resolution on September 2, 2021	2 September 2021 September 2, 2021
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 April 2018 Annual GMS Resolution on April 24, 2018	24 April 2018 April 24, 2018

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS SETELAH RUPS TAHUNAN 2024

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2024. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. RUPS Tahunan 2024 memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Satya Bhakti Parikesit sebagai Komisaris Perseroan.

COMPOSITION AND BASIS FOR APPOINTMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AFTER THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

In 2024, there were changes in the composition of Board of Commissioners based on the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on May 15, 2024. These changes were made based on the Company's needs. The 2024 AGMS decided to respectfully dismiss Satya Bhakti Parikesit as a Commissioner of the Company.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan 2024 Composition and Basis for Appointment of Board of Commissioners After the 2024 Annual GMS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Tanggal Efektif
Jarot Widyoko	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 8, 2020	8 Juni 2020 June 8, 2020
Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 April 2019 Annual GMS Resolution on April 30, 2019	30 April 2019 April 30, 2019
Rusmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 8, 2020	8 Juni 2020 June 8, 2020
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 8, 2020	8 Juni 2020 June 8, 2020
Harris Arthur Hedar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 8, 2020	8 Juni 2020 June 8, 2020
Firdaus Ali	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2021 Extraordinary GMS Resolution on September 2, 2021	2 September 2021 September 2, 2021

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG TERJADI SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS AFTER THE END OF THE FISCAL YEAR

As of the publication of this Annual Report, there have been no changes in the composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners.



Profil Pejabat Eksekutif

Executives Profile

EPCC Division



Tri Prabowo
Senior Vice President of EPCC Division

Menjabat sejak 01 Januari 2023
Serving since January 01, 2023

Internal Audit



Mahendra Dwisana
Senior Vice President of Internal Audit

Menjabat sejak 08 Agustus 2024
Serving since August 08, 2024

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	:	53 tahun per 31 Desember 2024 53 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Sleman, DI Yogyakarta, Indonesia Sleman, DI Yogyakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	20 April 1995 April 20, 1995
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	ST., Universitas Krisnadwipayana, 2022 ST., Krisnadwipayana University, 2022
Pengalaman Kerja Work Experience	:	Senior Vice President of EPCC 2023-present
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.01/A.DIR.01601/2022 tanggal 01 Januari 2022 Served as Senior Vice President based on the Decree of Board of Directors No. SK.02.01/A.DIR.01601/2022 dated January 01, 2022

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	:	52 tahun per 31 Desember 2024 52 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Tangerang Selatan, Banten, Indonesia South Tangerang, Banten, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	20 Juni 1994 June 20, 1994
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	<ul style="list-style-type: none"> SE., Universitas Persada Indonesia, 2002 MM, Bina Nusantara University, 2023
Pengalaman Kerja Work Experience	:	Senior Vice President of Internal Audit 2022-present
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.01/A.DIR.00787/2022 tanggal 01 Juni 2022 Served as Senior Vice President based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.DIR.00787/2022 dated June 01, 2022



Human Capital Division

Suli Fatimah
Senior Vice President of Human Capital Division

Menjabat sejak 01 Januari 2023
Serving since January 01, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	:	51 tahun per 31 Desember 2024 51 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	20 September 1997 September 20, 1997
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	<ul style="list-style-type: none"> S.Psi, Universitas Gajah Mada, 1997 M.Psi, Universitas Tarumanegara, 2018
Pengalaman Kerja Work Experience	:	Senior Vice President of Human Capital Division 2020-present
Dasar Hukum Pangkatangan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.01/A.DIR.01806/2020 tanggal 01 November 2020 Served as Senior Vice President based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.DIR.01806/2020 dated November 01, 2020

Asset Management Division

Bram Ibrahim
1. Senior Vice President of Asset Management Division
2. Senior Vice President of Transformation and Business Strategy Division

Menjabat sejak 01 Juni 2024
Serving since June 01, 2024

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	:	48 tahun per 31 Desember 2024 48 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	21 Januari 2004 January 21, 2004
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	M.T., Universitas Lambung Mangkurat M.T., Lambung Mangkurat University
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> Senior Vice President of Asset Management Division 2024-present GM of Infrastructure Operation Investment 2023-2024
Dasar Hukum Pangkatangan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.01/A.DIR.00275/2024 tanggal 16 Desember 2024 Served as Senior Vice President based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.DIR.00275/2024 dated December 16, 2024



Risk Management Division



Muhamad Abdi
Senior Vice President of Risk Management Division

Menjabat sejak 22 Mei 2024
Serving since May 22, 2024

Information Technology



Anang Yulianto
Senior Vice President of Information Technology

Menjabat sejak 01 Juni 2024
Serving since June 01, 2024

Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	: 45 tahun per 31 Desember 2024 45 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	: Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	: 18 Desember 2004 December 18, 2004
Riwayat Pendidikan Educational Background	: S.T, Universitas Gajah Mada, 2003
Pengalaman Kerja Work Experience	: <ul style="list-style-type: none"> Senior Vice President of Risk Management Division, 2024-present SM of Project Control 2023-2024 GM Program Management Office Department 2022-2023
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: <p>Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.01/A.DIR.00099/2024 tanggal 22 Mei 2024</p> <p>Served as Senior Vice President based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.DIR.00099/2024 dated May 22, 2024</p>

Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	: 56 tahun per 31 Desember 2024 56 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	: Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	: 20 Juni 1994 June 20, 1994
Riwayat Pendidikan Educational Background	: S.T., Universitas Gajah Mada, 1994
Pengalaman Kerja Work Experience	: <ul style="list-style-type: none"> Senior Vice President of Information Technology, 2024-present SM of Enterprise Resource Planning Dept., 2023-2023 GM of Enterprise Resource Planning Dept., 2020-2022
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: <p>Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.01/A.DIR.00040/2023 tanggal 11 Januari 2023</p> <p>Served as Senior Vice President based on the Decree of Board of Directors No. SK.02.01/A.DIR.00040/2023 dated January 11, 2023</p>

Corporate Secretariat



Mahendra Vijaya
Senior Vice President
of Corporate Secretary

Menjabat sejak 20 Juni 2003
Serving since June 20, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	:	48 tahun per 31 Desember 2024 48 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia West Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	20 Juni 2003 June 20, 2003
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	<ul style="list-style-type: none"> S.T., Universitas Brawijaya, 2001 MM., Bina Nusantara University, 2014 S.T., Brawijaya University, 2001 MM., Bina Nusantara University, 2014
Pengalaman Kerja Work Experience	:	Senior Vice President of Corporate Secretary 2020-present
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.01/A.DIR.01155/2020 tanggal 01 Juli 2020 Served as Senior Vice President based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.DIR.01155/2020 dated July 1, 2020

Corporate Marketing Strategy



Wahyu Hadi Prasetyo
Senior Vice President
of Corporate Marketing
Division

Menjabat sejak 1 Oktober 2023
Serving since October 1, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	:	51 tahun per 31 Desember 2024 51 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	20 Desember 1994 December 20, 1994
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	A.Md, Politeknik Negeri Semarang, 1994 A.Md, Semarang State Polytechnic, 1994
Pengalaman Kerja Work Experience	:	Senior Vice President of Corporate Marketing Division
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.01/A.DIR.01442/2023 tanggal 01 Oktober 2023 Served as Senior Vice President based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.DIR.01442/2023 dated October 1, 2023



Infrastructure 1 Division



Eko Sujiyanto
Senior Vice President of Infrastructure 1 Division

Menjabat sejak 11 Januari 2023
Serving since January 11, 2023

Building Division



Hernowo Adrianto
Senior Vice President of Building Division

Menjabat sejak 30 September 2024
Serving since September 30, 2024

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	:	48 tahun per 31 Desember 2024 48 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia Karanganyar, Central Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	20 Januari 2003 January 20, 2003
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	M.T., Universitas Sebelas Maret, 2003 M.T., Sebelas Maret University, 2003
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> Senior Vice President of Infrastructure 1 Division 2023-present GM of Operation Dept. 2022-2023
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.01/A.DIR.00038/2023 tanggal 11 Januari 2023 Served as Senior Vice President based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.DIR.00038/2023 dated January 11, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	:	49 tahun per 31 Desember 2024 49 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Semarang, Central Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	20 September 1997 September 20, 1997
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	M.T., Universitas Islam Sultan Agung, 2017 M.T., Sultan Agung Islamic University, 2017
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> Senior Vice President of Building Division 2024-present GM of Operation Dept. 2024-present
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.01/A.DIR.00210/2024 tanggal 30 September 2024 Served as Senior Vice President based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.DIR.00210/2024 dated September 30, 2024

Infrastructure 2 Division



Asrofin

Senior Vice President of
Infrastructure 2 Division

Menjabat sejak 13 September 2024
Serving since September 13, 2024

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	:	54 tahun per 31 Desember 2024 54 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Lumajang, Jawa Timur, Indonesia Lumajang, East Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	20 April 1995 April 20, 1995
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	<ul style="list-style-type: none"> S.T., Universitas Wishnuwardhana, 2019 A.Md., Universitas Brawijaya, 1994 S.T., Wishnuwardhana University, 2019 A.Md., Brawijaya University, 1994
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> Senior Vice President of Infrastructure 2 Division 2023-present GM of Operation Dept. 2022-2023
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.01/A.DIR.01823/2023 tanggal 01 Januari 2024 Served as Senior Vice President based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.DIR.01823/2023 dated January 1, 2024

Legal Division



Andie Hermawan

Senior Vice President of
Legal Division

Menjabat sejak 25 Desember 2023
Serving since December 25, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	:	46 tahun per 31 Desember 2024 46 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	01 Juni 2011 June 01, 2011
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	LL.M., Middlesex University of London, 2017
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> Senior Vice President of Legal Division 2023-present Manajer Biro Legal & Adkon 2023-2023 SM of Litigation Legal 2023-2023 Senior Vice President of Legal Division 2023-present Legal & Adkon Bureau Manager 2023-2023 SM of Litigation Legal 2023-2023
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.02/A.DIR.00883/2023 tanggal 25 Desember 2023 Served as Senior Vice President based on Board of Directors Decree No. SK.02.02/A.DIR.00883/2023 dated December 25, 2023



Finance Division



Ashuri
Senior Vice President of Finance Division

Menjabat sejak 8 Agustus 2024
Serving since August 8, 2024

Compliance and QHSE Division



Eka Santoso
Senior Vice President of Compliance and QHSE

Menjabat sejak 2 Desember 2024
Serving since December 2, 2024

Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	: 56 tahun per 31 Desember 2024 56 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	: Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	: 20 November 1990 November 20, 1990
Riwayat Pendidikan Educational Background	: <ul style="list-style-type: none"> S.E., Universitas Amir Hamzah Medan, 2000 M.M., Bina Nusantara University, 2003 S.E., Amir Hamzah University Medan, 2000 M.M., Bina Nusantara University, 2003
Pengalaman Kerja Work Experience	: Senior Vice President of Finance Division 2023-present
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.01/A.DIR.00761/2023 tanggal 01 Juni 2023 Served as Senior Vice President based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.DIR.00761/2023 dated June 1, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	: 51 tahun per 31 Desember 2024 51 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	: Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Surabaya, East Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	: 20 September 1997 September 20, 1997
Riwayat Pendidikan Educational Background	: S.T., Universitas Jayabaya, 2005 S.T., Jayabaya University, 2005
Pengalaman Kerja Work Experience	: Senior Vice President of Compliance and QHSE Division
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.02/A.DIR.00114/2024 tanggal 16 Mei 2024 Served as Senior Vice President based on Board of Directors Decree No. SK.02.02/A.DIR.00114/2024 dated May 16, 2024

Supply Chain Management Division



**Puspita
Angraeni**

**Senior Vice President
of Supply Chain
Management Division**

Menjabat sejak 1 November 2023
Serving since November 1, 2023

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	:	44 tahun per 31 Desember 2024 44 years old as of December 31, 2024
Domisili Domicile	:	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	20 Oktober 2006 October 20, 2006
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	<ul style="list-style-type: none"> • S.T., Universitas Diponegoro, • M.M., Universitas Diponegoro • S.T., Diponegoro University, • M.M., Diponegoro University
Pengalaman Kerja Work Experience	:	Senior Vice President of Infrastructure 2 Division
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Menjabat sebagai Senior Vice President berdasarkan Surat Keputusan <i>Board of Directors</i> No. SK.02.01/A.DIR.01427/2023 tanggal 01 November 2023 Served as Senior Vice President based on the Decree of the Board of Directors No. SK.02.01/A.DIR.01427/2023 dated November 1, 2023



Flyover Juanda
Juanda Flyover



Pengelolaan Human Capital

Human Capital Management



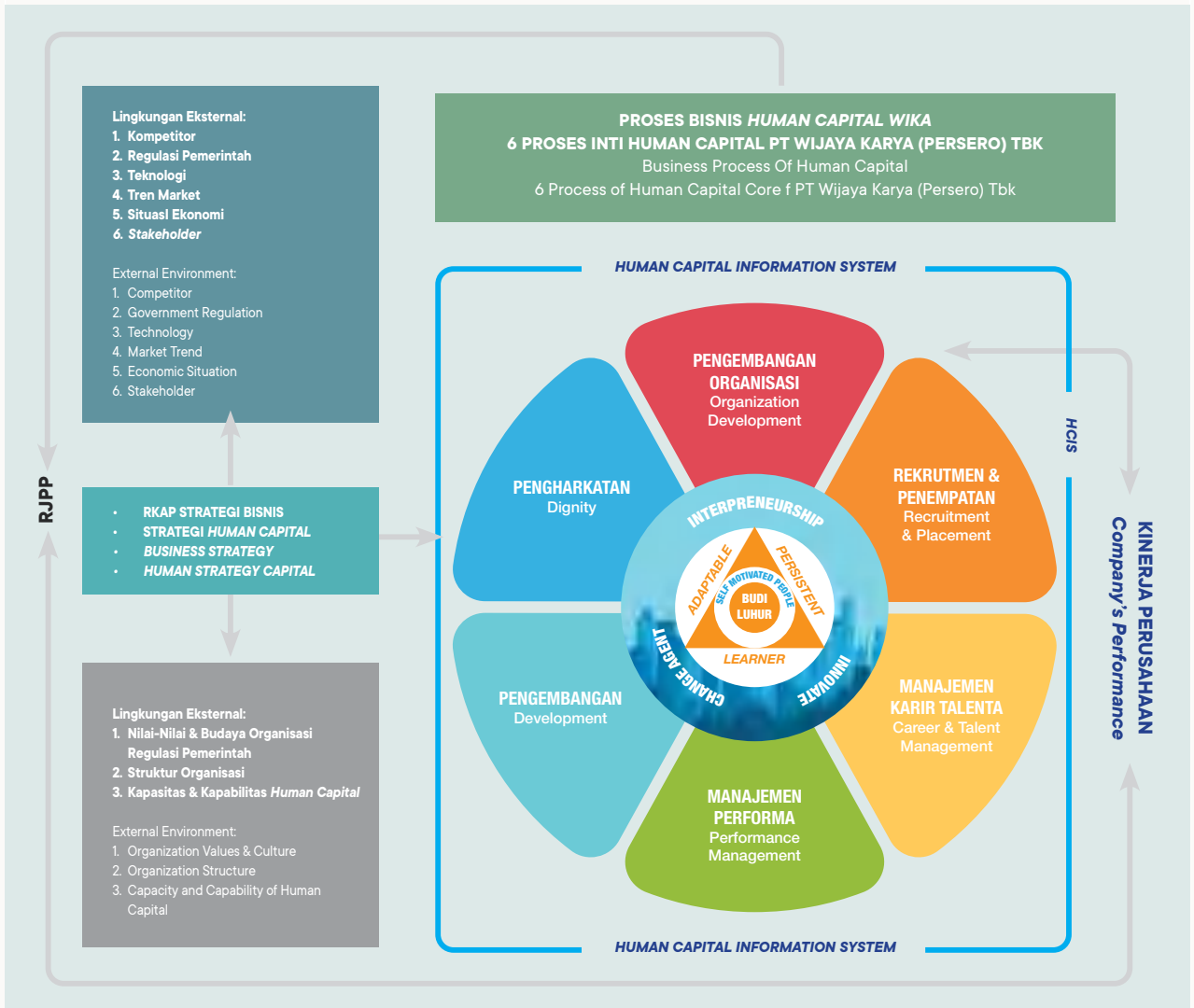
FILOSOFI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL

Pengelolaan dan pengembangan *Human Capital* (HC) yang dilakukan WIKA dilandasi oleh keyakinan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek penting yang berperan strategis dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan. Seiring dengan dinamika bisnis yang semakin kompleks dan tantangan global yang kian menuntut adaptabilitas, WIKA berkomitmen untuk menciptakan SDM yang andal, loyal dan kompeten. Sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, WIKA telah menyusun strategi dalam melakukan pengelolaan SDM sehingga dapat menciptakan insan yang tidak hanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan industri.

PHILOSOPHY OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

The management and development of Human Capital (HC) carried out by WIKA is based on the belief that Human Capital (HC) is one of the crucial aspects that plays a strategic role in realizing the Company's vision and mission. In line with the increasingly complex business dynamics and global challenges that demand greater adaptability, WIKA is committed to creating reliable, loyal, and competent HR. As an effort to achieve this vision and mission, WIKA has developed a strategy for managing HC to create individuals who not only have the necessary skills and knowledge but are also capable of adapting to industry developments.

Struktur Pengelolaan SDM WIKA WIKa's HC Management Structure



Departemen Pengembangan Organisasi Organizational Development Department	Departemen Manajemen Talenta Talent Management Department	Departemen Pusat Keunggulan WIKa WIKa's Center of Excellence Department	Departemen Rekrutmen & Pengharkatan Recruitment & Dignity Department
Human Capital Strategy & Planning System	Career Management	Wikapratama	Total Reward
Organization Design	Succession Planning	Wikasatrian	Outsource/ Internship
Job Analysis	Talent Sourcing & Development	Training Need Analysis	Industrial Relation
Culture (AKHLAK)	Coaching & Mentoring for Talent	Lembaga Sertifikasi Profesi	Non-Employee Data Management
Engagement & Employee Value Proposition	Advance Education	Certification (Internal & External)	Health Insurance
Respectfull Workplace Policy	Talent Management	Knowledge Management	Retirement
Wellbeing & Employee Assistance Program	Recruitment, Placement and Transfer	-	-
Human Capital Management System	Employee Data Management	-	-

HUMAN CAPITAL DIVISION

Sebagai penggerak utama dalam pengelolaan dan pengembangan SDM, *Human Capital Division* berperan strategis dalam membentuk, mengembangkan dan mempertahankan talenta unggul yang menjadi kekuatan utama Perseroan. *Human Capital Division* memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa seluruh aspek manajemen SDM, mulai dari proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi program kerja dilaksanakan secara optimal dan terintegrasi dengan tujuan jangka panjang WIKA. Demi mempertahankan relevansi dari program kerja yang dilaksanakan, *Human Capital Division* juga senantiasa melakukan penyesuaian antara sistem pengelolaan dengan strategi Perseroan sehingga dapat mendorong daya saing dan kinerja Perseroan.

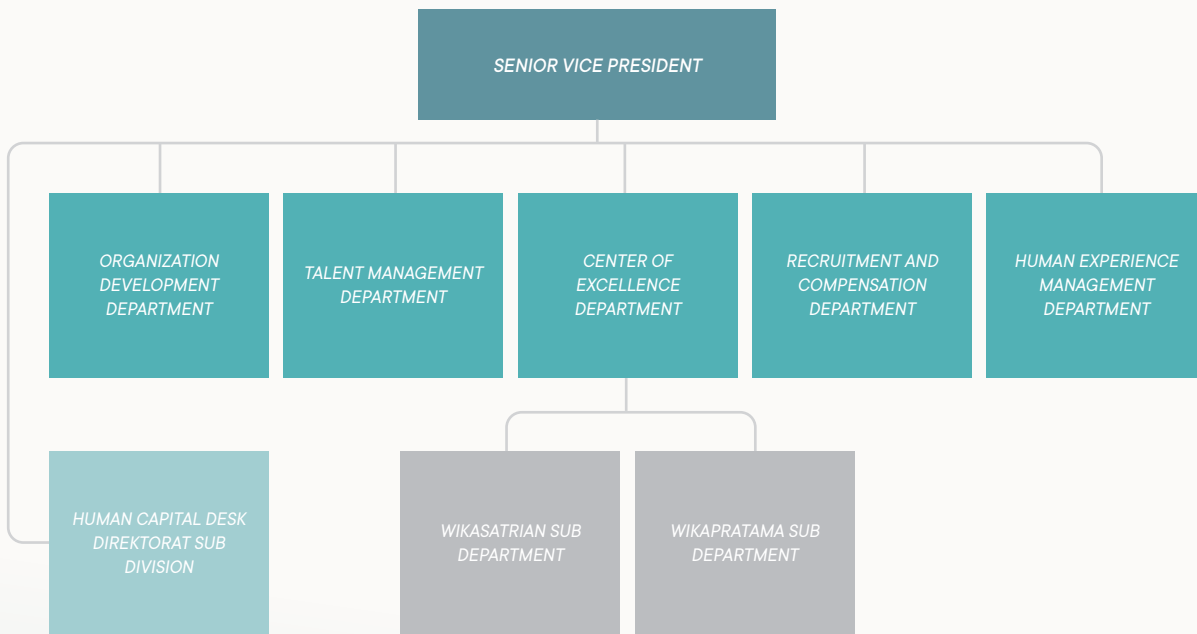
Adapun organisasi *Human Capital Division* tahun 2024 tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK.01.01/A.DIR.00009.Q/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Surat Keputusan Susunan Organisasi Human Capital Division PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Berikut susunan dari Struktur Organisasi *Human Capital Division*:

HUMAN CAPITAL DIVISION

As the main driver in the management and development of HC, the Human Capital Division plays a strategic role in shaping, developing, and retaining exceptional talent that serves as the main strength of the Company. The Human Capital Division has the primary responsibility to ensure that all aspects of talent management, from the planning process, implementation, to the evaluation of work programs, are carried out optimally and integrated with WIKA's long-term objectives. In order to maintain the relevance of the work programs being implemented, the Human Capital Division also continuously adjusts the management system to align with the Company's strategy, thereby driving the Company's competitiveness and performance.

The Human Capital Division organization for 2024 is outlined in the Board of Directors Decree No. SK.01.01/A.DIR.00009.Q/2024 dated May 16, 2024 concerning the Decree on Organizational Structure of Human Capital Division of PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Below is the Human Capital Division's Organizational Structure:

Struktur Organisasi Human Capital Division Human Capital Division Organizational Structure



Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Human Capital

Seiring bertumbuhnya bisnis WIKA, terdapat tuntutan dan tanggung jawab yang lebih besar baik dari segi persaingan yang lebih ketat dan citra perusahaan yang harus dipertahankan. Salah satu strategi WIKA dalam mempertahankan momentum tersebut ialah pengelolaan aset seperti Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat mewujudkan visi Perseroan menjadi perusahaan terbaik di bidang *engineering* (rekayasa), *procurement* (pengadaan) and *construction* (konstruksi) atau EPC serta investasi di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, *Human Capital Division* memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola fungsi perencanaan, pengembangan dan pemenuhan SDM.

Human Capital Division Duties and Responsibilities

As WIKA's business grows, there are greater demands and responsibilities, including increased competition and the need to maintain the company's image. One of WIKA's strategies in sustaining this momentum is the management of assets such as Human Capital (HC) to realize the Company's vision of becoming the best company in the fields of engineering, procurement, and construction (EPC), as well as investment in the Southeast Asia region. Therefore, the Human Capital Division has significant tasks and responsibilities in managing the functions of planning, development, and HR fulfilment.

Fungsi utama dari *Human Capital Division* meliputi peran sebagai mitra bisnis strategis yang membantu Perseroan dalam memenuhi dan mengidentifikasi kebutuhan untuk menunjang kegiatan operasional. Selain itu, *Human Capital Division* juga bertanggung jawab dalam menyusun berbagai strategi seperti perencanaan karier, optimalisasi penempatan, pembinaan dan pengembangan kompetensi, penentuan strategi remunerasi, hubungan industrial serta pengendalian biaya usaha tingkat Divisi.

Demi mengoptimalkan tugas dan tanggung jawabnya, *Human Capital Division* didukung oleh 4 (empat) Departemen *Human Capital* Korporasi, yakni *Organization and Human Experience Department*, *Talent Management Department*, *Center of Excellence Department* dan *Compensation & Benefit Department*. Selain itu juga terdapat dukungan dari 4 (empat) *Human Capital Desk* Direktorat *Sub-Division*. Setiap Departemen tentu memegang tugas dan fungsinya masing-masing, yang antara lain adalah:

1. *Organization and Human Experience Department*
Memiliki fungsi utama dalam pengelolaan dan pengendalian *Human Capital* melalui penyusunan rencana jangka panjang dan tahunan terkait fungsi *Human Capital*, meliputi strategi pengembangan organisasi, perencanaan pemenuhan kebutuhan *Human Capital*, pembentukan dan implementasi budaya perusahaan, penyusunan sistem dan prosedur lingkup *Human Capital*, peningkatan *engagement human capital*, *Employee Value Proposition*, perencanaan dan pengawasan *Respectful Workplace Policy*, pengawasan atas rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan untuk lingkup *Human Capital* di tingkat perusahaan, serta *Human Capital Management System* dalam rangka menunjang keberlanjutan perusahaan.
2. *Talent Management Department*
Memiliki fungsi utama dalam pengelolaan dan pengendalian *Human Capital* melalui pemenuhan kebutuhan *Human Capital*, penempatan pegawai, identifikasi *key position* organisasi, seleksi *talent*, rencana pengembangan dan rencana karir *talent* dalam rangka penyiapan kandidat untuk proses suksesor, termasuk juga pengelolaan manajemen karir, program pendidikan lanjutan serta perencanaan dan pembinaan kompetensi *Human Capital* dalam rangka menunjang optimalisasi proses kaderisasi *human capital* serta pengelolaan data pegawai guna menjaga keberlangsungan perusahaan.
3. *Center of Excellence Department*
Memiliki fungsi utama dalam pengelolaan dan pengendalian *Human Capital* melalui pengembangan kompetensi (baik *soft competency* maupun *hard competency*) *Human Capital* WIKA, melalui penyelenggaraan program pengembangan yang sistematis dan terintegrasi, serta penanggung jawab dalam pengembangan dan penerapan *Knowledge Management (KM)*.
4. *Compensation & Benefit Department*
Memiliki fungsi utama dalam, implementasi manajemen kinerja, pemeliharaan data *Human Capital* untuk non pegawai, dan pembinaan pencapaian sasaran karya, penyelenggaraan administrasi dan penggajian, hubungan dengan dana pensiun dan hubungan dengan purna bakti lingkup *human capital*, hubungan industrial yang harmonis, *compensation* dan *benefit* melalui pengharkatan *Human Capital* untuk pengendalian produktivitas *Human Capital* tingkat perusahaan.

The main function of the Human Capital Division includes acting as a strategic business partner that helps the Company meet and identify its needs to support operational activities. Additionally, the Human Capital Division is responsible for developing various strategies such as career planning, optimization of placement, coaching and competency development, determination of remuneration strategy, industrial relations and control of business costs at the Division level.

To optimize its tasks and responsibilities, the Human Capital Division is supported by 4 (four) Corporate Human Capital Departments: the Organization and Human Experience Department, Talent Management Department, Center of Excellence Department, and Compensation & Benefit Department. Additionally, there is support from 4 (four) Human Capital Desks within the Directorate Sub-Divisions. Each Department has its own specific duties and functions, which include the following:

1. Organization and Human Experience Department
Has the main function of managing and controlling Human Capital through preparing long-term and annual plans related to Human Capital functions, including organizational development strategies, planning to fulfil human capital needs, establishing and implementing corporate culture, preparing systems and procedures in human capital, increasing human capital engagement, Employee Value Proposition, planning and supervision of the Respectful Workplace Policy, supervision of the design and implementation of anti-bribery management system for Human Capital scope at corporate level, as well as Human Capital Management System in order to support the company's sustainability.
2. Talent Management Department
Has the main function of managing and controlling Human Capital through fulfilling human capital needs, employee placement, identifying key organizational positions, talent selection, development plans and talent career plans in order to prepare candidates for the successor process, including managing career management, continuing education programs and planning and developing Human Capital competencies in order to support the optimization of human capital cadre process and employee data management in order to maintain the Company's sustainability.
3. Center of Excellence Department
Has the main function in managing and controlling Human Capital through competency development (both soft competency and hard competency) of WIKA's Human Capital, through implementing systematic and integrated development programs, and is responsible for developing and implementing Knowledge Management (KM).
4. Compensation & Benefit Department
Has the main function of implementing performance management, maintaining Human Capital data for non-employees, and fostering the achievement of work targets, administering administration and payroll, relations with pension funds and relations with retired human capital, harmonious industrial relations, compensation and benefits through Human Capital appreciation for controlling human capital productivity at corporate level.

5. *Human Capital Desk* Direktorat *Sub-Division* merupakan *Human Capital Business Partner* dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian *Human Capital* melalui penyusunan pengembangan organisasi (di tingkat Divisi dan proyek sesuai area tanggung jawabnya), penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, melaksanakan proses rekrut dan seleksi (*outsourcing* dan tenaga proyek), mengelola dan mengoptimalkan penempatan pegawai, pengembangan dan pembinaan pegawai, evaluasi pegawai (performa kinerja dan kompetensi), pengharkatan pegawai, hubungan industrial, menyiapkan kaderisasi guna menunjang usaha di masing-masing unit kerja.

Program Kerja Human Capital Division 2024

Human Capital Division menyusun program kerja yang bertujuan untuk mempersiapkan SDM yang unggul, kompeten dan berdaya saing tinggi melalui berbagai program pelatihan atau pendidikan. *Human Capital Division* senantiasa memastikan, bahwa program kerja yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan Perseroan untuk mendorong pertumbuhan bisnis seiring dengan strategi yang diterapkan oleh Perseroan. Berdasarkan landasan tersebut, berikut program kerja *Human Capital Division* pada tahun 2024:

1. *Workforce Analysis*
2. *Well-being Program*
3. *Employee Engagement Survey*
4. *Cross Learning Visit*
5. *Project Visit*
6. *Respectful Workplace Policy Program*
7. *AKHLAK Survey*
8. *Customer Satisfaction Survey*
9. *Mapping Rotasi BOD-2*
10. *Pendampingan Project Manager*
11. *Coaching Individual Development Plan*
12. *Program Transformasi Pengembangan Tersistem*
13. *Turun ke Bawah (Turba)*
14. *Satria Muda*
15. *Wikademy*
16. *Community of Practices*
17. *Medical Check Up*
18. *Perundingan Perjanjian Kerja Bersama*
19. *Implementasi SAP HCM (Digitalisasi)*
20. *Panduan Perilaku Spesifik AKHLAK*
21. *HC Menyapa*

Target dan Rencana Human Capital Division

Berdasarkan penentuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024, telah ditetapkan sejumlah target dan rencana kegiatan *Human Capital Division*. Berikut uraian terkait target dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2024 beserta realisasi dan pencapaian targetnya:

Uraian Description	Target 2024 2024 Target	Realisasi Realization	Pencapaian Target Target Achievement
Pelatihan WIKASATRIAN WIKASATRIAN training	543	716	132%
Sertifikasi Internal Internal Certification	175	183	105%

5. *Human Capital Desk* Directorate *Sub Division* is a *Human Capital Business Partner* in managing and controlling *Human Capital* through organizing organizational development (at Division and project level according to area of responsibility), preparing plans for human capital needs, carrying out recruitment and selection processes (*outsourcing* and project staff), managing and optimizing employee placement, employee development and coaching, employee evaluation (performance and competency), employee appreciation, industrial relations, preparing cadres to support businesses in each work unit.

Human Capital Division 2024 Work Program

The *Human Capital Division* develops work programs aimed at preparing superior, competent, and highly competitive HR through various training or educational programs. The *Human Capital Division* consistently ensures that the work programs developed align with the Company's needs to drive business growth in accordance with the strategies implemented by the Company. Based on this foundation, the following are the work programs of the *Human Capital Division* for 2024:

1. *Workforce Analysis*
2. *Well-being Program*
3. *Employee Engagement Survey*
4. *Cross Learning Visit*
5. *Project Visit*
6. *Respectful Workplace Policy Program*
7. *AKHLAK Survey*
8. *Customer Satisfaction Survey*
9. *BOD-2 Rotation Mapping*
10. *Project Manager Mentoring*
11. *Individual Development Plan Coaching*
12. *Systematic Development Transformation Program*
13. *Going Down (Turba)*
14. *Satria Muda*
15. *Wikademy*
16. *Community of Practices*
17. *Medical Check Up*
18. *Collective Labor Agreement Negotiation*
19. *SAP HCM Implementation (Digitization)*
20. *AKHLAK Specific Behavior Guidelines*
21. *HC Greetings*

Human Capital Division Target and Activity Plan

Based on the determination of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024, a number of targets and activities have been set for the *Human Capital Division*. Below is an outline of the targets and planned activities to be carried out throughout 2024, along with their realization and target achievements:

Uraian Description	Target 2024 2024 Target	Realisasi Realization	Pencapaian Target Target Achievement
Sertifikasi Eksternal External Certification	180	185	103%
Pelatihan di Luar Rencana Non-Planned Training	-	1751	-
Pendidikan Lanjutan Advanced Education	-	-	-
Asesmen Assessment	300	365	122%
Feed-forward	215	182	85%

Program Strategis 2024

Human Capital Division telah menyusun program strategis tahun 2024 berdasarkan pertimbangan atas kebutuhan Perseroan dalam mencapai tujuan jangka pendek hingga jangka panjangnya. Berikut program-program yang akan dijalankan sepanjang tahun 2024:

1. Kajian dan review atas efektivitas Organisasi WIKA Induk
2. Update Prosedur & Instruksi Kerja
3. *Change Leader*
4. Pengembangan Tersistem
5. *Talent Muda & Talent Perempuan*
6. *Knowledge Management*
7. Kapabilitas Talenta BOD-1 & BOD-2
8. *Review Struktur Pendapatan*
9. *Penyehatan Dapen*

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Perseroan mencakup proses rekrutmen, penghargaan kerja, pengembangan karyawan, hubungan industrial hingga program pensiun. Sebagai upaya memastikan pengelolaan berjalan sesuai rencana, Manajemen SDM bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan, kesediaan dan kemampuan organisasi untuk mengakomodasi kebutuhan WIKA dalam menghadapi tantangan serta perubahan dalam industri.

Manpower Planning

WIKA menyusun *manpower planning* sebagai bentuk antisipasi dalam memenuhi kebutuhan SDM yang menunjang kegiatan operasional. Pelaksanaan *manpower planning* meliputi identifikasi, perencanaan dan evaluasi, yang kemudian ditentukan sesuai dengan perkembangan bisnis. Lebih lanjut, Perseroan senantiasa melakukan pengawasan serta revidi secara berkala terhadap pemenuhan kebutuhan SDM.

Rekrutmen

Proses rekrutmen merupakan kesempatan bagi WIKA dalam menciptakan tim yang kompeten dan berintegritas. Seiring dengan berkembangnya bisnis dan semakin pesatnya persaingan, Perseroan menyadari pentingnya regenerasi untuk mendapatkan SDM yang berpotensi. Sepanjang tahun 2024, WIKA melaksanakan proses rekrutmen baik untuk *fresh graduate* hingga tenaga kerja berpengalaman dengan menerapkan beberapa metode. Adapun metode yang dimaksud yaitu kerja sama dengan perguruan tinggi (*University Career Center*) di seluruh Indonesia, iklan, *job fair*, lamaran umum dan kolaborasi dengan lembaga rekrutmen. Selain itu, WIKA juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, yang kemudian setelah lulus akan diberikan kesempatan bekerja di WIKA.

2024 Strategic Programs

The Human Capital Division has developed strategic programs for 2024 based on considerations of the Company's needs to achieve its short-term and long-term goals. Below are the programs to be implemented throughout 2024:

1. Study and review of the effectiveness of WIKA Parent Organization
2. Update of Work Procedures & Instructions
3. Change Leader
4. Systematic Development
5. Young Talent & Female Talent
6. Knowledge Management
7. BOD-1 & BOD-2 Talent Capabilities
8. Revenue Structure Review
9. Dapen Revitalization

Human Capital Management

The management of Human Capital (HC) within the Company encompasses recruitment processes, work rewards, employee development, industrial relations, and retirement programs. In an effort to ensure that management runs according to plan, HC Management is responsible for ensuring the readiness, willingness, and capability of the organization to accommodate WIKA's needs in facing challenges and changes in the industry.

Manpower Planning

WIKA develops a manpower planning strategy as a form of anticipation to meet the HC needs that support operational activities. The implementation of manpower planning includes identification, planning, and evaluation, which are then determined based on business developments. Furthermore, the Company continuously monitors and periodically reviews the fulfilment of HC needs.

Recruitment

The recruitment process is an opportunity for WIKA to create a competent and integrity-driven team. As the business grows and competition intensifies, the Company recognizes the importance of regeneration to acquire potential talents. Throughout 2024, WIKA will carry out recruitment processes for both fresh graduates and experienced workers by applying several methods. These methods include cooperation with universities (University Career Centers) across Indonesia, advertisements, job fairs, open applications, and collaboration with recruitment agencies. Additionally, WIKA offers scholarships to high-achieving students, who will then have the opportunity to work at WIKA after graduation.



WIKA berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Perseroan meyakini, upaya ini tidak hanya meningkatkan loyalitas, tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi. Maka, WIKA menerapkan kebijakan dalam proses rekrutmen, di mana setiap individu diperlakukan secara merata tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan maupun gender.

Proses Seleksi

Proses seleksi pegawai WIKA telah diatur dalam Prosedur *Human Capital* Nomor WIKA-HCE-PM-01.01 dengan melibatkan lembaga independen dan tim rekrutmen yang terdiri dari perwakilan dari seluruh unit kerja. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan evaluasi proses seleksi tetap bersifat objektif dan menghormati prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

WIKA menerapkan proses seleksi yang berlangsung melalui beberapa tahap, dengan tujuan untuk memilih kandidat yang sesuai dengan budaya perusahaan. Dalam proses seleksi, setiap kandidat wajib memenuhi kriteria sebagai *“Self-Motivated People”*, yang berarti bahwa insan tersebut memiliki ketekunan, kemampuan beradaptasi dan kemampuan belajar. Pertimbangan dalam memilih kandidat tidak hanya memperhatikan wawasan dan kecerdasan yang dimiliki (IQ), namun juga memperhatikan kecerdasan emosional (EQ).

WIKA is committed to creating an inclusive work environment, where every individual feels valued and has equal opportunities for growth. The Company believes that this effort not only increases loyalty but also fosters creativity and innovation. Therefore, WIKA implements a policy in the recruitment process where every individual is treated equally, without discrimination based on ethnicity, religion, race, class, or gender.

Selection Process

The employee selection process at WIKA is regulated in the *Human Capital Procedure* No. WIKA-HCE-PM-01.01, which involves independent agencies and a recruitment team consisting of representatives from all work units. This guideline aims to ensure that the selection process remains objective and adheres to the principles of *Good Corporate Governance* (GCG).

WIKA applies a selection process that takes place in several stages, with the goal of choosing candidates who align with the company's culture. In the selection process, every candidate is required to meet the criteria as *“Self-Motivated People,”* meaning that the individual must have perseverance, adaptability, and a capacity for learning. The consideration in selecting candidates not only takes into account the knowledge and intelligence they possess (IQ) but also emotional intelligence (EQ).



Sepanjang tahun 2024, WIKA telah merekrut karyawan baru sebanyak 5 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2024, WIKA has recruited as many as 5 new employees, with the following details:

Jenis Rekrutmen Type of Recruitment	2024	2023	2022	2021	2020
Lulusan Baru Fresh Graduates	-	12	37	0	79
Tingkat Berpengalaman Professional Hire	5	1	1	0	4
Jumlah Total	5	13	38	0	83

Penilaian Kinerja

WIKA mengimplementasikan sistem penilaian kinerja berbasis *Key Performance Indicators* (KPI) yang terintegrasi dengan visi, misi dan tujuan strategis perusahaan. Penilaian KPI dilakukan dengan prinsip “*More for More*”, di mana kinerja karyawan diukur secara objektif, dengan indikator yang mencerminkan tanggung jawab yang dimiliki. Target setiap karyawan telah tertuang dalam bentuk Kesepakatan Karya (KK) yang ditinjau setiap 6 (enam) bulan sekali, untuk kemudian diberi penilaian dalam Penilaian Karya (PK) setiap akhir tahun sebagai bahan pertimbangan remunerasi.

Penilaian kinerja tidak hanya diberikan berdasarkan capaian hasil/kinerja, melainkan juga mempertimbangkan hasil Evaluasi Kompetensi (EK) dan *assessment* psikologis yang dilakukan terhadap setiap pegawai. Porsi bobot daripada penilaian PK dan EK akan disesuaikan dengan kebutuhan, karena PK mencerminkan hasil/kinerja karyawan, sedangkan EK merepresentasikan kemampuan *hard competency*.

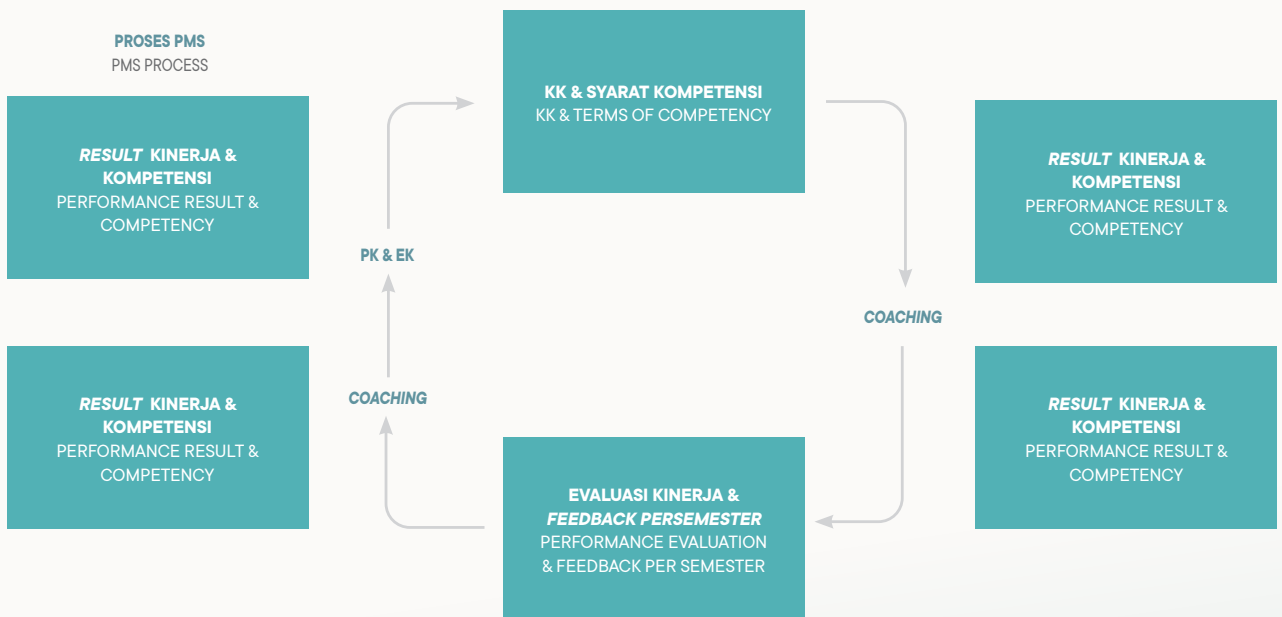
Sistem penggajian yang diterapkan WIKA mengadopsi pola *Global Grading System*, di mana Perseroan dapat mengukur tingkat pendapatan karyawan dengan mempertimbangkan aspek ekuitas internal dan eksternal sesuai dengan tingkatannya. Kemudian, hasil dari pertimbangan akan disampaikan kepada karyawan yang bersangkutan sebagai bentuk umpan balik serta untuk menyepakati perbaikan.

Performance Appraisal

WIKA implements a performance appraisal system based on *Key Performance Indicators* (KPIs) that are integrated with the company’s vision, mission, and strategic objectives. KPI assessments are carried out with the principle of “*More for More*,” where employee performance is measured objectively, using indicators that reflect the responsibilities held. Each employee’s targets are outlined in a *Work Agreement* (KK), which is reviewed every 6 (six) months, followed by a *Performance Appraisal* (PK) at the end of each year, which serves as the basis for remuneration considerations.

Performance assessments are not only based on results/performance achievements but also take into account the results of *Competency Evaluations* (EK) and psychological assessments conducted on each employee. The weight distribution between the PK and EK assessments will be adjusted based on needs, as PK reflects the employee’s results/performance, while EK represents their *hard competency* abilities.

The salary system applied by WIKA adopts the *Global Grading System* model, where the company can measure employee income levels while considering both internal and external equity aspects according to their grade. The results of this consideration are then communicated to the relevant employees as feedback and to agree on improvements.



Penghargaan Satya Karya

Penghargaan Satya Karya diselenggarakan setiap tahun pada perayaan ulang tahun WIKA, yang merupakan bentuk apresiasi Perseroan terhadap pegawai yang telah berdedikasi memberikan kinerja terbaiknya selama kurun waktu tertentu. Berikut rincian mengenai jumlah Penghargaan Satya Karya yang diberikan di tahun 2024:

Satya Karya Award

Every year in conjunction with the celebration of the Company’s anniversary, WIKA grants an appreciation to employees who have committed to dedicating themselves for a certain period of time through Satya Karya Award. The Satya Karya Awards given in 2024 are:



Masa Kerja (Tahun) Working Period (Year)	Jumlah Penerima (Orang) Total Recipients (Persons)
15	98
20	31
25	5
30	20
35	4
Jumlah Total	158

Kesejahteraan dan Program Penghargaan Terhadap Karyawan

Bagi WIKA, karyawan merupakan aset paling berharga dalam mencapai kesuksesan jangka panjang, karena Perseroan menyadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang dialami dapat dicapai berkat kinerja yang diberikan karyawan. Atas keyakinan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan loyalitas karyawan dengan menjaga kesejahteraan serta memberikan apresiasi yang sepadan. Oleh karena itu, WIKA senantiasa memperhatikan aspek kesehatan karyawan, baik dari segi nutrisi, pola hidup hingga cara berpikir. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan motivasi karyawan, agar tetap dalam kondisi terbaik. Wujud komitmen yang ditunjukkan WIKA adalah melalui Program *Well-being*, yang dijelaskan sebagai berikut:

Employee Welfare and Reward Program

For WIKA, employees are the most valuable asset in achieving long-term success, as the Company recognizes that the growth and development of the business are achieved thanks to the performance provided by its employees. Based on this belief, the Company is committed to maintaining employee loyalty by ensuring their well-being and offering appropriate appreciation. Therefore, WIKA continuously pays attention to the health aspects of its employees, from nutrition and lifestyle to mindset. These efforts are made to enhance employee motivation and ensure they remain in optimal condition. The form of commitment shown by WIKA is through the *Well-being Program*, which is described as follows:

Pola Pikir Paradigm	Pola Hidup Lifestyle	Pola Makan Dietary Habit
Suatu proses kegiatan mental/cara berfikir yang melibatkan kinerja otak yang menjadi acuan utama seseorang untuk bertindak.	Gaya hidup yang diterapkan seseorang dalam kehidupan yang mengutamakan aspek keseimbangan waktu kinerja, pemenuhan kebutuhan jasmani, dan kesehatan dalam penerapannya.	Yaitu pola makan dengan menu makanan yang sehat dan seimbang. Sehat adalah makanan dari bahan yang semakin dekat dengan hasilnya dan melalui proses yang sederhana/ <i>simple</i> . Seimbang berarti terdiri dari unsur karbohidrat, protein, dan lemak.
A process of mental/way of thinking that involves brain performance becoming the main reference point for the person.	A lifestyle applied by a person in life to seek a balance between work, fulfilment of physical and health needs in its implementation.	A dietary habit with healthy and balanced diet. Healthy food mean food from ingredients that are closer to results and processed in a modest/simple way. Balanced mean consisting of carbohydrates, protein, and fat.

Aspek pola hidup yang sehat meliputi dimensi fisik, emosi dan pola pikir. Aspects of a healthy lifestyle include physical, emotional and mindset dimensions.

Rekreasi/Gathering dan Hobby Recreation/Gathering and Hobby	Olahraga Sport	Keseimbangan Kerja dan Istirahat Balance of Working and Rest	Keselamatan/Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Safety/Health and Environment (SHE)	Spiritual/Religiuitas/Keagamaan Spiritual/Religius/Religion
--	----------------	---	--	--

Apresiasi yang diberikan kepada setiap karyawan mencakup tiga dimensi gaya hidup sehat, yaitu dimensi fisik, emosional dan pola pikir. WIKA memberikan fasilitas kepada para karyawan dengan ruang dan peralatan olahraga dan ruang laktasi. Selain itu, Perseroan juga memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk kelompok/grup sesuai dengan hobi (olahraga dan seni), kegiatan spiritual dan kegiatan *gathering* untuk mendorong gaya hidup *work-life balance*. Kemudian, Perseroan juga memfasilitasi karyawan dengan asuransi rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit. Karyawan juga diikutsertakan dalam pemeriksaan rutin *general check up* setiap 2 (dua) tahun sekali.

The appreciation given to each employee encompasses three dimensions of a healthy lifestyle: physical, emotional, and mindset. WIKA provides facilities for employees, including sports rooms, equipment, and lactation rooms. In addition, the Company allows employees the freedom to form groups or clubs based on their hobbies (sports and arts), spiritual activities, and social gatherings to promote a work-life balance. Furthermore, the Company also provides employees with outpatient and inpatient insurance at hospitals. Employees are also included in routine general check-ups every two (2) years.

Sebagai upaya dalam menjaga pola makan karyawan, WIKA juga menawarkan makan siang dan makan malam bagi karyawan yang lembur. Pola makan yang diterapkan di lingkup Perseroan telah didasarkan oleh anjuran dan pendampingan dokter profesional, sehingga makanan yang diberikan sesuai dengan asupan yang dibutuhkan. Lebih lanjut, WIKA juga telah melakukan pembinaan pada vendor penyedia makanan untuk mengikuti standar-standar kesehatan, demi menjaga kesehatan dan kebugaran karyawan.

Selanjutnya, hasil pengharkatan yang telah dilakukan Perseroan dapat diukur melalui *Employee Engagement Survey*. Survei yang dilaksanakan Perseroan mencakup 3 (tiga) dimensi, yakni *Say*, *Stay* dan *Strive*. Secara rinci, dimensi *Say* menggambarkan sejauh mana pegawai mempersepsikan Perseroan secara positif, dan mampu mengatakan hal-hal positif terhadap Perseroan. Kedua, dimensi *Stay* menggambarkan sejauh mana pegawai ingin tetap tinggal atau bergabung dalam Perseroan. Terakhir, dimensi *Strive* mengukur kerelaan pegawai untuk berjuang demi perusahaan atau memperjuangkan kepentingan Perseroan.

Manajemen Karier

WIKA berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan karier setiap karyawan. Di tengah persaingan industri yang ketat, Perseroan memahami bahwa kesuksesan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh inovasi dan efisiensi operasional, tetapi juga oleh pengelolaan SDM yang unggul. Oleh karena itu, WIKA menerapkan manajemen karier yang strategis untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang dan mencapai potensi terbaiknya.

Perseroan menentukan komposisi program pengembangan *hardskill* dan *softskill* sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing. Pada tingkat staf, pengembangan *hard competency* lebih besar dibanding dengan *soft competency*. Semakin tinggi jabatan, maka tuntutan pengembangan *soft competency* dan *managerial competency* akan semakin tinggi. Perseroan telah menyusun silabus pengembangan berdasarkan visi, misi, rencana jangka panjang, percepatan pengembangan *Human Capital* WIKA, dinamika dunia usaha, persyaratan kompetensi jabatan serta tingkat pengalaman masing-masing.

As part of the efforts to maintain employees' diet, WIKA also offers lunch and dinner to employees who work overtime. The diet applied within the Company is based on recommendations and guidance from professional doctors, ensuring that the meals provided meet the required nutritional intake. Additionally, WIKA has trained food vendors to comply with health standards to maintain employees' health and fitness.

Next, the results of the appreciation given by the Company can be measured through the Employee Engagement Survey. The survey conducted by the Company includes three (3) dimensions: *Say*, *Stay*, and *Strive*. Specifically, the *Say* dimension measures the extent to which employees perceive the Company positively and are able to speak positively about the Company. The second dimension, *Stay*, measures the extent to which employees want to stay or continue working at the Company. Finally, the *Strive* dimension measures employees' willingness to fight for the company or to advocate for its interests.

Career Management

WIKA is committed to creating a work environment that supports the career development of every employee. In the face of intense industry competition, the Company understands that long-term success is not only determined by innovation and operational efficiency but also by the management of superior human resources. Therefore, WIKA implements strategic career management to ensure that every individual has the opportunity to grow, develop, and reach their full potential.

The Company determines the composition of hard skills and soft skills development programs based on each position level. At the staff level, the development of hard competencies is more significant than soft competencies. As employees move up the ranks, the demand for the development of soft competencies and managerial competencies increases. The Company has designed a development syllabus based on its vision, mission, long-term plans, the acceleration of WIKA's Human Capital development, business dynamics, job competency requirements, and the level of experience of each employee.

Program Pengembangan Karier Career Development Program

Jenjang Level	Sasaran Pengembangan Development Goals	Peserta Participants
BOD-1	WSMDP (Senior Mgt) Fostering Transformation	3
BOD-2	WMMDP (Middle Mgt) Integrating Value Chain	38
BOD-3	WJMMDP (Junior Mgt) Aligning Execution	249
BOD-4	WELDP (Supervisor) Optimizing Business	455
BOD-5	WODP (Staff) Excellence Performance	45



Proses Pengembangan Karier Career Development Process



Hubungan Industrial

WIKa senantiasa menjaga hubungan industrial yang harmonis dan konstruktif. Sebagai perusahaan yang mengedepankan integritas dan profesionalisme, WIKa memahami bahwa hubungan industrial yang baik merupakan pondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif dan sejalan dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Upaya tersebut dilakukan melalui dialog intensif WIKa dengan karyawan demi menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Sebagai upaya dalam membuka komunikasi yang terbuka dan transparan, WIKa secara rutin mengadakan forum komunikasi antara serikat pekerja dan perwakilan WIKa untuk mendiskusikan isu-isu ketenagakerjaan, aspirasi karyawan serta berbagai kebijakan perusahaan. WIKa juga telah menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk menjamin keamanan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. PKB ini juga berfungsi untuk membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah atau perselisihan yang terjadi di tempat kerja.

Program Pensiun

Komitmen WIKa terhadap karyawan tidak hanya sebatas masa kerja saja, namun WIKa juga memperhatikan pengharkatan seluruh karyawan termasuk pada saat memasuki usia pensiun. Oleh karena itu, WIKa memberikan fasilitas perlindungan pasca-bekerja berupa:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya yang merupakan penyesuaian dari Yayasan Dana Pensiun Wijaya Karya untuk mengelola Program Pensiun Manfaat Pasti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 berikut perubahan-perubahannya. Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Manfaat Pasti (DAPEN WIKa PPMP) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PT Wijaya Karya (Persero) nomor SK.01.01/A.DIR.0053/1998 tanggal 18 Februari 1998 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-207/KM.17/1998 tanggal 9 Juni 1998 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Wijaya Karya dan telah diumumkan dalam pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 tanggal 28 Juli 1998 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1998. Peserta DAPEN WIKa PPMP adalah pegawai tetap Perseroan yang diangkat sebelum 1 Januari 2007. Iuran atas program tersebut dibebankan kepada karyawan sebesar 5% dari PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun) dan kepada perusahaan sebesar 24,71% dari PhDP. Sedangkan iuran PSL menjadi beban Perseroan;

Industrial Relations

WIKa consistently maintains harmonious and constructive industrial relations. As a company that prioritizes integrity and professionalism, WIKa understands that good industrial relations are a crucial foundation in creating a conducive and productive work environment that aligns with applicable labor regulations. This effort is carried out through intensive dialogue between WIKa and employees to create a balance between fulfilling rights and performing obligations.

As part of its effort to promote open and transparent communication, WIKa regularly holds forums for communication between labor union and WIKa representatives to discuss labor issues, employee aspirations, and various company policies. WIKa has also developed a Collective Labor Agreement (PKB) to ensure the security of both parties' rights and obligations. This agreement also serves to help both parties resolve problems or disputes that may arise in the workplace.

Pension Program

WIKa's commitment to employees extends beyond their working years, as WIKa also pays attention to the recognition of all employees, including when they reach retirement age. Therefore, WIKa provides post-employment protection facilities in the form of:

1. Defined Benefit Pension Program (PPMP) is managed by Wijaya Karya Pension Fund, which is an adjustment from Wijaya Karya Pension Fund Foundation to manage the Defined Benefit Pension Program based on Law Number 11 of 1992 and its amendments. Wijaya Karya Pension Fund Defined Benefit Pension Program (DAPEN WIKa PPMP) was established based on the Decree of PT Wijaya Karya (Persero) number SK.01.01/A.DIR.0053/1998 dated February 18, 1998 which has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number KEP-207/KM.17/1998 dated June 9, 1998 concerning Ratification of Pension Fund Regulation of Wijaya Karya Pension Fund and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 60 dated July 28, 1998 and Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 53 of 1998. DAPEN WIKa PPMP participants are permanent employees of the Company who were appointed before January 1, 2007. Contributions to the program are charged to employees at 5% of PhDP (Basic Pension Income) and to the company at 24.71% of PhDP. While PSL contributions are borne by the Company;

2. Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Iuran Pasti (DAPEN WIKA PPIP) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.01.01/A.DIR.2524/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-146/D.05/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari DAPEN WIKA PPIP dan telah diumumkan dalam pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7 tanggal 23 Januari 2015 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5/DP Tahun 2015. Peserta DAPEN WIKA PPIP adalah setiap pegawai yang bekerja pada Pendiri yang telah diangkat sebagai Pegawai Organik sejak 1 Januari 2007 dan setelahnya maupun Pegawai Terampil sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku pada Pendiri dan Pegawai Mitra Pendiri yang statusnya sesuai dengan peraturan yang ada di masing-masing perusahaan yang menjadi Mitra Pendiri. Iuran atas program tersebut dibebankan kepada pegawai sebesar 5% dari PhDP dan kepada perusahaan sebesar 12,5% dari PhDP.
 - a. Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Seluruh pegawai perseroan diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), yang terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Iuran sebesar 3% menjadi beban pegawai dan sebesar 6,24% menjadi beban Perseroan sesuai dengan peraturan presiden dan peraturan menteri ketenagakerjaan.
 - b. Program Imbalan Pasca Bekerja Program Imbalan Pasca Bekerja diberikan kepada pegawai yang diterima sebelum 1 Januari 2014, sesuai dengan kesepakatan dengan Serikat Pekerja yang tertuang dalam PKB tahun 2018-2020, program ini hanya diberikan kepada pegawai yang masuk sebelum 1 Januari 2014 dengan perhitungan yang dilakukan dengan posisi saat itu dan dilakukan pengembangan setiap tahunnya, sedangkan untuk pegawai yang masuk setelah itu hanya diberikan program pensiun, dengan catatan manfaat dari program pensiun yang diterima tidak boleh kurang dari Peraturan Perundangan yang berlaku.
2. b. Dana Pensiun Wijaya Karya Fixed Contribution Pension Program (DAPEN WIKA PPIP) is determined based on Decree Number SK.01.01/A.DIR.2524/2014 dated March 25, 2014 which has been approved by the Financial Services Authority as stated in the Decree of Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-146/D.05/2014 dated December 8, 2014 concerning the Approval of Pension Fund Regulation from DAPEN WIKA PPIP and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7 dated January 23, 2015 and Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5/DP of 2015. Participants of DAPEN WIKA PPIP are every employee working for the Founder who has been appointed as an Organic Employee since January 1, 2007 and thereafter or Skilled Employees in accordance with the Joint Working Agreement applicable to the Founder and Employees of Founding Partners whose status is in accordance with the regulations in each company that is a Founding Partner. Contributions for the program are charged to employees at 5% of PhDP and to the company at 12.5% of PhDP.
 - a. BPJS Ketenagakerjaan Social Security Program All employees of the company are included in the Employment Social Security Program (BPJS Ketenagakerjaan), which consists of Old Age Security (JHT), Pension Security (JP), Work Accident Security (JKK), and Death Security (JKM). Contributions of 3% are borne by employees and 6.24% are borne by the Company in accordance with presidential regulations and regulations of the Minister of Manpower.
 - b. 2. Post-Employment Benefit Program The Post-Employment Benefit Program is provided to employees who were hired before January 1, 2014, in accordance with the agreement with the Labor Union as stated in the 2018-2020 PKB, this program is only provided to employees who entered before January 1, 2014 with calculations made with the position at that time and development carried out annually, while for employees who entered after that, only a pension program is provided, with the note that the benefits from the pension program received must not be less than the applicable Laws and Regulations.

Penerima Imbalan Pasca Kerja Tahun 2024 Post-Employment Beneficiaries in 2024

Penerima Recipient	Penempatan WIKA Induk (orang) WIKA Parent Placement (person)	Penempatan AP/Asosiasi (orang) AP/Association Placement (person)
Pensiun Pension	64	51
Meninggal Passed Away	1	0
Resign	73	12

- c. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Perseroan juga memberikan bantuan kesehatan dalam bentuk kepesertaan di asuransi komersial / BPJS Kesehatan untuk pensiunan pegawai dan pasangannya sampai dengan usia 70 tahun.
- c. Health Insurance
The Company also provides health assistance in the form of participation in commercial insurance / BPJS Health for retired employees and their spouses up to the age of 70 years.



WIKA Talent Development Process

Sebagai upaya memaksimalkan potensi karyawan, WIKA mendirikan *Talent Management Department* sejak tahun 2015. Program ini dibentuk dengan tujuan untuk membangun manajemen karier yang baik. Adapun alur pengembangan talenta WIKA adalah sebagai berikut:

1. *Critical Position Identification*: WIKA mengidentifikasi posisi mana yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan.
2. *Talent Identification & Selection*: WIKA memiliki proses identifikasi Talenta karyawan WIKA dengan mempertimbangkan *performance* dan kompetensi ;
3. *Talent Development*: WIKA memiliki proses pengembangan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap karyawan yang diikutsertakan dalam suatu program Talenta.

WIKA memiliki 5 (lima) kategori/*cluster* jabatan di dalam lingkup kerja, yakni *Senior Manager, Middle Manager, Junior Manager, Supervisor* dan *Staff*. Demi mempersiapkan karyawan untuk menduduki jabatan selanjutnya (promosi), Perseroan menerapkan metode “dik-duk” yang berarti bahwa karyawan akan dilatih sebelum naik jabatan. Pada level *Middle* dan *Senior Manager*, WIKA menyediakan program internasional sebagai tolak ukur pengetahuan dan wawasan global.

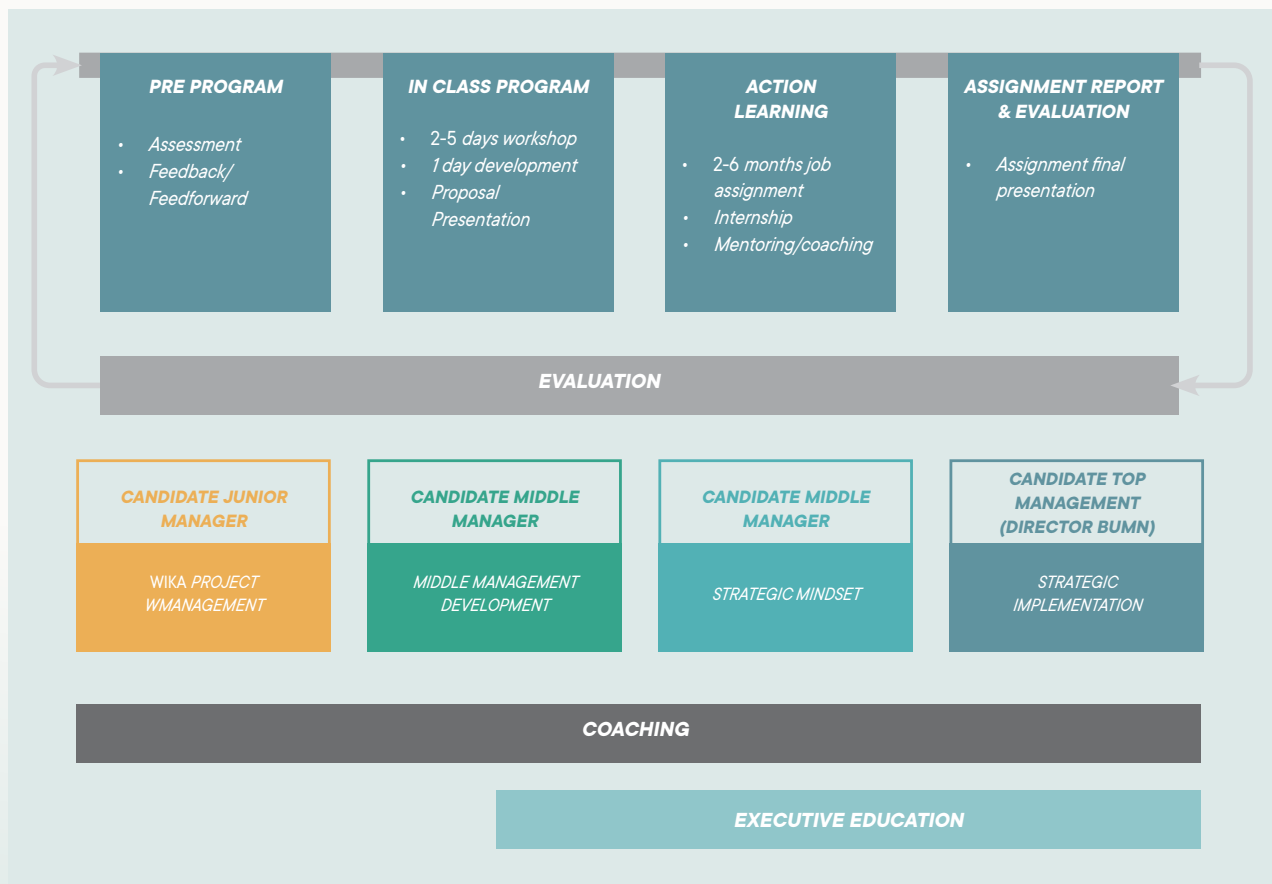
WIKA Talent Development Process

In an effort to maximize employee potential, WIKA established the *Talent Management Department* in 2015. This program was created with the goal of building a good career management system. The talent development process at WIKA is as follows:

1. *Critical Position Identification*: WIKA identifies which positions have a direct impact on the sustainability of the company.
2. *Talent Identification & Selection*: WIKA has a process of identifying WIKA employee Talents by considering performance and competence;
3. *Talent Development*: WIKA has a systematic and sustainable development process for employees who are included in a Talent program.

WIKA has 5 job clusters/categories, namely *Senior Manager, Middle Manager, Junior Manager, Supervisor, and Staff*. WIKA prepares a “dik-duk” method, meaning that employees are priorly trained before taking up next positions (promotion). At *Middle level* and *Senior Manager*, WIKA does not only prepare national program, but also international program as a benchmark for global knowledge and insight.

Program Talent Development Talent Development Program



Program Pelatihan Calon Pegawai

WIKA memberikan program pelatihan bagi calon karyawan. Berdasarkan Prosedur *Human Capital* Nomor WIKA-HCE-PM-01.01, karyawan yang dinyatakan lulus seleksi akan diikutsertakan dalam Program Pelatihan Calon Pegawai (PPCP). Pelatihan ini bertujuan agar setiap calon karyawan dapat menganut nilai-nilai budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta karakter manusia WIKA.

Selanjutnya, dalam pelatihan ini calon karyawan akan diberikan informasi dan pengenalan dasar-dasar sistem manajemen WIKA untuk mendukung calon karyawan dalam beradaptasi dengan ritme kerja dan budaya Perseroan. Pemberian materi pada PPCP dilakukan dengan beragam metode, seperti pelatihan di kelas, *outbond* dan *on the job training* yang didampingi oleh mentor, serta melakukan presentasi. Kemudian, pada tahap akhir PPCP calon karyawan diharuskan memenuhi nilai kualifikasi yang ditetapkan agar dapat ditentukan lulus dan diangkat menjadi pegawai tetap. Perseroan berkomitmen, untuk menjaga transparansi terhadap nilai hasil penilaian selama PPCP berlangsung.

Lebih lanjut, Perseroan akan melakukan pertimbangan penempatan kerja kepada karyawan berdasarkan kebutuhan unit kerja, latar belakang, hasil psikotes serta kompetensi yang dimiliki masing-masing individu. Sesuai dengan pola pengembangan profesional yang ditetapkan, Perseroan memberlakukan rotasi secara berkala, dengan memperhatikan kinerja dan kompetensi masing-masing karyawan.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

WIKA menyusun program *Learning and Development* berdasarkan pendekatan strategis yang diselaraskan dengan kebutuhan dan tujuan bisnis, guna mendorong keoptimalan operasional serta kematangan organisasi. Program ini mencakup aspek kemanusiaan secara menyeluruh, seperti sistem manajemen, kebijakan, strategi, peraturan dan lainnya.

Prospective Employee Training Program

WIKA holds training program for prospective employees. Based on Human Capital Procedure Number WIKA-HCE-PM-01.01, employee who have passed selection will be included in a Prospective Employee Training Program (PPCP). The objective of this training is each prospective employee can possess a good personalization, namely having AKHLAK cultural values (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) and certainly WIKA's basic characters.

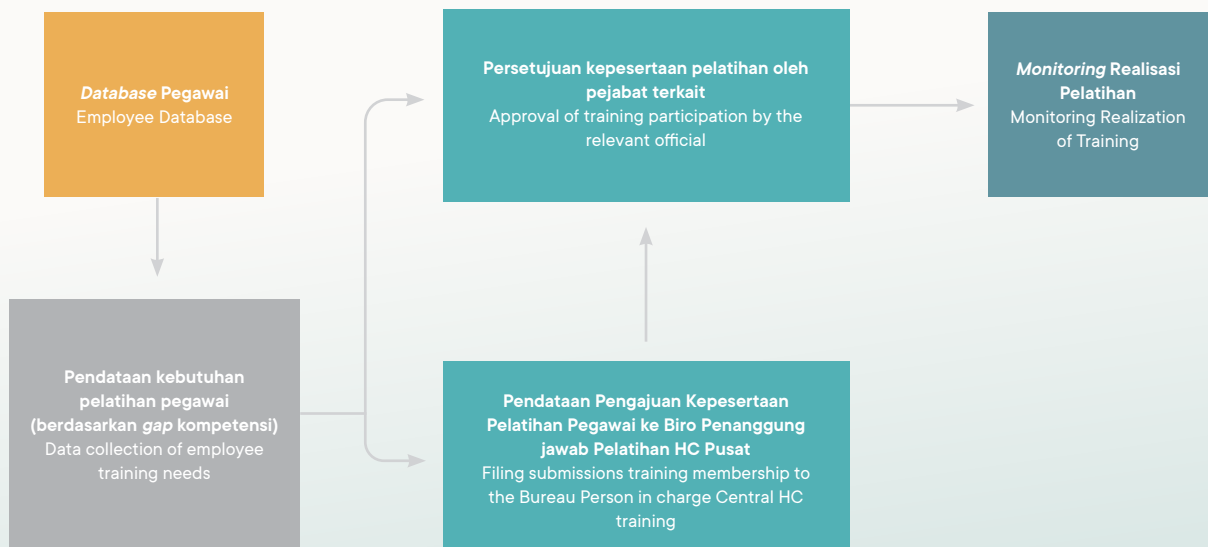
In addition, this program provides information and basic introduction regarding WIKA management system, aiming to help prospective employees to adapt with the Company's work rhythm and culture. In this program, the materials are delivered in class, in external and extra-work training courses, accompanied by mentors and presentations. At the end of PPCP, prospective employees must meet specified qualification scores in order to graduate and be appointed as permanent employees. The assessment results during PPCP is transparent and conveyed openly to prospective employees.

Afterward, the placement of prospective employees considers the needs of work unit and their background, psychological test results and competencies of each individual. Periodic rotation is also carried out in accordance with established pattern of professional development, taking into account the performance and competencies of each employee.

Employee Education and Competency Development Program

WIKA designs the Learning and Development program based on a strategic approach that is aligned with business needs and objectives, aiming to drive operational optimization and organizational maturity. This program covers all aspects of human resources, such as management systems, policies, strategies, regulations, and more.

Perencanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Education and Competency Development Program Planning





Program *Learning and Development* dilaksanakan melalui pihak internal serta program yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Sampai akhir tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan 12 program Pendidikan dan pengembangan kompetensi, dengan jumlah peserta mencapai 1.814 orang. Adapun rincian mengenai program yang dilaksanakan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The *Learning and Development* program is carried out through internal parties as well as programs organized by third parties. By the end of 2024, the Company has implemented 12 education and competency development programs, with a total of 1,814 participants. The details of the programs conducted in 2024 are as follows:

No	Jenis Program Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Types of Education and Competency Development Programs	Jumlah Peserta (Orang) Total Participants (person)	Penyelenggara Organizer
1	Pendidikan Lanjutan Higher Education	-	-
2	Pembekalan Komisaris Anak Perusahaan WIKA Debriefing of Commissioners of WIKA's Subsidiaries	-	-
3	Manajemen Bisnis Business management	532	Wikasatryan
4	<i>Soft & Hard (Self Mastery–Kepemimpinan)</i>	127	Wikasatryan
5	<i>WIKA Fundamental Project Management</i>	• (WPM) 57 • (WFPM) 108	• Wikasatryan • Wikapratama
6	Kontrak Manajemen Contract Management	163	Wikapratama
7	<i>Advance Practical</i>	188	Wikapratama
8	<i>Supervisory</i>	100	Wikapratama
9	QHSE Awareness	45	Wikapratama
10	<i>Practical Engineering Workshop</i>	-	-
11	<i>Practical Functional Workshop</i>	765	Wikapratama
12	<i>Practical Construction Workshop</i>	-	-

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Organisasi

Competency Development Based on Employee Group

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Organisasi Tahun 2024 Competency Development Based on Organizational Level in 2024

Level Organisasi Organizational Level	Jenis Pelatihan Type of Training	Jumlah Pelatihan Number of Trainings	Jumlah Peserta dari Golongan Karyawan yang Mengikuti Pelatihan Number of Participants from Employee Groups Who Attended Training	Persentase Golongan Karyawan yang Telah Mengikuti Pelatihan Percentage of Employee Groups Who Have Attended Trainin
BOD-1 Senior Management	Kapabilitas Talenta Talent Capability	1	3	13%
	<i>Finance For Executive</i>	1	19	83%
	<i>Safety Leadership</i>	1	2	9%
	MPP	1	4	14%
BOD – 2 Middle Management	Hard Kompetensi/Hard Competency			
	Kapabilitas Talenta/Talent Capability	1	16	16%
	<i>Corporate Finance</i>	2	15	15%
	PKMM	1	4	4%
	<i>Safety Leadership</i>	1	18	18%
	<i>Leader As Coach</i>	6	3	3%
	Merger & Akuisisi/Mergers & Acquisitions	1	4	4%
	MPP	1	8	8%
	Soft Kompetensi/Soft Competency			
	Satria Pratama	4	2	1%

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Organisasi Tahun 2024 Competency Development Based on Organizational Level in 2024

Level Organisasi Organizational Level	Jenis Pelatihan Type of Training	Jumlah Pelatihan Number of Trainings	Jumlah Peserta dari Golongan Karyawan yang Mengikuti Pelatihan Number of Participants from Employee Groups Who Attended Training	Persentase Golongan Karyawan yang Telah Mengikuti Pelatihan Percentage of Employee Groups Who Have Attended Trainin
BOD – 3 Junior Management	Hard Kompetensi/Hard Competency			
	Corporate Finance	2	32	16%
	PKMM	1	22	11%
	Managing Result	4	77	38%
	Leader As Coach	6	119	59%
	WIKA Project Management	2	6	3%
	Safety Leadership	1	7	3%
	Tim Tender Unggul	3	4	2%
	Merger & Akuisisi/Mergers & Acquisitions	1	8	4%
	MPP	1	13	6%
	Soft Kompetensi/Soft Competency			
	Satria Pratama	4	93	46%
	BOD – 4 Supervisor	Hard Kompetensi/Hard Competency		
Leader As Coach		6	13	2%
Managing Result		4	21	2%
WIKA project Management		2	51	6%
Tim Tender Unggul		2	14	2%
Merger & Akuisisi/Mergers & Acquisitions		1	11	1%
WIKA Fun damentals of Project Management		3	108	13%
Kontrak Manajemen Management Contract		4	163	19%
Advance Practical		4	188	22%
MPP		1	6	1%
Soft Kompetensi/Soft Competency				
Sehat Sejati		1	11	2%
Pemimpin Muda		1	21	2%
Supervisory	3	100	12%	
BOD – 5 Staff	Hard Kompetensi/Hard Competency			
	Tim Tender Unggul	3	69	15%
	Merger & Akuisisi/Mergers & Acquisitions	1	3	1%
	QSHE Awareness	2	45	10%
	Program Pilihan (<i>Practical Functional Workshop</i>)	11	765	170%
	Soft Kompetensi/Soft Competency			
	Sehat Sejati	1	3	1%
Pemimpin Muda	1	11	2%	



INVESTASI PENGEMBANGAN SDM

WIKA meyakini bahwa salah satu faktor terpenting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Oleh karena itu, WIKA berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam pengembangan SDM melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, kapabilitas dan profesionalisme karyawan. Berdasarkan keyakinan tersebut, WIKA telah menyusun anggaran untuk pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan kompetensi karyawan. Adapun realisasi anggaran untuk program pendidikan dan pengembangan kompetensi SDM di tahun 2024 sebesar Rp9.596.566.787, jumlah tersebut meningkat 98,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.823.362.867,-

Employee Engagement Survey (EES)

WIKA mengadakan *Employee Engagement Survey* (EES) untuk mengetahui kontribusi individual serta tingkat kepuasan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, EES juga berfungsi sebagai timbal balik terhadap program-program yang telah dilakukan, yang kemudian dapat menjadi evaluasi untuk penyusunan program-program selanjutnya. WIKA menetapkan target *engagement level* pegawai 10 % di atas rata-rata *engagement level* perusahaan di Indonesia.

HC DEVELOPMENT INVESTMENT

WIKA believes that one of the most important factors for achieving long-term success is the quality of Human Capital (HC). Therefore, WIKA is committed to continuously investing in HC development through various programs designed to enhance the competencies, capabilities, and professionalism of its employees. Based on this belief, WIKA has allocated a budget for the implementation of employee education and competency development programs. The actual budget for employee education and competency development in 2024 is Rp9,596,566,787, an increase of 98,96% compared to the previous year, which amounted to Rp4,823,362,867.

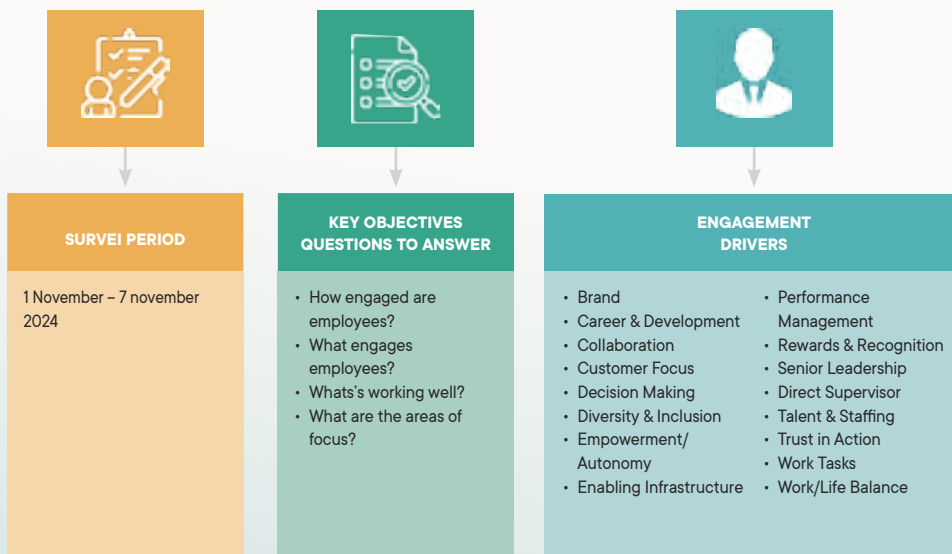
Employee Engagement Survey (EES)

WIKA conducts an Employee Engagement Survey (EES) to assess individual contributions and employee satisfaction in performing their work. In addition, the EES serves as feedback on the programs that have been implemented, which can then be used as an evaluation for developing future programs. WIKA sets a target engagement level for employees to be 10% above the average engagement level of companies in Indonesia.

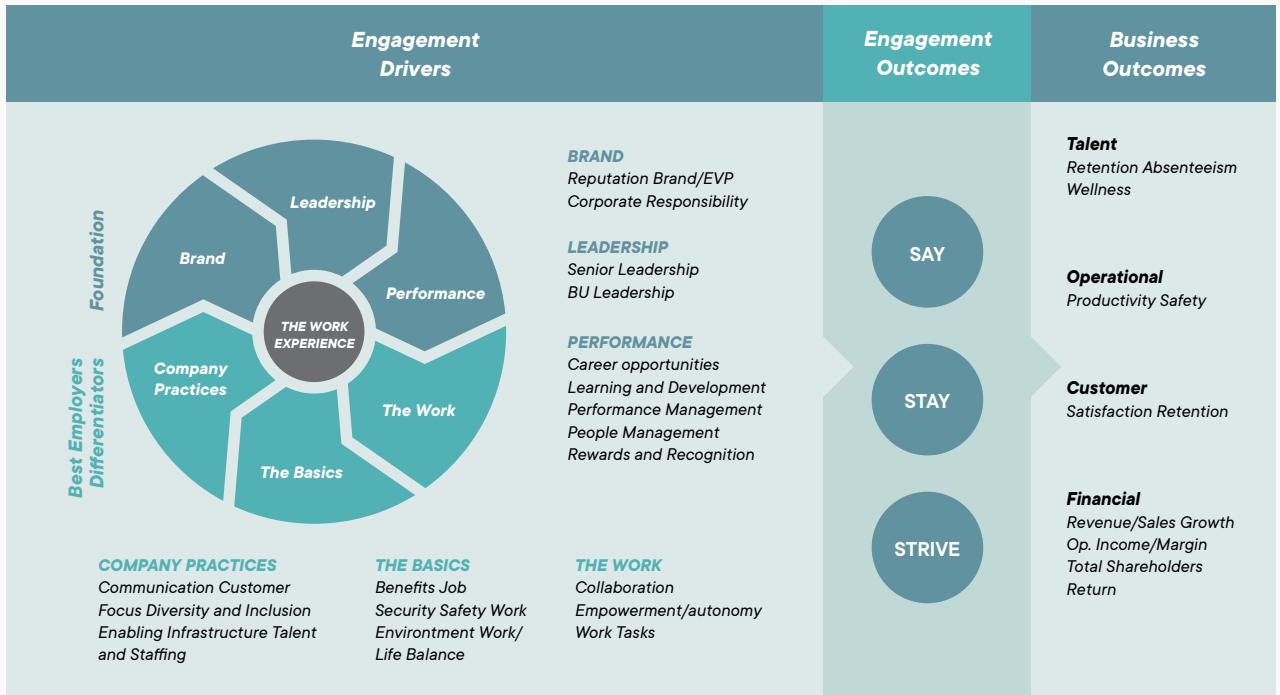
Berikut rincian mengenai hasil EES yang dilakukan di tahun 2024:

The following details are the results of the Company's EES program in 2024

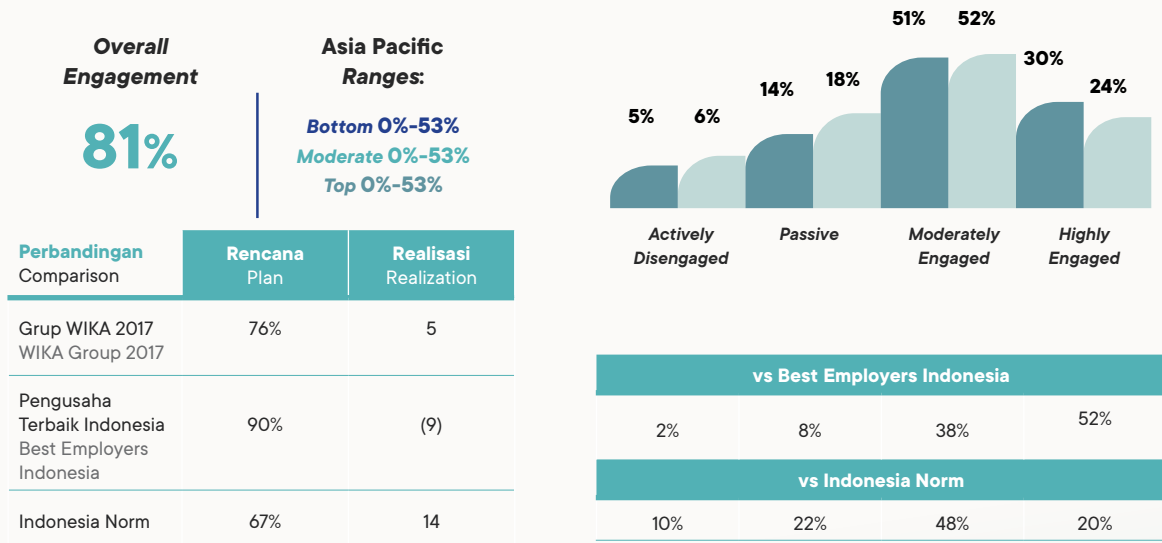
Tahun Year	WIKA		Rata-Rata Perusahaan di Indonesia Average of Indonesian Companies
	Rencana Plan	Realisasi Realization	
2017	75%	76%	65%
2019	77%	81%	67%
2021	82%	78%	78%
2022	85%	82%	80%
2023	79%	80%	77%
2024	80%	78%	75%



Kincentric Engagement Model



DENGAN PENINGKATAN SEBESAR 5% POIN, WIKA MASUK TOP QUARTILE OF APAC BENCHMARK 5%
WITH 5% POINTS IMPROVEMENT, WIKA ENTERS THE TOP QUARTILE OF APAC BENCHMARK 5%



Rencana Perkembangan SDM ke Depan

WIKA menyadari pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan bisnis di masa mendatang. Pada tahun 2025, program pengembangan SDM akan difokuskan pada peningkatan kompetensi *hard skills* di bidang digitalisasi, manajemen risiko, serta Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3/HSE). Selain itu, peningkatan *hard skills* juga akan mencakup manajemen bisnis, di mana karyawan akan dilatih untuk lebih memahami dinamika bisnis dan strategi perusahaan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan regulasi industri.

Future Human Capital Development Plan

WIKA recognizes the importance of sustainable Human Capital (HC) development to face future business challenges. In 2025, the HC development program will focus on enhancing hard skills in digitalization, risk management, as well as Health, Safety, and Environment (HSE). Additionally, hard skills improvement will also cover business management, where employees will be trained to better understand business dynamics and company strategies. This effort aims to ensure that each individual has the technical skills required to adapt to technological changes and industry regulations.



Di samping itu, WIKA juga akan memperkuat *soft skills* karyawan melalui program kepemimpinan yang komprehensif. Program ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang baik, dan pengambilan keputusan yang tepat. Sejalan dengan strategi Perseroan, program peningkatan *hard skills* terkait Engineering, Procurement, and Construction (EPC) serta keberlanjutan (*sustainability*) akan diperluas dan diintensifkan. Dengan fokus ini, WIKA berharap dapat menciptakan SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Data Demografi Karyawan

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan kinerja dan membantu Perseroan dalam mewujudkan tujuan. Untuk itu, WIKA secara berkesinambungan dalam mengembangkan dan mendukung upaya peningkatan kualitas SDM. Selain itu, Perseroan juga berusaha untuk menciptakan organisasi yang efektif, efisien, dan mampu menjawab setiap tantangan dalam dunia bisnis. Seiring perusahaan yang terus bertumbuh, peningkatan jumlah karyawan pun tidak dapat dihindari.

Per 31 Desember 2024, jumlah pegawai Perseroan mencapai 2.064 orang pegawai, mengalami penurunan 9,03% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.269 orang pegawai.

Furthermore, WIKA will also strengthen employees' soft skills through a comprehensive leadership program. This program is designed to develop effective leadership abilities, good communication, and sound decision-making. In line with the company's strategy, the improvement programs for hard skills related to Engineering, Procurement, and Construction (EPC) and sustainability will be expanded and intensified. With this focus, WIKA hopes to create HC that is not only technically competent but also possesses strong leadership capabilities to drive the company's growth and sustainability in the future.

Employee Demographics Data

Human Capital (HC) is one of the most important elements to improve the performance and support the Company in achieving its goals. For this reason, WIKA continuously develops and supports the efforts made for its HC quality improvement. The Company also strives to create an effective and efficient organization that is able to properly respond to every challenge in business world. In line with the Company's growth, increasing number of employees is inevitable.

As of December 31, 2024, the number of employees reached 2,064 employees, experienced a decrease 9,03% from the previous year which amounted to 2,269 employees.

Pergerakan Jumlah Karyawan 2020-2024 Number of Employees in 2020-2024

Tahun Year	Jumlah Karyawan Number of Employees
2020	2.834
2021	2.735
2022	2.563
2023	2.269
2024	2.064

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 2023-2024 (orang) Employee Composition Based on Employment Status in 2023-2024 (person)

Status Kepegawaian Employment Status	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Organik Organic	1.546	171	1.717	1.708	182	1.890
Terampil Skilled	306	41	347	336	43	379
Jumlah Total	1.852	212	2.064	2.044	225	2.269

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2023-2024 (orang) Employee Composition Based on Education Level in 2023-2024 (person)

Tingkat Pendidikan Level of education	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Strata 2/Strata 3 Master/Doctorate degree	267	36	302	296	37	333
Strata 1 Bachelor degree	1.398	152	1.550	1.528	161	1.689
Diploma Diploma	115	23	138	132	24	156
Non Akademik Non Academic	72	1	73	88	3	91
Jumlah Total	1.852	212	2.064	2.044	225	2.269

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia 2023-2024 (orang) Employee Composition Based on Age in 2023-2024 (person)

Rentang Usia Age Range	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
51-60 tahun/Year	202	9	211	262	14	276
41-50 tahun/Year	446	51	497	429	48	477
31-40 tahun/Year	952	96	1.048	974	92	1066
21-30 tahun/Year	252	56	308	379	71	450
Jumlah Total	1.852	212	2.064	2.044	225	2.269

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi 2023-2024 (orang) Employee Composition Based on Organization Level in 2023-2024 (person)

Level Organisasi Organization Level	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Entitas Induk Parent Entity						
Direksi/Board of Directors	6	0	6	6	1	7
Kepala Divisi/Division Head	13	2	15	20	2	22
Ahli Utama/Senior Expert 1	8	0	8	5	0	5
General Manager	49	10	59	49	6	55
Ahli Utama 2/Senior Expert 2	17	1	18	21	2	23
Manajer/Ahli Madya 1 Manager/Intermediate Expert 1	86	8	94	74	10	84
Manajer Proyek/Project Manager	77	2	79	94	2	96
Manajer Bidang/Manajer Konstruksi/Ahli Madya 2 Field Manager/Construction Manager/Associate Expert 2	131	16	147	124	17	141
Kepala Seksi/Pelaksana Utama/Ahli Muda/ Koordinator Section Chief/Main Implementer/Junior Expert/ Coordinator	725	70	795	782	63	845
Staf/Pelaksana/Staff/Implementers	369	60	429	442	80	522
Subtotal/Subtotal	1.481	169	1.650	1.536	174	1.688

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi 2023-2024 (orang)

Employee Composition Based on Organization Level in 2023-2024 (person)

Level Organisasi Organization Level	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Entitas Anak Subsidiaries						
Subtotal/Subtotal	371	43	414	433	43	476
Jumlah Total	1.852	212	2.064	2.044	225	2.269

Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Kerja 2023-2024 (orang)

Employee Composition Based on Work Placement in 2023-2024 (person)

Penempatan Kerja Work Placement	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Kantor Pusat Head Office	1.075	159	1.234	8.61	156	1.017
Kantor Divisi/Proyek Division/Project Office	777	53	830	1.183	69	1.252
Jumlah Total	1.852	212	2.064	2.044	225	2.269

Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja 2023-2024 (orang)

Employee Composition Based on Years of Service in 2023-2024 (person)

Penempatan Kerja Years of Service	2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
< 1 Tahun/Years	4	1	5	6	7	13
1 - 5 Tahun/Years	291	81	372	426	89	515
>5 - 10 Tahun/Years	708	62	770	807	61	868
>10 - 15 Tahun/Years	429	36	465	393	32	425
>15 - 20 Tahun/Years	214	20	234	138	19	157
>20 - 25 Tahun/Years	32	2	34	17	0	17
>25 - 30 Tahun/Years	147	6	153	212	10	222
>30 Tahun/Years	27	4	31	45	7	52
Jumlah Total	1.852	212	2.064	2.044	225	2.269

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Structure and Composition

Struktur Pemegang Saham WIKA Per 31 Desember 2023

WIKA's Shareholders structure Per December 31, 2023



Istana Presiden, IKN
Presidential Palace, IKN



Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Pada Awal dan Akhir Tahun Buku

Shareholders and Percentage of Ownership at The Beginning and end of The Fiscal Year

Tabel Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan pada Awal dan Akhir Tahun Buku
 Table of Shareholders and Percentage of Ownership at the Beginning and End of the Financial Year

Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2024/January 1, 2024			31 Desember 2024/December 31, 2024		
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Nilai Nominal Saham = Rp100/lembar saham Nominal Value of Shares = Rp100/share						
Saham Seri A Dwiwarna Dwiwarna Series A Shares						
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	1	100	-	1	100	-
Saham Seri B Series B Shares						
Kepemilikan saham 5% atau lebih Share ownership of 5% or more						
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	5.834.849.999	583.484.999.900	65,05	36.291.702.780	3.629.170.278.000	91,02
Kepemilikan Kurang dari 5% Ownership Less than 5%						
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors	184.200	18.420.000	0,00	5.842.200	584.220.000	0,02
Publik (masing-masing kepemilikan di bawah 5%) Public (each ownership under 5%)w	3.133.817.172	313.381.717.200	34,94	3.574.418.877	357.441.887.700	8,96
Sub Total	3.134.001.372	314.400.137.200	34,94	3.580.261.077	358.026.107.700	8,98
TOTAL	8.969.951.372	896.995.137.200	100%	39.873.063.858	3.987.306.385.800	100%

KOMPOSISI KELOMPOK PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN >5%

SHAREHOLDERS WITH MORE THAN 5% OWNERSHIP

Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	1 Januari 2024/January 1, 2024		31 Desember 2024/December 31, 2024	
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Negara Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	5.834.850.000	65,05	36.291.702.781	91,02

KOMPOSISI KELOMPOK PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN <5%

SHAREHOLDERS WITH LESS THAN 5% OWNERSHIP

Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	1 Januari 2024/January 1, 2024			31 Desember 2024/December 31, 2024		
	Jumlah Pemegang Saham Amount of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Jumlah Pemegang Saham Amount of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Masyarakat Public	65.534	3.135.101.372	34,95	60.789	3.580.261.077	8,98

PERSENTASE KEPEMILIKAN LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG ATAS SAHAM WIKA OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA AWAL DAN AKHIR TAHUN BUKU

PERCENTAGE OF INDIRECT OWNERSHIP OF WIKA SHARE BY BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS AT THE BEGINNING AND END OF FISCAL YEAR

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2024/January 1, 2024				31 Desember 2024/December 31, 2024			
		Kepemilikan Langsung Direct Ownership		Kepemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership		Kepemilikan Langsung Direct Ownership		Kepemilikan Tidak Langsung Indirect Ownership	
		Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Direksi/Board of Directors									
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director	184.200	0,0020%	-	-	1.434.200	0,0036%	-	-
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Director of Finance	-	-	-	-	510.000	0,0013%	-	-
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi	-	-	-	-	510.000	0,0013%	-	-
Hananto Aji	Direktur Operasi I Director of Operation I	-	-	-	-	1.269.000	0,0032%	-	-
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operation II	-	-	-	-	1.269.000	0,0032%	-	-
Sumadi	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Direktur Manajemen Risiko dan Legal	-	-	-	-	850.000	0,0021%	-	-
Dewan Komisaris/Board of Commissioners									
Jarot Widyoko	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-	31.000	0,0001%	-	-
Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-
Rusmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-
Harris Arthur Hedar	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-
Firdaus Ali	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-



RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE KEPEMILIKAN BERDASARKAN KLASIFIKASI

DETAILS OF SHAREHOLDERS AND PERCENTAGE OF OWNERSHIP BASED ON CLASSIFICATION

Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2024/January 1, 2024			31 Desember 2024/December 31, 2024		
	Jumlah Pemegang Saham Amount of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Jumlah Pemegang Saham Amount of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Pemodal Nasional						
Negara Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	1	5.834.850.000	65,05	1	36.291.702.781	91,02
Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	62.785	1.423.885.576	15,87	60.260	2.102.057.086	5,27
Koperasi Cooperatives	5	3.797.300	0,04	4	4.147.000	0,01
Yayasan Foundations	18	27.412.580	0,31	9	4.168.150	0,01
Dana Pensiun Pension Funds	87	641.333.865	7,15	50	605.382.845	1,52
Asuransi Insurance	76	103.680.579	1,16	21	75.738.227	0,19
Bank Bank	2	2.146.000	0,02	1	1.900.000	0,00
Perseroan Terbatas Corporations	120	174.502.656	1,95	122	240.881.710	0,60
Lembaga Pemerintah Government Institutions	1	93	0,00	1	93	0,00
Reksadana Mutual Funds	103	124.895.252	1,40	10	7.786.945	0,02
Sub Total	63.198	8.336.503.901	92,94	60.479	39.333.764.827	98,65
Pemodal Asing						
Perorangan Asing Foreign Individuals	193	19.624.997	0,22	226	11.527.627	0,03
Badan Usaha Asing Foreign Institutions	143	613.822.474	6,84	95	527.771.404	1,32
Sub Total	336	633.447.471	7,06	321	539.299.031	1,35
Total	63.534	8.969.951.372	100	60.800	39.873.063.858	100

JUMLAH PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE KEPEMILIKAN BERDASARKAN KLASIFIKASI

NUMBER OF SHAREHOLDERS AND PERCENTAGE OF OWNERSHIP BASED ON CLASSIFICATION

Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2024/January 1, 2024			31 Desember 2024/December 31, 2024		
	Jumlah Pemegang Saham Amount of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Jumlah Pemegang Saham Amount of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Institusi Lokal Local Institution	413	6.912.618.325	77,07	247	6.693.950.717	93,38
Institusi Asing Foreign Institution	143	613.822.474	6,84	88	268.891.758	1,32
Individu Lokal Local Individual	62.785	1.423.885.576	15,87	62.568	2.007.108.897	5,27
Individu Asing Foreign Individual	193	19.624.997	0,22	236	12.804.497	0,03

RINCIAN NAMA PEMEGANG SAHAM YANG MELIPUTI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR DAN PERSENTASE KEPEMILIKANNYA

DETAILS OF SHAREHOLDERS' NAMES WHICH INCLUDE TOP 20 SHAREHOLDERS AND THEIR PERCENTAGE OF OWNERSHIP

Per 1 Januari 2024/Per January 2024

No	Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	Status	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
1	Negara Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	Pemerintah Government	5.834.850.000	65,05
2	DJS Ketenagakerjaan Program JHT DJS Employment JHT Program	Dana Pensiun Pension Fund	298.240.927	3,32
3	PT Taspen (Asuransi) - Afs	Dana Pensiun Pension Fund	153.677.332	1,71
4	BNYM RE BNYMLB RE Employees Providentfd	Badan Usaha Asing Foreign Corporation	74.445.913	0,83
5	Citibank New York S/A Government Of Norw	Badan Usaha Asing Foreign Corporation	58.177.800	0,65
6	Citibank New York S/A Government Of Norw	Badan Usaha Asing Foreign Corporation	50.000.000	0,56
7	MESOP Wijaya Karya	Perseroan Terbatas	49.810.382	0,56
8	DJS Ketenagakerjaan Program JP	Dana Pensiun Pension Fund	44.510.570	0,50
9	State Street Bank-Ishares Core MSCI EMER	Badan Usaha Asing Foreign Corporation	41.181.423	0,50
10	JPMCB NA RE - Vanguard Emerging Markets	Badan Usaha Asing Foreign Corporation	41.029.470	0,50
11	Citibank New York S/A Government Of Norw	Badan Usaha Asing	38.701.300	0,43
12	DJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kece	Dana Pensiun Pension Fund	38.020.700	0,42
13	JPMCB NA RE-Vanguard Total International	Badan Usaha Asing Foreign Corporation	35.135.576	0,39
14	Citibank New York S/A Emerging Markets C	Badan Usaha Asing Foreign Corporation	23.930.022	0,27
15	RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies	Reksadana Mutual Funds	23.213.358	0,26
16	PT Panin Sekuritas	Badan Usaha Lokal Local Corporation	22.448.200	0,25
17	Citibank New York S/A Dimensional Emerging	Badan Usaha Asing Foreign Corporation	20.872.100	0,23
18	State Street Bank-Ishares MSCI Indonesia	Badan Usaha Asing Foreign Corporation	20.805.070	0,23
19	JPMCB NA RE - Blackrock Inst Tr Co N A I	Badan Usaha Asing Foreign Corporation	18.899.416	0,21
20	JPMCB NA RE - Vanguard Fiduciary Trust Com	Badan Usaha Asing Foreign Corporation	18.491.800	0,21

Per 31 Desember 2024/December 31, 2024

No	Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	Status	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
1	Negara Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	Pemerintah/Government	36.291.702.781	91,02
2	DJS Ketenagakerjaan Program JHT DJS Employment JHT Program	Dana Pensiun/Pension Fund	298.240.927	0,748
3	PT Taspen (Asuransi) - Afs	Dana Pensiun/Pension Fund	153.677.332	0,385
4	JPMCB NA RE - Blackrock Inst Tr Co N A I	Badan Usaha Asing/Foreign Corporation	109.365.400	0,274
5	HSBC Bank PLC S/A Abu Dhabi Investment A	Badan Usaha Asing/Foreign Corporation	75.640.231	0,190
6	PT Mitracomm Ekasarana	Perseroan Terbatas/Limited Company	65.308.000	0,164
7	MESOP Wijaya Karya	Perseroan Terbatas/Limited Company	46.477.882	0,117
8	DJS Ketenagakerjaan Program JP DJS Employment JP Program	Dana Pensiun/Pension Fund	44.510.570	0,112
9	JPMCB Na Re-Thrift Savings Plan	Badan Usaha Asing/Foreign Corporation	41.620.300	0,104
10	DJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kece DJS Employment Jaminan Kece Program	Dana Pensiun/Pension Fund	38.020.700	0,095
11	Manoj Pitamber Nanwani	Perorangan Indonesia/Indonesian Individual	26.261.200	0,066
12	SSB OBGF Ishares MSCI Indonesia ETF -218	Badan Usaha Asing/Foreign Corporation	21.924.000	0,055
13	Greatlink Intelligence Equity Fund	Asuransi/Insurance	21.289.200	0,053
14	Go Kiong Hwoo	Perorangan Indonesia/Indonesian Individual	20.923.700	0,052
15	Citibank New York S/A Emerging Markets C	Badan Usaha Asing/Foreign Corporation	19.524.422	0,049
16	Go Kiong Hwoo	Perorangan Indonesia/Indonesian Individual	18.659.400	0,047
17	UOB Kay Hian Pte Ltd	Badan Usaha Asing/Foreign Corporation	18.530.000	0,046
18	NTC-Northern Trust Investments Collective	Badan Usaha Asing/Foreign Corporation	17.948.200	0,045
19	Dana Pensiun Bri - Swa Kelola 2 Bri Pension Fund - Self Managed 2	Dana Pensiun/Pension Fund	17.210.619	0,043
20	Liu Maritess Esperanza	Perorangan Indonesia/Indonesian Individual	17.000.000	0,043

PEMANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI PERUSAHAAN, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU

MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS, BOTH DIRECTLY OR INDIRECTLY, UP TO INDIVIDUAL OWNERS

Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	Alamat Name of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Ministry of State-Owned Enterprise	Kantor Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 29935678 Fax. +62 21 29935740 www.bumn.go.id	36.291.702.781	91,02

Pemegang saham utama Perseroan adalah Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan kepemilikan sebesar 91,02% atau 36.291.702.781 lembar Saham. Pemerintah Republik Indonesia sekaligus menjadi nama pemilik akhir dari Perseroan.

The major shareholder of the Company is the Republic of Indonesia, represented by the Government of the Republic of Indonesia/ Ministry of State-Owned Enterprises (SOE), with ownership of 91.02% or 36,291,702,781 shares. The Government of the Republic of Indonesia is also the ultimate end-owner of the Company.

Nama Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik Memiliki Pengendalian Bersama Entitas, Beserta Persentase Kepemilikan Saham, Bidang Usaha, Total Aset, dan Status Operasi Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama

Name of Subsidiaries, Associated Entities, Joint Venture Companies Where The Issuer or Public Company Has Joint Control of The Entity, and The Percentage of Share Ownership, Business Fields, Total Assets, and Operational Status of Subsidiaries, Associated Entities, Joint Venture Companies

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES


Nama Name	Bidang Usaha Business Field	Kepemilikan Saham Shareholding (%)		Waktu Pendirian Date Of Establishment	Status Operasi Operational Status	Jumlah Aset Total Assets (Rp Juta Million)		Domisili Domicile
		2024	2023			2024	2023	
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Industri Beton Concrete Industry	60,00	60,00	11 Maret 1997 March 11, 1997	Beroperasi Operating	7.238.367	7.631.670	Indonesia
PT Wijaya Karya Realty	Realty, Properti, dan Jasa (kecuali bidang hukum dan pajak) Realty, Property, and Services (except legal and tax sector)	95,10	72,51	20 Januari 2000 January 20, 2000	Beroperasi Operating	16.152.873	18.005.753	Indonesia
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Jasa Konstruksi, Operation & Maintenance, Industrial yang mengarah ke Renewable Energy serta Investasi Construction, Operation & Maintenance, Industrial Services leading to Renewable Energy and Investmen	98,58	98,58	20 Januari 2000 January 20, 2000	Beroperasi Operating	63.553,25	3.194.751	Indonesia
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Konstruksi, Konsesi dan Industri Modular Construction, Concession and Modular Industry	97,99	97,99	28 Februari 1984 February, 28, 1984	Beroperasi Operating	1.446.948	1.458.645	Indonesia
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Konstruksi dan Properti Construction and Property	69,30	69,30	24 Oktober 2008 October 24, 2008	Beroperasi Operating	5.965.917	5.561.533	Indonesia
PT Wijaya Karya Bitumen	Pertambangan dan Industri Aspal Alam Mining and Natural Asphalt Industry	99,39	99,00	12 Mei 2013 May 12, 2013	Beroperasi Operating	347.728	378.905	Indonesia
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Jalan Tol Tollroads	84,17	82,98	17 Februari 2017 February 17, 2017	Beroperasi Operating	7.126.914	6.478.816	Indonesia
PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur	Pengelolaan Air Water Management	83,78	88,38	15 Januari 2021 January 15, 2021	Beroperasi Operating	1.829.245	1.233.196	Indonesia



INFORMASI SINGKAT ENTITAS ANAK

BRIEF INFORMATION ON SUBSIDIARIES

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Nama Perusahaan Company Name	PT Wijaya Karya Beton Tbk 	
Bidang Usaha Business Field	Industri Beton	Concrete Industry
Profil Perusahaan Company Profile	<p>PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) adalah Entitas Anak WIKA yang bergerak dalam bidang beton pracetak. WTON sebelumnya merupakan bagian dari departemen produk beton milik Perusahaan sejak tahun 1974. Pada tanggal 11 Maret 1997 sesuai dengan akta WTON No. 44 tanggal 11 Maret 1997 dari Achmad Bajumi, S.H., selaku pengganti dari Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta, WTON menjadi entitas anak Perusahaan. WTON bergerak dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha yang terkait.</p> <p>Saham WTON dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 April 2014. Porsi kepemilikan WIKA pada WTON adalah sebesar 60,0%. WTON saat ini memiliki 14 pabrik, 1 <i>mobile plant</i> dan 3 <i>quarry plant</i>.</p>	<p>PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) is a subsidiary of WIKA engaged in precast concrete. WTON was previously part of the Company's concrete product department since 1974. On March 11, 1997 in accordance with the WTON deed No. 44 dated March 11, 1997 before Achmad Bajumi, S.H., as alternate to Imas Fatimah, S.H., a notary in Jakarta, WTON became a subsidiary of the Company. WTON is engaged in trading and concrete industry, construction services and related business fields.</p> <p>WTON's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on April 8, 2014. WIKA's ownership of WTON is 60.0%. WTON currently has 14 factories, 1 mobile plant and 3 quarry plants.</p>
Tanggal dan Tahun Pendirian Date and Year of Establishment	11 Maret 1997	March 11, 1997
Jumlah Aset 2023 Total Assets in 2023	Rp7.238.366.934.674	Rp7.238.366.934.674
Kepemilikan Saham Shareholding	60,00%	60.00%
Status Operasi Operational Status	Beroperasi	Operating
Alamat Address	Gedung WIKA Tower 1 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340 DKI Jakarta, Indonesia	Gedung WIKA Tower 1 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340 DKI Jakarta, Indonesia
Pengurus Perusahaan* Company Management*	<p>Dewan Komisaris Komisaris Utama : Eko Sujiyanto Komisaris : R. Permadi Mulajaya Komisaris : Miftachul Munir Komisaris Independen : Nita Prihutamingrum Komisaris Independen : Iswandi Imran</p> <p>Direksi Direktur Utama : Kuntjara Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko : Syailendra Ogan Direktur Pemasaran dan Pengembangan : Rija Judaswara Direktur Teknik dan Produksi : Verly Widianoro Direktur Operasi dan Supply Chain Management : Agus Pramono</p> <p>Komite Audit Ketua (Merangkap Anggota): Iswandi Imran Anggota: Nita Prihutamingrum Anggota: Gunarto S.E., Ak, CA, CPA</p> <p>Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) Ketua (Merangkap Anggota): Nita Prihutamingrum Anggota: Priatna Agus Setiawan Anggota: Dedi Indra</p> <p>Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Ketua (Merangkap Anggota): R. Permadi Mulajaya Anggota: Miftachul Munir Anggota: Manajer Divisi Pengendalian dan Manajemen Risiko</p>	<p>Board of Commissioners President Commissioner: Eko Sujiyanto Commissioner: R. Permadi Mulajaya Commissioner: Miftachul Munir Independent Commissioner: Nita Prihutamingrum Independent Commissioner: Iswandi Imran</p> <p>Board of Directors President Director: Kuntjara Director of Finance, Human Capital, and Risk Management: Syailendra Ogan Director of Marketing and Development: Rija Judaswara Director of Engineering and Production: Verly Widianoro Director of Operations and Supply Chain Management: Agus Pramono</p> <p>Audit Committee Chairman (Concurrently Member): Iswandi Imran Member: Nita Prihutamingrum Member: Gunarto S.E., Ak, CA, CPA</p> <p>Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee Chairman (Concurrently Member): Nita Prihutamingrum Member: Priatna Agus Setiawan Member: Dedi Indra</p> <p>Integrated Risk Monitoring and Governance Committee Chairman (Concurrently Member): R. Permadi Mulajaya Member: Miftachul Munir Member: Risk Management and Control Division Manager</p>

*per 31 Desember 2024/as of December 31, 2024

PT Wijaya Karya Realty

Nama Perusahaan Company Name	PT Wijaya Karya Realty				
Bidang Usaha Business Field	Realty, Properti, dan Jasa (kecuali bidang hukum dan pajak)	Realty, Property, and Services (except legal and tax sector)			
Profil Perusahaan Company Profile	<p>PT Wijaya Karya Realty (WIKAL REALTY) adalah Entitas Anak WIKAL yang bergerak dalam bidang properti. WIKAL Realty didirikan berdasarkan akta Imas Fatimah, S.H., No.17 tanggal 20 Januari 2000. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C-20856HT01.01.TH2000, tanggal 15 September 2000. WIKAL Realty bergerak dalam bidang usaha realti, jasa properti dan jasa lainnya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.</p> <p>Porsi kepemilikan WIKAL pada WR adalah sebesar 95.10%. WIKAL Realty saat ini memiliki 6 perumahan, 7 property low/high rise, 9 property investasi, 28 property management, 28 hotel portfolio.</p>	<p>PT WIKAL Realty (WIKAL Realty) is a WIKAL's Subsidiary engaged in property. WIKAL Realty was established based on deed before Imas Fatimah, SH, No.17 dated January 20, 2000. This deed was approved by the Republic of Indonesia Minister of Justice through Decree No.C-20856HT01.01.TH2000, dated September 15, 2000. WIKAL Realty is engaged in realty business, property services and other services, excluding services in law and tax.</p> <p>WIKAL's share ownership of WR is 95.10%. WIKAL Realty currently has 6 residences, 7 low/high rise properties, 9 investment properties, 28 management properties, and 28 portfolio hotels.</p>			
Tanggal dan Tahun Pendirian Date and Year of Establishment	20 Januari 2000	January 20, 2020			
Jumlah Aset 2023 Total Assets in 2023	Rp16.152.872.874.963	Rp16,152,872,874,963			
Kepemilikan Saham Shareholding	95,10%	95.10%			
Status Operasi Operational Status	Beroperasi	Operating			
Alamat Address	Tamansari Hive Office, Lantai 12-15. Jl. DI. Panjaitan Kav. 2, RT.7/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340				
Pengurus Perusahaan* Company Management*	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Dewan Komisaris Komisaris Utama : Andie Hermawan Komisaris : Edi Mulia Komisaris : Endra Saleh Atmawidjaja Komisaris Independen : Eko Daniyanto Komisaris Independen : David Herson Tonus Komisaris Independen : Mangapul Silalahi Direksi President Director : Fery Safaria Director of Finance and Risk Management : Yoppi Priatmoko Director of Development and Human Capital : Adhi Priyanto Putro Director of Marketing Property and Realty : Ronny Wuisan </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> Board of Commissioners President Commissioner: Andie Hermawan Commissioner: Edi Mulia Commissioner: Endra Saleh Atmawidjaja Independent Commissioner: Eko Daniyanto Independent Commissioner: David Herson Tonus Independent Commissioner: Mangapul Silalahi Board of Directors President Director: Fery Safaria Director of Finance and Risk Management: Yoppi Priatmoko Director of Development and Human Capital: Adhi Priyanto Putro Director of Marketing Property and Realty: Ronny Wuisan </td> </tr> </table>			Dewan Komisaris Komisaris Utama : Andie Hermawan Komisaris : Edi Mulia Komisaris : Endra Saleh Atmawidjaja Komisaris Independen : Eko Daniyanto Komisaris Independen : David Herson Tonus Komisaris Independen : Mangapul Silalahi Direksi President Director : Fery Safaria Director of Finance and Risk Management : Yoppi Priatmoko Director of Development and Human Capital : Adhi Priyanto Putro Director of Marketing Property and Realty : Ronny Wuisan	Board of Commissioners President Commissioner: Andie Hermawan Commissioner: Edi Mulia Commissioner: Endra Saleh Atmawidjaja Independent Commissioner: Eko Daniyanto Independent Commissioner: David Herson Tonus Independent Commissioner: Mangapul Silalahi Board of Directors President Director: Fery Safaria Director of Finance and Risk Management: Yoppi Priatmoko Director of Development and Human Capital: Adhi Priyanto Putro Director of Marketing Property and Realty: Ronny Wuisan
Dewan Komisaris Komisaris Utama : Andie Hermawan Komisaris : Edi Mulia Komisaris : Endra Saleh Atmawidjaja Komisaris Independen : Eko Daniyanto Komisaris Independen : David Herson Tonus Komisaris Independen : Mangapul Silalahi Direksi President Director : Fery Safaria Director of Finance and Risk Management : Yoppi Priatmoko Director of Development and Human Capital : Adhi Priyanto Putro Director of Marketing Property and Realty : Ronny Wuisan	Board of Commissioners President Commissioner: Andie Hermawan Commissioner: Edi Mulia Commissioner: Endra Saleh Atmawidjaja Independent Commissioner: Eko Daniyanto Independent Commissioner: David Herson Tonus Independent Commissioner: Mangapul Silalahi Board of Directors President Director: Fery Safaria Director of Finance and Risk Management: Yoppi Priatmoko Director of Development and Human Capital: Adhi Priyanto Putro Director of Marketing Property and Realty: Ronny Wuisan				

*per 31 Desember 2024/as of December 31, 2024



PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi

Nama Perusahaan Company Name	PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi 	
Bidang Usaha Business Field	Industri dan Konstruksi	Industry and Construction
Profil Perusahaan Company Profile	<p>PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (WIKA IKON) adalah Entitas Anak WIKA yang sebelumnya bernama PT Wijaya Karya Intrade didirikan berdasarkan akta Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., No. 16 tanggal 20 Januari 2000. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C-19656HT 01.TH 2000, tanggal 4 September 2000. Berdasarkan akta No. 35 tanggal 12 April 2013 dari Sri Ismiyati, S.H., notaris di Jakarta, PT Wijaya Karya Intrade berubah nama menjadi (WIKA IKON).</p> <p>Perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-21488.AH. 01.02.Tahun 2013 tanggal 22 April 2013. (WIKA IKON) bergerak dalam bidang industri, perdagangan suku cadang mobil, alat teknik, mekanikal, elektrikal, pipa katup sambungan dan packing, bejana tekan, bahan-bahan konstruksi serta usaha jasa konstruksi. Porsi kepemilikan WIKA pada (WIKA IKON) adalah sebesar 98,58%.</p>	<p>PT WIKA Industri dan Konstruksi (WIKA IKON) is a WIKA's Subsidiary formerly known as PT Wijaya Karya Intrade established under the deed of Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., an alternate of Imas Fatimah, S.H., No. 16 dated January 20, 2000. This deed of establishment was approved by the Republic of Indonesia Minister of Justice through their Decision Letter no. C-19656HT 01.TH 2000, dated September 4, 2000. Based on deed No. 35 dated April 12, 2013 before Sri Ismiyati, SH, notary public in Jakarta, PT Wijaya Karya Intrade changed its name to (WIKA IKON).</p> <p>The amendment to the articles of association was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-21488.AH. 01.02.year 2013 dated April 22, 2013. (WIKA IKON) is engaged in industry, automobile parts trading, engineering equipment, mechanical, electrical, pipeline connections and packing valves, pressure vessels, construction materials and construction services business. WIKA's share ownership in (WIKA IKON) is 98.58%.</p>
Tanggal dan Tahun Pendirian Date and Year of Establishment	20 Januari 2000	January 20, 2000
Jumlah Aset 2023 Total Assets in 2023	Rp3.316.260.924.431	Rp3,316,260,924,431
Kepemilikan Saham Shareholding	98,58%	98.58%
Status Operasi Operational Status	Beroperasi	Operating
Alamat Address	Tamasari HIVE Office, Jl.D.I.Panjaitan Kav 2, Lt.8 Jakarta Timur	
Pengurus Perusahaan* Company Management*	Dewan Komisaris Komisaris Utama : Eka Santoso Komisaris : Harjawan Balaningrath Komisaris : Suharyanto Direksi Direktur Utama : Sidiq Purnomo Direktur : Adi Widyo Nugroho Direktur : San Oktavia Hari Akbar	Board of Commissioners President Commissioner: Eka Santoso Commissioner: Harjawan Balaningrath Commissioner: Suharyanto Board of Directors President Director: Sidiq Purnomo Director: Adi Widyo Nugroho Director: San Oktavia Hari Akbar

*per 31 Desember 2024/as of December 31, 2024

PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi

Nama Perusahaan Company Name	PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi		
Bidang Usaha Business Field	Jasa Konstruksi, <i>Operation & Maintenance</i> , Industrial yang mengarah ke <i>Renewable Energy</i> serta Investasi	Construction, <i>Operation & Maintenance</i> , Industrial services leading to <i>Renewable Energy</i> and Investment	
Profil Perusahaan Company Profile	PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi ("WIKAREKON"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 21 tertanggal 28 Februari 1984, dibuat di hadapan Soehardjono, S.H., pengganti dari Ali Harsojo, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana Anggaran Dasar telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta No. 43 tanggal 16 Juni 2023 dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.KN. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-0036172.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023.	PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi ("WIKAREKON"), a limited liability company established based on Deed No. 21 dated February 28, 1984, made before Soehardjono, S.H., alternate of Ali Harsojo, S.H., Notary in Jakarta, in which the Articles of Association have been amended several times and most recently by Deed No. 43 dated June 16, 2023 made before Ryan Bayu Candra, S.H., M.KN. Notary in Jakarta, and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree no. AHU-0036172.AH.01.02 of 2023 dated June 26, 2023.	
Tanggal dan Tahun Pendirian Date and Year of Establishment	28 Februari 1984	February 28, 1984	
Jumlah Aset 2023 Total Assets in 2023	Rp1.446.947.634.722	Rp1,446,947,634,722	
Kepemilikan Saham Shareholding	97,99%	97.99%	
Status Operasi Operational Status	Beroperasi	Operating	
Alamat Address	Jl. D.I Panjaitan Kav 2, Tamansari Hive Office Lt.5, Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13340		
Pengurus Perusahaan* Company Management*	Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tri Prabowo Komisaris : Sujono Komisaris Independen : Ahmad Thonthowi Djauhari Komisaris : Mira Rahardjo Djarot Direksi Direktur Utama : Rosman Pria Utama Direktur Operasi : Fafan Khoiril Fanani Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko : Ika Rosmayanti Dewi Direktur Strategi Bisnis dan Investasi : Hadi Irawan	Board of Commissioners President Commissioner: Tri Prabowo Commissioner: Sujono Independent Commissioner: Ahmad Thonthowi Djauhari Commissioner: Mira Rahardjo Djarot Board of Directors President Director: Rosman Pria Utama Director of Operations: Fafan Khoiril Fanani Director of Finance, Human Capital and Risk Management: Ika Rosmayanti Dewi Director of Business Strategy and Investment: Hadi Irawan	

*per 31 Desember 2024/as of December 31, 2024

Susunan Pengurus terakhir diubah dengan akta No. 52 tanggal 30 Mei 2024, dibuat di hadapan Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.KN Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan WIKAREKON nomor AHU-AH.01.09-0210355 tanggal 5 Juni 2024.

The composition of Board of Directors was last amended by deed No. 52 dated May 30, 2024, made before Notary Ryan Bayu Candra, S.H., M.KN Notary in Jakarta, which has been received and in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Letter of Receipt of Notification of Changes to WIKAREKON Company Data number AHU-AH.01.09-0210355 dated June 5, 2024.




PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Nama Perusahaan Company Name	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk		
Bidang Usaha Business Field	Konstruksi, Konsesi dan Industri Modular	Construction, Concession and Modular Industry	
Profil Perusahaan Company Profile	<p>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) adalah Entitas Anak WIKA yang didirikan berdasarkan akta Imas Fatimah, S.H., No. 43 tanggal 24 Oktober 2008. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU.92223.AH.01.01.TH 2008, tanggal 1 Desember 2008. Ruang lingkup kegiatan WEGE adalah bergerak dalam industri konstruksi dan engineering, jasa pemborongan dengan pola progres termin maupun turnkey, Build Operate Transfer (BOT), pengelolaan dan penyewaan gedung/kawasan niaga terpadu, perdagangan dan pemeliharaan peralatan serta material konstruksi, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan engineering pada khususnya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan terbatas, realti sebagai pengembang realti, properti sebagai investor properti dan industri pendukung konstruksi bangunan gedung.</p> <p>Saham WEGE dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017. Porsi kepemilikan WIKA pada WEGE adalah sebesar 69,30%.</p>	<p>PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) is a WIKA's Subsidiary established based on the deed of Imas Fatimah, S.H., No. 43 dated October 24, 2008. This deed of establishment was approved by the Republic of Indonesia Minister of Justice through their Decision Letter No. AHU.92223.AH.01.01.TH 2008 dated December 1, 2008. WEGE activities include the construction and engineering industry, contracting services with term and turnkey progress, Build Operate Transfer (BOT), management and rental of buildings / integrated trading areas, trading and maintenance of construction equipment and materials, service capacity building in construction and engineering services in particular in accordance with the principles of a limited company, realty as real estate developer, property as property investor and supporting building construction industries.</p> <p>WEGE shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 30, 2017. WIKA's share ownership in WEGE is 69.30%.</p>	
Tanggal dan Tahun Pendirian Date and Year of Establishment	24 Oktober 2008	October 24, 2008	
Jumlah Aset 2023 Total Assets in 2023	Rp5.965.916.897.856	Rp5,965,916,897,856	
Kepemilikan Saham Shareholding	69,30%	69.30%	
Status Operasi Operational Status	Beroperasi	Operating	
Alamat Address	WIKA Tower 1, 7th-10th Floor, JL. D.I. Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur 13340		
Pengurus Perusahaan* Company Management*	<p>Dewan Komisaris Komisaris Independen sekaligus Komisaris Utama : Joseph Prajogo Komisaris : Suli Fatimah Komisaris : Danis Hidayat Sumadilaga Komisaris Independen : Taufan Gestoro</p> <p>Direksi Direktur Utama : Hadian Pramudita Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko : Hartanto Karti Raharjo Direktur Operasi I : Bagus Tri Setyana Direktur Operasi II : Dwi Purnomo Direktur QHSE dan Pemasaran : Tomo Dwi Hasputro Wardoyo</p>	<p>Board of Commissioners Independent Commissioner and President Commissioner: Joseph Prajogo Commissioner: Suli Fatimah Commissioner: Danis Hidayat Sumadilaga Independent Commissioner: Taufan Gestoro</p> <p>Board of Directors President Director: Hadian Pramudita Director of Finance, Human Capital and Risk Management: Hartanto Karti Raharjo Director of Operations I: Bagus Tri Setyana Director of Operations II: Dwi Purnomo Director of QHSE and Marketing: Tomo Dwi Hasputro Wardoyo</p>	

*per 31 Desember 2024/as of December 31, 2024

PT Wijaya Karya Bitumen

<p>Nama Perusahaan Company Name</p>	<p>PT Wijaya Karya Bitumen</p>		
<p>Bidang Usaha Business Field</p>	<p>Pertambangan dan Industri Aspal Alam</p>	<p>Mining and Natural Asphalt Industry</p>	
<p>Profil Perusahaan Company Profile</p>	<p>PT Wijaya Karya Bitumen (WIKA Bitumen) adalah Entitas Anak WIKA yang sebelumnya bernama PT Sarana Karya (Persero), didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tertanggal 1 September 1984, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang seluruh Anggaran Dasar Perseroan telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 28 tanggal 19 April 2024 dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0084374.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 November 2022 dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0092826 tanggal 24 April 2024.</p>	<p>PT Wijaya Karya Bitumen (WIKA Bitumen) is a Subsidiary of WIKA that was previously known as PT Sarana Karya (Persero), established based on Notarial Deed No. 1 dated September 1, 1984, made before Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta, whose entire Articles of Association of the Company have been last amended by Deed Number 28 dated April 19, 2024 made before Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree Number AHU-0084374.AH.01.02.YEAR 2022 dated November 22, 2022 and received Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0092826 dated April 24, 2024.</p>	
<p>Tanggal dan Tahun Pendirian Date and Year of Establishment</p>	<p>12 Mei 2013</p>	<p>May 12, 2013</p>	
<p>Jumlah Aset 2023 Total Assets in 2023</p>	<p>Rp347.727.718.008</p>	<p>Rp347.727.718.008</p>	
<p>Kepemilikan Saham Shareholding</p>	<p>99,39%</p>	<p>99.39%</p>	
<p>Status Operasi Operational Status</p>	<p>Beroperasi</p>	<p>Operating</p>	
<p>Alamat Address</p>	<p>WIKA Tower 1, 6th Floor, JL. D.I. Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur 13340</p>		
<p>Pengurus Perusahaan* Company Management*</p>	<p>Dewan Komisaris Komisaris Utama : Mohammad Roem Olifwan Komisaris : Gogor Oko Nurharyo</p> <p>Direksi Direktur Utama : Sri Mulyono</p>	<p>Board of Commissioners President Commissioner: Mohammad Roem Olifwan Commissioner: Gogor Oko Nurharyo</p> <p>Board of Directors President Director: Sri Mulyono</p>	

*per 31 Desember 2024/as of December 31, 2024




PT Wijaya Karya Serang Panimbang

Nama Perusahaan Company Name	PT Wijaya Karya Serang Panimbang		
Bidang Usaha Business Field	Jalan Tol	Toll Roads	
Profil Perusahaan Company Profile	PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, Tamansari Hive Office Lantai 3, Jalan D.I Panjaitan Kav. 2, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 02 Tanggal 17 Februari 2017 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0007805.AH.01.01 tanggal 17 Februari 2017, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 02 tanggal 05 Juni 2023, dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta dan telah menerima Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0031891.AH.01.02TAHUN2023 tanggal 09 Juni 2023, dan Akta nomor 08 tanggal 28 Maret 2024 dibuat dihadapan John Heri Azmi, SH. Notaris di Kab. Lebak dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0079040 tanggal 02 April 2024, serta Akta Nomor 01 tanggal 11 Juli 2024 dibuat dihadapan John Heri Azmi, SH. Notaris di Kab. Lebak dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0228809 tanggal 19 Juli 2024.	PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG, a Limited Liability Company domiciled in Jakarta, Tamansari Hive Office 3rd Floor, Jalan D.I Panjaitan Kav. 2, a legal entity established based on Deed Number 02 dated February 17, 2017 made before Rina Utami Djauhari, SH., Notary in Jakarta, and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights Number AHU.0007805.AH.01.01 dated February 17, 2017, and last amended by Deed Number 02 dated June 5, 2023, made before Rina Utami Djauhari, SH, Notary in Jakarta and has received Approval of Amendment to the Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-0031891.AH.01.02YEAR2023 dated June 9, 2023, and Deed number 08 dated March 28, 2024 made before John Heri Azmi, SH. Notary in Lebak Regency and has received Notification Receipt from the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-AH.01.03-0079040 dated April 2, 2024, and Deed Number 01 dated July 11, 2024 made before John Heri Azmi, SH. Notary in Lebak Regency and has received Notification Receipt from the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-AH.01.09-0228809 dated July 19, 2024.	
Tanggal dan Tahun Pendirian Date and Year of Establishment	17 Februari 2017	February 17, 2017	
Jumlah Aset 2023 Total Assets in 2023	Rp7.126.913.633.593	Rp7.126.913.633.593	
Kepemilikan Saham Shareholding	84,17%.	84,17%.	
Status Operasi Operational Status	Beroperasi	Operating	
Alamat Address	Tamansari Hive Office Tower Lantai 3, Jl. D.I Panjaitan Kav. 2, RT.11/RW.11 Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur		
Pengurus Perusahaan* Company Management*	Dewan Komisaris Komisaris Utama : Eko Prasetyadi Rachmat Komisaris : I Ktut Hadi Priatna Komisaris Independen : Eman Sungkowo Direksi Direktur Utama : Iwan Juliansyah Direktur Keuangan, Human Capital & Manajemen Risiko : Farid Nur Aidy Direktur Teknik & Operasi : T. Arso Anggoro	Board of Commissioners President Commissioner: Eko Prasetyadi Rachmat Commissioner: I Ktut Hadi Priatna Independent Commissioner: Eman Sungkowo Board of Directors President Director: Iwan Juliansyah Director of Finance, Human Capital & Risk Management: Farid Nur Aidy Director of Engineering & Operations: T. Arso Anggoro	

*per 31 Desember 2024/as of December 31, 2024

PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur

Nama Perusahaan Company Name	PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur		
Bidang Usaha Business Field	Pengelolaan Air	Water Management	
Profil Perusahaan Company Profile	<p>PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur adalah Entitas Anak WIKA yang didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 15 Januari 2021, dibuat di hadapan Lia Amalia, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2021 No. AHU-0003230.AH.01.01. Tahun 2021, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 08 tanggal 24 September 2021, dibuat di hadapan Dea Cheryna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00052943.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021.</p> <p>PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur bergerak dalam bidang sistem penyediaan air minum. Porsi kepemilikan WIKA pada PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur saat ini adalah sebesar 83,78%.</p>	<p>PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur is a WIKA's Subsidiary that was established based on Deed No. 5 dated January 15, 2021, made before Lia Amalia, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated January 18, 2021 No. AHU-0003230.AH.01.01. 2021, and last amended by Deed No. 08 dated September 24, 2021, made before Dea Cheryna, S.H., M.Kn., Notary in Bekasi Regency, and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-00052943.AH.01.02. 2021 dated September 29, 2021.</p> <p>PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur is engaged in the drinking water supply systems business. Currently, WIKA's share ownership in PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur is 83.78%.</p>	
Tanggal dan Tahun Pendirian Date and Year of Establishment	15 Januari 2021	January 15, 2021	
Jumlah Aset 2023 Total Assets in 2023	Rp1.829.244.757.726	Rp1,829,244,757,726	
Kepemilikan Saham Shareholding	83,78%	83.78%	
Status Operasi Operational Status	Beroperasi	Operating	
Alamat Address	PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur Jl. Mayor Madmuin Hasibuan RT 004/RW 024, Margahayu Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113		
Pengurus Perusahaan* Company Management*	<p>Dewan Komisaris Komisaris Utama : Wahyu Hadi Prasetyo Komisaris : Antonius Rainier Haryanto</p> <p>Direksi Direktur Utama : Rendy Ardiansyah Direktur Keuangan dan HC : Arini Kristalisa Direktur Operasi: Hari Suprianta</p>	<p>Board of Commissioners President Commissioner: Wahyu Hadi Prasetyo Commissioner: Antonius Rainier Haryanto</p> <p>Board of Directors President Director: Rendy Ardiansyah Director of Finance and HC: Arini Kristalisa Director of Operations: Hari Suprianta</p>	

*per 31 Desember 2024/as of December 31, 2024


ENTITAS ASOSIASI
ASSOCIATED ENTITIES

Nama Name	Bidang Usaha Business Field	Kepemilikan Saham Shareholding (%)		Waktu Pendirian Date Of Establish- ment	Status Operasi Status Operasi	Jumlah Aset (Rp Juta) Jumlah Aset (Rp juta)		Domisili Domicile
		2024	2023			2024	2023	
PT WIKA Industri Energi	Perusahaan bidang Industri Pabrikasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi Manufacturing Industry, Energy Industry, Renewable Energy and Energy Conversion.	44,18	40	18 Juni 2010 June 18, 2010	Beroperasi Operating	295.349	252.711	Cileungsi Bogor
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Perusahaan bidang Pengangkutan Darat, Perdagangan, Jasa, Industri, Pembangunan, Perbengkelan, Perkebunan dan Pertanian, Bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Land Transportation, Trade, Services, Industry, Development, Workshops, Plantations and Agriculture, Finance and Insurance Activities, Rental and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents and Other Business Support	33,36	39,12	2 Oktober 2015 October 2, 2015	Dalam Pengembangan Under Development	26.541.130	24.013.621	Jakarta
PT Citra Marga Lintas Jabar	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Soreang – Pasir Koja, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol serta usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Concession of Soreang - Pasir Koja Toll Road Section, which includes funding, technical planning, construction implementation, operation and maintenance of the Toll Road as well as other businesses in accordance with the provisions of the Toll Road Concession Agreement with the Government and applicable laws and regulations.	16,56	16,56	8 Juli 2015 July 8, 2015	Beroperasi Operating	1.648.561	1.677.247	Soreang Pasir Koja
PT WIKA Jabar Power	Perusahaan bidang usaha Pertambangan Panas Bumi sisi Hulu (Upstream) dan Pembangunan Pembangkit Listrik. Kegiatan eksplorasi meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi. Pembangunan, pendirian, pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan pembangkit listrik antara lain PLTP, PLTG, PLTU, PLTBM, PLTA/PLTMH. Upstream Mining Geothermal Business (Upstream) and Power Plant Development. Exploration activities including exploration activities, feasibility studies and exploitation. Construction, establishment, operation, maintenance and development of power plants such as PLTP, PLTG, PLTU, PLTBm, PLTA/PLTMH.	20,44	20,44	16 Juli 2009 July 16, 2009	Tidak Beroperasi Not operating	4.734	4.916	Jawa Barat

Nama Name	Bidang Usaha Business Field	Kepemilikan Saham Shareholding (%)		Waktu Pendirian Date Of Establish- ment	Status Operasi Status Operasi	Jumlah Aset (Rp Juta) Jumlah Aset (Rp juta)		Domisili Domicile
		2024	2023			2024	2023	
PT Jasamarga Manado-Bitung	Perusahaan pelaksanaan pengusahaan ruas jalan tol Manado - Bitung yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya. Manado - Bitung toll road concession, covering funding, technical planning, construction, operation and maintenance of toll road and other businesses.	20,04	20,04	6 Juni 2016 June 6, 2016	Beroperasi Operating	4.339.915	4.545.977	Manado
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Perusahaan pelaksanaan pengusahaan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya. Balikpapan-Samarinda toll road concession covering funding, technical planning, construction, operation and maintenance of toll road and other businesses.	18,29	18,29	6 Juni 2016 June 6, 2016	Beroperasi Operating	9.613.156	9.722.893	Balikpapan
PT Air Minum Indonesia	Perusahaan bidang pengusahaan SPAM Jatiluhur. SPAM Jatiluhur concession.	14,00	14,00	30 Juli 2015 July 30, 2015	Dalam Pengembangan Under Development	-	-	Jakarta
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	Perusahaan bidang industri beton pracetak dan perdagangan, dan kegiatan usaha lain yang terkait, meliputi perindustrian, kegiatan impor mesin-mesin, suku cadang, bahan baku, dan usaha di bidang perdagangan. Precast concrete and trading industry and other related business activities, including industry, import activities of machinery, spare parts, raw materials and trading business.	10,00	10,00	16 Desember 2013 December 16, 2013	Beroperasi Operating	155.831	138.891	Cilegon
PT Jasamarga Bali Tol	Perusahaan bergerak di bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha lainnya. Nusa Dua-Ngurah Rai- Benoa toll road concession, covering funding, technical planning, construction, operation and maintenance of toll road and other businesses.	0,40	0,40	22 Agustus 2011 August 22, 2011	Beroperasi Operating	1.893.205	1.940.380	Denpasar
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	Perusahaan bergerak di bidang Industri Produk dari Pengilangan Minyak Bumi, Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia dan Perdagangan Besar Khusus Lainnya. Product Industry from Petroleum Refining, Chemical Industry and Chemical Goods and Other Special Wholesale Trade.	0,11	0,11	9 Oktober 1995 October 9, 1995	Beroperasi Operating	USD 501 mio.	USD 499	Jakarta



Nama Name	Bidang Usaha Business Field	Kepemilikan Saham Shareholding (%)		Waktu Pendirian Date Of Establish- ment	Status Operasi Status Operasi	Jumlah Aset (Rp Juta) Jumlah Aset (Rp juta)		Domisili Domicile
		2024	2023			2024	2023	
PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak	Bergerak dalam bidang pengusahaan Jalan Tol Semarang Demak yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semarang Demak Toll Road concession, including funding, technical planning, construction, operation and maintenance of toll roads, as well as other businesses in accordance with applicable regulations.	24,90	24,90	8 Agustus 2019 August 8, 2019	Beroperasi Operating	6.033.686	6.064.509	Semarang
PT Bandara Internasional Batam	Bergerak dalam bidang pengembangan, pengoperasian dan pengelolaan kegiatan bandar udara. Development, operation and management of airport activities.	19,00	19,00	20 Desember 2021 December 20, 2021	Dalam Pengembangan Under Development	693.385	657.680	Batam
PT Jasamarga Gedebage Cilacap	Bergerak dalam bidang pengusahaan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) Toll Road Concession.	7,23	10,00	28 Januari 2022 January 28, 2022	Dalam Pengembangan Under Development	49.800	51.225	Jakarta
PT Jasamarga Akses Patimban	Pengusahaan Jalan Tol Akses Patimban, meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta menjalankan aktivitas jalan tol atau usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Concession of Patimban Access Toll Road, includes funding, engineering planning, construction, operation and maintenance of the toll road, as well as carrying out toll road activities or other businesses in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.	0,88	2,29%	16 Januari 2023 January 16, 2023	Dalam Pengembangan Under Development	1.764.345	986.255	Jawa Barat
PT Karya Logistik Nusantara	PT Karya Logistik Nusantara bergerak dibidang industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api; Industri dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi; Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Sipil; Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fire-resistant brick, mortar, cement and similar industry; Industry of Cement and Lime for Construction; Ready-Mixed Mortar or Concrete Industry; Industry of goods from cement, lime, gypsum and other asbestos; Building Prefabrication Construction Work Services, Civil Prefabrication Construction Work Services; Wholesale Trading on the Basis of Fees or Contracts, as well as other businesses in accordance with applicable regulations.	13,95	17,65%	2 Februari 2023 February 2, 2023	Beroperasi Operating	412.800	227.435	Balikpapan



Jembatan Merah Putih
Merah Putih Bridge

INFORMASI SINGKAT ENTITAS ASOSIASI

PT WIKA Industri Energi (WINNER)

Secara resmi berdiri pada tanggal 18 Juni 2010 dengan nama PT Wijaya Karya Intrade Energi yang tertuang dalam Akta Pendirian No. 32 tanggal 18 Juni 2010. Seiring dengan fokus usaha sebagai pabrikasi maka dilakukan perubahan nama dari PT Wijaya Karya Intrade Energi menjadi PT Wijaya Karya Industri Energi berdasarkan Akta No. 35 tanggal 20 Mei 2013. Bergerak dalam bidang industri pabrikasi, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi. Perseroan memiliki 44,18% hak kepemilikan saham pada PT Wijaya Karya Industri Energi.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia

Pendirian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021, di mana Perseroan ditunjuk oleh Pemerintah sebagai salah satu anggota Konsorsium BUMN dalam rangka Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat. Perseroan memiliki 33,36% hak kepemilikan pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Bergerak dalam bidang Perusahaan bidang Pengangkutan Darat, Perdagangan, Jasa, Industri, Pembangunan, Perbengkelan, Perkebunan dan Pertanian, Bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.

BRIEF INFORMATION ON ASSOCIATED ENTITIES

PT WIKA Industri Energi (WINNER)

Officially established on June 18, 2010 under the name PT Wijaya Karya Intrade Energi as stated in the Deed of Establishment No. 32 dated June 18, 2010. In line with the business focus as a manufacturer, the name was changed from PT Wijaya Karya Intrade Energi to PT Wijaya Karya Industri Energi based on Deed No. 35 dated May 20, 2013. Engaged in the manufacturing industry, energy industry, renewable energy and energy conversion. The Company has 44.18% share ownership rights in PT Wijaya Karya Industri Energi.

PT Pilar Sinergi BumN Indonesia

The establishment of PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia referred to the Presidential Regulation no. 107 of 2015 dated October 6, 2015 concerning the Acceleration of High Speed Train Infrastructure and Facilities between Jakarta and Bandung as amended based on the Presidential Regulation No. 93 of 2021 dated October 6, 2021, where the Company was appointed by the Government as a member of the SOE Consortium in the framework of Accelerating the High Speed Train Infrastructure and Facilities. The Company owns 33.36% ownership rights in PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Engaged in the field of land transportation, trade, services, industry, development, workshops, plantations and agriculture, financial and insurance activities, rental and leasing activities without option rights, employment, travel agents and other business support.



Berdasarkan surat dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk kepada Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dengan nomor SE.01.01/A.DIR.00421.B/2024 tertanggal 28 Mei 2024, yang membahas tentang tambahan penjelasan mengenai rencana masa depan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, dinyatakan bahwa WIKA berkomitmen untuk tidak menambah investasi modal atau memberikan pinjaman kepada PSBI, termasuk untuk menutupi kekurangan dana Proyek KCJB. Keputusan ini diambil karena perusahaan masih dalam tahap pemulihan keuangan dan terikat oleh Master Restructuring Agreement (MRA) dengan para kreditur. Oleh karena itu, setiap tindakan korporasi, terutama yang berkaitan dengan kewajiban terhadap Proyek KCJB, harus mendapatkan persetujuan dari kreditur sebelum dilaksanakan.

PT Citra Marga Lintas Jabar

Perseroan memiliki 16,56% hak kepemilikan saham pada PT Citra Marga Lintas Jabar. PT Citra Marga Lintas Jabar adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Ruas Soreang – Pasir Koja, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol serta usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol. Jalan Tol Soreang Pasir Koja telah beroperasi sejak Desember 2017.

PT WIKA Jabar Power

Penyertaan saham Perseroan pada PT WIKA Jabar Power sebesar 20,44%, bergerak di bidang usaha Pertambangan Panas Bumi sisi Hulu (Upstream) dan Pembangunan Pembangkit Listrik. Kegiatan eksplorasi meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi. Pembangunan, pendirian, pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan pembangkit listrik antara lain PLTP, PLTG, PLTU, PLTBM, PLTA/PLTMH.

PT Jasamarga Manado-Bitung

Penyertaan saham pada PT Jasamarga Manado-Bitung sebesar 20,04%. Bergerak dalam bidang perencanaan, penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan bangunan pelengkap dan fasilitas jalan tol serta pengelolaan jalan dan fasilitas tol pada ruas Manado-Bitung.

PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda

Penyertaan saham Perseroan pada PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda sebesar 18,29%. Bergerak dalam bidang perencanaan, penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan bangunan pelengkap, dan fasilitas jalan tol serta pengelolaan jalan dan fasilitas tol pada ruas Balikpapan- Samarinda.

PT Air Minum Indonesia

Perseroan memiliki penyertaan saham pada PT Air Minum Indonesia sebesar 14,00%. Bergerak dalam bidang Sistem Penyediaan Air Minum yang meliputi kegiatan kelembagaan, pendanaan, dan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan serta usaha-usaha lainnya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan.

PT Wijaya Karya Krakatau Beton

Perseroan memiliki 10,00% kepemilikan pada PT WIKA Krakatau Beton. Bergerak dalam bidang industri beton pracetak dan perdagangan, serta kegiatan usaha lain yang terkait.

Based on a letter from PT Wijaya Karya (Persero) Tbk to the Assistant Deputy for Infrastructure Services of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia with the number SE.01.01/A.DIR.00421.B/2024 dated May 28, 2024, which discusses additional explanations regarding the future plans of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk at PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, it is stated that WIKA is committed not to increase capital investment or provide loans to PSBI, including to cover the shortfall in funds for KCJB Project. This decision was taken because the Company is still in the financial recovery stage and is bound by the Master Restructuring Agreement (MRA) with creditors. Therefore, every corporate action, especially those related to obligations towards KCJB Project, must obtain approval from creditors before being carried out.

PT Citra Marga Lintas Jabar

The company has 16.56% share ownership rights in PT Citra Marga Lintas Jabar. PT Citra Marga Lintas Jabar is a company engaged in Soreang – Pasir Koja Toll Road Concession, which includes funding, technical planning, construction implementation, operation and maintenance of the Toll Road as well as other businesses in accordance with the provisions of the Toll Road Concession Agreement. The Soreang Pasir Koja Toll Road has been operating since December 2017.

PT WIKA Jabar Power

The Company's share investment in PT WIKA Jabar Power is 20.44%. This company is engaged in the Upstream Geothermal Mining and Power Plant Development business. Exploration activities include exploration activities, feasibility studies and exploitation. Construction, establishment, operation, maintenance and development of power plants including PLTP, PLTG, PLTU, PLTBM, PLTA/PLTMH.

PT Jasamarga Manado-Bitung

The Company's share investment in PT Jasa Marga Manado- Bitung is 20.04%. Engaged in planning, construction of roads, complementary building bridges and toll road facilities, as well as management of roads and facilities at Manado-Bitung toll road.

PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda

The Company's share investment in PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda is 18.29%. Engaged in planning, construction of roads, complementary building bridges and toll road facilities and management of roads and facilities at Balikpapan-Samarinda toll road.

PT Air Minum Indonesia

The Company has 14.00% share investment in PT Air Minum Indonesia. Engaged in Water Supply Systems including institutional activities, funding and technical planning, construction, operations and maintenance as well as other businesses directly related to the Company's main business activities.

PT Wijaya Karya Krakatau Beton

The Company owns 10.00% shares in PT WIKA Krakatau Beton. Engaged in precast concrete and trade industries and other related business activities.

PT Jasamarga Bali Tol

Penyertaan saham Perseroan pada PT Jasamarga Bali Tol sebesar 0,40%. Bergerak dalam bidang perencanaan, penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan bangunan pelengkap dan fasilitas jalan tol serta pengelolaan jalan dan fasilitas tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Bali.

PT Trans Pacific Petrochemical Indotama

Perseroan memiliki penyertaan saham pada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ("TPPI") sebesar 0,11%. TPPI bergerak di bidang Industri Produk dari Pengilangan Minyak Bumi, Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia dan Perdagangan Besar Khusus Lainnya.

PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak

Penyertaan saham Perseroan pada PT PP Semarang Demak sebesar 24,90%. PT PP Semarang Demak adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengusahaan Jalan Tol Semarang Demak yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PT Bandara Internasional Batam

Penyertaan saham Perseroan pada PT Bandara Internasional Batam sebesar 19,00%. Merupakan Badan Usaha Pelaksana proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam.

PT Jasamarga Gedebage Cilacap

Penyertaan saham Perseroan pada PT Jasamarga Gedebage Cilacap sebesar 7,23%. Merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dibentuk oleh Konsorsium BUMN-Swasta pemenang lelang pembangunan Jalan Tol Gedebage- Tasikmalaya-Cilacap, yang terdiri dari Jasa Marga selaku pemegang saham mayoritas, Kemitraan PT Daya Mulia Turangga-Gama Group-PT Jasa Sarana, Waskita Karya, PTPP, dan Wijaya Karya.

PT Jasamarga Akses Patimban

Penyertaan saham Perseroan pada PT Jasamarga Akses Patimban sebesar 0,88%. PT Jasamarga Akses Patimban adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pengusahaan Jalan Tol Akses Patimban, meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta menjalankan aktivitas jalan tol atau usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PT Karya Logistik Nusantara

Penyertaan saham Perseroan pada PT karya Logistik Nusantara sebesar 13,95%. Merupakan Badan Usaha yang bergerak dibidang industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api; Industri dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi; Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Sipil; Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT Jasamarga Bali Tol

The Company's share investment in PT Jasa Marga Bali Tol is 0.40%. Engaged in the planning, construction of roads, complementary building bridges and toll road facilities and management of the Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Bali toll road and its facilities.

PT Trans Pacific Petrochemical Indotama

The Company owns 0.11%, share investment in PT Trans Pacific Petrochemical Indotama. TPPI operates in Petroleum Refining Products Industry, Chemical Industry and Goods from Chemicals and Other Special Wholesale Trade.

PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak

The Company's share investment in PT PP Semarang Demak is 24.90%. PT PP Semarang Demak is a company engaged in the concession of Semarang Demak Toll Road, which includes funding, engineering planning, construction implementation, operation and maintenance of toll roads, as well as other businesses in accordance with applicable rules and regulations.

PT Bandara Internasional Batam

The Company's share investment in PT Bandara Internasional Batam is 19.00%, an Implementing Business Entity for the Government Cooperation with Business Entity (KPBU) of Hang Nadim Batam International Airport project.

PT Jasamarga Gedebage Cilacap

The Company's investment in PT Jasamarga Gedebage Cilacap is 7.23%. A Toll Road Business Entity (BUJT) formed by an SOE-Private Consortium that won the tender for the construction of Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Toll Road, consisting of Jasa Marga as the major shareholder, PT Daya Mulia Turangga-Gama Group Partnership - PT Jasa Sarana, Waskita Karya, PTPP, and Wijaya Karya.

PT Jasamarga Akses Patimban

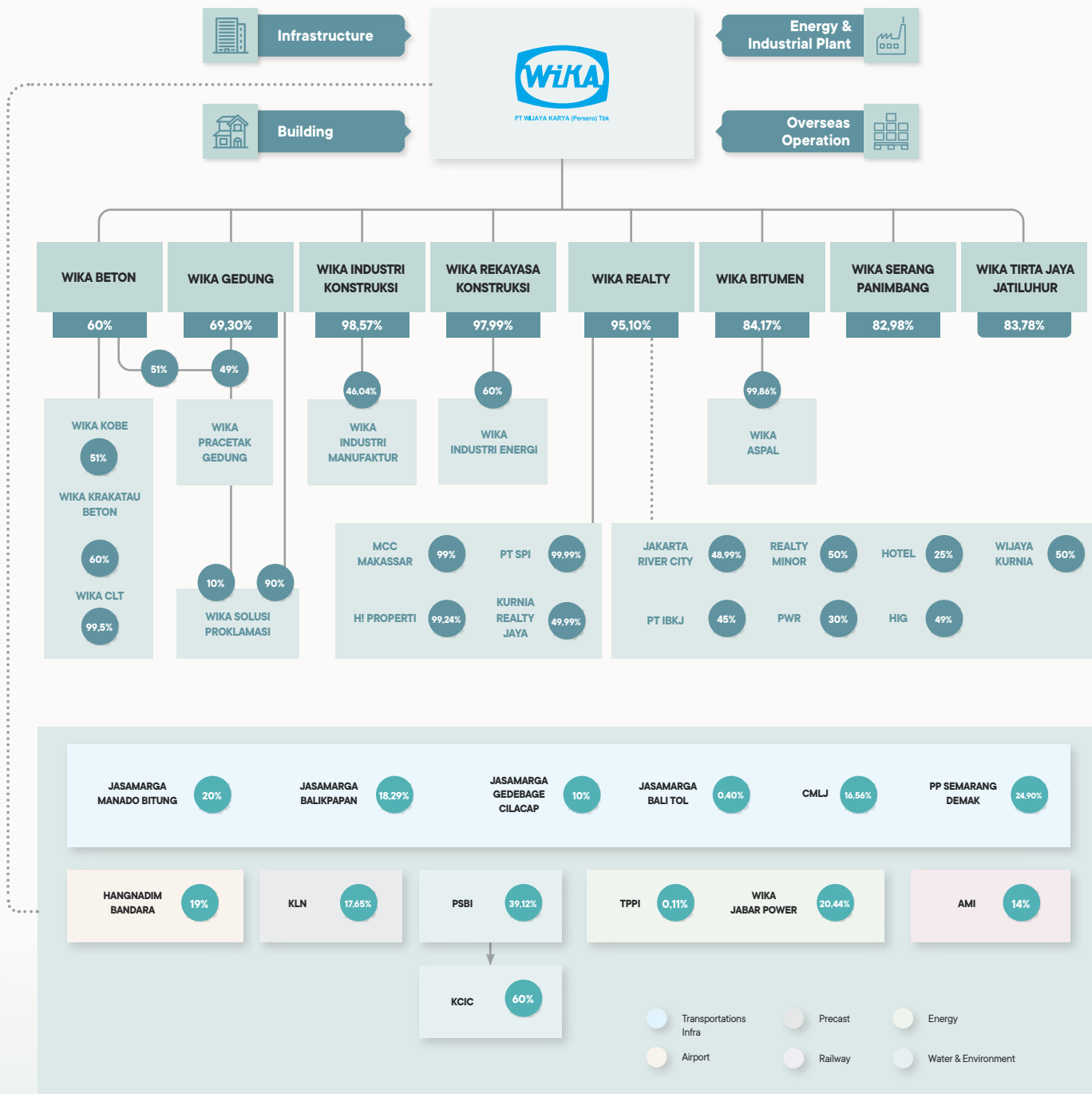
The Company's share investment in PT Jasamarga Access Patimban is 0.88%. PT Jasamarga Access Patimban is a company engaged in the concession of Patimban Access Toll Road, including funding, engineering planning, construction implementation, operation and maintenance of toll roads, as well as carrying out toll road activities or other businesses in accordance with applicable rules and regulations.

PT Karya Logistik Nusantara

The Company's share investment in PT Karya Logistik Nusantara is 13.95%. A Business Entity engaged in the Fire Resistant Brick, Mortar, Cement and the like industry; Industry of Cement and Lime for Construction; Ready-Mixed Mortar or Concrete Industry; Industry of goods from cement, lime, gypsum and other asbestos; Building Prefabrication Construction Work Services, Civil Prefabrication Construction Work Services; Wholesale Trading on the Basis of Fees or Contracts, as well as other businesses in accordance with applicable regulations.

Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure



Di sepanjang tahun 2024, WIKI tidak memiliki entitas *Joint Venture* (JV) dan *Special Purpose Vehicle* (SPV). Throughout 2024, WIKI will not have any Joint Venture (JV) or Special Purpose Vehicle (SPV) entities.

Kronologis Penerbitan dan/ atau Pencatatan Saham

Chronology of Share Listing and/or Issuance

PENAWARAN SAHAM PERDANA

Pada 11 Oktober 2007, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No.S-5275/BL/2007 untuk melakukan penawaran umum atas 1.846.154.000 lembar saham seri B dari total 5.846.154.000 lembar saham Perseroan kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp420 per saham yang didasarkan pada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) No. KD.01/3406/DPRRI/2007 tanggal 26 April 2007.

PROGRAM ALOKASI SAHAM UNTUK KARYAWAN

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. RIS15/D2.MBU/2007, tanggal 14 Juni 2007 dan surat persetujuan Menteri Negara BUMN No. S717/MBU/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang persetujuan program Employee Stock Allocation (ESA), Employee Stock Option Plan (ESOP) dan Management Stock Option Plan (MSOP), Perseroan menerbitkan total 303.071.000 saham baru untuk pelaksanaan ESOP dan MSOP yang dilakukan mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.

PENAWARAN UMUM TERBATAS

Dalam rangka memperkuat struktur modal, WIKA melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-631/D.04/2016 tanggal 3 November 2016 atas Pernyataan Pendaftaran dalam melakukan Penawaran Umum Terbatas. Jumlah HMETD yang diterbitkan WIKA pada 25 November 2016 adalah sebanyak 2.820.726.372 saham dengan harga nominal Rp100 per lembar dengan harga penawaran Rp2.180 per lembar. Setelah PUT, jumlah saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia adalah sejumlah 8.969.951.372 lembar saham.

AKSI KORPORASI SAHAM

Pada tahun 2024, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA melakukan aksi korporasi berupa penambahan modal melalui HMETD. PMHMETD ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas pendanaan. Dalam aksi korporasi ini, WIKA menawarkan hak kepada pemegang sahamnya untuk membeli saham baru dengan harga yang telah ditentukan. Tujuan utama dari PMHMETD ini adalah untuk mendapatkan dana segar yang akan digunakan untuk mendukung berbagai proyek

INITIAL PUBLIC OFFERING

On October 11, 2017, The Company obtained a Notice of Effectivity from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) in its letter No. S-5275/BL/2007 to conduct a public offering of 1,846,154,000 Series B shares with a total 5,846,154,000 Company shares to the public, at a nominal value of Rp100 per share and offering price of Rp420 per share based on the approval of the House of Representatives People of the Republic of Indonesia (DPR RI) No. KD. 01/3406/ DPRRI/2007 dated April 26, 2007.

EMPLOYEE STOCK ALLOCATION

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders resolution No. RIS15/D2.MBU/2007, dated June 14, 2007 and letter of approval from the Minister of SOEs No. S717/ MBU/2007 dated October 8, 2007 concerning approval of the Employee Stock Allocation (ESA) program, the Employee Stock Option Plan (ESOP) and the Management Stock Option Plan (MSOP), the Company issued a total of 303,071,000 new shares for the ESOP and MSOP between 2009 and 2014.

LIMITED PUBLIC OFFERING

In order to strengthen its capital structure, WIKA conducted a Limited Public Offering (PUT) with Pre-emptive Rights (HMETD) and obtained an effective statement through the Financial Services Authority (OJK) No. S-631/D.04/2016 dated November 3, 2016 for the Registration Statement in conducting the Limited Public Offering. The number of pre-emptive rights issued by WIKA on November 25, 2016 totalled 2,820,726,372 shares at a nominal price of Rp100 per share with an offering price of Rp2,180 per share. After the LPO, the number of the Company's shares listed on the Indonesia Stock Exchange was 8,969,951,372 shares.

STOCK CORPORATE ACTIONS

In 2024, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk or WIKA undertook a corporate action in the form of a capital increase through Preemptive Rights Offering (PMHMETD). This PMHMETD is part of the Company's strategy to strengthen its capital structure and enhance its funding capacity. In this corporate action, WIKA offered its shareholders the right to purchase new shares at a predetermined price. The main objective of this PMHMETD is to raise fresh funds that will be used to support various strategic projects, including the completion of

strategis perusahaan, termasuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Realisasi perolehan dana dari PMHMETD adalah sebesar Rp 6.087.913.159.742, dengan rincian Rp 6.000.000.000.000 berasal dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara dan Rp 87.913.159.742 merupakan dana PMHMETD dari masyarakat. Melalui aksi korporasi ini, terjadi perubahan pada komposisi kepemilikan saham dan peningkatan modal perusahaan. Jumlah saham beredar sebelum PMHMETD adalah 8.969.951.372 lembar saham, dan setelah PMHMETD, jumlahnya meningkat menjadi 39.873.063.858 lembar saham.

NAMA BURSA TEMPAT SAHAM PERUSAHAAN DICATATKAN

Seluruh saham WIKA telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia).

National Strategic Projects (PSN) and projects in the New Capital City (IKN). The realization of the funds raised from PMHMETD amounted to Rp6,087,913,159,742, with details of Rp6,000,000,000,000 coming from the government through State Capital Participation and Rp87,913,159,742 being funds from the public. Through this corporate action, there were changes in the composition of share ownership and an increase in the Company's capital. Total outstanding shares before PMHMETD was 8,969,951,372 shares, and after PMHMETD, increased to 39,873,063,858 shares.

NAME OF STOCK EXCHANGE WHERE COMPANY SHARES ARE LISTED

All WIKA shares have been listed on the Jakarta Stock Exchange (currently the Indonesia Stock Exchange).

Periode Period	Keterangan Description	Nilai Nominal Nominal Value (Rp)	Harga Penawaran Offering Price (Rp)	Jumlah Saham yang Diterbitkan Number of Shares Issued	Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Paid-in Capital		
					Jumlah Saham Number of Shares	Total Nilai (Rp) Total Value (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp) Total Offering Price (Rp)
Sebelum - IPO Before IPO					4.000.000.000	400.000.000.000	
2007	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	100	420	1.846.154.000	5.846.154.000	584.615.400.000	775.384.680.000
2009	Exercise ESOP/MSOP	100	322,74	213.500	5.846.367.500	584.636.750.000	68.904.990
2010	Exercise ESOP/MSOP	100	322,74	155.173.000	6.001.540.500	600.154.050.000	50.080.534.020
2011	Exercise ESOP/MSOP	100	322,74	25.727.000	6.027.267.500	602.726.750.000	8.303.131.980
2012	Exercise ESOP/MSOP	100	322,74	78.360.000	6.105.627.500	610.562.750.000	25.289.906.400
2013	Exercise ESOP/MSOP	100	322,74	34.340.500	6.139.968.000	613.996.800.000	11.083.052.970
2014	Exercise ESOP/MSOP	100	322,74	9.257.000	6.149.225.000	614.922.500.000	2.987.604.180
2016	Penawaran Umum Terbatas Limited Public Offering	100	2.180,00	2.820.726.372	8.969.951.372	896.995.137.200	6.149.183.490.960

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Issuance and/or Listing



WIKA telah beberapa kali melakukan penerbitan efek, baik dalam bentuk Obligasi, Medium Term Notes (MTN) maupun Surat Berharga Perpetual untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

WIKA has issued several securities, both in the form of Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Perpetual Securities to support its business growth.



PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

Pada 18 Desember 2020, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Nilai Pokok Obligasi yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp331.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh satu miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Obligasi Seri A telah diperpanjang selama 2 tahun sejak tanggal emisi, dengan adanya opsi beli (call option) yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2024, dengan total sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Akibatnya, sisa pokok Obligasi Seri A kini menjadi Rp231.000.000.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar rupiah).

PUBLIC OFFERING OF SUSTAINABLE BONDS I WIJAYA KARYA PHASE I YEAR 2020

On December 18, 2020, WIKA conducted a Public Offering of Sustainable Bonds I Wijaya Karya Phase I Year 2020. These bonds were offered with a value of 100% (one hundred percent) of the principal value of the bonds and consisted of 3 (three) series:

- Series A: The Principal Amount of Series A bonds offered was Rp331,000,000,000 (three hundred thirty one billion Rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.60% (eight point six zero percent) per annum, with a term of 3 (three) years from the Issuance Date, and a call option of Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) has been exercised throughout 2024, thereby the principal amount of Series A Bonds is currently Rp231,000,000,000 (two hundred and thirty one billion rupiah).

- Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.000.000.000 (empat ratus dua puluh sembilan miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Series B: The Principal Amount of Series B Bonds offered was Rp429,000,000,000 (four hundred twenty nine billion Rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.25% (nine point two five percent) per annum, with a term of 5 (five) years from the Issuance Date.
 - Series C: The Principal Amount of Series C Bonds offered was Rp740,000,000,000 (seven hundred and forty billion Rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.85% (nine point eight five percent) per annum, with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang Masih Beredar Sustainable Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase I 2020 that are still outstanding

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date Of Issue	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (Miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2024	2023	
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Public Offering of Sustainable Bonds I Wijaya Karya Phase I Year 2020	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	18 Desember 2020 December 18, 2020	Seri A: 5 tahun Seri B: 5 tahun Seri C: 7 tahun Series A: 5 years Series B: 5 years Series C: 7 years	Rp	1.400	Seri A : 18 Desember 2025 Seri B : 18 Desember 2025 Seri C : 18 Desember 2027 Series A: December 18, 2023 Series B: December 18, 2025 Series C: December 18, 2027	Seri A : 8,60% Seri B : 9,25% Seri C : 9,85% Series A: 8.60% Series B: 9.25% Series C: 9.85%	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021

Pada 3 Maret 2021, WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021. Obligasi ini berdenominasi Rp2.500.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) dan diperpanjang 2 (dua) tahun sejak tanggal emisi.
- Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp745.500.000.000 (tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.259.500.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh Sembilan miliar lima ratus juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

PUBLIC OFFERING OF SUSTAINABLE BONDS I WIJAYA KARYA PHASE II YEAR 2021

On March 3, 2021, WIKA conducted the Sustainable Public Offering of Sustainable Bonds I Wijaya Karya Phase II 2021. These bonds are denominated in Rp2,500,000,000,000 consisting of 3 (three) series, namely:

- Series A: The Principal Amount of Series A Bonds offered was Rp495,000,000,000 (four hundred and ninety-five billion rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.50% (eight point five zero percent) per year with a term of 3 (three) years from the Issuance Date.
- Series B: The Principal Amount of Series B Bonds offered was Rp745,500,000,000 (seven hundred forty five billion five hundred million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.10% (nine point one zero percent) per year with a term of 5 (five) years from the Issuance Date.
- Series C: The Principal Amount of Series C Bonds offered was Rp1,259,500,000,000 (one trillion two hundred fifty- nine billion five hundred million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.75% (nine point seven five percent) per year with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 yang Masih Beredar Sustainable Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase II 2021 that are still outstanding

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date Of Issue	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (Miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2024	2023	
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Public Offering of Sustainable Bonds I Wijaya Karya Phase II Year 2021	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	3 Maret 2021 March 3, 2021	Seri A : 5 tahun Seri B : 5 tahun Seri C : 7 tahun Series A: 5 years Series B: 5 years Series C: 7 years	Rp	2.500	Seri A: 3 Maret 2026 Seri B: 3 Maret 2026 Seri C: 3 Maret 2028 Series A: March 3, 2026 Series B: March 3, 2026 Series C: March 3, 2028	Seri A : 8,50% Seri B : 9,10% Seri C : 9,75% Series A: 8.50% Series B: 9.10% Series C: 9.75%	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

Pada 8 September 2021, WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021. Obligasi ini berdenominasi Rp1.750.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp571.000.000.000 (lima ratus tujuh puluh satu miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan telah dilakukan pelunasan pokok pada tanggal 8 September 2024.
- Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp197.000.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (sembilan koma satu nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp982.000.000.000 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (delapan koma lima puluh lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

PUBLIC OFFERING OF SUSTAINABLE BONDS II WIJAYA KARYA PHASE I YEAR 2021

On September 8, 2021, WIKA issued Sustainable Bonds II Wijaya Karya Phase I Year 2021. These bonds were denominated in Rp1,750,000,000,000 consisting of 3 (three) series, namely:

- Series A: The Principal Amount of Series A Bonds offered was Rp571,000,000,000 (five hundred and seventy-one billion rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.25% (eight point two five percent) per year with a term of 3 (three) years from the Issuance Date, and the principal was paid off on September 8, 2024.
- Series B: The principal amount of Series B Bonds offered was Rp197,000,000,000 (one hundred ninety-seven billion rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.55% (nine point one zero percent) per year with a term of 5 (five) years from the Issuance Date.
- Series C: The Principal Amount of Series C Bonds offered was Rp982,000,000,000 (nine hundred and eighty-two billion rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.25% (nine point two five percent) per year with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang Masih Beredar Continuous Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021 that are still outstanding

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date Of Issue	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (Miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2024	2023	
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Continuous Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase I 2021	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	8 September 2021 September 8, 2021	Seri A: 3 Tahun (lunas) Seri B: 5 Tahun Seri C: 7 Tahun Series A : 3 years (paid off) Series B : 5 years Series C : 7 years	Rp	1.156	Seri A: 8 September 2024 Lunas Seri B: 8 September 2026 Seri C: 8 September 2028 Series A: September 8, 2024 Paid off Series B : September 8, 2026 Series C : September 8, 2028	Seri A: 8,25% Seri B: 8,55% Seri C: 9,25% Series A : 8.25% Series B : 8.55% Series C : 9.25%	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

Pada 18 Februari 2022, WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022. Obligasi ini berdenominasi Rp1.750.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp593.950.000.000 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.150.000.000 (empat ratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp730.900.000.000 (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

PUBLIC OFFERING OF SUSTAINABLE BONDS II WIJAYA KARYA PHASE II YEAR 2022

On February 18, 2022, WIKA issued a Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds Phase II Year 2022. This bond is denominated in Rp1,750,000,000,000 and consists of 3 (three) series, namely:

- Series A: The principal amount of Series A Bonds offered is Rp593,950,000,000 (five hundred ninety three billion nine hundred and fifty million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 6.50% (six point five zero percent) per year with a term of 3 (three) years from the Issuance Date.
- Series B: The principal amount of the Series B Bonds offered is Rp425,150,000,000 (four hundred twenty five billion one hundred and fifty million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 7.75% (seven point seventy five percent) per year with a term of 5 (five) years from the Issuance Date.
- Series C: The principal amount of Series C Bonds offered is Rp730,900,000,000 (seven hundred thirty billion nine hundred million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.30% (eight point three zero percent) per year with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 yang Masih Beredar Sustainable Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022 that are still outstanding

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date Of Issue	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (Miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2024	2023	
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Public Offering of Sustainable Bonds II Wijaya Karya Phase II Year 2022	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	18 Februari 2022 February 18, 2022	Seri A : 3 tahun Seri B : 5 tahun Seri C : 7 tahun Series A : 3 years Series B : 5 years Series C : 7 years	Rp	1.750	Seri A : 18 Februari 2025 Seri B : 18 Februari 2027 Seri C : 18 Februari 2029 Series A : February 18, 2025 Series B : February 18, 2027 Series C : February 18, 2029	Seri A : 6,50% Seri B : 7,75% Seri C : 8,30% Series A: 6.50% Series B: 7.75% Series C: 8.30%	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo : IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

Pada 3 November 2022, WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022. Obligasi ini berdenominasi Rp1.204.880.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp497.800.000.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

PUBLIC OFFERING OF SUSTAINABLE BONDS III WIJAYA KARYA PHASE I YEAR 2022

On November 3, 2022, WIKA issued a Public Offering of Sustainable Bonds III Wijaya Karya Phase I Year 2022. These bonds are denominated in Rp1,204,880,000,000 consisting of 3 (three) series, namely:

- Series A: The principal amount of Series A Bonds offered is Rp497,800,000,000 (four hundred ninety seven billion eight hundred million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.90% (nine point nine zero percent) per year with a term of 3 (three) years from the Issuance Date.

- Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp275.230.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp449.850.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Series B: The principal amount of Series B Bonds offered is Rp275,230,000,000 (two hundred seventy five billion two hundred thirty million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 10.50% (ten point five zero percent) per year with a term of 5 (five) years from the Issuance Date.
- Series C: The principal amount of Series C Bonds offered is Rp449,850,000,000 (four hundred forty nine billion eight hundred and fifty million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 10.90% (ten point nine zero percent) per year with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 yang Masih Beredar Sustainable Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022 that are still outstanding

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date Of Issue	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (Miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2024	2023	
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Public Offering of Sustainable Bonds III Wijaya Karya Phase I Year 2022	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	3 November 2022 November 3, 2022	Seri A : 3 tahun Seri B : 5 tahun Seri C : 7 tahun Series A : 3 years Series B : 5 years Series C : 7 years	Rp	1.205	Seri A : 8 November 2025 Seri B : 8 November 2027 Seri C : 8 November 2029 Series A : November 8, 2025 Series B : November 8, 2027 Series C : November 8, 2029	Seri A : 9,90% Seri B : 10,50% Seri C : 10,90% Series A : 9.90% Series B : 10.50% Series C : 10.90%	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo : IdCCC (Credit Watch)	PT Bank Mega Tbk

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

Pada 18 Desember 2020, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

- Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp184.000.000.000 (seratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 35,8334% (tiga puluh lima koma delapan tiga tiga empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Telah lunas sesuai dengan tanggal jatuh tempo 18 Desember 2023
- Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp159.000.000.000 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 38,5417% (tiga puluh delapan koma lima empat satu tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

SUSTAINABLE MUDHARABAH SHARIA BONDS I WIJAYA KARYA PHASE I YEAR 2020

On December 18, 2020, WIKA conducted a Public Offering of Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Wijaya Karya Phase I Year 2020. These Mudharabah Sharia Bonds were offered with a value of 100% (one hundred percent) of the total Mudharabah Sharia Bonds Funds and consisted of 3 (three) series:

- Series A: The Principal Amount of Series A Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp184,000,000,000 (one hundred and eighty four billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder's Ratio, where the ratio is 35,8334% (thirty five point eight three three four percent) of the Shared Income with an indication of the profit sharing equivalent to 8.60% (eight point six zero percent) per year. The term of Series A Mudharabah Sharia Bonds is 3 (three) years from the Issuance Date. Has been paid in full according to the due date of December 18, 2023.
- Series B: The Principal Amount of Series B Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp159,000,000,000 (one hundred and fifty nine billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder's Ratio, where the ratio was 38.5417% (thirty eight point five four one seven percent) of the Shared Income with an indication of the profit sharing equivalent to 9.25% (nine point two five percent) per year. The term of Series A Mudharabah Sharia Bonds is 5 (five) years from the Issuance Date.

- Seri C: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp157.000.000.000 (seratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 41,0417% (empat puluh satu koma nol empat satu tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,85% (Sembilan koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

- Series C: The Principal Amount of Series C Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp157,000,000,000 (one hundred and fifty seven billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder's Ratio, where the ratio was 41.0417% (forty one point zero four one seven percent) of the Shared Income with an indication of the profit sharing equivalent to 9.85% (nine point two eight percent) per year. The term of Series C Mudharabah Sharia Bonds is 7 (seven) years from the Issuance Date.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Wijaya Karya Sustainable Sharia Bonds Mudharabah I Phase I 2020

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date Of Issue	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (Miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2024	2023	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Wijaya Karya Phase I Year 2020	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	18 Desember 2020 December 18, 2020	Seri A: 3 tahun (Lunas) Seri B: 5 tahun Seri C: 7 tahun Series A: 3 years (paid off) Series B: 5 years Series C: 7 years	Rp	316	Seri A : 18 Desember 2022 Lunas Seri B : 18 Desember 2025 Seri C : 18 Desember 2027 Series A: September 18, 2022 Paid off Series B: December 18, 2025 Series C: December 18, 2027	Seri A : 8,60% Seri B : 9,25% Seri C : 9,85% Series A: 8.60% Series B: 9.25% Series C: 9.85%	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo: IdD (sy) (Default syariah)	PT Bank Mega Tbk

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021

Pada 3 Maret 2021, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021. Sukuk Mudharabah ini memiliki denominasi total sebesar Rp500.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp134.300.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 37,2808% (tiga puluh tujuh koma dua delapan nol delapan persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,50% (delapan koma lima nol persen) pertahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun dan diperpanjang 2 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp211.600.000.000 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 39,9123% (tiga puluh sembilan koma sembilan satu dua tiga persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

SUSTAINABLE MUDHARABAH SHARIA BONDS I WIJAYA KARYA PHASE II YEAR 2021

On March 3, 2021, WIKA held a Public Offering of Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Wijaya Karya Phase II Year 2021. These Mudharabah Sharia Bonds has a total denomination of Rp500,000,000,000 consisting of 3 (three) series, namely:

- Series A: The principal amount of Series A Mudharabah Sharia Bonds offered was Rp134,300,000,000 (one hundred and thirty four billion three hundred million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds Holders Ratio, where the amount is the ratio is 37.2808% (thirty seven point two eight zero eight percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equivalent to 8.50% (eight point five zero percent) per year. The term of Series A Mudharabah Sharia Bonds is 3 (three) years from the Issuance Date.
- Series B: The principal amount of Series B Mudharabah Sharia Bonds offered was Rp211.600.000.000 (two hundred and eleven billion six hundred million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds holders ratio, where the ratio is 39.9123% (thirty nine point nine one two three percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equal to 9.10% (nine point one zero percent) per year. The term of Series B Mudharabah Sharia Bonds is 5 (five) years from the Issuance Date.

- Seri C: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp154.100.000.000 (seratus lima puluh empat miliar seratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 42,7632% (empat puluh dua koma tujuh enam tiga dua persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Series C: The principal amount of Series C Mudharabah Sharia Bonds offered was Rp154.100.000.000 (one hundred and fifty four billion one hundred million rupiahs) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds holders ratio, where the ratio is 42.7632% (forty two point seven six three two percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equal to 9.75% (nine point seven five percent) per year. The term of Series C Mudharabah Sharia Bonds is 7 (seven) years from the Issuance Date.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase II 2021

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date Of Issue	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (Miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2024	2023	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Wijaya Karya Phase II Year 2021	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	3 Maret 2021 December 18, 2020	Seri A: 5 tahun Seri B: 5 tahun Seri C: 7 tahun Series A: 5 years Series B: 5 years Series C: 7 years	Rp	500	Seri A: 3 Maret 2026 Seri B: 3 Maret 2026 Seri C: 3 Maret 2028 Series A: March 3, 2026 Series B: March 3, 2026 Series C: March 3, 2028	Seri A: 8,50% Seri B: 9,10% Seri C: 9,75% Series A: 8.50% Series B: 9.10% Series C: 9.75%	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo: CCC (sy) (Default syariah)	PT Bank Mega Tbk

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

Pada 8 September 2021, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021. Sukuk Mudharabah ini memiliki denominasi total sebesar Rp750.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp325.500.000.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 58,92860% (lima puluh delapan koma sembilan dua delapan enam nol persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A, telah lunas sesuai dengan tanggal jatuh tempo 8 September 2024.
- Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp91.500.000.000 (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 61,07143% (enam puluh satu koma nol tujuh satu empat tiga persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

SUSTAINABLE MUDHARABAH SHARIA BONDS II WIJAYA KARYA PHASE I YEAR 2021

On September 8, 2021, WIKA conducted a Public Offering of Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Wijaya Karya Phase I 2021. These Mudharabah Sharia Bonds have a total denomination of Rp750.000.000.000.000 consisting of 3 (three) series, namely:

- Series A: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series A offered was Rp325.500.000.000 (three hundred and twenty five billion five hundred million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Ratio of Mudharabah Sharia Bonds Holders, where the amount of the ratio is 58.92860% (fifty eight point nine two eight six zero percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equivalent to 8.25% (eight point two five percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series A is 3 (three) years from the Issuance Date. The Public Offering of Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Wijaya Karya Phase I 2021 Series A has been fully paid in accordance with the maturity date of September 8, 2024.
- Series B: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series B offered was Rp91.500.000.000 (ninety one billion five hundred million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds holders ratio, where the ratio is 61.07143% (sixty one point zero seven one four three percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equivalent to 8.55% (eight point five five percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series B is 5 (five) years from the Issuance Date.

- Seri C: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp333.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 66,07143% (enam puluh enam koma nol tujuh satu empat tiga persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

- Series C: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series C offered was Rp333,000,000,000 (three hundred and thirty three billion rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds holders ratio, where the ratio is 66.07143% (sixty six point zero seven one four three percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equal to 9.25% (nine point two five percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series C is 7 (seven) years from the Issuance Date.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase I 2021

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date Of Issue	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (Miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2024	2023	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Public Offering of Sustainable Bonds II Wijaya Karya Phase II Year 2021	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	8 September 2021	Seri A: 3 Tahun (Lunas) Seri B: 5 Tahun Seri C: 7 Tahun Series A: 3 years (paid off) Series B: 5 years Series C: 7 years	Rp	750	Seri A: 8 September 2024 Lunas Seri B: 8 September 2026 Seri C: 8 September 2028 Series A: September 8, 2024 Paid off Series B: September 8, 2026 Series C: September 8, 2028	Seri A: 8,25% Seri B: 8,55% Seri C: 9,25% Series A: 8,25% Series B: 8,55% Series C: 9,25%	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo: IdCCC (sy) (Kredit Watch syariah)	PT Bank Mega Tbk

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

Pada 18 Februari 2022, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022. Sukuk Mudharabah ini memiliki denominasi total sebesar Rp750.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp412.900.000.000 (empat ratus dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 51,17% (lima puluh satu koma satu tujuh persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp176.050.000.000 (seratus tujuh puluh enam miliar lima puluh juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 64,583340% (enam puluh empat koma lima delapan tiga tiga empat nol persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp161.050.000.000 (seratus enam puluh satu

SUSTAINABLE MUDHARABAH SHARIA BONDS II WIJAYA KARYA PHASE II YEAR 2022

On February 18, 2022, WIKA conducted a Public Offering of Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Wijaya Karya Phase II Year 2022. This Mudharabah Sharia Bonds has a total denomination of Rp750,000,000,000 consisting of 3 (three) series, namely:

- Series A: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series A offered is Rp412,900,000,000 (four hundred and twelve billion nine hundred million rupiahs) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing which is calculated based on the multiplication between the Nisbah of Mudharabah Sharia Bonds Holders, where the ratio is 51.17% (fifty one point one seven percent) of Revenue which is generated with an indication of profit sharing equivalent to 6.50% (six point five zero percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series A is 3 (three) years from the Issuance Date.
- Series B: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series B offered is Rp176,050,000,000 (one hundred seventy six billion and fifty million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds Holder Nisbah, where the ratio is 64.583340% (sixty four point five eight three three four zero percent) of the Revenue which is generated with an indication of profit sharing equivalent to 7.75% (seven point seven five percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series B is 5 (five) years from the Issuance Date.
- Series C: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series C offered is Rp161,050,000,000 (one hundred sixty one

miliar lima puluh juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 69,17% (enam puluh sembilan koma satu tujuh persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

billion and fifty million rupiahs) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing which is calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds Holder Nisbah, where the ratio is 69.17% (sixty nine point one seven percent) of the income that is shared with an indication of profit sharing equivalent to 8.30% (eight point three zero percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series C is 7 (seven) years from the date of issuance.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase II 2022

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date Of Issue	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Nilai (Miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2024	2023	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Public Offering of Sustainable Bonds II Wijaya Karya Phase II Year 2022	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	18 Februari 2022 February 18, 2022	Seri A : 3 tahun Seri B : 5 tahun Seri C : 7 tahun Series A : 3 years Series B : 5 years Series C : 7 years	Rp	750	Seri A : 18 Februari 2025 Seri B : 18 Februari 2027 Seri C : 18 Februari 2029 Series A : February 18, 2025 Series B : February 18, 2027 Series C : February 18, 2029	Seri A : 6,50% Seri B : 7,75% Seri C : 8,30% Series A : 6.50% Series B : 7.75% Series C : 8.30%	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	IdCCC (sy) (Kredit Watch syariah)	PT Bank Mega Tbk

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

Pada 3 November 2022, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022. Sukuk Mudharabah ini memiliki denominasi total sebesar Rp281.815.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp109.325.000.000 (seratus sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 66,00% (enam puluh enam koma nol nol persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,90% (sembilan koma sembilan nol) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp140.490.000.000 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang

SUSTAINABLE MUDHARABAH SHARIA BONDS III WIJAYA KARYA PHASE I YEAR 2022

On November 3, 2022, WIKA conducted a Public Offering of Sustainable Mudharabah Sharia Bonds III Wijaya Karya Phase I Year 2022. This Mudharabah Sharia Bonds has a total denomination of Rp281,815,000,000 consisting of 3 (three) series, namely:

- Series A: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series A offered is Rp109,325,000,000 (one hundred nine billion three hundred and twenty five million rupiahs) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds Holders Nisbah, where the amount of the ratio is 66.00% (sixty-six point zero zero percent) of Revenue which is generated with an indication of profit sharing equivalent to 9.90% (nine point nine zero) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series A is 3 (three) years from the Issuance Date.
- Series B: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series B offered is Rp140,490,000,000 (one hundred forty billion four hundred and ninety million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds Holders Ratio, where the amount of the ratio is 70.00% (seventy point zero zero percent) of Revenue which is generated with an indication of profit sharing equivalent to 10.50% (ten point five zero percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series B is 5 (five) years from the Issuance Date.
- Series C: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series C offered is Rp32,000,000,000 (thirty-two billion rupiahs) with Mudharabah Sukuk Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sukuk Holders Nisbah,

Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 72,67% (tujuh puluh dua koma enam tujuh persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

where the ratio is 72.67% (seventy- two point six seven percent) of Revenue that is generated with an indication of profit sharing equivalent to 10.90% (ten point nine zero percent) per year. The term of Mudharabah Sukuk Series C is 7 (seven) years from the date of issuance.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds III Phase I 2022

Nama Efek Security Name	Nama Bursa Stock Exchange	Tanggal Terbit Date Of Issue	Tenor Tenor	Mata Uang Cur- rency	Nilai (Miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat Trustee
								2024	2023	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Mudharabah Sharia Bonds III Wijaya Karya Phase I Year 2022	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	3 November 2022 November 3, 2022	Seri A : 3 tahun Seri B : 5 tahun Seri C : 7 tahun Series A : 3 years Series B : 5 years Series C : 7 years	Rp	282	Seri A : 3 November 2025 Seri B : 3 November 2027 Seri C : 3 November 2029 Series A: November 3, 2025 Series B: November 3, 2027 Series C: November 3, 2029	Seri A : 9,90% Seri B : 10,50% Seri C : 10,90% Series A: 9,90% Series B: 10,50% Series C: 10,90%	Pefindo: IdCCC (Credit Watch)	Pefindo: IdCCC (sy) (Kredit Watch syariah)	PT Bank Mega Tbk

MEDIUM TERM NOTES

Adapun rincian dari MTN hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut

MEDIUM TERM NOTES

The details of MTN until the end of 2023 are as follows:

Nama Efek Security Name	Tanggal Terbit Date Of Issue	Tenor Tenor	Mata Uang Cur- rency	Nilai (Rp Miliar) Value (Billions)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee
								2024	2023	
WIKA Realty										
MTN IX WIKA Realty Tahun 2019 MTN IX WIKA Realty Year 2019	23 Agustus 2019 August 23, 2019	5 tahun 5 years	Rp	545	28 Agustus 2024 August 28, 2024	12,00%	Belum Lunas Not Yet Paid	BBB	idBB+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Obligasi dengan Opsi Konversi I WIKA Realty Tahun 2019 Convertible Option Bond I WIKA Realty Year 2019	19 Desember 2019 December 19, 2019	14 tahun 14 years	Rp	950	30 Desember 2038 December 30, 2038	11,20%	Belum Lunas Not Yet Paid	BBB	dBB+ (cg)	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
MTN IX WIKA Realty Tahun 2019 MTN IX WIKA Realty Year 2019	26 Juli 2019 July 26, 2019	9 Tahun 9 years	Rp	300	26 Juli 2028 July 26, 2028	12,00%	Belum Lunas Not Yet Paid	Non Rating	Non Rating	PT Bank Bukopin Tbk
Entitas Anak WIKA Realty/Subsidiary of WIKA Realty										
MTN IV PT Hotel Indonesia Natour Tahun 2017 MTN IV PT Hotel Indonesia Natour Year 2017	28 Juli 2017 July 28, 2017	7 tahun 7 years	Rp	50	20 Juli 2024 July 20, 2024	12,85%	Belum Lunas Not Yet Paid	Non Rating	Non Rating	PT Bank Bukopin Tbk

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Public Accountant and Public Accounting Firm

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Akuntan Publik Public Accounting	Eishennoraz
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners
Alamat Address	Plaza ASIA Level 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav.59 Jakarta 12190 Indonesia Tel: +62 21 5140 1340 Fax: +62 21 5140 1350 Website: www.rsm.id E-mail: inquiry@rsm.id
Periode Penugasan Assignment Period	2024
Jasa Audit yang Diberikan Jasa Audit yang Diberikan	Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 General Audit of the Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the Year Ended December 31, 2024
Biaya Jasa Audit Biaya Jasa Audit	Rp733.920.000,-
Jasa Lainnya yang Diberikan Other Services Provided	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu atas Evaluasi Kinerja (Key Performance Indicator) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. 2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 62 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. 3. Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024. 4. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) dan Profil Perusahaan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 5. Jasa Limited Review Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Dan Entitas Anak per 30 Juni 2024. 6. Jasa Standar Audit 600 (SA600) Atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024.
Biasa Jasa Non-Audit Biasa Jasa Non-Audit	Rp1.426.080.000,-

Akuntan Publik Public Accounting	Lith Alfansuri
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners
Alamat Address	Plaza ASIA Level 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav.59 Jakarta 12190 Indonesia Tel: +62 21 5140 1340 Fax: +62 21 5140 1350 Website: www.rsm.id E-mail: inquiry@rsm.id
Periode Penugasan Assignment Period	2024
Jasa Audit yang Diberikan Jasa Audit yang Diberikan	-
Biaya Jasa Audit Biaya Jasa Audit	-
Jasa Lainnya yang Diberikan Other Services Provided	<ol style="list-style-type: none"> 1. AUP Segmen Reporting Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Dan Entitas Anak Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024. 2. AUP Information Package PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2024
Biasa Jasa Non-Audit Biasa Jasa Non-Audit	Rp302.000.000,-



Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Supporting Institutions and/or Professionals

INFORMASI PERDAGANGAN DAN PENCATATAN SAHAM

TRADING AND STOCK LISTING INFORMATION

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	PT Bursa Efek Indonesia
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 515 0515 Fax: +62 21 515 4153 Website: www.idx.co.id E-mail: listing@idx.co.id
Periode Penugasan Assignment Period	2007-sekarang 2007-present
Jasa yang Diberikan Services Provided	Menyediakan infrastruktur perdagangan dan pencatatan efek Providing trading infrastructure and securities listing
Biaya Fee	Rp340.000.000

KUSTODIAN

CUSTODIAN

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 5 Jl. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 515 2855 Fax: +62 21 529 91199 Website: www.ksei.co.id E-mail: helpdesk@ksei.co.id
Periode Penugasan Assignment Period	2007-sekarang 2007-present
Jasa yang Diberikan Services Provided	Kustodian Sentral dan Penyelesaian Transaksi Efek Central Custodian and Securities Transaction Settlement
Biaya Fee	Rp20.000.000

BIRO ADMINISTRASI EFEK

SHARE REGISTRAR

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	PT Datindo Entrycom
Alamat Address	Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Indonesia Tel: +62 21 350 8077 Fax: +62 21 350 8078 E-mail: dm@datindo.com
Periode Penugasan Assignment Period	2007-sekarang 2007-present
Jasa yang Diberikan Services Provided	Pencatatan Daftar Pemegang Saham dan Jasa Administrasi di Pasar Modal Recording of Shareholder List and Administrative Services in the Capital Market
Biaya Fee	Rp40.000.000

NOTARIS

NOTARY

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	Fathiah Helmi, S.H.
Alamat Address	Graha Irama, Jl. H. R. Rasuna Said No.6, RT.6/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12710 Tel: +62 21 5290 7304
Periode Penugasan Assignment Period	Tahun 2024 Year 2024
Jasa yang Diberikan Services Provided	Notaris dalam pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 Tanggal 15 Mei 2024 Notary in the implementation of Annual GMS for 2023 Fiscal Year on May 15, 2024
Biaya Fee	Rp33.500.000

LEMBAGA PEMERINGKAT

RATING AGENCY

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Alamat Address	Equity Tower Lt 30, Sudirman Central Business Distric Lot 9, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Periode Penugasan Assignment Period	PUB I - PUB III (Desember 2020 - November 2029) PUB I - PUB III (December 2020 - November 2029)
Jasa yang Diberikan Services Provided	Pemantauan Pemerinkatan Rating Monitoring
Biaya Fee	Rp175.000.000

WALI AMANAT

TRUSTEE

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Profession	PT Bank Mega Tbk
Alamat Address	JL. Kapten Tendean No. 12 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790, Indonesia Tel : +62 812 8348 4744 Website : www.bankmega.com
Jasa yang Diberikan Services Provided	2020-sekarang 2020-present
Periode Penugasan Assignment Period	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan jasa perwaliamanatan atas surat utang Perseroan Melakukan jasa pendampingan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) Performing trusteeship services for the Company's debt securities Performing assistance services for the General Meeting of Bondholders (RUPO) and/or General Meeting of Sharia Bond Holders (RUPSU)
Biaya Fee	Rp190.000.000 Rp10.000.000 (per tahap RUPO dan/atau RUPSU)/(per stage of RUPO and/or RUPSU)



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

PENGHARGAAN DI TAHUN 2024 AWARDS IN 2023



BCOMS 2024

Best Internal Communications

07 Maret 2024 | March 07, 2024
Kementerian BUMN
Ministry of State-Owned Enterprises



Penghargaan Listrik Indonesia 2024 Indonesian Electricity Awards 2024

The Most Active State Owned Company
in Industrial and Mineral Construction

06 Mei 2024 | May 06, 2024
Majalah Listrik Indonesia (MLI)
Listrik Indonesia Magazine (MLI)

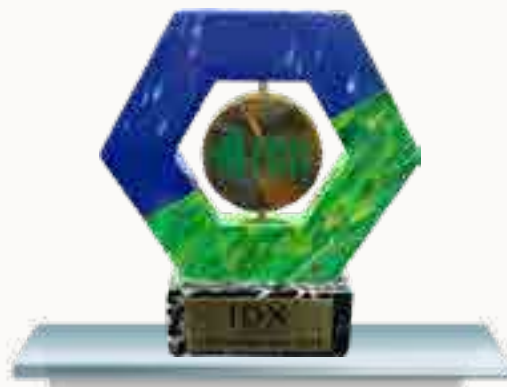


Penghargaan Transparansi dan Penurunan Emisi Korporasi Terbaik Tahun 2024

Best Corporate Transparency and Emission Reduction
Award 2024

Predikat **"Green"** untuk Transparansi Penurunan Emisi Korporasi
"Green" Predicate for Corporate Emission Reduction Transparency
Predikat **"Platinum"** untuk Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi
"Platinum" Predicate for Corporate Emission Calculation Transparency

03 Juni 2024 | June 03, 2024
**Bumi Global Karbon (BGK) Foundation
yang bekerjasama dengan Investortrust**
Bumi Global Carbon (BGK) Foundation
in collaboration with Investortrust



IDX Channel Anugerah ESG 2024

Kategori **Infrastruktur** melalui pengimplementasian ESG
dalam Strategi Transformasi WIKA
Category of Infrastructure through ESG implementation
in WIKA Transformation Strategy

26 Juli 2024 | July 26, 2024
IDX Channel



Anugerah Ekonomi Hijau Detik.com

Penggunaan Material Bangunan Ramah Lingkungan
Use of Environmentally Friendly Building Materials

30 Juli 2024 | July 30, 2024
Detik.com



Predikat Konstruksi Berkelanjutan Sustainable Construction Predicate

Predikat UTAMA untuk dua proyek strategis WIKA, yaitu Proyek Bendungan Sadawarna dan Proyek Pembangunan Jembatan Kretek 2 Lot 3

First place for two WIKA strategic projects, namely Sadawarna Dam Project and Kretek 2 Lot 3 Bridge Construction Project

22 Agustus 2024 | August 22, 2024
Kementerian PUPR



Indonesia QHSE Sustainability For Business Awards (IQSA)

THE BEST COMPANY CONCERNED QHSE (ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION & INVESTMENT) - PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (WIKA MANYAR SMELTER PROJECT)

THE BEST DIRECTOR QHSE EXCELLENT - BAPAK HARUM AKHMAD ZUHDI

THE BEST MANAGER QHSE - HENDRA WIJAYA

04 Oktober 2024 | October 04, 2024
Majalah Businessasia Indonesia bekerjasama dengan Forum QHSE BUMN Konstruks
Businessasia Indonesia Magazine in collaboration with SOE Construction QHSE Forum



Anugerah The Asset Manager 2024

Juara 2 Kategori MASTER
2nd Place MASTER Category

08 Oktober 2024 | October 08, 2024
Lembaga Manajemen Aset Negara
State Asset Management Institute



Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024

Gold Rank

21 Oktober 2024 | October 21, 2024

National Center for Corporate Reporting (NCCR) bekerja sama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioner (ICSP)
National Center for Corporate Reporting (NCCR) in collaboration with Institute of Certified Sustainability Practitioner (ICSP)



Customer Gathering - Creativity in Action Towards The Future 2024

The Most Awesome in Talent Management kategori BUMN
The Most Awesome in Talent Management SOE category

06 November 2024 | November 06, 2024

PPM Manajemen



Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2024

Indonesia Most Trusted Companies 2024

25 November 2024 | November 25, 2024

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan Majalah SWA
The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA Magazine



The 15th IICD Corporate Governance Conference and Award 2024

Top 50 Emiten dengan kategori Kapitalisasi Pasar Menengah (Middle Capitalization Public Listed Company)
Top 50 Issuers with Middle Capitalization Public Listed Company Category

25 November 2024 | November 25, 2024

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)



Indonesia CSR Award (ICA) 2024

Predikat Platinum
Platinum Predicate

28 November 2024 | November 28, 2024
Corporate Forum for CSR Development (CFCD)



Top Digital Awards 2024

1.
Golden Trophy
PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk

2.
Top Digital
Implementation 2024
Stars 5

3.
Top Leader on Digital
Implementation 2024

4.
Top CIO on Digital
Implementation 2024

5.
Top IT Manager
in Digital
Implementation 2024

05 Desember 2024 | December 05, 2024

Majalah ItWorks
ItWorks Magazine



Indonesia Knowledge Management Summit 2024

KM WIKA Raih Penghargaan Gold

13 Desember 2024 | December 13, 2024
PT Kilang Pertamina Internasional



4th Anniversary Indonesia Best Corporate Secretary Award

Indonesia 20 Best Corporate Secretary Awards 2024

17 Desember 2024 | December 17, 2024
The Iconomics



**Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik
Award of Transparency of Public Agency Information**

Badan Publik "Informatif"
"Informative" Public Agency

17 Desember 2024 | December 17, 2024
Komisi Informasi Pusat (KIP)
Central Information Commission (KIP)



Investortrust BUMN Awards 2024

Penghargaan Spesial
"Excellence in Corporate Turn Around & Restructuring"
Special Award
"Excellence in Corporate Turn Around & Restructuring"

19 Desember 2024 | December 19, 2024
Investortrust.id



Going Digital Awards in Infrastructure 2024

Finalis Top 3 dalam kategori Facilities, Campuses, and Cities untuk Proyek KSO WIKA di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Melalui presentasi yang dipimpin oleh Rizky Yusuf Ramadhan sebagai BIM Strategist, Octob Bhayu Hanggoro Putro sebagai BIM Lead, dan Davin Pradipta sebagai BIM Coordinator. Top 3 Finalists in the Facilities, Campuses, and Cities category for WIKA JO Project in the New National Capital (IKN) Through a presentation led by Rizky Yusuf Ramadhan as BIM Strategist, Octob Bhayu Hanggoro Putro as BIM Lead, and Davin Pradipta as BIM Coordinator.

Founders' Honor Going Digital Awards untuk Proyek Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 3B & 3B-2 dan Proyek Sumbu Kebangsaan Sisi Timur Founders' Honor Going Digital Awards for the IKN Nusantara Toll Road Project Section 3B & 3B-2 and the East Side National Axis Project

09 Oktober 2024 | October 09, 2024

Bentley Systems USA di Vancouver, Kanada



2023/24 Vision Award Annual Report Competition

- **Platinum Award**
- **Top 100 Reports Worldwide**
- **Technical Achievement Award**

17 Februari 2025 | February 17, 2025

LACP



SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU HINGGA TAHUN 2024

Sertifikasi dalam Sistem Manajemen WIKA (SMW)

WIKA memiliki Sistem Manajemen yang diterapkan dengan sangat baik dan menjadi kunci sukses keberhasilan WIKA di lapangan. Sistem Manajemen ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan hasil dari produk dan jasa agar tetap berjalan sesuai dengan tuntutan pelanggan. Sistem Manajemen yang berlaku di WIKA terdiri dari:

VALID CERTIFICATIONS IN 2024

Certification in WIKA Management System (SMW)

WIKA has a Management System that is applied very well and is the key to WIKA's success in the field. This Management System has a very important role in ensuring that the products and services continue to be in accordance with the demands of customers. WIKA Management System consists of:



Hingga akhir tahun 2024, sertifikasi yang masih berlaku sebagai berikut:

Until the end of 2024, the certifications that are still valid are as follows:

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Certification Issuance	Jenis Sertifikat Type of Certification	Bidang Sertifikat Area of Certification	Dikeluarkan Oleh Issuer	Masa Berlaku Hingga Validity Period
Nasional National				
4 Mei 2023 May 4, 2023	SNI ISO 9001:2015, Energy Plant Business Lines	Quality Management Systems-Requirements	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
4 Mei 2023 May 4, 2023	SNI ISO 9001:2015, Infrastructure Business Lines	Quality Management Systems-Requirements	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
4 Mei 2023 May 4, 2023	SNI ISO 9001:2015, Building Business Lines	Quality Management Systems-Requirements	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
4 Mei 2023 May 4, 2023	SNI ISO 9001:2015, Energy Plant Business Lines	Quality Management Systems-Requirements	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
4 Mei 2023 May 4, 2023	SNI ISO 14001:2015, Infrastructure Business Lines	Environmental Management Systems-Requirements with guidance for use	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
4 Mei 2023 May 4, 2023	SNI ISO 14001:2015, Building Business Lines	Environmental Management Systems-Requirements with guidance for use	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
4 Mei 2023 May 4, 2023	SNI ISO 14001:2015, Energy Plant Business Lines	Environmental Management Systems-Requirements with guidance for use	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
4 Mei 2023 May 4, 2023	SNI ISO 14001:2015, Oil & Gas and Industrial Plant Business Lines	Environmental Management Systems-Requirements with guidance for use	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
4 Mei 2023 May 4, 2023	ISO 45001:2018, Infrastructure Business Lines	Occupational Health and Safety Management System-Requirements	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
4 Mei 2023 May 4, 2023	ISO 45001:2018, Building Business Lines	Occupational Health and Safety Management System-Requirements	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
4 Mei 2023 May 4, 2023	ISO 45001:2018, Energy Plant Business Lines	Occupational Health and Safety Management System-Requirements	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
4 Mei 2023 May 4, 2023	ISO 45001:2018, Oil & Gas and Industrial Plant Business Lines	Occupational Health and Safety Management System-Requirements	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
4 Mei 2023 May 4, 2023	SNI ISO 9001:2015, Infrastructure Business Lines	Quality Management Systems-Requirements	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
4 Mei 2023 May 4, 2023	SNI ISO 9001:2015, Building Business Lines	Quality Management Systems-Requirements	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
23 November 2020 November 23, 2020	SNI ISO 37001:2016	Anti-Bribery Management System	Sucofindo	3 Mei 2026 May 3, 2026
15 November 2021 November 15, 2021	ISO 21500: 2021, Energy Plant Business Line	Project, Program, and Portfolio Management	RMC	-
15 November 2021 November 15, 2021	ISO 21500: 2021, Oil & Gas and Industrial Plant Business Line	Project, Program, and Portfolio Management	RMC	-
10 Januari 2022 January 10, 2022	ISO 19650-1: 2008 ISO 19650-2: 2008	Building Information Modelling	BSI	9 Januari 2025 January 9, 2025
6 Agustus 2024 August 6, 2024	Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety Management System Certificate	Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety Management System Certificate	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Minister of Manpower of the Republic of Indonesia	5 Agustus 2027
6 November 2024 November 6, 2024	ISO 31000:2018	Risk Management Systems - Guidelines	Sucofindo	5 November 2025
22 November 2024 November 22, 2024	ISO 20000-1:2018	Information technology – Service management	TÜV NORD Indonesia	21 November 2027
27 Desember 2024 December 27, 2024	ISO 27001:2022	Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements	TÜV NORD Indonesia	26 Desember 2027



Informasi Website Perusahaan

Information on Corporate Website



WIKA memiliki situs web resmi dengan alamat www.wika.co.id. Situs web ini merupakan portal resmi Perseroan yang dapat diakses secara terbuka, kapan saja, dan di mana saja, dengan mudah dan sederhana, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif, akurat dan aktual tentang Perseroan kepada khalayak luas, sesuai dengan Prinsip Keterbukaan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) khususnya kepada pemegang saham, pelanggan, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Situs web resmi Perseroan yang disajikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga telah sesuai dengan amanat Pasal 6, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan menyampaikan informasi mengenai, antara lain:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi Bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan;
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

WIKA has an official website with the address www.wika.co.id. This website is a portal that can be accessed openly, at anytime and anywhere, simple and easy, with the aim of providing comprehensive, accurate, and actual information about Company's to wider audience, in accordance with the Disclosure Principle as mandated by Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, and improving the implementation of Good Corporate Governance, especially for shareholders, customers, society, government, and other stakeholders.

The Company's official website is using two languages, namely Bahasa Indonesia and English. In addition, the website has also fulfilled the information that must be contained in accordance with article 6 of Financial Services Authority (POJK) Regulation No. 8/POJK.4/2015 concerning website of publicly listed companies or issuers, that must contain the following information:

1. General Information related to the Issuers or Public Companies
2. Information for Investors
3. Corporate Governance Information
4. Corporate Social Responsibility Information





Website Perseroan terdiri dari 6 (enam) kanal dengan konten sebagai berikut:

The Company's website consists of 6 (six) channels with the following content

Nama Kanal Channel Name	Konten Content	Konten Content
Info Perusahaan Company Information	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa Kami • Visi, Misi, & Komitmen • Manajemen <ul style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris b. Direksi c. Sekretaris Perusahaan d. Laporan Dewan Komisaris e. Laporan Dewan Direksi • Struktur <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi b. Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi • Nilai & Strategi • Sejarah Perusahaan • Keselamatan, Kesehatan, & Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • About Us • Vision, Mission & Commitment • Management <ul style="list-style-type: none"> a. Board of Commissioners b. Board of Directors c. Corporate Secretary d. Board of Commissioners Report e. Board of Directors Report • Structure <ul style="list-style-type: none"> a. Organizational structure b. Subsidiaries & Associated Entities • Values & Strategy • History of the Company • Safety, Health & Environment
Lini Bisnis Business Lines	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Tol b. Bandar Udara c. Pengelolaan Air • Realti & Properti <ul style="list-style-type: none"> a. Real Estat b. Layanan Hotel c. Manajemen Gedung • Infrastruktur & Gedung Publik <ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur b. Bangunan • Energi & Pabrik Industri <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangkit Listrik b. Pabrik Industri • Industri <ul style="list-style-type: none"> a. Produk Beton b. <i>Steel Fabrication</i> c. PPC d. <i>Heavy Equipment</i> e. Aspal f. Energi Terbarukan g. Kendaraan Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> • Investment <ul style="list-style-type: none"> a. Toll road b. Airport c. Water Management • Realty & Property <ul style="list-style-type: none"> a. Real Estate b. Hotel Services c. Building Management • Infrastructure & Public Buildings <ul style="list-style-type: none"> a. Infrastructure b. Building • Energy & Industrial Plants <ul style="list-style-type: none"> a. Power plants b. Industrial Factory • Industry <ul style="list-style-type: none"> a. Concrete Products b. Steel Fabrication c. PPC d. Heavy Equipment e. Asphalt f. Renewable energy g. Electric Vehicles
Hubungan Investor Investor Relations	<ul style="list-style-type: none"> • Beranda IR <ul style="list-style-type: none"> a. Selamat Datang di WIKA IR b. Kenapa Berinvestasi di WIKA? c. Berita Terbaru • Informasi Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur Grup b. Kepemilikan Saham c. Lembaga Penunjang Pasar Modal • Informasi Keuangan <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Keuangan b. Ikhtisar Keuangan c. Rasio Keuangan d. Presentasi Perusahaan e. Laporan Tahunan f. Dividen • Keterbukaan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumuman Emiten b. Aksi Korporasi c. Informasi Atau Fakta Material Lain d. Newsletter Investor e. Kalender Perusahaan f. Prospektus • Rapat Umum Pemegang Saham • Surat Utang dan Obligasi • Informasi Saham <ul style="list-style-type: none"> a. Grafik Interaktif b. Data Historis Saham c. Konsensus Analis d. Cakupan Analis e. Klasifikasi Indeks • Permintaan Informasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberitahuan Email b. Kontak Hubungan Investor 	<ul style="list-style-type: none"> • IR Home <ul style="list-style-type: none"> a. Welcome to WIKA IR b. Why Invest in WIKA? c. Latest news • Company Information <ul style="list-style-type: none"> a. Group Structure b. Shareholding c. Capital Market Supporting Institutions • Financial Information <ul style="list-style-type: none"> a. Financial Information b. Financial Overview c. Financial Ratios d. Corporate Presentation e. Annual report f. Dividend • Disclosure <ul style="list-style-type: none"> a. Issuer Announcement b. Corporate Action c. Other Material Information Or Facts d. Investor Newsletters e. Corporate Calendar f. Prospectus • General Meeting of Shareholders • Notes and Bonds • Stock Information <ul style="list-style-type: none"> a. Interactive Graphics b. Stock Historical Data c. Analyst Consensus d. Analyst Coverage e. Index Classification • Information request <ul style="list-style-type: none"> a. Email Notifications b. Investor Relations Contact

Nama Kanal Channel Name	Konten Content
Media & Informasi Media & Information	<ul style="list-style-type: none"> Ruang Berita Berita <ul style="list-style-type: none"> Postingan Media Sosial Siaran Pers Majalah Elektronik Video Terkait Kit Pers Penghargaan, Sertifikasi, & Rekaman PPID
Compliance Compliance	<ul style="list-style-type: none"> GCG <ul style="list-style-type: none"> Gambaran Umum Komitmen Struktur Whistleblowing System & Pengendalian Gratifikasi Kode Anggaran Dasar Manajemen Risiko Tata Kelola TI Auditor Eksternal Sistem Manajemen Anti Suap Asean Corporate Governance Scorecard Komite Audit & Komite NRG Perdagangan Internal Keberlanjutan <ul style="list-style-type: none"> Laporan Keberlanjutan Strategi Keberlanjutan Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Karir Career	<ul style="list-style-type: none"> Gambaran Umum SDM Formulir Pendaftaran Galeri

Website WIKA juga telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam *Annual Report Award*, yaitu:

WIKA's website has also fulfilled the following Annual Report Award criteria:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Information
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; Information on shareholder up to the individual ultimate owner	✓	https://investor-id.wika.co.id/shareholdings.html
Isi Kode Etik Code of Conduct	✓	https://www.wika.co.id/id/file/gcg-code
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Information on General Meeting of Shareholders (GMS)	✓	https://investor-id.wika.co.id/gms.html
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	✓	https://investor-id.wika.co.id/group_structure.html
Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis	✓	https://investor-id.wika.co.id/financials.html
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) Separate annual financial statements (last 5 years)	✓	https://investor-id.wika.co.id/financials.html
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Profiles	✓	https://investor-id.wika.co.id/board_of_commissioners.html https://investor-id.wika.co.id/directors.html
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charter of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Internal Audit Unit	✓	https://www.wika.co.id/id/file/gcg-code

✓ = tersedia pada situs web Perusahaan | available on the Company's website
x = belum tersedia pada situs web Perusahaan | not yet available on the Company's website

WIKA senantiasa memperbarui informasi yang disajikan dalam *website* secara berkala untuk memberikan informasi *ter-update* bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. WIKA juga memiliki akun media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube yang dikelola oleh *Public Relations* WIKA.

WIKA constantly updates the information presented on its website regularly to provide the most up-to-date information to all stakeholders and the general public. WIKA also has social media accounts as part of its transparency and communication efforts with all stakeholders, including Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube, managed by WIKA's Public Relations.





Analisi dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Perolehan berbagai proyek strategis nasional baru semakin memperkuat optimisme serta peran strategis WIKA dalam mendukung Asta Cita yang dicanangkan oleh Pemerintah. Kepercayaan ini menjadi bukti komitmen Perseroan dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas.

The acquisition of various new national strategic projects further strengthens the optimism and strategic role of WIKA in supporting the Asta Cita agenda established by the Government. This trust becomes a strong evidence of the Company's commitment to making tangible contribution to sustainable and high-quality infrastructure development.



Tinjauan Umum

General Overview



PLTU Cilacap 1x1000MW

ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Di tahun 2024, perekonomian global masih berlanjut pemulihan meskipun terus dibayangi tingginya risiko dan ketidakpastian. Sebagaimana disampaikan oleh Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* (IMF) dalam laporan *World Economic Outlook* (WEO) edisi Januari 2025 2024, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tumbuh di angka 3,2% (yoy) pada tahun 2024 dan tumbuh stabil 3,2% (yoy) di tahun 2025. Hal ini dipicu oleh kombinasi beberapa faktor, seperti inflasi yang dipandang masih akan berada di level tinggi dan berimplikasi pada *high for longer stance* terbatasnya ruang kebijakan pemerintah. *Downside risk* lain termasuk faktor struktural seperti peningkatan fragmentasi geoekonomi terhambatnya perdagangan lintas negara, dinamika politik negara maju, dampak iklim dan perkembangan demografi.

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC ANALYSIS

In 2024, the global economy continued its recovery, although remained overshadowed by high risks and uncertainties. As stated by the International Monetary Fund (IMF) in the *World Economic Outlook* (WEO) report for January 2025 2024, global economic growth is projected to grow at 3.2% (yoy) in 2024 and remain stable at 3.2% (yoy) in 2025. This is driven by a combination of several factors, such as inflation which is expected to remain at high levels, leading to a "high for longer" stance and limited policy space for governments. Other downside risks include structural factors such as increased geo-economic fragmentation, hindered cross-border trade, political dynamics in developed countries, climate impacts, and demographic developments.

Sementara, risiko perekonomian global juga datang dari tantangan pemulihan ekonomi Tiongkok, kontributor utama ekonomi dunia. Permintaan domestik yang lemah di Tiongkok telah mendorong peningkatan ekspor untuk produk-produk seperti baja, kendaraan listrik, panel surya, dan lain sebagainya. Aktivitas manufaktur global sepanjang tahun 2024 cenderung melemah yang ditandai dengan *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur merosot ke level di bawah 50 sejak Juni 2024 dan baru kembali naik ke level di atas 50 pada Desember 2024. Situasi ini secara umum merefleksikan lemahnya permintaan global. Harga komoditas global masih dalam tren yang dinamis.

Berdasarkan pada kebijakan Bank sentral Amerika Serikat (AS) *The Federal Reserve* (The Fed) memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) menjadi 4,75-5,0%. Pemangkasan suku bunga dilakukan karena meyakini inflasi AS sudah bergerak menuju target kisaran mereka di angka 2%. Namun, faktor utama dari pemangkasan sebesar 50 bps adalah tingkat pengangguran Amerika Serikat yang melambung. Inflasi AS melandai ke 2,9% (*year on year/ yoy*) pada Desember 2024, dari 3,4% pada Desember 2023. Tingkat pengangguran mencapai 4,1% pada Desember 2024, dari 3,8% pada Desember 2023. Kebijakan tersebut bisa membantu pasar tenaga kerja tetapi tetap membawa inflasi bergerak menuju 2% secara berkelanjutan. Sementara itu untuk 2025, The Fed memproyeksikan suku bunga berada di 3,4%. Angka ini mengindikasikan adanya pemotongan 100 bps atau 1%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 mencapai di angka 5,03% (*yoy*) atau sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,05%. Perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang baik meski kondisi ekonomi global diliputi ketidakpastian. Ekonomi Indonesia utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi hingga 54,04% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan tumbuh sebesar 4,94% (*yoy*).

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) di tahun 2024 meningkat didorong oleh peran APBN dalam menjaga ekonomi nasional. Pertumbuhan PKP tercatat sebesar 4,61% (*yoy*). Pertumbuhan positif ini didukung oleh penyerapan belanja modal dan belanja barang yang cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan fokus kebijakan APBN 2024 sebagai *shock absorber* dengan tujuan menahan efek guncangan ekonomi global.

Menurut data BPS, PDB atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp22.139,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 12.920,3 triliun. Dari sisi kinerja Lapangan Usaha (LU) Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,80% (*yoy*), diikuti oleh LU transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,69% (*yoy*) dan LU Penyediaan Akomodasi & Makan Minum dengan pertumbuhan sebesar 8,56%.

Adapun inflasi Indonesia tahun 2024 masih di bawah 2,50% (*yoy*), yaitu 1,57%. Hal ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal serta sinergi pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Inflasi yang terkendali diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tetap kuat.

Meanwhile, global economic risks also stem from challenges in economic recovery in China, a major contributor to the world economy. Weak domestic demand in China has led to an increase in exports of products such as steel, electric vehicles, solar panels, and others. Global manufacturing activities throughout 2024 tended to weaken, as indicated by the Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) dropping below 50 since June 2024 but rising back above 50 in December 2024. This situation generally reflects weak global demand. Global commodity prices remain in a dynamic trend.

Based on the policy of the United States central bank, the Federal Reserve (The Fed) reduced its benchmark interest rate by 50 basis points (bps) to 4.75-5.0%. The reduction of interest rate was made because the Fed believes US inflation is moving toward their target range of 2%. However, the main reason for the 50 bps reduction was the rising unemployment rate in the United States. US inflation eased to 2.9% (*year on year/yoy*) in December 2024, down from 3.4% in December 2023. The unemployment rate reached 4.1% in December 2024, up from 3.8% in December 2023. This policy could help the labor market but still keeps inflation moving toward 2% sustainably. For 2025, The Fed projects the interest rate to be at 3.4%. This figure indicates a 100 bps or 1% cut.

According to data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economic growth in 2024 is projected to reach 5.03% (*yoy*), slightly lower than the previous year's growth of 5.05%. Indonesia's economy showed good growth despite global economic uncertainty. Indonesia's economy is primarily supported by household consumption, which contributed 54.04% to the national Gross Domestic Product (GDP) and grew by 4.94% (*yoy*).

The government Consumption Expenditure (GCE) in 2024 increased, driven by the role of the State Budget (APBN) in maintaining the national economy. The growth of GCE was recorded at 4.61% (*yoy*). This positive growth was supported by high absorption of capital expenditure and goods expenditure. This aligns with the focus of the 2024 APBN policy as a shock absorber, aiming to mitigate the effects of global economic shocks.

According to BPS data, GDP at current prices in 2024 reached Rp22.139.0 trillion, and at constant 2010 prices, it reached Rp12.920.3 trillion. From the perspective of sectoral performance, the "Other Services" sector showed the highest growth at 9.80% (*yoy*), followed by the transport and warehousing sector with a growth of 8.69% (*yoy*) and the accommodation and food service sector with a growth of 8.56%.

Indonesia's inflation in 2024 was still below 2.50% (*yoy*), at 1.57%. This was the result of consistent monetary policy, fiscal policy, and synergy in inflation control, both at central and regional levels, through the Central and Regional Inflation Control Teams (TPIP and TPID). Controlled inflation is expected to help sustain strong economic growth.



ANALISIS INDUSTRI DAN POSISI PERSEROAN DALAM INDUSTRI

Pada tahun 2024, sektor konstruksi Indonesia mengalami perkembangan signifikan yang mempengaruhi perekonomian nasional. Kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 10,23% pada tahun 2024, menempatkannya sektor konstruksi sebagai sektor dengan kontribusi terbesar keempat dalam perekonomian nasional. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh beberapa proyek infrastruktur utama, termasuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatra dan pengembangan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun untuk tahun 2024, yang digunakan untuk mempercepat penyelesaian proyek.

Selain itu, pada sektor energi, melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah disusun, pemerintah menargetkan agar 23% dari total bauran energi pada tahun 2025 berasal dari energi terbarukan. Hingga tahun 2024, berdasarkan data dari Kementerian ESDM, hingga bulan Desember tahun 2024 realisasi kapasitas terpasang Energi Terbarukan Nasional adalah sebesar 101 GW dengan porsi terbesar berasal dari Pembangkit Energi fosil sebesar 86 GW atau 85% dan pembangkit energi terbarukan sebesar 15,1 GW atau 15%.

Secara umum, Perseroan memiliki peran dalam industri jasa konstruksi di Indonesia dengan kegiatan usaha yang terintegrasi melalui jasa konstruksi, Engineering Procurement Construction Commission (EPCC), Industri, Properti hingga Investasi. Peran ini didukung dengan posisi pasar yang kuat di antara BUMN Karya lain dalam kluster EPCC, Properti dan Entitas Anak. Meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global dan perekonomian domestik yang fluktuatif, Perseroan berhasil membangun fundamental bisnis yang kokoh bagi keberlanjutan bisnis melalui penerapan prinsip *four eyes principle* dengan fokus pada penyehatan keuangan Perseroan serta *core competition* Perseroan yang telah dijalankan sejak tahun sebelumnya. Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung kebijakan Pemerintah, pada tahun ini Perseroan kembali mencatatkan prestasinya dalam sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), Proyek Transisi Energi dan Energi Terbarukan dan Program 35.000 watt yang memberikan manfaat berkesinambungan bagi masyarakat.

INDUSTRY ANALYSIS AND COMPANY POSITION IN THE INDUSTRY

In 2024, Indonesia's construction sector experienced significant development, which impacted the national economy. The construction sector's contribution to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) reached 10.23% in 2024, making it the fourth-largest contributing sector to the national economy. The growth of this sector was driven by several major infrastructure projects, including the construction of Trans-Sumatra toll road and the development of infrastructure in the New Capital City (IKN). The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) allocated an infrastructure budget of Rp423.4 trillion for 2024, which will be used to accelerate the completion of projects.

Additionally, in the energy sector, through the National Energy Policy (KEN) that has been established, the government is targeting that 23% of the total energy mix by 2025 will be originating from renewable energy. As of 2024, according to data from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), by December 2024, the realized installed capacity of National Renewable Energy was 101 GW, with the largest share coming from fossil fuel-based power plants at 86 GW or 85%, and renewable energy plants at 15.1 GW or 15%.

In general, the Company plays a role in Indonesia's construction services industry with integrated business activities through construction services, Engineering Procurement Construction Commission (EPCC), Industry, Property, and Investment. This role is supported by a strong market position among other state-owned construction enterprises in the EPCC, Property, and Subsidiary Entity clusters. Despite facing global economic uncertainty and a volatile domestic economy, the Company has successfully built a robust business foundation for business sustainability by applying the four eyes principle, focusing on the Company's financial health, and continuing the core competition strategy that has been carried out since the previous year. As a commitment to supporting government policies, this year the Company has once again achieved accomplishments in several National Strategic Projects (PSN), Energy Transition and Renewable Energy Projects, and the 35,000 MW program, which provide continuous benefits to society.

Tinjauan Operasional

Operational Overview

STRATEGI PERSEROAN TAHUN 2024

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkemuka di Indonesia yang memiliki peran besar dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai agen pembangunan WIKA senantiasa terlibat dan dilibatkan dalam setiap proses pembangunan nasional, dan terus mencatatkan kontribusi dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di tanah air.

Sejauh ini, WIKA menjadi satu-satunya kontraktor utama yang berasal dari dalam negeri dalam konsorium yang melibatkan kontraktor luar negeri yang memiliki pengalaman panjang pada pembangunan kereta cepat di berbagai negara. Dalam menunjukkan optimismenya, WIKA mampu meraih banyak kontrak proyek. Tercatat, di tahun 2024, WIKA telah membukukan kontrak baru sebesar Rp65,1 triliun, yang mencerminkan kepercayaan pelanggan dan konsumen terhadap WIKA yang masih tetap kuat.

Terbukti banyak prestasi monumental yang berhasil dicatatkan WIKA dalam menunjukkan kapasitasnya untuk mengembangkan ide yang lebih segar dan inovatif juga dapat mengoptimalkan aset. Dalam strateginya, WIKA menggunakan teknologi *Augmented Reality* (AR) untuk menghasilkan visualisasi yang lebih baik sekaligus meminimalisir risiko kesalahan pekerjaan. Terobosan ini akan membuat proses pembangunan menjadi lebih komprehensif, analisis mendalam dan manajemen proyek yang lebih efisien.

Adapun kebijakan startegis yang telah ditetapkan WIKA di tahun 2024, adalah 8 substream penyehatan keuangan WIKA antara lain sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Keuangan
2. Perbaikan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
3. Percepatan Penagihan Piutang Bermasalah
4. *Asset Recycling*
5. Perbaikan *Portfolio Orderbook*
6. Penurunan *Operating Expense*
7. Penurunan Saldo Pinjaman Talangan *Supplier*
8. Penguatan Struktur Permodalan

WIKA secara berkala terus melakukan pemantauan dan evaluasi atas 8 *Stream* penyehatan. Berikut realisasi 8 *stream* penyehatan pada 2024 :

1. **Reprofiling/Restrukturisasi Keuangan** : bertujuan untuk menurunkan *Cost of Fund*
 - Target 2024
 - Rate bunga Kreditur Bank/Non Bank (MRA) sebesar 4% dibayarkan 0,5% di tahun 2024, sisanya 3,5% merupakan *deffered interest*.

THE COMPANY'S STRATEGIES FOR 2024

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk or WIKA's, is one of the leading State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia that has a major role in infrastructure development. As a development agent, WIKA's is always involved in every national development process and continues to contribute to a number of infrastructure development projects in the country.

Up to date, WIKA's is the only domestic main contractor in a consortium involving foreign contractors with extensive experience in high-speed rail construction in various countries. Demonstrating its optimism, WIKA's has been able to secure numerous project contracts. In 2024, WIKA's was recorded to be able to book new contracts amounting to Rp65.1 trillion, reflecting the continued strong trust of customers and consumers in WIKA's.

WIKA's has proven to achieve many monumental accomplishments, demonstrating its capacity to develop fresher and more innovative ideas while optimizing assets. In its strategy, WIKA's uses *Augmented Reality* (AR) technology to produce better visualizations while minimizing the risk of work errors. This breakthrough will make the construction process more comprehensive, with deeper analysis and more efficient project management.

The strategic policies established by WIKA's for 2024 are the 8 substreams of WIKA's financial recovery, as follows:

1. Financial Restructuring
2. Improvement of Governance and Risk Management
3. Acceleration of Collection of Non-Performing Receivables
4. Asset Recycling
5. Portfolio Orderbook Improvement
6. Decrease in Operating Expenses
7. Decrease in Supplier Bailing Loan Balances
8. Strengthening Capital Structure

WIKA continues to monitor and evaluate the 8 recovery streams in a regular manner. The following is the realization of the 8 recovery streams in 2024:

1. **Financial Reprofiting/Restructuring**: aims to reduce the Cost of Fund
 - Target 2024
 - The Bank/Non-Bank Creditor (MRA) interest rate of 4% is paid 0,5% in 2024, the remaining 3,5% is deferred interest.



2. **Perbaikan Tata Kelola dan Manajemen Risiko**, bertujuan untuk memperbaiki prosedur dan model operasi untuk memastikan adanya proses *check & balance* dalam setiap aktivitas.

- Target berupa inisiatif kualitatif untuk meningkatkan *check and balances*. Inisiatif yang telah dilaksanakan :
 - Implementasi *four-eyes* unit bisnis dan manajemen risiko untuk:
 - Perolehan proyek baik analisa pemberi kerja maupun atas risiko eksekusi pembangunan proyek; jaminan tender hanya diterbitkan jika lolos *four-eyes*; (*Closed*)
 - Kenaikan anggaran biaya proyek konstruksi dimana kenaikan anggaran di sistem SAP hanya diberikan dengan persetujuan kewenangan bertingkat sampai Direksi; (*Closed*)
 - Penerapan Digitalisasi Mekanisme dan *Dashboard Four Eyes Principles*; (*Closed*)
 - Penerapan *Lean Office*; (Target Q3/2024)
 - Pengendalian Proyek Terintegrasi (Digitalisasi proses pelaksanaan *Check Point/Four Eyes Principles*) (Target Q1 2025).
 - Perbaikan prosedur dan standarisasi isi kontrak konstruksi:
 - Ketentuan *Service Agreement* untuk proyek KSO dituangkan di dalam prosedur pemasaran Rev. 01 WIKA-PAS-PM-01.01 yang telah dilakukan pengesahan pada tanggal 2 Januari 2024; (*Closed*)
 - Perbaikan kategori dan *threshold project turnkey* yang kewenangannya diatur sesuai dalam prosedur pemasaran Rev. 01 WIKA-PAS-PM-01.01 dan Surat Edaran nomor 13/DK/WIKA/2023 saat ini mayoritas kewenangan pengambilan proyek *turnkey* harus dengan persetujuan Dewan Komisaris; (*Closed*)
 - Penggunaan Biro Kredit dalam seleksi vendor dan mitra KSO untuk mengetahui rating kemampuan finansial; (*Closed*)
 - Penggantian ERP ke sistem SAP sehingga ERP memiliki fitur *real time online* dan *locking* anggaran baik BUA, BTK, maupun HPP. SAP juga telah diimplementasikan untuk Proyek JO dimana WIKA menjadi *Leader JO*; (*Closed*)
 - Penyempurnaan kewenangan pengadaan minimal di 2 (dua) orang dari sebelumnya dapat dilakukan 1 (satu) orang dengan kewenangan tertentu, sudah dituangkan kedalam prosedur dan sudah diimplementasikan; (*Closed*)
 - Penggunaan *cash management* perbankan untuk transaksi pembayaran dan penutupan rekening-rekening proyek; saat ini pembayaran dilakukan tersentralisasi di Kantor Pusat Pembagian dana ke proyek melalui *virtual account*. Penunjukan Lembaga independen dalam proses pengendalian anggaran; (*Closed*)
 - Sudah dilakukan audit ICoFR oleh Auditor Independen; (*Closed*)
 - Telah diterapkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada 2 Januari 2024. (*Closed*)
- Sentralisasi SCM
 - Telah dilakukan penyesuaian prosedur dan SKSO dengan menggunakan kategori *management* sebagai pendekatan sentralisasi pengadaan. Saat ini telah ditetapkan 58 kategori *management* (Material Strategis) dan *tagging* 9000 sumber daya. (*Closed*)

2. **Improvement of Governance and Risk Management**, aims to: improve procedures and operating models to ensure a *check & balance* process in every activity.

- Targets in the form of qualitative initiatives to improve checks and balances. Initiatives that have been carried out:
 - Implementation of four-eyes business units and risk management for:
 - Project acquisition, both owner analysis and project construction execution risks; tender guarantees are only issued if they pass four-eyes; (*Closed*)
 - Increase in the construction project cost budget where the budget increase in the SAP system is only given with the approval of tiered authorities up to the Board of Directors; (*Closed*)
 - Implementation of Digitalization of Four Eyes Principles Mechanism and Dashboard; (*Closed*)
 - Implementation of Lean Office; (Target Q3/2024)
 - Integrated Project Control (Digitization of Check Point/ Four Eyes Principles implementation process) (Target Q1 2025).
 - Improvement of procedures and standardization of construction contract contents:
 - Service Agreement provisions for JO projects are stated in the marketing procedure Rev. 01 WIKA-PAS-PM-01.01 which has been ratified on January 2, 2024; (*Closed*)
 - Improvement of turnkey project categories and thresholds whose authority is regulated in accordance with the marketing procedure Rev. 01 WIKA-PAS-PM-01.01 and Circular Letter number 13/DK/WIKA/2023 currently the majority of turnkey project taking authority must be approved by the Board of Commissioners; (*Closed*)
 - Use of Credit Bureau in vendor and JO partner selection to determine financial capability ratings; (*Closed*)
 - Replacement of ERP to SAP system so that ERP has real time online features and budget locking for both BUA, BTK, and HPP. SAP has also been implemented for JO Projects where WIKA is the JO Leader; (*Closed*)
 - Improvement of procurement authority to a minimum of 2 (two) people from previously being able to be done by 1 (one) person with certain authority, has been stated in the procedure and has been implemented; (*Closed*)
 - Use of banking cash management for payment transactions and closing project accounts; currently payments are made centrally at the Head Office Distribution of funds to projects through virtual accounts. Appointment of an independent institution in the budget control process; (*Closed*)
 - ICoFR audit has been carried out by an Independent Auditor; (*Closed*)
 - Integrated Governance Guidelines have been implemented on January 2, 2024. (*Closed*)
- SCM Centralization
 - Adjustments to procedures and SKSO have been made using management categories as an approach to centralizing procurement. Currently, 58 management categories (Strategic Material) and 9000 resource tagging have been established. (*Closed*)

- Digitalisasi Persuratan
 - Digitalisasi persuratan melalui implementasi Aplikasi We-Office dan implementasi *paperless culture*. (Closed)
 - Digitalisasi Invoice
 - Penerapan digital invoice *Go-Live* Maret 2024. (Closed)
 - *Development Mass* Jurnal CKPN
 - Target Program Pengembangan Digitalisasi: Implementasi Otomatisasi Perhitungan *Impairment* di Laporan Keuangan Juni 2024. (Closed)
3. **Percepatan Penagihan Piutang Bermasalah**
Piutang bermasalah telah turun sebesar 23% jika dibandingkan dengan tahun 2023
4. **Asset Recycling**: Melakukan *asset recycling* atau divestasi atas aset-aset *non-core* WIKA dalam rangka mendapatkan dana tunai untuk penyelesaian utang WIKA.

- Correspondence Digitization
 - Correspondence digitization through the implementation of the We-Office Application and the implementation of a paperless culture. (Closed)
- Invoice Digitization
 - Implementation of Go-Live digital invoices in March 2024. (Closed)
- Development of Mass CKPN Journal
 - Target of the Digitalization Development Program: Implementation of Impairment Calculation Automation in the Financial Report in June 2024. (Closed)

3. **Acceleration of Collection of Problematic Receivables**
Problematic receivables have decreased by 23% compared to 2023
4. **Asset Recycling**: Carrying out asset recycling or divestment of WIKA's non-core assets in order to obtain cash funds to settle WIKA's debts.

Entitas Entity	Porsi Divestasi Divestment Portion	Target Penyelesaian Completion Target
PT PP Semarang Demak	24,90%	2026
PT Citra Marga Lintas Jabar	16,56%	2026
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	18,29%	2027

5. **Perbaiki *Portfolio Orderbook*** : Memperbaiki *portfolio orderbook* konstruksi dengan fokus pada proyek-proyek yang memiliki pembayaran *monthly progress* dengan tujuan untuk mengurangi deficit kas dan kebutuhan modal kerja. Komposisi *orderbook* atau kontrak berjalan di WIKA induk di tahun 2024 adalah sebesar 92,40% berupa *monthly progress*.
6. **Penurunan *Operating Expense*** : Penurunan *operating expense* sebesar minimal 25% secara jangka panjang jika dibandingkan tanpa inisiatif.
7. **Penurunan Saldo Pinjaman Talangan *Supplier*** : Restrukturisasi dan/atau penurunan pinjaman *supply chain financing* (SCF)
 - Total konversi pinjaman SCF s/d 2024 sebesar Rp6.36 triliun; menkonversi tagihan SCF jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang, hal ini berdampak kepada *Current Ratio* WIKA membaik pada TW 1 2024; (Closed)
 - Sudah dilakukan bersamaan dengan penyelesaian restrukturisasi perbankan; (Closed)
 - Penurunan penggunaan SCF dan menggunakan *self financing* (termin) untuk pembiayaan proyek. (Closed)
8. **Penguatan Struktur Permodalan** : Penguatan struktur permodalan melalui *rights issue* atau penerbitan saham baru melalui mekanisme HMETD.
 - Telah diperoleh PMN WIKA TA 2024 melalui PP No 15 Tahun 2024 pada tanggal 22 April (Closed)

5. **Orderbook Portfolio Improvement**: Improve the construction *orderbook portfolio* by focusing on projects that have monthly progress payments with the aim of reducing cash deficits and working capital needs. The composition of *orderbook* or ongoing contracts at WIKA parent in 2024 is 92.40% in the form of monthly progress.
6. **Decrease in Operating Expense**: Decrease in operating expenses by at least 25% in the long term when compared to without the initiative.
7. **Decrease in Supplier Advance Loan Balance**: Restructuring and/or decrease in *supply chain financing* (SCF) loans
 - Total conversion of SCF loans up to 2024 amounting to Rp6.36 trillion; converting short-term SCF bills into long-term loans, this has an impact on improving WIKA's *Current Ratio* in Q1 2024; (Closed)
 - Has been carried out simultaneously with the completion of banking restructuring; (Closed)
 - Decrease in the use of SCF and use of self-financing (term) for project financing. (Closed)
8. **Strengthening Capital Structure**: Strengthening capital structure through *rights issue* or issuance of new shares through HMETD mechanism.
 - WIKA PMN FY 2024 has been obtained through PP No. 15 of 2024 on April 22 (Closed)

Memasuki tahun 2024, WIKA melanjutkan strategi yang dapat memenuhi target-target sebagaimana telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan. Hal tersebut juga sekaligus menjadi komitmen WIKA untuk berpartisipasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang digulirkan Pemerintah dalam rangka meningkatkan konektivitas dan menghadirkan kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia. Di mana RPJMN 2020-2024 tersebut merupakan tahapan penting untuk mencapai target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Entering 2024, WIKA's continues its strategy to achieve the targets that have been set to improve the Company's performance. This also serves as WIKA's commitment to participate in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) launched by the Government to enhance connectivity and meet the basic needs of Indonesian people. The 2020-2024 RPJMN is a crucial stage in achieving the development targets outlined in the 2005-2025 National Long-Term Development Plan (RPJPN).



Berikut adalah produktivitas jumlah kontrak baru dan kontrak dihadapi WIKA di tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya.

The following is the productivity of the number of new contracts and order book of WIKA's in 2024 compared to the previous year.

Produktivitas Kontrak Baru dan Kontrak Dihadapi 2023-2024

Productivity of New Contracts and Order Book 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-miliar) (Rp-billion)	Persentase Percentage (%)
Kontrak Baru New Contract	20.656	29.244	8.588	-29.37% ↓
Kontrak Dihadapi Order Book	65.058	73.904	8.846	-11.97% ↓

Di tahun 2024, WIKA merealisasikan kontrak baru sebesar Rp20.656 miliar, mengalami penurunan Rp8.588 miliar atau -29.37% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp29.244 miliar. Sementara itu, kontrak dihadapi WIKA di tahun 2024 tercatat sebesar Rp65.058 miliar, mengalami penurunan Rp8.846 miliar atau -11.97% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp73.904 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh Penurunan ini terjadi karena WIKA sedang menghadapi tantangan dalam kondisi bisnis, yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah tender proyek pada tahun 2024 akibat peralihan pemerintahan yang terjadi pada tahun tersebut.

In 2024, WIKA's realized a new contract of Rp20,656 billion, a decrease of Rp8,588 billion or -29.37% compared to 2023 amounting to Rp29,244 billion. Meanwhile, the contracts faced by WIKA's in 2024 were recorded at an amount of Rp65,058 billion, a decrease of Rp8,846 billion or -11.97% compared to 2023 amounting to Rp73,904 billion. This decline occurred because WIKA was dealing with challenges in business conditions, caused by a decrease in the number of project tenders in 2024 due to the transition made by the government that occurred in that year.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Segmen Usaha

Dalam menyusun laporan keuangan, Perseroan menerapkan PSAK 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi. Manajemen menetapkan operasi bisnis dari segmen yang menunjukkan jenis usaha. Perseroan dan entitas anak beroperasi dan terdaftar di Indonesia. Seluruh kegiatan konstruksi dan penjualan barang dilakukan di Indonesia.

WIKA mengidentifikasi segmen operasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang di-review secara berkala oleh pengambil keputusan operasional guna mengalokasikan sumber daya, serta untuk menilai kinerja segmen operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

1. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi komponen lain dari entitas yang sama);
2. Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Business Segment

In preparing the financial statements, the Company applied PSAK 5 (2015 Adjustment) on Operational Segments. The management determines the business operations of the segments that indicate the type of business. The Company and its subsidiaries operate and are registered in Indonesia. All construction and sales are carried out in Indonesia.

WIKA's identifies operating segments based on internal report on components from the Group that are regularly reviewed by operational decision makers in order to allocate resources and assess the performance of operating segments.

An operating segment is a component from an Entity:

1. Involved in any business activities that generate revenue and incur expenses (including revenue and expenses related to transactions with other components of the same entity);
2. Whose operating results are regularly reviewed by the operational decision makers to make decisions about resources allocated to the segment, and to assess its performance; and
3. Where separate financial information is available.

Berdasarkan hal tersebut, WIKA membagi kegiatan usahanya menjadi 5 (lima) segmen sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, antara lain:

1. **Infrastruktur dan Gedung**
Terdiri dari bidang usaha jasa konstruksi sipil umum yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan laut, bandara, *jetty*, konstruksi hunian, komersial, serta sarana dan prasarana.
2. **Energi dan *Industrial Plant***
Meliputi bidang usaha jasa konstruksi bidang energi dan EPC serta jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Pada segmen ini termasuk investasi pada sektor kelistrikan yang mayoritas pendanaan dan operasinya dikendalikan oleh Perseroan.
3. **Industri**
Merupakan kegiatan usaha Perseroan pada industri beton *precast* serta jasa penunjang lainnya, seperti tiang pancang, girder, bantalan rel kereta api, konstruksi baja, *spare part* otomotif, produk konversi energi, dan industri pertambangan.
4. **Realti dan Properti**
Merupakan kegiatan usaha Perseroan pada industri properti yang terdiri dari usaha *landed housing* dan *high rise building* seperti apartemen, serta pengelolaan hotel, gedung dan kondotel.
5. **Investasi**
Merupakan kegiatan usaha Perseroan yang berasal dari penggunaan jalan tol dari aset konsesi.














Based on this, WIKA's divides its business activities into 5 (five) segments in accordance with the Company's Consolidated Financial Statements, namely:

1. **Infrastructure and Building**
Consists of general civil construction services business that includes the construction of commercial facilities and infrastructure such as roads, bridges, seaports, airports, *jetty*, and residential construction.
2. **Energy and Industrial Plant**
Consists of construction services in the energy sector and EPC, as well as operation and maintenance services for power plants. This segment includes investments in the electricity sector, where the Company controls the majority of funding and operations.
3. **Industry**
Consists of precast concrete business and other supporting services, such as piles, girders, railroad sleepers, steel construction, automotive spare parts, energy conversion products and the mining industry.
4. **Realty and Property**
Consists of property business activities, including landed housing and high-rise buildings such as hotels, buildings, and condotel management.
5. **Investment**
Consists of the activities on toll roads operation from concession assets.

Adapun WIKA juga membagi segmen operasi yang dijalankan berdasarkan segmen geografis, yaitu untuk pasar Indonesia dan luar negeri.

In addition, WIKA's also divides its operating segments based on geographic segments, namely Domestic and Overseas.

Lini Bisnis WIKA Berdasarkan Segmen Operasi WIKA's Lines of Business Based on Operating Segment

				
Infrastructure & Building	Energy & Industrial Plant	Industry	Realty & Property	Investment
Civil Construction & High Rise Building	EPCC	Industry Precast Concrete, Construction, Industry, Bitumen	Real Estate & Hospitality	Energy, Infra & Water
<p>Civil Construction :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Road and Bridge • Seaport and Jetty • Dam and Barrage <p>Overseas Operation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Building Construction : • Residential & Commercial • Airport • Railway Depot & Station 	<p>EPC :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power Plant • Industrial Plant • Processing Plant • Cable Transmission <p>Operation & Maintenance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power Plant • Airport • Green Energy  	<p>Precast & Ready Mix</p> <p>Construction Industry :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steel Fabrication • Aluminium Casting • Plastic Injection • Natural Asphalt • Electric Vehicle  	<p>Real Estate & Property :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landed house • High-Rise Property (Apartment Condotel) • Hotel & Resort • Property Management 	<ul style="list-style-type: none"> • Toll Road • Airport • Water Treatment Plant • High Speed Railway Jakarta Bandung  



Segmen Infrastruktur dan Gedung

Penjelasan Segmen

WIKA melaksanakan pembangunan melalui segmen infrastruktur dan gedung terdiri atas 2 (dua) bidang usaha, yakni jasa konstruksi sipil dan konstruksi gedung. Jasa konstruksi sipil memiliki sejumlah sub bidang usaha yang terdiri dari beberapa lini, di antaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, pengairan, serta prasarana perhubungan. Selain bertindak sebagai kontraktor, bidang usaha jasa konstruksi sipil juga mencakup rancang bangun (*design and build*), mulai dari perencanaan hingga proses konstruksi. Sementara, jasa konstruksi gedung juga mencakup sejumlah sub bidang usaha, seperti pembangunan apartemen, kondominium, hotel, rumah susun, dan kompleks perumahan. Jasa konstruksi gedung juga dapat melakukan pekerjaan rancang bangun (*design and build*) sejak proses perencanaan konstruksi dengan dukungan bidang perekayasaan yang dimiliki Perseroan.

Tantangan dan Strategi Peningkatan Kinerja Segmen

Segmen infrastruktur dan gedung yang dijalankan WIKA, telah menghasilkan sejumlah sarana dan prasarana yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta meningkatkan produktivitas masyarakat. WIKA terus melakukan pengembangan segmen infrastruktur dan gedung, dalam rangka meningkatkan kinerja, meski terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Adapun tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2024, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kondisi politik dan perekonomian global yang fluktuatif dan tidak pasti
2. Masa penyehatan keuangan / restrukturisasi yang sedang berlangsung di WIKA
3. Munculnya pesaing baru baik dari domestik maupun asing
4. Perkembangan teknologi yang berlangsung cepat
5. Mundurnya beberapa tender yang sedang berproses ke tahun selanjutnya

Di tengah tantangan tersebut, Perseroan telah menetapkan berbagai kebijakan strategis sebagaimana terlampir berikut ini, yakni:

1. Peningkatan likuiditas kas dan perbaikan rasio keuangan perusahaan
2. Memperbaiki HPP
3. Memperkuat value engineering untuk mengoptimalkan perencanaan dan sebagai dasar pengendalian dan pengawasan proyek
4. Memperkuat sinergi bisnis dan optimasi pengelolaan portofolio proyek dan ekspansi pasar melalui kemitraan
5. Menerapkan Owner Selection dan Project Selection berbasis Risiko

INFRASTRUCTURE AND BUILDING SEGMENT

Segment Explanation

WIKA carries out construction through the Infrastructure and Building segment consisting of 2 (two) businesses, namely civil construction and building construction services. Civil construction services oversee a number of sub-sectors covering several lines of business, including infrastructure and facilities construction such as roads, bridges, irrigation, and transportation facilities. Besides working as a contractor, the civil construction also covers the design and build, from the planning process to the construction process. Building construction services oversee a number of sub-sectors covering the construction of apartments, condominiums, hotels, flats and housing complexes. Building construction services are also involved in the design and build, from the planning process to the construction process, and supported by the Company's engineering sector.

Challenges and Improvement Strategies of Segment Performance

The infrastructure and building segments run by WIKA's have produced a number of facilities and infrastructure that are expected to improve the quality of life and increase productivity of the people. WIKA's continues to develop the infrastructure and building segment, in order to improve performance, despite the challenges faced. The challenges faced by the Company in 2023 include:

1. Fluctuating and uncertain global political and economic conditions
2. Ongoing financial recovery/restructuring at WIKA
3. The emergence of new competitors, both domestic and foreign
4. Rapid technological developments
5. Delays in several tenders that are being carried over to the next year

Amid these challenges, the Company has established various strategic policies as attached below:

1. Increase cash liquidity and improve the Company's financial ratios
2. Improve Cost of Goods Sold (COGS)
3. Strengthen value engineering to optimize planning and as the basis for project control and supervision
4. Strengthen business synergy and optimize project portfolio management and market expansion through partnerships
5. Implement Owner Selection and Project Selection based on Risk

Produktivitas Segmen

Segment Productivity

Produktivitas Segmen Infrastruktur dan Gedung Infrastructure and Building Segment Productivity 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-miliar) (Rp-billion)	Persentase Percentage (%)	
Kontrak Baru New Contract	8.687	15.396	-6.709	-43,58%	↓
Kontrak Dihadapi Order Book	40.795	49.632	-8.837	-17,81%	↓

Sepanjang tahun 2024, kinerja segmen infrastruktur dan gedung merealisasikan kontrak baru sebesar Rp8.687 miliar, mengalami penurunan Rp6.709 miliar atau 43,58% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp15.396 miliar. Penurunan ini terjadi karena WIKA sedang menghadapi tantangan dalam kondisi bisnis, yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah tender proyek pada tahun 2024 akibat peralihan pemerintahan yang terjadi pada tahun tersebut.

Throughout 2024, the performance of the infrastructure and building segment realized new contracts amounting to Rp8,687 billion, a decrease of Rp6,709 billion or 43.58% compared to 2023 amounting to Rp15,396 billion. This decline occurred because WIKA was dealing with challenges in business conditions, caused by a decrease in the number of project tenders in 2024 due to the transition made by the government that occurred in that year.

Sementara itu, kontrak dihadapi pada segmen infrastruktur dan gedung, di tahun 2024, adalah sebesar Rp40.795 miliar, mengalami penurunan Rp8.837 miliar atau 17,81% dari tahun sebelumnya sebesar Rp49.632 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan kontrak baru ditambah lagi banyak kontrak lama WIKA yang telah diselesaikan.

Meanwhile, the order book in the infrastructure and building segment in 2024 was Rp40,795 billion, a decrease of Rp8,837 billion or 17.81% from the previous year's figure of Rp49,632 billion. The decrease was due to a decline in new contracts plus the completion of many of WIKA's old contracts.

Pendapatan serta Profitabilitas Segmen

Segment Revenue and Profitability

Pendapatan serta Profitabilitas Segmen Infrastruktur dan Gedung Infrastructure and Building Segment Revenue and Profitability 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Penjualan Sales	10.561.436	12.780.695	-2.219.259	-17,36	↓
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(9.963.278)	(11.884.161)	1.920.883	16,16	↑
Laba (Rugi) Bruto Gross Profit (Loss)	598.158	896.534	-298.376	-33,28	↓
Beban Usaha Operating Expenses	(762.482)	(659.197)	103.285	15,67	↑
Laba (Rugi) Ventura Bersama Profit (Loss) of Joint Venture	1.264.241	130.721	1.133.520	867,13	↑
Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi Share of Profit (Loss) of Associated Entities	-	-	-	-	-
Beban dari Pendanaan Financing Costs	(1.991.902)	(1.810.511)	181.391	10,02	↑
Beban Pajak Penghasilan Final Final Income Tax Expenses	(336.804)	-	-	-	-
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	2.447.939	(3.149.103)	2.447.939	177,73	↑



Pendapatan serta Profitabilitas Segmen Infrastruktur dan Gedung Infrastructure and Building Segment Revenue and Profitability 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	1.219.150	(4.591.556)	5.810.705	126,55	↑
Penghasilan (Beban) Pajak Tax Income (Expenses)	(77)	(18.584)	18.507	99,59	↑
Laba (Rugi) Neto Net Profit (Loss)	1.219.073	(4.610.140)	5.829.212	126,44	↑
Jumlah Aset Total Assets	55.807.402	46.002.624	9.804.778	21,31	↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	38.312.788	33.337.450	4.975.338	14,92	↑

Segmen infrastruktur dan gedung di tahun 2024 mencatatkan penjualan atau pendapatan sebesar Rp10.561 miliar, mengalami penurunan Rp2.219 miliar atau 17,36% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp12.780,70 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan kontrak baru dan dihadapi WIKA.

Sementara di tahun 2024, segmen infrastruktur dan gedung mencatatkan laba bersih sebesar Rp1.219 miliar, mengalami peningkatan Rp3.391 miliar atau 126% jika dibandingkan dengan rugi bersih yang dicatatkan di tahun 2023 sebesar Rp4.610,14 miliar. Hal ini disebabkan oleh pencatatan laba pada proyek *joint operation* WIKA dan adanya peningkatan pendapatan lain-lain pada segmen ini.

Segmen Energi dan Industrial Plant Penjelasan Segmen

Perseroan senantiasa mengembangkan potensinya di industri Energi dan Industrial Plant, meliputi jasa *Engineering Procurement and Construction* (EPC) di bidang ketenagalistrikan. Sementara, bidang *industrial plant* berfokus membangun suatu *processing plant* untuk meningkatkan proses produksi bagi industri-industri yang membutuhkan proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi, seperti pengolahan bahan tambang, pengolahan petrokimia, pabrik pengolahan migas, pabrik semen, bahan bakar biofuels, pabrik pupuk, dan pabrik minyak goreng.

Tantangan dan Strategi Peningkatan Kinerja Segmen

Segmen Energi dan *Industrial Plant* berhasil menghadirkan sejumlah pelayanan melalui jasa EPC, khususnya di bidang ketenagalistrikan. Melalui segmen ini, WIKA juga telah membangun sejumlah *processing plant* yang terdiri dari berbagai lingkup pekerjaan. Segmen energi dan *industrial plant* terus dikembangkan WIKA. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2024, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Akibat kondisi WIKA yang saat ini sedang dalam masa restrukturisasi dan mengalami tantangan kinerja keuangan, WIKA mengalami kendala dalam pemenuhan persyaratan keuangan maupun kontraktual dalam proses perolehan proyek dari pemberi kerja pada segmen ini;

The infrastructure and building segment in 2024 recorded sales or revenue of Rp10,561 billion, a decrease of Rp2,219 billion or 17,36% compared to 2023 which amounted to Rp12,780.70 billion. The decrease was due to a decrease in new contracts and order book of WIKA.

Meanwhile, in 2024, the infrastructure and building segment recorded a net profit of Rp1,219 billion, an increase of Rp3,391 billion or 126% compared to the net loss recorded in 2023 of Rp4,610.14 billion. This was due to profit recording on WIKA's joint operation project and an increase in other income in this segment.

Energy And Industrial Plant Segment Segment Explanation

The Company continuously develop its potency in the Energy and Industrial Plant segment, covering the Engineering Procurement and Construction (EPC) services in the electricity sector. Meanwhile, the industrial plant business focuses on building a processing plant to improve production processes for industries that require the processing of raw materials into finished materials, such as oil and gas processing plants, petrochemical processing plants, cement plants, biofuels, fertilizer factories, cooking oil factories, and mineral processing.

Challenges and Improvement Strategies of Segment Performance

The Energy and Industrial Plant segment has been successfully presenting a number of services through EPC services, especially in the electricity sector. Through this segment, WIKA has also built a number of processing plants consisting of various scopes of work. WIKA's continues to develop the energy and industrial plant segment. However, there were several challenges faced by the Company in 2024, including:

1. Due to WIKA's current situation, which is in the process of restructuring and facing financial performance challenges, WIKA is encountering difficulties in meeting financial and contractual requirements in the project acquisition process from clients in this segment;

2. Terbatasnya project owner di bidang *energy industrial plant*;
3. Adanya risiko-risiko kontraktual antara Para Pihak menjadi tidak seimbang (*unbalanced*) dan berdampak kepada kerugian Penyedia Jasa (risiko desain, risiko site investigation, risiko pelaksanaan konstruksi, risiko finansial, risiko performance dan lain-lain).

Perseroan telah menetapkan berbagai kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan kinerja segmen energi dan *industrial plant*, yakni sebagai berikut:

1. Dibutuhkan dukungan pemegang saham utama untuk memberikan relaksasi baik dalam pemenuhan persyaratan keuangan maupun kontraktual dalam proses perolehan proyek dari pemberi kerja segmen ini;
2. Ekspansi ke sektor yang memiliki keterkaitan dengan energi atau *industrial plant*, seperti fasilitas pengolahan air, konstruksi pelabuhan, atau infrastruktur pendukung lainnya;
3. Peningkatan tata kelola dan manajemen risiko dengan penerapan sistem for eyes principle untuk memastikan *check and balance* dalam seluruh proses disetiap aktivitas administrasi kontraktual.

2. The limited number of project owners in the energy industrial plant sector;
3. The existence of contractual risks between the parties becoming unbalanced, which impacts the service provider with losses (design risks, site investigation risks, construction implementation risks, financial risks, performance risks, and others).

The Company has established various strategic policies to improve the performance of energy and industrial plant segment, namely as follows:

1. Support from major shareholders is needed to provide relaxation in meeting both financial and contractual requirements in the project acquisition process from clients in this segment;
2. Expansion into sectors related to energy or industrial plants, such as water treatment facilities, port construction, or other supporting infrastructure;
3. Improvement in governance and risk management by implementing the four-eyes principle system to ensure checks and balances in all processes of contractual administration activities.

Produktivitas Segmen

Segment Productivity

Produktivitas Segmen Energi dan Industrial Plant Energy and Industrial Plant Segment Productivity 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-miliar) (Rp-billion)	Persentase Percentage (%)	
Kontrak Baru New Contract	4.050	4.923	-873	-17,73%	↓
Kontrak Dihadapi Order Book	9.663	9.717	-54	-0,56%	↓

Di tahun 2024, segmen energi dan *industrial plant* berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp4.050 miliar, mengalami penurunan Rp873 miliar atau 17,73% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp4.923 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan lelang kontrak dari *project owner* akibat tahun politik pada 2024, dimana banyak *project owner* melakukan aksi *wait and see* atas kebijakan pemerintahan baru.

In 2024, the energy and industrial plant segments managed to book new contracts amounting to Rp4,050 billion, a decrease of Rp873 billion or 17.73% compared to the previous year's figure of Rp4,923 billion. This decline was caused by a decrease in contract auctions from project owners due to the political year in 2024, where many project owners took a wait and see action on the policies of the new government.

Adapun kontrak dihadapi segmen energi dan *industrial plant*, di tahun 2024, tercatat sebesar Rp9.663 miliar, mengalami penurunan Rp54 miliar atau 0,56% dari tahun 2023 sebesar Rp9.717 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan kontrak baru segmen energi dan *industrial plant*.

The order book of the energy and industrial plant segments in 2024 was recorded at Rp9,663 billion, a decrease of Rp54 billion or 0.56% from 2023's figure of Rp9,717 billion. The decrease was due to a decline in new contracts in the energy and industrial plant segment.


Pendapatan serta Profitabilitas Segmen
Segment Revenue and Profitability
Pendapatan serta Profitabilitas Segmen Energi dan Industrial Plant
Pendapatan serta Profitabilitas Segmen Energi dan Industrial Plant
2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Penjualan Sales	3.334.977	4.101.581	-766.604	18,69	↓
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(3.042.782)	(3.858.747)	-815.965	-21,15	↓
Laba (Rugi) Bruto Gross Profit (Loss)	292.195	242.834	49.361	20,33	↑
Beban Usaha Operating Expenses	(104.460)	(106.894)	2.434	-2,28	↓
Laba (Rugi) Ventura Bersama Profit (Loss) of Joint Venture	1.359	(241.936)	243.294	100,56	↑
Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi Share of Profit (Loss) of Associated Entities	-	-	-	-	-
Beban dari Pendanaan Financing Costs	(58.634)	(85.136)	25.502	-31,13	↓
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	(743.393)	(515.263)	-228.130	44,27	↑
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	(612.934)	(706.395)	93.461	13,23	↑
Penghasilan (Beban) Pajak Tax Income (Expenses)	0	(28.322)	28.322	100,00	↑
Laba (Rugi) Neto Net Profit (Loss)	(612.934)	(734.717)	121.784	16,58	↑
Jumlah Aset Total Assets	4.566.544	4.143.794	422.750	10,20	↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.811.758	5.000.241	(1.188.483)	-23,77	↓

Penjualan atau pendapatan segmen energi dan *industrial plant* di tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.334,98 miliar, mengalami penurunan Rp766,60 miliar atau 18,69% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp4.101,58 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan kontrak baru segmen energi dan *industrial plant*.

Sementara di tahun 2024, segmen energi dan *industrial plant* mencatatkan rugi bersih sebesar Rp612,93 miliar, mengalami peningkatan Rp121,783 miliar atau 16,58% jika dibandingkan dengan rugi bersih yang dicatatkan di tahun 2023 sebesar Rp734,72 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya beban lain-lain.

Sales or revenue of the energy and industrial plant segment in 2024 was realized at Rp3,334.98 billion, a decrease of Rp766.60 billion or 18.69% compared to the previous year of Rp4,101.58 billion. The decrease was caused by a decline in new contracts in the energy and industrial plant segment.

Meanwhile, in 2024, the energy and industrial plant segment recorded a net loss of Rp612.93 billion, an increase of Rp121.783 billion or 16.58% compared to the net loss recorded in 2023 of Rp734.72 billion. This was due to the continued high level of other expenses.

Segmen Industri

Penjelasan Segmen

Perseroan melaksanakan usahanya pada segmen industri yang telah menghasilkan sejumlah produk yang mampu mendukung kompetensi inti Perseroan di bidang konstruksi, sehingga dapat mendorong integrasi bisnis antar WIKA Group sekaligus memperluas cakupan bisnis WIKA Group. Pada segmen ini, Perseroan melalui beberapa anak perusahaannya, senantiasa mengembangkan dan menciptakan sejumlah inovasi baru untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Segmen ini memiliki sejumlah variasi produk-produk sebagai pendukung aktivitas konstruksi, di antaranya:

1. Beton Pracetak, yaitu: produk beton pracetak, seperti *PC Poles*, *PC Piles*, *Railway Sleeper CP*, *Bridge Concrete*, *Sheet Pile*, *PC Pipes*, *RC Box Culvert*, *Marine Structure CP*, *HCS*, *PC Cylinder* dan *Rigid Pavement Fabricated*;
2. Fasilitas Industri, yaitu: fabrikasi baja dengan menghasilkan produk konstruksi baja, struktur rangka baja, *conveyor*, *pipe rack*, *tower telekomunikasi*, *tower transmisi listrik*, jembatan rangka baja, tangki baja, *silos*, *hopper*, *pressure vessel*, *welded beam*, dan *steel plate work* lainnya serta *aluminium casting* dan *plastic injection*;
3. Bitumen, yaitu: *granular asphalt* dan *extraction asphalt*.

Tantangan dan Strategi Peningkatan Kinerja Segmen

Sepanjang tahun 2024 telah menghadapi tantangan yang dihadapi WIKA dalam melakukan pengembangan segmen industri, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Persaingan Pasar yang Ketat, banyaknya pemain di industri ini menciptakan persaingan yang intens, baik dari perusahaan besar maupun produsen lokal kecil, meskipun saat ini anak perusahaan WIKA yaitu WIKA Beton masih menjadi market leader pada segmen ini;
2. Biaya Produksi yang Tinggi, Harga bahan baku seperti semen, pasir, dan agregat terus meningkat, sehingga biaya produksi juga naik. Selain itu, transportasi produk beton pracetak yang berat menambah biaya logistik;
3. Isu Lingkungan, Industri ini berkontribusi pada emisi karbon, yang menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan di era keberlanjutan.

Perseroan telah menetapkan berbagai kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan kinerja segmen industri, yakni sebagai berikut:

1. Inovasi Produk, Mengembangkan produk baru dengan teknologi modern, seperti beton pracetak berteknologi tinggi yang lebih ringan, tahan lama, dan hemat energi seperti beberapa teknologi yang diterapkan pada WIKA Beton yaitu penerapan roadmap dekarbonisasi;
2. Efisiensi Operasional, dengan Mengoptimalkan proses produksi dengan menggunakan teknologi otomatisasi untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk;
3. Optimalisasi Distribusi, Mengembangkan jaringan distribusi yang lebih efisien dan dekat dengan lokasi proyek untuk mengurangi biaya transportasi.

Industry Segment

Segment Explanation

The Company operates in the industry segment that has been producing a number of products that can support its core competencies in the construction sector, so as to encourage business integration between WIKA's Group and expand the business scope of WIKA's Group. In this segment, the Company through several Subsidiaries continues to develop and create a number of new innovations to improve the quality of industrial products produced. The industry segment has a variety of products to support construction activities, including:

1. Precast Concrete, namely: precast concrete products, such as PC Polishing, PC Piles, Railway Sleeper CP, Bridge Concrete, Sheet Pile, PC Pipes, RC Box Culvert, Marine Structure CP, HCS, PC Cylinder and Rigid Pavement Fabricated;
2. Industrial facilities, namely: steel fabrication by producing steel construction products, steel frame structures, conveyors, pipe racks, telecommunication towers, power transmission towers, steel truss bridges, steel tanks, silos, hoppers, pressure vessels, welded beams, and steel other plate work as well as aluminum casting and plastic injection;
3. Bitumen, namely: granular asphalt and extraction asphalt.

Challenges and Improvement Strategies of Segment Performance

Throughout 2024, the challenges faced by WIKA's in developing the industry segment, among others are:

1. Tight market competition, with many players in this industry creating intense competition, both from large companies and small local producers, although currently, WIKA's subsidiary, WIKA Beton, remains the market leader in this segment;
2. High production costs, with raw material prices such as cement, sand, and aggregates continuing to rise, leading to higher production costs. Additionally, the transportation of heavy precast concrete products adds to logistics costs;
3. Environmental issues, as this industry contributes to carbon emissions, which are a major concern in environmental management in the era of sustainability.

The Company has established a number of strategic policies in order to improve the performance of industry segment, as follows:

1. Product innovation, developing new products with modern technology, such as high-tech precast concrete that is lighter, more durable, and energy-efficient, like some of the technologies applied at WIKA Beton, including the implementation of a decarbonization roadmap;
2. Operational efficiency, by optimizing the production process using automation technology to reduce production costs and improve product quality;
3. Distribution optimization, developing a more efficient distribution network closer to project locations to reduce transportation costs.



Produktivitas Segmen

Segment Productivity

Produktivitas Segmen Industri Industry Segment Productivity 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-miliar) (Rp-million)	2023 (Rp-miliar) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-miliar) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Kontrak Baru New Contract	6.539	7.497	-958	-12,78%	↓
Kontrak Dihadapi Order Book	9.590	8.927	663	7,43%	↑

Sepanjang tahun 2024, segmen industri membukukan kontrak baru senilai Rp6.539 miliar, menurun Rp958 miliar atau 12,78% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp7.497 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan utilisasi pabrik beton di anak usaha WIKA, yaitu WIKA Beton.

Throughout 2024, the industrial segment managed to book new contracts worth Rp6,539 billion, decreased by Rp958 billion or 12,78% compared to the previous year of Rp7,497 billion. This decrease was due to the decrease in the utilization of concrete plants at WIKA's subsidiary, WIKA Beton.

Adapun kontrak dihadapi segmen industri di tahun 2024, tercatat sebesar Rp9.590 miliar, meningkat Rp663 miliar atau 7,43% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp8.927 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh mayoritas kontrak dihadapi segmen industri adalah supply untuk proyek yang memiliki tipe *multi years contract*.

Meanwhile, the order book of the industrial segment in 2024 was recorded at Rp9,590 billion, an increase of Rp663 billion or 7,43% compared to 2023 amounting to Rp8,927 billion. The increase was due to the majority of order book of the industrial segment being supplies for projects that have a multi-year contract.

Pendapatan serta Profitabilitas Segmen

Segment Revenue and Profitability

Pendapatan serta Profitabilitas Segmen Industri Industry Segment Revenue and Profitability 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Penjualan Sales	5.295.532	5.017.322	278.210	5,54	↑
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(4.899.227)	(4.652.857)	(246.370)	5,30	↑
Laba (Rugi) Bruto Gross Profit (Loss)	396.305	364.465	31.840	8,74	↑
Beban Usaha Operating Expenses	(189.400)	(49.104)	-140.296	285,71	↑
Laba (Rugi) Ventura Bersama Profit (Loss) of Joint Venture	(1.586)	453	-2.039	-450,11	↓
Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi Share of Profit (Loss) of Associated Entities	-	(1.620)	1.620	100,00	↑
Beban dari Pendanaan Financing Costs	(70.962)	(83.994)	13.032	15,52	↑
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	(46.041)	(43.022)	-3.019	-7,02	↓
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	88.316	187.178	(98.862)	-52,82	↓

Pendapatan serta Profitabilitas Segmen Industri Industry Segment Revenue and Profitability 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Penghasilan (Beban) Pajak Tax Income (Expenses)	(39.841)	(63.442)	23.601	-37,20	↑
Laba (Rugi) Neto Net Profit (Loss)	48.475	123.736	(75.260)	-60,82	↓
Jumlah Aset Total Assets	10.546.521	10.633.107	(86.686)	-0,82	↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	7.267.076	6.192.210	1.074.866	17,36	↑

Di tahun 2024, penjualan atau pendapatan segmen industri terealisasi sebesar Rp5.295 miliar, mengalami peningkatan Rp278 miliar atau 5,54% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp5.017,32 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya upaya perbaikan prosedur penjualan pada segmen ini.

Sementara di tahun 2024, segmen industri mencatatkan laba bersih sebesar Rp48,47 miliar, mengalami penurunan Rp75 miliar atau 60,82% jika dibandingkan dengan laba bersih yang dicatatkan di tahun 2023 sebesar Rp123,74 miliar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban usaha segmen industri.

Segmen Realiti dan Properti Penjelasan Segmen

Perseroan melaksanakan usahanya pada segmen realiti dan properti yang dijalankan WIKA melalui WIKA Realty merupakan entitas anak perusahaan, mencakup beberapa pengerjaan dan pengelolaan berbagai jenis hunian, mulai dari *landed house*, *highrise building* (*apartemen*, *condotel*, dan *office mixed use*), serta *industrial estate*. Di samping itu, Perseroan juga menjalankan *property management* yang didukung juga oleh WIKA Realty, untuk mendorong pengembangan operasional di segmen realiti dan properti menjadi semakin optimal. WIKA Realty juga terus mengembangkan produk unggulannya, yakni Tamansari, yang merupakan konsep hunian dengan memadukan keindahan alam dan arsitektur modern serta kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia, untuk menciptakan hunian yang asri dan nyaman sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. WIKA juga menjalankan bisnis perhotelan melalui WIKA Realty, di mana WIKA Realty saat ini tengah menjalankan perannya sebagai Holding Hotel BUMN.

Tantangan dan Strategi Peningkatan Kinerja Segmen

Sepanjang tahun 2024 WIKA telah menghadapi tantangan dalam melakukan pengembangan segmen industri, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Persaingan Pasar yang Ketat, Banyaknya pengembang properti yang bersaing, terutama di kota-kota besar, membuat diferensiasi menjadi hal yang sulit.
2. Fluktuasi Ekonomi dan Daya Beli Konsumen, Ketergantungan pada stabilitas ekonomi, inflasi, dan suku bunga yang memengaruhi daya beli masyarakat.

In 2024, sales or revenue of the industrial segment were realized at Rp5,295 billion, increased by Rp278 billion or 5.54% compared to the previous year's figure of Rp5,017.32 billion. This increase was due to efforts to improve sales procedures in this segment.

Meanwhile, in 2024, the industrial segment recorded a net profit of Rp48.47 billion, a decrease of Rp75 billion or 60.82% compared to the net profit recorded in 2023 of Rp123.74 billion. This was due to the increase in operating expenses of the industrial segment.

Realty And Property Segment Segment Explanation

The Company operates in the realty and property segment, which is carried out through WIKA's Realty, a subsidiary, includes several types of residential construction, ranging from landed houses, high-rise buildings (apartments, condotels, and mixed-use offices), as well as industrial estates. In addition, the Company also runs property management that is also supported by its subsidiary, WIKA's Realty, to encourage development in the realty sector for more optimal operations of realty and property segment. WIKA's Realty continues to develop its superior product, Tamansari, which is a residential concept by combining natural beauty and modern architecture with local wisdom in various regions in Indonesia to create beautiful and comfortable residences and improve the quality of life of the people. WIKA's also runs hotel business through WIKA's Realty, where WIKA's Realty is currently carrying out its role as an SOE Hotel Holding.

Challenges and Improvement Strategies of Segment Performance

Throughout 2024, WIKA has faced challenges in developing the industrial segment, including the following:

1. Intense Market Competition, The large number of property developers competing, especially in major cities, makes differentiation a difficult task.
2. Economic Fluctuations and Consumer Purchasing Power, Dependence on economic stability, inflation, and interest rates which affect the purchasing power of the public.



- Regulasi Pemerintah, Kebijakan terkait pajak properti, perizinan, dan tata ruang seringkali menjadi kendala.

- Government Regulations, Policies related to property taxes, permits, and spatial planning often become obstacles.

Perseroan telah menetapkan berbagai kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan kinerja segmen realti dan properti, yakni sebagai berikut:

The Company has established various strategic policies in order to improve the performance of realty and property segment, as follows:

- Melakukan Analisa Berbasis Data Menggunakan data untuk memahami tren pasar, preferensi konsumen, dan pola pembelian.
- Mengidentifikasi segmen pasar potensial berdasarkan data demografi dan ekonomi wilayah tertentu.
- Melibatkan diri dalam program/kebijakan pemerintah terkait pembangunan 3 juta rumah.

- Conducting Data-Based Analysis, Using data to understand market trends, consumer preferences, and buying patterns.
- Identifying potential market segments based on demographic and economic data of specific regions.
- Engaging in government programs/policies related to the construction of 3 million houses.

Produktivitas Segmen

Segment Productivity

Produktivitas Segmen Realti dan Properti

Produktivitas Segmen Realti dan Properti

2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-miliar) (Rp-miliar)	2023 (Rp-miliar) (Rp-miliar)	Kenaikan/Penurunan Kenaikan/Penurunan		
			Nominal (Rp-miliar) (Rp-miliar)	Persentase Persentase (%)	
Kontrak Baru New Contract	1.291	1.346	-55	-4,09%	↓
Kontrak Dihadapi Order Book	1.962	2.102	-140	-6,66%	↓

Di tahun 2024, segmen realti dan properti membukukan kontrak baru senilai Rp1.291 miliar, mengalami penurunan Rp55 miliar atau 4,09% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.346 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya daya beli konsumen atas industri property.

In 2024, the realty and property segment successfully booked new contracts worth Rp1,291 billion, decreased by Rp55 billion or 4.09% from the previous year which amounted to Rp1,346 billion. This decrease was due to the decline in consumer purchasing power in the property industry.

Adapun kontrak dihadapi pada segmen realti dan properti, di tahun 2024, tercatat sebesar Rp1.962 miliar, turun Rp140 miliar atau 6,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.102 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya kontrak baru segmen realti dan properti.

Meanwhile, the order book in the realty and property segment, in 2024, was recorded at Rp1,962 billion, down Rp140 billion or 6.66% compared to the previous year's figure of Rp2,102 billion. The decrease was due to a decline in new contracts in the real estate and property segment.

Pendapatan serta Profitabilitas Segmen

Segment Revenue and Profitability

Pendapatan serta Profitabilitas Segmen Realti dan Properti

Realty and Property Segment Revenue and Profitability

2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase Persentase (%)	
Penjualan Sales	1.042.062	600.410	441.652	73,56	↑
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(823.895)	(381.449)	(442.446)	115,99	↓
Laba (Rugi) Bruto Gross Profit (Loss)	218.167	218.961	(794)	0,36	↓

Pendapatan serta Profitabilitas Segmen Realiti dan Properti

Realty and Property Segment Revenue and Profitability

2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Beban Usaha Operating Expenses	(155.464)	(140.510)	14.954	10,64	↓
Laba (Rugi) Ventura Bersama Profit (Loss) of Joint Venture	231	(177)	408	230,51	↑
Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi Share of Profit (Loss) of Associated Entities	-	1.066	-	-	↑
Beban dari Pendanaan Financing Costs	(932.562)	(905.688)	(26.874)	2,97	↑
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	(375.201)	(1.434.289)	1.059.088	73,84	↑
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	(1.244.829)	(2.260.637)	1.015.808	99,59	↑
Penghasilan (Beban) Pajak Tax Income (Expenses)	(236)	(58.015)	57.779	99,59	↑
Laba (Rugi) Neto Net Profit (Loss)	(1.245.065)	(2.318.652)	1.073.587	46,30	↑
Jumlah Aset Total Assets	16.450.269	14.176.315	2.273.954	16,04	↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	12.880.890	12.756.767	124.123	0,97	↓

Penjualan atau pendapatan segmen realiti dan properti di tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.469 miliar, mengalami peningkatan Rp427 miliar atau 41,02% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.042 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan tersebut disebabkan pertumbuhan pariwisata yang berdampak pada peningkatan kontribusi sektor hotel dari pasar sehingga meningkatkan minat pada sektor realiti properti.

Sementara di tahun 2024, segmen realiti dan properti mencatatkan rugi bersih sebesar Rp1.245 miliar, mengalami peningkatan laba Rp984 miliar atau 44% jika dibandingkan dengan rugi bersih yang dicatatkan di tahun 2023 sebesar Rp2.229 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan beban lain-lain jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Segmen Investasi Penjelasan Segmen

Melalui segmen investasi, Perseroan telah mengelola di bidang energi, infrastruktur dan air, di mana sampai dengan tahun 2024, WIKA telah melakukan investasi pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ambon 25MW, Maluku, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Borang 2x30 MW, Sumatera Selatan, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Marine fuel Oil (MFO) 50 MW di Pesanggaran, Bali, dan jalan tol yang menghubungkan Surabaya dengan Mojokerto, serta investasi pada usaha penyediaan air minum. WIKA juga melakukan penyertaan pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang merupakan konsorsium pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Sales or revenue of the realty and property segment in 2024 was realized at Rp1,469 billion, an increase of Rp427 billion or 41.02% compared to the previous year's figure of Rp1,042 billion. This increase was due to tourism growth, which has had an impact on the increased contribution of hotel sector from the market, thus increasing interest in the real estate sector.

Meanwhile, in 2024, the realty and property segment recorded a net loss of Rp1,245 billion, an increase of Rp984 billion or 44% compared to the net loss recorded in 2023 of Rp2,229 billion. This was due to a decrease in other income expenses when compared to the previous year.

Investment Segment Segment Explanation

Through the investment segment, the Company has been managing the energy, infrastructure and water sector. Until 2024, WIKA has invested in Ambon 25MW Diesel Power Plant (PLTD) in Maluku, Borang 2x30 MW Gas Power Plant (PLTG) in South Sumatra, Marine Fuel Oil (MFO) 50 MW Diesel Power Plant (PLTD) in Pesanggaran, Bali, and toll road connecting Surabaya with Mojokerto, as well as investment in the drinking water supply business. WIKA also made an investment in PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) which is a consortium for Jakarta-Bandung High-Speed Train project.



Tantangan dan Strategi Peningkatan Kinerja Segmen

Sepanjang tahun 2024 telah menghadapi tantangan yang dihadapi WIKA dalam melakukan pengembangan segmen investasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum menghasilkan hasil usaha yang baik ketidakstabilan kondisi pasar lokal dan global industri.
2. Keterbatasan kondisi likuiditas Badan Usaha pengampu investasi WIKA.
3. Keterbatasan likuiditas Perseroan serta kondisi Perseroan yang sedang berada dalam fase standstill dan restrukturisasi.

Perseroan telah menetapkan berbagai kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan kinerja segmen investasi, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan penjajakan untuk melancarkan proses divestasi.
2. Menganalisa strategi dan evaluasi atas aset investasi.
3. Mengedepankan analisa resiko atas eksekusi divestas.

Produktivitas Segmen

Challenges and Improvement Strategies of Segment Performance

Throughout 2024, the challenges faced by WIKA in developing the investment segment, among others are:

1. Has not generated good business results due to the instability of local and global market conditions in the industry.
2. Limited liquidity conditions of the investment-holding entity of WIKA.
3. Limited liquidity of the company and its condition being in a standstill and restructuring phase.

The Company has established a number of strategic policies in order to improve the performance of investment segment, namely as follows:

1. Conducting exploration to smooth the divestment process.
2. Analyzing strategies and evaluating investment assets.
3. Prioritizing risk analysis for the execution of divestment.

Segment Productivity

Produktivitas Segmen Investasi Investment Segment Productivity 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-miliar) (Rp-miliar)	2023 (Rp-miliar) (Rp-miliar)	Kenaikan/Penurunan Kenaikan/Penurunan		
			Nominal (Rp-miliar) (Rp-miliar)	Persentase Persentase (%)	
Kontrak Baru New Contract	85	85	-	0,00%	-
Kontrak Dihadapi Order Book	3.046	3.527	-481	-13,64%	↓

Nilai kontrak baru yang dibukukan Perseroan di tahun 2024, melalui segmen investasi adalah sebesar Rp85 miliar, nilai ini sama jika dibandingkan dengan tahun 2023 nilai kontrak baru sebesar Rp85 miliar.

Adapun kontrak dihadapi pada segmen investasi di tahun 2024 adalah sebesar Rp3.046 miliar, mengalami penurunan Rp481 miliar atau 13,64% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.527 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa proyek investasi WIKA telah menyelesaikan proses konstruksi.

The value of new contracts booked by the Company in 2024, through the investment segment, amounted to Rp85 billion. This value is the same when compared to the new contract value of Rp85 billion in 2023.

The order book in the investment segment in 2024 amounted to Rp3,046 billion, a decrease of Rp481 billion or 13.64% compared to the previous year's figure of Rp3,527 billion. This decrease was due to the construction process of several WIKA investment projects have been completed.

Pendapatan serta Profitabilitas Segmen

Segment Revenue and Profitability

Pendapatan serta Profitabilitas Segmen Investasi Investment Segment Revenue and Profitability 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Penjualan Sales	154.811	83.865	70.946	84,60	↑
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(141.033)	(86.034)	(54.999)	63,93	↓
Laba (Rugi) Bruto Gross Profit (Loss)	13.778	(2.169)	15.947	735,22	↑
Beban Usaha Operating Expenses	(9.060)	(20.528)	11.468	55,87	↑
Laba (Rugi) Ventura Bersama Profit (Loss) of Joint Venture	(1.528.916)	(57.446)	1.471.470	2.561,48	↑
Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi Share of Profit (Loss) of Associated Entities	(251.697)	(86.202)	(165.495)	191,99	↑
Beban dari Pendanaan Financing Costs	(225.683)	(277.645)	51.962	18,72	↑
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	(2.942)	(21.427)	18.485	86,27	↓
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	(2.004.520)	(465.417)	(1.539.103)	330,69	↓
Penghasilan (Beban) Pajak Tax Income (Expenses)	(12.267)	(6.661)	(5.606)	84,16	↓
Laba (Rugi) Neto Net Profit (Loss)	(2.016.787)	(472.078)	(1.544.709)	327,21	↓
Jumlah Aset Total Assets	4.701.872	5.124.034	(422.208)	8,24	↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.433.714	4.141.696	(707.982)	17,09	↑

Di tahun 2024, penjualan atau pendapatan segmen investasi terealisasi sebesar Rp154,81 miliar, mengalami peningkatan Rp70,95 miliar, atau 84,60% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp83,87 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa aset investasi WIKA menunjukkan peningkatan arus jalan tol.

Adapun di tahun 2024, segmen investasi mencatatkan rugi bersih sebesar Rp2.016,79 miliar, mengalami penurunan Rp1.544,71 miliar, atau 327,21% jika dibandingkan dengan rugi bersih yang dicatatkan di tahun 2023 sebesar Rp472,08 miliar. Hal ini disebabkan oleh pencatatan beban kerugian penyertaan WIKA pada PT PSBI untuk Kereta cepat Jakarta Bandung

In 2024, sales or revenue from the investment segment amounted to Rp154.81 billion, an increase of Rp70.95 billion, or 84.60% compared to the previous year's amount of Rp83.87 billion. This increase was caused by several WIKA investment assets showing an increase in toll road traffic.

As for 2024, the investment segment recorded a net loss of Rp2.016.79 billion, a decrease of Rp1.544.71 billion, or 327.22% compared to the net loss recorded in 2023 of Rp472.08 billion. This was caused by the recording of WIKA's investment loss burden in PT PSBI for Jakarta-Bandung high-speed train.



Segmen Geografis

Geographic Segment

Kinerja Segmen Geografis Geographic Segment Performance 2022-2023

Uraian Description	Nilai Aset Tercatat Carrying Asset Value			Pendapatan Revenue			Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year		
	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Pertumbuhan Growth (%)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Pertumbuhan Growth (%)	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Pertumbuhan Growth (%)
Indonesia Indonesia	63.553.125	65.742.025	-3,33	19.242.727	22.528.969	-14,59	(2.513.814)	(6.291.205)	60,04
Luar Negeri Overseas	-	239.211	-100	-	1.387	-100	-	(1.533.334)	100
Jumlah Total	63.553.125	65.981.236	-3,68	19.242.727	22.530.356	-14,59	(2.513.814)	(7.824.539)	67,87

Per 31 Desember 2024, nilai aset tercatat Perseroan berdasarkan segmen geografis mengalami penurunan 3,33% dibanding tahun sebelumnya. Sementara pendapatan Perseroan berdasarkan segmen geografis mengalami penurunan 14,59% dibanding tahun sebelumnya. Sementara di tahun 2024, berdasarkan segmen geografis, Perseroan mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp2.513,81 miliar mengalami peningkatan 67,87% dibanding tahun sebelumnya dengan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7.824,54 miliar.

As of December 31, 2024, the Company's carrying asset value by geographic segment decreased by 3.33% compared to the previous year. Meanwhile, the Company's revenue by geographic segment decreased by 14.59% compared to the previous year. Meanwhile, in 2024, by geographic segment, the Company recorded a net loss for the year of Rp2,513.81 billion, an increase of 67.87% compared to the previous year with a net loss for the year of Rp7,824.54 billion..

Tinjauan Keuangan

Financial Overview



Analisis dan pembahasan kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini telah mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta peraturan-peraturan yang berlaku.

The financial performance analysis and discussion in this Annual Report referred to the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk which has been audited by Public Accountant Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with unqualified opinion for the years ended December 31, 2024 and 2023.

The Company's Consolidated Financial Statements were prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia (SAK), which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board-Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI), as well as applicable regulations.



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI

STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

Aset

Assets

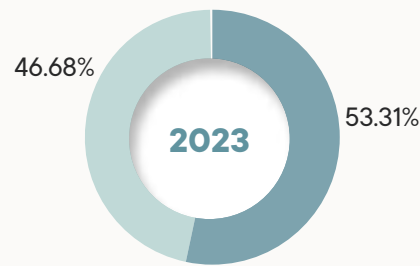
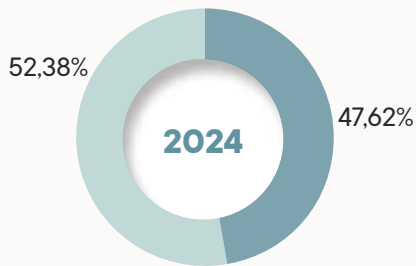
Tabel Aset
Assets
2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Aset Lancar Current Assets	30,238,519	30,801,656	-563,137	-1.83	↓
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	33,317,824	35,179,580	-1,861,756	-5.29	↓
Jumlah Aset Total Assets	63,556,343	65,981,236	-2,424,893	-3.68	↓

Per 31 Desember 2024, jumlah aset Perseroan tercatat sebesar Rp63.556 miliar, mengalami penurunan RpRp2.425 miliar atau 3,68% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp65.981,24 miliar. Penurunan ini lebih disebabkan oleh menurunnya saldo piutang perseroan.

As of December 31, 2024, the Company's total assets were recorded at Rp63,556 billion, a decrease of RpRp2.425 billion or 3.68% compared to the previous year of Rp65,981.24 billion. This decrease was mainly due to the decline in the Company's trade receivables balance.

Komposisi Aset
Assets Composition
2023-2024



● Aset Lancar
 Current Assets

● Aset Tidak Lancar
 Non-Current Assets

Aset Lancar

Current Assets

Tabel Aset Lancar
Current Assets
2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	3,361,003	3,233,071	127,932	3,96	↑
Bank Dibatasi Penggunaannya Restricted Banks	2.392.794	-			
Piutang Usaha - Neto Trade Receivables - Net	-	-			
Pihak Berelasi Related Parties	854.345	1.594.511	-740.166	-46,42	↓
Pihak Ketiga Third Parties	1.475.905	1.715.811	-239.906	-13,98	↓
Piutang Retensi - Neto Retention Receivables - Net	-	-			
Pihak Berelasi Related Parties	521.173	684.996	-163.823	-23,92	↓
Pihak Ketiga Third Parties	762.631	887.100	-124.469	-14,03	↓
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Neto Gross Amount Due from Customers - Net	-	-			
Pihak Berelasi Related Parties	1.025.174	1.171.734	-146.560	-12,51	↓
Pihak Ketiga Third Parties	718.331	1.291.316	-572.985	-44,37	↓
Piutang yang Belum Ditagih Unbilled Receivables	709.596	754.219	-44.623	-5,92	↓
Piutang Lain-Lain - Bagian Lancar Other Receivables - Current	-	-			
Pihak Berelasi Related Parties	257.196	277.628	-20.432	-7,36	↓
Pihak Ketiga Third Parties	146.817	22.168	124.649	562,29	↑
Persediaan Inventories	11.507.713	11.411.412	96.301	0,84	↑
Uang Muka - Bagian Lancar Advances - Current	594.732	879.097	-284.365	-32,35	↓
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	1.309.123	1.567.878	-258.755	-16,50	↓
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Advances	649.384	965.398	-316.014	-32,73	↓
Jaminan Usaha Business Guarantees	372.139	342.873	29.266	8,54	↑
Pekerjaan dalam Proses Work in Progress	3.312.548		3.312.548		
Pihak Berelasi Related Parties	1.590.622	2.687.489	-1.096.867	-40,81	↓



Tabel Aset Lancar Current Assets 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pihak Ketiga Third Parties	1,721,925	1,314,955	406,970	30,95	↑
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	30,238,519	30,801,656	(563,137)	-1,83	↓

Perseroan berhasil mencatat jumlah aset lancar sebesar Rp30.238 miliar di tahun 2024, mengalami penurunan Rp3.197 miliar atau 1,83% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp30.801 miliar. Penurunan ini lebih disebabkan oleh menurunnya piutang-piutang Perseroan yang merupakan dampak dari kebijakan Perseroan yang fokus terhadap *cash* dan percepatan penagihan piutang.

Kas dan Setara Kas

Hingga akhir 2024, Perseroan mencatatkan kas dan setara kas sebesar Rp3,361 miliar, mengalami peningkatan Rp128 miliar atau 3,96% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3,233 miliar. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh Penerimaan dana PMN sebesar Rp6 Triliun yang di terima Perseroan pada 2024.

Piutang Usaha

Di tahun 2024, Perseroan mencatatkan piutang usaha sebesar Rp2.330,25 miliar, mengalami penurunan Rp980,07 miliar atau 29,60% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp3,310 miliar. Penurunan ini lebih disebabkan oleh pencairan ataupun pembebanan piutang piutang yang produktif maupun yang kurang produktif.

Persediaan

Hingga akhir 2024, nilai persediaan Perseroan tercatat Rp11.507,71 miliar, meningkat Rp96,301 miliar atau 0,84%, dari Rp11,411,41 miliar di tahun 2023. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh pembatalan pesanan persediaan property Perseroan.

The Company managed to record current assets of Rp30,238 billion in 2024, a decrease of Rp3,197 billion or 1.83% compared to 2023 which was Rp30,801.66 billion. This decline was due to the decrease in the Company's receivables as an impact of the Company's policy of focusing on cash and accelerating receivables collection.

Cash and Cash Equivalents

Until the end of 2024, the Company recorded cash and cash equivalents of Rp3,361 billion, increased by Rp128 billion or 3.96% compared to 2023 which was recorded at Rp3,233 billion. This increase was due to the PMN funds of Rp6 trillion received by the Company in 2024.

Trade Receivables

In 2024, the Company recorded trade receivables of Rp2,330.25 billion, a decrease of Rp980.07 billion or 29.60% compared to the previous year of Rp3,310 billion. This decrease was driven by the disbursement or burdening of productive and less productive receivables.

Inventory

Until the end of 2024, the Company's inventory value was recorded at Rp11,507.71 billion, an increase of Rp 96.301 billion or 0.84%, from Rp 11,411.41 billion in 2023. This increase was mainly due to the cancellation of the Company's property inventory orders.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Jumlah Aset Tidak Lancar
Total Non-Current Asset
2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Tanah untuk Pengembangan Real Estate Assets	1,438,576	2,103,448	(664,872)	-31,61	↓
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associates	2.708.297	1.854.701	853,596	46,02	↑
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Ventures	11.388.953	12.022.212	-633,259	-5,27	↓
Properti Investasi - Neto Investment Property - Net	1.319.968	1.308.364	11,604	0,89	↑
Aset Tetap - Neto Fixed Assets - Net	5.330.447	8.115.700	-2,785,253	-34,32	↓
Aset Kerja Sama Operasi Joint Operation Assets	256.993	267.839	-10,846	-4,05	↓
Goodwill Goodwill	4.847	4.847	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Lainnya Other Long Term Investments	1.034.565	1.029.675	4,890	0,47	↑
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	9.138.763	7.601.854	1.536.909	20,22	↑
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	18,261	32,192	-13,931	-43,28	↓
Aset Lain-Lain Other Assets	678,151	838,747	-160,596	-19,15	↑
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	33,317,824	35,179,579	-1,861,755	-5,29	↓

Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp33,318 miliar, menurun Rp1,862 miliar atau 5,29% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp35,179,58 miliar. Penurunan ini lebih disebabkan oleh pelapasan aset-aset perseroan yang kurang produktif.

As of December 31, 2024, the Company recorded non-current assets of Rp33,318 billion, a decrease of Rp1,862 billion or 5,29% compared to 2023 amounted to Rp35,179.58 billion. This decrease was due to the disposal of the Company's less productive assets.

Investasi pada Entitas Asosiasi

Per 31 Desember 2024, Perseroan berhasil membukukan jumlah investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp2.708,29 miliar, meningkat Rp853 miliar atau 46,02% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.854,70 miliar. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh adanya tambahan penyertaan saham pada Entitas Asosiasi.

Investments in Associates

As of December 31, 2024, the Company managed to record investment in associates amounted to Rp2,708.29 billion, an increase of Rp853 billion or 46,02% from the previous year of Rp1,854.70 billion. This increase was mainly due to the additional investment in shares in the Associates.



Investasi pada Ventura Bersama

Jumlah investasi pada ventura bersama mengalami penurunan Rp633,25 miliar atau 5,27% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp12.022,21 miliar menjadi Rp11.338 miliar di tahun 2024. Penurunan ini lebih disebabkan oleh telah selesainya proyek- proyek JO dan pembukuan rugi PSBI.

Investasi Jangka Panjang Lainnya

Per 31 Desember 2024, jumlah investasi jangka panjang lainnya tercatat sebesar Rp1.034,56 miliar, meningkat Rp4,90 miliar atau 0,47% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.029,67 miliar. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh pembukuan rugi oleh entitas asosiasi dengan kepemilikan dibawah 20%.

Aset Tak Berwujud

Di tahun 2024, Perseroan mencatatkan jumlah aset tak berwujud sebesar Rp9.138,76 miliar, meningkat Rp1.536 miliar atau 20,22% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp7.601,85 miliar. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh penambahan pembukuan Aset tak berwujud atas hak konsesi.

Liabilitas

Investments in Joint Ventures

The amount of investment in joint ventures decreased by Rp633.25 billion or 5.27% from Rp12,022.21 billion in the previous year to Rp11,338 billion in 2024. This decrease was attributed to the completion of JO projects and PSBI's loss bookkeeping.

Other Long-term Investments

As of December 31, 2024, the amount of other long-term investments was recorded at Rp1,034.56 billion, an increase of Rp4.90 billion or 0.47% compared to 2023 of Rp1,029.67 billion. This increase was mainly due to the recording of losses by associates with ownership below 20%.

Intangible Assets

In 2024, the Company recorded intangible assets amounting to Rp9,138.76 billion, an increase of Rp1,536 billion or 20.22% compared to 2023 which was Rp7,601.85 billion. This increase was caused by the addition of intangible assets for concession rights.

Liabilities

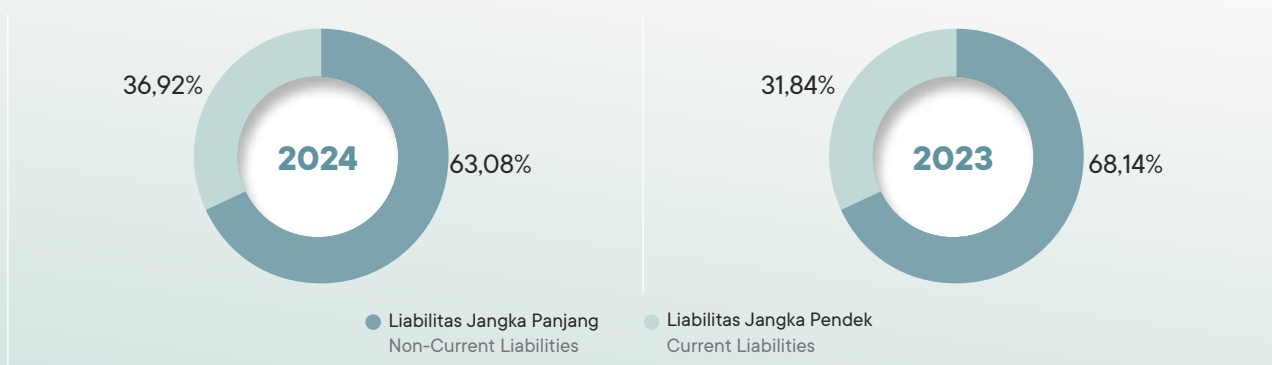
Tabel Liabilitas
 Liabilities
 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	19,023,300	38,437,294	-19,413,994	-50,51	↓
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	32,661,623	17,972,329	14,689,294	81,73	↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	51,684,923	56,409,623	-4,724,700	-8,38	↓

Di tahun 2024, jumlah liabilitas mengalami penurunan Rp4,725 miliar atau 8,38% dari tahun 2023 yang sebesar Rp56.409,62 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang vendor serta pembayaran Pokok Obligasi dan Sukuk yang jatuh tempo maupun dengan opsi beli (call option).

In 2024, total liabilities decreased by Rp4.725 billion or 8.38% from 2023 which was Rp56,409.62 billion. This decline was due to the payment of vendor debts and the payment of the Principal of Bonds and Sharia Bonds that were due or with a call option.

Komposisi Liabilitas
 Liabilities Composition
 2023-2024



Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities
2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pinjaman Jangka Pendek Short-Term Loans					
Pihak Berelasi Related Parties	350,000	12.759.484	-12.409.484	-97,26	↓
Pihak Ketiga Third Parties	203,144	4.853.650	-4.650.506	-95,81	↓
Utang Usaha Trade Payables	-	-	-	-	
Pihak Berelasi Related Parties	1.154.633	2.582.665	-1.428.032	-55,29	↓
Pihak Ketiga Third Parties	4.899.633	6.757.179	-1.857.546	-27,49	↓
Utang Lain-Lain Other Payables	-	-	-	-	
Pihak Berelasi Related Parties	750.726	803.545	-52.819	-6,57	↓
Pihak Ketiga Third Parties	268.968	138.738	130.230	93,87	↑
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja Gross Amount Due from Customers					
Utang Pajak Tax Liabilities	316.513	757.470	-440.957	-58,21	↓
Uang Muka dari Pelanggan Advances from Customers	1.284.705	602.423	682.282	113,26	↑
Beban Akrua Accrued Expenses	5.515.315	5.399.695	115.620	2,14	↑
Pendapatan Diterima di Muka Unearned Revenues	183.078	294.179	-111.101	-37,77	↓
Bagian Jangka Pendek dari: Current Portion of:					
Pinjaman Jangka Menengah Medium Term Notes	-	1.545.000	-	-	-
Utang Sewa Pembiayaan Lease Liabilities	30.604	44.129	-13.525	-30,65	↓
Pinjaman Jangka Panjang Long-Term Loans	1.651.001	189.334	1.461.667	772,00	↑
Obligasi Bonds	1.733.750	1.066.000	667.750	62,64	↓
Sukuk Mudharabah Mudharabah Sharia Bonds	681.225	643.800	37.425	5,81	↑
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	25.077.567	38.437.294	-13.359.727	-34,76	↓



Di tahun 2024, Perseroan mencatatkan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp20,078 miliar, menurun Rp13,360 miliar atau 34,76 dari tahun 2023 sebesar Rp38.437,29 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh reklasifikasi pinjaman jangka pendek yang sebelumnya pada liabilitas jangka pendek menjadi ke pinjaman jangka panjang pada liabilitas jangka panjang.

Pinjaman Jangka Pendek

Di akhir tahun 2024, jumlah pinjaman jangka pendek Perseroan tercatat sebesar Rp553 miliar, menurun Rp17,060 miliar atau 96,86% dari tahun sebelumnya sebesar Rp17,613 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh reklasifikasi pinjaman jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang dampak dari perjanjian MRA (*Master Restructuring Agreement*).

Utang Usaha

Per 31 Desember 2024, utang usaha Perseroan tercatat sebesar Rp6,054 miliar, menurun Rp3,285 miliar atau 35,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari Rp9,339,84 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran hutang-hutang konstruksi.

Liabilitas Jangka Panjang

In 2024, the Company recorded current liabilities of Rp20.078 billion, decreased by Rp13.360 billion or 34,76 from 2023 of Rp38,437.29 billion. This decrease was a result of the reclassification of short-term loans from current liabilities to long-term loans in non-current liabilities.

Short-Term Loans

At the end of 2024, the Company's short-term loans amounted to Rp553 billion, decreased by Rp17.060 billion or 96.86% from the previous year of Rp17,613 billion. This decrease occurred because of the reclassification of short-term loans into long-term loans due to the impact of the MRA (*Master Restructuring Agreement*).

Trade Payables

As of December 31, 2024, the Company's trade payables were recorded at Rp6,054 billion, a decrease of Rp3,285 billion or 35.18% compared to the previous year of Rp9,339.84 billion. This decrease was due to the payment of construction debts.

Non-Current Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities
2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Liabilitas Imbalan Pascakerja Employee Benefits Liabilities	272,215	269,871	2,344	0,87	↑
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	102,581	77,043	25,538	33,15	↑
Uang Muka dari Pelanggan Customer Advances	77,805	239,959	-162,154	-67,58	↓
Uang Muka Proyek Jangka Panjang Long-Term Project Advances	856,918	1,390,092	-533,174	-38,36	↓
Utang Lain-Lain Other Payables	378,872	108,252	270,62	249,99	↑
Bagian Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek Long-Term - Net of Short-Term Portion					
Pinjaman Jangka Menengah Medium Term Notes	1.705.000	235.000	1.470.000	625,53	↑
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	9,821	110,643	-100,822	-91,12	↓
Pinjaman Jangka Panjang Long Term Loans	21.309.858	5.723.225	15.586.633	272,34	↑
Utang Ventura Bersama Joint Venture Debts	84,763	77,287	7,476	9,67	↑
Obligasi Bonds	6.272.696	7.602.943	-1.330.247	-17,50	↓
Sukuk <i>Mudharabah</i> <i>Mudharabah Sharia Bonds</i>	1,591,090	2,138,015	-546,925	-25,58	↓
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	32,661,623	17,972,330	14,689,293	81,73	↑

Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp32,662miliar, mengalami peningkatan Rp14,689 miliar atau 81.73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp17,971,33 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh reklasifikasi pinjaman jangka pendek yang sebelumnya pada liabilitas jangka pendek menjadi ke pinjaman jangka panjang pada liabilitas jangka panjang.

Uang Muka Proyek

Di tahun 2024, Perseroan mencatatkan uang muka proyek sebesar Rp856 miliar, mengalami penurunan Rp533,17 miliar atau 38,36% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.390,09 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah proyek yang diperoleh Perseroan.

Pinjaman Jangka Menengah

Per 31 Desember 2024, Jumlah pinjaman jangka menengah Perseroan tercatat sebesar Rp1.705,00 miliar, mengalami peningkatan Rp1.470,00 miliar atau 625,53% dari tahun sebelumnya sebesar Rp235,00 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh perpanjangan jatuh tempo medium term notes (MTN) dan reklasifikasi dari liabilitas jangka pendek ke liabilitas jangka panjang.

Ekuitas

As of December 31, 2024, the Company recorded non-current liabilities amounting to Rp32.662 billion, an increase of Rp14.689 billion or 81,73% compared to the previous year of Rp17,971.33 billion. This increase was due to the reclassification of short-term loans from current liabilities to long-term loans in non-current liabilities.

Project Advances

In 2024, the Company recorded project advances of Rp856 billion, decreased by Rp533.17 billion or 38.36% compared to 2023 of Rp1,390.09 billion. This decrease was due to the decrease in the number of projects obtained by the Company.

Medium-Term Notes

As of December 31, 2024, the Company's medium-term notes were recorded at Rp1,705.00 billion, an increase of Rp1,470.00 billion or 625.53% from the previous year recorded at Rp235.00 billion. This increase was due to the extension of the maturity of medium term notes (MTN) and the reclassification of current liabilities to non-current liabilities.

Equity

Tabel Ekuitas
Equity
2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal Saham Nilai Nominal Rp100 (Nilai Penuh) per Saham Modal Dasar - 35.000.000.000 Lembar Saham Equity Attributable to Owners of Parent Entity Share Capital Nominal Value Rp100 (Full Value) per Share Authorized Capital - 35,000,000,000 Shares					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 8.969.951.372 Lembar Saham Issued and Fully Paid Capital - 8,969,951,372 Shares	3.987.306	896.995	3.090.311	344,52	↑
Modal Saham Diperoleh Kembali Treasury Stock	(110)	(110)	-	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	9.040.356	6.555.499	2.484.857	37,90	↑
Perubahan Ekuitas Entitas Anak Changes in Equity of Subsidiaries	1.003.022	1.121.143	-118.121	-10,54	↓
Saldo Laba Retained Earnings	(5.161.894)	(2.823.649)	-2.338.245	82,81	↑
Sub Total Sub-Total	8.868.680	5.749.878	3.118.802	54,24	↑



Tabel Ekuitas Equity 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	3.002.738	3.821.735	-818.997	-21,43	↓
Total Ekuitas Total Equity	11.871.419	9.571.613	2.299.806	24,03	↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	63.556.342	65.981.236	-2.428.111	-3,68	↓
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 8.969.951.372 Lembar Saham Issued and Fully Paid Capital - 8,969,951,372 Shares	3.987.306	896.995	3.090.311	344,52	↑

Hingga akhir 2024, Perseroan mencatatkan jumlah ekuitas sebesar Rp11.871,41 miliar, meningkat Rp2.299,80 miliar atau 24,03% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp9.751,61 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan dana Penyertaan Modal Negara PMN sebesar Rp6 Triliun pada 2024.

By the end of 2024, the Company recorded equity amounted to Rp11,871.41 billion, an increase of Rp2,299.80 billion or 24.03% compared to the previous year of Rp9,751.61 billion. The increase was due to the additional PMN State Capital Participation funds in the amount of Rp6 trillion in 2024.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan Bersih Net Revenue	19.242.726	22.530.356	3.287.630	-14,59	↓
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(17.724.124)	(20.668.209)	2.944.085	-14,24	↓
Laba Kotor Gross Profit	1.518.602	1.862.146	-343.544	-20,31	
Beban Penjualan Selling Expenses	(20.059)	(10.271)	-9.788	-95,30	↓
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(1.223.876)	(973.998)	-249.878	-25,65	↓
Penghasilan Lain-Lain Other Revenue	5.445.707	697.835	4.747.872	680,37	↑

Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian
Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income
2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Beban Lain-Lain Other Expenses	(3.734.349)	(5.404.164)	1.669.815	30,90	↑
Lab a (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	1.986.001	(3.828.451)	5.814.452	151,87	↑
Beban dari Pendanaan Financing Expenses	(3.282.890)	(3.206.109)	-76.781	-2,39	↓
Beban Pajak Penghasilan Final Final Income Tax Expenses	(336.804)	(500.558)	163.754	32,71	↑
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) of Associates	(221.037)	(91.144)	-129.893	-142,51	↓
Bagian Laba (Rugi) Entitas Ventura Bersama Share in Profit (Loss) of Joint Venture	(606.661)	(139.283)	-467.378	-335,56	↓
Lab a (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	(2.461.392)	(7.765.545)	5.304.153	68,30	↑
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefits (Expenses)	(52.421)	(58.994)	6.573	11,14	↑
Lab a (Rugi) Neto Net Profit (Loss)	(2.513.814)	(7.824.539)	5.310.725	67,87	↑
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Expenses)					
Penghasilan Komprehensif Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba (Rugi): Other Comprehensive Income Not Reclassified to Profit (Loss):					
Pengukuran Kembali Program Imbal Kerja Pasti Remeasurement of Defined Employee Benefit Program	(76.437)	(74.777)	-1.660	-2,22	↓
Pajak Penghasilan Terkait Income Tax Related	(2.776)	381	-3.157	-828,61	↑
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak Other Comprehensive Income for the Year After Tax	(79.214)	(74.396)	-4.818	-6,48	↓
Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income (Expenses) for the Year	(2.593.028)	(7.898.935)	5.305.907	67,17	↑
Lab a (Rugi) Neto yang Dapat Diatribusikan kepada: Net Profit (Loss) Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	(2.266.814)	(7.128.264)	4.861.450	68,20	↑
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling interests	(247.000)	(696.275)	449.275	64,53	↑
Jumlah Total	(2.513.814)	(7.824.539)	5.310.725	67,87	↑



Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain yang Dapat Diatribusikan kepada: Other Comprehensive Income (Expenses) Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	(2.338.245)	(7.196.040)	4.857.795	67,51	↑
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling interests	(254.783)	(702.895)	448.112	63,75	↑
Jumlah Total	(2.593.028)	(7.898.935)	5.305.907	67,17	↑
Laba (Rugi) Per Saham Dasar (Nilai Penuh) Earnings Per Share (Full Rupiah)	(117,63)	(794,68)	67,705	85,20	↑

Pendapatan Bersih

Net Revenue

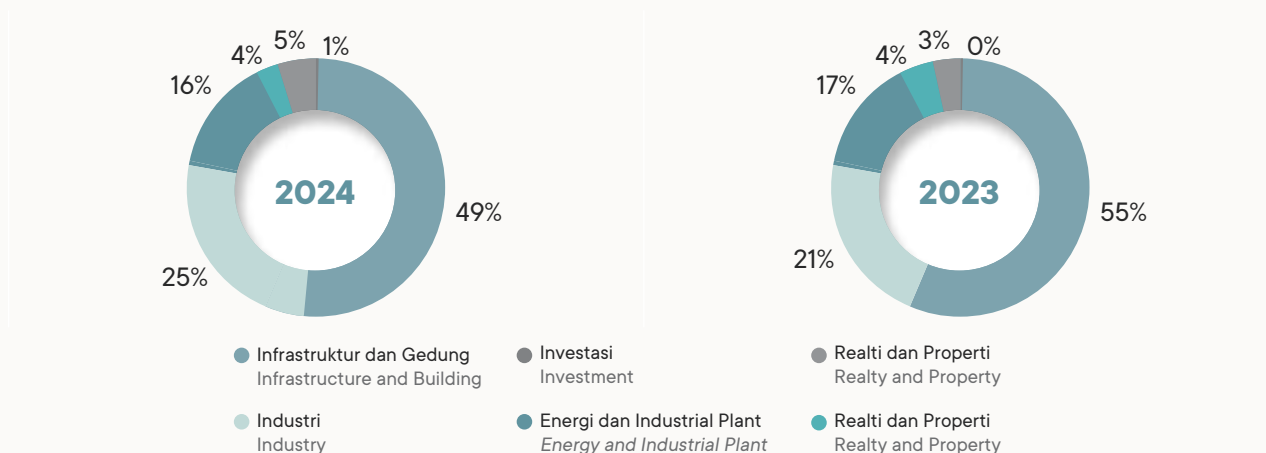
Tabel Pendapatan Bersih

Net Revenue

2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Infrastruktur dan Gedung Infrastructure and Building	10,561,436	12,780,695	-2,219,259	-17,36	↓
Industri Industry	5,295,532	5,017,322	278,210	5,54	↑
Energi dan <i>Industrial Plant</i> <i>Energy and Industrial Plant</i>	3,334,977	4,101,581	-766,604	-18,69	↓
Hotel Hotel	878,147	869,199	8,948	1,03	↓
Realti dan Properti Realty and Property	163,915	600,410	-436,495	-72,70	↑
Investasi Investment	154,811	83,865	70,946	84,60	↑
Eliminasi Elimination	(1,146,091)	(922,716)			
Jumlah Pendapatan Bersih Total Net Revenue	19.242.727	22.530.356	(3.287.629)	-14,59%	↓

Komposisi Pendapatan Bersih Net Revenue Composition 2023-2024



Di tahun 2024, Perseroan berhasil mencatatkan jumlah pendapatan bersih sebesar Rp19.242,72 miliar, mengalami penurunan Rp3.287,62 miliar atau 14,59% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp22.530,36 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan perolehan kontrak baru di 2024 serta penjualan didominasi proyek JO akibat persyaratan dari owner dan keterbatasan modal Perseroan.

In 2024, the Company managed to record net revenue of Rp19,242.72 billion, decreased by Rp3,287.62 billion or 14.59% compared to 2023 which was Rp22,530.36 billion. This decrease was caused by the decrease in obtaining new contracts in 2024 and sales dominated by JO projects due to owner requirements and the Company's limited capital.

Beban Pokok Pendapatan

Cost of Revenue

Tabel Beban Pokok Pendapatan
Cost of Revenue
2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Infrastruktur dan Gedung Infrastructure and Building	(9,963,278)	(11,884,161)	1,920,883	16.16	↓
Industri Industry	(4,899,227)	(4,652,857)	-246,370	5.30	↑
Energi dan Industrial Plant Energy and Industrial Plant	(3,042,782)	(3,858,747)	815,965	-21.15%	↓
Hotel Hotel	(710,932)	(727,677)	16,745	-2.30	↓
Realiti dan Properti Realty and Property	(112,963)	(381,449)	268,486	-70.39	↑
Investasi Investment	(141,034)	(86,034)	(55,000)	63.93%	↑
Eliminasi Eliminasi	1,146,091	922,716			
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenue	(17,724,124)	(20,668,209)	2,944,085	14.24	↓



Jumlah beban pokok pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp2.944 miliar atau 14,28% dari Rp20.668,21 miliar di tahun 2023 menjadi Rp17.724 miliar di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan serta peningkatan efisiensi dengan peningkatan pengawasan menggunakan penerapan SAP.

Laba Kotor

Jumlah laba kotor Perseroan tercatat sebesar Rp1.519 miliar di tahun 2024, menurun Rp343 miliar atau 18,45% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.862,15 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penjualan didominasi proyek JO akibat persyaratan dari owner dan keterbatasan modal Perseroan.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan di tahun 2024, tercatat sebesar Rp1.243 miliar, meningkat Rp260 miliar atau 26,38% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp984 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan jumlah proyek sehingga Pegawai dari proyek Kembali ke Kantor Pusat dan menjadi tambahan beban usaha.

Laba (Rugi) Usaha

Di tahun 2024, Perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp1.986 miliar, mengalami peningkatan Rp5.814 miliar atau 151,87% dari tahun 2023 dengan rugi usaha yang tercatat sebesar Rp3.831 miliar. Hal ini disebabkan oleh pada periode 2024 Perseroan memperoleh Capital Gain atas restrukturisasi perbankan.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Perseroan mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan di tahun 2024 sebesar Rp2.461 miliar, meningkat Rp5.304 miliar atau 68,30% dari tahun 2023 dengan rugi sebelum pajak penghasilan yang tercatat sebesar Rp7.824 miliar. Hal ini disebabkan oleh pada periode 2024 Perseroan memperoleh Capital Gain atas restrukturisasi perbankan.

Laba (Rugi) Neto

Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan rugi bersih sebesar Rp2.514 miliar, mengalami peningkatan Rp5.311 miliar atau 67,87% dibandingkan tahun 2023 dengan rugi bersih yang tercatat sebesar Rp7.824,54 miliar. Hal ini disebabkan oleh pada periode 2024 Perseroan memperoleh Capital Gain atas restrukturisasi perbankan.

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak

Di tahun 2024, Perseroan membukukan beban komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp79 miliar, menurun Rp4,82 miliar atau 6,48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar *minus* Rp74 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain.

Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan

Perseroan mencatatkan kerugian komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2.593 miliar di tahun 2024, meningkat Rp5.306 miliar atau 67,17% dari tahun sebelumnya dengan kerugian komprehensif tahun berjalan yang tercatat sebesar Rp7.899 miliar. Hal ini seiring dengan rugi neto Perseroan yang lebih rendah pada 2024 dibanding 2023 akibat memperoleh *Capital Gain* atas restrukturisasi perbankan.

The amount of cost of revenue decreased by Rp2,944 billion or 14.28% from Rp20,668.21 billion in 2023 to Rp17,724 billion in 2024. This decrease was due to a decrease in sales and increased efficiency with enhanced supervision using SAP implementation.

Gross Profit

The Company's gross profit was recorded at Rp1,519 billion in 2024, a decrease of Rp343 billion or 18.45% compared to the previous year of Rp1,862.15 billion. This decrease was caused by the domination of JO projects on sales due to owner requirements and the Company's limited capital.

Operating Expenses

The Company's operating expenses in 2024 were recorded at Rp1,243 billion, experienced an increase of Rp260 billion or 26.38% compared to the previous year of Rp984 billion. This increase occurred because of the decrease in the number of projects, making Employees from the project Returned to the Head Office and became an additional operating expenses.

Operating Profit (Loss)

In 2024, the Company posted an operating profit of Rp1,986 billion, experienced an increase of Rp5,814 billion or 151.87% from 2023 with a recorded operating loss of Rp3,831 billion. This was due to the Company obtaining Capital Gain from banking restructuring in 2024.

Profit (Loss) Before Income Tax

The Company recorded a loss before income tax in 2024 amounting to Rp2,46 billion, an increase of Rp5,304 billion or 68.30% from 2023 with a loss before income tax recorded at Rp7,824 billion. This was due to the Company obtaining Capital Gain from banking restructuring in 2024.

Net Profit (Loss)

As of December 31, 2024, the Company recorded a net loss of Rp2,514 billion, an increase of Rp5,311 billion or 67.87% compared to 2023 with a net loss recorded at Rp7,824.54 billion. This was due to the Company obtaining Capital Gain from banking restructuring in 2024.

Other Comprehensive Income for the Year After Tax

In 2024, the Company recorded other comprehensive expenses for the year after tax amounting to Rp79 billion, a decrease of Rp4.82 billion or 6.48% compared to the previous year which was recorded at minus Rp74 billion. This was driven by an increase in income tax related to other comprehensive income.

Total Comprehensive Income (Loss) for the Year

The Company recorded a comprehensive loss for the year of Rp2,593 billion in 2024, an increase of Rp5,306 billion or 67.17% from the previous year with a comprehensive loss for the year recorded at Rp7,899 billion. This is in line with the Company's lower net loss in 2024 compared to 2023 due to obtaining Capital Gain from banking restructuring.

Laba (Rugi) per Saham Dasar

Di tahun 2024, Perseroan mencatatkan rugi per saham dasar sebesar Rp117,63, menurun 85,20% jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan rugi per saham dasar yang tercatat sebesar Rp794,68. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kerugian komprehensif tahun berjalan yang dialami Perseroan.

Earnings (Loss) per Basic Share

In 2024, the Company recorded a loss per basic share of Rp117.63, a decrease of 85.20% compared to 2023 with a loss per basic share recorded at Rp794.68. This was due to the decrease in the Company's comprehensive loss for the year.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Tabel Arus Kas Konsolidasian
Consolidated of Cash Flows
2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	68.223	(2.895.234)	2.963.457	-102,36%	↑
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(3.818.677)	(1.336.045)	(2.482.632)	185,82	↑
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	3.987.534	1.806.126	2.181.408	120,78%	↑
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	237.080	(2.425.152)	2.662.232	-109,78%	↑
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Impact of Exchange Differences	4.013	(11.469)	15.482	-134,99%	↑
Kas Dan Bank Pengaruh Kas Dan Bank Pengaruh	(113.161)	-			
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun/Periode Cash and Cash Equivalents at End of the Year/ Period	3.361.003	5.669.693	127.932	3,96%	↓

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi tercatat mengalami peningkatan Rp2.963 miliar atau 102,36% dari tahun 2023 yang sebesar minus Rp2.895 miliar menjadi Rp68 miliar di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh Perseroan semakin efektif dan efisien dalam pengerjaan proyek.

Cash Flow from Operating Activities

Cash flow from operating activities is recorded to have increased by Rp2.963 billion or 102.36% from 2023 which was minus Rp2.895 billion to Rp68 billion in 2024. This was because the Company is increasingly effective and efficient in carrying out projects.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi di tahun 2024, tercatat sebesar minus Rp3.818 miliar, menurun Rp2.483 miliar atau 185,82% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar minus Rp1,336 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya alokasi dana PMN kepada proyek JO dan penambahan setoran modal kepada entitas asosiasi.

Cash Flow from Investing Activities

Cash flow from investing activities in 2024 was recorded at minus Rp3,818 billion, a decrease of Rp2,483 billion or 185.82% compared to 2023 of minus Rp1.336 billion. This decrease was due to the allocation of PMN funds to JO projects and additional capital deposits to associates.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp3.987 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp2.181 miliar atau 120,78%, dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1.806 miliar. Peningkatan ini dikarenakan Perseroan mendapatkan tambahan dana PMN sebesar Rp6 triliun pada 2024.

Cash Flow from Financing Activities

Cash flow from financing activities in 2024 was recorded at Rp3,987 billion, increased by Rp2,181 billion or 120.78%, compared to 2023 which was recorded at Rp1,806 billion. This increase was due to the Company receiving additional PMN funds of Rp6 trillion in 2024.



Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas merupakan akumulasi atas arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi serta arus kas dari aktivitas pendanaan. Di tahun 2024, bersih kas dan setara kas tercatat sebesar Rp237 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp2.662 miliar atau 109,78%, dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar minus Rp2.425 miliar. Peningkatan dikarenakan perseroan mendapatkan tambahan dana PMN sebesar Rp6 triliun pada 2024.

Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

Perseroan mencatat kas dan setara kas pada akhir periode sebesar Rp3.361 miliar, mengalami peningkatan Rp128 miliar atau 3,96% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.233 miliar. Hal ini disebabkan oleh perseroan mendapatkan tambahan dana PMN sebesar Rp6 triliun pada 2024.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban jangka pendek, sementara rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

Kemampuan Perseroan dalam Membayar Utang Jangka Pendek Berdasarkan Rasio Likuiditas

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo, diukur berdasarkan rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek, rasio kas dihitung melalui perbandingan antara kas dan setara kas dengan liabilitas jangka pendek, dan rasio cepat digunakan untuk melihat kekuatan atau kelemahan finansial Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan sisanya dibagi dengan liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek.

Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents

The increase (decrease) in net cash and cash equivalents is the accumulation of cash flows from operating activities, cash flows from investing activities and cash flows from financing activities. In 2024, net cash and cash equivalents were recorded at Rp237 billion increased by Rp2,662 billion or 109.78%, compared to 2023 which was recorded at minus Rp2,425 billion. The increase was due to the Company receiving additional PMN funds of Rp6 trillion in 2024.

Cash and Cash Equivalents at End of Period

The Company recorded cash and cash equivalents at the end of the period amounting to Rp3,361 billion, increased by Rp128 billion or 3.96% compared to the previous year of Rp3,233 billion. This was attributed to the Company receiving additional PMN funds of Rp6 trillion in 2024.

ABILITY TO PAY DEBTS AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE

Ability to Pay Debts

The Company's ability to meet all liabilities, both short-term and long-term, can be measured through the liquidity ratio and solvency ratio. The liquidity ratio is used to measure the Company's ability to pay off short-term liabilities, while the solvency ratio is used to measure the Company's ability to meet entire liabilities.

The Company's Ability to Pay Short-Term Debt Based on Liquidity Ratio

The Company's ability to meet short-term obligations that will mature is measured based on the liquidity ratio consisting of current ratio, cash ratio, and quick ratio. The current ratio is a comparison between current assets and short-term liabilities, the cash ratio is calculated by comparing cash and cash equivalents with short-term liabilities, and the quick ratio is used to see the Company's financial strength or weakness in meeting its short-term obligations which are calculated by subtracting inventory from current assets, and the remainder is divided by current liabilities or short-term liabilities.

Tabel Rasio Likuiditas
 Liquidity Ratio
 2023-2024

Uraian Description	2024 (%)	2023 (%)	Perubahan Difference (%)
Rasio Kas Cash Ratio	17,67	8,41	9,26
Rasio Lancar Current Ratio	158,96	80,13	78,83
Rasio Cepat Quick Ratio	32,04	50,45	-18,41

Per 31 Desember 2024, realisasi rasio kas Perseroan adalah sebesar 17,67% meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 8,41%. Rasio lancar Perseroan di tahun 2024 sebesar 158,96% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 80,13%. Sementara, rasio cepat Perseroan tercatat sebesar 32,04%, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 50,45%.

Rasio likuiditas Perseroan di 2024, tercatat mengalami kenaikan performa yang lebih dikarenakan telah diimplementasikannya rencana penyehatan keuangan perseroan dengan 8 substream penyehatan.

Kemampuan Perseroan dalam Membayar Utang Jangka Pendek maupun Jangka Panjang Berdasarkan Rasio Solvabilitas

Perseroan menggunakan rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuannya dalam membayar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, yang akan jatuh tempo. Adapun kemampuan Perseroan dalam membayar utang jangka pendek maupun utang jangka panjang yang diukur berdasarkan rasio solvabilitas, dan perbandingannya dalam 2 (dua) tahun terakhir, adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

As of December 31, 2024, the Company's cash ratio was realized at 17.67%, increased from 2023's realization at 8.41%. The Company's current ratio in 2024 was 158.96%, an increase from the previous year which was 80.13%. Meanwhile, the Company's quick ratio was recorded at 32.04%, down from the previous year at 50.45%.

The Company's liquidity ratio in 2024 was recorded to have experienced a higher increase in performance due to the implementation of the Company's financial recovery plan with 8 recovery substreams.

The Company's Ability to Pay Short-Term and Long-Term Debts Based on the Solvency Ratio

The Company uses the solvency ratio to measure its ability to pay short-term and long-term liabilities that will mature. The Company's ability to pay short-term and long-term debts as measured by the solvency ratio, and its comparison in the last 2 (two) years, is as described below.

Tabel Rasio Solvabilitas
Solvency Ratio
2023-2024

Uraian Description	2024 (X)	2023 (X)	Perubahan Difference (X)
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	4.35	5.89	-1.54
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Aset Debt to Asset Ratio	0.81	0.85	-0.04
Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas Gearing Ratio	2.99	3.86	-0.87
Rasio Ekuitas terhadap Jumlah Aset Equity to Asset Ratio	0.19	0.15	0.04

Rasio jumlah liabilitas terhadap ekuitas mengalami penurunan dari 5,89 kali di tahun sebelumnya menjadi 4,35 kali di tahun 2024, sementara rasio jumlah liabilitas terhadap aset tercatat sebesar 0,81 kali, turun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,85 kali.

Adapun rasio utang berbunga terhadap ekuitas Perseroan mengalami penurunan dari 3,86 kali di tahun 2023 menjadi 2,99 kali di tahun 2024. Sementara itu, rasio ekuitas terhadap jumlah aset tercatat sebesar 0,19 kali, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,15 kali.

Dapat disimpulkan, bahwa rasio solvabilitas Perseroan di 2024, mengalami peningkatan performa yang lebih dikarenakan peningkatan kapasitas neraca sebagai dampak dari telah berjalannya restrukturisasi pinjaman berdasarkan perjanjian *Master Restructuring Agreement* (MRA) ditambah dengan diterimanya tambahan dana PMN sebesar Rp6 triliun pada tahun 2024.

The debt to equity ratio decreased from 5.89 times in the previous year to 4.35 times in 2024, while the debt to to assets ratio was recorded at 0.80 times, down compared to 2023 of 0.85 times.

The Company's gearing ratio experienced a decrease from 3.86 times in 2023 to 2.99 times in 2024. Meanwhile, the equity to assets ratio was recorded at 0.19 times, an increase compared to the previous year which was recorded at 0.15 times.

Therefore, it can be concluded that the Company's solvency ratio in 2024 experienced a greater increase in performance due to an increase in balance sheet capacity as a result of the implementation of loan restructuring based on the Master Restructuring Agreement (MRA) plus the receipt of additional PMN funds of Rp6 trillion in 2024.



Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang merupakan kemampuan Perseroan dalam mengumpulkan piutangnya, yang dapat diukur berdasarkan penghitungan periode penagihan (*collection period*) atau jangka waktu rata-rata pengumpulan piutang. Berikut tingkat kolektibilitas piutang Perseroan yang diukur berdasarkan *collection period* atau jangka waktu rata-rata pengumpulan piutang di tahun 2024, dibanding tahun 2023, sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini.

Receivables Collectability Rate

The receivables collectability rate is the Company's ability to collect its receivables, which can be measured based on the calculation of collection period or the average period of receivables collection. The following is the Company's receivables collectability rate as measured based on the collection period or average period of receivables collection in 2024, compared to 2023, as attached in the table below.

Tabel Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectability Rate
2023-2024

Uraian Description	2024 (hari) (days)	2023 (hari) (days)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Periode Penagihan Collection Period	76	88	-11.79	-13.39%	↓

Untuk periode penagihan piutang Perseroan mengalami peningkatan sebesar 13,39% dari 88 hari di tahun 2023 menjadi 76 hari di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitas Perseroan membaik seiring dengan kebijakan perseroan yang fokus terhadap cash.

For the Company's receivables collection period, there was an increase of 13.39%, from 88 days in 2023 to 76 days in 2024. This shows that the Company's collectability level improved in line with the Company's policy of focusing on cash.

STRUKTUR MODAL

Rincian Struktur Modal

Komposisi struktur modal Perseroan pada tahun 2024 berasal dari liabilitas sebesar 81% dan ekuitas sebesar 19%. Komposisi ini relatif mengalami perubahan dari tahun 2023. Adapun rincian struktur modal Perseroan pada tahun 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut.

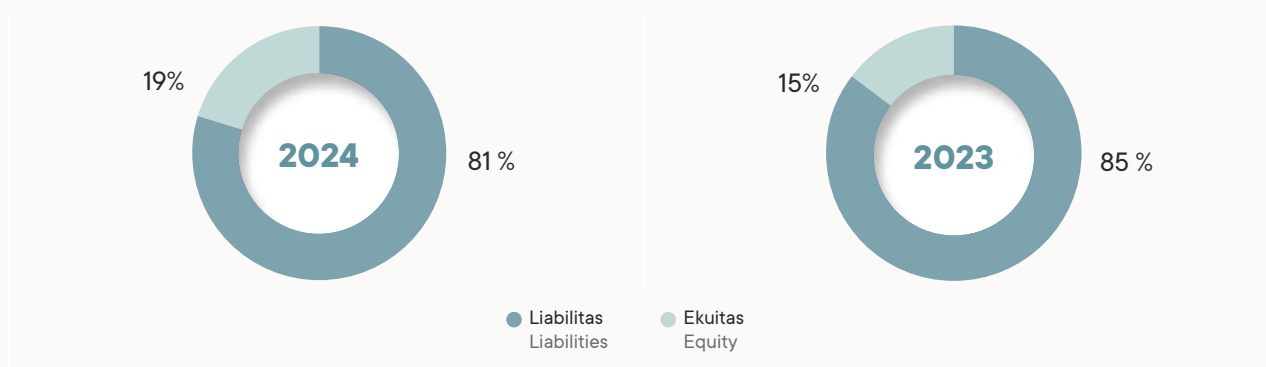
CAPITAL STRUCTURE

Capital Structure Details

The composition of the Company's capital structure in 2024 was made up of liabilities of 81% and equity of 19%. This composition relatively experienced changes from 2023. The details of the Company's capital structure in 2024 and 2023 are presented as follows.

Uraian Description	2024		2023		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Liabilitas Liabilities	51.684.923	81%	56.409,623	85,49%	(4.724.700)	-8.38%	↓
Ekuitas Equity	11,871,420	19%	9.571.613	14,51%	2,299,807	24.03%	↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	63.556.343	100%	65,981,236	100%	(2.424.893)	-3.68%	↓

Komposisi Struktur Modal Capital Structure Composition 2023-2024



Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Tujuan dari WIKA dan kelompok usahanya dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga grup dapat tetap memberikan hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada Pemegang Saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Perseroan memiliki kebijakan untuk menitikberatkan pengguna liabilitas sebagai sumber modalnya. Adapun liabilitas jangka pendek Perseroan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp25.077 miliar dan liabilitas jangka panjang Perseroan sebesar Rp32.661 miliar.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Dalam memaksimalkan keuntungan para Pemegang Saham dengan memastikan kelangsungan usaha yang ditujukan untuk kebijakan manajemen atau struktur modal, mengoptimisasi saldo utang dan ekuitas Perseroan sehingga dapat memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimal guna mengurangi biaya modal. Manajemen secara berkala melakukan reviu struktur permodalan dengan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Adapun *gearing ratio* per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini:

Uraian Description	2024	2023
Pinjaman Berbunga (Rp-juta) Interest-bearing Loans (Rp-million)	35,538,190	36,756,452
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	11,871,420	5,749,878
<i>Gearing Ratio (%)</i>	276%	639%

Management Policy On Capital Structure

The objective of WIKA's and its business groups in managing capital is to protect the group's ability to maintain business continuity, hence the group can continue to provide results for Shareholders and benefits for other stakeholders, as well as to provide adequate returns to Shareholders by determining product and service prices that are commensurate with the level of risk.

The Company has a policy to emphasize the use of liabilities as a source of capital. The Company's current liabilities in 2024 were recorded at Rp25,077 billion and the Company's non-current liabilities at Rp32,661 billion.

Basis for the Selection of Management Policy on Capital Structure

The management's policy on capital structure is aimed at maximizing shareholder profits, through ensuring business continuity and optimizing the balance of the Company's debt and equity, in order to be able to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders. The policy also aims to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. The management periodically reviews the capital structure by considering the cost of capital and related risks.

The gearing ratio as of December 31, 2024 and 2023 is as attached below:



Pinjaman berbunga terdiri dari pinjaman yang saling hapus dengan kas dan setara kas, sementara ekuitas yang dimaksud pada tabel di atas adalah ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, tambahan modal disetor, saldo laba, serta kepentingan nonpengendali, dan dikurangi dengan modal saham diperoleh kembali.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha menyebutkan bahwa suatu reaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki ikatan material untuk investasi barang modal yang disajikan pada tabel berikut ini.

Interest-bearing loans consist of loans that are offset against cash and cash equivalents, while the equity referred to in the table above is the parent shareholders' equity, which consists of issued capital, additional paid-in capital, retained earnings, and non-controlling interests, and is reduced by treasury stock.

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, a reaction is categorized as a material transaction if the transaction value is equal to 20% or more of the equity of the Public Company.

As of December 31, 2024, the Company has material commitments for capital goods investments as presented in the following table.

Tabel Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Per 31 Desember 2024
Material Commitments for Capital Goods Investment
As of December 31, 2024

No	Jenis ikatan Type of Commitment	Nama Pihak (Vendor) Pelaksana Executing Party (Vendor)	Tujuan Ikatan Purpose of Commitment	Sumber Dana Source of Funds	Mata Uang yang Menjadi Denominasi Denominasi Currency	Proteksi Risiko Mata Uang Asing Foreign Currency Risk Protection
1	Entitas Anak Subsidiary	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Pemenuhan Base Equity Fulfillment of Base Equity	Setoran Modal Capital Deposit	Rupiah	-
2	Entitas Anak Subsidiary	PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur	Pemenuhan Base Equity Fulfillment of Base Equity	Setoran Modal Capital Deposit	Rupiah	-
3	Entitas Asosiasi Subsidiary	PT PP Semarang Demak	Pemenuhan Base Equity Fulfillment of Base Equity	Setoran Modal Capital Deposit	Rupiah	-

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Jenis dan Tujuan Investasi Barang Modal

Dalam mengembangkan kegiatan usahanya, investasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Perseroan melakukan investasi barang modal yang merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan Perseroan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi Perseroan di masa depan.

Nilai Investasi Barang Modal

Di tahun 2024, Perseroan telah melakukan realisasi investasi barang modal sebesar Rp266,13 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp189,63 miliar atau 247,88% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp76,50 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh penyertaan pada entitas anak PT WIKA Serang Panimbang sebesar 119 miliar, penyertaan kepada entitas asosiasi PT PP Semarang Demak sebesar 137,41 miliar dan investasi pada aset tetap dan sistem sebesar 9,72 miliar. Adapun perbandingan realisasi investasi barang modal pada tahun 2023 dan 2024 disampaikan sebagai berikut.

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Type and Purpose of Capital Goods Investment

In developing its business activities, investment is one of the important things to be undertaken. The Company makes capital goods investments, which are activities involving the expenditure of funds used by the Company to purchase a number of fixed assets or to increase the value of fixed assets that are expected to provide value for the Company in the future.

Capital Goods Investment Value

In 2024, the Company has realized capital goods investments amounting to Rp266.13 billion, an increase of Rp189.63 billion or 247.88% compared to 2023 which amounted to Rp76.50 billion. This was due to an investment of 119 billion in a subsidiary PT WIKA's Serang Panimbang, an investment of 137.41 billion in an associated entity PT PP Semarang Demak, and an investment of 9.72 billion in fixed assets and systems. The comparison of capital goods investment realization in 2023 and 2024 is presented below.

Nilai Investasi Barang Modal Capital Goods Investment Value 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih (Rp-miliar) (Rp-billion)	Persentase Percentage (%)	
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	266,13	76,50	189,63	247,88	↑

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Berikut disampaikan informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan 31 Desember 2024 hingga tanggal laporan akuntan tanggal 27 Maret 2025.

- Informasi terkait Pembayaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A No SE.01.00/A.CORSEC.00069/2025 tanggal 14 Februari 2025 yaitu WIKA belum dapat melakukan pembayaran atas keseluruhan nilai obligasi dan sukuk atau sesuai dengan usulan WIKA pada tanggal jatuh tempo di tanggal 18 Februari 2025. Untuk itu WIKA akan kembali melakukan diskusi dengan Wali Amanat serta para pemegang Obligasi dan Sukuk guna mendapatkan kesepakatan pada RUPO dan RUPSU yang akan dilaksanakan berikutnya.
- Laporan Hasil Pemeringkatan Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material No SE.01.00/A.CORSEC.00072/2025 tanggal 21 Februari 2025 yaitu penurunan terhadap peringkat WIKA dan Surat Berharga WIKA dilakukan karena belum terpenuhinya pembayaran pokok Obligasi II Tahap II Seri A dan Sukuk II Tahap II Seri A yang jatuh tempo pada 18 Februari 2025. Pefindo akan kembali melakukan peninjauan peringkat dan prospek Perusahaan apabila WIKA mendapatkan kesepakatan penyelesaian kewajiban dengan para pemegang obligasi dan sukuk. Untuk itu WIKA akan kembali melakukan diskusi dengan wali amanat dan para pemegang Obligasi dan Sukuk guna mendapatkan persetujuan pada RUPO/RUPSU yang akan dilaksanakan berikutnya.
- Pada tanggal 18 Februari 2025, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan surat No.: Peng-SPT 00001/BEI.PP2/02-2025 mengenai penghentian sementara perdagangan efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk hal ini dikarenakan belum terpenuhinya pembayaran pokok Obligasi II Tahap II Seri A dan Sukuk II Tahap II Seri A yang jatuh tempo pada 18 Februari 2025. Pefindo akan kembali melakukan peninjauan peringkat dan prospek Perusahaan apabila WIKA mendapatkan kesepakatan penyelesaian kewajiban dengan para pemegang obligasi dan sukuk. Untuk itu WIKA akan kembali melakukan diskusi dengan wali amanat dan para pemegang Obligasi dan Sukuk guna mendapatkan persetujuan pada RUPO/RUPSU yang akan dilaksanakan berikutnya.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS OCCURRING AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

The following is material information and facts that occurred between the end of the reporting period December 31, 2024 and the date of the accountant's report dated March, 27 2025.

- Information related to the Payment of Wijaya Karya Sustainable Bonds and Mudharabah Sharia Bonds II Phase II 2022 Series A No SE.01.00/A.CORSEC. 00069/2025 dated February 14, 2025, WIKA's has not been able to make payments for the entire value of the bonds and sharia bonds or in accordance with WIKA's proposal on the due date of February 18, 2025. For this reason, WIKA's will again hold discussions with the Trustee and the Bond and Sharia Bond holders in order to reach an agreement at the next RUPO and RUPSU.
- Rating Result Report Due to Material Facts No SE.01.00/A.CORSEC. 00072/2025 dated February 31, 2025, namely a downgrade of WIKA's and WIKA's Securities due to the non-payment of the principal of Bonds II Phase II Series A and Sharia Bonds II Phase II Series A which matured on February 18, 2025. Pefindo will review the Company's rating and prospects again if WIKA's reaches a settlement agreement with bond and sharia bond holders. To that end, WIKA's will hold further discussions with the trustee and the bond and sharia bond holders to obtain approval at the next RUPO/RUPSU.
- On February 18, 2025, the Indonesia Stock Exchange issued letter No.: Peng-SPT 00001/BEI.PP2/02-2025 regarding the temporary suspension of trading in the securities of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk due to the non-payment of the principal of Bond II Phase II Series A and Sharia Bonds II Phase II Series A which matured on 18 February 2025. Pefindo will review the Company's rating and prospects again if WIKA's reaches an agreement on the settlement of obligations with bond and sharia bond holders. For this reason, WIKA's will hold further discussions with the trustee and the bond and sharia bond holders to obtain approval at the next RUPO/RUPSU.



INFORMASI PENINGKATAN ATAU PENURUNAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN

Perseroan mencatat peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan dalam Laporan Tahunan ini. Dimana pada tahun 2024, terdapat penurunan dari penjualan atau pendapatan sebesar 4,89% di mana pendapatan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp22.532 miliar turun menjadi Rp19.915 miliar di tahun 2024.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN

Sebagai perusahaan terdepan di sektor *Engineering, Procurement, and Construction (EPC)*, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) terus beradaptasi terhadap dinamika pasar yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah volatilitas harga material strategis seperti baja, semen, aspal, dan bahan bakar, yang memiliki dampak signifikan terhadap biaya proyek dan pendapatan perusahaan.

Tahun 2024 ditandai dengan ketidakpastian pasar global akibat fluktuasi harga komoditas, gangguan rantai pasok, serta kebijakan perdagangan internasional. Kenaikan harga baja dan semen sebagai komponen utama dalam proyek konstruksi berdampak pada peningkatan biaya proyek, sementara harga bahan bakar yang berfluktuasi memengaruhi efisiensi operasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga material strategis antara lain:

- Ketidakpastian Ekonomi Global** – Krisis geopolitik dan kebijakan perdagangan yang proteksionis memicu kenaikan harga bahan baku.
- Inflasi dan Kebijakan Moneter** – Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi dan logistik.
- Gangguan Rantai Pasok** – Disrupsi akibat perubahan iklim dan krisis logistik global memperlambat distribusi material.
- Regulasi Lingkungan** – Kebijakan dekarbonisasi dan transisi energi berdampak pada biaya produksi bahan bangunan.

Perubahan harga material strategis mempengaruhi beberapa aspek keuangan perusahaan, antara lain:

- Peningkatan Biaya Produksi:** Harga bahan baku yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan biaya konstruksi, yang dapat menggerus margin laba proyek.
- Penyesuaian Harga Kontrak:** Beberapa proyek dengan kontrak jangka panjang mengalami tekanan karena keterbatasan fleksibilitas dalam penyesuaian harga.
- Efisiensi dan Optimalisasi Biaya:** Strategi pengadaan yang lebih efisien dan negosiasi dengan pemasok menjadi kunci dalam mengurangi dampak kenaikan harga.
- Diversifikasi Sumber Material:** Meningkatkan pemanfaatan material lokal dan substitusi material yang lebih efisien guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.

INFORMATION ON MATERIAL INCREASE OR DECREASE IN SALES OR REVENUE

The Company recorded a material increase or decrease in sales or revenue in this Annual Report. Where in 2024, there was a decrease in sales or revenue of 4.89%, where revenue in 2023 was recorded at Rp22,532 billion, falling to Rp19,915 billion in 2024.

IMPACT OF PRICE CHANGES ON REVENUE

As a leading company in the Engineering, Procurement, and Construction (EPC) sector, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) continues to adapt to market dynamics that affect business sustainability. One of the main challenges faced is the volatility of strategic material prices such as steel, cement, asphalt, and fuel, which have a significant impact on project costs and company revenue.

The year 2024 is marked by global market uncertainty due to commodity price fluctuations, supply chain disruptions, and international trade policies. The rise in steel and cement prices, as key components in construction projects, has increased project costs, while fluctuating fuel prices have affected operational efficiency.

Factors influencing strategic material prices include:

- Global Economic Uncertainty** – Geopolitical crises and protectionist trade policies have driven up raw material prices.
- Inflation and Monetary Policy** – Higher interest rates increase production and logistics costs.
- Supply Chain Disruptions** – Disruptions due to climate change and the global logistics crisis slow down material distribution.
- Environmental Regulations** – Decarbonization policies and the energy transition impact the production cost of building materials.

Changes in strategic material prices affect several financial aspects of the Company, including:

- Increased Production Costs:** Higher raw material prices lead to increased construction costs, which can erode project profit margins.
- Contract Price Adjustments:** Some long-term projects face pressure due to limited flexibility in adjusting prices.
- Efficiency and Cost Optimization:** Efficient procurement strategies and negotiations with suppliers are key to mitigating the impact of price increases.
- Material Source Diversification:** Increasing the use of local materials and substituting more efficient materials to reduce dependence on imports.

Untuk mengatasi tantangan ini, WIKA menerapkan berbagai strategi mitigasi, antara lain:

1. **Strategi Hedging dan Kontrak Jangka Panjang:** Melakukan perjanjian pembelian bahan baku dalam jumlah besar dengan harga tetap guna mengurangi risiko volatilitas harga.
2. **Penguatan Supplier Relationship Management:** Membangun hubungan strategis dengan pemasok untuk memastikan kelancaran pasokan dan mendapatkan harga yang lebih kompetitif.
3. **Inovasi dan Efisiensi Operasional:** Menerapkan teknologi konstruksi yang lebih hemat material serta memanfaatkan bahan bangunan ramah lingkungan yang lebih ekonomis.
4. **Digitalisasi Rantai Pasok:** Mengoptimalkan sistem digital dalam pemantauan harga dan distribusi material untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan.
5. **Peningkatan Kemampuan Negosiasi Kontrak:** Memasukkan klausul eskalasi harga dalam kontrak guna mengurangi risiko finansial akibat kenaikan harga material.

Sebagai perusahaan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, WIKA terus berinovasi dalam mengelola dampak perubahan harga material strategis agar tidak menghambat pertumbuhan bisnis. Dengan strategi mitigasi yang tepat, efisiensi dalam rantai pasok, serta pendekatan adaptif terhadap tren pasar, WIKA tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing dan kinerja keuangan yang berkelanjutan di tengah tantangan industri konstruksi global.

PROSPEK USAHA

Tahun 2024 membawa peluang sekaligus tantangan bagi industri konstruksi nasional, termasuk WIKA. Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional, strategi yang adaptif dan inovatif menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan serta meningkatkan daya saing perusahaan.

Kondisi makroekonomi dan industri konstruksi nasional masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter, situasi politik pasca-Pemilu 2024, serta tren investasi di sektor infrastruktur dan properti. Sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,03% yang didorong oleh konsumsi domestik, investasi, serta pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut. Namun, beberapa faktor eksternal seperti fluktuasi suku bunga acuan, instabilitas politik pasca-Pemilu 2024, dan ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang dan geopolitik, dapat mempengaruhi iklim investasi serta pembiayaan proyek konstruksi. Kenaikan suku bunga acuan berpotensi meningkatkan biaya pendanaan proyek, sedangkan ketidakpastian ekonomi global turut memengaruhi harga bahan baku konstruksi. Selain tantangan ekonomi dan geopolitik, tren investor yang cenderung menerapkan strategi "wait & see" juga menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor konstruksi.

Di sisi lain, komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur tetap kuat, tercermin dari alokasi anggaran infrastruktur nasional tahun 2024 yang mencapai Rp423,4 triliun atau 12,73% dari total APBN. Untuk mempertahankan daya saing, WIKA perlu fokus pada segmen-segmen dengan potensi pertumbuhan tinggi serta strategi efisiensi di pasar yang kompetitif.

To address these challenges, WIKA implements various mitigation strategies, including:

1. **Hedging Strategy and Long-Term Contracts:** Making bulk raw material purchase agreements at fixed prices to reduce price volatility risks.
2. **Strengthening Supplier Relationship Management:** Building strategic relationships with suppliers to ensure smooth supply and obtain more competitive prices.
3. **Innovation and Operational Efficiency:** Applying construction technologies that use fewer materials and utilizing more cost-effective, environmentally friendly building materials.
4. **Supply Chain Digitization:** Optimizing digital systems to monitor material prices and distribution to improve transparency and procurement efficiency.
5. **Improving Contract Negotiation Capabilities:** Including price escalation clauses in contracts to mitigate financial risks from material price increases.

As a company that upholds sustainability principles, WIKA continues to innovate in managing the impact of strategic material price changes to ensure they do not hinder business growth. With the right mitigation strategies, supply chain efficiency, and adaptive approach to market trends, WIKA remains committed to maintaining competitiveness and sustainable financial performance amidst global construction industry challenges.

BUSINESS PROSPECTS

The year 2024 presents both opportunities and challenges for the national construction industry, including WIKA. Amid global and national economic dynamics, adaptive and innovative strategies are key to maintaining growth and enhancing the company's competitiveness.

The macroeconomic conditions and national construction industry are still influenced by various factors, including monetary policies, the political situation post-2024 elections, and investment trends in the infrastructure and property sectors. Throughout 2024, Indonesia's economic growth reached 5.03%, driven by domestic consumption, investment, and continued infrastructure development. However, several external factors, such as fluctuations in benchmark interest rates, post-2024 election political instability, and global economic uncertainty due to trade wars and geopolitical issues, may affect the investment climate and project financing. An increase in benchmark interest rates could raise project funding costs, while global economic uncertainty may affect the prices of construction raw materials. In addition to economic and geopolitical challenges, investor trends that tend to adopt a "wait & see" strategy also hinder the growth of the construction sector.

On the other hand, the government's commitment to infrastructure development remains strong, as reflected in the 2024 national infrastructure budget allocation of Rp423.4 trillion, or 12.73% of the total state budget. To maintain competitiveness, WIKA needs to focus on segments with high growth potential and adopt efficiency strategies in a competitive market.



Mengacu pada hasil Riset Pasar dan Pelanggan 2024, WIKA mengidentifikasi sektor-sektor dengan daya tarik pasar tinggi, kompetisi menengah, dan margin beragam.

1. Konstruksi Gedung

Urbanisasi dan kebutuhan akan bangunan di kota-kota besar maupun kota-kota baru di Indonesia terus berkembang, didukung dengan kapabilitas WIKA yang kuat dalam sektor ini. Tren pertumbuhan segmen gedung berada di 3-4% (CAGR). Meskipun tidak setinggi segmen lain, tetapi stabil meningkat dan cenderung resilien terhadap perubahan eksternal.

2. Infrastruktur Jalan

Perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan, didukung oleh kebutuhan infrastruktur jalan yang terus meningkat. Pembangunan jalan tol melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) masih marak dan dapat menjadi kesempatan bagi WIKA untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis.

3. Infrastruktur Kereta Api

Pemerintah terus mengembangkan infrastruktur kereta api untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Pada September 2024, Presiden Joko Widodo memulai pembangunan jalur baru MRT Jakarta yang membentang sejauh 25 kilometer dari Bekasi hingga Jakarta Barat. Proyek ini didanai melalui pinjaman hampir \$1 miliar dari Jepang dan ditargetkan selesai pada 2031. Selain MRT, kebutuhan akan pengembangan jaringan kereta api lainnya juga terus meningkat. Hal ini mencakup pembangunan dan perpanjangan jalur untuk layanan dalam kota (LRT dan MRT) serta antar kota, seperti Kereta Bandara di Ibu Kota Nusantara dan Kereta Antar kota Jakarta-Surabaya. Tren peningkatan jumlah penumpang kereta yang mencapai 15-20% per tahun semakin memperkuat urgensi pengembangan infrastruktur transportasi ini.

4. Energi dan Industri

Peningkatan kebijakan global tentang keberlanjutan mendorong transformasi energi. Kebutuhan energi yang berkelanjutan tetap tinggi seiring dengan perkembangan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat. Proyek energi baru terbarukan (EBT) dan infrastruktur listrik baru menciptakan peluang pasar signifikan. Pemerintah menargetkan akselerasi transisi energi dengan proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung (*floating solar power*), pengembangan *geothermal*, serta peningkatan kapasitas smelter berbasis energi hijau.

Dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, WIKA berupaya memastikan keberlanjutan serta pertumbuhan bisnis melalui beberapa strategi penguatan usaha, seperti diversifikasi portofolio dan ekspansi pasar, peningkatan efisiensi operasional, pendekatan ESG, penguatan struktur keuangan dan manajemen risiko, serta pengembangan kapasitas SDM dan inovasi.

Based on the results of the 2024 Market and Customer Research, WIKA has identified sectors with high market attractiveness, medium competition, and varying margins.

1. Building Construction

Urbanization and the demand for buildings in both large cities and new cities in Indonesia continue to grow, supported by WIKA's strong capabilities in this sector. The growth trend for the building segment is 3-4% (CAGR). While not as high as other segments, it remains stable and tends to be resilient to external changes.

2. Road Infrastructure

The Ministry of Public Works and Public Housing's (PUPR) planning will be a source of sustainable revenue, supported by the increasing demand for road infrastructure. Toll road development through the Public-Private Partnership (PPP) scheme is still widespread and could provide opportunities for WIKA to participate in strategic projects.

3. Railway Infrastructure

The government continues to develop railway infrastructure to improve connectivity and reduce traffic congestion. In September 2024, President Joko Widodo launched the construction of a new MRT Jakarta route, extending 25 kilometers from Bekasi to West Jakarta. This project is financed through a nearly \$1 billion loan from Japan and is expected to be completed by 2031. In addition to the MRT, there is a growing need for the development of other rail networks, including the construction and extension of urban (LRT and MRT) and intercity lines, such as the Airport Rail Link in the Capital City of Nusantara and the Jakarta-Surabaya Intercity Train. The trend of increasing train passenger numbers, which grows by 15-20% annually, further strengthens the urgency of developing this transportation infrastructure.

4. Energy and Industry

Global sustainability policies are driving energy transformation. The need for sustainable energy remains high in line with infrastructure development and societal demands. Renewable energy (EBT) projects and new electrical infrastructure create significant market opportunities. The government is targeting the acceleration of the energy transition through projects like floating solar power plants, geothermal development, and the enhancement of green energy-based smelter capacity.

With these various opportunities and challenges, WIKA strives to ensure business sustainability and growth through several business strengthening strategies, such as portfolio diversification and market expansion, operational efficiency improvement, ESG approaches, strengthening financial structures and risk management, as well as capacity building of human capital and innovation.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI UNTUK 1 (SATU) TAHUN KE DEPAN

Perbandingan antara Target dan Realisasi

Perseroan telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan kondisi industri dan ekonomi. Adapun perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan berdasarkan RKAP Tahun 2024 dibanding realisasi kinerja tahun buku 2024, adalah sebagai berikut.

Uraian Description	Realisasi 2024 (Rp-juta) 2024 Realization (Rp-million)	Target 2024 (Rp-juta) 2024 Target (Rp-million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024 Achievement of Realization against 2024 Target (%)	
Kontrak Dihadapi Order Book	65,057,816	76,229,402	85.34%	↓
Pemasaran/Kontrak Baru Marketing/New Contract	20,655,852	31,073,858	66.47%	↓
Pendapatan Bersih Net Revenue	19,915,593	23,968,954	83.09%	↓
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(1,988,741)	(5,630,884)	35.32%	↑
Jumlah Aset Total Assets	64,074,516	64,702,502	99.03%	↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	51,211,259	53,700,810	95.36%	↓
Jumlah Ekuitas Total Equity	12,863,257	11,001,692	116.92%	↑
Pengembangan Kompetensi SDM HC Competency Development	18,425	18,745	98,3%	-

Kontrak Dihadapi

Perseroan mencatat realisasi atas kontrak dihadapi sebesar Rp65.058 miliar di tahun 2024, atau mencapai 85.34% terhadap target sebesar Rp76.229 miliar. Kontrak Dihadapi terdiri dari kontrak lama sebesar Rp44.402 miliar dan kontrak baru 20.656. Besaran kontrak lama berasal dari perolehan di tahun tahun sebelumnya, dimana Perseroan mendapatkan beberapa proyek-proyek khusus dari Pemerintah dengan omzet kontrak yang tinggi.

Pemasaran/Kontrak Baru

Di tahun 2024 Perseroan berhasil mencatatkan perolehan kontrak baru dari aktivitas pemasaran, sebesar Rp20.656 miliar atau mencapai 66.47% terhadap target sebesar Rp31.074 miliar. Hal tersebut dikarenakan Perseroan lebih selektif seiring dengan penerapan *stream* penyehatan keuangan yang dilakukan dengan upaya menargetkan atau fokus pada proyek-proyek yang memiliki pembayaran *monthly progress*.

Pendapatan Bersih

Perseroan berhasil membukukan pendapatan di tahun 2024 sebesar Rp19.916 miliar atau mencapai 83.09% terhadap target sebesar Rp23.969 miliar. Seiring dengan menurunnya kontrak baru yang di dapat pada tahun 2024 berdampak pada perseroan dalam menghasilkan pendapatan bersih.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION AND ONE YEAR PROJECTION

Comparison between Target and Realization

The Company has established a number of targets to be achieved in the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), which have been adjusted to the industry and economic conditions. The comparison of the achievement of several established targets based on the 2024 RKAP with the realization in the 2024 fiscal year is as follows.

Order Book

The Company recorded the realization of order book Rp65,058 billion in 2024, or reaching 85.34% of the target of Rp76,229 billion. Order book consist of old contracts amounting to Rp44,402 billion and new contracts of 20,656. The amount of old contracts comes from acquisitions in previous years, where the Company obtained several special projects from the Government with high contract turnover.

Marketing/New Contracts

In 2024, the Company succeeded in recording new contract acquisitions from marketing activities, amounting to Rp20,656 billion or reaching 66.47% of the target of Rp31,074 billion. This was due to the Company being more selective in line with the financial recovery stream, which was carried out by targeting or focusing on projects that had monthly progress payments.

Net Revenue

The Company managed to record revenue in 2024 of Rp19,916 billion, or 83.09% of the target of Rp23,969 billion. The decrease in new contracts obtained in 2024 had an impact on the Company's ability to generate net revenue.



Laba (Rugi) Bersih

Di tahun 2024, Perseroan mencatatkan rugi bersih sebesar Rp1.987 miliar atau mencapai 35.32% terhadap target rugi sebesar Rp5.631 miliar. Nilai Kerugian yang dibukukan lebih rendah dibandingkan target dikarenakan adanya nilai keuntungan dari restrukturisasi pinjaman perbankan yang telah dilakukan pada 2024.

Jumlah Aset

Di tahun 2024 Perseroan berhasil membukukan jumlah aset sebesar Rp64.074 miliar atau mencapai 99.03% terhadap target sebesar Rp64.702 miliar. Jumlah aset menurun seiring dengan telah diterapkannya 8 substream penyehatan keuangan dengan salah satu stream penyehatannya yaitu percepatan penagihan piutang bermasalah yang menyebabkan saldo piutang menurun.

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp51.211 miliar atau mencapai 95.36% terhadap target sebesar Rp53.701 miliar. Menurunnya jumlah liabilitas disebabkan oleh pelunasan utang obligasi dan sukuk perseroan yang jatuh tempo pada tahun 2024 dan penurunan saldo hutang usaha perseroan.

Jumlah Ekuitas

Di tahun 2024 Perseroan membukukan jumlah ekuitas sebesar Rp12.863 miliar atau mencapai 116.92% terhadap target sebesar Rp11.002 miliar. Jumlah ekuitas melebihi target disebabkan oleh penambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar 6 triliun dan nilai rugi bersih yang lebih kecil dibandingkan rencana.

Pengembangan Kompetensi SDM

Perseroan telah merealisasikan biaya pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di tahun 2024 sebesar Rp18,425 miliar atau mencapai 98,3% terhadap target sebesar Rp18,745 miliar. Ketidaktercapaian atas target tersebut dikarenakan adanya efisiensi biaya pelatihan dan seminar dan perubahan metode pembelajaran mandiri secara online.

PROYEKSI UNTUK 1 (SATU) TAHUN KE DEPAN

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan prospek yang cerah. Penguatan ini tercermin dari kinerja solid di sejumlah sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, sumber daya alam, dan konstruksi. Dalam konteks tersebut, evaluasi investasi yang cermat dan perencanaan investasi yang strategis menjadi semakin penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan perusahaan, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada di berbagai sektor potensial.

Perseroan telah mengambil berbagai langkah strategis guna menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis, dengan fokus utama pada keberlanjutan dan efisiensi operasional. Salah satu inisiatif kunci adalah optimalisasi belanja modal (*capital expenditure*) yang dirancang untuk menjaga keseimbangan arus kas perusahaan agar tetap sehat dan terkendali. Langkah ini juga dilakukan sebagai bagian dari strategi manajemen risiko keuangan yang bertujuan untuk memastikan tersedianya likuiditas yang memadai bagi Perseroan,

Net Profit (Loss)

In 2024, the Company recorded a net loss of Rp1,987 billion or 35.32% of the target loss of Rp5,631 billion. The loss value booked was lower than the target due to the profit value from the restructuring of bank loans that had been carried out in 2024.

Total Assets

In 2024, the Company managed to record total assets of Rp64,074 billion, or 99.03% of the target of Rp64,702 billion. Total assets decreased in line with the implementation of 8 financial recovery substreams, one of which was the acceleration of collection of bad debts, which caused the balance of receivables to decrease.

Total Liabilities

The Company's total liabilities in 2024 were recorded at Rp51,211 billion, or 95.36% of the target of Rp53,701 billion. The decrease in the amount of liabilities was due to the repayment of the Company's bond and sharia bond debts that matured in 2024 and a decrease in the Company's accounts payable balance.

Total Equity

In 2024, the Company recorded equity of Rp12,863 billion, or 116.92% of the target of Rp11,002 billion. The equity exceeded the target due to an additional state capital injection (PMN) of 6 trillion and a smaller net loss than planned.

Human Capital Competency Development

The Company has realized Human Capital (HC) competency development costs in 2024 amounting to Rp18.425 billion or reaching 98.3% of the target of Rp18.745 billion. The failure to achieve this target was due to the efficiency of training and seminar costs and changes in online self-learning methods.

PROJECTIONS FOR THE NEXT YEAR

Amid ongoing global economic uncertainty, the Indonesian economy continues to show resilience and bright prospects. This strengthening is reflected in solid performance in a number of key sectors such as manufacturing, trade, natural resources, and construction. In this context, careful investment evaluation and strategic investment planning are increasingly important to ensure the sustainability of company growth, while taking advantage of opportunities in various potential sectors.

The Company has taken various strategic steps to address the challenges of dynamic economy, with a primary focus on sustainability and operational efficiency. One of the key initiatives is the optimization of capital expenditure, designed to maintain a healthy and controlled cash flow balance of the company. This step is also part of the financial risk management strategy aimed at ensuring adequate liquidity for the Company, both for operational needs as well as long-term investments. Additionally, business

baik untuk kebutuhan operasional maupun investasi jangka panjang. Selain itu, restrukturisasi portofolio usaha menjadi prioritas utama dalam upaya untuk memperkuat struktur bisnis yang lebih efisien dan fokus pada *core business* yang memiliki prospek terbaik. Langkah-langkah ini melibatkan pengkajian ulang atas segmen-segmen usaha yang ada, dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja, mengurangi risiko, serta memaksimalkan potensi pertumbuhan.

Perseroan secara berkala melakukan review menyeluruh terhadap seluruh program pengembangan dan investasi yang tengah berjalan. Peninjauan ini dilakukan untuk menilai kesesuaian program-program tersebut dengan visi jangka panjang perusahaan, serta memastikan bahwa alokasi sumber daya tetap berada pada jalur yang tepat, sesuai dengan prioritas dan kondisi keuangan terkini. Sebagai bagian dari upaya *refocusing*, Perseroan juga menjalankan strategi asset recycling, yaitu divestasi atau pelepasan beberapa investasi yang dinilai tidak lagi sejalan dengan fokus inti bisnis perusahaan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat struktur keuangan, sekaligus memfokuskan energi dan sumber daya perusahaan pada aset dan proyek yang diyakini memiliki nilai tambah lebih besar serta relevansi yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan jangka panjang.

Berdasarkan hal-hal tersebut Perseroan telah memproyeksikan sejumlah target optimis terkait kinerja Perseroan untuk 1 (tahun) ke depan, sebagaimana terlampir berikut ini.

portfolio restructuring has become a top priority in efforts made to strengthen a more efficient business structure and focus on core businesses with the best prospects. These steps involve a review of the existing business segments, with the goal of optimizing performance, reducing risks, and maximizing growth potential.

The Company periodically conducts a comprehensive review of all ongoing development and investment programs. This review is conducted to assess the suitability of these programs with the Company's long-term vision, and to ensure that the allocation of resources remains on the right track, in accordance with current priorities and financial conditions. As part of its refocusing efforts, the Company is also implementing an asset recycling strategy, which involves divesting several investments that are no longer considered to be in line with the core focus of the company's business. This step was taken as an effort to strengthen the financial structure, while focusing the company's energy and resources on assets and projects that are believed to have greater added value and higher relevance to long-term growth.

Based on these matters, the Company has projected a number of optimistic targets related to the Company's performance for the next 1 (one) year, as attached below.

Uraian Description	Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024 2025 Projection against 2024 Realization (%)
Kontrak Dihadapi Order Book	91.44%
Pemasaran/Kontrak Baru Marketing/New Contract	112.71%
Pendapatan Bersih Net Revenue	101.73%
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	-19.09%
Jumlah Aset Total Assets	92.09%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	99.19%
Jumlah Ekuitas Total Equity	63.82%
Kebijakan Dividen (Dividen yang akan Dibayarkan di Tahun 2025) Dividend Policy (Dividend to be Paid in 2025)	-
Pengembangan Kompetensi SDM HC Competency Development	-51.7%

Kontrak Dihadapi

Untuk tahun 2025, kontrak dihadapi Perseroan diproyeksikan sebesar 91.44% terhadap realisasi tahun 2024. Tahun 2025 diproyeksikan Kontrak Dihadapi Perseroan akan menurun yang mengikuti menurunnya anggaran infrastruktur dalam APBN 2025 dibandingkan 2024

Order Book

For 2025, the Company's order book is projected to be 91.44% of the 2024 realization. In 2025, the Company's order book is projected to decline following the decline in infrastructure budget in the 2025 State Budget compared to 2024



Pemasaran/Kontrak Baru

Pemasaran/Kontrak baru yang dapat dibukukan Perseroan di tahun 2025 diproyeksikan mencapai 112.71% terhadap realisasi tahun 2024. Tahun 2025 diproyeksikan Kontrak Baru Perseroan akan menurun yang mengikuti menurunnya anggaran Pendapatan di tahun 2025 diproyeksikan dapat mencapai 101.73% terhadap realisasi tahun 2024. Dengan telah diimplementasikannya 8 stream penyehatan keuangan pada 2024 terkait perbaikan *portofolio orderbook* dimana perseroan lebih selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan dengan berfokus pada proyek yang memiliki pembayaran *monthly payment* diproyeksikan akan berdampak pada pendapatan bersih perseroan pada 2025

Laba (Rugi) Bersih

Di tahun 2025, Perseroan memproyeksikan mencatatkan laba bersih mencapai -19.09% terhadap realisasi rugi yang dibukukan Perseroan di tahun 2024. Laba bersih pada 2025 diproyeksikan dapat tercapai apabila Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 dapat terserap sepenuhnya pada 2025, serta PMN Tahun Anggaran 2025 dapat terealisasi. Diproyeksikan pada 2025 perseroan dapat mengurangi hutang berbunga sehingga beban bunga akibat hutang berbunga dapat menurun.

Jumlah Aset

Jumlah aset untuk tahun 2025 diproyeksikan mencapai 92.09% terhadap realisasi tahun 2024, Jumlah aset 2025 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan realisasi 2024 disebabkan oleh menurunnya aset aset kurang produktif perseroan

Jumlah Liabilitas

Jumlah Liabilitas di tahun 2025 diproyeksikan sebesar 99.19% terhadap realisasi tahun 2024, Jumlah liabilitas 2025 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi 2024 yang diakibatkan penurunan hutang usaha serta hutang berbunga perseroan.

Jumlah Ekuitas

Perseroan memproyeksikan dapat membukukan jumlah ekuitas yang mencapai 63.82% terhadap realisasi tahun 2024, Jumlah ekuitas pada 2025 diproyeksikan akan mengalami penurunan seiring proyeksi tekanan rugi yang akan dibukukan perseroan.

Kebijakan Dividen

Pada tahun 2025 diproyeksikan perseroan tidak membagikan dividen karena pada tahun 2025 diproyeksikan saldo laba perseroan masih defisit.

Pengembangan Kompetensi SDM

Pengembangan Kompetensi SDM untuk tahun 2025 diproyeksikan mencapai -51.7% terhadap realisasi tahun 2024, penurunan tersebut disebabkan karena adanya efisiensi biaya pengembangan SDM yang berfokus pada pelatihan mandatory, perpanjangan sertifikasi, dan sertifikasi-sertifikasi yang mendukung proses tender.

Marketing/New Contracts

The new marketing/contracts that the Company can book in 2025 are projected to reach 112.71% of the 2024 realization. In 2025, the Company's New Contracts are projected to decline following the decline in budget. Revenue in 2025 is projected to reach 101.73% of the 2024 realization. With the implementation of 8 financial recovery streams in 2024 related to the improvement of orderbook portfolio, the Company is more selective in choosing projects to work on, focusing on projects with monthly payment. This is projected to have an impact on the Company's net revenue in 2025.

Net Profit (Loss)

In 2025, the Company projects a net profit of -19.09% compared to the realized loss booked by the Company in 2024. Net profit in 2025 is projected to be achieved if the State Capital Participation (PMN) for Fiscal Year 2024 can be fully absorbed in 2025, and the PMN for Fiscal Year 2025 can be realized. It is projected that in 2025 the Company will be able to reduce interest-bearing debt so that interest expenses due to interest-bearing debt can decrease.

Total Assets

Total assets for 2025 are projected to reach 92.09% of the 2024 realization. Total assets in 2025 are projected to decrease compared to the 2024 realization due to a decrease in the Company's less productive assets.

Total Liabilities

Total Liabilities in 2025 are projected at 99.19% of the 2024 realization. Total liabilities in 2025 are projected to decrease compared to the 2024 realization due to a decrease in the Company's trade payables and interest-bearing debt.

Total Equity

The Company projects to be able to record an equity amounting to 63.82% of the 2024 realization. Total equity in 2025 is projected to decline in line with the projected loss pressure to be booked by the Company.

Dividend Policy

In 2025, it is projected that the Company will not distribute dividends because in 2025 the Company's retained earnings are projected to still be in deficit.

Human Capital Competency Development

Human Capital Competency Development for 2025 is projected to reach -51.7% against the realization in 2024. This decrease is due to the efficiency of human capital development costs that focus on mandatory training, certification extensions, and certifications that support the tender process.



Relokasi Jalan Sei Duri
Relocation of Sei Duri Road



Aspek Pemasaran

Marketing Aspect



Bendungan Ameroro
Ameroro Dam

Strategi Pemasaran Tahun 2024

WIKA Berkomitmen melanjutkan pertumbuhan kinerjanya secara berkelanjutan di tahun 2024 yang diliputi tantangan ditengah masa penyehatan WIKA dan kondisi perekonomian global. Oleh karena itu WIKA melakukan penguatan strategi untuk memastikan komitmen serta target tersebut dapat tercapai.

Di tahun 2024, strategi WIKA akan difokuskan pada penyehatan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di seluruh sektor potensial di industri jasa konstruksi, EPCC, Properti dan Manufaktur, untuk itu WIKA telah merumuskan strategi sebagai upaya pencapaian target, yaitu:

Marketing Strategy for 2024

WIKA's is committed to continuing its performance growth sustainably in 2024, despite the challenges posed by WIKA's ongoing recovery process and global economic conditions. To achieve this, WIKA's is strengthening its strategy to ensure that its commitments and targets can be met.

In 2024, WIKA's strategy focused on business recovery and sustainable growth across all potential sectors in the construction services, EPCC, Property, and Manufacturing industries. To achieve these targets, WIKA's has formulated strategies to drive success, as follows:

Strategi Korporasi

1. Melakukan akselerasi ekspansi pasar dalam rangka memelihara pasar secara efisien dan efektif, dengan memperhatikan proses bisnis dalam Substream Penyehatan WIKA.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala ke Pemberi Kerja dan Kementerian BUMN sehingga dapat menciptakan emotional deposit dan sense of being ease (rasa nyaman) dalam menggunakan jasa dan produk WIKA.
3. Meningkatkan penetrasi pasar Renewable Energy dan Hilirisasi.
4. Menerapkan Owner Selection dan Project Selection berbasis prinsip 4 Eyes Principle Management Risiko dalam proses bisnis perolehan proyek.
5. Efisiensi dan perbaikan Harga Pokok Penjualan Perusahaan.
6. Meningkatkan sinergi antar Divisi dan seluruh Entitas Anak untuk meningkatkan competitiveness dengan melakukan alignment strategi entitas anak dan strategi perusahaan induk.
7. Meningkatkan komitmen terhadap keberlanjutan implementasi ESG, dan membangun ekosistem green energy yang selaras dengan inisiatif dan strategi transformasi bisnis.
8. Mengimplementasikan transformasi digital dalam proses bisnis pemasaran.

Pangsa Pasar

WIKA senantiasa melakukan survei untuk mengetahui pangsa pasar Perseroan setiap tahunnya, yang mengacu pada capaian kontrak baru. Berdasarkan survei yang telah dilakukan Perseroan, sampai dengan bulan Desember tahun 2024 WIKA tercatat menguasai 18.40% pasar konstruksi nasional terhadap market size jasa konstruksi nasional yang tercatat pada Kontrak Baru 5 (lima) BUMN Karya di tahun 2024. WIKA menunjukkan kinerja yang solid melalui pencapaian kontrak baru ditengah ketidakpastian akan perekonomian global selama tahun 2024 dan mampu tetap konsisten menjadi champion diantara 5 (lima) BUMN Karya, hal ini tercermin pada perolehan kontrak baru klaster EPCC, Properti dan Entitas anak yang membuku kontrak paling besar di tahun 2024. Kedepan, WIKA terus berkomitmen untuk memberikan best service excellent di bidang konstruksi, EPCC, Properti dan manufaktur secara berkelanjutan.

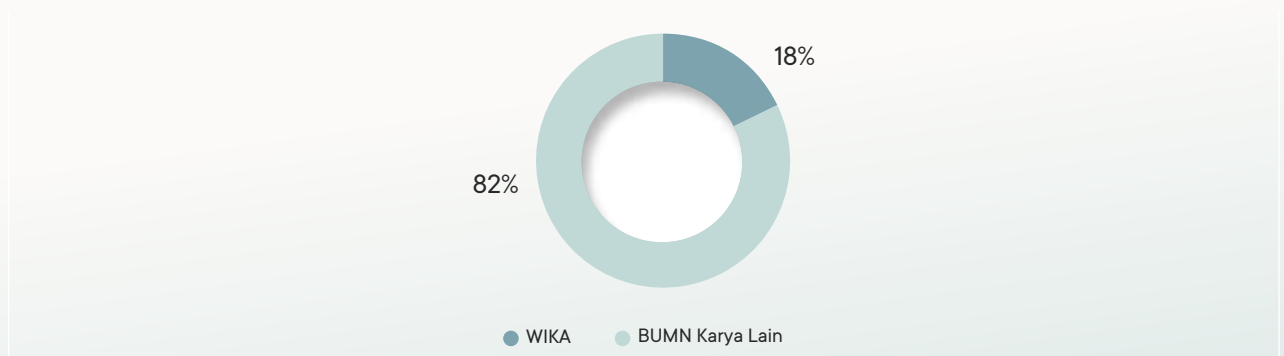
Corporate Strategy

1. Accelerating market expansion to efficiently and effectively maintain the market, taking into account the business processes in WIKA's Recovery Substream.
2. Conducting regular coordination and communication with Owners and the Ministry of SOEs to create emotional deposit and a sense of being ease for using WIKA's services and products.
3. Increasing market penetration in Renewable Energy and downstream industries.
4. Implementing Owner Selection and Project Selection based on the 4 Eyes Principle Risk Management in the project acquisition business process.
5. Efficiency improvements and reduction in the Company's Cost of Goods Sold.
6. Enhancing synergy between Divisions and all Subsidiaries to improve competitiveness by aligning the subsidiaries' strategies with the parent company's strategy.
7. Strengthening the commitment to the sustainable implementation of ESG and building a green energy ecosystem that aligns with business transformation strategies and initiatives.
8. Implementing digital transformation in the marketing business processes.

Market Share

WIKA's consistently conducts surveys to assess the Company's market share every year, based on new contract achievements. According to the survey conducted, as of December 2024, WIKA's controls 18.40% of the national construction market based on the market size of national construction services as reflected in the New Contracts from the 5 (five) major SOE Karya in 2024. WIKA's demonstrated solid performance through its new contract achievements amidst the uncertainty of the global economy in 2024 and remained consistently as a champion among the 5 (five) SOE Karya. This is reflected in the new contracts obtained in the EPCC, Property clusters, and subsidiaries, which recorded the largest contracts in 2024. Moving forward, WIKA's remains committed to delivering excellent service in construction, EPCC, Property, and manufacturing sectors sustainably.

Market Size WIKA di antara 5 BUMN Karya dalam Industri Konstruksi Nasional Tahun 2024
WIKA's Market Share among other SOE Karya in the National Construction Industry In 2024





Tinjauan Keuangan Lainnya

Other Financial Overview



Jalan Tol Serang-Panimbang
Jalan Tol Serang-Panimbang

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Kebijakan Pembagian Dividen

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi setiap peraturan yang berlaku, di mana Perseroan memiliki kebijakan untuk melakukan pembagian dividen berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan berupaya untuk memenuhi hak para pemegang saham tanpa mengesampingkan kondisi Perseroan, serta mempertimbangkan tingkat pertumbuhan usaha ke depan dan rencana ekspansi WIKA dalam keputusan pembagian dividen.

Perseroan telah menetapkan bahwa, dalam dividen tunai, wajib dilaksanakan pembayaran kepada para pemegang saham yang berhak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai setelah ditetapkan oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

DIVIDEND POLICY AND PAYOUT

Dividend Payout Policy

The Company is committed to constantly complying with all applicable regulations, where the Company has a policy to distribute dividends based on the Resolution of General Meeting of Shareholders (GMS), as regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The Company strives to fulfill the rights of shareholders without disregarding the Company's condition, as well as considering the level of future business growth and WIKA's expansion plans in deciding on dividend payout.

The Company has stipulated that, in cash dividends, payment must be made to the entitled shareholders no later than 30 (thirty) days after the announcement of summary of GMS minutes that decides the distribution of cash dividends after being determined by the Board of Directors and obtaining approval from the Board of Commissioners.

Pembagian Dividen dalam 2 (Dua) Tahun Buku Terakhir

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku sebelumnya, bahwa pada tahun 2023, Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen. Hal tersebut berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 4 Mei 2023, di mana Pemegang Saham memutuskan untuk tidak membagikan dividen di tahun 2023 atas hasil kinerja tahun buku 2022.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 15 Mei 2024, Pemegang Saham memutuskan untuk tidak membagikan dividen dari hasil kinerja tahun buku 2023. Atas hasil keputusan tersebut, Perseroan tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang patuh terhadap semua peraturan yang berlaku, Perseroan telah melakukan pemenuhan terkait kewajiban dalam membayar pajak yang merupakan salah satu bentuk kontribusi Perseroan kepada negara. Adapun kontribusi Perseroan kepada negara berupa pajak di tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Dividend Payout for the Last 2 (Two) Fiscal Years

As explained in the previous Annual Report, the Company decided not to distribute dividends in 2023. This was based on the resolution of Annual GMS held on May 4, 2023, in which the Shareholders decided not to distribute dividends in 2023 from the results of the 2022 fiscal year.

Based on the resolution of Annual GMS held on May 15, 2024, the Shareholders decided not to distribute dividends from the performance results of the 2023 fiscal year. As a result of this resolution, the Company has not distributed dividends in the last 2 (two) fiscal years.

TAX PAYMENT COMPLIANCE

As a State-Owned Enterprise (SOE) that complies with all applicable regulations, the Company has fulfilled its obligations in paying taxes which is one form of its contribution to the state. The Company's contribution to the state in the form of taxes in 2023 and 2024 is as follows.

Jenis Pajak Type of Tax	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan Increase (Decrease)		
			Selisih Difference (%)	Persentase Percentage (%)	
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	99.180.871.145	120.738.452.046	(21.557.580.901)	-17,85%	↓
PPh 22 Income Tax 22	31.334.515.658	48.221.297.569	(16.886.781.911)	-35,02%	↓
PPh 23/26 Income Tax 23/26	13.092.987.747	19.474.178.620	(6.381.190.873)	-32,77%	↓
PPh Final Pasal 4 (2) Final Income Tax Article 4 (2)	67.133.482.916	81.663.983.218	(14.530.500.302)	-17,79%	↓
PPh Pasal 15 Income Tax Article 15	-	33.379.937	-	-	
PPN-K Output VAT	453.544.016.488	871.530.601.066	(417.986.584.578)	-47,96%	↓
PPN-M Input VAT	440.251.927.254	716.181.579.429	(275.929.652.175)	-38,53%	↓
BM Luxury Goods Import	-	2.728.122.000	-	-	
PPN-Impor Import VAT	-	7.964.288.000	-	-	
Jumlah Pajak Total Tax	1.104.537.801.208	1.868.535.881.885	(763.998.080.677)	-40,89%	↓



REALISASI PENGGUNAAN DANA TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pernyataan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan modal BUMN dan/atau Perseroan terbatas dan dikelola secara korporasi. Penggunaan tambahan Pernyataan Modal Negara (PMN) diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi penambahan PMN yang diterima saat tahun berjalan, penambahan PMN yang diterima tahun sebelumnya yang belum habis digunakan, dan/atau penambahan PMN tahun-tahun berikutnya. WIKA telah memperoleh PMN pada tahun 1994, tahun 2000, dan tahun 2016 dalam membantu Pemerintah untuk mendorong peningkatan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur.

Berikut adalah penjelasan terkait realisasi penggunaan dana PMN yang diterima WIKA di tahun 1994, tahun 2000, dan tahun 2016.

PMN WIKA Tahun 1994

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, Perseroan telah memperoleh penambahan PMN berupa tanah seluas 257.345 m² yang masing-masing terletak di Desa Pondok Jagung dan Desa Lengkong Wetan Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang seluas 120.045 m² dan di Desa Jimbaran Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali seluas 137.300 m² yang pada saat ini dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum, dengan Nilai penambahan PMN ke dalam modal saham Perseroan atas tanah tersebut adalah sebesar Rp1.561.665.833,-.

PMN WIKA Tahun 2000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2000 tentang Penambahan Pernyataan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, Perseroan telah memperoleh penambahan PMN yang berasal dari sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Gowa berupa tanah tapak pabrik seluas 385.178 m², bangunan pabrik seluas 24.560 m², tanah untuk kantor seluas 4.319 m² serta bangunan kantor seluas 1.694 m² yang terletak di Kabupaten Goa dan Kota Makassar dengan Nilai penambahan PMN ke dalam modal saham Perseroan atas tanah tersebut adalah sebesar Rp1.523.562.891,-.

PMN WIKA Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2016, Perseroan telah memperoleh Penambahan PMN yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan usaha berupa investasi dan modal kerja dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000.000. Berikut adalah penjelasan terkait dana penambahan PMN WIKA Tahun 2016, sebagaimana terlampir di bawah ini.

REALIZATION OF THE USE OF ADDITIONAL STATE CAPITAL PARTICIPATION FUNDS

State Capital Participation (PMN) is the separation of state assets from the state budget which is used as capital for SOEs and/or limited liability companies and managed corporately. The use of additional State Capital Participation (PMN) is regulated in this Ministerial Regulation, including additional PMN received during the current year, additional PMN received in the previous year that has not been fully utilized, and/or additional PMN in subsequent years. WIKA's has received PMN in 1994, 2000, and 2016 to assist the Government in boosting the economy through infrastructure development.

The following is an explanation regarding the realization of the use of PMN funds received by WIKA's in 1994, 2000, and 2016.

WIKA'S PMN in 1994

Based on Government Regulation No. 24 of 1994 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia in the Share Capital of the Company (Persero) PT Wijaya Karya, the Company has obtained additional PMN in the form of 257,345 m² of land, each located in Pondok Jagung Village and Lengkong Wetan Village, Serpong District, Tangerang Regency covering an area of 120,045 m² and in Jimbaran Village, Kuta District, Badung Regency, Bali covering an area of 137,300 m² which is currently managed by the Ministry of Public Works, with the value of additional PMN into the Company's share capital for the land amounting to Rp1,561,665,833.

PMN WIKA'S in 2000

Based on Government Regulation No. 85 of 2000 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company PT Wijaya Karya, the Company has obtained additional State Capital Participation originating from the remaining proceeds of the liquidation of the Company PT Kertas Gowa in the form of factory land covering an area of 385,178 m², factory buildings covering an area of 24,560 m², land for offices covering an area of 4,319 m² and office buildings covering an area of 1,694 m² located in Goa Regency and Makassar City. The value of additional PMN into the Company's share capital for the land is Rp1,523,562,891.

PMN WIKA'S in 2016

Based on Government Regulation No. 42 of 2016, the Company has obtained an Additional PMN earmarked for business development activities in the form of investment and working capital with a value of Rp4,000,000,000,000. The following is an explanation regarding the additional PMN WIKA's funds in 2016, as attached below.

Ralisasi Penggunaan Dana PMN WIKA Tahun 2016 Realization of WIKA PMN Fund Usage in 2016

No	Kegiatan Activity	Tanggal Pencairan Disbursement Date	Nilai PMN (Rp-Juta) PMN value (Rp-Million)	Realisasi Keuangan Penggunaan Tambahan PMN Tahun 2024 (Rp-juta) Financial Realization of Additional Use of PMN in 2024 (Rp-million)				Realisasi Fisik Penggunaan Tambahan PMN Tahun 2024 Physical Realization of Additional Use of PMN in 2024			
				Tw-I Q1	Tw-II Q2	Tw-III Q3	Tw-IV Q4	Tw-I Q1	Tw-II Q2	Tw-III Q3	Tw-IV Q4
1	Pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda Construction of Balikpapan Samarinda Toll Road	3 November 2016 November 3, 2016	548.000	Telah terealisasi pada Tw-II 2021 Has been realized in Q2 2021				Per Tw-III 2021 telah terealisasi secara fisik 100% As of Q3 2021, 100% has been physically realized			
2	Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung Construction of Manado Bitung Toll Road	3 November 2016 November 3, 2016	273.000	Telah terealisasi pada Tw-II 2022 Has been realized in Q2 2022				Per Tw-II 2022 telah terealisasi secara fisik 100% As of Q2 2022, 100% has been physically realized			
3	Pembangunan Jalan Tol Soreang – Pasir Koja Construction of Soreang – Pasir Koja Toll Road	3 November 2016 November 3, 2016	131.622	Telah terealisasi pada Tw-III 2018 Has been realized in Q3 2018				Per Tw-III 2018 telah terealisasi secara fisik 100% As of Q3 2018, 100% has been physically realized			
4	Pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang Construction of Serang Panimbang Toll Road	3 November 2016 November 3, 2016	1.279.175	Telah terealisasi pada Tw-III 2018 Has been realized in Q3 2018				Per Tw-III 2018 telah terealisasi secara fisik 100% As of Q3 2018, 100% has been physically realized			
5	Pembangunan Jalan Tol Kunci Cengkareng Construction of Kunci Cengkareng Toll Road	3 November 2016 November 3, 2016	1.366.201	Telah terealisasi pada Tw-II 2021 Has been realized in Q2 2021				Per Tw-III 2021 telah terealisasi secara fisik 100% As of Q3 2021, 100% has been physically realized			
6	Pembangunan Spam Jatiluhur Construction of Spam Jatiluhur	3 November 2016 November 3, 2016	402.000	Telah terealisasi pada Tw-II 2021 Has been realized in Q2 2021				Per Tw-IV 2024 telah terealisasi secara fisik 100% As of Q4 2024, 100% has been physically realized			

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I

Pada tahun 2016, Perseroan melakukan penawaran umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I). Penawaran Umum Terbatas (PUT) atas pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK No. S-631/D.04/2016 tanggal 3 November 2016 atas Pernyataan Pendaftaran dalam melakukan Penawaran Umum Terbatas.

REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights I

In 2016, the Company has conducted a public offering for Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights I (PMHMETD I) in 2016. Limited Public Offering (PUT) of shareholders with Pre-emptive Rights (HMETD) has received an effective statement from OJK No. S-631/D.04/2016 dated November 3, 2016 regarding the Registration Statement in conducting Limited Public Offering.



Tabel Realisasi Penggunaan Dana Hasil PMHMETD I per 31 Desember 2024

No	Jenis Penawaran Umum Types of Public Offering	Tanggal Efektif Effective date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Realized Value of Public Offering Proceeds (Rp)		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum Proceeds of Public Offering	Biaya Penawaran Umum Costs of Public Offering	Hasil Bersih Net Proceeds
1	PMHMETD I	3 November 2016	6.149.183.490.960	41.004.522.564	6.108.178.968.396

Pada 25 November 2016, WIKA menerbitkan jumlah PUT dengan HMETD sebanyak 2.820.726.372 lembar saham dengan harga nominal Rp100 per lembar dengan harga penawaran Rp2.180 per lembar saham. Kemudian, jumlah saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah PUT adalah sebanyak 8.969.951.372 lembar saham.

On November 25, 2016, WIKA issued a number of PUT with pre-emptive rights of 2,820,726,372 shares with a nominal price of Rp100 per share and an offering price of Rp2,180 per share. Afterward, the number of Company shares listed on the Indonesia Stock Exchange after the LPO was 8,969,951,372 shares.

Berdasarkan dana hasil PMHMETD I yang diperoleh Perseroan (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa, dan beban emisi lainnya), digunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 48,40% digunakan untuk kebutuhan belanja modal dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur prioritas, seperti pembangunan jalan tol, SPAM, dermaga, pembangkit listrik, dan pengembangan kawasan;
- Sekitar 51,60% digunakan untuk kebutuhan modal kerja untuk mengembangkan usaha yang dijalankan Perseroan, yakni untuk pengembangan usaha di bidang infrastruktur dan pembangunan jalan tol.

Based on the proceeds from the PMHMETD I obtained by the Company (after deducting commissions, fees, service fees, and other issuance expenses), the funds were used as follows:

- Approximately 48.40% was used for capital expenditure needs to support priority infrastructure projects, such as the construction of toll roads, water supply systems, docks, power plants, and regional development;
- Approximately 51.60% is used for working capital needs to develop the Company's business, namely for business development in the infrastructure and toll road construction sectors.

Pada 31 Maret 2022, Penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD) Perseroan telah seluruhnya terserap dan telah sesuai dengan rencana penggunaan dana menurut Prospektus serta RUPS.

As of March 31, 2022, the use of funds from the Company's Capital Increase with Pre-emptive Rights I (PMHMETD) has been fully absorbed and is in accordance with the plan for the use of funds according to the Prospectus and GMS.

Adapun, PMHMETD I ini, sempat mengalami 2 (dua) kali perubahan penggunaan dana, yakni berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 30 April 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 27 Mei 2021, dengan rincian dan alasan perubahan sebagaimana terlampir berikut ini.

Meanwhile, the PMHMETD I had undergone 2 (two) changes in the use of funds, namely based on the Resolution of Annual GMS for Fiscal Year 2018 dated April 30, 2019, and the Resolution of Annual GMS for Fiscal Year 2020 dated May 27, 2021, with details and reasons for the changes as attached below.

1. Perubahan penggunaan dana PMHMETD I berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 30 April 2019.

Rencana Penggunaan Dana Planned Use of Funds

Nama Proyek Project Name	%
Kebutuhan Belanja Modal/Capital Expenditure Needs	65,85%
Jalan Tol Soreang – Pasir Koja/Soreang – Pasir Koja Toll Road	3,29%
Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Balikpapan – Samarinda Toll Road	11,23%
Jalan Tol Serang - Panimbang/Serang – Panimbang Toll Road	31,98%
Kawasan Industri Kuala Tanjung/Kuala Tanjung Industrial Area	11,67%
Kebutuhan Modal Kerja/Working Capital Needs	34,15%
Jalan Tol Kunciran – Cengkareng Kunciran – Cengkareng Toll Road	34,15%
Total	100%

1. Change in the use of PMHMETD I funds based on the Decree of Annual GMS for Fiscal Year 2018 dated April 30, 2019.

Perubahan Penggunaan Dana Changes in Use of Funds

Nama Proyek Project Name	%
Kebutuhan Belanja Modal/Capital Expenditure Needs	65,85%
Jalan Tol Soreang – Pasir Koja/Soreang – Pasir Koja Toll Road	3,29%
Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Balikpapan – Samarinda Toll Road	13,70%
Jalan Tol Serang - Panimbang/Serang – Panimbang Toll Road	31,98%
SPAM Jatiluhur	10,05%
Kebutuhan Modal Kerja/Working Capital Needs	34,15%
Jalan Tol Kunciran – Cengkareng Kunciran – Cengkareng Toll Road	34,15%
Total	100%

Realization of the Use of Proceeds from PMHMETD I as of December 31, 2024

Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus dan RUPS Fund Use Plan According to Prospectus and GMS (Rp)		Realisasi Penggunaan Dana Realization of Fund Use (Rp)		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Remaining Funds from Public Offering (Rp)
Belanja Modal Capital Expenditures	Modal Kerja Working capital	Belanja Modal Capital Expenditures	Modal Kerja Working capital	
2.956.556.575.934	3.151.622.392.462	2.956.556.575.934	3.151.622.392.462	-

Alasan perubahan:

Belum ada kejelasan terkait kapan proyeknya akan dibangun, sehingga realisasi dananya di prioritaskan ke proyek strategis lainnya.

Reason for change:

There is no clarity regarding when the project will be built, therefore the realization of funds is prioritized to other strategic projects.

2. Perubahan penggunaan dana PMHMETD I berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 30 April 2019.

2. Changes in the use of PMHMETD I funds based on the Decree of Annual GMS for 2018 Fiscal Year dated April 30, 2019.

Rencana Penggunaan Dana
Planned Use of Funds

Perubahan Penggunaan Dana
Changes in Use of Funds

Nama Proyek Project Name	%	Nama Proyek Project Name	%
Kebutuhan Belanja Modal/Capital Expenditure Needs	70,77%	Kebutuhan Belanja Modal/Capital Expenditure Needs	48,40%
Jalan Tol Soreang – Pasir Koja Soreang – Pasir Koja Toll Road	5,03%	Jalan Tol Soreang – Pasir Koja Soreang – Pasir Koja Toll Road	2,15%
Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Balikpapan – Samarinda Toll Road	7,35%	Jalan Tol Manado - Bitung Manado – Bitung Toll Road	5,03%
Jalan Tol Manado - Bitung/Manado – Bitung Toll Road	5,03%	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Balikpapan - Samarinda Toll Road	7,35%
Jalan Tol Serang - Panimbang/Serang – Panimbang Toll Road	20,94%	Jalan Tol Serang – Panimbang/Serang – Panimbang Toll Road	20,94%
Kawasan Industri Kuala Tanjung Kuala Tanjung Industrial Area	7,65%	Kawasan Industri Kuala Tanjung Kuala Tanjung Industrial Area	7,65%
Belanja Modal (Proyek Jalan Tol, Dermaga, Pembangkit Listrik Dan Pengembangan Kawasan) Capital Expenditure (Toll Road Project, Pier, Power Plant and Area Development)	5,28%	Belanja Modal (Proyek Jalan Tol, Dermaga, Pembangkit Listrik Dan Pengembangan Kawasan) Capital Expenditure (Toll Road Project, Pier, Power Plant and Area Development)	5,28%
Kebutuhan Modal Kerja/Working Capital Needs	29,23%	Kebutuhan Modal Kerja/Working Capital Needs	51,60%
Modal Kerja (Pengembangan Usaha Bidang Infrastruktur) Working Capital (Business Development in Infrastructure Sector)	29,23%	Modal Kerja (Pengembangan Usaha Bidang Infrastruktur) Working Capital (Business Development in Infrastructure Sector)	29,23%
Total	100%	Total	100%

Alasan perubahan:

Belum adanya kejelasan terkait kapan proyeknya akan dibangun, sehingga realisasi dananya di prioritaskan ke proyek strategis lainnya.

Reason for change:

There is no clarity regarding when the project will be built, therefore the realization of funds is prioritized for other strategic projects.

Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II

Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights II

Pada tahun 2024, Perseroan melakukan penawaran umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD II). Penawaran Umum Terbatas (PUT) atas pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Berdasarkan Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan No. S-52/D.04/2024 tanggal 28 Maret 2024, Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).

In 2024, the Company conducted a public offering for Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights I (PMHMETD II). The Limited Public Offering (PUT) of shareholders with Pre-emptive Rights (HMETD) has received an effective statement from the OJK. Based on the Notification of Effective Statement No. S-52/D.04/2024 dated March 28, 2024, the Company has received an effective statement in the context of Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights II (PMHMETD II).



Tabel Realisasi Penggunaan Dana Hasil PMHMETD II per 31 Desember 2024

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rp)		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
1	PMHMETD II	28 Maret 2024	6.087.913.159.742	5.880.000.000	6.082.033.159.742

Pada 28 Maret 2024, WIKA menerbitkan jumlah PUT dengan HMETD sebanyak 30.903.112.486 lembar saham dengan harga nominal Rp100 per lembar dengan harga penawaran Rp197 per lembar saham. Kemudian, jumlah saham Perseroan yang dicatatkan di BEI setelah PUT adalah sebanyak 39.873.063.858 lembar saham.

On March 28, 2024, WIKA issued a total of 30,903,112,486 shares with pre-emptive rights at a nominal price of Rp100 per share with an offer price of Rp197 per share. Then, the number of Company shares listed on the IDX after the rights issue was 39,873,063,858 shares.

Di tahun 2024, berdasarkan dana hasil PMHMETD II yang diperoleh Perseroan (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa, dan beban emisi lainnya), digunakan dengan rincian sebagai berikut:

In 2024, based on the proceeds from the second rights issue obtained by the Company (after deducting commissions, fees, service fees, and other issuance expenses), were used as follows:

No	Modal Kerja Working Capital	Realisasi Penggunaan Dana Realization of Fund Use
1	Pembangunan IKN - Pembangunan Istana Negara, Kalimantan Timur IKN Development - State Palace Development, East Kalimantan	82,395,121,864
2	Pembangunan IKN - Pembangunan Kantor Presiden, Kalimantan Timur IKN Development - Presidential Office Development, East Kalimantan	88,043,857,713
3	Jalan Tol IKN Segmen Kaltim Kariangau Tempadung (KKT) Kariangau - Sp. Tempadung, Kalimantan Timur IKN Toll Road Segment East Kalimantan Kariangau Tempadung (KKT) Kariangau - Sp. Tempadung, East Kalimantan	110,875,292,400
4	Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 dan 2, Jawa Barat Serang-Panimbang Toll Road Sections 1 and 2, West Java	768,698,036,856
5	Jalan Tol Semarang-Demak, Jawa Tengah Semarang-Demak Toll Road, Central Java	192,391,898,362
6	Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur, Jawa Barat Jatiluhur Drinking Water Supply System, West Java	134,888,921,352
7	Bendungan Lau Simeme, Sumatera Utara Lau Simeme Dam, North Sumatra	39,520,427,635
8	Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi-3, Banten Serang - Panimbang Toll Road Section-3, Banten	256,888,989,296
9	Pelabuhan Patimban Paket 6, Jawa Barat Patimban Port Package 6, West Java	114,584,941,237
10	Pembangunan Irigasi Rentang Paket 7, Jawa Barat Spandang Irrigation Development Package 7, West Java	28,088,407,619
11	Jalan Tol Probwangi Paket 3, Jawa Timur Probwangi Toll Road Package 3, East Java	132,864,937,345
12	Pembangkit Listrik Tenaga Uap - Palu 3 (2x50MW), Sulawesi Tengah Coal Power Plant - Palu 3 (2x50MW), Central Sulawesi	301,165,953,006
13	Pembangunan Smelter Manyar Gresik, Jawa Timur Manyar Gresik Smelter Development, East Java	177,786,999,628
14	Pembangunan Desalination Plant Manyar Gresik, Jawa Timur Manyar Gresik Desalination Plant Development, East Java	91,459,363,722
15	Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Ampel 500 kV, Jawa Tengah Ampel 500 kV Extra High Voltage Substation Development, Central Java	80,517,616,372
16	Engineering Procurement Construction Storage Tank & Piping Refinery Development Master Plant Regional Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur Engineering Procurement Construction Storage Tank & Piping Refinery Development Master Plant Regional Unit V Balikpapan, East Kalimantan	18,602,436,974

	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus dan RUPS (Rp)		Realisasi Penggunaan Dana (Rp)		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (Rp)
	Belanja Modal	Modal Kerja	Belanja Modal	Modal Kerja	
	-	6.082.033.159.742	-	3.654.191.409.400	2.427.841.705.342

No	Modal Kerja Working Capital	Realisasi Penggunaan Dana Realization of Fund Use
17	Proyek Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Wosusokas Segmen 4, Jawa Tengah Main Distribution Network Project for Wosusokas Drinking Water Supply System Segment 4, Central Java	31,108,372,174
18	Proyek Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Wosusokas Segmen 2, Jawa Tengah Main Distribution Network Project of Wosusokas Drinking Water Supply System Segment 2, Central Java	36,723,002,542
19	Pengolahan limbah Jakarta Sewerage Area 1-1, DKI Jakarta Waste Treatment of Jakarta Sewerage Area 1-1, DKI Jakarta	8,994,674,425
20	Pengolahan limbah Jakarta Sewerage Area 1-2, DKI Jakarta Waste Treatment of Jakarta Sewerage Area 1-2, DKI Jakarta	22,592,221,446
21	Jalan Tol Japek Selatan Seksi II, DKI Jakarta South Jakarta Toll Road Section II, DKI Jakarta	319,468,201,219
22	Pembangunan Bandara Kediri (runway), Jawa Timur Construction of Kediri Airport (runway), East Java	43,289,240,322
23	Pembangunan LPG Refrigerated Tuban, Pertamina, Jawa Timur Construction of LPG Refrigerated Tuban, Pertamina, East Java	440,945,109,401
24	Design & Build Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A, Bali Design & Build Dredging of Benoa Port Channel and Pool Package A, Bali	132,297,386,491
Total		3,654,191,409,400

Dana hasil rights issue publik PMHMETD II WIKA tidak terserap maksimum dikarenakan beberapa kondisi, yaitu kondisi saham WIKA yang pada saat pelaksanaan PMHMETD II sedang mengalami suspensi saham, sentimen publik terhadap industri konstruksi yang kurang positif, serta nilai kapitalisasi pasar saham WIKA yang kurang dari Rp5 Triliun. Hal ini menyebabkan banyak dana pensiun atau asset management tidak dapat berpartisipasi. Mengacu pada peraturan dan prosedur yang berlaku di internal masing-masing Perusahaan. Manajemen WIKA telah berupaya maksimal dalam melakukan penawaran kepada pemegang saham existing, baru maupun mitra kerja melalui roadshow dan one on one meeting untuk bertransaksi di pasar sekunder.

The funds from WIKA's PMHMETD II public rights issue were not fully absorbed due to several conditions, namely the condition of WIKA shares which were experiencing a share suspension at the time of the PMHMETD II, the lack of positive public sentiment towards the construction industry, and the value of WIKA's stock market capitalization of less than Rp5 trillion. Refers to the regulations and procedures that apply in the internal of each Company. WIKA's management has made maximum efforts in making offers to existing, new and partner shareholders through roadshows and one on one meetings to transact in the secondary market.



INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi, utang/modal, Perseroan senantiasa menggunakan jasa pihak ketiga untuk menilai kewajaran transaksi yang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Sebagaimana terlampir yang dilakukan Perseroan di sepanjang tahun 2024.

Informasi Material Mengenai Investasi

Perseroan tidak melakukan kegiatan Investasi baru atau pendirian perusahaan usaha patungan baru sepanjang tahun 2024.

Informasi Material Mengenai Ekspansi

Pada tahun 2024, Perseroan melakukan ekspansi berupa tambahan setoran modal untuk pemenuhan base equity pada entitas anak dan asosiasi sebagai berikut: Entitas Anak (Wijaya Karya Serang Panimbang sebesar Rp100 miliar, Wika Tirta Jaya Jatiluhur sebesar Rp19 miliar) dan Entitas Asosiasi (PP Semarang Demak sebesar Rp137 miliar).

Informasi Material Mengenai Divestasi

Perseroan tidak melakukan kegiatan Divestasi sepanjang tahun 2024.

Informasi Material Mengenai Penggabungan/Peleburan Usaha

Perseroan tidak melakukan kegiatan Penggabungan/Peleburan Usaha sepanjang tahun 2024.

Informasi Material Mengenai Akuisisi

Sesuai dengan Persetujuan KBUMN melalui Surat Kementerian BUMN Nomor S-497/MBU/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Persetujuan Penyertaan melalui Skema Debt to Asset Swap dan Shares Swap dalam rangka Pelaksanaan Kolaborasi dalam rangka Peningkatan Ekosistem Pariwisata dan Perhotelan, telah dilakukan Debt to Asset Swap dimana PT Wijaya Karya Realty ("WR") melunasi sebagian hutang yang dimilikinya kepada Perseroan dengan 50,99% saham PT Hotel Indonesia Properti ("HIPRO") milik WR, dimana saham tersebut setelah dimiliki oleh Perseroan kemudian dilakukan pertukaran saham / Shares Swap dengan saham WR milik PT Hotel Indonesia Natour ("HIN"), dimana terjadi peningkatan saham Perseroan pada WR yang sebelumnya sebesar 72,51%, menjadi 95,10%.

Informasi Material Mengenai Restrukturisasi Utang/Modal

Perseroan telah menjalani proses 8 (delapan) stream penyehatan keuangan dimana salah satu substreamnya adalah restrukturisasi keuangan dimana telah dilakukan penandatanganan Akta Penundukan Diri (Akses) terhadap Perjanjian Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Untuk Tujuan Restrukturisasi ("MRA") oleh dan antara (i) Perseroan, (ii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Agen Fasilitas Restrukturisasi, Agen Penampungan dan Agen Jaminan Kreditur Restrukturisasi dan (iii) kreditur Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank dari Perseroan yang belum

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Regarding material information on investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition and debt/capital restructuring, the Company consistently uses the services of third parties to assess the fairness of transaction carried out in compliance with applicable regulations in capital market sector. The Company's actions throughout 2024 is as attached below.

Material Information on Investment

The Company did not engage in any new investment activities or establishment of new joint ventures throughout 2024.

Material Information on Expansion

In 2024, the Company made expansions in the form of additional capital contributions to fulfill base equity in the following subsidiaries and associated entities: Subsidiaries (Wijaya Karya Serang Panimbang for Rp100 billion, Wika Tirta Jaya Jatiluhur for Rp19 billion) and Associated Entities (PP Semarang Demak for Rp137 billion).

Material Information on Divestment

The Company did not conduct divestment activities throughout 2024.

Material Information on Business Mergers/Consolidations

The Company did not conduct business mergers/consolidations throughout 2024.

Material Information on Acquisitions

In accordance with the Approval of the State-Owned Enterprises Coordinating Ministry through the Letter of Ministry of State-Owned Enterprises Number S-497/MBU/10/2024 dated October 11, 2024, regarding the Approval of Participation through Debt to Asset Swap and Shares Swap Schemes in the Collaboration for the Improvement of Tourism and Hospitality Ecosystems, a Debt to Asset Swap has been carried out in which PT Wijaya Karya Realty ("WR") paid off part of its debt to the Company with 50.99% of the shares of PT Hotel Indonesia Properti ("HIPRO") owned by WR, where the shares, after being owned by the Company, were then exchanged / Shares Swap with WR shares owned by PT Hotel Indonesia Natour ("HIN"), where there was an increase in the Company's shares in WR, which previously amounted to 72.51%, to 95.10%.

Material Information on Debt/Capital restructuring

The Company has undergone an 8 (eight) stream financial restructuring process, one of the substreams of which is financial restructuring, where a Deed of Submission (Accession) to the Addendum Agreement and Restatement of the Credit Agreement for Restructuring Purposes ("MRA") has been signed by and between (i) the Company, (ii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Restructuring Facility Agent, Receiving Agent and Restructuring Creditor Collateral Agent and (iii) Banking and Non-Bank Financial Institution creditors of the Company who have not signed the MRA ("Accession Creditors").

menandatangani MRA (“Kreditur Akses”). Sehubungan dengan telah dilakukannya penandatanganan Akta Penundukan Diri (Akses) sebagaimana tersebut di angka (1) di atas, maka seluruh kreditur Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank dari Perseroan telah setuju untuk melakukan restrukturisasi utang Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam MRA yang secara keseluruhan dengan jumlah utang yang telah direstrukturisasi adalah sebesar Rp20.798.469.595.445,- (baik pokok dan bunga). Bank- Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Non-Bank, yang secara bersama-sama disebut kreditur yang telah menyetujui restrukturisasi utang Perseroan (“Seluruh Kreditur”) adalah berjumlah 15 (lima belas) kreditur pada tanggal 28 Februari 2024. Adapun restrukturisasi ini mengubah jangka waktu jatuh tempo utang perbankan WIKA menjadi 10 tahun dan perlakuan pemotongan bunga menjadi 4%.

Pada tahun 2024, Perseroan juga melakukan restrukturisasi utang/ modal berupa tambahan setoran modal dengan skema debt to equity swap pada entitas anak dengan kepemilikan saham mayoritas dan entitas anak dengan kepemilikan saham minoritas sebagai berikut: Entitas Anak Mayoritas (Wijaya Karya Bitumen sebesar Rp100 miliar) dan Entitas Anak Minoritas (Wijaya Karya Industri Energi sebesar Rp8 miliar).

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Kebijakan Mekanisme Review atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan serta Ketentuan Terkait

Perseroan memastikan seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan, telah melalui prosedur yang memadai dan telah sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (arm’s length principle). dan sesuai dengan persyaratan komersial normal. Perseroan memiliki kebijakan terkait transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi. Transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, yang dilakukan Perseroan, senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan telah memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Mekanisme *review* atas transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi, dilakukan melalui proses audit oleh Komite Audit yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2024, WIKA tidak memiliki pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

In connection with the signing of the Deed of Submission (Accession) as referred to in point (1) above, all Banking and Non-Bank Financial Institution creditors of the Company have agreed to restructure the Company’s debt in accordance with the terms and conditions as stipulated in the MRA, which in total with the amount of debt that has been restructured is Rp20,798,469,595,445 (both principal and interest). Banks and Non-Bank Financial Institutions, collectively referred to as creditors who have agreed to the restructuring of the Company’s debt (“All Creditors”) amounted to 15 (fifteen) creditors as of February 28, 2024. This restructuring changed the maturity period of WIKA’s bank debt to 10 years and the treatment of interest deductions to 4%.

In 2024, the Company also restructured its debt/capital in the form of additional capital contributions with a debt to equity swap scheme in subsidiaries with majority share ownership and subsidiaries with minority share ownership as follows: Major Subsidiaries (Wijaya Karya Bitumen for Rp100 billion) and Minor Subsidiaries (Wijaya Karya Industri Energi for Rp8 billion).

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/ OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/ RELATED PARTIES

Policy on Review Mechanism for Transactions and Compliance with Relevant Regulations and Provisions

The Company ensures that all transaction activities carried out have gone through adequate procedures and are in accordance with the arm’s length principle and in accordance with normal commercial requirements. The Company has a policy regarding material transactions that contain conflicts of interest and/or transactions with affiliated/related parties. Material transactions that contain conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties/ related parties, which are carried out by the Company, always pay attention to the precautionary principle in accordance with generally accepted business practices and have complied with OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflicts of Interest, as well as PSAK No. 7 concerning Disclosure of Related Parties.

The mechanism for reviewing transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated/related parties is executed through an audit process by the Audit Committee, the results of which are then reported to the Board of Commissioners.

Throughout 2024, WIKA’s has no violations of laws and regulations regarding material transactions containing conflicts of interest and/ or transactions with affiliated parties/related parties.



Komitmen Perseroan atau Manajemen atas Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Proses melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi, Direksi memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi tersebut telah melalui prosedur yang memadai dan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*). Dewan Komisaris dan Komite Audit juga telah melakukan *review* terhadap Perseroan untuk memastikan bahwa transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi, dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan telah memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*), dan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan merupakan bagian dari transaksi afiliasi atau transaksi material yang dilakukan Perseroan.

Kebijakan tentang Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Transaksi Perseroan yang tercatat pada tahun 2024 dilakukan wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal. Transaksi Perseroan dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Perseroan dan bebas dari konflik kepentingan.

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi seperti yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang didefinisikan antara lain:

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

Company or Management Commitment on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/ Related Parties

In carrying out material transactions that contain conflicts of interest and/or transactions with affiliated/related parties, the Board of Directors ensures that all transaction activities have gone through adequate procedures and are in accordance with the arm's length principle. The Company through Board of Commissioners and Audit Committee has also conducted a review to ensure that material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated/related parties are carried out in accordance with generally accepted business practices and have met the principles of fair transactions (*arms-length principle*) and complied with applicable regulations.

Meanwhile, whether affiliated transactions or material transactions carried out by the Company, are business activities conducted in order to generate business income and are conducted routinely, repeatedly and/or continuously.

Policy on Affiliated/Related Parties

All transactions made by the Company in 2024 were carried out at arm's length and in accordance with normal commercial requirements. The Company's transactions are carried out on the basis of the Company's needs and are free from conflicts of interest.

The Company enters into transactions with related parties as regulated in PSAK No. 7 concerning Disclosure of Related Parties and Bapepam and LK Regulation No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 concerning "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies", which is defined among others:

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

1. A person or immediate family member who is related to the reporting entity if that person:
 - a. Has control or joint control of the reporting entity;
 - b. Has significant influence over the reporting entity; or
 - c. Has key management position of the reporting entity, or in the parent of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if one of the following conditions are met:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that each parent, subsidiary, and fellow subsidiaries are related to the other entity);
 - b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group where the other entity is a member);
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - e. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits in one of the reporting entities, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;

- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
- g. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
- h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Nama dan Sifat Hubungan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Keterikatan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak adalah pihak-pihak berelasi secara perorangan dan perusahaan dengan WIKA. Adapun nama-nama serta sifat hubungan berelasi dengan Perseroan disajikan sebagai berikut.

- f. The entity that is controlled or jointly controlled by a person identified in (1);
- g. The person identified in (1) (a) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or a parent of the entity); and
- h. The entity, or a member of a group to which the entity is part of the group, provides key management personnel services to the reporting entity, or to a parent of the reporting entity.

Significant transactions made with related parties, whether or not conducted under the same conditions and terms as the third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

Name and Nature of Relationship with Affiliated/ Related Parties

Direct or indirect ownership or management ties are related parties individually and corporately with WIKA's. The names and nature of related relationships with the Company are presented as follows.

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Transaction Nature
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Rekening Koran, Pinjaman Dana, Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses Konstruksi, Penjualan Checking Accounts, Loans, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Construction Work in Progress, Sales
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Rekening Koran, Pinjaman Dana, Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja Checking Accounts, Loans, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Rekening Koran, Pinjaman Dana Checking Accounts, Loans
PT Bank Syariah Mandiri	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Rekening Koran, Pinjaman Dana Checking Accounts, Loans
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Rekening Koran, Pinjaman Dana Checking Accounts, Loans
PT Bank BRI Syariah	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Rekening Koran Checking Accounts
PT Bank BNI Syariah	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Rekening Koran Checking Accounts
Koperasi Karyawan PT Wijaya Karya	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Deposito, Utang Usaha, Piutang Lain-lain Deposits, Trade Payables, Other Receivables
PT Makassar Coastal City	Entitas Asosiasi Associated Entity	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Penjualan Trade Receivables, Other Receivables, Sales
PT Jakarta River City	Entitas Asosiasi Associated Entity	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Penjualan Trade Receivables, Other Receivables, Sales
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan, Pekerjaan dalam Proses Konstruksi Trade Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Construction Work in Progress
KSO Angkasa Pura Property - WR	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
KSO HK - Aston	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales



Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Transaction Nature
PT Indah Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan Trade Receivables, Gross Amount Due from Customers, Sales
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penjualan Trade Receivables, Retention Receivables, Sales
PT Kurnia Realty Jaya	Entitas Asosiasi Associated Entity	Piutang Usaha, Penjualan, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja Trade Receivables, Sales, Gross Amount Due from Customers
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Penjualan, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja Trade Receivables, Sales, Gross Amount Due from Customers
PT Utama Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan, Pekerjaan dalam Proses Konstruksi Trade Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Sales, Construction Work in Progress
PT Waskita Beton Precast Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
KSO WIKA - Ragam	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
KSO WASKITA-GORIP	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Penjualan, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja Trade Receivables, Sales, Gross Amount Due from Customers
PT Boma Bisma Indra (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
PT Patra Jasa	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Pekerjaan dalam Proses Konstruksi, Penjualan Trade Receivables, Construction Work in Progress, Sales
KSO WIKA - HK	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penjualan Trade Receivables, Retention Receivables, Sales
PT Pertamina (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penjualan, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses Konstruksi Trade Receivables, Retention Receivables, Sales, Gross Amount Due from Customers, Construction Work in Progress
KSO WIKA-Lestari	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
PT Utama Karya Infrastruktur	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
KSO WIKA - Bahagia Bangunnusa	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Entitas Asosiasi Associated Entity	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penjualan, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja Trade Receivables, Retention Receivables, Sales, Gross Amount Due from Customers
PT Nindya Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
PT Pelabuhan Indonesia	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penjualan Trade Receivables, Retention Receivables,
KSO PT WIKA Gedung - Mutiara Masyur	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Pekerjaan dalam Proses Konstruksi, Penjualan Trade Receivables, Retention Receivables, Construction Work in Progress, Sales
KSO MCC-WIKA-INDYAWASKITA	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
KSO CRBC - WIKA - PP	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Transaction Nature
PT Istaka Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
PT Pelindo III (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penjualan, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses Konstruksi Trade Receivables, Retention Receivables, Sales, Gross Amount Due from Customers, Construction Work in Progress
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
KSO WIKA BETON – EMRAIL	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Usaha, Utang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Trade Payables, Sales
PT Pindad Engineering	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha, Utang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Trade Payables, Sales
KSO WIKA - Abdi Mulia	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Usaha, Penjualan Trade Receivables, Sales
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Retensi Retention Receivables
PT Transmarga Jatim Pasuruan	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses Konstruksi, Penjualan Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Construction Work in Progress, Sales
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Retensi Retention Receivables
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses Konstruksi Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Construction Work in Progress
KSO Perumas - Propernas	Kerja Sama Operasi	Piutang Retensi Retention Receivables
PT Angkasa Pura II (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Sales
PT Yodya Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Sales
KSO PT WIKA Gedung - Mahoni Citra Persada	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Retensi, Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan Retention Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due from Customers, Sales
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Retensi, Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan Retention Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due from Customers, Sales
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pendapatan Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Revenue
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	Entitas Asosiasi Associated Entity	Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers
PT Citra Marga Lintas Jabar	Entitas Asosiasi Associated Entity	Piutang Retensi, Piutang Lain-lain Retention Receivables, Other Receivables
PT Marga Kunciran Cengkareng	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses Konstruksi, Penjualan Gross Amount Due from Customers, Construction Work in Progress, Sales
PT Semen Padang (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses Konstruksi, Penjualan Gross Amount Due from Customers, Construction Work in Progress, Sales
WIKA - Rudy Jaya KSO	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan Gross Amount Due from Customers, Sales
KSU WIKA - Balai Pustaka	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Piutang Lain-lain, Penjualan Gross Amount Due from Customers, Other Receivables, Sales
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan Gross Amount Due from Customers, Sales



Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Transaction Nature
Koperasi WIKA Gedung	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan Gross Amount Due from Customers, Sales
KSO PT WIKA Gedung - Mutiara Mashyur	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan Gross Amount Due from Customers, Sales
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan, Pekerjaan dalam Proses Konstruksi Gross Amount Due from Customers, Sales, Construction Work in Progress
Koperasi Jasa Marga Indonesia	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan Gross Amount Due from Customers, Sales
PT Citramarga Lintas Jabar	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan Gross Amount Due from Customers, Sales
WIKON - Bukaka	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan Gross Amount Due from Customers, Sales
PT Pelindo I (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Penjualan Gross Amount Due from Customers, Sales
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Utang Usaha Trade Payables
PT Semen Tonasa Indonesia (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Utang Usaha Trade Payables
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Utang Usaha Trade Payables
PT Krakatau Wajatama Osaka Steel	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Utang Usaha Trade Payables
Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Utang Usaha Trade Payables
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Lain-lain Other Receivables
PT Wijaya Karunia Realtindo	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Lain-lain Other Receivables
Lembaga Manajemen Aset Negara	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Lain-lain Other Receivables
Koperasi Tamansari	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Lain-lain Other Receivables
PT High Speed Railway Contractor	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Lain-lain Other Receivables
KSO WIKA - Indulexso	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Lain-lain Other Receivables
KSO Tokyu - WIKA	Kerja Sama Operasi Joint Operation	Piutang Lain-lain Other Receivables
PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Pekerjaan dalam Proses Konstruksi Construction Work in Progress
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Provinsi Sulawesi Utara	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Pekerjaan dalam Proses Konstruksi Construction Work in Progress
PT Bhirawa Steel	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Utang Usaha Trade Payables
PT Solusi Bangun Beton	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Utang Usaha Trade Payables
PT Sarinah (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Usaha Trade Receivables
PT Bio Farma (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Retensi Retention Receivables
PT Bandara Internasional Batam	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto Gross Amount
PT Kaltim Amonium Nitrat	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto Gross Amount

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Transaction Nature
PT PP Semarang Demak	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto Gross Amount
PT Kilang Pertamina International	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto Gross Amount
PT Timah Tbk.	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Tagihan Bruto Gross Amount
PT LEN Industri (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Utang Usaha Trade Payables
PT Pegadaian (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Lain-lain Other Receivables
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat Ownership is Equally Bound	Piutang Lain-lain Other Receivables

Sifat Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham utama Perseroan.
- Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas di mana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.
- Entitas yang merupakan perusahaan asosiasi dari Grup.
- Entitas yang merupakan ventura bersama dari Grup.
- Manajemen kunci yang meliputi anggota dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Dana Pensiun Wijaya Karya adalah entitas yang didirikan oleh Perseroan untuk mengelola program manfaat imbalan dan iuran pasti Perseroan.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kegiatan transaksi berelasi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Jenis Transaksi Type of Transaction	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase terhadap Aset Percentage to Assets (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase terhadap Aset (%) Percentage to Assets (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Bank Bank	2.332.115	3,67%	2.242.351	3,34%	89.764	0,33%	↑
Bank Dibatasi Penggunaannya Bank Dibatasi Penggunaannya	2.392.794	3,77%	-	-	2.392.794	100,00	↑
Piutang Usaha Trade Receivables	854.345	1,34%	1.594.511	2,44%	(740.165)	(1,10%)	↓
Piutang Retensi Retention Receivables	521.174	0,83%	684.996	1,05%	(163.822)	(0,22%)	↓
Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja Gross Amount Due from Customers	1.030.279	1,63%	1.171.733	1,78%	(141.455)	(0,14%)	↓

Nature of Affiliated/Related Parties

The nature of relationships with related parties is as follows:

- The Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance is the Company's major shareholder;
- All entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia Ministry of Finance and entities where the Ministry of Finance has a significant influence: State-Owned Enterprises (SOEs);
- Related parties whose principal shareholders are the same as the Group;
- Entities that are associated companies of the Group;
- Entities that are joint ventures of the Group;
- Key management including members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors;
- Wijaya Karya Pension Fund is an entity established by the Company to manage the Company's defined benefits and contribution programs.

Realization of Related Party Transactions

The Company carries out transactions with related parties in accordance with applicable regulations. The related transaction activities carried out by the Company in 2023 and 2024 are as attached in the following tables:



Jenis Transaksi Type of Transaction	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase terhadap Aset Percentage to Assets (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase terhadap Aset (%) Percentage to Assets (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi Construction Work in Progress	1.590.623	2,50%	2.687.489	8,28%	(1.096.867)	(1,60%)	↓
Piutang Lain-Lain Other Receivables	257.196	0,40%	277.628	0,42%	(20.432)	(0,02%)	↑
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associates	2.708.297	4,26%	1.854.701	2,81%	853.595	1,45%	↑
Entitas pada Ventura Bersama Investment in Joint Ventures	11.388.954	17,92%	12.022.212	18,22%	(633.258)	(0,30%)	↓

Jenis Transaksi Type of Transaction	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase terhadap Liabilitas/ Pendapatan yang Terkait Percentage to Related Liabilities/ Revenue (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase terhadap Liabilitas/ Pendapatan yang Terkait Percentage to Related Liabilities/ Revenue (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Investasi jangka panjang lainnya Other Long-term Investments	1.034.566	1,63%	1.029.675	1,56%	4.890	0,07	↑
Pinjaman Jangka Pendek Short-term Loans	350.000	0,68%	12.759.484	22,62%	(11.909.484)	(21%)	↓
Pinjaman Jangka Panjang Long-term Loans	19.376.805	37,49%	3.217.879	5,70%	16.158.926	32%	↑
Utang Usaha Trade Payables	1.154.634	2,23%	2.582.665	4,59%	(1.428.031)	(2,35%)	↓
Utang Lain-Lain Other Payables	766.416	1,48%	803.546	1,42%	(37.130)	0,06	↓
Pendapatan Revenue	5.430.640	28,22%	5.723.039	25,41%	(292.399)	0,03	↓

Informasi Mengenai Transaksi Pihak Afiliasi

Pelaksanaan transaksi dengan pihak afiliasi yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam POJK No. 42/POJK.04/2020. Kegiatan transaksi afiliasi Perseroan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Information on Affiliated Transactions

The Company carries out transactions with affiliated parties in accordance with the provisions contained in POJK No. 42/POJK.04/2020. The Company's affiliated transaction activities in 2024 are as follows:

No.	Tanggal Date	Jenis Transaksi Afiliasi Type of Affiliated Transaction	Pihak yang Bertransaksi Transaction Parties	Sifat Hubungan Afiliasi Nature of Affiliation	Nilai Transaksi Transaction Value (Rp)	Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi Transaction Date
1.	11 Juni 2024 June 11, 2024	Transaksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melakukan penambahan setoran dengan skema konversi utang pemegang saham menjadi saham (<i>debt to equity swap</i>) kepada PT Wijaya Karya Industri Energi Transaction of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk making additional deposits with a shareholder debt conversion scheme into shares (<i>debt to equity swap</i>) to PT Wijaya Karya Industri Energi	a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk b. PT Wijaya Karya Rekrayasa Konstruksi PT Wijaya Karya Industri Energi a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk b. PT Wijaya Karya Rekrayasa Konstruksi PT Wijaya Karya Industri Energi	PT Wijaya Karya Industri Energi merupakan anak perusahaan PT Wijaya Karya Rekrayasa Konstruksi yang merupakan perusahaan terkendali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, juga selaku pemilik saham PT Wijaya Karya Industri Energi PT Wijaya Karya Industri Energi is a subsidiary of PT Wijaya Karya Rekrayasa Konstruksi which is a controlled company of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, also as the	PT Wijaya Karya Industri Energi memiliki pinjaman kepada Perseroan dengan saldo pinjaman sebesar Rp8.024.000.000,00. Dalam rangka penyelesaian terhadap pinjaman pemegang saham tersebut, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melakukan penambahan setoran modal dengan skema konversi utang menjadi saham (<i>debt to equity swap</i>) atas pinjaman pemegang saham tersebut. PT Wijaya Karya Industri Energi has a loan to the Company with a loan balance of Rp8,024,000,000. In order to settle the shareholder loan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk made an additional capital deposit with a debt to equity swap scheme for the	Transaksi afiliasi ini dinyatakan wajar berdasarkan hasil laporan pendapat kewajaran dari Kantor Jasa Penilaian Publik Iskandar dan Rekan sebagaimana dalam laporan No. 00156/2.0118-00/BS/03/0596/1/VI/2024 This affiliated transaction is declared fair based on the results of fairness opinion report from Iskandar and Partners Public Assessment Services Office as stated in report No. 00156/2.0118-00/BS/03/0596/1/VI/2024
2.	25 Juni 2024 June 25, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Realty, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Hotel Indonesia Properti dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) telah mencapai kesepakatan untuk menuangkan komitmen final masing-masing pihak terkait skema transaksi dalam suatu Perjanjian Pengalihan Saham Bersyarat. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Realty, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Hotel Indonesia Properti and PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) have reached an agreement to state the final commitment of each party regarding the transaction scheme and transaction value in a Conditional Share Transfer Agreement.	a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk b. PT Wijaya Karya Realty c. PT Hotel Indonesia Natour d. PT Hotel Indonesia Properti PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk b. PT Wijaya Karya Realty c. PT Hotel Indonesia Natour d. PT Hotel Indonesia Properti PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki saham di PT Wijaya Karya Realty, dan PT Hotel Indonesia Properti. PT Hotel Indonesia Natour merupakan pemegang saham PT Wijaya Karya Realty PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki saham di PT Wijaya Karya Realty, dan PT Hotel Indonesia Properti. PT Hotel Indonesia Natour merupakan pemegang saham PT Wijaya Karya Realty PT Hotel Indonesia Properti. PT Hotel Indonesia Natour is a shareholder of PT Wijaya Karya Realty	· <i>Debt to Asset Swaps</i> senilai Rp1.214.750.000.000,- untuk 50,99% saham PT Wijaya Karya Realty di PT Hotel Indonesia Properti. · <i>Share Swap</i> senilai Rp1.214.750.000.000,- untuk saham PT Hotel Indonesia Properti milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 50,99% dengan saham PT Hotel Indonesia Natour di PT Wijaya Karya Realty sebesar 22,57%. · <i>Debt to Asset Swap</i> worth Rp1,214,750,000,000 for 50.99% of PT Wijaya Karya Realty shares in PT Hotel Indonesia Properti. · <i>Share Swap</i> worth Rp1,214,750,000,000 for 50.99% of PT Hotel Indonesia Properti shares owned by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk with 22.57% of PT Hotel Indonesia Natour shares in PT Wijaya Karya Realty.	Transaksi afiliasi ini dinyatakan wajar berdasarkan hasil laporan pendapat kewajaran dari Kantor Jasa Penilaian Publik Iskandar dan Rekan sebagaimana dalam laporan No. 00155/2.0118-00/BS/03/0596/1/V/2024 This affiliated transaction is declared fair based on the results of fairness opinion report from Iskandar and Partners Public Assessment Services Office as stated in report No. 00155/2.0118-00/BS/03/0596/1/V/2024



No.	Tanggal Date	Jenis Transaksi Afiliasi Type of Affiliated Transaction	Pihak yang Bertransaksi Transaction Parties	Sifat Hubungan Afiliasi Nature of Affiliation	Nilai Transaksi Transaction Value (Rp)	Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi Transaction Date
3.	20 November 2024 November 20, 2024	Penambahan setoran modal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk kepada PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) melalui penerbitan saham baru. Additional capital deposit of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk to PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) through the issuance of new shares.	a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki saham di PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, menjadikannya sebagai perusahaan anak yang terkendali. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk owns shares in PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, making it a controlled subsidiary.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengambil sebagian saham yang ditawarkan oleh PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur sebanyak 18.993 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 atau sebesar Rp18.993.000.000 dari 42.122 lembar saham atau Rp42.121.908.000 yang ditawarkan. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk took part of the shares offered by PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur amounting to 18,993 shares with a nominal value of Rp1,000,000 or Rp18,993,000,000 from 42,122 shares or Rp42,121,908,000 offered.	Transaksi afiliasi ini dinyatakan wajar berdasarkan hasil laporan pendapat kewajaran dari Kantor Jasa Penilaian Publik Iskandar dan Rekan sebagaimana dalam laporan No. 00243/2.0118-00/BS/03/0520/1/IX/2024 This affiliated transaction is declared fair based on the results of fairness opinion report from Iskandar and Partners Public Assessment Services Office as stated in report No. 00243/2.0118-00/BS/03/0520/1/IX/2024

Sebagaimana terlampir pada tabel di atas, transaksi afiliasi yang dilakukan Perseroan adalah dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha. Transaksi ini juga telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Audited Perseroan Tahun 2024, dalam catatan atas laporan keuangan No. 51

As attached in the table above, the Company's affiliated transactions are performed in order to generate revenue. These transactions have also been disclosed in the Company's 2024 Audited Financial Statements, in the notes to the financial statements No. 51.

Informasi Mengenai Transaksi Material

Transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam POJK No. 17/POJK.04/2020. Pada Kuartal I 2024, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menandatangani dokumen yang disebut Akta Penundukan Diri (Akses) terkait perjanjian tambahan dan pernyataan ulang mengenai restrukturisasi kredit "*Master Restructuring Agreement*" (MRA). Dokumen ini ditandatangani oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen untuk restrukturisasi, serta para kreditur dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Dengan penandatanganan ini, semua kreditur, baik dari bank maupun lembaga keuangan non-bank, telah setuju untuk merestrukturisasi utang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam MRA. Total utang yang direstrukturisasi mencapai Rp20.798.469.595.445, termasuk pokok dan bunga. Restrukturisasi ini merupakan perpanjangan atas jatuh tempo pokok utang selama 8+2 tahun beserta adanya penurunan nilai bunga menjadi sebesar 4%. Namun, sesuai dengan POJK No. 17/POJK.04/2020, transaksi ini dianggap sebagai transaksi material yang dikecualikan

Information on Material Transactions

Material transactions carried out by the Company have complied with the provisions set forth in POJK No. 17/POJK.04/2020. In the first quarter of 2024, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk signed a document called the Deed of Submission (Accession) related to additional agreement and restatement on the "*Master Restructuring Agreement*" (MRA) credit restructuring. This document was signed by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the restructuring agent, and the creditors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. With this signing, all creditors, both from bank and non-bank financial institutions, have agreed to restructure the debt of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in accordance with the terms set out in the MRA. The total restructured debt reached Rp20,798,469,595,445, including principal and interest. This restructuring is an extension of the principal debt maturity for 8+2 years along with a reduction in the interest rate to 4%. However, in accordance with POJK No. 17/POJK.04/2020, this transaction is considered a material transaction that is exempted.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERSEROAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Pada tahun 2024, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan. Adapun perubahan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berdampak terhadap kinerja Perseroan di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

CHANGES TO LAWS AND REGULATIONS RELATED TO THE COMPANY IN THE LAST FISCAL YEAR

In 2024, there were changes to laws and regulations that have significant impact on the Company. The changes in regulations and/or legislation with impact on the Company's performance in 2024 are as follows.

Perubahan Peraturan Changes to the Regulations	Penjelasan Explanation	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
Peraturan OJK Nomor 45/POJK.04/2024	<p>Pasal 52 ayat (3) “(3) Penyampaian laporan dan pengumuman Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> secepat mungkin pada saat Emiten atau Perusahaan Publik mengetahui atau selanjutnya mengetahui Informasi atau Fakta Material; dan paling lambat sebelum dimulainya sesi 1 waktu perdagangan di Bursa Efek pada hari kerja berikutnya.” <p>Article 52 paragraph (3) “(3) Submission of reports and announcements of Material Information or Facts as referred to in paragraph (1) must be carried out:</p> <ol style="list-style-type: none"> as soon as possible when the Issuer or Public Company knows or should know the Material Information or Facts; and no later than before the start of session 1 of trading hours on the Stock Exchange on the following working day.” 	<p>Perlu melakukan penyesuaian dalam jangka waktu melaporkan dan mengumumkan Informasi Atau Fakta Material kepada OJK wajib dilakukan sesegera mungkin pada saat Emiten atau Perusahaan Publik mengetahui atau selanjutnya mengetahui dan paling lambat sebelum dimulainya sesi 1 waktu perdagangan di Bursa Efek pada hari kerja berikutnya.</p> <p>Adjustments need to be made in the time period for reporting and announcing Material Information or Facts to the OJK, which must be done as soon as possible when the Issuer or Public Company knows or should know and no later than before the start of session 1 of trading time on the Stock Exchange on the following working day.</p>

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERSEROAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Perseroan telah menyusun kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024.

Adapun perubahan-perubahan kebijakan akuntansi, penjelasan, serta dampaknya terhadap laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLIED BY THE COMPANY IN THE LAST FISCAL YEAR

The Company has prepared accounting policies in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) issued by the Financial Accounting Standards Board-Indonesian Accountants Association (DSAK-IAI) which are effective for the fiscal year starting on January 1, 2023 to December 31, 2023.

The changes in accounting policies, explanations and their impact on the Company's financial statements are as follows.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	Penjelasan/Alasan Perubahan Explanation/Reason for the Changes	Dampak terhadap Perseroan Impact on the Company
Amendemen PSAK 116 Amendemen PSAK 116	<p>“Sewa” terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik “Sewa” terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik</p>	<p>Implementasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya. Implementasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.</p>
Amendemen PSAK 201 Amendemen PSAK 201	<p>“Penyajian Laporan Keuangan” terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan “Penyajian Laporan Keuangan” terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan</p>	<p>Implementasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya. Implementasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.</p>
Amendemen PSAK 207 Amendemen PSAK 207	Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas	<p>Implementasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya. Implementasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.</p>
Amendemen PSAK 107 Amendemen PSAK 107	<p>“Instrumen Keuangan: Pengungkapan” -Pengaturan Pembiayaan Pemasok “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” -Pengaturan Pembiayaan Pemasok</p>	<p>Implementasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya. Implementasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.</p>

Mohon update terkait perubahan Kebijakan Akuntansi, Penjelasan/ Alasan perubahan, Dampak terhadap perusahaan di tahun 2024.....



Tingkat Kesehatan Perusahaan

Sebagai BUMN, WIKA telah melakukan penilaian tingkat kesehatan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Peringkat (*rating*) yang disampaikan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan WIKA Tahun Buku 2024, adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO), yang ditandatangani pada tanggal 10 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Peringkat Berdiri Sendiri (*Stand Alone Rating*): IdCCC (*Credit Watch*)
2. Peringkat Akhir (*Final Rating*): IdCCC (*Credit Watch*)

Dengan demikian, tingkat kesehatan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 adalah "(Sehat)".

Adapun Tingkat Kesehatan WIKA untuk tahun 2023 adalah adalah "(CCC/CreditWatch)", melalui pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2023 dengan hasil yakni sebagai berikut:

1. Peringkat Berdiri Sendiri (*Stand Alone Rating*): (CCC/ CreditWatch Negative)
2. Peringkat Akhir (*Final Rating*): (CCC/CreditWatchNegative)

Key Performance Indicator (Kpi) Perusahaan

Perseroan senantiasa melakukan penilaian performa perusahaan atas pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi, berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI), sebagai dasar untuk mengukur sejauh mana Perseroan telah mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah hasil penilaian berdasarkan KPI Perseroan untuk tahun buku 2024, adalah sebagaimana terlampir di bawah ini.

Company Soundness Level

As a state-owned enterprise, WIKA's has conducted an assessment of the company's soundness level in accordance with statutory regulations, specifically Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

The rating submitted in the context of assessing the Soundness Level of WIKA's for Fiscal Year 2024 is a rating conducted by PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO), which was signed on February 10, 2024, with the following results:

1. Stand Alone Rating: IdCCC (*Credit Watch*)
2. Final Rating: IdCCC (*Credit Watch*)

Thus, the Company's soundness level for Fiscal Year 2024 is "(Healthy)".

WIKA's Soundness Rating for 2023 is "(CCC/CreditWatch)", through a rating conducted by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), which was signed on December 12, 2023, with the following results:

1. Stand Alone Rating: (CCC/CreditWatch Negative)
2. Final Rating: (CCC/CreditWatchNegative)

Company Key Performance Indicator (Kpi)

The Company continuously assesses its performance in terms of the management carried out by the Board of Directors, based on Key Performance Indicators (KPIs), as a basis for measuring the extent to which the Company has achieved its set targets.

he following is the assessment result based on the Corporate KPI for fiscal year 2024, as attached below.

Key Performance Indicator WIKA Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Performance Indicators	Satuan Unit	Jenis Type	Target Target	Target Periodik Target Periodik			Nilai Value	Bobot KPI KPI Weight	Score	
					RA	RI	Persen Percent (%)			RA	RI
Nilai Ekonomi Sosial - Finansial Socio-Economic Value - Financial										20	17.5
1	EBITDA	Rp	KN	1.28 Triliun	1.28	0.16	12%	6	6	6.00	3.60
2	ROIC	%	KN	-6.75%	-6.75%	2.52%	237%	11	5	5.00	5.50
3	Interest Bearing Debt to EBITDA	Rasio Ratio	KN	27.73	27.73	225.51	12%	6	3	3.00	1.80
4	Interest Bearing Debt to Invested Capital	Rasio Ratio	KN	0.74	0.74	0.69	107%	11	3	3.00	3.30
5	Cash Conversion Cycle (CCC)	Hari Day	KN	115	115	85	135%	11	3	3.00	3.30

Key Performance Indicator WIKA Tahun 2024

Key Performance Indicator WIKA Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Performance Indicators	Satuan Unit	Jenis Type	Target Target	Target Periodik Target Periodik			Nilai Value	Bobot KPI KPI Weight	Score	
					RA	RI	Persen Percent (%)			RA	RI
Nilai Ekonomi Sosial - Operasional Socio-Economic Value - Operational									20	20	19
6	Project on time on budget	%	KN	65.22%	65.22%	64.38%	99%	10	5	5.00	5.00
7	Order Book Burn Rate	%	KN	52.72%	52.72%	50.53%	96%	10	5	5.00	5.00
8	Zero Fatality Accident	Jumlah Amount	KL	0	0	0	100%	11	5	5.00	5.50
9	Revenue from Focus & Champion Segment	%	KN	16.80%	16.80%	11.73%	70%	7	5	5.00	3.50
Nilai Ekonomi Sosial - Sosial Socio-Economic Values - Social									10	10	11
10	Penyelesaian Proyek PSN (Manyar Smelter Gresik) Completion of PSN Project (Manyar Smelter Gresik)	%	KL	100%	100%	100%	100%	11	5	5.00	5.50
11	Peningkatan TKDN Increase in TKDN	%	KN	83%	83%	96%	116%	11	5	5.00	5.50
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation									15	15	16.5
12	Roadmap Penyelesaian Konsolidasi BUMN Karya Roadmap for Completion of SOE Karya Consolidation	%	KL	100%	100%	100%	100%	11	5	5.00	5.50
13	Restrukturisasi Perusahaan Corporate Restructuring	%	KL	100%	100%	100%	100%	11	5	5.00	5.50
14	Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Roadmap for Improving the Implementation of Risk Management	%	KL	100%	100%	100%	100%	11	5	5.00	5.50
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership									10	10	11
15	Implementasi BIM dan ERP BIM and ERP Implementation	%	KL	100%	100%	100%	100%	11	5	5.00	5.50
16	IT Maturity Level	Skor	KL	3.5	3.50	3.51	100%	11	5	5.00	5.50
Peningkatan Investasi Increased Investment									13	13	9.6
17	Asset Recycling (Divestasi Portofolio) Asset Recycling (Portfolio Divestment)	%	KL	100%	100%	70%	70%	8	5	5.00	4.00
18	Realisasi PMN PMN Realization	%	KN	90.97%	90.97%	60.90%	67%	7	8	8.00	5.60
Pengembangan Talenta Talent Development									12	12	13.2
19	Rasio Top Talent Muda (<=42 tahun) dalam <i>nominated talent</i> Ratio of Young Top Talent (<=42 years) in <i>nominated talent</i>	%	KL	32.80%	32.80%	51.75%	158%	11	3	3.00	3.30



Key Performance Indicator WIKA Tahun 2024

Key Performance Indicator WIKA Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Performance Indicators	Satuan Unit	Jenis Type	Target Target	Target Periodik Target Periodik			Nilai Value	Bobot KPI KPI Weight	Score		
					RA	RI	Persen Percent (%)			RA	RI	
20	Rasio Perempuan dalam <i>nominated talent</i> Ratio of Women in <i>nominated talent</i>	%	KL	11.20%	11.20%	14.04%	125%	11	3	3.00	3.30	
21	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Ratio of Qualification Fulfillment of Risk Management Organ	%	KL	92.59%	92.59%	100%	108%	11	3	3.00	3.30	
22	Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti Roadmap for Recoery of Defined Benefit Pension Fund	%	KL	100%	100%	100%	100%	11	3	3.00	3.30	
Total									100.00	100.00	97.80	

Tabel hasil KPI WIKA Tahun Buku 2024

Berdasarkan tabel di atas, penilaian performa Perseroan berdasarkan KPI perusahaan untuk tahun 2024 diperoleh skor sebesar 97.80 dari bobot 100,00. Perolehan ini menunjukkan bahwa sebagian besar target capaian KPI tercapai, dan masih terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan peningkatan. Perseroan akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan performa perseroan yang tergambar dalam skor KPI Korporasi, terutama pada sektor perspektif yang masih belum mencapai nilai KPI / kinerja maksimal yaitu perspektif Nilai Ekonomi Sosial - Finansial, Nilai Ekonomi Sosial - Operasional, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, dan Peningkatan Investasi.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan RJPP 2020-2025

Perseroan telah memiliki Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) 2020-2025 yakni rencana strategis Perseroan yang di susun berdasarkan pendekatan 7 (tujuh) pilar *Strategic Business Unit* (SBU), yang perumusannya dilakukan dengan merujuk pada Perencanaan Strategis Departemen dan Entitas Anak. Tingginya tingkat persaingan pada bisnis konstruksi dan perubahan lingkungan usaha yang semakin dinamis dan cepat, mendorong WIKA untuk melakukan inovasi dan diversifikasi dalam menjalankan usahanya. Diversifikasi yang direncanakan dalam RJPP 2020-2025 tetap mengacu kepada Strategi Diversifikasi *Backward - Forward Integration*.

Adapun berdasarkan RJPP 2020-2025, WIKA fokus pada penguatan *cash*, *project excellence*, dan *portfolio balancing* yang dijalankan secara paralel, sebagaimana terlampir pada bagan di bawah ini.

WIKA KPI Results for Fiscal Year 2024

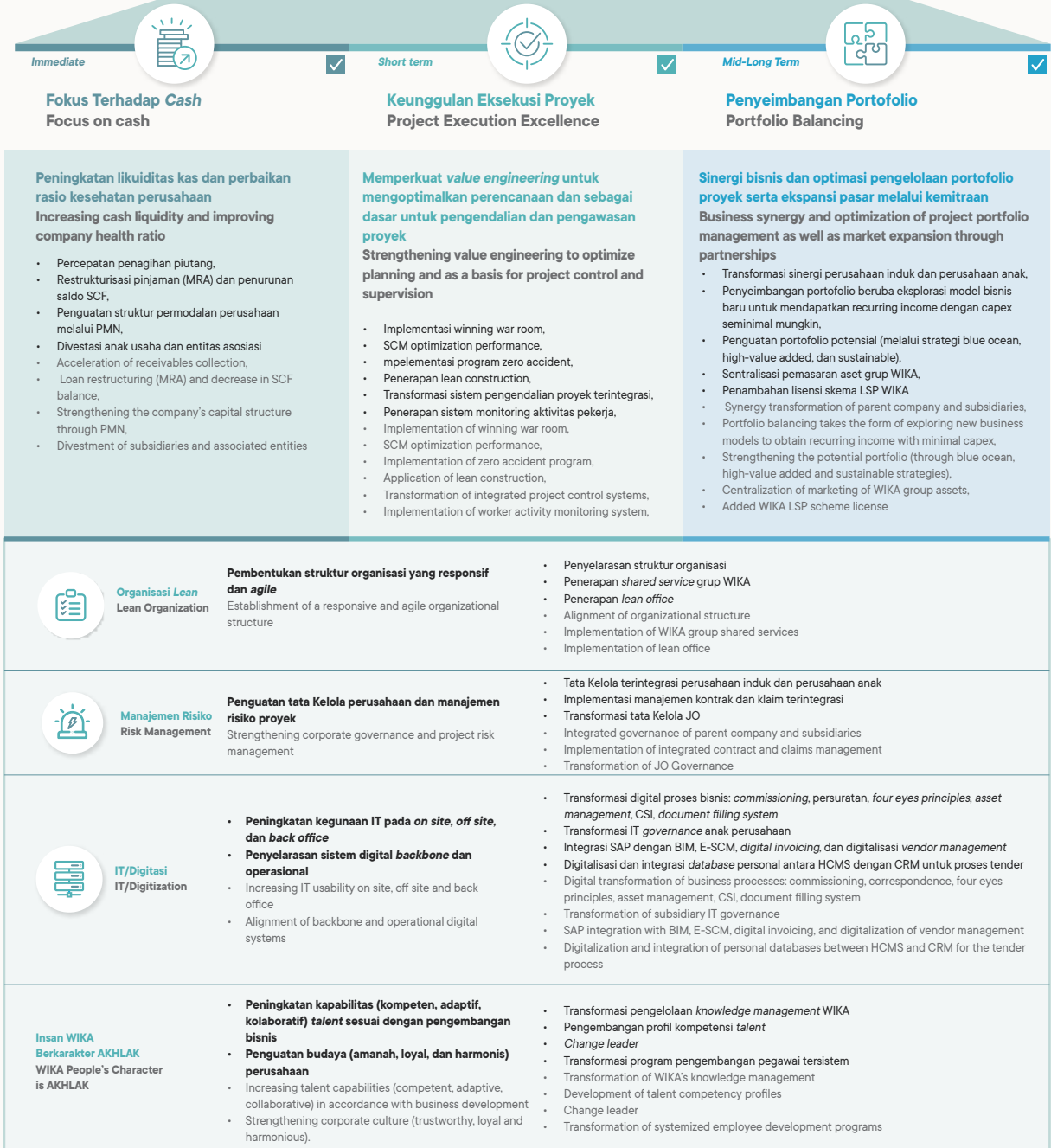
Based on the table above, the Company's performance evaluation based on the corporate KPIs for 2024 resulted in a score of 97.80 out of a total of 100.00. This achievement indicates that the majority of KPI targets were met, although there are still some indicators that require further improvement. The Company will continue to make efforts to improve its performance, as reflected in the Corporate KPI score, especially in sectors where the KPI performance has not yet reached its maximum value, including the Economic Social Value - Financial perspective, Economic Social Value - Operational perspective, Business Model Innovation, Technology Leadership, and Investment Enhancement.

CORPORATE LONG-TERM PLAN RJPP 2020-2025

The Company has developed a Corporate Long-Term Plan (RJPP) 2020-2025, which is a strategic plan created based on the approach of seven Strategic Business Unit (SBU) pillars. The formulation of this plan refers to the Strategic Planning of Departments and Subsidiaries. The high level of competition in the construction business and rapidly changing business environment have driven WIKA's to perform innovations and diversifications in running its business. The diversification planned in the RJPP 2020-2025 continues to follow the strategy of *Backward - Forward Integration Diversification*.

According to the RJPP 2020-2025, WIKA's focuses on strengthening *cash flow*, *project excellence*, and *portfolio balancing*, which will be carried out in parallel, as illustrated in the chart below.

“Cash Focus, Lean and Fit for Future”



Pilar/Enabler Tujuan Strategis Inisiatif Strategis
Pilar/Enabler Strategic Objectives Strategic Initiatives

Sebagaimana diketahui, WIKA memiliki lini bisnis yang paling lengkap dibandingkan perusahaan sejenis lainnya. Hal tersebut dibuktikan melalui diversifikasi bisnis yang dimiliki oleh WIKA dan Entitas Anak maupun Entitas Asosiasi yang sangat beragam, dan senantiasa bersinergi untuk mendukung kinerja Perseroan. Di samping sebagai kontraktor, WIKA juga telah memiliki portofolio investasi yang memadai dan saling terintegrasi (*backward forward*

As is well known, WIKA's has the most complete lines of business compared to other similar companies. This is evidenced through the diverse business diversification owned by WIKA's, its subsidiaries, and associated entities, which continuously synergize to support the Company's performance. In addition to being a contractor, WIKA's also has a sufficient and integrated investment portfolio (*backward-forward integration*). WIKA's has equity investments,



integration). WIKA memiliki penyertaan ekuitas baik mayoritas maupun minoritas di berbagai lini bisnis, seperti jalan tol dan properti yang diharapkan terus meningkat dan berkembang. Penyertaan pada proyek strategis nasional diharapkan dapat meningkatkan pendapatan konstruksi serta menghasilkan recurring income dari hasil investasi di masa depan.

Di tengah tantangan yang terjadi di sepanjang tahun 2024, WIKA terus berusaha untuk menjadi BUMN Karya terdepan di Indonesia, dengan tetap melakukan inovasi dan diversifikasi dalam menjalankan usahanya, sesuai dengan apa yang direncanakan dalam RJPP 2020-2025. Sampai dengan saat ini, WIKA selalu tercatat sebagai perusahaan konstruksi dengan *order book* dan pendapatan yang kompetitif.

Penerapan RJPP 2020-2025

Selama pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020–2025, PT Wijaya Karya (WIKA) telah berupaya keras untuk memulihkan kinerja atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan:

1. Kajian Building Karya Champions in Indonesia : WIKA melakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi dan membangun keunggulan kompetitif dalam industri konstruksi di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing proyek-proyek yang dikerjakan oleh WIKA. Melalui kajian ini, WIKA berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul, peningkatan teknologi konstruksi, dan penerapan praktik terbaik internasional dalam setiap proyek.
2. Kajian EPC Diagnostic : EPC (*Engineering, Procurement, and Construction*) *diagnostic* adalah evaluasi menyeluruh terhadap proses EPC internal WIKA yang ada untuk mengidentifikasi area perbaikan. Kajian ini membantu WIKA untuk mengoptimalkan kinerja proyek EPC dengan meminimalkan hambatan operasional dan meningkatkan koordinasi antara berbagai fungsi. Langkah-langkah yang diambil: 1) Evaluasi Proses dengan melakukan audit dan penilaian terhadap seluruh tahapan proses EPC, 2) Optimalisasi Proses sebagai Implementasi perubahan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek, 3) *Transformation Roadmap*, roadmap transformasi WIKA dalam jangka panjang.
3. Program Transformasi: Program transformasi secara holistik yang dijalankan oleh WIKA sebagai tindak lanjut dari EPC *diagnostic* yang telah dilakukan bertujuan untuk merubah budaya organisasi dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Program ini mencakup berbagai inisiatif untuk mendorong inovasi, efisiensi operasional, dan peningkatan layanan pelanggan. Langkah-langkah yang diambil: 1) Digitalisasi Proses Bisnis melalui Implementasi teknologi digital untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan proyek, 2) Pengembangan Budaya Kerja dengan membangun budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif melalui berbagai inisiatif internal.
4. Rencana Penyehatan Keuangan: Sebagai bagian dari upaya pemulihan kinerja, WIKA menyusun rencana penyehatan keuangan yang komprehensif dengan mencakup 8 *stream* penyehatan WIKA yaitu:

both majority and minority, in various business sectors, such as toll roads and property, which are expected to continue to grow and develop. Investments in national strategic projects are expected to increase construction revenue and generate recurring income from future investments.

Amid the challenges faced throughout 2024, WIKA's continues to strive to become the leading SOE Karya in Indonesia, consistently innovating and diversifying its business activities as planned in the RJPP 2020-2025. To date, WIKA's has consistently been recorded as a construction company with a competitive order book and revenue.

Implementation of RJPP 2020-2025

Throughout the implementation of the Corporate Long-Term Plan (RJPP) 2020–2025, PT Wijaya Karya (WIKA's) has made significant efforts to restore its performance amidst various challenges. The following are the efforts that have been and are being made:

1. Building Karya Champions in Indonesia Study: WIKA's conducts an in-depth study to identify and build competitive advantages in Indonesia's construction industry. This program aims to enhance the quality and competitiveness of the projects executed by WIKA's. Through this study, WIKA's focuses on developing superior human capital, enhancing construction technology, and applying international best practices in each project.
2. EPC Diagnostic Study: EPC (*Engineering, Procurement, and Construction*) *diagnostic* is a comprehensive evaluation of WIKA's internal EPC process to identify areas for improvement. This study helps WIKA's optimize its EPC project performance by minimizing operational barriers and improving coordination between various functions. Actions taken include: 1) Process Evaluation through audits and assessments of all EPC process stages, 2) Process Optimization as an implementation of changes based on evaluation results to improve project efficiency and effectiveness, 3) *Transformation Roadmap*, a long-term roadmap for WIKA's transformation.
3. Transformation Program: The holistic transformation program implemented by WIKA's as a follow-up to the EPC *diagnostic* aims to change the organizational culture and enhance the Company's competitiveness in the global market. This program includes several initiatives to drive innovation, operational efficiency, and improved customer service. Steps taken include: 1) Business Process Digitalization through the implementation of digital technology to improve project control and oversight, 2) Work Culture Development by fostering a collaborative and innovative work culture through various internal initiatives.
4. Financial Recovery Plan: As part of its efforts to restore performance, WIKA has formulated a comprehensive financial recovery plan covering 8 recovery streams, which include:

- a. Restrukturisasi Keuangan.
- b. Perbaikan Tata Kelola dan Manajemen Risiko.
- c. Percepatan Penagihan Piutang Bermasalah.
- d. *Asset Recycling*.
- e. Perbaikan Portfolio *Orderbook*.
- f. Penurunan *Operating Expense*.
- g. Penurunan Saldo Pinjaman Talangan Supplier.
- h. Penguatan Struktur Permodalan.

Melalui upaya-upaya ini, WIKA berusaha untuk memulihkan kinerja dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri konstruksi di Indonesia. Dengan kajian dan rencana strategis yang komprehensif, WIKA berharap dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari perencanaan strategis berkelanjutan, RJPP WIKA tahun 2020–2025 melanjutkan aksi korporasi yang sedang dilakukan khususnya Program Transformasi dan Rencana Penyehatan Keuangan.

- a. Financial Restructuring.
- b. Improvement of Governance and Risk Management.
- c. Accelerating Collection of Problematic Receivables.
- d. Asset Recycling.
- e. Improvement of Orderbook Portfolio.
- f. Reduction of Operating Expenses.
- g. Reduction of Supplier Bailing Loan Balances.
- h. Strengthening Capital Structure.

Through these efforts, WIKA's is striving to restore its performance and strengthen its position as a leading player in Indonesia's construction industry. With comprehensive studies and strategic plans, WIKA's hopes to overcome the challenges faced and achieve sustainable growth. As part of its ongoing strategic planning, WIKA's RJPP 2020–2025 continues the corporate actions being taken, particularly the Transformation Program and Financial Recovery Plan.s

Kilang Pertamina Balongan
Refinery Unit VI Balongan





Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Function



Dengan mengintegrasikan COBIT 2019 dan Peraturan Menteri BUMN, WIKA membangun fondasi yang kuat untuk manajemen teknologi informasi yang aman dan efisien. Upaya ini tidak hanya melindungi aset informasi Perseroan tetapi juga meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan mendukung pencapaian tujuan bisnis.

By integrating COBIT 2019 and the Ministry of SOE Regulation, WIKA builds a strong foundation for secure and efficient information technology management. This effort not only protects the Company's information assets but also enhances stakeholder trust and supports the achievement of business goals.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TI

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, terus berkomitmen untuk mengintegrasikan Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian integral dari strategi bisnis dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing. Sejalan dengan perkembangan era digital, Perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi berbasis *Confidentiality, Integrity dan Availability* untuk mendukung visi Perseroan menjadi pemain global dalam industri konstruksi.

Perseroan meyakini, bahwa pengelolaan dan implementasi Teknologi Informasi yang optimal dapat memberikan pengaruh positif pada efektivitas kinerja operasional. Dengan demikian, pemanfaatan TI tetap sejalan perkembangan bisnis Perseroan. Sebagai upaya dalam mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan terus meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang TI.

WIKA senantiasa berpegang teguh pada komitmen dalam pengelolaan dan pengembangan sistem TI Perseroan. Komitmen tersebut sejalan dengan visi dan misi Perseroan, yang juga bertujuan untuk mendukung proses bisnis manajemen, proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung.

Adapun visi dan misi Perseroan dalam pemanfaatan TI adalah sebagai berikut:

IT MANAGEMENT AND DEVELOPMENT POLICY

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk or WIKA, continues to be committed to integrating Information Technology (IT) as an integral part of its business strategy in improving operational efficiency and strengthening competitiveness. In line with the development of digital era, the Company applies the information technology management and development policy based on Confidentiality, Integrity and Availability to support the Company's vision of becoming a global player in the construction industry.

The Company believes that optimal management and implementation of Information Technology can bring positive impact on the effectiveness of operational performance. Thus, IT utilization remains in line with the development of the Company's business. As an effort to realize this commitment, the Company continually improve and develop the competencies of Human Capital (HC) in the IT field.

WIKA constantly adheres to its commitment in the management and development of IT system. This commitment is in line with the Company's vision and mission, which also aims to support the management business process, core business process and supporting business process.

The Company's vision and mission in utilizing IT are as follows:

Visi | Vision

Menjadi *enabler* bagi terciptanya visi WIKA

To Become an Enabler to Deliver WIKA's Vision of

“Menjadi Perusahaan Terpercaya di Bidang Infrastruktur dan EPC yang Berkelanjutan”

“Becoming a Trusted and Sustainable Integrated Infrastructure and EPC Services Company”



Misi | Mission



- **Eksplorasi dan Eksploitasi Benefit atas *Improvement* Proses Bisnis Berbasis TI**
- **Penyediaan Layanan Sistem Informasi Terintegrasi**
- **Infrastruktur yang Aman dan Andal**
- **Peningkatan Kematangan Tata Kelola TI dan Data**
- Exploit and Explore the Benefits from IT-Based Business Process Improvement
- Provide Integrated Information System Services
- Secure and Reliable Infrastructure
- Enhance IT and Data Governance Maturity

WIKA juga telah menerapkan pengembangan TI demi mendorong akselerasi bisnis melalui pendekatan dan kebijakan strategis yang mengacu pada Cobit 2019, ISO 27001 dan ISO 20000. Pengembangan TI WIKA juga selaras dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan internal Perseroan terkait dengan struktur organisasi dan *Good Corporate Governance* (GCG).

Demi mewujudkan pengembangan TI yang tepat guna, WIKA telah menyusun model manajemen dan arsitektur TI sebagai pedoman yang bertujuan untuk meningkatkan ketangkasan Perseroan dalam menghadapi dinamika industri serta mendukung efektivitas operasional bisnis. Selain itu, WIKA juga telah mengimplementasikan dan sertifikasi standarisasi pada manajemen pelayanan sistem dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dengan memperoleh sertifikasi ISO 20000-1:2018 (*IT Service Management System*) dan ISO 27001:2013 (*Information Security System*) untuk lingkup layanan SAP WIKA.

PENGELOLA SISTEM TI WIKA

Struktur pengelola TI WIKA berada di bawah *Information Technology Division* (IT Division) yang bertanggung jawab langsung pada Direktorat SDM & Transformasi. IT Division memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait TI dan berperan sebagai pengelola dan pengembangan solusi TI, dan membawahi 2 (dua) Departemen, yaitu *Information System Department* dan *Enterprise Resources Planning Department*.

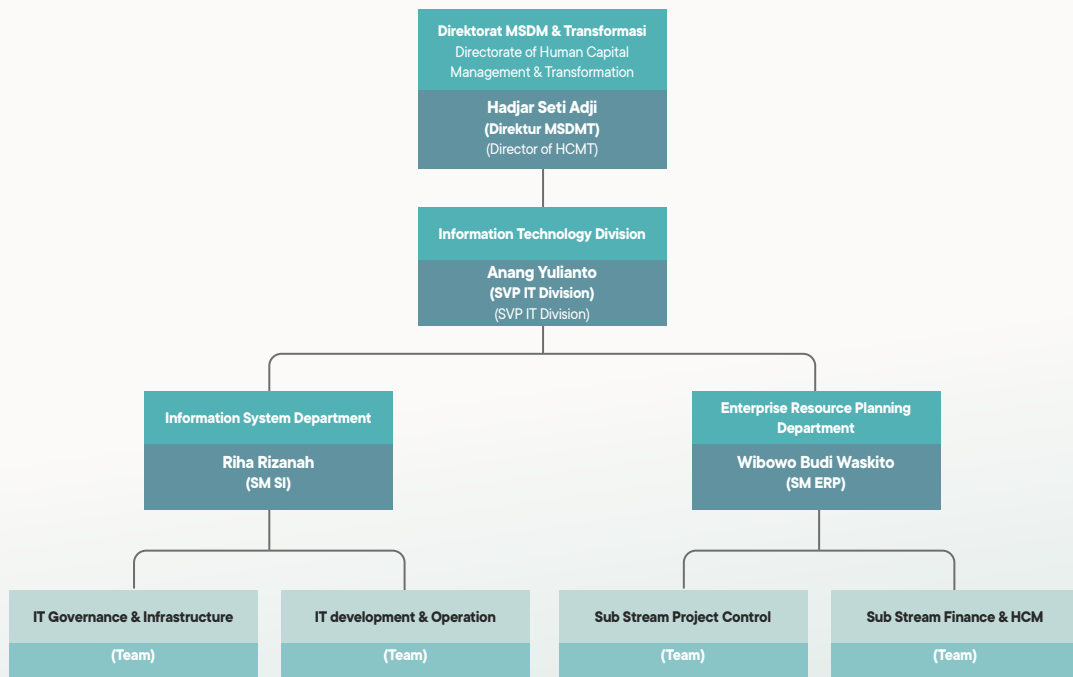
WIKA has also conducted IT development to drive business acceleration through strategic approaches and policies that refer to Cobit 2019, ISO 27001 and ISO 20000. WIKA's IT development is also in line with the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the Company's internal regulations related to organizational structure and Good Corporate Governance (GCG).

In order to realize appropriate IT development, WIKA has prepared an IT management and architecture model as a guideline that aims to increase the Company's agility in facing industry dynamics and supporting the effectiveness of business operations. In addition, WIKA has also implemented and certified standardization in system service management and Information Security Management System (SMKI) by obtaining ISO 20000-1:2018 (*IT Service Management System*) and ISO 27001:2013 (*Information Security System*) certification for the scope of WIKA's SAP services.

WIKA IT SYSTEM MANAGER

WIKA's IT management structure is under the Information Technology Division (IT Division) which is directly responsible to the Directorate of HC & Transformation. The IT Division has the authority to determine IT-related policies and acts as manager and developer of IT solutions, and oversees 2 (two) Departments, namely the Information System Department and the Enterprise Resources Planning Department.

Struktur Organisasi Pengelola Sistem TI WIKA per 31 Desember 2024 Organizational Structure of WIKA IT System Management as of December 31, 2024



Pengelola sistem TI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem TI berjalan dengan baik, aman, dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek penting dari tugas dan tanggung jawab pengelola sistem TI Perseroan:

IT system manager is responsible for ensuring that IT systems are running properly, safely and efficiently. The following are some important aspects of the duties and responsibilities of the Company's IT system manager:

No	Posisi Position	Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Job and Responsibility Description
1	SVP IT	<p>Memimpin perancangan, implementasi dan pengawasan strategi IT Perusahaan; memastikan infrastruktur TI dan sistem informasi berjalan efisien dan aman; memimpin inovasi digital serta mendukung tujuan bisnis dengan solusi teknologi terbaik bagi perusahaan.</p> <p>Leading the design, implementation and supervision of the Company's IT strategy; ensuring that IT infrastructure and information systems run efficiently and securely; leading digital innovation and supporting business objectives with the best technology solutions for the company.</p>
2	SM SI	<p>Bertanggung jawab, memastikan dan mengawasi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi perusahaan, pengelolaan infrastruktur TI, keamanan informasi, manajemen data, mengelola vendor serta sumber daya eksternal sesuai kebutuhan dan anggaran, kepatuhan regulasi dan menerapkan Sistem Manajemen WIKA yang berlaku di perusahaan</p> <p>Responsible for, ensuring and supervising the development and maintenance of the company's information system, IT infrastructure management, information security, data management, managing vendors and external resources according to needs and budget, regulatory compliance and implementing WIKA Management System applicable in the company</p>
3	SM ERP	<p>Bertanggung jawab dan melakukan pengkajian, perencanaan, pengembangan, <i>monitoring</i>, implementasi dan pengelolaan sistem ERP secara terpadu/terintegrasi untuk kepentingan unit kerja dan perusahaan.</p> <p>Responsible for and conducting assessment, planning, development, monitoring, implementation and management of the ERP system in an integrated manner for the benefit of work units and the company.</p>
4	IT Governance & Infrastructure	<p>Mengatur tata kelola IT dan strategi pengembangan teknologi yang sejalan dengan tujuan strategi Perusahaan dan <i>compliance</i> yang mengacu pada standar ketentuan dan target dari Kementerian BUMN, melakukan rancangan dan pengelolaan terkait <i>Enterprise Architecture (network, server, hardware, software)</i>, keamanan <i>cyber</i> dan Sistem Manajemen WIKA yang berlaku</p> <p>Managing IT governance and technology development strategies that are in line with the Company's strategic objectives and compliance that refers to the standards of provisions and targets of the Ministry of SOEs, designing and managing Enterprise Architecture (network, server, hardware, software), cyber security and applicable WIKA Management System</p>
5	IT Development & Operasion	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang, mengembangkan dan mengimplementasi solusi perangkat lunak dan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan dan terintegrasi dengan ERP Sistem. • Melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan sistem TI sesuai dengan target dan strategi yang ditetapkan. • Designing, developing and implementing software and application solutions that are in accordance with the company's business needs and integrated with the ERP System. • Managing IT services and ensuring that daily system operations run smoothly and carrying out routine maintenance and repairs of the IT system in accordance with the established targets and strategies.
6	Sub Stream Project Control	<p>Melakukan aktivitas pengkajian, perencanaan, pengembangan, <i>monitoring</i>, implementasi dan pengelolaan sistem <i>Enterprise Resource Planning (ERP)</i> secara terpadu dengan fokus pada pengendalian proyek (<i>project control</i>) dengan modul utama SAP sebagai <i>baseline (Project System, Material Manajemen dan Sales Distribution)</i></p> <p>Conducting assessment, planning, development, monitoring, implementation and management activities of Enterprise Resource Planning (ERP) systems in an integrated manner with a focus on project control with SAP main modules as the baseline (Project System, Material Management and Sales Distribution)</p>
7	Sub Stream Finance & HCM	<p>Melakukan aktivitas pengkajian, perencanaan, pengembangan, <i>monitoring</i>, implementasi dan pengelolaan sistem <i>Enterprise Resource Planning (ERP)</i> secara terpadu dengan fokus pada pengendalian proses bisnis akuntansi & keuangan (<i>finance</i>) dan sumber daya manusia dengan modul utama SAP sebagai <i>baseline (Finance Controlling, Funds Management, dan Human Capital Management System)</i></p> <p>Conducting assessment, planning, development, monitoring, implementation and management activities of Enterprise Resource Planning (ERP) systems in an integrated manner with a focus on controlling accounting & finance business processes and human resources with SAP main modules as the baseline (Finance Controlling, Funds Management, and Human Capital Management System)</p>

Peran Teknologi Informasi (TI) dalam pengembangan bisnis, termasuk transformasi digital WIKA saat ini sangat krusial dan mencakup berbagai aspek berikut:

The role of Information Technology (IT) in business development, including WIKA's current digital transformation, is very crucial and includes the following aspects:

 <p>IT Governance IT Governance</p>	 <p>Keamanan Informasi Information Security</p>	 <p>Ketersediaan Infrastruktur Infrastructure Availability</p>	 <p>Analisis dan Evaluasi Kebutuhan Bisnis Business Needs Analysis and Evaluation</p>	 <p>Desain, Pengembangan & Pemeliharaan Sistem System Design, Development & Maintenance</p>
<p>Memastikan bahwa teknologi Informasi mendukung tujuan strategis organisasi dengan mengelola risiko, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengoptimalkan sumber daya teknologi Ensuring that information technology supports the organization's strategic objectives by managing risk, ensuring regulatory compliance, and optimizing technology resources.</p>	<p>Melindungi data perusahaan dari ancaman siber dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan keamanan data, di mana data yang dipertukarkan dan digunakan semakin penting Protecting company data from cyber threats and maintaining compliance with data security regulations, where the data exchanged and used is increasingly important</p>	<p>Memastikan kelancaran operasional dan aksesibilitas layanan bagi seluruh pengguna dalam Perusahaan, bertanggung jawab merancang, mengimplementasikan, memelihara infrastruktur teknologi Ensuring smooth operation and accessibility of services for all users in the Company, responsible for designing, implementing, maintaining technology infrastructure</p>	<p>Memahami kebutuhan bisnis dan merencanakan optimalisasi sistem serta penyeragaman platform, mengidentifikasi area dimana sistem & platform yang dapat disederhanakan dan diintegrasikan Understanding business needs and planning system optimization and platform standardization. Identify areas where systems & platforms can be simplified and integrated</p>	<p>Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan solusi yang akan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam Perusahaan, termasuk perangkat lunak, basis data, dan infrastruktur yang diperlukan Plan, develop, and implement solutions that will optimize the use of technology within the Company, including software, databases, and necessary infrastructure</p>
 <p>Integrasi Sistem System Integration</p>	 <p>Pengambilan Keputusan berbasis Data Data-Based Decision Making</p>	 <p>Inovasi Teknologi Technology Innovation</p>	 <p>Manajemen Akses Access Management</p>	 <p>Desain, Pengembangan & Pemeliharaan Sistem System Design, Development & Maintenance</p>
<p>Memastikan sistem yang ada terintegrasi SAP sebagai core system, melakukan optimalisasi sistem yang berjalan dan penyeragaman platform untuk membantu dalam menghindari redundansi dan isolasi data Ensure existing systems are integrated with SAP as a core system, optimize running systems and standardize platforms to help avoid redundancy and data isolation</p>	<p>Memastikan sistem yang ada terintegrasi SAP sebagai core system, melakukan optimalisasi sistem yang berjalan dan penyeragaman platform untuk membantu dalam menghindari redundansi dan isolasi data Ensure existing systems are integrated with SAP as a core system, optimize running systems and standardize platforms to help avoid redundancy and data isolation</p>	<p>Mencari peluang untuk menerapkan teknologi baru sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan transformasi perusahaan lebih lanjut Seek opportunities to implement new technologies in accordance with technological developments that can further enhance the company's transformation</p>	<p>Mengelola hak akses ke sistem dan data serta memastikan bahwa hanya orang yang berwenang memiliki akses ke informasi yang sesuai Manage access rights to systems and data and ensure that only authorized persons have access to appropriate information</p>	<p>Memberikan dukungan teknis yang cepat dan efektif kepada pengguna di Perusahaan. Mendukung pengguna tentang penggunaan teknologi dan menerapkan solusi proaktif untuk mencegah masalah di masa mendatang Provide fast and effective technical support to users in the Company. Educate users on the use of technology and implement proactive solutions to prevent future problems</p>

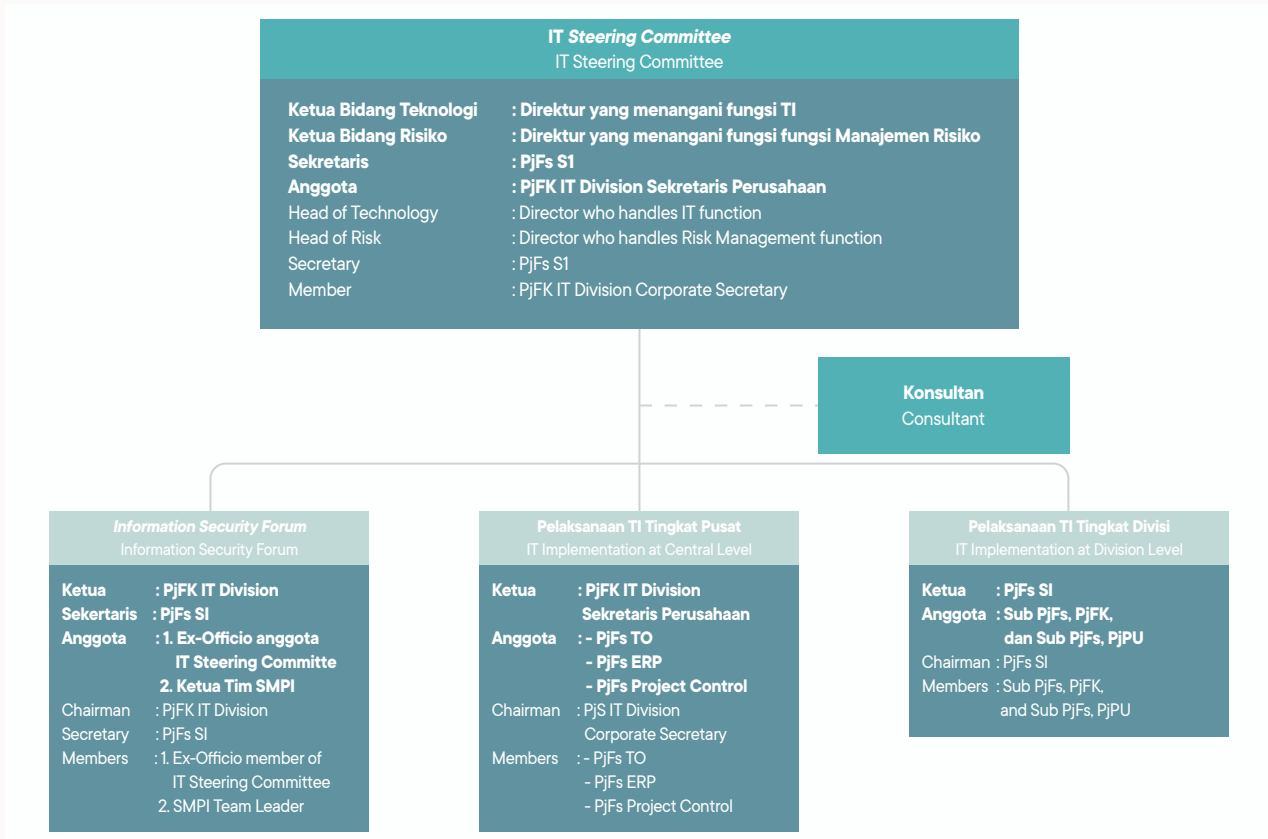
KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI WIKA

Dalam rangka memastikan pengelolaan TI lebih terstruktur dan strategis, WIKA membentuk IT *Steering Committee*. Pembentukan IT *Steering Committee* di WIKA adalah langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan TI Perseroan. Komite ini berperan penting dalam mengarahkan, mengawasi, dan memastikan bahwa inisiatif TI sejalan dengan tujuan bisnis WIKA. Dengan komite ini, WIKA dapat memastikan bahwa semua inisiatif TI berjalan selaras dengan tujuan bisnis, memberikan nilai tambah, dan mendukung pencapaian target Perseroan secara keseluruhan.

WIKA INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

In order to ensure more structured and strategic IT management, WIKA has formed an IT *Steering Committee*. The establishment of IT *Steering Committee* at WIKA is a strategic measure taken to improve the Company's IT management. This committee plays an important role in directing, supervising, and ensuring that IT initiatives are in line with WIKA's business objectives. With this committee, WIKA can ensure that all IT initiatives are in line with business objectives, provide added value, and support the achievement of the Company's overall targets.

Struktur Organisasi IT Steering Committee IT Steering Committee Organizational Structure



IT Steering Committee pada bidang teknologi dipimpin oleh Direktur yang menangani fungsi Teknologi Informasi yang saat ini dijabat oleh Direktur MSDM dan Transformasi dengan beranggotakan:

- Penanggung Jawab Fungsi Korporasi (PjFK) IT Division: SVP Information Technology Division
- Penanggung Jawab Fungsi (PjFs SI): SM Sistem Informasi
- Sekretaris Perusahaan

IT Steering Committee membawahi Information Security Forum, pelaksana TI ditingkat pusat yang mana keduanya dipimpin oleh Penanggung Jawab Fungsi Korporasi (PjFK) IT Division yaitu SVP Information Technology Division dan pelaksana TI di tingkat Divisi yang dipimpin oleh Penanggung Jawab Fungsi Sistem Informasi yaitu SM Sistem Informasi.

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI PERSEROAN

Sebagai emiten yang berkomitmen pada penerapan tata kelola yang baik dalam manajemen teknologi informasi, Manajemen TI WIKA mengacu pada standar COBIT 2019 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Dua pedoman ini menjadi landasan penting dalam mengelola keamanan informasi dan memastikan bahwa sistem TI Perseroan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

IT Steering Committee in the technology sector is led by the Director who handles the Information Technology function, currently held by the Director of HCM and Transformation, with members:

- Corporate Function Manager (PjFK) IT Division: SVP Information Technology Division
- Function Manager (PjFs SI): SM Information System
- Corporate Secretary

The IT Steering Committee oversees the Information Security Forum, IT implementers at the central level, both of which are led by Corporate Function Manager (PjFK) IT Division, namely SVP Information Technology Division, and IT implementers at the Division level led by Information System Function Manager, namely SM Information System.

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

As an issuer committed to implementing good governance in information technology management, WIKA's IT Management refers to the COBIT 2019 standard and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. These two guidelines serve as key groundworks in managing information security and ensuring that the Company's IT system is running in accordance with the principles of good governance.

Dengan mengintegrasikan COBIT 2019 dan Peraturan Menteri BUMN, WIKA membangun fondasi yang kuat untuk manajemen teknologi informasi yang aman dan efisien. Upaya ini tidak hanya melindungi aset informasi Perseroan tetapi juga meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, mendukung pencapaian tujuan bisnis, serta berkontribusi terhadap tata kelola yang baik di sektor BUMN. Melalui pendekatan ini, WIKA berupaya optimal dalam pengelolaan teknologi informasi yang profesional dan bertanggung jawab.

Selain itu, WIKA juga telah mengimplementasikan ISO 20000:2018 dalam sistem TI Perseroan. Implementasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan TI serta memastikan bahwa layanan tersebut dikelola dengan baik. ISO 20000 adalah standar internasional untuk manajemen layanan TI yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna. Melalui penerapan standar ini, WIKA berkomitmen untuk memberikan layanan TI yang andal dan profesional dalam mendukung operasional Perseroan.

WIKA juga telah mengimplementasikan ISO 27001:2022 dalam sistem TI, implementasi ini bertujuan untuk membangun, menerapkan dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi yang efektif guna melindungi aset informasi perusahaan dari ancaman siber yang dapat merusak kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data. Dengan menerapkan ISO 27001, Perseroan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait keamanan data, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan, meningkatkan kepercayaan pengguna dan mitra, serta menciptakan budaya keamanan yang proaktif dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang di era digital.

By integrating COBIT 2019 and the Minister of SOE Regulation, WIKA builds a strong foundation for secure and efficient information technology management. This effort does not only protect the Company's information assets but also increases stakeholder trust, supports the achievement of business goals, and contributes to good governance in the SOE sector. Through this approach, WIKA strives to optimally manage information technology in a professional and responsible manner.

In addition, WIKA has also implemented ISO 20000:2018 in the Company's IT system. The objective is to improve the quality of IT services and ensure that these services are managed properly. ISO 20000 is an international standard for IT service management that prioritizes efficiency, effectiveness, and user satisfaction. Through the implementation of this standard, WIKA is committed to providing reliable and professional IT services in supporting the Company's operations.

WIKA has also implemented ISO 27001:2022 in its IT system, which aims to build, apply and maintain an effective information security management system to protect the company's information assets from cyber threats that can damage the confidentiality, integrity and availability of data. By implementing ISO 27001, the Company can identify and manage risks related to data security, ensure compliance with relevant regulations, increase user and partner trust, and create a proactive security culture in dealing with the ever-growing threats in the digital era.



AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI

WIKA melakukan *assessment* berdasarkan *IT Maturity* menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 sebagai langkah strategis untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan manajemen teknologi informasi Perseroan. Tujuan dari *assessment* ini untuk mengidentifikasi tingkat kematangan sistem TI Perseroan, sehingga dapat menentukan sektor dan area yang perlu ditingkatkan. Pada tahun 2023 (*asesmen* COBIT 2019 dilakukan dua tahun sekali), WIKA memperoleh skor *assessment* sebesar 4,15 lebih tinggi dari target Kementerian BUMN yakni sebesar 3,00.

INFORMATION TECHNOLOGY AUDIT

WIKA conducts an assessment based on IT Maturity using the COBIT 2019 framework as a strategic step to evaluate and improve the Company's information technology management capabilities. The purpose of this assessment is to identify the maturity level of the Company's IT system, in order to determine the sectors and areas that need to be improved. In 2023 (the COBIT 2019 assessment is conducted every two years), WIKA obtained an assessment score of 4.15, higher than the Ministry of SOEs' target of 3.00.

Rincian Hasil *Assessment* berdasarkan *IT Maturity* Cobit 2019 untuk Tahun 2023 Details of Assessment Results based on IT Maturity Cobit 2019 for 2023

No	Domain Domain	Process Process	Name Name	Rating					Capability Level
				1	2	3	4	5	
1		EDM01	<i>Ensured Governance Framework Setting & Maintenance</i>	Fully	Fully	Fully	Fully	N/A	4
2	Evaluate, Direct, Monitor (EDM)	EDM03	<i>Ensured Risk Optimization</i>	Fully	Fully	Fully	Fully	N/A	4
3		EDM04	<i>Ensured Resource Optimization</i>	Fully	Fully	Fully	Fully	N/A	4
4		EDM05	<i>Ensured Stakeholder Engagement</i>	Fully	Fully	Fully	Fully	N/A	4
5	Align, Plan, Organize (APO)	APO01	<i>Managed the I&T Management Framework</i>	Fully	Fully	Fully	Fully	Partially	4
6		APO06	<i>Managed Budget and Costs</i>	Fully	Fully	Fully	Fully	N	4
7		APO12	<i>Managed Risk</i>	Fully	Fully	Fully	Fully	N	4
8		APO14	<i>Managed Data</i>	Fully	Fully	Fully	Fully	Partially	4
9		BAI01	<i>Managed Programs</i>	Fully	Fully	Fully	Fully	Fully	5
10	Build, Acquire, Implement (Bai)	BAI02	<i>Managed Requirements Definition</i>	Fully	Fully	Fully	Fully	N/A	4
11		BAI03	<i>Managed Solutions Identification & Build</i>	Fully	Fully	Fully	Fully	N/A	4
12		BAI05	<i>Managed Organizational Change</i>	Fully	Fully	Fully	Fully	N	4
13		BAI06	<i>Managed IT Changes</i>	Fully	Fully	Fully	Fully	N/A	4

Rincian Hasil Assessment berdasarkan IT Maturity Cobit 2019 untuk Tahun 2023

Details of Assessment Results based on IT Maturity Cobit 2019 for 2023

No	Domain Domain	Process Process	Name Name	Rating					Capability Level
				1	2	3	4	5	
14		BAIO7	Managed IT Change Acceptance & Transitioning	Fully	Fully	Fully	Fully	N	4
15		BAIO8	Managed Knowledge	Fully	Fully	Fully	Fully	Fully	5
16		BAIO9	Managed Assets	Fully	Fully	Fully	Fully	Partially	4
17		BAI11	Managed Projects	Fully	Fully	Fully	Fully	N/A	4
18	Deliver, Service, Support (DSS)	DSS05	Managed Security Services	Fully	Fully	Fully	Fully	N/A	4
19	Monitor, Evaluate, Assess (MEA)	MEA03	Managed Compliance with external Requirements	Fully	Fully	Fully	Fully	Fully	5
20		MEA04	Managed Assurance	Fully	Fully	Fully	Fully	N/A	4

Pemenuhan INDI 4.0 Level 3

WIKA telah melakukan asesmen Kesiapan Industri 4.0 (INDI 4.0) oleh konsultan independen yang di validasi oleh tim Komite INDI 4.0 dan Kementerian Perindustrian pada tahun 2023 WIKA dengan hasil skor 2.67 dari target 3.5 Kementerian BUMN, sehingga dapat diartikan WIKA berada pada level 3 dengan tingkat kesiapan matang menuju Industri 4.0.

Dalam upaya pemenuhan GAP hasil *assessment* tahun lalu terhadap target skor KBUMN, WIKA telah melakukan program pendampingan dengan konsultan independen serta telah melakukan asesmen ulang pada tahun 2024 dengan hasil skor *Quick Win* sebesar 3.03 pada Maret 2024, kemudian dari hasil tersebut sesuai dengan rekomendasi program kerja tersebut telah dilakukan bertahap untuk pemenuhan dokumen dan penilaian independen per Desember 2024 dengan hasil 3.51

Program Ketahanan dan Keamanan Siber

WIKA mengembangkan sistem ketahanan dan keamanan siber sesuai dengan prinsip utama keamanan informasi, yang meliputi kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan siber. Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan ketahanan dan keamanan siber dalam rangka mengawal inovasi untuk menjamin keberlanjutan bisnis dari ancaman *cybercrime*. Upaya ini secara konsisten dilakukan seiring dengan arah perkembangan bisnis Perseroan melalui *assessment Cyber Security Maturity* (CSM) berdasarkan standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di mana pada tahun 2024 WIKA memperoleh skor sebesar 3,56 lebih tinggi dari target sebesar 3,50.

Fulfillment of INDI 4.0 Level 3

WIKA has conducted the Industrial Readiness 4.0 (INDI 4.0) assessment by an independent consultant validated by the INDI 4.0 Committee team and the Ministry of Industry in 2023. WIKA scored 2.67 out of the Ministry of SOEs' target of 3.5, meaning that WIKA is at level 3 with a mature level of readiness towards Industry 4.0.

In an effort to fulfill the GAP results of last year's assessment against the Ministry of SOE's score target, WIKA has conducted a mentoring program with independent consultants and has conducted a re-assessment in 2024 with a *Quick Win* score of 3.03 in March 2024. Afterward, from these results in accordance with the recommendations of the work program, the fulfillment of documents and independent assessment have been carried out in stages as of December 2024 with a result of 3.51

Cybersecurity and Resilience Program

WIKA develops a cybersecurity and resilience system in accordance with the main principles of information security, which include confidentiality, integrity, and availability as well as provisions of laws and regulations governing cybersecurity. The Company is committed to continuing to develop cybersecurity and resilience in order to oversee innovation to ensure business sustainability from cybercrime threats. This effort is consistently carried out in line with the direction of the Company's business development through the *Cyber Security Maturity* (CSM) assessment based on the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) standards, where in 2024 WIKA obtained a score of 3.56, higher than the target of 3.50.

CSM assessment dilakukan untuk menilai dan meningkatkan tingkat kematangan keamanan Perseroan. Tujuannya termasuk penilaian risiko, kepatuhan peraturan, pengelolaan investasi keamanan, peningkatan respons terhadap insiden, dan peningkatan kesadaran karyawan. Dengan melakukan assessment ini, WIKA dapat memperkuat postur keamanan sibernya dan berkontribusi pada keberhasilan operasional serta reputasi Perseroan.

The CSM assessment aims to assess and improve the Company's level of security maturity. Its objectives include risk assessment, regulatory compliance, security investment management, improving incident response, and increasing employee awareness. By conducting this assessment, WIKA can strengthen its cybersecurity posture and contribute to the operational success and reputation of the Company.

Hasil assesment Cyber Security Maturity di tahun 2024 Cyber Security Maturity assessment results in 2024

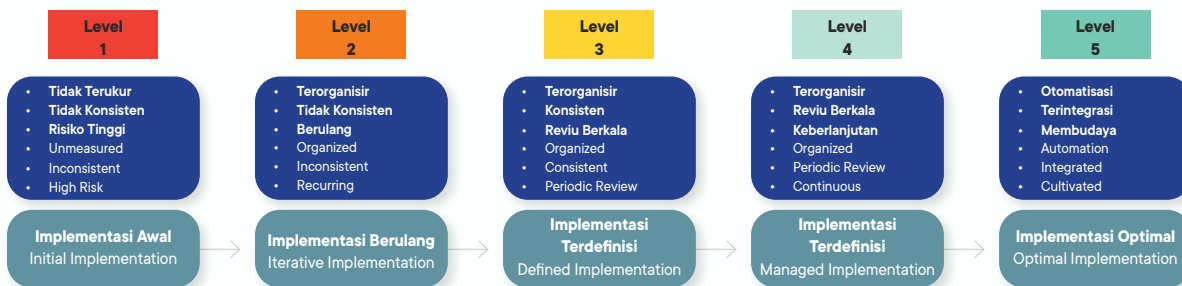


CSM TOOLS

Total Kelola Governance		Identifikasi Identification		Proteksi Protection		Deteksi Detection		Respon Response	
3,66		3,70		3,64		3,08		3,11	
Kesadaran Awareness	4,24	Manajemen Aset Asset Management	3,20	Jaringan Network	4,14	Perubahan Changes	3,00	Penahanan Detention	4,08
Audit Audit	3,25	Inventaris Inventory	4,20	Aplikasi Application	3,10	Monitor Monitor	3,79	Penanggulangan Countermeasures	3,20
Kontrol Control	4,09	Manajemen Risiko Risk Management	3,69	Pengguna User	3,22	Peringatan Monitor	3,63	Pemulihan Recovery	4,25
Pemenuhan Fulfillment	3,05	Prioritas Priority	4,40	Manajemen Identitas dan Aset Identity and Asset Management	3,54	Pemberitahuan Notification	3,00	Kegiatan Paksa Insiden Post Incident Activities	2,00
Kebijakan Development	3,70	Pelaporan Reporting	2,67	Cloud Cloud	4,00	Intelijen Intelligence	2,27	Pelaporan Reporting	2,00
Proses Process	3,64	Klasifikasi Classification	4,25	Data Data	3,86	Pelaporan Reporting	2,80		

Level Maturitas | Maturity Level

3,56



WIKA sudah membentuk tim Tanggap Insiden Siber/ *Computer Security Incident Response Team* dengan nama CSIRT-WIKA melalui Keputusan Direksi no. SK.01.01/A.DIR.00102/2023 pada 16 Januari 2023 dan di registrasi pada sektor bisnis di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 5 Desember 2023 dengan nomor 273/CSIRT01.21/BSSN/11/2023. Divisi TI juga sudah melakukan *awareness cyber security* melalui media portal internal (buletin IT) dan *micro learning* pada sistem *Learning Management System* terkait *awareness* ini

WIKA has formed a Computer Security Incident Response Team named CSIRT-WIKA through the Board of Directors Decree no. SK.01.01/A.DIR.00102/2023 on January 16, 2023 and registered in the business sector at the Cyber and Crypto Agency (BSSN) on December 5, 2023 with the number 273/CSIRT01.21/BSSN/11/2023. The IT Division has also conducted cyber security awareness through internal portal media (IT bulletins) and micro learning on the Learning Management System related to this awareness.



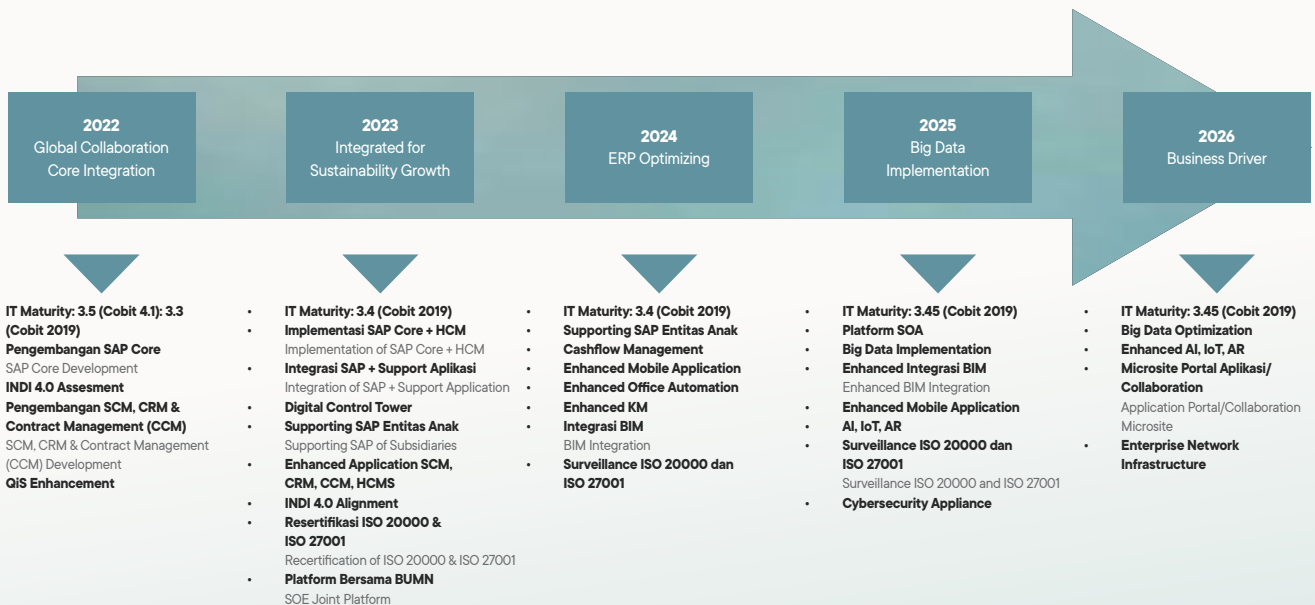
ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI WIKA

Pengembangan dan inisiatif TI WIKA berpedoman kepada *roadmap* TI periode 2022-2026. *Roadmap* ini ditujukan agar inisiatif yang disusun dapat menunjang program kerja secara efektif sehingga pengembangan yang ada selaras dengan rencana strategis jangka Panjang Perseroan. *Roadmap* TI juga diharapkan dapat menyelaraskan teknologi dengan tujuan bisnis sehingga dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional

WIKI INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP

IT development and initiatives of WIKA are guided by the IT roadmap for 2022-2026 period. This roadmap is intended to ensure that the planned initiatives effectively support work programs, aligning development efforts with the Company's long-term strategic plans. The IT roadmap is also expected to harmonize technology with business objectives, thereby helping to enhance operational efficiency and productivity.

Roadmap Teknologi Informasi Wika Periode 2022-2026 Roadmap Teknologi Informasi Wika Periode 2022-2026



PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2024

WIKA, sebagai salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia, memiliki berbagai program strategis dalam bidang Teknologi Informasi yang dirancang untuk mendukung efisiensi dan inovasi. Berikut adalah program strategis TI WIKA:

STRATEGIC PROGRAMS IN 2024

WIKA, as one of the leading construction companies in Indonesia, has various strategic programs in Information Technology designed to support efficiency and innovation. The following are WIKA's IT strategic programs:

Program Kerja Work Program	TW I Q1	TW II Q2	TW III Q3	TW IV Q4
1 Pengembangan Digitalisasi dan integrasi proses bisnis utama WIKA Development of Digitalization and Integration of WIKA's Core Business Processes	✓	✓	✓	✓
2 Pengembangan <i>Dashboard & Digital Control Tower</i> Development of Dashboard & Digital Control Tower	✓	✓	✓	✓
3 Pemenuhan INDI 4.0 Level 3 Fulfillment of INDI 4.0 Level 3	✓	✓		
4 <i>Maturity TI Cobit 2019</i> IT Maturity Cobit 2019	✓			
5 Pemenuhan standar keamanan informasi sesuai dengan ISO 27001 & ISO 20000 (Sertifikasi SAP WIKA) Fulfillment of information security standards in accordance with ISO 27001 & ISO 20000 (WIKA SAP Certification)			✓	
6 <i>Support & Pengembangan ERP System</i> Support & Development of ERP System	✓	✓	✓	✓
7 <i>Support Implementasi ERP Entitas Anak</i> Support for Subsidiary Entity ERP Implementation	✓	✓	✓	✓
8 Peningkatan Kompetensi SDM TI Improvement of IT HC Competencies	✓	✓	✓	
9 Implementasi ISO 27701 & Pemenuhan UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) Implementation of ISO 27701 & Fulfillment of PDP Law (Personal Data Protection)			✓	✓

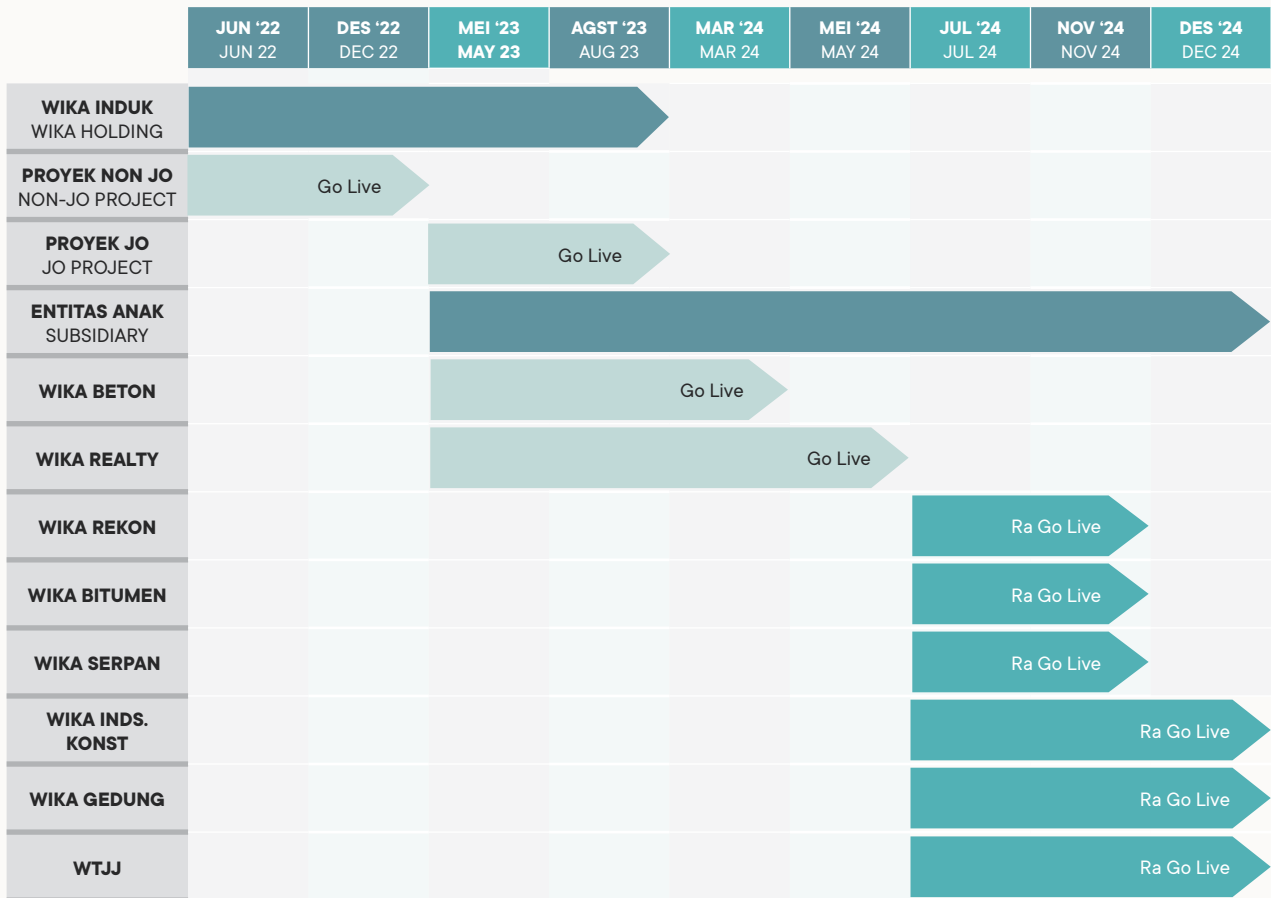
Program kerja IT Division tahun 2024 memfokuskan pada pengembangan digitalisasi dan integrasi proses bisnis WIKA terutama dalam pengembangan *dashboard* dan *Digital Control Tower* (DCT), kemudian IT Division juga fokus pada tata kelola dan *compliance* mengacu pada standar ketentuan dan target dari Kementerian BUMN, diantaranya : program INDI 4.0 untuk pemenuhan gap dalam pencapaian target skor 3.5 di tahun 2024, peningkatan tata Kelola *assessment* COBIT 2019, resertifikasi standar keamanan informasi sesuai ISO 27001-1:2022 dan standar layanan IT sesuai ISO 20000-1:2018 (perluasan ruang lingkup SAP) yang sebelumnya sudah diperoleh di tahun 2022 untuk lingkup ERP WIKA, serta pemenuhan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

The IT Division's 2024 work program focused on the development of digitalization and integration of WIKA's business processes, particularly in the development of dashboards and Digital Control Tower (DCT). Additionally, the IT Division emphasized governance and compliance in accordance with the standards and targets set by the Ministry of SOE, including: the INDI 4.0 program to close gaps in achieving the target score of 3.5 by 2024, enhancing governance through COBIT 2019 assessment, recertification of information security standards in compliance with ISO 27001-1:2022 and IT service standards according to ISO 20000-1:2018 (expanding the scope of SAP), which was previously achieved in 2022 for WIKA's ERP scope, as well as compliance with the Personal Data Protection (PDP) Act.

IT Division juga memfokuskan program kerja sesuai *masterplan* IT di 2024 yaitu ERP *optimizing* dengan melakukan *support* serta pengembangan ERP System - SAP sebagai *Core System* dan *support* Implementasi ERP Anak Perusahaan sehingga integritas, efektifitas dan efisiensi konsolidasi *financial report* dan standardisasi *master data* dapat tercapai.

The IT Division also aligned its work program with the 2024 IT master plan, focusing on ERP optimization by supporting and developing the ERP System - SAP as the core system and implementing ERP for subsidiaries, in order to ensure the integrity, effectiveness, and efficiency of consolidated financial reporting and standardization of master data.

Roadmap Implementasi SAP WIKA Grup Roadmap Implementasi SAP WIKA Group



Divisi TI secara langsung diminta oleh Direksi untuk memastikan bahwa penerapan ERP SAP di AP sama dengan di WIKI Induk terkait implementasi *4 Eyes Principle*, *Early Warning System* serta *controlling* anggaran, dengan target *Go Live* di bulan Desember 2024 untuk tujuh AP (Wika Gedung, Wika Rekayasa Konstruksi, Wika Industri & Konstruksi, Wika Bitumen, Wika Serang Panimbang, Wika Tirta Jaya Jatiluhur). Sesuai dengan permintaan tersebut maka dilakukan program *Roll Out* SAP WIKI Induk untuk seluruh modul yang digunakan di WIKI Induk (*Project System, Material Management, Sales and Distribution, Finance and Controlling, Fund Management, Human Capital Management*) dan melakukan penyesuaian program dengan proses bisnis yang ada di tiap AP.

Implementasi *roll out* ini merupakan kolaborasi *development* antara IT dan konsultan dimana dalam kegiatan ini dapat menekan biaya pengembangan aplikasi khususnya konsultan IT karena sebagian *task* konsultan dapat dikerjakan oleh tim IT WIKI. Pendampingan AP terkait SAP sampai dengan September 2024 telah dilakukan tahapan *preparation, explore dan KUT (Key User Training)*.

The IT Division was directly requested by the Board of Directors to ensure that the implementation of SAP ERP in subsidiaries is the same as in WIKI Holding, related to the implementation of the *4 Eyes Principle*, *Early Warning System* and budget control, with *Go Live* target in December 2024 for seven subsidiaries (Wika Gedung, Wika Rekayasa Konstruksi, Wika Industri & Konstruksi, Wika Bitumen, Wika Serang Panimbang, Wika Tirta Jaya Jatiluhur). In accordance with this request, the SAP *Roll Out* program for WIKI Holding was carried out for all modules used in WIKI Holding (*Project System, Material Management, Sales and Distribution, Finance and Controlling, Fund Management, Human Capital Management*) and adjustments to the program were made according with the business processes in each subsidiary.

This *roll out* is a development collaboration between IT and consultants, which can reduce application development costs, especially IT consultants, since some of the consultant tasks can be done by WIKI IT team. Regarding assistance for subsidiaries related to SAP, until September 2024 the preparation, explore and *KUT (Key User Training)* stages has been carried out.

Agenda Preparation, Explore dan KUT Roll Out Anak Perusahaan

Agenda Preparation, Explore and KUT Roll Out of Subsidiaries



Selain itu, guna menunjang aktivitas transaksi SAP di seluruh modul Divisi IT juga melakukan standarisasi dan integrasi *master data* untuk seluruh WIKA Group yang mencakup *General Ledger, Business Partner, Material / Service Master, Bank Key*. Dengan mengimplementasikan standarisasi master data, Perseroan dapat meningkatkan kolaborasi antar entitas baik departemen, divisi, maupun Anak Perusahaan dan meningkatkan efektivitas operasional secara keseluruhan.

Pengembangan ERP System dengan SAP sebagai *Core* dan otomasi untuk menjaga integritas data, efektifitas dan efisiensi proses, diantaranya Implementasi WDIGI (*WIKI Digital Invoice*) terintegrasi dengan SAP. WDIGI mendigitalisasikan proses penagihan, pembayaran dan dokumen pendukung secara digital (*document management system*). Proses verifikasi dan *approval* pembayaran tagihan secara berjenjang sesuai dengan *workflow* pembayaran.

In addition, to support SAP transaction activities in all modules, the IT Division also standardizes and integrates master data for the entire WIKA Group, including General Ledger, Business Partner, Material / Service Master, Bank Key. By implementing master data standardization, the Company can improve collaboration between entities, both departments, divisions and subsidiaries and improve overall operational effectiveness.

The development of ERP System with SAP as the Core and automation to maintain data integrity, effectiveness and efficiency of the process, including the Implementation of WDIGI (*WIKI Digital Invoice*) integrated with SAP. WDIGI digitizes the billing process, payments and supporting documents digitally (*document management system*). The verification and approval process for bill payments is tiered according to the payment workflow.



W – DIGITAL INVOICE

- Integrasikan SAP transaksi dan verifikasi berkas tagihan secara digital (**Paperless**)
- Monitoring progress tagihan (**traceability**)
- Akurasi validitas data
- Otomasi **Three Way Machining** (PO-GR/SES – Invoice)
- Pembuatan **Berita Acara Pembayaran (BAP)** secara digital & terintegrasi SAP

DIGITAL WAREHOUSE

- Perbaikan tata kelola proses bisnis pergudangan
- Efisiensi waktu proses administrasi penerimaan dan pengeluaran material
- **Opename Stock Mandatory** dilakukan tiap bulan dan diinput dalam SAP
- **Automatic Generate Journal** transaksi ke SAP

ERP OPTIMIZING

- Otomasi *monitoring* dan pengendalian volume *waste material* utama
- *Monitoring data waste volume* sumber daya
- Tahap 1 : Besi Beton & Ready Mix

JUST IN TIME DELIVERY (GR-GI)

- *Monitoring* Umur Persediaan
- *Material Management (Lean Construction – Time)*
- Efisiensi Biaya Gudang
- Optimalisasi *Cashflow*

W – DIGITAL INVOICE

- SAP transaction integration and digital invoice file verification (**Paperless**)
- Invoice progress monitoring (**traceability**)
- Data validity accuracy
- **Three Way Machining Automation** (PO-GR/SES – Invoice)
- **Digital & SAP integrated Payment Minutes (BAP)** creation

DIGITAL WAREHOUSE

- Improvement of warehouse business process governance
- Efficient time for material receipt and issuance administration process
- Opename Stock Mandatory is carried out every month and inputted into SAP
- Automatic Generate Transaction Journal to SAP

ERP OPTIMIZING

- Automation of monitoring and control of main material waste volume
- Monitoring of resource waste volume data
- Stage 1: Reinforced Concrete & Ready Mix

JUST IN TIME DELIVERY (GR-GI)

- Inventory Age Monitoring
- Material Management (Lean Construction – Time)
- Warehouse Cost Efficiency
- Cashflow Optimization

Pengembangan program strategis lainnya adalah sistem informasi WISE (WIKI *Integrated Smart E-Procurement*) untuk pengelolaan proses pengadaan secara Elektronik di lingkungan WIKI, *launching* pada tanggal 7 Mei 2024 yang disahkan secara langsung oleh Direktur Utama WIKI.

INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan fokus pada investasi TI yang strategis, WIKI berusaha untuk mengakselerasi percepatan dan pertumbuhan kinerja Perseroan sekaligus meningkatkan daya saing di industri konstruksi. Pada tahun 2024, WIKI telah mengalokasikan dana sebesar Rp17,46 Miliar lebih rendah dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp21,67 miliar untuk investasi dan biaya di bidang TI. Investasi Teknologi Informasi WIKI mencakup berbagai aspek yang mendukung efisiensi operasional, pengembangan inovasi, dan keamanan siber. Beberapa area utama investasi TI di WIKI meliputi:

1. Enterprise Infrastruktur Internet
2. Middleware/API Management
3. Firewall SAP
4. Upgrade Data Warehouse

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI WIKI TAHUN KE DEPAN

Dengan rencana yang terstruktur dan berfokus pada inovasi, WIKI berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana strategis dalam mencapai visi dan misi Perseroan, serta untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Untuk itu, WIKI telah menyusun rencana pengembangan Teknologi Informasi tahun 2025 berdasarkan kepada RJPP dan *roadmap* TI sebagai berikut:

1. *Regulatory*
 - Sasaran:
 - Tingkat kematangan pengelolaan teknologi informasi di level 3 (*defined*) dan sejalan RJPP
 - *Compliance* terhadap aturan perundangan yang berlaku (ISO 20000, ISO 27001, UU no 27 tahun 2022 tentang PDP, PERMEN 2 BUMN)
 - Program Kerja:
 - Penyesuaian Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dengan RJPP WIKI terbaru 2025 - 2029
 - Implementasi IT *Governance* terintegrasi untuk WIKI Group
 - *Assesement* INDI 4.0 KBUMN dan IT *Maturity* berbasis COBIT 2019 untuk 30 proses dengan *target score* 3.5
 - *Surveillance* ISO 20000 untuk layanan dan ISO 270001 untuk keamanan untuk *core process system*
 - Sertifikasi PDP (Pelindungan Data Pribadi) serta Implementasi Infrastruktur dan *privacy* sistem mengacu kepada ketentuan PDP

Another strategic program development is the WISE (WIKI *Integrated Smart E-Procurement*) information system for electronic procurement process management within WIKI, launched on May 7, 2024, which was directly approved by the President Director of WIKI.

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

By focusing on strategic IT investment, WIKI strives to accelerate the Company's performance and growth while increasing competitiveness in the construction industry. In 2024, WIKI has budgeted Rp17.46 billion, lower than the 2023 budget of Rp21.67 billion for investment and costs in the IT sector. WIKI's Information Technology investment covers various aspects that support operational efficiency, innovation development, and cybersecurity. Some of the main areas of IT investment in WIKI include:

1. Enterprise Internet Infrastructure
2. Middleware/API Management
3. SAP Firewall
4. Data Warehouse Upgrade

WIKI'S INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLAN FOR THE NEXT YEAR

With a structured plan that focuses on innovation, WIKI is committed to utilizing information technology as a strategic tool in achieving the Company's vision and mission, as well as to face future challenges and opportunities. To that end, WIKI has prepared an Information Technology development plan for 2025 based on the RJPP and IT roadmap as follows:

1. *Regulatory*
 - Target:
 - Information technology management maturity level at level 3 (*defined*) and in line with RJPP
 - Compliance with applicable laws and regulations (ISO 20000, ISO 27001, Law no. 27 of 2022 concerning PDP, PERMEN 2 BUMN)
 - Work Program:
 - Adjustment of the Information Technology Strategic Plan (RSTI) with the latest WIKI RJPP 2025 - 2029
 - Implementation of integrated IT *Governance* for WIKI Group
 - Assessment of INDI 4.0 KBUMN and IT *Maturity* based on COBIT 2019 for 30 processes with a target score of 3.5
 - *Surveillance* ISO 20000 for services and ISO 270001 for security for the core process system
 - PDP (Personal Data Protection) Certification and Infrastructure Implementation and system privacy refer to PDP provisions



2. Process Improvement

- Sasaran:
 - Peningkatan Kegunaan IT pada *onsite, offsite, back office*, dan penyelarasan sistem *digital backbone* dan operasional
 - Peningkatan Layanan IT untuk mendukung operasional perusahaan
- Program Kerja:
 - Digitalisasi dan optimalisasi proses bisnis untuk pengembangan sistem *BQ Tools*, Integrasi *BIM*, *Learning Management System*, *Vendor Management System*, dan Implementasi *WeOffice* Entitas Anak
 - *Support* dan Pengembangan ERP dengan target digitalisasi lab / survei terintegrasi SAP
 - *Support* Implementasi SAP WIKA Group

3. System Improvement

- Sasaran:
 - Adopsi Teknologi Baru (Inovasi) untuk kehandalan *database*
- Program Kerja:
 - Pengembangan *Big Data*, *Artificial Intelligence* Modernisasi *Business Warehouse* dan Implementasi *Service Oriented Architecture (SOA)*
 - Melakukan peningkatan *cyber security* dan migrasi Infrastruktur *cloud system* untuk *core process*

2. Process Improvement

- Target:
 - Improving IT Usability on onsite, offsite, back office, and aligning digital backbone and operational systems
 - Improving IT Services to support company operations
- Work Program:
 - Digitalization and optimization of business processes for the development of *BQ Tools* systems, *BIM* Integration, *Learning Management System*, *Vendor Management System*, and Implementation of *Subsidiary Entities WeOffice*
 - Support and Development of ERP with the target of digitalization of SAP integrated labs / surveys
 - Support for SAP WIKA Group Implementation

3. System Improvement

- Target:
 - Adoption of New Technology (Innovation) for database reliability
- Work Program:
 - Development of *Big Data*, *Artificial Intelligence* Modernization of *Business Warehouse* and Implementation of *Service Oriented Architecture (SOA)*
 - Improving *cyber security* and migration of cloud system infrastructure for core processes





Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Dalam fase stabilisasi ini, Perseroan mengerahkan seluruh sumber daya dan inovasi untuk membangun fondasi tata Kelola yang kokoh sehingga WIKA dapat lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari faktor internal maupun dinamika eksternal.

In this stabilization phase, the Company deploys all its resources and innovations to build a solid governance foundation, enabling WIKA to be more resilient in facing various challenges, both from internal factors and external dynamics.

Pernyataan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Statement of Corporate Governance Implementation



Tahun 2024 menjadi periode penuh tantangan bagi WIKA, terutama dengan adanya program restrukturisasi keuangan serta gugatan PKPU yang dihadapi Perseroan. Dalam menghadapi dinamika ini, WIKA berkomitmen untuk menanggapi setiap tuntutan dan arahan dari pemegang saham, regulator, serta pihak terkait lainnya dengan sikap profesional dan itikad baik. Perseroan terus berupaya keras memperkuat penerapan tata kelola yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan utama dalam pengelolaan risiko, peningkatan efisiensi eksekusi proyek, optimalisasi likuiditas, serta penguatan struktur modal kerja.

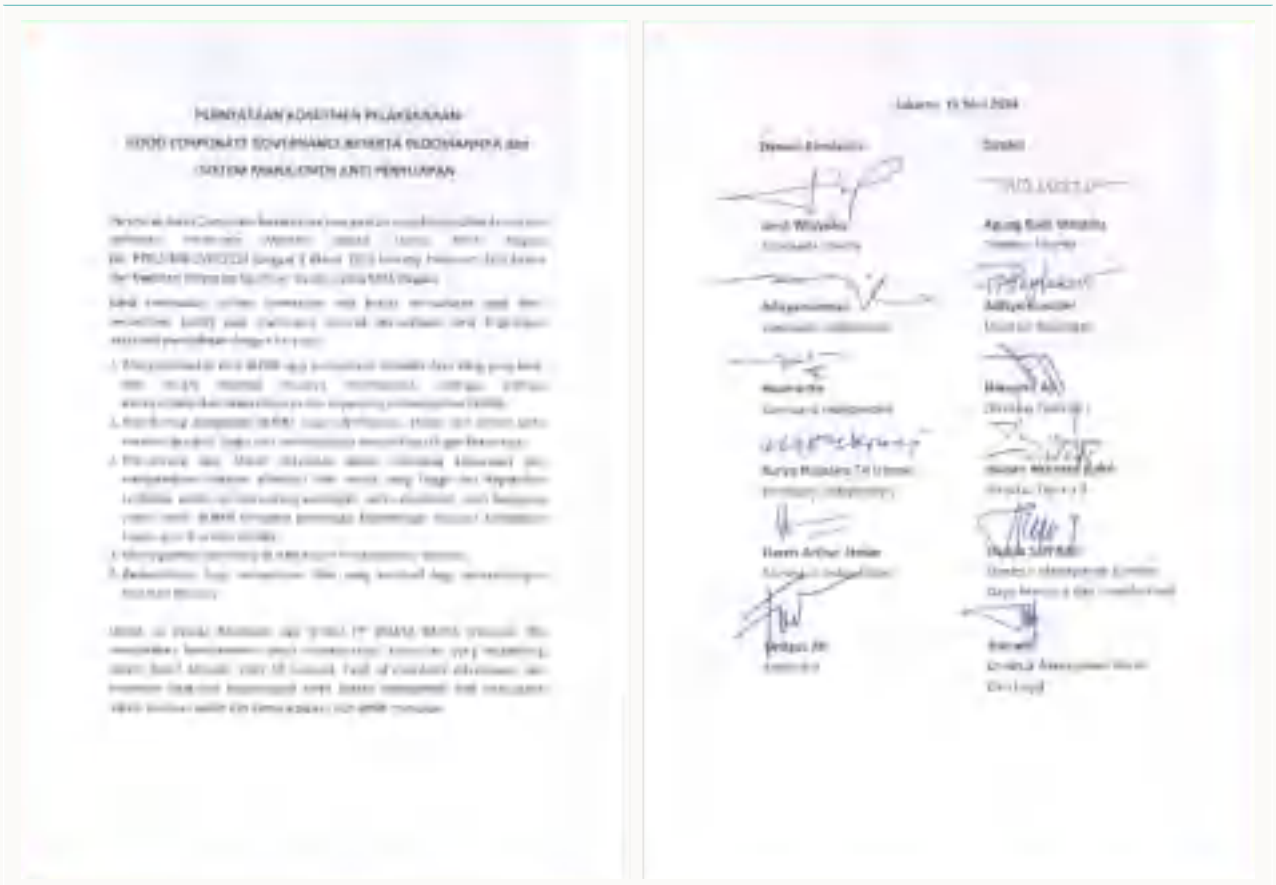
Sejalan dengan upaya tersebut, tahun 2024 juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemulihan WIKA. Dalam fase perbaikan dan stabilisasi ini, perusahaan mengerahkan seluruh sumber daya dan inovasi untuk membangun fondasi tata kelola yang lebih kokoh dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. WIKA menerapkan berbagai inisiatif strategis yang terukur, termasuk digitalisasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional. Langkah-langkah konkret telah diambil, mulai dari digitalisasi proses pengadaan guna menciptakan rantai pasok yang lebih transparan dan responsif, implementasi sistem monitoring proyek secara *real-time* untuk memberikan visibilitas penuh terhadap progres bisnis, hingga mekanisme pengawasan yang lebih ketat guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis di seluruh lini Perseroan.

2024 has been a challenging period for WIKA's, especially with the financial restructuring program and the PKPU lawsuit faced by the Company. In facing this dynamic, WIKA's is committed to responding to every demand and direction from shareholders, regulators, and other related parties with a professional attitude and good faith. The Company continues to strengthen the implementation of governance based on transparency, accountability, and responsibility. These principles are the main foundation in risk management, increasing project execution efficiency, optimizing liquidity, and strengthening working capital structure..

In line with these efforts, the year 2024 also marks an important milestone in WIKA's recovery journey. During this phase of improvement and stabilization, the Company is deploying all resources and innovations to build a more solid governance foundation to deal with both internal and external challenges. WIKA's is implementing various measurable strategic initiatives, including digitalization to enhance operational accuracy and efficiency. Concrete steps have been taken, starting from digitalizing the procurement process to create a more transparent and responsive supply chain, implementing a real-time project monitoring system to provide full visibility into business progress, and tightening supervision mechanisms to ensure compliance with business ethics principles throughout the Company's operations.

WIKA meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah elemen fundamental bagi keberlanjutan bisnis dan pencapaian tujuan jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, WIKA menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha, di mana setiap pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai bagian dari upaya ini, WIKA terus mengambil langkah strategis untuk membangun dan memperkuat kepercayaan para pemegang saham, kreditur, pelanggan, mitra, dan masyarakat luas. Dengan fondasi tata kelola yang semakin kuat, WIKA optimistis menghadapi tantangan serta peluang di masa depan demi pertumbuhan yang berkelanjutan.

WIKA's believes that good corporate governance is a fundamental element for business sustainability and achieving long-term goals. By applying GCG principles, WIKA's creates a conducive environment for business growth, where each stakeholder can actively participate in decision-making processes. As part of this effort, WIKA's continues to take strategic measures to build and strengthen the trust of shareholders, creditors, customers, partners, and the wider community. With an increasingly strong governance foundation, WIKA's is optimistic about facing future challenges and opportunities in the pursuit of sustainable growth.



JEJAK REKAM PENERAPAN GCG DI WIKA

WIKA'S GCG IMPLEMENTATION MILESTONES

<p>1960</p>	<p>PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk berdiri. PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk was established.</p>
<p>2007</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk IPO • Pertama kali WIKA melakukan <i>assessment</i> penerapan GCG dengan perolehan skor 81,83 • PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk IPO • WIKA's carried out GCG assessment for the first time, which obtained a score of 81.83
<p>2008</p>	<p><i>Assessment</i> penerapan GCG dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan skor yang meningkat, yaitu 85,56. GCG assessment was conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) with an improved score of 85.56.</p>

2009	<p>Hasil <i>assessment</i> penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada tahun 2009 mencapai skor 86,20. Pada tahun tersebut, terjadi beberapa peningkatan signifikan dalam praktik GCG. Salah satunya adalah peran yang semakin ditingkatkan oleh komite-komite Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut meliputi Komite Audit, Komite GCG, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha.</p> <p>Penerapan GCG juga semakin terasa di tingkat operasional Perseroan. Hal ini ditandai dengan peran aktif dari Unit Kerja GCG yang secara intensif melakukan sosialisasi mengenai GCG kepada seluruh jajaran WIKA. Unit Kerja GCG juga membantu Komite GCG dalam memantau kepatuhan perilaku kerja terhadap buku panduan kode etik (<i>code of conduct</i>) Perseroan.</p> <p>The results of Good Corporate Governance assessment in 2009 obtained a score of 86.20. In this year, several significant improvements in GCG practices were recorded. One of them is the increasingly enhanced role of Board of Commissioners committees. These committees include Audit Committee, GCG Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Financial Planning and Business Risk Committee.</p> <p>The implementation of GCG was also increasingly felt at the Company's operational level. This is marked by the active role of GCG Work Unit, which intensively carried out GCG outreach to all levels of WIKAs. The GCG Work Unit also assisted the Committee in monitoring work behavior compliance with the Company's code of conduct guidebook</p>
2010	<p>Perseroan telah melakukan sejumlah upaya sejak tahun 2007 hingga 2010, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan komite-komite sebagai perangkat kerja Dewan Komisaris, yaitu: Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Perencanaan dan Risiko Usaha, serta Komite GCG. 2. Tinjauan terhadap <i>Code of Corporate Governance</i>, <i>Code of Conduct</i>, dan <i>Board Manual</i>. 3. Pembuatan dokumen <i>Conflict of Interest</i> dari Dewan Komisaris dan Direksi. 4. Hasil <i>assessment</i> GCG di tahun 2010 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diperoleh skor 86,97. <p>The Company has made a number of efforts from 2007 to 2010, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establishment of committees as working tools of Board of Commissioners, namely: Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Business Planning and Risk Committee, and GCG Committee. 2. Review of the Code of Corporate Governance, Code of Conduct, and Board Manual. 3. Preparation of Conflict of Interest documents from Board of Commissioners and Board of Directors. 4. The results of 2010 GCG assessment by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), obtained a score of 86.97.
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan GCG Perusahaan terhadap Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011; • Hasil <i>assessment</i> GCG di tahun 2011 oleh BPKP, diperoleh skor 89,34 dengan kategori Baik. • The Company's GCG implementation towards SOE Ministerial Regulation PER-01/MBU/2011; • The results of GCG assessment in 2011 by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), obtained a score of 89.34 in Good category
2012	<p>Kementerian Negara BUMN telah mengeluarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Surat Keputusan tersebut merupakan pengejawantahan dari bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Berdasarkan peraturan baru tersebut terdapat beberapa perbedaan dalam melakukan penilaian, dimana dalam kriteria penilaian yang lama tolok ukur penilaian yang digunakan hanya 50 indikator dengan 160 parameter sedangkan dengan kriteria penilaian yang baru tolok ukur penilaian memiliki 6 aspek yang meliputi 153 indikator dengan sub indikator atau yang disebut sebagai Faktor Uji Kesesuaian (FUK) sebanyak 568 FUK. Melihat dari perbedaan parameter yang dipergunakan dalam penilaian tersebut, dengan kondisi yang sama akan terjadi penurunan hasil penilaian sebesar 15-20% apabila dilakukan dengan menggunakan kriteria yang baru. Nilai GCG Perseroan tahun 2011 dengan menggunakan parameter SK-16/S.MBU/2012 diperkirakan skornya akan berada pada kisaran 76,00 - 80,00.</p> <p>The Ministry of State-Owned Enterprises has issued the Decree of Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises Number SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE. This Decree is an embodiment of the Minister of State for State-Owned Enterprises Regulation Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance. Based on the new regulation, there are several differences in conducting assessments, where in the old assessment criteria, the assessment benchmarks used were only 50 indicators with 160 parameters, whereas with the new assessment criteria, the assessment benchmarks have 6 aspects which include 153 indicators with sub-indicators or what are called as a Conformity Test Factor (FUK) of 568 FUK. Looking at the differences in parameters used in the assessment, under the same conditions there would be a decrease in assessment results of 15-20% if using the new criteria, the Company's GCG score in 2011 using the SK-16/S.MBU/2012 parameters is estimated to be in the range of 76.00 - 80.00.</p>
2013	<p>Perseroan melakukan penilaian penerapan praktik GCG untuk tahun 2013 berdasarkan metode <i>Assessment</i> GCG yang diatur dalam SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Pelaksanaan <i>assessment</i> tahun 2013 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai <i>independent assessor</i>. Capaian nilai (skor) Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar 86,076.</p> <p>The Company assessed the implementation of GCG practices for 2013 based on the GCG Assessment method regulated in SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE. The 2013 assessment was carried out by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as an independent assessor. The Company achieved a score of 86.076 in 2013.</p>
2014	<p>Pada tahun 2014, Perseroan melakukan penilaian mandiri (<i>self assessment</i>) penerapan praktik GCG untuk tahun 2014 berdasarkan metode <i>Assessment</i> GCG yang diatur pada SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Pelaksanaan <i>self assesment</i> tahun 2014 dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Capaian nilai (skor) Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar 89,231 dengan kategori "Sangat Baik".</p> <p>In 2014, the Company conducted an independent assessment (self-assessment) of the implementation of GCG practices for 2014 based on the GCG Assessment method regulated in SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE. The 2014 self-assessment was carried out by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. The Company's score in 2014 was 89.231 in "Very Good" category.</p>
2015	<p>Pelaksanaan <i>assesment</i> tahun 2015 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai <i>independent assessor</i>. Capaian nilai (skor) Perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar 93,35 dengan kategori "Sangat Baik" (BPKP).</p> <p>The 2015 assessment was carried out by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as an independent assessor. The Company's score in 2015 was 93.35 in "Very Good" category (BPKP).</p>

2016	<p>Sebagai bagian dari komitmen implementasi GCG, selama tahun 2016, WIKA telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengukuran pelaksanaan GCG melalui <i>Self Assessment</i> GCG dengan Skor 94,93 (Sangat Baik). 2. Mengikuti <i>Assessment ASEAN Corporate Governance Scorecard</i> dengan Skor 74. 3. Meraih Penghargaan Internasional oleh Alpha Southeast Asia dalam <i>Institutional Investor Corporate Awards 2016</i> untuk kategori "The Best of Strongest Adherence to Corporate Governance". 4. Meraih Penghargaan <i>The Best 2nd of Good Corporate Governance</i> sektor <i>Construction and Building</i> dari IPMI International Business School and Economic Review. 5. Meraih Predikat <i>Indonesia Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i> dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dengan Skor 81,86. 6. Masuk kedalam <i>Top 50 Public Listed Companies</i> dari Indonesian Institute for 'Corporate Directorship'. <p>As part of its GCG implementation commitment, during 2016, WIKA's has carried out the following activities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conducted measurement of GCG implementation through GCG Self Assessment with a score of 94.93 (Very Good). 2. Participated in the ASEAN Corporate Governance Scorecard Assessment with a score of 74. 3. Received an International Award from Alpha Southeast Asia in the 2016 Institution Investor Corporate Awards in "The Best of Strongest Adherence to Corporate Governance" category. 4. Received the 2nd Best of Good Corporate Governance Award in the Construction and Building sector from IPMI International Business School and Economic Review. 5. Achieved the title of Indonesia Trusted Company Based on the Corporate Governance Perception Index (CGPI) from The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) with a score of 81.86. 6. Entered the Top 50 Public Listed Companies from the Indonesian Institute for Corporate Directorship.
2017	<p>Untuk memperkuat penerapan GCG, selama tahun 2017 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Assessment</i> GCG oleh BPKP dengan Skor 94,925. 2. <i>Asean Corporate Governance Scorecard</i> dengan skor 78. 3. Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN dengan predikat <i>Industry Leader</i> dengan poin 687,5 dalam acara BUMN Performance Excellent Award 2017. 4. <i>Top 50 of The Biggest Market Capitalization Public Listed Companies</i> dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). 5. Meraih Predikat <i>Indonesia Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i> dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dengan Skor 84,99. 6. BUMN yang Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan Selama Tahun 2016 dalam acara Infobank 8th BUMN Awards 2017. 7. The Best BUMN yang diselenggarakan oleh IPMI International Business School dan Majalah Economic Review. 8. <i>The Best Corporate Secretary in Corporate Governance</i> dari SWA. 9. Pengesahan Pedoman <i>Subsidiary Governance</i> dengan No. SK 33/DK/WIKA/2017. <p>To strengthen the implementation of GCG, during 2017 the followings were done:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GCG assessment by BPKP with a score of 94.925. 2. Asean Corporate Governance Scorecard with a score of 78. 3. Assessment of SOE Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) with the title Industry Leader and 687.5 points at the 2017 SPE Performance Excellence Award event. 4. Top 50 of The Biggest Market Capitalization Public Listed Companies from the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). 5. Achieved the title of Indonesia Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) from The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) with a score of 84.99. 6. SOE with Very Good Predicate for Financial Performance During 2016 at the Infobank 8th SOE Awards 2017. 7. The Best SOE organized by IPMI International Business School and Economic Review Magazine. 8. The Best Corporate Secretary in Corporate Governance from SWA. 9. The Ratification of Subsidiary Governance Guidelines with No. SK 33/DK/WIKA's/2017.
2018	<p>Berikut ini adalah capaian dan kegiatan-kegiatan terkait GCG tahun 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>Self Assessment</i>: skor <i>self assessment</i> sebesar 94,949 dengan verifikator Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2. Menerima 7 penghargaan untuk bidang GCG sepanjang tahun 2018 dan Manajemen, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Terbaik ke- 3 BUMN dalam <i>ASEAN Corporate Governance Scorecard</i>, Februari dari RSM. b. Kategori Platinum for Very Excellent, Grade A in Indonesia GCG Award 2018 yang diselenggarakan oleh Economic Review dan IPMI, 2 November 2018. c. <i>The Most Trusted Company in Corporate Governance Perception Index</i> dari Indonesia Institute for Corporate Governance dan SWA. d. <i>Top 4 Social Business Innovation Company 2018 Category Building Construction</i> di Green CEO Award 2018 ke-7, 27 September 2018. e. <i>Excellent Company for Product and Business Process Innovation</i> dalam Indonesia Most Innovative Business Award 2018, dari Warta Ekonomi, 23 Maret 2018. f. Peringkat 3 Kategori Platinum Indonesia CSR Award dari Economic Review 2018, 23 Februari 2018. g. <i>Top 5 GCG Issues in Construction Sector</i>, 26 Oktober 2018 dalam Indonesia Corporate Secretary Award 2018 dari Warta Ekonomi. h. Penghargaan BUMN <i>Performance Excellent Award 2017</i> dari penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN dengan skor 704,50 dan masuk sebagai "Industry Leader" sekategori dengan Jasa Marga, Telkomsel dan Pertamina, yang diselenggarakan oleh Forum Ekselen BUMN <p>The followings are the achievements and activities related to GCG in 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conducted self-assessment with a score of 94.949, with the Financial and Development Supervisory Agency as verifier. 2. Received 7 awards in the field of GCG throughout 2018 and Management, namely: <ol style="list-style-type: none"> a. 3rd Best SOE in the ASEAN Corporate Governance Scorecard, February from RSM. b. Platinum Category for Very Excellence, Grade A in Indonesia GCG Award 2018 organized by Economic Review and IPMI, on November 2, 2018. c. The Most Trusted Company in Corporate Governance Perception Index from the Indonesia Institute for Corporate Governance and SWA. d. Top 4 Social Business Innovation Company 2018 Building Construction Category at the 7th Green CEO Award 2018, on September 27, 2018. e. Excellence Company for Product and Business Process Innovation in the 2018 Indonesia Most Innovative Business Award, from Warta Ekonomi, on March 23, 2018. f. Ranked 3rd in the Platinum Indonesia CSR Award Category from the 2018 Economic Review, February 23, 2018. g. Top 5 GCG Issues in Construction Sector, on October 28, 2018 in Indonesia Corporate Ceremony Award 2018 from Warta Ekonomi h. SOE Performance Excellence Award 2017 from the assessment of SOE Superior Performance Assessment Criteria with a score of 704.50 and entered as "Industry Leader" in the same category as Jasa Marga, Telkomsel and Pertamina, organized by the SOE Excellence Forum.

2019

Adapun kegiatan peningkatan kualitas GCG yang dijalankan pada tahun 2019 antara lain:

1. Skor *Assessment* : 94,825 dengan Asesor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Penerimaan *Award* untuk bidang GCG sepanjang tahun 2019 dan Manajemen, yaitu:
 - a. *ASEAN Scorecard* : Skor 78,94 dinilai oleh RSM.
 - b. Penghargaan *Indonesia Most Trusted Companies* (Level tertinggi dari *Corporate Governance Perception Index-CGPI*) Tahun 2018 dengan skor 86,30 dari *Indonesia Institute Corporate Governance (IICG)* dan *Majalah SWA*.
 - c. *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* dan *Best Role of Stakeholders* oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* oleh *IICD*.
 - d. *Top Governance Risk Compliance (GRC) Awards: Top GRC Awards 2019 #4 Stars* dan *The Most Committed GRC Leader 2019* dari *Majalah Top Business* bekerja sama dengan *KNKG* (Komite Nasional Kebijakan Governance), *IRMAPA* (*Indonesia Risk Management Professional Association*), dan *ICoPI* (*Institute Compliance Professional Indonesia*), *Asia Business Research Center*, serta didukung oleh beberapa perusahaan konsultan GCG dan Manajemen Risiko, Manajemen Kepatuhan.
 - e. *Institutional Investor Corporate Awards Alpha Southeast Asia 2019: Strongest Adherence to Corporate Governance*.
3. Skor Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN 711,50 dan masuk sebagai "*Industry Leader*" yang diselenggarakan oleh Forum Ekselen BUMN;

The GCG quality improvement activities carried out in 2019 include:

1. Assessment Score : 94,825 with the Financial and Development Supervisory Agency as assessor;
2. Received the following awards in the field of GCG throughout 2019 and Management:
 - a. *ASEAN Scorecard* : Skor 78,94 dinilai oleh RSM.
 - b. Penghargaan *Indonesia Most Trusted Companies* (Level tertinggi dari *Corporate Governance Perception Index-CGPI*) Tahun 2018 dengan skor 86,30 dari *Indonesia Institute Corporate Governance (IICG)* dan *Majalah SWA*.
 - c. *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* dan *Best Role of Stakeholders* oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* oleh *IICD*.
 - d. *Top Governance Risk Compliance (GRC) Awards: Top GRC Awards 2019 #4 Stars* dan *The Most Committed GRC Leader 2019* dari *Majalah Top Business* bekerja sama dengan *KNKG* (Komite Nasional Kebijakan Governance), *IRMAPA* (*Indonesia Risk Management Professional Association*), dan *ICoPI* (*Institute Compliance Professional Indonesia*), *Asia Business Research Center*, serta didukung oleh beberapa perusahaan konsultan GCG dan Manajemen Risiko, Manajemen Kepatuhan.
 - e. *Institutional Investor Corporate Awards Alpha Southeast Asia 2019: Strongest Adherence to Corporate Governance*.
3. Skor Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN 711,50 dan masuk sebagai "*Industry Leader*" yang diselenggarakan oleh Forum Ekselen BUMN;

2020

Perseroan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG yang dijalankan di sepanjang tahun 2020, antara lain:

1. *Self Assessment* Implementasi GCG Tahun 2020: 94,95 dengan Tim Verifikator dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pengawasan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
2. Penerimaan *Award* untuk bidang GCG sepanjang tahun 2020 dan Manajemen, yaitu:
 - a. *ASEAN Scorecard*: Skor 87,89 dinilai oleh RSM;
 - b. Penghargaan *Indonesia Most Trusted Companies* (Level tertinggi dari *Corporate Governance Perception Index-CGPI*) Tahun 2019 dengan skor 87,30 dari *Indonesia Institute Corporate Governance (IICG)* dan *Majalah SWA*;
 - c. *Top Governance Risk Compliance (GRC) Awards: Top GRC Awards 2019 #4Stars, The Most Committed GRC Leader 2020*, dan *The High Performance Corporate Secretary on GRC* dari *Majalah TopBusiness* bekerja sama dengan *KNKG* (Komite Nasional Kebijakan Governance), *IRMAPA* (*Indonesia Risk Management Professional Association*), dan *ICoPI* (*Institute Compliance Professional Indonesia*), *Asia Business Research Center*, serta didukung oleh beberapa perusahaan konsultan GCG dan Manajemen Risiko, Manajemen Kepatuhan;
 - d. Penandatanganan Pernyataan Benturan Kepentingan Komisaris dan Direksi Tahun 2020-2021 dan Penandatanganan Pernyataan Benturan Kepentingan tahun 2020-2021.
3. Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyusapan untuk 5 (lima) Divisi Ruang Lingkup (Divisi Keuangan, *Human Capital*, *SCM*, *DIP*, Sekretariat Perusahaan)
4. Penandatanganan Komitmen Kepatuhan *Code of Conduct* yang dilakukan oleh seluruh Pegawai 100%

The Company's activities aimed at improving the quality of GCG principles implementation carried out throughout 2020 include:

1. 2020 GCG Assessment Score: 94.95 with a Team of Verificator from the Financial Monitoring and Development Supervision Agency (BPKP) Representative of DKI Jakarta Province;
2. Received the following Awards in the field of GCG throughout 2020 and Management:
 - a. *ASEAN Scorecard*: a Score of 87.89 assessed by RSM;
 - b. *Indonesia Most Trusted Companies Award* (Highest level of the *Corporate Governance Perception Index-CGPI*) in 2019 with a score of 87.30 from the *Indonesia Institute Corporate Governance (IICG)* and *SWA Magazine*;
 - c. *Top Governance Risk Compliance (GRC) Awards: Top GRC Awards 2019 #4Stars, The Most Committed GRC Leader 2020*, and *The High Performance Corporate Secretary on GRC* from *TopBusiness Magazine* in collaboration with *KNKG* (*National Committee for Governance Policy*), *IRMAPA* (*Indonesia Risk Management Professional Association*), and *ICoPI* (*Institute Compliance Professional Indonesia*), *Asia Business Research Center*, and supported by several GCG and Risk Management consulting companies, Compliance Management;
 - d. Signing of the Conflict of Interest Statement for Commissioners and Directors for 2020-2021 and Signing of the Conflict of Interest Statement for 2020-2021.
3. ISO 37001:2016 Certification regarding Anti-Bribery Management System for 5 (five) Scope Divisions (Finance Division, *Human Capital*, *SCM*, *DIP*, Company Secretariat);
4. Signing of the *Code of Conduct Compliance Commitment* by all employees 100%.

2021

Sepanjang tahun 2021, Perseroan berupaya meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG melalui upaya implementasi GCG sebagai berikut:

1. Skor *Assessment* Implementasi GCG Tahun 2021: 94,978 dengan Tim Asesor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
2. Penerimaan Award untuk bidang GCG sepanjang tahun 2021 dan Manajemen, yaitu:
 - a. Hasil Riset ASEAN *Corporate Governance Scorecard*: Skor 87,34 dinilai secara independen oleh IICD;
 - b. *Best State Owned Enterprise* from The 12th IICD Corporate Governance Award 2021;
 - c. Penghargaan Indonesia *Most Trusted Companies* (Level tertinggi dari Corporate Governance Perception Index-CGPI) Tahun 2020 dengan skor 87,40 dari Indonesia Institute Corporate Governance (IICG) dan Majalah SWA;
 - d. *Top Governance Risk Compliance* (GRC) Awards: Top GRC Awards 2021 #4Stars, The Most Committed GRC Leader 2021 on GRC dari Majalah TopBusiness bekerja sama dengan KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), dan ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia), Asia Business Research Center, serta didukung oleh beberapa perusahaan konsultan GCG dan Manajemen Risiko, Manajemen Kepatuhan;
 - e. Indonesia *TOP GCG Awards 2021 Category Building Construction Sector* dari The Economics.
3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait *Whistleblowing System* Terintegrasi bersama 24 BUMN;
4. Pengembangan aplikasi *Whistleblowing System* bekerja sama dengan Departemen Sistem Informasi serta KPK;
5. Melakukan Asesmen WBS TPK Terintegrasi dengan Asesor KPK;
6. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) ;
7. Melakukan Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Gratifikasi dan *Whistleblowing System* yang diselenggarakan oleh KPK;
8. Monitoring Pengendalian Gratifikasi di Perusahaan;
9. Melakukan pendampingan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Entitas Anak (WIKI Gedung);
10. Keikutsertaan Sekretaris Perusahaan dan GM *Corporate Relations* dalam Forum Diskusi *Whistleblowing System* Terintegrasi antara BUMN dan KPK;

Throughout 2021, the Company made the following efforts to improve the quality of GCG principles implementation:

1. 2021 GCG Assessment Score: 94.978 with a Team of Assessors from the Financial Monitoring and Development Supervision Agency (BPKP) Representative of DKI Jakarta Province;
2. Received the following Awards in the field of GCG throughout 2021 and Management:
 - a. ASEAN Corporate Governance Scorecard Research Results: with a Score 87.34 assessed independently by IICD;
 - b. Best State Owned Enterprise from The 12th IICD Corporate Governance Award 2021;
 - c. Indonesia Most Trusted Companies Award (Highest level of the Corporate Governance Perception Index-CGPI) in 2020 with a score of 87.40 from the Indonesia Institute Corporate Governance (IICG) and SWA Magazine;
 - d. Top Governance Risk Compliance (GRC) Awards: Top GRC Awards 2021 #4Stars, The Most Committed GRC Leader 2021 on GRC from TopBusiness Magazine in collaboration with KNKG (National Committee for Governance Policy), IRMAPA (Indonesian Risk Management Professional Association), and ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia), Asia Business Research Center, and supported by several GCG and Risk Management consulting companies, Compliance Management;
 - e. Indonesia TOP GCG Awards 2021 for Building Construction Sector Category from The Economics.
3. Signing of a Cooperation Agreement with the Corruption Eradication Commission (KPK) regarding the Integrated Whistleblowing System with 24 SOEs;
4. Developing a Whistleblowing System application in collaboration with the Information Systems Department and the Corruption Eradication Commission;
5. Conduct an Integrated Corruption Eradication WBS Assessment with KPK Assessors;
6. Establish a Gratification Control Unit (UPG);
7. Provide Technical Guidance on Gratification Control Devices and Whistleblowing Systems organized by the Corruption Eradication Commission;
8. Monitoring Gratification Control in the Company;
9. Provide assistance with ISO 37001:2016 certification regarding Anti-Bribery Management Systems for Subsidiaries (WIKI's Gedung);
10. Participation of the Corporate Secretary and GM Corporate Relations in the Integrated Whistleblowing System Discussion Forum between SOE and the Corruption Eradication Commission.

2022

Sepanjang tahun 2022, Perseroan secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG melalui:

1. *Self Assessment* Implementasi GCG Tahun 2022 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan skor 95,116 sebagai Verifikator;
2. Skor *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dengan Skor 89,69 dengan Kategori (Baik) dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD);
3. Mempertahankan Posisi Indonesia *The Most Trusted Company* (Sangat Terpercaya) dengan Skor 87,47 dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awards oleh IICG bekerja sama dengan Majalah SWA;
4. Monitor & Evaluasi Pembangunan *Whistleblowing System* TPK Terintegrasi Kerja Sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 2 kali (April dan September) Tahun 2022;
5. Monitor & Evaluasi sebanyak 4 kali pada tahun 2022 (setiap triwulan) tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
6. Integrasi aplikasi *Whistleblowing System* bekerja sama dengan Departemen Sistem Informasi serta KPK;
7. Melakukan pendampingan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Entitas Anak (WIKI Industri & Konstruksi, WIKI Industri Energi).

Throughout 2022, the Company consistently made efforts to improve the quality of GCG principles implementation through:

1. 2022 GCG Assessment carried out by BPKP Representative of DKI Jakarta Province with a score of 95.116;
2. Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) score of 89.69 with Category (Good) from the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD);
3. Maintaining Indonesia's position as The Most Trusted Company (Very Trusted) with a score of 87.47 in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award by IICG in collaboration with SWA Magazine;
4. Monitor & Evaluate the Development of an Integrated Corruption Eradication Whistleblowing System in Collaboration with the Corruption Eradication Commission (KPK) for 2 times (April and September) in 2022;
5. Monitor & Evaluation for 4 times in 2022 (every quarter) regarding the Gratification Control Unit at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk by the Corruption Eradication Commission (KPK);
6. Integration of the Whistleblowing System application in collaboration with the Information Systems Department and the Corruption Eradication Commission;
7. Provide assistance with ISO 37001:2016 certification regarding Anti-Bribery Management Systems for Subsidiaries (WIKI's Industri & Konstruksi, WIKI's Industri Energi).

2023

Di tahun 2023, Perseroan mewujudkan upayanya dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG melalui:

1. Skor Implementasi GCG Tahun 2023 masih menggunakan Skor 95,116 karena pada tahun 2023 Kementerian BUMN menerbitkan SK 12/S.MBU/08/2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK 16/S.MBU/2023 Tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Agustus 2023 sehingga hingga saat ini belum ada SK pengganti terkait Asesmen Penerapan;
2. Skor *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dengan Skor 94,02 dengan Kategori (Sangat Baik) dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD);
3. Memperoleh Indonesia The Most Trusted Company (Sangat Terpercaya) dengan Skor 87,60 dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awards oleh IICG bekerjasama dengan Majalah SWA;
4. Mendapatkan skor 82,19 dengan kategori "Sangat Baik" yang diberikan oleh Indonesia Corporate Accountability Index (ICORPAX) Tahun 2022 oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
5. Perseroan mengadopsi peraturan baru yang signifikan bagi penerapan GCG di lingkungan Perseroan, yakni Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, yang diterapkan pada 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

In 2023, the Company realized the following efforts in improving the quality of GCG principles implementation:

1. The 2023 GCG Implementation Score still used a score of 95.116, because in 2023 the Ministry of SOEs issued Decree 12/S.MBU/08/2023 concerning the Revocation of the Decree of Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises Number: SK 16/S.MBU/2023 Concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises dated August 16, 2023, thereby until now there has been no replacement decree regarding the Implementation Assessment;
2. Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) with a score of 94.02 in (Very Good) Category from the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD);
3. Obtained Indonesia The Most Trusted Company (Very Trusted) with a score of 87.60 in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awards by IICG in collaboration with SWA Magazine;
4. Received a score of 82.19 in "Very Good" category given by the Indonesia Corporate Accountability Index (ICORPAX) 2022 by BPKP Representative of DKI Jakarta Province.
5. The Company adopted new regulation that is significant for the implementation of GCG within the Company, namely Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, which took effect on March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

2024

Di tahun 2024, Perseroan mengoptimalkan upayanya dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG melalui:

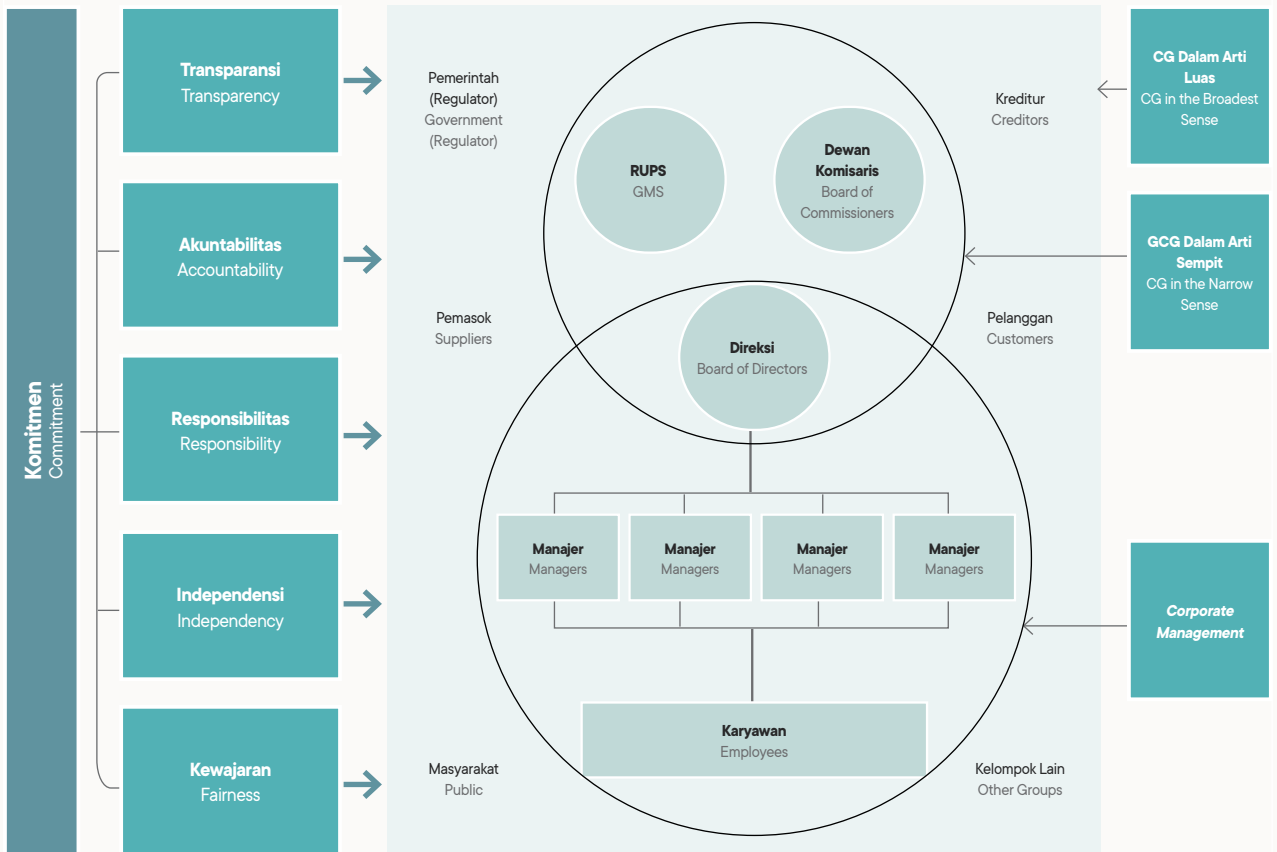
1. Skor Implementasi GCG Tahun 2024 menggunakan Skor *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dengan Skor 92,35 dengan Kategori (Sangat Baik) dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), sesuai dengan Surat Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 Tentang Pelaksanaan Assessment GCG Tahun 2023;
2. Mempertahankan Posisi Indonesia *The Most Trusted Company* (Sangat Terpercaya) dengan Skor 87,61 dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awards oleh IICG bekerja sama dengan Majalah SWA;
3. Mendapatkan skor 79,42 dengan kategori "Baik" yang diberikan oleh Indonesia Corporate Accountability Index (ICORPAX) Tahun 2023 oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
4. Melakukan pendampingan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Entitas Anak (WIKA Realty & WIKA Beton).
5. Monitor & Evaluasi Pembangunan *Whistleblowing System* TPK Terintegrasi Kerja Sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 1 kali (November) Tahun 2024;
6. Melakukan pemutakhiran Pedoman Benturan Kepentingan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

In 2024, the Company optimized its efforts to improve the quality of GCG principles implementation through:

1. GCG Implementation Score in 2024 using the Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) Score with a Score of 92.35 with (Very Good) Category from the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), in accordance with the Letter of Deputy for Finance and Risk Management of Ministry of SOEs Number S-52/DKU.MBU/10/2024 Concerning the Implementation of GCG Assessment in 2023;
2. Maintaining the Position of Indonesia The Most Trusted Company (Very Trusted) with a Score of 87.61 in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awards by IICG in collaboration with SWA Magazine;
3. Obtaining a score of 79.42 with "Good" category, given by the Indonesia Corporate Accountability Index (ICORPAX) in 2023 by BPKP Representative Office of DKI Jakarta Province;
4. Provide assistance for ISO 37001:2016 certification on Anti-Bribery Management System for Subsidiaries (WIKA's Realty & WIKA's Beton).
5. Monitor & Evaluate the Development of Integrated TPK Whistleblowing System in Collaboration with the Corruption Eradication Commission (KPK) for one time (November) in 2024;
6. Update the Conflict of Interest Guidelines in accordance with the Regulation of Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

RUANG LINGKUP PENERAPAN GCG WIKA

SCOPE OF WIKA'S GCG IMPLEMENTATION



DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan praktik GCG di lingkungan Perseroan, terdapat beberapa ketentuan yang menjadi acuan utama, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 B ayat (1) dan ayat (2);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanggal 25 November 2009;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

BASIS OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

In carrying out GCG practices within the Company, several provisions that become the main reference are as follows:

1. 1999 Law No. 31 JO 2001 Law No. 20 concerning the Eradication of Corruption Article 12 B paragraph (1) and paragraph (2);
2. 2003 Law of the Republic of Indonesia No. 19 concerning State-Owned Enterprises as amended by 2022 Law No. 2 concerning Job Creation and stipulated by 2023 Law No. 6 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of 2022 Law No. 2 concerning Job Creation into Law;
3. 2007 Law of the Republic of Indonesia No. 40 dated August 16, 2007 on Limited Liability Companies;
4. 2008 Law of the Republic of Indonesia No. 14 concerning Public Information Disclosure;
5. Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions Decree No. Kep-412/BL/2009 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest of Certain Transactions dated November 25, 2009;
6. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
7. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State Owned Enterprises;

8. Akta Pendirian Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 110 tanggal 22 Desember 1972, yang dibuat dihadapan Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor: 5 tanggal 4 Februari 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0015012.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022.

8. Establishment of the Company Deed as set forth in Deed No. 110 dated December 22, 1972, made before Paramita Tamzil, successor of Djojo Muljadi, S.H., Notary in Jakarta and has undergone several amendments, with the latest amendment as in the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 5 dated February 4, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H, Notary in Jakarta and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU0015012.AH.01.02.Tahun 2022 dated March 2, 2022.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Peningkatan Kualitas Pengurusan dan Pengawasan Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan yang baik akan meningkatkan kualitas pengurusan dan pengawasan jalannya operasional perusahaan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang layak dan bijaksana.

2. Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan

Meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengambilan keputusan yang lebih baik dan bijaksana melalui kemandirian Organ Perseroan dengan selalu memperhatikan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang timbul serta menghindari adanya benturan kepentingan.

3. Peningkatan Kualitas *Human Capital*

Meningkatkan profesionalisme dan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan penilaian kinerja yang lebih objektif, transparan, wajar, serta struktur organisasi dengan fungsi, sistem, dan pertanggungjawaban yang jelas.

4. Peningkatan Kinerja melalui Manajemen Risiko

Mengoptimalkan potensi dan nilai tambah sumber daya alam secara ekonomis dengan pengelolaan risiko yang lebih efektif.

5. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan

Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara bijaksana dan terkendali, dan menyusun laporan keuangan perusahaan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan suatu sistem pengendalian internal yang andal dan manajemen risiko yang sehat.

6. Peningkatan Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, dan pemegang saham dengan selalu melakukan pengkinian data/informasi yang materiil dan relevan secara transparan, akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Peningkatan Peran dan Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan dengan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta melaksanakan hubungan usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

8. Peningkatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan ikut berperan aktif melestarikan lingkungan, khususnya di sekitar kegiatan operasi Perseroan.

OBJECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

1. Improving the Quality of the Company's Management and Supervision

Good Corporate Governance will improve the Company's operational management and supervision quality through proper and wise decision-making mechanisms.

2. Improving the Quality of Decision

Improving the Company's performance through better and wiser decision making through the independency of Corporate bodies whilst paying attention to prevailing laws and regulations, and considering potential risks that arise and avoiding conflicts of interest.

3. Improving the Quality of Human Capital

Improving the HC professionalism and development by conducting more objective, transparent, and fair performance appraisal, as well as an organizational structure with clear functions, systems, and accountability.

4. Improving Performance through Risk Management

Optimizing the potential and added value of natural resources economically with more effective risk management.

5. Improving Management Accountability

Ensuring that financial management is carried out in a prudent and controlled manner, and preparing accurate and accountable corporate financial reports using a reliable internal control system and sound risk management.

6. Improving Stakeholders' Trust

Increasing the confidence of investors, creditors, and shareholders by always updating material and relevant data/information in a transparent, accurate, quality, and accountable manner.

7. Improving the Stakeholders' Role and Trust

Paying attention to the interests of stakeholders by clarifying the rights and obligations of each party, as well as carrying out healthy and responsible business relationships.

8. Improving Social and Environmental Responsibilities

Carrying out community empowerment and taking an active role in conserving the environment, especially around the Company's operational areas.

GOVERNANCE FRAMEWORK WIKA

Governance Framework WIKA adalah sistem terpadu yang dirancang untuk memastikan tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan. Dimulai dari fondasi prinsip-prinsip tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. *Framework* ini mencakup komitmen WIKA terhadap standar GCG. Struktur tata kelola yang jelas, melibatkan peran dan tanggung jawab manajemen serta dewan pengawas, didukung oleh proses tata kelola yang sistematis. Semua ini bertujuan menghasilkan kinerja yang sejalan dengan harapan pemangku kepentingan, sehingga tercipta nilai tambah dan keberlanjutan.

WIKA'S GOVERNANCE FRAMEWORK

WIKA's Governance Framework is an integrated system designed to ensure effective and sustainable corporate governance. Starting from the foundation of governance principles that emphasize transparency, accountability, and fairness. This framework encompasses WIKA's commitment to GCG standards. A clear governance structure, involving the roles and responsibilities of management and the supervisory board, and supported by systematic governance processes. All of this aims to produce performance in line with stakeholder expectations, thus creating added value and sustainability.



Governance Principles	Governance Commitment	Governance Structure	Governance Process	Governance Outcome
<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Akuntabilitas • Responsibilitas • Independensi • Kewajaran • Transparency • Accountability • Responsibility • Independence • Fairness 	<ul style="list-style-type: none"> • Visi, Misi, Nilai • RJPP • RKAP • Kode Etik Dewan Komisaris & Direksi • Vision, Mission, Values • RJPP • RKAP • Code of Conduct for Board of Commissioners & Board of Directors 	<ul style="list-style-type: none"> • RUPS • Dewan Komisaris • Direksi • GMS • Board of Commissioners • Board of Directors 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Pelaporan & Keterbukaan • Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal • Manajemen Kinerja • Perencanaan Strategis • Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan • Stakeholder Relations, Reporting & Disclosure • Risk Management and Internal Control • Work management • Strategic Planning • Policy Formulation and Decision Making 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan nilai Perseroan sehingga memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. • Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif serta meningkatkan kemandirian Organ Perseroan. • Mendorong Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan hidup. • Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional. • Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. • Optimizing Company values with strong competitiveness, both nationally and internationally. • Encouraging professional, efficient and effective Company management increasing independence of Corporate bodies • Encouraging Corporate bodies to make decisions and act based on high moral values and in compliance with laws and regulations, as well as awareness of the Company's corporate social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability. • Increasing Company's contribution to the national economy. • Improving conducive climate towards national investment development.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan

Sustainable Implementation of Corporate Governance

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

WIKA secara konsisten mengoptimalkan kualitas penerapan GCG untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup pengembangan kebijakan dan mekanisme yang mendukung efisiensi operasional, inovasi, dan adaptasi terhadap dinamika pasar. Melalui siklus peningkatan GCG yang berkesinambungan, WIKA berkomitmen untuk memperkuat pengendalian internal, meningkatkan transparansi, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan Perseroan dan para pemangku kepentingan guna mencapai keberlanjutan bisnis yang lebih kokoh.

IMPROVEMENT OF GCG IMPLEMENTATION QUALITY

WIKA's consistently optimizes the quality of GCG implementation to ensure sustainable growth and create added value for all stakeholders. This effort is not only limited to compliance with regulations, but also includes developing policies and mechanisms that support operational efficiency, innovation, and adaptation to market dynamics. Through a continuous cycle of GCG improvement, WIKA's is committed to strengthening internal control, increasing transparency, and maintaining a balance between the Company's interests and stakeholders, in order to achieve stronger business sustainability.

Siklus Peningkatan Kualitas Penerapan GCG WIKA Cycle of WIKA's GCG Implementation Quality Improvement

Siklus Peningkatan Kualitas Penerapan GCG WIKA Cycle of WIKA's GCG Implementation Quality Improvement

1	2	3	4	5
Standar Kualitas Implementasi GCG GCG Implementation Quality Standards	Implementasi GCG GCG Implementation	Monitoring Implementasi GCG GCG Implementation Monitoring	Assessment GCG GCG Assessment	Peningkatan Kualitas Implementasi GCG dan Benchmarking Improving the Quality of GCG Implementation and Benchmarking

Siklus dalam upaya peningkatan kualitas penerapan GCG di WIKA mencakup:

1. Penetapan standar kualitas penerapan GCG;
2. Penerapan prinsip-prinsip GCG;
3. *Monitoring* atau pengawasan penerapan GCG;
4. Pengukuran/penilaian penerapan GCG;
5. Peningkatan kualitas penerapan GCG dan *Benchmarking*.

Penetapan Standar Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penetapan standar kualitas dalam penerapan GCG bertujuan untuk memastikan setiap aspek operasional dan manajemen berjalan dengan efektif dan terukur. Standar ini berfungsi sebagai acuan bagi WIKA dalam mengelola proses kerja, pengambilan keputusan, dan pengawasan, sehingga kualitas pelaksanaan dapat dievaluasi secara objektif. Dengan standar yang ditetapkan, WIKA dapat mengidentifikasi area perbaikan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga konsistensi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini juga membantu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan melalui transparansi dan keandalan manajemen perusahaan. Adapun standar-standar tersebut meliputi:

1. Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, khususnya mengenai Perusahaan Terbatas;
2. Anggaran Dasar WIKA;

The cycle of WIKA's GCG implementation quality improvement includes:

1. Determination of GCG implementation quality standards;
2. Implementation of GCG principles;
3. Monitoring or supervision of GCG implementation;
4. Measurement/assessment of GCG implementation;
5. Improvement of GCG implementation quality and Benchmarking.

Determination of Corporate Governance Implementation Quality Standards

The determination of quality standards in GCG implementation aims to ensure that every aspect of operations and management runs effectively and measurably. This standard serves as a reference for WIKA's in managing work processes, decision making, and supervision, so that the quality of implementation can be evaluated objectively. With the standards set, WIKA's can identify areas of improvement, improve operational efficiency, and maintain consistency in achieving predetermined targets. This also helps increase stakeholder confidence through transparency and reliability of Company management. The standards include:

1. Laws and Regulations of the Republic of Indonesia, especially regarding Limited Liability Companies;
2. WIKA's Articles of Association;

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan;
6. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* untuk *State Owned Company* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD);
7. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*;
8. Penerapan GCG dengan melihat indeks terkait tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*;
9. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dikembangkan oleh KNKG tahun 2021.

Berdasarkan acuan-acuan tersebut, WIKA menetapkan Pedoman GCG yang komprehensif, mencakup Kode Etika serta berbagai kebijakan dan pedoman pendukung lainnya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan bahwa penerapan GCG di WIKA berjalan secara sistematis dan berkesinambungan.

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG di WIKA

WIKA mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023. Regulasi ini memberikan pedoman bagi tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan yang harus diikuti oleh seluruh BUMN. Selain itu, WIKA juga berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 mengenai pedoman penerapan tata kelola perusahaan serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada tahun 2021.

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan di WIKA terdiri dari lima pilar fundamental, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, *fairness* atau kewajaran, yang disingkat menjadi TARIF.

3. Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
4. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises;
5. Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 Circular Letter concerning Guidelines for the Implementation of Corporate Governance; and
6. Corporate Governance Principles for State Owned Companies developed by the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD);
7. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
8. GCG Implementation based on the Corporate Governance Perception Index (CGPI);
9. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance developed by the KNKG in 2021.

Based on these references, WIKA's establishes a comprehensive GCG Guidelines, including a Code of Conduct and various other supporting policies and guidelines. This step is taken as an effort to ensure that the implementation of GCG in WIKA's runs systematically and continuously.

Implementation of GCG Principles in WIKA'S

WIKA's implements the GCG principles stipulated by the Ministry of State-Owned Enterprises ("SOEs") through the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-2/MBU/03/2023. This regulation provides guidelines for governance and significant corporate activities that must be followed by all SOEs. In addition, WIKA's is also guided by the Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 regarding guidelines for implementing corporate governance as well as General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI), developed by the National Committee for Governance Policy (KNKG) in 2021.

The GCG principles applied at WIKA consist of five fundamental pillars, namely transparency, accountability, responsibility, independence, *fairness* or reasonableness, which are abbreviated as TARIF.

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG di WIKA

Implementation of GCG Principles in WIKA's



Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan:

The following is an explanation of GCG principles implementation in the Company:

Prinsip Dasar Basic Principle	Komitmen WIKA WIKA's Commitment	Penerapan di Lingkup WIKA WIKA's Scope of Application
Keterbukaan Transparency	Keterbukaan dan objektif dalam melaksanakan pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha. Openness and objectivity in carrying out decisionmaking to carry out business activities.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki website Perusahaan yang berisi keterbukaan informasi Perusahaan pada www.WIKA.co.id . PT Wijaya Karya (Persero) Tbk has an official website containing Company information disclosure at www.WIKA's.co.id .
Akuntabilitas Accountability	Bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan segala tindakan secara transparan dan wajar untuk kepentingan perusahaan Work with high accountability and be accountable for all actions transparently and fairly for the benefit of the Company	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mewajibkan seluruh pimpinan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar sehingga manajemen telah memiliki rincian peran dan tanggung jawab dari masing-masing organ dan karyawan secara jelas sesuai d PT Wijaya Karya (Persero) Tbk requires all leaders to be accountable for their performance in a transparent and fair manner so that management has detailed and clear roles and responsibilities of each organ and employee in accordance with the vision, mission, goals, and strategies of Company.
Pertanggungjawaban Responsibility	Berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada serta melaksanakan tanggung jawab sosial. Adhering to the precautionary principle and ensuring compliance with existing regulations and carrying out social responsibility.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk berkomitmen untuk membangun kesesuaian dan keselarasan terhadap peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is committed to building conformity and harmony with applicable laws and regulations as well as sound corporate principles.
Kemandirian Independency	Pengelolaan secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Professional management by avoiding conflicts of interest from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations.	Dalam proses pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan, manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senantiasa menghasilkan keputusan yang objektif dan bebas dari benturan kepentingan atau tekanan dari pihak mana pun. In the process of making decisions or determining policies, the management of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk always produces decisions that are objective and free from conflicts of interest or pressure from any party.
Kewajaran Fairness	Dalam melaksanakan kegiatan bisnis memberikan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholders</i> yang timbul. In carrying out business activities, provide fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders that arise.	Tidak melakukan tindakan diskriminatif guna menjamin pemenuhan hak seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Not taking discriminatory actions to ensure the fulfillment of the rights of all shareholders and other stakeholders in accordance with applicable laws and regulations.

Penerapan 4 (Empat) Pilar Governansi PUGKI

Perseroan menjalankan prinsip-prinsip GCG berdasarkan pengembangan Pedoman Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada tahun 2021.

Dalam Pedoman Governansi Korporat Indonesia tahun 2021 menyoroti prinsip-prinsip utama yang terdapat dalam empat pilar governansi korporat, yakni etika perilaku, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Pilar-pilar tersebut mencerminkan perkembangan nilai-nilai fundamental yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tersebut, WIKA bertekad untuk menciptakan sistem governansi yang tidak hanya memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mengutamakan kepentingan semua pemangku kepentingan.

PUGKI Governance Pillars Implementation

The Company implements GCG principles based on the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) development issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in 2021.

The 2021 Indonesian Corporate Governance Guidelines highlight the key principles contained in the four pillars of corporate governance, namely ethical behavior, accountability, transparency and sustainability. These pillars reflect the development of fundamental values that include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality. With a strong commitment to these principles, WIKA's is determined to create a governance system that not only meets the standards set, but also encourages sustainable growth and prioritizes the interests of all stakeholders.

Pilar Governansi Korporat Indonesia Pillars of Indonesian Corporate Governance



WIKA menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan empat pilar governansi korporat dengan fokus pada adaptasi terhadap perkembangan terkini, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya ini, WIKA menguatkan landasan untuk menangani benturan kepentingan, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan anti korupsi dan Pedoman Kode Etik Bisnis. Selain itu, Perseroan bertekad untuk melakukan evaluasi kinerja secara transparan, serta menjaga independensi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan langkah-langkah ini, WIKA berupaya menciptakan praktik governansi yang lebih baik dan berkelanjutan di lingkungan korporat.

Monitoring Penerapan GCG Penanggung Jawab Penerapan GCG

WIKA telah menetapkan Sekretariat Perusahaan sebagai penanggung jawab penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup WIKA melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.01.01/A.DIR.01566/220 tanggal 1 September 2020. Sekretariat Perusahaan, yang kini telah berubah nomenklatur menjadi *Corporate Secretariat* melalui Surat Keputusan No. SK.01.01/A.DIR/01920/2022 tanggal 20 Desember 2022, merupakan unit yang bertanggung jawab atas implementasi GCG di seluruh tingkat organisasi. *Corporate Secretariat* dipimpin oleh *Corporate Secretary* yang diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. *Corporate Secretary* memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen dan pemangku kepentingan eksternal, termasuk regulator.

Corporate Secretary juga memegang posisi penting sebagai Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip anti penyuapan di seluruh aktivitas Perseroan.

WIKA's demonstrates a strong commitment to implementing the four pillars of corporate governance with a focus on adaptation to the latest developments, social and environmental responsibility, and sustainable development principles. In this effort, WIKA's strengthens the foundation for handling conflicts of interest, ensuring compliance with anti-corruption policies and the Code of Conduct. In addition, the Company is determined to conduct transparent performance evaluations, and maintain the independence and remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners. With these steps, WIKA's strives to create better and sustainable governance practices in the corporate environment.

GCG Implementation Monitoring Unit in Charge of GCG Implementation

WIKA's has determined the Corporate Secretariat as the unit in charge of implementing Corporate Governance within WIKA's through the Board of Directors Decree No. SK.01.01/A.DIR.01566/220 dated September 1, 2020. The Corporate Secretariat, which has now changed its nomenclature to Corporate Secretariat through Decree No. SK.01.01/A.DIR/01920/2022 dated December 20, 2022, is the unit responsible for GCG implementation at all levels of the organization. The Corporate Secretariat is led by Corporate Secretary who is appointed by Board of Directors and directly responsible to President Director. Corporate Secretary has a strategic role in overseeing the implementation of GCG principles, as well as acting as a liaison between management and external stakeholders, including regulators.

Corporate Secretary also holds an important position as Chairperson of Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, which aims to ensure the implementation of anti-bribery principles in all Company activities.

Pengukuran/Penilaian Penerapan GCG

Perseroan secara konsisten mengimplementasikan proses pengukuran, penilaian, dan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG. Langkah ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan keselarasan penerapan GCG di seluruh lini operasional Perseroan. Evaluasi tersebut dilakukan secara komprehensif oleh pihak internal maupun pihak eksternal yang independen dan berkompeten. Metodologi yang digunakan dalam penilaian ini mengacu pada parameter yang diakui secara nasional maupun internasional, meliputi:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
3. Parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard*;
4. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*;
5. *Indonesia Corporate Accountability Index (ICORPAX)* Tahun 2022.

Measurement/Assessment of GCG Implementation

The Company consistently implements a process of measurement, assessment, and evaluation of the implementation of GCG principles. This step aims to ensure the effectiveness and alignment of GCG implementation in all operational lines of the Company. The evaluation is conducted comprehensively by internal and external parties that are independent and competent. The methodology used in this assessment refers to nationally and internationally recognized parameters, including:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
2. Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard parameters;
4. Corporate Governance Perception Index (CGPI);
5. Indonesia Corporate Accountability Index (ICORPAX) in 2022.

<p>Skor Score 92,35 Kategori Category "Sangat Baik Very Good"</p> <p>ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i> by Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)</p>	<p>Skor Score 87,61 Kategori Category "Sangat Terpercaya Highly Trusted"</p> <p><i>Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i></p>	<p>Skor Score 79,42 Kategori Category "Baik Good"</p> <p><i>Indonesia Corporate Accountability Index (ICORPAX)</i> Tahun 2023 oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta <i>Indonesia Corporate Accountability Index (ICORPAX)</i> 2023 by BPKP Representative of DKI Jakarta Province</p>
--	---	---

Perkembangan Assessment GCG di WIKA

Melalui proses penilaian atas penerapan prinsip GCG, Perseroan memperoleh wawasan komprehensif mengenai keunggulan serta potensi perbaikan dalam sistem tata kelola yang telah diimplementasikan. Hasil evaluasi atas pelaksanaan GCG selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yakni tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan capaian sebagai berikut:

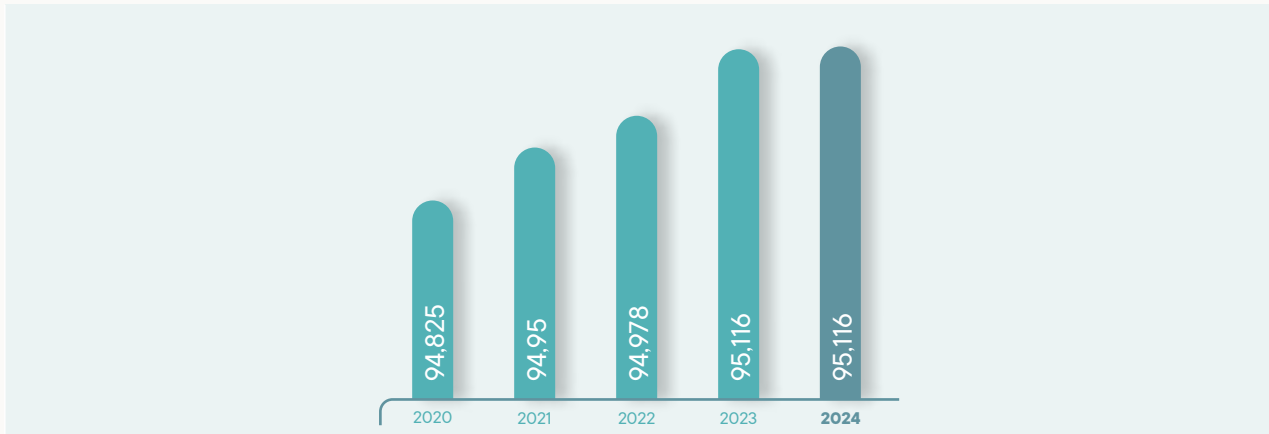
Development of GCG Assessment at WIKA'S

Through the GCG assessment process, the Company gains comprehensive insight into the excellence and potential for improvement in the governance system that has been implemented. The GCG assessment results for the last 5 (five) years, from 2020 to 2024, are as follows:

Perkembangan Skor GCG 2020-2024 GCG Score Development in 2020-2024

Tahun Assessment GCG GCG Assessment Year	Tahun Implementasi GCG GCG Implementation Year	Skor Assessment GCG GCG Assessment Score	Kategori Category	Pelaksana Assessor
2024	2023	95,116	Sangat Baik Very Good	Self Assessment
2023	2022	95,116	Sangat Baik Very Good	Self Assessment
2022	2021	94,978	Sangat Baik Very Good	BPKP
2021	2020	94,95	Sangat Baik Very Good	Self Assessment
2020	2019	94,825	Sangat Baik Very Good	BPKP

Skor Assessment GCG GCG Assessment Score



Penilaian Berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard

Evaluasi pelaksanaan GCG di WIKA dilakukan berdasarkan kriteria dan metodologi yang dirancang oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Proses ini menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard, sebuah alat ukur tata kelola perusahaan yang telah diakui oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) sebagai standar bersama.

Aspek penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard adalah sebagai berikut:

- Hak-Hak Pemegang Saham;
- Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham;
- Peran Pemangku Kepentingan;
- Pengungkapan dan Transparansi;
- Tanggung Jawab Dewan.

Assessment Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard

GCG assessment at WIKA's is carried out based on criteria and methodology designed by The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). This process uses the ASEAN Corporate Governance Scorecard, a corporate governance measurement tool that has been recognized by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) as a common standard.

The ASEAN Corporate Governance Scorecard assessment aspects include:

- Shareholder Rights;
- Equal Treatment of Shareholders;
- Role of Stakeholders;
- Disclosure and Transparency;
- Board Responsibilities.

Perkembangan Skor ACGS 2020-2024 Perkembangan Skor ACGS 2020-2024

Tahun AssessmentGCG Tahun AssessmentGCG	Tahun Implementasi GCG Tahun Implementasi GCG	Skor AssessmentGCG Skor AssessmentGCG	Kategori Kategori	Pelaksana Pelaksana
2024	2023	92,35	"Very Good"	IICD
2023	2022	94,02	"Very Good"	IICD
2022	2021	89,69	"Good"	IICD
2021	2020	87,34	"Good"	IICD
2020	2019	82,02	"Good"	IICD

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard dilakukan oleh lembaga independen yaitu Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICG).

Assessor

The assessment of ASEAN Corporate Governance Scorecard is carried out by an independent institution, namely the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICG).

Skor Penilaian

Pencapaian hasil penilaian GCG WIKA berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Scorecard Level I	Total Item	Item Not Applicable	Dipenuhi Item Adopted	Tingkat Pemenuhan Adoption Rate (%)
Part A	20	3	17	85 %
Part B	15	4	12	73,33 %
Part C	13	1	12	92,31 %
Part D	32	1	31	96,88 %
Part E	65	9	57	86,15 %
Total Score			88,35	
Bonus			6	
Penalty			-2	
Total Score			92,35	

Assessment Score

The achievement of WIKA's GCG assessment results based on the ASEAN *Corporate Governance Scorecard* in 2024 is as follows:

Penilaian Berdasarkan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*

Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat penerapan GCG, Perseroan berpartisipasi dalam *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Penilaian ini dirancang untuk memberikan evaluasi mendalam mengenai efektivitas penerapan GCG di lingkungan Perseroan. Melalui proses ini, Perseroan tidak hanya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja tata kelola yang sudah berjalan, tetapi juga menemukan peluang untuk meningkatkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan integritas, guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

CGPI dinilai dari pemenuhan aspek dan indikator penilaian sebagai berikut:

- Aspek Struktur Governansi (*Governance Structure*)
Aspek struktur governansi merupakan penilaian terhadap kelengkapan struktur dan infrastruktur governansi korporat serta platform bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek struktur governansi ini meliputi:
 - Indikator Pemegang Saham dan RUPS;
 - Indikator Dewan Komisaris;
 - Indikator Direksi;
 - Indikator Organ Pendukung Dewan Komisaris;
 - Indikator Organ Kelengkapan Direksi;
 - Indikator Penanggung Jawab Manajemen Fungsional;
 - Indikator Pemangku Kepentingan Kunci Lainnya.
- Aspek Proses Governansi (*Governance Process*)
Aspek proses governansi merupakan penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme governansi korporat serta penguatan *platform* bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek proses governansi ini meliputi:
 - Indikator Sistem dan Mekanisme Governansi Pemenuhan Hak Pemegang Saham dan RUPS;
 - Indikator Sistem dan Mekanisme Governansi Dewan Komisaris dan Direksi;

Assessment Based on *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*

As part of its commitment to strengthen GCG implementation, the Company participated in the *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* organized by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). This assessment is designed to provide an in-depth evaluation of the effectiveness of GCG implementation within the Company. Through this process, the Company not only obtains a comprehensive overview of its governance performance, but also finds opportunities to improve aspects of transparency, accountability and integrity, in order to support sustainable growth and build stakeholder trust.

CGPI is assessed on the fulfillment of the following assessment aspects and indicators:

- Governance Structure
An assessment of the completeness of corporate governance structure and infrastructure and business platform to create value for stakeholders and realize sustainable corporate growth in accordance with governance principles. The assessment indicators for this governance structure aspect include:
 - Shareholders and GMS Indicator
 - Board of Commissioners Indicator
 - Board of Directors Indicator
 - Board of Commissioners' Supporting Organs Indicator;
 - Board of Directors' Complementary Organs Indicator;
 - Functional Management Responsible Unit Indicator;
 - Other Key Stakeholder Indicator
- Governance Process Aspect
An assessment of the effectiveness of corporate governance systems and mechanisms as well as the strengthening of business platform to create value for stakeholders to realize sustainable Corporate growth in accordance with the governance principles. The assessment indicators for the governance process aspect include:
 - Indicators of Governance Systems and Mechanisms for Fulfillment of Shareholder Rights and GMS;
 - Indicators of Governance Systems and Mechanisms for Board of Commissioners and Board of Directors;

- c. Indikator Sistem dan Mekanisme Governansi Perilaku Keorganisasian;
 - d. Indikator Governansi Pengawasan Internal dan Eksternal;
 - e. Indikator Sistem dan Mekanisme Governansi Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi;
 - f. Indikator Governansi Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan;
 - g. Indikator Sistem dan Mekanisme Governansi Perencanaan Strategis;
 - h. Indikator Sistem dan Mekanisme Governansi Infrastruktur Organisasi;
 - i. Indikator Sistem dan Mekanisme Governansi Teknologi Informasi;
 - j. Indikator Sistem dan Mekanisme Governansi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - k. Indikator Sistem dan Mekanisme Governansi Kreativitas dan Inovasi;
 - l. Indikator Sistem dan Mekanisme Governansi Membangun Kematangan Perusahaan.
3. Aspek Hasil Governansi (*Governance Outcome*)
- Aspek hasil governansi merupakan penilaian terhadap kualitas luaran, hasil, dampak dan manfaat dari governansi korporat serta penguatan platform bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek hasil governansi ini meliputi:
- a. Indikator Hasil dari Tata kelola Organ Perusahaan;
 - b. Indikator Kesesuaian Perilaku Keorganisasian;
 - c. Indikator Hasil dari Tata Kelola Risiko, Kepatuhan, serta Pengendalian dan Pengawasan;
 - d. Indikator Hasil dari Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - e. Indikator dari Tata Kelola Membangun Kematangan Perusahaan.

- c. Indicators of Governance Systems and Mechanisms for Organizational Behavior;
 - d. Indicators of Internal and External Supervision Governance;
 - e. Indicators of Governance Systems and Mechanisms for Disclosure and Transparency of Information;
 - f. Indicators of Governance Systems and Mechanisms for Risk Management and Compliance;
 - g. Indicators of Governance Systems and Mechanisms for Strategic Planning;
 - h. Indicators of Governance Systems and Mechanisms for Organizational Infrastructure;
 - i. Indicators of Governance Systems and Mechanisms for Information Technology;
 - j. Indicators of Governance Systems and Mechanisms for Sustainable Development Goals;
 - k. Indicators of Governance Systems and Mechanisms for Creativity and Innovation;
 - l. Indicators of Governance Systems and Mechanisms for Building Corporate Maturity.
3. Governance Outcome
- An assessment of the quality of corporate governance output, results, impacts and benefits and the strengthening of business platform to create value for stakeholders to realize sustainable Company growth in accordance with the governance principles. The assessment indicators of the governance outcome aspect include:
- a. Indicators of Corporate Organ Governance Outcome;
 - b. Indicators of Organizational Behavior Conformity;
 - c. Indicators of Risk, Compliance, and Control and Supervision Governance Outcome;
 - d. Indicators of Sustainable Development Goals Governance Outcome;
 - e. Indicators of Building Corporate Maturity Governance.

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian CGPI dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

Pencapaian hasil penilaian GCG WIKA berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Assessor

CGPI assessment is conducted by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

Tahun Assessment GCG Tahun Assessment GCG	Tahun Implementasi GCG Tahun Implementasi GCG	Skor Assessment GCG Skor Assessment GCG	Kategori Kategori	Pelaksana Pelaksana
2024	2023	87,61	"Sangat Terpercaya" "Sangat Terpercaya"	IICG
2023	2022	87,60	"Sangat Terpercaya" "Sangat Terpercaya"	IICG
2022	2021	87,4	"Sangat Terpercaya" "Sangat Terpercaya"	IICG
2021	2020	87,34	"Sangat Terpercaya" "Sangat Terpercaya"	IICG
2020	2019	87,02	"Sangat Terpercaya" "Sangat Terpercaya"	IICG

Skor Penilaian

Pencapaian hasil penilaian GCG WIKA yang dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), berhasil memperoleh skor sebesar 87,61 dengan predikat "Sangat Tepercaya".

Aktivitas Peningkatan Penerapan *Corporate Governance* 2024

Di tahun 2024, Perseroan terus memperkuat implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dari berbagai Aspek yang meliputi:

1. Penerapan *Three Lines Model* dalam Tata Kelola:
 - a. Manajemen Risiko : Dilakukan peranhkapan organ pengelola risiko wajib mengikuti *Three Lines Model*, Penerapan Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini sesuai dengan SK Nomor SK.02.01/A.DIR.00144/2024;
 - b. Internal Audit: Menjaga akuntabilitas utama kepada organ pengurus dan independensinya dari pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab manajemen, mengkomunikasikan asuransi dan penasehat yang independent dan objektif, melaporkan penilaian independensi dan objektivitas kepada organ pengurus dan menerapkan pengamanan yang di persyaratkan;
 - c. IT: Pelaksanaan IT Blueprint/ IT Master Plan, Monitoring & Evaluasi (COBIT), melaksanakan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) ISO 27001:2022.
2. Peningkatan Kontrol Proyek/Bisnis Berbasis *Enterprise Resource Planning* (ERP)
 - a. Diterapkannya single sistem kontrol level proyek menggunakan *Enterprise Resource Planning* (ERP);
 - b. Integrasi antara ERP dan sistem manajemen proyek (Primavera/Microsoft Project) untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek selalu berbasis data yang sama;
 - c. Pemantauan *real-time* terhadap berbagai aspek proyek, seperti pengeluaran, waktu kerja, dan progres fisik proyek serta penggunaan perangkat mobile yang terintegrasi dengan ERP.
3. Penerapan Digitalisasi
 - a. Penerapan sistem digitalisasi *invoice* yaitu WIKA Digital Invoice (WDIGI);
 - b. Penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik yaitu WIKA Integrated Smart *E-Procurement* (WISE) untuk pengadaan barang dan jasa proyek yang terintegrasi dengan *System Application and Product* (SAP);
 - c. Penerapan *Vendor Management System* (VMS) dalam pengelolaan vendor mulai dari proses registrasi, verifikasi data dan evaluasi penilaian vendor yang terintegrasi;
 - d. Penerapan *System E-Cataloge* sebagai standarisasi sumber daya yang digunakan untuk seluruh sistem di lingkungan WIKA dan sebagai database harga material historis (*Pricebook*);
 - e. Penerapan belanja B2B UMKM melalui platform PaDI UMKM dalam mendukung program Kementerian dan memberdayakan UMKM di lingkungan Perusahaan.
4. Penerapan *Four eyes Priciples*
 - a. *Supply Chain Management: Four Eyes Principles* diterapkan pada proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme persetujuan pada fase usulan Keputusan (USKEP) yang terdiri dari Tim Evaluasi Pengusul Pemenang (TEPP) dan Tim Pejabat Pemutus (TPPM) yang merupakan tim yang beranggotakan pejabat lintas fungsi;

Assessment Score

The results of WIKA's GCG assessment conducted by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), managed to obtain a score of 87.61 with "Highly Trusted" predicate.

Activities to Improve *Corporate Governance* Implementation In 2024

In 2024, the Company continues to strengthen the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) principles from the following Aspects:

1. Implementation of the *Three Lines Model* in Governance:
 - a. Risk Management: The implementation of risk management organs must follow the *Three Lines Model*. The *Three Lines Risk Governance Model* is in accordance with Decree Number SK.02.01/A.DIR.00144/2024;
 - b. Internal Audit: Maintain primary accountability to the management organ and its independence from the implementation of works that are the responsibility of management, communicate independent and objective insurance and advisors, report assessments of independence and objectivity to the management organ and implement the required safeguards;
 - c. IT: Implementation of IT Blueprint/IT Master Plan, Monitoring & Evaluation (COBIT), implementing the Information Security Management System (SMPI) ISO 27001:2022.
2. Improving Project/Business Control Based on *Enterprise Resource Planning* (ERP)
 - a. Implementation of a single project level control system using *Enterprise Resource Planning* (ERP);
 - b. Integration between ERP and project management system (Primavera/Microsoft Project) to ensure that project planning, implementation, and reporting are always based on the same data;
 - c. Real-time monitoring of various aspects of the project, such as expenditure, working time, and physical progress of the project as well as the use of mobile devices integrated with ERP.
3. Implementation of Digitalization
 - a. Implementation of invoice digitalization system, namely WIKA's Digital Invoice (WDIGI);
 - b. Implementation of electronic-based procurement system, namely WIKA's Integrated Smart *E-Procurement* (WISE) for procurement of goods and services for projects integrated with *System Application and Product* (SAP);
 - c. Implementation of *Vendor Management System* (VMS) in vendor management starting from the registration process, data verification and integrated vendor assessment evaluation;
 - d. Implementation of *E-Cataloge System* as a standardization of resources used for all systems in WIKA's environment and as a historical material price database (*Pricebook*);
 - e. Implementation of B2B MSME shopping through the PaDI MSME platform in supporting the Ministry's program and empowering MSMEs in the Company environment.
4. Implementation of *Four Eyes Principles*
 - a. *Supply Chain Management: Four Eyes Principles* are applied to the procurement process of goods and services through an approval mechanism at the Decision Proposal Phase (USKEP) consisting of Winning Proposer Evaluation Team (TEPP) and Decision Official Team (TPPM) which is a team consisting of cross-functional officials;

- b. Implementasi *four eyes* unit bisnis dan manajemen risiko dalam perolehan proyek baik analisis pemberian kerja maupun atas risiko eksekusi pembangunan proyek.
 - c. Penerapan Digitalisasi mekanisme dan *dashboard four eyes principles*.
5. Penerapan ESG WIKA
 - a. Melakukan 6 Program Strategis KBUMN 2024-2029 dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional terdiri dari: Ketahanan Pangan, Perumahan Rakyat, Penguatan UMKM, Hilirisasi Mineral, Ketahanan & Transisi Energi serta Pertahanan.
 - b. Melakukan penerapan terhadap *Net Zero Growth Housing Product*, contoh: Pembangunan rumah micro dengan menggunakan bahan *MoLi module*, *Flatpack module* yang ditentukan dengan pemasangan *sandwich panel*, pembangunan rumah micro menggunakan skema ventilasi dengan jendela yang bisa di operasikan, pintu geser serta serapan matahari.
 - c. Penggunaan *Electric Vehicle* sebagai kendaraan dinas pengganti kendaraan BBM.
 - d. Parameter ESG merujuk pada beberapa Lembaga resmi Internasional, antara lain: S&P Global, Sustainalytics, IFRS sustainability, TFCO.
 6. Penerapan 8 *Stream* Penyehatan
 - a. Melakukan *Reprofiling/* Restrukturisasi keuangan, menurunkan *cost of fund* sebesar 4% dari restrukturisasi Bank (MRA).
 - b. Implementasi Tata Kelola dan Manajemen Risiko.
 - c. Implementasi percepatan penagihan piutang bermasalah dengan target *settlement claim* & piutang tahun 2024-2027.
 - d. Melakukan *Asset Recycling* atau divestasi atas aset-aset *Non core* WIKA dalam rangka mendapatkan dana tunai untuk penyelesaian utang WIKA.
 - e. Melakukan perbaikan *Portfolio Orderbook* konstruksi dengan fokus pada proyek-proyek yang memiliki pembayaran *monthly progress* dengan tujuan untuk mengurangi defisit kas dan kebutuhan modal kerja.
 - f. Melakukan penurunan *Operating Expense* sebesar minimal 25% jangka panjang dengan penerapan *manning* tenaga kerja di proyek berbasis ERP.
 - g. Melakukan penurunan saldo pinjaman talangan *supplier* dengan restrukturisasi dan/ atau penurunan pinjaman *supply chain financing* (SCF).
 - h. Melakukan penguatan struktur permodalan melalui *rights issue* atau penerbitan saham baru melalui mekanisme HMETD. HMETD merupakan hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan ke publik.
 7. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Dalam mewujudkan Organisasi yang berintegritas, Perseroan terus melaksanakan program penguatan program pembangunan anti korupsi. Program Anti Korupsi dilakukan dengan melakukan pemantauan implementasi SMAP di seluruh Divisi Ruang Lingkup. Selain itu, pada tahun 2024 telah dilakukan Audit Internal dan Audit Eksternal ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di seluruh Divisi Ruang Lingkup dengan hasil tidak ada temuan major.
 8. *Whistle Blowing System* (WBS)

Pengaduan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct* (WBS) telah diatur dalam Instruksi Kerja Nomor WIKA-GCG_IK-02.01 rev. 01 tertanggal 22 Desember 2023.
- b. Implementation of *four eyes* business units and risk management in project acquisition, both analysis of work assignments and the risk of project development execution.
 - c. Implementation of Digitalization of the *four eyes principles* mechanism and dashboard.
5. Implementation of WIKA's ESG
 - a. Carrying out 6 Ministry of SOE's Strategic Programs 2024-2029 in supporting national economic growth consisting of: Food Security, Public Housing, Strengthening MSMEs, Mineral Downstreaming, Energy Resilience & Transition and Defense.
 - b. Implementing *Net Zero Growth Housing Products*, for example: Construction of micro houses using *MoLi module* materials, *Flatpack modules* determined by the installation of *sandwich panels*, construction of micro houses using a ventilation scheme with operable windows, sliding doors and solar absorption.
 - c. Use of *Electric Vehicles* as official vehicles to replace *BBM* vehicles.
 - d. ESG parameters refer to several official International Institutions, including: S&P Global, Sustainalytics, IFRS sustainability, TFCO.
 6. Implementation of 8 *Streams* of Restructuring
 - a. Carrying out *Reprofiling/Financial Restructuring*, reducing the cost of funds by 4% from Bank restructuring (MRA).
 - b. Implementation of Governance and Risk Management.
 - c. Implementation of acceleration of collection of problematic receivables with a target of settlement of claims & receivables in 2024-2027.
 - d. Carrying out *Asset Recycling* or divestment of WIKA's non-core assets in order to obtain cash funds for WIKA's debt settlement.
 - e. Improving the construction *Orderbook Portfolio* by focusing on projects that have *monthly progress* payments with the aim of reducing cash deficits and working capital needs.
 - f. Reducing *Operating Expense* by at least 25% in the long term by implementing *manning* of workers in ERP-based projects.
 - g. Reducing the balance of *supplier advance loans* by restructuring and/or reducing *supply chain financing* (SCF) loans.
 - h. Strengthening the capital structure through a *rights issue* or issuance of new shares through the HMETD mechanism. HMETD is a right given to shareholders to buy new shares before being offered to the public.
 7. Anti-Bribery Management System (SMAP)

In realizing an organization with integrity, the Company continues to implement a program to strengthen the anti-corruption development program. The Anti-Corruption Program is carried out by monitoring the implementation of SMAP in all Divisions. In addition, in 2024, an Internal Audit and External Audit of ISO 37001:2016 on the Anti-Bribery Management System were carried out in all Divisions with the results of no major findings.
 8. *Whistle Blowing System* (WBS)

Reporting Violation of the *Code of Conduct* (WBS) have been regulated in Work Instruction Number WIKA's-GCG_IK-02.01 rev. 01 dated December 22, 2023.

Dalam peningkatan *awareness* terhadap WBS tahun 2024 telah dilakukan sosialisasi WBS sebanyak 6 kali guna meningkatkan pemahaman terkait WBS serta mengurangi terjadinya risiko yang dapat merugikan Perusahaan melalui deteksi dini (*early warning system*). Berdasarkan *resume* hasil pengelolaan WBS sepanjang tahun 2024 terdapat 17 laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan melalui mekanisme WBS, dengan 11 laporan pengaduan ditolak karena tidak memiliki cukup bukti dan 6 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti.

WIKA juga bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembangunan WBS Terintegrasi, dimana pada tanggal 14 November 2024 telah dilakukan monitoring dan evaluasi bersama KPK terkait pembangunan WBS terintegrasi dengan KPK, setiap laporan dugaan pelanggaran dengan kategori penyuapan akan terintegrasi dengan WBS KPK.

Selain itu telah dilakukan integrasi mengenai WBS antara WIKA Induk dengan Anak Perusahaan, dimana Anak Perusahaan yang belum memiliki klan WBS dapat menggunakan kanal WBS WIKA Induk serta dilakukan pendampingan dalam pengembangan WBS di Anak Perusahaan.

9. Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi di WIKA telah diatur dalam Instruksi Kerja Pengendalian Gratifikasi Nomor WIKA-GCG-IK-02.02 Rev. 00 Amd. 04 tertanggal 11 Januari 2023. Gratifikasi merupakan pemberian/penerimaan uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dengan nilai berapa pun, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh Personel WIKA terkait dengan wewenang/jabatannya di Perseroan sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan di masa yang akan datang. Bagi barang gratifikasi yang menjadi milik Perusahaan, maka barang tersebut akan diletakkan di Lemari Gratifikasi yang dimiliki oleh Perusahaan.

10. Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, sebagaimana telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada tanggal 4 Mei 2023 maka pada tanggal 3 Juli 2023 Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor 67/DK/WIKA/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Perseroan telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-KP-01.01 tanggal 13 November 2023 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-QM-01.01.

Pada tahun 2024 telah dilakukan penyempurnaan Struktur Tata Kelola Terintegrasi dengan menunjuk Direktur Keuangan, *Human Capital*, Keuangan dan Risiko Anak Perusahaan sebagai Direktur Penanggung jawab dan Sekretaris Perusahaan sebagai Koordinator Tata Kelola Terintegrasi Anak Perusahaan.

In increasing awareness of WBS in 2024, WBS socialization has been organized 6 times to enhance understanding regarding WBS and reduce the occurrence of risks that can harm the Company through early detection (*early warning system*). Based on the summary of WBS management results throughout 2024, there were 17 reports of alleged violations reported through the WBS mechanism, with 11 complaint reports rejected due to insufficient evidence and 6 complaints have been followed up.

WIKAs also collaborates with the Corruption Eradication Commission (KPK) regarding the development of Integrated WBS, where on November 14, 2024, joint monitoring and evaluation were carried out with KPK regarding the development of integrated WBS with KPK, each report of alleged violations in the bribery category will be integrated with KPK WBS.

In addition, an integration has been carried out regarding WBS between WIKAs Parent and Subsidiaries, where Subsidiaries that do not yet have a WBS channel can use WIKAs Parent WBS channel and are assisted in developing WBS in Subsidiaries.

9. Gratification Control

Gratification control at WIKAs has been regulated in the Gratification Control Work Instruction Number WIKAs-GCG-IK-02.02 Rev. 00 Amd. 04 dated January 11, 2023. Gratification is the giving/receiving of money/equivalents of money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation facilities, travel, free medical treatment, and other facilities of any value, whether received domestically or abroad, and which are carried out using electronic means or without electronic means carried out by WIKAs People related to their authority/position in the Company, thereby can cause a conflict of interest in the future. For gratification items that belong to the Company, the items will be placed in the Gratification Cabinet owned by the Company.

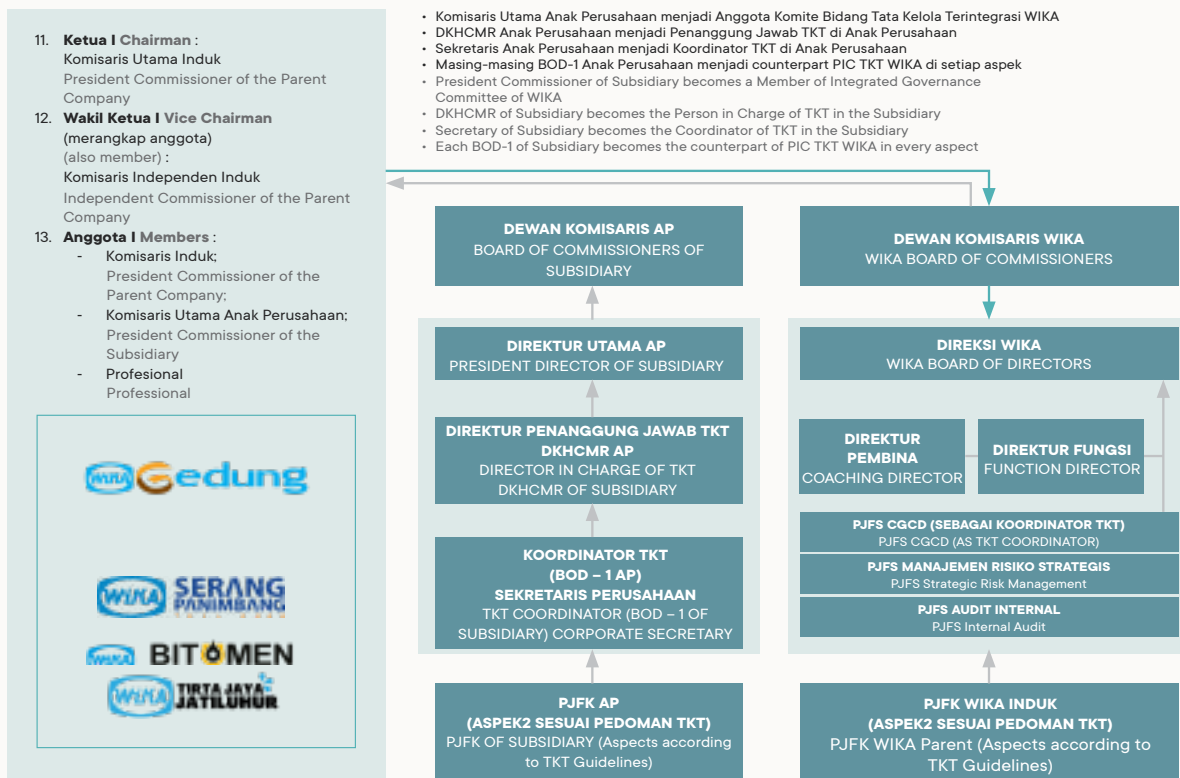
10. Integrated Governance

In accordance with the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, as confirmed in the General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dated May 4, 2023, on July 3, 2023, the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk has formed an Integrated Governance Committee in accordance with the Decree of Board of Commissioners of the Company (Persero) Number 67/DK/WIKAs/2023 dated July 3, 2023 concerning the Establishment and Appointment of Members of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

The Company has an Integrated Governance Policy Number WIKAs-SUB-KP-01.01 dated November 13, 2023 and Guidelines for the Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance Number WIKAs-SUB-QM-01.01.

In 2024, the Integrated Governance Structure was refined by appointing the Director of Finance, Human Capital, Finance and Risk of Subsidiary as the Director in Charge and the Corporate Secretary as the Coordinator of Integrated Governance of Subsidiary.

FRAMEWORK TATA KELOLA TERINTEGRASI WIKA GROUP WIKA Group Integrated Governance Framework



Program Kerja Tata Kelola Terintegrasi antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Internal Audit;
2. Aspek Manajemen Risiko;
3. Aspek Keuangan;
4. Aspek *Finance*;
5. Aspek Sinergi Bisnis;
6. Aspek Pengadaan;
7. Aspek *Human Capital*;
8. Aspek SMAP, WBS, Benturan Kepentingan dan TJSL;
9. Aspek Hukum dan Kepatuhan;
10. Aspek *Quality, Health, Safety, dan Environment*;
11. Aspek *Information Technology*.

Integrated Governance Work Programs include the following:

1. Internal Audit Aspect;
2. Risk Management Aspect;
3. Financial Aspect;
4. Finance Aspect;
5. Business Synergy Aspect;
6. Procurement Aspect;
7. Human Capital Aspect;
8. SMAP, WBS, Conflict of Interest and CSR Aspect;
9. Legal and Compliance Aspect;
10. Quality, Health, Safety, and Environment Aspect;
11. Information Technology Aspect.

Roadmap GCG WIKA

Peta jalan GCG dirancang sebagai acuan strategis untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola berjalan secara terstruktur, terukur, dan efektif. Dengan pendekatan ini, Perseroan berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung stabilitas operasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang sehat, tangguh, dan berkesinambungan.

WIKA'S GCG Roadmap

The GCG roadmap is designed as a strategic reference to ensure the implementation of governance principles is structured, measurable and effective. With this approach, the Company seeks to create a business environment that supports operational stability while encouraging healthy, resilient and sustainable growth.

Roadmap GCG

2022	2023	2024	2025	2026
Memenuhi target skor implementasi GCG. Sosialisasi tata kelola kepada pengurus Perseroan. Meeting the target score for GCG implementation. Dissemination of governance to the Company's management.	Menerapkan standar GCG Internasional secara parsial (<60%). ASEAN Scorecard Level 4. Implementing International GCG standards partially (<60%). ASEAN Scorecard Level 4.	Menerapkan standar GCG Internasional secara parsial (>80%). ASEAN Scorecard level 4. Implementing International GCG standards partially (>80%). ASEAN Scorecard level 4.	Menerapkan standar GCG Internasional secara full. ASEAN Scorecard level 4. Implementing International GCG standards in full. ASEAN Scorecard level 4.	Menerapkan standar GCG Internasional secara full. ASEAN Scorecard level 4. Implementing International GCG standards in full. ASEAN Scorecard level 4.

Pencapaian Roadmap GCG 2024

Penerapan GCG di lingkup Perseroan di tahun 2024, memiliki target utama terhadap *Roadmap* GCG WIKA, yaitu "Menerapkan Standar GCG International Secara Full dan "ASEAN Scorecard Level 4".

Pada tahun 2024, Perseroan menggandeng konsultan independen untuk melakukan penilaian penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* di Perseroan dengan hasil penilaian yang cukup memuaskan, dimana Perseroan mempertahankan capaian ASEAN *Scorecard* Level 4.

Keberhasilan yang telah dicapai tersebut merupakan cerminan keberhasilan Perseroan dalam menerapkan praktik-praktik GCG secara konsisten sehingga mampu meningkatkan integritas dan kinerja usaha Perseroan yang berkelanjutan, serta menumbuhkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Perseroan juga telah merealisasikan *roadmap* GCG untuk tahun 2024.

Rencana Implementasi Good Corporate Governance 2025

Sebagai upaya dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip dan praktik GCG dilakukan dengan efektif, Perseroan telah mengidentifikasi dan mengembangkan strategi pelaksanaan GCG yang telah disusun untuk mengoptimalkan implementasi GCG di Perseroan di tahun 2025. Komitmen WIKA untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan, didukung oleh partisipasinya dalam penilaian GCG dengan menggunakan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard dan Assessment* Penerapan GCG berdasarkan regulasi yang berlaku.

Komitmen Perseroan dalam melengkapi perangkat yang lebih baik lagi dibanding pada awal tahun di lima tahun terakhir terutama didukung oleh keikutsertaan Perseroan dalam *Assessment* Implementasi GCG baik yang sesuai ASEAN *Scorecard* maupun yang sesuai Kementerian BUMN dan/atau Lembaga BPKP, Perseroan lebih fokus pada pembentukan perangkat manajemen kontrol internal yang lebih integratif terutama dalam mengantisipasi risiko bisnis yang efektif melalui Manajemen Risiko dalam kerangka *Governance, Risk and Compliance* (GRC). Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Perseroan juga mengaplikasikan prinsip-prinsip GCG dalam prosedur bisnis, serta telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Induk dan Anak Perusahaan yang didukung dengan Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan, Prosedur Tata Kelola Perusahaan, Peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi dan Pengaduan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct (Whistleblowing System)*.

Sejak Tahun 2023 lalu juga Perseroan telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk seluruh Divisi di Kantor Pusat sebagai bagian dari Program Perluasan Ruang Lingkup, yang akan diperluas juga dengan komitmen Entitas Anak lainnya untuk mengimplementasikan dan atau memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 di tahun 2025.

Pencapaian Roadmap GCG 2024

The implementation of GCG within the Company in 2024 focused on the main target of WIKA's GCG Roadmap, namely "Implementing Full International GCG Standards" and "ASEAN Scorecard Level 4".

In 2024, the Company collaborated with an independent consultant to conduct an assessment of the implementation of ASEAN *Corporate Governance Scorecard* within the Company, achieving quite satisfactory results, where the Company maintained its ASEAN *Scorecard* Level 4.

This success reflects the Company's achievements in consistently applying GCG practices, which have enhanced the integrity and sustainable business performance of the Company, as well as fostered trust among stakeholders in the Company. The Company has also successfully realized its GCG roadmap for 2024.

Achievement of 2024 GCG Roadmap

As part of its efforts to ensure that the principles and practices of GCG are effectively implemented, the Company has identified and developed strategies for the execution of GCG in 2025. WIKA's commitment to enhancing corporate governance standards is supported by its participation in GCG assessments using the ASEAN *Corporate Governance Scorecard* and GCG Assessments based on applicable regulations.

The Company is committed to completing better governance tools compared to the beginning of the last five years, especially supported by its participation in the GCG Assessment, both in accordance with the ASEAN *Scorecard* and the Ministry of SOEs and/or BPKP Institutions. The Company is more focused on forming a more integrated internal control management system, particularly in anticipating business risks effectively through Risk Management within the *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) framework. In accordance with the Ministry of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the Company also applies GCG principles in business procedures, and has applied an Integrated Corporate Governance Policy for Parent and Subsidiaries, supported by Guidelines for Managing Subsidiaries, Corporate Governance Procedures, Regulations related to Gratification Control, and Violations Reporting under the Code of Conduct (Whistleblowing System).

Since 2023, the Company has also implemented ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management Systems across all Divisions at the Head Office as part of the Scope Expansion Program, which will also be expanded with commitments from other Subsidiaries to implement and/or obtain ISO 37001:2016 certification in 2025.

Struktur dan Mekanisme *Corporate Governance*

Corporate Governance Structure and Mechanism



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN MEKANISME HUBUNGAN ANTAR ORGAN

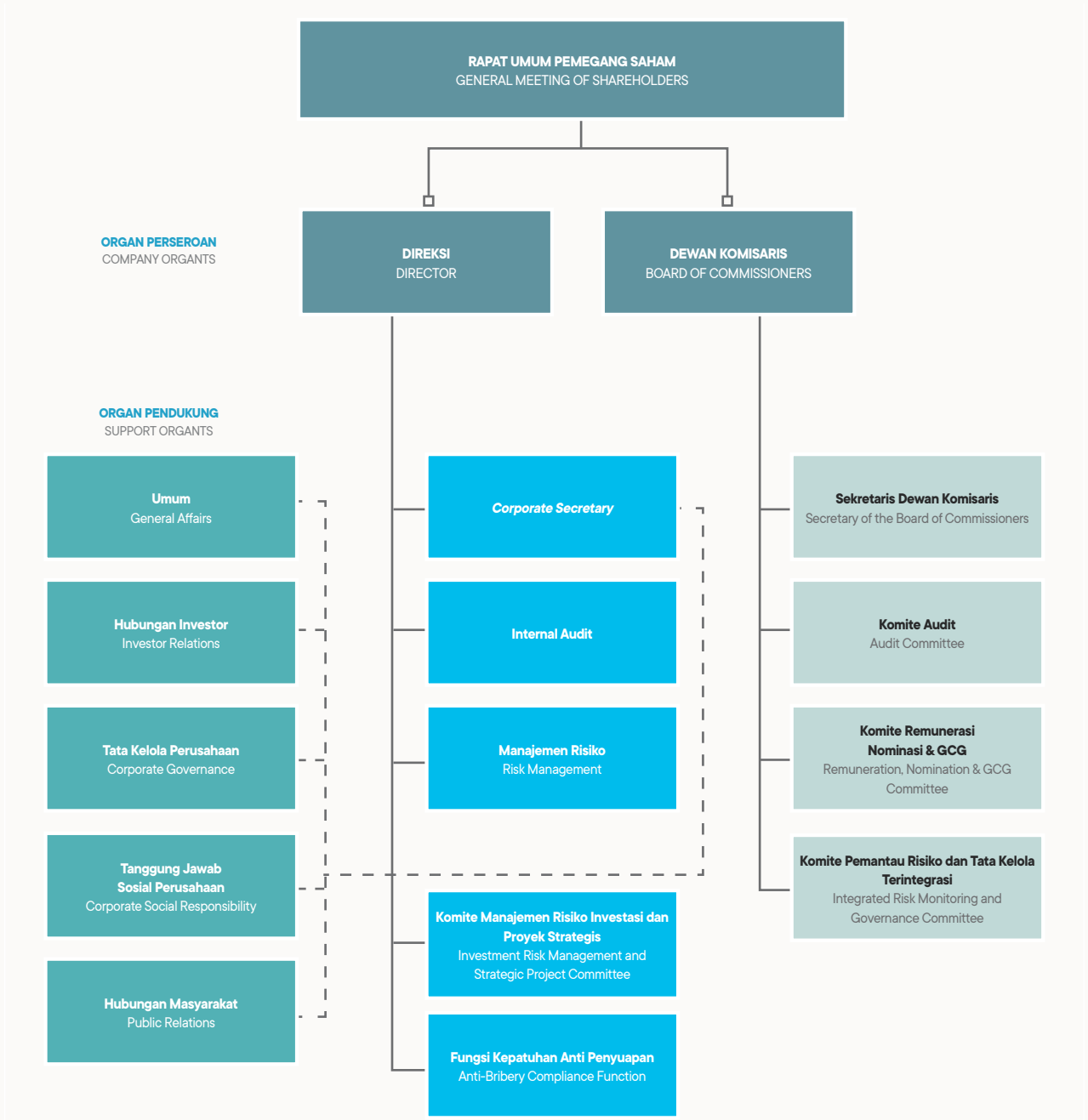
Struktur organ GCG dan mekanisme koordinasi antar organ menjadi pilar utama dalam memastikan integritas serta keberlanjutan operasional Perseroan. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur organisasi perusahaan mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, dan organ pendukung lainnya. Sinergi yang harmonis antar organ ini dirancang untuk mendukung kepentingan Perseroan secara optimal, dengan tetap mengacu pada regulasi, Anggaran Dasar, dan kebijakan internal yang berlaku.

Masing-masing organ memiliki perannya dalam mendukung tata kelola yang efektif. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan strategis terhadap kebijakan Direksi, didukung oleh organ seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris. Sementara itu, Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan pelaksanaan strategi bisnis Perseroan, yang diperkuat oleh berbagai organ pendukung, termasuk *Corporate Secretariat*, Internal Audit, Manajemen Risiko, serta komite-komite seperti Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis. Fungsi Kepatuhan Anti Penyusapan juga menjadi bagian penting untuk menjaga tata kelola yang bersih dan berintegritas.

STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE ORGANS AND RELATIONSHIP MECHANISMS BETWEEN ORGANS

The GCG organ structure and coordination mechanism between organs are the main pillars in ensuring the integrity and sustainability of the Company's operations. Based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Company's organizational structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Board of Directors, and other supporting organs. The harmonious synergy between these organs is designed to optimally support the Company's interests, while still referring to the prevailing regulations, Articles of Association, and internal policies.

Each organ has its role in supporting effective governance. Board of Commissioners is tasked with strategic oversight of Board of Directors' policies, supported by organs such as Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Secretary of Board of Commissioners. Meanwhile, Board of Directors is responsible for operational management and implementation of the Company's business strategy, which is strengthened by various supporting organs, including *Corporate Secretariat*, Internal Audit, Risk Management, as well as committees such as Investment Risk Management and Strategic Project Committee. The Anti-Bribery Compliance function is also an important part of maintaining clean governance and integrity.



MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Adapun mekanisme tersebut didukung oleh Organ Perseroan seperti RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan organ pendukung lainnya. Mekanisme ini dijalankan secara konsisten untuk menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, organ Perseroan melaksanakan pembagian fungsi dan tanggung jawab secara jelas dan adil, di mana fungsi dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan tanpa saling intervensi.

CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

The corporate governance mechanism is a system designed to direct the management of the Company based on GCG principles. The mechanism is supported by the Company's organs such as GMS, Board of Commissioners, Board of Directors and other supporting organs. Mechanisms that are implemented consistently aim to maintain business continuity in the long term so as to provide added value to Shareholders and other stakeholders. Therefore, the Company's organs make a clear and fair division of functions and responsibilities, in which these functions and responsibilities are carried out without mutual intervention.

RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang eksklusif yang tidak dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Sementara Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara keberlanjutan usaha Perseroan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedua organ tersebut didukung oleh organ pendukung masing-masing. Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Kemudian, Direksi didukung oleh *Corporate Secretariat*, Internal Audit, Risk Management Division, Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis, dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.

SOFT STRUCTURE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan, WIKA telah menetapkan berbagai kebijakan dan pedoman yang konsisten dengan standar tata kelola yang baik. Sebagai bagian dari struktur tata kelola, WIKA juga mengembangkan *soft structure* yang mendukung penerapan GCG secara efektif. Berikut adalah *soft structure* GCG yang ada di WIKA:

1. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Nomor 5 tanggal 4 Februari 2022;
2. Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of GCG*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang berlaku;
3. Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang berlaku;
4. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku;
5. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Perseroan yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang berlaku;
6. Instruksi Kerja Pengendalian Gratifikasi;
7. Instruksi Kerja Pengaduan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct* (*Whistleblowing System*);
8. Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi;
9. Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG;
10. Piagam Komite;
11. Piagam Satuan Pengawas Internal;
12. Prosedur Sistem Manajemen Risiko;
13. Prosedur Perseroan lainnya.

The GMS is a corporate organ that has exclusive authority which cannot be delegated to Board of Commissioners and Board of Directors, within the limits specified in the Limited Liability Company Law and/or the Company's Articles of Association. Meanwhile, Board of Commissioners and Board of Directors have responsibility to maintain the Company's business sustainability. The implementation of duties and responsibilities of the two organs is supported by their respective supporting organs. The Board of Commissioners is assisted by Supporting Organs under Board of Commissioners and consisting of Audit Committee and Nomination, Remuneration and GCG Committee, Risk Monitoring Committee, and Integrated Governance Committee. Then, Board of Directors is supported by Corporate Secretariat, Internal Audit, Risk Management Division, Investment and Strategic Project Risk Management Committee, and Anti-Bribery Compliance Function.

CORPORATE GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

To ensure the implementation of GCG principles within the Company, WIKA's has established various policies and guidelines that are consistent with good governance standards. As part of the governance structure, WIKA's also develops a soft structure that supports the effective implementation of GCG. The following is the GCG soft structure that exists in WIKA's:

1. Deed of Articles of Association of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 5 dated February 4, 2022;
2. Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (*Code of GCG*) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, which has been updated based on the applicable Board of Directors Decree;
3. Board Manual of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, which has been updated based on the applicable Joint Decree;
4. Code of Conduct of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, which has been updated based on the applicable Decree;
5. Guidelines for Handling Conflict of Interest of the Company, which has been updated based on the applicable Joint Decree;
6. Gratification Control Work Instruction;
7. Work Instruction for Complaints of Violations of the Code of Conduct (*Whistleblowing System*);
8. Guidelines on Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance;
9. Nomination, Remuneration and GCG Committee Charter;
10. Committee Charter;
11. Internal Audit Charter;
12. Risk Management System Procedure;
13. Other Company Procedures.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum pengambilan keputusan yang tertinggi untuk Pemegang Saham. RUPS juga merupakan *platform* Pemegang Saham untuk menggunakan hak mereka untuk mendapatkan informasi, mengemukakan pendapat, dan menyampaikan pertanyaan, sepanjang hal tersebut relevan terhadap agenda RUPS dan mematuhi Anggaran Dasar perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan RUPS di Perseroan dimulai dengan tahapan pengumuman dan pemanggilan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi yang relevan terkait agenda RUPS disampaikan bersamaan dengan pemanggilan tersebut. Apabila informasi tersebut belum tersedia pada saat pemanggilan dilakukan, maka informasi terkait akan disampaikan pada saat RUPS berlangsung. Proses ini memastikan bahwa seluruh pemegang saham mendapatkan akses yang tepat waktu terhadap bahan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam RUPS.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham merupakan individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Pemegang Saham Perseroan terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat. Dengan demikian komposisi Pemegang Saham WIKA per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	36.291.702.781	91,02
Masyarakat Public	3.580.261.077	8,98

HAK, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

Perseroan senantiasa memperhatikan hak-hak para pemegang saham. Berdasarkan Anggaran Dasar, Pemegang Saham Perseroan terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest decision-making forum for Shareholders. The GMS is also a platform for Shareholders to exercise their rights to obtain information, express opinions, and submit questions, as long as they are relevant to the GMS agenda and comply with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

The GMS held by the Company starts with the announcement and summon stages which are carried out in accordance with the prevailing regulations. Relevant information related to the GMS agenda is submitted together with the summons. If the information is not yet available at the summons, the relevant information will be conveyed at the GMS. This process ensures that all shareholders have timely access to the materials required for decision making at the GMS.

SHAREHOLDERS

Shareholders are individuals or legal entities that legally own Company shares. Shareholders do not intervene in the functions, duties and authority of Board of Commissioners and Board of Directors.

Based on the Articles of Association, the Company's Shareholders consist of Dwiwarna Series A Shares that can only be owned specifically by the Republic of Indonesia and Series B Shares that can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public. Thus, WIKA's shareholders composition as at December 31, 2024 is as follows:

SHAREHOLDERS RIGHTS, AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES

The Company pays full attention to the rights of shareholders. Based on the Articles of Association, the Company's Shareholders consist of Series A Dwiwarna Shares that can only be owned by the Republic of Indonesia and Series B Shares that can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public.

Hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Persetujuan perubahan permodalan;
 - c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
 - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
 - h. Persetujuan penggunaan laba;
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS.
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan.

KEBIJAKAN HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PERLAKUAN YANG SETARA BAGI SELURUH PEMEGANG SAHAM

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham diatur dalam Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang mengatur di mana Perseroan harus memperlakukan Pemegang Saham secara adil. Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah/persentase saham yang dimilikinya. Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan. Segala informasi yang berkaitan dengan pemegang saham diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan membatasi campur tangan Pemegang Saham dalam kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pengertian dalam campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Perseroan atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi.

Dwiwarna A Series Shareholders privileges are:

1. The right to approve in the GMS regarding the following matters:
 - a. Approval of amendments to the Articles of Association;
 - b. Approval for capital changes;
 - c. Approval of appointment and dismissal of members of Board of Directors and Board of Commissioners;
 - d. Approval of mergers, consolidations, acquisitions, divestments and dissolution;
 - e. Approval of remuneration for members of Board of Directors and the Board of Commissioners;
 - f. Approval for transfer of assets based on the Articles of Association that require the GMS approval;
 - g. Approval on the participation and reduction of percentage of equity participation in other companies based on the Articles of Association that require the GMS approval;
 - h. Approval on the use of profits;
 - i. Approval on non-operational long-term investments and financing based on the Articles of Association that require the GMS approval.
2. The right to nominate candidates as members of Board of Directors and members of Board of Commissioners.
3. The right to propose the GMS agenda.
4. The right to request and access Company data and documents.

POLICY ON RELATIONSHIP WITH SHAREHOLDERS AND EQUAL TREATMENT FOR ALL SHAREHOLDERS

The policy related to Relationship with Shareholders is regulated in the Code of Conduct, whereby the Company must treat all shareholders fairly. Shareholders who have shares of the same classification will receive equal treatment and can exercise their rights in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Each Shareholder in the General Meeting of Shareholders (GMS) is entitled to vote in accordance with the classification and number/percentage of shares held. Each Shareholder is entitled to obtain complete and accurate material information about the Company. All information relating to shareholders is provided in accordance with applicable regulations.

The Company rejects Shareholders' interference in its operational activities, which are the responsibility of Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations. The definition of interference includes actions or directives that directly or indirectly affect the Company's management or the decisions of Board of Directors.

Kegiatan operasional Perseroan yang melibatkan *stakeholders* harus tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga kemandirian Perseroan sebagai badan hukum yang profesional dapat berkembang baik sesuai dengan tujuan usahanya. Perseroan akan berusaha keras agar Perseroan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham. Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

AKSES INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perseroan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada Pemegang Saham, sesuai dengan prinsip keterbukaan. Penyampaian informasi yang tepat waktu dan relevan adalah kunci agar Pemegang Saham dapat menjalankan hak serta kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka memastikan akses yang transparan, Perseroan menyediakan berbagai saluran informasi yang mudah diakses oleh Pemegang Saham, sebagai berikut:

1. RUPS, merupakan wadah bagi Perseroan untuk menyampaikan laporan dan informasi Perseroan, di mana Pemegang Saham dapat berpartisipasi secara langsung dalam mengambil keputusan;
2. Media sosial melalui Facebook: PT Wijaya Karya, Instagram: ptwijayakarya, YouTube: PT Wijaya Karya;
3. *Website*, melalui *website* Perseroan (www.WIKA.co.id), IDX (www.idx.co.id), dan KSEI (www.ksei.co.id);
4. Public Expose adalah kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh perusahaan terbuka. Tujuan dari *public expose* adalah untuk memberikan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan, seperti investor, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Paparan publik dilakukan oleh perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan BEI Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Perusahaan Publik.

PENYELENGGARAAN RUPS

Waktu dan Tempat Penyelenggaraan RUPS

RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Di mana, Perusahaan terbuka wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, atau dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu lainnya. Selain itu, Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Terbuka. Sesuai dengan ketentuan, RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:

1. Tempat kedudukan Perusahaan Terbuka;
2. Tempat Perusahaan Terbuka melakukan kegiatan usaha utamanya;
3. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka; atau
4. Provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham Perusahaan Terbuka.

The Company's operational activities involving stakeholders must adhere to the principles of accountability and transparency so that the Company's independence as a professional legal entity can develop well in accordance with its business objectives. The Company will strive for the Company to experience sustainable growth so as to make an optimal contribution to Shareholders. The determination of dividends is made by the Shareholders at the General Meeting of Shareholders.

INFORMATION ACCESS FOR SHAREHOLDERS

The Company has a responsibility to provide clear and accurate information to Shareholders, in accordance with the principle of transparency. The delivery of timely and relevant information is key to enable Shareholders to properly exercise their rights and obligations. In order to ensure transparent access, the Company provides various information channels that are easily accessible to Shareholders, as follows:

1. GMS, is a forum for the Company to submit Company's reports and information, where Shareholders can participate directly in making decisions;
2. Social media via Facebook: PT Wijaya Karya, Instagram: ptwijayakarya, YouTube: PT Wijaya Karya;
3. Website, through the Company website (www.WIKA.co.id), IDX (www.idx.co.id), and KSEI (www.ksei.co.id);
4. Public Expose is a mandatory activity that must be carried out by public companies. The purpose of public expose is to provide transparent information to company stakeholders, such as investors, employees, customers and the general public. Public exposure is carried out by the Company at least once a year. These provisions are regulated in IDX Regulation Number I-E concerning Obligations to Submit Public Company Information.

GMS HOLDING

Time and Place of GMS

The Company's GMS consists of Annual GMS (AGMS) and Extraordinary GMS (EGMS). A Public Company is obliged to hold an Annual GMS no later than 6 (six) months after the fiscal year ends, or under certain conditions OJK may set another deadline. In addition, the Company may hold other GMS at any time based on the need for the Public Company's interest. In accordance with the provisions, the GMS must be held in the territory of the Republic of Indonesia. The place for holding the GMS must be at:

1. The domicile of the Public Company;
2. The place where the Public Company conducts its main business activities;
3. The capital of the province where the Public Company is domiciled or running its main business activities; or
4. The province where the domicile of the stock exchange that lists the Public Company's shares.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2024

Di sepanjang 2024, WIKA melaksanakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali yakni RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan RUPS Luar Biasa yang dilaporkan hasil keputusannya kepada OJK dan diumumkan pada situs web WIKA (www.WIKA.co.id) dan situs web BEI (www.idx.co.id).

Pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2024

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 diselenggarakan pada 15 Mei 2024, pukul 14.46 s/d 16.44 WIB di Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur – Indonesia.

GMS in 2024

Throughout 2024, WIKA's held GMS 2 (two) times, consisting of the 2023 Fiscal Year Annual GMS and Extraordinary GMS, in which the resolutions were reported to OJK and announced on the WIKA's website (www.WIKA.co.id) and the IDX website (www.idx.co.id).

Annual GMS on May 15, 2024

The 2023 Fiscal Year Annual GMS was held on May 15, 2024, at 14.46-16.44 WIB at WIKA's Tower II Building, 17th Floor Multipurpose Room, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, East Jakarta - Indonesia

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan 15 Mei 2024 The Stages of Annual GMS Holding on May 15, 2024

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Date	Keterangan Description
Pemberitahuan RUPS Tahunan kepada Regulator Notification of Annual GMS to Regulators	13 Maret 2024 March 13, 2024	Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat No SE.01.01/A. CORSEC.00213/2024 The Company submitted the AGMS Notice to the Financial Services Authority (OJK) as stated in Letter No SE.01.01/A.CORSEC.00213/2024
Penundaan RUPS Tahunan Postponement of Annual GMS	March 18, 2024 March 18, 2024	Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Penundaan RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat No SE.01.01/A. CORSEC.00222/2024 The Company has submitted a Notification of Postponement of the AGMS to the Financial Services Authority (OJK) as stated in Letter No. SE.01.01/A. CORSEC.00222/2024
Perubahan Mata Acara RUPS Tahunan Changes to the Agenda of Annual GMS	28 Maret 2024 March 28, 2024	Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Mata Acara RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat No SE.01.01/A. CORSEC.00241/2024 The Company has submitted a Notification of Changes to the Agenda of AGMS to the Financial Services Authority (OJK) as stated in Letter No. SE.01.01/A. CORSEC.00241/2024
Pengumuman RUPS Tahunan Annual GMS Announcement	5 April 2024 April 5, 2024	Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPST kepada Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan. The Company announced the AGMS to Shareholders on the Indonesia Stock Exchange website, the Indonesian Central Securities Depository website and the Company's website.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan Recording Date of List of Shareholders entitled to attend the Annual GMS	22 April 2024 April 22, 2024	Tercatat 1 (Satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS Tahunan. Recorded 1 (One) working day prior to the Summons of Annual GMS.
Pemanggilan dan Informasi penjelasan mata acara RUPS Tahunan Summons and information explaining the Annual GMS agenda	23 April 2024 April 23, 2024	Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPS Tahunan kepada Pemegang Saham, melalui: 1. Website Bursa Efek Indonesia 2. Website KSEI 3. Website PT Wijaya Karya (Persero) Tbk The Company submitted the Annual GMS Summon to Shareholders through: 1. Indonesia Stock Exchange website 2. Indonesian Central Securities Depository website 3. The Company's website
Pelaksanaan RUPS Tahunan Annual GMS Holding	15 Mei 2024 May 15, 2024	RUPS Tahunan dilaksanakan di Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur – Indonesia. Annual GMS is held at WIKA Tower II Building, 17th Floor Multipurpose Room, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, East Jakarta - Indonesia.
Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Summary of Annual GMS Minutes	17 Mei 2024 May 17, 2024	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan diumumkan melalui: 1. Website Bursa Efek Indonesia 2. Website KSEI 3. Website PT Wijaya Karya (Persero) Tbk A summary of Annual GMS minutes was announced through: 1. Indonesia Stock Exchange website 2. KSEI website 3. Website of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Akta Risalah RUPS Tahunan Deed of Minutes of Annual GMS	14 Juni 2024 June 14, 2024	Akta RUPS No. 17 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., Akta RUPS Tahunan telah disampaikan kepada OJK pada 14 Juni 2024. GMS Deed No. 17 made before Notary Fathiah Helmi, SH., The deed of Annual GMS was submitted to OJK on June 14, 2024.

Proses Penyelenggaraan RUPS Tahunan 4 Mei 2023

Process of Annual GMS Holding on May 15, 2024

Tanggal dan Waktu Date and Time	15 Mei 2024, pukul 14.46 - 16.44 WIB May 15, 2024, 14:46-16:44 WIB	
Lokasi Location	Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur – Indonesia. WIKA Tower II Building, 17th Floor Multipurpose Room, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, East Jakarta, Indonesia.	
Kuorum Quorum	<p>Para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama mewakili 36.870.595,595 saham atau merupakan 93,5191809% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali (<i>buy back</i>) oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.100.000 saham). Dengan demikian ketentuan kuorum RUPS telah terpenuhi dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat.</p> <p>The holders/proxies of Dwiwarna Series A Shareholders and the Holders/Proxies of Series B Shareholders who jointly represent 36,870,595,595 shares or constitute 93,5191809% of the total shares with voting rights issued by the Company up to the day of the Meeting (excluding shares that have been bought back by the Company of 1,100,000 shares). Thus quorum provisions for the GMS have been fulfilled and the holding of GMS is legal and can make binding decisions.</p>	
Pimpinan RUPS Tahunan Annual GMS Chairman	<p>Bapak Jarot Widyoko selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Keputusan Dewan Komisaris Nomor DK.01.01/A.DEKOM.00044/2024 tanggal 24 April 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan</p> <p>Jarot Widyoko as President Commissioner appointed by the Board of Commissioners Decree No. DK.01.01/A. DEKOM.00044/2024 dated April 24, 2024 in accordance with Article 24 paragraph 1 letter a of the Company's Articles of Association</p>	
Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance	<p>Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen President Commissioner Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner</p>	<p>: Jarot Widyoko : Firdaus Ali : Suryo Hapsoro Tri Utomo : Adityawarman : Rusmanto : Jarot Widyoko : Firdaus Ali : Adityawarman : Suryo Hapsoro Tri Utomo : Rusmanto</p>
Kehadiran Direksi Board of Directors Attendance	<p>Direktur Utama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Direktur Operasi I Direktur Operasi II Direktur Operasi III Direktur <i>Quality, Health, Safety, and Environment</i> Direktur <i>Human Capital & Pengembangan</i> President Director Director of Finance and Risk Management Director of Operation I Director of Operation II Director of Operation III Director of Quality, Health, Safety, and Environment Director of Human Capital & Development</p>	<p>: Agung Budi Waskito : Adityo Kusumo : Hananto Aji : Harum Akhmad Zuhdi : Rudy Hartono : Ayu Widya Kiswari : Hadjar Seti Adji : Agung Budi Waskito : Adityo Kusumo : Hananto Aji : Harum Akhmad Zuhdi : Rudy Hartono : Ayu Widya Kiswari : Hadjar Seti Adji</p>
Pihak Independen Penghitung Suara Vote Counter Independent Party	<p>Notaris: Fathiah Helmi, SH. Biro Administrasi Efek: PT Datindo Entrycom Kantor Akuntan Publik: KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Notary : Fathiah Helmi, SH. Share Registrar : PT Datindo Entrycom Public Accounting Firm : PAF Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners</p>	

Tata Tertib RUPS Tahunan

Tata Tertib RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 disampaikan kepada Pemegang Saham pada saat pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, yakni 23 April 2024. Dalam tata tertib tersebut, disampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("Rapat") PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK eRUPS").

Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh KSEI, dengan mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Lembaga / Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat, serta Perseroan dalam kondisi tertentu dapat melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat.

Bahan Mata Acara RUPS

Sesuai Pasal 18 POJK RUPS dan Pasal 23 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://investor.WIKA.co.id/> sejak tanggal Pemanggilan.

Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS

1. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2024 dan/ atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy") yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.

Annual GMS Rules

The Rules of Annual GMS for 2024 Fiscal Year were submitted to Shareholders at the time of summons for the 2024 Fiscal Year Annual GMS, which was on April 23, 2024. In the rules, it is stated that the Annual General Meeting of Shareholders for 2024 Fiscal Year ("Meeting") of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Company") is held in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK GMS") and the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("POJK eRUPS").

The Meeting will be held electronically using eRUPS provided by KSEI, with the physical Meeting mechanism will be attended by the Chairperson of the Meeting, Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners, Notaries, and Institutions/ Professions supporting the the meeting, and the Company in certain conditions can limit the physical presence of Shareholders either partially or wholly in holding the Meeting.

GMS Agenda

In accordance with Article 18 of POJK GMS and Article 23 paragraph (10) of the Company's Articles of Association, the Company has provided materials related to the Meeting agenda, which are available and can be downloaded through the Company's website <https://investor.WIKA.co.id/> since the date of GMS Summons.

Attendance of Shareholders at the GMS

1. Based on Article 23 paragraph (1) of POJK GMS, the Shareholders, either themselves or represented by their proxies based on a power of attorney, are entitled to attend the Meeting. If not specifically stated, the mention of Shareholders in the Rules of Procedure also includes their legal proxies.
2. Pursuant to Article 23 paragraph (2) of POJK GMS, Meeting Participants are Shareholders whose names are registered in the Register of Company Shareholders on April 22, 2024 and/ or owners of the Company's share balance in the Securities Account sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading at Indonesia Stock Exchange on April 22, 2024 until 16.15 WIB.
3. Shareholders as referred to in letter b above, may appoint their attorney to attend the Meeting, with the following conditions:
 - a. Grant power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in <https://easy.ksei.co.id> link provided by KSEI as an electronic power of attorney mechanism in the process of holding a Meeting ("e-Proxy"), conducted no later than 1 (one) working day prior to the holding of the Meeting. Power of Attorney via e-Proxy cannot be given to members of Board of Directors and members of Board of Commissioners, as well as employees of the Company.

- b. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI), Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://investor.WIKA.co.id/> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.
4. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.

Ketentuan Kuorum

Berdasarkan Pasal 25 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab dalam RUPS Tahunan

1. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
2. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Berdasarkan Pasal 25 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 15 Mei 2024, Perseroan melibatkan sejumlah pihak independen dengan menunjuk Notaris Fathiah Helmi, S.H., untuk memverifikasi validitas proses pemungutan suara, Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai pihak yang diundang terkait mata acara Jasa Audit laporan Keuangan, dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPS Tahunan.

- b. In the event that Shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI), Shareholders can download the power of attorney contained on the Company's website <https://investor.WIKA.co.id/> to provide power of attorney and vote at the Meeting, the power of attorney must be sent to the Share Registrar PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Tel. (021) 3508077, no later than 3 (three) working days prior to the Meeting date, namely May 8, 2024 at 15.00 WIB.

4. Meeting participants have the right to express opinions or ask questions and vote at the meeting.
5. The Company urges all Shareholders to register attendance electronically through the eASY.KSEI system or to authorize the Company's Share Registrar, PT Datindo Entrycom.

Quorum Terms

Based on Article 25 paragraph 1 letter a of the Company's Articles of Association and Article 87 paragraph 2 of the Limited Liability Company Law ("UUPT") and Article 41 paragraph 1 of POJK 15/2020, the Meeting must be attended by Shareholders representing more than 1/2 (one per two) part of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

Question and Answer at Annual GMS

1. Prior to making decisions on the Meeting Agenda, Chairperson of the Meeting will give opportunities for the Shareholders or Shareholders' Proxies to ask questions or opinions in the Question and Answer;
2. The opportunity to ask questions or express opinions is given to a maximum of 3 (three) questioners. Questions or opinions that can be submitted are only on matters relating to the Meeting Agenda.

Decision Making Mechanism

1. Voting is carried out orally, unless the Chairperson of Meeting determines otherwise.
2. Meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus.
3. Based on Article 25 paragraph 5 letter a of the Company's Articles of Association, Resolutions shall be valid if approved by Seri A Dwiwarna Shareholders and other Shareholders and/or their authorized representatives who together represent more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

Vote Counter Independent Party

At the Annual GMS on May 15, 2024, the Company has appointed independent parties, namely Notary Fathiah Helmi, S.H., as validator for voting, Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners as invited parties regarding the agenda of Audit Services on Financial Statements, and PT Datindo Entrycom as the Share Registrar to carry out calculations and/or validate and vote at the Annual GMS.

Rincian Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan Realisasinya

Details of 2023 Annual GMS Resolutions and Their Realization

Mata Acara Rapat Pertama Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan Yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Approval of the Company's Annual Report Including the Board of Commissioners Supervisory Report for 2023 Fiscal Year, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements which Include the Report on Social and Environmental Responsibility Program (SER) that Ending December 31, 2023, as well as Granting of Settlement and Release of Responsibility Fully (*volledig acquit et de charge*) to Board of Directors for the Company's Management Actions and Board of Commissioners for the Company's Supervisory Actions Carried out during 2023 Fiscal Year

Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions

Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya
1 (one) Shareholder or the representative raised question

Pengambilan Keputusan Decision Making

	Dengan Pemungutan Suara Voting		
	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	36.861.414.324 saham atau 99,9750987% dari yang hadir 36.861.414.324 shares or 99,9750987% of those present	9.155.990 saham atau 0,0248328% dari yang hadir 9,155,990 shares or 0.0248328% of those present	25.281 saham atau 0,0000686% dari yang hadir 25,281 shares or 0.0000686% of those present

Keputusan Rapat

Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 99,9999314% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00320/2.1030/AU.1/03/0181- 3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak.
- Direksi dan Dewan Komisaris diminta menyelesaikan dengan tuntas hal-hal yang menjadi penyebab pencatatan kerugian pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan senantiasa konsisten menjalankan tugas dan fungsinya dengan cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Grup Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam rangka penyelesaian secara tuntas perbaikan dan peningkatan kinerja, serta penyehatan keuangan Grup Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, guna menjaga keberlangsungan usaha Grup Perusahaan.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00455/2.1030/AU.2/12/0181-3/0/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Resolution	<p>With 99.9999314% of the total votes present at the Meeting, decided to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report for 2023 Fiscal Year and the Social and Environmental Responsibility Program Implementation Report, and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for 2023 Fiscal Year, which have been audited by Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) in accordance with the Independent Auditor's Report Number: 00320/2.1030/AU.1/03/0181- 3/1/III/2024 dated March 28, 2024 with the opinion "fair, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2023, and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards", as well as granting a release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the Company's management and supervisory actions carried out in the Fiscal Year ended December 31, 2023 to the extent that such actions did not constitute a criminal offense and/or violate the prevailing laws and regulations and legal procedures, were reflected in the Company's report books, and did not cause losses to the Company and its subsidiaries. 2. Board of Directors and Board of Commissioners are requested to completely resolve matters that cause the recording of losses in the Company's Consolidated Financial Statements for 2023 Fiscal Year and always consistently carry out their duties and functions carefully and carefully to optimize all resources owned by the PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Group of Companies in order to completely resolve the improvement and improvement of performance, as well as the financial restructuring of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Group of Companies, in order to maintain the Group's business sustainability. 3. Ratify the Financial Statements of Micro and Small Business Funding Program for 2023 Fiscal Year ended on December 31, 2023 which is part of the Annual Report of Social and Environmental Responsibility Program (SER) as audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) in accordance with the Independent Auditor's Report Number: 00455/2.1030/AU.2/12/0181-3/0/III/2024 dated March 28, 2024 with the opinion "fair, in all material respects, the financial position of the Program as of December 31, 2023, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability in Indonesia", as well as granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the Micro and Small Business Funding Program ending on December 31, 2023 to the extent that such actions do not constitute a criminal offense and/or violate the provisions of applicable laws and legal procedures, and are reflected in the Company's report books. 									
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up on Meeting Resolution	Keputusan Langsung Berlaku Resolution Took Immediate Effect									
Status	Terealisasi Realized									
Mata Acara Rapat Kedua Agenda 2	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of Micro and Small Business Funding Program for 2024 Fiscal Year.									
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders raised questions or responses									
Pengambilan Keputusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="877 1460 1117 1505">Dengan Pemungutan Suara Voting</th> </tr> <tr> <th data-bbox="654 1527 718 1572">Setuju Agree</th> <th data-bbox="973 1527 1053 1572">Abstain Abstain</th> <th data-bbox="1260 1527 1388 1572">Tidak Setuju Disagree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="558 1594 813 1695">36.865.680.415 saham atau 99.9866691% dari yang hadir 36,865,680,415 shares or 99.9866691% of those present</td> <td data-bbox="877 1594 1165 1695">4.751.190 saham atau 0,0128861% dari yang hadir 4,751,190 shares or 0.0128861% of those present</td> <td data-bbox="1197 1594 1452 1695">163.990 saham atau 0,0004448% dari yang hadir 163,990 shares or 0.0004448% of those present</td> </tr> </tbody> </table>	Dengan Pemungutan Suara Voting			Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree	36.865.680.415 saham atau 99.9866691% dari yang hadir 36,865,680,415 shares or 99.9866691% of those present	4.751.190 saham atau 0,0128861% dari yang hadir 4,751,190 shares or 0.0128861% of those present	163.990 saham atau 0,0004448% dari yang hadir 163,990 shares or 0.0004448% of those present
Dengan Pemungutan Suara Voting										
Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree								
36.865.680.415 saham atau 99.9866691% dari yang hadir 36,865,680,415 shares or 99.9866691% of those present	4.751.190 saham atau 0,0128861% dari yang hadir 4,751,190 shares or 0.0128861% of those present	163.990 saham atau 0,0004448% dari yang hadir 163,990 shares or 0.0004448% of those present								

<p>Keputusan Rapat Resolution</p>	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9995552% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut <p>With 99.9995552% of the total votes present at the Meeting, decided to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Appoint Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for 2024 Fiscal Year and the Social and Environmental Responsibility Program Implementation Report, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for 2024 Fiscal Year period. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of audit fees, additions/adjustments to the scope other than as stated above, including the appointment of a Public Accountant, and other terms of appointment that are reasonable for the KAP. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners with prior written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders to determine the replacement KAP in the event that KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) for any reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Social and Environmental Responsibility Program Implementation Report, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for 2024 Fiscal Year, including determining the amount of audit fees and other requirements for the replacement KAP. 									
<p>Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up on Meeting Resolution</p>	<p>Telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024.</p> <p>A Public Accounting Firm (KAP) has been appointed to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Report for the 2024 Fiscal Year.</p>									
<p>Status</p>	<p>Terealisasi Realized</p>									
<p>Mata Acara Rapat Ketiga Agenda 3</p>	<p>Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023.</p> <p>Determination of Salary/Honorarium, Facilities and Allowances for Board of Directors and Board of Commissioners for 2024 Fiscal Year, and Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the performance in 2023 Fiscal Year.</p>									
<p>Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions</p>	<p>Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders raised questions or responses</p>									
<p>Pengambilan Keputusan Decision Making</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Dengan Pemungutan Suara Voting</th> </tr> <tr> <th>Setuju Agree</th> <th>Abstain Abstain</th> <th>Tidak Setuju Disagree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36.865.811.205 saham atau 99,9870238% dari yang hadir 36,865,811,205 shares or 99,9870238% of those present</td> <td>4.764.990 saham atau 0,0129236% dari yang hadir 4,764,990 shares or 0.0129236% of those present</td> <td>19.400 saham atau 0,0000526% dari yang hadir 19,400 shares or 0.0000526% of those present</td> </tr> </tbody> </table>	Dengan Pemungutan Suara Voting			Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree	36.865.811.205 saham atau 99,9870238% dari yang hadir 36,865,811,205 shares or 99,9870238% of those present	4.764.990 saham atau 0,0129236% dari yang hadir 4,764,990 shares or 0.0129236% of those present	19.400 saham atau 0,0000526% dari yang hadir 19,400 shares or 0.0000526% of those present
Dengan Pemungutan Suara Voting										
Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree								
36.865.811.205 saham atau 99,9870238% dari yang hadir 36,865,811,205 shares or 99,9870238% of those present	4.764.990 saham atau 0,0129236% dari yang hadir 4,764,990 shares or 0.0129236% of those present	19.400 saham atau 0,0000526% dari yang hadir 19,400 shares or 0.0000526% of those present								
<p>Keputusan Rapat</p>	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999474% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024; dan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun buku 2024 									

<p>Resolution</p>	<p>With 99.9999474% of the total votes present at the Meeting, decided to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Approved to grant authority and power to the Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of tantiem/performance incentive/special incentive for the performance of 2023 Fiscal Year, as well as determine honorarium, allowances, and facilities for members of Board of Commissioners for 2024 Fiscal Year; and Approved to grant authority and power to the Board of Commissioners with prior written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of tantiem/performance incentive/special incentive for the performance in 2023 Fiscal Year, as well as determine the salary, allowances and facilities for the Board of Directors for 2024 Fiscal Year. 																		
<p>Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up on Meeting Resolution</p>	<p>Berdasarkan Insentif Khusus Tahun 2023, Gaji/Honorarium Tahun 2024 serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui surat nomor SR-294/Wk.MBU.10/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun 2024.</p> <p>Based on the 2023 Special Incentive, the 2024 Salary/Honorarium and other Allowances and/or Facilities for Members of Board of Directors and Board of Commissioners, have been determined by the Series A Dwiwarna Shareholder through letter number SR-294/Wk.MBU.10/08/2024 dated August 23, 2024 concerning the Determination of Income for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in 2024.</p>																		
<p>Status</p>	<p>Terealisasi Realized</p>																		
<p>Mata Acara Rapat Keempat Agenda 4</p>	<p>Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Changes in the Company's Management Composition.</p>																		
<p>Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions</p>	<p>Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders raised questions or responded</p>																		
<p>Pengambilan Keputusan Decision Making</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Dengan Pemungutan Suara Voting</th> </tr> <tr> <th>Setuju Agree</th> <th>Abstain Abstain</th> <th>Tidak Setuju Disagree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36,701,347,882 shares or 99.5409683% of those present</td> <td>4,765,090 saham atau 0,0129238% dari yang hadir 4,765,090 shares or 0.0129238% of those present</td> <td>169,247,713 saham atau 0,4590317% dari yang hadir 169,247,713 shares or 0.4590317% of those present</td> </tr> </tbody> </table>	Dengan Pemungutan Suara Voting			Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree	36,701,347,882 shares or 99.5409683% of those present	4,765,090 saham atau 0,0129238% dari yang hadir 4,765,090 shares or 0.0129238% of those present	169,247,713 saham atau 0,4590317% dari yang hadir 169,247,713 shares or 0.4590317% of those present									
Dengan Pemungutan Suara Voting																			
Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree																	
36,701,347,882 shares or 99.5409683% of those present	4,765,090 saham atau 0,0129238% dari yang hadir 4,765,090 shares or 0.0129238% of those present	169,247,713 saham atau 0,4590317% dari yang hadir 169,247,713 shares or 0.4590317% of those present																	
<p>Keputusan Rapat</p>	<p>Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 99.5409683% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Satya Bhakti Parikesit sebagai Komisaris Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 30 April 2019 terhitung sejak tanggal 30 April 2024, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. <ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: Sdr. Rudy Hartono sebagai Direktur Operasi III Sdr. Ayu Widya Kiswari sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment; <p>Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 8 Juni 2020 Juncto RUPS LB Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.</p> Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Semula</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</td> <td>Direktur Keuangan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Direktur Manajemen Risiko dan Legal</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Direktur Human Capital Management</td> <td>Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Direktur Quality, Safety, Health and Environment</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Direktur Operasi III</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Semula	Menjadi	1	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Direktur Keuangan	2		Direktur Manajemen Risiko dan Legal	3	Direktur Human Capital Management	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi	4	Direktur Quality, Safety, Health and Environment	-	5	Direktur Operasi III	-
No.	Semula	Menjadi																	
1	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Direktur Keuangan																	
2		Direktur Manajemen Risiko dan Legal																	
3	Direktur Human Capital Management	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi																	
4	Direktur Quality, Safety, Health and Environment	-																	
5	Direktur Operasi III	-																	

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1	Adityo Kusumo	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Direktur Keuangan
2	Hadjar Seti Adji	Direktur Human Capital Management	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022 dan RUPSLB Tahun 2022 tanggal 5 Agustus 2022 juncto RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 4 Mei 2023, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat Sdr. Sumadi sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal Perseroan dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

1	Direktur Utama	: Agung Budi Waskito
2	Direktur Keuangan	: Adityo Kusumo
3	Direktur Operasi I	: Hananto Aji
4	Direktur Operasi II	: Harum Akhmad Zuhdi
5	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi	: Hadjar Seti Adji
6	Direktur Manajemen Risiko dan Legal	: Sumadi

b. Dewan Komisaris

1	Komisaris Utama	: Jarot Widyoko
2	Komisaris Independen	: Adityawarman
3	Komisaris Independen	: Rusmanto
4	Komisaris Independen	: Suryo Hapsoro Tri Utomo
5	Komisaris Independen	: Harris Arthur Hedar
6	Komisaris	: Firdaus Ali

7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris seta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

With 99.5409683% of the total votes present at the Meeting, decided to:

- Approve the Proposal of Series A Dwiwarna Shareholders as follows.
- Confirmed the honorable dismissal of Satya Bhakti Parikesit as Commissioner of the Company, who was appointed based on the Annual GMS Resolution for 2018 Fiscal Year on April 30, 2019 effective from April 30, 2024, with gratitude for the contribution of energy and thought given during his tenure as Commissioner of the Company.
 - Honorably dismiss the names mentioned below as the Company's Management:
 - Rudy Hartono as Director of Operation III
Ayu Widya Kiswari as Director of Quality, Health, Safety and Environment;
Who were appointed respectively based on the Annual GMS Resolution for 2021 Fiscal Year dated June 8, 2020 Juncto LB GMS 2021 dated September 2, 2021, as of the closing of this GMS, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during their tenure as the Company's Management.

Keputusan Rapat

3. Changing the nomenclature of members of the Company's Board of Directors as follows:

No.	From	Became
1	Director of Finance and Risk Management	Director of Finance
2		Director of Risk Management and Legal
3	Director of Human Capital Management	Director of Human Capital Management and Transformation
4	Director of Quality, Safety, Health and Environment	-
5	Director of Operation III	-

4. Transferring the assignment of the names mentioned below as members of the Company Board of Directors as follows:

No.	Name	From	Became
1	Adityo Kusumo	Director of Finance and Risk Management	Director of Finance
2	Hadjar Seti Adji	Director of Human Capital Management	Director of Human Capital Management and Transformation

each of whom was appointed based on the 2022 EGMS Resolution dated February 4, 2022 and 2022 EGMS dated August 5, 2022 in conjunction with the 2022 Annual GMS dated May 4, 2023, with the term of office continuing the remaining term of office based on the relevant appointment GMS.

5. To appoint Sumadi as Director of Risk Management and Legal of the Company with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the GMS to dismiss him at any time.
6. With the confirmation of the dismissal, termination, change in position nomenclature, transfer of duties, and appointment of the Company's Management as referred to in number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5, the composition of the Company's Management is as follows:

a. Board of Directors

1	President Director	:	Agung Budi Waskito
2	Director of Finance	:	Adityo Kusumo
3	Director of Operation I	:	Hananto Aji
4	Director of Operations II	:	Harum Akhmad Zuhdi
5	Director of Human Capital Management and Transformation	:	Hadjar Seti Adji
6	Director of Finance and Risk Management	:	Sumadi

b. Board of Commissioners

1	President Commissioner	:	Jarot Widyoko
2	Independent Commissioner	:	Adityawarman
3	Independent Commissioner	:	Rusmanto
4	Independent Commissioner	:	Suryo Hapsoro Tri Utomo
5	Independent Commissioner	:	Harris Arthur Hedar
6	Commissioner	:	Firdaus Ali

7. Members of Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in point 5 who are still serving in other positions that are prohibited by laws and regulations to be concurrent with the positions as members of Board of Directors and Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, then the person concerned must resign or be dismissed from the position.

8. Authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state the resolution of this GMS in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or authorized official, and to make necessary adjustments or corrections if

**Keputusan Rapat
Resolution**

**Tindak Lanjut Keputusan Rapat
Follow-up on Meeting Resolution**

Telah ditindaklanjuti dengan menuangkan keputusan Pemegang Saham ke dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dalam Akta No. 17 Tahun 2024 tanggal 04 Februari 2024.
Has been followed up by outlining the Shareholders' decision into the Statement of Resolution of the General Meeting of Shareholders as stated in Deed No. 17 of 2024 dated February 4, 2024.

Status

Terealisasi
Realized

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 12 Januari 2024

Perseroan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 14.31 s/d 15.07 WIB di Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur – Indonesia.

Extraordinary GMS on January 12, 2024

The Company held an Extraordinary GMS on January 12, 2024, at 14.31-15.07 WIB at WIKA's Tower II Building, 17th Floor Multipurpose Room, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, East Jakarta - Indonesia.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 12 Januari 2024 Stages of Extraordinary GMS Holding on January 12, 2024

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Date	Keterangan Description
Pemberitahuan RUPS Tahunan kepada Regulator Notification of Extraordinary GMS to Regulators	30 November 2023 November 30, 2023	Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat No. SE.01.01/A.CORSEC.01918/2023 The Company has submitted the Extraordinary GMS Notice to the Financial Services Authority (OJK) as stated in Letter No. SE.01.01/A.CORSEC.01918/2023
Pengumuman RUPS Tahunan Announcement of Extraordinary GMS	6 Desember 2023 December 6, 2023	Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPST kepada Pemegang Saham pada 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan. The Company announced the EGMS to Shareholders in 1 Indonesian language daily newspaper, Investor Daily, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan Recording Date of List of Shareholders entitled to attend the Extraordinary GMS	20 Desember 2024 December 20, 2023	Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Biasa. List of Shareholders eligible to attend the Extraordinary GMS.
Pemanggilan dan Informasi penjelasan mata acara RUPS Tahunan Summons and Information explaining the agenda of Extraordinary GMS	21 Desember 2023 December 21, 2023	Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham, melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia; 2. Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan 3. Situs web Perseroan. The Company submitted the Extraordinary GMS Summons to Shareholders, through: 1. Indonesia Stock Exchange website; 2. Indonesian Central Securities Depository website; and 3. The Company's website.
Pelaksanaan RUPS Tahunan January 12, 2024	12 Januari 2024 January 12, 2024	RUPS Luar Biasa dilaksanakan di Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur – Indonesia The Extraordinary GMS was held at WIKA Tower II Building, 17th Floor Multipurpose Room, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, East Jakarta - Indonesia
Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Summary of Minutes of Extraordinary GMS	12 Januari 2024 January 12, 2024	Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa diumumkan melalui: 1. Website Bursa Efek Indonesia 2. Website KSEI 3. Website PT Wijaya Karya (Persero) Tbk A summary of Extraordinary GMS minutes was announced through: 1. Indonesia Stock Exchange website 2. KSEI website 3. Website of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Akta Risalah RUPS Tahunan Deed of Minutes of Extraordinary GMS	23 Januari 2024 January 23, 2024	Akta RUPS No. 2 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Akta RUPS Luar Biasa telah disampaikan kepada OJK pada 23 Januari 2024. GMS Deed No. 2 made before Notary Notaris Fathiah Helmi, S.H., The Extraordinary GMS Deed has been submitted to OJK on January 23, 2024

Proses Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa 12 Januari 2024 Process of Extraordinary GMS holding on January 12, 2024

Tanggal dan Waktu Date and Time	12 Januari 2024, pukul 14.31 - 15.07 WIB January 12, 2024, 14.31 - 15.07 WIB	
Lokasi Venue	Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur – Indonesia. WIKA Tower II Building, 17th Floor Multipurpose Room, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, East Jakarta - Indonesia	
Kuorum Quorum	<p>Para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama mewakili 6.171.985.805 saham atau merupakan 68,8157887% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali (<i>buy back</i>) oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.100.000 saham). Dengan demikian ketentuan kuorum RUPS telah terpenuhi dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat.</p> <p>The holders/proxies of Dwiwarna Series A Shareholders and the Holders/Proxies of Series B Shareholders who jointly represent 6,171,985,805 shares or constitute 68,8157887% of the total shares with voting rights issued by the Company up to the day of the Meeting (excluding shares that have been bought back by the Company of 1,100,000 shares). Thus quorum provisions for the GMS have been fulfilled and the holding of GMS is legal and can make binding decisions.</p>	
Pimpinan RUPS Tahunan Extraordinary GMS Chairman	<p>Bapak Jarot Widyoko selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Keputusan Dewan Komisaris Nomor DK.01.01/A.DEKOM.0001/2024 tanggal 05 Januari 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Jarot Widyoko as the President Commissioner appointed by the Board of Commissioners Decree No. DK.01.01/A.DEKOM.0001/2024 dated January 5, 2024 in accordance with Article 24 paragraph 1 letter a of the Company's Articles of Association.</p>	
Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance	<p>Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris President Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Commissioner Commissioner</p>	<p>: Jarot Widyoko : Adityawarman : Suryo Hapsoro Tri Utomo : Harris Arthur Hedar : Rusmanto : Firdaus Ali : Satya Bakti Parikesit : Jarot Widyoko : Adityawarman : Suryo Hapsoro Tri Utomo : Harris Arthur Hedar : Rusmanto : Firdaus Ali : Satya Bakti Parikesit</p>
Kehadiran Direksi Board of Directors Attendance	<p>Direktur Utama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Direktur Operasi I Direktur Operasi II Direktur Operasi III Direktur <i>Quality, Health, Safety, and Environment</i> Direktur <i>Human Capital & Pengembangan</i> President Director Director of Finance and Risk Management Director of Operations I Director of Operations II Director of Operation III Director of Quality, Health, Safety, and Environment Director of Human Capital & Development</p>	<p>: Agung Budi Waskito : Adityo Kusumo : Hananto Aji : Harum Akhmad Zuhdi : Rudy Hartono : Ayu Widya Kiswari : Hadjar Seti Adji : Agung Budi Waskito : Adityo Kusumo : Hananto Aji : Harum Akhmad Zuhdi : Rudy Hartono : Ayu Widya Kiswari : Hadjar Seti Adji</p>
Pihak Independen Penghitung Suara Vote Counter Independent Party	<p>Notaris: Fathiah Helmi, S.H., Biro Administrasi Efek: PT Datindo Entrycom Notary : Fathiah Helmi, S.H., Share Registrar : PT Datindo Entrycom</p>	

Kesempatan Tanya Jawab dalam RUPS Luar Biasa

1. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
2. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Berdasarkan Pasal 25 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada 12 Januari 2024, Perseroan melibatkan sejumlah pihak independen dengan menunjuk Notaris Fathiah Helmi, S.H., untuk memverifikasi validitas proses pemungutan suara, dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPS Luar Biasa.

Rincian Keputusan RUPS Luar Biasa 12 Januari 2024 dan Realisasinya

Mata Acara Rapat Pertama Agenda 1	Persetujuan atas Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"). Approval of Capital Increase with Pre-emptive Rights ("PMHMETD").		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders raised questions or responded		
Pengambilan Keputusan Decision Making	Dengan Pemungutan Suara Voting		
	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	6.001.054.323 saham atau 97,2305270% dari yang hadir 6,001,054,323 shares or 97,2305270% of those present	1.247.086 saham atau 0,0202056% dari yang hadir 1,247,086 shares or 0,0202056% of those present	169.684.396 saham atau 2,7492674% dari yang hadir 169,684,396 shares or 2,7492674% of those present

Question and Answer at Extraordinary GMS

1. Prior to making decisions on the Meeting Agenda, the Chairperson of the Meeting will give opportunities for the Shareholders or Shareholders' Proxies to ask questions or opinions in the Question and Answer;
2. The opportunity to ask questions or express opinions is given to a maximum of 3 (three) questioners. Questions or opinions that can be submitted are only on matters relating to the Meeting Agenda.

Decision Making Mechanism

1. Voting is carried out orally, unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise.
2. Meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus.
3. Pursuant to Article 25 paragraph 5 letter a of the Company's Articles of Association, Resolutions shall be valid if approved by Seri A Dwiwarna Shareholders and other Shareholders and/or their authorized representatives who together represent more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

Vote Counter Independent Party

At the Extraordinary GMS held on January 12, 2024, the Company involved a number of independent parties by appointing Notary Fathiah Helmi, S.H., as the Share Registrar to count and/or validate and vote in the Extraordinary GMS.

Details of the Extraordinary GMS Resolution on January 12, 2024 and their Realization

	<p>Rapat disetujui dengan suara terbanyak berjumlah 6.002.301.409 saham atau 97,2507326% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu "PMHMETD") dengan cara menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 92.238.374.992 (sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD melalui mekanisme PUT dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD dan menentukan harga pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris; b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, termasuk akta Notaris dan Pernyataan Pendaftaran berikut kelengkapan dokumennya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD; d. Menentukan jadwal PMHMETD; e. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD; f. Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD; g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga (jika ada); h. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI); j. Menegaskan 1 atau lebih keputusan dalam RUPS LB pada 1 (satu) atau lebih akta Notaris. 3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD. <ol style="list-style-type: none"> a. Menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD; dan b. Menyatakan jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan. c. Serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. <p>With 6,002,301,409 shares or 97.2507326% of the total votes present at the Meeting, decided to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the Increase of the Company's Issued and Paid-up Capital by granting Pre-emptive Rights (PMHMETD) by issuing new shares in the maximum amount of 92,238,374,992 (ninety-two billion two hundred thirty-eight million three hundred seventy-four thousand nine hundred ninety-two) Series B Shares with a nominal value of Rp100.00 (one hundred Rupiah) per share through a Limited Public Offering (LPO), with due observance of the prevailing laws and regulations. 2. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with the implementation of PMHMETD through the LPO mechanism by fulfilling the terms and conditions in the applicable regulations, including but not limited to: <ol style="list-style-type: none"> a. Determine the certainty of the number of shares issued in the framework of PMHMETD and determine the exercise price of PMHMETD with the Board of Commissioners' approval; b. Signing, printing, issuing and/or submitting the necessary documents, including the Notarial deed and Registration Statement along with the completeness of documents to the Financial Services Authority (OJK); c. Determining the Shareholders Register date who are entitled to the Pre-emptive Rights; d. Determine the schedule of PMHMETD; e. Determining the ratio of shareholders who are entitled to Pre-emptive Rights; f. Determine the use of proceeds from PMHMETD; g. Determine whether or not there is a Standby Buyer, as well as determine and negotiate the terms and conditions of the agreement between the Company and the Standby Buyer (if any); h. Deposit the Company's shares in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); i. To list all of the Company's shares that have been issued and fully paid-up as a result of the PMHMETD on the Indonesia Stock Exchange (IDX); j. Affirming 1 or more resolutions in the LB GMS in 1 (one) or more Notarial deeds. 3. Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners, including but not limited to declaring the certainty of shares issued in the framework of PMHMETD. <ol style="list-style-type: none"> a. Stating the certainty of number of shares issued in the framework of PMHMETD; and b. Stating the amount of additional issued and paid-up capital after the PMHMETD is completed, namely in article 4 paragraph (2) and (3) of the Company's Articles of Association. c. As well as taking all necessary actions in connection with this matter with due observance of the laws and regulations.
<p>Keputusan Rapat Resolution</p>	
<p>Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up on Meeting Resolution</p>	<p>Telah dilaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau <i>rights issue</i> pada tahun 2024. Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD) or rights issue in 2024 has been carried out.</p>
<p>Status</p>	<p>Terealisasi Realized</p>

Mata Acara Rapat Kedua
 Agenda 2

 Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
 Approval of Amendment to Article 4 of the Company's Articles of Association.

Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya
 Number of Shareholders Asking Questions

 Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
 No Shareholders raised questions or responded

Pengambilan Keputusan
 Decision Making

	Dengan Pemungutan Suara Voting		
	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	5.998.026.154 saham atau 97,1814639% dari yang hadir 5,998,026,154 shares or 97,1814639% of those present	1.247.086 saham atau 0,0202056% dari yang hadir 1,247,086 shares or 0,0202056% of those present	172.712.565 saham atau 2,7983306% dari yang hadir 172,712,565 shares or 2,7983306% of those present

Rapat disetujui dengan suara terbanyak berjumlah 5.999.273.240 saham atau 97,2016694% dari seluruh jumlah saham yang hadir dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar, penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah PUT dengan cara menerbitkan HMETD.
- Sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMHMETD, menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Dasar yaitu meningkatkan Modal Dasar Perseroan. semula: Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) Saham, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah)
 - 34.999.999.999 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.499.999.999.900,00 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah); menjadi: Rp27.500.000.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar) saham yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);
 - 274.999.999.999 (dua ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp27.499.999.999.900,00 (dua puluh tujuh triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah).
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di atas, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

With 5,999,273,240 shares or 97,2016694% of the total votes present at the Meeting, decided to:

- Approve the amendment to Article 4 of the Company's Articles of Association in relation to the increase in authorized capital, the increase in issued and paid-up capital of the Company after the Rights Issue.
- In connection with the decision to implement the Rights Issue, approve the amendment to Article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of Association regarding the Authorized Capital, namely to increase the Authorized Capital of the Company. from: 1: Rp3,500,000,000,000.00 (three trillion five hundred billion Rupiah) divided into 35,000,000,000 (thirty five billion) Shares, consisting of:
 - 1 (one) Series A Dwiwarna Share, with a nominal value of Rp100.00 (one hundred Rupiah) or entirely with a total nominal value of Rp100.00 (one hundred Rupiah)
 - 34,999,999,999 (thirty-four billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine) Series B Shares, each share with a nominal value of Rp100.00 (one hundred Rupiah) or with a total nominal value of Rp3,499,999,999,900.00 (three trillion four hundred ninety-nine billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred Rupiah); to become:

Keputusan Rapat

Resolution	<p>Rp27,500,000,000,000.00 (twenty seven trillion five hundred billion Rupiah) divided into 275,000,000,000 (two hundred seventy five billion) shares consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (one) Series A Dwiwarna Share, with a nominal value of Rp100.00 (one hundred Rupiah) or entirely with a total nominal value of Rp100.00 (one hundred Rupiah); 274,999,999,999 (two hundred seventy four billion nine hundred ninety nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine) Series B Shares, each share shall have a nominal value of Rp100.00 (one hundred Rupiah) or with a total nominal value of Rp27,499,999,999,900.00 (twenty seven trillion four hundred ninety nine billion nine hundred ninety nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine Rupiah). <ol style="list-style-type: none"> 3. Granting power and authority to the Board of Commissioners to declare the realization of number of shares issued in connection with the increase in issued and paid-up capital after the implementation of PMHMETD in article 4 paragraph (2) and (3) of the Company's Articles of Association. 4. Granting power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the decision on the amendment of the Company's Articles of Association above, including compiling and restating the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed and submitting it to the competent authority to obtain approval and/or receipt of notification of the amendment of the Company's Articles of Association, doing everything deemed necessary and useful for such purposes with no one being excluded, including to make additions and/or changes in the amendment of the Company's Articles of Association if required by the competent authority.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up on Meeting Resolution	<p>Telah ditindaklanjuti dengan menuangkan keputusan Pemegang Saham ke dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dalam Akta No. 2 Tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024. Has been followed up by stating the Shareholders' decision into the Statement of Resolution of General Meeting of Shareholders as stated in Deed No. 2 of 2024 dated January 12, 2024.</p>
Status	Terealisasi Realized

Keputusan dan Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) RUPS Luar Biasa. Seluruh keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa telah dimuat dalam Akta Seluruh agenda dan keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Mei 2023 telah direalisasikan pada tahun 2023 dan tidak ada keputusan yang belum direalisasikan. Begitu pula dengan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Oktober 2023 telah direalisasikan pada tahun 2023 dan tidak ada keputusan RUPS Luar Biasa yang belum direalisasikan.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 4 Mei 2023 dan Realisasinya

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 diselenggarakan pada 4 Mei 2023, pukul 14.33 s/d 16.15 WIB di Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur – Indonesia.

GMS Holding in 2023

In 2023, the Company held 2 (two) GMS, namely 1 (one) Annual GMS and 1 (one) Extraordinary GMS. All resolutions of Annual and Extraordinary GMS have been included in the Deed. The entire agendas and resolutions of the Annual GMS on May 4, 2023 have been realized in 2023 and there are no decisions that have not been realized. Likewise, the Extraordinary GMS on October 13, 2023 has been realized in 2023 and there are no resolutions of the Extraordinary GMS that have not been realized

Annual GMS Resolution on May 4, 2023 and Their Realization

The Annual GMS for 2022 Fiscal Year was held on May 4, 2023, at 14.33 to 16.15 WIB at WIKA's Tower II Building, 17th Floor Multipurpose Room, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, East Jakarta - Indonesia.

Mata Acara Rapat Pertama Agenda 1	<p>Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022. Approval of the Company's Annual Report Including the Board of Commissioners Supervisory Report for 2022 Fiscal Year, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements which Include the Report on Social and Environmental Responsibility Program (SER) that Ending December 31, 2022, as well as Granting of Settlement and Release of Responsibility Fully (<i>volledig acquit et de charge</i>) to Board of Directors for the Company's Management Actions and Board of Comm</p>											
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions	Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya 1 (one) Shareholder or the representative raised question											
Pengambilan Keputusan Decision Making	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="879 1854 1118 1906">Dengan Pemungutan Suara Voting</th> </tr> <tr> <th data-bbox="655 1921 719 1973">Setuju Agree</th> <th data-bbox="975 1921 1054 1973">Abstain Abstain</th> <th data-bbox="1262 1921 1374 1973">Tidak Setuju Disagree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="531 1989 842 2085">6.304.910.571 saham atau 99.5373254% dari yang hadir 6,304,910,571 shares or 99.5373254% of those present</td> <td data-bbox="863 1989 1174 2085">29.304.315 saham atau 0,4626351% dari yang hadir 29,304,315 shares or 0.4626351% of those present</td> <td data-bbox="1182 1989 1468 2085">2500 saham atau 0,0000395% dari yang hadir 2500 shares or 0.0000395% of those present</td> </tr> </tbody> </table>			Dengan Pemungutan Suara Voting			Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree	6.304.910.571 saham atau 99.5373254% dari yang hadir 6,304,910,571 shares or 99.5373254% of those present	29.304.315 saham atau 0,4626351% dari yang hadir 29,304,315 shares or 0.4626351% of those present	2500 saham atau 0,0000395% dari yang hadir 2500 shares or 0.0000395% of those present
Dengan Pemungutan Suara Voting												
Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree										
6.304.910.571 saham atau 99.5373254% dari yang hadir 6,304,910,571 shares or 99.5373254% of those present	29.304.315 saham atau 0,4626351% dari yang hadir 29,304,315 shares or 0.4626351% of those present	2500 saham atau 0,0000395% dari yang hadir 2500 shares or 0.0000395% of those present										

Keputusan Rapat
 Resolution

Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 99,9999605% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor : 00186/2.1030/AU.1/03/0181-2/1/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 dengan pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasian Terlampir Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal yang Material, Posisi Keuangan Konsolidasian Grup Tanggal 31 Desember 2022, Serta Kinerja Keuangan dan Arus Kas Konsolidasiannya untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut, Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
- Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Laporan Nomor: 00325/2.1030/AU.2/12/018-2/0/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia".
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

With 99.9999605% of the total votes present at the Meeting, decided to:

- Approve the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report for 2022 Fiscal Year, and ratify the Company's Financial Statements for 2022 Fiscal Year audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners as contained in report No. 00186/2.1030/AU.1/03/0181-2/1/III/2023 dated March 23, 2023 with the opinion "the consolidated financial statements are fairly presented, in all material respects, the financial position of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2022, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards";
- Received the Report of Financial and Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year ending December 31, 2022, which was audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners according to Report Number: 00325/2.1030/AU.2/12/018-2/0/III/2023 dated March 24, 2023 with the opinion "reasonable, in all material respects, the financial position of the Program as of December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability in Indonesia".
- Provide full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to members of Board of Directors and members of Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during 2022 Fiscal Year, provided that that such actions are not criminal act and reflected in the Annual Report, the Consolidated Financial Statements and the PKBL Annual Report for 2022 Fiscal Year.

Tindak Lanjut Keputusan Rapat
 Follow-up on Meeting Resolution

Keputusan Langsung Berlaku
 Decision Immediately Applied

Status

Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua
 Agenda 2

Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
 Approval to Determine the Use of Net Profit for 2022 Fiscal Year

Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya
 Number of Shareholders Asking Questions

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
 No Shareholders raised questions or responses

Pengambilan Keputusan
 Decision Making

	Dengan Pemungutan Suara Voting		
	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	6.310.378.671 saham atau 99,6236518% dari yang hadir 6,310,378,671 shares or 99.6236518% of those present	23.836.215 saham atau 0,3763088% dari yang hadir 23,836,215 shares or 0.3763088% of those present	2500 saham atau 0,0000395% dari yang hadir 2500 shares or 0.0000395% of those present

Keputusan Rapat
 Resolution

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999605% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Tidak menetapkan penggunaan laba Tahun Buku 2022 karena Laba Atribusi Entitas Induk Perseroan defisit sebesar Rp59.596.186.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

With 99.9999605% of the total votes present at the Meeting, decided to:

Not to determine the use of profit for 2022 Fiscal Year because the Company's Profit Attributable to Parent Entity was deficit amounting to Rp59,596,186,000 (fifty nine billion five hundred ninety six million one hundred eighty six thousand Rupiah).

Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up on Meeting Resolution	Keputusan Langsung Berlaku Decision Immediately Applied									
Status	Terealisasi Realized									
Mata Acara Rapat Ketiga Agenda 3	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of Micro and Small Business Funding Program for 2023 Fiscal Year.									
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders raised questions or responses									
Pengambilan Keputusan Decision Making	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Dengan Pemungutan Suara Voting</th> </tr> <tr> <th>Setuju Agree</th> <th>Abstain Abstain</th> <th>Tidak Setuju Disagree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.304.253.091 saham atau 99,5269456% dari yang hadir 6,304,253,091 shares or 99,5269456% of those present</td> <td>23.836.215 saham atau 0,3763088% dari yang hadir 23,836,215 shares or 0,3763088% of those present</td> <td>6.128.080 saham atau 0,0967457% dari yang hadir 6,128,080 shares or 0,0967457% of those present</td> </tr> </tbody> </table>	Dengan Pemungutan Suara Voting			Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree	6.304.253.091 saham atau 99,5269456% dari yang hadir 6,304,253,091 shares or 99,5269456% of those present	23.836.215 saham atau 0,3763088% dari yang hadir 23,836,215 shares or 0,3763088% of those present	6.128.080 saham atau 0,0967457% dari yang hadir 6,128,080 shares or 0,0967457% of those present
Dengan Pemungutan Suara Voting										
Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree								
6.304.253.091 saham atau 99,5269456% dari yang hadir 6,304,253,091 shares or 99,5269456% of those present	23.836.215 saham atau 0,3763088% dari yang hadir 23,836,215 shares or 0,3763088% of those present	6.128.080 saham atau 0,0967457% dari yang hadir 6,128,080 shares or 0,0967457% of those present								
Keputusan Rapat Resolution	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9032543% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut, serta melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. <p>With 99,9032543% of the total votes present at the Meeting, decided to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Re-appoint Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) to perform audit services for the Company's Consolidated Financial Statements, audit of Performance Evaluation and Compliance Audit Report as well as Report of Financial and Implementation of the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) ending on December 31, 2023; Grant delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of audit fees, additional scope of work required and other reasonable requirements for the public accounting firm, and to audit the Company's financial statements for other periods in 2023 fiscal year for the purposes and interests of the Company; Granting authority and power to the Board of Commissioners with prior written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders to determine a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) for any reason is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements and Statements of Financial and Implementation of the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for 2023 Fiscal Year, including determining the audit fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm. 									
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up on Meeting Resolution	Telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023. A Public Accounting Firm (KAP) has been appointed to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Report for 2023 Fiscal Year.									
Status	Terealisasi Realized									
Mata Acara Rapat Keempat Agenda 4	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2023 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2022 untuk Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan. Determination of Salary/Honorarium, Allowances and Other Facilities in 2023 and Tantiem for Performance in 2022 for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.									

Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders raised questions or responses		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara Voting		
	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
Keputusan Rapat Resolution	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999605% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2023; dan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk tahun 2023. <p>With 99,9999605% of the total votes present at the meeting decided to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Granting authority and power to the Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of tantiem for 2022 Fiscal Year, as well as to determine the honorarium, allowances, and other facilities of Board of Commissioners for 2023; and Granting authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of tantiem for 2022 Fiscal Year, and to determine the salaries, allowances, and other facilities of Board of Directors for 2023. 		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up on Meeting Resolution	<p>Berdasarkan Tantiem Tahun 2022, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 telah ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui surat No. PER-3/MBU/03/2023 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023.</p> <p>The amount of 2022 Tantiem, Salary/Honorarium and Allowances and/or other Facilities for Members of Board of Directors and Board of Commissioners for 2023 has been determined by the Series A Dwiwarna Shareholder through Letter No. PER-3/MBU/03/2023 regarding the Determination of Income for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in 2023 on March 24, 2023.</p>		
Status	Terealisasi Realized		
Mata Acara Rapat Kelima Agenda 5	<p>Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2022.</p> <p>Report on the Realization of the Use of Additional State Capital Participation Funds and the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering through Additional Capital By Granting Pre-emptive Rights I of the Company up to 2022 Fiscal Year</p>		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders raised questions or responses		
Pengambilan Keputusan Decision Making	Dengan Pemungutan Suara Voting		
	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
Keputusan Rapat Resolution	<p>Untuk Mata Acara kelima bersifat Laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2022. Dengan telah terealisasinya secara keseluruhan penggunaan dana tersebut maka pelaksanaan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara tahun 2016 dan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan dinyatakan selesai.</p> <p>The Fifth Meeting Agenda is a Report, therefore no decision was made. The meeting received reports on the Realization of Additional Use of State Equity Participation Funds and the Realization of Use of Funds from Public Offering through Additional Capital by Providing Pre-emptive Rights I of the Company up to 2022 Fiscal year. With the realization of overall use of these funds, the use of State Equity Participation funds in 2016 and the use of proceeds from Public Offering through Additional Capital by Providing Preemptive Rights I of the Company was declared completed.</p>		

Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up on Meeting Resolution	Keputusan Langsung Berlaku Decision Immediately Applied						
Status	Terealisasi Realized						
Mata Acara Rapat Keenam Agenda 6	<p>Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022; Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022. <p>Accountability Report on the Realization of Use of Proceeds from Sustainable Public Offering as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022 and Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase II 2022; Wijaya Karya Sustainable Bonds III Phase I 2022 and Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds III Phase I 2022; 						
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders raised questions or responses						
Pengambilan Keputusan Decision Making	<p style="text-align: center;">Dengan Pemungutan Suara Voting</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Setuju Agree</th> <th>Abstain Abstain</th> <th>Tidak Setuju Disagree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree	-	-	-
Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree					
-	-	-					
Keputusan Rapat Resolution	<p>Untuk Mata Acara keenam bersifat Laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan.</p> <p>Rapat menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022; Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022. <p>sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) POJK 30/2015.</p> <p>The sixth agenda item is a report, therefore no decision is made.</p> <p>The Meeting received Accountability Report on the Realization of Use of Proceeds from Sustainable Public Offering as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wijaya Karya Sustainable Bonds II Phase II 2022 and Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase II 2022; Wijaya Karya Sustainable Bonds III Phase I 2022 and Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds III Phase I 2022; <p>as required by Article 6 paragraph (1), Article 6 paragraph (2), Article 7 paragraph (1) and Article 7 paragraph (2) POJK 30/2015</p>						
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up on Meeting Resolution	Keputusan Langsung Berlaku Decision Immediately Applied						
Status	Terealisasi Realized						
Mata Acara Rapat Ketujuh Agenda 7	<p>Persetujuan Penguatan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. <p>Approval of the confirmation of Minister of State-Owned Enterprises Regulation of the Republic of Indonesia, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises; Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises. 						
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders raised questions or responses						

	Dengan Pemungutan Suara Voting		
	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
Pengambilan Keputusan Decision Making	6.310.558.671 saham atau 99,6264935% dari yang hadir 6,310,558,671 shares or 99.6264935% of those present	23.656.215 saham atau 0,3734671% dari yang hadir 2 23,656,215 shares or 0.3734671% of those present	2500 saham atau 0,0000395% dari yang hadir 2500 shares or 0.0000395% of those present
Keputusan Rapat Resolution	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999605% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: 1. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 2. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; 3. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari. With 99,9999605% of the total votes present at the Meeting decided to: Approved the confirmation of Minister of State-Owned Enterprises Regulation of the Republic of Indonesia, namely: 1. Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises; 2. Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; 3. Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises. And the changes later on.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up on Meeting Resolution	Keputusan Langsung Berlaku Decision Immediately Applied		
Status	Terealisasi Realized		
Mata Acara Rapat Kedelapan Agenda 8	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Approval of Changes in the Company's Management Composition.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders raised questions or responses		
	Dengan Pemungutan Suara Voting		
	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
Pengambilan Keputusan Decision Making	6.000.948.215 saham atau 94,7385896% dari yang hadir 6,000,948,215 shares or 94.7385896% of those present	23.656.215 saham atau 0,3734671% dari yang hadir 23,656,215 shares or 0.3734671% of those present	309.612.956 saham atau 4,8879433% dari yang hadir 309,612,956 shares or 4,8879433% of those present

Keputusan Rapat

Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 95,1120567% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Komisaris Independen;
 yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1	Direktur Human Capital dan Pengembangan	Direktur Human Capital Management

3. Mengalihkan penugasan Sdr. Hadjar Seti Adji semula sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan menjadi Direktur Human Capital Management yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2022, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Komisaris Independen;
 Dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

1	Direktur Utama	Agung Budi Waskito
2	Direktur Operasi I	Hananto Aji
3	Direktur Operasi II	Harum Akhmad Zuhdi
4	Direktur Operasi III	Rudy Hartono
5	Direktur <i>Quality, Health, Safety, and Environment</i>	Ayu Widya Kiswari
6	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Adityo Kusumo
7	Direktur <i>Human Capital Management</i>	Hadjar Seti Adji

b. Dewan Komisaris

1	Komisaris Utama	Jarot Widyoko
2	Komisaris	Satya Bhakti Parikesit
3	Komisaris	Firdaus Ali
4	Komisaris Independen	Adityawarman
5	Komisaris Independen	Harris Arthur Hedar
6	Komisaris Independen	Rusmanto
7	Komisaris Independen	Suryo Hapsoro Tri Utomo

6. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

With 95.1120567% of the total votes present at the Meeting decided to:

Approve the Proposal of Series A Dwiwarna Shareholders as follows:

1. Honorably dismiss the following names as the Company's Management:
 - a. Agung Budi Waskito as President Director;
 - b. Suryo Hapsoro Tri Utomo as Independent Commissioner;
 each of whom was appointed based on the Annual GMS Resolution for 2017 Fiscal Year to 2019 Fiscal Year, as of the closing of this GMS, with gratitude for the contribution of energy and thought given during their tenure as the Company's Management.

2. Changing the nomenclature of members of the Company's Board of Directors as follows:

No.	From	Became
1	Director of Human Capital and Development	Director of Human Capital Management

3. Transferring the assignment of Hadjar Seti Adji, previously as Director of Human Capital and Development, to become Director of Human Capital Management appointed based on the 2022 EGMS Resolution, with the term of office continuing the remaining term of office as referred to in the GMS Resolution.

4. To appoint the following names as the Company's Management:
 - a. Agung Budi Waskito as President Director;
 - b. Suryo Hapsoro Tri Utomo as Independent Commissioner;
 - c. With a term of office in accordance with the Company's Articles of Association and taking into account the laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the rights of GMS to dismiss at any time.

5. With the dismissal, changes in the position nomenclature, transfer of duties, and appointment of the Company's Management as referred to in number 1, number 2, number 3, and number 4, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners shall be as follows:

- a. Board of Directors

1	President Director	Agung Budi Waskito
2	Director of Operations I	Hananto Aji
3	Director of Operations II	Harum Akhmad Zuhdi
4	Director of Operations III	Rudy Hartono
5	Director of Quality, Health, Safety and Environment	Ayu Widya Kiswari
6	Director of Finance and Risk Management	Adityo Kusumo
7	Director of Human Capital Management	Hadjar Seti Adji

- b. Board of Commissioners

1	President Commissioner	Jarot Widyoko
2	Commissioner	Satya Bhakti Parikesit
3	Commissioner	Firdaus Ali
4	Independent Commissioner	Adityawarman
5	Independent Commissioner	Harris Arthur Hedar
6	Independent Commissioner	Rusmanto
7	Independent Commissioner	Suryo Hapsoro Tri Utomo

6. Members of Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in point 4 who are still serving in other positions that are prohibited by laws and regulations to be concurrent with the positions as members of Board of Directors and Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, then the person concerned must resign or be dismissed from the position.

7. Authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state the resolution of this GMS in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or authorized official, and to make necessary adjustments or corrections if required by the competent authorities for the purpose of implementing the resolutions of the meeting.

Resolution

Tindak Lanjut Keputusan Rapat
Follow-up on Meeting Resolution

Telah ditindaklanjuti dengan menuangkan keputusan Pemegang Saham ke dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dalam Akta No. 6 Tahun 2023 tanggal 04 Mei 2023. Has been followed up by including the Shareholders decision into the General Meeting of Shareholders Resolution Statement as stated in the Deed No. 6 on May 4, 2023.

Status

Terealisasi
Realized

Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Oktober 2023 dan Realisasinya

Resolution of Extraordinary GMS dated October 13, 2023 and its Realisation

Mata Acara Rapat Pertama Agenda 1	Persetujuan atas Usulan Restrukturisasi Perseroan Approval on the Company's Restructuring Proposal		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Number of Shareholders Asking Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders submitted questions or responses		
Pengambilan Keputusan Decision Making	Dengan Pemungutan Suara Voting		
	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	6.441.176.662 saham atau 95,6232716% dari yang hadir 6,441,176,662 shares or 95.6232716% of those present	1.264.831 saham atau 0,0187772% dari yang hadir 1,264,831 shares or 0.0187772% of those present	293.551.280 saham atau 4,3579512% dari yang hadir 293,551,280 shares or 4.3579512% of those present
Keputusan Rapat Resolution	<p>Rapat disetujui dengan suara terbanyak berjumlah 6.442.441.493 saham atau 95,6420488% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Usulan Restrukturisasi yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka penyehatan Perseroan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal dan kinerja Perseroan dengan metode restrukturisasi sebagaimana yang telah dipaparkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk memberikan persetujuan dalam hal terdapat perubahan metode restrukturisasi. <p>The meeting was approved with the most votes amounting to 6,442,441,493 shares or 95.6420488% of the total number of votes present at the Meeting decided:</p> <ol style="list-style-type: none"> Approve the Restructuring Proposal submitted by the Company in order to improve the Company's health as a strategic step to improve the Company's internal conditions and performance with the restructuring method as explained, the implementation of which is carried out in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. Grant authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Shareholder to provide approval in the event of changes in the restructuring method. 		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat Follow-up on Meeting Resolution	Keputusan telah dituangkan dalam Akta RUPS No. 22 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Akta RUPS Tahunan telah disampaikan kepada OJK pada 10 November 2023. The resolution has been stated in the Deed of GMS No. 22 made before Notary Aulia Taufani, S.H.. The Deed of Annual GMS has been submitted to the OJK on November 10, 2023.		
Status	Terealisasi Realized		

Direksi

Board of Directors



Direksi berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan keberhasilan pengelolaan Perseroan melalui penerapan praktik tata kelola yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan regulasi yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi mengedepankan kolaborasi dan pengambilan keputusan kolektif untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi para pemangku kepentingan. Akuntabilitas Direksi tercermin melalui pelaporan kinerja kepada RUPS, yang berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan pengawasan guna memastikan seluruh kegiatan operasional Perseroan sejalan dengan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan keberlanjutan.

KRITERIA DIREKSI

Dalam rangka memastikan kinerja anggota Direksi sesuai dengan harapan Pemegang Saham dan kebutuhan Perseroan, maka perlu ditetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Direksi sesuai kebutuhan. Kriteria Direksi Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.

Board of Directors acts as the main organ in ensuring the successful management of the Company through the implementation of governance practices in accordance with the Articles of Association and prevailing regulations. In carrying out its duties, Board of Directors prioritizes collaboration and collective decision-making to drive sustainable growth and provide optimal benefits to stakeholders. The accountability of Board of Directors is reflected through performance reporting to the GMS, which served as an evaluation and monitoring mechanism to ensure that all of the Company's operational activities are in line with the principles of transparency, responsibility and sustainability.

BOARD OF DIRECTORS CRITERIA

In order to ensure the performance of members of Board of Directors meet the expectations of Shareholders and the Company's needs, it is necessary to establish a policy on the criteria for members of Board of Directors as needed. The criteria for the Company's Board of Directors includes:

1. The Company is managed and led by the Board of Directors whose number are adjusted to the needs of the Company, and consists of at least 2 (two) persons, with one appointed as the President Director, and if necessary one can be appointed as Deputy President Director.

2. Persyaratan Anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam lima 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
 - Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan Poin 2 di atas.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan sejak tanggal pengangkatan oleh RUPS hingga penutupan RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal tersebut, dengan ketentuan tidak melebihi 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal. RUPS berwenang untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir, yang berlaku efektif sejak penutupan RUPS kecuali ditentukan lain. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.

BOARD OF DIRECTORS TERM OF OFFICE

The term of office of members of Board of Directors is determined from the date of appointment by the GMS until the closing of the 5th Annual GMS after that date, provided that it does not exceed 5 (five) years in accordance with the regulations in the Capital Market sector. The GMS is authorized to dismiss a member of Board of Directors before his/her term of office expires, which is effective since the closing of the GMS unless otherwise specified. After the term of office ends, members of Board of Directors may be reappointed by GMS for the next 1 (one) term period.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi memiliki hak dan wewenang untuk:

1. Menerima gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;
2. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi Perseroan lainnya dan Pemegang Saham yang mengusulkan pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri;
 - b. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka pengunduran diri dari anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, kecuali pengunduran diri tersebut menyebabkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang;
 - c. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya menjadi efektif;
 - d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga Perseroan memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
3. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan;
5. Mengangkat dan memberhentikan *Corporate Secretary* dan/atau *Head of Internal Audit* dengan persetujuan Dewan Komisaris;
6. Menghapusbukkan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan yang selanjutnya, dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;

BOARD OF DIRECTORS RIGHTS AND AUTHORITIES

In carrying out its duties, Board of Directors has the right and authority to:

1. Receive salaries and allowances/facilities including retirement benefits, the GMS determine the amount of which and such authority can be delegated to the Board of Commissioners.
2. A member of Board of Directors has the right to resign from his/her position and must notify the Company in writing with a copy to the Board of Commissioners, other members of Board of Directors, and the Shareholders who proposed the appointment of the relevant member of Board of Directors:
 - a. The Company is obliged to hold a GMS to approve the resignation of member of Board of Directors no later than 90 (ninety) calendar days after the resignation letter is received;
 - b. In the event that the Company does not hold a GMS within 90 (ninety) calendar days after receiving the resignation letter, the resignation of member of Board of Directors becomes valid without requiring GMS approval, unless the resignation causes the number of Directors to be less than 2 (two) persons;
 - c. Member of Board of Directors who resigns as mentioned above, can still be held accountable from their appointment until the date his/her resignation becomes effective;
 - d. In the event that a member of Board of Directors resigns and causes the number of Directors to be less than 2 (two) persons, the resignation becomes valid when it has been determined by the GMS and a new member of Board of Directors has been appointed so that the Company meets the minimum requirements for the number of Board of Directors.

Board of Directors is authorized to:

1. Determine the Company's management policies;
2. Regulate the delegation of Board of Directors' authority to represent the Company in and out of court to one or several members of Board of Directors specifically appointed for that matter, or to one or several employees of the Company, individually or jointly or to others;
3. Stipulate provisions concerning Company employees including the determination of salaries, pensions and old age insurance, and other income based on applicable laws and regulations;
4. Appoint and dismiss Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations;
5. Appoint and dismiss the *Corporate Secretary* and/or *Head of Internal Audit Unit* with the approval of Board of Commissioners;
6. Write-off bad debts following the provisions stipulated in the Articles of Association and subsequently reporting to the Board of Commissioners to report and account for in the Annual Report;

7. Tidak menagih lagi piutang bunga dan, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau keputusan RUPS.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
4. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), apabila dapat membuktikan:
 - a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BOARD OF DIRECTORS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Directors' duties and responsibilities as stipulated in the Company's Articles of Association, among others:

1. Carrying out all actions related to the Company's management, for the Company's benefit and in accordance with the Company's purposes and objectives, with due observance and compliance with the provisions, as well as represent the Company both inside and outside the court in all matters and events with restrictions as regulated in legislation, Articles of Association and/or GMS resolutions;
2. In carrying out their duties, the Board of Directors must devote their full energy, thoughts, attention and devotion to their duties, obligations and the achievement of Company's goals;
3. In carrying out their duties, members of Board of Directors must comply with the Company's Articles of Association, Code of Good Corporate Governance, Code of Conduct and Legislation and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness;
4. Each member of Board of Directors must carry out their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence, for the interests and business of the Company by taking into account prevailing laws;
5. a. Each member of Board of Directors is jointly and severally liable for the Company's losses caused by errors or negligence by members of Board of Directors in carrying out their duties.
b. Members of Board of Directors shall not be liable for any loss of the Company as referred to in letter (a), if they can prove that:
 - a) The loss was not due to their mistake or negligence;
 - b) They exercised good, responsible, and careful management;
 - c) There was no conflict of interest either directly or indirectly with the management's actions that resulting in loss; and
 - d) They have taken actions to prevent such losses or occurrence.

6. Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
- a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Kerja Sama Lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
 - d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - i. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - j. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - k. Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
 - l. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - m. Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - n. Tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
6. The below actions by Board of Directors shall have written approval from Board of Commissioners:
- a. Releasing/transferring and/or collateralizing Company's assets with a value exceeding a certain amount determined by the Board of Commissioners, except assets recorded as inventories, taking into account laws and regulations in Capital Market;
 - b. Establishing cooperation with business entities or other parties, in the form of joint operations (JO), business cooperation (KSU), licensing cooperation, Build, Operate and Transfer, Build, Transfer and Operate (BTO), Build, Operate and Own (BOO), and other agreements that have the same nature, whose time period or value exceeds that stipulated by the Board of Commissioners;
 - c. Establishing and changing the Company logo;
 - d. Establishing an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;
 - e. Conducting capital participation for a certain value determined by the Board of Commissioners in other companies, subsidiaries, and joint ventures that are not in the framework of saving accounts receivables by observing Laws and Regulations in Capital Market;
 - f. Establishing subsidiaries and/or joint ventures for a certain value determined by the Board of Commissioners with due regard to Regulations in Capital Market;
 - g. Proposing Company representatives as candidates for Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries that make significant contributions to the Company and/or strategic value determined by the Board of Commissioners;
 - h. Conducting mergers, consolidations, acquisitions, separations and dissolutions of subsidiaries and joint ventures for certain values determined by the Board of Commissioners by taking into account laws and regulations in Capital Market;
 - i. Binding the Company as a guarantor (borg or avalist) for a certain value determined by the Board of Commissioners by observing laws and regulations in Capital Market;
 - j. Receiving medium/long term loans and provide medium/long term loans with a certain value determined by the Board of Commissioners with due regard to Regulations in Capital Market;
 - k. Providing short/medium/long-term loans that are not operational, except for loans to subsidiaries that have been reported to the Board of Commissioners;
 - l. Eliminating bad debt receivables and expired goods for a value that exceeds the limit set by the Board of Commissioners;
 - m. Performing actions that are material transactions as determined by laws and regulations in Capital Market for a certain value determined by the Board of Commissioners, unless those actions are included in material transactions that are excluded by laws and regulations in Capital Market;
 - n. Actions that have not been determined in the Company's Work Plan and Budget;

- o. Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menggunakan pembiayaan dari Perseroan terlebih dahulu (*proyek turnkey/prefinancing*) dengan nilai dan kriteria tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
- p. Melakukan pembelian aset lahan dan/atau *land bank* untuk kegiatan usaha *property* maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
- q. Melakukan investasi dengan batasan nilai dan/atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Direksi.
 - i. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (p) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - ii. persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (p), dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - iii. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS;
 - iv. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b), (e), (f), (g), dan (h) ayat ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
- 7. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini;
- 8. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan;
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan.
- 9. a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk:
 - 1) Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - 2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
- o. Carry out the main business activities as referred to in Article 3 using financing by the Company in advance (*turnkey/modified turnkey/prefinancing projects*) with certain values and criteria determined by the Board of Commissioners;
- p. Purchase land assets and/or land bank for property business activities or serve as fixed assets, with a certain value determined by the Board of Commissioners;
- q. Invest with certain value limits and/or criteria determined by the Board of Commissioners based on the Board of Directors recommendation.
 - i. Determination of limits and/or criteria by the Board of Commissioners for the matters referred to in letters (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) and (p) are performed by the Board of Commissioners after received approval from Dwiwarna Series A shareholders;
 - ii. The Board of Commissioners' special approval with respect to letters (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), and (p) carried out by the Board of Commissioners after obtaining Dwiwarna A Series shareholder approval;
 - iii. The actions of Board of Directors as referred to in letter (b) to the extent necessary in the implementation of main business activities that are commonly carried out in the relevant business fields by observing the laws and regulations, and does not require approval from the Board of Commissioners and/or GMS;
 - iv. The actions of Board of Directors as referred to in letters (b), (e), (f), (g), and (h) as long as needed in order to join a tender and/or to implement projects and/or fulfill the requirements and/or the implementation of main business activities conducted in the relevant business field by taking into account laws and regulations, and does not require approval from the Board of Commissioners and/or GMS.
- 7. Within a period of 30 (thirty) days from the receipt of a request and a complete explanation and documents from Board of Directors, the Board of Commissioners must provide the decision referred to in point (5);
- 8. Board of Directors must request the approval from GMS to:
 - a. Transfer Company's assets;
 - b. Guarantee the Company's debt, of more than 50% (fifty percent) of the Company's net worth in 1 (one) transaction or more, whether related or not, except as the executor of the Company's business activities.
- 9. a. The following actions can only be carried out by the Board of Directors after receiving a written response from the Board of Commissioners and approval from the GMS:
 - 1) Performing actions in material transactions as determined by capital market laws and regulations with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's equity, unless such actions are included in material transactions that are exempted by capital market laws and regulations;
 - 2) Conducting transactions containing conflicts of interest as determined in capital market laws and regulations;

- 3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
- 4) Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.
 - b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
10. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada poin 8 dan poin 9 di atas yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik;
11. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
12. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi;
13. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;
14. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin 13, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
15. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan;
 - b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan;
 - c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.
16. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama;
- 3) Conducting other transactions to comply with capital market laws and regulations;
- 4) Carry out special assignments given by the Central Government to perform public benefit functions as well as national research and innovation.
 - b. If within 30 (thirty) days of receipt of a request or explanation and documents from Board of Directors, Board of Commissioners does not provide a written response, the GMS can make a decision without a written response from the Board of Commissioners.
10. The legal actions referred to in points 8 and 9 above that are carried out without the GMS approval, remain binding on the Company as long as the other parties in the said legal actions act in good faith;
11. The GMS can reduce restrictions on the actions of Board of Directors regulated in the Articles of Association, or determine other restrictions to Board of Directors other than those stipulated in the Articles of Association;
12. The management policies are determined in the Board of Directors' Meetings;
13. In order to carry out the management of the Company, each member of Board of Directors has the right and is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company in accordance with the Company management policies and authority based on the Board of Directors decision;
14. Unless otherwise specified in the Company's management policy as referred to in point 13, President Director shall have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company both inside and outside the Court;
15. a. If the President Director is not present or is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, the Deputy President Director has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of President Director and on behalf of the Board of Directors and carrying out the duties of President Director and/or Deputy President Director if at the same time the Deputy President Director is absent or unavailable;
 - b. If the Deputy President Director is not present or is absent due to any reason, which does not need to be proven to a third party, the Deputy President Director designates in writing a member of Board of Directors who is authorized to carry out the duties of Deputy President Director or the Deputy President Director designates in writing a member of Board of Directors who is authorized to act for and on behalf of Board of Directors as well as carrying out the duties of President Director and/or Deputy Managing Director if the President Director is not present or unavailable;
 - c. If the GMS does not appoint a Deputy President Director, then in the event that the President Director is unavailable or absent due to any reason, which does not need to be proven to a third party, the President Director shall appoint in writing a member of Board of Directors who is authorized to act on behalf of Board of Directors and carry out the duties of President Director.
16. In the event that the President Director does not make an appointment, the longest-serving member of Board of Directors has the authority to act for and on behalf of Board of Directors and carry out the duties of President Director;

17. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa;
18. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;
19. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini;
20. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan.
21. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Dalam rangka mengoptimalkan efektivitas pengelolaan dan pencapaian tujuan Perseroan, per 31 Desember 2024, pembagian tugas serta tanggung jawab Direksi telah diatur sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam Surat Keputusan No. SK.01.01/A.DIR.00022.A/2024 tanggal 29 November 2024 Rincian lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

To optimize the effectiveness of management and the achievement of the Company's objectives, as of December 31, 2024, the division of duties and responsibilities of Board of Directors has been regulated in accordance with the provisions contained in Decree No SK.01.01/A.DIR.00022.A/2024 dated November 29, 2024. Further details regarding the division of duties and responsibilities of Board of Directors are as follows:

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan segala Tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS; 2. Memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola, mengembangkan, menumbuhkan usaha Perusahaan sesuai dengan Visi, Misi, rencana strategis Perusahaan dan senantiasa berupaya meningkatkan sinergi sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien; 3. Pengurusan dan pembinaan fungsi Sekretariat Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern; 4. Menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan; 5. Menetapkan Visi, Misi, strategi pokok perusahaan, strategi usaha, sasaran jangka panjang, kebijakan-kebijakan pokok Perusahaan, dan peraturan-peraturan Perusahaan; 6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain; 7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun kepemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS; 8. Melakukan koordinasi dan pembinaan antar Direktorat dalam melakukan pengendalian Perseroan; 9. Memberikan pengarahan terhadap bisnis dan perkembangan usaha Entitas Anak dan Entitas Asosiasi;

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director	<p>10. Penetapan perencanaan dan pengendalian dalam penerapan "Good Corporate Governance" (GCG), keterkaitan dengan peraturan-peraturan Perusahaan dan undang-undang yang berlaku, terlaksananya publisitas Perusahaan, komunikasi <i>intern</i> dan <i>ekstern</i>, protokoler, promosi serta penerapan <i>standard</i> pelayanan pelanggan, serta strategi hubungan dengan investor;</p> <p>11. Bertanggung jawab dalam penetapan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);</p> <p>12. Pengurusan terhadap fungsi Internal Audit dan <i>Corporate Secretary</i> serta memiliki kewenangan untuk melakukan segala tindakan pengurusan Perseroan untuk mewakili Direktorat yang dipimpin, dan/atau melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya dan/atau memberikan kuasa kepada <i>Senior Vice President</i>, <i>Senior Manager</i>, <i>General Manager</i>, <i>Manager</i>, <i>Project Manager</i>, dan/atau pejabat lain baik dari dalam dan/atau luar Perseroan dalam rangka perolehan, pelaksanaan, dan penyelesaian Proyek, kegiatan operasional dan pengurusan Perseroan dalam ruang lingkup Direktoratny dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prosedur Perseroan yang berlaku;</p> <p>13. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi pengendalian terhadap fungsi yang ada di dalam organ Perusahaan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Internal Audit, termasuk kebijakan operasi Perusahaan yang mengacu pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku, memberikan informasi strategis tentang fakta dan realita kinerja unit kerja yang diperiksa secara transparan, memberikan saran-saran perbaikannya, dan monitoring perkembangan kinerja anak Perusahaan. <i>Corporate Secretariat</i>, termasuk di dalamnya pengendalian terhadap hubungan dengan investor dan hubungan publik, pengelolaan manajemen aset, strategi konsolidasi perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, kebijakan Perusahaan, kebijakan pokok, anggaran Perusahaan lingkup Sekretariat Perusahaan. Pembinaan keahlian teknis dan <i>Human Capital</i> di Direktorat yang menjadi tanggung jawabnya. <p>14. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan mengusulkan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko secara komprehensif; Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko; Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. keakuratan metodologi penilaian Risiko; 2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; 3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan Risiko (<i>risk limit</i>) dan ambang batas (<i>threshold</i>); dan Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. <p>15. Melaksanakan fungsi Audit Intern meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan kerangka Audit Intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi; Memastikan SPI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta Risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi; Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SPI; Memastikan kepala SPI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan, sesuai kemampuan keuangan perusahaan; Memastikan Anak Perusahaan BUMN memiliki SPI; dan Melaksanakan fungsi <i>Audit Intern</i> lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. <p>16. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. <ol style="list-style-type: none"> Carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the objectives and purposes of the Company and representing the Company both inside and outside the court regarding all matters and all events with limitations as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions; Having main responsibility in managing, developing, growing the Company's business in accordance with the Company's Vision, Mission, strategic plan and always striving to improve the synergy of company resources effectively and efficiently; Management and development of the Corporate Secretariat and Internal Audit Unit functions; Determining the Company's management policies; Determining the Company's Vision, Mission, main strategy, business strategy, long-term targets, main policies of the Company, and Company regulations; Arranging the transfer of the Board of Directors' authority to represent the Company inside and outside the court to one or several members of Board of Directors specifically appointed for that purpose or to one or several employees of the Company either individually or together or to other persons; Carrying out all other actions and deeds regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company inside and outside the court regarding all matters and all events, with limitations as stipulated in laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Decisions; Coordinating and coaching between Directorates in exercising control of the Company; Providing direction on the business and business development of Subsidiaries and Associated Entities; Determining planning and control in the implementation of "Good Corporate Governance" (GCG), the relationship with Company regulations and applicable laws, the implementation of Company publicity, internal and external communications, protocol, promotion and implementation of customer service standards, and investor relations strategies;

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director	<ol style="list-style-type: none"> 11. Responsible for determining the Social and Environmental Responsibility (CSR) program/ Partnership and Community Development Program (PKBL); 12. Management of the Internal Audit and Corporate Secretary functions and has the authority to carry out all management actions of the Company to represent the Directorate led, and/or sign documents required for its operational activities and/or grant power of attorney to Senior Vice President, Senior Manager, General Manager, Manager, Project Manager, and/or other officials both from within and/or outside the Company in the context of obtaining, implementing, and completing Projects, operational activities and management of the Company within the scope of its Directorate while still paying attention to the applicable Articles of Association and Company Procedures; 13. Determination of the pattern of coaching, development, coordination, consolidation of control over the functions within the Company's organs, which include: <ol style="list-style-type: none"> a. Internal Audit, including the Company's operational policies that refer to applicable regulations/laws, providing strategic information on the facts and realities of the performance of work unit being audited in a transparent manner, providing suggestions for improvement, and monitoring the development of the performance of the Company's subsidiaries. b. Corporate Secretariat, including control over investor relations and public relations, asset management, short-term and long-term planning consolidation strategies, Company policies, main policies, Company budgets within the scope of the Corporate Secretariat. c. Development of technical expertise and Human Capital in the Directorate under its responsibility. 14. Carrying out Risk Management functions including: <ol style="list-style-type: none"> a. Preparing and proposing comprehensive Risk Management policies and strategies; b. Implementing Risk Management policies; c. Developing a Risk Management culture at all levels of the organization; d. Implementing improvements in the competence of human resources related to Risk Management; e. Ensuring that the Risk Management function has been operating independently; f. Carrying out periodic reviews to ensure: 1. the accuracy of the Risk assessment methodology; 2. the adequacy of the implementation of Risk Management information system; 3. the accuracy of Risk Management policies and procedures and the determination of Risk limits and thresholds; and g. Carrying out other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. 15. Carrying out Internal Audit functions including: <ol style="list-style-type: none"> a. Developing an Internal Audit framework to identify, measure, monitor, and control all risks faced; b. Develop an Internal Audit framework to identify, measure, monitor, and control all risks faced; c. Ensuring that SPI obtains information related to developments, initiatives, projects, products, and operational changes as well as identified and anticipated Risks; d. Ensuring that appropriate corrective actions have been taken promptly for all SPI findings and recommendations; e. Ensuring that the head of SPI has the resources and budget needed to carry out duties and functions in accordance with the annual audit plan, in accordance with the company's financial capabilities; f. Ensuring that SOE's Subsidiaries have SPI; and g. Carry out other Internal Audit functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. 16. Carrying out Integrated Governance functions including: <ol style="list-style-type: none"> a. Preparing Integrated Governance policies; b. Directing, monitoring, and evaluating the implementation of Integrated Governance policies; c. Following up on the direction or advice of Board of Commissioners/Supervisory Board in order to improve Integrated Governance policies; and d. Implement other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister.
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Director of Finance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawahi <i>Finance Division</i> dan <i>Supply Chain Management Division</i>; 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi Perseroan pada Direktorat Keuangan dan serta bidang <i>supply chain management</i>; 3. Menjalankan peran dalam pembinaan terhadap PT Wijaya Karya Serang Panimbang dan PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur yang merupakan Entitas Anak Perusahaan serta Entitas Asosiasi yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan program kerja yang dibuat oleh Entitas Anak Perusahaan selaras dengan arahan strategis dan target Entitas Anak Perusahaan yang ditentukan oleh <i>Holding/Corporate</i>. b. Memastikan program kerja semua Entitas Anak Perusahaan yang berada dibawah koordinasi Direktur Pembina tidak ada yang overlap atau saling kanibalisasi. c. Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan sinergi bisnis dan operasional Entitas Anak Perusahaan dibawah koordinasi Direktur Pembina. d. Memantau dan membantu mengoptimalkan kinerja dari Entitas Anak Perusahaan dengan memberikan masukan dan arahan terkait bisnis, operasional dan organisasi. e. Memastikan masalah-masalah di Entitas Anak Perusahaan dan antar Entitas Anak Perusahaan telah dicoba untuk diselesaikan secara maksimal sebelum di eskalasikan ke <i>Holding/Corporate</i>. f. Memastikan dukungan-dukungan yang diperlukan dan telah disampaikan oleh Entitas Anak Perusahaan kepada <i>Holding/Corporate</i> terpenuhi. g. Memastikan interaksi antara AP dan <i>Holding/Corporate</i> sesuai dengan charter interaksi Entitas Anak Perusahaan dan <i>Holding/Corporate</i>. 4. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengusulkan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko secara komprehensif; b. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko; c. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; e. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Director of Finance	<ul style="list-style-type: none"> f. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: <ul style="list-style-type: none"> • Keakuratan metodologi penilaian Risiko; • kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; • ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan Risiko (<i>risk limit</i>) dan ambang batas (<i>threshold</i>); dan g. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. h. Melaksanakan pengurusan BUMN sesuai bidang pengelolaan Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri; i. Melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan bidang pengelolaan Risiko yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi, dan kebijakan BUMN yang telah ditetapkan; j. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; k. Melaksanakan penetapan langkah yang diperlukan untuk memastikan BUMN telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan menjaga agar kegiatan usaha BUMN tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan; l. Melaksanakan pemantauan dan menjaga kepatuhan BUMN terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh BUMN kepada pihak eksternal; m. Penetapan pola pengendalian <i>supply chain management</i>; n. Penetapan strategi dan kebijakan pengadaan jasa utama dan material strategis Perusahaan. <p>5. Melaksanakan fungsi Keuangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengurusan BUMN di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri; b. Melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan unit kerja dan Anak Perusahaan BUMN yang berada di bidang keuangan, serta berkoordinasi dengan direktur lainnya; c. Melaksanakan penyusunan dan penetapan pengaturan terkait keuangan dengan memperhatikan kebijakan BUMN dan prinsip kehati-hatian; d. Melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan BUMN; dan e. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya. <p>6. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. <p>7. Penetapan strategi terlaksananya perumusan dan pengkonsolidasian perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, kebijakan Perusahaan, <i>Key Performance Indicator</i>, kebijakan pokok dan anggaran Perusahaan;</p> <p>8. Penetapan perencanaan dan pengendalian hasil usaha konsolidasi tingkat Pusat, meliputi konsolidasi hasil usaha Divisi, Departemen, Entitas Anak, dan Entitas Asosiasi;</p> <p>9. Pengurusan terhadap fungsi bidang pada Direktorat Keuangan, yaitu <i>Finance Division</i>, <i>Supply Chain Management Division</i> dan Perusahaan Anak/Perusahaan Asosiasi serta memiliki kewenangan untuk melakukan segala tindakan pengurusan Perseroan untuk mewakili Direktorat yang dipimpin, dan/atau melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya dan/atau memberikan kuasa kepada <i>Senior Vice President</i>, <i>Senior Manager</i>, <i>Manager</i>, <i>Project Manager</i>, dan/atau pejabat lain baik dari dalam dan/atau luar Perseroan dalam rangka perolehan, pelaksanaan, dan penyelesaian Proyek, kegiatan operasional dan pengurusan Perseroan dalam ruang lingkup Direktornya dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prosedur Perseroan yang berlaku.</p> <p>10. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi pengendalian terhadap fungsi yang ada di dalam organ Perusahaan, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Finance Division</i>, termasuk di dalamnya pengendalian RKAP, kebijakan dan standar keuangan Perusahaan, strategi pendanaan Perusahaan, pengelolaan anggaran investasi Perusahaan, serta pengendalian keselarasan kinerja dengan rencana strategis Perusahaan, strategi konsolidasi kinerja Perusahaan, strategi jejaring institusi keuangan atau investor, perencanaan dan pengembangan usaha, termasuk di dalamnya strategi dan implementasi investasi, optimalisasi sinergi proses dan produk, strategi pengembangan usaha baru serta kebijakan pengendalian biaya usaha Perusahaan, penetapan kebijakan akuntansi dan perpajakan tingkat Perusahaan dan optimalisasi kearsipan Perusahaan; b. <i>Supply Chain management Division</i>, termasuk di dalamnya penyusunan strategi dan kebijakan Pengadaan dan Pengadaan terpadu serta optimalisasi jejaring pemasok/penyedia jasa di dalam dan luar negeri; c. Pembinaan keahlian teknis dan <i>Human Capital</i> di Direktorat yang menjadi tanggung jawabnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Leading the Finance Division and Supply Chain Management Division; 2. Carrying out all actions related to the management and development of the Company's functions in the Finance Directorate and the supply chain management sector; 3. Carrying out a role in developing PT Wijaya Karya Serang Panimbang and PT WIKATIRTA Jaya Jatiluhur, which are Subsidiaries and Associated Entities under his/her responsibility, including: <ul style="list-style-type: none"> a. Ensuring that the work programs created by Subsidiaries are in line with the strategic direction and targets of Subsidiaries determined by the Holding/Corporate. b. Ensuring that the work programs of all Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director do not overlap or cannibalize each other. c. Coordinating and optimizing the business and operational synergy of Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director. d. Monitoring and helping to optimize the performance of Subsidiaries by providing input and direction related to business, operations and organization. e. Ensure that problems in Subsidiaries and between Subsidiaries have been attempted to be resolved optimally before being escalated to Holding/Corporate. f. Ensure that the necessary support that has been delivered by Subsidiaries to Holding/Corporate is fulfilled. g. Ensure that the interaction between Subsidiaries and Holding/Corporate is in accordance with the Subsidiary and Holding/Corporate interaction charter.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Director of Finance	<ol style="list-style-type: none"> 4. Implement Risk Management functions including: <ol style="list-style-type: none"> a. Prepare and propose comprehensive Risk Management policies and strategies; b. Implement Risk Management policies; c. Develop a Risk Management culture at all levels of the organization; d. Implement human resource competency improvement related to Risk Management; e. Ensure that the Risk Management function has been operating independently; f. Conduct periodic reviews to ensure: <ul style="list-style-type: none"> • The accuracy of the Risk assessment methodology; • the adequacy of the implementation of the Risk Management information system; • the accuracy of Risk Management policies and procedures and the determination of Risk limits and thresholds; and g. Carrying out other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. h. Carrying out management of SOEs in accordance with the field of Risk management, guided by the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister; i. Carrying out the determination of strategies and policies in the field of Risk management that are its responsibility by taking into account the vision, strategy, and policies of SOE that have been determined; j. Carrying out coordination and providing direction for the implementation of the principles of Good Corporate Governance; k. Carrying out the determination of steps needed to ensure that SOE has complied with all laws and regulations and ensuring that SOE business activities do not deviate from the provisions of laws and regulations; l. Carrying out monitoring and maintaining SOE compliance with all agreements and commitments made by SOE to external parties; m. Determination of supply chain management control patterns; n. Determination of strategy and policy for procurement of main services and strategic materials of the Company. 5. Carrying out the Finance function including: <ol style="list-style-type: none"> a. Carrying out the management of SOE in the field of financial management in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister; b. Carrying out the determination of strategy and policy of work units and Subsidiaries of SOE in the field of finance, and coordinating with other directors; c. Carrying out the preparation and determination of financial regulations by taking into account SOE policies and the principle of prudence; d. Carrying out the preparation and presentation of SOE financial reports; and e. Carrying out other authorities, duties, and responsibilities related to its functions. 6. Carrying out the Integrated Governance function including: <ol style="list-style-type: none"> a. Preparing Integrated Governance policies; b. Directing, monitoring, and evaluating the implementation of Integrated Governance policies; c. Following up on the direction or advice of Board of Commissioners/Supervisory Board in order to improve the Integrated Governance policies; and Implement other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. 7. Determination of strategies for the formulation and consolidation of short-term and long-term planning, Company policies, Key Performance Indicators, main policies and the Company's budget; 8. Determination of planning and control of consolidated business results at the Central level, including consolidation of business results of Divisions, Departments, Subsidiaries, and Associated Entities; 9. Management of functions in the Finance Directorate, namely the Finance Division, Supply Chain Management Division and Subsidiaries/Associated Entities and has the authority to carry out all management actions of the Company to represent the Directorate led, and/or sign documents required for its operational activities and/or grant power of attorney to the Senior Vice President, Senior Manager, Manager, Project Manager, and/or other officials both from within and/or outside the Company in the context of obtaining, implementing, and completing Projects, operational activities and management of the Company within the scope of its Directorate while still paying attention to the applicable Articles of Association and Company Procedures. 10. Determination of the pattern of coaching, development, coordination, consolidation of control over the functions within the Company's organs, which include: <ol style="list-style-type: none"> a. Finance Division, including control of RKAP, Company financial policies and standards, Company funding strategy, management of Company investment budget, and control of performance alignment with Company strategic plan, Company performance consolidation strategy, financial institution or investor network strategy, business planning and development, including investment strategy and implementation, optimization of process and product synergy, new business development strategy and Company business cost control policy, determination of Company level accounting and taxation policy and optimization of Company archives; b. Supply Chain Management Division, including preparation of integrated Procurement and Procurement strategy and policy and optimization of supplier/service provider network in domestic and overseas; c. Development of technical expertise and Human Capital in the Directorate under his/her responsibility.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Hananto Aji	Direktur Operasi I Director of Operations I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawahi <i>Infrastructure 1 Division, Infrastructure 2 Division, Building Division, dan Corporate Marketing Division</i>. 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi perusahaan Perseroan pada Direktorat Operasional 1, yaitu di bidang usaha jasa konstruksi infrastruktur dan pengembangan perolehan pasar; 3. Menjalankan peran dalam pembinaan terhadap PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang merupakan Entitas Anak Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan program kerja yang dibuat oleh Entitas Anak Perusahaan selaras dengan arahan strategis dan target Entitas Anak Perusahaan yang ditentukan oleh <i>Holding/Corporate</i>. b. Memastikan program kerja semua Entitas Anak Perusahaan yang berada dibawah koordinasi Direktur Pembina tidak ada yang <i>overlap</i> atau saling kanibalisasi. c. Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan sinergi bisnis dan operasional Entitas Anak Perusahaan dibawah koordinasi Direktur Pembina. d. Memantau dan membantu mengoptimalkan kinerja dari Entitas Anak Perusahaan dengan memberikan masukan dan arahan terkait bisnis, operasional dan organisasi. e. Memastikan masalah-masalah di Entitas Anak Perusahaan dan antar Entitas Anak Perusahaan telah dicoba untuk diselesaikan secara maksimal sebelum dieskalasikan ke <i>Holding/Corporate</i>. f. Memastikan dukungan-dukungan yang diperlukan dan telah disampaikan oleh Entitas Anak Perusahaan kepada <i>Holding/Corporate</i> terpenuhi. g. Memastikan interaksi antara AP dan <i>Holding/Corporate</i> sesuai dengan <i>charter</i> interaksi Entitas Anak Perusahaan dan <i>Holding/Corporate</i>. 4. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengusulkan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko secara komprehensif; b. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko; c. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; e. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; f. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. Keakuratan metodologi penilaian Risiko; 2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; 3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan Risiko (<i>risk limit</i>) dan ambang batas (<i>threshold</i>); dan g. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. 5. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan d. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. 6. Penetapan sasaran strategis, strategi pokok, kebijakan pokok dan pengendalian hasil usaha konstruksi infrastruktur dan bangunan gedung; 7. Penetapan sasaran pasar dan pengembangan pasar dini sesuai dengan lingkup tugasnya; 8. Penetapan pola pengendalian konstruksi dan komersial; 9. Penetapan estimasi biaya, pengelolaan kontrak, dukungan teknis dan spesifikasi, serta konsultasi dan kolaborasi dalam perolehan proyek konstruksi; 10. Penetapan strategi pengembangan perolehan pasar potensial dalam unit usahanya, teknologi, rekayasa dan manajemen konstruksi; 11. Pengusahaan unit usaha strategis yang menjadi bidang usaha Direktorat Operasional 1, yaitu <i>Infrastructure 1 Division, Infrastructure 2 Division, Building Division, Corporate Marketing Division</i> mencakup fungsi <i>engineering, quantity survey, pengembangan usaha dan pemasaran, manajemen kontrak, konstruksi, keuangan, perencanaan dan pengendalian proyek, quality, health, safety and environment</i> di Direktoratannya; 12. Pengurusan terhadap fungsi-fungsi pada Direktorat Operasional 1 serta memiliki kewenangan untuk melakukan segala tindakan pengurusan Perseroan untuk mewakili Direktorat yang dipimpin, dan/atau melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya dan/atau memberikan kuasa kepada <i>Senior Vice President, General Manager, Manager, Project Manager</i>, dan/atau pejabat lain baik dari dalam dan/atau luar Perseroan dalam rangka perolehan, pelaksanaan, dan penyelesaian Proyek, kegiatan operasional dan pengurusan Perseroan dalam ruang lingkup Direktoratannya dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prosedur Perseroan yang berlaku;

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Hananto Aji	Direktur Operasi I Director of Operations I	<p>13. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi, dan pengendalian terhadap fungsi yang ada di dalam organ Perusahaan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemasaran, termasuk di dalamnya penetapan strategi perintisan pasar dan perolehan kontrak di wilayah operasi yang menjadi tanggung jawabnya, optimalisasi pelayanan pelanggan, strategi perolehan informasi pasar dini Perusahaan, pengendalian pemasaran antar Division, optimalisasi pengelolaan wilayah, optimalisasi promosi pemasaran, dan penetapan strategi Kerja Sama Operasi (KSO) mitra usaha; Departemen Operasi, termasuk di dalamnya optimalisasi aplikasi <i>Enterprise Resource Planning (ERP)</i>, <i>Lean Construction</i>, <i>"Knowledge Management"</i>, strategi standarisasi dan pengembangan rekayasa konstruksi dan metode konstruksi, strategi pengendalian produksi tingkat Perusahaan dan yang bersifat Kerja Sama Operasi (KSO), Pengendalian hasil manajemen <i>review</i> dan tindak lanjutnya, strategi Manajemen kontrak, optimalisasi klaim, optimalisasi pengelolaan risiko; <p>14. Pembinaan keahlian teknis dan <i>Human Capital</i> di Direktora yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> Leading Infrastructure 1 Division, Infrastructure 2 Division, Building Division, and Corporate Marketing Division. Carrying out all actions related to the management and development of the Company's business functions in the Directorate of Operational 1, namely in the field of infrastructure construction services and market acquisition development; Carrying out a role in coaching PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, which is a Subsidiary under his/her responsibility, including: <ol style="list-style-type: none"> Ensuring that the work program created by the Subsidiary is in line with the strategic direction and targets of Subsidiary determined by the Holding/Corporate. Ensuring that the work programs of all Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director do not overlap or cannibalize each other. Coordinating and optimizing the business and operational synergy of Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director. Monitoring and helping to optimize the performance of Subsidiaries by providing input and direction related to business, operations and organization. Ensure that problems in Subsidiaries and between Subsidiaries have been attempted to be resolved optimally before being escalated to Holding/Corporate. Ensure that the necessary supports that have been submitted by Subsidiaries to Holding/Corporate are fulfilled. Ensure that the interaction between Subsidiaries and Holding/Corporate is in accordance with the Subsidiary and Holding/Corporate interaction charter. Implement Risk Management functions including: <ol style="list-style-type: none"> Prepare and propose comprehensive Risk Management policies and strategies; Implement Risk Management policies; Develop a Risk Management culture at all levels of the organization; Implement human resource competency improvement related to Risk Management; Ensure that the Risk Management function has been operating independently; Conduct periodic reviews to ensure: 1. The accuracy of Risk assessment methodology; 2. the adequacy of the implementation of Risk Management information system; 3. the accuracy of Risk Management policies and procedures and the determination of Risk limits and thresholds; and Carrying out other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. Carrying out Integrated Governance functions: <ol style="list-style-type: none"> Preparing Integrated Governance policies; Directing, monitoring, and evaluating the implementation of Integrated Governance policies; Following up on the direction or advice of the Board of Commissioners/Supervisory Board in order to improve Integrated Governance policies; and Carrying out other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. Determination of strategic targets, main strategies, main policies and control of infrastructure and building construction business results; Determination of market targets and early market development in accordance with the scope of his/her duties; Determination of construction and commercial control patterns; Determination of cost estimates, contract management, technical support and specifications, as well as consultation and collaboration in obtaining construction projects; Determination of development strategies for obtaining potential markets in its business units, technology, engineering and construction management; Management of strategic business units that are the business fields of the Directorate of Operational 1, namely Infrastructure 1 Division, Infrastructure 2 Division, Building Division, Corporate Marketing Division covering engineering functions, quantity surveys, business development and marketing, contract management, construction, finance, project planning and control, quality, health, safety and environment in its Directorate; Management of the functions in the Directorate of Operational 1 and has the authority to carry out all management actions of the Company to represent the Directorate led, and/or to sign documents required for its operational activities and/or to grant power of attorney to the Senior Vice President, General Manager, Manager, Project Manager, and/or other officials both from within and/or outside the Company in the context of obtaining, implementing, and completing Projects, operational activities and management of the Company within the scope of its Directorate while still paying attention to the applicable Articles of Association and Company Procedures; Determination of the pattern of guidance, development, coordination, consolidation, and control of the functions within the Company's organs, which include: <ol style="list-style-type: none"> Marketing, including the determination of market pioneering strategies and contract acquisition in the operational areas under his/her responsibility, optimization of customer service, early market information acquisition strategies for the Company, marketing control between Divisions, optimization of regional management, optimization of marketing promotion, and determination of Joint Operation (JO) strategies for business partners;

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Hananto Aji	Director of Operations I	b. Operations Department, including the optimization of Enterprise Resource Planning (ERP) applications, Lean Construction, "Knowledge Management", standardization strategies and development of construction engineering and construction methods, production control strategies at the Company level and those of a Joint Operation (JO) nature, Control of management review results and their follow-up, contract management strategies, optimization of claims, optimization of risk management; 14. Development of technical expertise and Human Capital in the Directorates under his/her responsibility.
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operations II	1. Membawahi <i>Engineering, Procurement, Construction and Commissioning</i> dan <i>Asset Management Division</i> ; 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pembinaan fungsi perusahaan Perseroan pada Direktorat Operasional 2, yaitu di bidang usaha strategis konstruksi dan EPC Energi, Industrial Plant serta <i>Petrochemical</i> dan <i>Oil & Gas</i> , manajemen aset serta operasional investasi; 3. Menjalankan peran dalam pembinaan terhadap PT Wijaya Karya Rekrayasa Konstruksi serta PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi yang merupakan Entitas Anak Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi: a. Memastikan program kerja yang dibuat oleh Entitas Anak Perusahaan selaras dengan arahan strategis dan target Entitas Anak Perusahaan yang ditentukan oleh <i>Holding/Corporate</i> . b. Memastikan program kerja semua Entitas Anak Perusahaan yang berada dibawah koordinasi Direktur Pembina tidak ada yang <i>overlap</i> atau saling kanibalisasi. c. Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan sinergi bisnis dan operasional Entitas Anak Perusahaan dibawah koordinasi Direktur Pembina. d. Memantau dan membantu mengoptimalkan kinerja dari Entitas Anak Perusahaan dengan memberikan masukan dan arahan terkait bisnis, operasional dan organisasi. e. Memastikan masalah-masalah di Entitas Anak Perusahaan dan antar Entitas Anak Perusahaan telah dicoba untuk diselesaikan secara maksimal sebelum dieskalasikan ke <i>Holding/Corporate</i> . f. Memastikan dukungan-dukungan yang diperlukan dan telah disampaikan oleh Entitas Anak Perusahaan kepada <i>Holding/Corporate</i> terpenuhi. g. Memastikan interaksi antara AP dan <i>Holding/Corporate</i> sesuai dengan charter interaksi Entitas Anak Perusahaan dan <i>Holding/Corporate</i> . 4. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko meliputi: a. Menyusun dan mengusulkan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko secara komprehensif; b. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko; Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; c. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. Keakuratan metodologi penilaian Risiko; 2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; 3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan Risiko (<i>risk limit</i>) dan ambang batas (<i>threshold</i>); dan d. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. 5. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi meliputi: a. Menyusun kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan d. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. 6. Penetapan sasaran pasar dan pengembangan pasar dini sesuai dengan lingkup tugasnya; 7. Penetapan pola pengendalian konstruksi, komersial dan <i>commissioning</i> ; 8. Penetapan strategi pengembangan perolehan pasar potensial dalam unit usahanya, teknologi, manajemen konstruksi dan manajemen <i>commissioning</i> ; 9. Penetapan pengelolaan dan pengendalian portofolio usaha investasi Perseroan meliputi sektor infrastruktur, energi, dan industrial serta properti dan Gedung untuk mendapatkan optimum return on investment. 10. Penetapan pola pengembangan sistem Manajemen Keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan, termasuk di dalamnya perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan sistem manajemen di tingkat Perusahaan; 11. Penetapan pola pengembangan sistem manajemen Perusahaan, sistem manajemen mutu, termasuk di dalamnya perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan sistem manajemen mutu di tingkat Perusahaan serta strategi dan kebijakan fungsi engineering; 12. Pengusahaan unit usaha strategis yang menjadi bidang usaha Direktorat Operasional 2, yaitu <i>Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPCC) Division</i> , dan <i>Asset Management Division</i> mencakup fungsi engineering, pengembangan usaha dan pemasaran, manajemen kontrak, konstruksi, <i>commissioning</i> , keuangan, perencanaan dan aset manajemen di Direktoratnnya; 13. Pengurusan terhadap fungsi-fungsi pada Direktorat Operasional 2 serta memiliki kewenangan untuk melakukan segala tindakan pengurusan Perseroan untuk mewakili Direktorat yang dipimpin, dan/atau melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya dan/atau memberikan kuasa kepada <i>Senior Vice President, General Manager, Manager, Project Manager</i> , dan/atau pejabat lain baik dari dalam dan/atau luar Perseroan dalam rangka perolehan, pelaksanaan, dan penyelesaian Proyek, kegiatan operasional dan pengurusan Perseroan dalam ruang lingkup Direktoratnnya dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prosedur Perseroan yang berlaku;

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operations II	<p>14. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi, dan pengendalian terhadap fungsi yang ada di dalam organ Perusahaan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemasaran, termasuk di dalamnya penetapan strategi perintisan pasar dan perolehan kontrak di wilayah operasi yang menjadi tanggung jawabnya, optimalisasi pelayanan pelanggan, strategi perolehan informasi pasar dini Perusahaan, pengendalian pemasaran antar Division, optimalisasi pengelolaan wilayah, optimalisasi promosi pemasaran, dan penetapan strategi Kerja Sama Operasi (KSO) mitra usaha; Departemen Operasi, termasuk di dalamnya optimalisasi aplikasi <i>Enterprise Resource Planning (ERP)</i>, <i>Lean Construction</i>, "<i>Knowledge Management</i>", strategi standarisasi dan pengembangan metode konstruksi, strategi pengendalian produksi tingkat Perusahaan dan yang bersifat Kerja Sama Operasi (KSO), pengendalian hasil manajemen <i>review</i> dan tindak lanjutnya, strategi manajemen kontrak, optimalisasi klaim, optimalisasi pengelolaan risiko; <i>Asset Management</i>, termasuk didalamnya mempunyai fungsi utama dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi piutang tingkat perusahaan, pengelolaan, pengendalian dan penyelesaian piutang bermasalah, melakukan koordinasi dengan pihak <i>ekstern</i> dan <i>intern</i> terkait pengelolaan piutang, penyusunan pelaporan piutang dan pengawasan serta pengendalian tertib administrasi pengelolaan piutang di seluruh organ/unit kerja perusahaan; Pembinaan keahlian teknis dan <i>Human Capital</i> di Direktorat yang menjadi tanggung jawabnya. Pembinaan keahlian <i>Investment Operation</i> termasuk di dalamnya, yaitu tercapainya peningkatan <i>return growth portfolio</i> usaha perseroan dan Entitas Anak/Asosiasi melalui pengelolaan/pengendalian maupun restrukturisasi <i>portfolio</i> usaha baik di induk Perseroan maupun Entitas Anak/Asosiasi; Pembinaan keahlian teknis dan <i>human capital</i> di Direktorat yang menjadi tanggung jawabnya. <ol style="list-style-type: none"> Leading the Engineering, Procurement, Construction and Commissioning and Asset Management Division; Carrying out all actions related to the development of the Company's business functions in the Directorate of Operational 2, namely in the strategic business fields of construction and EPC Energy, Industrial Plant and Petrochemical and Oil & Gas, asset management and investment operations; Carrying out a role in developing PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi and PT Wijaya Karya Industri and Konstruksi which are Subsidiaries that are under his/her responsibility, including: <ol style="list-style-type: none"> Ensuring that the work programs created by the Subsidiaries are in line with the strategic direction and targets of Subsidiaries determined by the Holding/Corporate. Ensuring that the work programs of all Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director do not overlap or cannibalize each other. Coordinating and optimizing the business and operational synergy of Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director. Monitoring and helping to optimize the performance of Subsidiaries by providing input and direction related to business, operations and organization. Ensure that problems in Subsidiaries and between Subsidiaries have been attempted to be resolved optimally before being escalated to Holding/Corporate. Ensure that the necessary support that has been delivered by Subsidiaries to Holding/Corporate is fulfilled. Ensure that the interaction between Subsidiaries and Holding/Corporate is in accordance with the Subsidiary and Holding/Corporate interaction charter. Implement Risk Management functions including: <ol style="list-style-type: none"> Prepare and propose comprehensive Risk Management policies and strategies; Implement Risk Management policies; Develop a Risk Management culture at all levels of the organization; Implement human resource competency improvement related to Risk Management; Ensure that the Risk Management function has operated independently; Conduct periodic reviews to ensure: 1. The accuracy of Risk assessment methodology; 2. the adequacy of the implementation of Risk Management information system; 3. the accuracy of Risk Management policies and procedures and the determination of Risk limits and thresholds; and Carrying out other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. Carrying out Integrated Governance functions including: <ol style="list-style-type: none"> Preparing Integrated Governance policies; Directing, monitoring, and evaluating the implementation of Integrated Governance policies; Following up on the direction or advice of the Board of Commissioners/Supervisory Board in order to improve the Integrated Governance policies; and Carrying out other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. Determining market targets and early market development in accordance with the scope of his/her duties; Determining construction, commercial and commissioning control patterns; Determining potential market acquisition development strategies in his/her business units, technology, construction management and commissioning management; Determining the management and control of the Company's investment business portfolio including the infrastructure, energy, and industrial sectors as well as property and buildings to obtain optimum return on investment. Determination of the development pattern of the Occupational Health and Safety Management system, including the planning, development, and implementation of the management system at Corporate level; Determination of the development pattern of the Company's management system, quality management system, including the planning, development, and implementation of the quality management system at Corporate level as well as the strategy and policy of the engineering function; Management of strategic business units that are the business fields of the Directorate of Operational 2, namely the Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPCC) Division, and the Asset Management Division covering the functions of engineering, business development and marketing, contract management, construction, commissioning, finance, planning and asset management in his/her Directorate;

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operations II	<ol style="list-style-type: none"> 13. Management of the functions in the Directorate of Operational 2 and has the authority to carry out all management actions of the Company to represent the Directorate led, and/or sign documents required for its operational activities and/or grant power of attorney to the Senior Vice President, General Manager, Manager, Project Manager, and/or other officials both from within and/or outside the Company in the context of obtaining, implementing, and completing Projects, operational activities and management of the Company within the scope of its Directorate while still paying attention to the applicable Articles of Association and Company Procedures; 14. Determination of the pattern of guidance, development, coordination, consolidation, and control of functions within the Company's organs, which include: <ol style="list-style-type: none"> a. Marketing, including the determination of market pioneering strategies and contract acquisition in the operational areas under his/her responsibility, optimization of customer service, early market information acquisition strategies of the Company, marketing control between Divisions, optimization of regional management, optimization of marketing promotion, and determination of the strategy for Joint Operations (JO) of business partners; b. Operations Department, including optimizing Enterprise Resource Planning (ERP) applications, Lean Construction, "Knowledge Management", standardization strategies and development of construction methods, production control strategies at the Company level and those of a Joint Operation (JO) nature, control of management review results and their follow-up, contract management strategies, claim optimization, risk management optimization; c. Asset Management, including having the main function in designing and developing a company-level receivables information system, managing, controlling and resolving problematic receivables, coordinating with external and internal parties related to receivables management, compiling receivables reporting and supervising and controlling the orderly administration of receivables management in all organs/work units of the company; d. Developing technical and Human Capital expertise in the Directorate under his/her responsibility. e. Developing Investment Operation expertise including achieving increased return growth in the company's business portfolio and Subsidiaries/Associated Entities through managing/controlling and restructuring the business portfolio both in the parent Company and Subsidiaries/Associations; f. Development of technical expertise and human capital in the Directorate under his/her responsibility.
Rudy Hartono*	Direktur Operasi III Director of Operations II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawahi <i>Building and Overseas Division</i> dan <i>Asset Management</i>; 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi perusahaan Perseroan pada Direktorat Operasional 3, yaitu di bidang usaha jasa konstruksi bangunan gedung bertingkat tinggi dan bidang usaha konstruksi di luar negeri serta manajemen aset; 3. Menjalankan peran dalam pembinaan terhadap PT Wijaya Karya Beton Tbk yang merupakan Entitas Anak Perusahaan yang menjadi tanggungjawabnya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan program kerja yang dibuat oleh Entitas Anak Perusahaan selaras dengan arahan strategis dan target Entitas Anak Perusahaan yang ditentukan oleh <i>Holding/Corporate</i>. b. Memastikan program kerja semua Entitas Anak Perusahaan yang berada dibawah koordinasi Direktur Pembina tidak ada yang <i>overlap</i> atau saling kanibalasi. c. Mengoordinasikan dan mengoptimalkan sinergi bisnis dan operasional Entitas Anak Perusahaan dibawah koordinasi Direktur Pembina. d. Memantau dan membantu mengoptimalkan kinerja dari Entitas Anak Perusahaan dengan memberikan masukan dan arahan terkait bisnis, operasional dan organisasi. e. Memastikan masalah-masalah di Entitas Anak Perusahaan dan antar Entitas Anak Perusahaan telah dicoba untuk diselesaikan secara maksimal sebelum dieskalasikan ke <i>Holding/Corporate</i>. f. Memastikan dukungan-dukungan yang diperlukan dan telah disampaikan oleh Entitas Anak Perusahaan kepada <i>Holding/Corporate</i> terpenuhi. g. Memastikan interaksi antara AP dan <i>Holding/Corporate</i> sesuai dengan charter interaksi Entitas Anak Perusahaan dan <i>Holding/Corporate</i>. 4. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengusulkan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko secara komprehensif; b. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko; c. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; e. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; f. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. keakuratan metodologi penilaian Risiko; 2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; 3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan Risiko (<i>risk limit</i>) dan ambang batas (<i>threshold</i>); dan g. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. 5. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan d. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. 6. Penetapan sasaran pasar dan pengembangan pasar dini sesuai dengan lingkup tugasnya; 7. Penetapan pola pengendalian konstruksi dan komersial; 8. Penetapan strategi pengembangan perolehan pasar potensial dalam unit usahanya, teknologi dan manajemen konstruksi; 9. Penetapan pengendalian, pengelolaan dan penyelesaian piutang bermasalah dan aset perusahaan di seluruh organ/unit kerja perusahaan; 10. Pengusahaan unit usaha strategis yang menjadi bidang usaha Direktorat Operasional 3, yaitu <i>Building and Overseas Division</i>, <i>Asset Management Division</i> mencakup fungsi <i>engineering</i>, pengembangan usaha dan pemasaran, manajemen kontrak, konstruksi, keuangan, perencanaan dan pengendalian proyek, <i>quality, health, safety and environment</i> di Direktoratatnya;

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Rudy Hartono*	Direktur Operasi III Director of Operations III	<ul style="list-style-type: none"> 11. Pengurusan terhadap fungsi-fungsi pada Direktorat Operasional 3 serta memiliki kewenangan untuk melakukan segala tindakan pengurusan Perseroan untuk mewakili Direktorat yang dipimpin, dan/atau melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya dan/atau memberikan kuasa kepada <i>Senior Vice President, General Manager, Manager, Project Manager</i>, dan/atau pejabat lain baik dari dalam dan/atau luar Perseroan dalam rangka perolehan, pelaksanaan, dan penyelesaian Proyek, kegiatan operasional dan pengurusan Perseroan dalam ruang lingkup Direktoratnya dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prosedur Perseroan yang berlaku; 12. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi, dan pengendalian terhadap fungsi yang ada di dalam organ Perusahaan, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemasaran, termasuk di dalamnya penetapan strategi perintisan pasar dan perolehan kontrak <i>single product</i> di wilayah operasi dalam negeri dan luar negeri, optimalisasi pelayanan pelanggan, strategi perolehan informasi pasar dari Perusahaan, pengendalian pemasaran antar Divisi, optimalisasi pengelolaan wilayah, optimalisasi promosi pemasaran, dan penetapan strategi Kerja Sama Operasi (KSO) mitra usaha; b. Departemen Operasi, termasuk di dalamnya, optimalisasi aplikasi "<i>Knowledge Management</i>", strategi standarisasi dan pengembangan metode konstruksi, strategi pengendalian produksi tingkat Perusahaan dan yang bersifat Kerja Sama Operasi (KSO), Pengendalian hasil manajemen <i>review</i> dan tindak lanjutnya, strategi administrasi kontrak, optimalisasi klaim, optimalisasi pengelolaan risiko; c. <i>Asset Management</i>, termasuk di dalamnya mempunyai fungsi utama dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi piutang tingkat perusahaan, pengelolaan, pengendalian dan penyelesaian piutang bermasalah, melakukan koordinasi dengan pihak <i>ekstern</i> dan <i>intern</i> terkait pengelolaan piutang, penyusunan pelaporan piutang, dan pengawasan serta pengendalian tertib administrasi pengelolaan piutang di seluruh organ/unit kerja perusahaan; d. <i>Project Asset Management</i>, termasuk di dalamnya perancangan dan pengembangan sistem informasi aset tingkat perusahaan, pengelolaan, pengendalian dan aset untuk korporasi dan proyek, melakukan koordinasi dengan pihak <i>ekstern</i> dan <i>intern</i> terkait pengelolaan aset, penyusunan pelaporan aset, dan pengawasan serta pengendalian tertib administrasi pengelolaan aset di seluruh organ/unit kerja Perseroan; e. Pembinaan keahlian teknis dan <i>Human Capital</i> di Direktorat yang menjadi tanggung jawabnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Leading the Building and Overseas Division and Asset Management; 2. Carrying out all actions related to the management and development of the Company's business functions in the Directorate of Operational 3, namely in the field of high-rise building construction services and overseas construction as well as asset management; 3. Carrying out a role in developing PT Wijaya Karya Beton Tbk, which is a Subsidiary that is under his/her responsibility, including: <ul style="list-style-type: none"> a. Ensuring that the work program created by the Subsidiary is in line with the strategic direction and targets of Subsidiary determined by the Holding/Corporate. b. Ensuring that the work programs of all Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director do not overlap or cannibalize each other. c. Coordinating and optimizing the business and operational synergy of Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director. d. Monitoring and helping to optimize the performance of the Subsidiaries by providing input and direction related to business, operations and organization. e. Ensure that problems in Subsidiaries and between Subsidiaries have been attempted to be resolved optimally before being escalated to Holding/Corporate. f. Ensure that the necessary support that has been delivered by Subsidiaries to Holding/Corporate is fulfilled. g. Ensure that the interaction between Subsidiaries and Holding/Corporate is in accordance with the Subsidiary and Holding/Corporate interaction charter. 4. Implement Risk Management functions including: <ul style="list-style-type: none"> a. Prepare and propose comprehensive Risk Management policies and strategies; b. Implement Risk Management policies; c. Develop a Risk Management culture at all levels of the organization; d. Implement human resource competency improvement related to Risk Management; e. Ensure that the Risk Management function has been operating independently; f. Conduct periodic reviews to ensure: 1. the accuracy of Risk assessment methodology; 2. the adequacy of the implementation of Risk Management information system; 3. the accuracy of Risk Management policies and procedures and the determination of Risk limits and thresholds; and g. Carrying out other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. 5. Carrying out Integrated Governance functions including: <ul style="list-style-type: none"> a. Preparing Integrated Governance policies; b. Directing, monitoring, and evaluating the implementation of Integrated Governance policies; c. Following up on the direction or advice of the Board of Commissioners/Supervisory Board in order to improve Integrated Governance policies; and d. Carrying out other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. 6. Determining market targets and early market development in accordance with the scope of his/her duties; 7. Determining construction and commercial control patterns; 8. Determining strategies for developing potential market acquisition in his/her business units, construction technology and management; 9. Determination of control, management and settlement of problematic receivables and company assets in all organs/work units of the company; 10. Management of strategic business units that are the business fields of Directorate of Operational 3, namely Building and Overseas Division, Asset Management Division covering engineering functions, business development and marketing, contract management, construction, finance, project planning and control, quality, health, safety and environment in his/her Directorate;

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Rudy Hartono*	Direktur Operasi III Director of Operations II	<ol style="list-style-type: none"> 11. Management of functions in the Directorate of Operational 3 and having the authority to carry out all management actions of the Company to represent the Directorate led, and/or signing documents required for its operational activities and/or granting power of attorney to Senior Vice President, General Manager, Manager, Project Manager, and/or other officials both from within and/or outside the Company in the context of obtaining, implementing, and completing Projects, operational activities and management of the Company within the scope of his/her Directorate while still considering the applicable Articles of Association and Company Procedures; 12. Determination of the pattern of coaching, development, coordination, consolidation, and control of the functions within the Company's organs, which include: <ol style="list-style-type: none"> a. Marketing, including the determination of market pioneering strategies and obtaining single product contracts in domestic and overseas operational areas, optimizing customer service, early market information acquisition strategies for the Company, marketing control between Divisions, optimizing regional management, optimizing marketing promotions, and determining strategies for Joint Operations (JO) for business partners; b. Operations Department, including the optimization of "Knowledge Management" applications, standardization strategies and development of construction methods, production control strategies at the Company level and those of a Joint Operations (JO) nature. Control of management review results and their follow-up, contract administration strategies, optimizing claims, optimizing risk management; c. Asset Management, including having the main function in designing and developing a company-level receivables information system, managing, controlling and resolving problematic receivables, coordinating with external and internal parties related to receivables management, compiling receivables reporting, and supervising and controlling the orderly administration of receivables management in all organs/work units of the company; d. Project Asset Management, including the design and development of corporate-level asset information systems, management, control and assets for corporation and projects, coordinating with external and internal parties related to asset management, preparation of asset reporting, and supervision and control of orderly administration of asset management in all organs/work units of the Company; e. Development of technical expertise and Human Capital in the Directorate under his/her responsibility.
Ayu Widya Kiswari*	Direktur Quality, Health, Safety and Environment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawahi <i>Quality Safety, Health, Environment and Engineering Division, Supply Chain Management Division, Information Technology Division</i>; 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi Perseroan pada Direktorat <i>Quality, Health, Safety and Environment</i>, yaitu di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, bidang pengembangan kualitas dan sistem manajemen Perusahaan, bidang pengembangan (termasuk BIM & riset), bidang <i>engineering</i>, bidang teknologi informasi, digital, serta bidang <i>supply chain management</i>; 3. Menjalankan peran dalam pembinaan terhadap PT Wijaya Karya Bitumen yang merupakan Entitas Anak Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan program kerja yang dibuat oleh Entitas Anak Perusahaan selaras dengan arahan strategis dan target Entitas Anak Perusahaan yang ditentukan oleh <i>Holding/Corporate</i>. b. Memastikan program kerja semua Entitas Anak Perusahaan yang berada dibawah koordinasi Direktur Pembina tidak ada yang <i>overlap</i> atau saling kanibalasi. c. Mengoordinasikan dan mengoptimalkan sinergi bisnis dan operasional Entitas Anak Perusahaan dibawah koordinasi Direktur Pembina. d. Memantau dan membantu mengoptimalkan kinerja dari Entitas Anak Perusahaan dengan memberikan masukan dan arahan terkait bisnis, operasional dan organisasi. e. Memastikan masalah-masalah di Entitas Anak Perusahaan dan antar Entitas Anak Perusahaan telah dicoba untuk diselesaikan secara maksimal sebelum dieskalasikan ke <i>Holding/Corporate</i>. f. Memastikan dukungan-dukungan yang diperlukan dan telah disampaikan oleh Entitas Anak Perusahaan kepada <i>Holding/Corporate</i> terpenuhi. g. Memastikan interaksi antara AP dan <i>Holding/Corporate</i> sesuai dengan <i>charter</i> interaksi Entitas Anak Perusahaan dan <i>Holding/Corporate</i>. 4. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengusulkan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko secara komprehensif; b. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko; c. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; e. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; f. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. keakuratan metodologi penilaian Risiko; kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; 3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan Risiko (<i>risk limit</i>) dan ambang batas (<i>threshold</i>); dan g. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. 5. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan d. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Ayu Widya Kiswari*	Direktur Quality, Health, Safety and Environment	<ol style="list-style-type: none"> 6. Penetapan pola pengembangan sistem Manajemen Keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan, termasuk di dalamnya perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan sistem manajemen di tingkat Perusahaan; 7. Penetapan pola pengembangan sistem manajemen Perusahaan, sistem manajemen mutu, termasuk di dalamnya perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan sistem manajemen mutu di tingkat Perusahaan serta strategi dan kebijakan fungsi enjiniring; 8. Penetapan strategi dan pola pengembangan sistem informasi, termasuk di dalamnya strategi dan pola pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi, optimalisasi aplikasi, perangkat lunak dan perangkat keras, optimalisasi jejaring teknologi informasi tingkat Perusahaan, serta pelaksanaan <i>enterprise resources planning</i> tingkat Perusahaan; 9. Penetapan pola pengendalian <i>supply chain management</i>; 10. Penetapan strategi dan kebijakan pengadaan jasa utama dan material strategis Perseroan; 11. Pengurusan terhadap fungsi bidang pada Direktorat Quality, Health, Safety, and Environment, yaitu Quality, Health, Safety, Environment and Engineering Division, Supply Chain Management Division, Information Technology Division, serta memiliki kewenangan untuk melakukan segala tindakan pengurusan Perseroan untuk mewakili Direktorat yang dipimpin, dan/atau melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya dan/atau memberikan kuasa kepada Senior Vice President, Senior Manager, Manager, Project Manager, dan/atau pejabat lain baik dari dalam dan/atau luar Perseroan dalam rangka perolehan, pelaksanaan, dan penyelesaian Proyek, kegiatan operasional dan pengurusan Perseroan dalam ruang lingkup Direktoratny dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prosedur Perseroan yang berlaku; 12. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi, pengendalian terhadap fungsi yang ada di dalam organ Perseroan, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Quality, Safety, Health, Environment and Engineering Division, termasuk didalamnya rencana jangka panjang pengembangan dan aplikasi sistem manajemen Lingkungan, Keselamatan Kesehatan Kerja (K3L), rencana jangka panjang pengembangan sistem, strategi kebijakan, pengembangan dan optimalisasi <i>Research & Development</i> (R&D), <i>Knowledge Management</i>, serta <i>Building Information Modeling</i>, sesuai dengan Visi dan Misi organisasi yang telah ditetapkan; b. Supply Chain Management Division, termasuk di dalamnya penyusunan strategi dan kebijakan Pengadaan dan Pengadaan terpadu serta optimalisasi jejaring pemasok/penyedia jasa di dalam dan luar negeri. c. Information Technology Division, termasuk didalamnya penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi serta <i>enterprise resource planning</i> tingkat perusahaan. d. Pembinaan keahlian teknis dan <i>Human Capital</i> di Direktorat yang menjadi tanggung jawabnya. 1. Leading the Quality Safety, Health, Environment and Engineering Division, Supply Chain Management Division, Information Technology Division; 2. Carrying out all actions related to the management and development of the Company's functions in the Directorate of Quality, Health, Safety and Environment, namely in the field of occupational health and safety, quality development and the Company's management system, development (including BIM & research), engineering, information technology, digital, and supply chain management; 3. Carrying out a role in developing PT Wijaya Karya Bitumen which is a Subsidiary that is under his/her responsibility, including: <ol style="list-style-type: none"> a. Ensuring that the work program created by the Subsidiary is in line with the strategic direction and targets of Subsidiary determined by the Holding/Corporate. b. Ensuring that the work programs of all Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director do not overlap or cannibalize each other. c. Coordinating and optimizing the business and operational synergy of Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director. d. Monitor and help optimize the performance of Subsidiaries by providing input and direction related to business, operations and organization. e. Ensure that problems in Subsidiaries and between Subsidiaries have been attempted to be resolved optimally before being escalated to Holding/Corporate. f. Ensure that the necessary support and has been delivered by Subsidiaries to Holding/Corporate is fulfilled. g. Ensure that the interaction between Subsidiaries and Holding/Corporate is in accordance with the Subsidiary and Holding/Corporate interaction charter. 4. Implement Risk Management functions including: <ol style="list-style-type: none"> a. Prepare and propose comprehensive Risk Management policies and strategies; b. Implement Risk Management policies; c. Develop a Risk Management culture at all levels of the organization; d. Implement human resource competency improvement related to Risk Management; e. Ensure that the Risk Management function has operated independently; f. Conduct periodic reviews to ensure: 1. the accuracy of Risk assessment methodology; adequacy of implementation of Risk Management information system; 3. accuracy of Risk Management policies and procedures and determination of Risk limits and thresholds; and g. Implementing other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. 5. Implementing Integrated Governance functions including: <ol style="list-style-type: none"> a. Preparing Integrated Governance policies; b. Directing, monitoring, and evaluating the implementation of Integrated Governance policies; c. Following up on the direction or advice of the Board of Commissioners/Supervisory Board in order to improve Integrated Governance policies; and d. Implementing other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Ayu Widya Kiswari*	Direktur <i>Quality, Health, Safety and Environment</i>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Determination of the development pattern of the Occupational Health and Safety Management system, including the planning, development, and implementation of the management system at Corporate level; 7. Determination of the Company's management system development pattern, quality management system, including the planning, development, and implementation of the quality management system at Corporate level and the strategy and policy of the engineering function; 8. Determination of the strategy and pattern of information system development, including the strategy and pattern of information technology development and management, optimization of applications, software and hardware, optimization of the Company's information technology network, and implementation of enterprise resources planning at the Company level; 9. Determination of the supply chain management control pattern; 10. Determination of the Company's main service and strategic material procurement strategy and policy; 11. Management of the functions in the Directorate of Quality, Health, Safety, and Environment, namely the Quality, Health, Safety, Environment and Engineering Division, Supply Chain Management Division, Information Technology Division, and has the authority to carry out all management actions of the Company to represent the Directorate led, and/or to sign documents required for its operational activities and/or to grant power of attorney to the Senior Vice President, Senior Manager, Manager, Project Manager, and/or other officials both from within and/or outside the Company in the context of obtaining, implementing, and completing Projects, operational activities and management of the Company within the scope of its Directorate while still paying attention to the applicable Articles of Association and Procedures of the Company; 12. Determination of the pattern of coaching, development, coordination, consolidation, control of the functions within the Company's organs, which include: <ol style="list-style-type: none"> a. Quality, Safety, Health, Environment and Engineering Division, including the long-term plan for the development and application of the Environmental, Occupational Health and Safety (K3L) management system, long-term plan for system development, policy strategy, development and optimization of Research & Development (R&D), Knowledge Management, and Building Information Modeling, in accordance with the Vision and Mission of the organization that has been determined; b. Supply Chain Management Division, including the preparation of integrated Procurement and Procurement strategies and policies and optimization of supplier/service provider networks at home and abroad. c. Information Technology Division, including the preparation and implementation of information systems and enterprise resource planning at corporate level. d. Development of technical expertise and Human Capital in the Directorate under his/her responsibility.
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Membawahi Human Capital Division, Transformation and Business Strategy Division dan Information Technology Division.</i> 2. <i>Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi Perseroan pada Direktorat Human Capital Management, yaitu di bidang Sumber Daya Manusia (Human Capital), strategi perencanaan dan pengembangan pasar, transformasi perusahaan serta bidang teknologi informasi, digital, bidang pengembangan (termasuk BIM & riset), dan bidang engineering.</i> 3. <i>Menjalankan peran dalam pembinaan terhadap PT Wijaya Karya Realty yang merupakan Entitas Anak Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Memastikan program kerja yang dibuat oleh Entitas Anak Perusahaan selaras dengan arahan strategis dan target Entitas Anak Perusahaan yang ditentukan oleh Holding/Corporate.</i> b. <i>Memastikan program kerja semua Entitas Anak Perusahaan yang berada dibawah koordinasi Direktur Pembina tidak ada yang overlap atau saling kanibalisasi.</i> c. <i>Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan sinergi bisnis dan operasional Entitas Anak Perusahaan dibawah koordinasi Direktur Pembina.</i> d. <i>Memantau dan membantu mengoptimalkan kinerja dari Entitas Anak Perusahaan dengan memberikan masukan dan arahan terkait bisnis, operasional dan organisasi.</i> e. <i>Memastikan masalah-masalah di Entitas Anak Perusahaan dan antar Entitas Anak Perusahaan telah dicoba untuk diselesaikan secara maksimal sebelum dieskalasikan ke Holding/Corporate.</i> f. <i>Memastikan dukungan-dukungan yang diperlukan dan telah disampaikan oleh Entitas Anak Perusahaan kepada Holding/Corporate terpenuhi.</i> g. <i>Memastikan interaksi antara AP dan Holding/Corporate sesuai dengan charter interaksi Entitas Anak Perusahaan dan Holding/Corporate.</i> 4. <i>Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko meliputi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Menyusun dan mengusulkan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko secara komprehensif;</i> b. <i>Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko;</i> c. <i>Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;</i> d. <i>Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;</i> e. <i>Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;</i> f. <i>Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. Keakuratan metodologi penilaian Risiko; 2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; 3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan Risiko (risk limit) dan ambang batas (threshold); dan Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.</i> 5. <i>Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi meliputi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Menyusun kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;</i> b. <i>Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;</i> c. <i>Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan</i> d. <i>Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation	<ol style="list-style-type: none"> 6. Penetapan strategi dan pola perencanaan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (<i>Human Capital</i>), termasuk di dalamnya penetapan strategi <i>human capital</i>, pengembangan organisasi, perencanaan rekrutmen, optimalisasi penempatan Sumber Daya Manusia (<i>Human Capital</i>) di tingkat Perusahaan, pembinaan kompetensi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (<i>Human Capital</i>), <i>talent management</i>, suksesi dan pengembangan sistem remunerasi yang disesuaikan dengan arah pengembangan usaha Perseroan; 7. Penetapan strategi dan pola sistem pengharkatan Sumber Daya Manusia (<i>Human Capital</i>), penetapan pola pengembangan hubungan industrial secara kondusif dan optimalisasi penyelenggaraan administrasi di fungsi Sumber Daya Manusia (<i>Human Capital</i>); 8. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Memberikan pengarahan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia (<i>Human Capital</i>) pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi disesuaikan dengan perkembangan bisnis; 11. Penetapan strategi pemasaran terkait <i>market intelligence</i>, evaluasi dan analisa pasar, <i>Key Clients</i>, serta konsolidasi perolehan kontrak; 12. Penetapan strategi dan pelaksanaan transformasi sesuai kebijakan dan arah perusahaan; 13. Penetapan strategi dan pola pengembangan sistem informasi, termasuk di dalamnya strategi dan pola pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi, optimalisasi aplikasi, perangkat lunak dan perangkat keras, optimalisasi jejaring teknologi informasi tingkat Perusahaan, serta pelaksanaan <i>enterprise resources planning</i> tingkat Perusahaan; 14. Pengurusan terhadap fungsi bidang pada Direktorat <i>Human Capital Management</i>, yaitu <i>Human Capital Division</i>, <i>Transformation and Business Strategy Division</i>, <i>Information Technology Division</i> serta memiliki kewenangan untuk melakukan segala tindakan pengurusan Perseroan untuk mewakili Direktorat yang dipimpin, dan/atau melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya dan/atau memberikan kuasa kepada <i>Senior Vice President</i>, <i>Senior Manager</i>, <i>Manager</i>, <i>Project Manager</i>, dan/atau pejabat lain baik dari dalam dan/atau luar Perseroan dalam rangka perolehan, pelaksanaan, dan penyelesaian Proyek, kegiatan operasional dan pengurusan Perseroan dalam ruang lingkup Direktoratnyanya dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prosedur Perseroan yang berlaku; 15. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi, pengendalian terhadap fungsi yang ada di dalam organ Perusahaan, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Human Capital Division</i>, termasuk di dalamnya perencanaan implementasi manajemen "<i>Human Capital</i>", perencanaan strategis jangka panjang Sumber Daya Manusia (<i>Human Capital</i>) berdasarkan pada "<i>knowledge based competencies</i>", perumusan peta kompetensi Sumber Daya Manusia (<i>Human Capital</i>) sesuai jenjang karir, sistem pengembangan berbasis pada proses dan hasil, rencana jangka panjang pengembangan organisasi, pengembangan talent, optimalisasi pengelolaan hubungan industrial, implementasi "<i>performance management system</i>" (PMS) berdasarkan rencana jangka pendek panjang pengembangan sistem pengharkatan Sumber Daya Manusia (<i>Human Capital</i>); b. <i>Transformation and Business Strategy Division</i>, termasuk di dalamnya strategi dan analisis perumusan potensi pasar, pengelolaan hubungan dengan <i>Key Clients</i>, perolehan omzet kontrak yang terkonsolidasi serta transformasi <i>office</i> sesuai kebijakan dan arah perusahaan, pengembangan dan optimalisasi <i>Research & Development</i> (R&D), <i>Knowledge Management</i>, serta <i>Building Information Modeling</i> (BIM). c. <i>Information Technology Division</i>, termasuk didalamnya penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi serta <i>enterprise resource planning</i> tingkat perusahaan. d. Pembinaan keahlian teknis dan <i>Human Capital</i> di Direktorat yang menjadi tanggung jawabnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Leading the Human Capital Division, Transformation and Business Strategy Division and Information Technology Division. 2. Carrying out all actions related to the management and development of the Company's functions in the Directorate of Human Capital Management, namely in the field of Human Resources (Human Capital), market planning and development strategy, corporate transformation and information technology, digital, development (including BIM & research), and engineering. 3. Carrying out a role in coaching PT Wijaya Karya Realty which is a Subsidiary that is under his/her responsibility, including: <ol style="list-style-type: none"> a. Ensuring that the work program created by the Subsidiary is in line with the strategic direction and targets of Subsidiary determined by the Holding/Corporate. b. Ensuring that the work programs of all Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director do not overlap or cannibalize each other. c. Coordinating and optimizing the business and operational synergy of Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director. d. Monitoring and helping to optimize the performance of Subsidiaries by providing input and direction related to business, operations and organization. e. Ensure that problems in Subsidiaries and between Subsidiaries have been attempted to be resolved optimally before being escalated to Holding/Corporate. f. Ensure that the necessary support that has been delivered by Subsidiaries to Holding/Corporate is fulfilled. g. Ensure that the interaction between Subsidiaries and Holding/Corporate is in accordance with the Subsidiary and Holding/Corporate interaction charter.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation	<ol style="list-style-type: none"> 4. Implement Risk Management functions including: <ol style="list-style-type: none"> a. Prepare and propose comprehensive Risk Management policies and strategies; b. Implement Risk Management policies; c. Develop a Risk Management culture at all levels of the organization; d. Implement human resource competency improvement related to Risk Management; e. Ensure that the Risk Management function has been operating independently; f. Conduct periodic reviews to ensure: 1. The accuracy of Risk assessment methodology; 2. the adequacy of the implementation of Risk Management information system; 3. the accuracy of Risk Management policies and procedures and the determination of Risk limits and thresholds; and Implementing other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. 5. Implementing Integrated Governance functions including: <ol style="list-style-type: none"> a. Preparing Integrated Governance policies; b. Directing, monitoring, and evaluating the implementation of Integrated Governance policies; c. Following up on the direction or advice of the Board of Commissioners/Supervisory Board in order to improve Integrated Governance policies; and d. Implementing other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. 6. Determination of strategy and pattern of planning and development of Human Capital, including determination of human capital strategy, organizational development, recruitment planning, optimization of placement of Human Capital at Corporate level, competence development and development of Human Capital, talent management, succession and development of remuneration system adjusted to the direction of the Company's business development; 7. Determination of strategy and pattern of Human Capital reward system, determination of pattern of development of conducive industrial relations and optimization of administration in Human Capital function; 8. Regulating provisions regarding the Company's personnel including determination of salary, pension or old age security, and other income for Company's employees based on applicable laws and regulations; 9. Appointing and dismissing Company's Employees based on Company's personnel regulations and applicable laws and regulations; 10. Providing direction on the management of Human Capital in Subsidiaries and Associated Entities adjusted to business development; 11. Determination of marketing strategies related to market intelligence, market evaluation and analysis, Key Clients, and consolidation of contract acquisition; 12. Determination of strategies and implementation of transformation in accordance with company policies and directions; 13. Determination of strategies and patterns for developing information systems, including strategies and patterns for developing and managing information technology, optimizing applications, software and hardware, optimizing information technology networks at the Company level, and implementing enterprise resources planning at Corporate level; 14. Management of the functions of Directorate of Human Capital Management, namely the Human Capital Division, Transformation and Business Strategy Division, Information Technology Division and has the authority to carry out all management actions of the Company to represent the Directorate led, and/or sign documents required for its operational activities and/or grant power of attorney to the Senior Vice President, Senior Manager, Manager, Project Manager, and/or other officials both from within and/or outside the Company in the context of obtaining, implementing, and completing Projects, operational activities and management of the Company within the scope of his/her Directorate while still paying attention to the applicable Articles of Association and Company Procedures; 15. Determination of the pattern of coaching, development, coordination, consolidation, control of functions within the Company's organs, which include: <ol style="list-style-type: none"> a. Human Capital Division, including the planning of the implementation of "Human Capital" management, long-term strategic planning of Human Capital based on "knowledge based competencies", formulation of Human Capital competency maps according to career levels, development systems based on processes and results, long-term organizational development plans, talent development, optimization of industrial relations management, implementation of "performance management system" (PMS) based on short-term long-term plans for developing Human Capital reward system; b. Transformation and Business Strategy Division, including strategies and analysis of market potential formulation, management of relationships with Key Clients, acquisition of consolidated contract turnover and office transformation according to company policies and directions, development and optimization of Research & Development (R&D), Knowledge Management, and Building Information Modeling (BIM). c. Information Technology Division, including the preparation and implementation of information systems and enterprise resource planning at corporate level. d. Development of technical expertise and Human Capital in the Directorate under his/her responsibility.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Sumadi**	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawahi <i>Risk Management Division</i>, <i>Legal Division</i> dan <i>Compliance and Quality, Safety, Health, Environment Division</i>; 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi Perseroan pada manajemen risiko, bidang legal, serta <i>compliance and Quality, Safety, Health, Environment</i>; 3. Menjalankan peran dalam pembinaan terhadap PT Wijaya Karya Beton Tbk dan PT Wijaya Karya Bitumen yang merupakan Entitas Anak Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan program kerja yang dibuat oleh Entitas Anak Perusahaan selaras dengan arahan strategis dan target Entitas Anak Perusahaan yang ditentukan oleh <i>Holding/Corporate</i>. b. Memastikan program kerja semua Entitas Anak Perusahaan yang berada dibawah koordinasi Direktur Pembina tidak ada yang <i>overlap</i> atau saling kanibalisasi. c. Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan sinergi bisnis dan operasional Entitas Anak Perusahaan dibawah koordinasi Direktur Pembina. d. Memantau dan membantu mengoptimalkan kinerja dari Entitas Anak Perusahaan dengan memberikan masukan dan arahan terkait bisnis, operasional dan organisasi. e. Memastikan masalah-masalah di Entitas Anak Perusahaan dan antar Entitas Anak Perusahaan telah dicoba untuk diselesaikan secara maksimal sebelum dieskalasikan ke <i>Holding/Corporate</i>. f. Memastikan dukungan-dukungan yang diperlukan dan telah disampaikan oleh Entitas Anak Perusahaan kepada <i>Holding/Corporate</i> terpenuhi. g. Memastikan interaksi antara AP dan <i>Holding/Corporate</i> sesuai dengan charter interaksi Entitas Anak Perusahaan dan <i>Holding/Corporate</i>. 4. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengusulkan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko secara komprehensif; b. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko; c. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; e. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; f. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. Keakuratan metodologi penilaian Risiko; 2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; 3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan Risiko (<i>risk limit</i>) dan ambang batas (<i>threshold</i>); dan g. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. h. Melaksanakan pengurusan BUMN sesuai bidang pengelolaan Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri; i. Melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan bidang pengelolaan Risiko yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi, dan kebijakan BUMN yang telah ditetapkan; j. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; k. Melaksanakan penetapan langkah yang diperlukan untuk memastikan BUMN telah memenuhi seluruh peraturan perundang dan menjaga agar kegiatan usaha BUMN tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang; l. Melaksanakan pemantauan dan menjaga kepatuhan BUMN terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh BUMN kepada pihak eksternal; m. Melaksanakan pengembangan organisasi kerja sehingga BUMN memiliki kebijakan, prosedur, dan metode yang handal dalam menerapkan pengelolaan Risiko; n. Melaksanakan pemantauan kepatuhan dan pengawasan melekat pada semua unit kerja organisasi pengelolaan Risiko; o. Membentuk unit kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada direktur yang membidangi pengelolaan Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi; • Memantau profil Risiko, peta Risiko, realisasi perhitungan Risiko inheren dan Risiko residual, dan realisasi pelaksanaan perlakuan Risiko dan biaya; • Melakukan <i>internal control testing</i> dan <i>stress testing</i>; • Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko; • Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko; • Memberikan rekomendasi kepada lini pertama dan/atau komite pemantau Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki; dan • Menyusun dan menyampaikan laporan Manajemen Risiko kepada direktur yang membidangi pengelolaan Risiko dan komite pemantau risiko secara berkala triwulan; dan p. Melaksanakan pengurusan BUMN di bidang pengelolaan Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan RUPS/Menteri. 5. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan d. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. 6. Penetapan strategi fungsi legal dalam pelaksanaan hukum Perusahaan dan pasar modal;

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Sumadi**	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal	<p>7. Pengurusan terhadap fungsi bidang pada Manajemen Risiko dan Legal, yaitu <i>Risk Management Division, Legal Division, Compliance and Quality, Safety, Health, Environment Division</i> serta memiliki kewenangan untuk melakukan segala tindakan pengurusan Perseroan untuk mewakili Direktorat yang dipimpin, dan/atau melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya dan/atau memberikan kuasa kepada <i>Senior Vice President, Senior Manager, Manager, Project Manager</i>, dan/atau pejabat lain baik dari dalam dan/atau luar Perseroan dalam rangka perolehan, pelaksanaan, dan penyelesaian Proyek, kegiatan operasional dan pengurusan Perseroan dalam ruang lingkup Direktoratnyanya dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prosedur Perseroan yang berlaku;</p> <p>8. Penetapan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi, pengendalian terhadap fungsi yang ada di dalam organ Perusahaan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Risk Management Division</i> termasuk di dalamnya peningkatan penerapan rencana manajemen risiko dan evaluasi, monitoring program untuk seluruh bisnis Perseroan saat ini dan mendatang sesuai dengan Visi dan Misi organisasi termasuk pengendalian proyek dan produk melalui <i>Enterprise Resource Planning</i>; Legal, termasuk di dalamnya penanganan fungsi hukum mengenai kepatuhan hukum, pengamanan risiko (meliputi pengamanan terhadap aset perusahaan dan klaim terhadap pihak eksternal serta risiko investasi perusahaan dari aspek Legal), menangani kasus-kasus yang dihadapi perusahaan, di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, pelaksanaan hukum korporasi dan pasar modal. <i>Compliance and Quality, Safety, Health, Environment Division</i>, termasuk di dalamnya kepatuhan Perusahaan terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, rencana jangka panjang pengembangan dan aplikasi sistem manajemen Lingkungan, Keselamatan Kesehatan Kerja (K3L), strategi kebijakan sesuai dengan Visi dan Misi organisasi yang telah ditetapkan. Pembinaan keahlian teknis dan human capital di Direktorat yang menjadi tanggung jawabnya. <ol style="list-style-type: none"> Leading the Risk Management Division, Legal Division and Compliance and Quality, Safety, Health, Environment Division; Carrying out all actions related to the management and development of the Company's functions in risk management, legal, compliance and Quality, Safety, Health, Environment; Carrying out a role in developing PT Wijaya Karya Beton Tbk and PT Wijaya Karya Bitumen which are Subsidiaries that are under his/her responsibility, including: <ol style="list-style-type: none"> Ensuring that the programs created by the Subsidiaries are in line with the strategic direction and targets of Subsidiaries determined by the Holding/Corporate. Ensuring that the work programs of all Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director do not overlap or cannibalize each other. Coordinating and optimizing the business and operational synergy of Subsidiaries under the coordination of the Coaching Director. Monitoring and helping to optimize the performance of Subsidiaries by providing input and direction related to business, operations and organization. Ensure that problems in Subsidiaries and between Subsidiaries have been attempted to be resolved optimally before being escalated to Holding/Corporate. Ensure that the necessary supports that have been submitted by Subsidiaries to Holding/Corporate are fulfilled. Ensure that the interaction between Subsidiaries and Holding/Corporate is in accordance with the Subsidiary and Holding/Corporate interaction charter. Implement Risk Management functions including: <ol style="list-style-type: none"> Prepare and propose comprehensive Risk Management policies and strategies; Implement Risk Management policies; Develop a Risk Management culture at all levels of the organization; Implement human resource competency improvement related to Risk Management; Ensure that the Risk Management function has been operating independently; Conduct periodic reviews to ensure: 1. The accuracy of Risk assessment methodology; 2. the adequacy of the implementation of Risk Management information system; 3. accuracy of Risk Management policies and procedures and determination of Risk limits and thresholds; and Carrying out other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. Carrying out management of SOEs in accordance with the field of Risk management, guided by the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister; Carrying out the determination of strategies and policies in Risk management that are his responsibility by taking into account the vision, strategy, and policies of SOEs that have been determined; Carrying out coordination and providing direction for the implementation of the principles of Good Corporate Governance; Carrying out the determination of measures needed to ensure that SOE has complied with all laws and regulations and ensuring that SOE business activities do not deviate from the provisions of laws and regulations; Carrying out monitoring and maintaining SOE compliance with all agreements and commitments made by SOE to external parties; Carrying out the development of work organizations, hence SOE has reliable policies, procedures, and methods in implementing Risk management; Implementing compliance monitoring and inherent supervision of all work units of the Risk management organization;

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Sumadi**	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal	<ul style="list-style-type: none"> o. Establishing a Risk Management work unit that is directly responsible to the director in charge of Risk management, which has the authority and responsibility including: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring the implementation of Risk Management that has been approved by the Board of Directors; • Monitoring the Risk profile, Risk map, realization of inherent Risk and residual Risk calculations, and realization of the implementation of Risk treatment and costs; • Conducting internal control testing and stress testing; • Periodically reviewing the Risk Management process; • Evaluating the accuracy of the model and validity of the data used to measure Risk; • Providing recommendations to the first line and/or Risk monitoring committee according to the authority they have; and • Compiling and submitting Risk Management reports to the director in charge of Risk management and the risk monitoring committee on a quarterly basis; and p. Carrying out management of SOE in the field of Risk management in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and GMS/Minister. 5. Implementing the Integrated Governance function includes: <ul style="list-style-type: none"> a. Preparing the Integrated Governance policy; b. Directing, monitoring, and evaluating the implementation of the Integrated Governance policy; c. Following up on the direction or advice of the Board of Commissioners/Supervisory Board in order to improve the Integrated Governance policy; and d. Implementing other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. 6. Determination of legal function strategies in the implementation of Company and capital market laws; 7. Management of the functions of the Risk Management and Legal fields, namely the Risk Management Division, Legal Division, Compliance and Quality, Safety, Health, Environment Division and has the authority to carry out all management actions of the Company to represent the Directorate led, and/or sign documents required for its operational activities and/or grant power of attorney to the Senior Vice President, Senior Manager, Manager, Project Manager, and/or other officials both from within and/or outside the Company in the context of obtaining, implementing, and completing Projects, operational activities and management of the Company within the scope of its Directorate while still paying attention to the applicable Articles of Association and Company Procedures; 8. Determination of the pattern of coaching, development, coordination, consolidation, control of functions within the Company's organs, which include: <ul style="list-style-type: none"> a. Risk Management Division includes improving the implementation of risk management plans and evaluations, monitoring programs for all current and future Company businesses in accordance with the Vision and Mission of the organization including project and product control through Enterprise Resource Planning; b. Legal, including handling legal functions regarding legal compliance, risk security (including security of company assets and claims against external parties and company investment risks from a legal aspect), handling cases faced by the company, in court and outside court, implementation of corporate law and capital markets. c. Compliance and Quality, Safety, Health, Environment Division, including the Company's compliance with all applicable laws and regulations, long-term plans for the development and application of Environmental, Occupational Health and Safety (K3L) management systems, policy strategies in accordance with the established Vision and Mission of the organization. d. Development of technical expertise and human capital in the Directorate under its responsibility.

PERNYATAAN BAHWA DIREKSI MEMILIKI PEDOMAN ATAU PIAGAM (CHARTER) DIREKSI

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara optimal, Perseroan telah menetapkan Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang dirancang sebagai panduan operasional bagi seluruh anggota Direksi. Pedoman ini menjadi dasar bagi Direksi untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab, dengan memprioritaskan kepentingan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan prinsip GCG. Pedoman ini dirumuskan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, komunikasi yang efektif, dan koordinasi yang terstruktur antara Direksi dan organ perusahaan lainnya. Dengan pendekatan yang sistematis, mudah dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten, pedoman ini memastikan bahwa setiap langkah Direksi selaras dengan visi, misi, serta tujuan strategis Perseroan. Selain itu, pedoman ini menjadi alat untuk menjaga standar kerja yang tinggi dan memastikan implementasi praktik GCG yang unggul.

STATEMENT THAT BOARD OF DIRECTORS HAS GUIDELINES OR CHARTER

To ensure optimal implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities, the Company has established a Board Manual designed as an operational guide for all members of Board of Directors. This guideline served as the basis for the Board of Directors to act professionally and responsibly, prioritizing the Company's interests in accordance with laws and regulations, Articles of Association, and GCG principles. The guidelines are formulated to create harmonious working relationships, effective communication and structured coordination between Board of Directors and other corporate organs. With a systematic, easy-to-understand and consistently applicable approach, these guidelines ensure that every step of Board of Directors is aligned with the Company's vision, mission and strategic objectives. In addition, the guidelines serve as a tool to maintain high working standards and ensure the implementation of excellent GCG practices.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap peningkatan tata kelola, Perseroan secara berkala melakukan *review* terhadap *Board Manual*, *Code of Corporate Governance*, dan *Code of Conduct*. Proses *review* ini bertujuan untuk menyesuaikan pedoman dengan dinamika bisnis dan kebutuhan terkini. Sosialisasi terhadap pedoman yang diperbarui juga dilakukan untuk memastikan pemahaman menyeluruh di seluruh lapisan manajemen. Hasil evaluasi dan sosialisasi tersebut kemudian disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai pedoman resmi yang menjadi acuan kerja.

Adapun isi *Board Manual* Direksi mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi;
2. Komposisi dan Pembagian Tugas antar Direksi;
3. Penetapan Kebijakan Perusahaan oleh Direksi;
4. Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi
5. Perusahaan;
6. Kriteria Anggota Direksi;
7. Program Pengenalan Direksi;
8. Etika Jabatan;
9. Pengelolaan Keuangan Perusahaan;
10. Rapat Direksi;
11. Kinerja Direksi;
12. Benturan Kepentingan Direksi;
13. Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris;
14. *Corporate Secretary*;
15. Sistem Pengendalian Internal.

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Terjalannya kerja sama yang harmonis antara Dewan Komisaris dan Direksi menjadi faktor kunci untuk memastikan setiap organ dalam Perseroan dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing dengan efektif dan efisien. Untuk itu, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjaga masing-masing Perusahaan, setiap independensi organ hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam rangka tugas dan tanggung jawab masing-masing merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Dewan Komisaris harus menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Berbagai hal yang menyangkut hubungan kerja sehari-hari antara Dewan Komisaris dengan Direksi, yang belum diatur oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, Panduan *Good Corporate Governance*, *Code of Conduct* serta dokumen ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dengan dilandasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;

As part of its commitment to improving governance, the Company periodically reviews the Board Manual, Code of Corporate Governance, and Code of Conduct. This review process aims to adjust the guidelines to the latest business dynamics and needs. Socialization of the updated guidelines is also conducted to ensure thorough understanding at all levels of management. The results of the evaluation and socialization are then ratified by the Board of Directors and Board of Commissioners as official guidelines that become work references.

The contents of Board Manual for Board of Directors regulates the following matters:

1. Board of Directors' Duties, Authorities and Obligations;
2. Board of Directors' Composition and Division of Duties among Directors;
3. Determination of Company Policy by the Board of Directors;
4. Delegation of Authorities among members of Board of Directors;
5. Board of Directors Members' Criteria;
6. Orientation Program;
7. Job Ethics;
8. Corporate Finance Management;
9. Board of Directors' Meeting;
10. Board of Directors' Performance;
11. Board of Directors' Conflict of Interests;
12. Working Relationship with Board of Commissioners;
13. Corporate Secretary;
14. Internal Control System.

RELATIONSHIP BETWEEN BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The harmonious cooperation between Board of Commissioners and Board of Directors is a key factor to ensure that each organ in the Company can work according to their respective functions effectively and efficiently. To that end, in maintaining a good working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors, the following principles are applied:

1. In order to maintain the independence of each corporate organ, the relationship between Board of Commissioners and Board of Directors in the context of their respective duties and responsibilities is a formal relationship, in the sense that it must always be based on a mechanism or correspondence that can be accounted for. Informal relations can be made by each Member of Board of Commissioners and Board of Directors, but cannot be used as a formal policy before going through a mechanism or correspondence that can be accounted for;
2. Board of Commissioners must respect the Board of Directors' function and role in managing the Company as stipulated in the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association. Matters relating to daily working relationships between Board of Commissioners and Board of Directors that have not been regulated by applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, Code of Good Corporate Governance, Code of Conduct, and this document will be further regulated based on agreement between Board of Commissioners and Board of Directors based on Good Corporate Governance principles;

3. Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri maupun kolegal dapat memperoleh akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai Anak Perusahaan;
4. Dalam hal permintaan informasi oleh Dewan Komisaris menyangkut Anak Perusahaan, maka permintaan tersebut disalurkan melalui Direksi Perusahaan. Merupakan wewenang Direksi Perusahaan untuk meminta informasi tersebut dari Anak Perusahaan dengan kewenangannya sebagai Pemegang Saham;
5. Dewan Komisaris bersama-sama Direksi Perusahaan secara periodik melakukan rapat koordinasi untuk membahas berbagai permasalahan yang menyangkut Perusahaan. Dalam rapat koordinasi tersebut, Komisaris Utama berperan sebagai pimpinan rapat. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Anggota Dewan Komisaris lainnya sebagai orang yang mewakilinya;
6. Keputusan rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan sesuatu yang mengikat bagi semua peserta rapat;
7. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris merupakan jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggota Dewan Komisaris lainnya sehingga setiap hubungan kerja antara seorang anggota Dewan Komisaris dengan salah satu atau beberapa orang Direksi perlu diketahui oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

Susunan Direksi Perseroan dirancang secara strategis untuk mencerminkan kompleksitas operasional dan struktur organisasi yang ada, sehingga mampu mendukung proses pengambilan keputusan yang responsif, terukur, dan efisien. Hal ini bertujuan mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan secara optimal. Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan dalam keanggotaan Direksi dan perubahan nomenklatur jabatan berdasarkan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 15 Mei 2024. Dengan demikian, per 31 Desember 2024, komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS STRUCTURE, NUMBER, COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT

The Company's Board of Directors composition is strategically designed to reflect the operational complexity and existing organizational structure, so as to support a responsive, measurable and efficient decision-making process. This aims to optimally support the achievement of the Company's vision and mission. Throughout 2024, there were changes in the Board of Directors membership and changes in position nomenclature based on the Annual GMS held on May 15, 2024. Thus, as of December 31, 2024, the Board of Directors composition is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Office Period	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director	8 Juni 2020 - RUPST 2025 June 8, 2020 - 2025 AGMS	Ke-1 1st	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 Keputusan RUPS Tahunan tanggal 04 Mei 2023 AGMS resolution dated June 8, 2020 AGMS resolution dated May 4, 2023
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Director of Finance	4 Februari 2022 - RUPST 2027 February 4, 2022 - 2027 AGMS	Ke-1 1st	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 4 Februari 2022 Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2024 EGMS resolution dated February 4, 2022 AGMS resolution dated May 15, 2024
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation	5 Agustus 2022 - RUPST 2027 August 5, 2022 - 2027 AGMS	Ke-1 1st	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 5 Agustus 2022 Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2024 AGMS resolution dated June 8, 2020 AGMS resolution dated May 15, 2024
Hananto Aji	Direktur Operasi I Director of Operation I	8 Juni 2020 - RUPST 2025 June 8, 2020 - 2025 AGMS	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 AGMS resolution dated June 8, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Office Period	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operation II	8 Juni 2020 - RUPST 2025 June 8, 2020 - 2025 AGMS	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 AGMS resolution dated June 8, 2020
Sumadi	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal	15 Mei 2024 - RUPST 2029 May 15, 2024 - 2029 AGMS	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2024 AGMS resolution dated May 15, 2024

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik yang dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan lulus *fit and proper test* sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS FIT AND PROPER TEST AND BASIS OF APPOINTMENT

All Board of Directors members have fulfilled the criteria and requirements in the fit and proper test in accordance with the Limited Liability Company Law, the Company's Articles of Association, related good corporate governance regulations, and other relevant rules and regulations. All members of Board of Commissioners have adequate integrity, competencies and reputation, as evidenced by passing the fit and proper test as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Organizer	Tanggal Efektif Effective Date
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	8 Juni 2020 June 8, 2020
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Director of Finance	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	4 Februari 2022 February 4, 2022
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	5 Agustus 2022 August 5, 2022
Hananto Aji	Direktur Operasi I Director of Operation I	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	8 Juni 2020 June 8, 2020
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operation II	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	8 Juni 2020 June 8, 2020
Sumadi	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	15 Mei 2024 May 15, 2024

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Kepemilikan saham oleh Direksi, baik di Perseroan maupun di perusahaan lain, secara berkala diungkapkan dalam laporan daftar kepemilikan saham anggota Direksi. Dengan demikian, transparansi mengenai saham yang dimiliki oleh Direksi di Perseroan dapat dilihat berikut:

BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP

Share ownership by the Board of Directors, both in the Company and in other companies, is periodically disclosed in the report on the list of share ownership of members of Board of Directors. Thus, transparency regarding the shares owned by the Board of Directors in the Company can be seen below:

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		WIKA	Perusahaan Lain Other Company
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director	1.434.200 lembar saham 184.200 shares	-
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Director of Finance	510.000 lembar saham 510.000 shares	-

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		WIKA	Perusahaan Lain Other Company
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation	510.000 lembar saham 510.000 shares	-
Hananto Aji	Direktur Operasi I Director of Operation I	1.269.000 lembar saham 1.269.000 shares	-
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operation II	1.269.000 lembar saham 1.269.000 shares	-
Sumadi	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal	850.000 lembar saham 850.000 shares	-

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
4. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau Kepala daerah;
5. Menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
7. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS

The Board of Directors members are prohibited from holding concurrent positions as stated below:

1. Members of Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Privately Owned Enterprises;
2. Members of Board of Commissioners and/or Supervisory Board of a State-Owned Enterprise;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
4. Management of political parties, members of DPR, DPD, DPRD Level I, and DPRD Level II and/or regional heads;
5. Candidates/members of DPR, DPD, DPRD Level I, and DPRD Level II or candidates for Regional Head/ Deputy Regional Head;
6. Other positions that may lead to a conflict of interest; and/or
7. Other positions in accordance with the provisions in legislation

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Company/ Institution	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Other Company/ Institution
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director	Komisaris (2020-sekarang) Commissioner (2020-present)	PT Kereta Cepat Indonesia China
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Director of Finance	-	-
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama (2021-sekarang); • Komisaris (2022); • Komisaris Utama (2020-sekarang); • Komisaris Utama (2020-2021). • President Commissioner (2021-present) • Commissioner (2022) • President Commissioner (2020-present) • President Commissioner (2020-2021) 	<ul style="list-style-type: none"> • PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk • PT. Jasamarga Gedebage Cilacap • PT Jasamarga Balikpapan Samarinda • PT. Wijaya Karya Serang Panimbang
Hananto Aji	Direktur Operasi I Director of Operation I	-	-
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operation II	Komisaris Utama (2022-sekarang) President Commissioner (2022-present);	PT Wijaya Karya Beton
Sumadi	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal	Komisaris Utama (2022-Sekarang) President Commissioner (2022-present);	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham, sebagaimana tercermin dalam tabel berikut:

AFFILIATION OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

All members of the Company's Board of Directors have no affiliation with members of Board of Commissioners, other members of Board of Directors and Shareholders, as reflected in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Ya Yes	Tidak No
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No		
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Director of Finance		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hananto Aji	Direktur Operasi I Director of Operation I		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operation II		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sumadi	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Benturan kepentingan Direksi adalah merupakan kondisi tertentu di mana kepentingan pribadi Direksi berpotensi bertentangan dengan kepentingan Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan, meraih laba serta pencapaian visi dan misi Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh Pemegang Saham.

MANAGEMENT OF BOARD OF DIRECTORS' CONFLICTS OF INTEREST

Conflicts of interest within Board of Directors pertains to conditions where the individual interests of a member of Board of Directors has a potential conflict with the Company's interests to increase the Company's value, profit achievements, vision and mission as mandated by the Shareholders.

WKA menerapkan beberapa prinsip untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Direksi harus menghindari adanya potensi benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut Direksi perlu memenuhi beberapa prinsip, yaitu:
 - a. Direksi wajib menyelenggarakan dan mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain secara benar dan akurat;
 - b. Direksi harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam pengambilan keputusan;
 - c. Tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perseroan di mana yang bersangkutan atau keluarganya mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut;
 - d. Direksi wajib membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Apabila terjadi sesuatu hal, di mana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi BUMN dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS/Menteri dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen dan/atau kontrak manajemen tahunan Direksi BUMN;
 - b. Adanya perubahan strategi bisnis pada BUMN;
 - c. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara;
 - e. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
 - f. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara;
 - g. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 - h. Melakukan tindakan yang melanggar kode etik Direksi BUMN;
 - i. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - j. Berhalangan tetap, termasuk sakit keras/sakit berkepanjangan.

WKA's applies several principles to avoid conflicts of interest and further implications with the following steps:

1. Board of Directors must avoid potential conflicts of interest when carrying out their duties. To prevent this from happening, Board of Directors has to fulfill the following principles:
 - a. Board of Directors is required to maintain and complete a Special Register that contains theirs and their family's share ownership in other companies truthfully and accurately.
 - b. Board of Directors must avoid any activities that can affect their independence in decision-making.
 - c. They may not participate in any procurement activity that involves a Company where the person concerned or their family has significant share ownership or has a financial interest in the transaction.
 - d. Board of Directors is obliged to make statements regarding conflicts of interest related to matters contained in the Company's Work Plan and Budget.
2. If there is a situation where the interests of the Company conflict with the interests of one member of Board of Directors, then with the approval of Board of Commissioners, the Company will be represented by other member of Board of Directors. If the conflict of interest concerns all members of Board of Directors, the Company will be represented by the Board of Commissioners or a person appointed by the Board of Commissioners.
3. In the absence of a Board of Commissioners, the General Meeting of Shareholders appoints one or more persons to represent the Company in carrying out the abovementioned tasks.

BOARD OF DIRECTORS RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

The resignation and dismissal mechanism of Board of Directors can be described as follows:

1. Members of SOE's Board of Directors can be dismissed at any time based on the GMS/Minister's decision by stating the reasons.
2. The reasons for the dismissal of a member of SOE's Board of Directors as referred to in paragraph (1) are as follows:
 - a. Unable to fulfill his/her obligations that have been agreed upon in the Management Contract and/or the annual management contract of SOE's Board of Directors;
 - b. There is a change in the business strategy of the SOE;
 - c. Unable to perform his/her duties properly;
 - d. Involved in actions that are detrimental to SOEs and/or State finances;
 - e. Violating the provisions of laws and regulations and/or the articles of association;
 - f. Has been named as a suspect or defendant by an authorized party in an action that is detrimental to SOEs and/or State finances;
 - g. Committing acts that violate ethics and/or propriety;
 - h. Committing actions that violate the code of conduct of SOE's Board of Directors;
 - i. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force; or
 - j. Permanently incapacitated, including serious illness/prolonged illness.

3. Selain alasan pemberhentian Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi BUMN dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN.
4. Selain alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemberhentian Direksi BUMN memperhatikan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BUMN yang bersangkutan.
5. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri; dan/ atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi BUMN berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.
6. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
7. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
 - f. Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - i. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan Pemberhentian sementara pada huruf d ayat ini; atau
 - ii. Lampaunya jangka waktu pada huruf d ayat ini.
 - g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
3. In addition to the reasons for dismissal of the SOE Board of Directors as referred to in paragraph (2), members of SOE Board of Directors may be dismissed based on other reasons deemed appropriate by the GMS/Minister for the interests and objectives of the SOE.
4. In addition to the reasons for dismissal as referred to in paragraph (2) and paragraph (3), the dismissal of SOE Board of Directors shall take into account the reasons for dismissal as stipulated in the articles of association of the relevant SOE.
5. The position of a member of Board of Directors ends if:
 - a. Passed away;
 - b. His/her term of office ends;
 - c. Dismissed based on the decision of the GMS/ Minister; and/or
 - d. No longer fulfills the requirements as SOE Board of Directors based on the articles of association and laws and regulations including prohibited concurrent positions.
6. For members of Board of Directors who resign before and after their term of office expires, except due to death, the person remains responsible for their actions until their resignation has been accepted by the GMS.
7. Members of Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners at any time by stating their reasons if they act contrary to the Articles of Association or there are indications of actions that have harmed the Company or they have neglected their obligations or there is urgent reason from the Company, taking into account the following terms:
 - a. The said dismissal must be notified in writing to member of Board of Directors concerned together with the reasons that caused the action with a copy to the Board of Directors;
 - b. The notification, as referred to in letter a, shall be delivered no later than 2 (two) working days after the temporary suspension is determined;
 - c. Members of Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to carry out any management of the Company, or for the interests of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company, and may not represent the Company both inside and outside the Court;
 - d. Within a period of no more than 90 (ninety) days after the temporary dismissal referred to, the Board of Commissioners must hold a GMS to revoke or confirm the decision on the temporary dismissal;
 - e. Within this timeframe as referred to in letter d, or if the GMS has not made a decision, the temporary termination cannot be canceled;
 - f. The limitation of authorities referred to in letter c applies from when the temporary dismissal decision was made by the Board of Commissioners until:
 - i. There is a GMS resolution that approves or revokes the temporary dismissal referred to in letter d; or
 - ii. The time limit referred to in letter d expired.
 - g. In the GMS referred to in letter d, members of Board of Directors concerned will be given the opportunity to defend themselves;

- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
- k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
- l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
 - i. Keputusan pemberhentian sementara; dan
 - ii. Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut pada huruf d ayat ini, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DIREKSI, RAPAT DIREKSI BERSAMA DEWAN KOMISARIS, DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RAPAT TERSEBUT TERMASUK KEHADIRAN DALAM RUPS

Kebijakan terkait Frekuensi Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

Rapat Direksi merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perusahaan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Perusahaan. Rapat Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara.

POLICY AND FREQUENCY OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS, JOINT MEETINGS OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS AND ATTENDANCE OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AT THE MEETING INCLUDING ATTENDANCE AT THE GMS

Policy on Frequency of Board of Directors Meetings and Board of Directors Meetings with Board of Commissioners

The Board of Directors meetings are held to make business decisions, evaluate the Company's performance and establish management policies of the Company. The Board of Directors meetings are based on the following principles:

1. Board of Directors must hold regular Meetings at least 1 (one) time each month;
2. Board of Directors must hold a Board of Directors Meeting with Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months;
3. Board of Directors Meetings can be held at any time if:
 - a. At the request of one or more members of Board of Directors;
 - b. At the written request of one or more members of Board of Commissioners;
 - c. At the written request of 1 (one) or more Shareholders who own 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan;
5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan teller, faksimile atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

4. Invitations for Board of Directors' Meetings can only be made by members of Board of Directors who are entitled to represent the Board of Directors according to the provisions of Article 12 of the Company's Articles of Association.
5. a. Invitations to the Board of Directors' Meetings must be made in writing and delivered or submitted directly to each member of Board of Directors, with a receipt, or by registered mail or by courier or teller service, facsimile or e-mail no later than 5 (five) days before the meeting is held, not counting the date of the invitation and the date of the meeting or in a shorter time in urgent situation.
- b. Such invitations are not required for meetings that have been scheduled based on previous Board of Directors' Meeting decisions, or if all members of Board of Directors attend such meetings.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Direksi dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

Pelaksanaan Rapat Direksi

Di tahun 2024, Direksi telah melaksanakan Rapat Direktur Khusus sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Frequency of Board of Directors Meetings and Attendance Level of Board of Directors and Board of Commissioners Joint Meetings

Board of Directors Meeting Implementation

In 2024, Board of Directors has conducted Special Director Meetings as many as 49 (forty-nine) with attendance level and meeting agenda as follows:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Hadir Attendees	Kehadiran Attendance		Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
				Hadir Present	Tidak Hadir Absent	
1.	9 Januari 2024 January 9, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Arahan Direksi 3. Program Penawaran Saham Kepada <i>Vendor</i> PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 1. Special Board of Directors Meeting 2. Board of Directors' Directives 3. Stock Offering Program to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Vendors	Dirut	✓		
			DOP I	✓		
			DOP II	✓		
			DOP III	✓		
			DKMR	✓		
			DHCM	✓		
			DQHSE	✓		
2.	22 Januari 2024 January 22, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. <i>Update</i> Prosedur IHL 3. Progres Pencairan Piutang s/d Desember 2023 4. Program Transformasi SCM WIKA 5. Rencana <i>Signing</i> MRA, Profil Keuangan Desember 2023 & Rencana CF 2024 6. Pembukuan Aset Tanah Lampung 1. Special Board of Directors Meeting 2. IHL Procedure Update 3. Receivables Disbursement Progress until December 2023 4. WIKA's SCM Transformation Program 5. MRA Signing Plan, December 2023 Financial Profile & CF Plan 2024 6. Lampung Land Asset Bookkeeping	Dirut	✓		
			DOP I	✓		
			DOP II	✓		
			DOP III	✓		
			DKMR	✓		
			DHCM	✓		
			DQHSE	✓		

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Hadir Attendees	Kehadiran Attendance		Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
				Hadir Present	Tidak Hadir Absent	
3	29 Januari 2024 January 29, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Program Penawaran Saham WIKA Kepada Vendor dan Pegawai WIKA	DOP I	✓		
		3. Rencana Pembayaran Sukuk PUB 1 Tahap 1 Seri A	DOP II	✓		
		4. Update Aksi Korporasi (DTE WIKON, DTE Winner, Divestasi WTJJ)	DOP III	✓		
		5. Pengelolaan Aset Proyek dan Usulan Perubahan SK.01.03/A.DIR.6927/2013	DKMR	✓		
4	5 Februari 2024 February 5, 2024	1. Special Board of Directors Meeting	DHCM	✓		
		2. WIKA's Stock Offering Program to WIKA's Vendors and Employees				
		3. Sukuk PUB 1 Phase 1 Series A Payment Plan				
		4. Corporate Action Update (DTE WIKON, DTE Winner, WTJJ Divestment)	DQHSE	✓		
		5. Project Asset Management and Proposed Changes to SK.01.03/A.DIR.6927/2013				
5	12 Februari 2024 February 12, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Perbaikan Prosedur terkait BOD dan Kas Kecil	DOP I	✓		
		3. Pengajuan DTE WIKON	DOP II	✓		
		4. Check Point Proyek Tanjung Benoa	DOP III	✓		
		5. Review R/K JO Infra 1	DKMR	✓		
6	19 Februari 2024 February 19, 2024	1. Special Board of Directors Meeting	DHCM	✓		
		2. Improvement of Procedures related to BOD and Petty Cash				
		3. Submission of DTE WIKON				
		4. Tanjung Benoa Project Check Point	DQHSE	✓		
		5. Review of R/K JO Infra 1				
5	12 Februari 2024 February 12, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Putusan MA atas kasus insiden crane pada proyek LRT Tahun 2018	DOP I	✓		
		1. Special Board of Directors Meeting	DOP II	✓		
		2. Supreme Court Decision on the 2018 LRT Project Crane Incident	DOP III	✓		
			DKMR	✓		
6	19 Februari 2024 February 19, 2024		DHCM	✓		
			DQHSE	✓		Datang siang karena penerbangan dari luar kota mengalami keterlambatan. Arrived in the afternoon because the flight from out of town was delayed.
6	19 Februari 2024 February 19, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Update MRA, Kreditur Akses & Proyeksi Cash Flow Restrukturisasi Perseroan	DOP I	✓		
		3. Update Program Penawaran Saham	DOP II	✓		
		1. Special Board of Directors Meeting	DOP III	✓		
		2. Update on MRA, Accession Creditors & Company Restructuring Cash Flow Projection	DKMR	✓		
6	19 Februari 2024 February 19, 2024	3. Update on Stock Offering Program	DHCM	✓		
			DQHSE	✓		

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Hadir Attendees	Kehadiran Attendance		Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
				Hadir Present	Tidak Hadir Absent	
7	26 Februari 2024 February 26, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Update informasi terkait PKPU 3. Paparan terkait Draft RJPP 2024-2028 1. Special Board of Directors Meeting 2. Update on PKPU Information 3. Presentation on Draft RJPP 2024-2028	Dirut	✓		
			DOP I	✓		
			DOP II	✓		
			DOP III	✓		
			DKMR	✓		
			DHCM	✓		
			DQHSE	✓		
8	4 Maret 2024 March 4, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Paparan Rencana Penjualan Lahan Karawang - Wanasari 1. Special Board of Directors Meeting 2. Presentation of Karawang - Wanasari Land Sales Plan	Dirut	✓		
			DOP I	✓		
			DOP II	✓		
			DOP III	✓		
			DKMR	✓		
			DHCM	✓		
			DQHSE	✓		
9	15 Maret 2024 March 15, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Pengalihan Uang Muka Investasi Perseroan pada Jiwasraya kepada IFG 1. Special Board of Directors Meeting 2. Transfer of the Company's Investment Down Payment in Jiwasraya to IFG	Dirut	✓		
			DOP I	✓		
			DOP II	✓		
			DOP III	✓		
			DKMR	✓		
			DHCM	✓		
			DQHSE	✓		
10	18 Maret 2024 March 18, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Pembahasan JP Tahun Buku 2023 3. Penyusunan Buku Putih (Penyehatan Keuangan WIKA) 4. Update Pencairan Piutang per 8 Maret 2024 dan Prognosa s/d Q1 2024 5. Evaluasi Cash flow 2024 1. Special Board of Directors Meeting 2. Discussion of JP for Fiscal Year 2023 3. Preparation of White Paper (Financial Recovery of WIKAs) 4. Update on Disbursement of Receivables as of March 8, 2024 and Prognosis until Q1 2024 5. Evaluation of Cash Flow 2024	Dirut	✓		
			DOP I	✓		
			DOP II	✓		
			DOP III		✓	
			DKMR	✓		
			DHCM	✓		
			DQHSE	✓		
11	25 Maret 2023 March 25, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Paparan OK Baru s.d Feb 2024 dan Proyeksi s.d Des 2024 3. Update Progress Divestasi WTJJ 4. Agenda dan Waktu Pelaksanaan RUPST AP 5. Pelaksanaan Proses Penghapusbukuan Aset Properti Investasi Mess Makassar 1. Special Board of Directors Meeting 2. New OK Presentation until Feb 2024 and Projection until Dec 2024 3. WTJJ Divestment Progress Update 4. Subsidiaries' AGMS Agenda and Implementation Time 5. Implementation of the Mess Makassar Investment Property Asset Write-off Process	Dirut	✓		
			DOP I	✓		
			DOP II	✓		
			DOP III	✓		
			DKMR	✓		
			DHCM	✓		
			DQHSE	✓		

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Hadir Attendees	Kehadiran Attendance		Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
				Hadir Present	Tidak Hadir Absent	
12	1 April 2024 April 1, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Direksi Khusus Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU) PUB 1 Tahap 1 Tahun 2020 Special Board of Directors Meeting Proposed Decision of the General Meeting of Sukuk Mudharabah Holders (RUPSU) PUB 1 Phase 1 2020 	Dirut		√	Agenda keluar kota - Solo Agenda keluar kota - Solo
			DOP I	√		
			DOP II	√		
			DOP III		√	
			DKMR	√		
			DHCM	√		
			DQHSE	√		
13	2 April 2024 April 2, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Direksi Khusus Penambahan KBLI WIKON Pelepasan Saham WIKA pada WIKA Beton 	Dirut	√		
			DOP I		√	
			DOP II	√		
			DOP III	√	√	
			DKMR	√		
			DHCM	√		
			DQHSE	√		
14	16 April 2024 April 16, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Direksi Khusus Pembahasan Biaya Emisi dan Penjualan Saham ke Publik Valuasi dan Rencana Penawaran Pelepasan Saham ke Pemegang Saham Eksisting WTJJ Update Proses Restrukturisasi WSP 	Dirut	√		
			DOP I	√		
			DOP II	√		
			DOP III	√		
			DKMR	√		
			DHCM	√		
			DQHSE	√		
15	22 April 2024 April 22, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Direksi Khusus Proses Penghapusbukuan Aset Properti Investasi Mess Makassar 	Dirut	√		
			DOP I	√		
			DOP II	√		
			DOP III	√		
			DKMR	√		
			DHCP	√		
			DQHSE	√		
16	29 April 2024 April 29, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Direksi Khusus Update Program Kerja IT Sampai Tahun 2024 Sosialisasi Term & Condition MRA Pembahasan Penerbitan Bank Garansi 	Dirut		√	Menghadiri Puncak Hari Air Sedunia di Kementerian PUPR Attending the World Water Day Peak Event at the Ministry of PUPR
			DOP I	√		
			DOP II		√	
			DOP III	√		
			DKMR	√		
			DHCP	√		
			DQHSE	√		

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Hadir Attendees	Kehadiran Attendance		Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
				Hadir Present	Tidak Hadir Absent	
17	6 Mei 2024 May 6, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Update Pencadangan Piutang Proyek Bandara Makassar 3. Pembahasan Penawaran Keikutsertaan Penjualan Saham PT Jasa Marga Bali Tol 1. Special Board of Directors Meeting 2. Update on Makassar Airport Project Receivables Reserve 3. Discussion on PT Jasa Marga Bali Tol Share Sale Participation Offer	Dirut		√	Rapat bersama Bapak Wakil Menteri. Meeting with the Deputy Minister
			DOP I	√		
			DOP II	√		
			DOP III		√	
			DKMR	√		
			DHCP	√		
			DQHSE	√		
18	15 Mei 2024 May 15, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Debt to Asset dan Share Swap Saham WR dan HIPRO 3. Debt To Equity (DTE) PT Wijaya Karya Industri Energi (Winner) 4. Permohonan Persetujuan Anggaran PMN Tahun 2025 5. Pencadangan Piutang Proyek Manatuto 6. Pencadangan Piutang Proyek Soibada 1. Special Board of Directors Meeting 2. Debt to Asset and Share Swap of WR and HIPRO Shares 3. Debt To Equity (DTE) of PT Wijaya Karya Industri Energi (Winner) 4. Request for Approval of 2025 PMN Budget 5. Manatuto Project Receivables Reserve 6. Soibada Project Receivables Reserve	Dirut	√		
			DOP I	√		
			DOP II	√		
			DOP III	√		
			DKMR	√		
			DHCM	√		
			DQHSE	√		
19	16 Mei 2024 May 15, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Skema Pengelolaan Dana PMN Tahun 2024 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 1. Special Board of Directors Meeting 2. 2024 PMN Fund Management Scheme of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dirut	√		
			DOP I	√		
			DOP II	√		
			DKU			
			DMRL	√		
			DMSDMT	√		
20	17 Mei 2024 May 17, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Rencana Pembayaran Dipercepat (Call Options) atas Obligasi dan Sukuk yang Diperpanjang dan Jatuh Tempo di 2024 3. Special Board of Directors Meeting 4. Accelerated Payment Plan (Call Options) for Bonds and Sukuk Extended and Due in 2024	Dirut	√		
			DOP I	√		
			DOP II	√		
			DKU	√		
			DMRL	√		
			DMSDMT	√		
21	28 Mei 2024 May 28, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Sosialisasi Struktur Organisasi Perseroan Terbaru 3. Proyek Design and Building Pengerukan Alur dan kolam Pelabuhan Benoa Paket A 4. Paparan Update Klaim Proyek HSR ke SIAC 1. Special Board of Directors Meeting 2. Socialization of the Company's Latest Organizational Structure 3. Design and Building Project for Dredging the Benoa Port Channel and Pool Package A 4. Exposure of HSR Project Claim Update to SIAC	Dirut	√		
			DOP I	√		
			DOP II	√		
			DKU	√		
			DMRL	√		
			DMSDMT	√		
				√		

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Hadir Attendees	Kehadiran Attendance		Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
				Hadir Present	Tidak Hadir Absent	
22	3 Juni 2024 June 3, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Perbaikan Tata Kelola KSO				
		3. Hasil Review BPKP untuk Pemanfaatan PMN 2024	DOP I	✓		
		4. Update Divestasi WTJJ	DOP II	✓		
		5. Opsi Setoran Modal pada PPSD				
		6. Pengalihan Pengelolaan Laboratorium WIKA, WIKAsatrian, dan WIKA Pratama	DKU	✓		
23	24 Juni 2024 June 24, 2024	1. Special Board of Directors Meeting	DMRL	✓		
		2. Improvement of JO Governance				
		3. Results of BPKP Review for Utilization of PMN 2024				
		4. Update on WTJJ Divestment	DMSDMT	✓		
		5. Capital Deposit Option at PPSD				
		6. Transfer of Management of WIKA's Laboratory, WIKA's satrian, and WIKA's Pratama				
24	1 Juli 2024 July 1, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Pembahasan Proyeksi Cash Flow 2024 WIKA Induk	DOP I	✓		
		3. Update Proses Pengadaan dan Efisiensi SCM	DOP II	✓		
		4. Rencana Divestasi CMLJ dan Update Perjanjian Pengakuan Hutang CMLJ	DKU	✓		
		1. Special Board of Directors Meeting	DMRL	✓		
		2. Discussion of 2024 WIKA's Parent Cash Flow Projection				
25	15 Juli 2024 July 15, 2024	3. Update on Procurement Process and SCM Efficiency	DMSDMT	✓		
		4. CMLJ Divestment Plan and Update on CMLJ Debt Acknowledgement Agreement				
		1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Usulan Perubahan Dana PMN dan Cash Flow s.d Sept 2024	DOP I	✓		
		3. Pembahasan Porsi Penyertaan WIKA di Bandara Internasional Batam	DOP II	✓		
		4. Pembahasan Rencana Setoran Modal WTJJ (tidak dinotulensikan)	DMRL	✓		
25	15 Juli 2024 July 15, 2024	5. Pembahasan terkait Penyesuaian Modal Dasar setelah Right Issue	DKU	✓		
		1. Special Board of Directors Meeting				
		2. Proposed Changes to PMN Funds and Cash Flow until September 2024	DKU	✓		
		3. Discussion of WIKA's Participation Portion in Batam International Airport				
		4. Discussion of WTJJ Capital Deposit Plan (not recorded)	DMSDMT	✓		
		5. Discussion related to Adjustment of Authorized Capital after Right Issue				

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Hadir Attendees	Kehadiran Attendance		Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
				Hadir Present	Tidak Hadir Absent	
26	23 Juli 2024 July 23, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	√		
		2. Pembahasan Proyek PLTS	DOP I	√		
		3. Pembahasan Porsi Penyertaan WIKA di Bandara Internasional Batam	DOP II	√		
		4. Pembahasan Rencana Setoran Modal WTJJ (tidak dinotulensikan)	DMRL	√		
		1. Special Board of Directors Meeting	DKU	√		
		2. Discussion of PLTS Project				
27	29 Juli 2024 July 19, 2024	3. Discussion of WIKA's Participation Portion in Batam International Airport	DMSDMT	√		
		4. Discussion of WTJJ Capital Deposit Plan (not recorded)				
		1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	√		
		2. Pembahasan <i>Cash Flow</i> Bulan Agustus - September 2024	DOP I	√		
		3. Pembahasan Perubahan Proyek Usulan PMN TA 2024 dan Usulan Proyek PMN TA 2025	DOP II	√		
		4. Pembukuan RK KSO HSRCC				
28	31 Juli 2024 July 31, 2024	5. Special Board of Directors Meeting	DMRL	√		
		6. Discussion of Cash Flow for August - September 2024	DKU	√		
		7. Discussion of Changes to the Proposed PMN Project for FY 2024 and the Proposed PMN Project for FY 2025	DMSDMT	√		
		8. Bookkeeping of RK KSO HSRCC				
		1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	√		
		2. Pembahasan Lanjutan Rencana Setoran Modal WTJJ	DOP I	√		
29	05 Agustus 2024 August 05, 2024	3. Rencana Restrukturisasi Obligasi dan Sukuk	DOP II	√		
		4. Strategi Penanganan PKPU di WIKA Group (tidak dinotulensikan)	DMRL	√		
		5. Special Board of Directors Meeting	DKU	√		
		6. Further Discussion of WTJJ Capital Deposit Plan				
		7. Bond and Sukuk Restructuring Plan	DMSDMT	√		
		8. PKPU Handling Strategy in WIKA's Group (not recorded)				
30	12 Agustus 2024 August 12, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	√		
		2. Paparan Proses Restitusi KSO WIKA	DOP I	√		
		3. Persetujuan Ambang Batas Risiko Korporat	DOP II	√		
		4. Paparan Kasus Gugatan Bentley atas Penggunaan <i>Software Non Lisensi</i>	DMRL	√		
		1. Special Board of Directors Meeting	DKU	√		
		2. Exposure of WIKA's JO Restitution Process				
		3. Approval of Corporate Risk Threshold	DMSDMT	√		
		4. Exposure of Bentley Lawsuit Case for Use of Non-Licensed Software				

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Hadir Attendees	Kehadiran Attendance		Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
				Hadir Present	Tidak Hadir Absent	
31	19 Agustus 2024 August 19, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Paparan <i>Project Performance</i> sd Juli 2024				
		3. <i>Update Cashflow</i> dan Kesiapan Dana Pembayaran Obligasi & Sukuk September 2024	DOP I	✓		
		4. Persetujuan Buku Putih Penyehatan Keuangan	DOP II	✓		
		1. Special Board of Directors Meeting	DMRL	✓		
		2. Exposure of Project Performance until July 2024				
		3. Update on Cashflow and Readiness of Bond & Sukuk Payment Funds September 2024	DKU	✓		
		4. Approval of Financial Recovery White Paper	DMSDMT	✓		
32	26 Agustus 2024 August 26, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Pembahasan <i>Performance BW Water</i> pada Proyek WTJJ	DOP I	✓		
		3. Pemberi Kuasa Jual dari WIKA kepada WR untuk Menjual Lahan Manglayang Bandung	DOP II	✓		
		1. Special Board of Directors Meeting	DMRL	✓		
		2. Discussion of BW Water Performance on WTJJ Project	DKU	✓		
		3. Sales Authorization from WIKA's to WR to Sell Manglayang Bandung Land	DMSDMT	✓		
33	2 September 2024 September 2, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Permohonan Persetujuan <i>unhold/unlock</i> Sistem SAP Proyek <i>Design and Build</i> Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A				
		3. Pembahasan Urgensi Kebutuhan <i>Dropping</i> DBG	DOP I	✓		
		4. Penarikan Laba Div. Operasi				
		5. <i>Update Divestasi WTJJ & CLMJ</i>				
		6. Penyehatan Dapen				
		1. Special Board of Directors Meeting	DOP II	✓		
		2. Request for Approval of Unhold/Unlock SAP System for Design and Build Project for Dredging of Channel and Pond of Benoa Port Package A	DMRL	✓		
			DKU	✓		
		3. Discussion of Urgency of DBG Dropping Needs				
		4. Withdrawal of Profit from Operation Division				
		5. Update on WTJJ & CLMJ Divestment	DMSDMT	✓		
6. Restructuring of Dapen						
34	9 September 2024 September 9, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Penyehatan Dapen (tidak dinotulensikan)				
		3. Pencadangan Proyek Bellazona dan Proyek Logement	DOP I	✓		
		4. Pencadangan Proyek Sei Alalak	DOP II	✓		
		1. Special Board of Directors Meeting	DMRL	✓		
		2. Restructuring of Dapen (not recorded)				
		3. Reserves for Bellazona Project and Logement Project	DKU	✓		
		4. Reserves for Sei Alalak Project	DMSDMT	✓		
		35	17 September 2024 September 17, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓
2. Peninjauan Remunerasi (Tidak dinotulensikan)	DOP I			✓		
1. Special Board of Directors Meeting	DOP II			✓		
2. Remuneration Review (Not Recorded)	DMRL			✓		
	DKU			✓		
	DMSDMT			✓		

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Hadir Attendees	Kehadiran Attendance		Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
				Hadir Present	Tidak Hadir Absent	
36	23 September 2024 September 23, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Sosialisasi Peninjauan Remunerasi 3. Pembebanan BDD Infra 1 ex DSU 4. Pencadangan PDPK Proyek KAN 1. Special Board of Directors Meeting 2. Socialization of Remuneration Review 3. BDD Infra 1 ex DSU Charge 4. PDPK Reserve for KAN Project	Dirut	√		
			DOP I	√		
			DOP II	√		
			DMRL	√		
			DKU	√		
			DMSDMT	√		
37	7 Oktober 2024 October 7, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Pembahasan Proyek <i>Building Division</i> 3. <i>Update</i> Divestasi WTJJ dan Valuasi atas LK Juni oleh EY 4. Rencana Restrukturisasi Lini Bisnis Anak Perusahaan 5. <i>Road Map</i> Perbaikan Risiko (Gap Utama RMI BPKP) 6. Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi 1. Special Board of Directors Meeting 2. Discussion of Building Division Project 3. Update on WTJJ Divestment and Valuation of June LK by EY 4. Restructuring Plan of Subsidiaries' Line of Business 5. Risk Improvement Road Map (Main Gap of BPKP RMI) 6. Implementation of Personal Data Protection Law	Dirut	√		
			DOP I	√		
			DOP II	√		
			DMRL	√		
			DKU	√		
			DMSDMT	√		
38	15 Oktober 2024 October 15, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. Rencana Optimalisasi KIW untuk Pasar Eksternal 1. Special Board of Directors Meeting 2. KIW Optimization Plan for External Market	Dirut	√		
			DOP I	√		
			DOP II	√		
			DMRL	√		
			DKU	√		
			DMSDMT	√		
39	21 Oktober 2024 October 21, 2024	1. Rapat Direksi Khusus 2. <i>Update</i> OK Baru WIKA s/d Sept dan Proyeksi s/d Des 2024 3. <i>Update</i> Penerimaan Termin + <i>Cashflow</i> sd W2 Okt dan Proyeksi sd Des 2024 4. Pembahasan Pencadangan Proyek <i>Building Division</i> 5. Pembahasan Pencadangan Proyek Pelabuhan Kijing 6. Paparan Inisiasi Digitalisasi RKAP 2025 1. Special Board of Directors Meeting 2. Update of WIKA's New OK until Sept and Projection until Dec 2024 3. Update of Term Receipt + Cashflow until W2 Oct and Projection until Dec 2024 4. Discussion of Building Division Project Reserves 5. Discussion of Kijing Port Project Reserves 6. Presentation of RKAP 2025 Digitalization Initiation	Dirut	√		
			DOP I	√		
			DOP II	√		
			DMRL	√		
			DKU	√		
			DMSDMT	√		

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Hadir Attendees	Kehadiran Attendance		Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
				Hadir Present	Tidak Hadir Absent	
40	28 Oktober 2024 October 28, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Pembahasan Perubahan Prosedur HC				
		3. Pencadangan PDPK TLS 4 dan TLS 5	DOP I	✓		
		4. Pembahasan Terkait Kondisi Dapen PPMP WIKA	DOP II	✓		
		5. Pengembangan Internal Audit				
41	31 Oktober 2024 October 31, 2024	1. Special Board of Directors Meeting	DMRL	✓		
		2. Discussion of HC Procedure Changes				
		3. Reserves for PDPK TLS 4 and TLS 5	DKU	✓		
		4. Discussion Regarding the Condition of WIKA's PPMP Pension Fund				
		5. Development of Internal Audit	DMSDMT	✓		
42	4 November 2023 November 4, 2023	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Update Divestasi WTJJ Pasca FBO	DOP I	✓		
		3. Pembahasan Perubahan Kontrak Proyek Tol Serpong	DOP II	✓		
		4. Pembahasan PDPK Proyek Unjambi dan Halte Transjakarta	DMRL	✓		
		1. Special Board of Directors Meeting	DKU	✓		
43	12 November 2024 November 12, 2024	2. WTJJ Divestment Update Post FBO				
		3. Discussion on Changes to Serpong Toll Project Contract	DMSDMT	✓		
		4. Discussion on PDPK for Unjambi Project and Transjakarta Bus Stop				
		1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Paparan Proyeksi Penyerapan PMN TA 2024 sd Q1 2025	DOP I	✓		
44	18 November 2024 November 18, 2024	3. Paparan Roadmap Penyehatan Dapen	DOP II	✓		
		4. Paparan Status WIKA Cabang Malaysia dan Rencana Proyek KBRI Malaysia	DMRL	✓		
		5. Paparan Usulan Jakon dan SHL pada WTJJ	DKU	✓		
		1. Special Board of Directors Meeting				
		2. Presentation of PMN Absorption Projection for FY 2024 to Q1 2025	DMSDMT	✓		
44	18 November 2024 November 18, 2024	3. Presentation of Dapen Health Roadmap				
		4. Presentation of WIKA's Malaysia Branch Status and KBRI Malaysia Project Plan	DKU	✓		
		5. Presentation of Jakon and SHL Proposal at WTJJ				
		1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Paparan Pencadangan PDPK Proyek Modtank Balikpapan	DOP I	✓		
44	18 November 2024 November 18, 2024	3. Paparan Perencanaan Strategi Berbasis Risiko - RKAP 2025	DOP II	✓		
		4. Paparan Program Pemasaran Tamansari Iswara dan Usulan Ketetapan Harga Jual	DMRL	✓		
		1. Special Board of Directors Meeting	DKU	✓		
		2. Presentation of PDPK Reserves for Balikpapan Modtank Project				
		3. Presentation of Risk-Based Strategic Planning - RKAP 2025	DMSDMT	✓		
44	18 November 2024 November 18, 2024	4. Presentation of Tamansari Iswara Marketing Program and Proposed Selling Price Determination				

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Hadir Attendees	Kehadiran Attendance		Alasan ketidakhadiran Reason for Absence
				Hadir Present	Tidak Hadir Absent	
45	25 November 2024 November 25, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Update Proyeksi Cashflow sd Desember 2024	DOP I	✓		
		3. Persiapan Pengajuan Notice Of Arbitration (NOA) ke HSRCC	DOP II	✓		
		1. Special Board of Directors Meeting	DMRL	✓		
		2. Cashflow Projection Update until December 2024	DKU	✓		
		3. Preparation of Submission of Notice of Arbitration (NOA) to HSRCC	DMSDMT	✓		
46	2 Desember 2024 December 2, 2024		Dirut		✓	Rapat koordinasi dengan PU di Kementerian PU Coordination meeting with PU at the Ministry of PU
		1. Rapat Direksi Khusus				
		2. Pencadangan Tagihan Bruto Proyek WIKa Realty				
		3. Persiapan Pengajuan Notice Of Arbitration (NOA) ke HSRCC	DOP I		✓	Menghadiri Kunjungan Wamen PU ke IKN Balikpapan Attending the Visit of the Deputy Minister of PU to IKN Balikpapan
		1. Special Board of Directors Meeting				
		2. Reserves for Gross Bills for WIKa's Realty Project				
3. Preparation of Submission of Notice of Arbitration (NOA) to HSRCC	DOP II	✓				
			DMRL	✓		
			DKU	✓		
			DMSDMT	✓		
47	10 Desember 2024 December 10, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Pembahasan PL Proyek KBRI Malaysia (tidak dinotulensikan)	DOP I	✓		
		3. Update OK Baru WIKa sd November 2024 dan Prognosa sd Desember 2024	DOP II	✓		
		4. Proyek Cash Flow sd Akhir Desember 2024				
		1. Special Board of Directors Meeting	DMRL	✓		
		2. Discussion of PL for the Indonesian Embassy Project in Malaysia (not recorded)	DKU	✓		
3. Update of WIKa's New OK until November 2024 and Prognosis until December 2024						
4. Cash Flow Project until the End of December 2024	DMSDMT	✓				
48	23 Desember 2024 December 23, 2024	1. Rapat Direksi Khusus	Dirut	✓		
		2. Proyek Pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat				
		3. Usulan Pencatatan Kerugian Proyek PG Assembagoes	DOP I		✓	Cuti Umroh Umrah Leave
		4. Laporan Penerapan Manajemen Risiko	DOP II	✓		
		1. Special Board of Directors Meeting	DMRL	✓		
		2. Kijing Terminal Development Project, Mempawah, West Kalimantan				
3. Proposal for Recording Losses for the Assembagoes Sugar Factory Project	DKU		✓	Cuti Natal Christmas Leave		
4. Risk Management Implementation Report	DMSDMT	✓				
49	30 Desember 2024 December 30, 2024		Dirut	✓		
		1. Rapat Direksi Khusus	DOP I		✓	Cuti Umroh Umrah Leave
		2. Penghapusan Pembukuan RK	DOP II	✓		
		1. Special Board of Directors Meeting	DMRL	✓		
		2. Write-off of RK Bookkeeping	DKU	✓		
			DMSDMT	✓		

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris, dan RUPS

Meetings Frequency and Attendance Level of Board of Directors in Board of Directors Meetings, Board of Directors Meetings with Board of Commissioners, and GMS

Nama dan Jabatan Name and Position	Rapat Direksi Board of Directors Meeting			Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris Board of Directors Meeting with Board of Commissioners			RUPS GMS		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Persentase Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Persentase Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Persentase Persentase Percentage
Agung Budi Waskito (Direktur Utama) (President Director)	49	42	85 %	12	12	100%	2	2	100%
Adityo Kusumo (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	49	48	97 %	12	11	91%	2	2	100%
Hananto Aji (Direktur Operasi I) (Director of Operations I)	49	44	89 %	12	10	83%	2	2	100%
Harum Akhmad Zuhdi (Direktur Operasi II) (Director of Operations II)	49	47	95 %	12	12	100%	2	2	100%
Rudy Hartono (Direktur Operasi III)* (Director of Operations III)*	18	14	77 %	5	3	60%	2	2	100%
Ayu Widya Kiswari (Direktur Quality, Health, Safety, and Environment)*	18	17	94 %	5	5	100%	2	2	100%
Hadjar Seti Adji (Direktur Human Capital Management) (Director of Human Capital Management)	49	48	97 %	12	12	100%	2	2	100%
Sumadi (Direktur Manajemen Risiko dan Legal)* (Director of Risk Management and Legal)*	31	31	100 %	7	7	100%	2	2	100%

*) Tidak lagi menjabat sejak 15 Mei 2024 | No longer served since May 15, 2024

**) Menjabat sejak 15 Mei 2024 | Served since May 15, 2024

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI

Kebijakan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi, Termasuk Program Orientasi bagi Anggota Direksi yang Baru Diangkat

Untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab yang diemban oleh Direksi, Perseroan mengimplementasikan berbagai program pengembangan kompetensi. Program ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman serta memperluas pengetahuan Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya guna mencapai tujuan Perseroan.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

Policy on Training and/or Competency Development for Members of Board of Directors, including Orientation Program for New Directors

To support the Board of Directors in their responsibilities, the Company implements various competency development programs. These programs aim to deepen the understanding and expand the knowledge of Board of Directors in carrying out their duties, functions and responsibilities in order to achieve the Company's objectives.

Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi

Dengan berbagai latar belakang yang berbeda, Perseroan menyelenggarakan program pengenalan Direksi untuk memberikan gambaran atas kegiatan bisnis, rencana Perseroan ke depan, dan lainnya yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke cabang-cabang atau program lainnya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Direktur Utama. Jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang lain yang ditunjuk.

Program pengenalan Perseroan mencakup aspek-aspek berikut:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, *Code of CG* dan *code of conduct*;
2. Gambaran umum perusahaan meliputi visi misi, tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, RKAP, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, kondisi persaingan usaha, tingkat risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan hubungan kerja dengan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang anggota Direksi;
5. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Perusahaan.

Di tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Direksi, sehingga Perseroan mengadakan program pengenalan Direksi baru yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2024, di Jakarta.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti Anggota Direksi dalam Tahun Buku

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Program ini dirancang untuk memperkuat keahlian strategis, memperdalam wawasan industri, dan memastikan penerapan praktik terbaik dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Berikut adalah daftar pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2024:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Material of Education and Training	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organized by
Agung Budi Waskito (Direktur Utama) (President Director)	Tidak ada pelatihan No training	Tidak ada pelatihan No training	Tidak ada pelatihan No training	Tidak ada pelatihan No training

New Directors Orientation Program

With a variety of different backgrounds, the Company organizes an orientation program for Board of Directors to provide an overview of business activities, the Company's future plans, and other matters that are the responsibility of Board of Directors.

The Orientation program can be in the form of presentations, meetings, visits to Company's facilities, branch offices, or other programs. The person in charge for organizing the orientation program is the President Director, or if unavailable, the responsibility passes to the President Commissioner or other appointed member of Board of Directors.

The Company's orientation program includes:

1. Implementation of the principles of good corporate governance, Code of CG and code of conduct;
2. General overview of the Company related to vision and mission, objectives, nature and scope of activities, RKAP, financial and operating performance, strategy, short and long term business plans, conditions of business competition, level of risk and various other strategic issues;
3. Information related to delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies and audit committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Directors and working relationship with Board of Commissioners as well as prohibited matters as a member of Board of Directors;
5. Prevailing laws and regulations and Company policies.

In 2024, there were changes in the Board of Directors composition, thereby Company held an Orientation program for the new Directors which was conducted on May 16, 2024, at Jakarta

Training and/or Competency Development of Members of Board of Directors in the Fiscal Year

Throughout 2024, Board of Directors have participated in various training and competency development programs. These programs are designed to strengthen strategic expertise, deepen industry insights, and ensure the application of best practices in carrying out leadership duties. The following is a list of training and competency development programs participated in by the Board of Directors during 2024:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Material of Education and Training	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organized by
Adityo Kusumo (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	Workshop Wakil Menteri BUMN "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future Workshop of Deputy Minister of SOE "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future	SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future	2024	Kementerian BUMN Ministry of SOE
	Workshop Penyusunan Petunjuk Teknis ICOFR BUMN Workshop Penyusunan Petunjuk Teknis ICOFR BUMN	Penyusunan Petunjuk Teknis ICOFR BUMN Preparation of ICOFR BUMN Technical Guidelines	2024	Kementerian BUMN Ministry of SOE
	Workshop KBUMN Workshop of Ministry of SOE	Penguatan BUMN dan Lingkup Usaha terhadap Penerapan Manajemen Risiko Strengthening SOEs and Business Scope on Risk Management Implementation	2024	Kementerian BUMN Ministry of SOE
	Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani Strategic Business Workshop of Deputy Minister of SOE Rosan Roeslani	Strategic Business	2024	Kementerian BUMN Ministry of SOE
Hadjar Seti Adji (Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi) (Director of Human Capital Management and Transformation)	Vicon Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan TI BUMN Vicon Socialization of SOE IT Implementation Policy	Kebijakan Penyelenggaraan TI BUMN SOE IT Implementation Policy	2024	Kementerian BUMN Ministry of SOE
	Vicon Sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 76/SE/Dk/2024 tentang Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Vicon Socialization of Circular Letter of the Director General of Construction Development No. 76/SE/Dk/2024 concerning Guidelines for the Use of Foreign Construction Workers in the Ministry of Public Works and Public Housing	Tentang Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Lingkungan Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat Regarding Guidelines for the Use of Foreign Workers in the Ministry of Public Works and Public Housing	2024	Kementerian BUMN Ministry of SOE
	Vicon Sosialisasi Profiling Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Vicon Socialization of Profiling of the Implementation of Personal Data Protection Law	Profiling Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Profiling the Implementation of Personal Data Protection Law	2024	Kementerian BUMN Ministry of SOE
	Sosialisasi Bimtek Pengisian LHKPN tahun lapor 2023 (Hybrid) Socialization of Technical Guidance for Filling in LHKPN for 2023 Reporting Year (Hybrid)	Pengisian LHKPN tahun lapor 2023 (Hybrid) Filling in LHKPN for 2023 Reporting Year (Hybrid)	2024	KPK
	Engineering Mastery Workshop	-	2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Mini Workshop Upgrading CoP	-	2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	
Vicon Program Pelatihan dan Sertifikasi CRGP (Certified Risk Governance Professional Level 4) Vicon CRGP (Certified Risk Governance Professional Level 4) Training and Certification Program	-	2024	LSPMR	

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Material of Education and Training	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organized by
Hadjar Seti Adji (Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi) (Director of Human Capital Management and Transformation)	Seminar "Analisis Kinerja BUMN 2024 dan Prospek BUMN Masa Depan" Diselenggarakan oleh BUMN Research Centre (BRG) LMFEBUI "SOE Performance Analysis 2024 and SOE Future Prospects" Seminar Organized by BUMN Research Center (BRG) LMFEBUI	-	2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
	Seminar Kesehatan dengan tema "Optimizing Employee Health and Wellness Through Vaccination" kerja sama dengan Biofarma, TJSL & Srikandi WIKA Health Seminar with the theme "Optimizing Employee Health and Wellness Through Vaccination" in collaboration with Biofarma, CSR & Srikandi WIKa's	-	2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Hananto Aji (Direktur Operasi I) (Director of Operation I)	<i>Certified Risk Governance Professional</i>	<i>Risk Culture & Leadership</i>	2024	RAP Learning Center
	<i>Strengthening Leadership for Transformation By Ignasius Jonan</i>	-	2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
	<i>Transformation Talk Bersama Wamen KBUMN</i> Transformation Talk with Deputy Minister of SOE	-	2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
	Sosialisasi Kebijakan serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Socialization of Policy and Guidelines for the Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance	-	2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Harum Akhmad Zuhdi (Direktur Operasi II) (Director of Operation II)	<i>Certified Risk Governance Professional</i>	<i>Risk Culture & Leadership</i>	2024	RAP Learning Center
Sumadi (Direktur Manajemen Risiko dan Legal) (Director of Risk Management and Legal)	<i>Certified Risk Governance Professional</i>	<i>Legal Risk Management</i>	2024	RAP Learning Center
	<i>Program Pathways to Chartered Account Indonesia</i>	<i>Financial Accounting</i>	2024	Kementerian BUMN

PENILAIAN DIREKSI TERHADAP KINERJA KOMITE YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan belum membentuk Komite di bawah Direksi. Meskipun demikian, tugas dan tanggung jawab Direksi tetap didukung oleh unit kerja yang dipimpin oleh kepala Divisi. Setiap Unit Kerja secara berkala mempertanggungjawabkan kinerjanya setiap kuartal kepada Direksi melalui kegiatan *Management Review*.

BOARD OF DIRECTORS' ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF ITS SUPPORTING COMMITTEES

Until the end of 2024, the Company has not formed a Committee under the Board of Directors. However, the duties and responsibilities of Board of Directors are still supported by work units led by Division heads. Each Work Unit periodically reports its performance every quarter to the Board of Directors through Management Review activities.

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Di tahun 2024, Direksi berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengedepankan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap keputusan yang diambil senantiasa mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta Rencana Kerja yang telah ditetapkan sejak awal tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian target Perseroan. Secara garis besar, pelaksanaan tugas Direksi sepanjang tahun 2024 mencakup langkah-langkah berikut:

1. Penyusunan perencanaan Perseroan;
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan;
3. Pengelolaan aset dan Keuangan;
4. Penyelenggaraan rapat Direksi selama tahun 2024 telah dilakukan sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) kali Rapat Direksi;
5. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir);
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, di mana pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham yang terdiri dari 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada bulan Mei 2024 dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada bulan Januari 2024;
7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal;
8. Penerapan dan pengawasan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha;
9. Penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
10. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman terkait Tata Kelola Terintegrasi;
11. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES IMPLEMENTATION

In 2024, Board of Directors is committed to carry out its duties and responsibilities by prioritizing the principles of compliance, transparency, and accountability. Every decision taken always refers to the prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the Work Plan that has been set since the beginning of the year. This aims to ensure the smooth operation and achievement of the Company's objectives. Broadly speaking, the implementation of the Board of Directors' duties throughout 2024 included the following steps:

1. Preparation of the Company's plan;
2. Fulfillment of the Company's performance targets;
3. Asset and Financial management;
4. Organizing Board of Directors meetings, which in 2024 has been held as many as 49 (Forty Nine) times;
5. Attending Board of Commissioners Meeting that includes the Board of Directors (Board Meeting);
6. Organizing the General Meeting of Shareholders. In 2024 there were 2 (two) General Meetings of Shareholders consisting of 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders in May 2024 and 1 (one) Extraordinary General Meeting of Shareholders in January 2024;
7. Supervision and improvement of internal business processes;
8. Implementation and supervision of Good Corporate Governance in every business activity;
9. Implementation of ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System;
10. Preparation of Policies and Guidelines related to Integrated Governance;
11. Implementation of other duties related to the management of the Company.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris memegang peran sentral dalam menjaga tata kelola Perseroan yang transparan dan bertanggung jawab. Dalam fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memastikan kebijakan strategis yang dijalankan Direksi selaras dengan visi Perseroan serta peraturan yang berlaku. Selain memberikan arahan yang konstruktif, Dewan Komisaris turut memantau implementasi praktik GCG di setiap lini bisnis untuk memastikan keberlanjutan operasional yang berintegritas.

Komposisi Dewan Komisaris dirancang untuk menciptakan pengambilan keputusan yang efektif, dengan mengedepankan prinsip independensi. Kemandirian ini menjadi kunci untuk menghindari potensi benturan kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dalam pengawasan maupun pemberian nasihat. Dengan bertanggung jawab langsung kepada RUPS, Dewan Komisaris berkomitmen melaksanakan tugas secara profesional demi mendukung tercapainya tujuan strategis Perseroan.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Untuk menjamin seluruh anggota Dewan Komisaris yang berkompeten, maka dibutuhkan anggota Dewan Komisaris yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kriteria Dewan Komisaris Perseroan di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan kebutuhan;
2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama;
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Board of Commissioners plays a central role in maintaining transparent and responsible governance of the Company. In its supervisory function, Board of Commissioners ensures that the strategic policies implemented by the Board of Directors are in line with the Company's vision and prevailing regulations. In addition to providing constructive direction, Board of Commissioners also monitors the implementation of GCG practices in each business lines to ensure operational sustainability with integrity.

The Board of Commissioners composition is designed to create effective decision-making, by prioritizing the principle of independence. This independence is key to avoiding potential conflicts of interest that could interfere with objectivity in supervision and advising. Reporting directly to the GMS, Board of Commissioners is committed to carry out its duties professionally to support the achievement of the Company's strategic objectives.

BOARD OF COMMISSIONERS CRITERIA

Board of Commissioners has an important role in the implementation of GCG principles. In order to ensure that all Board of Commissioners members are competent, members of Board of Commissioners needed are those who suit the needs of the organization. The criteria for the Company's Board of Commissioners includes the following:

1. Board of Commissioners shall consist of 2 (two) or more members whose number is determined by the GMS in accordance with needs.
2. The Company is required to have an Independent Commissioner in accordance with the laws and regulations in Capital Market.
3. Board of Commissioners consisting of more than 1 (one) member is an assembly, and each member of Board of Commissioners cannot act individually, but based on the Board of Commissioners' decisions.
4. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 1 (one) member, one member shall be appointed as the President Commissioner.
5. Those who can be appointed as members of Board of Commissioners are individuals who are capable of taking legal actions, unless within 5 (five) years before their appointment:
 - a. Have been declared bankrupt;
 - b. Have been members of a Board of Directors or Board of Commissioners or Supervisory Board found guilty of causing a Company or Public Corporation to be declared bankrupt; or
 - c. Have been convicted of a criminal offense that was detrimental to the State and/or SOE's finance and/or related to the financial sector.

6. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan 5 di atas, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut;
8. Khusus untuk Anggota Komisaris Independen memiliki kriteria tambahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU.2011 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi;
10. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS;
11. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud di atas, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka;
12. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu dihitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Dewan Komisaris tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas pada:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;

BOARD OF COMMISSIONERS TERM OF OFFICE

The term of office for a member of Board of Commissioners is for a period commencing from the date stipulated by the GMS that appointed them and ends at the close of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of appointment, without diminishing the GMS right to dismiss them before the end of their term of office if the member meets one or more, but not limited to the following reasons:

1. Cannot perform their duties properly;
2. Did not comply with the the laws and regulations and/or the Articles of Association;
3. Involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State;

4. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
5. Mengundurkan diri.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, antara lain meliputi:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada poin (1), maka:
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - i. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perseroan;
 - ii. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - iii. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - iv. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 - v. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
 - vi. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
 - vii. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - viii. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite-komite lain jika dianggap perlu, termasuk mengangkat dan memberhentikan anggota komite tersebut, dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
 - ix. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - x. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ini;
 - xi. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian *Corporate Secretary* dan/atau *Head of Internal Audit*;
 - xii. Menyetujui pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan konstruksi dan investasi yang diajukan Direksi;

4. Found guilty by a court decision that has permanent legal power; or
5. Resigned.

After their term of office ends, members of Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for 1 (one) term of office.

BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Commissioners' duties and responsibilities as stipulated in the Company's Articles of Association, among others, include:

1. Board of Commissioners is tasked with supervising the management policies, the Company's general management and business conducted by the Board of Directors, and providing advice to the Board of Directors including supervising the execution of the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Budget, and the provisions in the Articles of Association, and GMS resolutions, as well as prevailing laws and regulations, for the Company's benefits and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
2. In carrying out the duties in point (1), thus:
 - a. Board of Commissioners is authorized to:
 - i. Examining the books, letters, and other documents, examining cash for verification purposes and other securities, as well as examining the Company's assets;
 - ii. Enter the grounds, buildings and offices used by the Company;
 - iii. Request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company;
 - iv. Acknowledge all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
 - v. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors, with the knowledge of Board of Directors to attend Board of Commissioners' meetings;
 - vi. Appoint and dismiss the Secretary of Board of Commissioners;
 - vii. Temporarily dismiss members of Board of Directors in accordance with the Articles of Association;
 - viii. Establish the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Monitoring Committee and other Committees, if deemed necessary, including appoint and dismiss members of those committees, after taking into account the Company's capabilities;
 - ix. Use experts for certain matters and certain periods at the Company's expense, if deemed necessary by taking into account the applicable regulations;
 - x. Manage the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the Articles of Association;
 - xi. Approve the appointment and dismissal of *Corporate Secretary* and/or *Head of Internal Audit*;
 - xii. Approve guidelines and/or policies of construction and investment activity governance proposed by Board of Directors;

- xiii. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - xiv. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau keputusan RUPS.
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
- i. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 - ii. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - iii. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - iv. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - v. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
 - vi. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
 - vii. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - viii. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - ix. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 - x. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - xi. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan 11 perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - xii. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - xiii. Menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 - xiv. Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris (BOC *Charter*).
- xiii. Attend Board of Directors' Meetings and provide views on matters discussed;
 - xiv. Carry out other oversight authorities insofar as they are not contrary to the Statutory Regulations, capital market regulations, Articles of Association and/or GMS resolutions.
- b. Board of Commissioners is obliged to:
- i. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
 - ii. Provide opinions and approvals on the Company's Long-term Plan as well as Work Plan and Annual Budget and other work plans prepared by the Board of Directors, in accordance with the Articles of Association;
 - iii. Follow the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important on the management of the Company;
 - iv. Report to the Dwiwarna Series A shareholder if there are symptoms of a decline in the Company's performance;
 - v. Propose to the GMS regarding the appointment of Public Accountant who will audit the Company's books.
 - vi. Research and review periodic reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and sign the Annual Reports;
 - vii. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested;
 - viii. Make minutes of Board of Commissioners' meetings and save a copy;
 - ix. Report to the Company regarding their and/or their families' share ownership in the Company and other companies;
 - x. Provide reports on the supervisory tasks that have been carried out during the recent fiscal year to the GMS;
 - xi. Provide explanation on all matters asked or requested by the Dwiwarna Series A shareholder whilst observing laws and regulations, especially those applied in the Capital Market sector;
 - xii. Carry out other obligations in the framework of their supervisory and advisory tasks, as long as they are not in conflict with the laws and regulations, Articles of Association and/or GMS resolutions.
 - xiii. Submit quarterly reports on the Company's performance including the realization of Key Performance Indicators to Series A Dwiwarna Shareholder;
 - xiv. Prepare the Charter/Guidelines and work procedures for Board of Commissioners (BOC Charter).

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme efisiensi, transparansi, kemandirian akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beriktikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
5. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Perseroan berkomitmen untuk memastikan fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan optimal dengan mengatur pembagian tugas dan wewenang secara sistematis. Hal ini diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 85/DK/WIKA/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pembagian Bidang Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Rincian lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

3. In carrying out these duties, each member of Board of Commissioners must:
 - a. Comply with the Articles of Association, laws and regulations and the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness;
 - b. Act in good faith, with prudence and responsibility when carrying out their supervisory duties and when giving advice to the Board of Directors, in the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
4. Under certain conditions, Board of Commissioners must hold an AGMS and other GMS in accordance with their authority as stipulated in laws and regulations and Articles of Association.
5. Each member of Board of Commissioners is directly responsible for the Company's losses caused by errors or negligence by members of Board of Commissioners in carrying out their duties. Members of Board of Commissioners cannot be held responsible for the Company's losses as referred to in letter a, if they can prove:
 - a. Such losses are not due to error or negligence;
 - b. They have carried out the supervisory task in good faith, responsibly, for the benefit and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
 - c. There is no direct and indirect conflict of interest in the supervision that resulted in a loss; and
 - d. Actions are taken to prevent the occurrence or continuance of such losses.

BOARD OF COMMISSIONERS DIVISION OF DUTIES

The Company is committed to ensuring that the supervisory function of Board of Commissioners runs optimally by systematically regulating the division of duties and authorities. This is regulated in the Decree of Board of Commissioners Number 85/DK/WIKA/2021 dated October 1, 2021 concerning the Division of Supervisory Duties of Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Further details regarding the division of duties and responsibilities of Board of Commissioners are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Jarot Widyoko	Komisaris Utama President Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinir segala kegiatan dan pekerjaan terkait tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, termasuk atas tugas tertentu dalam rangka pengawasan dan penasihatan yang belum tercakup dalam pembagian tugas khusus penetapan ini; Bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dalam penyampaian secara tertulis hasil segala upaya, kegiatan, dan pekerjaan pengawasan serta penasihatan tersebut atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Melakukan pengawasan dan penasihatan atas Bidang Usaha Sipil Umum dan Bangunan Gedung; Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Melaksanakan upaya, kegiatan, dan pekerjaan lainnya untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar, dan atau Keputusan RUPS. <ol style="list-style-type: none"> Coordinate all activities and work related to the tasks carried out by Board of Commissioners of Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, including certain tasks in the context of supervision and advice that are not covered in the division of special tasks of this determination; Act for and on behalf of Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk in submitting in writing the results of all efforts, activities, and work of supervision and advice on management policies, the course of management, both regarding the Company and the Company's business carried out by Board of Directors of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Conduct supervision and advice on the General Civil Engineering and Building Construction Business Sector; Conduct cross-sectoral coordination and inter-institutional relations for the benefit of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Carry out other efforts, activities, and work for the benefit of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations, Company regulations, Articles of Association, and/or GMS Decisions.
Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan dan penasihatan atas Bidang Keuangan dan Investasi; Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Melaksanakan upaya, kegiatan, dan pekerjaan lainnya untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar, dan atau Keputusan RUPS; Selaku anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, melaporkan kepada Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya. <ol style="list-style-type: none"> Conduct supervision and advice on the Finance and Investment Sector; Conduct cross-sectoral coordination and inter-institutional relations for the benefit of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Carry out efforts, activities, and other work for the benefit of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations, Company regulations, Articles of Association, and/or GMS Decisions; As a member of Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, report to the President Commissioner of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk regarding all efforts, work, and activities.
Rusmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan dan penasihatan atas Bidang Usaha Luar Negeri dan Bangunan Gedung; Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Melaksanakan upaya, kegiatan, dan pekerjaan lainnya untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar, dan atau Keputusan RUPS; Selaku anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, melaporkan kepada Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya. <ol style="list-style-type: none"> Conduct supervision and advice on Overseas Business and Building Construction Sectors; Conduct cross-sectoral coordination and inter-institutional relations for the benefit of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Carry out efforts, activities, and other work for the benefit of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations, Company regulations, Articles of Association, and/or GMS Decisions; As a member of Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, report to the President Commissioner of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk regarding all efforts, work, and activities.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Usaha Business Field
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan dan penasihat atas Bidang Usaha Industrial Plant dan Powerplant & Energi; Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Melaksanakan upaya, kegiatan, dan pekerjaan lainnya untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar, dan atau Keputusan RUPS; Selaku anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, melaporkan kepada Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya. <ol style="list-style-type: none"> Conduct supervision and advice on the Industrial Plant and Powerplant & Energy Business Sectors; Conduct cross-sectoral coordination and inter-institutional relations for the benefit of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Carry out efforts, activities, and other work for the benefit of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations, Company regulations, Articles of Association, and/or GMS Decisions; As a member of Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, report to the President Commissioner of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk regarding all efforts, work, and activities.
Harris Arthur Hedar	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan dan penasihat atas Bidang Usaha Sipil Umum, Pemasaran dan Legal; Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Melaksanakan upaya, kegiatan, dan pekerjaan lainnya untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar, dan atau Keputusan RUPS; Selaku anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, melaporkan kepada Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya. <ol style="list-style-type: none"> Conduct supervision and advice on the General Civil, Marketing and Legal Business Sectors; Conduct cross-sectoral coordination and inter-institutional relations for the benefit of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Carry out efforts, activities, and other work for the benefit of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations, Company regulations, Articles of Association, and or GMS Decisions; As a member of Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, report to the President Commissioner of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk regarding all efforts, work, and activities.
Firdaus Ali	Komisaris Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan dan penasihat atas Bidang Quality, Health, Safety, dan Environment (QHSE) serta Bidang Human Capital dan Pengembangan; Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Melaksanakan upaya, kegiatan, dan pekerjaan lainnya untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar, dan atau Keputusan RUPS; Selaku anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, melaporkan kepada Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya. <ol style="list-style-type: none"> Conduct supervision and advice on the Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE) Sector and the Human Capital and Development Sector; Conduct cross-sectoral coordination and inter-institutional relations for the benefit of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk; Carry out efforts, activities, and other work for the benefit of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations, Company regulations, Articles of Association, and/or GMS Decisions; As a member of Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, report to the President Commissioner of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk regarding all efforts, work, and activities.

PERNYATAAN BAHWA DEWAN KOMISARIS MEMILIKI PEDOMAN ATAU PIAGAM (CHARTER) DEWAN KOMISARIS

Perseroan telah menyusun Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) sebagai landasan utama dalam memastikan pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif, efisien, dan berintegritas. Pedoman ini dirancang untuk memperjelas alur komunikasi, koordinasi, serta pembagian tugas antara organ Perseroan dan Dewan Komisaris secara terstruktur, sistematis, dan konsisten. Pedoman tersebut mencakup prinsip-prinsip GCG, sehingga setiap aktivitas dapat dijalankan dengan selaras terhadap visi dan misi Perseroan.

Sebagai bentuk komitmen untuk menjaga relevansi dengan dinamika bisnis, Perseroan secara berkala melakukan evaluasi terhadap *Board Manual*, *Code of Corporate Governance*, dan *Code of Ethics*. Hasil *review* dan sosialisasi tersebut telah ditetapkan sebagai pedoman terbaru yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Januari 2023. Isi *Board Manual* Dewan Komisaris mengatur hal-hal antara lain:

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris;
2. Kriteria Dewan Komisaris;
3. Masa Jabatan Dewan Komisaris;
4. Program Pengenalan Dewan Komisaris;
5. Komisaris Independen;
6. Etika Jabatan Dewan Komisaris;
7. Rapat Dewan Komisaris;
8. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris;
9. Benturan Kepentingan Dewan Komisaris;
10. Hubungan Kerja dengan Direksi;
11. Komite yang Membantu Dewan Komisaris;
12. Sekretaris Dewan Komisaris.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA DASAR PENGANGKATANNYA

Di tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 6 (enam) orang. Komposisi tersebut terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris, dan 4 (empat) Komisaris Independen. Komposisi ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun susunan Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Office Period	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Jarot Widyoko	Komisaris Utama President Commissioner	8 Juni 2020 – RUPST 2025 June 8, 2020 – 2025 AGMS	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 AGMS resolution dated June 8, 2020
Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner	8 Juni 2020 – RUPST 2025 September 2, 2021 – 2026 AGMS	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 AGMS resolution dated June 8, 2020

STATEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS THAT HAS A BOARD OF COMMISSIONERS GUIDELINES OR CHARTER

The Company has prepared the Board of Directors and Board of Commissioners Work Procedure Guidelines (*Board Manual*) as the main foundation in ensuring the implementation of effective, efficient and integrity supervisory duties. This guideline is designed to clarify the flow of communication, coordination, and division of duties between the Company's organs and Board of Commissioners in a structured, systematic, and consistent manner. The guidelines include GCG principles, so that every activity can be carried out in line with the Company's vision and mission.

As a commitment to maintain relevance to business dynamics, the Company periodically evaluates the *Board Manual*, *Code of Corporate Governance*, and *Code of Conduct*. The results of the review and socialization have been established as the latest guidelines signed by the Board of Directors and Board of Commissioners in January 2023. The *Board Manual* contents for Board of Commissioners regulates, among others:

1. Board of Commissioners' Duties, Authority and Obligations;
2. Board of Commissioners' Criteria ;
3. Board of Commissioners' Term of Office;
4. Board of Commissioners' Introduction Program;
5. Independent Commissioners;
6. Board of Commissioners' Job Ethics;
7. Board of Commissioners' Meetings;
8. Board of Commissioners' Performance appraisal;
9. Board of Commissioners' Conflicts of Interest
10. Working Relations with Board of Directors;
11. Committees Under Board of Commissioners
12. Secretary of Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS STRUCTURE, NUMBER, COMPOSITION AND BASIS FOR APPOINTMENT

In 2024, there were changes in the Board of Commissioners composition, where the Company's Board of Commissioners amounted to 6 (six) persons. The composition consists of 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 4 (four) Independent Commissioners. This composition has fulfilled the provisions stipulated in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the number of members of the Company's Board of Commissioners. The Board of Commissioners composition as of December 31, 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Office Period	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Rusmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	2 September 2021 – RUPST 2026 September 2, 2021 – 2026 AGMS	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2021 EGMS resolution dated September 2, 2021
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	4 Mei 2023 – RUPST 2028 May 4, 2023 – 2028 AGMS	Ke-2 2nd	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Mei 2023 AGMS resolution dated May 4, 2023
Harris Arthur Hedar	Komisaris Independen Independent Commissioner	8 Juni 2020 – RUPST 2025 June 8, 2020 – 2025 AGMS	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 AGMS resolution dated June 8, 2020
Firdaus Ali	Komisaris Commissioner	8 Juni 2020 – RUPST 2025 June 8, 2020 – 2025 AGMS	Ke-1 1st	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Juni 2020 AGMS resolution dated June 8, 2020

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait, termasuk ketentuan tentang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik yang dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan lulus *fit and proper test* sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS FIT AND PROPER TEST AND BASIS OF APPOINTMENT

The entire Board of Commissioners members have fulfilled the criteria and requirements in the fit and proper test in accordance with Limited Liability Company Law, the Company's Articles of Association, Good Corporate Governance regulations related to, and other relevant rules and regulations, including provisions regarding Independent Commissioners. All members of Board of Commissioners have adequate integrity, competencies and reputation, as evidenced by passing the fit and proper test as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementer	Tanggal Efektif Effective Date
Jarot Widyoko	Komisaris Utama President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	8 Juni 2020 June 8, 2020
Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	8 Juni 2020 June 8, 2020
Rusmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	2 September 2021 September 2, 2021
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	4 Mei 2023 May 4, 2023
Harris Arthur Hedar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	8 Juni 2020 June 8, 2020
Firdaus Ali	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	8 Juni 2020 June 8, 2020

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPATKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 7.i telah uraikan terkait keputusan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Dalam hal ini, Dewan Komisaris juga menetapkan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas beberapa tindakan yang tertuang pada Anggaran Dasar Perseroan melalui Surat Nomor DK.01.01/A.DEKOM.00034/2024 Tanggal 09 April 2024 perihal Kebijakan Ambang Batas Kewenangan Transaksi pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan.

DECISIONS REQUIRED BOARD OF COMMISSIONERS' APPROVAL

Article 12 paragraph 7.i of the Company's Articles of Association has outlined the Board of Directors' decisions that must obtain approval from the Board of Commissioners. In this case, the Board of Commissioners also determines the Limitations and/or Criteria for the Authority of Board of Directors, Board of Commissioners, and Series A Dwiwarna Shareholders for several actions stated in the Company's Articles of Association through Letter No. DK.01.01/A.DEKOM.00034/2024 dated April 9, 2024 concerning the Policy on Threshold of Transaction Authority at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Subsidiaries.

Keputusan Direksi yang perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 12 ayat 7.i Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Kolaborasi dalam rangka Peningkatan Ekosistem Pariwisata dan Perhotelan melalui skema Debt to Asset Swap dan Shares Swap.
2. Persetujuan Perubahan Struktur Permodalan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.
3. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perseroan di Kota Batam.
4. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Benturan kepentingan Dewan Komisaris adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan individual anggota Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan Perseroan untuk meraih laba, meningkatkan nilai Perseroan, mencapai visi dan menjalankan misi Perseroan serta melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris WIKA mematuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Beberapa prinsip yang dianut untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris selalu menghindari adanya benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait;
2. Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam tugas pengawasan Perseroan;
3. Dewan Komisaris berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain;
4. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan;
5. Dewan Komisaris berkewajiban membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

The Board of Directors' decisions that require approval from the Board of Commissioners, as described in Article 12 paragraph 7.i of the Company's Articles of Association, are as follows:

1. Application for Approval of the Implementation of Collaboration in the Framework of Improving the Tourism and Hospitality Ecosystem through the Debt to Asset Swap and Shares Swap schemes.
2. Approval of Changes to the Capital Structure of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk at PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.
3. Approval of the Opening of the Company's Branch Office in Batam City.
4. Approval of Changes in the Organizational Structure of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

MANAGEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS' CONFLICTS OF INTEREST

Conflict of interests within the Board of Commissioners pertains to conditions where the individual interests of a member of Board of Commissioners has a potential conflict with the Company's profitability, value achievement, vision and mission, as well the implementation of GMS resolutions.

WIKA's Board of Commissioners complies with OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflicts of Interest. The principles adopted to prevent conflicts of interest and the continued implications that often arise include:

1. Board of Commissioners must avoid any conflict of interest in carrying out their duties. Board of Commissioners will not use their position for personal interests or for the benefit of other people or other parties;
2. Board of Commissioners must avoid any activity that can affect their independence in the Company's supervisory duties;
3. Board of Commissioners is obliged to fill the a Special Register showing their ownership of shares and/or their families in other companies;
4. If there is a conflict of interest, it must be disclosed, and the Commissioner concerned must not involve themselves in the decision-making process;
5. Board of Commissioners is obliged to make statements regarding conflicts of interest related to matters contained in the Company's Work Plan and Budget.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris, baik di Perseroan maupun di perusahaan lain, secara berkala diungkapkan dalam laporan daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, transparansi mengenai saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris di Perseroan dapat dilihat berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		WIKA	Perusahaan Lain Other Companies
Jarot Widyoko	Komisaris Utama President Commissioner	-	-
Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Rusmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Harris Arthur Hedar	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Firdaus Ali	Komisaris Commissioner	-	-

BOARD OF COMMISSIONERS SHARE OWNERSHIP

Share ownership by the Board of Commissioners, both in the Company and in other companies, is regularly disclosed in the report on the list of share ownership of members of Board of Commissioners. Thus, transparency regarding the shares owned by the Board of Commissioners in the Company can be seen below:

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Dalam *Board Manual*, Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

POLICY ON BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITIONS

As stated in the Board Manual, members of Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Members of Board of Directors of other State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Privately Owned Enterprises.
2. Other positions based on laws and regulations, political party management and/or candidates/legislative members.
3. Other positions that may lead to a conflict of interest.

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Company/Institution	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Other Company/Institution
Jarot Widyoko	Komisaris Utama President Commissioner	Jabatan Fungsional, Pengelola Sumber Daya Air Ahli Utama Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Functional Position, Water Resources Manager Main Expert Secretariat of the Directorate General, Directorate General of Water Resources	Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ministry of Public Works (PU)
Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Rusmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Dosen Fakultas Teknik Audit Committee Lecturer, Faculty of Engineering	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Gadjah Mada University, Yogyakarta

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Company/Institution	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Other Company/Institution
Harris Arthur Hedar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Dosen Tetap Pasca Sarjana Permanent Lecturer, Postgraduate	Universitas Jayabaya Jakarta Jayabaya Jakarta, University
Firdaus Ali	Komisaris Commissioner	Dosen dan Peneliti Program Studi Teknik Lingkungan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Lecturer and Researcher, Environmental Engineering Study Program, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering	Universitas Indonesia Jakarta University of Indonesia, Jakarta

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

AFFILIATION OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

All members of the Company's Board of Commissioners have no affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors or Shareholders, as shown in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Ya Yes	Tidak No
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No				
Jarot Widyoko	Komisaris Utama President Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rusmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Harris Arthur Hedar	Komisaris Independen Independent Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Firdaus Ali	Komisaris Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT TERSEBUT TERMASUK KEHADIRAN DALAM RUPS

Kebijakan rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Board Manual, di mana rapat Dewan Komisaris diadakan paling sedikit setiap bulan sekali, di mana dalam rapat tersebut mengundang Direksi. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Informasi Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi, dan RUPS

Rapat Internal Dewan Komisaris

Di tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

POLICY AND FREQUENCY OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS, JOINT MEETINGS OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS AND ATTENDANCE OF MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AT THE MEETING INCLUDING ATTENDANCE AT THE GMS

The Board of Commissioners meeting policy is set out in the Board Manual, where Board of Commissioners meetings are held at least once a month, and Board of Directors can be invited to the meetings. All Board of Commissioners decisions are taken at a Board of Commissioners meeting. Board of Commissioners may convene at any time at the request of 1 (one) or several members of Board of Commissioners, at the request of Board of Directors, or at the written request of 1 (one) or several Shareholders who represent at least 1/10 (one tenth) of the total shares with voting rights, by mentioning the matters to be discussed.

Information on Attendance of Members of Board of Commissioners in Board of Commissioners Meeting, Joint Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners, and GMS

Internal Board of Commissioners Meeting

In 2024, the Board of Commissioners has held 10 (ten) internal meetings of Board of Commissioners with the following attendance levels and meeting agendas:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attended/Not Attended	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	15 Januari 2024 January 15, 2024	1. Hasil Evaluasi Komite Audit 2. Pemaparan Komite Pemantau Risiko 3. Surat Masuk Dewan Komisaris 4. Lain-lain 1. Results of Audit Committee's Evaluation 2. Risk Monitoring Committee's Presentation 3. Incoming Letters for Board of Commissioners 4. Others	Jarot Widyoko	✓	
			Satya Bhakti Parikesit *)	✓	
			Firdaus Ali	✓	
			Adityawarman	✓	
			Harris Arthur Hedar	✓	
			Rusmanto	✓	
			Suryo Hapsoro Tri Utomo	✓	
2	28 Februari 2024 February 28, 2024	Pembahasan Rencana Perubahan Nomenklatur Direksi dan Silaturahmi dengan Kandidat Pengurus PT WIK A Realty Discussion of Plan to Change the Nomenclature of Board of Directors and Meeting with Candidates for the Management of PT WIK A Realty	Jarot Widyoko	✓	
			Satya Bhakti Parikesit *)	✓	
			Firdaus Ali	✓	
			Adityawarman	✓	
			Harris Arthur Hedar	✓	
			Rusmanto	✓	
			Suryo Hapsoro Tri Utomo	✓	
3	05 Maret 2024 March 05, 2024	1. Update 8 Stream Penyelesaian Keuangan Perusahaan 2. Hasil Evaluasi Komite Audit atas Kinerja sampai dengan bulan Januari 2024 1. Update on the 8 Streams of the Company's Financial Recovery 2. Results of Audit Committee's Evaluation on Performance up to January 2024	Jarot Widyoko	✓	
			Satya Bhakti Parikesit *)	✓	
			Firdaus Ali	✓	
			Adityawarman	✓	
			Harris Arthur Hedar	✓	
			Rusmanto	✓	
			Suryo Hapsoro Tri Utomo	✓	

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attended/Not Attended	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
4	23 April 2024 April 23, 2024	1. Hasil Evaluasi Komite Audit atas Kinerja PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jarot Widyoko	√	
		2. Pemaparan Komite Pemantau Risiko	Satya Bhakti Parikesit *)	√	
		3. Update RUPS Tahunan dan Penetapan Pimpinan RUPS Tahunan Tahun Anggaran 2023	Firdaus Ali	√	
		4. Surat Masuk Dewan Komisaris	Adityawarman	√	
		5. Lain-lain	Harris Arthur Hedar	√	
5	11 Juni 2024 June 11, 2024	1. Results of Audit Committee's Evaluation on the Performance of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Rusmanto	√	
		2. Risk Monitoring Committee's Presentation			
		3. Update on the Annual GMS and Determination of the Leadership of Annual GMS for the 2023 Fiscal Year	Suryo Hapsoro Tri Utomo	√	
		4. Incoming Letters for Board of Commissioners			
		5. Others			
6	22 Juli 2024 July 22, 2024	1. Hasil Evaluasi Komite Audit atas Kinerja PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jarot Widyoko	√	
		2. Hasil Evaluasi Komite Pemantau Risiko	Adityawarman	√	
		3. Surat Masuk Dewan Komisaris	Rusmanto	√	
		4. Lain-lain			
7	06 September 2024 September 06, 2024	1. Results of Audit Committee's Evaluation on the Performance of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Suryo Hapsoro Tri Utomo	√	
		2. Results of Risk Monitoring Committee's Evaluation	Harris Arthur Hedar	√	
		3. Incoming Letters for Board of Commissioners	Firdaus Ali	√	
		4. Others			
8	11 Oktober 2024 October 11, 2024	1. Hasil Evaluasi Komite Audit atas Kinerja PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jarot Widyoko	√	
		2. Hasil Evaluasi Komite Pemantau Risiko	Adityawarman	√	
		3. Surat Masuk Dewan Komisaris	Rusmanto	√	
		4. Lain-lain			
8	11 Oktober 2024 October 11, 2024	1. Results of Audit Committee's Evaluation	Suryo Hapsoro Tri Utomo	√	
		2. Results of Risk Monitoring Committee's Evaluation			
		3. Incoming Letters for Board of Commissioners	Harris Arthur Hedar	√	
		4. Others	Firdaus Ali	√	

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Hadir/Tidak Hadir Attended/Not Attended	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
9	12 November 2024	1. Hasil Evaluasi Laporan Bulanan oleh Komite Audit	Jarot Widyoko	✓	
		2. Hasil Evaluasi Laporan Bulanan Komite Pemantau Risiko	Adityawarman	✓	
		3. Pembahasan Permohonan Persetujuan Pengesahan atas tindakan Direksi WIKA dalam Penyelesaian Kewajiban PT Wijaya Karya Rekrayasa Konstruksi/(PT WRK) yang bersumber dari Penggunaan Fasilitas Non Cash Loan di Bank Mandiri	Rusmanto	✓	
		4. Pembahasan Usulan Konsultasi Anggaran Tantiem Direksi & Dewan Komisaris Tahun 2025	Suryo Hapsoro Tri Utomo	✓	
			Harris Arthur Hedar	✓	
		Firdaus Ali	✓		
	November 12, 2024	1. Results of Monthly Report Evaluation by Audit Committee	Jarot Widyoko	✓	
		2. Results of Monthly Report Evaluation by Risk Monitoring Committee	Adityawarman	✓	
		3. Discussion of the Request for Approval of Ratification of the actions of WIKA Board of Directors in the Settlement of Obligations of PT Wijaya Karya Rekrayasa Konstruksi/(PT WRK) originating from the Use of Non-Cash Loan Facilities at Bank Mandiri	Rusmanto	✓	
		4. Discussion of the Proposal for Consultation on the 2025 Board of Directors & Board of Commissioners Tantiem Budget	Suryo Hapsoro Tri Utomo	✓	
			Harris Arthur Hedar	✓	
		5. Incoming Letters for Board of Commissioners			
6. Others					
10	16 Desember 2024	1. Surat Masuk Dewan Komisaris	Jarot Widyoko	✓	
		2. Lain-lain	Adityawarman	✓	
		1. Incoming Letters for Board of Commissioners	Rusmanto	✓	
			Suryo Hapsoro Tri Utomo	✓	
		2. Others	Harris Arthur Hedar	✓	
		Firdaus Ali	✓		

*) Selesai masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris efektif per 30 April 2024

*) End of term of office as member of the Board of Commissioners since April 30, 2024

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Di tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan menyertakan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Board of Commissioners Meeting with Board of Directors

In 2024, the Board of Commissioners has held 12 (twelve) Board of Commissioners meetings involving the Board of Directors with the following attendance levels and meeting agendas:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants					
			Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kehadiran Attendance		Direksi Board of Directors	Kehadiran Attendance	
				Hadir Yes	Tidak No		Hadir Yes	Tidak No
1	16 Januari 2024 January 16, 2024	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya	Jarot Widyoko	✓		Agung Budi Waskito	✓	
		2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan November 2023	Satya Bhakti Parikesit *)	✓		Hananto Aji	✓	
		3. Pembahasan Lanjutan RKAP WIKA Tahun 2024 dan Kontrak Manajemen Tahun 2024	Firdaus Ali	✓		Harum Akhmad Zuhdi	✓	
		4. Pembahasan Rencana Restrukturisasi	Adityawarman	✓		Rudy Hartono **)		✓
		5. Lain-lain	Harris Arthur Hedar	✓		Ayu Widya Kiswari ***)	✓	
		1. Follow-up to the Results of previous Board of Commissioners Meeting involving Board of Directors (Board meeting)	Rusmanto	✓		Adityo Kusumo	✓	
		2. Discussion and Input from Board of Commissioners on the Performance Results of WIKA and Subsidiaries until November 2023						
		3. Continued Discussion of WIKA's 2024 RKAP and 2024 Management Contract	Suryo Hapsoro Tri Utomo	✓		Hadjar Seti Adji	✓	
		4. Discussion of the Restructuring Plan						
		5. Others						
2	29 Januari 2024 January 29, 2024	1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk termasuk didalamnya rencana pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2024	Jarot Widyoko	✓		Agung Budi Waskito	✓	
		2. Pengesahan Kontrak Manajemen antara Direksi dengan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2024	Satya Bhakti Parikesit *)	✓		Hananto Aji	✓	
		3. Persetujuan Dewan Komisaris atas Aksi Korporasi Perusahaan Tahun 2024	Firdaus Ali	✓		Harum Akhmad Zuhdi	✓	
		1. Approval and Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk including the implementation plan for the Social and Environmental Responsibility Program (CSR) and the Work Plan and Budget (RKA) of Board of Commissioners for 2024	Adityawarman	✓		Rudy Hartono **)	✓	
		2. Ratification of the Management Contract between Board of Directors and Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for 2024	Harris Arthur Hedar	✓		Ayu Widya Kiswari ***)	✓	
		3. Board of Commissioners' approval for the Company's Corporate Actions for 2024	Rusmanto	✓		Adityo Kusumo	✓	
		2. Ratification of the Management Contract between Board of Directors and Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for 2024	Suryo Hapsoro Tri Utomo	✓		Hadjar Seti Adji	✓	
		3. Board of Commissioners' approval for the Company's Corporate Actions for 2024						

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants					
			Dewan Komisaris Komisaris Board of Commissioners	Kehadiran Attendance		Direksi Board of Directors	Kehadiran Attendance	
				Hadir Yes	Tidak No		Hadir Yes	Tidak No
3	06 Februari 2024 February 06, 2024	1. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Konsultasi KPI 2. Pembahasan Update Kajian PMN Tahun 2024 3. Pembahasan Debt to Asset Swab PT WIKA Realty 4. Lain-lain 1. Discussion of Follow-up to KPI Consultation Results 2. Discussion of PMN Study Update for 2024 3. Discussion of Debt to Asset Swab PT WIKA Realty 4. Others	Jarot Widyoko	✓		Agung Budi Waskito	✓	
			Satya Bhakti Parikesit *)	✓		Hananto Aji	✓	
			Firdaus Ali	✓		Harum Akhmad Zuhdi	✓	
			Adityawarman	✓		Rudy Hartono **)	✓	
			Harris Arthur Hedar	✓		Ayu Widya Kiswari ***)	✓	
			Rusmanto	✓		Adityo Kusumo	✓	
			Suryo Hapsoro Tri Utomo	✓		Hadjar Seti Adji	✓	
4	05 Maret 2024 March 05, 2024	1. Pembahasan 8 Stream Penyehatan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 2. Pembahasan Executive Summary Laporan Hasil Usaha Bulan Januari 2024 3. Pembahasan Rencana Implementasi SAP Anak Perusahaan 4. Pembahasan Penetapan Harga Final Rights Issue 5. Lain-lain 1. Discussion of 8 Streams of Financial Recovery of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 2. Discussion of Executive Summary of January 2024 Business Results Report 3. Discussion of Subsidiary SAP Implementation Plan 4. Discussion of Final Rights Issue Pricing 5. Others	Jarot Widyoko	✓		Agung Budi Waskito	✓	
			Satya Bhakti Parikesit *)	✓		Hananto Aji	✓	
			Firdaus Ali	✓		Harum Akhmad Zuhdi	✓	
			Adityawarman	✓		Rudy Hartono **)	✓	
			Harris Arthur Hedar	✓		Ayu Widya Kiswari ***)	✓	
			Rusmanto	✓		Adityo Kusumo	✓	
			Suryo Hapsoro Tri Utomo	✓		Hadjar Seti Adji	✓	
5	30 April 2024 April 30, 2024	1. Pembahasan Executive Summary Laporan Hasil Usaha Bulan Februari 2024 2. Pembahasan Usulan Pengalihan Saham PT WIKA Beton dan Perubahan Struktur Permodalan PT PSBI 3. Pembahasan Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 4. Pembahasan Definisi Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto dan PDPK 5. Lain-lain 1. Discussion of Executive Summary of February 2024 Business Results Report 2. Discussion of Proposal for Transfer of PT WIKA Beton Shares and Changes in PT PSBI Capital Structure 3. Discussion of Preparation for Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for Fiscal Year 2023 4. Discussion of Definition of Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Receivables and PDPK 5. Others	Jarot Widyoko	✓		Agung Budi Waskito	✓	
			Firdaus Ali	✓		Hananto Aji	✓	
			Adityawarman	✓		Harum Akhmad Zuhdi	✓	
			Harris Arthur Hedar	✓		Rudy Hartono **)	✓	
			Rusmanto	✓		Ayu Widya Kiswari ***)	✓	
						Adityo Kusumo	✓	
			Suryo Hapsoro Tri Utomo	✓		Hadjar Seti Adji	✓	

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants					
			Dewan Komisaris Komisaris Board of Commissioners	Kehadiran Attendance		Direksi Board of Directors	Kehadiran Attendance	
				Hadir Yes	Tidak No		Hadir Yes	Tidak No
6	13 Juni 2024 June 13, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan April 2024 Pembahasan Rancangan RJPP WIKA Tahun 2025-2029 Pembahasan mengenai Pelepasan Saham HIPRO Lain-lain 	Jarot Widyoko	√		Agung Budi Waskito	√	
			Adityawarman	√		Adityo Kusumo	√	
			Rusmanto	√		Hananto Aji	√	
			Suryo Hapsoro Tri Utomo	√		Harum Akhmad Zuhdi	√	
			Harris Arthur Hedar	√		Hadjar Seti Adji	√	
7	12 Juli 2024 July 12, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Discussion of the Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners Meeting Including Board of Directors (Board meeting) Discussion and Input from Board of Commissioners on the Performance Results of WIKA and Subsidiaries until April 2024 Discussion of the Draft of WIKA RJPP for 2025-2029 Discussion on the Release of HIPRO Shares Others 	Firdaus Ali	√		Sumadi	√	
			Jarot Widyoko	√		Agung Budi Waskito	√	
			Adityawarman	√		Adityo Kusumo	√	
			Rusmanto	√		Hananto Aji	√	
			Suryo Hapsoro Tri Utomo	√		Harum Akhmad Zuhdi	√	
8	22 Juli 2024 July 22, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Hasil Usaha sampai dengan Bulan Mei 2024 dan Proyeksi Kinerja sampai dengan Bulan Juni 2024 Pembahasan RJPP WIKA Tahun 2025-2029 Lain-lain Discussion of Business Results Report until May 2024 and Performance Projection until June 2024 Discussion of WIKA's RJPP 2025-2029 Others 	Harris Arthur Hedar	√		Hadjar Seti Adji	√	
			Firdaus Ali	√		Sumadi	√	
			Jarot Widyoko	√		Agung Budi Waskito	√	
			Adityawarman	√		Adityo Kusumo	√	
			Rusmanto	√		Hananto Aji	√	
9	25 September 2024 September 25, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Further discussion of WIKA's 2025-2029 RJPP Draft Discussion of Business Results Report up to May 2024 and Performance Projections up to June 2024 Others Discussion of Business Results Report until July 2024 and Performance Projection until August 2024 Discussion of BPKP Review Results related to Proposed Changes to PMN Use in 2024 Others 	Suryo Hapsoro Tri Utomo	√		Harum Akhmad Zuhdi	√	
			Harris Arthur Hedar	√		Hadjar Seti Adji	√	
			Jarot Widyoko	√		Agung Budi Waskito	√	
			Adityawarman	√		Adityo Kusumo	√	
			Rusmanto	√		Hananto Aji	√	

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants					
			Dewan Komisaris Komisaris Board of Commissioners	Kehadiran Attendance		Direksi Board of Directors	Kehadiran Attendance	
				Hadir Yes	Tidak No		Hadir Yes	Tidak No
10	17 Oktober 2024 October 17, 2024	1. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Hasil Usaha sampai dengan Bulan Agustus 2024 dan Proyeksi Kinerja sampai dengan Bulan September 2024 3. Lain-lain 1. Discussion of the Follow-up to the Results of previous Board of Commissioners Meeting Including Board of Directors (Board meeting) 2. Discussion of Business Results Report until August 2024 and Performance Projections until September 2024 3. Others	Jarot Widyoko	√		Agung Budi Waskito	√	
			Adityawarman	√		Adityo Kusumo	√	
			Rusmanto	√		Hananto Aji	√	
			Suryo Hapsoro Tri Utomo	√		Harum Akhmad Zuhdi	√	
			Harris Arthur Hedar	√		Hadjar Seti Adji	√	
			Firdaus Ali	√		Sumadi	√	
11	28 November 2024 November 28, 2024	1. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Hasil Usaha sampai dengan Bulan Oktober 2024 dan Proyeksi Kinerja sampai dengan Bulan Desember 2024 3. Pembahasan Penyesuaian Struktur Organisasi untuk Pemenuhan RMI 4. Pembahasan Rancangan RKAP Tahun 2025 5. Pembahasan Usulan KPI Tahun 2025 6. Pembahasan Laporan Risk Manajemen 7. Lain-lain 1. Discussion of the Follow-up to the Results of previous Board of Commissioners Meeting Including Board of Directors (Board meeting) 2. Discussion of Business Results Report until October 2024 and Performance Projections until December 2024 3. Discussion of Adjustments to the Organizational Structure to Fulfill RMI 4. Discussion of the RKAP Draft for 2025 5. Discussion of the Proposed KPI for 2025 6. Discussion of the Risk Management Report 7. Others	Jarot Widyoko	√		Agung Budi Waskito	√	
			Adityawarman	√		Adityo Kusumo	√	
			Rusmanto	√		Hananto Aji	√	
			Suryo Hapsoro Tri Utomo	√		Harum Akhmad Zuhdi	√	
			Harris Arthur Hedar	√		Hadjar Seti Adji	√	
			Firdaus Ali	√		Sumadi	√	
12	19 Desember 2024 December 19, 2024	1. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Hasil Usaha sampai dengan Bulan November 2024 dan Proyeksi Kinerja/Hasil Usaha sampai dengan 31 Desember 2024 3. Pembahasan Finalisasi Rancangan RKAP Tahun 2025 4. Lain-lain 1. Discussion of the Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners Meeting Including Board of Directors (Board meeting) 2. Discussion of Business Results Report until November 2024 and the Performance/ Business Results Projection until December 31, 2024 3. Discussion of the Finalization of RKAP Draft for 2025 4. Others	Jarot Widyoko	√		Agung Budi Waskito	√	
			Adityawarman	√		Adityo Kusumo	√	
			Rusmanto	√		Hananto Aji	√	
			Suryo Hapsoro Tri Utomo	√		Harum Akhmad Zuhdi	√	
			Harris Arthur Hedar	√		Hadjar Seti Adji	√	
			Firdaus Ali	√		Sumadi	√	

Rapat Dewan Komisaris Khusus

Di tahun 2024, Dewan Komisaris tidak melaksanakan Rapat Dewan Komisaris Khusus.

Special Board of Commissioners Meeting

In 2024, the Board of Commissioners did not hold a Special Board of Commissioners Meeting.s



Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan RUPS

Meeting Frequency and Attendance Level of Board of Commissioners in Board of Commissioners Meetings, Board of Commissioners Meetings with Board of Directors, and GMS

Nama dan Jabatan Name and Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Internal Meeting		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Jarot Widyoko	10	10	100%
Satya Bhakti Parikesit*	4	4	100%
Adityawarman	10	10	100%
Rusmanto	10	10	100%
Suryo Hapsoro Tri Utomo	10	10	100%
Harris Arthur Hedar	10	10	100%
Firdaus Ali	10	10	100%

*) Selesai masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris efektif per 30 April 2024
*) End of term of office as member of Board of Commissioners since April 30, 2024

	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Board of Commissioners Meeting with Board of Directors			RUPS GMS		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
	12	12	100%	1	1	100%
	4	4	100%	-	-	-
	12	12	100%	1	1	100%
	12	12	100%	1	1	100%
	12	12	100%	1	1	100%
	12	12	100%	1	1	100%
	12	12	100%	1	1	100%

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris, Termasuk Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris yang Baru Diangkat

Perseroan berkomitmen mendukung pengembangan kapasitas Dewan Komisaris melalui berbagai program pelatihan dan pembelajaran. Pelatihan ini mencakup kegiatan internal maupun kolaborasi dengan lembaga eksternal yang kredibel. Dengan memperluas wawasan, meningkatkan keahlian, dan memperkuat kepemimpinan, inisiatif ini dirancang untuk memastikan Dewan Komisaris dapat menjalankan perannya secara optimal. Dukungan tersebut merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan memastikan tata kelola yang unggul.

Program Pengenalan Perusahaan bagi Komisaris Baru

Perseroan mengadakan program orientasi kepada anggota Dewan Komisaris yang baru guna memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris agar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang atau program lainnya. Tanggung jawab pengadaan program pengenalan ini berada pada Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Direktur Utama.

Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, antara lain:

1. Prinsip-prinsip dan implementasi *good corporate governance*;
2. Gambaran Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi;
5. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Perusahaan.

Di tahun 2024, terjadi perubahan dalam susunan Dewan Komisaris dengan diberhentikannya satu anggota komisaris. Meskipun demikian, anggota Dewan Komisaris lainnya tetap melanjutkan peran dan tanggung jawab mereka tanpa perubahan, dengan demikian tidak terdapat program pengenalan bagi Dewan Komisaris baru yang dilakukan di tahun 2024.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS

Policy on Training and/or Competency Development for Members of Board of Commissioners, including an Orientation Program for New Commissioners

The Company is committed to supporting the capacity development of Board of Commissioners through various training and development programs. This includes both internal activities and collaboration with credible external institutions. By broadening horizons, enhancing expertise and strengthening leadership, these initiatives are designed to ensure Board of Commissioners can perform their roles optimally. Such support is part of the Company's strategy to drive sustainable growth and ensure excellent governance.

New Commissioners Orientation Program

The Company conducts an orientation program for new members of Board of Commissioners to provide an understanding of the duties and responsibilities as members of Board of Commissioners to be carried out properly. The orientation program may include presentations, meetings, visits to the Company's facilities, visits to Regional Offices and Branch Offices or other programs. The person in charge for organizing this orientation program is the President Commissioner, or if he/she is unavailable, then the responsibility passes to the President Director.

The orientation program given to members of Board of Commissioners includes:

1. The principles and implementation of Good Corporate Governance;
2. The Company overview related to the objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
3. Information related to delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies and the audit committee;
4. Information on Board of Commissioners and Board of Directors duties and responsibilities;
5. Prevailing laws and regulations and Company policies

In 2024, there were changes in the Board of Commissioners' composition with the dismissal of one commissioner. However, the remaining members of Board of Commissioners continued their roles and responsibilities unchanged, thus no orientation program for new Board of Commissioners was conducted in 2024.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris dalam Tahun Buku

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Program ini dirancang untuk memperkuat keahlian strategis, memperdalam wawasan industri, dan memastikan penerapan praktik terbaik dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Berikut adalah daftar pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024:

Training and/or Competency Development of Members of Board of Commissioners in the Fiscal Year

Throughout 2024, Board of Commissioners have participated in various training and competency development programs. These programs are designed to strengthen strategic expertise, deepen industry insights, and ensure the application of best practices in carrying out leadership duties. The following is a list of training and competency development programs participated in by Board of Commissioners during 2024:

Nama dan Jabatan Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal Tempat/Tanggal	Penyelenggara Penyelenggara
Jarot Widyoko (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Pendidikan Sertifikasi Governansi dan Manajemen Risiko Governance and Risk Management Certification Education	Governansi dan Manajemen Risiko Governance and Risk Management	Jakarta, 17-18 Desember 2024 Jakarta, December 17-18, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/ LSPMR
Adityawarman (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Pelatihan/Review Course Training/Review Course	Manajemen Risiko Risk Management	Jakarta, 10-11 September 2024 Jakarta, September 10-11, 2024	LSPMKS
Rusmanto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Seminar	Sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Socialization of Guidelines for the Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance	Jakarta, 22 Januari 2024 Jakarta, January 22, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Suryo Hapsoro Tri Utomo (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Pelatihan/Review Course Training/Review Course	Manajemen Risiko Risk Management	Jakarta, 24-25 Oktober 2024 Jakarta, September 10-11, 2024	RAP Learning Center
	Seminar	Profesi Advokat : Tantangan dan Harapan dalam Menegakkan Access to Justice demi tercapainya Supremasi Hukum Advocacy Profession: Challenges and Hopes in Upholding Access to Justice for the Achievement of the Supremacy of Law	Jakarta, 13 September 2024 Jakarta, September 13, 2024	DPN Peradi dan Justitia Training Center
	Seminar	Capacity Building : Journal Review Process and Operating	Jakarta, 29-30 Oktober 2024 Jakarta, October 29-30, 2024	DPN Peradi dan Bank Indonesia
Harris Arthur Hedar (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Seminar	Tips dan Trik dalam Menangani dan Menyelesaikan Perkara Arbitrase Tips and Tricks for Handling and Resolving Arbitration Cases	Jakarta, 01 November 2024 Jakarta, November 22, 2024	DPN Peradi
	Seminar	Kiat-kiat dalam Membuat dan Memahami Kontrak yang benar (Practical Guideline on How to Make Agreement Correctly) Practical Guideline on How to Make Agreement Correctly	Jakarta, 22 November 2024 Jakarta, November 22, 2024	DPN Peradi

Nama dan Jabatan Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal Tempat/Tanggal	Penyelenggara Penyelenggara
Firdaus Ali (Komisaris) (Commissioner)	Seminar	Sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Socialization of Guidelines for the Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance	Jakarta, 22 Januari 2024 Jakarta, January 22, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
	Pendidikan Sertifikasi Governansi dan Manajemen Risiko Governance and Risk Management Certification Education	Governansi dan Manajemen Risiko Governance and Risk Management	Jakarta, 17-18 Desember 2024 Jakarta, December 17-18, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/LSPMR

KEPUTUSAN, REKOMENDASI DAN PELAKSANAAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah keputusan tertulis yang telah diambil oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024:

1. Tanggapan Dewan Komisaris atas Penetapan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2. Laporan Evaluasi Kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Pemberian Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perseroan di Kota Batam.
4. Penyampaian Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, terkait realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Tambahan Pekerjaan Penelaahan Terbatas (*Limited Review*) terhadap Laporan Keuangan Interim PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Konsolidasian untuk Periode 30 Juni 2024.
6. Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Kolaborasi dalam rangka Peningkatan Ekosistem Pariwisata dan Perhotelan melalui skema Debt to Asset Swap dan Shares Swap.
7. Permohonan Persetujuan Penetapan Pengurus Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
8. Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Kolaborasi dalam rangka Peningkatan Ekosistem Pariwisata dan Perhotelan melalui skema Debt to Asset Swap dan Shares Swap.
9. Persetujuan Perubahan Struktur Permodalan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.
10. Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP") PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2025 - 2029
11. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
12. Permohonan Konsultasi *Key Performance Indicators* (KPI) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2025.

BOARD OF COMMISSIONERS DECISIONS, RECOMMENDATIONS AND IMPLEMENTATION

The following are the written decisions made by the Board of Commissioners throughout 2024:

1. Board of Commissioners' response to the Determination of Additional State Capital Participation Funds for PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2. Public Accounting Firm (KAP) Performance Evaluation Report on the Provision of Audit Services for the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ending December 31, 2023.
3. Approval to Open a Company Branch Office in Batam City.
4. Submission of Decisions Outside the Board of Commissioners Meeting of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, regarding the realization of the number of shares issued in the Capital Increase with Pre-emptive Rights II (PMHMETD II).
5. Approval of the Appointment of a Public Accounting Firm to Conduct Additional Limited Review Work on the Interim Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Consolidation for the Period June 30, 2024.
6. Request for Approval of Collaboration Implementation in the context of Improving the Tourism and Hospitality Ecosystem through Debt to Asset Swap and Shares Swap schemes.
7. Application for Approval of the Establishment of the Management of Subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
8. Application for Approval of Collaboration Implementation in the context of Improving the Tourism and Hospitality Ecosystem through the Debt to Asset Swap and Shares Swap schemes.
9. Approval of Changes in the Capital Structure of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.
10. Long-Term Corporate Plan ("RJPP") of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for 2025-2029
11. Approval of Changes to the Organizational Structure of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
12. Request for Consultation on Key Performance Indicators (KPI) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the Fiscal Year 2025.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu dihitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Dewan Komisaris tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas pada:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - e. Mengundurkan diri. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan;
3. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir 1 a, b, dan c di atas, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c dan d di atas merupakan pemberhentian dengan tidak hormat;
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Komisaris, maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut;
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana memenuhi ketentuan Anggaran Dasar;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Masa jabatannya berakhir;
 - d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga Perseroan memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris;

BOARD OF COMMISSIONERS RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

The resignation and dismissal mechanism for Board of Commissioners is as follows:

1. The term of office for a member of Board of Commissioners is for a period commencing from the date determined by the GMS that appointed them, and ends at the closing of the 5th (fifth) AGMS after the date of their appointment, without diminishing the GMS right to dismiss before the end of their term of office if the member meets one or more, but not limited to the following reasons:
 - a. Cannot perform their duties properly;
 - b. Did not follow the provisions of the laws and regulations and/or the Articles of Association;
 - c. Engaged in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
 - d. Found guilty by a court decision that has permanent legal power; or
 - e. Resigned. Upon the expiry of their term, members of Board of Commissioners may be re-appointed by the GMS for 1 (one) more term of office.
2. In addition to the reasons for dismissing members of Board of Commissioners referred to point 1 above, members of Board of Commissioners may be dismissed by the GMS based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company.
3. Dismissal decisions for reasons as referred to points 1 a, b, and c above, are taken after the person has been given the opportunity to defend themselves. Dismissal for the reasons referred to points 1 letters c and d above result in dismissal with disrespect.
4. If for some reason the position of a member of Board of Commissioners is vacant, or the Company does not have a member of Board of Commissioners, a GMS must be held no later than 90 (ninety) calendar days after the vacancy occurs, to fill the vacancy;
5. The position of member of Board of Commissioners ends if:
 - a. Their resignation becomes effective as per the Articles of Association;
 - b. They passed away;
 - c. Their term in office ends;
 - d. They are dismissed by the GMS; and/or no longer fulfills the requirements as a member of Board of Commissioners based on prevailing laws and regulations;
 - e. They can no longer fulfill the requirements as a member of Board of Commissioners based on prevailing laws and regulations.
6. In the event that a member of Board of Commissioners resigns and causes the number of members of Board of Commissioners to be less than 2 (two) people, the resignation is valid if has been determined by the GMS, and a new member of Board of Commissioners has been appointed, so the Company meets the minimum requirements for the number of members of Board Commissioner.

7. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

7. For members of Board of Commissioners who resign before and after their term of office expires, except due to death, the person remains responsible for their actions until their resignation has been accepted by the GMS.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA KOMITE YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS PADA TAHUN BUKU MELIPUTI:

Prosedur Penilaian Kinerja

Dalam rangka memastikan kinerja seluruh organ pendukung GCG berjalan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara rutin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas fungsi organ-organ pendukung, termasuk Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG. Evaluasi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap organ menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung penerapan tata kelola yang berintegritas. Proses penilaian dilakukan berdasarkan:

1. *Self Assessment*;
2. *Peer Group Assessment*.
 - Sekretaris Dewan Komisaris
Penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian program kerja dan penilaiannya dari Dewan Komisaris. Pencapaian program kerja dilakukan secara mandiri/self assessment. Sedangkan penilaian Dewan Komisaris diberikan dalam diskusi atau rapat;
 - Komite Audit
Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja dan realisasi yang dicapai. Kemudian, juga mempertimbangkan pencapaian tahun sebelumnya dengan maksimal angka 100;
 - Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi baru dibentuk pada bulan Juli tahun 2023;
 - Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG
Penilaian kinerja Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja dan realisasi yang dicapai. Kemudian, juga mempertimbangkan pencapaian tahun sebelumnya dengan maksimal angka 100.

Kriteria yang Digunakan Seperti Capaian Kinerja Selama Tahun Buku, Kompetensi dan Kehadiran dalam Rapat

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF ITS SUPPORTING COMMITTEES IN THE FISCAL YEAR INCLUDES:

Performance Assessment Procedures

To ensure the performance of all GCG supporting organs in accordance with their roles and responsibilities, Board of Commissioners regularly conducts a comprehensive evaluation of the effectiveness of supporting organs' functions, including the Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Integrated Governance Committee, and Nomination, Remuneration and GCG Committee. This evaluation is designed to ensure that each organ performs its duties well in supporting the implementation of governance with integrity. The assessment process is conducted based on:

1. *Self Assessment*;
2. *Peer Grup Assessment*.
 - Secretary of Board of Commissioners
The assessment is based on work program achievements, which is done by self-assessment, and also assessed by Board of Commissioners through discussions or meetings;
 - Audit Committee
Audit Committee performance performance is based on their work plan and its realization, with comparison to the previous year's achievements with a maximum score of 100;
 - Risk Monitoring Committee and Integrated Governance Committee, which were recently formed in July 2023;
 - Nomination, Remuneration and GCG Committee
Performance appraisal of Nomination, Remuneration and GCG Committee is conducted by comparing the work plan and realization achieved. Then, it also considers the previous year's achievement with a maximum number of 100.

The Criteria Used such as Performance Achievements During The Fiscal Year, Competence and Attendance at Meetings

Realisasi Capaian Program dan KPI Tahun 2024
 Realization of Achievements of Program and KPIs in 2024

No	Indikator Indicator	Satuan Unit	Target 2024 2024 Target	Bobot Weight	Real 2024 2024 Real	Skor (Real x Bobot) Score (Real x Weight)
I	Aspek Pengawasan dan Pengarahan (50%) Supervision and Direction Aspect (50%)					
1	Rapat Dewan Komisaris: a. Jumlah Rapat b. Penyelesaian Risalah Rapat Board of Commissioners Meeting: a. Number of Meetings b. Completion of Meeting Minutes	Kali Times %	Min. 12 100	5% 5%	22 100	5% 5%

Realisasi Capaian Program dan KPI Tahun 2024
Realization of Achievements of Program and KPIs in 2024

No	Indikator Indicator	Satuan Unit	Target 2024 2024 Target	Bobot Weight	Real 2024 2024 Real	Skor (Real x Bobot) Score (Real x Weight)
2	Memberikan Keputusan atas Permintaan Persetujuan atau Rekomendasi dari Direksi Providing Decisions on Requests for Approval or Recommendations from the Board of Directors	Hari Days	Max. 30	6%	30	6%
3	Menyampaikan RKAP 2024 kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Submitting the 2024 RKAP to Series A Dwiwarna Shareholders	Hari Days	Max. 30	6%	30	6%
4	Memberikan Tanggapan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terhadap Kinerja Trilwulan Tahun 2024 Providing Responses to Series A Dwiwarna Shareholders on Quarterly Performance in 2024	Kali Times	Min. 3	6%	3	6%
5	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Internal Audit atau Auditor Eksternal Monitoring Follow-up on Internal Audit or External Auditor Findings	Kali Times	Min. 1	5%	1	5%
6	Evaluasi Pelaksanaan Auditor Eksternal (KAP) Evaluation of External Auditor (KAP) Implementation	Kali Times	Min. 1	5%	1	5%
7	Kunjungan ke Lapangan Proyek Project Site Visits	Kali Times	Min. 4	12%	5	12%
SKOR I SCORE I						50%
II	Aspek Pelaporan (30%) Reporting Aspect (30%)					
8	Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024 kepada Pemegang Saham Seri A Submission of the Board of Commissioners' Work Plan and Budget for 2024 to Series A Shareholders	Hari Days	Max. 30	15%	30	15%
9	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023 Preparation of the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for 2023	Kali Times	Min. 1	15%	1	15%
SKOR II SCORE II						30%
III	Aspek Dinamis (20%) Dynamic Aspect (20%)					
10	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assesment Follow-up on Recommendations from Assessment Results	%	100	10%	100	10%
11	Peningkatan Kompetensi dan Wawasan Dewan Komisaris Improving Board of Commissioners' Competencies and Knowledge	Kali Times	Min. 5	10%	8	10%
SKOR III SCORE III						20%
TOTAL (SKOR I + II + III) TOTAL (SCORE I + II + III)						100%

Komisaris Independen

Independent Commissioner



Komisaris Independen merupakan salah satu anggota dari Dewan Komisaris yang memiliki peranan dalam menjaga objektivitas dalam pengawasan Perseroan. Komisaris Independen tidak memiliki keterkaitan finansial, struktural, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham pengendali, yang bisa memengaruhi kemampuannya dalam menjalankan tugasnya secara independen sesuai prinsip-prinsip GCG. Tugas utama Komisaris Independen adalah melakukan pengawasan yang objektif terhadap jalannya operasional perusahaan dan mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Penunjukannya diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris untuk Emiten atau Perusahaan Publik.

KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Hingga 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 4 (empat) Komisaris Independen dari total 6 (enam) anggota Dewan Komisaris yang menjabat. Jumlah Komisaris Independen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, yang mewajibkan Komisaris Independen minimal 30% dari total jumlah anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, per 31 Desember 2024, komposisi Komisaris Independen Perseroan adalah sebagai berikut:

Independent Commissioner is members of Board of Commissioners whose role is to in maintaining objectivity in the Company's supervision. Independent Commissioners have no financial, structural or family relationships with members of Board of Commissioners, Board of Directors or controlling shareholders, which may affect their ability to perform their duties independently in accordance with GCG principles. The main duty of Independent Commissioners is to conduct objective supervision of the Company's operations and represent the interests of minority shareholders. Their appointment is regulated in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners for Issuers or Public Companies.

INDEPENDENT COMMISSIONER COMPOSITION AND MEMBERSHIP IN BOARD OF COMMISSIONERS

As of December 31, 2024, the Company has 4 (four) Independent Commissioners out of a total of 6 (six) serving members of Board of Commissioners. The number of Independent Commissioners is in accordance with the provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014, which requires Independent Commissioners to be at least 30% of the total number of members of Board of Commissioners. Thus, as of December 31, 2024, the Company's Independent Commissioner composition is as follows:

Nama Name	Periode Jabatan dan Masa Jabatan Period and Term of Office
Adityawarman	Periode pertama untuk masa jabatan 08 Juni 2020-RUPS Tahunan 2025. Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 08 Juni 2020. The first period for term of office June 08, 2020-2025 Annual GMS. Appointed as Independent Commissioner based on the resolution of Annual GMS for 2017 Fiscal Year dated June 08, 2020.
Rusmanto	Periode pertama untuk masa jabatan 02 September 2021-RUPS Tahunan 2026. Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 02 September 2021. The first period for term of office September 02, 2021-2026 Annual GMS. Appointed as Independent Commissioner based on the resolution of 2021 Extraordinary GMS dated September 02, 2021.
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Periode kedua untuk masa jabatan 04 Mei 2023-RUPS Tahunan 2028. Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 04 Mei 2023. The second period for term of office May 04, 2023-2028 Annual GMS. Appointed as Independent Commissioner based on the resolution of 2022 Annual GMS dated May 04, 2023.
Harris Arthur Hedar	Periode pertama untuk masa jabatan 08 Juni 2020-RUPS Tahunan 2025. Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 08 Juni 2020. The first period for term of office June 08, 2020-2025 Annual GMS. Appointed as Independent Commissioner based on the resolution of Annual GMS for 2017 Fiscal Year dated June 08, 2020.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria penentuan Komisaris Independen Perseroan telah disesuaikan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21 ayat 2, yang meliputi:

CRITERIA OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

The criteria for WIKA's Independent Commissioners have been adjusted to POJK No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies Article 21 paragraph 2, which includes:

No.	Kriteria Komisaris Independen Independent Commissioners' Criteria	Adityawarman	Rusmanto	Suryo Hapsoro Tri Utomo	Harris Arthur Hedar
1	Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last six months, except for reappointment as a Company Independent Commissioner for the following period.	✓	✓	✓	✓
2	Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Has no direct or indirect shareholding in the Company	✓	✓	✓	✓
3	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama Perseroan. Has no affiliation with the Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors or Majority Shareholders of the Company	✓	✓	✓	✓
4	Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Has no business relations, directly or indirectly, with the Company's business activities	✓	✓	✓	✓

PERNYATAAN TENTANG INDEPENDENSI Masing-masing KOMISARIS INDEPENDEN

Seluruh Komisaris Independen telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah membuat pernyataan independensi untuk menyatakan status independensinya. Pernyataan independensi tersebut diperbaharui secara berkala.

INDEPENDENT COMMISSIONERS' STATEMENT OF INDEPENDENCE

All Independent Commissioners have met the criteria according to the prevailing laws and regulations and have made statement of independence to declare their independence status. The independence statements are updated regularly.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen yang ditandatangani tahun 2024

Pernyataan Independensi Komisaris Independen yang ditandatangani tahun 2024

Adityawarman



Pernyataan Independensi Komisaris Independen yang ditandatangani tahun 2024

Pernyataan Independensi Komisaris Independen yang ditandatangani tahun 2024

Rusmanto



Pernyataan Independensi Komisaris Independen yang ditandatangani tahun 2024

Pernyataan Independensi Komisaris Independen yang ditandatangani tahun 2024

Suryo Hapsoro Tri Utomo



Pernyataan Independensi Komisaris Independen yang ditandatangani tahun 2024

Pernyataan Independensi Komisaris Independen yang ditandatangani tahun 2024

Harris Arthur Hedar



Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Board of Directors and Board of Commissioners Nomination and Remuneration

INFORMASI NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Prosedur Nominasi, Meliputi Uraian Singkat Mengenai Kebijakan dan Proses Nominasi Anggota Direksi

Prosedur nominasi Anggota Direksi berpedoman pada surat edaran KBUMN Nomor: S-8/Wk2.MBU/04/2021, yang mengatur bahwa setiap BUMN berkontribusi dalam mendukung Talent & Succession Management, maka melalui program *Cluster Talent Committee* (CTC). Setiap tahun, melalui program *Cluster Talent Committee* (CTC), setiap tahun BUMN akan mengirimkan nama-nama *nominated talent* BOD-1 untuk masuk ke dalam Talent Pool KBUMN. *Nominated talent* tersebut akan diseleksi untuk melihat *readiness talent*. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk juga terlibat dalam proses *assess readiness talent* dengan melakukan proses wawancara *nominated talent* dari BUMN klaster jasa infrastruktur lain.

Prosedur dan Pelaksanaan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Besaran remunerasi Direksi ditetapkan setiap tahun dalam RUPS. Pengkajian besaran remunerasi dilakukan oleh konsultan independen yang sudah memiliki pengalaman, mempunyai database yang kuat dalam menangani perusahaan sekelas Perseroan. Besaran remunerasi Direksi ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Perseroan menetapkan remunerasi Direksi dikaitkan dengan target pencapaian profit, kemampuan menjaga keberlangsungan dan pengembangan usaha WIKA. WIKA, melalui Dewan Komisaris, mempertimbangkan lima faktor utama dalam menetapkan usulan remunerasi Direksi, yakni:

1. Imbalan jasa untuk menutupi biaya-biaya yang diperlukan dalam menjalankan usaha;
2. Menghargai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki dan dibutuhkan oleh Perseroan;
3. Ketersediaan waktu secara penuh dalam mencurahkan tenaga dan pikiran guna menjalankan tugas Perseroan;
4. Kemampuan memitigasi risiko bagi Perseroan dan memberi imbalan terhadap tindakan kedinasan yang berisiko bagi pribadinya; dan
5. Menghargai pencapaian target sesuai dengan ukuran kinerja utama (*Key Performance Indicator*) yang ditetapkan.

INFORMATION ON NOMINATION AND REMUNERATION OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Nomination Procedure, Includes a Brief Description of the Policy and Nomination Process for Members of Board of Directors

The nomination procedure for members of Board of Directors is guided by Ministry of SOE circular letter Number: S-8/Wk2.MBU/04/2021, which stipulates that each SOE contributes to supporting Talent & Succession Management, through the Cluster Talent Committee (CTC) program. Every year, through the Cluster Talent Committee (CTC) program, SOE will send BOD-1 nominated talent names to enter the Ministry of SOE Talent Pool. The Nominated Talent will be selected to identify the Readiness Talent. Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is also involved in the process of assessing Readiness Talent by conducting an interview process for nominated Talents from other SOEs of the Infrastructure Services cluster.

Procedures and Implementation of Remuneration for Directors and Board of Commissioners

Procedure for Determining Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners

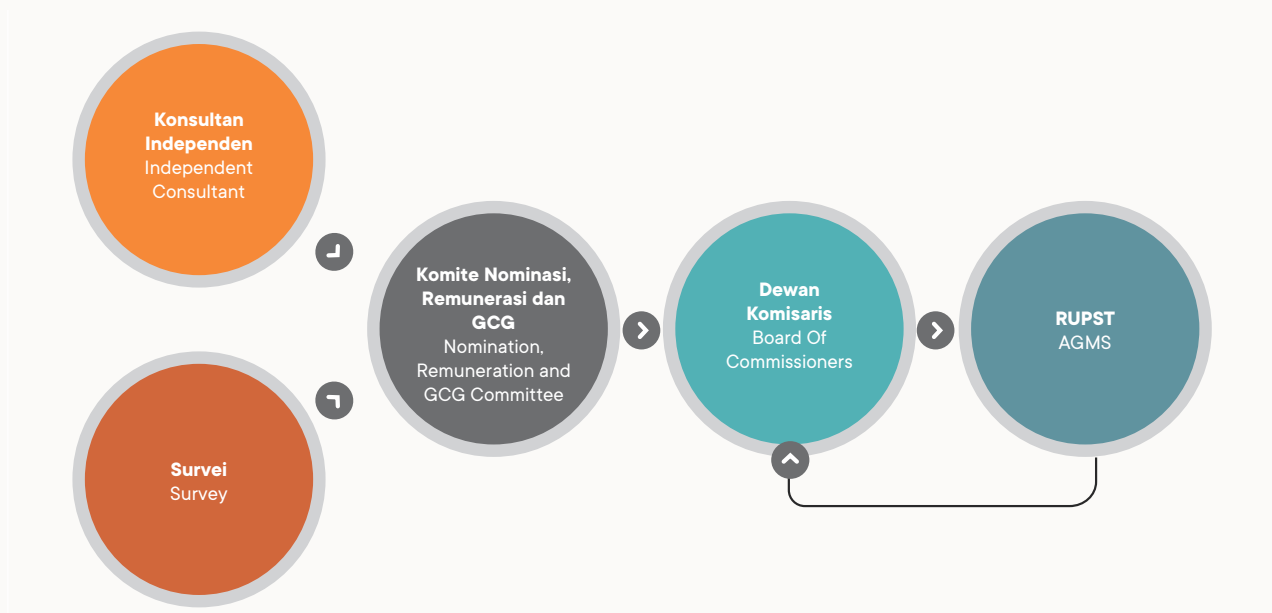
The Board of Directors remuneration is determined annually in the GMS. The remuneration assessment is conducted by experienced independent consultant using a strong database for similar companies as the Company. The amount of remuneration for Board of Directors is determined by taking into account applicable regulations.

The Board of Directors remuneration is determined based on the achievement of profit target, the ability to maintain sustainability and the development of WIKA's business. WIKA, through the Board of Commissioners, considers five main factors in determining the Board of Directors remuneration, namely:

1. Compensation to cover costs needed to run a business;
2. Appreciation for the competencies and experience possessed and needed by the Company;
3. Full availability of time in devoting energy and thoughts to performing the duties;
4. Ability to mitigate risks for the Company, and rewards for personal actions that pose a risk to the person; and
5. Appreciation for the achievement of KPI targets set.

Dewan Komisaris

Penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris telah ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS dengan prosedur penetapan sebagai berikut:



1. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG meminta konsultan independen melakukan kajian remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melakukan survei pasar pada perusahaan sejenis dan sekelas Perseroan;
3. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
4. Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas usulan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG untuk kemudian diusulkan dalam RUPS;
5. Pemegang Saham melakukan pembahasan pada RUPS;
6. RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi.

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Seperti Gaji, Tunjangan, Tantiem/Bonus dan Lainnya

Dewan Komisaris dan Direksi menerima remunerasi tetap dan tidak tetap. Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang terdiri dari:

1. Gaji/Honorarium;
2. Tunjangan;
3. Fasilitas; dan
4. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus; dan
5. Long Term Incentive (LTI).

Board of Commissioners

Shareholders determine the amount of remuneration for Board of Commissioners through the GMS with following procedure:

1. Nomination, Remuneration and GCG Committee requests an independent consultant to conduct a remuneration review for Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Nomination, Remuneration and GCG Committee conducts a market survey of similar companies and peer groups of the Company;
3. Nomination, Remuneration and GCG Committee provides recommendations to Board of Commissioners;
4. Board of Commissioners discusses the Nomination, Remuneration and GCG Committee's recommendations to be then proposed at the GMS;
5. Shareholders conduct discussions at the GMS .
6. The GMS grants authority and power to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure, such as Salary, Allowances, Tantiem/Bonus and Others

Board of Commissioners and Board of Directors receive fixed and variable remuneration. In accordance with the Regulation of Minister of SOE Number: PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises, which consists of:

1. Salary/Honorarium;
2. Allowances;
3. Facilities; and
4. Tantiem/Performance incentives/Special incentive;
5. Long Term Incentive (LTI).

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Remunerasi diberikan dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan pasar industri konstruksi;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
5. Prestasi kerja individu;
6. Kewajaran dengan peer perseroan lainnya;
7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan;
8. Besaran remunerasi yang diterima adalah:
 - a. Komisaris Utama 45% dari remunerasi Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Komisaris 90% dari remunerasi Komisaris Utama;
 - c. Direktur Utama 100%;
 - d. Anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Indicators

The determination of Board of Commissioners and Board of Directors remuneration refers to the Ministry of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 regarding Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises, as follows:

1. Business scale factor;
2. Business complexity factor;
3. Inflation rate;
4. The Company's condition and financial capability;
5. Other relevant factors that do not conflict with statutory regulations.

The Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration refers to the following indicators:

1. Remuneration is given in the event that the Company makes a profit in the relevant fiscal year;
2. Remuneration is given with reference to the development of construction industry market;
3. Remuneration is given after reviewing the Board of Commissioners and Board of Directors performance results in performing their duties and responsibilities;
4. The financial performance and achievement of the Company's Key Performance Indicators (KPI);
5. Individual work performance;
6. Fairness with other corporate peers;
7. Consideration of the Company's long-term goals and strategies;
8. The remuneration received is:
 - a. President Commissioner 45% of President Director's remuneration;
 - b. Other members of Board of Commissioners 90% of President Commissioner' remuneration;
 - c. President Director 100%;
 - d. Other members of Board of Directors 85% of President Director.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Remuneration Structure

Gaji Dewan Komisaris

- Komisaris Utama 45% dari gaji Direktur Utama
- Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama

Board of Commissioners Salary

- President Commissioner 45% of President Director's salary;
- Other Commissioners 90% of President Commissioner's honorarium

Tunjangan Dewan Komisaris

- Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium
- Tunjangan Transportasi diberikan sebesar 20% dari honorarium
- Asuransi Purna Jabatan diberikan selama menjabat. Premi asuransi 25% dari honorarium dalam satu tahun

Board of Commissioners Allowances

- Religious holiday allowance - 1 (one) time honorarium.
- Transportation Allowance - 20% of honorarium.
- Post-employment Insurance during the term of office, with insurance premium 25% of annual honorarium.

Struktur Remunerasi Direksi

Board of Directors Remuneration Structure

Gaji Direksi

- Direktur Utama sebesar 100%
- Direksi lainnya 85% dari Gaji Direktur Utama

Board of Directors Salary

- President Director 100%;
- Other Directors 85% of President Director's salary

Tunjangan Direksi

- Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji
- Tunjangan Perumahan diberikan sebesar 40% dari Gaji dengan ketentuan maksimal sebesar Rp27.500.000
- Asuransi Purna Jabatan diberikan

Board of Directors Allowances

- Religious holiday allowance - 1 (one) time salary.
- Housing allowance - 40% of salary with a maximum of Rp27,500,000.
- Post-employment Insurance during the term of office, with insurance premium 25% of annual salary.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Remuneration Structure

Fasilitas Dewan Komisaris

- Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris serta suami/isteri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau bekerja, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan
- Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisaris diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

Board of Commissioners Facilities

- Health facilities are provided through health insurance or reimbursement of medical expenses. Health facilities are given to members of Board of Commissioners as well as their spouses and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 (twenty five) years, yet if the child who is not yet 25 (twenty five) years old is married or working then the person concerned is not entitled to health facilities.
- Legal assistance facilities for members of Board of Commissioners in the event of actions/deeds occurring for and on behalf of the position as a member of Board of Commissioners are related to the purposes, objectives, and business activities of the Company.

Tantiem/Insentif Kinerja Dewan Komisaris

- Penetapan tantiem mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan

Board of Commissioners Tantiem/Performance Incentives

- The tantiem considers the Company's performance and capability improvement.

Struktur Remunerasi Direksi

Board of Directors Remuneration Structure

Fasilitas Direksi

- Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan
- Fasilitas Kendaraan, diberikan 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional
- Fasilitas bantuan hukum, diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Direksi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

Board of Directors Facilities

- Health facilities, provided in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses.
- Vehicle facilities, for 1 (one) official vehicle along with maintenance and operational costs.
- Legal aid facility, provided in the event of actions/deeds occurring for and on behalf of the position as a member of Board of Directors are related to the purposes, objectives, and business activities of the Company.

Tantiem/Insentif Kinerja Direksi

- Penetapan tantiem mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan

Board of Directors Tantiem/Performance Incentives

- The tantiem considers the Company's performance and capability improvement.

Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pengungkapan Informasi

Berikut adalah uraian terkait realisasi remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2024:

Disclosure of Information on Amount of Remuneration of Each Member of Board of Directors and Member of Board of Commissioners

The following is a description of the realization of remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2024:

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2024 Board of Commissioners Remuneration in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan (Dalam 1 Tahun) Monthly Remuneration (In 1 Year)		THR Religious Holiday Allowance	Tantiem Tahun Buku 2023 (Bersih) 2024 Fiscal Year Tantiem	Remunerasi Total 2024 2024 Honorarium Remuneration
		Honorarium Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance			
Jarot Widyoko	Komisaris Utama President Commissioner	1.496.160.000	244.080.000	120.600.000	92.706.016	1.953.546.016
Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner	1.346.544.000	219.672.000	108.540.000	84.562.950	1.759.318.950
Rusmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	542.700.000	65.124.000	108.540.000	101.838.010	818.202.010
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	1.346.544.000	219.672.000	108.540.000	84.562.950	1.759.318.950
Harris Arthur Hedar	Komisaris Independen Independent Commissioner	1.346.544.000	219.672.000	108.540.000	84.562.950	1.759.318.950
Firdaus Ali	Komisaris Commissioner	1.346.544.000	219.672.000	108.540.000	84.562.950	1.759.318.950
Satya Bhakti Parikesit*	Komisaris Commissioner	1.346.544.000	219.672.000	108.540.000	84.562.950	1.759.318.950

*) Tidak lagi menjabat sejak 15 Mei 2024 | No longer served since May 15, 2024

Remunerasi Direksi Tahun 2024 Board of Directors Remuneration 2024

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan (Dalam 1 Tahun) Remuneration (In 1 Year)		THR Religious Holiday Allowance	Tantiem Tahun Buku 2023 (Bersih) Fiscal Year Tantiem (Net)	Remunerasi Total 2024 Honorarium Remuneration
		Honorarium	Tunjangan Transportasi			
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director	3.312.000.000	275.000.000	268.000.000	200.445.120	4.055.445.120
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Director of Finance	2.815.200.000	275.000.000	227.800.000	170.378.640	3.488.378.640
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation	2.815.200.000	275.000.000	227.800.000	170.378.640	3.488.378.640
Hananto Aji	Direktur Operasi I Director of Operations I	2.815.200.000	275.000.000	227.800.000	170.378.640	3.488.378.640
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operations II	2.815.200.000	275.000.000	227.800.000	170.378.640	3.488.378.640
Rudy Hartono*	Direktur Operasi III Director of Operations III	1.139.000.000	82.500.000	227.800.000	207.141.450	1.656.441.450
Ayu Widya Kiswari*	Direktur Quality, Health, Safety and Environment	1.139.000.000	82.500.000	227.800.000	207.141.450	1.656.441.450
Sumadi**	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal	1.642.200.000	192.500.000	0	0	1.834.700.000

*) Tidak lagi menjabat sejak 15 Mei 2024 | No longer served since May 15, 2024

***) Menjabat sejak 15 Mei 2024 | Served since May 15, 2024

Jumlah Remunerasi Total Remuneration	Jumlah Dewan Komisaris Total Board of Commissioners	Jumlah Direksi Total Board of Directors
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	-	5
Di atas Rp1 miliar-Rp2 miliar Above Rp1 billion until Rp2 billion	6	3
Di atas Rp500 juta-Rp1 miliar Above Rp500 million until Rp1 billion	1	-
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	-	-

Bonus Kinerja

Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-13/MBU/09/2021, ketentuannya sebagai berikut:

- Tantiem/Insentif Kinerja dapat diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris apabila:
 - Realisasi nilai tingkat kesehatan paling rendah 70;
 - Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP);

Performance Bonus

Tantiem/performance incentives for Board of Directors and Board of Commissioners is regulated in SOE Ministerial Regulation No. PER-04/MBU/2014 as amended by SOE Minister Regulation No. PER-13/MBU/09/2021, with the following conditions:

- Tantiem/incentives can be given to the Board of Directors and Board of Commissioners if:
 - Soundness level is not below 70; or
 - Lowest KPI achievement is 80% (eighty percent);
 - Auditor's opinion is at a minimum Qualified (WDP);

- d. Kondisi perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan dalam kondisi rugi, atau perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung. Kerugian tersebut tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
- 2. Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penetapan Tantiem mempertimbangkan:
 - i. EAT;
 - ii. Capaian KPI;
 - iii. BUMN yang melakukan investasi jangka Panjang secara agresif;
 - iv. BUMN yang melaksanakan penugasan Pemerintah; dan/ atau
 - v. Faktor lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
 - b. Penetapan Insentif Kinerja mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan Perseroan.
- 3. Komposisi besarnya Tantiem/IK bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama;
 - b. Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama;
 - c. Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama.

Opsis Saham bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2024, tidak ada pelaksanaan program opsi saham untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Perseroan.

- d. The Company does not incurred more losses than the previous year if the Company was in a loss condition, or the Company does not incur a loss from the previous year's profitable condition. Losses do not take into account factors beyond the Board of Directors' control.
- 2. Tantiem/performance incentives calculation uses internal guidelines established by the Minister as follows:
 - a. The determination of tantiem considers:
 - i. EAT;
 - ii. KPI Achievements;
 - iii. SOE that are aggressive in long-term investments;
 - iv. SOE that carries out the Government assignments; and/or
 - v. Other factors that can be accounted for professionally.
 - b. The determination of Performance Incentives considers improvements in the Company's performance and financial capability.
- 3. The composition of amount of Tantiem/performance incentives for Directors and Commissioners follows the following positional factors:
 - a. Other Directors: in 85% of President Director;
 - b. President Commissioner: 45% of the President Director;
 - c. Other Commissioners: 90% of President Commissioner.

Board of Commissioners and Board of Directors Stock Option

During 2024, there was no exercise of stock option programs for members of Board of Commissioners and Board of Directors in the Company

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Board of Directors and Board of Commissioners Performance Appraisal

Penilaian terhadap kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan kriteria evaluasi yang telah disepakati dalam perjanjian penunjukan mereka. Proses evaluasi dilakukan setiap tahun melalui RUPS, dengan mengacu pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait penunjukan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik secara kolektif maupun individu. Selain berpengaruh pada keputusan penunjukan kembali, hasil evaluasi juga berperan penting dalam penentuan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

The performance appraisal of Board of Directors and Board of Commissioners is carried out based on the evaluation criteria agreed upon in their appointment agreements. The evaluation process is conducted annually through the GMS, with reference to predetermined criteria. The evaluation results become a reference in making decisions regarding the reappointment of members of Board of Directors and Board of Commissioners, both collectively and individually. In addition to influencing the reappointment decision, the evaluation results also play an important role in determining the remuneration structure for Board of Directors and Board of Commissioners.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direksi dievaluasi secara berkala dan dilaporkan kepada Pemegang Saham.

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE APPRAISAL

The implementation of functions, duties and responsibilities of Board of Directors is evaluated periodically and reported to the Shareholders.

Penilaian Kinerja Direksi oleh RUPS

Kinerja Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam *Statement of Corporate Intent*, tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan serta amanat Pemegang Saham.

Board of Directors' Performance Appraisal by the GMS

The Board of Directors' performance will be evaluated annually by the Shareholders at the GMS. In general, the performance of Board of Directors is determined based on the performance targets listed in the Statement of Corporate Intent, the duties and obligations listed in the applicable laws and regulations and the Articles of Association of the Company as well as the mandate of Shareholders.

Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Direksi sejak pengangkatannya. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemberian skema kompensasi bagi Direksi.

Formal evaluation criteria are submitted openly to the Board of Directors since his/her appointment. The evaluation results of the Board of Directors performance as a whole and the performance of each member of Board of Directors are an integral part of providing a compensation scheme for Board of Directors.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Direksi baik selaku Dewan maupun individu juga merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

The results of performance appraisal of each member of Board of Directors are one of the basic considerations for Shareholders for dismissal and/or reappointment of the said Board of Directors member. The results of performance appraisal of Board of Directors, both as a Board and individually, are also a means of evaluating and increasing the effectiveness of Board of Directors.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Kinerja Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

Board of Directors' Performance Appraisal Procedures

The performance of Board of Directors is reported to the Shareholders through the GMS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

RUPS menetapkan kriteria kinerja Direksi maupun individu anggota Direksi. Kriteria evaluasi kinerja individu anggota Direksi antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi maupun Rapat Koordinasi Direksi dengan Komisaris.
2. Kesiapannya dengan materi yang akan dibahas dalam rapat.
3. Partisipasinya dalam pembahasan masalah maupun dalam pengambilan keputusan.
4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan perusahaan.
5. Komitmennya terhadap keputusan bersama yang telah dibuat.

Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan Penilaian kinerja Direksi adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Di tahun 2024, Direksi telah berhasil mencatatkan pencapaian yang signifikan dalam menjalankan kepengurusan Perseroan. Dengan pendekatan strategis yang terencana, Direksi tidak hanya berfokus pada implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, namun juga memonitor dan mengevaluasi setiap langkah yang diambil untuk memastikan tercapainya tujuan jangka panjang Perseroan. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Direksi menunjukkan integritas dan kepemimpinan yang kokoh, dengan selalu mengedepankan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan risiko yang optimal. Upaya Direksi untuk menjaga hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap kemajuan dan reputasi Perseroan di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan, salah satunya melalui penilaian yang dilakukan oleh RUPS.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya.

Board of Directors' Performance Appraisal Criteria

The GMS determines the performance criteria for Board of Directors and individual members of Board of Directors. The criteria for evaluating the individual performance of Board of Directors members include:

1. The level of attendance at Board of Directors meetings and Coordination Meetings between Directors and Commissioners.
2. Readiness with the material to be discussed at the meeting.
3. Participation in problem discussions and decision making.
4. Compliance with applicable laws and regulations and Company policies.
5. Commitment to joint decisions that have been made.

Assessor

The assessor of Board of Directors' performance is the Shareholders at the GMS based on the obligations listed in applicable laws and regulations, the Articles of Association, and the Shareholders mandate.

Board of Directors Performance Appraisal Results

In 2024, Board of Directors has made significant achievements in the management of the Company. With a planned strategic approach, Board of Directors not only focuses on the implementation of established policies, but also monitors and evaluates every step taken to ensure the achievement of the Company's long-term goals. In carrying out its roles and responsibilities, Board of Directors demonstrates integrity and solid leadership, always prioritizing the principles of sustainability and optimal risk management. The Board of Directors' efforts to maintain harmonious relationships with all stakeholders demonstrate a high dedication to the Company's progress and reputation in the midst of evolving industry dynamics.

BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE APPRAISAL

The performance appraisal of Board of Commissioners is conducted through various predetermined mechanisms, one of which is through the appraisal conducted by the GMS.

Board of Commissioners' Performance Appraisal by the GMS

The performance of Board of Commissioners is evaluated annually by the Shareholders at the General Meeting of Shareholders. In general, the performance of Board of Commissioners is determined based on the duties and obligations listed in applicable Laws and Regulations, Articles of Association, and Shareholders mandate. The formal evaluation criteria are submitted openly to the Board of Commissioners since his/her appointment.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/ atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS berdasarkan *Board Manual* dan Rencana Kerja (Renja) Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, yang setiap awal tahun ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan. Renja ini berisi target-target kinerja Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris maupun individu anggota Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja individu Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada.
2. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perseroan.
3. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu.
4. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
5. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan *assessment* atas kinerja Dewan Komisaris yaitu Pemegang Saham dalam RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Di tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Direksi dalam mengelola Perseroan telah sesuai dengan kebijakan strategis yang ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi pengawasaan tersebut, Dewan Komisaris berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi, serta memberikan arahan yang konstruktif untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan operasional Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun, memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendukung pencapaian visi Perseroan yang berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan.

The evaluation results of Board of Commissioners performance as a whole and the performance of each member of Board of Commissioners individually will form an integral part of the compensation and incentive scheme for Board of Commissioners. The results of performance evaluation of each individual member of Board of Commissioners is one of the basic considerations for Shareholders to dismiss and/or reappoint the said Board of Commissioners member. The results of Board of Commissioners' performance appraisal both as a Board and individually are a means of evaluating and increasing the effectiveness of Board of Commissioners.

Board of Commissioners' Performance Appraisal Procedures

The performance of Board of Commissioners is reported to Shareholders through the GMS based on the Board Manual and Work Plan of Board of Commissioners and Supporting Organs of Board of Commissioners, which are signed at the beginning of each year by the entire Board of Commissioners. This work plan contains performance targets for Board of Commissioners.

Board of Commissioners' Performance Appraisal Criteria

The General Meeting of Shareholders determines the performance criteria for Board of Commissioners and individual members of Board of Commissioners. The criteria for evaluating the individual performance of Board of Commissioners include:

1. The level of attendance at Board of Commissioners meetings and meetings with existing committees.
2. Contribution to the Company's supervision process.
3. Involvement in certain assignments.
4. Commitment to advancing the interests of the Company.
5. Compliance with applicable laws and regulations and Company policies.

Assessor

The assessor of performance appraisal of Board of Commissioners is the Shareholders at the GMS.

Board of Commissioners' Performance Appraisal Results

In 2024, Board of Commissioners has carried out its supervisory duties with full responsibility, ensuring that every step taken by the Board of Directors in managing the Company is in accordance with the established strategic policies. In carrying out this supervisory function, Board of Commissioners plays an active role in monitoring and evaluating the Board of Directors' performance, as well as providing constructive direction to maintain the sustainability and operational success of the Company. In addition, Board of Commissioners has also ensured that all operational activities are carried out with reference to the prepared Annual Work Plan, paying attention to applicable laws and regulations, and supporting the achievement of the Company's vision which focuses on sustainable growth.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Policy on Board of Commissioners and Board of Directors Diversity



WIKA secara konsisten mengedepankan prinsip keberagaman dalam pembentukan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, yang mengacu pada pedoman yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Kebijakan ini menekankan pentingnya keberagaman dalam struktur organisasi, dengan tujuan agar Dewan Komisaris dan Direksi dapat berfungsi secara efektif dan memberikan pengawasan serta nasihat yang tepat. Keberagaman yang dimaksud meliputi keberagaman dalam keahlian, pengetahuan, dan pengalaman para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini penting agar keputusan yang diambil dapat mencakup berbagai sudut pandang dan memperkaya kualitas pengawasan perusahaan. Keberagaman ini juga memastikan bahwa Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas pengawasan secara optimal, dengan memperhatikan berbagai aspek yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

WIKA's consistently prioritizes the principle of diversity in the composition formation of Board of Commissioners and Board of Directors, which refers to the guidelines stipulated in the Circular Letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance. This policy emphasizes the importance of diversity in the organizational structure, with the aim that both Boards of Commissioners and Board of Directors can function effectively and provide appropriate supervision and advice. Diversity includes diversity in the skills, knowledge and experience of the members of Board of Commissioners and Board of Directors. This is important so that decisions are made from a variety of perspectives and enrich the quality of the Company's supervision. This diversity also ensures that the Board of Commissioners can carry out its supervisory duties optimally, taking into account a wider range of aspects in the decision-making process.

Dalam hal ini, WIKA juga mengakomodasi prinsip keberagaman tersebut dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perseroan, yang menjadi acuan dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria, seperti integritas, dedikasi, pemahaman yang mendalam tentang manajemen perusahaan, serta pengetahuan atau keahlian yang relevan dengan bidang tugas masing-masing anggota. Selain itu, faktor waktu yang dapat diberikan untuk menjalankan tugasnya juga menjadi perhatian penting dalam pengangkatan anggota.

Meskipun keberagaman dalam hal keahlian dan pengetahuan sudah diprioritaskan, hingga saat ini, WIKA belum memiliki kebijakan formal terkait keberagaman usia dan jenis kelamin. Proses nominasi lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan perusahaan sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, meskipun keberagaman usia dan jenis kelamin belum diatur, WIKA tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mencerminkan kebutuhan dan tujuan strategis Perseroan.

Di tahun 2024, keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Hal ini menunjukkan adanya keberagaman berperan sebagai faktor peningkatan kinerja dan tercapainya tujuan Perseroan. Keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi tercermin pada tabel di bawah ini.

In this case, WIKA's also accommodates the principle of diversity in the Company's Articles of Association and Board Manual, which is a reference in the appointment of members of Board of Commissioners and Board of Directors. The selection process is carried out by considering a number of criteria, such as integrity, dedication, in-depth understanding of company management, and knowledge or expertise relevant to each member's field of duty. In addition, the time factor that can be given to carry out their duties is also an important concern in the appointment of members.

Although diversity in terms of expertise and knowledge has been prioritized, until now, WIKA's has no formal policy regarding age and gender diversity. The nomination process is more focused on meeting the Company's needs in accordance with the areas of expertise needed to achieve company objectives. Thus, although age and gender diversity have not been regulated, WIKA's remains committed to ensuring that the composition of Board of Commissioners and Board of Directors reflects the needs and strategic objectives of the Company.

In 2024, Board of Commissioners and Board of Directors composition diversity is based on education, work experience, age, and gender. This shows that diversity plays a role as a factor in improving performance and achieving the Company's goals. Board of Commissioners and Board of Directors diversity can be seen in the table below.

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Jarot Widyoko	Komisaris Utama President Commissioner	61	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> Magister Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, Institut Teknologi Bandung tahun (1993) Insinyur Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada tahun (1987) Master in Water Resources Development, Bandung Institute of Technology, (1993) Civil Engineer, Gadjah Mada University in (1987) 	<ul style="list-style-type: none"> Jabatan Fungsional, Pengelola Sumber Daya Air Ahli Utama Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tahun 2024-sekarang Jabatan Fungsional, Teknik Pengairan Ahli Utama Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tahun 2023-2024 Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tahun 2020-2023 Functional Position, Water Resources Manager, Main Expert, Secretariat of Directorate General, Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works and Public Housing, 2024-present Functional Position, Water Resources Engineering, Main Expert, Secretariat of Directorate General, Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works and Public Housing, 2023-2024 Director General of Water Resources, Ministry of Public Works and Public Housing, 2020-2023 	Teknik Engineering

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner	69	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen, Universitas Trisakti tahun (2005) Sarjana Teknik Sipil, Universitas Diponegoro tahun (1982) Master of Management, Trisakti University (2005) Bachelor of Civil Engineering, Diponegoro University (1982) 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris PT Utama Karya (Persero) (2016-2020) Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2012-2016) Direktur Operasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2008-2012) Commissioner of PT Utama Karya (Persero) (2016-2020) President Director of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2012-2016) Operations Director of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2008- 2012) 	Teknik dan Manajemen Engineering and Management
Rusmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	67	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> PPSA XVIII Lemhannas RI, tahun 2012 Sekolah Staf dan Komando TNI, tahun 2002 Sekolah Staf dan Komando AD, tahun 1996 Akabri Darat - Sarjana Teknik Elektro, tahun 1983. PPSA XVIII Lemhannas RI (2012)) TNI Staff and Command School (2002) AD Staff and Command School (1996) Army Academy - Bachelor of Electrical Engineering (1983) 	<ul style="list-style-type: none"> Staf Khusus Kabin Bidang Intelijen Teknologi, Badan Inteligen Negara (BIN) (2017-2024) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya, Kementerian Pertahanan RI (2015) Korsahli Kasad, TNI Angkatan Darat (2015) Special Staff for the Intelligence Technology Cabin, State Intelligence Agency (BIN) (2017-2024) Expert Staff for Socio-Cultural Affairs, Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (2015) Expertise of the Chief of Staff of the Army, Indonesian Army (2015) 	Pertahanan dan Keamanan NKRI Homeland Defense and Security
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	68	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> Profesi Insinyur, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, tahun 2020 Ph.D. (Doctor of Philosophy), Faculty of Engineering, University of Newcastle upon Tyne, UK, tahun 1996 Sarjana Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada, tahun 1984. Engineering Profession, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University (2020) Ph.D. (Doctor of Philosophy), University of Newcastle upon Tyne, UK (1996) Bachelor of Engineering, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1984) 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretaris merangkap Anggota Komite Audit Universitas Gadjah Mada, tahun 2022-sekarang Dosen Program Studi Magister Teknik Sipil dan Program Doktor Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, tahun 1996-sekarang Dosen Program Studi Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, tahun 1996-sekarang Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, tahun 1985-sekarang Secretary and Member of Audit Committee of Gadjah Mada University (2022-present) Lecturer of Master of Civil Engineering Study Program and Doctoral Program of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University (1996-present) Lecturer of Master of Transportation Systems and Engineering Study Program, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University (1996-present) Lecturer of Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University (1985-present) 	Teknik Engineering

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Harris Arthur Hedar	Komisaris Independent Independent Commissioner	63	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> Guru Besar dalam Bidang Hukum Kebijakan Publik, Universitas Negeri Makassar (2023); Doktor Hukum, Universitas Jayabaya (2014); Sarjana Hukum, Universitas Narotama (2007) Professor in Public Policy Law, Makassar State University (2023); Doctor of Law, Jayabaya University (2014); Bachelor of Law, Narotama University (2007) 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, tahun 2024-2028 Dosen Tetap Pasca Sarjana, Universitas Jayabaya, tahun 2015-sekarang Advokat pada Kantor Advokat Dr. Harris Arthur Hedar S.H, M.H dan Rekan, tahun 2013-sekarang Corporate Legal Lion Air Group, tahun 2006-sekarang Vice Chancellor of Jayabaya University Jakarta (2024-2028) Permanent Lecturer of Postgraduate Program, Jayabaya University (2015-present) Advocate at Dr. Harris Arthur Hedar S.H, M.H and Partners Law Firm (2013-present) Corporate Legal Lion Air Group (2006-present) 	Hukum Law
Firdaus Ali	Komisaris Commissioner	64	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Filosofi Teknik Lingkungan, University of Wisconsin- Madison, Amerika Serikat (2002) Master of Science Teknik Lingkungan, University of Wisconsin- Madison, Amerika Serikat (1998) Sarjana Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung tahun (1988) Doctor of Philosophy in Environmental Engineering, University of Wisconsin Madison, United States (2002) Master of Science in Environmental Engineering, University of Wisconsin Madison, United States (1998) Bachelor of Environmental Engineering, Bandung Institute of Technology (1988) 	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Direktur International Water Resources Association, tahun 2025-2027 Penasihat Senior Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, tahun 2015-2019 dan tahun 2019-2024 Wakil Presiden Asia Water Council, tahun 2016-sekarang Pendiri dan Ketua Indonesia Water Institute, tahun 2009-sekarang Dosen dan Peneliti Program Studi Teknik Lingkungan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, tahun 1988-sekarang Board of Director International Water Resources Association (2025-2027) Senior Advisor for Water Resources Management to the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia (2015-2019) and (2019-2024) Vice President of the Asia Water Council (2016-present) ounder and Chairman of the Indonesia Water Institute (2009-present) Lecturer and Researcher of the Environmental Engineering Study Program, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Indonesia (1988-present) 	Teknik Lingkungan Environmental Engineering

Direksi
Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Agung Budi Waskito	Direktur Utama President Director	53	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> • Magister di Engineering Civil, Indian Institute Technology Roorkee (2002) • Sarjana Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada tahun (1995) • Master in Civil Engineering, Indian Institute Technology Roorkee (2002) • Bachelor of Civil Engineering, Gadjah Mada University Yogyakarta (1995) 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (2020-sekarang) • Direktur Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2018-2020) • General Manager Departemen Sipil Umum I (2017-2018) • General Manager Departemen Sinergi Bisnis (2016-2017) • Manajer Divisi Operasi 4 Sipil Umum II (2014-2015) • Commissioner of PT Kereta Cepat Indonesia China (2020-present) • Director of Operations I of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2018-2020) • General Manager General Civil Department I (2017-2018) • General Manager of Business Synergy Department (2016- 2017) • General Civil Operations Division 4 Manager II (2014-2015) 	Teknik Sipil Civil Engineering
Adityo Kusumo	Direktur Keuangan Director of Finance	42	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> • Magister of Business Administration (MBA), UCLA Anderson School of Management Finance (2014) • Sarjana (S1) Teknik Elektro, Universitas Indonesia (2004) • Master of Business Administration (MBA), UCLA Anderson School of Management - Finance (2014) • Bachelor in Electrical Engineering, University of Indonesia (2004) 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Wijaya Karya Realty (2022-2023) • Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022-2023) • Executive Assistant Wakil Menteri BUMN II, Kementerian BUMN (2019-2022) • Vice President, Head of Mergers & Acquisitions (M&A) Department, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk(2017-2019) • Assistant Vice President, Project Leader Mergers & Acquisitions (M&A), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2017) • President Commissioner of PT Wijaya Karya Realty (2022- 2023) • Director of Finance and Risk Management of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022-2023) • Executive Assistant Deputy Minister of SOE II, Ministry of SOE (2019 -2022); • Vice President, Head of Mergers & Acquisitions (M&A) Department, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2019) • Assistant Vice President, Project Leader Mergers & Acquisitions (M&A), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014- 2017). 	Accounting dan Finance Accounting and Finance

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Hadjar Seti Adji	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi Director of Human Capital Management and Transformation	59	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Engineering Science, University of New South Wales, Sydney (2002) • Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Diponegoro (1991) • Master of Engineering Science, University of New South Wales, Sydney (2002) • Bachelor in Civil Engineering, Diponegoro University (1991) 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (2022-2023) • Direktur Human Capital Management PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023-sekarang); • Direktur Human Capital & Pengembangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022-2023); • Director of HCM & System Development PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2019-2022); • Director of HCM PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2018-2019); • Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT PP (Persero) Tbk (2016-2018); • Kepala Divisi Riset & Teknologi PT PP (Persero) Tbk (2014-2018); • Kepala Divisi Manajemen Risiko PT PP (Persero) Tbk (2014-2015) • President Commissioner of PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (2022-2023) • Director of Human Capital Management of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023-Present) • Director of Human Capital & Development of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022-2023); • Director of HCM & System Development of PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2019-2022) • Director of HCM of PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2018- 2019); • Head of Business Development Division of PT PP (Persero) Tbk (2016-2018) • Head of Research & Technology Division of PT PP (Persero) Tbk (2014-2018) • Head of Risk Management Division of PT PP (Persero) Tbk (2014-2015) 	Teknik Sipil dan Human Capital Civil Engineering and Human Capital

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Hananto Aji	Direktur Operasi I Director of Operation I	51	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Profesi Insinyur (Teknik Sipil), Universitas Gadjah Mada (2020); • Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1997). • Professional Engineer Education (Civil Engineering), Gadjah Mada University (2020) • Bachelor of Civil Engineering, Sebelas Maret University, Surakarta (1997) 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2021-sekarang) • Komisaris PT. Jasamarga Gedebage Cilacap (2022) • Komisaris Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (2020-sekarang) • Komisaris Utama PT. Wijaya Karya Serang Panimbang (2020-2021) • General Manager Sinergi Bisnis (2019-2020) • Manajer Divisi 5 Divisi Sipil Umum 3 (2017-2019) • Manajer Divisi 4 Departemen Sipil Umum 2 (2017) • Manajer (Tersus) Departemen Sipil Umum 2 (2016-2017) • Manajer Divisi 4 Departement Sipil Umum 2 (2016-2017) • Manajer Divisi 2 Departement Sipil Umum 1 (2015) • Manajer Divisi 4 Departement Sipil Umum 2 (2015-2017) • Manajer DSU 2 DOT 1 Departement Sipil Umum 2 (2015) • President Commissioner of PT Wijaya Karya Gedung (Tbk) (2021-present) • Commissioner of PT. Jasamarga Gedebage Cilacap (2022) • President Commissioner of PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda (2020-present) • President Commissioner of PT Wijaya Karya Serang Panimbang (2020-2021) • General Manager of Business Synergy Department of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019-2020) • Division 5 Manager of General Civil Department 3 of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-2019) • Division 4 Manager of General Civil Department 2 (2017) • Manager (Tersus) of General Civil Department 2 (2016-2017) • Division 4 Manager of General Civil Department 2 (2016-2017) • Division 2 Manager, General Civil Department 1 (2015); • Division 4 Manager of General Civil Department 2 (2015-2017) • Manager DSU 2 DOT 1 of General Civil Department 2 (2015). 	Teknik Sipil Civil Engineering

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Harum Akhmad Zuhdi	Direktur Operasi II Director of Operation II	54	Laki-laki Male	Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1994) Bachelor of Civil Engineering, Sepuluh November Institute of Technology (1994)	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Wijaya Karya Beton (2022-sekarang) • General Manager Departemen Powerplant & Energy PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019-2020); • Manager Divisi Operasi EPC Departemen PPE PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-2018); • Manajer Bidang Operasi Bidang Pemasaran PEE PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016-2017). • President Commissioner of PT Wijaya Karya ReKayasa Konstruksi (2020-present) • General Manager of Power Plant & Energy Department (2019-2020) • Division Manager of Power Plant and Energy Department of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-2018) • Operations Manager for Power Plant and Energy Marketing, Power Plant & Energy Department (2016-2017) 	Teknik Sipil Civil Engineering
Sumadi	Direktur Manajemen Risiko dan Legal Director of Risk Management and Legal	52	Laki-laki Male	Magister Manajemen Keuangan Binus Business School tahun (2023) Master of Financial Management Binus Business School (2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2022-Sekarang) • Senior Vice President Finance Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022-2024) • General Manager Akuntansi & Pajak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020-2022) • President Commissioner of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2022-Present) • Senior Vice President Finance Division of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022-2024) • General Manager Accounting & Tax of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020-2022) 	Keuangan, Manajemen, Legal, Manajemen Risiko Finance, Management, Legal, Risk Management

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Board of Commissioners Supporting Organs

Dewan Komisaris dilengkapi dengan berbagai organ pendukung yang berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan dan memastikan kelancaran tugasnya. Di antaranya adalah Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dipimpin oleh Komisaris Independen berfokus pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparansi. Semua organ ini bekerja secara sinergis untuk mendukung efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris berperan sebagai bagian penting yang mendukung Dewan Komisaris dalam memastikan kelancaran administrasi serta efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Organ ini dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi administrasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Piagam Kerja Sekretaris Dewan Komisaris

- Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023-2025;
- Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Perusahaan yang Baik Tahun 2023-2025;
- Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2024.

Kriteria Sekretaris Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris, 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun pada BUMN yang sama, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The Board of Commissioners is equipped with various supporting organs that play an important role in strengthening the implementation of supervisory functions and ensuring the smooth running of its duties. Among these are the Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination, Remuneration and GCG Committee, Risk Monitoring Committee, Integrated Governance Committee led by Independent Commissioner focusing on the implementation of good governance principles and transparency. All these organs work synergistically to support the effectiveness of supervision conducted by the Board of Commissioners.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

Secretary of Board of Commissioners plays an important role in supporting the Board of Commissioners in ensuring the smooth administration and effective implementation of its duties and responsibilities. This organ was established to optimize the administrative function in the decision-making process and supervision carried out by the Board of Commissioners.

Secretary of Board of Commissioners Charter

- Board of Directors and Board of Commissioners Manual for 2023-2025;
- Guidelines to Implementing Good Corporate Governance for 2023-2025;
- Work Plan for Board of Commissioners and Supporting Organs of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for 2023.

Secretary of Board of Commissioners Criteria

In accordance with the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia, Number: PER3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises, Secretary of Board of Commissioners/Supervisory Board must meet the following requirements :

1. Understand the system of management, supervision and development of SOEs;
2. Have good integrity;
3. Understand secretarial functions;
4. Have the ability to communicate and coordinate well.

Secretary of Board of Commissioners Term of Office

Based on the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia, Number: PER3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises, states that the term of office of Secretary of Board of Commissioners is determined by the Board Commissioner, 3 (three) years and can be reappointed for 2 (two) years at the same SOE, without reducing the right of Board of Commissioners to dismiss at any time.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of Board of Commissioners Profile



Nuriana

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

Periode Jabatan: 01 November 2023 - sekarang
Term of Office: November 01, 2023 - present

Kewarganegaraan	Nationality
Indonesia	Indonesia
Usia	Age
52 tahun	52 years old
Domisili	Domicile
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Educational Background
<ol style="list-style-type: none"> Magister Manajemen dari Universitas Mercu Buana tahun 2015 Sarjana Ekonomi dari STIE Nasional Banjarmasin tahun 1997 	<ol style="list-style-type: none"> Master of Management from Mercu Buana University (2015) Bachelor of Economics from STIE Nasional Banjarmasin (1997)
Pengalaman Kerja	Work Experience
<ol style="list-style-type: none"> Pj Kasubbid Tata Kelola dan Manajemen Risiko Usaha Energi II (2002-2010) Sekretaris Dewan Komisaris PT Energy Management Indonesia (2008-2013) Kasubbid Usaha Infrastruktur dan Logistik Ila2 (2010-2012) Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelayanan Nasional Indonesia (Persero) (2011-2016) Kasubbag Akuntansi (2012-2014) Kepala Subbidang Program Pengembangan SDM Eksekutif BUMN (2014-2015) Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ib-1 (2015-2017) Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VII (2016-2019) Kepala Subbidang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Eksekutif BUMN (2017-2020) Sekretaris Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk (2019-2023) Sekretaris Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023-sekarang) 	<ol style="list-style-type: none"> Acting Head of Energy Business Governance and Risk Management Subdivision II (2002-2010) Secretary of Board of Commissioners of PT Energy Management Indonesia (2008-2013) Head of Infrastructure and Logistics Business Subdivision Ila2 (2010-2012) Secretary of Board of Commissioners of PT Pelayanan Nasional Indonesia (Persero) (2011-2016) Head of Accounting Subdivision (2012-2014) Head of SOE Executive HR Development Program Subdivision (2014-2015) Head of Agro and Pharmaceutical Industry Business Sub-Sector Ib-1 (2015-2017) Secretary of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara VII (2016-2019) Head of SOE Executive Human Resources Development Program Subdivision (2017-2020) Secretary of Board of Commissioners of PT TIMAH Tbk (2019-2023) Secretary of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023-present)
Jabatan Lainnya	Other Positions
Penata Kelola Perusahaan Negara Muda (2020-sekarang)	Junior State Company Management (2020-present)
Dasar Hukum Pengangkatan	Legal Basis for Appointment
Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, Nomor: 107/DK/WIKA/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Decree of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Number: 107/DK/WIKA's/2023 dated October 10, 2023 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Pelatihan	Certification
<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Rating Perusahaan oleh Fitch Rating Pelatihan dan Sertifikasi Tata Kelola Perusahaan Lanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Corporate Rating Training by Fitch Rating Advanced Corporate Governance Training and Certification

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris meliputi:

1. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
 - a. Menyiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris;
 - b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar BUMN yang bersangkutan;
 - c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
 - d. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
 - e. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat Dewan Komisaris melakukan tugas lain berupa:
 - a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris; dan
 - c. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris harus memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perseroan.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dapat berjalan dengan baik, Perseroan memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris. Dalam hal ini, Perseroan memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung kelancaran operasional dan memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Sekretaris Dewan Komisaris memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan Dewan Komisaris secara efektif. Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi yang relevan dengan perkembangan bisnis dan tata kelola perusahaan, sebagai berikut:

Secretary of Board of Commissioners Duties and Responsibilities

Secretary of Board of Commissioners' duties and responsibilities include:

1. Secretary of Board of Commissioners is tasked with carrying out activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties in the form of:
 - a. Prepare meetings, including meeting briefing sheets for the Board of Commissioners;
 - b. Prepare minutes of Board of Commissioners meetings in accordance with the articles of association of the relevant SOE;
 - c. Administering Board of Commissioners documents including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
 - d. Prepare a draft of work plan and budget for Board of Commissioners;
 - e. Prepare draft reports for the Board of Commissioners; and
 - f. Carry out other duties from the Board of Commissioners.
2. Apart from carrying out the duties as referred to above, the Secretary of Board of Commissioners as the head of Secretariat of Board of Commissioners carries out other duties in the form of:
 - a. Ensure that the Board of Commissioners complies with statutory regulations and applies the principles of good corporate governance;
 - b. Provide information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
 - c. As a liaison officer between Board of Commissioners and other parties.
3. For orderly administration and implementation of good corporate governance, the Board of Commissioners Secretariat is obliged to ensure that documents pertaining to the implementation of activities are stored properly in the Company.

Secretary of Board of Commissioners Competency Development

To ensure that the supervisory function carried out by the Board of Commissioners can run well, the Company pays special attention to the competency development of Secretary of Board of Commissioners. In this regard, the Company facilitates the improvement of knowledge and skills that can support smooth operations and strengthen the implementation of supervisory duties. This support aims to ensure that the Secretary of Board of Commissioners has the necessary expertise to effectively support the Board of Commissioners' activities. Throughout 2024, Secretary of Board of Commissioners has participated in various competency improvement programs relevant to business development and corporate governance, as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer by
Nuriana (Sekretaris Dewan Komisaris) (Secretary of Board of Commissioners)	Pelatihan Rating Perusahaan oleh Fitch Rating Corporate Rating Training by Fitch Rating	Memahami Kriteria Pemeringkatan Perusahaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan Rating Perusahaan per bidang usaha Understanding the Company Rating Criteria and the steps taken to determine the Company Rating per business sector	Retreat Lounge Lt. 1, The Westin Jakarta Jl. HR. Rasuna Said Np. Kav.C-22A, Jakarta Selatan, 26 November 2024 Retreat Lounge Fl. 1, The Westin Jakarta Jl. HR. Rasuna Said Np. Kav. C-22A, South Jakarta, November 26, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOE
	Pelatihan dan Sertifikasi Tata Kelola Perusahaan Lanjutan Advanced Corporate Governance Training and Certification	Pengembangan Technical Development Program (TDP) dan Enterprise Capacity Development Program (ECDP) Development of Technical Development Program (TDP) and Enterprise Capacity Development Program (ECDP)	Online, 11-12 Juni 2024 (Pelatihan) 13 Juni 2024 (Ujian sertifikasi) Online, June 11-12, 2024 (Training) June 13, 2024 (Certification exam)	LSP Mitra Kalyana Sejahtera

Kebijakan Remunerasi bagi Sekretaris Dewan Komisaris

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor. 86/DK/WIKA/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Penghasilan Bagi Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam memastikan tercapainya tujuan-tujuan strategis Dewan Komisaris dengan melaksanakan fungsi pendukung yang esensial. Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Dewan Komisaris terlibat dalam dua kategori kegiatan utama, yaitu Kegiatan Rutin dan Kegiatan Non-Rutin. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai masing-masing kegiatan tersebut:

- Kegiatan Rutin Sekretaris Dewan Komisaris meliputi:
 - Kegiatan Rapat Dewan Komisaris:
 - Penyiapan Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris;
 - Penyiapan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi.
 - Kegiatan Penyiapan dan Dukungan Kegiatan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris:
 - Penyiapan Bahan Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris;
 - Penyiapan Dukungan Kegiatan Perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris;
 - Penyiapan Dukungan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris serta Komite Dewan Komisaris;

Remuneration Policy for Secretary of Board of Commissioners

- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia, Number: PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises;
- Decree of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 86/DK/WIKA's/2021 dated October 01, 2021 concerning Income for Committees and Secretary of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

2024 Duties Implementation Report

Throughout 2024, Secretary of Board of Commissioners has played an active role in ensuring achievement of the Board of Commissioners' strategic objectives by performing essential support functions. In its implementation, Secretary of Board of Commissioners is involved in two main categories of activities, namely Routine Activities and Non-Routine Activities. The following is a further description of each of these activities:

- Routine activities:
 - Board of Commissioners Meeting Activities:
 - Preparation of Minutes of Internal Meetings of Board of Commissioners;
 - Preparation of Minutes of Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors;
 - Preparation and Supporting Activities for Board of Commissioners and Board of Commissioners Committee's Activities:
 - Preparation of Board of Commissioners and Board of Commissioners Committee Meeting Materials;
 - Preparation of Support for Business Travel Activities for Board of Commissioners and Committees of Board of Commissioners;
 - Preparation of Support for Education and Training Activities for Board of Commissioners and Committees of Board of Commissioners;

- Penyiapan Konsep Dokumen Persuratan untuk Kebutuhan Dewan Komisaris dan/atau Organ Pendukung Dewan Komisaris;
 - Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dewan Komisaris;
 - dan lain-lain.
2. Kegiatan Penyiapan dan Dukungan Kegiatan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris:
- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta kegiatan lainnya yang diberikan sesuai arahan dan kebutuhan Dewan Komisaris;
 - b. Penyusunan Konsep Standard Operating Procedure (SOP) atas kegiatan yang dilakukan di lingkungan Dewan Komisaris dan Organ Pendukungnya.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris oleh Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan secara langsung oleh Dewan Komisaris. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa kinerja Sekretaris sesuai dengan tugas dan tanggung jawab utama yang diemban, antara lain:

1. Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris;
2. Seluruh Rapat Dewan Komisaris, baik rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi, dan rapat Dewan Komisaris khusus dihadiri oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Notulis, kecuali Rapat Khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
3. Bertanggung jawab atas terdistribusinya berbagai informasi yang terkait dengan agenda yang akan dibahas Sekretaris Dewan Komisaris juga bertanggung jawab terhadap pembuatan, pengadministrasian, dan pendistribusian Risalah Rapat Dewan Komisaris;
4. Merencanakan teknis program Pengenalan dan Pelatihan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat bersama dengan *corporate secretary*.

Berdasarkan 4 (empat) hal di atas, kinerja Sekretaris Dewan Komisaris telah sesuai dengan tupoksi serta mencapai target yang telah direncanakan pada Rencana Kegiatan tahun 2024. Berikut hasil kinerja yang telah dilakukan Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2024:

1. Melakukan penyelenggaraan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 10 (sepuluh) kali;
2. Melakukan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali;
3. Melakukan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ yang dibentuk Dewan Komisaris dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Komite Audit berperan memastikan sistem pengendalian internal berfungsi secara efektif, manajemen risiko berjalan optimal, serta pelaksanaan audit internal sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, Komite Audit juga bertanggung jawab untuk meninjau dan memastikan

- Preparation of Draft Letter Documents for the Needs of Board of Commissioners and/or Supporting Organs of Board of Commissioners;
 - Administration of Incoming and Outgoing Letters of Board of Commissioners;
 - and others.
2. Preparation and Supporting Activities for Board of Commissioners and Board of Commissioners' Committees:
- a. Education and training activities and other activities according to the directions and needs of Board of Commissioners;
 - b. Drafting the Standard Operating Procedure (SOP) concept for activities carried out within Board of Commissioners and its Supporting Bodies.

Evaluation and Performance Appraisal of Secretary of Board of Commissioners by Board of Commissioners

The performance appraisal of Secretary of Board of Commissioners is conducted directly by the Board of Commissioners. This process is designed to ensure that the Secretary's performance is in accordance with the main duties and responsibilities assumed, among others:

1. Carry out administrative and secretarial tasks related to all activities of Board of Commissioners;
2. All Board of Commissioners' Meetings, both Internal Meetings of Board of Commissioners and Coordination Meetings of Board of Commissioners with Board of Directors, as well as special meeting of Board of Commissioners, are attended by the Secretary of Board of Commissioners or other official appointed as a Note Taker, except for Special Meetings which may only be attended by Board of Commissioners and/or Board of Directors;
3. Responsible for the distribution of various information related to the agenda to be discussed. Secretary of Board of Commissioners is also responsible for the preparation, administration and distribution of Minutes of Board of Commissioners Meeting;
4. Planning technical introduction and training programs for newly appointed members of Board of Commissioners together with the Corporate secretary.

Based on the 4 (four) points above, the performance of Secretary of Board of Commissioners has been in accordance with its duties and functions, and has achieved the targets planned in the 2024 Activity Plan. The performance results of Secretary of Board of Commissioners are as follows:

1. Holding 10 (ten) Internal Meetings of Board of Commissioners;
2. Holding 12 (twelve) Meetings of Board of Commissioners involving Board of Directors;
3. Carrying out administrative and secretarial tasks related to all activities of Board of Commissioners throughout 2024.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is an organ established by the Board of Commissioners with the aim of supporting the implementation of supervisory duties. Audit Committee plays a role in ensuring that the internal control system functions effectively, risk management runs optimally, and the implementation of internal audits in accordance with applicable standards. In addition, Audit Committee is also

proses pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dasar pembentukan Komite Audit, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
8. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
9. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor 110 Tanggal 22 Desember 1972 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 5 Tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015012.AH.01.02.Tahun 2022 ("Anggaran Dasar").

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit

Komite Audit menjalankan fungsinya mengacu pada Piagam Komite Audit yang dirancang sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini diperbarui dan disahkan melalui Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 79/DK/WIKA/2018 Tanggal 02 Juli 2028 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 73/DK/WIKA/2016 tentang Piagam Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana telah diubah sesuai dengan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 106/DK/WIKA/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 tentang Piagam Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Ketentuan yang diatur di dalam Piagam Komite Audit meliputi:

responsible for reviewing and ensuring that the financial reporting process is carried out in a transparent and accountable manner, thus supporting the creation of good corporate governance.

Audit Committee Establishment Basis

The basis for establishing Audit Committee, includes:

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as amended by Law Number 6 of 2023 on the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
2. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets.
3. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 on the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
4. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises as amended by Government Regulation Number 23 of 2022.
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.
7. Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for Duties Implementation of Audit Committee.
8. Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises Number SK-3/DKU.MBU/05/2023 concerning Technical Instructions for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs within State-Owned Enterprises.
9. Articles of Association of Limited Liability Company PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as stated in the Deed of Notary Dian Paramita Tamzil Number 110 dated December 22, 1972 as amended several times, most recently by the Deed of Extraordinary Shareholders' Decision Statement of Limited Liability Company PT Wijaya Karya Tbk Number 5 dated February 4, 2022 made before Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta and has received approval from the Minister of Law and Human Rights Number AHU-0015012.AH.01.02.Tahun 2022 ("Articles of Association").

Audit Committee Charter

The Audit Committee performs its function by referring to the Audit Committee Charter which is designed as the main guideline in carrying out its duties and responsibilities. This charter was updated and ratified through the Decree of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No: 79/DK/WIKA's/2018 dated July 02, 2028 concerning Amendments to the Decree of Board of Commissioners No: 73/DK/WIKA's/2016 on the Committee Charter of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, as amended in accordance with the Copy of the Decree of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No: 106/DK/WIKA's/2023 dated October 10, 2023 concerning the Audit Committee Charter of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Provisions regulated in the Audit Committee Charter include:

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Pedoman Umum;
3. Bab III Organisasi;
4. Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab;
5. Bab V Honorarium, Pembebanan Biaya dan Anggaran;
6. Bab VI Rapat, Surat Menyurat dan Pelaporan;
7. Bab VII Penutup

Kriteria Anggota Komite Audit

Kriteria pengangkatan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, proses audit, dan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib memahami ketentuan di bidang QHSEE;
4. Wajib mematuhi *Code of Conduct* yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
6. Mampu bekerja secara mandiri, independen, objektif dan profesional, memiliki integritas, dan penuh dedikasi;
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultansi lain kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali sebagai Komisaris Independen;
9. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang dibuktikan dengan ditandatangani surat pernyataan tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung;
10. Dalam hal Anggota Komite Audit memperoleh saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
11. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
12. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
2. Bagi anggota dan atau Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, masa jabatannya sebagai Komite Audit berakhir sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris;

1. Chapter I Introduction;
2. Chapter II General Guidelines;
3. Chapter III Organization;
4. Chapter IV Duties and Responsibilities;
5. Chapter V Honorarium, Fees and Budget;
6. Chapter VI Meetings, Correspondence and Reporting;
7. Chapter VII Closing.

Audit Committee Criteria

The criteria for appointment of members of Audit Committee are as follows:

1. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with their field of work and be able to communicate well;
2. Have sufficient understanding on financial reports, the Company's business specifically related to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's services or business activities, audit processes, risk management and legislation in capital market and other related legislation;
3. Must understand the provisions related to QSHE;
4. Must comply with the prevailing Code of Conduct in PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
5. Must be willing to increase their competencies continuously through education and training;
6. Able to work independently, objectively and professionally, have integrity and be dedicated;
7. Must not be a person from a Public Accounting Firm, Legal Consulting Office, Public Appraisal Service Office or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk within the past 6 (six) months;
8. Must not be a person who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's activities in the past 6 (six) months except as an Independent Commissioner.
9. Must not have any direct or indirect shares in PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as evidenced by signing a statement to that effect;
10. In the event that a member of Audit Committee acquires PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's shares, either directly or indirectly due to a legal event, the shares must be transferred to another party no later than 6 (six) months after the shares are acquired;
11. Must not have any affiliation with members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's Majority Shareholders.
12. Must not have any business relations, directly or indirectly, related to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's business activities.

Term of Office

The term of office of Audit Committee is as follows:

1. Term of office for members of Audit Committee shall not be longer than their term of office on the Board of Commissioners as laid down in PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's articles of association;
2. For Audit Committee members or Chairman and/or Vice Chairman who are concurrently members of Board of Commissioners, their term of office on the Audit Committee ends the same as their tenure as a member of Board of Commissioners;

3. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
4. Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
2. Melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur di bidang QHSEE;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
4. Melakukan penelaahan dengan manajemen dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik terkait dengan semua hal yang diharuskan untuk dikomunikasikan oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik kepada Komite Audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal/Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pemberhentian Auditor Eksternal/Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
7. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit SPI;
8. Melakukan penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian intern PT Wijaya Karya (Persero) Tbk termasuk pengendalian dan pengamanan teknologi informasi;
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, SPI dan unit yang menangani pengembangan manajemen risiko dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris;
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan dan atau ditugaskan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris maupun Keputusan Dewan Komisaris.

3. The term of office of members of Audit Committee who are not members of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for a 2 (two) year term of office, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss them at any time;
4. Members of Audit Committee who are not members of Board of Commissioners may be reappointed based on a Decree of Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities

Audit Committee duties and responsibilities are as follows:

1. Review financial information to be released by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk to the public and or authorities including financial statements, projections and other reports related to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's financial information;
2. Review and provide recommendations on the implementation of policies and procedures in the field of QHSEE;
3. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and the External Auditor/Public Accountant regarding the services provided;
4. Jointly with the management and the External Auditor/Public Accountant, review all matters that are required to be communicated by the External Auditor/Public Accountant to the Audit Committee in accordance with the Public Accountant Professional Standards;
5. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of External Auditors/Public Accountants based on independence, scope of assignment and fees;
6. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the dismissal of External Auditors/Public Accountants based on independence, scope of assignment, and fees;
7. Review the implementation of audit by the Internal Audit Unit (SPI) and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Directors regarding SPI audit findings;
8. Review the effectiveness of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's internal control system, including information technology control and security;
9. Review complaints related to the accounting and financial reporting processes of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
10. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Audit Committee Authorities

Audit Committee authorities include:

1. Access to documents, data and information of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk about employees, funds, assets and required resources;
2. Communicating directly with employees, including Board of Directors, SPI and units handling risk management development, and External Auditors/Public Accountants related to the Audit Committee duties and responsibilities;
3. Involvement with independent parties outside the Audit Committee members who are required to assist in carrying out their duties (if needed) with the written approval of Board of Commissioners;
4. Performing other authorities granted and/or assigned by the Board of Commissioners, as stipulated through the Board of Commissioners' Meetings and Board of Commissioners' Decree mechanisms.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Audit

Di tahun 2024, struktur keanggotaan Komite Audit tidak mengalami perubahan di mana komposisi Komite Audit Perseroan berjumlah 4 (empat) anggota yang terdiri dari Komisaris Independen dan pihak eksternal yang dipilih dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Penunjukan ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan prinsip independensi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Berikut susunan dan komposisi Komite Audit per 31 Desember 2024:

Audit Committee Structure, Amount, Composition and Basis of Appointment

In 2024, the membership structure of Audit Committee remains unchanged where the composition of the Company's Audit Committee amounted to 4 (four) members consisting of Independent Commissioners and external parties elected and dismissed by the Board of Commissioners. This appointment is designed to ensure the continuity of the principle of independence, in accordance with the provisions stated in the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee. The following is the composition of Audit Committee as of December 31, 2024:

Jabatan Position	Nama Name	Keterangan Description	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Office Period
Ketua Komite Audit merangkap Anggota Audit Committee Chairman and Member	Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Teknik dan Manajemen Engineering and Management	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the period as Board of Commissioners
Anggota Member	Adityawarman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Teknik dan Manajemen Engineering and Management	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the period as Board of Commissioners
Anggota Member	Roy Journalista	Pihak Independen Independent Party	Tenaga Ahli Bidang Akuntansi dan Keuangan Engineering and Management	Periode Ke-1 1st Period
Anggota Member	Rita Rufaida	Pihak Independen Independent Party	Tenaga Ahli Bidang Akuntansi dan Keuangan Engineering and Management	Periode Ke-1 1st Period

Profil Komite Audit



Suryo Hapsoro Tri Utomo

Ketua Komite Audit
 Audit Committee Chairman

Profil Ketua Komite Audit Suryo Hapsoro Tri Utomo dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The Audit Committee Chairman profile, Suryo Hapsoro Tri Utomo, can be found in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Dasar Hukum Pengangkatan

Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 88/DK/WIKA/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Legal Basis for Appointment

The Copy of PT Wijaya Karya Tbk Board of Commissioners' Decree No. 88/DK/WIKA's/2021 dated October 01, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of Audit Committee of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.



Adityawarman

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Profil Anggota Komite Audit Adityawarman dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The Audit Committee Member profile, Adityawarman, can be found in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Dasar Hukum Pengangkatan

Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 88/DK/WIKA/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Legal Basis for Appointment

The Copy of PT Wijaya Karya Tbk Board of Commissioners' Decree No. 88/DK/WIKA's/2021 dated October 01, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of Audit Committee of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.



Roy Younalista

Anggota Komite Audit Audit Committee Member

Periode Jabatan: 3 Juli 2023 - sekarang

Term of Office: July 3, 2023 - present

Kewarganegaraan	Nationality
Indonesia	Indonesia
Usia	Age
61 Tahun per 31 Desember 2024	52 tahun
Domisili	Domicile
Bogor, Jawa Barat, Indonesia	Bogor, West Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Educational Background
<ol style="list-style-type: none"> Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1984) Sarjana Ekonomi - Akuntan, Universitas Warmadewa (1997) Master of Business Administration, International University of Japan (2001) 	<ol style="list-style-type: none"> Diploma III State Accountancy College (1984) Bachelor of Economics - Accountant, Warmadewa University (1997) Master of Business Administration, International University of Japan (2001)
Sertifikasi	Certification
<ol style="list-style-type: none"> Chartered Accountant (CA), 2013 Certification in Audit Committee Practices (CACP), IKAI, 2024 Certified Risk Governance Professional (CRGP), GIRMA, 2024 	<ol style="list-style-type: none"> Chartered Accountant (CA), 2013 Certification in Audit Committee Practices (CACP), IKAI, 2024 Certified Risk Governance Professional (CRGP), GIRMA, 2024
Rangkap Jabatan	Concurrent Position
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di Perseroan maupun lembaga lainnya.	Does not hold concurrent positions either in the Company or other institutions.
Pengalaman Kerja	Work Experience
<ol style="list-style-type: none"> Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara di BPKP Palembang (2014-2016) Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara di BPKP Medan (2017-2020) Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara di BPKP Jakarta (2020-2023) 	<ol style="list-style-type: none"> Coordinator of State Accounting Supervision at BPKP Palembang (2014-2016) Coordinator of State Accounting Supervision at BPKP Medan (2017-2020) Coordinator of State Accounting Supervision at BPKP Jakarta (2020-2023)
Dasar Hukum Pengangkatan	Legal Basis for Appointment
<ul style="list-style-type: none"> Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 65/DK/ WIKA/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 80/DK/ WIKA/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> Copy of Decree of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 65/DK/WIKA's/2023 dated July 03, 2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of Audit Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Copy of Decree of the Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 80/DK/WIKA/2023 dated July 24, 2023 concerning the Appointment of Members of the Audit Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk

Audit Committee Profile



Rita Rufaida

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Periode Jabatan: 24 Juli 2023 - sekarang
Term of Office: July 24, 2023 - present

Kewarganegaraan	Nationality
Indonesia	Indonesia
Usia	Age
61 Tahun per 31 Desember 2024	61 Tahun per 31 Desember 2024
Domisili	Domicile
Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia	Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Educational Background
<ol style="list-style-type: none"> Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1984) Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991) Master of Business Administration, Michigan State University (1993) 	<ol style="list-style-type: none"> Diploma III of the State College of Accountancy (1984) Diploma IV of the State College of Accountancy (1991) Master of Business Administration, Michigan State University (1993)
Sertifikasi	Certification
<ol style="list-style-type: none"> Chartered Accountant (CA), 2015 Certification in Audit Committee Practices (CACP), IKAI, 2024 Certified Risk Governance Professional (CRGP), GIRMA, 2024 	<ol style="list-style-type: none"> Chartered Accountant (CA), 2015 Certification in Audit Committee Practices (CACP), IKAI, 2024 Certified Risk Governance Professional (CRGP), GIRMA, 2024
Rangkap Jabatan	Concurrent Position
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di Perseroan maupun lembaga lainnya.	Does not have concurrent positions both in the Company and other institutions.
Pengalaman Kerja	Work Experience
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 1983-2023	Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) 1983-2023
Dasar Hukum Pengangkatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 80/DK/WIKA/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.	The Copy of PT Wijaya Karya Tbk Board of Commissioners' Decree No. 80/DK/WIKA's/2023 dated July 24, 2023 concerning Appointment of Members of Audit Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Pernyataan Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Audit Committee Independency Statement

All Audit Committee members are independent parties with no financial, management, share ownership and/or familial relations with Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Company, which can affect their ability to act independently.

Aspek Independensi Independency Aspects	Suryo Hapsoro Tri Utomo	Adityawarman	Roy Younalista	Rita Rufaida
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the Company, its subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have familial relations with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as a political party, official and government management	✓	✓	✓	✓

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Telah Diikuti dalam Tahun Buku

Untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dapat berjalan dengan baik, Perseroan memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kompetensi Komite Audit. Dalam hal ini, Perseroan memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung kelancaran operasional dan memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Komite Audit memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan Dewan Komisaris secara efektif. Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi yang relevan dengan perkembangan bisnis dan tata kelola Perseroan, sebagai berikut:

Training and/or Competency Development Attended in the Fiscal Year

To ensure that the supervisory function carried out by the Board of Commissioners can run well, the Company pays special attention to the competency development of Audit Committee. In this regard, the Company facilitates the improvement of knowledge and skills that can support smooth operations and strengthen the implementation of supervisory duties. This support aims to ensure that the Audit Committee has the expertise needed to effectively support the Board of Commissioners' activities. Throughout 2024, Audit Committee has participated in various competency improvement programs that are relevant to the Company's business and governance development, as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer by
Suryo Hapsoro Tri Utomo (Ketua Komite Audit merangkap Anggota) (Audit Committee Chairman and Member)	Pelatihan/Review Course Training/Review Course	Manajemen Risiko Risk Management	Jakarta, 24-25 Oktober 2024 Jakarta, October 24-25, 2024	RAP Learning Center
Adityawarman (Wakil Ketua) (Deputy Chairman)	Pelatihan/Review Course Training/Review Course	Manajemen Risiko Risk Management	Jakarta, 10-11 September 2024 Jakarta, September 10-11, 2024	LSPMKS
	Review Course	IC, MR, Keterbukaan Informasi, External Auditor	Jakarta, 25-27 Juni 2024 Jakarta, June 25-27, 2024	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association
Roy Younalista (Anggota) (Member)	Seminar	Peran Strategis Komite Audit Dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman The Strategic Role of Audit Committee in Realizing a Safe Cyber Realm	Jakarta, 01 Agustus 2024 Jakarta, August 01, 2024	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association
	Pelatihan/Review Course Training/Review Course	Manajemen Risiko Risk Management	Jakarta, 24-25 Oktober 2024 Jakarta, October 24-25, 2024	RAP Learning Center

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer by
	Review Course	IC, MR, Keterbukaan Informasi, External Auditor IC, MR, Information Disclosure, External Auditor	Jakarta, 25-27 Juni 2024 Jakarta, June 25-27, 2024	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association
Rita Rufaida (Anggota) (Member)	Seminar	Komite Audit Dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman The Strategic Role of Audit Committee in Realizing a Safe Cyber Realm	Jakarta, 01 Agustus 2024 Jakarta, August 01, 2024	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association
	Pelatihan/Review Course Training/Review Course	Manajemen Risiko Risk Management	Jakarta, 24-25 Oktober 2024 Jakarta, October 24-25, 2024	RAP Learning Center

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Audit dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat tersebut

Ketentuan Rapat Komite Audit sebagai berikut:

- Rapat Komite Audit diadakan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus;
- Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite, atau melalui media daring;
- Rapat Komite Audit hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Komite Audit;
- Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan;
- Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Jika Ketua Komite Audit berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit paling senior;
- Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait materi rapat untuk hadir pada rapat Komite Audit. Rapat Komite Audit yang dihadiri oleh pihak-pihak selain anggota Komite Audit, tidak akan dipengaruhi oleh pendapat maupun perbedaan pendapat yang muncul di antara pihak di luar Komite Audit;
- Setiap rapat Komite Audit harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Isi risalah rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada), dan keputusan rapat;
- Risalah rapat Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- Risalah rapat didokumentasikan dalam kumpulan dokumen Komite Audit yang dibantu administrasi dan penyimpanannya oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Policy and Frequency of Audit Committee Meetings and Attendance of Members of Audit Committee at the Meeting

The Audit Committee Meeting terms are as follows:

- Audit Committee Meetings are held at least 1 (once) a month, or at least similar to the minimum conditions for the Board of Commissioners' meetings as set out in the Company's Articles of Association. If necessary, the Audit Committee may hold special meetings;
- Committee meetings are held at the Company's domicile, another place determined by the Committee Chairman, or through online media;
- Audit Committee meetings can only be held if attended by more than 1/2 (one half) of the Audit Committee members;
- Meetings are held based on invitations and previously agreed agendas;
- Audit Committee meetings are chaired by the Audit Committee Chairman. If the Chairman is absent then the meeting is chaired by the Audit Committee Deputy Chairman or the senior member of Audit Committee;
- Audit Committee meeting decisions are taken based on deliberation;
- If necessary, the Audit Committee may invite other parties related to the meeting material to the Audit Committee meeting. Audit Committee meetings that are attended by parties other than members of the Audit Committee, shall not be influenced by any opinions or differences of opinion coming from the parties invited to the Audit Committee;
- Each Audit Committee meeting must have meeting minutes signed by all present Audit Committee members. The meeting minutes will include the meeting time and place, agenda, attendees, and topics discussed, with dissenting opinion (if any), and meeting decisions;
- Audit Committee meeting minutes must be submitted to the Board of Commissioners;
- Audit Committee meeting minutes must be administered and stored by the Secretary of Board of Commissioners.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Sepanjang tahun 2024, rapat Komite Audit dilaksanakan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Audit Committee Meeting Frequency and Attendance

During 2024, Audit Committee held 22 (twenty-two) meetings with the agenda and attendance of each member of Audit Committee as follows:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	15 Januari 2024 January 15, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Executive Summary Laporan Hasil Usaha sampai dengan Bulan November 2023 Pembahasan Persiapan Rapat Internal Dewan Komisaris Tanggal 15 Januari 2024 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Executive Summary of Business Results Report until November 2023 Discussion of Preparation for Internal Meeting of Board of Commissioners on January 15, 2024 Others
2	02 Februari 2024 February 02, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Hasil ICOFR dan Tindak Lanjutnya <ol style="list-style-type: none"> Discussion of ICOFR Results and Follow-up
3	05 Maret 2024 March 05, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Monitoring terhadap 8 Stream Penyelesaian Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Pembahasan Executive Summary Laporan Hasil Usaha sampai dengan Bulan Januari 2024 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Monitoring of the 8 Streams of Financial Recovery of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Discussion of Executive Summary of Business Results Report up to January 2024 Others
4	19 Maret 2024 March 19, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Hasil Pengawasan Internal Audit Pembahasan Progress Audit KAP RSM Indonesia Pembahasan Progress Tindak Lanjut Hasil Review ICOFR Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit pihak Auditor Eksternal (BPK dan KAP) Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Internal Audit Supervision Results Discussion of Audit Progress of KAP RSM Indonesia Discussion of Follow-up Progress of ICOFR Review Results Discussion of Follow-up of Audit Results of External Auditors (BPK and KAP) Others
5	23 April 2024 April 23, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Executive Summary Laporan Hasil Usaha sampai dengan Bulan Februari 2024 Pembahasan Persiapan Rapat Internal Dewan Komisaris Tanggal 23 April 2024 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Internal Audit Supervision Results Discussion of Audit Progress of KAP RSM Indonesia Discussion of Follow-up Progress of ICOFR Review Results Discussion of Follow-up of Audit Results of External Auditors (BPK and KAP) Others
6	14 Mei 2024 May 14, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Executive Summary Laporan Hasil Usaha sampai dengan Bulan Maret 2024 Pembahasan Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tanggal 15 Mei 2024 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Executive Summary of Business Results Report until March 2024 Discussion of Preparation for the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk on May 15, 2024 Others
7	04 Juni 2024 June 04, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak Lanjut Surat dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna perihal Tanggapan atas Laporan Capaian Kinerja Tahun Buku 2023 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Follow-up Letter from Series A Dwiwarna Shareholders regarding Response to the 2023 Fiscal Year Performance Achievement Report of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Others
8	11 Juni 2024 June 11, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Executive Summary Laporan Hasil Usaha sampai dengan Bulan April 2024 Pembahasan Rencana Aksi Korporasi Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Executive Summary of Business Results Report until April 2024 Discussion of Corporate Action Plan Others
9	09 Juli 2024 July 09, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Progress PKPT Tahun 2024 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal dan External Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Review ICOFR Pembahasan Limited Review KAP RSM Indonesia Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of PKPT Progress in 2024 Monitoring of Follow-up of Internal and External Audit Results Monitoring of Follow-up of ICOFR Review Results Discussion of Limited Review of KAP RSM Indonesia Others

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
10	09 Juli 2024 July 09, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Dashboard dalam rangka Pengawasan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of the Dashboard in the context of Supervision of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Others
11	22 Juli 2024 July 22, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Executive Summary Laporan Hasil Usaha WIKA Induk Bulan Juni Tahun 2024 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Executive Summary of WIKA Parent's Business Results Report for June 2024 Others
12	16 Agustus 2024 August 16, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Executive Summary Laporan Hasil Usaha WIKA Konsolidasi Bulan Juni 2024 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Executive Summary of WIKA Consolidated Business Results Report for June 2024 Others
13	06 September 2024 September 06, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Executive Summary Laporan Hasil Usaha WIKA Induk Bulan Juli 2024 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Executive Summary of WIKA Parent's Business Results Report for July 2024 Others
14	18 Oktober 2024 October 18, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Progress PKPT Tahun 2024 Pembahasan Progress Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Audit Internal dan External Pembahasan Progress Pemantauan Hasil Review ICOFR Pembahasan Progress Limited Review KAP RSM Indonesia Pembahasan Progress Audit Internal Terintegrasi Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of PKPT Progress in 2024 Discussion of Follow-up Progress on Internal and External Audit Findings Discussion of ICOFR Review Results Monitoring Progress Discussion of Limited Review Progress of KAP RSM Indonesia Discussion of Integrated Internal Audit Progress Others
15	05 November 2024 November 05, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Prognosa Kinerja Perseroan Tahun 2024 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of the Company's Performance Prognosis in 2024 Others
16	12 November 2024 November 12, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Executive Summary Laporan Hasil Usaha WIKA Konsolidasi Bulan September 2024 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion of the Executive Summary of the WIKA Consolidated Business Results Report for September 2024 Others
17	22 November 2024 November 22, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pemaparan Progress Kinerja CQHSE Division sampai dengan Bulan Oktober 2024 Pemaparan Overview Proyek Tol Jakarta-Cikampek Selatan 2A dan Proyek RDF Rorotan <ol style="list-style-type: none"> Presentation of the CQHSE Division's Performance Progress until October 2024 Presentation of the Overview of Jakarta-Cikampek Selatan 2A Toll Road Project and RDF Rorotan Project
18	09 Desember 2024 December 09, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan terkait tambahan tugas Kepatuhan Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion on additional Compliance tasks Others
19	09 Desember 2024 December 09, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Peta Jalan Implementasi ICOFR Pembahasan Rancangan KPI RKAP PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2025 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion on ICOFR Implementation Roadmap Discussion on the Draft KPI RKAP of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for 2025 Fiscal Year Others
20	18 Desember 2024 December 18, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Program Kerja CQHSE Division Tahun 2025 Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion on the CQHSE Division Work Program for 2025 Others
21	18 Desember 2024 December 18, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Peta Jalan Implementasi ICOFR Pembahasan terkait tambahan tugas Kepatuhan Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> Discussion on the ICOFR Implementation Roadmap Discussion on additional Compliance tasks Others

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
22	18 Desember 2024 December 18, 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Progress Kinerja Internal Audit Tahun 2024 Pembahasan Progress Kinerja Internal Audit Tahun 2024 Pembahasan Rencana Kinerja Internal Audit Tahun 2025 (termasuk Audit Terintegrasi) Pembahasan Roadmap Implementasi ICOFR Pembahasan Progress Audit KAP atas Laporan Keuangan Tahun 2024 Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion on the 2024 Internal Audit Performance Progress Discussion on the 2024 Internal Audit Performance Progress Discussion on the 2025 Internal Audit Performance Plan (including Integrated Audit) Discussion on ICOFR Implementation Roadmap Discussion on KAP Audit Progress on 2024 Financial Statements Others

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Komite Audit Attendance of Audit Committee			
		Suryo Hapsoro Tri Utomo	Adityawarman	Roy Journalista	Rita Rufaida
1	15 Januari 2024 January 15, 2024	v	v	v	v
2	02 Februari 2024 February 02, 2024	v	v	v	v
3	05 Maret 2024 March 05, 2024	v	v	v	v
4	19 Maret 2024 March 19, 2024	v	v	v	v
5	23 April 2024 April 23, 2024	v	v	v	v
6	14 Mei 2024 May 14, 2024	v	v	v	v
7	04 Juni 2024 June 04, 2024	v	v	v	v
8	11 Juni 2024 June 11, 2024	v	v	v	v
9	09 Juli 2024 July 09, 2024	v	v	v	v
10	09 Juli 2024 July 09, 2024	v	v	v	v
11	22 Juli 2024 July 22, 2024	v	v	v	v
12	16 Agustus 2024 August 16, 2024	v	v	v	v
13	06 September 2024 September 06, 2024	v	v	v	v
14	18 Oktober 2024 October 18, 2024	v	v	v	v
15	05 November 2024 November 05, 2024	v	v	v	v
16	12 November 2024 November 12, 2024	v	v	v	v
17	22 November 2024 November 22, 2024	v	v	v	v
18	09 Desember 2024 December 09, 2024	v	v	v	v
19	09 Desember 2024 December 09, 2024	v	v	v	v
20	18 Desember 2024 December 18, 2024	v	v	v	v
21	18 Desember 2024 December 18, 2024	v	v	v	v
22	18 Desember 2024 December 18, 2024	v	v	v	v

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat

Audit Committee Meeting Attendance Recapitulation

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Suryo Hapsoro Tri Utomo (Ketua Chairman)	22	22	100%
Adityawarman (Wakil Ketua Komite Audit Audit Committee Deputy Chairman)	22	22	100%
Roy Yournalista (Anggota Member)	22	22	100%
Rita Rufaida (Anggota Member)	22	21	95%

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Audit

Penetapan remunerasi bagi Komite Audit mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Remuneration Policy for Audit Committee

The determination of remuneration for Audit Committee refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit pada Tahun Buku Sesuai dengan yang Dicantumkan dalam Pedoman atau Piagam (Charter) Komite Audit

Sepanjang tahun 2024, pelaksanaan tugas Komite Audit meliputi:

Implementation of Audit Committee Activities in the Fiscal Year as stated in the Audit Committee Guidelines or Charter

Throughout 2024, the implementation of Audit Committee duties included:

No.	Uraian Tugas Komite Audit Audit Committee Job Description	
	Menurut Piagam Komite Audit According to the Audit Committee Charter	Realisasi Realization
1	Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, meliputi Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasi WIKA Tahunan (Audited), informasi keuangan lainnya yang dikeluarkan Perseroan (bila ada), dan penelaahan hasil capaian kinerja WIKA Bulanan. Reviewing the financial information that will be issued by the Company to the public and/or authorities, including Publication of Annual WIKA Consolidated Financial Statements (Audited), Publication of Quarterly WIKA Consolidated Financial Statements (Audited), other financial information issued by the Company (if any), and review of monthly WIKA performance results.	Komite Audit secara rutin melakukan pengawasan atas hasil capaian kinerja WIKA Bulanan yang dilaporkan Direksi melalui Executive Summary Bulanan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan kinerja, dan untuk memperoleh informasi secara dini apabila terjadi penurunan kinerja secara signifikan. Selain itu Komite Audit juga melakukan diskusi dengan KAP dan Manajemen terutama terkait dengan temuan-temuan yang material pada saat proses audit tahunan. Diskusi dilakukan untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan yang diterbitkan relevan serta andal bagi semua pemangku kepentingan. Diskusi dan pemantauan juga dilakukan dalam proses Limited Review yang dilakukan KAP atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024. Audit Committee routinely monitors the results of WIKA's monthly performance achievements which are reported by the Board of Directors through the Monthly Executive Summary. This is done to obtain an overview of performance development, and to obtain information early on in the event of a significant decline in performance. In addition, Audit Committee also conducts discussions with KAP and Management, especially related to material findings during the annual audit process. Discussions are held to ensure that the published Financial Statements are relevant and reliable for all stakeholders. Discussions and monitoring are also carried out in the Limited Review process conducted by KAP on the First Semester Financial Statements of 2024.

Uraian Tugas Komite Audit Audit Committee Job Description	
No.	Menurut Piagam Komite Audit According to the Audit Committee Charter
2	<p>Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit/jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP), termasuk menelaah independensi dan objektivitas.</p> <p>Evaluate the effectiveness of audits/services by the Public Accounting Firm (KAP), including reviewing independence and objectivity</p>
3	<p>Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP yang didasarkan pada independensi, profesionalisme, ruang lingkup penugasan, dan fee, untuk audit tahun buku 2024 untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>Prepare recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a KAP based on independence, professionalism, scope of assignment, and fees, for an audit of 2024 fiscal year to be submitted to the GMS</p>
4	<p>Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit KAP Tahun Buku 2023.</p> <p>Prepare a Report on the Evaluation Results of Audit Committee on the Implementation of KAP Audit Service for 2024 Fiscal Year.</p>

Komite Audit melakukan koordinasi sekaligus monitoring dan evaluasi atas kinerja KAP dalam melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan. Didampingi oleh Internal Audit dan Manajemen terkait, Komite Audit mengawal KAP dalam melakukan kunjungan ke proyek-proyek yang terpilih sebagai sample audit.

Selain itu, Komite Audit, dengan menggunakan hasil survey kepuasan auditee yang didistribusikan oleh Internal Audit, memberikan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit oleh KAP terpilih.

Audit Committee coordinates, monitors and evaluates the performance of KAP in auditing the Company's Financial Statements. Accompanied by Internal Audit and related Management, Audit Committee supervises KAP in visiting projects selected as audit samples.

In addition, Audit Committee, using the results of auditee satisfaction survey distributed by Internal Audit, assesses the effectiveness of audits conducted by selected KAP.

Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan KAP untuk pelaksanaan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024. Rekomendasi dibuat berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja KAP yang lalu, yang digali melalui survey kepada seluruh unit kerja terkait, pertimbangan independensi, kecukupan jumlah staff auditor yang ditugaskan di perusahaan, ketepatan waktu penyelesaian laporan, dan saran perbaikan yang diberikan KAP untuk perbaikan prosedur dan operasional di Perusahaan, serta pertimbangan ketersediaan anggaran untuk audit.

Audit Committee provides recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of KAP for the audit of the Financial Statements for Fiscal Year 2024. Recommendations are made based on the results of an evaluation of the past performance of KAP, which is explored through a survey of all relevant work units, consideration of independence, adequacy of the number of auditor staff assigned to the Company, timeliness of report completion, and suggestions for improvements provided by the KAP for procedural and operational improvements in the Company, as well as consideration of the availability of an audit budget.

Komite Audit memberikan penilaian atas pelaksanaan proses audit oleh KAP berdasarkan hasil survey yang didistribusikan oleh Internal Audit ke seluruh unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan audit. Berdasarkan hasil survey, auditee puas dengan pekerjaan audit yang dilakukan oleh KAP.

Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

Selain itu, sesuai arahan dari Kementerian BUMN, Dewan Komisaris, atas masukan dari Komite Audit, juga telah menyampaikan evaluasi atas kinerja KAP.

Audit Committee assesses the implementation of audit process by KAP based on survey results distributed by Internal Audit to all work units related to audit implementation. Based on the survey results, auditees are satisfied with the audit work carried out by KAP.

The evaluation report is submitted to OJK in accordance with regulations.

In addition, as directed by the Ministry of SOEs, the Board of Commissioners, based on input from Audit Committee, has also submitted an evaluation of KAP's performance.

No.	Uraian Tugas Komite Audit Audit Committee Job Description	
	Menurut Piagam Komite Audit According to the Audit Committee Charter	Realisasi Realization
5	<p>Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor.</p> <p>Reviewing the implementation of audits by internal auditors and external auditors, and supervising the implementation of follow-up by the Board of Directors on the auditors' findings.</p>	<p>Komite Audit melakukan diskusi dengan Internal Audit dan KAP terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Internal Audit, dan KAP.</p> <p>Komite Audit juga melakukan diskusi dengan Internal Audit mengenai tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi/Manajemen atas hasil pengawasan dari Internal Audit dan KAP, termasuk tindak lanjut atas temuan BPK dari pengawasan pada tahun-tahun sebelumnya yang masih terbuka.</p> <p>Diskusi atas hasil audit dan tindak lanjutnya dilakukan secara formal dalam Rapat Koordinasi setiap tiga bulan. Disamping itu juga dilakukan diskusi dengan Internal Audit dalam proses penyusunan PKPT Internal Audit, dan diskusi informal lain sesuai kebutuhan.</p> <p>Audit Committee conducts discussions with Internal Audit and KAP related to the audit process conducted by Internal Audit and KAP.</p> <p>Audit Committee also discusses with Internal Audit regarding the follow-up actions taken by the Board of Directors/Management on the results of supervision from Internal Audit and KAP, including follow-up on BPK findings from supervision in previous years that are still open.</p> <p>Discussion of the audit results and follow-up is conducted formally in a Coordination Meeting every three months. In addition, discussions are also held with Internal Audit in the process of preparing the Internal Audit PKPT, and other informal discussions as needed.</p>
6	<p>Melakukan penelaahan apabila terdapat pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan (bila ada).</p> <p>Conduct a review if there are complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes (if any).</p>	<p>Tidak ada pengaduan terkait proses akuntansi.</p> <p>There are no complaints regarding the accounting process.</p>
7	<p>Melakukan penelaahan terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan WIKA (bila ada).</p> <p>Conduct a review related to the potential conflict of interest of WIKA (if any).</p>	<p>Tidak ada potensi benturan kepentingan yang teridentifikasi.</p> <p>No potential conflicts of interest have been identified.</p>
8	<p>Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Rapat Direksi (bila ada).</p> <p>Conduct an examination of allegations of errors in the Board of Directors' Meeting decisions or irregularities in the Board of Directors' Meeting decisions implementation (if any).</p>	<p>Tidak ada kesalahan dalam keputusan rapat Direksi yang teridentifikasi atau dilaporkan.</p> <p>No errors in Board of Directors meeting decisions have been identified or reported.</p>
9	<p>Melakukan penelaahan atas pelaksanaan QHSEE oleh Perseroan.</p> <p>Reviewing the implementation of QHSEE by the Company.</p>	<p>Komite Audit bersama dengan tim QHSE Perseroan melakukan patrol dengan mengunjungi proyek-proyek Perseroan untuk memastikan bahwa QHSE telah diterapkan secara menyeluruh di proyek-proyek Perseroan. Tahun 2024 kunjungan dilakukan ke proyek Perseroan di Ibukota Negara (IKN) yang terdiri atas Proyek Kantor Presiden, Istana Negara, dan Jalan Tol. Patrol juga dilakukan ke Proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan dan Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek Selatan.</p> <p>Audit Committee together with the Company's QHSE team conduct patrols by visiting the Company's projects to ensure that QHSE has been implemented thoroughly in the Company's projects. In 2024, visits were made to the Company's projects in the State Capital (IKN) which consisted of Presidential Office, State Palace, and Toll Road Projects. Patrols were also carried out on Rorotan Refuse Derived Fuel (RDF) Project and Jakarta Cikampek Selatan Toll Road Project.</p>

No.	Uraian Tugas Komite Audit Audit Committee Job Description	
	Menurut Piagam Komite Audit According to the Audit Committee Charter	Realisasi Realization
10	Telaah terhadap Sistem Internal Kontrol WIKA. Assessment of WIKA's Internal Control System.	<p>Komite Audit melakukan diskusi dengan Internal Audit terkait implementasi sistem pengendalian internal pada Perseroan, memantau penyelesaian tindak lanjut atas hasil evaluasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) yang dilaksanakan oleh Konsultan Independen pada tahun 2023, serta memantau rencana dan kesiapan Perseroan dalam mengimplementasikan ICOFR sesuai Road Map dari Kementerian BUMN.</p> <p>Audit Committee conducts discussions with Internal Audit regarding the implementation of internal control system in the Company, monitors the completion of follow-up on the results of Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) evaluation carried out by Independent Consultant in 2023, and monitors the Company's plans and readiness in implementing ICOFR according to the Road Map from the Ministry of SOEs.</p>
11	<p>Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas Komite Audit meliputi Laporan Komite Audit untuk Annual Report, Laporan realisasi program kerja Komite Audit.</p> <p>Making reports related to the implementation of duties of Audit Committee including Audit Committee Report for the Annual Report, Report on the realization of Audit Committee work program.</p>	<p>Komite Audit menyusun laporan kegiatan Komite Audit setiap triwulan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas Komite. Selain itu, Komite Audit juga melaporkan keberadaan dan aktivitas Komite Audit dalam Annual Report Perseroan.</p> <p>Audit Committee prepares a report on Audit Committee activities every quarter as a form of accountability for the Committee's duties implementation. In addition, Audit Committee also reports the existence and activities of Audit Committee in the Company's Annual Report.</p>
12	<p>Perjalanan Dinas Komite Audit dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Komite Audit, meliputi perjalanan dalam negeri dan luar negeri.</p> <p>Audit Committee business trips in the context of official duties carried out by the Audit Committee, including domestic and overseas travel.</p>	<p>Komite Audit melakukan beberapa perjalanan dinas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjalanan dinas dalam negeri, dalam rangka mendampingi Dewan Komisaris bersama Tim QHSE untuk QHSE Patrol sebanyak 2 (dua) kali (Proyek-proyek IKN, dan Proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan serta Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek Selatan); Perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka mendampingi KAP RSM Indonesia ke Proyek WIKA sebanyak (1) satu kali (untuk 2 (dua) Proyek) Tahun 2024 tidak ada perjalanan dinas ke luar negeri mengingat tidak ada proyek di luar negeri. <p>Audit Committee made several business trips including:</p> <ul style="list-style-type: none"> Domestic business trips, in the context of accompanying the Board of Commissioners with the QHSE Team for QHSE Patrols 2 (two) times (National Capital Integrated Transportation Project, and Rorotan Refuse Derived Fuel (RDF) Project and Jakarta Cikampek Selatan Toll Road Project); Domestic business trips to accompany KAP RSM Indonesia to WIKA Projects (one trip for two projects) In 2024, there were no business trips abroad as there were no overseas projects.

No.	Uraian Tugas Komite Audit Audit Committee Job Description	
	Menurut Piagam Komite Audit According to the Audit Committee Charter	Realisasi Realization
13	Mengikuti program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi terkait tugas komite audit. Participate in education and training programs as well as certification related to audit committee duties.	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2024, seluruh anggota Komite Audit (Ketua, Wakil Ketua, dan anggota independen) mengikuti program sertifikasi dan memperoleh sertifikat kompetensi di bidang Manajemen Risiko. Selain itu, 2 (dua) orang anggota independen Komite Audit juga mengikuti program sertifikasi kompetensi di bidang Komite Audit. Sebelum memperoleh sertifikasi tersebut didahului dengan pelatihan sebanyak 20 jam pelatihan. Rincian program pelatihan/peningkatan pengetahuan yang diikuti Komite Audit dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku 2024. <ul style="list-style-type: none"> In 2024, all members of Audit Committee (Chairman, Vice Chairman, and independent member) participated in the certification program and obtained a competency certificate in Risk Management. In addition, 2 (two) independent members of Audit Committee also participated in the competency certification program in the field of Audit Committee. Before obtaining this certification, 20 hours of training must be completed. Details of the training/knowledge improvement programs attended by Audit Committee can be seen in the Training and/or Competency Improvement section that have been attended in the 2024 fiscal year.
14	Lain-lain Others	<p>Selama tahun 2024 Komite Audit telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Membantu dalam proses telaah yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko atas permohonan persetujuan aksi korporasi yang diajukan Direksi. Mengikuti rapat-rapat yang dilakukan oleh Komite Dewan Komisaris lainnya yang mengundang Unit Kerja. Menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN terkait Manajemen Risiko, ICOFR, maupun Pengadaan Barang Jasa/P3DN/TKDN. <p>During 2024, Audit Committee has:</p> <ul style="list-style-type: none"> Assisted in the review process conducted by Risk Monitoring Committee upon the request for approval of corporate action submitted by the Board of Directors. Attended meetings conducted by other Board of Commissioners Committees that invited Work Units. Attended meetings conducted by the Ministry of State-Owned Enterprises related to Risk Management, ICOFR, and Procurement of Goods and Services/P3DN/TKDN.

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN GCG

Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (“Komite NRG”) adalah bagian penting dari struktur Dewan Komisaris. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dibentuk untuk mendukung pengawasan yang efektif dalam tiga aspek utama, yakni Nominasi, Remunerasi, dan penerapan GCG. Dalam pelaksanaannya, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG bekerja secara independen dan kolegial, memastikan setiap tugas dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil kerja Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dilaporkan langsung kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang telah dilaksanakan.

Dasar Pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Dalam pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG, Perseroan mengacu pada pedoman berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6800);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 376);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262) (“Permen BUMN No. 2/2023”);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263) (“Permen BUMN No. 3/2023”);
7. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor: 110 tanggal 22 Desember 1972 sebagaimana telah

NOMINATION, REMUNERATION, AND GCG COMMITTEE

The Nomination, Remuneration and Good Corporate Governance Committee (“NRG Committee”) is an important part of the Board of Commissioners structure. The Nomination, Remuneration and GCG Committee was established to support effective supervision in three main aspects, namely Nomination, Remuneration and GCG implementation. In its implementation, the Nomination, Remuneration and GCG Committee works independently and collegially, ensuring each task is carried out based on the principles of transparency and accountability. The work results of Nomination, Remuneration and GCG Committee are reported directly to the Board of Commissioners as a form of accountability for the duties that have been carried out.

Nomination, Remuneration and GCG Committee Establishment Basis

In establishing the Nomination, Remuneration and GCG Committee, the Company refers to the following guidelines:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of 2007 Number 106, Supplement to State Gazette Number 4756) as amended by Law Number 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes Law (State Gazette of 2023 Number 41, Supplement to State Gazette Number 6856);
2. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of 2003 Number 70, Supplement to State Gazette Number 4297) as amended by Law Number 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes Law (State Gazette of 2023 Number 41, Supplement to State Gazette Number 6856);
3. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises (State Gazette of 2005 Number 117, Supplement to State Gazette Number 4556) as amended by Government Regulation Number 23 of 2022 on Amendments to Government Regulations Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises (State Gazette of 2022 Number 113, Supplement to State Gazette Number 6800);
4. Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies (2014 State Gazette Number 376);
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 262) (“SOE Ministerial Regulation No. 2/2023”);
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 263) (“SOE Ministerial Regulation No. 3/2023”);
7. Articles of Association of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk as stated in the Deed of Notary Dian Paramita Tamzil Number: 110 dated December 22, 1972 as amended several

beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 5 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015012.AH.01.02. Tahun 2022 ("Anggaran Dasar").

Pedoman Kerja/Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG menjalankan tugasnya berdasarkan Piagam Komite yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dekom Nomor 23/DK/WIKA/2020 tanggal 16 April dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 23/DK/WIKA/2020 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dekom Nomor 126/DK/WIKA/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Secara keseluruhan, Piagam Komite ini mencakup sejumlah pokok bahasan utama yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG dalam mendukung tata kelola yang baik di lingkungan Perseroan, meliputi:

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Pedoman Umum;
3. Bab III Pembentukan, Organisasi, Masa Jabatan dan Persyaratan Keanggotaan;
4. Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab, Kewenangan, Etika Kerja dan Evaluasi;
5. Bab V Honorarium, Pembebanan Biaya dan Anggaran;
6. Bab VI Penyelenggaraan Rapat, Surat Menyurat, Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
7. Bab VII Penutup.

Kriteria Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Kriteria anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan yang relevan, independensi, pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tata kelola perusahaan, serta mampu mengkomunikasikan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip dan proses Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG secara umum, prinsip-prinsip fungsi pengawasan dan Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan regulasi yang berkaitan dengan operasi Perseroan;
 - d. Mampu mempelajari kegiatan Perseroan secara cepat, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang memadai tentang kegiatan Perseroan dan kaitannya dengan aspek Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG;
 - e. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan santun serta menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah.

times, most recently by the Deed of Extraordinary Shareholder Decision Statement of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Number 5 dated February 4, 2022 made before Fathiah Helmi, S.H, Notary in Jakarta and has received approval from the Minister of Law and Human Rights Number AHU0015012.AH.01.02.Tahun 2022 ("Articles of Association").

Nomination, Remuneration and GCG Committee Work Guidelines/Charter

The Nomination, Remuneration and GCG Committee carries out its duties based on the Committee Charter which has been determined through the Board of Commissioners Decree No. 23/DK/WIKA's/2020 dated April 16, as amended by the Board of Commissioners Decree No. 126/DK/WIKA's/2023 dated December 29, 2023 concerning the Nomination, Remuneration and Good Corporate Governance (GCG) Committee Charter of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Overall, this Committee Charter includes a number of main topics that serve as guidelines for the duties implementation of Nomination, Remuneration and GCG Committees in supporting good governance within the Company, including:

1. Chapter I Introduction;
2. Chapter II General Guidelines;
3. Chapter III Formation, Organization, Term of Office and Membership Requirements;
4. Chapter IV Duties and Responsibilities, Authority, Work Ethics and Evaluation;
5. Chapter V Honorarium, Fees and Budget;
6. Chapter VI Organizing Meetings, Correspondence, Reporting and Accountability;
7. Chapter VII Closing.

Nomination, Remuneration and GCG Committee Criteria

The criteria for members of Nomination, Remuneration and GCG Committee are as follows:

1. Competency Requirements
 - a. Have integrity, dedication, ability, relevant education, independence, knowledge and experience to carry out the duties and functions of supervision of corporate governance and able to communicate in writing the results of their duties and functions to the Board of Commissioners in accordance with applicable terms and anprocedures;
 - b. Have sufficient knowledge to understand the principles and processes of Nomination, Remuneration & GCG Committee in general, the principles of supervisory function and the Company's Articles of Association;
 - c. Have adequate knowledge of Laws and Regulations concerning the Limited Liability Company, StateOwned Enterprise, and Regulations relating to the Company's operations;
 - d. Able to promptly learn about the Company's activities so that they can obtain adequate comprehension about the Company's activities and their relation to the Nomination, Remuneration & GCG Committee aspects;
 - e. Able to work together and communicate well and politely, as well as provide sufficient time to carry out their duties properly and with added value.

2. Persyaratan Independensi

- a. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;
- b. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang bukan anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
- c. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- d. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- e. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG bukan merupakan karyawan kunci Perseroan yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- f. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perseroan;
- g. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultansi lainnya kepada Perseroan dalam waktu satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan atau Keputusan Dewan Direksi sebagaimana yang berlaku pada Anggaran Dasar Perseroan.
3. Masa jabatan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang (1) satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang bukan anggota Dekom dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

2. Independence Requirements

- a. A member of Nomination, Remuneration & GCG Committee whose position as a member of Board of Commissioners does not have a blood relationship to the third degree, either in a straight line or a side line or a relationship arising from marriage with other members of Board of Commissioners or with members of Board of Directors;
- b. Members of Nomination, Remuneration & GCG Committee who are not members of Board of Commissioners are prohibited from having blood and marriage relations up to the third degree, either in a straight line or a sideways line with members of Board of Commissioners and members of Board of Directors;
- c. Members of Nomination, Remuneration and GCG Committee are not holding concurrent positions as administrators of political parties and/or legislative candidates/members and/or candidates for regional/deputy regional heads, and other positions in accordance with the provisions of laws and regulations that may cause conflicts of interest;
- d. Members of Nomination, Remuneration and GCG Committee do not have a business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business activities which may cause a conflict of interest;
- e. Members of Nomination, Remuneration and GCG Committee are not a key employee of the Company, namely a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Company's activities in the last year before being appointed by the Board of Commissioners;
- f. Members of Nomination, Remuneration and GCG Committee have no direct or indirect personal interest in the Company's material information;
- g. Members of Nomination, Remuneration and GCG Committee are not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services, non-audit services and or other consulting services to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk within the last one year prior to being appointed by the Board of Commissioners;

Term Of Office

1. The term of office of a member of Nomination, Remuneration and GCG Committee may not be longer than the Board of Commissioners term of office as regulated in the Company's Articles of Association.
2. The term of office of a member of Board of Commissioners who concurrently served as a member of Nomination, Remuneration & GCG Committee, is the same as the term of office of his/her appointment as a member of Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders and or Board of Directors Decree as applicable to the Articles of Association and Bylaws of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
3. The term of office for members of Nomination, Remuneration & GCG Committee who are not members of Board of Commissioners is 3 (three) years and can be extended in accordance with applicable legal provisions;
4. Members of Nomination, Remuneration & GCG Committee who are not members of Board of Commissioners may be reappointed based on the Board of Commissioners Decision;

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG harus mengetahui lingkup pekerjaan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Berkaitan Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iv. Kebijakan pengelolaan terhadap talenta internal Perseroan pada satu level di bawah Direksi.
 - b. Melakukan kegiatan terkait nominasi dan pengelolaan talenta internal serta melaporkannya kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku.
 - c. Dalam hal Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menganggap perlu menggunakan konsultan Nominasi independen untuk melakukan penelaahan kembali atas Nominasi yang telah ditentukan, maka Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG bertugas:
 - i. Memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan;
 - ii. Melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui unit human capital.
 - d. Menjalankan kebijakan umum terkait Nominasi yang meliputi:
 - i. Membuka kesempatan seluas-luasnya khususnya internal insan Perseroan yang telah memenuhi kriteria sebagai Direksi dan Dekom Perseroan untuk mendaftarkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Nominasi Direksi dan Dekom Perseroan;
 - ii. Mengumumkan penjangkaran dan pendaftaran diri harus dilakukan dalam kaidah GCG;
 - iii. Mendorong dan memberikan kesempatan lebih kepada wanita dalam mengikuti proses Nominasi;
 - iv. Setiap tahapan proses Nominasi internal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedur internal Perseroan, yang tidak melanggar Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Pokok Berkaitan Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi;
 - b. Melakukan kegiatan terkait remunerasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Dalam hal Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menganggap perlu menggunakan konsultan Remunerasi independen untuk melakukan penelaahan kembali atas Remunerasi yang telah ditentukan, maka Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG:
 - i. Memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan;
 - ii. Melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui *human capital*.

Nomination, Remuneration and GCG Committee Duties and Responsibilities

To carry out its responsibilities, the Nomination, Remuneration and GCG Committee must acknowledge their scope of work, which includes the followings:

1. Main Duties Related to Nominations
 - a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - i. Board of Directors and/or Board of Commissioners Membership Composition.
 - ii. Policies and criteria needed in the Nomination process.
 - iii. Performance evaluation policy for Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 - iv. Management policy for the Company's internal talents at one level below the Board of Directors.
 - b. Conducting nomination activities and reporting them to Shareholders in accordance with applicable laws and regulations.
 - c. In the event that the Nomination, Remuneration and GCG Committee deems it necessary to use an independent Nomination consultant to review the Nominations that have been determined, the Nomination, Remuneration and GCG Committee is tasked with:
 - i. Provide input regarding consultant criteria and competencies;
 - ii. Monitoring consultant work through the human capital unit.
 - d. Carry out general policies regarding Nominations which include:
 - i. Open opportunities as wide as possible, especially for internal Company personnel who have met the criteria for being Directors and Board of Commissioners of the Company to register or be nominated to become Nominees for Directors and Board of Commissioners of the Company;
 - ii. Announcing the selection process and selfregistration must be carried out in accordance with GCG principles;
 - iii. Encourage and provide more opportunities for women to participate in the Nomination process;
 - iv. Each stage of the internal nomination process must be carried out in accordance with the provisions of the Company's internal procedures, which do not violate the Articles of Association and statutory provisions.
2. Main Duties related to Remuneration
 - a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies and amount of Remuneration.
 - b. Performing remuneration activities and reporting to Shareholders in accordance with prevailing laws and regulations.
 - c. In the event that the Nomination, Remuneration and GCG Committee considers it necessary to use an independent Remuneration consultant to review the determined Remuneration, then the Nomination, Remuneration and GCG Committee:
 - i. Provide input regarding consultant criteria and competencies;
 - ii. Monitoring consultant work through human capital.

3. Tugas Pokok Berkaitan GCG

- a. Melakukan kajian, evaluasi dan rekomendasi kepada Dekom atas penerapan GCG di Perseroan.
- b. Melakukan kajian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan karakteristik bidang kegiatan Perseroan, antara lain yang mengatur tentang badan hukum Perseroan, badan hukum milik negara, pasar modal, jasa konstruksi, perjanjian dan tata kelola perusahaan;
- c. Memberikan pendapat dan/atau masukan yang objektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dekom berkaitan dengan praktik GCG;
- d. Melakukan kajian atas kesesuaian ketentuan-ketentuan dalam Standar Operasi Prosedur dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku dan relevan;
- e. Menyusun *self-assessment tool* dan melakukan *self assessment* terhadap kinerja Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG serta melaporkannya kepada Dekom;
- f. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG serta melaporkannya kepada Dekom secara periodik;
- g. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dekom yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, peraturan perusahaan, *code of corporate governance* Perseroan, kode etik perusahaan, *board manual* serta ketentuan-ketentuan lain dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG;
- h. Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil *assessment* yang dilakukan oleh konsultan eksternal;
- i. Melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Kerja Tahunan dari Divisi Hukum dan Divisi Teknologi Informasi;
- j. Memberikan masukan dan telaahan atas kegiatan monitoring dari Divisi Hukum dan Divisi Teknologi Informasi melalui Dekom.

4. Pelaksanaan Tugas Khusus

- a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG oleh Dekom dilakukan melalui perintah tertulis yang antara lain menerangkan:
 - i. Nama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang diberi tugas;
 - ii. Sifat dan lingkup pekerjaan;
 - iii. Tujuan dan sasaran pekerjaan;
 - iv. Waktu penugasan; dan
 - v. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.
- b. Tugas khusus dapat mencakup namun tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dari suatu hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG serta anggota Dekom.

3. Main Duties related to GCG

- a. Reviewing, evaluating and providing recommendations to the Board of Commissioners on GCG implementation in the Company.
- b. Reviewing the Company's compliance with prevailing laws and regulations relevant to the characteristics of Company's activities, including regulating the Company's legal entity, state-owned legal entity, capital market, construction services, agreements and corporate governance.
- c. Providing objective, professional and independent opinions and/or input on matters requiring attention, follow-up, or other matters that can support the Board of Commissioners in carrying out their duties in relation to GCG practices.
- d. Reviewing the suitability of the Standard Operating Procedure (SOP) against prevailing laws and regulations, and the code of conduct.
- e. Developing self-assessment tools and conducting a self-assessment on the Committee's performance and reporting to the Board of Commissioners.
- f. Documenting the Nomination, Remuneration and GCG Committee's duties results, and periodically reporting to the Board of Commissioners.
- g. Carry out special tasks and other tasks from Board of Commissioners that do not conflict with applicable and relevant laws and regulations, Company regulations, code of corporate governance of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Company code of conduct, Board Manual and other provisions in the Nomination, Remuneration and GCG Committee charter;
- h. Evaluating GCG and Ethical Standards policies and following up on the external consultant's assessment results
- i. Monitoring the implementation of activities in accordance with the Annual Work Plan of Legal Division and Information Technology Division;
- j. Provide input and review of monitoring activities from the Legal Division and Information Technology Division through the Board of Commissioners.

4. Implementation of Special Duties

- a. The BoC's assignment of special tasks to the Nomination, Remuneration and GCG Committee is carried out through a written order which, among other things, explains:
 - i. Name of Nomination, Remuneration and GCG Committee member being assigned;
 - ii. Nature and scope of work;
 - iii. Work goals and objectives;
 - iv. Time of assignment; And
 - v. Administrative matters related to the specific task in question.
- b. Special duties may include but are not limited to examining allegations of errors in Board of Directors meeting decisions or deviations in the implementation of Board of Directors meeting decisions in relation to their duties and responsibilities;
- c. The Nomination, Remuneration and GCG Committee must submit reports on the implementation of special duties with a maximum level of confidentiality limited to members of Nomination, Remuneration and GCG Committee and members of Board of Commissioners.

Tugas Pokok Berkaitan Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi;
2. Melakukan kegiatan terkait remunerasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku;
3. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan nominasi independen untuk melakukan penelaahan kembali atas nominasi yang telah ditentukan, maka tugas Komite adalah memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan serta melakukan pekerjaan konsultan melalui *Human Capital*.

Tugas Pokok Berkaitan GCG

1. Melakukan kajian, evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan GCG WIKA;
2. Melakukan kajian atas kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan karakteristik bidang kegiatan Perseroan, antara lain mengatur tentang badan hukum Perseroan, badan hukum milik negara, pasar modal, jasa konstruksi, perjanjian dan tata kelola perusahaan;
3. Memberikan pendapat dan/atau masukan yang objektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik GCG;
4. Melakukan kajian atas kesesuaian ketentuan-ketentuan dalam Standar Operasi Prosedur (SOP) dengan Peraturan Perundang-undangan dan kode etik yang berlaku dan relevan;
5. Menyusun *self assessment tools* dan melakukan *self assessment* terhadap kinerja Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
6. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan tugas Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara periodik;
7. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Komisaris yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, peraturan Perseroan, *code of corporate governance* PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, kode etik perusahaan, *Board Manual* serta ketentuan-ketentuan lain dalam piagam ini;
8. Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil *assessment* yang dilakukan oleh konsultan eksternal.

Main Remuneration Duties

1. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies and amount of Remuneration.
2. Performing remuneration activities and reporting to Shareholders in accordance with prevailing laws and regulations.
3. If the Committee considers the necessity to use an independent nomination consultant to review the preestablished nomination, the Committee's duty is to provide input on the criteria and competency of the consultants and to carry out the work of consultants through Human Capital.

Main GCG Duties

1. Reviewing, evaluating and providing recommendations to the Board of Commissioners on WIKA's GCG implementation.
2. Reviewing the Company's compliance with prevailing laws and regulations relevant to the characteristics of Company's activities, including regulating the Company's legal entity, state-owned legal entity, capital market, construction services, agreements and corporate governance.
3. Providing objective, professional and independent opinions and/or input on matters requiring attention, follow-up, or other matters that can support the Board of Commissioners in carrying out their duties in relation to GCG practices.
4. Reviewing the suitability of the Standard Operating Procedure (SOP) against prevailing laws and regulations, and the code of conduct.
5. Developing self-assessment tools and conducting a self-assessment on the Committee's performance and reporting to the Board of Commissioners.
6. Documenting the Committee's duties results, and periodically reporting to the Board of Commissioners.
7. Carry out special tasks and other tasks from Board of Commissioners that do not conflict with applicable and relevant laws and regulations, Company regulations, code of corporate governance of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Company code of conduct, Board Manual and other provisions in this charter;
8. Evaluating GCG and Ethical Standards policies and following up on the external consultant's assessment results

Wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG mempunyai wewenang antara lain:

1. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG bekerja secara kolektif, dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
2. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dekom, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
3. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG wajib bekerja sama dengan mitra kerja seperti Sekretariat Dekom, Komite lain di lingkungan Dekom, unit terkait di level manajemen antara lain Sekretaris Perusahaan, unit yang menangani human capital, hukum dan regulasi, pengendalian intern, GCG dan unit-unit operasional Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya;
4. Dalam hal diperlukan, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dapat mempekerjakan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dengan persetujuan tertulis Dekom dan atas biaya perusahaan;
5. Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dapat membentuk tim ad-hoc, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya;
6. Memperoleh masukan dari pihak eksternal/independen yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan peningkatan kemampuan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG apabila diperlukan atas biaya perusahaan;
7. Mengundang pihak manajemen Perseroan untuk hadir dalam rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG apabila diperlukan.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Dekom memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dengan jumlah dan komposisi sebagai berikut:

1. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG berada di bawah koordinasi Dekom dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dekom;
2. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dengan komposisi 1 (satu) orang merupakan anggota Dekom yang bertindak sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG serta (dua) orang anggota;
3. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, dapat berasal dari:
 - a. Anggota Dekom;
 - b. Pihak yang berasal dari luar Perseroan;
 - c. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
4. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang bukan merupakan anggota Dekom tidak boleh merangkap sebagai anggota Dekom, sekretaris/staf Dekom, anggota komite pada BUMN/perusahaan lain dan anggota komite lain di lingkungan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada periode yang sama.

Nomination, Remuneration and GCG Committee Authorities

Nomination, Remuneration and GCG Committee has the following authorities:

1. The Nomination, Remuneration and GCG Committee works collectively and is independent in carrying out its duties;
2. Based on a written assignment letter from the Board of Commissioners, the Nomination, Remuneration and GCG Committee can access records or information about employees, funds, assets and other resources belonging to the Company related to the implementation of their duties;
3. In carrying out its authority, the Nomination, Remuneration and GCG Committee is obliged to collaborate with work partners such as the Board of Commissioners Secretariat, other committees within the Board of Commissioners, related units at management level including the Corporate Secretary, units that handle human capital, laws and regulations, internal control, GCG and the Company's operational units related to their duties;
4. If necessary, the Nomination, Remuneration and GCG Committee may employ experts and/or consultants to assist the Nomination, Remuneration and GCG Committee with written approval from the Board of Commissioners and at the Company's expense;
5. If necessary, in carrying out its duties the Nomination, Remuneration and GCG Committee can form an ad-hoc team, with assignment criteria and periods adjusted to the needs and type of work;
6. Obtain input from professional external/independent parties in the context of carrying out duties and improving the abilities of members of Nomination, Remuneration and GCG Committee if necessary at the Company's expense;
7. Invite the Company's management to attend the Nomination, Remuneration and GCG Committee meetings if necessary.

Structure, Number, Composition and Basis of Appointment of Nomination, Remuneration and GCG Committee

BOC has the authority to appoint and dismiss members of Nomination, Remuneration and GCG Committee with the following number and composition:

1. The Nomination, Remuneration and GCG Committee is under the coordination of BOC and is structurally responsible to BOC;
2. Members of Nomination, Remuneration and GCG Committee consist of at least 3 (three) persons, with the composition of 1 (one) person being a member of Board of Commissioners who acts as Chairman of Nomination, Remuneration and GCG Committee and (two) members;
3. Members of Nomination, Remuneration and GCG Committee may come from:
 - a. Members of Board of Commissioners;
 - b. Parties from outside the Company;
 - c. Those who hold managerial positions under the Board of Directors in charge of Human Capital.
4. Members of Nomination, Remuneration and GCG Committee who are not members of Board of Commissioners may not concurrently serve as members of Board of Commissioners, secretaries/staff of Board of Commissioners, members of committees at other SOEs/ companies and members of other committees within PT Wijaya Karya (Persero) Tbk during the same period.

Di tahun 2024, keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG berdasarkan Keputusan Dekom Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 68/DK/WIKA/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Jabatan Anggota-Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Dengan demikian, komposisi Komite NRG per 01 Januari s.d 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Di tahun 2024, keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG berdasarkan Keputusan Dekom Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 68/DK/WIKA/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Jabatan Anggota-Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Dengan demikian, komposisi Komite NRG per 01 Januari s.d 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Periode 1 Januari – tgl/bln 2024
Period of January 1 – date/month 2024

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Harris Arthur Hedar	Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Chairman and Member of Nomination, Remuneration and GCG Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hukum Law	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the Term of Office as a Member of Board of Commissioners
Firdaus Ali	Wakil Ketua merangkap Anggota Komite NRG Vice Chairman and Member of NRG Committee	Komisaris Commissioner	Teknik Lingkungan Environmental Engineering	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the Term of Office as a Member of Board of Commissioners
Bastian	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Hukum Law	Periode Ke-1 1st Period

Berikut adalah susunan Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG yang berlaku hingga 31 Desember 2024:

The following is the structure of Nomination, Remuneration and GCG Committee that is valid until December 31, 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Harris Arthur Hedar	Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Chairman and Member of Nomination, Remuneration and GCG Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hukum Law	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the period as Board of Commissioners
Firdaus Ali	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Teknik Lingkungan Environmental Engineering	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the period as Board of Commissioners
Bastian	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Hukum Law	Periode Ke-1 1st Period



Harris Arthur Hedar

Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG
Nomination, Remuneration and GCG Committee
Chairman

Profil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Harris Arthur Hedar dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The Nomination, Remuneration and GCG Committee Chairman profile, Harris Arthur Hedar, can be found in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 68/DK/WIKA/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Jabatan Anggota-Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Legal Basis for Appointment

Decree of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 68/DK/WIKA's/2023 dated July 03, 2023 concerning the Dismissal and Transfer of Position of Members of Nomination, Remuneration and Good Corporate Governance (GCG) Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.



Firdaus Ali

Wakil Ketua merangkap Anggota Nominasi, Remunerasi dan GCG
Vice Chairman and Member of Nomination, Remuneration and GCG

Profil Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Firdaus Ali dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The Nomination, Remuneration and GCG Committee Member profile, Firdaus Ali, can be found in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 68/DK/WIKA/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Jabatan Anggota-Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Legal Basis for Appointment

Decree of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 68/DK/WIKA's/2023 dated July 03, 2023 concerning the Dismissal and Transfer of Position of Members of Nomination, Remuneration and Good Corporate Governance (GCG) Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.



Bastian

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG
Nomination, Remuneration and GCG Committee Member

Periode Jabatan: 12 September 2022 - sekarang, Periode Ke-1
Term of Office : September 12, 2022 – present, 1st Period

Kewarganegaraan

Indonesia

Nationality

Indonesia

Usia

52 Tahun per 31 Desember 2024

Age

52 Years old as of December 31, 2024

Domisili

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Domicile

South Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana Hukum Jurusan Hukum Internasional Universitas Trisakti (1995)
2. Diploma pascasarjana dalam Hukum Internasional dan Eropa, Universitas Liverpool, UK (1997)
3. Magister Pajak Internasional, University of Melbourne, Australia (2015)

Educational Background

1. Bachelor of Laws from the Department of International Law, Trisakti University (1995)
2. Graduate Diploma in International and European Law, University of Liverpool, UK (1997)
3. Master of International Tax, University of Melbourne, Australia (2015)

Sertifikasi

1. Winning Strategy : Leading Strategic Growth and Change, Perindo Training Center, tahun 2019
2. Tinjauan Manfaat dan Dampak Major Project di Bidang Sumber Daya Air serta Kesiapan Proyek Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas, tahun 2020
3. Mastering The Art of Leadership, Corporate Leadership Development Institute, tahun 2020
4. Implementasi PSAK 7 Series (71.72.73) di Masa Pandemi : Sharing Perusahaan Terdampak, Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAM) tahun 2021
5. Guide to CPP Certification & CPP Examination, Asia Anti Fraud, tahun 2021
6. Workshop Self Assessment Implementation GCG tahun 2022, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan-PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun 2022
7. Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di tahun 2022, Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAM) tahun 2022
8. Economic Outlook 2022 : Investment Opportunities in the Post Pandemic World, Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAM) tahun 2022
9. Managing for Development Result, ADB-Kementerian BUMN, tahun 2023
10. Certificate Risk Governance Professional (CRGP), tahun 2024

Certification

1. Winning Strategy: Leading Strategic Growth and Change, Perindo Training Center, 2019
2. Review of the Benefits and Impacts of Major Projects in the Field of Water Resources and the Readiness of National Priority Projects, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency, 2020
3. Mastering the Art of Leadership, Corporate Leadership Development Institute, 2020
4. Implementation of PSAK 7 Series (71.72.73) during the Pandemic: Sharing of Affected Companies, Indonesian Institute of Management Accountants (IAM) in 2021
5. Guide to CPP Certification & CPP Examination, Asia Anti Fraud, in 2021
6. GCG Self Assessment Workshop in 2022, Financial and Development Supervisory Agency-PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in 2022
7. Implementation of the Taxation Regulation Harmonization Law in 2022, Indonesian Institute of Management Accountants (IAM) in 2022
8. Economic Outlook 2022: Investment Opportunities in the Post-Pandemic World, Indonesian Institute of Management Accountants (IAM) in 2022
9. Managing for Development Results, Asian Development Bank (ADB) - Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), in 2023
10. Certificate in Risk Governance Professional (CRGP), in 2024

Pengalaman Kerja

1. Ketua Komite Risiko dan Audit PT Jasa Tirta Energi (2021 – 2023)
2. Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Tirta Energi (2021-2023)
3. Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko, Perum Jasa Tirta I (2015 - 2016)
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian BUMN (2016 - 2019)
5. Anggota Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2018 – 2019)
6. Anggota Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) (2017 – 2018)

Work Experience

1. Chairman of Risk and Audit Committee of PT Jasa Tirta Energi (2021 – 2023)
2. Member of Board of Commissioners of PT Jasa Tirta Energi (2021 – 2023)
3. Director of Finance, Resource Management and Risk Management, Perum Jasa Tirta I (2015 – 2016)
4. Head of Legal Bureau, Ministry of SOE (2016 – 2019)
5. Member of Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2018 – 2019)
6. Member of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) (2017 – 2018)

Jabatan Lainnya

Koordinator Hukum Korporasi 3, Asdep Bidang Hukum Korporasi, Kementerian BUMN, tahun 2024-sekarang

Concurrent Positions

Coordinator of Corporate Law 3, Deputy Assistant for Corporate Law, Ministry of State-Owned Enterprises, 2024-present

Dasar Hukum Pengangkatan

- Keputusan Dekom Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 78/DK/WIKA/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- Keputusan Dekom Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 68/DK/WIKA/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Jabatan Anggota-Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Legal Basis for Appointment

- Decree of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 78/DK/WIKA's/2022 dated September 12, 2022 concerning the Appointment of Members of Nomination, Remuneration and Good Corporate Governance (GCG) Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- Decree of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 68/DK/WIKA's/2023 dated July 03, 2023 concerning the Dismissal and Transfer of Positions of Members of Nomination, Remuneration and Good Corporate Governance (GCG) Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Pernyataan Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Seluruh Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Nomination, Remuneration and GCG Committee Independency Statement

All Nomination, Remuneration and GCG Committee members are independent parties with no financial, management, share ownership and/or familial relations with Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Company, which can affect their ability to act independently.

Aspek Independensi Independency Aspects	Harris Arthur Hedar	Firdaus Ali	Bastian
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the Company, its subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Dewan Komisaris Does not have familial relations with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Board of Commissioners Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan Pemerintah Does not serve as a political party, official and government management	✓	✓	✓

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Telah Diikuti dalam Tahun Buku

Untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dapat berjalan dengan baik, Perseroan memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kompetensi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG. Dalam hal ini, Perseroan memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung kelancaran operasional dan memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan Dewan Komisaris secara efektif. Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi yang relevan dengan perkembangan bisnis dan tata kelola Perseroan, sebagai berikut:

Training and/or Competency Development that Has Been Participated in the Fiscal Year

To ensure that the supervisory function carried out by the Board of Commissioners can run properly, the Company pays special attention to the competency development of Nomination, Remuneration and GCG Committee. In this matter, the Company facilitates the enhancement of knowledge and skills that can support smooth operations and strengthen the implementation of supervisory duties. This support aims to ensure that the Nomination, Remuneration and GCG Committee has the expertise needed to effectively support the activities of Board of Commissioners. Throughout 2024, Nomination, Remuneration and GCG Committee has participated in various competency improvement programs that are relevant to the development of the Company's business and governance, as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Harris Arthur Hedar (Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG) Chairman and Member of Nomination, Remuneration and GCG Committee	Seminar	Profesi Advokat : Tantangan dan Harapan dalam Menegakkan Access to Justice demi tercapainya Supremasi Hukum Advocacy Profession: Challenges and Hopes in Upholding Access to Justice to Achieve the Supremacy of Law	Jakarta, 13 September 2024 Jakarta, September 13, 2024	DPN Peradi dan Justitia Training Center DPN Peradi and Justitia Training Center
	Seminar	Capacity Building : Journal Review Process and Operating	Jakarta, 29-30 Oktober 2024 Jakarta, October 29-30, 2024	DPN Peradi dan Bank Indonesia DPN Peradi and Bank Indonesia
	Seminar	Tips dan Trik dalam Menangani dan Menyelesaikan Perkara Arbitrase Tips and Tricks in Handling and Resolving Arbitration Cases	Jakarta, 01 November 2024 Jakarta, November 01, 2024	DPN Peradi
	Seminar	Kiat-kiat dalam Membuat dan Memahami Kontrak yang benar (Practical Guideline on How to Make Agreement Correctly Practical Guideline on How to Make Agreement Correctly	Jakarta, 22 November 2024 Jakarta, November 22, 2024	DPN Peradi
Firdaus Ali (Wakil Ketua merangkap Anggota) Vice Chairman and Member	Seminar	Sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Socialization of Guidelines for the Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance	Jakarta, 22 Januari 2024 Jakarta, January 22, 2024	PT Wijaya Karya (Persero),tbk
Bastian (Anggota) Member	Sertifikasi	Certified Risk Governance Professional	Jakarta 17-18 Desember 2024 Jakarta, December 17-18, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan LSPMR PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and LSPMR
	Seminar	The Supreme Court's Opinion on Contract Language Requirement	Jakarta, 07 Maret 2024 Jakarta, March 07, 2024	HHP Indonesia
	Webinar	Basic Indonesia Modeling and Macro	Jakarta, 08 Mei 2024 Jakarta, May 08, 2024	RSM Indonesia
	Webinar	2025 Indonesian Economy and Taxation Outlook	Jakarta, 04 Desember 2024 Jakarta, December 04, 2024	RSM Indonesia
	Sertifikasi	Certified Risk Governance Professional	Jakarta 17-18 Desember 2024 Jakarta, December 17-18, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan LSPMR PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and LSPMR

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite NRG dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat tersebut

Kebijakan yang mengatur prosedur Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah sebagai berikut:

1. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan program kerja Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG;
2. Jika dipandang perlu, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
3. Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG diadakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite, atau melalui media daring;
4. Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG. Apabila Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota yang paling senior dalam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG. Apabila Ketua maupun anggota senior Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG berhalangan hadir, maka rapat batal untuk dilaksanakan;
5. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG;
6. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak minimum 2 (dua) hari sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang disepakati, atau melalui media daring;
7. Keputusan rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang menurut ketua rapat bersifat strategis baru berlaku efektif jika telah diputuskan oleh rapat Dewan Komisaris;
8. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Nominasi, Remunerasi dan GCG termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang hadir sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat;
9. Setiap anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun;
10. Setiap anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menyampaikan persetujuan atau keberatan dan/atau usul perbaikan atas Risalah Rapat dimaksud dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Risalah Rapat;
11. Setiap anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut;
12. Kehadiran anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG;
13. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dalam rapat serta laporan singkat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang memuat isu-isu penting yang dibicarakan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*);

Policy and Frequency of Nomination, Remuneration and GCG Committee Meetings and Attendance of Members of Nomination, Remuneration and GCG Committee at the Meeting

The policies regulating the Nomination, Remuneration and GCG Committee Meeting procedures are as follows:

1. Nomination, Remuneration and GCG Committee holds meetings at least once every 3 (three) months to discuss the Nomination, Remuneration and GCG Committee's Work Program;
2. If deemed necessary, Nomination, Remuneration and GCG Committee may invite other parties to the meetings with the knowledge of relevant Directors;
3. Nomination, Remuneration and GCG Committee meetings are held at the Company's domicile, another place determined by the Committee Chairman, or via online media;
4. Nomination, Remuneration and GCG Committee meetings are chaired by the Committee Chairman. If unable to attend, the meeting will be chaired by the most senior Nomination, Remuneration and GCG Committee member, and if the meeting cannot be attended by the Chairman and/or the senior member then the meeting will be void;
5. The call for meetings are sent by the Nomination, Remuneration and GCG Committee Chairman;
6. The call for meetings shall be made at least 7 (seven) days before, and in urgent cases a minimum of 2 (two) days prior to the date of the meeting, stating the day, date, time, place and meeting agenda to be discussed, and held at the Company's premises, or elsewhere in the Republic of Indonesia, as agreed upon, or via online media;
7. Nomination, Remuneration and GCG Committee meeting decisions that are deemed by the meeting Chairman to be strategic, will only become effective when they have been approved at a Board of Commissioners' meeting;
8. All matters discussed and decided upon at the Nomination, Remuneration and GCG Committee meeting, including dissenting opinions, are set forth in the Meeting Minutes that are signed by all Nomination, Remuneration and GCG Committee members present, as valid evidence of the decisions taken at the meeting;
9. Each Nomination, Remuneration and GCG Committee member are given the freedom to express their professional opinions during the discussions on each meeting agenda item, without being interrupted;
10. Each Nomination, Remuneration and GCG Committee member submits their approval or objection and/or proposal for improvements to the Meeting Minutes within a period of 3 (three) days from the date of sending the Meeting Minutes;
11. Each Nomination, Remuneration and GCG Committee member is entitled to receive a copy of the Meeting Minutes even if they are not present at the meeting;
12. The attendance of Nomination, Remuneration and GCG Committee members in meetings is reported in the Committee's quarterly reports and annual reports;
13. The number of meetings and the attendance of each Nomination, Remuneration and GCG Committee member in the meeting as well as the Nomination, Remuneration and GCG Committee's brief report containing important issues discussed by the Nomination, Remuneration and GCG Committee must be disclosed in the Annual Report;

14. Tata tertib Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG tertuang dalam aturan tersendiri.

14. The Nomination, Remuneration and GCG Committee Meeting rules are set forth in a separate regulation.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Sepanjang tahun 2024, rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Nomination, Remuneration and GCG Committee Meeting Frequency And Attendance

Throughout 2024, Nomination, Remuneration and GCG Committee held 8 (eight) meetings, with the agenda and level of attendance of each Committee member as follows:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	28 Februari 2024 February 28, 2024	Pembahasan Rencana Perubahan Nomenklatur Direksi dan Silaturahmi dengan Kandidat Pengurus PT WIKA Realty Discussion of the Plan to Change the Nomenclature of Board of Directors and Gathering with Candidates for the Management of PT WIKA Realty
2	05 Maret 2024 March 05, 2024	Pembahasan Nominated Talents (BOD dan BOD-1) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Discussion of Nominated Talents (BOD and BOD-1) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
3	24 April 2024 April 24, 2024	Pembahasan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2024 Discussion of the Proposal for Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners in 2024
4	25 April 2024 April 25, 2024	Pembahasan Permohonan Perubahan Pengurus Anak dari Manajemen Discussion of the Request for Changes to the Management of Subsidiaries
5	16 Mei 2024 May 16, 2024	Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi Discussion of Changes to the Organizational Structure
6	11 Juni 2024 June 11, 2024	Permohonan Persetujuan Penetapan Pengurus Anak Request for Approval of the Determination of Subsidiary Management
7	11 Oktober 2024 October 11, 2024	Permohonan Persetujuan Penetapan Pengurus Anak Request for Approval of the Determination of Subsidiary Management
8	20 November 2024 November 20, 2024	Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi Discussion of Changes to the Organizational Structure

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Nomination, Remuneration and GCG Committee Attendance		
		Harris Arthur Hedar	Firdaus Ali	Bastian
1	28 Februari 2024 February 28, 2024	v	v	v
2	05 Maret 2024 March 05, 2024	v	v	v
3	24 April 2024 April 24, 2024	v	v	v
4	25 April 2024 April 25, 2024	v	v	v
5	16 Mei 2024 May 16, 2024	v	v	v
6	11 Juni 2024 June 11, 2024	v	v	v
7	11 Oktober 2024 October 11, 2024	v	v	v
8	20 November 2024 November 20, 2024	v	v	v
Jumlah Rapat Number of Meetings		8	8	8
Jumlah Kehadiran Number of Attendance		8	8	8
% Kehadiran % of Attendance		100%	100%	100%

Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Nomination, Remuneration and GCG Committee Attendance Recapitulation at the Meetings

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Nomination, Remuneration and GCG Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Harris Arthur Hedar (Ketua merangkap Anggota Chairman and Member)	8	8	100%
Firdaus Ali (Anggota (Wakil Ketua merangkap Anggota Wakil Ketua merangkap Anggota)	8	8	100%
Bastian (Anggota Member)	8	8	100%

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Penetapan remunerasi bagi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Remuneration Policy for Nomination, Remuneration and GCG Committee

The determination of remuneration for the Nomination, Remuneration and GCG Committee refers to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises:

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi WIKA mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023. Adapun sumber bakal calon Direksi berasal dari:

- Direksi BUMN;
- Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- Talenta BUMN yang diusulkan melalui Dewan Komisaris, terdiri atas:
 - Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - Direksi anak perusahaan BUMN/Perusahaan patungan BUMN.
- Talenta Kementerian BUMN;
- Sumber lain yang terdiri dari:
 - Pejabat BUMN lain; dan
 - Sumber lainnya.

Board of Directors Succession Policy

WIKA's Board of Directors succession policy refers to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER3/MBU/03/2023. The candidates for Board of Directors might be originating from: The candidates for Board of Directors might be originating from:

- SOE Board of Directors;
- SOE Board of Commissioners/Supervisory Board;
- SOE talent Proposal by the Board of Commissioners, including:
 - Officials one level below Board of Directors or officials with outstanding achievements;
 - Directors of SOE subsidiaries/joint ventures.
- Ministry of SOE talent;
- Other sources consisting of:
 - Other SOE officials; and
 - Other Sources.

Bakal calon Direksi dapat diusulkan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat agar diusulkan kepada Menteri BUMN. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023.

Candidates for Board of Directors may be proposed by the Nomination, Remuneration and GCG Committee to the Board of Commissioners. Board of Commissioners will assess the persons concerned and will be proposed to the Minister of SOEs if they meet the requirements. Candidates eligible to become members of Board of Directors must comply with the formal and other requirements in Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG pada Tahun Buku Sesuai dengan yang Dicantumkan dalam Pedoman atau Piagam (Charter) Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG telah melaksanakan program dan Rencana Kerja yang dirumuskan di awal tahun. Pelaksanaan ini menjadi wujud tanggung jawab Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG dalam memperkuat peran Dewan Komisaris, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Adapun lingkup tugas yang menjadi perhatian meliputi:

Implementation of Nomination, Remuneration and GCG Committee Activities in the Fiscal Year According to the Nomination, Remuneration and GCG Committee Guidelines or Charter

Throughout 2024, the Nomination, Remuneration and GCG Committee has implemented the program and Work Plan formulated at the beginning of the year. This implementation is a form of responsibility of the Nomination, Remuneration and GCG Committee in strengthening the Board of Commissioners' role, especially in carrying out supervisory functions that support good corporate governance. The scope of duties that are of concern include:

- Pemberian masukan dan usulan kebijakan Nominasi Direksi dan Dekom, yaitu:
 - penentuan kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
- Providing Input and Proposal on Nomination Policy for Board of Directors and Board of Commissioners:
 - Determination of Policies and Criteria needed in the Nomination process;

- b. melakukan konfirmasi dan assessmen awal atas permintaan nominasi;
- c. penyampaian laporan kepada Pemegang Saham tentang Nominasi dan penilaian kinerja Direksi.
- 2. Pemberian masukan dan usulan kebijakan Remunerasi Direksi dan Dekom, yaitu:
 - a. memberikan telahaan dan persetujuan/rekomendasi atas usulan Remunerasi tahun berjalan;
 - b. menyampaikan pelaporan kepada Pemegang Saham tentang usulan Remunerasi Direksi dan Dekom, akan masuk pada agenda RUPS.
- 3. Tugas Pokok Berkaitan dengan GCG, yaitu:
 - a. melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dekom atas penerapan GCG;
 - b. melakukan kajian atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Lain-lain sebagai penunjang pelaksanaan tugas, yaitu:
 - a. Pengembangan kompetensi dan pengetahuan anggota Komite NRG;
 - b. Sertifikasi Kompetensi.

- b. Conduct initial confirmation and assessment of nomination requests.
- c. Submit reports to Shareholders regarding the Nomination and performance appraisal of Board of Directors.
- 2. Providing Input and Proposal on Remuneration Policy for Board of Directors and Board of Commissioners:
 - a. Provide review and approval/recommendation on the current year's Remuneration proposal;
 - b. Submitting reports to Shareholders regarding the proposed Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners, which will be included in the GMS agenda.
- 3. Main Duties Related to GCG:
 - a. Conduct studies and provide recommendations to Board of Commissioners on the implementation of GCG;
 - b. Conduct a review of the Company's compliance with applicable Laws and Regulations.
- 4. Other activities to support the implementation of duties:
 - a. Development of competency and knowledge of Nomination, Remuneration and GCG Committee members;
 - b. Competency Certification.

Penilaian atas Kinerja Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Kinerja Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG dinilai berdasarkan kerangka evaluasi yang diterapkan untuk organ pendukung Dewan Komisaris. Penilaian ini mencakup pengukuran kontribusi komite terhadap pencapaian tujuan Perseroan, pelaksanaan fungsi strategis, serta pemenuhan standar tata kelola yang telah ditetapkan. Informasi lebih lanjut terkait penilaian ini dijelaskan pada bagian "Penilaian atas Kinerja Organ Pendukung dan/atau Komite di Bawah Dewan Komisaris" dalam Laporan Tahunan ini.

Berikut evaluasi kinerja Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG yang didasarkan pada perbandingan antara rencana yang telah disusun dengan realisasi pelaksanaannya:

Nomination, Remuneration and GCG Committee Performance Appraisal

The performance of Nomination, Remuneration and GCG Committee is appraised based on the evaluation framework applied to the supporting organs of Board of Commissioners. This appraisal includes measurement of the committee's contribution to the achievement of the Company's objectives, implementation of strategic functions, and fulfillment of established governance standards. Further information regarding this appraisal is explained in the section "Performance Appraisal of Supporting Organs and/or Committees under the Board of Commissioners" in this Annual Report.

The following are evaluation of the Nomination, Remuneration and GCG Committee's performance based on the comparison between the plan prepared and the realization of their implementation:

No.	Kegiatan Activity	Rencana 2024 2024 Plan	Realisasi 2023 2023 Realization	Persentase realisasi Percentage of Realization	Keterangan Information
1	Pemberian Masukan dan Usulan Kebijakan Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris Providing input and proposals for nomination policies for Board of Directors and Board of Commissioners	1	1	100%	Permintaan tahunan Annual Request
2	Pemberian Masukan dan Usulan Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Providing input and proposals for remuneration policy for Board of Directors and Board of Commissioners	1	1	100%	Permintaan Tahunan Annual Request
3	Pelaksanaan Tugas Pokok Berkaitan dengan GCG Implementation of Main Duties Related to GCG	8	8	100%	Rapat berkala Regular meetings
4	Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Tugas Implementation of Supporting Activities	9	9	100%	Pelatihan dan pelaksanaan tugas lain Training and other tasks

Saran dan Masukan untuk Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Berikut adalah beberapa saran dan masukan yang telah dianalisis sebagai bagian dari evaluasi internal terkait pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2024:

1. Meningkatkan intensitas pertemuan dan diskusi dengan unit kerja/divisi yang menjadi mitra kerja Komite NRG, khususnya unit kerja/divisi yang baru menjadi mitra Komite NRG, yaitu Divisi Hukum dan Divisi Teknologi Informasi.
2. Kondisi perekonomian dan perusahaan yang tidak optimal, membutuhkan pengawasan dan penasehatan yang out of the box khususnya untuk bertahan pada kondisi penuh tekanan.
3. Kolaborasi dengan komite lain, termasuk dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi perlu diintensifkan, termasuk pembuatan kebijakan agar bisa secara langsung ikut serta melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko berfungsi sebagai salah satu elemen pengawasan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris WIKA. Tugas utama Komite Pemantau Risiko ini adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan pengawasan terhadap kinerja manajemen risiko yang diterapkan oleh Direksi. Dengan memberikan nasihat yang konstruktif, komite bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur dan metodologi pengelolaan risiko telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini penting agar risiko yang mungkin muncul dalam operasional Perseroan tetap dapat dikelola secara efektif, meminimalkan dampak negatif, dan menjaga agar kegiatan usaha tetap berjalan dalam koridor yang menguntungkan bagi Perseroan.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko Perseroan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6800);

Advice and Input for Nomination, Remuneration and GCG Committee

The following advice and input has been considered as an internal evaluation of the implementation of activities in 2024:

1. Increasing the frequency of meetings and discussions with work units/divisions that are partners of NRG Committee, especially the work units/divisions that have recently become partners of NRG Committee, such as Legal Division and Information Technology Division.
2. The suboptimal economic and company conditions require supervision and advisory that is out of the box, especially to survive under high pressure.
3. Collaboration with other committees, including the Integrated Governance Committee, needs to be intensified, including the creation of policies to directly participate in overseeing subsidiaries.

RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee functions as one of the supervisory elements established by WIKA's Board of Commissioners. The main duties of this Risk Monitoring Committee are to assist the Board of Commissioners in carrying out supervision of risk management performance implemented by the Board of Directors. By providing constructive advice, the committee aims to ensure that all risk management procedures and methodologies have met the established standards. This is important so that risks that may arise in the Company's operations can still be managed effectively, minimize negative impacts, and keep business activities running in a profitable corridor for the Company.

Risk Monitoring Committee Basis of Establishment

The establishment of the Company's Risk Monitoring Committee is guided by the following provisions:

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of 2003 Number 70, Supplement to State Gazette Number 4297) as amended by Law Number 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation becomes Law (State Gazette of 2023 Number 41 Supplement to State Gazette Number 6856);
2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of 2007 Number 106, Supplement to State Gazette Number 4756) as amended by Law Number 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes Law (State Gazette of 2023 Number 41, Supplement to State Gazette Number 6856);
3. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises (State Gazette of 2005 Number 117 Supplement to State Gazette Number 4556) as amended by Government Regulation Number 23 of 2022 on Amendments to Government Regulation Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises (State Gazette of 2022 Number 113 Supplement to State Gazette Number 6800);

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263);
6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor: 110 tanggal 22 Desember 1972 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 5 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015012.AH.01.02. Tahun 2022 ("Anggaran Dasar");
7. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 67/DK/WIKA/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki pedoman kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Tbk (Persero) dengan nomor 96/DK/WIKA/2023, yang diterbitkan pada tanggal 26 September 2023. Surat keputusan ini mengatur Piagam Komite Pemantau Risiko, yang mencakup berbagai ketentuan penting mengenai peran dan tanggung jawab komite dalam menjalankan pengawasan terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Piagam tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Pedoman Umum;
3. Bab III Organisasi, Masa Jabatan dan Syarat-syarat Keanggotaan;
4. Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab;
5. Bab V Honorarium dan Pembebanan Biaya/Anggaran;
6. Bab VI Rapat, Mekanisme Kerja dan Pelaporan;
7. Bab VII Penutup

Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

Kriteria anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan yang relevan, independensi, pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tata kelola Perusahaan, serta mampu mengkomunikasikan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku;
 - b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip dan proses Komite Pemantau Risiko secara umum, prinsip-prinsip fungsi pengawasan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan mengenai perseroan, BUMN dan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan;
 - d. Mampu mempelajari kegiatan Perusahaan secara cepat, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang memadai

Risk Monitoring Committee Work Guidelines/Charter

The Risk Monitoring Committee has a work guideline contained in the Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Tbk (Persero) with number 96/DK/WIKA's/2023, which was issued on September 26, 2023. This decision letter regulates the Risk Monitoring Committee Charter, which includes various important provisions regarding the roles and responsibilities of the committee in carrying out supervision of the risks faced by the Company. The charter contains the following matters:

1. Chapter I Introduction;
2. Chapter II General Guidelines;
3. Chapter III Organization, Term of Office and Membership Requirements;
4. Chapter IV Duties and Responsibilities;
5. Chapter V Honorarium and Fees/Budget;
6. Chapter VI Meetings, Work Mechanisms and Reporting;
7. Chapter VII Closing.

Criteria for Risk Monitoring Committee Members

The criteria for members of Risk Monitoring Committee are as follows:

1. Competency Requirements
 - a. Have integrity, dedication, ability, relevant education, independence, knowledge and experience to carry out the duties and functions of supervising the Company's governance, and be able to communicate in writing the results of the implementation of their duties and functions to the Board of Commissioners in accordance with applicable procedures;
 - b. Have sufficient knowledge to be able to understand the principles and processes of the Risk Monitoring Committee in general, the principles of the supervisory function and the Company's Articles of Association.
 - c. Have adequate knowledge of laws and regulations regarding companies, SOE and those related to Company operations;
 - d. Able to promptly learn the Company's activities, so as to obtain an adequate understanding of the Company's activities and

tentang kegiatan Perusahaan dan kaitannya dengan aspek manajemen risiko;

- e. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan santun serta menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah.
2. Persyaratan Independensi
 - a. Anggota Komite Pemantau Risiko yang kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;
 - b. Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan;
 - c. Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan;
 - d. Anggota Komite Risiko tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - e. Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan karyawan kunci WIKA, yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
 - f. Anggota Komite Risiko tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan;
3. Anggota Komite Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lainnya kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam waktu satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
2. Jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan atau Keputusan Dewan Direksi sebagaimana yang berlaku pada Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
3. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

their relation to risk management aspects;

- e. Able to collaborate and communicate well and politely, and provide sufficient time to carry out their duties well and add value.
2. Independence Requirements
 - a. Members of Risk Monitoring Committee who is a member of Board of Commissioners, do not have a blood family relationship up to the third degree, either straight line or sideways or a relationship arising from marriage with another member of Board of Commissioners or with a member of Board of Directors;
 - b. Members of Risk Monitoring Committee who is not a member of Board of Commissioners are prohibited from having blood or marital relations up to the third degree, either straight or sideways, with members of Board of Commissioners and members of Board of Directors of the Company;
 - c. Members of Risk Monitoring Committee who is not a member of Board of Commissioners are prohibited from having blood or marital relations up to the third degree, either straight or sideways, with members of Board of Commissioners and members of Board of Directors of the Company;
 - d. Risk Committee members do not have any business relationships, either directly or indirectly, related to the business activities of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk which could give rise to a conflict of interest;
 - e. Risk Monitoring Committee members who are not WIKA's key employees, namely an individual having the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in the last year before being appointed by the Board of Commissioners;
 - f. Risk Monitoring Committee members do not have direct or indirect personal interest in material information of the Company;
3. Risk Monitoring Committee members are not a person works in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, or other parties who provide audit services, nonaudit services and/or other consultancy services to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk within the last year before being appointed by the Board of Commissioners.

Term of Office

1. The term of office of members of Risk Monitoring Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
2. The terms of office of members of Board of Commissioners who also serve as members of Risk Monitoring Committee, is the same as the term of office of their appointment as members of Board of Commissioners as determined by the General Meeting of Shareholders and/or Decree of Board of Directors as applicable in the Articles of Association of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
3. The term of office of members of Risk Monitoring Committee who are not members of Board of Commissioners is 3 (three) years and can be extended once for a 2 (two) year term of office, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss them at any time;
4. Members of Risk Monitoring Committee who are not members of Board of Commissioners may be reappointed based on the Board of Commissioners' Decision.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas untuk mendukung Dewan sesuai dengan tanggung jawabnya. Adapun tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Dewan Komisaris, untuk mengawasi dan memastikan kecukupan kebijakan Manajemen Risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan;
2. Menganalisa dan mengevaluasi laporan Manajemen Risiko, laporan profil risiko Perseroan, maupun laporan lainnya terkait Manajemen Risiko setiap triwulan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
 - a. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi Manajemen Risiko Perseroan setiap triwulan, serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan Manajemen Risiko Perseroan.
3. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan fungsi kepatuhan (*compliance*) Perseroan dalam penerapan Manajemen Risiko setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan penerapan Manajemen Risiko Perseroan;
4. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas unit kerja yang membidangi keuangan dan Manajemen Risiko beserta jajarannya serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas unit kerja yang membidangi Keuangan dan Manajemen Risiko beserta jajarannya yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Pemantau Risiko

Di tahun 2024, Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang anggota yang salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite. Ketua Komite Audit juga menjabat anggota Dewan Komisaris pada tahun buku.

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Rusmanto	Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Member of Risk Monitoring Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pertahanan dan Keamanan NKRI Defense and Security of the Republic of Indonesia	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the Service Period as Member of Board of Commissioners
Satya Bhakti Parikesit *)	Wakil Ketua Komite merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko Vice Chairman and Member of Risk Monitoring Committee	Komisaris Commissioner	Hukum dan Manajemen Legal and Management	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris *) Following the Term of Office as a Member of Board of Commissioners *)

Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities

The Risk Monitoring Committee is tasked to support the Board of Commissioners in accordance with their responsibilities. The duties of Risk Monitoring Committee are as follows:

1. Conduct periodic evaluation in accordance with the provisions and procedures applicable within the Board of Commissioners, monitor and ensure the adequacy of Risk Management policies and provide opinions in the form of suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners to improve and enhance the Company's Risk Management framework and policies;
2. Analyze and evaluate Risk Management reports, Company risk profile reports, and other reports related to Risk Management every quarter and provide suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners for necessary improvements and enhancements;
 - a. Monitor and evaluate the adequacy of the Company's Risk Management identification, measurement, monitoring, control and information system processes every quarter, and provide suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners to improve the effectiveness and quality of the Company's Risk Management implementation.
3. Evaluate and analyze the implementation of the Company's compliance function in implementing Risk Management every semester and provide suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners to improve the implementation quality of the compliance function in the Company's Risk Management;
4. Supervise and evaluate duties implementation of work unit in charge of Finance and Risk Management and its staffs and provide suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners to improve the effectiveness of the work unit in charge of Finance and Risk Management and its staffs, which is carried out at least 1 (one) time in 1 (one) year; and
5. Carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners from time to time.

Structure, Number, Composition and Basis for Appointment of Risk Monitoring Committee

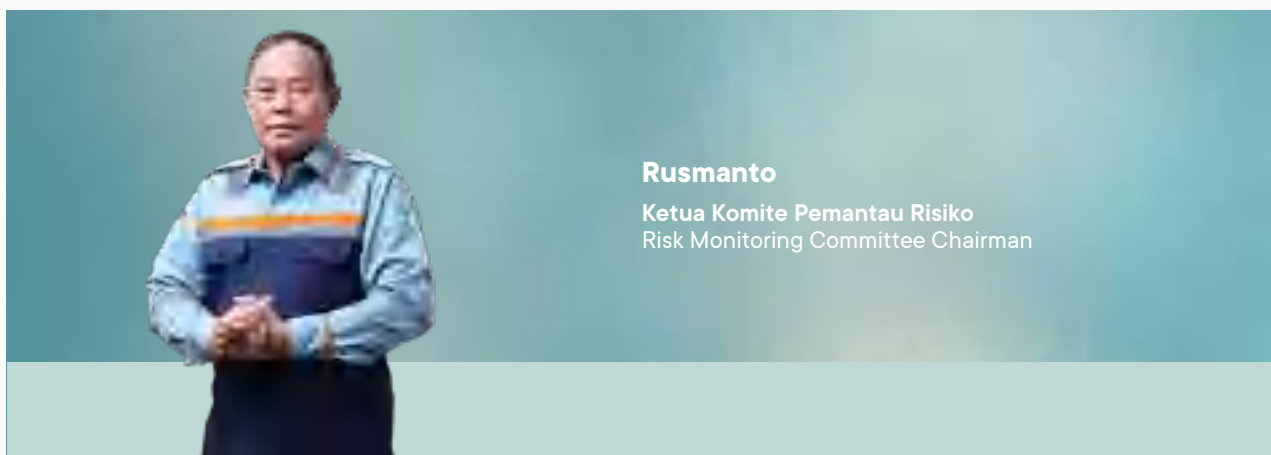
In 2024, Risk Monitoring Committee consisted of 3 (three) members, one of whom acted as the Committee Chairman. The Chairman of Audit Committee is also a member of Board of Commissioners in the fiscal year under review.

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Wilarjo	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Tenaga Ahli Bidang Akuntan, Keuangan dan Manajemen Risiko Expert in Accounting, Finance and Risk Management	Periode Ke-1 1st Period
Andar Sudiar Sukma	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Tenaga Ahli Bidang Hukum, Tata Kelola Perusahaan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Expert in Legal, Corporate Governance, Compliance and Risk Management	Periode Ke-1 1st Period

*) Selesai masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris efektif per 30 April 2024, sehingga otomatis selesai sebagai Wakil Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko.
*) Term of office as a member of Board of Commissioners ended on April 30, 2024, hence the term as Vice Chairman member of Risk Monitoring Committee automatically ended.

Profil Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring and Integrated Governance Committee Profile



Rusmanto

Ketua Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Chairman

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko, Rusmanto dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The profile of Risk Monitoring Committee Chairman, Rusmanto, can be seen in the profile section of Board of Commissioners in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Dasar Hukum Pengangkatan

Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor 67/DK/WIKA/2023 Tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Legal Basis for Appointment

Copy of Decree of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) No. 67/DK/WIKA's/2023 dated July 03, 2023 concerning the Formation and Appointment of Members of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.



Wilarjo

Anggota Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Member

Periode Jabatan: 03 Juli 2023 – Sekarang

Term of Office : July 03, 2023 - Present

Kewarganegaraan

Indonesia

Nationality

Indonesia

Usia

63 Tahun per 31 Desember 2024

Age

63 years old as of December 31, 2024

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Domicile

Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. Ajun Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta (1984)
2. Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta (1992)
3. Magister Management, STIE IPWI, Jakarta (1998)

Educational Background

1. Adjunct Accountant, State College of Accountancy (STAN), Jakarta (1984)
2. Accountant, State College of Accountancy (STAN), Jakarta (1992)
3. Master of Management, STIE IPWI, Jakarta (1998)

Sertifikasi

1. Chartered Accountant
2. Brevet AB
3. CPGRC
4. CCRM
5. CRGP

Certification

1. Chartered Accountant
2. Brevet AB
3. CPGRC
4. CCRM
5. CRGP

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan baik di Perseroan maupun lembaga lainnya.

Concurrent Position

Does not have concurrent positions either in the Company or other institutions.

Pengalaman Kerja

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 1984-2021
2. Komite Audit pada PT IPC Terminal Peti Kemas, 2022-Juni 2023

Work Experience

1. Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) 1984-2021
2. Audit Committee at PT IPC Terminal Petikemas, 2022-June 2023

Dasar Hukum Pengangkatan

Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor 67/DK/WIKA/2023 Tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Legal Basis for Appointment

Copy of Decree of Board of Commissioners of the Company (Persero) Number 67/DK/WIKA/2023 Dated July 03, 2023 concerning the Establishment and Appointment of Members of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of the Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.



Andar Sudiar Sukma

Anggota Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Member

Periode Jabatan: 03 Juli 2023 – Sekarang

Term of Office : July 03, 2023 – present

Kewarganegaraan	Nationality
Indonesia	Indonesia
Usia	Age
44 Tahun per 31 Desember 2024	44 years old as of December 31, 2024
Domisili	Domicile
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia	South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Educational Background
<ol style="list-style-type: none"> Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (2004) Magister Hukum, Universitas Indonesia (2022) 	<ol style="list-style-type: none"> Bachelor of Laws, University of Indonesia (2004) Master of Law, University of Indonesia (2022)
Sertifikasi	Certification
<ol style="list-style-type: none"> Certified Risk Governance Profesional (CRGP), LSPMR, 2024 Certified Corporate Risk Manager (CCRM), BPKP, 2024 Certified ISO 37001 Lead Auditor, PECB Certification Canada, 2021 Certified in Audit Committee Practice (CACP), Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), 2019 Certified Governance Professionals (CGP), LSP MKS, 2019 Certified Fraud Examiners (CFE) dari ACFE USA, 2012 	<ol style="list-style-type: none"> Certified Risk Governance Professional (CRGP), LSPMR, 2024 Certified Corporate Risk Manager (CCRM), BPKP, 2024 Certified ISO 37001 Lead Auditor, PECB Certification Canada, 2021 Certified in Audit Committee Practice (CACP), Indonesian Audit Committee Association (IKAI), 2019 Certified Governance Professionals (CGP), LSP MKS, 2019 Certified Fraud Examiners (CFE) from ACFE USA, 2012
Rangkap Jabatan	Concurrent Position
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di Perseroan maupun lembaga lainnya.	Does not hold concurrent positions at other Companies or institutions
Pengalaman Kerja	Work Experience
<ol style="list-style-type: none"> Associate Sofyan Djailil & Partners (SDP) (2004-2005) Executive Compliance PT Prudential Life Assurance (Prudential Life) (2005-2006) Internal Auditor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) (2006-2014) Manajer Hukum Perikatan Bisnis PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) (2014-2015) Legal Head PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) (2015-2016) Senior Consultant PT Sinergi Daya Prima (SDP) (2016-2018) Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan PT PLN Nusantara Power (2016-2023) Komite Nominasi & Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) (2018-2023) 	<ol style="list-style-type: none"> Associate at Sofyan Djailil & Partners (SDP) (2004-2005) Executive Compliance at PT Prudential Life Assurance (Prudential Life) (2005-2006) Internal Auditor at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) (2006-2014) Legal Manager for Business Engagements of PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) (2014-2015) Legal Head of PT Transportation Jakarta (Transjakarta) (2015-2016) Senior Consultant of PT Sinergi Daya Prima (SDP) (2016-2018) Audit Committee and Risk Management & Compliance Committee of PT PLN Nusantara Power (2016-2023) Nomination & Remuneration Committee, and Risk Monitoring Committee of PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) (2018-2023)
Dasar Hukum Pengangkatan	Legal Basis for Appointment
Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor 67/DK/WIKA/2023 Tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.	Copy of Decree of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) No. 67/DK/WIKA/2023 dated July 03, 2023 concerning the Formation and Appointment of Members of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Pernyataan Independensi Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring and Integrated Governance Committee Statement of Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Rusmanto	Wilarjo	Andar Sudiard Sukma
<p>Anggota Komite Pemantau Risiko yang kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi.</p> <p>Members of Risk Monitoring Committee who is a member of Board of Commissioners, do not have a blood family relationship up to the third degree, either in a straight line or a side line or a relationship arising from marriage with another member of Board of Commissioners or with Board of Directors.</p>	√	N/A	N/A
<p>Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan.</p> <p>Members of Risk Monitoring Committee who is not a member of Board of Commissioners are prohibited from having blood or marital relations up to the third degree, either straight or sideways, with members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.</p>	N/A	√	√
<p>Anggota Komite Risiko tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.</p> <p>Risk Committee members do not have any business relationships, either directly or indirectly, related to the business activities of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk which could give rise to a conflict of interest.</p>	√	√	√
<p>Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan karyawan kunci WIKA, yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Risk Monitoring Committee Members are not WIKA key employees, namely a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in the last year before being appointed by the Board of Commissioners</p>	√	√	√
<p>Anggota Komite Risiko tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan.</p> <p>Risk Committee members do not have direct or indirect personal interest in material information of the Company</p>	√	√	√
<p>Anggota Komite Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lainnya kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam waktu satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Risk Committee members are not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, or other parties who provide audit services, non-audit services and/or other consultancy services to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk within the last year before being appointed by the Board of Commissioners</p>	√	√	√

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Telah Diikuti dalam Tahun Buku

Untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dapat berjalan dengan baik, Perseroan memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kompetensi Komite Pemantau Risiko. Dalam hal ini, Perseroan memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung kelancaran operasional dan memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Komite Pemantau Risiko memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan Dewan Komisaris secara efektif. Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi yang relevan dengan perkembangan bisnis dan tata kelola Perseroan, sebagai berikut:

Training and/or Competency Improvement Attended in the Fiscal Year

To ensure that the supervisory function carried out by the Board of Commissioners can run well, the Company pays special attention to the competency development of Risk Monitoring Committee. In this regard, the Company facilitates the improvement of knowledge and skills that can support smooth operations and strengthen the implementation of supervisory duties. This support aims to ensure that the Risk Monitoring Committee has the expertise needed to effectively support the Board of Commissioners' activities. Throughout 2024, Risk Monitoring Committee has participated in various competency improvement programs that are relevant to the Company's business development and governance, as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer by
Rusmanto (Ketua Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee Chairman)	Seminar	Sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Socialization of Guidelines for the Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance	Jakarta, 22 Januari 2024 Jakarta, January 22, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Wilarjo (Anggota Member)	Pendidikan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Education	Manajemen Risiko Risk Management	Ciawi, 8 - 26 Juli 2024 Ciawi, July 8 - 26, 2024	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
	Pendidikan Sertifikasi Governansi dan Manajemen Risiko Governance and Risk Management Certification Education	Governansi dan Manajemen Risiko Governance and Risk Management	Jakarta, 17 - 18 Desember 2024 Jakarta, December 17 - 18, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/LSPMR
	Pelatihan Training	Analisis Penelitian Kuantitatif Menggunakan Stata dan Smart PLS. Quantitative Research Analysis Using Stata and Smart PLS.	Jakarta, 25 Mei 2024 Jakarta, May 25, 2024	IAI Wilayah Jakarta IAI Jakarta Region
	Pelatihan Training	Strategi pemasaran digital di era digital: Tattik dan langkah efektif mencetak profit optimal Digital marketing strategies in digital era: Effective tactics and steps to create optimal profits	Jakarta, 5 Juni 2024 Jakarta, June 5, 2024	OJK
Andar Sudiar Sukma (Anggota Member)	Pendidikan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Education	Manajemen Risiko Risk Management	Ciawi, 8 - 26 Juli 2024 Ciawi, July 8 - 26, 2024	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
	Pendidikan Sertifikasi Governansi dan Manajemen Risiko Governance and Risk Management Certification Education	Governansi dan Manajemen Risiko Governance and Risk Management	Jakarta, 17 - 18 Desember 2024 Jakarta, December 17 - 18, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/LSPMR

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Tersebut

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko

- Rapat Komite dilaksanakan paling 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan keperluan;
- Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite, atau melalui media daring (*online*);
- Pemanggilan rapat Komite harus dilakukan oleh Ketua Komite dan disampaikan kepada setiap anggota Komite melalui media elektronik tercepat paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat dalam hal keadaan mendesak;
- Pemanggilan rapat Komite sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya;
- Pemanggilan rapat Komite harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat atau alamat tautan dalam hal rapat diselenggarakan secara daring;
- Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota dari jumlah anggota Komite, termasuk seorang anggota Dewan Komisaris dan anggota dari pihak independen;
- Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite, dan dalam hal Ketua Komite tidak hadir atau berhalangan rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite;
- Rapat Komite dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat;
- Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari anggota komite yang hadir dalam rapat, dengan ketentuan setiap anggota komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara;
- Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite berwenang mengambil keputusan;
- Pimpinan rapat Komite harus memberikan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat Komite;
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan perbedaan pendapatnya;
- Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat
- Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud;
- Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen, memberikan persetujuannya secara tertulis;
- Risalah rapat Komite harus didokumentasikan dengan baik oleh Sekretariat Dewan Komisaris.

Policy and Frequency of Risk Monitoring Committee Meetings and Level of Attendance of Risk Monitoring Committee Members at The Meetings

Risk Monitoring Committee Meeting Policy

- Committee meetings are held at most 1 (one) time in 1 (one) month or can be held at any time as needed;
- Committee meetings are held at the Company's domicile, another place determined by the Committee Chairman, or via online media;
- Summons for Committee meetings must be made by the Committee Chariman and delivered to each Committee member via electronic media no later than 1 (one) day before the meeting is held, without taking into account the date of summons and the date of meeting, or within a shorter time in case of urgent circumstances. ;
- Summons for Committee meetings as referred to in number 3, are not required for meetings that have been scheduled based on the decisions of previously held meetings;
- Summons for Committee meetings must include the meeting agenda, date, time and place of the meeting or the link address if the meeting is held online;
- Committee meetings can only be held if attended by at least 51% (fifty one percent) of total Committee members, including a member of Board of Commissioners and members of independent parties;
- Committee meetings are chaired by the Committee Chairman, and in the event that the Committee Chairman is absent or unavailable, the meeting is chaired by the Committee Deputy Chairman;
- Committee meetings may invite the Board of Directors and/or Division Heads/Executive Officers of the Company to request explanations, presentations and information related to the meeting agenda;
- Committee meeting decisions are made based on deliberation and consensus. If consensus deliberation is not reached, then the decision is made based on the majority vote of committee members present at the meeting, provided that each committee member is only entitled to cast 1 (one) vote;
- If the same number of votes agree and disagree, then the chairman of Committee meeting has the authority to make a decision;
- The Chairman of Committee meeting must provide conclusions and decisions at the end of each Committee meeting;
- Dissenting opinions that occur at Committee meetings must be stated clearly in the minutes of meeting along with the reasons;
- Minutes of Committee meetings must be prepared by someone present at the meeting and appointed by the chairman of the meeting. The minutes of meeting must be signed by all Committee members present at the meeting
- The minutes of Committee meeting are valid evidence regarding the decisions taken at the meeting in question;
- The Committee can make valid decisions without holding a meeting, provided that at least 51% (fifty one percent) of total members, including an Independent Commissioner and an Independent Party, give written approval;
- Minutes of Committee meetings must be properly documented by the Secretariat of Board of Commissioners.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2024, rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Meeting Frequency and Attendance Level

Throughout 2024, Risk Monitoring Committee meetings were held 25 (twenty-five) times with the attendance level and meeting agenda as follows:

Triwulan I 1st Quarter

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	17 Januari 2024 January 17, 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Program Manajemen Risiko Korporat tahun 2023 2. Isu-isu Terkini Manajemen Risiko 3. Rencana Program Kerja Risk Management Division tahun 2024 <ol style="list-style-type: none"> 1. Realization of Corporate Risk Management Program in 2023 2. Current Issues in Risk Management 3. Risk Management Division Work Program Plan in 2024
2	02 Februari 2024 February 02, 2024	Pembahasan Laporan Hasil Assessment ICOFR Discussion of ICOFR Assessment Result Report
3	20 Februari 2024 February 20, 2024	Pembahasan Progress Penyelesaian MRA Discussion of MRA Completion Progress
4	08 Maret 2024 March 08, 2024	Pemenuhan Organ Pengelola Risiko pada Anak Perusahaan Fulfillment of Risk Management Organ in Subsidiaries
5	22 Maret 2024 March 22, 2024	Tindak Lanjut Pemenuhan Organ Pengelola Risiko Anak Perusahaan Follow-up on Fulfillment of Risk Management Organ in Subsidiaries

Triwulan I 2nd Quarter

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	17 April 2024 April 17, 2024	Pembahasan Rencana Perubahan Struktur Permodalan PT PSBI Discussion of PT PSBI Capital Structure Change Plan
2	23 April 2024 April 23, 2024	Diskusi Pelepasan Saham WIKA pada WIKA Beton Discussion of WIKA Share Release in WIKA Beton
3	30 April 2024 April 30, 2024	Pembahasan Risiko Hasil Pelaksanaan Check Point Proyek Discussion of Risks from Project Check Point Implementation Results
4	20 Mei 2024 May 20, 2024	Diskusi Tindak Lanjut Review dan Penguatan Pencegahan Benturan Kepentingan sesuai Surat Kementerian BUMN Discussion of Follow-up Review and Strengthening of Conflict of Interest Prevention according to the Letter of Ministry of SOEs
5	04 Juni 2024 June 04, 2024	Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham Seri A dalam RUPS Tahunan 2023 Discussion of Follow-up to Series A Shareholders' Directions in the 2023 Annual GMS
6	07 Juni 2024 June 07, 2024	Diskusi Rencana Aksi Korporasi pada WIKA Realty dan HIPRO Discussion of Corporate Action Plan in WIKA Realty and HIPRO
7	27 Juni 2024 June 27, 2024	Diskusi Profil Risiko Korporat Ter-Update Discussion of the Most Updated Corporate Risk Profile

Triwulan I 3rd Quarter

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	05 Juli 2024 July 05, 2024	Updating Rencana Aksi Korporasi DTE WIKA Realty/HIPRO Updating Corporate Action Plan DTE WIKA Realty/HIPRO
2	01 Agustus 2024 August 01, 2024	Pembahasan Risk Maturity Index PT WIKA (Persero) Tbk tahun 2023 Discussion of Risk Maturity Index of PT WIKA (Persero) Tbk in 2023
3	14 Agustus 2024 August 14, 2024	Rencana Perubahan Risk Capacity Perseroan dalam rangka Revisi RKAP dan Risiko Omset Kontrak Tidak Tercapai Planned Changes to the Company's Risk Capacity in the context of the Revision of RKAP and the Risk of Unachieved Contract Turnover
4	27 Agustus 2024 August 27, 2024	Interview RMI peran Dewan Komisaris dan Komite dalam Manajemen Risiko RMI Interview on the Role of Board of Commissioners and Committees in Risk Management

Triwulan I 3rd Quarter

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
5	03 September 2024 September 03, 2024	Pembahasan Hasil RMI tahun 2023 Discussion of RMI Results in 2023
6	06 September 2024 September 06, 2024	Pembahasan Top 3 Risk Corporate Discussion of Top 3 Corporate Risks
7	12 September 2024 September 12, 2024	Pembahasan Pencapaian Omset Kontrak sampai dengan Bulan Juni 2024 Discussion of Contract Turnover Achievement until June 2024

Triwulan I 4th Quarter

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	02 Oktober 2024 02 October 2024	Persiapan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Preparation of Integrated Governance Committee Meeting
2	29 Oktober 2024 October 29, 2024	Profil Risiko Korporat Triwulan III dan Profil Risiko Anak Perusahaan (Agregasi) Tindak Lanjut Rekomendasi RMI Isu Strategis Korporat 1. Corporate Risk Profile for Quarter III and Subsidiary Risk Profile (Aggregation) 2. Follow-up of RMI Recommendations 3. Corporate Strategic Issues
3	08 November 2024 November 08, 2024	Diskusi mengenai Manajemen Risiko sehubungan dengan Penyusunan RKAP 2025 Discussion on Risk Management in relation to the Preparation of RKAP 2025
4	15 November 2024 November 15, 2024	Diskusi 3 Risiko Utama tahun 2025, Risiko Cashflow tahun 2025 Diskusi Rencana Aksi Korporasi SHL WIKA Rekayasa Konstruksi 1. Discussion of 3 Main Risks for 2025, Cashflow Risk for 2025 2. Discussion of SHL WIKA Rekayasa Konstruksi Corporate Action Plan
5	06 Desember 2024 December 06, 2024	Diskusi Usulan Risk Appetite Statement (RAS) untuk tahun 2025 Discussion of Proposed Risk Appetite Statement (RAS) for 2025
6	20 Desember 2024 December 20, 2024	1. Profil Risiko Korporat Triwulan IV tahun 2024 2. Profil Risiko Korporat Triwulan I tahun 2025 3. Isu Strategis Korporat 1. Corporate Risk Profile for Quarter IV of 2024 2. Corporate Risk Profile for Quarter I of 2025 3. Corporate Strategic Issues

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Attendance			
		Rusmanto	Satya Bhakti Parikesit *)	Wilarjo	Andar Sudiar Sukma
1	17 Januari 2024 January 17, 2024	v	v	v	v
2	02 Februari 2024 February 02, 2024	v	v	v	v
3	20 Februari 2024 February 20, 2024	v	v	v	v
4	08 Maret 2024 March 08, 2024	v	v	v	v
5	22 Maret 2024 March 22, 2024	v	v	v	v
6	17 April 2024 April 17, 2024	v	v	v	v
7	23 April 2024 April 23, 2024	v	v	v	v
8	30 April 2024 April 30, 2024	v	N/A	v	v
9	20 Mei 2024 May 20, 2024	v	N/A	v	v

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Attendance			
		Rusmanto	Satya Bhakti Parikesit *)	Wilarjo	Andar Sudiar Sukma
10	04 Juni 2024 June 04, 2024	v	N/A	v	v
11	07 Juni 2024 June 07, 2024	v	N/A	v	v
12	27 Juni 2024 June 27, 2024	v	N/A	v	v
13	05 Juli 2024 July 05, 2024	v	N/A	v	v
14	01 Agustus 2024 August 01, 2024	v	N/A	v	v
15	14 Agustus 2024 August 14, 2024	v	N/A	v	v
16	27 Agustus 2024 August 27, 2024	v	N/A	v	v
17	03 September 2024 September 03, 2024	v	N/A	v	v
18	06 September 2024 September 06, 2024	v	N/A	v	v
19	12 September 2024 September 12, 2024	v	N/A	v	v
20	02 Oktober 2024 October 02, 2024	v	N/A	v	v
21	29 Oktober 2024 October 29, 2024	v	N/A	v	v
22	08 November 2024 November 08, 2024	v	N/A	v	v
23	15 November 2024 November 15, 2024	v	N/A	v	v
24	06 Desember 2024 December 06, 2024	v	N/A	v	v
25	20 Desember 2024 December 20, 2024	v	N/A	v	v
Jumlah Total		25	7	25	25
Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings		25	7	25	25
% Kehadiran Rapat % Meeting Attendance		100%	100%	100%	100%

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Recapitulation of Attendance of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Rusmanto (Ketua Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Chairman)	25	25	100%
Satya Bhakti Parikesit (Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko Vice Chairman of Risk Monitoring Committee *)	7	7	100%
Wilarjo (Anggota Member)	25	25	100%
Andar Sudiar Sukma (Anggota Member)	25	25	100%

*) Selesai masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris efektif per 30 April 2024, sehingga otomatis selesai sebagai Wakil Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko.

*) Term of office as a member of Board of Commissioners ended effectively on April 30, 2024, hence the term as Vice Chairman member of Risk Monitoring Committee automatically ended.

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Pemantau Risiko

Penetapan remunerasi bagi Komite Pemantau Risiko mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko pada Tahun Buku Sesuai dengan yang Dicantumkan dalam Pedoman atau Piagam (Charter) Komite Pemantau Risiko

Di tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah secara aktif menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawabnya, yang mencakup:

Risk Monitoring Committee Remuneration Policy

The determination of remuneration for Risk Monitoring Committee refers to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

Risk Monitoring Committee Activities in the Fiscal Year in accordance with those stated in the Risk Monitoring Committee Charter

In 2024, Risk Monitoring Committee has actively carried out its various duties and responsibilities, which include:

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and responsibilities	Rencana Kerja 2024 Work Plan	Realisasi 2024 Realization 2024
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Dewan Komisaris, untuk mengawasi dan memastikan kecukupan kebijakan Manajemen Risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan. <ol style="list-style-type: none"> a. Menganalisa dan mengevaluasi laporan Manajemen Risiko, laporan profil risiko Perseroan, maupun laporan lainnya terkait Manajemen Risiko setiap triwulan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan. b. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi Manajemen Risiko Perseroan setiap triwulan, serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan Manajemen Risiko Perseroan. 1. Periodic evaluation in accordance with the provisions and procedures applicable within the Board of Commissioners, monitor and ensure the adequacy of Risk Management policies and provide opinions in the form of suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners to improve and enhance the Company's Risk Management framework and policies <ol style="list-style-type: none"> a. Analyze and evaluate Risk Management reports, Corporate risk profile reports, and other reports related to Risk Management every quarter and provide suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners for necessary improvements and enhancements. b. Monitor and evaluate the adequacy of the Company's Risk Management identification, measurement, monitoring, control and information system processes every quarter, and provide suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners to improve the effectiveness and quality of the Company's Risk Management implementation. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi Risiko Proyek Pra-Lelang dan Check Point/CP (20,50,70) dan selesai 2. Pemantauan profil risiko dari aplikasi SIMR <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluate Pre-Auction Project Risk and Check Point/CP (20,50,70) and finish 2. Monitor risk profile from SIMR application 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan pemantauan Implementasi MR, termasuk profil risiko dari aplikasi SIMR, melalui CP (20, 50, 70 dan selesai) sebanyak 67 (168% dari target) proyek berjalan pada tahun 2024 dari target 40 proyek/calon proyek. 2. Melakukan pemantauan profil risiko korporat terupdate sampai dengan bulan Desember 2024 sesuai laporan Profil Risiko Korporat tahun 2024. <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan profil risiko signifikan melalui rapat (rincian dibawah) : <ul style="list-style-type: none"> • Melalui Check Point Proyek: <ol style="list-style-type: none"> a. Lini 1 : Divisi/Unit Kerja. b. Lini 2 : Risk Management Division (RMD). c. Melalui rapat Komite Audit dengan Internal Audit d. Lini 3 : Internal Audit 2. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas usulan Top Risiko Korporat sampai dengan bulan Desember 2024, sesuai laporan yang disampaikan oleh Direktur MR & Legal secara berkala melalui rapat. <ol style="list-style-type: none"> 1. The monitoring of MR Implementation has been carried out, including the risk profile of SIMR application, through CP (20, 50, 70 and completed) of 67 (168% of the target) ongoing projects in 2024 from the target of 40 projects/prospective projects. 2. Monitoring the updated corporate risk profile until December 2024 according to the 2024 Corporate Risk Profile report. <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan profil risiko signifikan melalui rapat (rincian dibawah) : <ul style="list-style-type: none"> • Melalui Check Point Proyek: <ol style="list-style-type: none"> a. Lini 1 : Divisi/Unit Kerja. b. Lini 2 : Risk Management Division (RMD). c. Melalui rapat Komite Audit dengan Internal Audit d. Lini 3 : Internal Audit 2. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas usulan Top Risiko Korporat sampai dengan bulan Desember 2024, sesuai laporan yang disampaikan oleh Direktur

Tugas dan Tanggung Jawab
Duties and responsibilities

Rencana Kerja 2024
Work Plan

Realisasi 2024
Realization 2024

<p>2. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan fungsi kepatuhan (compliance) Perseroan dalam penerapan Manajemen Risiko setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan penerapan Manajemen Risiko Perseroan.</p> <p>2. Evaluate and analyze the implementation of the Company's compliance function in Risk Management every semester and provide suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners to improve the quality of the compliance function implementation in the Company's Risk Management.</p>	<p>Evaluasi kepatuhan dan penerapan three line model Evaluation of compliance and implementation of the three line model</p>	<p>1. Dilakukan penelaahan atas kepatuhan peraturan dan Manajemen Risiko untuk rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029.</p> <p>2. Melakukan penelaahan atas usulan aksi korporasi yang masuk ke Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A/RUPS sepanjang tahun 2024</p> <p>3. Bersama Komite Audit, memastikan bahwa 3rd liner mengawasi proyek yang terlambat.</p> <p>1. Conducted a review of regulatory compliance and Risk Management for the draft of the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2025-2029.</p> <p>2. Conducted a review of corporate action proposals submitted to the Board of Commissioners and/or Series A Shareholders/GMS throughout 2024</p> <p>3. Together with the Audit Committee, ensured that the 3rd liner monitored late projects</p>
<p>3. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas unit kerja yang membidangi keuangan dan Manajemen Risiko beserta jajarannya serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas unit kerja yang membidangi Keuangan dan Manajemen Risiko beserta jajarannya yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Supervise and evaluate the implementation of duties of work unit in charge of Finance and Risk Management and its staffs and provide suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners to improve the effectiveness of the work unit in charge of Finance and Risk Management and its staffs, which is carried out at least 1 (one) time in 1 (one) year.</p>	<p>Rapat dengan Divisi Manajemen Risiko pada tahun 2024 Meeting with Risk Management Division in 2024</p>	<p>Telah melakukan telaahan mengenai 3 risiko utama korporat bersama SM Manajemen Risiko Strategic melalui zoom meeting untuk memenuhi permintaan Deputi Manajemen Risiko & Keuangan Kementerian BUMN sampai dengan bulan Desember 2024 bersama Risk Management Division.</p> <p>Has conducted a review of 3 major corporate risks with SM Strategic Risk Management through a zoom meeting to fulfill the request of the Deputy for Risk Management & Finance of the Ministry of SOEs until December 2024 with Risk Management Division.</p>
<p>4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.</p> <p>4. Carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners from time to time.</p>	<p>Sesuai disposisi Dewan Komisaris In accordance with the disposition of the Board of Commissioners</p>	<p>1. Mendampingi Dewan Komisaris dalam kunjungan awal tahun 2024 ke Proyek SPAM Jatiluhur tanggal 02 Januari 2024.</p> <p>2. Menghadiri dan menjadi Narasumber dalam Sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata kelola Terintegrasi PT WIKA Group tanggal 22 Januari 2024</p> <p>3. Melakukan Analisa Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Permodalan pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sesuai Memorandum KPR Nomor: DK.01.01/A.KOMITE.00014/2024 tanggal 17 April 2024</p> <p>4. Melakukan Analisa Permohonan Pelepasan Sebagian Saham PT Wijaya Karya Beton Tbk/ WIKA Beton sesuai Memorandum KPR Nomor: DK.01.01/A.KOMITE.00017/2024 tanggal 23 April 2024.</p> <p>5. Telaahan bersama Komite Audit tentang rencana DTA dan Share Swap Saham WIKA Realty dan HIPRO yang disampaikan dalam Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 10 Juni 2024</p> <p>6. Melakukan telaahan atas atas Permohonan Direksi untuk Persetujuan Aksi Korporasi Peningkatan Ekosistem Pariwisata dan Perhotelan dengan Memo KPR Nomor: DK.01.01/A.KOMITE.00036/20254 tanggal 16 Agustus 2024.</p> <p>7. Melakukan kajian atas pencapaian kontrak baru Perseroan sebagaimana tertuang dalam Memorandum KPR Nomor: DK.01.01/A.KOMITE.00044/2024 tanggal 20 September 2024 mengenai Kajian atas Perolehan Kontrak Baru PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sampai dengan bulan Juni 2024.</p> <p>8. Penelaahan Draft RKAP tahun 2025 terutama bagian Manajemen Risiko</p> <p>9. Mengikuti Patrol QHSE Dewan Komisaris ke Proyek Japek II dan RFD Rorotan pada tanggal 22 November 2024</p> <p>10. Telaahan atas Permohonan Direksi Terkait Rencana Tindakan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam Penyelesaian Kewajiban PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (WRK) yang Bersumber dari Penggunaan Fasilitas Non Cash Loan Perseroan di Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2024.</p> <p>11. Telaahan atas Permohonan Direksi Terkait Rencana Tindakan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam Penyelesaian Kewajiban PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (WIKAIKON) yang Bersumber dari Penggunaan Fasilitas Non Cash Loan Perseroan di Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri sesuai Memo KPR tanggal 31 Desember 2024.</p>

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and responsibilities	Rencana Kerja 2024 Work Plan	Realisasi 2024 Realization 2024
5. Pendidikan dan Pelatihan 5. Education and Training	1 kali dalam 1 tahun sesuai ketentuan 1 time in 1 year according to the provisions	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accompanying the Board of Commissioners on a visit in early 2024 to SPAM Jatiluhur Project on January 2, 2024. 2. Attending and becoming a speaker in the Socialization of Guidelines for the Management of Subsidiaries and Integrated Governance of PT WIKA Group on January 22, 2024 3. Analyze the Request for Approval of Changes to the Capital Structure at PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) in accordance with KPR Memorandum Number: DK.01.01 / A.KOMITE.00014/2024 dated April 17, 2024 4. Conduct an Analysis of the Request for Partial Release of Shares of PT Wijaya Karya Beton Tbk / WIKA Beton in accordance with KPR Memorandum Number: DK.01.01 / A.KOMITE.00017/2024 dated April 23, 2024. 5. Joint review with the Audit Committee of DTA and Share Swap plans for WIKA Realty and HIPRO shares as presented at the Internal Meeting of Board of Commissioners on June 10, 2024. 6. Review the Board of Directors' Request for Approval of the Corporate Action to Improve the Tourism and Hospitality Ecosystem with Memorandum KPR Number: DK.01.01 / A.KOMITE.00036 / 20254 dated August 16, 2024. 7. Conduct a review of the Company's new contract achievements as stated in Memorandum KPR Number: DK.01.01 / A.KOMITE.00044 / 2024 dated September 20, 2024 regarding the Review of New Contract Acquisition of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk up to June 2024. 8. Review of the 2025 Budget Plan Draft, especially the Risk Management section 9. Participate in the QHSE Patrol of Board of Commissioners to Japek II Project and RFD Rorotan on November 22, 2024 10. Review of Board of Directors' Request Regarding the Action Plan of Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in Settling Liabilities of PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (WRK) that Originated from the Use of the Company's Non-Cash Loan Facility at Bank Mandiri on December 11, 2024. 11. Examination of a request from Board of Directors regarding the action plan of Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in the settlement of obligations of PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (WIKAIKON) arising from the use of the company's non-cash loan facilities at Bank BRI, Bank BNI and Bank Mandiri according to the KPR memo dated December 31, 2024. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua KPR telah mengikuti Seminar Sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata kelola Terintegrasi PT WIKA Group tanggal 22 Januari 2024 2. Anggota KPR mengikuti 2 Sertifikasi Manajemen Risiko yaitu Certified Corporate Risk Manager (CCRM) dari BPKP dengan hasil kompeten dan Certified Risk Governance Professional (CRGP) dari LSPMR. <ol style="list-style-type: none"> 1. The Chairman of KPR has attended the Seminar on the Socialization of Guidelines for the Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance of PT WIKA Group on January 22, 2024 2. KPR members took part in 2 Risk Management Certifications, namely Certified Corporate Risk Manager (CCRM) from BPKP with competent results and Certified Risk Governance Professional (CRGP) from LSPMR.

Penilaian atas Kinerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Pemantau Risiko, Perusahaan menggunakan pendekatan yang diuraikan pada bagian "Penilaian atas Kinerja Organ Pendukung dan/atau Komite di Bawah Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Evaluasi terhadap efektivitas anggota Komite Pemantau Risiko, baik secara individu maupun kolektif, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan evaluasi yang mencakup beberapa indikator utama, antara lain:

1. Penilaian tingkat kehadiran pada rapat Komite Pemantau Risiko.
2. Penilaian kontribusi dalam penyampaian usulan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris dalam rapat Komite Pemantau Risiko.
3. Penilaian kualitas usulan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris.

Penilaian terhadap kinerja anggota Komite Pemantau Risiko telah dilakukan dengan mengacu pada beberapa kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh tingkat kehadiran setiap anggota mencapai 100%. Selain itu, kontribusi dalam penyampaian usulan pemberian nasihat dinilai dengan kategori "Baik," begitu pula dengan kualitas dari usulan yang diberikan, yang juga mendapatkan penilaian "Baik."

Sebagai bagian dari peranannya, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang mendukung tugas Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Berikut adalah ringkasan kegiatan yang telah dilaksanakan beserta hasil kinerja yang dicapai oleh Komite Pemantau Risiko:

Assessment of Risk Monitoring Committee Performance

In evaluating the performance of Risk Monitoring Committee, the Company uses the approach described in the section "Performance Assessment of Supporting Organs and/or Committees under the Board of Commissioners" contained in this Annual Report.

Evaluation of the effectiveness of members of Risk Monitoring Committee, both individually and collectively, is carried out by using an evaluation approach that includes several main indicators, among others:

1. Assessment of attendance rate at Risk Monitoring Committee meetings.
2. Assessment of contribution in submitting advisory proposals to the Board of Commissioners at Risk Monitoring Committee meetings.
3. Assessment of the quality of proposals for providing advice to the Board of Commissioners.

Performance assessment of members of Risk Monitoring Committee has been conducted with reference to several predetermined criteria. Based on the evaluation results, the attendance rate of each member reached 100%. In addition, the contribution in the submission of advisory proposals was rated "Good," as well as the quality of the proposals provided, which was also rated "Good."

As part of its role, Risk Monitoring Committee has carried out a number of activities that support the Board of Commissioners' duties in supervising and advising the Board of Directors. The following is a summary of the activities carried out and the performance results achieved by the Risk Monitoring Committee:

Tugas dan Tanggung Jawab
Duties and responsibilities

Rencana Kerja 2024
Rencana Kerja 2024

Realisasi 2024
Realisasi 2024

1. Mengevaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Dewan Komisaris, untuk mengawasi dan memastikan kecukupan kebijakan Manajemen Risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan.
 - a. Menganalisa dan mengevaluasi laporan Manajemen Risiko, laporan profil risiko Perseroan, maupun laporan lainnya terkait Manajemen Risiko setiap triwulan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.
 - b. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi Manajemen Risiko Perseroan setiap triwulan, serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan Manajemen Risiko Perseroan.
1. Periodic evaluation in accordance with the provisions and procedures applicable within the Board of Commissioners, monitor and ensure the adequacy of Risk Management policies and provide opinions in the form of suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners to improve and enhance the Company's Risk Management framework and policies
 - a. Analyze and evaluate Risk Management reports, Corporate risk profile reports, and other reports related to Risk Management every quarter and provide suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners for necessary improvements and enhancements.
 - b. Monitor and evaluate the adequacy of the Company's Risk Management identification, measurement, monitoring, control and information system processes every quarter, and provide suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners to improve the effectiveness and quality of the Company's Risk Management implementation.

1. Mengevaluasi Risiko Proyek Pra-Lelang dan Check Point/CP (20,50,70) dan selesai
2. Pemantauan profil risiko dari aplikasi SIMR
 1. Evaluate Pre-Auction Project Risk and Check Point/CP (20,50,70) and finish
 2. Monitor risk profile from SIMR application

Evaluasi kepatuhan dan penerapan three line model
Evaluation of compliance and implementation of the three line model

2. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan fungsi kepatuhan (compliance) Perseroan dalam penerapan Manajemen Risiko setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan penerapan Manajemen Risiko Perseroan.
2. Evaluate and analyze the implementation of the Company's compliance function in Risk Management every semester and provide suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners to improve the quality of the compliance function implementation in the Company's Risk Management.

1. Telah dilakukan pemantauan Implementasi MR, termasuk profil risiko dari aplikasi SIMR, melalui CP (20, 50, 70 dan selesai) sebanyak 67 (168% dari target) proyek berjalan pada tahun 2024 dari target 40 proyek/calon proyek.
2. Melakukan pemantauan profil risiko korporat terupdate sampai dengan bulan Desember 2024 sesuai laporan Profil Risiko Korporat tahun 2024.
 1. Melakukan pengawasan profil risiko signifikan melalui rapat (rincian dibawah) :
 - Melalui Check Point Proyek:
 - a. Lini 1 : Divisi/Unit Kerja.
 - b. Lini 2 : Risk Management Division (RMD).
 - c. Melalui rapat Komite Audit dengan Internal Audit
 - d. Lini 3 : Internal Audit
 2. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas usulan Top Risiko Korporat sampai dengan bulan Desember 2024, sesuai laporan yang disampaikan oleh Direktur MR & Legal secara berkala melalui rapat.
 1. The monitoring of MR Implementation has been carried out, including the risk profile of SIMR application, through CP (20, 50, 70 and completed) of 67 (168% of the target) ongoing projects in 2024 from the target of 40 projects/prospective projects.
 2. Monitoring the updated corporate risk profile until December 2024 according to the 2024 Corporate Risk Profile report.
 1. Conducting significant risk profile monitoring through meetings (details below):
 - Through Project Check Points:
 - a. Line 1: Division/Work Unit.
 - b. Line 2: Risk Management Division (RMD).
 - c. Through Audit Committee meetings with Internal Audit
 - d. Line 3: Internal Audit
 2. Conducting monitoring and review of Top Corporate Risk proposals until December 2024, according to reports submitted by the Director of RM & Legal periodically through meetings.

1. Dilakukan penelaahan atas kepatuhan peraturan dan Manajemen Risiko untuk rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029.
2. Melakukan penelaahan atas usulan aksi korporasi yang masuk ke Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A/RUPS sepanjang tahun 2024
3. Bersama Komite Audit, memastikan bahwa 3rd liner mengawasi proyek yang terlambat.
 1. Conducted a review of regulatory compliance and Risk Management for the draft of the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2025-2029.
 2. Conducted a review of corporate action proposals submitted to the Board of Commissioners and/or Series A Shareholders/GMS throughout 2024
 3. Together with the Audit Committee, ensured that the 3rd liner monitored late projects.

Tugas dan Tanggung Jawab
Duties and responsibilities

Rencana Kerja 2024
Rencana Kerja 2024

Realisasi 2024
Realisasi 2024

<p>3. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas unit kerja yang membidangi keuangan dan Manajemen Risiko beserta jajarannya serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas unit kerja yang membidangi Keuangan dan Manajemen Risiko beserta jajarannya yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Supervise and evaluate the implementation of duties of work unit in charge of Finance and Risk Management and its staffs and provide suggestions and/or recommendations to the Board of Commissioners to improve the effectiveness of the work unit in charge of Finance and Risk Management and its staffs, which is carried out at least 1 (one) time in 1 (one) year.</p>	<p>Rapat dengan Divisi Manajemen Risiko pada tahun 2024 Meeting with Risk Management Division in 2024</p>	<p>Telah melakukan telaahan mengenai 3 risiko utama korporat bersama SM Manajemen Risiko Strategic melalui zoom meeting untuk memenuhi permintaan Deputy Manajemen Risiko & Keuangan Kementerian BUMN sampai dengan bulan Desember 2024 bersama Risk Management Division.</p> <p>Has conducted a review of 3 major corporate risks with SM Strategic Risk Management through a zoom meeting to fulfill the request of the Deputy for Risk Management & Finance of the Ministry of SOEs until December 2024 with Risk Management Division.</p>
<p>4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.</p> <p>4. Carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners from time to time.</p>	<p>Sesuai disposisi Dewan Komisaris In accordance with the disposition of the Board of Commissioners</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mendampingi Dewan Komisaris dalam kunjungan awal tahun 2024 ke Proyek SPAM Jatiluhur tanggal 02 Januari 2024. Menghadiri dan menjadi Narasumber dalam Sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata kelola Terintegrasi PT WIKA Group tanggal 22 Januari 2024 Melakukan Analisa Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Permodalan pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sesuai Memorandum KPR Nomor: DK.01.01/A.KOMITE.00014/2024 tanggal 17 April 2024 Melakukan Analisa Permohonan Pelepasan Sebagian Saham PT Wijaya Karya Beton Tbk/ WIKA Beton sesuai Memorandum KPR Nomor: DK.01.01/A.KOMITE.00017/2024 tanggal 23 April 2024. Telaahan bersama Komite Audit tentang rencana DTA dan Share Swap Saham WIKA Realty dan HIPRO yang disampaikan dalam Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 10 Juni 2024 Melakukan telaahan atas atas Permohonan Direksi untuk Persetujuan Aksi Korporasi Peningkatan Ekosistem Pariwisata dan Perhotelan dengan Memo KPR Nomor: DK.01.01/A.KOMITE.00036/20254 tanggal 16 Agustus 2024. Melakukan kajian atas pencapaian kontrak baru Perseroan sebagaimana tertuang dalam Memorandum KPR Nomor: DK.01.01/A.KOMITE.00044/2024 tanggal 20 September 2024 mengenai Kajian atas Perolehan Kontrak Baru PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sampai dengan bulan Juni 2024. Penelaahan Draft RKAP tahun 2025 terutama bagian Manajemen Risiko Mengikuti Patrol QHSE Dewan Komisaris ke Proyek Japek II dan RFD Rorotan pada tanggal 22 November 2024 Telaahan atas Permohonan Direksi Terkait Rencana Tindakan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam Penyelesaian Kewajiban PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (WRK) yang Bersumber dari Penggunaan Fasilitas Non Cash Loan Perseroan di Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2024. Telaahan atas Permohonan Direksi Terkait Rencana Tindakan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam Penyelesaian Kewajiban PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (WIKAIKON) yang Bersumber dari Penggunaan Fasilitas Non Cash Loan Perseroan di Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri sesuai Memo KPR tanggal 31 Desember 2024.

Tugas dan Tanggung Jawab
Duties and responsibilities

Rencana Kerja 2024
Rencana Kerja 2024

Realisasi 2024
Realisasi 2024

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Accompanying the Board of Commissioners on a visit in early 2024 to SPAM Jatiluhur Project on January 2, 2024. 2. Attending and becoming a speaker in the Socialization of Guidelines for the Management of Subsidiaries and Integrated Governance of PT WIKA Group on January 22, 2024 3. Analyze the Request for Approval of Changes to the Capital Structure at PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) in accordance with KPR Memorandum Number: DK.01.01 / A.KOMITE.00014/2024 dated April 17, 2024 4. Conduct an Analysis of the Request for Partial Release of Shares of PT Wijaya Karya Beton Tbk / WIKA Beton in accordance with KPR Memorandum Number: DK.01.01 / A.KOMITE.00017/2024 dated April 23, 2024. 5. Joint review with the Audit Committee of DTA and Share Swap plans for WIKA Realty and HIPRO shares as presented at the Internal Meeting of Board of Commissioners on June 10, 2024. 6. Review the Board of Directors' Request for Approval of the Corporate Action to Improve the Tourism and Hospitality Ecosystem with Memorandum KPR Number: DK.01.01 / A.KOMITE.00036 / 20254 dated August 16, 2024. 7. Conduct a review of the Company's new contract achievements as stated in Memorandum KPR Number: DK.01.01 / A.KOMITE.00044 / 2024 dated September 20, 2024 regarding the Review of New Contract Acquisition of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk up to June 2024. 8. Review of the 2025 Budget Plan Draft, especially the Risk Management section 9. Participate in the QHSE Patrol of Board of Commissioners to Japek II Project and RFD Rorotan on November 22, 2024 10. Review of Board of Directors' Request Regarding the Action Plan of Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in Settling Liabilities of PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (WRK) that Originated from the Use of the Company's Non-Cash Loan Facility at Bank Mandiri on December 11, 2024. 11. Examination of a request from Board of Directors regarding the action plan of Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in the settlement of obligations of PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (WIKAIKON) arising from the use of the company's non-cash loan facilities at Bank BRI, Bank BNI and Bank Mandiri according to the KPR memo dated December 31, 2024.
<ol style="list-style-type: none"> 5. Pendidikan dan Pelatihan 5. Education and Training 	<p>1 kali dalam 1 tahun sesuai ketentuan 1 time in 1 year according to the provisions</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua KPR telah mengikuti Seminar Sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata kelola Terintegrasi PT WIKA Group tanggal 22 Januari 2024 2. Anggota KPR mengikuti 2 Sertifikasi Manajemen Risiko yaitu Certified Corporate Risk Manager (CCRM) dari BPKP dengan hasil kompeten dan Certified Risk Governance Professional (CRGP) dari LSPMR. 1. The Chairman of KPR has attended the Seminar on the Socialization of Guidelines for the Principles of Subsidiary Management and Integrated Governance of PT WIKA Group on January 22, 2024 2. KPR members took part in 2 Risk Management Certifications, namely Certified Corporate Risk Manager (CCRM) from BPKP with competent results and Certified Risk Governance Professional (CRGP) from LSPMR.

Saran dan Masukan untuk Komite Pemantau Risiko

Berikut adalah beberapa saran dan masukan yang telah diberikan kepada manajemen untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam evaluasi kinerja internal Perseroan sepanjang tahun 2024:

1. Meningkatkan perolehan Omzet Kontrak Baru dengan memperhatikan mitigasi risiko yang sudah disiapkan. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah:
 - a. Menghitung kemampuan (kapasitas) produksi WIKA, untuk memitigasi OK Baru diproduksi secara optimal.
 - b. Memperluas pasar, dengan:
 - Mengikuti tender senilai >100 M - <150 M secara selektif di Pulau Jawa.
 - Merelaksasikan regulasi kreditur mengenai keikutsertaan dalam tender Swasta Nasional yang memiliki finansial dan kredibilitas baik.
 - c. KPI Winning Rate perlu ditinjau kembali agar dapat memberikan kontribusi lebih optimal terhadap pencapaian Kontrak Baru guna mengamankan KPI korporat dan RKAP 2024.
2. Dengan tetap mempertimbangkan risiko, mengusahakan agar laba per proyek di atas target RKAP yaitu untuk Proyek Joint Operation (JO/KSO) diatas 8,10% dan Proyek Non JO/KSO diatas 5,52%.
3. Menjalankan pemantauan atas pelaksanaan kontrak melalui Check Point Proyek (20%, 50%, 70% dan Laporan Proyek Selesai) secara konsisten secara tepat waktu.
4. Mengupayakan peningkatan budaya risiko dengan:
 - a. Penggunaan aplikasi yang berfungsi sebagai early warning/ pengingat pelaksanaan CP termasuk Penggunaan aplikasi yang handal pada seluruh proyek.
 - b. Peningkatan kapasitas & kapabilitas berkenaan dengan Manajemen Risiko kepada personal di proyek, termasuk pengetahuan penentuan risiko dan penentuan mitigasi yang paling tepat (Risk Minded to be Achieve Corporate Goals).
 - c. Peningkatan pemahaman Proyek agar pengelolaan Manajemen Risiko lebih optimal untuk menjaga pencapaian On time On budget dalam rangka mengamankan RKAP 2024.
 - d. Menyempurnakan pedoman pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Lingkup WIKA Group.
 - e. Menyempurnakan Pedoman Manajemen Risiko disesuaikan dengan proses bisnis.
5. Atas risiko-risiko utama Perseroan, agar selalu dievaluasi secara berkala sesuai kebijakan Manajemen Risiko Perseroan, termasuk melakukan evaluasi atas risiko-risiko lain yang dapat mempengaruhi sasaran Perseroan. Dan, memastikan tidak terdapat risiko yang belum teridentifikasi.
6. Dalam rangka pelaksanaan MR korporat :
 - a. Digital Control Tower (DCT) diharapkan dapat lebih optimal digunakan untuk pengawasan proyek.
 - b. Risk Management Division (RMD) melakukan evaluasi mitigasi risiko yang sudah disiapkan agar diuji kembali dengan kondisi terkini mengingat masih ada mitigasi yang belum efektif menurunkan risiko sebagaimana ada pada risiko yang telah diidentifikasi pada RKAP 2024.
 - c. Dari data pelaksanaan pengawasan proyek melalui CP oleh RMD, terlihat bahwa untuk proyek dengan risiko ekstrim masih pada angka 29,06% yang artinya masih perlu pengawasan dari RMD selaku 2nd liner untuk memantau 1st liner (pemilik risiko) dalam mengamankan tujuan proyeknya.

Suggestions and Input for Risk Monitoring Committee

The following are some of the suggestions and inputs that have been provided to management for consideration in evaluating the Company's internal performance throughout 2024:

1. Increase the acquisition of New Contract Turnover by paying attention to the risk mitigation that has been prepared. The things that need attention are:
 - a. Calculate WIKA's production capacity to mitigate the optimal production of New OKs.
 - b. Expand the market by:
 - Participating in tenders worth >100 M - <150 M selectively in Java.
 - Relaxing creditor regulations regarding participation in National Private tenders that have good financial standing and credibility.
 - c. The Winning Rate KPI needs to be reviewed in order to make a more optimal contribution to the achievement of New Contracts to secure corporate KPIs and the 2024 Company Budget.
2. While still considering the risks, strive to ensure that the profit per project is above the Company Budget target, namely for Joint Operation (JO/KSO) Projects above 8.10% and Non-JO/KSO Projects above 5.52%.
3. Consistently and timely carry out monitoring of contract implementation through Project Check Points (20%, 50%, 70% and Completed Project Report).
4. Strive to improve the risk culture by:
 - a. Using applications that function as early warning/reminders for CP implementation, including the use of reliable applications in all projects.
 - b. Increased capacity & capability with regard to Risk Management for project personnel, including knowledge of risk determination and determination of the most appropriate mitigation (Risk Minded to be Achieve Corporate Goals).
 - c. Increased understanding of the Project so that Risk Management is more optimally managed to maintain On time On budget achievements in order to secure the 2024 RKAP.
 - d. Improve the guidelines for managing subsidiaries and integrated governance within the scope of the WIKA Group.
 - e. Improve the Risk Management Guidelines in accordance with business processes.
5. The Company's main risks should be regularly evaluated in accordance with the Company's Risk Management policy, including evaluating other risks that may affect the Company's goals. And, ensure that there are no unidentified risks.
6. In the context of implementing corporate RM:
 - a. Digital Control Tower (DCT) is expected to be used more optimally for project supervision.
 - b. The Risk Management Division (RMD) evaluates the risk mitigation that has been prepared so that it can be re-tested with the latest conditions, considering that there is still mitigation that has not been effective in reducing risk as in the risks that have been identified in the 2024 RKAP.
 - c. From the data on project supervision implementation through CP by RMD, it can be seen that for projects with extreme risk, the figure is still at 29.06%, which means that supervision is still needed from RMD as a 2nd liner to monitor the 1st liner (risk owner) in securing the project objectives.

- d. Risiko ekstrem tertinggi pada Triwulan II adalah Temuan Audit Eksternal, yaitu perbedaan antara perhitungan Manajemen Proyek dengan Auditor Eksternal banyak terjadi.
- e. Dari Data Project On Time On Budget, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian RMD, yaitu target KPI korporat tahun 2024 untuk proyek on time on budget adalah sebesar 65%, sedangkan realisasi per bulan Mei 2024 baru tercapai 35%.
7. Berkenaan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) diharapkan:
- Mencantumkan strategi dan rencana aksi yang dijabarkan dengan jelas dilengkapi target terukur serta timeline yang selaras dengan RPK untuk menghindari deviasi yang terlalu jauh dengan realisasi ke depannya.
 - Identifikasi risiko termasuk mitigasinya agar Perseroan dapat rebound dengan cepat dan sehat.
8. Berkenaan dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan:
- Direksi Perseroan agar benar-benar menjaga imbal hasil yang diproyeksikan dalam kajian-kajian bisnis/ekonomi/finansial yang telah disiapkan guna mendukung tujuan aksi korporasi untuk memberikan nilai tambah bagi Perseroan, meminimalisir risiko dan menjaga kontribusi positif bagi RKAP 2024.
 - Selalui memperhatikan opini Jamdatun dan/atau BPKP dan ketentuan POJK serta ketentuan lainnya untuk meminimalisir risiko hukum serta persyaratan-persyaratan lain agar tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari dan untuk mengamankan aspek-aspek kritikal atas proses aksi korporasi.
 - Direksi agar memastikan bahwa risiko-risiko yang telah diidentifikasi perlu benar-benar dilakukan pengendaliannya oleh risk owner sebagai 1st liners dan evaluasi dari 2nd liner serta pengawasan oleh 3rd liner untuk memastikan risiko termitigasi dengan baik dan tidak ada risiko lain yang tidak teridentifikasi yang dapat mengganggu sasaran rencana aksi korporasi.
 - Dalam rencana pemberian Shareholder Loan kepada Anak Perusahaan, agar dipastikan Anak Perusahaan memiliki Repayment Capacity (RPC)/kemampuan bayar kembali SHL yang cukup agar potensi pendapatan dan/atau imbal hasil yang diharapkan Perseroan benar-benar dapat diperoleh sesuai rencana.
 - Dalam hal akan melakukan pemberian SHL, agar dipastikan telah mendapatkan persetujuan dari Kreditor MRA sebelum membuat perjanjian SHL/Cash Loan karena belum termasuk transaksi pinjaman yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam kajian hukum.
 - Direksi agar memastikan bahwa risiko-risiko yang telah diidentifikasi perlu benar-benar dilakukan pengendaliannya oleh risk owner sebagai 1st liners dan evaluasi dari 2nd liner serta pengawasan oleh 3rd liner untuk memastikan risiko termitigasi secara efektif, transaksi sesuai dengan Risk Appetite Statement (RAS) dan tidak ada risiko lain yang tidak teridentifikasi yang dapat mengganggu sasaran rencana.
 - Direksi agar memastikan agar proses untuk menjalankan aksi korporasi selalu mengindahkan arahan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Prinsip Business Judgement Rules dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG).
- d. The highest extreme risk in Quarter II was the External Audit Finding, namely the frequent differences between Project Management and External Auditor calculations.
- e. From the Project On Time On Budget Data, the RMD needs to pay attention to the 2024 corporate KPI target for on time on budget projects, which is 65%, while the realization as of May 2024 is only 35%.
7. With regard to the Company's Long-Term Plan (RJPP), it is expected that:
- It includes a clearly outlined strategy and action plan with measurable targets and a timeline that is in line with the RPK to avoid deviations that are too far from future realization.
 - It identifies risks including their mitigation so that the Company can rebound quickly and healthily.
8. With regard to the corporate action plan to be carried out by the Company:
- The Company's Board of Directors must strictly maintain the projected returns in the business/economic/financial studies that have been prepared to support the objectives of the corporate action to provide added value for the Company, minimize risks and maintain a positive contribution to the 2024 Company Budget.
 - By paying attention to the opinion of the Attorney General's Office for Legal Aid and/or the Finance and Development Supervision Agency and the provisions of the Financial Services Authority Regulation and other provisions to minimize legal risks and other requirements so as not to create legal risks in the future and to secure critical aspects of the corporate action process.
 - Board of Directors to ensure that the risks that have been identified need to be controlled by the risk owner as the 1st liners and evaluated by the 2nd liners as well as supervised by the 3rd liners to ensure that the risks are properly mitigated and that there are no other unidentified risks that could interfere with the objectives of the corporate action plan.
 - In the plan to provide a Shareholder Loan to the Subsidiary, to ensure that the Subsidiary has sufficient Repayment Capacity (RPC) so that the Company's potential income and/or expected returns can actually be obtained as planned.
 - In the case of granting SHL, to ensure that approval has been obtained from the MRA Creditor before making the SHL/Cash Loan agreement because it does not include exempted loan transactions as stated in the legal review.
 - Board of Directors to ensure that the risks that have been identified need to be controlled by the risk owner as the 1st liners and evaluation from the 2nd liners as well as supervision by the 3rd liners to ensure that the risks are effectively mitigated, the transactions are in accordance with the Risk Appetite Statement (RAS) and there are no other unidentified risks that can interfere with the plan's objectives.
 - Board of Directors to ensure that the process for carrying out corporate actions always heeds the direction of Series A Dwiwarna Shareholder, the Business Judgement Rules Principle, and the principles of Good Corporate Governance (GCG).

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dewan Komisaris Perseroan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik di seluruh aspek operasional Perseroan. Komite ini bertanggung jawab mengawasi implementasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, Komite Tata Kelola Terintegrasi juga berperan dalam menjaga independensi dan profesionalisme dalam pengelolaan Perseroan, memastikan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip kewajaran dan mendukung kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Tujuan utama pembentukan komite ini adalah menciptakan sistem tata kelola yang berkelanjutan, serta mendukung kemajuan dan pengembangan Perseroan di dalam lingkup BUMN konglomerasi.

Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan didasarkan pada pedoman yang mengacu pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, sebagaimana telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada tanggal 04 Mei 2023;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, pada tanggal 04 Mei 2023;
6. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
7. Akta Pendirian Perseroan yang termaktub dalam Akta Nomor: 110 tanggal 22 Desember 1972, yang dibuat dihadapan Paramita Tamsil pengganti dari Djoyo Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 5 tanggal 04 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0015012.AH.01.02. Tahun 2022.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The Company's Board of Commissioners established the Integrated Governance Committee to ensure the implementation of good governance principles in all aspects of the Company's operations. This committee is responsible for overseeing the principles of transparency, accountability and responsibility in accordance with applicable standards. In addition, Integrated Governance Committee also plays a role in maintaining independence and professionalism in the Company's management, ensuring that every policy and decision taken is in accordance with the principles of fairness and supports the interests of all stakeholders. The main objective of establishing this committee is to create a sustainable governance system, as well as to support the progress and development of the Company within the scope of conglomerate SOEs.

Integrated Governance Committee Basis of Establishment

The establishment of the Company's Integrated Corporate Governance Committee is based on guidelines that refer to the following provisions:

1. Law Number: 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as amended by Law Number: 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number: 2 of 2022 concerning Job Creation into Law;
2. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number: 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number: 2 of 2022 concerning Job Creation into Law;
3. Government Regulation Number: 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises as amended by Government Regulation Number: 23 of 2022;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOE, as confirmed at the General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk on May 04, 2023;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises, as confirmed at the General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, on May 04, 2023;
6. Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises Number: SK-3/DKU.MBU/05/2023 concerning Technical Instructions for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs within State-Owned Enterprises.
7. The Deed of Establishment of the Company as contained in Deed Number: 110 dated December 22, 1972, made before Paramita Tamsil, substitute for Djoyo Mulyadi, S.H., Notary in Jakarta, as amended several times, most recently by the Deed of Extraordinary Shareholders Resolution Statement of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Number: 5 dated February 04, 2022 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and has received approval from the Minister of Law and Human Rights Number: AHU-0015012.AH.01.02. year 2022.



8. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 67/DK/WIKA/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

8. Board of Commissioners Decree No: 67/DK/WIKA/2023 dated July 3, 2023 concerning the Establishment and Appointment of Members of Integrated Risk Monitoring and Governance Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.



Pedoman Kerja/Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki pedoman kerja yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 97/DK/WIKA/2023 tentang Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 26 September 2023. Piagam ini mencakup berbagai aspek penting yang menjadi pedoman bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, antara lain:

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Pedoman Umum;
3. Bab III Organisasi;
4. Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab;
5. Bab V Honorarium dan Pembebanan Biaya/Anggaran;
6. Bab VI Rapat, Surat Menyurat dan Pelaporan;
7. Bab VII Penutup.

Kriteria Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kriteria anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris BUMN Induk;
2. Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi diketuai oleh Komisaris Utama BUMN Induk dan anggota terdiri dari perwakilan Dewan Komisaris BUMN Induk serta Komisaris Utama Anak Perusahaan;
3. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Dewan Komisaris BUMN Induk salah satunya adalah Komisaris Independen;
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dibantu oleh tim pendukung guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya;
5. Penunjukan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan tim pendukungnya diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris BUMN Induk.

Ketentuan Masa Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, sebagaimana telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada tanggal 04 Mei 2023, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, pada tanggal 04 Mei 2023.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas untuk mendukung Dewan sesuai dengan tanggung jawabnya. Adapun tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi secara berkala dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi pada lingkup Perseroan;
2. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Grup Perseroan;

Integrated Governance Committee Work Guidelines/Charter

The Integrated Governance Committee has a work guideline prepared based on the Decree of Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 97/DK/WIKA's/2023 concerning the Integrated Governance Committee Charter of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dated September 26, 2023. This charter covers various important aspects that serve as guidelines for the Integrated Governance Committee in carrying out its duties and functions effectively, among others:

1. Chapter I Introduction;
2. Chapter II General Guidelines;
3. Chapter III Organization;
4. Chapter IV Duties and Responsibilities;
5. Chapter V Honorarium and Fees/Budget;
6. Chapter VI Meetings, Correspondence and Reporting;
7. Chapter VII Closing.

Criteria for Integrated Governance Committee Members

The criteria for members of Integrated Governance Committee are as follows:

1. Integrated Governance Committee is under the coordination of the Board of Commissioners of the Parent SOE;
2. The membership composition of Integrated Governance Committee is chaired by the President Commissioner of the Parent SOE and members consist of representatives of the Board of Commissioners of the Parent SOE and the President Commissioner of the Subsidiaries;
3. Members of Integrated Governance Committee who come from the Board of Commissioners of the Parent SOE, one of whom is an Independent Commissioner;
4. Integrated Governance Committee can be assisted by a supporting team to facilitate the implementation of its duties;
5. The appointment of members of Integrated Governance Committee and its supporting team is based on the Decree of Board of Commissioners of the Parent SOE.

Term of Office

In accordance with the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No: PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOE, as confirmed at the General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk on May 04, 2023, and the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No: PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises, as confirmed at the General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, on May 04, 2023.

Integrated Governance Committee Duties and Responsibilities

The Integrated Governance Committee has the task of supporting the Board of Commissioners in accordance with its responsibilities. The duties of Integrated Governance Committee are as follows:

1. Evaluate periodically and provide input to the Board of Commissioners for approval of Integrated Governance policies within the Company;
2. Monitor and evaluate the suitability of implementation of the Company Group Integrated Governance policies;

3. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian internal, manajemen risiko dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BUMN Induk untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris BUMN Induk dari waktu ke waktu sesuai wewenang, tugas dan fungsinya.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2024, Komite Pemantau Risiko terdiri dari tiga anggota, dengan salah satunya menjabat sebagai Ketua Komite. Ketua Komite Audit, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, berperan aktif dalam pengawasan dan penilaian risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Struktur ini memastikan keterpaduan antara fungsi pengawasan internal dan pengelolaan risiko yang efektif, yang mendukung transparansi serta keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis Perseroan.

Structure, Number, Composition and Basis for Appointment of Integrated Governance Committee

In 2024, Risk Monitoring Committee consisted of three members, with one of them serving as Committee Chairman. The Chairman of Audit Committee, who also served as a member of Board of Commissioners, plays an active role in the oversight and assessment of risks faced by the Company. This structure ensures alignment between the internal control function and effective risk management, which supports transparency and sustainability in the Company's strategic decision-making.

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Information	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Jarot Widyoko	Ketua merangkap Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Chairman and Member of Integrated Governance Committee	Komisaris Utama Induk President Commissioner of the Parent Company	Teknik Engineering	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the Service Period as Member of Board of Commissioners
Rusmanto	Wakil Ketua merangkap Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Deputy Chairman and Member of Integrated Governance Committee	Komisaris Independen Induk Independent Commissioner of the Parent Company	Pertahanan dan Keamanan NKRI Defense and Security of the Republic of Indonesia	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the Service Period as Member of Board of Commissioners
Satya Bhakti Parikesit*)	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Member of Integrated Governance Committee	Komisaris Induk Commissioner of the Parent Company	Hukum dan Manajemen Law and Management	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris *) Following the Term of Office as a Member of Board of Commissioners *)
8 (Delapan) Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Anggota Member	Komisaris Utama Anak Perusahaan President Commissioner of Subsidiary	Teknik, Keuangan dan Manajemen Engineering, Finance and Management	Periode Ke-1 1st Period
Andar Sudiar Sukma	Tim Pendukung Supporting Team	Pihak Independen Independent Party	Hukum, Tata Kelola Korporasi dan Kepatuhan Legal, Corporate Governance and Compliance	Periode Ke-1 1st Period

*) Selesai masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Induk Perusahaan efektif per 30 April 2024, sehingga otomatis selesai sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

*) Term of office as a member of Board of Commissioners of the Parent Company ended on April 30, 2024, hence automatically ended service as a member of Integrated Governance Committee.

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Committee Profile



Jarot Widyoko

Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Chairman

Profil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, Jarot Widyoko dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The profile of Integrated Governance Committee Chairman, Jarot Widyoko, can be seen in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Dasar Hukum Pengangkatan

Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor 67/DK/WIKA/2023 Tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Legal Basis for Appointment

Copy of Decree of the Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) No. 67/DK/WIKA's/2023 dated July 03, 2023 concerning the Formation and Appointment of Members of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.



Rusmanto

Wakil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Deputy Chairman

Profil Wakil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, Rusmanto dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The profile of Integrated Governance Committee Deputy Chairman, Rusmanto, can be seen in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Dasar Hukum Pengangkatan

Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor 67/DK/WIKA/2023 Tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Legal Basis for Appointment

Copy of Decree of the Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) No. 67/DK/WIKA's/2023 dated July 03, 2023 concerning the Formation and Appointment of Members of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Komisaris Utama 8 (Delapan) Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk President Commissioner of 8 (Eight) Subsidiaries of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee Member

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komisaris Utama 8 (Delapan) Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dapat dilihat pada bagian profil Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada Laporan Tahunan ini.

The profiles of Integrated Governance Committee Members, President Commissioners of 8 (Eight) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Subsidiaries can be seen in the profile section of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Subsidiaries in this Annual Report.

Dasar Hukum Pengangkatan

Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor 67/DK/WIKA/2023 Tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Legal Basis for Appointment

Copy of Decree of the Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) No. 67/DK/WIKA's/2023 dated July 03, 2023 concerning the Formation and Appointment of Members of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.



Andar Sudiar Sukma

Tim Pendukung Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee Supporting Team

Profil Tim Pendukung Komite Tata Kelola Terintegrasi, Andar Sudiar Sukma dapat dilihat pada bagian profil Anggota Komite Pemantau Risiko pada Laporan Tahunan ini.

The profile of Integrated Governance Committee Supporting Team, Andar Sudiar Sukma, can be seen in the profile section of the Risk Monitoring Committee Members in this Annual Report.

Dasar Hukum Pengangkatan

Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor 67/DK/WIKA/2023 Tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Legal Basis for Appointment

Copy of Decree of the Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) No. 67/DK/WIKA's/2023 dated July 03, 2023 concerning the Formation and Appointment of Members of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of Limited Liability Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Pernyataan Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Committee Statement of Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Jarot Widyoko	Rusmanto	Satya Bhakti Parikesit*	Andar Sudiar Sukma
<p>Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi</p> <p>Members of the Integrated Governance Committee who are a member of Board of Commissioners, do not have a blood family relationship up to the third degree, either straight or sideways or a relationship arising from marriage with another member of Board of Commissioners or with members of Board of Directors</p>	√	√	√	N/A
<p>Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang bukan anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan</p> <p>Members of Integrated Governance Committee who are not a member of Board of Commissioners are prohibited from having blood or marital relations up to the third degree, either straight or sideways, with members of Board of Commissioners and members of Board of Directors.</p>	N/A	N/A	N/A	√

*) selesai masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Induk Perusahaan efektif per 30 April 2024, sehingga otomatis selesai sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

*) Term of office as a member of Board of Commissioners of the Parent Company ended on April 30, 2024, hence automatically ended service as a member of Integrated Governance Committee

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Telah Diikuti dalam Tahun Buku

Untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dapat berjalan dengan baik, Perseroan memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dalam hal ini, Perseroan memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung kelancaran operasional dan memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan Dewan Komisaris secara efektif. Sepanjang tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi yang relevan dengan perkembangan bisnis dan tata kelola Perseroan, sebagai berikut:

Training and/or Competency Improvement Attended in the Fiscal Year

To ensure that the supervisory function carried out by the Board of Commissioners can run well, the Company pays special attention to the competency development of Integrated Governance Committee. In this regard, the Company facilitates the improvement of knowledge and skills that can support smooth operations and strengthen the implementation of supervisory duties. This support aims to ensure that the Integrated Corporate Governance Committee has the expertise needed to effectively support the Board of Commissioners' activities. Throughout 2024, Integrated Corporate Governance Committee has participated in various competency improvement programs relevant to the Company's business and governance development, as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer by
Jarot Widyoko (Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi) (Integrated Governance Committee Chairman)	Pendidikan Sertifikasi Governansi dan Manajemen Risiko	Governansi dan Manajemen Risiko	Jakarta/17 - 18 Desember 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/LSPMR
Rusmanto (Wakil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi) (Integrated Governance Committee Deputy Chairman)	Seminar	Sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi	Jakarta/22 Januari 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Andar Sudiar Sukma (Tim Pendukung Komite Tata Kelola Terintegrasi) (Integrated Governance Committee Support Team)	Pendidikan Sertifikasi Manajemen Risiko	Manajemen Risiko	Ciawi/8 - 26 Juli 2024	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP)
	Pendidikan Sertifikasi Governansi dan Manajemen Risiko	Governansi dan Manajemen Risiko	Jakarta/17 - 18 Desember 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/LSPMR

Kebijakan dan Pelaksanaan, Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Rapat tersebut

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan (triwulanan) atau dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan keperluan;
- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diadakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat lain yang ditentukan oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau melalui media daring;
- Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau Wakil Ketua Komite, dan disampaikan kepada setiap anggota Komite melalui media elektronik tercepat paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rapat diadakan;
- Pemanggilan rapat Komite sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat atau alamat tautan dalam hal rapat diselenggarakan secara daring;
- Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi dan dalam hal Ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengundang Direksi Perseroan dan/atau Direksi Anak Perusahaan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat;
- Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara;
- Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang mengambil keputusan;
- Pimpinan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat Komite;
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
- Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir dalam rapat;
- Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud;
- Risalah rapat didokumentasikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris.

Policy and Implementation, Frequency of Integrated Governance Committee Meetings and Level of Attendance of Integrated Governance Committee Members at These Meetings

Integrated Governance Committee Meeting Policy

- Integrated Governance Committee meetings are held at least 1 (one) time in 3 (three) months (quarterly) or can be held at any time as needed;
- Integrated Governance Committee meetings are held at the Company's domicile, another place determined by the Chairman of Integrated Governance Committee or via online media;
- Summons for the meeting must be made by the Chairman of Integrated Governance Committee or the Deputy Chairman of Committee, and conveyed to each Committee member via electronic media no later than 1 (one) week before the meeting is held;
- Summons for the Committee meeting as referred to in number 3, must include the meeting agenda, date, time and place of the meeting or the link address if the meeting is held online;
- Meetings can only be held if attended by at least 51% of total members of Integrated Governance Committee;
- Integrated Governance Committee meetings may invite the Company's Directors and/or Subsidiary Directors to request explanations, presentations and information related to the meeting agenda;
- Decisions at the Integrated Governance Committee meeting are made based on deliberation and consensus. If consensus deliberation is not reached, then the decision is made based on the majority vote, provided that each member of Integrated Governance Committee is only entitled to cast 1 (one) vote;
- If the same number of votes agree and disagree, then the chairman of Integrated Governance Committee meeting has the authority to make a decision;
- The Chairman of Integrated Governance Committee meeting must present conclusions and decisions at the end of each Committee meeting;
- Dissenting opinions that occur at Integrated Governance Committee meetings must be stated clearly in the minutes of meeting along with the reasons;
- Minutes of meeting must be prepared by someone who is present at the meeting and appointed by the meeting chairman. The minutes of meeting must be signed by all members of Integrated Governance Committee who attend the meeting;
- Minutes of meeting are valid evidence regarding the decisions taken at the meeting in question;
- Minutes of meetings are documented by the Secretariat of Board of Commissioners.
- Meeting Frequency, Attendance Level, and Recapitulation of Integrated Governance Committee

Frekuensi Rapat, Tingkat Kehadiran, dan Rekapitulasi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2024, rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Meeting Frequency, Attendance Level, and Recapitulation of the Integrated Governance Committee

Throughout 2024, Integrated Governance Committee meetings were held as many as 3 (three) times with the attendance level and meeting agenda as follows:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	22 Januari 2024 22 Januari 2024	Sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi
2	17 Oktober 2024 17 Oktober 2024	<ol style="list-style-type: none"> Arahan dari Komisaris Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi; Pemaparan dan Diskusi Kinerja Anak Perusahaan; Lain-lain
3	16 Desember 2024 16 Desember 2024	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Tindak Lanjut atas Issue Strategis pada Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang sebelumnya; Pembahasan Kinerja Bulan Oktober 2024/Terkini dan Prognosa Bulan Desember 2024; Pembahasan Rencana Pengawasan untuk RKAP Tahun 2025.

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee Attendance		
		22 Januari 2024	17 Oktober 2024	16 Desember 2024
1	Jarot Widyoko (Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi) (Integrated Governance Committee Chairman)	v	v	x
2	Rusmanto (Wakil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi) (Integrated Governance Committee Deputy Chairman)	v	v	v
3	Satya Bhakti Parikesit*)	v	N/A	N/A
4	Komisaris Utama PT WIKA Beton Tbk	v	v	v
5	Komisaris Utama PT WIKA Realty	v	v	v
6	Komisaris Utama PT WIKA Industri dan Konstruksi	v	v	v
7	Komisaris Utama PT WIKA Rekayasa Konstruksi	v	x	v
8	Komisaris Utama PT WIKA Bangunan Gedung Tbk	v	v	v
9	Komisaris Utama PT WIKA Bitumen	v	v	v
10	Komisaris Utama PT WIKA Serang Panimbang	v	v	v
11	Komisaris Utama PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur	v	v	v

*) Selesai masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Induk Perusahaan efektif per 30 April 2024, sehingga otomatis selesai sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

*) End of term of office as member of Board of Commissioners Parent Company effective as of April 30, 2024, thus automatically completing term as member of Integrated Governance Committee.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi

Recapitulation of Integrated Governance Committee Attendance

Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Jarot Widyoko (Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi) (Integrated Governance Committee Chairman)	3	2	67%
Rusmanto (Wakil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi) (Integrated Governance Committee Deputy Chairman)	3	3	100%
Satya Bhakti Parikesit*)	1	1	100%
Komisaris Utama PT WIKA Beton Tbk	3	3	100%
Komisaris Utama PT WIKA Realty	3	3	100%
Komisaris Utama PT WIKA Industri dan Konstruksi	3	3	100%
Komisaris Utama PT WIKA Rekayasa Konstruksi	3	2	67%
Komisaris Utama PT WIKA Bangunan Gedung Tbk	3	3	100%
Komisaris Utama PT WIKA Bitumen	3	3	100%
Komisaris Utama PT WIKA Serang Panimbang	3	3	100%
Komisaris Utama PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur	3	3	100%

*) Selesai masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Induk Perusahaan efektif per 30 April 2024, sehingga otomatis selesai sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

*) End of term of office as member of Board of Commissioners Parent Company effective as of April 30, 2024, thus automatically completing term as member of Integrated Governance Committee.

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Penetapan remunerasi bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Integrated Governance Committee Remuneration Policy

Determination of remuneration for Integrated Governance Committee refers to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Tahun Buku Sesuai dengan yang Dicantumkan dalam Pedoman atau Piagam (Charter) Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2024 kegiatan yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi atas Pedoman Pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan dan hasilnya disampaikan kepada manajemen untuk penyempurnaan yang dilakukan pada bulan Januari 2024;
- Melakukan sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2024;
- Melakukan pemantauan implementasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi untuk aspek kinerja/operasional, manajemen risiko, tata kelola Perusahaan, dan hukum melalui rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan pada bulan Oktober dan Desember 2024.

Integrated Governance Committee Activities in the Fiscal Year in accordance with those stated in the Integrated Governance Committee Charter

In 2024, the activities carried out by the Integrated Governance Committee are as follows:

- Conducting an evaluation of the Company's Integrated Governance Management Guidelines and the results were submitted to the management for improvement, carried out in January 2024;
- Conducting socialization of the Guidelines for the Principles of Management of Subsidiaries and Integrated Governance of the Company, carried out on January 22, 2024;
- Monitoring the implementation of the Integrated Governance Policy for aspects of performance/operations, risk management, corporate governance, and law through the Integrated Governance Committee meetings held in October and December 2024.

Penilaian atas Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam evaluasi kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, Perusahaan mengacu pada pendekatan yang dijelaskan dalam bagian "Penilaian atas Kinerja Organ Pendukung dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris" dalam Laporan Tahunan ini.

Evaluasi terhadap kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara kolektif, dilakukan dengan indikator:

1. Penilaian tingkat kehadiran pada rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi;
2. Penilaian kontribusi dalam penyampaian usulan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi;
3. Penilaian kualitas usulan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris.

Dengan kriteria tersebut, secara keseluruhan penilaiannya adalah baik.

Saran dan Masukan untuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Berikut adalah beberapa saran dan masukan yang telah disampaikan kepada manajemen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses evaluasi kinerja internal Perseroan sepanjang tahun 2024:

1. Pemberlakukan Komite Tata Kelola Terintegrasi terhadap seluruh Anak Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk agar melalui ratifikasi Pedoman Prinsip Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi melalui RUPS masing-masing Anak Perusahaan agar dapat mengikat sesuai hukum korporasi yang berlaku;
2. Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan amanat dari Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Mengingat PT WIKA (Persero) Tbk masuk sebagai BUMN Sistemik B, maka wajib memenuhi Organ Pengelola Risiko dan menjalankan fungsi Komite TKT (yang terdiri dari Komisaris Induk dan Komisaris Utama Anak Perusahaan) untuk membantu melakukan pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Induk Perusahaan terhadap jalannya Perusahaan secara konglomerasi guna menciptakan sinergi yang memberikan nilai tambah dan tumbuh secara sehat;
3. Anggota Komite TKT agar dapat melakukan pengawasan dan memberikan nasihat yang baik kepada Direksi Anak Perusahaannya untuk mencapai kinerja optimal sinergis dengan Induknya. Pemberian nasihat diharapkan secara detail sesuai risikonya agar tujuan konsolidasi tercapai.
4. RKAP masing-masing Anak harus berbasis risiko, oleh karena itu, dipastikan terdapat bagian yang berisi risiko-risiko dalam menjalankan RKAP. Hal ini agar selaras dengan risiko-risiko RKAP Induk yang sudah dituangkan dalam RKAP Tahun 2024 ini.
5. Penerapan Three Line Model dalam proses bisnis harus end to end progress. Dapat dicontohkan di Induk yang sudah menerapkan 4 eyes principles (4EP) dalam memilih proyek yang akan dimasuki (fase pra lelang). Untuk proyek yang sudah berjalan terdapat

Assessment of Integrated Governance Committee Performance

In evaluating the performance of Integrated Governance Committee, the Company refers to the approach described in the section "Assessment of the Performance of Supporting Organs and/or Committees under Board of Commissioners" in this Annual Report.

The performance Integrated Governance Committee is evaluated collectively, with the following indicators:

1. Assessment of the level of attendance at the Integrated Governance Committee meeting;
2. Assessment of contributions in submitting proposals for providing advice to the Board of Commissioners in the Integrated Governance Committee meeting;
3. Assessment of the quality of proposals for providing advice to the Board of Commissioners.

Based on these criteria, the overall assessment is good.

Suggestions and Input for Integrated Risk Monitoring and Governance Committee

The following are some suggestions and inputs that have been submitted to management to be taken into consideration in the process of evaluating the Company's internal performance throughout 2024:

1. The implementation of Integrated Governance Committee for all Subsidiaries of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk should be done through the ratification of Subsidiary Principles and Integrated Governance Guidelines at each Subsidiary's GMS, so that it can be binding according to the applicable corporate law.
2. The Integrated Governance Committee is mandated by the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Governance Guidelines and Significant Corporate Activities for SOEs. Since PT WIKA (Persero) Tbk is categorized as a Systemic SOE B, it is required to have a Risk Management Body and implement the Integrated Governance Committee function (which consists of the Parent Company's Commissioners and the Subsidiary's President Commissioner) to assist in supervising and providing advice by the Parent Company's Board of Commissioners on the company's conglomerate operations in order to create synergies that add value and ensure healthy growth.
3. Members of Integrated Governance Committee should be able to supervise and provide good advice to the Board of Directors of Subsidiaries to achieve optimal performance in synergy with Parent Company. The advice should be detailed according to the associated risks so that the consolidation objectives are met.
4. The RKAP of each Subsidiary should be risk-based, ensuring that there is a section outlining the risks involved in implementing the RKAP. This should be aligned with the risks in the Parent Company's RKAP, which has been outlined in the 2024 RKAP.
5. The application of the Three-Line Model in business processes must involve end-to-end progress. For example, the Parent Company has already applied the 4 Eyes Principle (4EP) in selecting projects to engage in (pre-tender phase). For ongoing projects, supervision is carried out in accordance with the project

- pengawasan sesuai progress proyek 20%, 50%, 70% dan masa retensi yang melibatkan 3 lini sesuai peranannya masing-masing.
6. Anak Perusahaan agar selalu menjalankan Perusahaan sesuai prinsip-prinsip GCG dan tidak ada fraud di Perusahaan.
 7. Issue-issue strategis pada Anak Perusahaan agar dipantau oleh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 8. Program kerja pengawasan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi selaku Komisaris Utama di Anak Perusahaan agar diselaraskan dengan issue-issue strategisnya masing-masing Anak Perusahaan sebagai bentuk pengawalan atas sasaran secara holding.
- progress at 20%, 50%, 70%, and retention periods, involving all three lines according to their respective roles.
6. The Subsidiaries must always operate the company in accordance with the principles of GCG and ensure that there is no fraud within the company.
 7. Strategic issues within the Subsidiaries should be monitored by members of Integrated Governance Committee.
 8. The work program of Integrated Governance Committee members, in their role as President Commissioner at Subsidiaries, should be aligned with the strategic issues of each Subsidiary, as a form of oversight on the goals at holding level.



Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Other Committees Under Board of Commissioners

Hingga akhir tahun 2024, Dewan Komisaris memiliki 4 (empat) komite, yakni Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pembentukan komite-komite ini dirancang untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya komite-komite ini, Dewan Komisaris diharapkan dapat menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dalam memastikan tata kelola yang transparan dan berkelanjutan.

Until the end of 2024, Board of Commissioners has 4 (four) committees, namely Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee, and Integrated Governance Committee. The establishment of these committees is designed to strengthen the supervision and management of the Company in accordance with applicable regulations. With these committees in place, Board of Commissioners is expected to perform its functions, duties and responsibilities more effectively in ensuring transparent and sustainable governance.

Komite di bawah Direksi

Committees Under Board of Directors

WIKA terus memperkuat struktur tata kelola perusahaan dengan melanjutkan inisiatif yang telah dimulai di tahun sebelumnya. Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis serta Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang dibentuk pada tahun 2023, kini berperan lebih aktif dalam mendukung Direksi untuk meningkatkan efektivitas operasional dan pengambilan keputusan. Kedua komite ini tidak hanya memberikan saran dan rekomendasi yang strategis, tetapi juga memperkuat upaya perusahaan dalam memitigasi risiko serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan fokus pada peningkatan kinerja jangka panjang dan penguatan integritas, WIKA berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan kepatuhan yang tinggi di seluruh lini operasional perusahaan.

WIKA's continues to strengthen its corporate governance structure by continuing the initiatives started in the previous year. The Investment and Strategic Project Risk Management Committee and Anti-Bribery Compliance Function, established in 2023, now play a more active role in supporting the Board of Directors to improve operational effectiveness and decision-making. These two committees not only provide strategic advice and recommendations, but also strengthen the Company's efforts to mitigate risks and ensure that every step taken is in line with the principles of good governance. With a focus on improving long-term performance and strengthening integrity, WIKA's is committed to continuously strengthening the internal control system and ensuring high compliance throughout the Company's operations.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO INVESTASI DAN PROYEK STRATEGIS

Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis dibentuk dengan tujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada Direksi dalam memperkuat pengelolaan risiko, khususnya yang berkaitan dengan investasi Perseroan. Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengawasi pelaksanaan proyek-proyek strategis Perseroan, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip manajemen risiko yang telah ditetapkan.

INVESTMENT AND STRATEGIC PROJECT RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Investment Risk Management and Strategic Projects Committee was established with the aim of providing direct support to the Board of Directors in strengthening risk management, particularly in relation to the Company's investments. The Investment and Strategic Project Risk Management Committee has an important role in formulating and overseeing the implementation of the Company's strategic projects, as well as ensuring that every decision taken is in accordance with established risk management principles.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis

Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis berada di bawah Direksi dalam struktur organisasi Perseroan, sesuai dengan Surat Keputusan No. SK.02.01/A.DIR.01615/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Berikut adalah susunan anggota dari Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis:

Structure and Membership of Investment and Strategic Project Risk Management Committee

The Investment Risk Management and Strategic Projects Committee is under Board of Directors in the Company's organizational structure, in accordance with Decree No. SK.02.01/A.DIR.01615/2023 dated November 1, 2023 concerning Establishment of Investment Risk Management and Strategic Projects Committee of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. The membership composition of Investment and Strategic Project Risk Management Committee is as follows:

No.	Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis Membership composition of Investment and Strategic Project Risk Management Committee	
1	Koordinator Coordinator	Senior Vice President – Risk Management Division
2	Wakil Koordinator Deputy Coordinator	Senior Vice President – Finance Division
		Senior Vice President – Legal Division
		Senior Manager of Contract and Claim Management – Legal Division
		Senior Manager of Joint Operation – Finance Division
3	Anggota Member	Senior Manager of Strategic Risk Management – Risk Management Division
		Senior Manager of Operation Infrastructure Risk Management – Risk Management Division
		Senior Manager of Operation EPCC and Building Risk Management
		Senior Manager of Project Control – Risk Management Division

Profil dan Sertifikasi Anggota Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis

Profil masing-masing anggota Komite dapat dilihat pada pembahasan Profil Pejabat Eksekutif. Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis telah memenuhi sertifikasi yang ditetapkan.

Profile and Certification of Members of Investment Risk Management and Strategic Project Committee

The profile of each Committee member can be seen in the discussion of Executive Officer Profile. All members of the Investment Risk Management and Strategic Project Committee have fulfilled the specified certification.

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Sertifikasi Certification
1	Muhamad Abdi (SVP Risk Management Division)	SK.02.01/A.DIR.00099/2024	Certified Corporate Risk Manager (CCRM) oleh BPKP Certified Corporate Risk Manager (CCRM) by BPKP
2	Ashuri (Senior Vice President – Finance Division)	SK.02.01/A.DIR.00143/2024	Certified Risk Governance Professional (CRGP) oleh LSPMR Certified Risk Governance Professional (CRGP) by LSPMR
3	Andie Hermawan (Senior Vice President – Legal Division)	SK.02.01/A.DIR.00143/2024	Certified Risk Governance Professional (CRGP) oleh LSPMR Certified Risk Governance Professional (CRGP) by LSPMR
4	Agus Prasetyo (Senior Manager of Contract and Claim Management – Legal Division)	SK.02.01/A.DIR.00143/2024	Certified Risk Management Professional (CRMP) oleh LSPMR Certified Risk Governance Professional (CRGP) by LSPMR
5	Muhammad Rifai Afif (Senior Manager of Joint Operation – Finance Division)	SK.02.01/A.DIR.00143/2024	Certified Risk Management Professional (CRMP) oleh LSPMR Certified Risk Governance Professional (CRGP) by LSPMR
6	Awalia Rahmawati (Senior Manager of Strategic Risk Management – Risk Management Division)	SK.02.01/A.DIR.00213/2024	Certified Risk Management Professional (CRMP) oleh LSPMR Certified Risk Governance Professional (CRGP) by LSPMR
7	Aries Fakhri (Senior Manager of Operation Risk Management – Risk Management Division)	SK.02.01/A.DIR.00020/2025	Certified Risk Management Professional (CRMP) oleh LSPMR Certified Risk Governance Professional (CRGP) by LSPMR

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Sertifikasi Certification
8	Agung Setiyono (Senior Manager of Finance Risk Management – Risk Management Division)	SK.02.01/A.DIR.00021/2025	Certified Risk Management Professional (CRMP) oleh LSPMR Certified Risk Governance Professional (CRGP) by LSPMR
9	Dwi Susanto (Senior Manager of Project Control – Risk Management Division)	SK.02.01/A.DIR.00142/2024	Certified Risk Management Professional (CRMP) oleh LSPMR Certified Risk Governance Professional (CRGP) by LSPMR

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis terhitung mulai Surat Keputusan ditetapkan.

Pernyataan Independensi Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis

Seluruh Anggota Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis adalah komite yang dibentuk secara *ex officio*, terdiri dari anggota BOD-1 dan/atau BOD-2, dengan tugas utama untuk melakukan analisis mendalam mengenai berbagai aspek risiko, keuangan, dan hukum pada proyek-proyek besar dan mega. Komite ini juga memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kajian proyek *Non Green Lane*, proyek Strategis, serta investasi yang terkait dengan WIKA.

Keputusan yang diambil adalah bersifat kolektif kolegial, di mana rekomendasi dilakukan oleh seluruh Pimpinan PjFK untuk proyek besar, mega dan luar negeri.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis, Perseroan telah menetapkan Piagam Komite yang disahkan melalui Surat Keputusan No. SK.02.01/A.DIR.01615/2023 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Piagam tersebut memberikan pedoman dalam melakukan kajian menyeluruh yang mencakup aspek risiko, keuangan, dan hukum terkait dengan pengadaan proyek, baik yang berkaitan dengan investasi maupun yang bersifat non-investasi di WIKA.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Telah Diikuti dalam Tahun Buku

Dalam upaya memperkuat kemampuan operasional, Perseroan memberikan dukungan kepada Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis untuk meningkatkan pengetahuan serta kompetensi yang relevan. Tujuan dari langkah ini adalah agar peran Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis telah berpartisipasi dalam sejumlah program pengembangan kompetensi, dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi. Selama tahun 2024, yang meliputi:

Term of Office

The term of office of Investment Risk Management and Strategic Project Committee starts from the date of the Decree.

Investment Risk Management and Strategic Project Committee Statement of Independence

All members of Investment and Strategic Project Risk Management Committee who are independent parties do not have any share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Company, which may affect their ability to act independently.

Duties and Responsibilities

The Investment and Strategic Project Risk Management Committee is a committee formed *ex officio*, consisting of members of BOD-1 and/or BOD-2, with the main task of conducting in-depth analysis of various risk, financial and legal aspects of large and mega projects. This committee also provides recommendations to the Board of Directors regarding the review of Non Green Lane projects, Strategic projects, and investments related to WIKA's.

The decisions taken are collective collegial, where recommendations are made by all PjFK leaders for large, mega and overseas projects.

Work Guidelines/Charter of Investment and Strategic Project Risk Management Committee

To support the implementation of the Investment Risk Management and Strategic Project Committee's duties and responsibilities, the Company has established a Committee Charter authorized through Decree No. SK.02.01/A.DIR.01615/2023 concerning Establishment of Investment Risk Management and Strategic Project Committee of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. The charter provides guidelines in conducting a comprehensive review covering risk, financial and legal aspects related to project procurement, both investment and non-investment related at WIKA's.

Training and/or Competency Improvement Attended in The Fiscal Year

In an effort to strengthen operational capabilities, the Company provides support to Investment Risk Management and Strategic Projects Committee to improve relevant knowledge and competencies. The purpose of this step is so that the role of the Investment Risk Management and Strategic Projects Committee after has participated in a number of competency development programs, can be more effective in supporting the management carried out by the Board of Directors. During 2024 as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Muhamad Abdi (SVP Risk Management Division)	Sertifikasi Certification	<i>Certified Corporate Risk Manager</i>	Oktober 2024 October 2024	BPKP
	Pelatihan Training	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko ke X 10th National Conference of Risk Management Professionals	13-14 Desember 2024 December 13-14, 2024	LSPMR
	Board Briefing Manajemen Risiko Risk Management Board Briefing	Optimalisasi Peran Three Lines Model dalam rangka Menumbuhkan Budaya Sadar Risiko Optimizing the Role of Three Lines Model in Developing a Risk-Aware Culture	14 Oktober 2024 October 14, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
	Seminar	Forum Manajemen Risiko untuk Manajer Proyek Risk Management Forum for Project Managers	20 Desember 2024 December 20, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Ashuri (Senior Vice President – Finance Division)	Workshop	<i>Workshop Assesment GCG</i>	14 Agustus 2024 August 14, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Andie Hermawan (Senior Vice President – Legal Division)	Sertifikasi Certification	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	31 Oktober 2024 – 31 Oktober 2026 October 31, 2024 – October 31, 2026	LSPMR
Agus Prasetyo (Senior Manager of Contract and Claim Management – Legal Division)	Pelatihan Training	Pengembangan Kapabilitas Manajer Madya Middle Manager Capability Development	20 Desember 2024 December 20, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Muhammad Rifai Afif (Senior Manager of Joint Operation – Finance Division)	Pelatihan Training	Manajemen Umum Dana Pensiun Pension Fund General Management	12 – 13 Februari 2024 February 12-13, 2024	ADPI
		Manajemen Risiko Dana Pensiun Pension Fund Risk Management	19 Februari 2024 February 19, 2024	ADPI
		Masa Persiapan Purnabakti Angkatan 10 Retirement Preparation Period Batch 10	13-16 Februari 2024 February 13-16, 2024	Internal WIKA
Awalia Rahmawati (Senior Manager of Strategic Risk Management – Risk Management Division)	Pelatihan Training	"Live Webinar GIRMA :“Standarisasi Risk Maturity Index BUMN “-Juknis (SK-8/DKU.MBU/12/2023” "GIRMA Live Webinar: "SOE Risk Maturity Index Standardization" - Technical Guidelines (SK-8/DKU.MBU/12/2023"	12 Januari 2024 January 12, 2024	GIRMA LSPMR
	Board Briefing Manajemen Risiko Risk Management Board Briefing	Optimalisasi Peran Three Lines Model dalam rangka Menumbuhkan Budaya Sadar Risiko Optimizing the Role of Three Lines Model in Developing a Risk-Aware Culture	14 Oktober 2024 October 14, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
	Pelatihan Training	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko ke X 10th National Conference of Risk Management Professionals	13-14 Desember 2024 December 13-14, 2024	LSPMR
	Seminar	Forum Manajemen Risiko untuk Manajer Proyek Risk Management Forum for Project Managers	20 Desember 2024 December 20, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Aries Fakhrial (Senior Manager of Operation Risk Management – Risk Management Division)	Board Briefing Manajemen Risiko Risk Management Board Briefing	Optimalisasi Peran Three Lines Model dalam rangka Menumbuhkan Budaya Sadar Risiko Optimizing the Role of Three Lines Model in Developing a Risk-Aware Culture	14 Oktober 2024 October 14, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
	Sertifikasi	CRMP	November 2024 November 2024	LSPMR
	Pelatihan Training	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko LSPMR ke X 10th National Conference of Risk Management Professionals	12-13 Desember 2024 December 13-14, 2024	LSPMR
Agung Setiyono (Senior Manager of Finance Risk Management – Risk Management Division)	Board Briefing Manajemen Risiko Risk Management Board Briefing	Optimalisasi Peran Three Lines Model dalam rangka Menumbuhkan Budaya Sadar Risiko Optimizing the Role of Three Lines Model in Developing a Risk-Aware Culture	14 Oktober 2024 October 14, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
	Pelatihan Training	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko LSPMR ke X 10th National Conference of Risk Management Professionals	12-13 Desember 2024 December 13-14, 2024	LSPMR
	Seminar	Forum Manajemen Risiko untuk Manajer Proyek Risk Management Forum for Project Managers	20 Desember 2024 December 20, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Dwi Susanto (Senior Manager of Project Control – Risk Management Division)	Board Briefing Manajemen Risiko Risk Management Board Briefing	Optimalisasi Peran Three Lines Model dalam rangka Menumbuhkan Budaya Sadar Risiko Optimizing the Role of Three Lines Model in Developing a Risk-Aware Culture	14 Oktober 2024 October 14, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
	Seminar	Forum Manajemen Risiko untuk Manajer Proyek Risk Management Forum for Project Managers	20 Desember 2024 December 20, 2024	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis dalam Rapat Tersebut

Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis adalah bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang terkait dengan investasi dan proyek strategis dipahami, dievaluasi, dan dikelola secara efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko investasi dan proyek strategis dilakukan dengan cara yang terkoordinasi dan efektif, serta sesuai dengan tujuan dan kebijakan organisasi secara keseluruhan. Dalam hal proyek dengan kategori Non Green Lane pengusul inisiatif proyek diwajibkan melakukan paparan dengan kategori proyek besar dan mega kepada Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis harus dihadiri setidaknya 50% dari anggota atau minimal oleh 3 (tiga) fungsi.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis

Sepanjang tahun 2024, rapat Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	Maret 2024 March 2024	Perolehan Proyek RDF Plant Rorotan, Jakarta Acquisition of RDF Plant Rorotan Project, Jakarta
2	Mei 2024 May 2024	Perolehan Proyek Rediversion MWRD Acquisition of MWRD Rediversion Project
3	Juni 2024 June 2024	Perolehan Proyek Revitalisasi Dermaga Gospier Surabaya Acquisition of Gospier Surabaya Pier Revitalization Project
4	Juli 2024 July 2024	Perolehan Proyek KIPP : Jalan Kawasan Hankam dan Ling Acquisition of KIPP Project: Hankam and Ling Area Road
5	Juli 2024 July 2024	Perolehan Proyek EPC Coal Handling TLS 6 & TLS 7 Acquisition of EPC Coal Handling TLS 6 & TLS 7 Project

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Attendance							
		SVP RMD	SVP Legal	SVP Finance	SM CCM	SM SFP	SM SRM	SM OIRM	SM PC
1	Maret 2024 March 2024	v	v	v	v	v	v	v	x
2	Mei 2024 May 2024	v	v	v	v	v	x	v	x
3	Juni 2024 June 2024	v	v	v	v	v	x	v	x
4	Juli 2024 July 2024	v	v	v	v	v	x	v	x
5	Juli 2024 July 2024	v	v	v	v	v	v	v	x
Jumlah Rapat Number of Meetings		5	5	5	5	5	5	5	5
Jumlah Kehadiran Number of Attendance		5	5	5	5	5	2	5	0
% Kehadiran % of Attendance		100%	100%	100%	100%	100%	40%	100%	0%

Policy and Frequency of Investment Risk Management and Strategic Project Committee Meetings and Level of Attendance of Committee Members at the Meetings

The holding of Investment and Strategic Project Risk Management Committee meeting aims to ensure that the risks associated with investments and strategic projects are understood, evaluated, and managed effectively. This is important to ensure that the investment and strategic project risks is managed in a coordinated and effective manner, as well as in accordance with the overall goals and policies of the organization. In the case of projects with the Non-Green Lane category, the project initiative proposer is required to make a presentation with the large and mega project category to the Investment and Strategic Project Risk Management Committee which must be attended by at least 50% of the members or at least 3 (three) functions.

Frequency of Meetings and Level of Attendance of Investment Risk Management and Strategic Project Committee

Throughout 2024, Investment Risk Management and Strategic Projections Committee held 5 (five) meetings, with the attendance level and meeting agenda as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis pada Rapat

Recapitulation of Attendance of Investment Risk Management and Strategic Project Committee at the Meetings

Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis Investment Risk Management and Strategic Project Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Senior Vice President – Risk Management Division	5	5	100%
Senior Vice President – Finance Division	5	5	100%
Senior Vice President – Legal Division	5	5	100%
Senior Manager of Contract and Claim Management – Legal Division	5	5	100%
Senior Manager of Joint Operation – Finance Division	5	5	100%
Senior Manager of Strategic Risk Management – Risk Management Division	5	5	100%
Senior Manager of Operation Risk Management – Risk Management Division	5	5	100%
Senior Manager of Finance Risk Management – Risk Management Division	5	5	100%
Senior Manager of Project Control – Risk Management Division	5	5	100%

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis pada Tahun Buku

Brief description on duties implementation of investment risk management and strategic projections in the fiscal year

Pada tahun 2024, Komite Manajemen Risiko Investasi dan Proyek Strategis telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya melalui langkah-langkah berikut:

In 2024, Investment Risk Management and Strategic Projects Committee has carried out its roles and responsibilities to the best of its ability through the following steps:

1. Memberikan rekomendasi atas Pengguna Jasa untuk proyek besar dan mega (NR I);
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kajian Proyek Non Green Lane, Strategis dan investasi WIKA, untuk proyek besar dan mega (NR II);
3. Memutuskan proyek masuk kategori Pre Financing atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan;
4. Melakukan review dan persetujuan untuk seluruh proyek konstruksi luar negeri, dikarenakan masuk ke dalam kategori Proyek Non Green Lane sehingga memerlukan Nota Rekomendasi Tahap II.

1. Provide recommendations for Service Users for large and mega projects (NR I);
2. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the study of Non-Green Lane, Strategic and investment Projects of WIKA's, for large and mega projects (NR II);
3. Decide whether the project is in the Pre-Financing category or not in accordance with the regulations applicable in the Company;
4. Conduct reviews and approvals for all overseas construction projects, because they are in the Non-Green Lane Project category and require a Phase II Recommendation Note.

FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN

ANTI-BRIBERY COMPLIANCE FUNCTION

Untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas operasional, Perusahaan mendirikan Fungsi Kepatuhan Anti-Penyuapan yang memiliki peran penting dalam mengelola dan mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) di lingkungan perusahaan.

To strengthen operational efficiency and effectiveness, the Company established an Anti-Bribery Compliance Function that has an important role in managing and optimizing the implementation of Anti-Bribery Management System (ABMS) within the Company.

Struktur dan Keanggotaan Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan

Structure and Membership of AntiBribery Compliance Function

Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan dalam struktur organisasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk berada di bawah pengawasan Direksi, sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 26/DK/WIKA/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Struktur Organisasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Adapun, susunan anggota Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan adalah sebagai berikut:

The Anti-Bribery Compliance Function in the organizational structure of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is under the supervision of Board of Directors, in accordance with the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 26/DK/WIKA's/2023 dated March 31, 2023 concerning Organizational Structure of SNI ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Meanwhile, the membership composition of Anti-Bribery Compliance Function is as follows:

No.	Susunan Keanggotaan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan Membership Composition of Anti-Bribery Compliance Function		Nama Pejabat Official Name
1	Ketua Chairman	BOD - 1 yang membawahi unit Corporate Secretary BOD – 1 which oversees the Corporate Secretary unit	Mahendra Vijaya
		BOD – 2 yang membawahi fungsi GCG BOD – 2 which oversees the GCG function	Yuherni Sisdi Rachmiyati*
		BOD – 2 yang membawahi fungsi Legal Litigasi BOD – 2 which oversees the Legal Litigation function	Tegas Djuni Prakoso*
2	Anggota Member	BOD – 2 dari fungsi Internal Auditor (SMAP) BOD – 2 of the Internal Auditor function (SMAP)	Ahmad Amiriansjah Pabittei
		BOD – 2 yang membawahi fungsi Kepatuhan Pegawai – Human Capital BOD – 2 which oversees the Employee Compliance – Human Capital function	Wisma Ubayaji
		BOD – 2 yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Strategis BOD – 2 which oversees the Strategic Risk Management function	Awalia Rahmati

*) Pensiun di tanggal 11 Juni 2025 | Retired on June 11, 2025

*) Pensiun di tanggal 17 Juni 2025 | Retired on June 17, 2025

Profil dan Sertifikasi Anggota Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

Profil masing-masing anggota Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi. Seluruh anggota Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan telah memenuhi sertifikasi yang ditetapkan.

Ketentuan Masa Jabatan

Jabatan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan bersifat *ex-officio* di mana memiliki masa jabatan yang sejalan dengan periode penjabatannya di posisi yang dimaksud. Sehingga jika terdapat pergantian anggota, maka anggota yang ditunjuk juga akan berakhir masa jabatannya.

Pernyataan Independensi Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

Setiap Anggota FKAP telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas bersama dengan seluruh Pegawai PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk yang menyatakan sebagai berikut:

- Berkomitmen untuk berperan secara aktif untuk mewujudkan Perusahaan yang bersih dan berintegritas serta mendukung praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (*antifraud*) serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dalam menjalankan tugas jabatan;
- Tidak akan menerima atau memberi sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam menjalankan tugas jabatan;
- Bersikap transparan, jujur, objektif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatan;
- Berkomitmen untuk menghindari tindakan-tindakan yang mengandung benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan pedoman benturan kepentingan dalam menjalankan tugas jabatan;
- Memberikan contoh mengimplementasikan dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas jabatan, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama rekan kerja di lingkungan kerja secara konsisten;
- Berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan memiliki iklim kerja yang harmonis dengan perilaku insan WIKA yang saling menghormati, bebas diskriminasi,

Profile and Certification of Members of Anti-Bribery Compliance Function

The profile of each member of Anti-Bribery Compliance Function can be seen in the discussion of the Board of Directors Profile. All members of Anti-Bribery Compliance Function have fulfilled the specified certification.

Term of Office

The position of Anti-Bribery Compliance Function is *ex-officio* and has a term of office that is in line with the period of office in the position in question. Therefore, if there is a change of member, the appointed member's term of office will also end.

Anti-Bribery Compliance Function Statement of Independence

Each Member of FKAP has signed an Integrity Pact together with all PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk's employees which states as follows:

- Committed to playing an active role in creating a company that is cleanR and has integrity and supports anti-money laundering and terrorism financing practices, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud and does not involve oneself in disgraceful acts in carrying out their duties;
- Will not accept or give anything, either directly or indirectly, in the form of bribes, gifts, assistance or other forms, which are not in accordance with applicable regulations, in carrying out their duties;
- Be transparent, honest, objective and responsible in carrying out their duties;
- Committed to avoiding actions that contain conflicts of interest in accordance with the provisions of conflict of interest guidelines in carrying out their duties;
- Provide an example of consistently implementing and maintaining compliance with laws and regulations in carrying out job duties, especially for employees who are under my supervision and fellow colleagues in the work environment;
- Committed to creating a work environment that is safe, comfortable, and has a harmonious work climate with behavior of WIKA's employees that respects each other, is free from

pengucilan atau pembatasan, melecehkan, perundungan, dan berbagai bentuk *harassment* lainnya sesuai dengan *Respectful Workplace Policy* di lingkungan Perusahaan;

7. Akan menyampaikan informasi dalam hal terjadi penyimpangan integritas kepada Tim Kepatuhan melalui portal *whistleblowing system* (wbs.WIKA.co.id) serta turut menjaga kerahasiaan materi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
8. Bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku apabila terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran atas hal-hal tersebut di atas.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah
 - a. Memberi arahan kepada Manajemen Puncak agar implementasi SMAP berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
 - b. Memberi arahan terkait kebijakan tata kelola anti penyuapan yang diperlukan saat implementasi SMAP agar sesuai standar SMAP.
 - c. Mendukung penegakan ketentuan tata kelola anti penyuapan di Perusahaan.
 - d. Melakukan pengawasan agar strategi dan tata kelola anti penyuapan Perusahaan sejalan dengan SMAP.
 - e. Melakukan pengawasan terhadap informasi menyangkut substansi dan operasi serta tata kelola anti penyuapan di Perusahaan, dan memberikan arahan kepada Manajemen Puncak secara berkala.
 - f. Melakukan pengawasan guna memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi tata kelola anti penyuapan, sumber daya terlokasikan dan ditugaskan dengan baik.
 - g. Melakukan pengawasan yang wajar terhadap penerapan, kecukupan dan keefektifan tata kelola anti penyuapan di Perusahaan oleh Manajemen Puncak.
 - h. Melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu agar implementasi SMAP di Perusahaan berjalan dengan baik.
2. Manajemen Puncak
 - a. Menetapkan ruang lingkup proses bisnis Perusahaan yang akan dilakukan standardisasi SMAP.
 - b. Menetapkan dan menyetujui kebijakan yang diperlukan saat implementasi SMAP.
 - c. Memastikan tata kelola anti penyuapan, termasuk sasaran, peraturan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup dalam rangka mengatasi risiko penyuapan pada Perusahaan dan sesuai dengan SMAP.
 - d. Memastikan integrasi persyaratan SMAP ke dalam proses bisnis Perusahaan.
 - e. Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dan tata kelola anti penyuapan.
 - f. Mengomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan SMAP.
 - g. Memastikan tata kelola anti penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sarannya.
 - h. Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan tata kelola anti penyuapan.

discrimination, exclusion or restrictions, harassment, bullying and various other forms of harassment in accordance with the *Respectful Workplace Policy* within the Company;

7. Will convey information in the event of a violation of integrity to the Compliance Team via the whistleblowing system portal (wbs.WIKA.co.id) and also maintain the confidentiality of material regarding reported regulatory violations;
8. Willing to accept the consequences in accordance with the applicable rules and regulations if it is proven that there has been a deviation or violation of the things mentioned above.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of Anti-Bribery Compliance Function are as follows:

1. Steering Committee
 - a. Providing guidance to Top Management to ensure that the implementation of SMAP proceeds according to the established standards.
 - b. Providing guidance regarding anti-bribery governance policies during the implementation of SMAP to meet SMAP standards.
 - c. Supporting the enforcement of anti-bribery governance provisions within the Company.
 - d. Conducting oversight to ensure that the Company's anti-bribery strategy and governance are in line with SMAP.
 - e. Monitoring information regarding the substance and operations as well as anti-bribery governance in the Company, and providing periodic guidance to Top Management.
 - f. Carrying out supervision to ensure the availability of adequate and appropriate resources for antibribery governance operations, to ensure that resources are allocated and assigned properly.
 - g. Conducting reasonable oversight on the implementation, adequacy and effectiveness of anti-bribery governance in the Company by Top Management.
 - h. Taking any other actions deemed necessary to ensure successful implementation of SMAP within the Company.
2. Top Management
 - a. Establishing the scope of the Company's business processes to be standardized under SMAP.
 - b. Establishing and approving policies required during the implementation of SMAP.
 - c. Ensuring that anti-bribery governance, including objectives, regulations, policies, and established procedures, is sufficiently implemented, maintained, and reviewed to address bribery risks in the Company and comply with SMAP.
 - d. Ensuring the integration of SMAP requirements into the Company's business processes.
 - e. Providing adequate and appropriate resources for effective operations and anti-bribery governance.
 - f. Internally communicating the importance of effective anti-bribery management and compliance with SMAP requirements.
 - g. Ensuring that anti-bribery governance is appropriately designed to achieve its objectives.
 - h. Directing and supporting personnel to contribute to the effectiveness of anti-bribery governance.

- i. Membangun budaya anti penyuapan di lingkungan Perusahaan.
 - j. Memastikan konsistensi pelaksanaan tata kelola anti penyuapan dan melakukan peningkatan proses bisnis berkelanjutan (*continuous improvement*).
 - k. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinan dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggungjawab mereka.
 - l. Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan aktual.
 - m. Memastikan tidak ada pegawai Perusahaan yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner, terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dan tata kelola anti penyuapan, atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun menolak ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis Perusahaan (kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini).
 - n. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Pengarah mengenai substansi dan operasi serta tata kelola anti penyuapan dan atas tuduhan serius atau penyuapan terstruktur.
 - o. Memastikan independensi Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
 - p. Melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu agar implementasi SMAP di Perusahaan berjalan dengan baik.
3. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)
- a. Bertindak mewakili untuk dan atas nama Perusahaan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan dalam menangani laporan penyuapan dan melakukan investigasi, dalam melaksanakan tindak lanjut dari laporan adanya penyuapan serta memiliki akses langsung dan cepat ke Dewan Pengarah.
 - b. Mengawasi penyusunan rancangan ketentuan terkait dengan SMAP dan penerapan SMAP Perusahaan.
 - c. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk pegawai atas SMAP dan isu terkait penyuapan.
 - d. Memastikan SMAP Perusahaan sesuai dengan persyaratan standar ISO 37001 :2016.
 - e. Melaporkan kinerja SMAP kepada Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak.
 - f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan bagian hukum.
 - g. Melakukan pembaharuan (*update*) dokumen dan prosedur dalam implementasi SMAP.
 - h. Menilai secara berkelanjutan terkait efektifitas penerapan SMAP dalam mengelola risiko penyuapan yang dihadapi Perusahaan.
 - i. Menerima informasi terkait dugaan insiden/tindakan penyuapan perkembangan proses investigasi dan hasil audit investigasi terkait penyuapan yang sedang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern serta hasil audit internal SMAP dari Tim Audit Internal SMAP dan melakukan tindak lanjut perbaikan.
- i. Building an anti-bribery culture within the Company.
 - j. Ensuring consistency in implementing anti-bribery governance and continuous business process improvement.
 - k. Supporting other relevant management roles to demonstrate leadership in preventing and detecting bribery within their areas of responsibility.
 - l. Encouraging the use of reporting procedures for suspected and actual bribery.
 - m. Ensuring that no Company employees suffer retaliation, discrimination, or disciplinary action for making good faith reports or based on reasonable beliefs of bribery violations or suspected violations and anti-bribery governance, or for refusing to engage in bribery even if refusal may result in loss of Company business (unless there is individual participation in such violations).
 - n. Regularly reporting to the Board of Directors on the substance and operations of anti-bribery governance and serious allegations or structured bribery.
 - o. Ensuring the independence of the Anti-Bribery Compliance Function.
 - p. Taking any other necessary actions to ensure successful implementation of SMAP within the Company.
3. Anti-Bribery Compliance Function (FKAP)
- a. Acting on behalf of and representing the Company in handling bribery reports and conducting investigations, in carrying out follow-up actions from reports of bribery, and having direct and prompt access to the Board of Directors.
 - b. Overseeing the drafting of provisions related to SMAP and the implementation of the Company's SMAP.
 - c. Providing guidance and instructions to employees on SMAP and bribery-related issues.
 - d. Ensuring that the Company's SMAP complies with the requirements of ISO 37001:2016 standards.
 - e. Reporting on the performance of SMAP to the Board of Directors and Top Management.
 - f. Submitting task implementation reports to the Board of Directors with a copy to the legal department.
 - g. Updating documents and procedures in the implementation of SMAP.
 - h. Continuously assessing the effectiveness of SMAP implementation in managing bribery risks faced by the Company.
 - i. Receiving information regarding alleged incidents/actions of bribery, the progress of investigations, and the results of bribery-related audit investigations conducted by the Internal Audit Unit, as well as the results of internal audits of SMAP from the SMAP Internal Audit Team, and taking follow-up actions for improvement.

Pedoman Kerja/Piagam Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

Perusahaan telah menetapkan pedoman kerja untuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 26/DK/WIKA/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Struktur Organisasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pedoman ini mencakup pengaturan mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam perusahaan.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Telah Diikuti dalam Tahun Buku

Dalam upaya memperkuat kemampuan operasional, Perseroan memberikan dukungan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan untuk meningkatkan pengetahuan serta kompetensi yang relevan. Tujuan dari langkah ini adalah agar peran Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi. Selama tahun 2024, Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan telah berpartisipasi dalam sejumlah program pengembangan kompetensi, yang meliputi:

Work Guidelines/Charter for AntiBribery Compliance Function

The Company has established a work guideline for Anti-Bribery Compliance Function which was approved through the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 26/DK/WIKA's/2023 dated March 31, 2023 concerning Organizational Structure of SNI ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. This guideline includes arrangements regarding the duties and responsibilities that must be carried out by the Anti-Bribery Compliance Function within the Company.

Training and/or Competency Improvement Attended in The Fiscal Year

In an effort to strengthen operational capabilities, the Company provides support for Anti-Bribery Compliance Function to improve relevant knowledge and competencies. The purpose of this step is to enable the Anti-bribery Compliance Function to play a more effective role in supporting the management carried out by the Board of Directors. During the year, Anti-Bribery Compliance Function has participated in a number of competency development programs, which include:

Nama Name	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer by
Mahendra Vijaya	Pelatihan Training	Narasumber & Petugas Sosialisasi/ <i>Refreshment</i> Tata kelola SMAP – WBS – Pengendalian Gratifikasi Resource Persons and Socialization Officers/ Refreshment SMAP Governance – WBS – Gratification Control	Via Zoom Online, 27 September 2024 Via Zoom Online, September 27, 2024	WIKA Corsec
	Pelatihan Training	<i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>	WIKA Tower Kav 10, 8 –9 Oktober 2024 WIKA Tower Kav 10, October 8-9, 2024	BPKP
*Yuherni Sisdi Rachmiyati	Pelatihan Training	Narasumber & Petugas Sosialisasi/ <i>Refreshment</i> Tata kelola SMAP – WBS – Pengendalian Gratifikasi Resource Persons and Socialization Officers/ Refreshment SMAP Governance – WBS – Gratification Control	Via Zoom Online, 27 September 2024 Via Zoom Online, September 27, 2024	WIKA Corsec
	Pelatihan Training	<i>Panel Discussion Women Leadership</i> di lingkungan Grup BUMN Panel Discussion on Women Leadership in SOE Group Environment	Ballroom Graha Pertamina, 4 Oktober 2024 Graha Pertamina Ballroom, October 4, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOE
**Tegas Djuni Prasongko	Seminar Nasional National Seminar	Seminar Nasional Audit Internal National Seminar of Internal Audit	Bali, 6 –7 Desember 2023 Bali, December 6-7, 2023	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation

Nama Name	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer by
Ahmad Amiriansjah Pabittei	Pelatihan Training	<i>Personel Power "Be Your Best With NLP"</i>	The Bellezza Permata Hijau, 7-8 Juni 2024 The Bellezza Permata Hijau, June 7-8, 2024	IndoNLP
	Pelatihan Training	<i>Managing with NLP</i>	The Bellezza Permata Hijau, 31 Agustus 2024 – 1 September 2024 The Bellezza Permata Hijau, August 31, 2024 – September 1, 2024	IndoNLP
	Pelatihan Training	<i>NLP Certification Program</i>	The Bellezza Permata Hijau, 6-8 Agustus 2024 The Bellezza Permata Hijau, August 6-8, 2024 WIKAsatrian,	IndoNLP
	Pelatihan Training	<i>Awareness ISO 22301:2019</i>	WIKAsatrian, 22-23 Agustus 2024 August 22-23, 2024	Sucofindo
Wisma Ubayaji	Seminar Seminar	<i>Sharing Session Legal & Mankom</i> <i>Sharing Session Legal & Mankom</i>	Online Zoom, 23 Agustus 2024 Online Zoom, August 23, 2024	Legal
	Pelatihan Training	<i>Awareness ISO 22301:2019</i>	WIKAsatrian, 22-23 Agustus 2024 WIKAsatrian, August 22-23, 2024	Sucofindo
Awalia Rahmati	Pelatihan Training	<i>Industrial Relation Talk Series #1</i>	WIK Tower Kav 10, 5 November 2024 WIK Tower Kav 10, November 5, 2024	
	Seminar Nasional National Seminar	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X <i>X National Conference of Risk Management Professionals</i>	Renaissance Hotel Nusa Dua Resort, Bali 12 – 13 Desember 2024 Renaissance Hotel Nusa Dua Resort, Bali December 12 – 13, 2024	LSPMR

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dan Tingkat Kehadiran Anggota Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam Rapat tersebut

Sepanjang tahun 2024, Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan telah melakukan 5 (lima) kali Rapat koordinasi yang meliputi 2 (dua) kali Rapat Internal FKAP, 1 (satu) kali Rapat tinjauan FKAP, 1 (satu) kali Rapat Tinjauan Manajemen Puncak dan 1 (satu) kali Rapat Tinjauan dengan Dewan Pengarah.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

Sepanjang tahun 2024, rapat Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Policy and Frequency of Anti-Bribery Compliance Function Meetings and Level of Attendance at the Meetings

Throughout 2024, the Anti-Bribery Compliance Function has held 5 (five) coordination meetings, including 2 (two) FKAP Internal Meetings, 1 (one) FKAP Review Meeting, 1 (one) Top Management Review Meeting and 1 (one) Review Meeting with the Board of Directors.

Frequency of Meetings and Level of Attendance of Anti-Bribery Compliance Function

During 2024, Anti-Bribery Compliance Function held 5 (five) meetings with the attendance level and meeting agenda as follows:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	5 Maret 2024 March 5, 2024	Tinjauan Rencana Penerapan SMAP (Sertifikasi ISO 37001:2016) ke Seluruh Anak Perusahaan Review of SMAP Implementation Plan (ISO 37001:2016 Certification) to All Subsidiaries
2	28 Mei 2024 May 28, 2024	1. Tinjauan Kecukupan Identifikasi Risiko Penyusunan dari masing-masing Divisi yang dibuat (BRIRADC) 2. Tinjauan Realisasi Program Kerja Divisi 1. Review of Bribery Risk Identification Adequacy from each Division created (BRIRADC) 2. Review of Division Work Program Realization
3	19 September 2024 September 19, 2024	1. Tindak lanjut atas notulen tinjauan manajemen sebelumnya dan status 2. Perubahan atas Isu internal dan eksternal yang relevan, masalah-masalah strategis saat ini dan ke depan serta rekomendasi tindak lanjut 3. Sasaran SMAP 4. Kebutuhan Harapan Stakeholder 5. Laporan tentang Kinerja SMAP 6. Laporan penyusunan dari WBS dan penyelidikan / investigasi yg telah dilakukan 7. Audit Internal 8. Audit Eksternal (Sertifikasi) 1. Follow-up on previous management review minutes and status 2. Changes in relevant internal and external issues, current and future strategic issues and follow-up recommendations 3. SMAP Targets 4. Stakeholder Expectations Needs 5. Report on SMAP Performance 6. Bribery reports from WBS and investigations that have been conducted 7. Internal Audit 8. External Audit (Certification)
4	29 Oktober 2024 October 29, 2024	Update Implementasi SMAP kepada Manajemen Puncak SMAP Implementation Update to Top Management
5	28 November 2024 November 28, 2024	Update Implementasi SMAP kepada Dewan Pengarah SMAP Implementation Update to the Board of Directors

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Attendance					
		Mahendra Vijaya	Yuherni Siswi Rachmiyati	Tegas Djuni Prasongko	Ahmad Amiriansjah Pabittei	Wisma Ubayaji	Awalia Rahmawati
1	5 Maret 2024 March 5, 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	28 Mei 2024 May 28, 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	19 Sept 2024 Sept. 19, 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	28 Nov 2024 Nov 28, 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	29 Okt 2024 Oct 29, 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jumlah Rapat Number of Meetings		5	5	5	5	5	5
Jumlah Kehadiran Total Attendance		5	5	5	5	5	5
% Kehadiran % Attendance		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rekapitulasi Kehadiran Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan pada Rapat

Recapitulation of Attendance of Anti-Bribery Compliance Function at Meetings

Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan Compliance and Anti-Bribery Function	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Mahendra Vijaya	5	5	100%
Yuherni Siswi Rachmiyati	5	5	100%
Tegas Djuni Prasongko	5	5	100%
Ahmad Amiriansjah Pabittei	5	5	100%
Wisma Ubayaji	5	5	100%
Awalia Rahmati	5	5	100%

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan pada Tahun Buku

Pada tahun 2024, Fungsi Kepatuhan terhadap Anti Penyuapan telah menjalankan perannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem
 - a. Pelatihan *awareness* ISO 37001:2016
 - b. Sosialisasi SMAP ke internal Perseroan (Kebijakan SMAP, WBS, Pengendalian Gratifikasi)
 - c. Pemantauan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai sesuai ruang lingkup SMAP
 - d. Sosialisasi SMAP kepada vendor
 - e. Sosialisasi SMAP kepada *owner*/pelanggan
 - f. Penetapan alokasi tanggung jawab untuk penerapan SMAP (Tim FKAP dan penanggung jawab dokumen Divisi)
 - g. Pemantauan keefektifan alokasi tanggung jawab untuk penerapan SMAP
 - h. Pemutakhiran BRIRADC dan penetapan mitigasi risiko penyuapan (untuk risiko diatas batas rendah)
 - i. Pemantauan keefektifan identifikasi risiko penyuapan dan pengendalian dalam BRIRADC seluruh Divisi
 - j. Pelaksanaan uji kelayakan personil
 - k. Pemantauan hasil uji kelayakan personil
 - l. Pelaksanaan uji kelayakan vendor
 - m. Pemantauan hasil uji kelayakan vendor
 - n. Evaluasi kecukupan sumberdaya dan kompetensi auditor internal SMAP
 - o. Pelaksanaan Audit Internal SMAP
 - p. Rapat Tinjauan FKAP
 - q. Rapat Tinjauan Manajemen Puncak SMAP
 - r. Rapat Tinjauan Dewan Pengarah terkait SMAP
 - s. Pemutakhiran Sasaran dan Program SMAP dalam RKAP Tahunan
 - t. Pemutakhiran Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur SMAP
 - u. Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 37001:2016 oleh Sucofindo
 - v. Sertifikasi
2. Kepatuhan terhadap Sistem
 - a. Pemantauan *Whistle Blowing System*
 - b. Pemantauan laporan kinerja anti penyuapan seluruh Divisi
 - c. Pemantauan insiden terkait *Fraud* (tanpa efek merugikan), melalui pelaporan formal maupun informal
 - d. Pemantauan/Evaluasi pemenuhan perundangan terkait SMAP
 - e. Pemantauan budaya kepatuhan di internal pegawai
 - f. Pemantauan Hasil Audit dari Akuntan Publik
3. Peningkatan Penerapan Sistem/Program Jangka Panjang
 - a. Pengembangan aplikasi WBS Terintegrasi dengan KPK
 - b. Implementasi SMAP di anak perusahaan
 - c. Integrasi Aplikasi WBS dengan anak perusahaan

Brief Description on Duties Implementation of Anti-Bribery Compliance Function in the Fiscal Year

By 2024, Anti-Bribery Compliance Function has performed its role with the following steps:

1. System Implementation
 - a. ISO 37001:2016 awareness training
 - b. Socialization of SMAP to the Company's internal (SMAP Policy, WBS, Gratification Control)
 - c. Monitoring the signing of integrity pacts by all employees in accordance with the scope of SMAP
 - d. Socialization of SMAP to vendors
 - e. Socialization of SMAP to owners/customers
 - f. Assignment of responsibility allocation for SMAP implementation (FKAP Team and person in charge of Division documents)
 - g. Monitoring the effectiveness of responsibility allocation for SMAP implementation
 - h. Updating of BRIRADC and determination of bribery risk mitigation (for risks above the low limit)
 - i. Monitoring the effectiveness of bribery risk identification and control in BRIRADC across Divisions
 - j. Implementation of personnel due diligence
 - k. Monitoring of personnel due diligence results
 - l. Implementation of vendor due diligence
 - m. Monitoring of vendor due diligence results
 - n. Evaluation of the adequacy of resources and competence of SMAP internal auditors
 - o. Implementation of SMAP Internal Audit
 - p. FKAP Review Meeting
 - q. SMAP Top Management Review Meeting
 - r. SMAP-related Governing Board Review Meeting
 - s. Updating SMAP Goals and Programs in the Annual RKAP
 - t. Updating of SMAP Policies, Guidelines and Procedures
 - u. Implementation of ISO 37001:2016 External Audit by Sucofindo
 - v. Certification
2. Compliance with the System
 - a. Whistle Blowing System Monitoring
 - b. Monitoring of anti-bribery performance reports of all Divisions
 - c. Monitoring of Fraud-related incidents (without adverse effects), through formal and informal reporting
 - d. Monitoring/Evaluation of the fulfillment of SMAP related legislation
 - e. Monitoring of compliance culture in internal employees
 - f. Monitoring of Audit Results from Public Accountants
3. Improvement of System Implementation/Long-term Programs
 - a. Development of WBS application Integrated with KPK
 - b. Implementation of SMAP in subsidiaries
 - c. Integration of WBS Application with subsidiaries

Organ Pendukung Direksi

Supporting Organs of Board of Directors



Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan dukungan Organ Pendukung yaitu *Corporate Secretary* dan Internal Audit. Kedua organ ini memiliki peran signifikan dalam mendukung pengelolaan serta penerapan keputusan yang telah dirumuskan oleh Direksi. Selain itu, kedua organ tersebut turut menyediakan dukungan operasional yang diperlukan untuk memastikan jalannya pengelolaan Perseroan secara efisien dan efektif.

CORPORATE SECRETARY

Citra positif Perseroan yang terbangun di lingkungan eksternal, mulai dari pemegang saham hingga regulator dan masyarakat luas, mencerminkan peran sentral *Corporate Secretary* dalam mendukung operasional Perseroan. Sebagai penghubung utama, *Corporate Secretary* memastikan kelancaran komunikasi antarorgan Perseroan, mempererat hubungan dengan para pemangku kepentingan, dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku. Proses pengangkatan, pemberhentian, serta penetapan tanggung jawab *Corporate Secretary* sepenuhnya menjadi bagian dari wewenang Direktur Utama.

Board of Directors carries out its duties and responsibilities with the support of Supporting Organs, namely *Corporate Secretary* and Internal Audit. These two organs play a significant role in supporting management and implementation of decisions formulated by Board of Directors. In addition, both organs also provide the necessary operational support to ensure efficient and effective management of the Company.

CORPORATE SECRETARY

The Company's positive image in the external environment, from shareholders to regulators and wider community, reflects the central role of *Corporate Secretary* in supporting the Company's operations. As the main liaison, *Corporate Secretary* ensures smooth communication between the Company's organs, strengthens relationships with stakeholders, and maintains the Company's compliance with applicable regulations. The process of appointing, dismissing, and determining the responsibilities of *Corporate Secretary* is fully within the authority of the President Director.

Dasar Hukum Pengangkatan *Corporate Secretary*

Kriteria dan mekanisme pengangkatan *Corporate Secretary* merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang *Corporate Secretary* Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.

Alur Pengangkatan/Pemberhentian *Corporate Secretary*

Pengangkatan dan pemberhentian *Corporate Secretary* dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Proses tersebut, termasuk pengangkatan, pergantian, maupun pemberhentian *Corporate Secretary*, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab

Corporate Secretary memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Berikut beberapa di antaranya:

1. Terlaksananya perumusan penyusunan dan evaluasi/*monitoring* perencanaan jangka pendek (RKAP) dan jangka panjang, kebijakan Perseroan, kebijakan pokok, anggaran Perseroan lingkup *Corporate Secretary*;
2. Terlaksananya publisitas Perseroan, komunikasi internal dan eksternal, protokoler, *branding*, *event* serta penerapan standar pelayanan pelanggan;
3. Terlaksana dan terbinanya hubungan serta komunikasi dengan para investor, regulator dan lembaga terkait lainnya;
4. Terselenggaranya pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian terhadap rencana/realisasi kegiatan umum antara lain: keanggotaan profesi, asosiasi, membership, perizinan operasi Perseroan, pengelolaan gedung kantor pusat, kendaraan, kebersihan serta akomodasi Direksi/Dewan Komisaris;
5. Terlaksananya pelayanan, bantuan, saran, dukungan, dan audit (*Support, Assist, Service, Advice* dan Audit/SASAA) di seluruh unit kerja/organ perusahaan lingkup *Corporate Secretary*;
6. Terlaksananya tertib administrasi, termasuk tapi tidak terbatas pada laporan bulanan, semesteran, dan tahunan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;
7. Terlaksananya upaya peningkatan mutu yang menjadi tanggung jawabnya melalui penerapan Sistem Manajemen WIKA;
8. Terlaksananya pembinaan fungsi di lingkungannya dan sumber daya manusia yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan arah perkembangan Perseroan;
9. Bertindak sebagai *coach* dan melakukan proses *coaching* secara aktif terhadap minimal personel satu level di bawahnya;
10. Melakukan proses penyiapan kader 'pengganti' (suksesi) pada level satu tingkat di bawahnya;
11. Terlaksananya manajemen risiko dalam setiap aktivitas pekerjaan di lingkungan kerjanya;
12. Terlaksananya pengendalian biaya usaha unit kerja.

Legal Basis of *Corporate Secretary* Appointment

The criteria and mechanism for appointing a *Corporate Secretary* refer to provisions contained in the OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning *Corporate Secretary* of Issuers or Public Companies and Ministry of SOEs Regulation No. PER 01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises, as amended by PER-09/MBU/2012.

Corporate Secretary Appointment/Dismissal Procedure

The appointment and dismissal of *Corporate Secretary* is made by President Director with the approval of Board of Commissioners. The process, including appointment, replacement and dismissal of *Corporate Secretary*, must be reported to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with applicable regulations.

Duties and Responsibilities

Corporate Secretary has a number of duties and responsibilities that play an important role in supporting the smooth operation of the Company. Here are some of them:

1. Formulation and evaluation/*monitoring* of short-term and long-term planning (RKAP), Corporate policies, basic policies, Corporate budgets within the scope of *Corporate Secretariat*;
2. Coordinating the Company's publicity, internal and external communications, protocols, branding, events and application of customer service standards.
3. Developing and building communication with investors, regulators and other relevant institutions.
4. Implementing, managing and controlling general activity plans/realization including: professional memberships, association membership, Company operational permits, management of head office building, vehicles, cleanliness and accommodation of Board of Directors/Board of Commissioners.
5. Services, assistance, facilities, support and audits (*Support, Assist, Service, Advice* and Audit/SASAA) in all work units/Company organs within the scope of the *Corporate Secretariat*;
6. Administering, including but not limited to monthly, semester and annual reports in accordance with the scope of its responsibilities.
7. Quality improvement efforts which are under its responsibility through the implementation of WIKA's Management System;
8. Implementing guidance function in the environment and Human Capital under its responsibilities in accordance with the Company's development direction.
9. Acting as a coach and conduct an active coaching process for personnel a minimum of one level below.
10. Preparing a 'successor' cadre for one level below.
11. Implementing risk management in all work activities.
12. Implementing business unit cost control.

Profil Pejabat Corporate Secretary

Corporate Secretary Profile



Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

Menjabat Sejak 14 Juni 2019
Served since June 14, 2019

Kewarganegaraan	Nationality
Indonesia	Indonesia
Usia	Age
48 tahun per 31 Desember 2024	48 years old as at December 31, 2024
Domisili	Domicile
DKI Jakarta, Indonesia	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Educational Background
S2 Bisnis, Jurusan Business Strategy, Universitas Bina Nusantara tahun 2014	S2 Bisnis, Jurusan Business Strategy, Universitas Bina Nusantara tahun 2014
Pengalaman Kerja	Work experience
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manager Komersial Proyek East West Highway Algeria C-1 (2008-2010) 2. Manager Proyek Motorway Algeria C-1 (2010-2012) 3. Manager Komersial dan Risiko Departemen Luar Negeri WIKA (2012-2013) 4. Manager Proyek Senayan Square Hotel Complex Structure Carpark (2013-2014) 5. Manager proyek Mydin Retail Mall Kuching Malaysia (2014-2015) 6. Manager Country Malaysia Area 2 Luar Negeri (2014-2018) 7. Manager Bidang Pemasaran & Quality Survey Area 2 Luar Negeri (2016-2018) 8. Manager Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lumut Balai Sumsel (2017-2018) 9. Manager Divisi 1 Wilayah 1 Timur Tengah (2018-2019) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Commercial Project Manager, East West Highway Algeria C-1 (2008-2010) 2. Project Manager Motorway, Algeria C-1 (2010-2012) 3. Overseas Department Commercial and Risk Manager, WIKA's (2012-2013) 4. Project Manager, Senayan Square Hotel Complex Structure Carpark (2013-2014) 5. Project Manager, Mydin Retail Mall Kuching Malaysia (2014-2015) 6. Country Manager, Malaysia Area 2 (2014-2018) 7. Marketing & Quality Survey Manager, area 2 (2016-2018) 8. Project Manager, Geothermal Power Plant, Lumut Balai Sumsel (2017-2018) 9. Division Manager 1 Region 1, Middle East (2018-2019)
Dasar Hukum Pengangkatan	Legal Basis for Appointment
Menjabat sebagai Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.01989/2022.	Appointed as Corporate Secretary based on Board of Directors Decree SK.02.01/A.DIR.01989/2022.
Sertifikasi	Certification
ISO 37001:2016	ISO 37001:2016

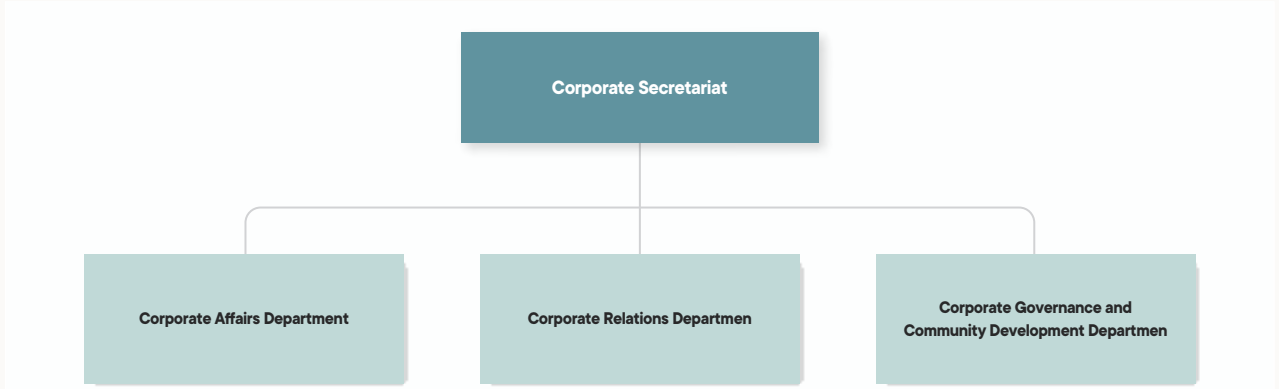
Struktur Organisasi *Corporate Secretary*

Struktur Organisasi *Corporate Secretariat* WIKA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.01.01/A.DIR.00009.O/2024 yang diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2024.

Corporate Secretary Organizational Structure

The Organizational Structure of WIKA's *Corporate Secretariat* is determined based on the Board of Directors Decree No. SK.01.01/A.DIR.01921/2022 issued on December 20, 2022.

Struktur Organisasi *Corporate Secretariat* Corporate Secretariat Organizational Structure



Pengembangan Kompetensi *Corporate Secretary*

Perseroan mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan *Corporate Secretary* yang relevan dengan operasional bisnis Perseroan. Dukungan ini bertujuan untuk memperkuat peran *Corporate Secretary* dalam mendukung pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2024, *Corporate Secretary* telah berpartisipasi dalam berbagai program pengembangan kompetensi, di antaranya:

Corporate Secretary Competency Development

The Company supports the *Corporate Secretary* to increase knowledge and competencies relevant to the Company's business operations. This aims to strengthen the role of *Corporate Secretary* in supporting the management of the Company carried out by Board of Directors. Throughout 2024, *Corporate Secretary* has participated in the following competency development programs:

Nama Name	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer by
Mahendra Vijaya (<i>Corporate Secretary</i>)	Pelatihan Training	Narasumber & Petugas Sosialisasi/ Refreshment Tata kelola SMAP – WBS – Pengendalian Gratifikasi Resource Persons and Socialization/ Refreshment Officers for SMAP Management – WBS – Gratification Control	Via Zoom Online, 27 September 2024 Via Zoom Online, September 27, 2024	WIKA Corsec
	Pelatihan Training	Internal Audit Capability Model (IACM)	WIKA Tower Kav 10, 8 –9 Oktober 2024 WIKA Tower Kav 10, October 8-9, 2024	BPKP

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas *Corporate Secretary* pada Tahun Buku

Sesuai dengan fungsinya, *Corporate Secretary* telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam membantu Direksi sepanjang tahun 2024 melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Fungsi Utama *Corporate Affairs*
Pada fungsi *Corporate Affairs*, *Corporate Secretary* telah melaksanakan antara lain:
 - a. Tersusunnya kebijakan Perusahaan dan kebijakan pokok serta anggaran Perusahaan lingkup hubunganmasyarakat, kesekretariatan dan umum;
 - b. Tersusunnya standar pelayanan dan penyajian informasi Perusahaan melalui media maupun hubungan antar lembaga;
 - c. Terlaksananya sebagai fungsi pusat informasi Perusahaan untuk umum yang berkaitan dengan bidanusaha/ aktivitas Perusahaan;

Brief Description of *Corporate Secretary* Duties Implementation in the Fiscal Year

In accordance with its functions, *Corporate Secretary* has carried out its duties and responsibilities in assisting Board of Directors throughout 2024 through the following activities:

1. Main Function of *Corporate Affairs*
In the *Corporate Affairs* function, the *Corporate Secretary* has carried out, among others:
 - a. Compilation of Company policies and main policies as well as corporate budgets in the scope of Public Relations, secretariat and general affairs;
 - b. Establishment of service standards and presentation of Company information through media and inter-institutional relations.
 - c. Implementation as a function of the Company's information center for the public related to the Company's business fields/ activities.

- d. Kendall administrasi dokumen masuk dan keluar Perusahaan, pelayanan kesekretariatan tingkat Perusahaan, upacara terkait dengan protokoler Perusahaan;
 - e. Terselenggaranya kesekretariatan dan umum secara efektif dan efisien;
 - f. Terlaksananya tugas-tugas keprotokoleran bagi pihak *intern* dan *ekstern*, acara-acara Perusahaan dan rapat Perusahaan, serta jasa pelayanan akomodasi;
 - g. Terlaksananya peredaran dokumen/surat-surat masuk/keluar secara tertib dan tepat waktu penyampaian kepada yang berkepentingan;
 - h. Terlaksananya pengetikan dan pengadaan surat-surat untuk kepentingan Perusahaan secara efektif dan efisien;
 - i. Terlaksananya pengarsipan dokumen-dokumen Perusahaan secara aman dan tertib;
 - j. Terlaksananya pelayanan dan penyediaan sarana kesekretariatan secara efektif dan efisien;
 - k. Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan koordinasi terhadap Sekretaris Direksi dan Sekretaris Unit Kerja untuk dapat mengoptimalkan dalam mendukung kegiatan operasional Direksi dan kegiatan di masing-masing Unit Kerja;
 - l. Terbinanya hubungan dengan pihak-pihak yang berkaitan secara efektif dan efisien dengan bidang tugasnya;
 - m. Terlaksananya pelayanan yang terkait dengan penyediaan alat tulis kantor (ATK), ruang rapat, konsumsi rapat, protokoler acara Perusahaan, *air conditioner* (AC), telepon, listrik, air bersih, lift, keamanan, dan ruang kerja;
 - n. Terlaksananya pelayanan dan penyediaan transportasi untuk Direksi, Komisaris, dan organ tingkat pusat;
 - o. Terlaksananya Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di tingkat kantor pusat;
 - p. Terlaksananya pelayanan, bantuan, saran, dukungan, dan audit (*Support, Assist, Service, Advice* dan *Audit/SASAA*) di seluruh unit kerja/organ Perusahaan lingkup sekretariat Perusahaan.
 - q. Terlaksananya tertib administrasi sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - r. Terlaksananya upaya peningkatan Mutu dan aspek legal yang menjadi tanggung jawabnya, melalui penerapan Sistem Manajemen WIKA;
 - s. Terlaksananya peningkatan dan pembinaan kompetensi *Human Capital* yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan arah perkembangan Perusahaan;
 - t. Melakukan proses penyiapan kader 'pengganti' (suksesi) pada level satu tingkat dibawahnya dan *Expert*;
 - u. Bertindak sebagai *Coach* dan melakukan proses *coaching* secara aktif terhadap minimal personil satu level dibawahnya;
 - v. Melakukan proses pembinaan terhadap profesionalitas/keahlian bagi personil yang memiliki sertifikasi keahlian;
 - w. Terlaksananya kepatuhan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Sistem Manajemen WIKA (SMW), Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), serta upaya peningkatan mutu dan *safety* di Unit Kerjanya.
2. Fungsi Utama *Corporate Relation Department*
Pada fungsi *Corporate Relation Department*, *Corporate Secretary* telah melaksanakan antara lain:
- a. Tersusunnya koordinasi pertemuan antara Direksi/ Komisaris/ Pemegang Saham dan arsip aktif terkait dengan dokumen hasil pertemuan antara Direksi/Komisaris/Pemegang Saham;
 - d. Administrative control of Company's incoming and outgoing documents, corporate-level secretarial services, ceremonies related to Company protocols;
 - e. Organizing the secretariat and general affairs effectively and efficiently;
 - f. Implementing protocol tasks for internal and external parties, assisting Board of Directors, corporate events and Company meetings, as well as coordinating accommodation and transportation services;
 - g. Implementation of circulation of incoming/outgoing documents/letters in an orderly and timely manner for delivery to interested parties;
 - h. Implementation of typing and procurement of letters for the interests of the Company effectively and efficiently.
 - i. Safe and orderly filing of Company operating permit documents;
 - j. Implementation of services and provision of secretarial facilities effectively and efficiently;
 - k. Implementation of coaching, development and coordination of Secretary of Board of Directors and Secretary of Work Unit to be able to optimize in supporting the operational activities of Board of Directors and Activities in each Work Unit.
 - l. Maintaining effective and efficient relationships with parties related to their field of work;
 - m. Implementation of services related to the provision of office stationery (ATK), meeting rooms, meeting supplies, company event protocols, air conditioning (AC), telephone, electricity, clean water, lifts, security and work space.
 - n. Implementation of services and provision of transportation for Directors, Commissioners, and organs at holding;
 - o. Implementation of Security Management System (SMP) at head office level;
 - p. Implementation of services, assistance, advice, support, and audits (*Support, Assist, Service, Advice* and *Audit/SASAA*) in all work units/organs of the Company within the scope of the corporate secretariat;
 - q. Implementation of orderly administration in accordance with their responsibilities;
 - r. Implementation of quality improvement efforts under their responsibility, through the implementation of WIKA's Management System;
 - s. Implementation of development functions in their environment and Human Capital, which is their responsibility in accordance with the direction of the Company's development;
 - t. Preparing a 'successor' cadre for one level below and expert;
 - u. Act as a Coach and actively conduct coaching processes for at least one level below personnel
 - v. Conduct coaching processes for professionalism/expertise for personnel who have expertise certification
 - w. Implementation of compliance with the Anti-Bribery Management System (SMAP), WIKA's Management System (SMW), Security Management System (SMP), as well as efforts to improve quality and safety in the Work Unit.
2. Main Functions of Corporate Relation Department
In the function of Corporate Relations Department, the Corporate Secretary has carried out, among others:
- a. Establishment of coordination of meetings between Board of Directors/Commissioners/Shareholders and active archives related to documents from meetings between Board of Directors/Commissioners/Shareholders;

- b. Tersusunnya standar pelayanan dan penyediaan fasilitas bagi pemegang saham, Direksi, Komisaris, dan pihak-pihak terkait;
 - c. Tersusunnya susunan kebijakan Perusahaan dan kebijakan pokok serta anggaran Perusahaan lingkup *Corporate Relations Department*;
 - d. Terbinanya hubungan baik dengan regulator, pemegang saham, Perusahaan sekuritas, *asset management/fund manager*, dana pensiun dan Lembaga lainnya yang berkaitan secara efektif dan efisien dengan bidang tugasnya;
 - e. Tersusunnya perencanaan dan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham, beserta dokumentasi aktif terkait pelaksanaannya;
 - f. Tersusunnya standar dan terlaksananya penyusunan *Annual Report* Perusahaan dengan bidang-bidang terkait;
 - g. Tersusunnya analisa dan rencana strategis dalam upaya meningkatkan citra Perusahaan dalam kaitannya dengan peningkatan nilai saham Perusahaan;
 - h. Tersusunnya standar presentasi Perusahaan (*Corporate Presentation*) dalam lingkup hubungan investor;
 - i. Terlaksananya pelayanan, bantuan, saran, dukungan, dan audit (*Support, Assist, Service, Advice dan Audit /SASAA*) di seluruh unit kerja/organ Perusahaan lingkup *Corporate Secretary*;
 - j. Terlaksananya tertib administrasi sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - k. Terlaksananya kepatuhan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Sistem Manajemen WIKA (SMW), Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), serta upaya peningkatan mutu dan *safety* di Unit Kerjanya;
 - l. Terlaksananya peningkatan dan pembinaan kompetensi *Human Capital* yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan arah perkembangan perusahaan;
 - m. Bertindak sebagai *Coach* dan melakukan proses *coaching* secara aktif terhadap minimal personil satu level dibawahnya;
 - n. Melakukan proses penyiapan kader 'pengganti' (suksesi) pada level satu tingkat dibawahnya dan *Expert*;
 - o. Melakukan proses pembinaan terhadap profesionalitas/keahlian bagi personil yang memiliki sertifikasi keahlian;
 - p. Terlaksananya manajemen risiko dan aspek legal untuk setiap lingkup pekerjaannya.
3. Fungsi Utama *Corporate Governance and Community Development Department*
Pada fungsi *Corporate Governance and Community Development Department*, *Corporate Secretary* telah melaksanakan antara lain:
- a. Terselenggaranya komunikasi *intern* dan *ekstern* Perusahaan, publisitas Perusahaan secara efektif dan efisien;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan program tata kelola keberlanjutan Perusahaan;
 - c. Melakukan evaluasi dan mengembangkan program keberlanjutan Perusahaan serta melakukan *improvement* terhadap sistem tata kelola keberlanjutan Perusahaan;
 - d. Menyusun, mereviu, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan sebagai salahsatu strategi komunikasi Perusahaan;
- b. Establishment of service standards and provision of facilities for shareholders, Directors, Commissioners, and related parties;
 - c. Compilation of the Company's policy structure and main policies and budgets of the Company within the scope of Corporate Relations Department;
 - d. Maintain good relations with regulators, shareholders, securities companies, asset management/fund managers, pension funds and other institutions related effectively and efficiently to the field of duties;
 - e. Planning and implementation of the General Meeting of Shareholders, along with active documentation related to its implementation;
 - f. Formulation of standards and implementation of the preparation of the Company's Annual Report with related fields;
 - g. Preparation of analysis and strategic plans in an effort to improve the Company's image in relation to increasing the value of the Company's shares;
 - h. Establishment of Corporate Presentation standards within the scope of investor relations;
 - i. Implementation of services, assistance, advice, support and audit (Support, Assist, Service, Advice and Audit/SASAA) in all work units/organs of the Company within the scope of Corporate Secretary;
 - j. Implementation of orderly administration in accordance with its responsibilities;
 - k. Implementation of compliance with the Anti-Bribery Management System (SMAP), WIKA's Management System (SMW), Security Management System (SMP), and efforts to improve quality and safety in the Work Unit;
 - l. The implementation of improving and fostering the competence of Human Capital which is their responsibility in accordance with the direction of the company's development;
 - m. Act as a Coach and conduct an active coaching process for at least one level personnel below him/her;
 - n. Carry out the process of preparing a 'replacement' cadre (succession) at the level one level below and Expert;
 - o. Carry out the process of fostering professionalism / expertise for personnel who have expertise certification;
 - p. Implementation of risk management and legal aspects for each scope of work.
3. Main Functions of Corporate Governance and Community Development Department
In the function of Corporate Governance and Community Development Department, the Corporate Secretary has carried out, among others:
- a. Implementation of internal and external corporate communications, effective and efficient publicity of the company;
 - b. Plan and implement corporate sustainability governance programs;
 - c. Evaluate and develop the Company's sustainability program and make improvements to the Company's sustainability governance system.;
 - d. Compile, review, evaluate, and improve the quality of sustainability reports as one of the Company's communication strategies.;

- e. Tersusunnya perencanaan dan pengendalian pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan lingkungan, dalam rangka menjalankan fungsi *Corporate Social Responsibility*, serta pengendalian biaya usaha Unit PKBL;
 - f. Mengembangkan kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai konsep keberlanjutan dan pertimbangan efisiensi biaya dan efektifitas program, merespon isu global serta meminimalkan risiko Perusahaan;
 - g. Tersusunnya Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai salah satu strategi komunikasi Perusahaan;
 - h. Tersusunnya perencanaan dan terselenggaranya kepatuhan pelaksanaan peraturan *Good Corporate Governance* (GCG);
 - i. Terlaksananya kendali terhadap kepatuhan undang-undang, peraturan, dan etika berusaha diseluruh unitkerja Perusahaan;
 - j. Tersusunnya susunan kebijakan Perusahaan dan kebijakan pokok serta anggaran Perusahaan lingkup *Good Corporate Governance* (GCG);
 - k. Terlaksananya penyusunan anggaran Perusahaan lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Good Corporate Governance* (GCG);
 - l. Menindaklanjuti kepentingan dan kebutuhan pemangku kepentingan dengan rekomendasi kebijakan pada sistem tata kelola Perusahaan;
 - m. Terbinanya hubungan secara efisien dan efektif dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - n. Terlaksananya pelayanan, bantuan, saran, dukungan, dan audit (*Support, Assist, Service, Advice* dan *Audit /SASAA*) di seluruh unit kerja/organs Perusahaan lingkup *Corporate Secretary*;
 - o. Terlaksananya tertib administrasi sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - p. Terlaksananya kepatuhan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Sistem Manajemen WIKA (SMW), Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), serta upaya peningkatan mutu dan *safety* di Unit Kerjanya;
 - q. Terlaksananya peningkatan dan pembinaan kompetensi *Human Capital* yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan arah perkembangan perusahaan;
 - r. Bertindak sebagai *Coach* dan melakukan proses *coaching* secara aktif terhadap minimal personil satu level dibawahnya;
 - s. Melakukan proses penyiapan kader 'pengganti' (suksesi) pada level satu tingkat dibawahnya dan *Expert*;
 - t. Melakukan proses pembinaan terhadap profesionalitas/ keahlian bagi personil yang memiliki sertifikasi keahlian;
 - u. Terlaksananya manajemen risiko dan aspek legal untuk setiap lingkup pekerjaannya.
- e. Formulation of planning and control of small business development and cooperatives as well as environmental development, in the framework of carrying out the Corporate Social Responsibility function, as well as controlling the PKBL Unit's business costs;
 - f. Developing the performance of Corporate Social Responsibility (CSR)/Partnership and Community Development Program (PKBL) according to the concept of sustainability and considering cost efficiency and program effectiveness, responding to global issues and minimizing corporate risks;
 - g. Compilation of Corporate Social Responsibility (CSR)/ Partnership and Community Development Program (PKBL) as one of the Company's communication strategies;
 - h. Compilation of planning and implementation of compliance with the implementation of Good Corporate Governance (GCG) regulations;
 - i. Implementation of control over compliance with laws, regulations, and business ethics in all work units of the Company;
 - j. Compiled composition of Company policies and main policies and corporate budgets within the scope of Good Corporate Governance (GCG);
 - k. Implementation of the preparation of the Company's budget within the scope of Corporate Social Responsibility (CSR)/ Partnership and Community Development Program (PKBL) and Good Corporate Governance (GCG);
 - l. Following up on the interests and needs of stakeholders with policy recommendations on the corporate governance system;
 - m. Maintaining efficient and effective relationships with parties related to their field of work;
 - n. Implementation of services, assistance, advice, support, and audits (*Support, Assist, Service, Advice* and *Audit/SASAA*) in all work units/Company organs within the scope of the Corporate Secretary;
 - o. Implementation of orderly administration in accordance with their responsibilities;
 - p. Implementation of quality improvement efforts under their responsibility, through the implementation of WIKA's Management System;
 - q. Implementation of development of functions in their environment and Human Capital, which is their responsibility in accordance with the direction of the Company's development;
 - r. Act as a Coach and carry out an active coaching process for at least one level below personnel;
 - s. Carry out the process of preparing 'replacement' (succession) cadres at one level below;
 - t. Implementation of risk management for each scope of work;
 - u. Compilation of standards and implementation of the preparation of the Company's Sustainability Report with related fields.

INTERNAL AUDIT

Fungsi audit internal di Perseroan dijalankan oleh Internal Audit, yang bertujuan untuk mendukung Direksi dalam memastikan dan membantu manajemen Perseroan dalam mengevaluasi serta menguji pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Internal

INTERNAL AUDIT

Internal audit function in the Company is carried out by Internal Audit, which aims to support Board of Directors in ensuring and assisting the Company's management in evaluating and testing the implementation of internal control and management systems in accordance with established policies. Internal Audit has the

Audit memiliki tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi perbaikan, memantau tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut, berkoordinasi dengan Komite Audit, serta melaksanakan pemeriksaan khusus jika diperlukan.

Untuk memperkuat tata kelola internal yang kokoh dan meningkatkan kinerja operasional, keberadaan Internal Audit berlandaskan pada Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 mengenai Perusahaan-Perseroan (Persero), Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. No. 01.01/A.DIR.01922/2022 yang mengatur Susunan Organisasi Internal Audit.

Profil Pejabat Internal Audit

responsibility to provide recommendations for improvement, monitor follow-up on these recommendations, coordinate with Audit Committee, and conduct special examinations if necessary.

To strengthen strong internal governance and improve operational performance, the existence of Internal Audit refers to the Law of the Republic of Indonesia Chapter VI No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Government Regulation No. 12 of 1998 concerning Companies (Persero), Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Decree No.01.01/A.DIR.01922/2022 concerning the Internal Audit Organization Structure.

Head of Internal Audit Unit Profile



Mahendra Dwisana
Head of Internal Audit

Menjabat Sejak 1 Juli 2022
Served Since July 1, 2022

Kewarganegaraan	Nationality
Indonesia	Indonesia
Usia	Age
52 tahun per 31 Desember 2024	52 years old as at December 31, 2024
Domisili	Domicile
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia	South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan	Educational Background
<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP) Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran (1993) Sarjana Akuntansi, Universitas Persada Indonesia – Yayasan Administrasi Indonesia (YAI), (2002) Magister Manajemen, Universitas Bina Nusantara (2023) 	<ol style="list-style-type: none"> Company Administration Expert Education (PAAP) Faculty of Economics, Padjadjaran University (1993) Bachelor of Accounting, Persada University Indonesia – Indonesian Administration Foundation (YAI), (2002) Magister Manajemen, Universitas Bina Nusantara (2023)
Pengalaman Kerja	Work Experience
<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksa Internal Audit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2000-2010); Kepala Pemeriksa Internal Audit PT Wijaya Karya Insan Pertiwi (2010-2012); Manajer Keuangan & Akuntansi PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (2012-2017); Manajer Keuangan PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (2017-2020); Direktur Keuangan <i>Human Capital</i> & Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (2020-2022); Head of Internal Audit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Juli 2022 - sekarang) 	<ol style="list-style-type: none"> Auditor of Internal Audit Unit of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2000-2010); Chief Auditor of Internal Audit Unit of PT Wijaya Karya Insan Pertiwi (2010-2012) Finance & Accounting Manager of PT Wijaya Karya Engineering Construction (2012-2017) Finance Manager of PT Wijaya Karya Industry & Construction (2017-2020); Director of Finance Human Capital & Risk Management of PT Wijaya Karya Industry & Construction (2020- 2022); Head of Internal Audit Unit of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (July 2022 - present)
Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku	Valid Education and/or Professional Certification
<ol style="list-style-type: none"> Qualified Internal Audit – Yayasan Pendidikan Internal Audit Certified Risk Governance Professional - LSPMR 	<ol style="list-style-type: none"> Qualified Internal Audit – Internal Audit Education Foundation Certified Risk Governance Professional – LSPMR
Dasar Hukum Pengangkatan	Legal Basis for Appointment
Menjabat sebagai Head of Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.01990/2022 tanggal 1 Juni 2022.	Appointed as Head of IAU based on Board of Directors's Decree SK.02.01/A.DIR.01990/2022 dated June 1, 2022.

Komposisi Personil Internal Audit

Internal Audit didukung oleh tim auditor yang diatur dalam Susunan Organisasi Internal Audit sesuai dengan Surat Keputusan No.01.01/A.DIR.01922/2022. Dalam struktur tersebut, *Head of Internal Audit* bertanggung jawab atas tim auditor yang terdiri dari *Head of Auditor* dan *Auditor*. Dalam melaksanakan fungsi mereka, baik *Head of Auditor* maupun *Auditor* bertanggung jawab langsung kepada *Head of Internal Audit*. Namun, dalam proses pemeriksaan, *Head of Auditor* berperan sebagai Ketua Tim yang secara langsung mengawasi *Auditor*.

Jabatan Position	Jumlah Total
<i>Head Of Internal Audit</i>	1
<i>Head Of Auditor</i>	5
<i>Auditor</i>	4
Kesekretariatan	1
Sistem Informasi	1

Pada 29 November 2024 organisasi internal audit bertransformasi dan mengalami perubahan sesuai dengan SK No.01.01/A.DIR.000022/2024 per 29 November 2024 dan efektif mulai pada 2 Desember 2024, jumlah pegawai di Internal Audit adalah 10 orang yang terdiri dari:

Jabatan Position	Jumlah Total
<i>Head Of Internal Audit</i>	1
<i>SM Planning & Development</i>	1
<i>SM Operational</i>	1
<i>SM Financial</i>	1
SM Governance, Risk & Internal Control	1
Auditor	4
Sekretaris	1
Sistem Informasi Information System	1

Dasar Hukum Penunjukan sebagai *Head of Internal Audit*

Penunjukan Kepala Audit Internal di Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Pasal 5 dalam peraturan ini mengatur bahwa Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Selanjutnya, Pasal 11 menetapkan bahwa setiap perubahan, baik itu pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal, harus dilaporkan segera kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Internal Audit Composition

Internal Audit is supported by Auditor team as regulated in the Internal Audit Organization Structure SK No.01.01/A.DIR.01922/2022. Within that Structure, Head of Internal Audit oversees the Audit team consisting of Head of Auditor and Auditors. In carrying out their functions, both Head of Auditor and Auditors are directly responsible to Head of Internal Audit. However, when carrying out the audit duties, Head of Auditor acts as a Team Leader directly in charge of the Auditors.

Pada 29 November 2024 organisasi internal audit bertransformasi dan mengalami perubahan sesuai dengan SK No.01.01/A.DIR.000022/2024 per 29 November 2024 dan efektif mulai pada 2 Desember 2024, jumlah pegawai di Internal Audit adalah 10 orang yang terdiri dari:

Head of Internal Audit Legal Basis Appointment

The appointment of the Company's Head of Internal Audit is guided by the Financial Services Authority Regulation (OJK) No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Charter, where article 5 explains that Head of Internal Audit is appointed and dismissed by President Director with Board of Commissioners' approval, and Article 11 explains that every appointment, replacement or dismissal of Head of Internal Audit should immediately be notified to OJK.

Kualifikasi atau Sertifikasi sebagai Profesi Audit Internal

Qualification or Certification as Internal Audit Profession

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
Mahendra Dwisana	Head of Internal Audit	QIA
Windya Darmawan	SM Financial	QIA Dasar Basic QIA
Dani Widiatmoko	SM Operational	Proses QIA QIA Process
Sri Hartaty	SM Governance, Risk & Internal Control	QIA Lanjutan Advanced QIA
Moch. Arifin	SM Planning & Development	QIA Dasar Basic QIA
Dimas Anggara Rachman	Auditor	QIA Lanjutan Advanced QIA
R. Dedi Tri Wiasa	Auditor	QIA Dasar Basic QIA
Muhammad Hafiz K. P	Auditor	QIA Dasar Basic QIA
R. Nugrahaning Bulannuridin	Auditor	QIA
Djoko Supriyadi	Auditor	QIA

Wewenang Internal Audit

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Internal Audit diberikan wewenang untuk:

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit, alokasi sumber daya, frekuensi, memilih subyek dan menerbitkan laporan;
2. Memasuki seluruh areal perusahaan dan meninjau tempat usaha, lingkungan kerja dan lokasi aset perusahaan;
3. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam rangka pemeriksaan;
4. Memiliki akses sepenuhnya atas semua dokumen, pencatatan, personil perusahaan, properti dan fisik informasi atas objek Pemeriksaan, untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penugasan dengan tunduk pada akuntabilitas untuk kerahasiaan dan pengamanan catatan dan informasi;
5. Meminta bantuan tenaga pemeriksa dari dalam perusahaan, dalam hal tidak tersedianya kompetensi personil Internal Audit, dan dari luar perusahaan jika dipandang perlu dengan beban yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
7. Melakukan koordinasi dengan Auditor Eksternal yang mencakup KAP, BPK, BPKP dan Instansi lainnya yang relevan;
8. Melakukan pengawasan pada Anak Perusahaan dalam lingkup PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Head of Internal Audit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk wajib melakukan koordinasi dengan Head of Internal Audit Anak Perusahaan untuk meminta keterangan dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kaidah pengawasan dan menyelaraskan program Internal Audit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan Internal Audit Anak Perusahaan dalam

Internal Audit Authorities

To support the smooth implementation of its duties, Internal Audit is authorized to:

1. Compile, modify and implement internal audit policies, including determining the procedures and scope of audit work, resource allocation, frequency, selecting subjects and issuing reports;
2. Enter all Company areas, and review the places of business, work environment and location of Company assets.
3. Request information and explanations at all levels of management and employees in the context of audit;
4. Have complete access to all documents, records, Company's Personnel and physical information on the Audit Objects, and to obtain data and or information relating to accountability for the confidentiality and safeguarding of records and information;
5. Request the assistance of auditors from within the Company, in the case of an absence of competent Internal Audit personnel, and from outside the Company if deemed necessary with the cost incurred the responsibility of the Company.
6. Communicate directly with Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
7. Coordinate with External Auditors including KAP, BPK, BPKP and other relevant agencies.
8. Supervise the Subsidiaries within PT Wijaya Karya (Persero) Tbk with the following conditions:
 - a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Head of Internal Audit must coordinate with the Subsidiary's Head of Internal Audit to request information and documents in accordance with the supervision method in line with the program of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Internal Audit with Subsidiaries' Internal Audit to ensure the control aspect in the Subsidiaries. PT Wijaya

rangka untuk memastikan berjalannya aspek pengendalian pada Anak Perusahaan, dan Internal Audit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dapat melakukan pemeriksaan ke Anak Perusahaan bersama IA Perusahaan Anak dengan penugasan oleh Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;

- b. Atas hasil pemeriksaan Internal Audit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dilaporkan secara langsung kepada Komisaris Utama Anak Perusahaan dengan tembusan kepada Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Direktur Utama Anak Perusahaan.
9. Dalam hal melakukan pemeriksaan/audit dan memiliki kepentingan yang masih berkaitan dengan pemeriksaan, maka pemeriksa dapat memiliki akses atas semua dokumen, pencatatan, personil perusahaan dan fisik informasi objek yang berkorelasi langsung dengan objek pemeriksaan;
10. Dapat mengikuti rapat-rapat yang bersifat strategis;
11. Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Internal Audit.

Karya (Persero) Tbk can conduct inspections to subsidiaries together with IA Subsidiaries with the assignment by the President Director of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;

- b. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Internal Audit audit results are reported directly to the Subsidiary's President Commissioner with a copy to the President Director of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance.
9. In the case of conducting an examination/audit and having an interest that is still related to the examination, the examiner can have access to all documents, records, Company personnel and physical information objects that are directly correlated with the object of the examination;
10. Can attend strategic meetings
11. Conducting the selection of competent human capital in accordance with the needs in implementation of Internal Audit duties.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti dalam Tahun Buku

Perseroan mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan Internal Audit yang relevan dengan operasional bisnis Perseroan. Dukungan ini bertujuan untuk memperkuat peran Internal Audit dalam mendukung pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2024, Internal Audit telah berpartisipasi dalam berbagai program pengembangan kompetensi, di antaranya:

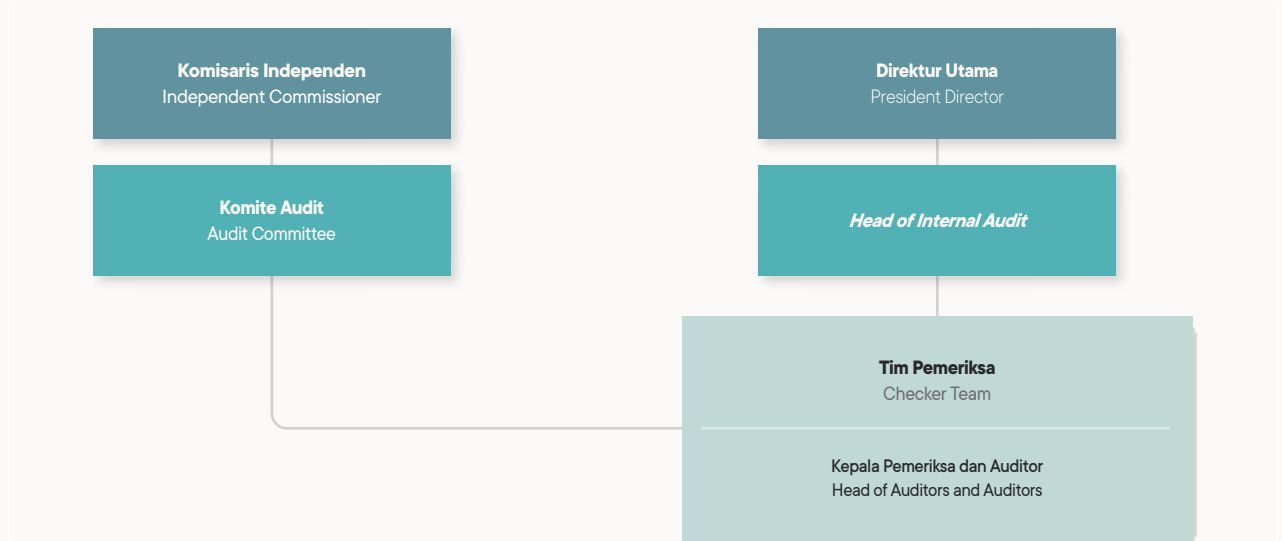
Training and/or Competency Development Attended in the Fiscal Year

The Company supports Internal Audit to increase knowledge and competencies relevant to the Company's business operations. This aims to strengthen the role of Internal Audit in supporting the management of the Company carried out by Board of Directors. Throughout 2024, Internal Audit has participated in competency development programs, as follows:

Nama	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer by
Mahendra Dwisana	Certified Risk Governance Professional	Online	4-5 Desember 2024 December 4-5, 2024	LSPMR
Sri Hartaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. QIA Dasar, 2. QIA Lanjutan 3. Managing Result 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Online 2. Online 3. Online 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 18 Maret – 1 April 2024 2. 4 – 16 November 2024 3. March 18 - April 1, 2024 4. November 4 - 16, 2024 	YPIA YPIA NextIDEA
Moch. Arifin	QIA Dasar Basic QIA	Online	18 Maret – 1 April 2024 March 18 - April 1, 2024	YPIA
Dimas Anggara Rachman	QIA Lanjutan Advanced QIA	Online	4 – 16 November 2024 November 4 - 16, 2024	YPIA
R. Dedi Tri Wiasa	QIA Dasar Basic QIA	Online	18 Maret – 1 April 2024 March 18 - April 1, 2024	YPIA
R. Nugrahaning Bulannuridin	QIA Manajerial Managerial QIA	Online	24 Juni 2024 – 3 Juli 2024 June 24, 2024 - July 3, 2024	YPIA
Djoko Supriyadi	QIA Manajerial Managerial QIA	Online	24 Juni 2024 – 3 Juli 2024 June 24, 2024 - July 3, 2024	YPIA
Windya Darmawan	Internal Audit Transformation	Online	27 Maret 2024 March 27, 2024	IIA

Struktur dan Kedudukan Unit Internal Audit

Berikut struktur dan hubungan kerja Internal Audit yang tergambar dalam bagan struktur organisasi di bawah ini:



Kedudukan Internal Audit dalam struktur organisasi perusahaan berada di bawah Direktur Utama. Dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan, Perseroan dibantu oleh tim pemeriksa dengan melibatkan *Head of Auditor* dan *Auditor*.

1. *Head of Auditor*, dalam organisasi dikelompokkan setingkat *Senior Manager* yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, dan bertanggung jawab langsung kepada *Head of Internal Audit*;
2. Auditor adalah anggota tim pemeriksa yang terdiri dari *expert* dan/atau staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dan/atau pejabat yang berwenang, dan bertanggung jawab kepada *Head of Internal Audit*.

Kedudukan Internal Audit harus diletakkan dalam struktur organisasi yang sejajar dengan peran dan tanggung jawab yang dimilikinya. Dalam menyampaikan pandangan dan pemikirannya terkait pelaksanaan pengawasan kepada Manajemen, Internal Audit harus melakukannya secara independen, tanpa dipengaruhi atau ditekan oleh Manajemen maupun pihak lain dalam organisasi Perseroan.

Alur Pengangkatan dan Pemberhentian *Head of Internal Audit*

Head of Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian *Head of Internal Audit* harus segera diinformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Pedoman untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam Piagam Internal Audit yang telah ditetapkan oleh Direksi. Tugas dan tanggung jawab Internal Audit mencakup:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berbasis risiko yang direviu secara berkala terhadap perubahan, termasuk perhitungan anggaran Internal Audit yang mencakup biaya audit berdasarkan *man hours* dan jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa serta biaya operasional;

Structure and Position of Internal Audit Unit

The following structure and working relationship of Internal Audit is illustrated in the organizational structure chart below:

The position of Internal Audit in the Company's organizational structure is under the President Director. In supporting the effectiveness of supervisory functions, the Company is assisted by an auditor team involving the Head of Auditor and Auditors.

1. Head Of Auditor, in the organization is grouped at the level of Senior Manager who is appointed and dismissed by the Board of Directors, and is directly responsible to the Head of Internal Audit;
2. Auditor is a member of auditor team consisting of experts and or staff appointed and dismissed by the Board of Directors and/or authorized officials, and is responsible to the Head of Internal Audit.

The position of Internal Audit must be placed in an organizational structure that is equivalent to its roles and responsibilities. In expressing views and thoughts related to the implementation of supervision to Management is carried out freely and cannot be influenced or pressured by Management or other parties in the Company's organization.

Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit Procedure

Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director with Board of Commissioners' approval. Every appointment, replacement, or dismissal of Head of Internal Audit should immediately be notified to OJK.

Description of Duties and Responsibilities

Guidelines for the implementation of duties and responsibilities of Internal Audit Unit are regulated in the Internal Audit Charter and has been established by Board of Directors. The duties and responsibilities of Internal Audit consist of:

1. Preparing a risk-based Annual Audit Work Program (PKPT) that is reviewed periodically for changes, including the calculation of the Internal Audit budget which includes audit costs based on manhours and the number of objects examined and operational costs;

2. Melakukan pemeriksaan rutin sesuai dengan jadwal yang telah dituangkan dalam PKPT, dan menguji serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian *intern*, proses tata kelola perusahaan, dan sistem Manajemen Risiko sesuai dengan peraturan perundangan, kebijakan, dan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran perseroan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas, namun tidak terbatas pada bidang Akuntansi, Keuangan, Operasional, *Human Capital*, Pemasaran, Enjinereng, Produktivitas, dan Teknologi Informatika, serta melakukan evaluasi atas sistem, prosedur, dan kebijakan operasi perusahaan yang dilakukan secara berkesinambungan;
4. Menyiapkan dan mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
5. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Prosedur Umum Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Satuan Pengawasan Intern No. WIKA-PEIPM. 01.01, dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit serta menyampaikan laporan *audit intern*, laporan hasil kaji ulang pihak eksternal, laporan pengangkatan atau pemberhentian *Head of Internal Audit* kepada Kementerian;
6. Membuat "draft" surat Tindak Lanjut Direktur Utama yang difokuskan kepada permasalahan utama dan perlu mendapatkan penanganan yang segera dari pimpinan unit kerja yang diperiksa, dan Direktur Utama akan menandatangani surat Tindak Lanjut tersebut apabila telah sesuai dengan pandangannya;
7. Memantau dan menganalisis tindak lanjut dari LHP yang disampaikan kepada pimpinan tertinggi unit kerja sesuai dengan disposisi dari Direktur Utama, dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dan Komite Audit, terutama untuk temuan signifikan;
8. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan personil Internal Audit melalui pendidikan/pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Profesi seperti *Qualified Internal Auditor (QIA)* yang berkelanjutan baik di dalam maupun di luar negeri;
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan oleh Internal Audit dengan melakukan "peer review" sebagaimana diatur dalam prosedur dan asesmen lembaga independen minimal 3 tahun sekali sesuai standar internasional yang berlaku;
10. Memberikan pendapat, masukan, dan pertimbangan maupun jasa konsultasi yang objektif kepada Manajemen dan unit kerja lainnya, baik secara formal maupun informal berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan;
11. Bekerja sama dan membina hubungan yang setara dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
12. Melakukan Audit Khusus apabila diperlukan;
13. Dalam hal ditugaskan untuk bekerja sama dengan organ pendukung Dewan Komisaris selain Komite Audit, akan ditetapkan dalam Surat Penugasan tersendiri;
14. Melakukan koordinasi kegiatan dengan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia assurance lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak. Dalam rangka pelaksanaan fungsi IA terintegrasi, tugas dan tanggung jawab IA mengacu pada pedoman tata
 2. Conducting routine audit in accordance with the schedule set forth in PKPT, and testing and evaluating the effectiveness of internal control, corporate governance processes and Risk Management systems in accordance with applicable laws, policies and regulations to obtain assurance that the Company's goals and objectives can be achieved optimally and sustainably;
 3. Conducting efficient and effective audit and assessment, at a minimum but not limited in the Accounting, Finance, Operational, Human Capital, Marketing, Engineering, Productivity, and Information Technology fields, and evaluating the system, procedures and policies of the Company's operations on an ongoing basis;
 4. Preparing and documenting the Audit Working Paper (KKP);
 5. Preparing Audit Result Reports (LHP) in accordance with the General Procedure for Inspection and Follow up of the Internal Audit Unit No.WIKA's-PEI-PM.01.01, and submit report to the President Director and Board of Commissioners through Audit Committee and submit internal audit reports, external party review reports, reports on the appointment or dismissal of Head of Internal Audit to the Ministry;
 6. Creating a "draft" of the President Director's Follow-Up letter, focused on the main issues and needs to receive an immediate response from the work unit heads, for the President Director to sign if it is in accordance with the President Director's views;
 7. Monitoring and analyzing the LHP follow-up, as submitted to the senior leadership of the work units, in accordance with the President Director's disposition, and reporting the follow-up monitoring results to the President Director and Audit Committee especially for significant findings;
 8. Improving the Internal Audit personnel competencies and capabilities through education/training and Professional Expertise Certification such as Qualified Internal Auditor (QIA) that is recognized both inside and outside the country;
 9. Developing a program to evaluate the quality of internal audit activities undertaken by the Internal Audit by conducting a "peer review" as stipulated in the procedures and assessment of independent institutions at least once every 3 years in accordance with applicable international standards;
 10. Providing opinions, input and considerations and objective consulting services to Management and other work units, both formally and informally during the audit activities;
 11. Cooperating and fostering relations with the Audit Committee in carrying out the audit function;
 12. Conducting Special Audits if necessary;
 13. When assigned to cooperate with the supporting bodies of Board of Commissioners, other than the Audit Committee, this should be stipulated through separate Assignment Letter.
 14. Coordinating activities with external audit and other assurance provider units/functions, in order to achieve comprehensive and optimal audit results. In framework of implementing the integrated IA function, the duties and responsibilities of IA refer to the integrated governance guidelines, monitoring the implementation of internal audits at each subsidiary. Carry out audits on subsidiaries either individually, joint audits or based on reports from internal audit subsidiaries IA submits

kelola terintegrasi, memantau pelaksanaan *audit intern* pada masing-masing anak perusahaan. Melaksanakan audit pada anak perusahaan baik secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari internal audit anak perusahaan, IA menyampaikan laporan *audit intern* terintegrasi kepada direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh anak perusahaan dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya;

15. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern anak perusahaan, merumuskan prinsip *audit intern* yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu;
16. Melakukan penyusunan dan pengkajian piagam *audit intern* secara periodik;
17. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas Internal Audit kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan atau putusan pengadilan;
18. Melakukan kaji ulang terhadap kinerja IA (*Quality Assurance Review*) paling sedikit 3 tahun sekali dengan pihak independen;
19. Melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
20. Memastikan anggota Internal Audit mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Perusahaan;
21. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
22. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas pengawasan *intern*, yaitu terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota IA, penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi IA, dan pihak eksternal mematuhi piagam audit intern perusahaan.

Pernyataan bahwa Telah Memiliki Pedoman atau Piagam (*Charter*) Unit Audit Internal

Pedoman kerja Internal Audit disusun sebagai panduan utama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dokumen ini telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Direktur Utama dan Komisaris Utama pada tanggal 3 Juni 2023. Pedoman tersebut mencakup:

1. Visi, Misi dan Tujuan;
2. Struktur dan Kedudukan, yaitu kedudukan Internal Audit dalam Organisasi;
3. Tugas dan Tanggung Jawab, yaitu mengenai peran dan tanggung jawab Internal Audit dalam organisasi;
4. Peranan Internal Audit di dalam organisasi;
5. Wewenang, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh Internal Audit dalam menjalankan perannya;
6. Kode Etik, yaitu untuk mengatur perilaku dan kepatuhan pemeriksa intern;
7. Kompetensi, yaitu persyaratan jabatan bagi Tim Internal Audit;
8. Independensi dan objektivitas, yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemeriksa internal dalam konteks kebebasan bertindak (independensi) secara objektif;
9. Pertanggungjawaban, yaitu bahwa Kepala Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
10. Hubungan Kerja.

integrated internal audit reports to Director appointed to carry out the supervisory function of all Subsidiaries and Board of Commissioners of PT Wijaya Karya;

15. Determine the strategy for Subsidiaries' internal audit implementation, formulate internal audit principles that include audit methodology and quality control implementation steps;
16. Conducting periodic preparation and review of the internal audit charter;
17. Maintaining the confidentiality of Company information and/or data related to implementation of Internal Audit duties unless permitted based on statutory provisions and/or court decisions;
18. Conducting a review of IA performance (*Quality Assurance Review*) at least once every 3 years with an independent party;
19. Organizing regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and or Audit Committee;
20. Ensuring that Internal Audit members follow continuous professional development and other training in accordance with the development of the Company's complexity and business activities;
21. Reporting significant findings to President Director and Board of Commissioners/Supervisory Board for prompt corrective action;
22. Ensuring that in the event of use of external parties for internal control activities, namely the implementation of knowledge transfer between external parties to IA members, the use of external party services does not affect independence and objectivity of the IA function and external parties comply with the Company's internal audit charter.

Statement of Internal Audit Unit that Has a Guideline or Charter

Internal Audit has a work guideline that is used as a reference in carrying out its duties. The guidelines have been approved and authorized by the President Director and President Commissioner on June 3, 2023.

The guidelines cover:

1. Vision, Mission and Objectives;
2. Structure and Position, including the position of Internal Audit in the Organization;
3. Duties and Responsibilities, including the roles and responsibilities of Internal Audit in the organization;
4. Role of Internal Audit in the organization;
5. Authorities possessed by Internal Audit in carrying out their role;
6. Code of Conduct, to regulate the behavior and compliance of internal auditors;
7. Competencies, job requirements for Internal Audit Teams;
8. Independence and objections when carrying out its duties and functions as an internal auditor in the context of objective freedom of action (independence);
9. Accountability, where the Head of Internal Audit is responsible to the President Director;
10. Employment Relations.

Kode Etik Auditor

Internal Auditor Perseroan memiliki Kode Etik dalam menjalankan tugasnya antara lain:

1. *Auditor Intern* wajib bersikap jujur, objektivitas, hati-hati, bijaksana, bertanggung jawab, berani dan memiliki integritas yang tinggi serta harus mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya, dan harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh Direktur Utama;
2. *Auditor Intern* harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan dalam rangka tugas pemeriksaan dan mematuhi semua kaidah hukum dan profesi yang menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas;
3. *Auditor Intern* harus berusaha untuk meningkatkan keahlian dalam melakukan pekerjaannya dengan memelihara kompetensi jabatan, moralitas, menjunjung tinggi kehormatan korps dan memberikan dukungan kepada tujuan organisasi yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
4. *Auditor Intern* harus membangun komunikasi yang intens dengan sesama pemeriksa dan *auditor eksternal*, untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diembannya;
5. Dalam melaksanakan tugasnya *Auditor Intern* harus berpedoman kepada norma-norma pemeriksaan dan Prosedur Umum Pengawasan Intern dan hukum/ketentuan lainnya;
6. *Auditor Intern* harus menghindarkan diri untuk mengambil bagian dalam aktivitas ilegal atau kegiatan yang dapat menurunkan derajat profesi audit internal maupun Perseroan, dan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab sebagai Auditor Intern, kecuali ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
7. *Auditor Intern* tidak dapat melakukan tindakan yang baik secara jelas ataupun tersirat memberikan tekanan atau ancaman baik berkaitan langsung dengan kegiatan pemeriksaan maupun dalam hubungan interpersonal;
8. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan hasil audit;
9. Menjaga informasi kerahasiaan yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Rencana Pemeriksaan Tahunan

Untuk memastikan operasional Perseroan berjalan dengan baik, Internal Audit terus berupaya mengoptimalkan perannya dalam membantu Direktur Utama. Hal ini dilakukan dengan menetapkan jumlah objek pemeriksaan berdasarkan risiko yang diperoleh melalui penilaian yang menghasilkan skor pada tiap proyek. Skor yang tinggi menjadi prioritas pemeriksaan namun, jika dalam perjalanan terdapat proyek yang menunjukkan skor risiko tinggi, maka objek pemeriksaan dapat disesuaikan. Berikut jumlah objek pemeriksaan pada tahun 2025 yang akan direncanakan sebanyak 36 obyek pemeriksaan.

Internal Audit merupakan elemen utama dalam Divisi Korporasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit kepatuhan terhadap penerapan Sistem Manajemen Wika (SMW) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perannya meliputi peninjauan kebijakan operasional Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Proses audit ini menghasilkan informasi yang transparan mengenai fakta dan kinerja unit kerja yang diawasi, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang aplikatif untuk

Auditor's Code of Conduct

The Company's Internal Auditors have a Code of Conduct in carrying out their duties, including:

1. Internal Auditors must be honest, objective, careful, wise, responsible, brave and have high integrity, and must be able to act independently in carrying out their duties and obligations, and must be able to maintain the trust given by the President Director;
2. Internal Auditors must be able to maintain the trust given in the framework of audit task and comply with all legal and professional methods for which they are responsible for carrying out their duties;
3. Internal Auditors must strive to improve their expertise in carrying out their work by maintaining job competency, morality and upholding the honor of the corps, and providing support to legitimate organizational goals in accordance with laws and regulations;
4. Internal Auditors must establish intense communication with fellow auditors and external auditors, in the interests of the Company and in the context of carrying out their assigned duties.
5. In carrying out their duties, Internal Auditors must be guided by inspection norms and General Procedures for Internal Supervision and other laws/provisions;
6. Internal Auditors must avoid taking part in illegal activities that would reduce the internal audit, or the Company's professionalism, and must maintain the confidentiality of Company information and/or data related to the implementation of Internal Auditors' duties and responsibilities, unless stipulated by law or Court rulings/ decisions;
7. Internal Auditors cannot take actions that either clearly or implicitly provide pressure or threats either directly related to inspection activities or in interpersonal relationships;
8. Disclose all material facts known, which if not disclosed may interfere with the reporting of audit results;
9. Maintain confidential information obtained while in office in accordance with applicable rules and regulations.

Annual Audit Plan

To ensure the Company's operations run properly, Internal Audit continues to optimize its role in assisting the President Director. This is done by determining the number of inspection objects based on the risk obtained through an assessment that produces a score on each project. High scores are prioritized for inspection, however, if there are projects that show high risk scores, the object of inspection can be adjusted. The following number of inspection objects in 2025 will be planned sebanyak 36 obyek pemeriksaan.

Internal Audit is the main element in Corporate Division that is responsible for carrying out compliance audits on the implementation of the Wika's Management System (SMW) in accordance with applicable regulations. Its role includes reviewing the Company's operational policies to ensure compliance with regulations and laws. This audit process produces transparent information about the facts and performance of the work unit being supervised, while providing applicable improvement recommendations to support the

mendukung peningkatan tata kelola dan efisiensi operasional perusahaan. Selain menjalankan proses audit pada tahun 2025 sesuai No.PER-2/MBU/03/2023 Internal audit sebagai lini ketiga bersinergi dengan lini kedua dan satu menjalankan implementasi penilaian Risk Maturity Index dan ICoFR.

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Internal Audit di Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Internal Audit telah menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan, melakukan review secara berkala berdasarkan tingkat risiko yang ada. Sebanyak 36 objek pemeriksaan telah direncanakan untuk tahun 2024, mencakup berbagai aspek, termasuk tingkat proyek, divisi operasional, fungsional, anak perusahaan dan asosiasi. Hingga akhir Desember 2024, realisasi pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 37 objek tersebut telah berhasil diperiksa.

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Internal Audit berperan sebagai pihak yang diundang dalam rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit. Kehadirannya mengikuti jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris, Direksi, atau Komite Audit, tanpa menetapkan jadwal sendiri.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Internal Audit

Selain berpartisipasi dalam rapat yang diadakan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, Internal Audit juga menyelenggarakan rapat internal. Selama tahun 2024, Internal Audit telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda pencapaian program kerja pemeriksaan tahunan dan tindak lanjutnya. Berikut adalah kehadiran masing-masing anggota Komite Audit:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	08 Januari 2024 January 08, 2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit dan Isu Strategis Januari 2024 Discussion of Audit Work Program Realization and Strategic Issues January 2024
2	15 Januari 2024 January 15, 2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit dan Isu Strategis Januari 2024 Discussion of Audit Work Program Realization and Strategic Issues January 2024
3	26 Januari 2024 January 26, 2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit dan Isu Strategis Januari 2024 Discussion of Audit Work Program Realization and Strategic Issues January 2024
4	06 Februari 2024 February 06, 2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit dan Isu Strategis Februari 2024 Discussion of Audit Work Program Realization and Strategic Issues February 2024
5	01 Maret 2024 March 01, 2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit dan Isu Strategis Maret 2024 Discussion of Audit Work Program Realization and Strategic Issues March 2024
6	14 Mei 2024 May 14, 2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit dan Isu Strategis Mei 2024 Discussion of Audit Work Program Realization and Strategic Issues May 2024
7	11 Juni 2024 June 11, 2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit dan Isu Strategis Juni 2024 Discussion of Audit Work Program Realization and Strategic Issues June 2024
8	10 Juli 2024 July 10, 2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit dan Isu Strategis Juli 2024 Discussion of Audit Work Program Realization and Strategic Issues July 2024
9	16 Juli 2024 July 16, 2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit dan Isu Strategis Juli 2024 Discussion of Audit Work Program Realization and Strategic Issues July 2024
10	06 Agustus 2024 August 06, 2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit dan Isu Strategis Agustus 2024 Discussion of Audit Work Program Realization and Strategic Issues August 2024

improvement of corporate governance and operational efficiency. Selain menjalankan proses audit pada tahun 2025 sesuai No.PER-2/MBU/03/2023 Internal audit sebagai lini ketiga bersinergi dengan lini kedua dan satu menjalankan implementasi penilaian Risk Maturity Index dan ICoFR.

Brief Description of Internal Audit Duties Implementation in 2024

Throughout 2024, Internal Audit has carried out activities in accordance with the planned work program by conducting periodic reviews based on the existing risk level. An audit of 36 objects covering several aspects has been planned in 2024, including the project level, operational division, functional, subsidiaries and associated entities. Until the end of December 2024, realization of the inspection shows that as many as 37 of these objects have been successfully inspected.

Policy and Frequency of Internal Audit Meetings with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Audit Committee

Internal Audit acts as an invited party in meetings with Board of Commissioners, Board of Directors, and Audit Committee. Its attendance follows the meeting schedule set by Board of Commissioners, Board of Directors, or Audit Committee, without setting its own schedule.

Internal Audit Meeting Frequency and Attendance

In addition to attending meetings organized by Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee, Internal Audit organizes meetings internally. Throughout 2024, Internal Audit held 12 (twelve) meetings with the agenda of achieving the annual audit work program and its follow up. The attendance of each member of Audit Committee is as follows:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
11	30 September 2024 September 30, 2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit dan Isu Strategis September 2024 Discussion of Audit Work Program Realization and Strategic Issues September 2024
12	25 November 2024 November 25, 2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit dan Isu Strategis November 2024 Discussion of Audit Work Program Realization and Strategic Issues November 2024

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Attendance								
		Mahendra Dwisana	Tegas Djuni Prasongko	Windya Darmawan	Achmad Harris A.S	Ali Afandi	R.Nugrahaning B	Djoko Supriyadi	M. Hafiz K.P	Sri Hartaty
1	08 Januari 2024 January 08, 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	15 Januari 2024 January 15, 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	26 Januari 2024 January 26, 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	06 Februari 2024 February 06, 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	01 Maret 2024 March 01, 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	14 Mei 2024 May 14, 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	11 Juni 2024 June 11, 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	10 Juli 2024 July 10, 2024	✓	Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Period	✓	Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Period	✓	✓	✓	✓	✓
9	16 Juli 2024 July 16, 2024	July 16, 2024	Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Period	✓	Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Period	✓	✓	✓	✓	✓
10	06 Agustus 2024 August 06, 2024	✓	Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Period	✓	Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Period	✓	✓	✓	✓	✓
11	30 September 2024 August 06, 2024	✓	Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Period	✓	Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Period	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Attendance								
		Mahendra Dwisana	Tegas Djuni Prasongko	Windya Darmawan	Achmad Harris A.S	Ali Afandi	R.Nugrahaning B	Djoko Supriyadi	M. Hafiz K.P	Sri Hartaty
12	25 November 2024 November 25, 2024	√	Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Period	√	Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Period	√	√	√	√	√
Jumlah Rapat Total Meetings		12	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah Kehadiran Total Attendance		12	7	12	7	12	12	12	12	12
% Kehadiran % Attendance		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Temuan dan Tindak Lanjut

Sampai dengan Desember 2024 terdapat total 675 temuan dengan kondisi telah dilakukan tindak lanjut dan close sebanyak 637 temuan dan open sebanyak 38 temuan. Sehingga persentase realisasi tindaklanjut audit dibanding total temuan 94,2%.

Findings and Follow Up

Until December 2024, there were a total of 675 findings with conditions that had been followed up and closed as many as 637 findings and open as many as 38 findings. Accordingly, the percentage of audit follow-up realization compared to the total findings is 94.2%.

Tujuan dan Lingkup Audit

Pelaksanaan pemeriksaan audit bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan penerapan sistem pengendalian akuntansi, operasional, dan manajemen di WIKA. Proses audit dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan bahwa pencapaian sasaran Perseroan berlangsung dengan efektif dan efisien. Ruang lingkup audit ini terbatas pada Kantor Pusat WIKA. Selain tugas rutin, Internal Audit juga melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap objek tertentu yang diminta atau ditugaskan oleh Direksi, di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Audit Objectives and Scope

The purpose of audit is to evaluate the feasibility of implementing accounting, operational and management control systems at WIKA's. The audit process is carried out in an integrated manner to ensure that the achievement of the Company's goals takes place effectively and efficiently. The scope of this audit is limited to the WIKA's Head Office. In addition to routine tasks, Internal Audit also carries out special examinations of certain objects requested or assigned by the Board of Directors, outside the Annual Supervisory Work Program (PKPT).

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Internal Audit

Evaluasi terhadap kinerja Internal Audit dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Organ Pendukung dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris.

Internal Audit Evaluation and Performance Appraisal

Evaluation of Internal Audit performance is routinely assessed annually by the Supporting Bodies and/or Committees under Board of Commissioners.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Untuk menjamin operasional yang optimal, Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal yang terintegrasi di setiap lini bisnis. Sistem ini dirancang untuk memastikan seluruh aktivitas Perseroan berjalan sesuai regulasi dan prosedur yang telah ditentukan, sekaligus mendukung tercapainya target Perseroan secara berkelanjutan. Fungsi pengawasan atas implementasi sistem pengendalian ini dilakukan oleh Internal Audit, yang berperan memastikan kelancaran operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, keakuratan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap pengelolaan operasional dan keuangan. Pelaksanaan sistem ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Internal Audit, tetapi juga melibatkan koordinasi erat antara Dewan Komisaris, jajaran manajemen, dan karyawan, sehingga tercipta budaya kerja yang mendukung efektivitas pengendalian di seluruh aspek organisasi.

Berdasarkan *Board Manual* PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Direksi diwajibkan untuk menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif guna melindungi aset dan investasi Perseroan. Sistem Pengendalian Internal mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - a. Integritas, nilai etika dan kompetensi pegawai;
 - b. Filosofi dan gaya manajemen;
 - c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab;
 - d. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha yang relevan.
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perusahaan.
5. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perseroan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.
6. Untuk membantu Direksi dalam melakukan perencanaan, pengendalian, koordinasi dalam pengawasan, penilaian atas sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaan kegiatan perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan, dibentuk fungsi Internal Audit.

To ensure optimal operations, the Company implements an integrated internal control system in every Business Field. This system is designed to ensure that all of the Company's activities run in accordance with predetermined regulations and procedures, while supporting the achievement of the Company's targets in a sustainable manner. The supervisory function for the implementation of this control system is carried out by Internal Audit, whose role is to ensure smooth operations, efficient use of resources, accuracy of financial reporting, and compliance with operational and financial management. The implementation of this system is not only the responsibility of Internal Audit, but also involves close coordination between Board of Commissioners, management, and employees, thus creating a work culture that supports the effectiveness of controls in all aspects of the organization.

Based on the Board Manual of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Board of Directors is required to establish an effective internal control system to protect the Company's investments and assets. This Internal Control System includes the following:

1. A disciplined and structured internal control environment in the Company, consisting of:
 - a. Integrity, ethical values and employee competence;
 - b. Management philosophy and style;
 - c. The ways management carries out its authorities and responsibilities;
 - d. Organizing and developing human capital; and
 - e. Attention and direction taken by the Board of Directors.
2. Business risk assessment and management as a process to identify, analyze, assess and manage relevant business risks.
3. Control activities, actions taken during a process to control the Company's activities at every level and unit in the organizational structure, including the authorities, authorization, verification, reconciliation, work performance appraisal, division of duties, and security of Company assets.
4. Information and communication system, as is a process for presenting reports on operational, financial, and observance of the rules and regulations applicable to the Company.
5. Monitoring, as a process for evaluating the internal control system quality, including the internal audit function at each level and unit in the Company's organizational structure, so that it can be carried out optimally, provided that irregularities occur are reported to Board of Directors and copies submitted to Audit Committee.
6. Assistance to Board of Directors in planning, controlling, coordinating supervision, evaluating the management control system, and implementing Company activities and providing suggestions for improvement, through the established Internal Audit.

7. Internal Audit dipimpin oleh *Head of Internal Audit* yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi Internal Audit diatur dengan Keputusan Direksi.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL, SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Pengendalian keuangan dan operasional dilaksanakan dengan menyediakan informasi yang relevan bagi setiap level manajemen, Pemegang Saham, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, pengendalian ini didukung oleh penerapan kebijakan, prosedur, dan instruksi kerja yang dirancang khusus untuk memastikan pencapaian sasaran dan target Perseroan. Sistem pengendalian ini mencakup seluruh aspek operasional dan keuangan yang ada di dalam Perseroan, sehingga mampu mendukung efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan fungsi bisnis secara menyeluruh.

TUJUAN PENGENDALIAN

Tujuan Sistem Pengendalian Internal di WIKA adalah:

1. Tujuan Kepatuhan, yaitu menjamin bahwa semua kegiatan usaha perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh perusahaan;
2. Tujuan Informasi, yaitu menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Tujuan Operasional, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi perusahaan dari risiko kerugian.

PENJELASAN KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DENGAN KERANGKA YANG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL (COSO – INTERNAL CONTROL FRAMEWORK); DAN TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal di Perseroan merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Direksi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana, dengan tujuan memberikan keyakinan yang cukup dalam pencapaian Visi, Misi, Sasaran, serta Tujuan Perseroan.

Kerangka pengendalian internal Perseroan didasarkan pada standar internasional dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Menurut COSO, tujuan dari pengendalian internal meliputi aspek operasional, pelaporan, dan kepatuhan.

7. The Internal Audit is led by the Head of Internal Audit and in carrying out their duties is responsible to the President Director. Further details on the Internal Audit duties and functions are regulated by a Board of Directors' Decree

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL, AS WELL AS COMPLIANCE WITH OTHER LAWS AND REGULATIONS

Financial and operational control is implemented by providing relevant information to every level of management, Shareholders and related stakeholders which is used as the basis for making decisions. In addition, this control is supported by the implementation of policies, procedures, and work instructions specifically designed to ensure the achievement of the Company's goals and targets. This control system covers all operational and financial aspects within the Company, so as to support efficiency and effectiveness in carrying out business functions as a whole.

CONTROL OBJECTIVES

WIKA's Internal Control System objectives include:

1. Compliance Objectives to ensure that all business activities in the Company are carried out in accordance with prevailing laws and regulations issued by the Government, and internal Company policies and procedures.
2. Information Objectives to ensure that reports provided are correct, complete, timely and relevant as required for reliable and accountable decision-making.
3. Operational Objectives to ensure that there is increased effectiveness and efficiency in the use of assets and other resources to protect the Company from the risk of losses.

EXPLANATION ON THE SUITABILITY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH INTERNATIONALLY RECOGNIZED FRAMEWORK (COSO – INTERNAL CONTROL FRAMEWORK); AND REVIEW ON THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company's Internal Control System is a control process carried out sustainably by Board of Directors, Structural Officials, Functional Officials and Executives designed to provide adequate assurance of achievement of the Company's Vision, Mission, Goals and Objectives.

The Company's internal control system framework is based on to the international standard of the Committee of Sponsoring Organizations (COSO). According to COSO, the objectives of internal control include operational, reporting, and compliance aspects.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi. Sementara tujuan pelaporan menitikberatkan pada kualitas pelaporan keuangan yang andal, tepat waktu, transparan, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Perseroan. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

Penerapan sistem pengendalian internal menurut COSO mencakup lima komponen yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Aktivitas Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Kegiatan Pemantauan.

Pemeriksaan Internal Audit melibatkan pengujian pengendalian intern (*internal control*) di tiga aspek utama, yakni Operasional, Akuntansi/Keuangan, dan Kepatuhan. Selain itu, proses audit ini bersinergi dengan fungsi-fungsi lain dalam operasional Perseroan, termasuk manajemen Mutu, *Safety, Health and Environment* (SHE), Risiko dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) yang mengacu pada kerangka COSO.

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian merupakan elemen penting yang berdampak signifikan pada semua aspek dalam sistem pengendalian internal, terutama yang berkaitan dengan etika bisnis dan *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini tertanam dalam setiap bagian Perseroan saat melaksanakan aktivitas dan menjalankan tanggung jawab pengendalian yang menjadi tugas utama mereka. Lingkungan pengendalian dirancang dengan tujuan untuk menjadi landasan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi komponen pengendalian internal lainnya. Oleh karena itu, lingkungan pengendalian di Perseroan harus memenuhi beberapa aspek berikut:

1. Penegakan integritas dan nilai etika diimplementasi dengan cara:
 - a. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku sebagaimana dituangkan dalam budaya Perseroan, terdapat aturan perilaku yang berisi standar etika dan pedoman perilaku bagi pegawai di lingkungan Perseroan;
 - b. Memberikan keteladanan yang nyata dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan di Perseroan dalam bentuk tindakan dan ucapan;
 - c. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat jika terdapat penyimpangan atas kebijakan dan prosedur, atau terjadinya pelanggaran terhadap aturan perilaku yang telah ditetapkan oleh Perseroan;
 - d. Manajemen dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian *intern* dengan memberikan penjelasan yang memadai;
 - e. Menghilangkan peluang/godaan untuk berperilaku tidak etis.
2. Komitmen terhadap kompetensi diwujudkan dengan:
 - a. Mengidentifikasi dan mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di lingkungan Perseroan;
 - b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di lingkungan Perseroan;

Operational objectives are related to the operational effectiveness and efficiency. The reporting objectives are related to the interests of financial reporting that meet the criteria of reliability, timeliness, transparency and other requirements stipulated by the regulator and the Company. While the compliance objectives are related to the Company's compliance with laws and regulations.

The internal control elements according to COSO include the following components:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication;
5. Monitoring Activities

Internal Audit involves examining internal controls in three main aspects, namely Operations, Accounting/ Finance and Compliance. In addition, this audit process synergizes with other functions in the Company's operations, including Quality management, Safety, Health and Environment (SHE), Risk and Security Management System (SMP) which refers to the COSO framework.

CONTROL ENVIRONMENT

The control environment is an important thing that has a significant impact on all aspects of the internal control system, especially related to business ethics and GCG. This is embedded in every part of the Company in carrying out activities and carrying out control responsibilities that are their main tasks. The control environment is built as an effective foundation to support the execution of other internal control components, so that the Company's control environment meets the following aspects:

1. Enforcement of integrated and ethical values implementation by:
 - a. Developing and complying with rules of conduct as outlined in the corporate culture, including rules of conduct that contain ethical standards and codes of conduct for employees within the Company.
 - b. Providing real examples for the implementation of rules of conduct at each level of leadership in the Company in the form of actions and speech.
 - c. Enforcing appropriate disciplinary action if there are deviations from policies and procedures, or violations of rules of conduct established by the Company.
 - d. Explaining and accounting by Management for any intervention or neglect of internal control by providing adequate explanation.
 - e. Eliminating the opportunity/temptation to behave unethically.
2. Commitment to competence is realized by:
 - a. Identifying and defining activities required to complete tasks and functions at each position within the Company.
 - b. Developing competency standards for each task and function at each position within the Company.

- c. Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya;
 - d. Memilih pejabat yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang dapat dijabarkan secara akurat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menunjang aktivitas Perseroan.
3. Kepemimpinan kondusif yang ditunjukkan oleh Direksi dengan:
 - a. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan untuk dimitigasi sebelum keputusan diambil oleh Direksi secara kolegal;
 - b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja;
 - c. Mendorong setiap unit kerja menerapkan Sistem Pengendalian Internal Perseroan;
 - d. Melindungi aset dan informasi dari akses atau penggunaan oleh pihak yang tidak sah;
 - e. Melakukan interaksi yang intensif dengan pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional;
 - f. Menunjukkan sikap yang adil dan tidak memihak dalam memberi penugasan kepada pejabat struktural dan/atau fungsional.
 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan dilakukan dengan aktivitas:
 - a. Menyesuaikan dengan *core* bisnis dan sifat kegiatan Perseroan;
 - b. Memberikan penjelasan kepada pegawai terkait dengan uraian pekerjaan (*job description*) yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Memberikan kejelasan hubungan jenjang pelaporan internal dalam lingkungan Perseroan;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian serta perbaikan terhadap struktur organisasi bilamana terjadi perubahan lingkungan strategis;
 - e. Menetapkan jumlah dan komposisi jabatan pegawai yang disesuaikan dengan formasi manajerial dan non manajerial.
 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dengan memperhatikan aspek:
 - a. Wewenang diberikan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya melalui *job description* yang selaras dengan ketentuan otorisasi perusahaan;
 - b. Pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana harus memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan mempunyai keterkaitan dengan unit kerja lain di lingkungan perusahaan sehingga perlu adanya koordinasi yang intens dan efektif;
 - c. Pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana harus memahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab dan wewenangnya sepenuhnya berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern.
 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan *Human Capital* dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Penetapan prosedur dari tahap rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen;
 - c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- c. Conducting training and mentoring to help employees maintain and improve their work competencies.
 - d. Selecting officials with managerial skills and technical experience that can be accurately seen in the implementation of their duties and functions in support of the Company activities.
3. Conducive leadership shown by the Board of Directors by:
 - a. Considering the risks in decision-making to be mitigated before the Board of Directors makes decisions collegially.
 - b. Implementing performance-based management.
 - c. Encouraging each work unit to implement the Company's Internal Control System.
 - d. Protecting assets and information from unauthorized access or use.
 - e. Conducting intensive interaction with structural and/or functional officials.
 - f. Exhibiting a fair and impartial attitude when assigning structural and/or functional officials.
 4. Establishing an organizational structure that suits the Company's needs is achieved by:
 - a. Adjusting the core business and the nature of the Company's activities.
 - b. Providing explanations to employees related to their job description under their responsibility.
 - c. Providing clarity of internal reporting relationships with the Company.
 - d. Carrying out evaluations and adjustments and improvements to the organizational structure whenever there is a change in the strategic environment.
 - e. Establishing the number and composition of employee positions, adjusted to managerial and non-managerial formations.
 5. Delegating appropriate authority and responsibilities by taking into account:
 - a. The authority given to structural officials, functional officials and executors matches their level of responsibility in their job descriptions in line with the Company's authorization provisions.
 - b. Structural officials, functional officials and implementers must understand that the authority and responsibilities given link to other work units within the Company, so intense and effective coordination is required.
 - c. Structural officials, functional officials and implementers must understand that the implementation of their responsibilities and powers is wholly related to the Internal Control System's application.
 6. Preparing and implementing sound Human Capital development policies is carried out by taking into account:
 - a. Established procedures from the recruitment stage to employees leaving.
 - b. Background searches of prospective employees in the recruitment process.
 - c. Adequate periodic supervision of employees.

7. Perwujudan dari peran Internal Audit yang efektif dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan evaluasi dan penilaian atas ketaatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Perseroan;
 - b. Memberikan penilaian yang objektif atas kecukupan *internal control* atas penerapan Sistem Pengendalian Intern Perseroan;
 - c. Memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal Perseroan.

PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko adalah tahap penting dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Perseroan. Tujuan dari penilaian risiko ini adalah untuk menentukan risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani secara tepat, sehingga tingkatan risiko yang dihadapi oleh Perseroan dapat berkurang hingga batas nilai risiko yang dapat diterima. Manajemen memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebelum melakukan penilaian, terlebih dahulu harus ditetapkan tujuan aktivitas kegiatan hingga ke tingkatan operasional. Tujuan yang ditetapkan oleh Perseroan harus memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan memiliki jangka waktu yang jelas, serta harus dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Manajemen akan menetapkan strategi dan menerapkannya secara konsisten.

Penilaian risiko pada tingkat Perseroan dilakukan melalui:

1. Penetapan Tujuan Perseroan Penetapan sasaran dan target bisnis harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan risiko-risiko potensial yang mempengaruhi secara negatif terhadap upaya pencapaian sasaran/target. Manajemen akan selalu menetapkan target bisnis dalam koridor toleransi risiko yang masih dapat ditanggung oleh Perseroan;
2. Penetapan Tujuan pada Tingkat Kegiatan Operasional Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan berdasarkan pada tujuan dan kaitannya dengan rencana strategis Perseroan, dengan tujuan pada tingkatan kegiatan operasional saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya yang diarahkan pada relevansi dengan seluruh kegiatan utama Perusahaan;
3. Identifikasi Risiko Identifikasi risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi setiap peristiwa risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Perseroan yang bersumber dari faktor internal dan eksternal Perseroan, maupun faktor lainnya yakni:
 - a. Faktor internal meliputi antara lain infrastruktur, kebijakan/ketentuan Perseroan, sumber daya manusia, proses bisnis, keuangan, investasi dan teknologi informasi yang dapat diaplikasikan;
 - b. Faktor eksternal meliputi antara lain lingkungan alam, ekonomi, sosial, politik dan perkembangan teknologi informasi;
 - c. Faktor lainnya, seperti kegagalan pencapaian misi, tujuan dan sasaran masa lalu dan program yang kompleks dan penting.

7. The embodiment of Internal Audit effective role is carried out by:
 - a. Evaluating and assessing compliance with the Company 's Internal Control System.
 - b. Providing an objective assessment on the internal control adequacy related to its application of the Company 's Internal Control System.
 - c. Providing suggestions for improvements and recommendations in the application of the Company 's Internal Control System.

RISK ASSESSMENT

Risk assessment is an important stage to identify and analyze risks that have the potential to hinder the achievement of Company 's goals. This risk assessment 's purpose is to identify priority Corporate risks that must be handled appropriately, so that the Company 's risk level can be reduced to the extent that the risk value becomes acceptable. Management has an obligation to conduct risk assessments in carrying out its duties and functions. Before conducting an assessment, the objectives of the activity must first be set down to the operational level. The objectives set by the Company must contain statements and directions that are specific, measurable, achievable, realistic, and have a clear timeframe, and must be communicated to all employees. To achieve these objectives, Management will establish strategies and implement them consistently.

Risk assessments at the Company level is performed by:

1. Determination of Company goals Establishing business goals and targets should be conducted by first taking into account potential risks that negatively affect the target achievement. Management will always set business targets within the risk tolerance corridor that can still be borne by the Company.
2. Determination of objectives at the operational level Establishing objectives at the activity level based on the objectives and their relation to the Company 's strategic plan, with the operational activity level objectives being complementary, mutually supportive and non contradictory to each other, and directed to the relevance of all major activities of the Company.
3. Risk identification Risk identification is carried out by identifying any risk events that can hamper the achievement of corporate objectives coming from internal and external factors of the Company, as well as other factors namely:
 - a. Internal factors including infrastructure, Company policies/provisions, human capital, business, finance, investment and information technology processes that are applied.
 - b. External factors including natural environment, economic, social, political and information technology developments.
 - c. Other factors, such as a failure of mission accomplishments, past goals and targets and complex and important programs.

4. **Analisis Risiko**
Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya (*likelihood*) risiko dan tingkat dampak risiko dari hasil identifikasi risiko sebagai acuan untuk mengelolanya dengan pengukuran risiko berdasarkan pendekatan risiko inheren dan risiko residual. Tujuan analisis risiko adalah untuk memperoleh risiko potensial yang perlu memperoleh prioritas pengendalian risiko karena dapat menghambat pencapaian tujuan Perseroan dan menyediakan data untuk membantu dalam melakukan evaluasi dan menetapkan strategi respon berupa mitigasi risiko/*action plan*.

AKTIVITAS PENGENDALIAN

Pengendalian Operasional dan Keuangan meliputi:

1. **Pengendalian Fisik Aset**
Pengendalian fisik aset di lingkungan Perseroan diarahkan untuk mengamankan dan melindungi aset-aset berisiko;
2. **Pemisahan Fungsi**
Pemisahan fungsi diarahkan untuk mengurangi kesalahan, kecurangan dan pemborosan. Pemisahan fungsi di lingkungan Perseroan dilakukan dengan memastikan bahwa:
 - a. Tidak seorang pun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama kejadian dan transaksi dari awal sampai akhir proses;
 - b. Pemisahan tanggung jawab dan tugas atas kejadian dan transaksi kepada pegawai yang berbeda berkaitan dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, review dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.
3. **Pelaksanaan Kejadian dan Transaksi**
Pelaksanaan kejadian dan transaksi harus diotorisasi dan dilaksanakan oleh pegawai yang berwenang. Untuk melaksanakan kejadian dan transaksi yang sesuai, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa hanya kejadian dan transaksi yang valid dilaksanakan, sesuai dengan keputusan Direksi dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh kejadian dan transaksi yang dilaksanakan telah diotorisasi serta dilakukan oleh pegawai yang bertindak sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya;
 - c. Kondisi dan syarat otorisasi secara jelas dikomunikasikan kepada Pimpinan Unit Kerja dan pegawai.
4. **Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian dan transaksi**
Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian dan transaksi wajib dilakukan di lingkungan Perseroan untuk menjamin tersedianya informasi yang relevan dan tepercaya untuk pengambilan keputusan dan menjamin pencatatan yang akurat tepat waktu;
5. **Pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya;**
6. **Dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian.**

4. **Risk Analysis**
A risk analysis is conducted to determine the likelihood of risk, and the level of risk impact, through risk identification as a reference for managing and measuring risk according to an inherent risk approach and residual risk. The purpose of a risk analysis is to identify potential risks that need to be prioritized for risk control, as they can hinder the achievement of corporate objectives, and to provide data to assist in the evaluation and establish of response strategies in the form of risk mitigation/*action plans*.

CONTROL ACTIVITIES

Operational and Financial Control includes:

1. **Physical Control of Assets.**
The physical control of assets in the Company aimed at securing and protecting risk assets.
2. **Separation of Functions.**
Separation of functions is directed at reducing errors, fraud and waste. Separation of functions within the Company is carried out by ensuring that:
 - a. No one is allowed to control all the main aspects in events and transactions from the beginning to the end of the process.
 - b. Separation of responsibilities and duties for events and transactions to different employees relating to authorization, approval, processing and recording, payment or receipt of funds, reviews and audits, and the functions of storing and handling assets.
3. **Implementation of Events and Transactions**
The implementation of events and transactions must be authorized and carried out by authorized employees. To carry out the appropriate events and transactions, the following should be considered:
 - a. Control is carried out to ensure that only valid events and transactions are carried out, in accordance with the Board of Directors' decisions and applicable provisions.
 - b. Control is carried out to ensure that all events and transactions carried out have been authorized and carried out by employees who act according to their capacities and responsibilities.
 - c. The conditions and terms of authorization are clearly communicated to the Head of the Work Unit and employees.
4. **Accurate and timely recording of events and transactions.**
Accurate and timely recording of events and transactions must be carried out within the Company to ensure the availability of relevant and reliable information for decision-making and to ensure timely and accurate recording.
5. **Limited access and accountability for resources and records.**
6. **Good documentation on events and transactions control.**

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Direksi memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara lengkap mengenai kegiatan usaha, mencakup aspek keuangan dan non-keuangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Penyampaian informasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan waktu dan format yang telah ditetapkan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Komunikasi atas informasi ini harus dilakukan secara efektif, baik dalam lingkungan internal Perseroan maupun kepada pihak eksternal yang relevan.

AKTIVITAS PEMANTAUAN

Pemantauan secara berkelanjutan dilaksanakan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal Perseroan dalam periode waktu tertentu. Proses pemantauan ini diimplementasikan melalui:

1. Pemantauan rutin terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*on going monitoring*) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan-tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas;
2. Evaluasi oleh unit terpisah/independen (*separate evaluation*) diselenggarakan melalui penilaian mandiri, revidu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan.

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Manajemen Perseroan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal di setiap jenjang organisasi. Sementara itu, Internal Audit melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terkait kecukupan dan efektivitas Sistem Pengawasan Internal, serta pengawasan yang mendukung asersi Direksi mengenai efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan.

Hasil evaluasi ini disampaikan kepada Manajemen, yang kemudian ditindaklanjuti dan dimonitor untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern cukup memadai dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Hasil evaluasi tahunan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal di Perseroan menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, sistem pengendalian internal dinilai memadai. Perseroan telah mengambil langkah-langkah efektif untuk menjaga keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

INFORMATION AND COMMUNICATION

The Board of Directors has an obligation to submit complete information regarding business activities, including financial and non-financial aspects, relating to the implementation of its duties and responsibilities. The submission of such information must be done in accordance with the predetermined time and format, in order to support the smooth implementation, supervision, and accountability. Communication of this information must be carried out effectively, both within the Company's internal environment and to relevant external parties.

MONITORING ACTIVITIES

Monitoring is the process of evaluating the quality of the Company's internal control system for a certain period of time. Monitoring is carried out through:

1. Routine monitoring of ongoing activities, carried out through routine management activities, supervision, benchmarking, reconciliation and other actions related to the tasks.
2. Separate evaluations are carried out through self assessments, reviews, and testing the Company's internal control system effectiveness.

INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION EVALUATION

The Company's management evaluates the implementation of internal control system at every level of the organization. Meanwhile, Internal Audit carries out a comprehensive evaluation of the adequacy and effectiveness of the Internal Control System, as well as supervision that supports Board of Directors' assertions regarding the effectiveness of Internal Control System implemented.

This evaluation is submitted to Management, which is then followed up and monitored to ensure that the Internal Control System is adequate in supporting the achievement of the Company's goals and objectives.

BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS' STATEMENT ON THE ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The results of annual evaluation on the effectiveness of the Company's internal control system indicate that, overall, the internal control system is considered adequate. The Company has taken effective steps to maintain security, accountability, and compliance in carrying out its operational activities

Manajemen Risiko

Risk Management

GAMBARAN UMUM MENGENAI SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Sistem Manajemen Risiko Perseroan dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang dapat memengaruhi operasional maupun kinerja keuangan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh, sistem ini mencakup evaluasi risiko strategis, operasional, keuangan, hingga kepatuhan, yang diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan perusahaan didasarkan pada mitigasi risiko yang efektif serta pengoptimalan peluang yang mendukung keberlanjutan usaha. Melalui penerapan ini, Perseroan tidak hanya melindungi nilai perusahaan tetapi juga memperkuat ketahanan dan fleksibilitasnya dalam menghadapi tantangan bisnis.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Perseroan secara konsisten melakukan penilaian risiko usaha untuk merancang strategi mitigasi yang efektif. Penerapan sistem manajemen risiko di Perseroan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dan berlaku di WIKA Grup. Untuk memastikan bahwa manajemen risiko diimplementasikan secara terstruktur, Divisi Manajemen Risiko, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko di WIKA Grup, telah menyusun:

1. Piagam Manajemen Risiko;
2. Kebijakan Manajemen Risiko;
3. Pedoman Sistem Manajemen Risiko;
4. Prosedur Manajemen Risiko;
5. Instruksi Kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko.

Terdapat 4 (empat) program utama yang telah dibentuk oleh Divisi Manajemen Risiko WIKA, meliputi:

1. Pelaksanaan pengukuran Maturitas Manajemen Risiko;
2. Peningkatan kompetensi PIC Risk di lingkungan WIKA Grup;
3. *Workshop* Manajemen Risiko;
4. Pelaksanaan *four eyes principles*.

Adapun, Perseroan mengukur tingkat kematangan penerapan sistem manajemen risiko menggunakan mekanisme *Risk Maturity Level* (RML). Evaluasi ini memberikan gambaran tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Perseroan, yang dikategorikan dalam 5 (lima) ruang lingkup dengan dimensi sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT OVERVIEW OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company's Risk Management System is designed to identify, analyze and manage various risks that may affect operational and financial performance. With a structured and comprehensive approach, the system includes evaluation of strategic, operational, financial, and compliance risks, which are integrated into decision-making process. Risk Management function is responsible for ensuring that all company policies and decisions are based on effective risk mitigation and optimization of opportunities that support business sustainability. Through this implementation, the Company not only protects its corporate value but also strengthens its resilience and flexibility in facing business challenges.

REVIEW ON THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company consistently conducts business risk assessments to develop appropriate mitigation strategies. The risk management system in the Company has referred to the policy originating from the Board of Directors and applicable in WIKA's Group. To ensure the implementation of structured risk management, Risk Management Division as the Division that oversees the implementation of risk management in WIKA's Group has compiled:

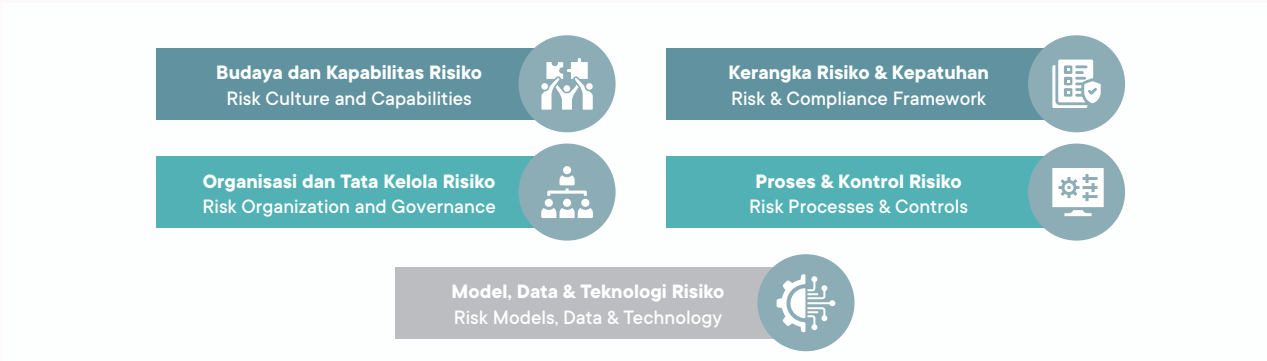
1. Risk Management Charter;
2. Risk Management Policy;
3. Risk Management System Guidelines;
4. Risk Management Procedures;
5. Work Instructions related to Risk Management implementation.

There are 4 (four) programs that have been established by WIKA's Risk Management Division, including:

1. Implementation of Risk Management Maturity measurement;
2. Increasing the competence of PIC Risk within the WIKA's Group;
3. Risk Management Workshop;
4. Implementation of the four eyes principles.

Meanwhile, the Company measures the maturity level of risk management system implementation using the Risk Maturity Level (RML) mechanism. This evaluation provides an overview of the maturity level of risk management in the Company, which is categorized into 5 (five) scopes with the following dimensions:

Dimensi Risk Maturity Index (RMI)



Hasil assessment *Risk Maturity Index* (RMI) 2024 di lingkungan WIKA menunjukkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dengan Skor: 2,1. Tingkat Kematangan: Fase Berkembang.

The results of 2024 Risk Maturity Index (RMI) assessment in WIKA's environment show the level of maturity of risk management implementation with a score of 2.1, Maturity Level: Developing Phase.



PERNYATAAN MANAJEMEN ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Evaluasi tahunan terhadap sistem manajemen risiko Perseroan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang memuaskan dan dinilai cukup memadai. Penilaian ini terlihat dari implementasi pengelolaan risiko yang dilakukan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain:

MANAGEMENT STATEMENT ON THE ADEQUACY OF CORPORATE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The annual evaluation results show that the risk management system in the Company for 2024 is considered adequate. This assessment can be seen from the implementation of risk management through various strategic activities, among others:

Rencana Program Kerja RKAP 2024 2024 RKAP Work Program Plan	Realisasi Program Kerja s.d Desember 2024 Realization of Work Program until December 2024
Pelaksanaan <i>assessment</i> (internal/external) pengguna jasa, mitra KSO, dan seleksi proyek. Implementation of assessments (internal/external) of service users, JO partners, and project selection.	Terlaksananya <i>assessment</i> terhadap pengguna jasa, mitra KSO dan Proyek dalam bentuk Nota Rekomendasi Assessment of service users, JO partners and Projects in the form of Recommendation Notes has been carried out
Menetapkan pengguna jasa <i>green lane</i> setiap 3 bulan. Determining green lane service users every 3 months	Tersusunnya daftar pengguna jasa <i>green lane</i> sebanyak 4 (empat) dokumen Compilation of a list of green lane service users as many as 4 (four) documents
Pelaksanaan pelatihan untuk tim pelaksanaan <i>assessment</i> . Implementation of training for the assessment team.	Tersertifikasinya 10 (sepuluh) orang personil untuk CRMO, CRMP dan CCRM Certification of 10 (ten) personnel for CRMO, CRMP and CCRM
<i>Check Point Progress</i> 20%, 50%, dan 70% serta <i>Four Eyes</i> . Check Point Progress 20%, 50%, and 70% and Four Eyes.	Terlaksananya proses <i>check point</i> di setiap proyek sesuai jadwal yang ditentukan The check point process in each project according to the specified schedule has been carried out
SASAA di level Divisi dan Proyek. SASAA at the Division and Project levels.	Terlaksananya SASAA di 12 proyek Implementation of SASAA in 12 projects

Rencana Program Kerja RKAP 2024
2024 RKAP Work Program Plan

Realisasi Program Kerja s.d Desember 2024
Realization of Work Program until December 2024

Workshop Risk Maturity Indeks
Risk Maturity Index Workshop

Terlaksananya Program *Roadshow* Budaya Sadar Risiko (BUSARI) di divisi operasi dan entitas anak
Risk Awareness Culture Roadshow Program (BUSARI) in the operations division and subsidiaries has been held

Industri *attractive outlook* dan evaluasi terhadap proyek *on going* WIKA
Attractive industry outlook and evaluation of WIKA's ongoing projects

Tersusunnya dokumen *industry attractive*
Compilation of industry attractive documents

Standardisasi risiko strategis
Strategic risk standardization

Tersusunnya standarisasi risiko strategis
Strategic risk standardization has been compiled

Integrasi data agregasi risiko
Integration of risk aggregation data

Terlaksananya integrasi data agregasi risiko
Risk aggregation data integration has been implemented

Peningkatan kompetensi organ pengelola risiko
Increasing the competence of risk management organs

Tersertifikasinya seluruh organ pengelola risiko dari delapan organ pengelola risiko
Certification of all risk management organs from eight risk management organs

Benchmark

Terlaksananya *benchmark* ke PT PLN (Persero), PT Utama Karya (Persero) dan PT Pertamina (Persero) serta menjadi Perseroan yang menjadi target *benchmark* PT PGN Tbk.
Benchmark has been carried out to PT PLN (Persero), PT Utama Karya (Persero) and PT Pertamina (Persero) and becoming a company that is the target of the benchmark PT PGN Tbk.

Board Briefing Management

Terlaksananya *Board Briefing Management - Risk Management* pada 14 Oktober 2024.
Board Briefing Management - Risk Management has been held on October 14, 2024.

Evaluasi penerapan sistem manajemen risiko dilakukan dengan berbagai cara, antara lain seperti:

1. *Review* isi Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur Manajemen Risiko;
2. Sosialisasi Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur Manajemen Risiko;
3. Pelaksanaan mekanisme *Four Eyes* dan *Check Point*;
4. *Assessment Risk Maturity Level (RML)* setiap tahun untuk mencapai target *score* maturitas risiko secara WIKA sesuai Kebijakan Manajemen Risiko.

The Risk Management System is evaluated through various methods, among others:

1. Review of the contents of Risk Management Policies, Guidelines, and Procedures;
2. Dissemination of Risk Management Policies, Guidelines, and Procedures;
3. Implementation of Four Eyes and Check Point mechanism;
4. Assessment of Risk Maturity Level (RML) every year to achieve the risk maturity score target in accordance with the Risk Management Policy

Dengan demikian, hasil evaluasi tahunan menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko di Perseroan sepanjang tahun 2024 telah memadai dengan perolehan skor *Risk Maturity Level (RML)* sebesar 2.1.

The annual evaluation results show that the implementation of risk management in the Company throughout 2024 has been adequate with the acquisition of a Risk Maturity Level (RML) score of 2.1.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO DAN JUMLAH PEGAWAI

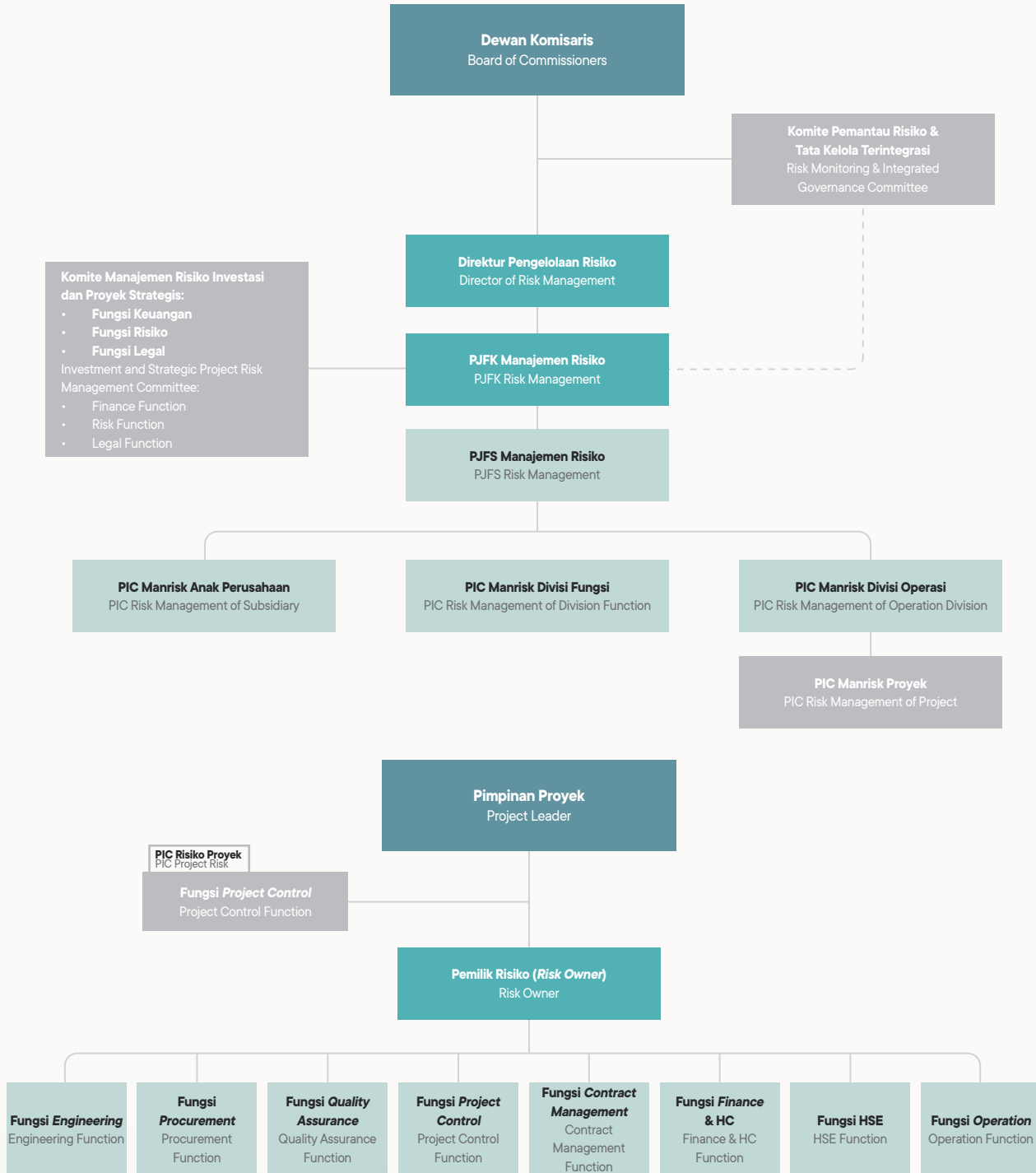
RISK MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND NUMBER OF EMPLOYEES

Perseroan menjalankan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan mendukung keberlanjutan bisnis.

The Company implements a risk management system in accordance with the Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. This effort aims to ensure that all operational activities run in line with the principles of good governance and support business sustainability.

Sejak 31 Mei 2018, Perseroan membentuk Departemen Manajemen Risiko, yang kemudian diubah menjadi Divisi Manajemen Risiko. Divisi ini berada di bawah pengawasan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Transformasi ini menegaskan komitmen Perseroan dalam memperkuat tata kelola risiko secara menyeluruh dan mendukung pencapaian visi serta misi Perseroan. Berikut struktur organisasi yang mendukung Sistem Manajemen Risiko:

Since May 31, 2018, the Company established a Risk Management Department, which was later changed to Risk Management Division. This division is under supervision of Director of Finance and Risk Management. This transformation emphasizes the Company's commitment to strengthen risk governance as a whole and support the achievement of the Company's vision and mission. The following is the organizational structure that supports Risk Management System:



Profil Pejabat Manajemen Risiko

Risk Management Official Profile



Muhamad Abdi
SVP Risk Management Division
SVP Risk Management Division

Menjabat Sejak 22 Mei 2024
Served since Mei 22, 2024

Kewarganegaraan Indonesia	Nationality Indonesia
Usia 45 tahun per 31 Desember 2024	Age 45 years as of December 31, 2024
Domisili Jakarta Timur, Indonesia	Domicile East Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Magister Manajemen Universitas Indonesia (2003)	Educational Background Master of Management, University of Indonesia (2003)
Pengalaman Kerja 1. Senior Manager Project Control, Risk Management Division (2023) 2. Wakil Pimpinan Proyek 1 Palu-3 Coal Fired Steam Power Plant (2x50 MW) (2022) 3. Manajer Sub Divisi Perencanaan dan Pengendalian Proyek Divisi Power dan Energi (2020)	Work Experience 1. Senior Manager Project Control, Risk Management Division (2023) 2. Deputy Project Leader 1 Palu-3 Coal Fired Steam Power Plant (2x50 MW) (2022) 3. Manager of Sub Division of Planning and Project Control, Power and Energy Division (2020)
Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku Certified Corporate Risk Manager penyelenggara BPKP (2024)	Applicable Education and/or Professional Certification Certified Corporate Risk Manager, organized by BPKP (2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Menjabat sebagai Senior Vice President Risk Management Division berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.02.01/A.DIR.00099/2024 tanggal 22 September 2024.	Legal Basis for Appointment Appointed as Senior Vice President Risk Management Division based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.DIR.00099/2024 dated September 22, 2024.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Divisi Manajemen Risiko memiliki fungsi utama dalam penerapan, pengembangan, dan pengendalian implementasi sistem manajemen risiko serta manajemen proyek. Divisi ini juga bertanggung jawab atas asesmen dan penerapan Prinsip *Four Eyes* di tingkat perusahaan, yang terintegrasi dari semua fungsi manajemen. Hal ini dilakukan berdasarkan Visi/Misi WIKA untuk mencapai target produktivitas perusahaan dengan menerapkan *Enterprise Resource Planning* dan Sistem Manajemen WIKA yang berlaku di perusahaan, sesuai dengan SK No. 01.01/A.DIR.01738/2022 tanggal 1 Desember 2023.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Risk Management Division has the main function in the application, development, implementation control, assessment of the risk management system and project management as well as the application of *Four Eyes* Principles at the Company level which is integrated from all management functions, based on WIKA's Vision/Mission to achieve the Company's productivity targets by implementing *Enterprise Resource Planning* and WIKA's Management System applicable in the Company, in accordance with Decree No. 01.01/A.DIR.01738/2022 dated December 1, 2023.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEJABAT MANAJEMEN RISIKO

Wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pejabat Manajemen Risiko Perseroan dilaksanakan oleh Direktur *Human Capital Management*.

SERTIFIKASI PROFESI

Untuk mendukung optimalisasi penerapan manajemen risiko, Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas SDM. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko. Setiap penanggung jawab fungsi manajemen risiko di semua level telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko, seperti CRMO (*Certified Risk Management Officer*), CRMP (*Certified Risk Management Professional*), dan CRGP (*Certified Risk Governance Professional*), terutama di level BOD - 1.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

Untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pemahaman dalam mendukung pelaksanaan tugas, Penanggung Jawab fungsi manajemen risiko telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2024. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa mereka memperoleh wawasan terbaru dan keterampilan relevan dalam mengelola risiko Perseroan. Berikut ini adalah seminar, pendidikan, dan/atau pelatihan yang diikuti selama tahun 2024:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer by
Muhamad Abdi (SVP Risk Management Division)	Sertifikasi Certification	<i>Certified Corporate Risk Manager</i>	Oktober 2024 October 2024	BPKP
	Pelatihan Training	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko ke X 10th National Conference of Risk Management Professionals	13-14 Desember 2024 December 13-14, 2024	LSPMR
Awalia Rahmawati	Pelatihan Training	"Live Webinar GIRMA : "Standarisasi Risk Maturity Index BUMN "-Juknis (SK-8/DKU.MBU/12/2023" "Live Webinar GIRMA: "SOE Risk Maturity Index Standardization" - Technical Instructions (SK-8/DKU.MBU/12/2023"	12 Jan 2024 Jan. 12, 2024	GIRMA LSPMR
	Pelatihan Training	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko ke X 10th National Conference of Risk Management Professionals	13-14 Desember 2024 December 13-14, 2024	LSPMR
M. Rifqi Hermaryono	Webinar	<i>Managing Comprehensive Security Risk for Organization Resilience</i>	26 April 2024 April 26, 2024	GIRMA LSPMR
Aries Fakhrial	Sertifikasi Certification	CRMP	November 2024 November 2024	LSPMR

RISK MANAGEMENT OFFICIAL APPOINTMENT AND DISMISSAL

The authority to appoint and dismiss the Company's Risk Management Officer is exercised by Director of Human Capital Management.

PROFESSIONAL CERTIFICATION

To support the optimization of risk management implementation, The Company strives to improve the quality of its human capital. This commitment is realized through implementation of risk management certification. Each person in charge of the risk management function at all levels has obtained Risk Management Certification, such as CRMO (*Certified Risk Management Officer*), CRMP (*Certified Risk Management Professional*), and CRGP (*Certified Risk Governance Professional*), especially at the BOD - 1 level.

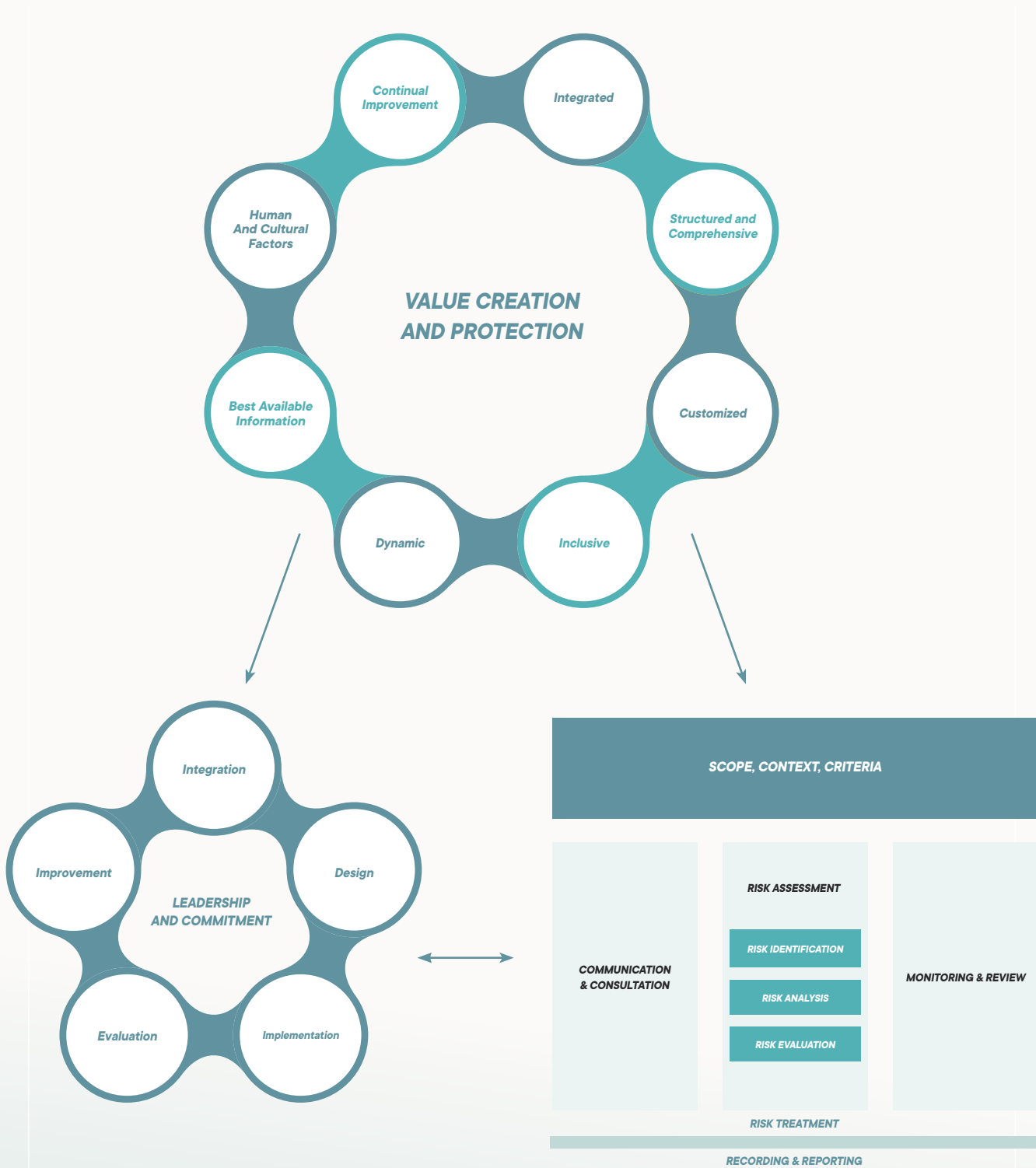
RISK MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT

To improve their competence, knowledge and understanding in supporting their duties, the person in charge of risk management function has participated in various competency development programs throughout 2024. This step was taken to ensure that they obtain the latest insights and relevant skills in managing the Company's risks. The following are seminars, education, and/or training attended during 2024:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer by
Aries Fakhrizal	Pelatihan Training	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko LSPMR ke X 10th LSPMR National Conference of Risk Management Professionals	12-13 Desember 2024 December 12-13, 2024	LSPMR
Agung Setiyono	Pelatihan Training	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko LSPMR ke X 10th LSPMR National Conference of Risk Management Professionals	12-13 Desember 2024 December 12-13, 2024	LSPMR
	Sertifikasi Certification	CRMP	Online / 14 Maret 2024 Online / March 14, 2024	LSPMR
	Webinar	"Live Webinar GIRMA : "Standarisasi Risk Maturity Index BUMN "-Juknis (SK-8/DKU.MBU/12/2023" "Live Webinar GIRMA: "SOE Risk Maturity Index Standardization" - Technical Instructions (SK-8/DKU. MBU/12/2023"	12 Januari 2024 January 12, 2024	GIRMA LSPMR
Chandra Dian Ikawati	Webinar	"Live Webinar GIRMA : "Cyber Security Risk Management " "	17 Mei 2024 May 17, 2024	GIRMA LSPMR
	Webinar	Live Webinar GIRMA " Managing Comprehensive Security Risk for Organization Resilience"	16 April 2024 April 16, 2024	GIRMA LSPMR
	Webinar	Regulasi dan Praktik Manajemen Risiko pada Institusi Sektor Publik di Indonesia Regulation and Risk Management Practices in Public Sector Institutions in Indonesia	31 Juli 2024 July 31, 2024	APWI (Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia) & GIRMA (Global Integrated Risk Management Association)
	MASTERCLASS	Implementasi Risk Maturity Index Implementation of Risk Maturity Index	29 Februari 2024 February 29, 2024	GIRMA LSPMR
Yumma Vinda	Pelatihan Training	ISO 22301 Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis ISO 22301 Business Continuity Management System	22-23 Agustus 2024 August 22-23, 2024	SUCOFINDO
Bagus Yuntar Kurniawan	Webinar	"Live Webinar GIRMA : Cyber Security Risk Management " "	17 Mei 2024 May 17, 2024	GIRMA LSPMR
Windari Afrita Sonya	Webinar	"Live Webinar GIRMA : Cyber Security Risk Management " "	17 Mei 2024 May 17, 2024	GIRMA LSPMR
	Sertifikasi Certification	CRMO	20-22 Mei 2024 May 20-22, 2024	LSPMR
Gery Riyandi	Pelatihan Training	ISO 22301 Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis ISO 22301 Business Continuity Management System	22-23 Agustus 2024 August 22-23, 2024	SUCOFINDO
Antonius Witur Bayu Purbantara	Sertifikasi Certification	CRMO	20-22 Mei 2024 May 20-22, 2024	LSPMR
Faris Setiawan	Sertifikasi Certification	CRMO	September 2024 September 2024	LSPMR
Rizky Nurdiansyah	Sertifikasi Certification	CRMO	September 2024 September 2024	LSPMR
Ilvan Prasetya Nugraha	Sertifikasi Certification	CRMO	September 2024 September 2024	LSPMR
I Komang Gama Setiawan	Sertifikasi Certification	CRMO	Oktober 2024 October 2024	LSPMR
Tri Jati Waluyo	Sertifikasi Certification	CRMO	Oktober 2024 October 2024	LSPMR

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT SYSTEM



Sistem Manajemen Risiko Wika tahun 2024 mulai memasuki tahap migrasi ke ISO 31000:2018 dengan mengikuti Prinsip, *Framework*, dan proses seperti gambar di atas.

Wika's Risk Management System in 2024 is in the migration stage to ISO 31000:2018 by following the Principles, Frameworks, and processes as shown above.

FRAMEWORK MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Integrasi Integration	Desain Design	Implementasi Implementation	Evaluasi Evaluation	Perbaikan Improvements
<ul style="list-style-type: none"> Integrasi Manrisk ke dalam perusahaan adalah proses penyatuan yang dinamis dan berulang, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya Perusahaan Manrisk menjadi bagian dari tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasional perusahaan The integration of risk management into the Company is a dynamic and iterative process of integration, and is adapted to the needs and culture of the Company Risk management is part of the Company's objectives, governance, leadership and commitment, strategy, objectives and operations. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman perusahaan dan konteksnya Penegasan komitmen penerapan Manajemen Risiko Penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan Alokasi sumber daya Penyiapan komunikasi dan konsultasi Understanding of the Company and its context Affirmation of commitment to the implementation of Risk Management Determination of the Company's roles, authorities, responsibilities and accountability Resource allocation Communication and consulting setup 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan rencana implementasi manajemen risiko yang sesuai, termasuk alokasi waktu dan sumber daya Mengidentifikasi dimana, kapan, bagaimana dan oleh siapa beragam jenis keputusan dibuat di seluruh perusahaan Memodifikasi proses pengambilan keputusan yang sesuai (jika diperlukan) Memastikan aturan dalam mengelola risiko dipahami dengan jelas dan diterapkan Develop an appropriate risk management implementation plan, including time and resource allocation Identify where, when, how and by whom various types of decisions are made across the enterprise Modify the decisionmaking process accordingly (if needed) Ensure that the rules for managing risk are clearly understood and implemented 	<ul style="list-style-type: none"> Mengukur kinerja kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator dan perilaku yang diharapkan. Menentukan apakah kerangka kerja manajemen risiko sudah sesuai untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan Measuring the performance of risk management framework on a regular basis against the objectives, implementation plans, indicators and expected behavior. Determine whether the risk management framework is appropriate to support the Company goals achievement. 	<ul style="list-style-type: none"> Adaptasi Perusahaan secara berkelanjutan memantau dan mengadaptasi apakah kerangka kerja manajemen risiko untuk mengatasi perubahan konteks eksternal dan internal Perbaikan berkesinambungan Perusahaan secara berkesinambungan meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, serta bagaimana proses manajemen risiko diintegrasikan Adaptation The Company continuously monitors and adapts whether the risk management framework is to cope with changing external and internal contexts Continuous improvement The Company continuously improves the suitability, adequacy and effectiveness of the risk management framework, as well as how the risk management process is integrated.

WIKA senantiasa berupaya menciptakan pengelolaan risiko yang efektif melalui penerapan *Framework* Manajemen Risiko. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perseroan ini terdiri dari seperangkat komponen yang membentuk fondasi dan mengatur organisasi, di mana pengelolaan risiko menjadi bagian yang melekat pada masing-masing Divisi, Proyek, dan Anak Perusahaan dalam WIKA.

WIKA's always strives to create effective risk management through the implementation of Risk Management Framework. The Company's Risk Management Framework consists of a set of components that form the foundation and govern the organization, where risk management becomes an inherent part of each Division, Project, and Subsidiary within WIKA's.

Leadership dan Komitmen ini dilakukan oleh *Top Management* agar budaya risiko dan pengelolaan risiko dapat terukur (akuntabilitas). Tujuan dari *Framework* Manajemen Risiko adalah membantu Perseroan dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi kerja secara signifikan. Pengelolaan (sistem manajemen) risiko dilakukan oleh Fungsi Manajemen Risiko (Divisi Manajemen Risiko, sesuai struktur organisasi di atas). Peningkatan tingkat kedewasaan (maturitas) mitigasi risiko dilakukan oleh para *risk owner*.

This Leadership and Commitment is carried out by Top Management so that risk culture and risk management can be measured (accountability). The purpose of Risk Management Framework is to significantly assist the Company in integrating risk management into its activities and work functions. Risk management (management system) is carried out by the Risk Management Function (Risk Management Division, according to the organizational structure above). Increasing the level of maturity (maturity) of risk mitigation is carried out by risk owners.

Framework Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018 adalah sebagai berikut:

1. *Leadership dan Komitmen Top Management*

Direksi dan Komisaris WIKA (manajemen puncak dan badan pengawas) sepenuhnya mendukung kebijakan ERM (*Enterprise Risk Management*) dan pengelolaan risiko di seluruh organisasi, serta berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk membangun, memelihara, dan melakukan perbaikan kerangka kerja ERM secara berkesinambungan untuk memastikan manajemen risiko terintegrasi di semua aktivitas Perseroan. Kepemimpinan dan komitmen ini diwujudkan dengan mengimplementasikan semua komponen *framework* manajemen risiko, menerbitkan dan menetapkan kebijakan manajemen risiko, memastikan sumber daya yang diperlukan telah dialokasikan untuk pengelolaan risiko, serta menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat yang diperlukan oleh Perseroan.

Direksi telah menetapkan sebuah Divisi yang dipimpin oleh *Senior Vice President Risk Management Division* yang di dalamnya terdapat Departemen Manajemen Risiko yang dipimpin oleh *Senior Manager Manajemen Risiko*. Departemen Manajemen Risiko dan PIC Manajemen Risiko di semua Divisi, serta Anak Perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan dan untuk memberikan saran dan dukungan kepada Direksi, Pemimpin Senior dan *stakeholder* lainnya. Departemen Manajemen Risiko melakukan *monitoring* dan *controlling* terhadap pelaksanaan serta pelaporan manajemen risiko Anak Perusahaan untuk memastikan visi misi perusahaan tercapai. Di mana ERM adalah tanggung jawab Manajemen, dan Auditor internal melalui kegiatan audit berbasis risiko bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan mendukung kegiatan identifikasi risiko serta merekomendasikan perbaikan kerangka kerja ERM.

2. Integrasi

- Integrasi Manajemen Risiko ke dalam perusahaan adalah proses penyatuan yang dinamis dan berulang, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya perusahaan;
- Manajemen Risiko menjadi bagian dari tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasional perusahaan.

Mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

- a. Konteks Organisasi membantu *Risk Owner* dan *PIC Risk* untuk menyusun konteks risiko. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan definisi ruang lingkup dan parameter risiko yang dikelola. Kegiatan ini akan mengarahkan proses manajemen risiko selanjutnya. Faktor eksternal meliputi aspek politik, hukum dan perundangan, ekonomi, regulator, penyedia layanan kesehatan, asosiasi profesi, lingkungan yang kompetitif baik lokal maupun regional dan pemangku kepentingan lainnya. Faktor internal meliputi kebijakan, prosedur, budaya perusahaan, sumber daya, sistem informasi, persepsi para pemangku kepentingan dan struktur organisasi;
- b. Proses Terintegrasi seperti perencanaan strategis, struktur tata kelola, operasional, persyaratan kepatuhan, sistem informasi, prosedur keuangan, manajemen perubahan, dan proses lain, yang diintegrasikan menjadi satu sistem manajemen;

The ISO 31000:2018-based Risk Management Framework is as follows:

1. *Leadership and Top Management Commitment*

WIKA's Board of Directors and Board of Commissioners (top management and supervisory body) fully support ERM (*Enterprise Risk Management*) policies and risk management throughout the organization, and are committed to allocating appropriate resources to build, maintain, and continuously improve the ERM framework to ensure integrated risk management in all of the Company's activities. This leadership and commitment is realized by implementing all components of the risk management framework, issuing and establishing risk management policies, ensuring that the necessary resources have been allocated for risk management, and establishing authority, responsibility, and accountability at the level required by the Company.

Board of Directors has established a Division headed by *Senior Vice President Risk Management Division* within which there is a Risk Management Department headed by *Senior Manager Risk Management*. The Risk Management Department and Risk Management PICs in all Divisions, as well as Subsidiaries are responsible for the management and maintenance and for providing advice and support to the Board of Directors, Senior Leaders and other stakeholders. The Risk Management Department monitors and controls the implementation and reporting of Subsidiaries' risk management to ensure that the Company's vision and mission are achieved. Where ERM is the responsibility of Management, and Internal Auditors through riskbased audit activities are responsible for ensuring compliance and supporting risk identification activities and recommending improvements to the ERM framework.

2. Integration

- Integration of Risk Management into the Company is a dynamic and iterative process of integration, and is adapted to the needs and culture of the Company;
- Risk Management is part of the Company's objectives, governance, leadership and commitment, strategy, objectives, and operations.

Consider the following aspects:

- a. The Organizational Context helps the Risk Owner and Risk PIC to develop a risk context. This activity is carried out to ensure the definition of the scope and parameters of the risk being managed. This activity will direct the next risk management process. External factors include aspects of politics, laws and regulations, economy, regulators, health service providers, professional associations, competitive environment both locally and regionally and other stakeholders. Internal factors include policies, procedures, corporate culture, resources, information systems, perceptions of stakeholders and organizational structure;
- b. Integrated Processes such as strategic planning, governance structures, operations, compliance requirements, information systems, financial procedures, change management, and other processes, which are integrated into one management system;

- c. Akuntabilitas Pengelolaan Risiko merupakan akuntabilitas dan wewenang fungsi manajemen. Penjabaran tugas ERM di setiap lini organisasi selaras dengan visi dan misi Perusahaan;
- d. *PIC Risk (Risk Advisor)* terdapat pada Departemen Manajemen Risiko yang bertugas sebagai koordinator, memberikan advokasi, dan fasilitator kepada *PIC Risk (Risk Officer)* yang berada dalam setiap lini organisasi. Ruang lingkup penugasan *PIC Risk (Risk Advisor)* kepada *PIC Risk (Risk Officer)* adalah:
 - i. Mempersiapkan, menerapkan, memelihara pemahaman ERM dan memberikan pelatihan secara berkelanjutan;
 - ii. Memberikan saran dan masukan pada semua tingkatan manajemen untuk keberlangsungan bisnis;
 - iii. Mengelola sumber-sumber daya eksternal yang diperlukan untuk mendukung kerangka kerja ERM;
 - iv. Mekanisme komunikasi dan pelaporan Departemen Manajemen Risiko terhadap setiap perubahan kerangka kerja ERM;
 - v. Bentuk tanggung jawab atas penerapan dan pemanfaatan perangkat ERM:
 - Mengusulkan alokasi sumber daya (*resources*) dalam pengelolaan risiko, meliputi:
 - SDM, kompetensi, keterampilan, dan pengalaman personel;
 - Proses dan prosedur terdokumentasi;
 - Sistem manajemen informasi dan pengetahuan;
 - Pengembangan profesional dan kebutuhan pelatihan.
 - vi. Menyiapkan komunikasi dan konsultasi manajemen risiko guna mendukung *framework* dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko secara efektif.

Manajemen Risiko perlu diintegrasikan ke dalam proses bisnis dan aktivitas Perseroan, di mana integrasi ini merupakan proses yang dinamis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya Perseroan. Manajemen Risiko menjadi bagian dari tujuan, sasaran, tata kelola, kepemimpinan, komitmen, strategi, dan aktivitas operasional Perseroan sehingga penerapan integrasi manajemen risiko oleh Perseroan antara lain:

- a. Melakukan pemetaan terhadap Konteks Internal dan Eksternal Perseroan secara detail sesuai dengan tujuan dan sasaran, yaitu menetapkan *Risk Context* dan *Stakeholder Analysis* (internal dan eksternal) sebagai salah satu dokumen *mandatory* dalam RKP, RKAP, dan RJPP;
- b. Mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi Perseroan dalam proses mencapai sasaran, di mana Perseroan menetapkan *Risk Register* sebagai dokumen *mandatory* lainnya dalam RKP, RKAP, dan RJPP;
- c. Mengintegrasikan hasil identifikasi potensi risiko dari konteks eksternal dan internal Perseroan ke dalam dokumen *Risk Register* yang meliputi Risiko Operasional di level Proyek dan Risiko Strategis di level Perseroan.

3. Desain:

Ketika mendesain kerangka kerja pengelolaan risiko, organisasi memeriksa dan memahami konteks eksternal dan internalnya.

Pemeriksaan terhadap konteks eksternal organisasi terdiri dari:

- a. Faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan, baik internasional, nasional, regional, maupun lokal;

- c. Risk Management Accountability is the accountability and authority of the management function. The description of ERM duties in every line of the organization is in line with the Company's vision and mission.
- d. Risk PIC (Risk Advisor) is located in the Risk Management Department whose duties are as coordinator, providing advocacy, and facilitator to Risk PIC (Risk Officer) who are in every line of the organization. The scope of assignment of Risk PIC (Risk Advisor) to Risk PIC (Risk Officer) is:
 - i. Prepare, implement, maintain understanding of ERM and provide ongoing training;
 - ii. Provide advice and input at all levels of management for business continuity;
 - iii. Manage the external resources needed to support the ERM framework;
 - iv. The Risk Management Department's communication and reporting mechanism on any changes to the ERM framework;
 - v. Form of responsibility for the implementation and utilization of ERM tools;
 - vi. Propose the allocation of resources in risk management, including:
 - HC, competence, skills and experience of personnel;
 - Documented processes and procedures;
 - Information and knowledge management systems;
 - Professional development and training needs.
 - vii. Prepare risk management communication and consultation to support the framework and facilitate the effective implementation of risk management.

Risk Management needs to be integrated into the business processes and activities of the Company, in which this integration is a dynamic process that is adapted to the needs and culture of the Company. Risk Management is part of the goals, objectives, governance, leadership, commitment, strategy and operational activities of the Company so that the implementation of integrated risk management by the Company includes:

- a. Mapping the Company's Internal and External Context in detail in accordance with the goals and objectives, namely establishing the Risk Context and Stakeholder Analysis (internal and external) as one of the mandatory documents in the RKP
- b. Identifying potential risks that may be faced by the Company in the process of achieving its targets, in which the Company establishes the Risk Register as another mandatory document in the RKP, RKAP, and RJPP;
- c. Integrating the results of the identification of potential risks from the external and internal context of the Company into the Risk Register document which includes Operational Risk at the Project level and Strategic Risk at the Company level.

3. Design:

When designing a risk management framework, the organization examines and understands its external and internal context.

An examination of the external context of organization consists of:

- a. Social, cultural, political, legal, regulatory, financial, technological, economic and environmental factors, whether international, national, regional, or local;

- b. Penggerak dan tren utama yang mempengaruhi sasaran organisasi;
- c. Hubungan, persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan pemangku kepentingan eksternal;
- d. Hubungan dan komitmen kontraktual;
- e. Kompleksitas.

Pemeriksaan/pengujian atas konteks internal terdiri dari:

- a. Visi, misi, dan *value*;
 - b. Tata kelola, struktur organisasi, peran, dan akuntabilitas;
 - c. Strategi, sasaran, dan kebijakan;
 - d. Budaya organisasi;
 - e. *Standard*, panduan, dan model yang diadopsi oleh organisasi;
 - f. Kapabilitas yang ditinjau dari sumber daya dan pengetahuan (misalnya modal, waktu, orang; kekayaan intelektual, proses, sistem, dan teknologi);
 - g. Data, sistem informasi, dan aliran informasi;
 - h. Hubungan dengan pemangku kepentingan internal, yang mempertimbangkan persepsi dan *value* mereka;
 - i. Hubungan dan komitmen kontraktual;
 - j. Interdependensi dan interkoneksi.
4. Implementasi *framework* diterapkan sebagai berikut:
- a. Mengembangkan rencana yang sesuai, termasuk waktu dan sumber daya;
 - b. Mengidentifikasi dimana, kapan, bagaimana, dan oleh siapa beragam jenis keputusan dibuat di seluruh organisasi;
 - c. Memodifikasi proses pengambilan keputusan yang sesuai, jika diperlukan;
 - d. Memastikan pengaturan organisasi dalam mengelola risiko dipahami dengan jelas dan dapat diimplementasikan.
5. Evaluasi:
- a. Mengukur kinerja kerangka kerja manrisk secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan;
 - b. Menentukan apakah kerangka kerja manrisk sudah sesuai untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan.
6. Perbaikan:
- a. Adaptasi
Perseroan secara berkelanjutan memantau dan mengadaptasi kerangka kerja manrisk untuk mengatasi perubahan konteks eksternal dan internal.
 - b. Perbaikan berkesinambungan
Perseroan secara berkesinambungan meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka kerja manrisk, serta bagaimana proses manrisk diintegrasikan.

Untuk memastikan manajemen risiko dapat mengatasi perubahan eksternal dan internal Perseroan (perubahan konteks organisasi), ERM harus terus disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari pemangku kepentingan, serta upaya memantau dan mengadaptasi *framework* manajemen risiko.

ERM harus melekat pada budaya manajemen Perseroan dalam rangka pengambilan keputusan dan perbaikan yang berkesinambungan sebagai upaya meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas *framework* manajemen risiko, serta mengintegrasikan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko meliputi lima kegiatan utama, yaitu menetapkan *risk context*, *risk assessment* (identifikasi, analisa, dan evaluasi risiko), *risk treatment*, *monitoring*, *reviewing*, komunikasi, dan konsultasi risiko.

- b. Key drivers and trends affecting the organization's goals;
- c. Relationships, perceptions, values, needs and expectations of external stakeholders;
- d. Contractual relationships and commitments;
- e. Complexity.

Examination/testing of the internal context consists of:

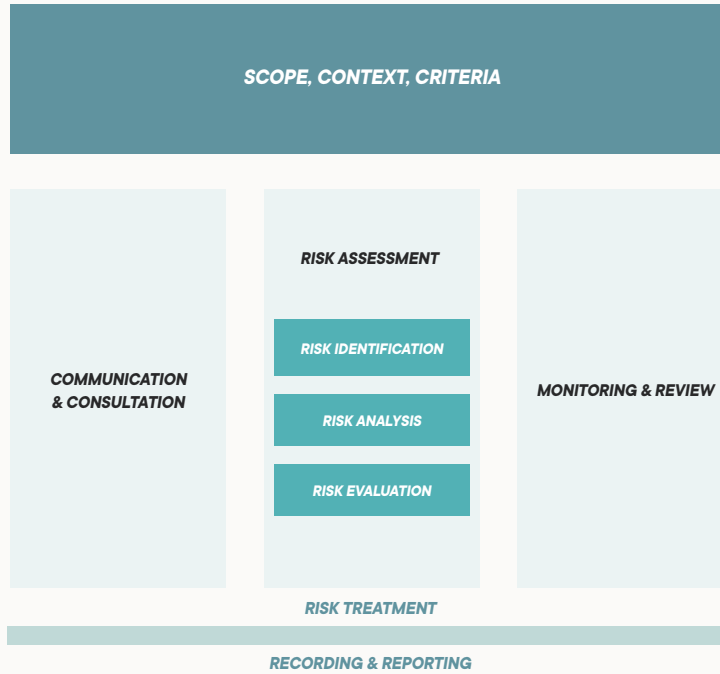
- a. Vision, mission, and values;
 - b. Governance, organizational structure, roles and accountability;
 - c. Strategy, objectives and policies;
 - d. Organizational culture;
 - e. Standards, guidelines and models adopted by the organization;
 - f. Capability in terms of resources and knowledge (eg capital, time, people; intellectual property, processes, systems and technology);
 - g. Data, information systems, and information flows;
 - h. Relationships with internal stakeholders, taking into account their perceptions and values;
 - i. Contractual relationships and commitments;
 - j. Interdependence and interconnection.
4. Implementation of the framework is applied as follows:
- a. Develop an appropriate plan, including time and resources;
 - b. Identify where, when, how and by whom various types of decisions are made across the organization;
 - c. Modify the decision-making process as appropriate; if needed
 - d. Ensure organizational arrangements in managing risk are clearly understood and can be implemented.
5. Evaluation:
- a. Measuring the risk management performance framework on a regular basis against the objectives, implementation plans, indicators, and expected behavior.
 - b. Determine whether the risk management framework is appropriate to support the achievement of Company goals.
6. Improvements:
- a. Adaptation
The Company continuously monitors and adapts the risk management framework to cope with changing external and internal contexts.
 - b. Continuous improvement
The Company continuously improves the suitability, adequacy, and effectiveness of the risk management framework, as well as how the manrisk process is integrated.

To ensure risk management can cope with the Company's external and internal changes (changes in organizational context), ERM must be continuously refined based on evaluation results and recommendations from stakeholders, as well as efforts to monitor and adapt the risk management framework.

ERM must be embedded in the Company's management culture in the context of decision making and continuous improvement as an effort to improve the suitability, adequacy, and effectiveness of the risk management framework, as well as to integrate the risk management process. The risk management process includes five main activities, namely establishing a risk context, risk assessment (identification, analysis, and evaluation of risk), risk treatment, monitoring, reviewing, communication, and risk consulting.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Hubungan antara Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja serta Proses Manajemen Risiko WIKA adalah sebagai berikut:



Proses manajemen risiko menjadi bagian integral manajemen dan pengambilan keputusan, serta diintegrasikan ke dalam struktur, operasional, dan proses organisasi. Hal ini dapat diterapkan pada tingkat strategis, operasional, atau proyek. Terdapat banyak penerapan proses manajemen risiko di dalam organisasi yang disesuaikan untuk mencapai sasaran, dan menyesuaikan konteks eksternal dan internal di mana proses manajemen risiko diterapkan. Sifat dinamis dan variabel dari perilaku dan budaya manusia dipertimbangkan dalam penerapan proses manajemen risiko. Walaupun proses manajemen risiko sering ditampilkan secara berurutan, di mana dalam praktiknya proses manajemen risiko bersifat berulang.

IMPLEMENTASI PROSES MANAJEMEN RISIKO

Monitoring dan *Review* terhadap seluruh aktivitas pengelolaan risiko harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam proses ini, tanggung jawab untuk setiap aktivitas harus ditetapkan secara jelas, memastikan akuntabilitas di setiap tahap pengelolaan risiko. Kegiatan tersebut dapat diintegrasikan dengan audit internal, yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan wawasan dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko, panduan, prosedur, dan instruksi kerja yang berkaitan dengan manajemen risiko ditinjau secara berkala. Peninjauan ini dilakukan setidaknya setiap dua tahun sekali untuk memastikan relevansi dan efektivitas dokumen tersebut dalam mendukung pengelolaan risiko yang optimal.

RISK MANAGEMENT PROCESS

The relationship between WIKA's Risk Management Principles, Framework and Risk Management Process is as follows:

The risk management process is an integral part of management and decision making, and is integrated into organizational structures, operations and processes. It can be applied at the strategic, operational or project level. There are many implementations of risk management processes within organizations that are tailored to achieve goals, and adapt to the external and internal contexts in which the risk management processes are implemented. The dynamic and variable nature of human behavior and culture is considered in the application of the risk management process. Although the risk management process is often presented sequentially, in practice the risk management process is iterative.

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT PROCESS

Monitoring and review of all risk management activities should be carried out systematically and continuously. In this process, responsibility for each activity should be clearly assigned, ensuring accountability at every stage of risk management. Such activities can be integrated with internal audits, which serve as a means to gain insights and make continuous improvements.

As part of risk management, guidelines, procedures and work instructions relating to risk management are periodically reviewed. This review is conducted at least every two years to ensure the relevance and effectiveness of these documents in supporting optimal risk management.

Perseroan telah secara resmi menerapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Implementasi ini mencerminkan komitmen perseroan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) melalui pengelolaan kegiatan korporasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut. Dengan mengintegrasikan pedoman ini ke dalam operasional, perseroan memastikan bahwa setiap kegiatan korporasi signifikan dilaksanakan secara strategis, terukur, dan sejalan dengan kepentingan pemangku kepentingan, sehingga mendukung keberlanjutan bisnis dan pencapaian tujuan perusahaan sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, Perseroan secara konsisten mengevaluasi implementasi manajemen risiko melalui pengukuran kinerja yang dilakukan secara tahunan. Salah satu metodenya adalah dengan mengukur tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (*risk maturity level*) di berbagai tingkatan, termasuk Proyek, Divisi, dan Anak Perusahaan.

The Company has officially implemented the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. This implementation reflects the Company's commitment to improve good corporate governance through the management of corporate activities that are transparent, accountable, and in accordance with the principles set out in the regulation. By integrating these guidelines into operations, the Company ensures that every significant corporate activity is carried out strategically, measurably, and in line with the interests of stakeholders, thus supporting business sustainability and the achievement of corporate goals as part of a State-Owned Enterprise.

In addition, the Company consistently evaluates the implementation of risk management through annual performance measurement. One of the methods is to measure the risk maturity level of risk management implementation at various levels, including Projects, Divisions, and Subsidiaries.

MATRIKS RISIKO SIGNIFIKAN WIKA 2024

WIKA'S SIGNIFICANT RISK MATRIX IN 2024



PROFIL RISIKO DAN UPAYA MITIGASI

RISK PROFILE AND MITIGATION EFFORTS

No.	Risiko Risk	Penyebab Cause	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Mitigasi Risiko Risk Mitigation Realization
1.	Berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap Sistem Manajemen K 3 L Potential violation of the HSE Management System	<ol style="list-style-type: none"> Adanya disparitas dari segi kompetensi HSE baik dari segi internal WIKA, subkon dan vendor Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen K3 L Kurangnya <i>awareness</i> atas penerapan sistem manajemen K3 L 	<ol style="list-style-type: none"> Membuat program <i>mandatory Safety leadership</i> untuk Level MP <i>Training HSE for non HSE</i> Perumusan dan penerapan inisiasi transformasi <i>zero accident</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan <i>safety leadership training</i> s.d. batch 5 kepada seluruh MP, GM, dan SVP Operasi <i>Training HSE for Non HSE</i> telah dilaksanakan s.d. batch 3 kepada Pelut/ MK, serta Kasie non HSE Telah dirumuskan inisiasi transformasi <i>zero accident</i> yang sedang dalam proses persetujuan Direksi Telah dilaksanakan TBM dan <i>Fit To Work</i>
2.	Target omset kontrak baru di bawah rencana New contract turnover target below plan	<ol style="list-style-type: none"> Kalah tender karena harga penawaran yang tidak kompetitif dan kondisi keuangan WIKA Omzet Kontrak proyek sasaran mengalami pengunduran waktu / dibatalkan / reposisi anggaran Keterbatasan mengikuti <i>tender</i> karena kondisi keuangan WIKA Gagal mengikuti tender karena Laporan Keuangan WIKA tidak memenuhi <i>requirement</i> yang dipersyaratkan 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendekatan intimasi dengan calon pengguna jasa dengan sosialisasi keunggulan WIKA Mulai melakukan penetrasi pasar dengan pengguna jasa swasta yang memiliki reputasi baik Melakukan <i>partnership / KSO</i> dengan perusahaan yang memiliki <i>performance</i> yang baik Menyiapkan rencana <i>value engineering</i> dalam proposal <i>tender</i> untuk <i>tender</i> D&B dan EPCC 	<ol style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penyusunan HPP yang lebih efisien (<i>value engineering</i> dan standarisasi <i>overhead</i>) Aplikasi WISE telah digunakan oleh Tim Pemasaran sebagai upaya untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Terlaksananya penetrasi pasar dengan pengguna jasa swasta telah dilaksanakan Telah dilakukan pemilihan partner dengan BUMN dan swasta Nasional serta partner asing yang kredibel Penetrasi pendalaman market & melakukan evaluasi terkait komposisi pembentuk biaya <i>tender</i> Telah dilakukan kajian untuk prognosa perolehan sampai dengan Desember 2024, dengan realisasi yang sudah tercapai adalah 47.41% dari prognosa optimis.

No.	Risiko Risk	Penyebab Cause	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Mitigasi Risiko Risk Mitigation Realization
3.	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek Delay in completion of project work	<ol style="list-style-type: none"> Serah terima lahan yang belum sepenuhnya bebas Adanya perubahan desain atas permintaan pengguna jasa di masa pelaksanaan proyek Perizinan mulai kerja dan koordinasi dengan Pihak Eksternal yang birokratis Kinerja vendor atau subkon terpilih tidak sesuai dengan perjanjian kontraktual Keterlambatan pembayaran dari pengguna jasa yang berdampak pada pembayaran kepada vendor atau subkon 	<ol style="list-style-type: none"> Selektif dalam perolehan proyek baru Melakukan negosiasi cara pembayaran pada fase pra kontrak Memastikan agar basic design dapat diajukan sebagai <i>construction design</i> sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan Memastikan penilaian VPI (<i>Vendor Performance Index</i>) menjadi <i>feeding information</i> atau evaluasi terhadap data <i>vendor management system</i> Melakukan pendekatan intimasi dengan pihak pengguna jasa Melakukan <i>support</i> kepada pihak pengguna jasa dalam mempercepat pembebasan lahan 	<ol style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakannya upaya penyewaan lahan sebagai support kepada pengguna jasa Telah dilakukan upaya addendum kontrak terkait EOT dan item pekerjaan baru Telah dilakukan upaya optimalisasi pola pembayaran hutang dan <i>dropping</i> serta pembayaran vendor di proyek setelah pencairan PMN sudah masuk di WIKA Terlaksananya evaluasi secara detail di setiap bulan terkait proyeksi kinerja proyek dan monitoring mingguan terhadap target pencapaian OP dan dilakukan evaluasi mingguan melalui MP forum
		<ol style="list-style-type: none"> Handover of land that is not fully free Changes in design at the request of service users during project implementation Bureaucratic permits to start work and coordination with External Parties Performance of the selected vendor or subcontractor is not in accordance with the contractual agreement Delays in payments from service users that impact payments to vendors or subcontractors 	<ol style="list-style-type: none"> Selective in acquiring new projects Negotiate payment method in the pre-contract phase Ensure that the basic design can be submitted as a construction design as the basis for work implementation. Ensure the VPI (Vendor Performance Index) assessment is feeding information or evaluation of the vendor management system data. Conduct an intimacy approach with the service user Supporting service users in accelerating land acquisition. 	<ol style="list-style-type: none"> Land leasing efforts have been carried out as support to service users Efforts have been made to addendum contracts related to EOT and new work items Efforts have been made to optimize the pattern of debt repayment and dropping and vendor payments in the project after the PMN disbursement has entered WIKA The implementation of detailed evaluations every month regarding project performance projections and weekly monitoring of OP achievement targets and weekly evaluations through the MP forum.
4.	Adanya progres pekerjaan yang belum diakui selama lebih dari 3 bulan The existence of unrecognized work progress for more than 3 months	<p>Pekerjaan yang dilaksanakan sebelum adanya kesepakatan antara pengguna jasa dengan WIKA terkait dengan perbedaan persepsi ruang lingkup</p> <p>Work carried out before the agreement between service users and WIKA related to differences in perception of scope</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sosialisasi Prosedur Manajemen Kontrak dan Prosedur <i>Asset Management</i> oleh Tim Legal dan Tim AMD <i>Project Control</i> melakukan <i>locking budget</i> sesuai Nota Rekomendasi Divisi Legal terkait dengan <i>Site Instruction</i> dari pengguna jasa yang belum dituangkan dalam kontrak Mengedepankan penyelesaian sengketa melalui forum mediasi / konsiliasi Melakukan kerja sama dengan ahli di bidang kontraktual (<i>Contract Specialist</i>) untuk meningkatkan <i>success rate claim</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Telah dibentuk ST Tim untuk sosialisasi prosedur dan telah dilaksanakan sosialisasi tersebut pada 22 Juni 2024. Telah disusun draft Prosedur yang mengatur mengenai alur proses <i>locking budget</i> dengan Nota Rekomendasi yang akan dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan fungsi terkait. Telah dibentuk sistem monitoring dan database atas klaim dan piutang bermasalah. Telah dilakukan proses mediasi atas beberapa klaim dan piutang bermasalah, baik melalui KBUMN, Kejaksaan, BPKP.
			<ol style="list-style-type: none"> Socialization of Contract Management Procedures and Asset Management Procedures by the Legal Team and AMD Team Project Control locking the budget according to the Legal Division's Recommendation Note related to Site Instruction from service users that has not been stated in the contract. Prioritizing dispute resolution through mediation / conciliation forums Collaborate with contractual experts (Contract Specialists) to increase the success rate of claims 	<ol style="list-style-type: none"> A ST Team has been formed to socialize the procedure and the socialization has been carried out on June 22, 2024. A draft procedure has been prepared that regulates the flow of budget locking process with a Recommendation Note, which will be discussed first with the related functions. A monitoring system and database for claims and problematic receivables have been formed. A mediation process has been carried out for several claims and problematic receivables, both through the Ministry of SOE, the Prosecutor's Office, and BPKP.

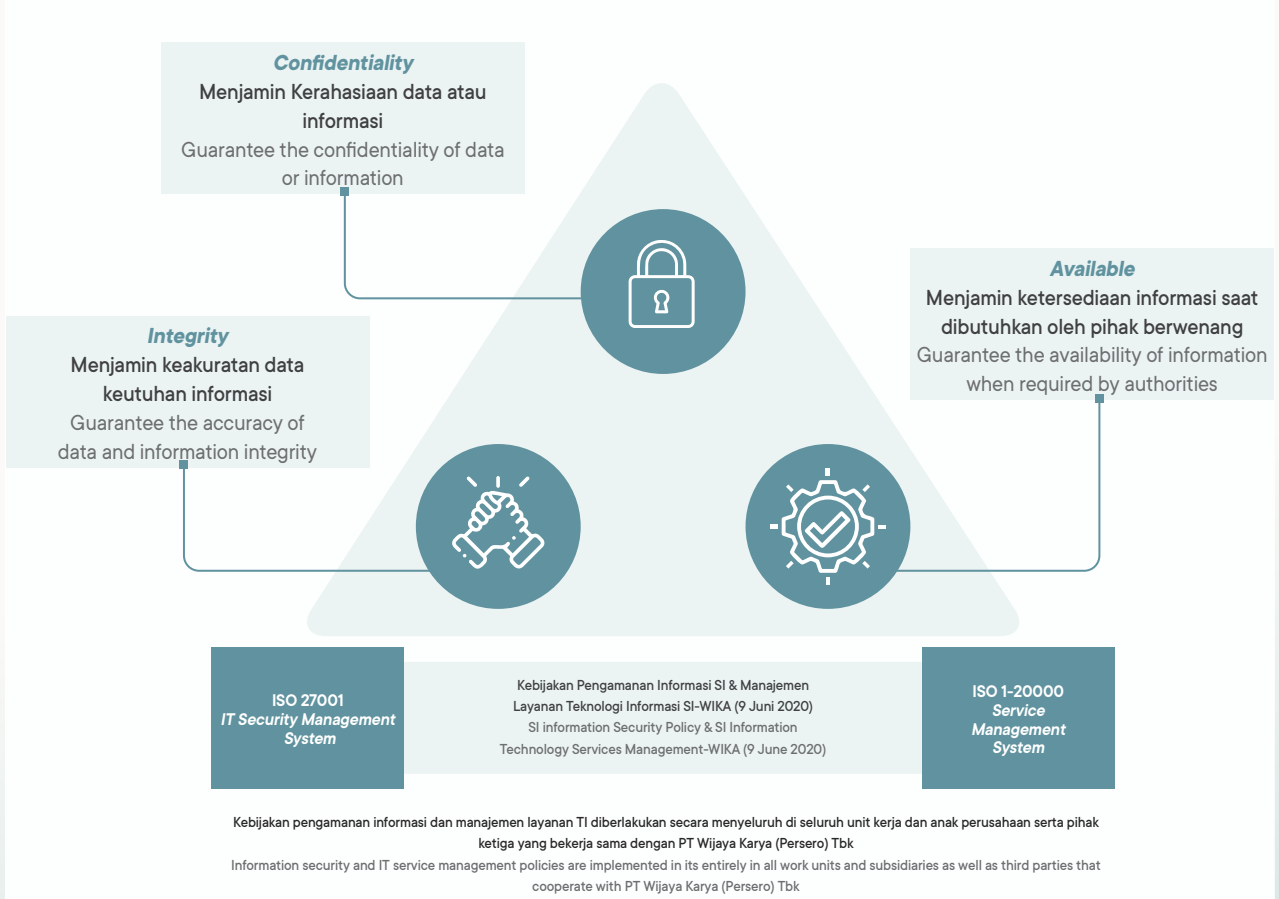
No.	Risiko Risk	Penyebab Cause	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Mitigasi Risiko Risk Mitigation Realization
5	Kesulitan mendapatkan fasilitas Bank Garansi Difficulty obtaining Bank Guarantee facilities	Bank terlalu <i>prudent</i> dalam menyalurkan bank garansi pada perusahaan yang sedang dalam kondisi restrukturisasi Banks are too prudent in channeling bank guarantees to companies that are under restructuring conditions	Mengupayakan perjanjian restrukturisasi final yang dapat mengakomodasi kebutuhan Bank Garansi di masa depan Pursue a final restructuring agreement that can accommodate the need for Bank Guarantees in the future.	<ol style="list-style-type: none"> 1. WIKA telah mendapatkan fasilitas bank garansi dari Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI masing-masing sebesar 1,6 T yang setiap penerbitan bank garansinya <i>pro rate</i> 3 bank 2. Dilakukan upaya untuk menghindari <i>tender</i> yang waktunya mepet dengan ketentuan jaminan bank garansi 3. Penggunaan fasilitas asuransi sebagai alternatif bank garansi <ol style="list-style-type: none"> 1. WIKA has obtained bank guarantee facilities from Bank Mandiri, Bank BNI and Bank BRI amounting to 1.6 T each, which each bank guarantee issuance is <i>pro rate</i> 3 banks. 2. Efforts are made to avoid tenders that are tightly timed with the provisions of bank guarantees. 3. Use of insurance facilities as an alternative to bank guarantees
6	Restrukturisasi anak perusahaan khususnya di PT Wijaya Karya Realty Restructuring of subsidiaries, especially PT Wijaya Karya Realty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar yang jenuh pada bisnis apartement 2. Kenaikan suku bunga membuat biaya pinjaman untuk properti menjadi lebih tinggi 3. Penawaran properti yang berlebihan di pasar tanpa cukupnya permintaan, sehingga mengakibatkan persaingan yang ketat dan penjualan menjadi lambat. 4. Sulitnya mencari pembiayaan KPR dari Bank, terutama Bank HIMBARA. 5. Menurunnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk WIKA Realty <ol style="list-style-type: none"> 1. Market saturation in apartment business 2. Increase in interest rates makes the cost of borrowing for property higher 3. Excessive property supply in the market without sufficient demand, resulting in intense competition and slow sales. 4. Difficulty in finding mortgage financing from banks, especially Bank HIMBARA. 5. Declining consumer confidence in WIKA Realty's products. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sinergi bisnis dengan pihak <i>stakeholder</i> terkait, terutama pihak regulator untuk meningkatkan <i>occupancy rate</i> persediaan <i>property</i> 2. Memudahkan akses menuju pada lokasi strategis seperti moda transportasi publik yang memudahkan konsumen untuk melakukan mobilitas 3. Melakukan program <i>marketing</i> yang lebih atraktif 4. Melakukan kajian legal <i>opinion</i> untuk penjualan persediaan di bawah nilai buku <ol style="list-style-type: none"> 1. Conduct business synergies with relevant stakeholders, especially regulators to increase the occupancy rate of property inventories. 2. Facilitate access to strategic locations such as public transportation modes that make it easier for consumers to do mobility 3. Conduct a more attractive marketing program 4. Conduct a legal opinion review for the sale of inventory below book value 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemasaran efektif dengan pengoptimalan penggunaan <i>digital marketing</i>. 2. Strategi <i>Partnership</i> melalui <i>Home Ownership Program</i> (HOP), beberapa diantaranya sudah dilakukan HOP dengan Karyawan WIKA Group, WIKA Tuban, Manajemen WIKA Gedung, Bagian transformasi WIKA Gedung, Manajemen WRK, PT Danar Hadi, LMAN, Manajemen Plaza Indonesia, PT BMP, PT Integrated Teknologi Indonesia) 3. Fokus pada penjualan <i>existing</i> produk dan <i>idle asset</i> 4. Telah dilakukan penyesuaian harga (Tamansari Bintaro Mansion, Ruko Tamansari Grand Samarinda). 5. Peningkatan <i>delivery product</i>. 6. Memberikan <i>gimmick</i> yang menarik (DP 0% , <i>fully/semifurnish</i>, <i>Rental Guarantee</i>, <i>Free AC</i>, <i>Free Canopy</i>, <i>Free Biaya KPR</i>, <i>Free BPHTB</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Conduct effective marketing by optimizing the use of digital marketing. 2. Partnership strategy through Home Ownership Program (HOP), some of which have been carried out HOP with WIKA Group Employees, WIKA Tuban, WIKA Building Management, WIKA Building transformation section, WRK Management, PT Danar Hadi, LMAN, Plaza Indonesia Management, PT BMP, PT Integrated Teknologi Indonesia). 3. Focus on selling existing products and idle assets 4. Price adjustments have been made (Tamansari Bintaro Mansion, Tamansari Grand Samarinda Shophouse). 5. Improved product delivery. 6. Providing attractive gimmicks (0% down payment, full/semifurnish, Rental Guarantee, Free AC, Free Canopy, Free KPR Fee, Free BPHTB).
7	Berkurangnya likuiditas perusahaan Reduced company liquidity	Tidak tercapainya kesepakatan dengan investor Not reaching an agreement with the investor	Mempercepat proses divestasi dengan pihak lain melalui berbagai skema dan pendekatan baik di market maupun di Kementerian BUMN Accelerate the divestment process with other parties through various schemes and approaches both in the market and at the Ministry of SOEs	Proses <i>due diligence</i> oleh masing-masing <i>potential buyer</i> untuk NBO Due diligence process by each potential buyer for NBOs

No.	Risiko Risk	Penyebab Cause	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Mitigasi Risiko Risk Mitigation Realization
8	Kurangnya penyerapan dana PMN Lack of absorption of PMN funds	<ol style="list-style-type: none"> Untuk proyek KSO yang telah disulkan sebagai penerima dana PMN, harus melalui review pihak eksternal Terdapat beberapa proyek dalam usulan awal yang telah selesai progres konstruksinya sehingga tidak ada lagi kebutuhan modal kerja untuk diserap dari dana PMN Terdapat penyesuaian kebutuhan modal kerja dari dana PMN pada beberapa proyek 	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan review ke pihak eksternal terkait teknis penyaluran dana PMN khusus untuk proyek KSO Mempersiapkan penyerapan dana PMN ke proyek-proyek non KSO Mengajukan usulan perubahan penggunaan dana PMN 	<ol style="list-style-type: none"> Realisasi serapan dana PMN per Juli 16,71% dari target 53,01%, dikarenakan beberapa proyek berstatus KSO ada sebagian yang belum tercapai kesepakatan untuk penempatan modal kerja dari dana PMN Saat ini tengah dilakukan proses pengajuan perubahan peruntukan dana PMN pada beberapa proyek untuk mengganti proyek-proyek dalam daftar penerima PMN awal yang tidak dapat menerima dana PMN
9	Potensi penurunan omset penjualan Potential decrease in sales turnover	<ol style="list-style-type: none"> Progress belum diakui pengguna jasa Keterlambatan pembayaran dari pengguna jasa yang berdampak pada pembayaran kepada vendor atau subkon Belum dapat dimulainya pekerjaan dikarenakan belum <i>effective date</i> Pengguna jasa belum memenuhi kewajiban kontraktual (AMDAL, pendanaan, kesiapan lahan) 	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan proyek untuk menyepakati waktu <i>approval</i> terhadap piutang dengan pengguna jasa (Semacam SOP). Pemenuhan permintaan dokumen antara pemberi kerja dengan <i>lender</i> Mengusulkan adanya <i>point effective date</i> setelah kewajiban pengguna jasa terpenuhi (misalkan AMDAL dan lahan) 	<ol style="list-style-type: none"> Telah adanya prosedur manajemen kontrak terkait dengan rekomendasi kerja sebelum adanya kesepakatan dan penerapan <i>Lean Construction</i> di semua Proyek Telah adanya arahan untuk bekerja sesuai dengan anggaran/DIPA, evaluasi bulanan Proyek dengan melampirkan <i>Monthly Report and Feedback</i> Telah adanya usulan <i>point effective date</i> setelah kewajiban pengguna jasa terpenuhi (misalkan AMDAL dan lahan)

No.	Nama Kejadian Event Name	Waktu Kejadian Time of Event	Penyebab Kejadian Cause of Incident	Dampak Impact	Tindak Lanjut Follow-up	Nilai Kerugian (Miliar) Loss Value (Billions)
1	Kenaikan harga-harga kebutuhan proyek (Proyek Sei Duri) Increase in prices of project requirements (Sei Duri Project)	2024	<ol style="list-style-type: none"> kenaikan harga <i>raw material</i> kenaikan kurs USD kenaikan harga minyak dunia kelangkaan material 	Penambahan biaya langsung Addition of direct costs	Melakukan <i>review</i> desain dan melakukan optimalisasi metode dan percepatan Conduct design reviews and optimize methods and acceleration.	3,469M

No.	Nama Kejadian Event Name	Waktu Kejadian Time of Event	Penyebab Kejadian Cause of Incident	Dampak Impact	Tindak Lanjut Follow-up	Nilai Kerugian (Miliar) Loss Value (Billions)
2	Serah terima lahan/ Pekerjaan yang terlambat (Proyek Submarine Cable 150 kV Sumatera- Bangka) Delay in land handover/work (Submarine Cable 150 kV Sumatra- Bangka Project)	2024	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya komitmen antara pemilik dan owner terkait masalah administrasi Kurangnya komunikasi antar pihak Terdapat perselisihan hak kepemilikan lahan <ol style="list-style-type: none"> Lack of commitment between parties regarding administrative issues Lack of communication between parties There is a dispute over land ownership rights 	<p>Penambahan biaya tidak langsung</p> <p>Addition of indirect costs</p>	<p>Memperkuat dokumen dan evidence terkait penambahan waktu pelaksanaan terjadi akibat pengguna jasa tidak dapat memenuhi kewajiban serah terima lahan sesuai yang disepakati</p> <p>Strengthen documents and evidence related to additional implementation time due to service users not being able to fulfill land handover obligations as agreed.</p>	4,874m
3	Bencana Alam (Proyek Teluk tapang) Natural disaster (Tapang Bay Project)	2024	<p>Kejadian longsor akibat curah hujan tinggi di lokasi pekerjaan</p> <p>Landslide due to high rainfall at the work site</p>	<p>Penambahan biaya langsung untuk penanganan longsor dan perbaikan lokasi pekerjaan serta percepatan pekerjaan yang terdampak</p> <p>Addition of direct costs for landslide management and repair of work site as well as acceleration of affected works</p>	<p>Melakukan identifikasi lokasi pekerjaan rawan longsor dan melakukan proteksi</p> <p>Identify landslide-prone work sites and protect them</p>	0,563M

Penerapan Cyber Security WIKA WIKA Cyber Security Implementation



Portofolio Keamanan Sistem Informasi WIKA terdiri dari 3 Unsur CIA, yaitu:

1. *Confidentiality*, yaitu unsur yang menjaga dan menjamin kerahasiaan data atau informasi yang ada di WIKA;
2. *Integrity*, yaitu unsur yang menjamin mengenai keakuratan dan keutuhan informasi dari hulu ke hilir dalam sebuah Perseroan;
3. *Availability*, yaitu unsur yang menjamin ketersediaan informasi atau data saat dibutuhkan oleh pihak yang berwenang.

Untuk mendukung ketiga unsur tersebut, Perseroan telah mengimplementasikan Kebijakan Pengamanan Informasi dan Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Kebijakan ini telah disahkan oleh Direktur Utama dan diterapkan secara menyeluruh di seluruh unit kerja serta anak perusahaan WIKA, termasuk pada pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

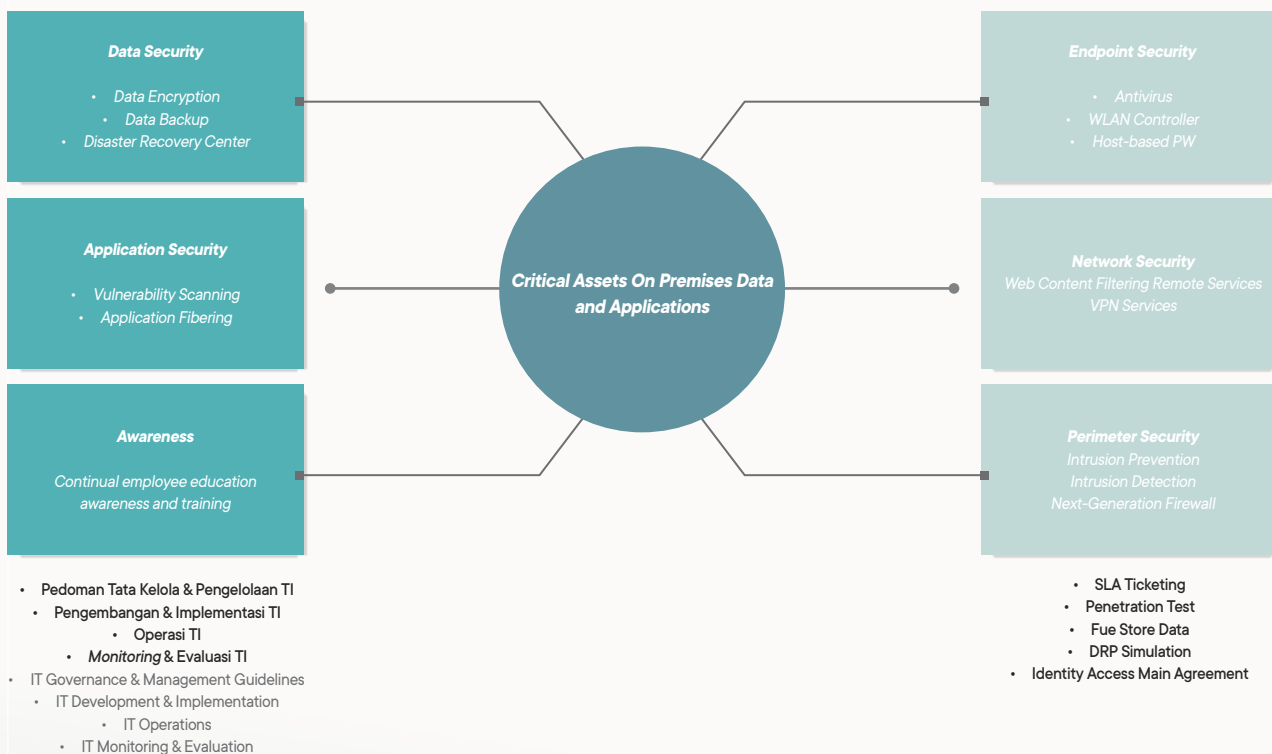
Oleh karena itu, dari portofolio keamanan informasi serta ditopang oleh kebijakan tersebut, WIKA berhasil memperoleh sertifikasi ISO 27001 untuk IT *Security Management System* dan ISO 20000-1 untuk *Service Management System* pada tahun 2020.

WIKA's Information System Security Portfolio consists of 3 CIA Elements, namely:

1. Confidentiality, element that maintains and guarantees the confidentiality of data or information in WIKA's;
2. Integrity, element that guarantees the accuracy and integrity of information from upstream to downstream within a Company;
3. Availability, element that guarantees the availability of information or data when needed by authorized parties

To support these three elements, the Company has implemented an Information Security Policy and Information Technology Service Management. This policy has been approved by the President Director, and is applied thoroughly in all work units and subsidiaries of WIKA's, including third parties cooperating with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Therefore, from the information security portfolio and supported by this policy, WIKA's succeeded in obtaining ISO 27001 certification for IT Security Management System and ISO 20000-1 for Service Management System in 2020.



Internet telah menjadi aspek penting yang memberikan manfaat dan kemudahan bagi setiap individu, terutama dengan banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan secara online atau dalam jaringan. Bagi pegawai WIKA, internet menjadi kebutuhan dasar yang mendukung pengembangan kapabilitas, seperti mencari pengetahuan atau teknologi terbaru untuk mendukung aktivitas kerja.

Namun, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa dunia maya juga membawa potensi kejahatan siber (*cyber crime*). Oleh karena itu, WIKA telah menerapkan *Cyber Security Framework* dengan tujuan untuk melindungi seluruh aset informasi dari potensi ancaman kejahatan siber.

The internet has become an important aspect that provides benefits and convenience for every individual, especially with the many activities that can be done online or in the network. For WIKA's employees, the internet is a basic need that supports capability development, such as seeking the latest knowledge or technology to support work activities.

However, we cannot ignore the fact that many activities in cyberspace can trigger cyber crime. Therefore, WIKA's has implemented a Cyber Security Framework with the aim of protecting all information assets from potential cyber crime.

Cyber Security Framework WIKA sendiri meliputi 7 layer dimulai dari paling luar yaitu *Perimeter Security*, di mana layer ini adalah yang paling berbatasan langsung dengan dunia internet. Untuk layer *Perimeter Security*, WIKA sendiri sudah menerapkan dan mengoptimalkan penggunaan *Next Generation Firewall* yang mempunyai fitur *Intrusion Prevention System (IPS)* serta *Intrusion Detection System (IDS)*. Lalu tingkatan layer berikutnya adalah *Network Security*, di mana WIKA mengoptimalkan fungsi dari *Web Content Filtering*, didukung dengan penerapan *Remote Services* dan *VPN Services*. Selanjutnya adalah *Layer Endpoint Security*, di mana terdapat berbagai pengamanan dari mulai *Antivirus*, *WLAN Controller* yang terenkripsi serta *Host-based Firewall*.

Selain yang bersifat teknis, kita juga memasukkan unsur *Awareness* di tahapan layer berikutnya, yang mencakup edukasi berkala kepada seluruh pegawai Perseroan terkait dunia keamanan siber. Setelah itu berlanjut ke tahapan atau layer berikutnya yaitu *Aplikasi Keamanan (Application Security)*, yang secara otomatis melakukan pemindaian terhadap ancaman *vulnerability* serta melakukan *filtering* terhadap seluruh aplikasi yang ada di lingkungan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Selanjutnya pada tingkatan ke-6 adalah *Data Security*, di mana seluruh aktivitas informasi dan data dipastikan selalu *availability* serta pastinya terenkripsi. WIKA juga sudah menerapkan sistem *backup* secara otomatis melalui 2 metode yaitu *Disk-to-Disk* dan WIKA juga sudah mempunyai *Disaster Recovery Center* yang berfungsi sebagai cadangan terakhir apabila terjadi bencana di dalam perusahaan.

Dan pada tingkatan atau layer terakhir adalah *Critical Asset*, yang berisikan seluruh informasi dalam bentuk data maupun aplikasi yang berada di dalam area pusat data perusahaan. Selain itu, juga untuk menopang kinerja dari 7 layer tersebut, WIKA juga menerapkan *Policy Management* yang berisikan kebijakan dan prosedur mengenai teknologi informasi dari perencanaan sampai dengan proses monitoring, serta untuk meningkatkan kinerja optimal teknologi informasi dari semua elemen perusahaan, WIKA juga menerapkan *Monitoring & Response* yang terdiri dari *SLA Ticketing*, *Penetration Test*, *Restore Data*, *DRP Simulation*, dan juga *Identity Access Management*.

Dengan adanya *Cyber Security Framework*, diharapkan seluruh elemen dalam perusahaan dapat bekerja dengan optimal dan aman, sehingga mampu meningkatkan kinerja Perseroan secara berkelanjutan.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Untuk menanggulangi risiko yang dapat berdampak pada operasional dan kelangsungan usaha Perseroan, kebijakan Instruksi Manajemen Krisis diberlakukan. Instruksi ini ditandatangani oleh Direktur Operasi 2 pada 20 April 2018 dan diperbarui pada 20 April 2021.

WIKA's *Cyber Security Framework* consists of 7 layers, starting from the outermost, namely *Perimeter Security* and this layer is the one directly adjacent to the internet world. For the *Perimeter Security* layer, WIKA's has applied and optimized the use of *Next Generation Firewall* which has *Intrusion Prevention System (IPS)* and *Intrusion Detection System (IDS)* features. Then the next layer level is *Network Security*, where WIKA's optimizes the function of *Web Content Filtering*, supported by the implementation of *Remote Services* and *VPN Services*. Next is the *Endpoint Security* Layer, where there are various safeguards ranging from *Antivirus*, *encrypted WLAN Controllers* and *Hostbased Firewalls*.

Apart from the technicality, we also include the *Awareness* element in the next layer, which contains education and is periodically conveyed to all Company employees regarding the world of cybersecurity. After that, the next layer is the *Application Security*, which automatically scans for *vulnerability* threats and filters all existing applications within PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Furthermore, at the 6th level is the *Data Security*, where all information and data activities that are encrypted and the availability are always assured. WIKA's has applied an automatic backup system through 2 methods, namely *Diskto-Disk* and WIKA's also has a *Disaster Recovery Center* which functions as the final backup in the event of a disaster within the Company.

And at the last layer is the *Critical asset*, which contains all information in the form of data and applications that are in the Company's data center area. Apart from that, to support the performance of the 7 layers, WIKA's also applies *Policy Management* that contains policies and procedures regarding information technology from planning to monitoring process and to improve optimal performance of information technology from all elements of the Company. WIKA's also implements *Monitoring & Response*, which consists of *SLA Ticketing*, *Penetration tests*, *Data Restore*, *DRP Simulation* and *Identity Access Management*.

With the *Cyber Security Framework*, it is expected that all elements in the Company can work optimally and safely, hence improving the Company's performance in a sustainable manner.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

To mitigate risks that may impact the Company's operations and business continuity, a *Crisis Management Instruction* policy is in place. This instruction was signed by Director of Operation II on April 20, 2018 and renewed on April 20, 2021.

Tujuan dari kebijakan ini adalah agar krisis dapat dikendalikan secepat mungkin, ditangani dengan baik, dan tidak mengancam kelangsungan bisnis Perseroan. Beberapa penyebab atau sumber krisis yang telah diidentifikasi meliputi:

1. Bencana alam;
2. Kecelakaan kerja;
3. Isu lingkungan;
4. Produk yang kurang sempurna; dan
5. Tindak kriminal.

Adapun strategi yang akan dilakukan dalam manajemen krisis, yaitu:

1. Tindakan preventif melalui antisipasi terhadap situasi krisis. Dalam hal ini, *public relation* dituntut memiliki kepekaan terhadap gejala-gejala yang timbul di awal sebelum krisis terjadi, dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir strategis dalam menganalisa dan memposisikan masalah kritis agar nantinya dapat dicegah secara dini.
2. Jika krisis dapat dicegah sejak dini, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membentuk tim krisis yang diketuai oleh *Corporate Secretary* harus selalu mengadakan komunikasi agar suasana krisis dapat terpantau;
 - b. Tim krisis harus dapat informasi yang jelas dan akurat tentang perkembangan krisis, sehingga informasi yang diberikan kepada pers tidak menyimpang dengan situasi yang sebenarnya.
3. Strategi penanggulangan, yaitu masa kuratif. Dalam strategi penanggulangan terdapat langkah-langkah yang harus diambil sesuai dengan situasi dan kondisi. Penanggulangan krisis harus segera diatasi, sebab hal tersebut dilakukan agar krisis tidak menyebar dan berkembang ke sektor lain. Selain itu, agar operasional organisasi tidak terganggu dan berjalan efektif.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan hasil evaluasi tahunan terhadap efektivitas sistem manajemen risiko di Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyimpulkan bahwa penerapan sistem manajemen risiko di lingkungan Perseroan dinilai sudah cukup memadai. Hasil evaluasi menunjukkan keseimbangan yang baik antara infrastruktur dan sistem manajemen risiko yang diterapkan.

The purpose of this policy is so that the crisis can be controlled as quickly as possible, handled properly, and does not threaten the Company's business continuity. Some of the causes or sources of crisis that have been identified include:

1. Natural disasters;
2. Work accident;
3. Environmental issues;
4. Products that are less than perfect; And
5. Criminal acts.

The strategies that will be implemented in crisis management are:

1. Preventive action through anticipation of crisis situations. In this case, public relations is required to have sensitivity to symptoms that arise early before a crisis occurs, and is required to have strategic thinking skills in analyzing and positioning critical problems so that they can be prevented early.
2. If the crisis can be prevented early, the following steps are needed:
 - a. Forming a crisis team headed by the *Corporate Secretary* must always maintain communication so that the crisis situation can be monitored;
 - b. The crisis team must receive clear and accurate information about the development of the crisis, so that the information provided to the press does not deviate from the actual situation.
3. Countermeasures strategy, namely the curative period. In the countermeasures strategy, there are steps that must be taken according to the situation and conditions. Crisis management must be addressed immediately, because this is done so that the crisis does not spread and develop to other sectors. Apart from that, so that organizational operations are not disrupted and run effectively.

BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS' STATEMENT ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

Based on the results of annual evaluation of the effectiveness of risk management system in the Company, Board of Directors and Board of Commissioners of the Company concluded that the implementation of risk management system in the Company is considered adequate. The evaluation results show a good balance between the infrastructure and the risk management system implemented.

Auditor Eksternal

External Auditor

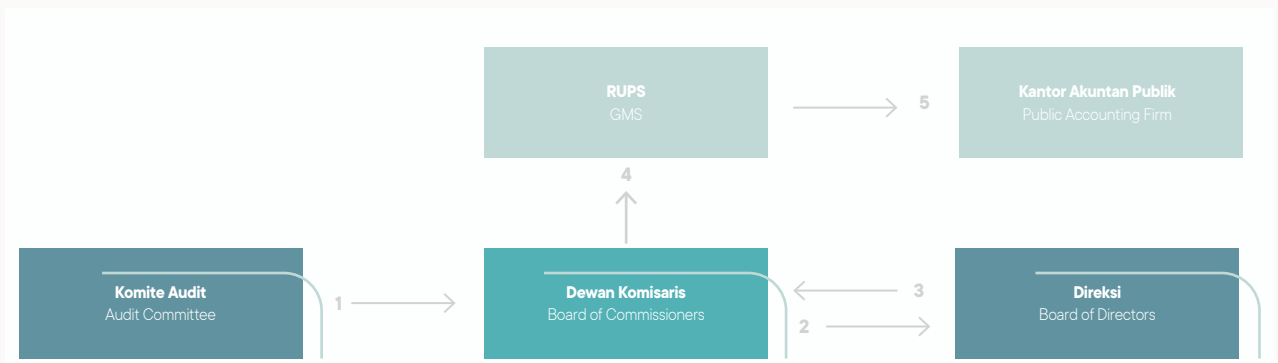
KEBIJAKAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik, sebagai organ eksternal Perseroan, memiliki peran penting dalam memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Penunjukan Akuntan Publik dilakukan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihan Akuntan Publik mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk memastikan independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

PUBLIC ACCOUNTANT APPOINTMENT POLICY

The Public Accountant, as an external organ of the Company, has an important role in providing an opinion regarding the conformity of the presentation of the Company's financial statements with the applicable Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia. The appointment of Public Accountant is made through the Annual GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and Audit Committee. The selection process is carried out in accordance with applicable procurement mechanism for goods and services. To ensure the independence and quality of audit results, the appointed External Auditor must not have a conflict of interest with the Company.

Proses Penunjukan Akuntan Publik Process for Appointing Public Accountant



Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan KAP tahun sebelumnya dan kemudian mengadakan rapat pembahasan pengadaan jasa audit KAP. Hasil evaluasi KAP kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan memberikan saran terkait pengadaan jasa audit KAP berdasarkan rapat Komite Audit. Board of Commissioners requests the Board of Directors carry out the KAP Audit Services procurement process based on the KAP evaluation results and in accordance with WIKA's provisions.

Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan proses pengadaan Jasa Audit KAP berdasarkan hasil evaluasi KAP dan sesuai dengan ketentuan WIKA. Board of Commissioners requests the Board of Directors carry out the KAP Audit Services procurement process based on the KAP evaluation results and in accordance with WIKA's provisions.

Melakukan proses pengadaan
Carry out the procurement process



Mengajukan usulan jasa Audit KAP kepada RUPS
Submit KAP Audit service proposal to the GMS

Menetapkan jasa audit KAP
Determine the KAP audit service

TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN AUDITOR EKSTERNAL

Komite Audit telah melaksanakan tanggung jawab berkaitan dengan memberikan rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, tertanggal 15 Februari 2024. Selanjutnya, Komite Audit memberikan rekomendasi dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik RSM Indonesia tertanggal April 02, 2024.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Penerapan fungsi Audit Eksternal yang ditunjuk oleh Perseroan mengacu pada standar dan pedoman yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023, pasal 7 ayat 1. Peraturan ini menyebutkan bahwa bank umum, emiten, dan perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama selama 7 (tujuh) tahun kumulatif.

Perseroan secara konsisten berkomunikasi untuk memastikan bahwa proses audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan mematuhi perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Selain itu, Perseroan juga memastikan bahwa proses audit diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan audit, pertemuan rutin diadakan untuk membahas permasalahan penting dan signifikan.

NAMA DAN TAHUN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SERTA AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN SELAMA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Merujuk pada hasil keputusan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024, Perseroan telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan pekerjaan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penunjukan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, di mana Akuntan Publik yang ditunjuk diwajibkan untuk tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

AUDIT COMMITTEE RESPONSIBILITIES IN PROVIDING RECOMMENDATIONS ON THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF EXTERNAL AUDITOR

The Audit Committee has carried out its responsibilities in relation to providing recommendation for the appointment and dismissal of external auditors, based on the Evaluation Results Report on the Implementation of Audit Services on Annual Historical Financial Information by Public Accountants and/or Public Accounting Firms, dated February 15, 2024. Furthermore, the Audit Committee provided recommendation in the Appointment of Public Accountant and/or RSM Indonesia Public Accounting Firm dated April 02, 2024.

IMPLEMENTATION OF EXTERNAL AUDIT FUNCTIONS

The implementation of External Audit function that has been appointed by the Company follows the standards and guidelines that have been set, which refers to the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation No. 9 of 2023 dated July 11, 2023 article 7 paragraph 1, which reads that the parties in the form of commercial banks, issuers, and public companies must limit the use of audit services on annual historical financial information from the same AP for 7 (seven) cumulative years.

The Company consistently communicates to ensure that the audit process is in accordance with the Accountant Professional Standards and complies with the work agreement and audit scope that has been set. In addition, the Company also ensures that the audit process is completed in accordance with the predetermined time target. To support the smooth implementation of audit, regular meetings are held to discuss important and significant issues.

NAME AND YEAR OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT PERFORMING AUDIT OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE LAST 5 (FIVE) YEARS

Referring to the Annual GMS resolutions which was held on May 15, 2024, the Company has approved the appointment of Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Mawar & Partners (RSM Indonesia) to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024. This appointment was made by taking into account the aspects of independence and quality of the audit results, where the appointed Public Accountant is required not to have a conflict of interest with the Company

Akuntan Publik Tahun 2024 Public Accountant for 2024

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia)
Akuntan Accountant	:	Eishennoraz
Tahun Audit Audit Year	:	2024



Periode Penugasan Assignment Period	: 2024		
Jasa Service	Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 General Audit of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Financial Statements for the Year ended December 31, 2024		
Jasa Lainnya Other Service	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu atas Evaluasi Kinerja (<i>Key Performance Indicator</i>) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. 2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar <i>Auditing</i> (PSA) No. 62 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. 3. Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024. 4. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) dan Profil Perusahaan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 5. Jasa <i>Limited Review</i> Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Dan Entitas Anak per 30 Juni 2024. 6. Jasa Standar Audit 600 (SA600) Atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Review of the Performance Evaluation (<i>Key Performance Indicator</i>) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2024. 2. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control as a form of implementation of Statement of Auditing Standards (PSA) No. 62 for the year ending December 31, 2024. 3. Audit of Financial Statements on the Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year ending December 31, 2024. 4. Submission of the Company's Annual Financial Report (LKTP) and Company Profile to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia. 5. Limited Review Services of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Subsidiaries as of June 30, 2024. 6. Audit Standard 600 (SA600) Services on the Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the Year Ended December 31, 2024. </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu atas Evaluasi Kinerja (<i>Key Performance Indicator</i>) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. 2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar <i>Auditing</i> (PSA) No. 62 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. 3. Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024. 4. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) dan Profil Perusahaan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 5. Jasa <i>Limited Review</i> Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Dan Entitas Anak per 30 Juni 2024. 6. Jasa Standar Audit 600 (SA600) Atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review of the Performance Evaluation (<i>Key Performance Indicator</i>) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2024. 2. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control as a form of implementation of Statement of Auditing Standards (PSA) No. 62 for the year ending December 31, 2024. 3. Audit of Financial Statements on the Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year ending December 31, 2024. 4. Submission of the Company's Annual Financial Report (LKTP) and Company Profile to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia. 5. Limited Review Services of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Subsidiaries as of June 30, 2024. 6. Audit Standard 600 (SA600) Services on the Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the Year Ended December 31, 2024.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu atas Evaluasi Kinerja (<i>Key Performance Indicator</i>) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. 2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar <i>Auditing</i> (PSA) No. 62 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. 3. Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024. 4. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) dan Profil Perusahaan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 5. Jasa <i>Limited Review</i> Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Dan Entitas Anak per 30 Juni 2024. 6. Jasa Standar Audit 600 (SA600) Atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review of the Performance Evaluation (<i>Key Performance Indicator</i>) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2024. 2. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control as a form of implementation of Statement of Auditing Standards (PSA) No. 62 for the year ending December 31, 2024. 3. Audit of Financial Statements on the Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year ending December 31, 2024. 4. Submission of the Company's Annual Financial Report (LKTP) and Company Profile to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia. 5. Limited Review Services of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Subsidiaries as of June 30, 2024. 6. Audit Standard 600 (SA600) Services on the Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the Year Ended December 31, 2024. 		
Biaya Fees	: Rp2.160.000.000		

Informasi mengenai KAP dan Akuntan yang melakukan audit WIKAL selama 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan sebagai berikut:

Information regarding Public Accounting Firms and Accountants who have audited WIKAL's for the last 5 (five) years are as follows:

Daftar Akuntan Publik 2020-2024 Public Accountants for 2020 – 2024

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Services	Jasa Lainnya Other Services	Fee	Izin KAP KAP License
2024	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Eishennoraz	Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu atas Evaluasi Kinerja (<i>Key Performance Indicator</i>) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. 2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar <i>Auditing</i> (PSA) No. 62 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. 3. Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024. 4. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) dan Profil Perusahaan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 5. Jasa <i>Limited Review</i> Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Dan Entitas Anak per 30 Juni 2024. 6. Jasa Standar Audit 600 (SA600) Atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024. 	Rp2.160.000.000	STTD.KAP-00012/ PM.22/2017

Daftar Akuntan Publik 2020-2024 Public Accountants for 2020 – 2024

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Services	Jasa Lainnya Other Services	Fee	Izin KAP KAP License
	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners		General Audit of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Financial Statements for the Year ended December 31, 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review of the Performance Evaluation (Key Performance Indicator) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2024. 2. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control as a form of implementation of Statement of Auditing Standards (PSA) No. 62 for the year ending December 31, 2024. 3. Audit of Financial Statements on the Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year ending December 31, 2024. 4. Submission of the Company's Annual Financial Report (LKTP) and Company Profile to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia. 5. Limited Review Services of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Subsidiaries as of June 30, 2024. 6. Audit Standard 600 (SA600) Services on the Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the Year Ended December 31, 2024. 	Rp2.160.000.000	STTD.KAP-00012/ PM.22/2017
2023	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners	Benny Andria	Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 General Audit of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Financial Statements for the Year ended December 31, 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 62 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. • Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) dan Profil Perusahaan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. • Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) • Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control as a form of implementation of Statement of Auditing Standards (PSA) No. 62 for the year ending December 31, 2023. • Submission of the Company's Annual Financial Report (LKTP) and Company Profile to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia. • Financial Report on the Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) 	Rp1.042.143.750 Rp1.042.143.750	STTD. KAP-00012/ PM.22/2017
2022	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners	Benny Andria	Audit umum atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Konsolidasian General audit of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Consolidated Financial Statements	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu atas Evaluasi Kinerja PT Wijaya Karya (Persero) Tbk • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern • Audit Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). • Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) dan Profil Perusahaan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia • Performance Appraisal Review of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk • Compliance Audit with Legislation and Internal Control • Audit on the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) Financial Statements • Submission of the Company's Annual Financial Report (LKTP) and Company Profile to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia 	Rp1.050.625.000 Rp1.050.625.000	STTD. KAP-00012/ PM.22/2017

Daftar Akuntan Publik 2020-2024

Public Accountants for 2020 – 2024

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Services	Jasa Lainnya Other Services	Fee	Izin KAP KAP License
2021	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners	Benny Andria	Audit umum atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Konsolidasian General audit of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Consolidated Financial Statements	<ul style="list-style-type: none"> Reviu atas Evaluasi Kinerja PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Audit Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) dan Profil Perusahaan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Performance Appraisal Review of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Compliance Audit with Legislation and Internal Control Audit on the Social and Environmental Responsibility Program (SER) Financial Statements Submission of the Company's Annual Financial Report (LKTP) and Company Profile to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia 	Rp1.025.000.000,000 Rp1.025.000.000,000	STTD.KAP-00012/ PM.22/2017
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners	Rudi Hartono Purba	Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 General audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi Kinerja Perseroan Tahun Buku 2020; Laporan Audit kepatuhan (<i>compliance audit</i>) terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Tahun Buku 2020; Laporan Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. The Company Performance Evaluation Report for 2020 Fiscal Year; Compliance audit report on Legislation and Internal Control for 2020 Fiscal Year; Audit Report on the Financial Statements of Partnership and Community Development Program for the year ending on December 31, 2020. 	Rp1.000.000.000 Rp1.000.000.000	STTD.KAP-00012/ PM.22/2017

BESARNYA FEE UNTUK MASING-MASING JENIS JASA YANG DIBERIKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Jasa Utama

- Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp733.920.000.

Jasa Lainnya

- Reviu atas Evaluasi Kinerja (*Key Performance Indicator*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 133.440.000,-
- Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar *Auditing* (PSA) No. 62 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 122.320.000,-
- Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 122.320.000,-

AMOUNT OF FEE FOR EACH TYPE OF SERVICE PROVIDED BY PUBLIC ACCOUNTING FIRM IN THE LAST FISCAL YEAR

Main Services

- General Audit of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's Financial Statements for the year ended December 31, 2024 amounting to Rp733.920.000.

Other Services

- Review of the Performance Evaluation (*Key Performance Indicator*) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2024, amounted to Rp133,440,000.
- Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control as a form of implementation of Statement of Auditing Standards (PSA) No. 62 for the year ending December 31, 2024, amounted to Rp122,320,000.
- Audit of Financial Statements on the Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year ending December 31, 2024, amounted to 122,320,000.

4. Jasa *Limited Review* Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Dan Entitas Anak per 30 Juni 2024 sebesar Rp 890.000.000,-
5. Jasa Standar Audit 600 (SA600) Atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 sebesar Rp 158.000.000,-.

JASA LAIN YANG DIBERIKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK SELAIN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

1. Reviu atas Evaluasi Kinerja (*Key Performance Indicator*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
2. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar *Auditing* (PSA) No. 62 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.
3. Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
4. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) dan Profil Perusahaan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
5. Jasa *Limited Review* Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Dan Entitas Anak per 30 Juni 2024.
6. Jasa Standar Audit 600 (SA600) Atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024.

KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Perseroan terus berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit, dan Manajemen. Untuk memastikan proses audit berjalan sesuai Standar Profesional Akuntan, perjanjian kerja, serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan sesuai dengan target waktu, pertemuan rutin dilakukan guna membahas berbagai permasalahan penting yang signifikan.

Kantor Akuntan Publik berkoordinasi dengan Komite Audit dengan meminta masukan/saran tentang area yang mendapat perhatian khusus dari Komite Audit. Pada saat melakukan Audit, Komite Audit dan Kantor Akuntan Publik melakukan diskusi terkait temuan-temuan yang diperoleh KAP, dan saat *exit meeting* KAP menyampaikan hasil auditnya. Komite Audit selalu mengevaluasi pelaksanaan audit umum sesuai dengan standar audit yang berlaku.

4. Submission of the Company's Annual Financial Report (LKTP) and Company Profile to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, amounted to Rp122,320,000.
5. Limited Review Services of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Subsidiaries as of June 30, 2024, amounted to Rp890,000,000

OTHER SERVICES PROVIDED BY PUBLIC ACCOUNTING FIRMS AND PUBLIC ACCOUNTANTS APART FROM AUDIT SERVICE OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IN THE LAST FISCAL YEAR

1. Review of the Performance Evaluation (Key Performance Indicator) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2024.
2. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control as a form of implementation of Statement of Auditing Standards (PSA) No. 62 for the year ending December 31, 2024.
3. Audit of Financial Statements on the Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year ending December 31, 2024.
4. Submission of the Company's Annual Financial Report (LKTP) and Company Profile to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia.
5. Limited Review of the Consolidated Financial Report of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Subsidiaries as of June 30, 2024.
6. Audit Standard 600 (SA600) Services on the Financial Statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the Year Ended December 31, 2024.

COORDINATION OF EXTERNAL AUDITORS AND AUDIT COMMITTEE

The Company continues to improve communication between the Public Accounting Firm (KAP), Audit Committee, and Management. To ensure that the audit process runs according to the Accountant Professional Standards, work agreements, as well as the audit scope that has been set and in accordance with the time target, regular meetings are held to discuss various significant issues.

The Public Accounting Firm coordinates with the Audit Committee by asking for input/suggestions about areas that require special attention from the Audit Committee. When conducting an Audit, the Audit Committee and the Public Accounting Firm discuss the KAP findings and the KAP presents the audit results at exit meeting. The Audit Committee evaluates that the general audits are conducted in accordance with applicable auditing standards.

Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Perusahaan Entitas Anak, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Legal Issues with Material Impact Faced by the Company, Subsidiaries, Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners

Hingga 31 Desember 2024, Perseroan memiliki perkara perdata yang terdaftar di berbagai Pengadilan maupun perkara pidana yang diperiksa di tahap penyelidikan maupun pengadilan yang dilakukan oleh Perseroan, sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the Company has/had no civil cases registered in various Courts or criminal cases examined at the investigation or trial stages conducted by the Company, as follows:

Permasalahan Hukum Legal Issues

Permasalahan Hukum Legal Issues	Jumlah Total			
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Pajak Tax	Arbitrase Arbitrase
Klaim Pembayaran Payment Claim	1	-	-	2
Lahan/Tanah Land	3	-	-	-
Pembatalan Putusan Arbitrase Cancellation of Arbitration Award	-	-	-	-
K3 OSH	-	-	-	-
Tarif Bea Masuk Import Duty Tarif	-	-	-	-

Permasalahan Hukum Legal Issues	Jumlah Amount	
	Perseroan The Company	Anak Usaha Subsidiary
PKPU	2	11

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IMPORTANT CASES FACED BY THE COMPANY

No.	Pokok Perkara dan Perkembangan Terakhir Case Subject And Latest Development	Status Penyelesaian Settlement Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact On the Company's Condition	Sanksi Administratif Administrative Sanction	Nilai Perkara Case Value
1	Pengajuan Klaim Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung oleh Perseroan Claim Submission for Jakarta Bandung Fast Train Project by the Company	Dalam proses pengajuan arbitrase melalui SIAC In the process of filing an arbitration through SIAC, the Appeal	Apabila klaim berhasil, akan membawa dampak positif pada keuangan perusahaan If the claim is successful, will have a positive impact on the company's finances	-	USD 675.835,536.89
2	Gugatan oleh Al Ghaith terhadap Perseroan atas belum selesainya pembayaran pekerjaan Proyek Logemen Al Jazair Lawsuit by Al Ghaith against the Company for unfinished payment of the Al Jazair Logemen Project work	Sedang dalam proses Request For Correction ke ICC Paris Currently in the process of Request For Correction to the ICC Paris	Perseroan diminta membayar Al Ghaith sebesar kurang lebih Rp 122.000.000.000 The Company is requested to pay Al Ghaith approximately Rp122,000,000,000		USD 6,002,004.96 + DZD 71,424,164.07

No.	Pokok Perkara dan Perkembangan Terakhir Case Subject And Latest Development	Status Penyelesaian Settlement Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact On the Company's Condition	Sanksi Administratif Administrative Sanction	Nilai Perkara Case Value
3	Gugatan Klaim Asuransi PT Berdikari Insurance pada Proyek Jembatan Dompok Lawsuit of PT Berdikari Insurance Claim on Dompok Bridge Project	Putusan Banding telah tanggal 24 Desember 2024 mengabulkan gugatan Perseroan dan menyatakan PT Berdikari Insurance untuk membayar ganti rugi klaim polis asuransi CAR kepada Perseroan The Appeal Decision dated December 24, 2024 granted the Company's lawsuit and stated that PT Berdikari Insurance must pay compensation for the CAR insurance policy claim to the Company.	Membawa dampak positif pada keuangan perusahaan Bring a positive impact on the company's finances	-	Rp 16.817.569.719,- Rp 16.817.569.719,-
4	PKPU PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Pemohon : PT Asta Askara Sentosa Tanggal 16 Februari 2024 PKPU of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Applicant: PT Asta Askara Sentosa Date: February 16, 2024	Permohonan PKPU ditolak PKPU application rejected	Ada potensi terjadinya pailit apabila PKPU dikabulkan There is a potential for bankruptcy if PKPU is granted	-	Nilai Perkara : Rp300.000.000 Case Value: Rp300,000,000
5	PKPU PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi Pemohon PT Infinite Berkah Energi Tanggal 3 Mei 2024 PKPU of Wijaya Karya Industri dan Konstruksi Applicant: Infinite Berkah Energi Date: May 3, 2024	Permohonan PKPU ditolak PKPU application rejected	Ada potensi terjadinya pailit apabila PKPU dikabulkan There is a potential for bankruptcy if PKPU is granted	-	Nilai Perkara : Rp6.080.882.032 Case Value: Rp6,080,882,032
6	PKPU PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi Pemohon: PT Delta Niaga Sinergi Tanggal : 10 Juni 2024 PKPU of Wijaya Karya Industri dan Konstruksi Applicant: Delta Niaga Sinergi Date: June 10, 2024	Permohonan PKPU ditolak PKPU application rejected	Ada potensi terjadinya pailit apabila PKPU dikabulkan There is a potential for bankruptcy if PKPU is granted	-	Nilai Perkara : Rp1.599.410.155 Case Value: Rp1,599,410,155
7	PKPU PT Wijaya Karya Bitumen Pmohon : PT Slava Indonesia & PT Lintas Bangun Persadajaya Tanggal 11 Juli 2024 PKPU of Wijaya Karya Bitumen Applicant: PT Slava Indonesia & PT Lintas Bangun Persadajaya Date: July 11, 2024	Permohonan PKPU Sementara telah dicabut oleh Hakim Pengawas. Temporary PKPU Application has been revoked by the Supervising Judge.	Ada potensi terjadinya pailit apabila PKPU dikabulkan There is a potential for bankruptcy if PKPU is granted	-	Nilai Perkara : PT Slava : Rp 650.979.258 PT Lintas : Rp 2.441.857.650 Case Value: - PT Slava: Rp650,979,258 - PT Lintas: Rp2,441,857,650
8	PKPU PT Wijaya Karya Realty Pemohon: PT Indoland Manajemen Properti Terpadu & CV Saroha Indonesia Tanggal : 26 Juli 2024 PKPU of PT Wijaya Karya Realty Applicant: PT Indoland Integrated Property Management & CV Saroha Indonesia Date: July 26, 2024	Permohonan PKPU ditolak PKPU application rejected	Ada potensi terjadinya pailit apabila PKPU dikabulkan There is a potential for bankruptcy if PKPU is granted	-	Nilai Perkara : PT Indoland : Rp 3.835.904.010 CV Saroha : Rp 1.800.000.000 PT Abimanyu (Kreditur Lain) : Rp 13.683.215.430 Case Value: - PT Indoland: Rp3,835,904,010 - CV Saroha: Rp1,800,000,000 - PT Abimanyu (Other Creditors): Rp13,683,215,430

No.	Pokok Perkara dan Perkembangan Terakhir Case Subject And Latest Development	Status Penyelesaian Settlement Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact On the Company's Condition	Sanksi Administratif Administrative Sanction	Nilai Perkara Case Value
9	PKPU PT Wijaya Karya Realty Pemohon : CV Natuna Cemerlang Tanggal : 26 Juli 2024 PKPU of PT Wijaya Karya Realty Applicant: CV Natuna Cemerlang Date: July 26, 2024	Permohonan PKPU ditolak PKPU application rejected	Ada potensi terjadinya pailit apabila PKPU dikabulkan There is a potential for bankruptcy if PKPU is granted	-	Nilai Perkara: Rp1.733.188.375 Case Value: Rp1,733,188,375
10	PKPU PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi Pemohon : PT Delta Niaga Sinergi Tanggal : 19 Agustus 2025 PKPU of PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi Applicant: PT Delta Niaga Sinergi Date: August 19, 2025	Permohonan PKPU ditolak PKPU application rejected	Ada potensi terjadinya pailit apabila PKPU dikabulkan There is a potential for bankruptcy if PKPU is granted	-	Nilai Perkara : Rp842.122.452 Case Value: Rp842,122,452
11	PKPU PT Wijaya Karya Pracetak Gedung Pemohon : CV Maju Lancar Jaya Tanggal : 10 September 2024 PKPU of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung Applicant: CV Maju Lancar Jaya Date: September 10, 2024	Permohonan PKPU ditolak PKPU application rejected	Ada potensi terjadinya pailit apabila PKPU dikabulkan There is a potential for bankruptcy if PKPU is granted	-	Nilai Perkara: Rp570.418.720 Case Value: Rp570,418,720
12	PKPU PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi Pemohon : PT Infinite Berkah Energi Tanggal : 3 Oktober 2024 PKPU of PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi Applicant: PT Infinite Berkah Energi Date: October 3, 2024	Permohonan PKPU ditolak PKPU application rejected	Ada potensi terjadinya pailit apabila PKPU dikabulkan There is a potential for bankruptcy if PKPU is granted	-	Nilai Perkara : Rp 8.285.419.550 Case Value: Rp8,285,419,550
13	PKPU PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Pemohon : UD Jaya Abadi & CV Jaya Sentosa Tanggal : 14 Oktober 2024 PKPU of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Applicant: UD Jaya Abadi & CV Jaya Sentosa Date: October 14, 2024	Permohonan PKPU dicabut PKPU application withdrawn	Ada potensi terjadinya pailit apabila PKPU dikabulkan There is a potential for bankruptcy if PKPU is granted	-	Nilai Perkara: Rp765.207.676 Case Value: Rp765,207,676
14	PKPU PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi Pemohon : PT Delta Niaga Sinergi Tanggal : 25 Oktober 2024 PKPU PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi Applicant: PT Delta Niaga Sinergi Date: October 25, 2024	Permohonan PKPU ditolak PKPU application rejected	Ada potensi terjadinya pailit apabila PKPU dikabulkan There is a potential for bankruptcy if PKPU is granted	-	Nilai Perkara : Rp8.285.419.550 Case Value: Rp8,285,419,550
15	PKPU PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Pemohon : PT Wiradjaja Prima Kencana Tanggal 1 November 2024 PKPU of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Applicant: PT Wiradjaja Prima Kencana Date: November 1, 2024	Permohonan PKPU dicabut PKPU application withdrawn	Ada potensi terjadinya pailit apabila PKPU dikabulkan There is a potential for bankruptcy if PKPU is granted	-	Nilai Perkara : Rp8.316.935.400 Case Value: Rp8,316,935,400

No.	Pokok Perkara dan Perkembangan Terakhir Case Subject And Latest Development	Status Penyelesaian Settlement Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact On the Company's Condition	Sanksi Administratif Administrative Sanction	Nilai Perkara Case Value
16	PKPU PT Wijaya Karya Realty Pemohon : CV Saroha Sentosa Indonesia PKPU of PT Wijaya Karya Realty Applicant: CV Saroha Sentosa Indonesia	Permohonan PKPU ditolak PKPU application rejected	Ada potensi terjadinya pailit apabila PKPU dikabulkan There is a potential for bankruptcy if PKPU is granted	-	Nilai Perkara : Rp1.800.000.000 Case Value: Rp1,800,000,000

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT SERTA ENTITAS ANAK

Hingga 31 Desember 2024, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat serta Entitas Anak.

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN

Hingga 31 Desember 2024, tidak ada permasalahan hukum yang berdampak terhadap Perseroan.

KASUS TERKAIT BURUH DAN KARYAWAN

Hingga 31 Desember 2024, tidak terdapat kasus yang melibatkan Perseroan dengan buruh atau karyawan.

SANKSI ADMINISTRASI/SANKSI YANG DIKENAKAN KEPADA PERUSAHAAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN OTORITAS LAINNYA PADA TAHUN 2024

Hingga 31 Desember 2024, tidak ada sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Lainnya sehingga tidak ada informasi terkait yang dapat disajikan pada laporan ini.

LEGAL CASES FACED BY THE SERVING BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS AND SUBSIDIARIES

As of December 31, 2024, there were no legal cases faced by the serving Board of Commissioners and Board of Directors as well as Subsidiaries.

IMPACT OF LEGAL CASES AGAINST THE COMPANY

Until December 31, 2024, there were no legal cases that impact the Company.

CASES RELATED TO LABOR AND EMPLOYEES

As of December 31 2024, there were no cases involving the Company with workers or employees.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS/SANCTIONS IMPOSED ON THE COMPANY, MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY AND OTHER AUTHORITIES IN 2024

Until December 31, 2024, there were no administrative sanctions imposed on the Company, Members of Board of Commissioners, and Members of Board of Directors by the Financial Services Authority and Other Authorities, hence there is no related information that can be presented in this report.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Perseroan memahami pentingnya keterbukaan informasi sebagai landasan dalam menciptakan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan. Dengan menyediakan akses yang mudah dan terbuka terhadap informasi perusahaan, baik untuk pihak internal maupun eksternal, Perseroan berupaya memastikan setiap pihak dapat memperoleh data yang relevan secara transparan.

Keterbukaan informasi ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab terhadap pemegang saham dan masyarakat, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik. Perseroan menyadari bahwa citra positif hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan berkesinambungan. Berbagai informasi yang disediakan oleh Perseroan untuk diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan meliputi:

1. Media Elektronik

WIKa menyadari akan pentingnya pemanfaatan media elektronik dalam mendukung penyampaian informasi kepada publik baik internal maupun eksternal. Perseroan memastikan aksesibilitas data melalui berbagai media elektronik sebagai langkah proaktif untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang efisien dan efektif dalam lingkup yang semakin meluas. Media elektronik WIKa data diakses melalui:

- Website : www.WIKa.co.id
- E-mail : adwijaya@WIKa.co.id

2. Siaran Pers

Sepanjang tahun 2024, WIKa telah mengeluarkan berbagai siaran pers yang membahas beragam hal terkait dengan Perseroan, antara lain:

The Company understands the importance of information disclosure as a foundation in creating strong relationships with stakeholders. By providing easy and open access to company information, both internally and externally, the Company strives to ensure that every party can obtain relevant data in a transparent manner.

This information disclosure is not only a form of responsibility to shareholders and the public, but also a strategic step to build public trust. The Company realizes that a positive image can only be achieved through open, honest, and continuous communication. Various information provided by the Company for access by shareholders and stakeholders include:

1. Electronic Media

WIKa's realizes the importance of utilizing electronic media in supporting the delivery of information to the public, both internal and external. The Company ensures data accessibility through various electronic media as a proactive step to meet the needs of efficient and effective communication in an increasingly broad scope. WIKa's electronic media data is accessed through:

- Website: www.WIKa.co.id
- E-mail : adwijaya@WIKa.co.id

2. Press Releases

During 2024, WIKa has issued various press releases that discuss various matters related to the Company, among others:

No.	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
1	03 Januari 2024 January 03, 2024	Sambut Tahun Baru, WIKa Berbagi 200 Paket Sembako kepada Kaum Dhuafa Welcoming the New Year, WIKa Distributed 200 Food Packages to the Poor
2	09 Januari 2024 January 09, 2024	Presiden RI Joko Widodo Resmikan Bendungan Karian Bendungan Pertama WIKa yang Diresmikan di Tahun 2024 President of the Republic of Indonesia Joko Widodo Inaugurates the Karian Dam, WIKa's First Dam to be Inaugurated in 2024
3	19 Januari 2024 January 19, 2024	Langkah Mantap Penyehatan WIKa, Kontrak Baru WIKa 2023 Capai Rp29,1 Triliun A Steady Step for WIKa's Recovery, WIKa's New Contract in 2023 Reached Rp29.1 Trillion
4	24 Januari 2024 January 24, 2024	WIKa dan 11 Lembaga Keuangan Sepakati MRA dengan Nilai Outstanding Rp 24,20 Triliun WIKa and 11 Financial Institutions Agree on MRA with an Outstanding Value of Rp24.20 Trillion
5	25 Januari 2024 January 25, 2024	SPAM Semarang Jadi PSN Kedua Garapan WIKa yang Diresmikan Jokowi di 2024 SPAM Semarang Becomes WIKa's Second PSN to be Inaugurated by Jokowi in 2024
6	02 Februari 2024 February 02, 2024	Upaya WIKa Sehatkan Keuangan Lewat Penguatan Tata Kelola WIKa's Efforts to Improve Finances Through Strengthening Governance
7	06 Februari 2024 February 06, 2024	WIKa Garap Proyek NCICD Senilai Rp163,5 Miliar WIKa Works on the NCICD Project Worth Rp163.5 Billion
8	10 Februari 2024 February 10, 2024	WIKa Bangun Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 KKT Kariangau - Sp. Tempadung WIKa Builds the IKN Toll Road Section 3B-2 KKT Kariangau - Sp. Tempadung
9	17 Februari 2024 February 17, 2024	Tanggul Sungai Wulan Jebol, WIKa Sigap Tambal dalam 3 Hari Wulan River Embankment Bursts, WIKa Quickly Patched in 3 Days
10	22 Februari 2024 February 22, 2024	Seminar Peduli Stunting WIKa Dihadiri 6.400 Kader Posyandu WIKa Stunting Care Seminar Attended by 6,400 Posyandu Cadres
11	29 Februari 2024 February 29, 2024	Dukung pemenuhan air di Jakarta dan Jabar, WIKa bangun SPAM Jatiluhur I Supporting the fulfillment of water in Jakarta and West Java, WIKa builds SPAM Jatiluhur I

No.	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
12	06 Maret 2024 March 06, 2024	Lembaga Keuangan Dukung Penuh, Kesepakatan MRA WIKA Capai 100% Financial Institutions Fully Support, WIKA MRA Agreement Reached 100%
13	21 Maret 2024 March 21, 2024	WIKA lanjutkan pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur Tahap 2 di IKN WIKA continues the construction of Jalan Sumbu Kebangsaan Timur Phase 2 in IKN
14	25 Maret 2024 March 25, 2024	WIKA Raih Kontrak Baru hingga Februari 2024 Senilai Rp 3,17 Triliun WIKA's New Contracts until February 2024 Worth Rp3.17 Trillion
15	02 April 2024 April 02, 2024	WIKA Gelar Pasar Sembako Murah di IKN WIKA Held Cheap Grocery Market in IKN
16	04 April 2024 April 04, 2024	WIKA Bangun Pusat Olahraga Elite untuk Olimpiade di Cibubur WIKA Builds Elite Sports Center for the Olympics in Cibubur
17	19 April 2024 April 19, 2024	Jalan Tol Bayung Lencir-Tampino-Jambi Ditargetkan Rampung Awal 2025 Bayung Lencir-Tampino-Jambi Toll Road Targeted for Completion in Early 2025
18	25 April 2024 April 25, 2024	Progres Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 3 Construction Progress of Serang-Panimbang Toll Road Section 3
19	30 April 2024 April 30, 2024	WIKA Raih Kontrak Baru Senilai Rp 5 Triliun WIKA's New Contract Worth Rp5 Trillion
20	03 Mei 2024 May 03, 2024	Pefindo Naikkan Peringkat WIKA Jadi idBBB dari idSD Pefindo Raised WIKA's Rating to idBBB from idSD
21	06 Mei 2024 May 06, 2024	WIKA Dinobatkan Sebagai BUMN Paling Produktif oleh Majalah Listrik Indonesia WIKA Named the Most Productive SOE by Indonesian Electricity Magazine
22	08 Mei 2024 May 08, 2024	WIKA & UGM Bangun Irigasi Perpipaian di Kelurahan Sodo Gunungkidul WIKA & UGM Build Pipe Irrigation in Sodo Village, Gunungkidul
23	14 Mei 2024 May 14, 2024	Wijaya Karya (WIKA) Groundbreaking Proyek Pengolahan Sampah Terbesar di Indonesia Wijaya Karya (WIKA) Groundbreaking for the Largest Waste Processing Project in Indonesia
24	15 Mei 2024 May 15, 2024	Presiden RI Resmikan Proyek Bendungan Ameroro President of the Republic of Indonesia Inaugurated the Ameroro Dam Project
25	31 Mei 2024 May 31, 2024	Raih Kontrak Baru Rp5,5 Triliun, WIKA Mulai Pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadim Achieving a New Contract of Rp5.5 Trillion, WIKA Began the Construction of Terminal 2 of Hang Nadim International Airport
26	27 Juni 2024 June 27, 2024	Donor Darah WIKA WIKA Blood Donation
27	28 Juni 2024 June 28, 2024	WIKA Masuk <i>Fortune Southeast Asia</i> 500 WIKA Enters <i>Fortune Southeast Asia</i> 500
28	01 Juli 2024 July 01, 2024	Penanaman Pohon Endemik Jawa di Tol IKN Planting Endemic Javanese Trees on the IKN Toll Road
29	03 Juli 2024 July 03, 2024	WIKA Gelar Program Beasiswa Pendidikan Anak Berprestasi WIKA Held an Education Scholarship Program for Outstanding Children
30	04 Juli 2024 July 04, 2024	WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp 8,86 T Hingga Mei 2024 WIKA Secured a New Contract of Rp8.86 T Until May 2024
31	06 Juli 2024 July 06, 2024	Peresmian Bendungan Pamukkulu Inauguration of the Pamukkulu Dam
32	10 Juli 2024 July 10, 2024	Peresmian Bendungan Cipanas Inauguration of the Cipanas Dam
33	16 Juli 2024 July 16, 2024	WIKA Bangun Gedung UNJANI WIKA Builds UNJANI Building
34	17 Juli 2024 July 17, 2024	Kontrak Baru WIKA Senilai Rp 10,25 Triliun WIKA's New Contract Worth Rp10.25 Trillion
35	22 Juli 2024 July 22, 2024	WIKA Kembali Lakukan Inovasi Pada Proyek RE-MWRD WIKA Again Innovates in the RE-MWRD Project
36	22 Juli 2024 July 22, 2024	<i>Groundbreaking Rediversion of Muara Wahau Road Diversion (RE-MWRD)</i> Groundbreaking Rediversion of Muara Wahau Road Diversion (RE-MWRD)
37	06 Agustus 2024 August 06, 2024	IPAL KIPP IKN IPAL KIPP IKN
38	07 Agustus 2024 August 07, 2024	Bantuan Sayap Ibu Donation for Sayap Ibu
39	22 Agustus 2024 August 22, 2024	Rencana pembayaran Obligasi dan Sukuk September 2024 Bond and Sharia Bond Payment Plan September 2024

No.	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
40	29 Agustus 2024 August 29, 2024	Laporan Keuangan + Perolehan Kontrak Jetty 1 Baru Manggis Financial Report + Acquisition of Jetty 1 Baru Manggis Contract
41	30 Agustus 2024 August 30, 2024	Puji Karya WIKA sekelas Hotel Bintang 5, Jokowi Resmikan RSUP Persahabatan Praising WIKA's Work as a 5-Star Hotel, Jokowi Inaugurated Persahabatan Hospital
42	04 September 2024 September 04, 2024	WIKAI Raih Kontrak Baru WIKAI Won New Contract
43	06 September 2024 September 06, 2024	Dua Proyek WIKAI diresmikan Presiden Jokowi, tingkatkan kualitas kesehatan dan mobilitas warga Jawa Timur Two WIKAI Projects Inaugurated by President Jokowi, Improve the Quality of Health and Mobility of East Java Residents
44	09 September 2024 September 09, 2024	WIKAI penuh pembayaran Obligasi & Sukuk PUB II Tahap I seri A Rp896Miliar WIKAI Fulfilled Bond & Sharia Bond Payment PUB II Phase I Series A Rp896 Billion
45	14 September 2024 September 14, 2024	Optimalkan Layanan Kesehatan & Pariwisata : WIKAI Bangun Rumah sakit & Jembatan Kaca Optimizing Health & Tourism Services: WIKAI Builds Hospital & Glass Bridge
46	25 September 2024 September 25, 2024	Upaya transformasi yang dilakukan WIKAI semakin meningkatkan keunggulan eksekusi proyek, hingga Agustus 2024 WIKAI bukukan kontrak baru senilai Rp 13,5 Triliun WIKAI's transformation efforts are increasingly improving the excellence of project execution, until August 2024 WIKAI has booked new contracts worth Rp13.5 Trillion
47	01 Oktober 2024 October 01, 2024	WIKASATRIAN: Pusat Kepemimpinan Berbasis Alam untuk Keberlanjutan Lingkungan WIKASATRIAN: Nature-Based Leadership Center for Environmental Sustainability
48	07 Oktober 2024 October 07, 2024	Sinergi WIKAI dan BUMN Karya Tingkatkan Kualitas Pendidikan di IKN Synergy between WIKAI and BUMN Karya Improves the Quality of Education in IKN
49	09 Oktober 2024 October 09, 2024	Pakai Jalan Tol: Lebih Boros Atau Ekonomis? Using Toll Roads: More Wasteful or Economical?
50	15 Oktober 2024 October 15, 2024	Jokowi Resmikan Istana Negara IKN Karya WIKAI KSO, Simak Kecanggihannya Jokowi Inaugurated IKN State Palace by WIKAI JO, Be Amazed with its Sophistication
51	17 Oktober 2024 October 17, 2024	Reduksi Banjir dan Tingkatkan Konektivitas, Presiden Jokowi Resmikan 2 Proyek Strategis WIKAI di Sumatera Reducing Floods and Increasing Connectivity, President Jokowi Inaugurated 2 Strategic WIKAI Projects in Sumatra
52	24 Oktober 2024 October 24, 2024	Wapres Gibran Tinjau Proyek WIKAI, Tekankan Rampung Tepat Waktu Dengan Kualitas Terbaik Vice President Gibran Reviews WIKAI Projects, Emphasizes Completion on Time with the Best Quality
53	26 Oktober 2024 October 26, 2024	Penghargaan Kompetisi <i>International Year In Infrastructure Going Digital Awards 2024 dan Founders' Honor Going Digital Awards</i> Year In Infrastructure Going Digital Awards 2024 International Competition and Founders' Honor Going Digital Awards
54	28 Oktober 2024 October 28 2024	Semangat Sumpah Pemuda, Kisah Inspiratif 2 Insan Muda WIKAI dalam Meraih Gelar Bergengsi di Kompetisi Nasional The Spirit of the Youth Pledge, Inspirational Stories of 2 WIKAI Young People in Winning Prestigious Titles in National Competitions
55	01 November 2024 November 01, 2024	Kinerja Operasi Membaik, WIKAI Tingkatkan Kolektabilitas Piutang dan Pengelolaan Utang Operational Performance Improves, WIKAI Increases Receivables Collectibility and Debt Management
56	07 November 2024 07 November 2024	10 Proyek Monumental Karya WIKAI 10 Monumental Projects by WIKAI
57	07 November 2024 07 November 2024	Penghargaan <i>The Most Awesome in Talent Management</i> The Most Awesome in Talent Management Award
58	11 November 2024 November 11, 2024	Mengenal Bang Guntur, Sosok Local Heroes di Desa Tanjung Burung Binaan WIKAI Getting to Know Bang Guntur, a Local Heroes Figure in Tanjung Burung Village, Fostered by WIKAI
59	22 November 2024 November 22, 2024	WIKAI Raih <i>Gold Rank Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024</i> WIKAI Achieved Gold Rank Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024
60	25 November 2024 November 25, 2024	Kontribusi WIKAI dalam Pembangunan Indonesia melalui Asta Cita WIKAI's Contribution to Indonesia's Development through Asta Cita
61	01 November 2024 November 01, 2024	Implementasikan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik: WIKAI Raih 2 Penghargaan <i>Corporate Governance</i> Implementing Good Corporate Governance: WIKAI Obtained 2 Corporate Awards Governance
62	28 November 2024 November 28, 2024	Capai Kontrak Baru Rp16,9 Triliun, WIKAI Terapkan ESG Hingga Dukung Asta Cita Reaching New Contracts of Rp16.9 Trillion, WIKAI Implemented ESG to Support Asta Cita
63	29 November 2024 November 29, 2024	Konsisten Tingkatkan Implementasi ESG, WIKAI Jalin Kerjasama Dengan BRIN, Sabet Indonesia CSR Award 2024 Consistently Increasing ESG Implementation, WIKAI Collaborates with BRIN, Won Indonesia CSR Award 2024
64	05 Desember 2024 December 05, 2024	TJSL WIKAI menyelenggarakan Aksi Penanaman Pohon dan Donor Darah CSR WIKAI Held Tree Planting and Blood Donation Action

3. Buletin

Perseroan memiliki WIKA MAGZ yakni sebuah media cetak sebagai saluran informasi internal yang menjadi jendela informasi utama dan *marketing tool* untuk meningkatkan reputasi dan mendukung peningkatan penjualan Perseroan. Media ini didistribusikan ke seluruh *stakeholder* perusahaan baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

4. Media Sosial

Perseroan secara konsisten menyajikan informasi terkini dan tepat waktu kepada publik melalui berbagai *platform* media sosial, termasuk:

- a. Twitter : @PTWijayaKarya
- b. Facebook : PT Wijaya Karya
- c. Instagram : ptwijayakarya
- d. Youtube : PT WIJAYA KARYA
- e. LinkedIn : PT Wijaya Karya
- f. *E-mail* : humas@WIKA.co.id

3. Bulletin

The Company has WIKA's MAGZ, a print media as an internal information channel which is the main information window and marketing tool to improve reputation and support the Company's sales increase. This media is distributed to all Company stakeholders both in hard copy and soft copy.

4. Social Media

The Company consistently presents the latest and timely information to the public through various social media platforms, including:

- a. Twitter : @PTWijayaKarya
- b. Facebook : PT Wijaya Karya
- c. Instagram : ptwijayakarya
- d. Youtube : PT WIJAYA KARYA
- e. LinkedIn : PT Wijaya Karya
- f. *E-mail* : humas@WIKA.co.id

Kode Etik

Code of Conduct

Untuk memastikan keberhasilan optimal dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, WIKA menerapkan Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* (CoC) sebagai panduan berperilaku bagi seluruh jajaran Perseroan. Pedoman ini dirancang untuk mengarahkan interaksi dan hubungan yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan, sekaligus menjadi fondasi dalam menginternalisasi nilai-nilai dan etika bisnis yang dijunjung oleh Perseroan.

Sebagai bagian dari budaya perusahaan, CoC tidak hanya menjadi acuan dalam bertindak, tetapi juga diamanatkan kepada setiap karyawan untuk diterapkan secara konsisten. Melalui perilaku yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan, diharapkan visi dan misi Perseroan dapat tercapai dengan lebih baik. Penerapan CoC yang berkelanjutan diproyeksikan dapat memberikan dampak positif, baik dalam hal peningkatan kinerja operasional maupun penguatan citra Perseroan di mata publik. Dalam setiap keputusan dan tindakan, seluruh insan WIKA diharapkan mematuhi standar integritas tertinggi, termasuk untuk situasi yang mungkin tidak diatur secara eksplisit oleh hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan memiliki kode etik Perusahaan yang diatur dalam Buku Pedoman Etika dan Perilaku yang mengacu pada peraturan-peraturan terkait, antara lain:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pedoman Umum GCG Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013 tentang Road Map menuju BUMN Bersih;
5. *Road Map* Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014;
6. *The Indonesia Corporate Governance Manual*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & *International Finance Corporation* (IFC), Edisi Pertama, 2014;
7. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya; dan
8. ISO 37001, persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pokok-pokok kode etik yang terdapat dalam Pedoman Etika dan Perilaku tersebut mengatur antara lain:

1. Kebijakan Perseroan Mengenai Etika dan Perilaku
 - a. Integritas dalam Aktivitas Bisnis dan Pekerjaan;
 - b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai;
 - c. Pengelolaan Lingkungan;

To ensure optimal success in implementing GCG principles, WIKA implements a Code of Conduct (CoC) as a behavioral guide for all levels of the Company. This guideline is designed to direct interactions and relationships carried out with stakeholders, as well as a foundation in internalizing the values and business ethics upheld by the Company.

As part of the corporate culture, the CoC is not only a reference for action, but also mandated to every employee to be applied consistently. Through behavior that reflects the Company's values, it is expected that the Company's vision and mission can be better achieved. The sustainable implementation of CoC is projected to have a positive impact, both in terms of improving operational performance and strengthening the Company's image in the public eye. In every decision and action, all WIKA's personnel are expected to adhere to the highest standards of integrity, including for situations that may not be explicitly regulated by applicable laws and regulations in Indonesia.

The Company' Code of Conduct is regulated in the Ethics and Conduct Handbook that refers to various regulations and related provisions, including:

1. 2003 Law Number 19 concerning State-Owned Enterprises Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Indonesian GCG General Guidelines, National Committee on Governance Policy (KNKG), 2006;
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
4. Ministry of SOEs Circular No. SE-05/MBU/2013 concerning Road Map towards Clean SOEs;
5. Corporate Governance Road Map issued by the Financial Services Authority (OJK) in 2014;
6. *The Indonesia Corporate Governance Manual*, OJK & *International Finance Corporation* (IFC), First Edition, 2014;
7. The Company's Articles of Association and amendments thereto; and
8. ISO 37001, Anti-Bribery Management System requirements.

CODE OF CONDUCT PRINCIPLES

The code of conduct principles are contained in the Code of Ethics and Conduct and regulate:

1. Company Policies Regarding Ethics and Behavior
 - a. Integrity in Business and Work Activities;
 - b. Employee Health and Safety;
 - c. Management of the environment;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> d. Keterlibatan dalam Politik; e. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi; f. Benturan Kepentingan; g. Etika Usaha Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Kebijakan tentang Larangan Suap dan Praktik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; h. Kebijakan tentang Hadiah, Imbalan dan Sumbangan (Donasi) yang tidak dibenarkan; i. Data Perseroan dan Kerahasiaan Informasi; j. Keterbukaan Informasi; k. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya; l. Penggunaan Aplikasi Sosial Media di Kantor; m. Integritas Penggunaan Sosial Media dan citra Perseroan; n. Integritas Laporan Keuangan; o. Perlindungan Aset Perseroan; p. Tata Kelola Terintegrasi Tata Kelola Perseroan dan Entitas Anak; q. Pelarangan <i>Insider Trading</i>; r. Etika dalam Bermedia Sosial (Medsos); s. Pelarangan Hasutan Kebencian; t. Kesetaraan Hak Dalam Rekrutmen Pegawai; u. Hak atas Kekayaan Intelektual; v. <i>Respectful Workplace Policy</i>. <p>2. Etika dengan Pemangku Kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan dengan Pemegang Saham; b. Hubungan dengan Pemegang Obligasi; c. Hubungan dengan Kreditur; d. Hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham (<i>Shareholders</i>); e. Hubungan dengan Pemberi Pekerjaan; f. Hubungan dengan Rekanan; g. Hubungan dengan Pengguna Akhir; h. Hubungan dengan Pegawai (Hubungan Industrial); i. Hubungan dengan Pejabat Negara; j. Hubungan dengan Masyarakat. <p>3. Mekanisme Pelaporan dan Penegakan Etika dan Perilaku</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaporan Pelanggaran; b. Mekanisme Penegakan Kepatuhan Terhadap Kode Etik; c. Sanksi atas Pelanggaran. | <ul style="list-style-type: none"> d. Involvement in Politics; e. False Statements, False Claims and Conspiracies; f. Conflicts of Interest; g. Anti-Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) Business Ethics and Policy on Prohibition of Bribery and Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Practices; h. Unjustified Gifts, Rewards and Donations Policy; i. Company Data and Information Confidentiality; j. Information Disclosure; k. Misappropriation and Similar Deviations; l. Use of Social Media Applications in the Office; m. Integrity on Use of Social Media and Company image; n. Integrity of Financial Statements; o. Protection of Company Assets; p. Integrated Governance of the Company and Subsidiaries; q. Prohibition of Insider Trading; r. Ethics in Social Media; s. Prohibition of Incitement to Hate; t. Equality of Rights in Employee Recruitment; u. Intellectual Property Rights.Ethics with Stakeholders. v. Respectful Workplace Policy. <p>2. Ethics with Stakeholders</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Relationship with Shareholders; b. Relationship with Bondholders; c. Relationship with Creditors; d. Relationships with Investors and Shareholders; e. Relationship with the Employer; f. Relationship with Partners; g. Relationship with End Users; h. Industrial Relations; i. Relationship with State Officials; j. Relationship with the Community. <p>3. Ethics and Behavior Reporting and Enforcement Mechanisms</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Violation Reporting; b. Code of Conduct Compliance Enforcement; c. Sanctions for Violations. |
|---|---|

TIM PENGADUAN PELANGGARAN

Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas di Perseroan, dibentuklah Tim Pengaduan Pelanggaran yang bertugas untuk mengelola pengaduan atas segala bentuk pelanggaran. Tim ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Adapun susunan Tim Pengaduan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Tim Kepatuhan
Tim Kepatuhan adalah tim yang dibentuk oleh Perseroan yang bertanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap *Code of Conduct*, serta menyampaikannya kepada Tim Pencari Fakta.

VIOLATION COMPLAINT MANAGEMENT TEAM

In order to uphold the Company's compliance and integrity, a Violation Complaint Team was formed to manage complaints regarding violations. The Violation Complaint Team is responsible to the President Director. The Violation Complaint Team consists of:

1. Compliance Team
The Compliance Team is a team formed by the Company and responsible for receiving and following up on reports regarding violations and/or deviations from the Code of Conduct, and submitting them to the Fact Finding Team.

Struktur Organisasi Tim Kepatuhan

Organizational Structure of Compliance Team

Ketua Chairman	Corporate Secretary
Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> Senior Manager of Corporate Governance & Community Development Senior Manager of Strategic Risk Management Senior Manager of Project Control Senior Manager of Compliance and Quality System Management Senior Manager of Health, Safety and Environment Senior Manager of Litigation Legal Senior Manager of Organization & Human Experience Management

- Tim Pencari Fakta
Tim yang dibentuk atau direkomendasikan oleh Tim Kepatuhan dan disetujui oleh Direksi untuk mencari serta menyelidiki indikasi penyelewengan terhadap pelaksanaan kepatuhan *Code of Conduct*. Tim Pencari Fakta dapat dibentuk sesuai kewenangan Direksi dari ahli terkait dan independen di luar fungsi dan/atau organisasi. Tim Pencari Fakta bersifat *ad hoc*.
- Majelis Kehormatan Pegawai
Majelis Kehormatan Pegawai adalah Pejabat dan/atau Pegawai yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta pemeriksaan terhadap Pegawai yang dilaporkan/diduga melanggar peraturan/*Code of Conduct*.

- Fact Finding Team
A team formed or recommended by the Compliance Team approved by the Board of Directors to investigate indications of irregularities in the implementation of Code of Conduct compliance. A Fact Finding Team can be formed according to the Board of Directors' authority from related and independent experts outside the function and/or organization. The Fact Finding Team is *ad hoc*.
- Employee Honorary Council
The Employee Honorary Council is an official and/or employee who is given the authority to enforce implementation and examine employees who are reported/suspected of violating regulations/*Code of Conduct*.

Struktur Organisasi Majelis Kehormatan Pegawai

Organizational Structure of Employee Honorary Council

Ketua Chairman	SVP Human Capital
Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> Corporate Secretary Head of Internal Audit SVP Legal Division SVP Risk Management Division SVP Compliance and Quality, Health, Safety, Environment Division

BENTUK SOSIALISASI DAN UPAYA PENEGAKANNYA

Untuk menegakkan *Code of Conduct*, Perseroan secara rutin melaksanakan sosialisasi, implementasi, dan evaluasi terkait kode etik yang tercantum dalam Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*), sesuai dengan SK Perubahan *Code of Conduct* No. SK.02.09/A.DIR.01288/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai komitmen pelaksanaannya. Fungsi *Good Corporate Governance* (GCG) yang berada di bawah *Corporate Secretariat* bertanggung jawab atas implementasi, sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan terhadap Kode Etik Perseroan.

Sosialisasi dilakukan melalui pelatihan, *sharing* internal, serta media *online* yang diikuti oleh pegawai induk maupun Anak Perusahaan. Setiap tahunnya, seluruh pegawai diwajibkan menandatangani pernyataan komitmen penerapan kode etik secara *online*, sesuai dengan *Code of Conduct* yang telah ditetapkan.

FORMS OF SOCIALIZATION AND ENFORCEMENT EFFORTS

To enforce the Code of Conduct, the Company routinely conducts socialization, implementation, and evaluation related to the Code of Conduct in accordance with the Decree of Code of Conduct Amendment No. SK.02.09/A.DIR.01288/2023 dated October 4, 2023 whose implementation commitment has been signed by the Board of Commissioners and Board of Directors. In this case, The Company's Good Corporate Governance (GCG) function is under the Corporate Secretariat and is responsible for implementing, socializing, coordinating and evaluating the compliance with the Company's Code of Conduct.

Socialization is carried out through training, internal sharing, and online media attended by employees of the parent and subsidiaries. Every year, all Company employees are required to sign an online statement of commitment to the Code of Conducts in accordance with the Code of Conduct.

Penegakan terhadap pelaksanaan Kode Etik diatur di dalam Instruksi Kerja (IK) *Standard Operating Procedure (SOP) Whistle Blowing System* No. WIKA-GCG-IK-02.01 Rev. 00 Amd 05 tanggal 10 Januari 2023 yang kemudian dilakukan revisi tertanggal 22 Desember 2023 dengan nomor dokumen WIKA-GCG-IK-02.01 Rev. 01.

Dugaan Pengaduan Pelanggaran juga dapat dilakukan melalui *website* wbs.WIKA.co.id atau e-mail ke timkepatuhangcg@WIKA.co.id.

PERNYATAAN KODE ETIK BERLAKU BAGI ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN KARYAWAN PERUSAHAAN

Kode Etik dan Pedoman ini berlaku bagi seluruh insan Perseroan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan reputasi Perseroan. Setiap individu dalam Perseroan memiliki kesadaran bahwa menjalankan etika yang baik akan memberikan dampak positif terhadap reputasi perusahaan.

Komitmen terhadap penerapan kode etik di seluruh tingkatan organisasi diwujudkan dalam bentuk tanda tangan setiap karyawan WIKA pada Lembar Pernyataan Kepatuhan Standar Etika Perseroan dan *Code of Corporate Governance*. Hal ini menegaskan keterlibatan dan komitmen semua pihak untuk mematuhi standar etika yang telah ditetapkan, menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG.

efforts towards the implementation of Code of Conduct are regulated in the Work Instruction (IK) *Standard Operating Procedure (SOP) Whistle Blowing System* No. WIKA's-GCG-IK-02.01 Rev. 00 Amd 05 dated January 10, 2023 which was then revised dated December 22, 2023 with document number WIKA's-GCG-IK-02.01 Rev. 01.

Alleged Violation Complaints can also be made through the *website* wbs.WIKA.co.id or e-mail to timkepatuhangcg@WIKA.co.id.

STATEMENT OF CODE OF CONDUCT APPLIES TO MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS, AND COMPANY EMPLOYEES

This Code of Conduct applies to all Company personnel, meaning the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees. All of the Company's personnel have the awareness that practicing good ethics will improve and strengthen the Company's reputation. The awareness to practice good ethics is expected to improve and strengthen the Company's reputation.

Commitment to applying the code of conduct at all organizational levels is contained in the form of a signature of each WIKA's employee on the Company's Ethics Standards Compliance Statement and Code of Corporate Governance. This confirms the involvement and commitment of all individuals within the Company to comply with established ethical standards, create a work environment of integrity, and uphold the GCG principles.

Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Code of Conduct dan Code of Corporate Governance serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan Statement of Commitment to Implement the Code of Conduct, Code of Corporate Governance and Anti-Bribery Management System



SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Setiap Insan WIKA yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah pelanggaran terhadap Kode Etik:

1. Sanksi bagi Pegawai yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Atasan Langsung atau Direksi sesuai dengan tingkat kesalahannya setelah mendapat laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan;
2. Direksi memberikan arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing;
3. Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris;
4. Sanksi bagi Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham;
5. Bila Mitra Kerja atau *Stakeholders* yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

JENIS SANKSI UNTUK MASING-MASING JENIS PELANGGARAN YANG DIATUR DALAM KODE ETIK

Menurut Pasal 68 ayat 5 dalam Bab XVII Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2021-2022 antara Perseroan dan Serikat Karyawan WIKA, disebutkan bahwa terhadap pegawai yang telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan bersalah, Perusahaan berhak memberikan sanksi yang mungkin meliputi:

1. Peringatan Lisan;
2. Peringatan Tertulis I, II, dan III;
3. Pemotongan Gaji;
4. Penurunan *Grade*;
5. Pemberhentian dari jabatan;
6. Pemutusan Hubungan Kerja.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK BESERTA SANKSI YANG DIBERIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sepanjang tahun 2024, tidak terbukti terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh karyawan WIKA.

SANCTIONS FOR CODE OF CONDUCT VIOLATION

Every WIKA's Personnel who is proven to have committed a violation will be given sanctions in accordance with the applicable policies and laws and regulations. The following are violations of the Code of Conduct:

1. Sanctions for employees who commit violations are decided by their immediate supervisor or Board of Directors according to the violations level after receiving a report on the violation committed by the employee concerned;
2. Board of Directors provides direction on coaching actions, disciplinary sanctions and/or other actions as well as prevention that must be carried out by the Direct Superiors in their respective environments;
3. Sanctions for Board of Directors who commit violations are decided by Board of Commissioners;
4. Sanctions for Board of Commissioners who commit violations are decided by Shareholders;
5. If Partners or Stakeholders commit a violation, the provisions as stated in the contract will be imposed. If it is related to a criminal act, can be forwarded to the authorities.

TYPES OF SANCTIONS FOR EACH TYPE OF VIOLATION REGULATED IN THE CODE OF CONDUCT

According to Article 68 paragraph 5 in Chapter XVII of the 2021-2022 Collective Labor Agreement (PKB) between the Company and the WIKA's Employees Union, it is stated that for employees who have gone through the inspection process and are found guilty, the Company has the right to impose sanctions which may include:

1. Verbal Warning;
2. Written Warning I, II, and III;
3. Payroll Deduction;
4. Decreasing Grade;
5. Dismissal from office;
6. Work Termination.

NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS AND SANCTIONS GIVEN IN THE LAST FISCAL YEAR

Throughout 2024, there were no proven code of conduct violations committed by WIKA's employees.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan Antara Lain Berupa Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen (*Management Stock Ownership Program/MSOP*) dan/atau Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (*Employee Stock Ownership Program/ESOP*)

Policy of Performance-Based Long-Term Compensation for Management and/or Employees, Among Others in the Form of Management Stock Option Plan/Msop And/Or Employee Stock Option Plan/Esop

Hingga Tahun Buku 2024, Perseroan belum melaksanakan program kepemilikan saham oleh Karyawan (*Employee Stock Option Program/ESOP*) dan/atau Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Option Program/MSOP*).

Until 2024 Fiscal Year, the Company has not carried out Employee Stock Option Program (ESOP) and/or Management Stock Option Program (MSOP).

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Kerja Setelah Terjadinya Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan atas Saham Perusahaan Terbuka

Share Ownership of Members of Board of Directors and Board of Commissioners No Later Than 3 (Three) Working Days After the Occurrence of Ownership or Any Changes of Ownership of Shares of Public Companies

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI KERJA SETELAH TERJADINYA KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung. Laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan.

SHARE OWNERSHIP POLICY FOR MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS NO LATER THAN 3 (THREE) WORKING DAYS AFTER THE OCCURRENCE OF OWNERSHIP OR ANY CHANGES OF OWNERSHIP OF PUBLIC COMPANY SHARES

Based on OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017 concerning Report of Ownership or Any Changes in Ownership of Public Company Shares, Members of Board of Directors or members of Board of Commissioners must report to the Financial Services Authority on ownership and any changes in ownership of Public Company shares, either directly or indirectly. The said report must be submitted no later than 10 (ten) days after the occurrence of ownership or change.

Selain ketentuan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris juga wajib menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka. Penyampaian informasi tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

Kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham atas saham Perseroan diatur dalam Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 41/DK/WIKA/2021 dan Nomor: SK.02.09/A.DIR.0617/2021 dan sedang dimutakhirkan berdasarkan perubahan Peraturan Menteri Per-2/MBU/03/2023.

PELAKSANAAN ATAS KEBIJAKAN DIMAKSUD

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak melaporkan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris, dikarenakan tidak terdapat perubahan kepemilikan saham.

In addition to reporting requirements to the Financial Services Authority, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners are also required to submit information to the Public Company regarding ownership and any changes in their ownership of the Public Company's shares. Submission of this information is carried out no later than 3 (three) working days after the ownership or any change in ownership of the Public Company's shares.

The policy regarding the obligation of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners to submit information regarding ownership and any changes in share ownership of the Company's shares is regulated in Working Guidelines for Board of Directors and Board of Commissioners (*Board Manual*) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk that has been updated based on Joint Decree No: 41/DK/WIKA/2021 and No: SK.02.09/A. DIR.0617/2021 and is being updated based on the amendment of Ministerial Regulation Per-2/MBU/03/2023.

IMPLEMENTATION OF THE POLICY

In 2024, the Company did not report share purchase and/or sale transactions by the Board of Directors and Board of Commissioners, because there were no changes in share ownership.

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Kebijakan pelaporan pelanggaran diterapkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas implementasi tata kelola perusahaan. Kebijakan ini dirancang untuk memudahkan semua pihak, baik pimpinan maupun karyawan, dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan yang aman, di mana setiap individu merasa didorong untuk berkontribusi menjaga integritas Perseroan. Dengan mekanisme pelaporan yang terbuka dan transparan, Perseroan berharap dapat segera menangani pelanggaran, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan keberlanjutan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Pelaporan pelanggaran di Perseroan diatur dalam Instruksi Kerja (IK) *Standard Operating Procedure (SOP) Whistle Blowing System* No. WIKA-GCG-IK-02.01 Rev. 00 Amd 05 tanggal 10 Januari 2023 yang kemudian dilakukan revisi tertanggal 22 Desember 2023 dengan nomor dokumen WIKA-GCG-IK-02.01 Rev. 01.

SOSIALISASI WBS

Untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan transparan, WIKA terus mendorong setiap Insan WIKA untuk aktif melaporkan berbagai bentuk pelanggaran. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan sosialisasi *Whistleblowing System (WBS)* secara konsisten dan berkesinambungan, menggunakan berbagai pendekatan yang efektif. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Perseroan telah menyebarkan buku *Code of Conduct* dan *Code of Corporate Governance* kepada seluruh Insan WIKA. Buku-buku panduan ini disebarluaskan melalui surat elektronik guna memastikan seluruh karyawan memiliki pemahaman yang jelas mengenai nilai-nilai integritas, etika kerja, dan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus mendukung implementasi WBS secara optimal.

Sepanjang tahun 2024, Departemen *Corporate Governance and Community Development* telah melakukan 6 (enam) kali sosialisasi *whistleblowing system* bersamaan dengan Sosialisasi GCG kepada pegawai induk dan anak Perusahaan.

CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Adanya dugaan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* dapat dilaporkan oleh setiap Insan WIKA kepada Perseroan secara pribadi melalui kanal *whistleblowing System (WBS)* yaitu wbs.WIKA.co.id. Selanjutnya, Tim Kepatuhan akan menerima laporan dan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

The violation reporting policy is implemented as part of efforts to improve the quality of corporate governance implementation. This policy is designed to facilitate all parties, both leaders and employees, in reporting violations that occur. The main objective of this policy is to create a safe environment, where every individual feels encouraged to contribute to maintaining the integrity of the Company. With an open and transparent reporting mechanism, the Company hopes to immediately address violations, improve accountability, and ensure the sustainability of good corporate governance practices.

Violation reporting in the Company is regulated in the Work Instruction (IK) *Standard Operating Procedure (SOP) Whistle Blowing System* No. WIKA-GCG-IK-02.01 Rev. 00 Amd 05 dated January 10, 2023 which was then revised dated December 22, 2023 with document number WIKA-GCG-IK-02.01 Rev. 01.

WBS SOCIALIZATION

To support the creation of a clean and transparent work environment, WIKA's continues to encourage every WIKA's personnel to actively report various forms of violations. This step is realized through strengthening the socialization of *Whistleblowing System (WBS)* consistently and continuously, using various effective approaches. As part of this commitment, the Company has disseminated the *Code of Conduct* and *Code of Corporate Governance* books to all WIKA's Personnel. These guidebooks are distributed via electronic mail to ensure that all employees have a clear understanding of the values of integrity, work ethics, and good corporate governance, while supporting the optimal implementation of WBS. Throughout 2024, Corporate Relations Department has conducted

Throughout 2024, the Corporate Governance and Community Development Department has conducted 6 (six) socializations of the *whistleblowing system* together with GCG Socialization to employees of the parent Company and its subsidiaries.

VIOLATION REPORT SUBMISSION

Any alleged *Code of Conduct* violation can be reported by every WIKA's personnel to the Company personally through the *Whistle Blowing System (WBS)* channel, namely wbs.WIKA.co.id. Furthermore, the GCG Compliance Team will receive and follow up on the complaint, but there are a number of important things that must be considered:

1. Penggunaan surat yang anonim/tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi awal di mana tindak lanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan Tim Kepatuhan atas kebenaran substansi masalah yang dilaporkan. Tim Kepatuhan akan menyampaikan kepada pelapor alasan tidak dilakukan pemrosesan;
2. Pengaduan Pelanggaran yang tergolong sebagai dugaan Penyuapan Keuangan, Pelanggaran Gratifikasi, serta Penyuapan non-Keuangan (Penyelewengan Wewenang) akan ditindaklanjuti oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
3. Pengaduan Pelanggaran yang tergolong sebagai dugaan Penyelewengan/Pelanggaran Kode Etik/*Code of Conduct*, Disiplin Pegawai dan lainnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh Tim Kepatuhan;
4. Jika Pihak yang diadukan berasal dari Tim Kepatuhan dan/atau FKAP maka yang bersangkutan akan dinonaktifkan sementara dari jabatan terkait dan tidak diikutsertakan dalam proses investigasi;
5. Setiap insan WIKA yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* maka wajib melaporkan hal tersebut melalui kanal pelaporan pelanggaran yang disediakan;
6. Pemantauan jumlah pelaporan yang masuk pada *Whistleblowing System* dilakukan melalui pelaporan formal maupun informal oleh Tim Kepatuhan dan atau FKAP minimal 1x (satu kali) dalam setahun;
7. Tim Kepatuhan akan memberikan jangka waktu permintaan pemenuhan bukti kepada Pelapor dalam 5 (lima) hari kerja sejak Tim Kepatuhan mengirimkan email konfirmasi kepada Pelapor, namun pelapor dapat mengajukan perpanjangan waktu dengan konfirmasi dari administrator Tim Kepatuhan;
8. Direksi dapat memberikan penghargaan/*reward* kepada pelapor yang melaporkan pelanggaran khususnya yang berhasil mencegah terjadinya kerugian perusahaan yang signifikan dengan bentuk dan besar penghargaan/*reward* akan ditentukan kemudian.

MEDIA PELAPORAN

Melalui kanal pelaporan yang dapat diakses di wbs.WIKA.co.id, Insan WIKA memiliki fasilitas untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Setiap laporan pelanggaran yang diterima akan segera ditindaklanjuti oleh Tim Kepatuhan.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Setiap Insan WIKA yang melaporkan pelanggaran/*Whistleblower* berhak mendapatkan perlindungan. Namun, ada sejumlah ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan *Whistleblowing System* WIKA, yaitu:

1. Tim Kepatuhan, FKAP, dan Majelis Kehormatan Pegawai akan diberikan perlindungan yang sama dengan Pelapor. Perlindungan terhadap pembalasan, tekanan, ancaman baik secara fisik, psikologis, administrasi maupun penuntutan hukum;
2. Setiap identitas pelapor dan materi laporan wajib dirahasiakan dan diberikan perlindungan atas kerahasiaan identitas pelapor dan materi pelaporan sesuai dengan mekanisme perlindungan kerahasiaan serta akan ada sanksi yang diberikan bagi yang membocorkan identitas pelapor dan materi laporan;

1. The use of anonymous letters will be treated merely as initial information where the follow-up depends on the level of confidence of GCG Compliance Team on the correctness on the substance of problem reported. The Compliance Team will convey to the complainant the reasons for not processing.
2. Violation Complaints classified as alleged Financial Bribery, Gratification Violations, and Non-Financial Bribery (Abuse of Authority) will be followed up by the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP).
3. Violation Complaints classified as alleged irregularities/violations of Code of Conduct, employee discipline and others will be followed up by a fact-finding team formed by the compliance team.
4. If the party being complained comes from the Compliance Team and/or FKAP then the person concerned will be temporarily disabled from the related position and not included in the investigation process.
5. Every WIKA's personnel who is aware of an alleged Code of Conduct violation is obliged to report this matter through the provided violation reporting channel.
6. Monitoring of the number of reports submitted to the Whistleblowing System is carried out through formal and informal reporting by the Compliance Team and/or FKAP at least 1x (once) a year.
7. The Compliance Team will provide a period of request for fulfillment of evidence to whistleblowers within 5 (five) working days after the Compliance Team sends a confirmation email to whistleblowers, but the complainant can request an extension of time with confirmation from the Compliance Team administrator.
8. The Board of Directors can give awards/rewards to whistleblowers who report violations, especially those who have succeeded in preventing significant Company losses, the form and amount of the award/reward will be determined later.

REPORTING MEDIA

Through the reporting channel that can be accessed at wbs.WIKA.co.id, WIKA's personnel have the facility to report alleged violations. Every violation report received will be followed up by the Compliance Team.

WHISTLEBLOWER PROTECTION

Every WIKA's personnel who reports a violation/*Whistleblower* has the right to get protection. However, there are a number of provisions that apply to the implementation of WIKA's Whistleblowing System, namely:

1. The Compliance Team, FKAP and Employee Honor Council will be given the same protection as the Whistleblower. Protection against retaliation, pressure, threats whether physical, psychological, administrative or legal prosecution;
2. Every whistleblowers identity and report material must be kept confidential and protection is given to the confidentiality of whistleblowers identity and reporting material in accordance with the confidentiality protection mechanism and there will be sanctions for those who leak the whistleblowers identity and report material

3. Penggunaan surat yang anonim/tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi awal di mana tindak lanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan Tim Kepatuhan atas kebenaran substansi masalah yang dilaporkan. Tim Kepatuhan akan menyampaikan kepada pelapor alasan tidak dilakukan pemrosesan;
4. Direksi dan jajaran manajemen perusahaan wajib memberikan perlindungan, termasuk imunitas administrasi kepada pelapor pelanggaran terhadap pembalasan, perlakuan negatif dari internal, tekanan, atau ancaman baik secara fisik, psikologis, administrasi, perlindungan karier maupun penuntutan hukum;
5. Setiap laporan pelanggaran dan atau penyimpangan wajib memenuhi sifat tidak memihak (impartial) suku, ras, agama dan golongan serta tidak bersifat fitnah dan atau laporan palsu;
6. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor jika pelanggaran tersebut terbukti benar terjadi, kecuali jika yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut atau laporan merupakan fitnah maka akan ada sanksi yang diberikan sesuai rekomendasi dari Majelis Kehormatan Pegawai. Pertimbangan *justice collaboration* kepada pelapor yang terlibat pelanggaran tersebut dapat diberlakukan atas dasar pertimbangan Majelis Kehormatan Pegawai dengan rekomendasi dari Manajemen Puncak;
7. Direksi dapat memberikan penghargaan/*reward* kepada pelapor yang melaporkan pelanggaran khususnya yang berhasil mencegah terjadinya kerugian perusahaan yang signifikan dengan bentuk dan besar penghargaan/*reward* akan ditentukan kemudian.

PENANGANAN PENGADUAN

Organisasi penanganan pelaporan pelanggaran terdiri atas enam elemen utama, yaitu:

1. Tim Kepatuhan yang dibentuk sesuai Surat Tugas No. ST 01.02/A.DIR.01617/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Penugasan *Ex Officio* sebagai Tim Pengaduan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct* (CoC) yang di antaranya bertugas untuk:
 - a. Bertindak mewakili untuk dan atas nama Perusahaan guna melakukan tindakan-tindakan dalam menangani laporan pengaduan pelanggaran;
 - b. Melihat semua pelaporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan perusahaan;
 - c. Menerima dan menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap *Code of Conduct* dan atau Penyuapan;
 - d. Melakukan verifikasi kebenaran laporan dugaan pelanggaran;
 - e. Menindaklanjuti Laporan terkait Pelanggaran terhadap *Code of Conduct* kepada Tim Pencari Fakta;
 - f. Melakukan pembentukan Tim Pencari Fakta jika kasus terkait etika dan GCG;
 - g. Menindaklanjuti Laporan terkait Dugaan Penyuapan ke Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
 - h. Melakukan *review* terhadap hasil dari investigasi Tim Pencari Fakta/FKAP;
 - i. Memutuskan pelimpahan kasus ke Majelis Kehormatan Pegawai;

COMPLAINT HANDLING

The violation report handling organization consists of six main elements:

1. The Compliance Team which was formed in accordance with the Assignment Letter No. ST 01.02/A.DIR.01617/2023 dated November 8, 2023 concerning Ex Officio Assignment as Team for Complaints of Code of Conduct (CoC) Violation, which among other things is tasked with:
 - a. Act on behalf of and on behalf of the Company to take actions in handling reports of violations;
 - b. View all reports of alleged violations related to the Company;
 - c. Receive and follow up on reports of violations and or deviations from the Code of Conduct and or Bribery;
 - d. Verify the truth of reports of alleged violations;
 - e. Follow up on Reports regarding Code of Conduct Violations to the Fact Finding Team;
 - f. Forming a Fact Finding Team if the case is related to ethics and GCG;
 - g. Follow up on Reports related to Alleged Bribery to the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP)
 - h. Review the results of the Fact-Finding Team/FKAP investigation;
 - i. Decide on the delegation of cases to the Honorary Council of Employees;

- j. Membuat Kesimpulan Pokok sebagai masukan bagi Majelis Kehormatan Pegawai;
 - k. Memiliki akses ke Direksi yang sesuai bilamana perlu dan jika diperlukan atau diwajibkan, laporan kepada otoritas pemerintah terkait untuk penyelidikan/tindakan lebih lanjut.
2. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) adalah orang (kelompok) dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., No. SK.01.01/A.DIR.00006/2023 tanggal 31 Maret 2023. Pengaduan Pelanggaran yang tergolong sebagai dugaan Penyuapan Keuangan, Gratifikasi, serta Penyuapan non-Keuangan (Penyelewengan Wewenang) akan ditindaklanjuti oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).
 3. Tim Investigasi yang disebut dengan Tim Pencari Fakta. Tim yang dibentuk atau direkomendasikan oleh Tim Kepatuhan yang disetujui oleh Direksi untuk mencari menyelidiki indikasi penyelewengan terhadap pelaksanaan kepatuhan *Code of Conduct*. Tim Pencari Fakta dapat dibentuk sesuai kewenangan Direksi dari ahli terkait dan independen di luar fungsi dan/atau organisasi. Tim Pencari Fakta bersifat Ad Hoc. Tugasnya secara keseluruhan adalah melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa telah terjadi pelanggaran.
 4. Majelis Kehormatan Pegawai, merupakan Pejabat dan atau Pegawai yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang dilaporkan/diduga melanggar peraturan/*Code of Conduct* sesuai yang tercantum dalam prosedur. Majelis Kehormatan Pegawai dibentuk sesuai Surat Tugas No. ST.01.02/A.DIR.01617/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Penugasan Ex Officio sebagai Tim Pengaduan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct* (CoC) yang di antaranya bertugas untuk:
 - a. Melakukan penegakan pelaksanaan serta pemeriksaan terhadap Pegawai yang dilaporkan/diduga melanggar peraturan/*Code of Conduct*;
 - b. Mereviu laporan Tim Pencari Fakta/FKAP dan Rekomendasi Tindak Lanjut Pokok dari Tim Kepatuhan;
 - c. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi terbaik atas laporan tersebut;
 - d. Memberikan rekomendasi Keputusan kepada Manajemen Puncak (Direksi) berupa:
 - i. Penjatuhan sanksi moral dan/atau hukuman disiplin terhadap Pegawai Terlapor; atau
 - ii. Pemulihan nama baik Pegawai Terlapor.
 5. Direksi, dengan tugas utama: Melakukan seleksi, konfirmasi (dari aspek kategori jenis pelanggaran, siapa yang melakukan dan kelengkapan dokumennya) dan verifikasi, serta memutuskan apakah laporan akan ditindaklanjuti atau diarsip untuk pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu, Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk juga memiliki wewenang dan tugas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, No. SK.01.01/A.DIR.00006/2023 tanggal 31 Maret 2023.
- j. Make a Principal Conclusion as input to the Honorary Council of Employees;
 - k. Have access to appropriate Board of Directors where necessary and if required or required, report to relevant government authorities for further investigation/action.
2. Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) is a person (group) with the responsibility and authority to carry out the operation of Anti-Bribery Management System as stated in the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., No. SK.01.01/A.DIR.00006/2023 dated March 31, 2023. Complaints of violations classified as allegations of Financial Bribery, Gratification, and Non-Financial Bribery (Abuse of Authority) will be followed up by the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP).
 3. The Investigation Team, known as the Fact Finding Team. A team formed or recommended by the Compliance Team approved by the Board of Directors to investigate indications of misuse of the implementation of Code of Conduct compliance. The Fact Finding Team can be formed according to the authority of Board of Directors from related and independent experts outside the function and/or organization. The Fact Finding Team is Ad Hoc in nature. His overall task is to carry out further investigations into the substance of the reported violations with the aim of finding and gathering the necessary evidence to ensure that a violation has occurred.
 4. Employee Honorary Council, which is an official and/or employee who is authorized to conduct examinations of employees who are reported/allegedly violating the regulations/Code of Conduct as stated in the procedure. Employee Honorary Council was formed in accordance with Assignment Letter No. ST 01.02/A.DIR.01617/2023 dated November 8, 2023 concerning Assignment of Ex Officio as Team for Complaints of Code of Conduct (CoC) Violation, which among other things is tasked with:
 - a. Carry out enforcement and inspection of employees who are reported/allegedly violating regulations/Code of Conduct;
 - b. Reviewing the FKAP/FKAP report and the main follow-up recommendations from the Compliance Team;
 - c. Take the necessary steps to produce the best recommendations for the report;
 - d. Provide decision recommendations to Top Management (Board of Directors) in the form of:
 - i. Imposition of moral sanction and/or disciplinary punishment on the Reported Employee; or
 - ii. Restoration of good name of the Reported Employee.
 5. Board of Directors has the main duties of selecting, confirming (in terms of violation category, who conducted the violation, and complete documentation) and verifying, and deciding whether the report will be followed up, and archiving for violations committed by employees. In addition, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's Board of Directors has the authorities and duties as stated in PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's Board of Commissioners and Board of Directors Joint Decree No. SK.01.01/A.DIR.00006/2023 dated March 31, 2023;

6. Dewan Pengarah yaitu Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan secara umum terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan, melalui tinjauan berkala terhadap hasil tinjauan FKAP dan tinjauan manajemen yang dilakukan Manajemen Puncak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, No. SK.01.01/A. DIR.01726/2020 tanggal 28 September 2020.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Pihak-pihak yang mengelola pengaduan antara lain:

1. Tim Kepatuhan adalah tim yang dibentuk oleh Perseroan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan *Code of Conduct*. Tim Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. Identitas dari anggota Tim Kepatuhan GCG bersifat *ex-officio*.
2. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) adalah tim yang dibentuk oleh Perseroan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan terkait Penyuapan. FKAP bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. Identitas dari anggota Tim Kepatuhan GCG bersifat *ex-officio*.
3. Tim Pencari Fakta dibentuk dan direkomendasikan oleh Tim Kepatuhan GCG. Fungsi tim pencari fakta adalah untuk mencari serta menyelidiki indikasi penyelewengan terhadap pelaksanaan kepatuhan *Code of Conduct*. Keberadaan Tim Pencari Fakta bersifat Ad Hoc dan bersifat rahasia.
4. Majelis Kehormatan Pegawai Majelis Kehormatan Pegawai terdiri dari pejabat dan/atau pegawai Perseroan yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang dilaporkan/diduga melanggar peraturan/*Code of Conduct*.

6. Steering Committee, namely PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's Board of Commissioners has the responsibility of conducting general supervision of the Anti-Bribery Management System, through regular reviews of the results of FKAP reviews and management reviews conducted by Top Management, as stated in PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's Board of Commissioners and Board of Directors Joint Decree No. SK.01.01/A.DIR.01726/2020 dated September 28, 2020.







UNIT IN CHARGE IN MANAGING COMPLAINTS

The Unit managing the complaints include:

1. Compliance Team, a team formed by the Company to receive and follow up reports on Code of Conduct violations and/or deviations. Compliance Team reports directly to the President Director. The identity of GCG Compliance Team members is *ex-officio*;
2. Anti-Bribery Compliance Function (FKAP). A team formed by the Company to receive and follow up reports on violations and/or irregularities related to Bribery. FKAP reports directly to the President Director of the Company. The identity of members of GCG Compliance Team is *ex-officio*;
3. Fact Finding Team, formed following recommendations by GCG Compliance Team. Their function is to search for and investigate indications of irregularities with Code of Conduct compliance. The existence of Fact Finding Team is Ad Hoc and confidential;
4. Employee Honorary Council, consists of Company officers and/or employees authorized to conduct checks on employees who have been reported/suspected of regulations/Code of Conduct violations.

ALUR PROSES PENANGANAN PENGADUAN

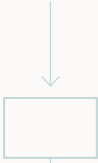







Apabila terjadi pengaduan melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*), prosedur yang diikuti adalah sebagai berikut:

No	Alur Proses Process flow	Uraian Kegiatan Description of Activities
		<p>Pengaduan Pelanggaran disampaikan kepada Tim Kepatuhan melalui wbs.WIKA.co.id Violations Complaints are submitted to the Compliance Team via wbs.WIKA.co.id</p>
1.		<p>Tim Kepatuhan akan mengategorikan pihak yang diadukan. Kategori Kasus :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika pengaduan terkait anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Induk dan/atau Anak Perusahaan maka pengaduan tersebut akan langsung diteruskan ke Pemegang Saham Mayoritas dalam hal ini kepada pengelola WBS Kementerian BUMN Jika yang diadukan adalah selain anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Induk dan/atau Anak Perusahaan, maka kasus ditindaklanjuti oleh Tim Kepatuhan <p>Compliance Team will categorize the complained party. Case Category:</p> <ol style="list-style-type: none"> If the complaint is related to members of Board of Directors or members of Board of Commissioners of the Parent and/or Subsidiaries, the complaint will be directly forwarded to the Majority Shareholder, in this case to WBS manager of the Ministry of SOEs. If the complainant is other than a member of Board of Directors or a member of Board of Commissioners of the Parent and/or Subsidiary, the complaint will be followed up by Compliance Team.
2.	 <p>Ditolak</p> <p>Diterima</p>	<p>Ketua Tim Kepatuhan akan melakukan verifikasi sendiri atau menunjuk anggota Tim Kepatuhan untuk melakukan proses verifikasi laporan sesuai dengan bukti yang dilaporkan Pelapor. Kriteria Verifikasi : kelengkapan identitas pelapor, informasi dalam laporan (<i>what, where, when, who, how/ 4W1H</i>), kategori aduan, serta dokumen pendukung yang diunggah dalam lampiran. Surat yang anonim/ tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi awal dimana tindak lanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan Tim Kepatuhan atas kebenaran substansi masalah yang dilaporkan. The Compliance Team Leader will conduct the verification by himself or appoint a member of Compliance Team to conduct the report verification process in accordance with the evidence reported by the Whistleblower. Verification Criteria: completeness of reporter's identity, report information (<i>what, where, when, who, how/4W1H</i>), complaint category, and supporting documents uploaded in the attachment. Anonymous/unidentified letters (canned letters) will be treated as preliminary information where the follow-up depends on the Compliance Team's level of confidence in the correct substance of the reported problem.</p>
3.		<p>Tim kepatuhan/FKAP melakukan penelaahan atas laporan yang telah terverifikasi dengan melakukan analisa terhadap laporan dugaan pelanggaran serta kesesuaian dokumen pendukung yang menjadi bukti dugaan pelanggaran. Status Laporan : Pengaduan Baru, Pengaduan Diterima, Sedang Diverifikasi, Verifikasi Belum Selesai, Verifikasi Selesai, Pengaduan Ditolak, Sedang Ditindaklanjuti dan Pengaduan Selesai Ditindaklanjuti. (Apabila bukti tidak cukup maka dibuat status Pengaduan Ditolak) *setelah poin 5.15 dilakukan. The Compliance/FKAP team reviews the verified reports by analyzing the reports of alleged violations and the suitability of supporting documents that are evidence of alleged violations. Report Status: New Complaint, Complaint Received, Being Verified, Verification Not Completed, Verification Completed, Complaint Rejected, Being Followed Up and Complaint Completed Followed Up. (If the evidence is insufficient, the status of Complaint Rejected is made) *after point 5.15 is done.</p>
4.		<p>Tim Kepatuhan mengkoordinasi pembentukan Tim Pencari Fakta jika diperlukan (kasus Kode Etik & <i>Harrassment</i>); FKAP terkait Kasus Penyusunan atau dapat langsung melakukan investigasi The Compliance Team coordinates the formation of a Fact Finding Team if necessary (Code of Conduct & <i>Harrassment</i> cases); FKAP related to Bribery Cases or may directly conduct investigations.</p>
5.		<p>Tim Kepatuhan/Tim Pencari Fakta / FKAP melakukan Investigasi jika diperlukan Compliance Team/Fact Finding Team /FKAP conducts Investigation if necessary</p>

COMPLAINT HANDLING PROCESS FLOW

When there is an incoming complaint through the whistleblowing system mechanism, the following process applies

Matriks Penanggung Jawab Matrix of Unit In Charge					Input	Output	Platform
R	A	S	C	I			
Admin Tim Kepatuhan (Staf GCG) Compliance Team Admin (GCG Staff)					Tim Kepatuhan dan atau Tim FKAP Compliance Team and/or FKAP Team		wbs.WIKA.co.id
Admin Tim Kepatuhan (Staf GCG) Compliance Team Admin (GCG Staff)	Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader	1. Pemegang Saham Mayoritas (WBS KBUMN) 2. Tim Kepatuhan dan Tim FKAP 1. Majority Shareholder (WBS KBUMN) 2. Compliance Team and FKAP Team			1. Pemegang Saham Mayoritas 2. Tim Kepatuhan dan Tim FKAP 1. Majority Shareholder (WBS KBUMN) 2. Compliance Team and FKAP Team		
Admin Tim Kepatuhan (Staf GCG) Compliance Team Admin (GCG Staff)	Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader				Tim Kepatuhan dan atau Tim FKAP Compliance Team and/or FKAP Team		
Admin Tim Kepatuhan (Staf GCG) Compliance Team Admin (GCG Staff)	Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader				Tim Kepatuhan dan atau Tim FKAP Compliance Team and/or FKAP Team		
1. Tim Kepatuhan; dan atau 2. Tim FKAP 1. Compliance Team; and/or 2. FKAP Team	Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader		Manajemen Puncak (Dirut) Top Management (President Director)				SK Dirut pembentukan TPF (jika diperlukan) President Director's Decree establishing TPF (if needed)
1. Tim Kepatuhan; dan atau 2. Tim FKAP 1. Compliance Team; and/or 2. FKAP Team	Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader				1. Ketua Tim Kepatuhan; dan/atau 2. Tim Kepatuhan (Jika dilakukan oleh TPF & FKAP) 1. Compliance Team Leader; and/or 2. Compliance Team (If conducted by TPF & FKAP)		

No	Alur Proses Process flow	Uraian Kegiatan Description of Activities
6.		<p>Tim Kepatuhan/Tim Pencari Fakta / FKAP membuat hasil investigasi Compliance Team/Fact Finding Team /FKAP produces investigation results</p>
7.		<p>Tim Pencari Fakta / FKAP menyerahkan hasil investigasi kepada Tim Kepatuhan Fact Finding Team /FKAP submits investigation results to Compliance Team</p>
8.		<p>Tim Kepatuhan/FKAP melakukan review terhadap hasil dari Tim Pencari Fakta / FKAP, apakah kasus akan dilimpahkan atau dilanjutkan ke Majelis Kehormatan Pegawai atau Tidak The Compliance/FKAP Team reviews the Fact Finding Team/FKAP results, whether or not the case will be delegated or continued to the Employee Honor Council.</p>
9.		<p>Tim Kepatuhan membuat Kesimpulan Pokok sebagai masukan bagi Majelis Kehormatan Pegawai. Compliance Team makes a Principal Conclusion as input for the Employee Honor Council.</p>
10.		<p>Majelis Kehormatan Pegawai membuat Rekomendasi setelah melakukan review atas laporan Tim Pencari Fakta / FKAP dan Rekomendasi Tindak Lanjut Pokok dari Tim Kepatuhan. The Employee Honor Council makes a Recommendation after reviewing the Fact Finding Team / FKAP report and the Main Follow-up Recommendation from the Compliance Team.</p>
11.		<p>Majelis Kehormatan Pegawai membuat Rekomendasi kepada Manajemen Puncak (Direksi) Employee Honor Council makes Recommendations to Top Management (Board of Directors)</p>
12.		<p>Hasil rekomendasi dari Majelis Kehormatan Pegawai disampaikan kepada Manajemen Puncak (Direksi) dan/atau diketahui oleh Dewan Pengarah Recommendations from the Employee Honor Council are submitted to Top Management (Board of Directors) and/or acknowledged by the Steering Board.</p>
13.		<p>Keputusan oleh Direktur Utama, sesuai peraturan perusahaan yang berlaku Decision by the President Director, in accordance with applicable Company regulations</p>

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Berdasarkan hasil resume hasil penerapan *Whistleblowing System* sepanjang tahun 2024 terdapat 17 (tujuh belas) laporan pelanggaran yang dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (wbs.WIKA.co.id).

NUMBER OF COMPLAINTS RECEIVED AND PROCESSED IN THE LAST FISCAL YEAR

Based on the summary of *Whistleblowing System* throughout 2024, there were 17 (seventeen) violation reports received through the *Whistleblowing System* mechanism (wbs.WIKA.co.id).

Matriks Penanggung Jawab
Matrix of Unit In Charge

					Input	Output	Platform
R	A	S	C	I			
1. Tim Kepatuhan; dan/atau 2. Tim FKAP	Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP				1. Ketua Tim Kepatuhan; dan/atau 2. Tim Kepatuhan (Jika dilakukan TPF & FKAP)		
1. Compliance Team; and/or 2. FKAP Team	Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader				1. Compliance Team Leader; and/or 2. Compliance Team (If conducted by TPF & FKAP)		
1. Tim Kepatuhan; dan/atau 2. Tim FKAP	Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP				1. Ketua Tim Kepatuhan; dan/atau 2. Tim Kepatuhan (Jika dilakukan TPF & FKAP)		Investigasi Pelanggaran Violation Investigation
1. Compliance Team; and/or 2. FKAP Team	Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader				1. Compliance Team Leader; and/or 2. Compliance Team (If conducted by TPF & FKAP)		
1. Tim Kepatuhan; dan/atau 2. Tim FKAP	Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP				Majelis Kehormatan Pegawai Violation Investigation Result	Hasil Investigasi Pelanggaran Violation Investigation Result	
1. Compliance Team; and/or 2. FKAP Team	Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader						
Tim Kepatuhan Compliance Team	Ketua Tim Kepatuhan dan atau Ketua Tim FKAP Compliance Team Leader and/or FKAP Team Leader				Majelis Kehormatan Pegawai Employee Honor Council	Kesimpulan Pokok Hasil Investigasi Hasil Investigasi Pelanggaran Violation Investigation Result	
Majelis Kehormatan Pegawai Employee Honor Council	Manajemen Puncak Top Management				Manajemen Puncak Top Management		
Majelis Kehormatan Pegawai Employee Honor Council	Manajemen Puncak Top Management				Manajemen Puncak Top Management		
Majelis Kehormatan Pegawai Employee Honor Council	Manajemen Puncak Top Management		Manajemen Puncak Top Management		Dewan Pengarah Steering Board		
Manajemen Puncak Top Management	Direktur Utama President Director				PJFK HC		SK Dirut

Kategori Pengaduan Laporan terbagi dalam tiga kategori yaitu Penyuapan sebanyak 0 (nol) laporan. Penyalahgunaan Wewenang 10 (sepuluh) laporan dan Kode Etik & *Harassment* sebanyak 7 (tujuh) laporan.

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Status Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran antara lain sebanyak 16 (enam belas) laporan telah ditindaklanjuti dan 8 (delapan) laporan ditolak karena kurang bukti untuk ditindaklanjuti. Adapun pelaporan yang ditindaklanjuti bukan merupakan laporan pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh pegawai sehingga tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada terlapor.

The Report Complaint category is divided into three categories, namely Bribery with 0 (zero) reports, Abuse of Authority with 10 (ten) reports and Code of Conduct & Harassment with 7 (seven) reports.

COMPLAINTS FOLLOW-UP

The Follow-Up Status of Violation Complaints is 16 (sixteen) reports have been followed up and 8 (eight) reports have been rejected due to lack of evidence to be followed up. The reports that were followed up were not reports of violations proven to have been committed by employees so that no sanctions were imposed on the reported party.

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Perseroan terus berkomitmen untuk mencegah dan menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Langkah ini mencakup berbagai tindakan strategis untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas Perseroan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain bertujuan untuk menjaga integritas organisasi, upaya ini juga dirancang untuk melindungi Perseroan dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat tindakan tidak etis. Dalam setiap keputusan dan kebijakan, Perseroan senantiasa mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan individu, keluarga, maupun kelompok tertentu. Untuk itu, Perseroan mengacu pada kebijakan anti-korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam implementasinya, manajemen berkomitmen untuk mendukung kebijakan ini dengan menandatangani pakta integritas.

PROGRAM DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI, BALAS JASA (KICKBACKS), FRAUD, SUAP DAN/ATAU GRATIFIKASI DALAM PERUSAHAAN

1. Perubahan *Code of Conduct* No. SK.02.09/A. DIR.01288/2023 tanggal 4 Oktober 2023;
2. Pedoman Sistem Manajemen WIKA Nomor WIKA-SMW-QM.01.01 Rev 11 Amd 03 tanggal 18 Desember 2023;
3. Prosedur Perencanaan Sistem Manajemen Mutu, Anti Penyuaipan (SMAP) dan Pengamanan Nomor WIKA-SMW-PM.01.01 Rev 00 tanggal 10 Juli 2023;
4. Instruksi Kerja Pengendalian Gratifikasi Nomor WIKA-GCG-IK-02.02 Rev. 00 Amd. 04 tertanggal 11 Januari 2023;
5. Instruksi Kerja (IK) *Standard Operating Procedure* (SOP) *Whistleblowing System* No. WIKA-GCG-IK-02.01 Rev. 00 Amd 05 tanggal 10 Januari 2023 yang kemudian dilakukan revisi tertanggal 22 Desember 2023 dengan nomor dokumen WIKA-GCG-IK-02.01 Rev. 01.
6. Sosialisasi *Whistleblowing System* dan Pengendalian Gratifikasi melalui berbagai media seperti pertemuan tatap muka/media online, banner cetak, digital banner to all employee, dan lain-lain;
7. Penandatanganan Komitmen Kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang dilakukan oleh seluruh pegawai setiap tahun;
8. Penandatanganan Komitmen Kepatuhan terhadap Manual GCG (*Code of Conduct, Code of Corporate Governance dan Board Manual*) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris & Direksi; dan

The Company continues to be committed to preventing and avoiding Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices as part of the implementation of good corporate governance. This includes various strategic actions to ensure that all of the Company's activities are transparent, accountable, and in accordance with applicable regulations. In addition to maintaining the organization's integrity, this effort is also designed to protect the Company from potential losses that may arise due to unethical actions. In every decision and policy, the Company always prioritizes the interests of the Company over the interests of individuals, families, or certain groups. To this end, the Company refers to the anti-corruption policy as stipulated in Law No. 20 of 2001 on the Amendment to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. In its implementation, the management is committed to supporting this policy by signing an integrity pact.

PROGRAMS AND PROCEDURES CARRIED OUT IN OVERCOMING CORRUPTION PRACTICES, KICKBACKS, FRAUD, BRIBERY AND/OR GRATIFICATION IN THE COMPANY

1. Amendment to the *Code of Conduct* No. SK.02.09/A. DIR.01288/2023 dated October 4, 2023;
2. WIKA's Management System Guidelines Number WIKASMW-QM.01.01 Rev 11 Amd 03 dated December 18, 2023;
3. Quality Management System Planning Procedures, Anti-bribery (SMAP) and Security Number WIKA-SMWPM.01.01 Rev 00 dated July 10, 2023;
4. Gratification Control Work Instruction Number WIKAGCG-IK-02.02 Rev. 00 Amd. 04 dated January 11, 2023;
5. Work Instruction (IK) *Standard Operating Procedure* (SOP) *Whistle Blowing System* No. WIKA-GCG-IK-02.01 Rev. 00 Amd 05 dated January 10, 2023 which was then revised dated December 22, 2023 with document number WIKA-GCG-IK-02.01 Rev. 01.
6. Socialization of *Whistleblowing System* and Gratification Control through various media such as face-to-face meetings/online media, printed banners, digital banners to all employees, and others;
7. Signing of *Code of Conduct Compliance Commitment*, which is carried out by all employees every year;
8. Signing of *Compliance Commitments to GCG Manual* (*Code of Conduct, Code of Corporate Governance and Board Manual*) conducted by the Board of Commissioners & Board of Directors; and

9. Perjanjian Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang *Whistleblowing System* Terintegrasi yang terdiri dari:
- Pembuatan Kanal Pengaduan Online *Whistleblowing System* (WBS): wbs.WIKA.co.id;
 - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan WBS Terintegrasi oleh KPK.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI-KORUPSI KEPADA KARYAWAN

Corporate Secretary, yang memiliki peran krusial dalam implementasi GCG, telah secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi mengenai gratifikasi kepada seluruh Insan WIKA. Sosialisasi ini mencakup informasi terkait praktik gratifikasi, baik yang rutin maupun insidental. Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024:

- Sosialisasi GCG, WBS dan CoC di Direktorat Operasional;
- Sosialisasi GCG, WBS dan CoC di Direktorat Operasional 2;
- Sosialisasi Prosedur Tata Kelola Perusahaan;
- Sosialisasi GCG, WBS dan CoC di Divisi Fungsional;
- Sosialisasi GCG Internal Sekper;
- Sosialisasi GCG, WBS di Seluruh Anak Perusahaan.

Sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi, Perseroan aktif menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh Insan WIKA untuk meningkatkan pemahaman mengenai Suap dan Gratifikasi, serta mewujudkan lingkungan yang bebas dari korupsi. Beberapa kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2024 antara lain:

- Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Rapat Direksi yang menyertakan SVP dan Direksi AP;
- Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Direktorat Operasi 1;
- Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Direktorat Operasi 2;
- Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Divisi Fungsional;
- Sosialisasi Prosedur Sistem Manajemen Mutu, Anti Penyuapan dan Manajemen Pengamanan;
- Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di seluruh Anak Perusahaan;
- Sosialisasi SMAP ke Divisi Ruang Lingkup;
- Pelatihan SMAP oleh IDSurvey.

9. Cooperation Agreement with the Corruption Eradication Commission (KPK) on an integrated *Whistleblowing System* consisting of:
- Creating an Online *Whistleblowing System* (WBS) Complaint Channel: wbs.WIKA.co.id;
 - Monitoring and evaluation of Integrated WBS development by KPK.

ANTI-CORRUPTION TRAINING/SOCIALIZATION TO EMPLOYEES

Corporate Secretary, which has a crucial role in the implementation of GCG, has actively conducted socialization activities regarding gratuities to all WIKA's personnel. This socialization includes information related to gratuity practices, both routine and incidental. The following are the activities that will be carried out throughout 2024:

- Socialization of GCG, WBS and CoC in the Operational Directorate;
- Socialization of GCG, WBS and CoC in the Operational Directorate 2;
- Socialization of Corporate Governance Procedures;
- Socialization of GCG, WBS and CoC in Functional Divisions;
- Socialization of Internal GCG of the Secretary;
- Socialization of GCG, WBS in All Subsidiaries.

As part of the effort to eradicate corruption, the Company actively socializes the policy to all WIKA's personnel to increase understanding of Bribery and Gratuities, and create an environment free from corruption. Some of activities carried out throughout 2024 include:

- Socialization of the Anti-Bribery Management System (SMAP) at Board of Directors Meeting involving SVP and AP Directors;
- Socialization of Gratification Control in the Operations Directorate 1;
- Socialization of Gratification Control in the Operational Directorate 2;
- Socialization of Gratification Control in the Functional Division;
- Socialization of the Quality Management System Procedure, Anti-Bribery and Security Management;
- Socialization of the Anti-Bribery Management System in all Subsidiaries;
- Socialization of SMAP to the Scope Division;
- SMAP Training by IDSurvey.

Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control

Pengendalian gratifikasi di WIKA telah diatur dalam Instruksi Kerja Pengendalian Gratifikasi Nomor WIKAGCG-IK-02.02 Rev. 00 Amd. 04 tertanggal 11 Januari 2023. Gratifikasi merupakan pemberian/penerimaan uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dengan nilai berapa pun, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh Personel WIKA terkait dengan wewenang/jabatannya di Perseroan sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan di masa yang akan datang. Bagi barang gratifikasi yang menjadi milik Perusahaan, maka barang tersebut akan diletakkan di Lemari Gratifikasi yang dimiliki oleh Perusahaan.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perseroan memberikan batasan pemberian yang diperbolehkan, yaitu:

1. Pemberian hadiah/cenderamata dan/atau jamuan, makan dan/atau hiburan diperbolehkan sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara (seperti antar teman dan antar tetangga), saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan dengan maksud memberikan sesuatu hal kepada Perseroan yang tidak menjadi hak Perseroan secara hukum serta frekuensi pemberian tersebut tidak boleh terlalu sering karena dapat menimbulkan dugaan dari seseorang bahwa ada sesuatu di balik pemberian tersebut;
2. Pemberian hadiah/cenderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi Perseroan wajib menggunakan logo Perseroan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo Perseroan pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan);
3. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada Perseroan atas undangan resmi dari Perseroan, sepanjang ketentuan mengenai honorarium tersebut tidak dilarang dalam kode etik atau peraturan internal instansi dari Pihak Ketiga tersebut;
4. Setiap pemberian yang dilakukan, dicatat dan *form* yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pihak pemberi dan diketahui oleh atasan langsung dan *Corporate Secretary*.

Perseroan memberikan batasan penerimaan yang diperbolehkan, yaitu:

1. Menerima hadiah/cenderamata dan/atau jamuan, makan dan/atau hiburan, dalam batas-batas yang wajar, dengan frekuensi penerimaan yang tidak terlalu sering sehingga patut diduga tidak bertujuan untuk menyuap;
2. Menerima hadiah/cenderamata yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut:

Gratification control at WIKA's has been regulated in the Gratification Control Work Instruction Number WIKAGCG-IK-02.02 Rev. 00 Amd. 04 dated January 11, 2023. Gratification is the giving/receiving of money/money equivalent, goods, discounts, commissions, interestfree loans, travel tickets, lodging facilities, travel tours, free medical treatment, and other facilities of any value, whether received domestically or overseas, covering those using electronic or non-electronic means, by WIKA's Personnel related to their authority/position in the Company, so that could cause a conflict of interest in the future. For gratuities that belong to the Company, the items will be placed in the Gratuity Cabinet owned by the Company.

GRATIFICATION CONTROL MANAGEMENT

The Company provides allowable giving limits, namely:

1. The giving of gifts/souvenirs and/or meals and/or entertainment as long as it is intended to foster good relations within the limits of reasonableness and pays attention to equality (such as between friends and neighbors), mutual respect and is not aimed at bribing the party concerned with the intention of giving something to the Company that it is not legally entitled to, and the giving may not be too frequent so as to cause allegations of impropriety;
2. The giving of gifts/souvenirs in the form of goods intended to promote the Company must bear the Company's logo, and be an inseparable part of the said item (the Company's logo on the said item cannot be removed);
3. The giving of meeting honorariums to third parties is permissible as an appreciation of the contribution of ideas and expertise to the Company at the official invitation of the Company, as long as the honorarium are not prohibited in the Code of Conducts or internal regulations of the third party;
4. All gifts made must be recorded and forms completed by the employee concerned as the giver with the full knowledge of their direct supervisor and the Corporate Secretary.

The Company provides allowable accepting limits, namely:

1. Receiving gifts/souvenirs and/or meals and/or entertainment, within reasonable limits, provided it is not too frequent so as to cause allegations of impropriety;
2. Receiving gifts/souvenirs bearing the logo/Company name of the giver, with the following restrictions being met as follows:

- a. Logo, nama perseroan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi perseroan pemberi;
 - b. Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum.
3. Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh pihak ketiga diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut patut diduga tidak bermaksud untuk mempengaruhi pegawai yang bersangkutan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya dan tidak dilarang dalam kode etik atau peraturan internal Perseroan;
 4. Menerima hiburan yang masih dalam batas kewajaran diperbolehkan jika:
 - a. Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus;
 - b. Tidak melakukan pembayaran yang membiayai keluarga atau teman;
 - c. Tidak melakukan pembayaran untuk biaya liburan;
 - d. Membatasi pembayaran untuk kepentingan perjalanan, akomodasi, biaya makan yang terkait dengan rencana perjalanan yang wajar;
 - e. Tidak terdapat konflik kepentingan terhadap hubungan bisnis secara institusi antara Perseroan dengan Pihak Ketiga yang menawarkan Hiburan;
 - f. Tidak mengganggu waktu kerja pegawai yang bersangkutan;
 - g. Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal Perseroan penyebab kecurangan/*fraud* dan benturan kepentingan.
 5. Apabila terdapat penerimaan hadiah/cenderamata dan atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perseroan, maka Personel WIKA wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - a. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan. Kemudian UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.
 - b. Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System*
Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Personel WIKA atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui Gratifikasi di Perseroan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System*.
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maupun penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas, dan lainnya) wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan. KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan penerimaan tersebut dapat menjadi milik penerima atau milik
- a. The logo, the name of the Company/party providing the objects referred to is inseparable from the policy/promotion of the giving Company;
 - b. Not in the form of gifts that violate decency and law.
3. Receiving an honorarium as a speaker, resource person, invited formally by third parties are allowed, as an appreciation for contributing ideas and expertise, provided the gift is not intended to influence the employee concerned to do and/or not to do anything related with their position/title and is not prohibited in the Company's Code of Conducts or internal regulations;
 4. Receiving entertainment within reasonable limits is allowed if:
 - a. Entertainment is not carried out continuously.
 - b. Does not making payments that finance family or friends;
 - c. Does not making payment for vacation expenses;
 - d. Limiting payments for travel, accommodation, meal expenses associated with reasonable itineraries;
 - e. There is no conflict of interest in the institutional business relationship between the Company and third parties offering Entertainment;
 - f. Does not interfere with the work time of the employee concerned;
 - g. Does not involve discussing internal Company information that could lead to fraud and conflicts of interest.
 5. If there are gifts/souvenirs and/or entertainment outside the limits set by the Company, WIKA's Personnel must report them through:
 - a. Gratification Control Unit (UPG).
Gifts related to position and contrary to obligations or duties must be reported to the Gratification Control Unit (UPG) within a maximum period of 10 (ten) working days from the date of receipt. Then the UPG is required to forward the Gratification report to the KPK within a maximum period of 10 (ten) working days from the date of receipt.
 - b. Whistleblowing System.
Reporting through the Whistleblowing System is carried out if the whistleblower is WIKA's Personnel or other parties (Customers, partners and communities) who do not have direct involvement, but knows of gratification in the Company with the potential to create abuse of authority/position. Reporting through the Whistleblowing System is carried out in accordance with a separate mechanism that regulates the Whistleblowing System.
 - c. Corruption Eradication Commission (KPK)
For receiving goods that may expire quickly (for example: food and drinks), or receiving goods that do not expire quickly (e.g. money, gold and others) they must report it to KPK no later than 30 (thirty) working days from the date of receipt. KPK no later than 30 (thirty) working days from the date of receiving the report shall determine whether the receipt may be the property of the recipient or the state (if the receipt is in the form of money and belongs to the state, then the money is transferred through accounts provided by the KPK.

negara. Jika penerimaan dalam bentuk uang dan menjadi milik negara maka uang tersebut ditransfer melalui rekening yang telah disediakan KPK.

Diagram Alur Kerja dan Tanggung Jawab Memberi Hadiah/ Bingkisan/Cenderamata/Hiburan Workflow and Responsibilities for Giving Prizes/Gifts/Souvenirs/Entertainment







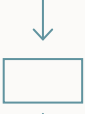

No	Alur Proses Process flow	Uraian Kegiatan Description of Activities	Matriks Penanggung Jawab Matrix of Unit In Charge					Input	Output
			R	A	S	C	I		
A		Pemberian Hadiah/ Bingkisan/Cenderamata/ Hiburan Giving of Gifts/Parcels/ Souvenirs/Entertainment							
1		Pelaporan kepada atasan langsung maksimal 7 hari setelah pemberian Reporting to the direct superior within 7 days after giving							
2		Pelaporan kepada kepala Divisi terkait maksimal 2 hari kerja Reporting to the relevant Division Head within 2 working days							
3		Penerimaan Laporan Report Receipt							
4		Pemberian ke pihak ketiga dikabulkan UPG yang dikembalikan ke atasan langsung untuk dikembalikan kepada pemberi dan bukti pengiriman pemberian diberikan ke Kepala PJFK/PJPU terkait, Divisi Keuangan, Sekretariat perusahaan dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Giving to third parties is approved by UPG which is returned to the direct superior to be returned to the giver and proof of delivery of the gift is given to the Head of the relevant PJFK/PJPU, Finance Division, Company Secretariat and Director of Finance and Risk Management	UPG	Atasan langsung Pelapor Direct superior Reporter					Bukti Pengiriman Proof of delivery
5		Pemberian ke pihak ketiga dikabulkan UPG yang dikembalikan ke atasan langsung Giving to third parties is approved by UPG which is returned to the direct superior	UPG	Atasan langsung Pelapor Direct superior Reporter					DKMR

Diagram Alur Kerja dan Tanggung Jawab Memberi Hadiah/ Bingkisan/Cenderamata/Hiburan Workflow and Responsibilities for Giving Prizes/Gifts/Souvenirs/Entertainment

No	Alur Proses Process flow	Uraian Kegiatan Description of Activities	Matriks Penanggung Jawab Matrix of Unit In Charge					Input	Output
			R	A	S	C	I		
6		Pengiriman (untuk gratifikasi yang dikabulkan) Delivery (for approved gratification)	Pelapor (Pegawai) Reporter (Employee)	Atasan langsung Pelapor Direct superior Reporter				UPG	
7		Penyerahan Bukti Pengiriman Submission of Proof of Delivery	Pelapor (Pegawai) Reporter (Employee)	Atasan langsung Pelapor Direct superior Reporter				UPG	

LAPORAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, terdapat 1 (satu) laporan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dengan rincian barang gratifikasi tersebut menjadi milik Perusahaan (berisi Parsel Makanan) yang telah disumbangkan kepada Panti Asuhan.

GRATIFICATION MANAGEMENT REPORT 2024

Throughout 2024, there were 1 (one) report of gratification received by the Gratification Control Unit (UPG), with details of the gratification goods becoming the property of the Company (containing Food Parcels) and have been donated to the Orphanage.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan

Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Condition

Di tahun 2013, Perseroan melakukan pembelian kembali saham ("*buyback*") yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 02/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK 02/2013"). Latar belakang pelaksanaan buyback tersebut dikarenakan adanya penurunan Indeks Harga Saham Gabungan ("IHSG") BEI yang signifikan selama periode 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 sebesar 1.247,134 poin atau 23,91%, sebagaimana Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 01/SEOJK.04/2013 tanggal 27 Agustus 2013. Harga saham Perseroan turut mengalami penurunan selama periode tersebut. Pelaksanaan buyback tersebut dilaksanakan dalam beberapa tahap sejak tanggal 4 September 2013 hingga 4 Desember 2013 dengan total saham sebesar 6.018.500 lembar saham.

Selanjutnya, Perseroan mengalihkan seluruh saham hasil pembelian kembali tersebut pada tahun 2019. Di mana pelaksanaan pengalihan saham hasil buyback tersebut dilakukan dalam beberapa tahap mulai 11 Oktober 2019 hingga 4 Desember 2019.

Sementara itu, Perseroan kembali melakukan pembelian kembali saham (buyback) dalam beberapa tahap di tahun 2020, yaitu sejak 13 Maret 2020 hingga 13 Juni 2020, dengan total saham sebanyak 1.100.000 lembar saham.

Kemudian, Perseroan mencatatkan Laba Bersih tahun buku 2021 mencapai Rp225,85 miliar. Total Aset tahun buku 2021 mencapai Rp69,20 triliun. Ekuitas tahun buku 2021 mencapai Rp17,50 triliun. Kontrak Baru tahun buku 2021 mencapai Rp26,81 triliun, dan Kontrak Dihadapi tahun buku 2021 mencapai Rp88,12 triliun.

In 2013, WIKA's conducted a share buyback traded on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 02/POJK.04/2013 on Share Repurchases Issued by Issuers or Public Companies Under Significantly Fluctuating Market Conditions ("POJK 02/2013"). The background of the buyback was due to a significant decline in the IDX Jakarta Composite Index ("JCI") during the period from May 20, 2013 to August 27, 2013 amounting to 1,247,134 points or 23.91%, as per the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 01/SEOJK.04/2013 dated August 27, 2013. The Company's share price also decreased during the period. The buyback was carried out in several stages from September 4, 2013 to December 4, 2013 with a total of 6,018,500 shares.

Furthermore, the Company transferred all of the shares from the buyback in 2019. The transfer of shares resulting from the buyback was carried out in several stages from October 11, 2019 to December 4, 2019.

Meanwhile, the Company resumed share buybacks in several stages in 2020, from March 13, 2020 to June 13, 2020, with a total of 1,100,000 shares.

Then, the Company recorded a Net Profit for 2021 fiscal year reaching Rp225.85 billion. Total assets for 2021 fiscal year reached Rp69.20 trillion, equity for 2021 fiscal year reached Rp17.50 trillion. New Contracts for 2021 fiscal year reached Rp26.81 trillion, and Facing Contracts for 2021 fiscal year reached Rp88.12 trillion.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Funding for Social and Political Activities

WIKA memiliki komitmen yang tinggi terhadap tanggung jawab sosial dan masyarakat, yang diwujudkan melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijelaskan secara rinci pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Selain itu selama tahun 2024, Perseroan tidak memberikan dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

WIKA's has a high commitment to social and community responsibility, which is realized through various Corporate Social Responsibility (CSR) programs which are explained in detail in the Corporate Social Responsibility Chapter in this Annual Report. In addition, during 2024, the Company did not provide funds for political activities or to political parties.

Pencegahan Transaksi Orang dalam (*Insider Trading*) Prevention of Insider Transactions

Untuk menghindari praktik *insider trading*, *Code of Conduct* Perseroan mencakup kebijakan yang dirancang khusus. Selain itu, terdapat regulasi terkait perolehan informasi dengan metode yang sah, serta kewajiban untuk menyimpan dan menggunakan informasi tersebut sesuai dengan norma-norma etika yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendorong kinerja Perseroan, melindungi stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, WIKA mengimplementasikan kebijakan ini melalui Surat Edaran mengenai Larangan Transaksi Orang Dalam pada Masa Pembelian Kembali Saham (*buyback*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kebijakan ini mengacu pada pasal 95 hingga pasal 97 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasal 8 dan pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang terkait.

To avoid insider trading practices, the Company's Code of Conduct includes specially designed policies. In addition, there are regulations regarding the acquisition of information by legitimate methods, as well as the obligation to store and use such information in accordance with established ethical norms.

In order to encourage the Company's performance, protect stakeholders, and improve compliance with laws and regulations, WIKA implements this policy through the issuance of a Circular Letter regarding the Prohibition of Insider Transactions during the Buyback Period of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, based on articles 95 to article 97 of 1995 Law No. 8 concerning the Capital Market and article 8 and article 20 of OJK Regulation No. 2/POJK.04/2013 dated August 23, 2013, as well as related OJK Circular Letter.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Management of State Official Wealth Report (LHKPN)

Perseroan mengharuskan pejabat struktural hingga dua tingkat di bawah Direksi untuk melaporkan harta kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap integritas serta upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terdiri dari:

1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
3. PER. KPK No. 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan PN.

WAJIB LAPOR LHKPN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK 01.09/A.DIR.00271/2021 tentang Pejabat yang Wajib Menyampaikan LHKPN, maka pejabat struktural WIKA yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:

1. Pejabat struktural sampai dengan dua tingkat di bawah Direksi;
2. Direksi Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Badan Hukum yang ditunjuk Perseroan; dan
3. Pejabat yang dipandang memegang fungsi strategis.

The Company requires structural officials up to two levels below Board of Directors, to submit their wealth reports to the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia. This step is taken as a form of support for integrity and efforts to create a clean and professional work environment.

LEGAL BASIS

The legal basis for submitting the State Official Wealth Report (LHKPN) consists of:

1. Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Free State Organizers from KKN;
2. Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission; and
3. PER. KPK No. 02 of 2020 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of PN Assets.

MANDATORY REPORT OF LHKPN

Based On the Board of Directors Decree No. SK 01.09/A. DIR.00271/2021 regarding officials who are required to submit LHKPN, WIKA's structural officials who are required to submit LHKPN are:

1. Structural officials up to two levels below Board of Directors;
2. Directors of Subsidiaries, Associated Companies and Legal Entities appointed by the Company;
3. Officials deemed to hold strategic functions.

MEKANISME PELAPORAN LHKPN

Berdasarkan UU No. 28 tahun 1999, Perseroan menjalankan mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat, di mana penyelenggara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

LAPORAN LHKPN TAHUN 2024

Per 31 Desember 2024, seluruh wajib lapor di lingkungan Perseroan telah disampaikan kepada LHKPN. Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

LHKPN REPORTING MECHANISM

Based on Law No. 28 of 1999, the Company implements a mechanism for State Official Wealth Report, whereby the officials are obliged to:

1. Allow for their wealth to be checked before, during and after taking office;
2. Report and declare their wealth before and after taking office.

2024 LHKPN REPORT

As of December 31, 2024, all mandatory reports within the Company have been submitted to the LHKPN. LHKPN reporting until the end of 2024 period is presented in the table below:

Nama Name	Status Pelaporan Reporting Status	Tanggal Lapor Report Date	Tanggal Kirim Sent Date	Status LHKPN LHKPN Status	Media Pelaporan Reporting Media
Jarot Widyoko (Komisaris Utama I President Commissioner)	Sudah Lapor Already Reported	31 Desember 2024 December 31, 2024	17 Januari 2025 January 17, 2025	Diumumkan Lengkap Announced Complete	e-Filling
Adityawarman (Komisaris Independen I Independent Commissioner)	Sudah Lapor Already Reported	31 Desember 2024 December 31, 2024	3 Februari 2025 February 3, 2025	Diumumkan Lengkap Announced Complete	e-Filling
Rusmanto (Komisaris Independen I Independent Commissioner)	Sudah Lapor Already Reported	31 Desember 2024 December 31, 2024	23 Januari 2025 January 23, 2025	Diumumkan Lengkap Announced Complete	e-Filling
Suryo Hapsoro Tri Utomo (Komisaris Independen I Independent Commissioner)	Sudah Lapor Already Reported	31 Desember 2024 December 31, 2024	7 Februari 2025 February 7, 2025	Diumumkan Lengkap Announced Complete	e-Filling
Harris Arthur Hedar (Komisaris Independen Independent Commissioner)	Sudah Lapor Already Reported	31 Desember 2024 December 31, 2024	14 Februari 2025 February 14, 2025	Diumumkan Lengkap Announced Complete	e-Filling
Firdaus Ali (Komisaris I Commissioner)	Sudah Lapor Already Reported	31 Desember 2024 December 31, 2024	28 Februari 2025 February 28, 2025	Proses Verifikasi Verification Process	e-Filling
Agung Budi Waskito (Direktur Utama I President Director)	Sudah Lapor Already Reported	31 Desember 2024 December 31, 2024	17 Februari 2025 February 17, 2025	Diumumkan Lengkap Announced Complete	e-Filling
Adityo Kusumo (Direktur Keuangan I Director of Finance)	Sudah Lapor Already Reported	31 Desember 2024 December 31, 2024	12 Februari 2025 February 12, 2025	Diumumkan Lengkap Announced Complete	e-Filling
Hadjar Seti Adji (Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi I Director of Human Capital Management and Transformation)	Sudah Lapor Already Reported	31 Desember 2024 December 31, 2024	27 Februari 2025 February 27, 2025	Proses Verifikasi Verification Process	e-Filling
Hananto Aji (Direktur Operasi I I Director of Operations I)	Sudah Lapor Already Reported	31 Desember 2024 December 31, 2024	24 Februari 2025 February 24, 2025	Diumumkan Lengkap Announced Complete	e-Filling
Harum Akhmad Zuhdi (Direktur Operasi II I Director of Operations II)	Sudah Lapor Already Reported	31 Desember 2024 December 31, 2024	23 Februari 2025 February 23, 2025	Proses Verifikasi Verification Process	e-Filling
Sumadi (Direktur Manajemen Risiko dan Legal I Director of Risk Management and Legal)	Sudah Lapor Already Reported	31 Desember 2024 December 31, 2024	28 Februari 2025 February 28, 2025	Proses Verifikasi Verification Process	e-Filling

Transparansi Praktik *Bad Governance*

Bad Governance Practices Transparency

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan terkait aktivitas Perseroan yang mencemari lingkungan.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Perseroan senantiasa mempertahankan komitmen tinggi untuk menerapkan prinsip GCG dengan mematuhi berbagai peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal perpajakan. Sepanjang tahun 2024, WIKA tidak memiliki kasus yang berkaitan dengan perpajakan. WIKA berupaya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Hingga akhir 2024, kontribusi Perseroan kepada negara sebesar Rp1,10 triliun melalui pembayaran pajak, mengalami penurunan 40,26% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp1.868.535.881.885. Adapun rinciannya sebagai berikut:

REPORT ON COMPANY ACTIVITIES POLLUTING THE ENVIRONMENT

DISCLOSURE ON FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

The Company maintains a high commitment to implementing GCG principles by complying with various applicable regulations and laws, including in terms of taxation. Throughout 2024, WIKA's did not have any cases related to taxation. WIKA's strives to fulfill its obligations as a taxpayer. Until the end of 2024, the Company's contribution to the state amounted to Rp1.10 trillion through tax payments, decreasing by 40.26% from the previous year, which was Rp1,868,535,881,885. The details are as follows:

Jenis Pajak Tax Type	2024	2023
PPH Pasal 21 Income Tax Article 21	99.180.871.145	120.738.452.046
PPH 22 Income Tax Article 22	31.334.515.658	48.221.297.569
PPH 23/26 Income Tax Article 23/26	13.092.987.747	19.474.178.620
PPH Final Pasal 4 (2) Final Income Tax Article 4 (2)	67.133.482.916	81.663.983.218
PPH Pasal 15 Income Tax Article 15	-	33.379.937
PPN-K VAT-K	453.544.016.488	871.530.601.066
PPN-M VAT-M	440.251.927.254	716.181.579.429
BM	-	2.728.122.000
PPN-Import VAT-Import	-	7.964.288.000
Total Pajak Total Tax	1.104.537.801.208	1.868.535.881.885

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Seluruh penyajian informasi, analisa, dan pembahasan kinerja pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia). Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

KASUS TERKAIT BURUH DAN KARYAWAN

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat kasus yang melibatkan Perseroan dengan buruh atau karyawan.

PENGUNGKAPAN SEGMENT OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan yang tertera dalam PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi dan untuk kepentingan Manajemen serta berdasarkan segmen geografis, Perseroan mengelompokkan segmen operasi berdasarkan jenis usaha dan geografis, seperti yang telah ditampilkan dalam Laporan Keuangan Audit tahun 2024 yang terdiri dari:

1. Infrastruktur dan Gedung;
2. Energi dan Industrial Plant;
3. Industri;
4. Realti dan Properti;
5. Investasi.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Laporan Tahunan WIKA yang disampaikan kepada pemegang saham, investor, pemangku kepentingan, serta yang diunggah di situs web resmi Perseroan, telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perseroan.

INCOMPATIBILITY OF ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS PRESENTATION WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

The presentation of information, analysis and discussions in this annual report refer to the Company's Financial Statements for the years ended December 31, 2024 and December 31, 2023 as audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia). The Company's consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), including the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), and Interpretation issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountants (DSAK), and Applicable Capital Market and OJK Regulations, and Bapepam-LK Regulation No. VIII.G.7 concerning Guidelines for the Presentation of Financial Statements, and Chairman of Bapepam-LK Decree No. KEP-347/BL/2012 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

CASES RELATED TO WORKERS AND EMPLOYEES

OPERATING SEGMENTS DISCLOSURE IN THE FINANCIAL STATEMENTS

According to PSAK No. 5 (2015 Adjustment) regarding Operational Segments and for the benefit of Management as well as based on geographical segments, as stated in the 2024 Audited Financial Statements consisting of:

1. Infrastructure and Building;
2. Energy and Industrial Plant;
3. Industry;
4. Realty and Property;
5. Investment

ANNUAL REPORT AND DIGITAL ANNUAL REPORT COMPATIBILITY

WIKA's Annual Report, whether submitted to shareholders, investors, stakeholders, or uploaded on the Company's official website, are the same as the Annual Report printed and published by the Company.



Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

WIKA senantiasa menjalankan praktik GCG dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan serta menjadikan kepatuhan pada regulasi sebagai prioritas utama dalam operasional Perseroan. WIKA telah berkomitmen untuk memenuhi rekomendasi dan pedoman yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Dalam Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola yang baik. Rekomendasi tersebut merupakan standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Berikut uraian penerapannya, disampaikan sebagai berikut:

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation
I	Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect 1: Relations of Public Company with Shareholders in Ensuring Rights of Shareholders	

Prinsip 1
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS.

Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles in Compliance with Financial Service Authority Provisions

WIKA's constantly carries out GCG practices by complying with established standards and making compliance with regulations a top priority in the Company's operations. WIKA's has committed to fulfilling the recommendations and guidelines contained in OJK Regulation No. 21/POJK.04/2014 concerning Guidelines for Implementing Public Company Governance and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

In Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for the Governance of Public Companies, there are 5 (five) aspects, 8 (eight) principles and 25 (twenty five) recommendations for the implementation of good corporate governance aspects and principles. Recommendations for the implementation of good corporate governance aspects and principles in the Governance Guidelines are standards that must be applied by the Company to implement the governance principles. The description of its application is as follows:

Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Statement	Penjelasan Penerapan di WIKA Explanation of Implementation at WIKA
<p>Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>Telah Terpenuhi.</p> <p>Perseroan telah mengatur, mengakomodir, dan mengaplikasikan penerapan GCG terkait pemenuhan hak-hak dan hubungan dengan Pemegang Saham yang diterapkan secara adil. Berkenaan dengan hal tersebut Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pemenuhan terhadap hak-hak Pemegang Saham diimplementasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan setiap Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah persentase saham yang dimilikinya. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan.</p> <p>Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 ayat 4 huruf a; yang menyatakan bahwa "Para Pemegang Saham memiliki hak yang sama atas setiap 1 saham memberikan 1 hak suara". Turunan atas ketentuan Anggaran Dasar tersebut diimplementasikan melalui prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara yang terdapat dalam Tata Tertib RUPS, di mana Tata Tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi. Adapun dalam penerapannya memiliki tata cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. • Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. <p>Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.</p>

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation
-----	----------------------	-------------------------------

Principle 1
Improving GMS Implementation

Public companies have technical voting methods or procedures, both openly and privately, that prioritize independence and the interests of shareholders

Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.
All members of Board of Directors and members of Board of Commissioners of Public Company attended the Annual GMS.

Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
Minutes of GMS is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.

Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Statement

Each share with voting rights issued has one vote (one share one vote). Shareholders can exercise their voting rights when making decisions, especially in making decisions by means of voting. However, the mechanism for decision making by means of voting, both openly and privately, has not been regulated in detail.

It is recommended that Public Companies have a voting procedure in making decisions on an agenda of the GMS. The voting procedure must maintain the independence or freedom of shareholders. For example, open voting is carried out by raising one's hand in accordance with the optional instructions offered by the GMS chairman. Meanwhile, closed voting is carried out on decisions that require confidentiality or at the request of shareholders, by using a ballot card or by using electronic voting.

Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS. The presence of all members of Board of Directors and members of Board of Commissioners of the Public Company is intended so that each member of Board of Directors and Board of Commissioners can pay attention, explain and answer directly the problems that occur or questions raised by shareholders regarding the agenda at GMS.

Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.

The Public Company must make a summary of the GMS minutes in Indonesian and foreign languages (at least in English), and announce it 2 (two) working days after the GMS is held to the public, one of which is through the Public Company Website. The availability of summary minutes of the GMS on the Public Company Website provides an opportunity for absent shareholders to obtain important information in organizing a GMS easily and quickly. Therefore, the provisions regarding the minimum period of availability of summary minutes of the GMS on the Website are intended to provide sufficient time for shareholders to obtain such information.

Penjelasan Penerapan di WIKA Explanation of Implementation at WIKA

Has been fulfilled.

The Company has regulated, accommodated and applied the application of GCG related to fulfilling the rights and relationships with Shareholders fairly. In this regard, Shareholders who own shares of the same classification will receive equal treatment and can use their rights in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

The fulfillment of Shareholders rights is applied in the General Meeting of Shareholders (GMS), where each Shareholder is entitled to cast a vote in accordance with the classification and the percentage of shares owned. Each Shareholder is entitled to receive complete and accurate material information about the Company.

In accordance with the Company's Articles of Association Article 5 paragraph 4 letter a; which states that "Shareholders have the same rights in every 1 share giving 1 vote". The derivative provisions in the Articles of Association are implemented through voting procedures for making decisions on an agenda item contained in the GMS Rules, where the GMS Rules are given to Shareholders present and reexplained by the GMS Chairperson at the opening of GMS. The Company has appointed an independent party namely the Securities Administration Bureau and Notary to conduct vote counting and/or validating, using the following procedures:

- Voting is conducted after all questions have been answered and/or the question and answer time is up.
- Each share gives the holder the right to 1 (one) vote. If a Shareholder has more than 1 (one) share, they are only required to vote 1 (one) time and their vote applies to all shares they own or represent.

For each Agenda, a vote will be held for decision-making. At the end of each vote, the Notary Public reads the results of the vote.

Telah Terpenuhi.

Dalam Akta Risalah RUPS Tahunan No. 17 tanggal 15 Mei 2024 mengungkapkan bahwa RUPS Tahunan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat itu.

Has been fulfilled.

In the AGMS Minutes Deed No. 17 dated May 15, 2024, it was stated that all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in office attended the AGMS.

Telah terpenuhi.

Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta diumumkan 1 (satu) hari kerja setelah RUPS dari 2 (dua) hari yang dipersyaratkan oleh regulasi, untuk memenuhi informasi kepada *Stakeholders* yang salah satunya diumumkan melalui *website* Perseroan (www.WIKA.co.id), pada menu Informasi Bagi Pemegang Saham bagian Rapat Umum Pemegang Saham.

Has been fulfilled.

The Company prepared the summary of GMS minutes in Indonesian and English, and announced it 1 (one) working day after the GMS of the 2 (two) days required by regulations, to fulfill information to Stakeholders, and was announced on the Company's website (www.WIKA.co.id), via the Shareholders Information menu for the General Meeting of Shareholders.

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation
-----	----------------------	-------------------------------

Prinsip 2
Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.
Principle 2
Improving Communication Quality of Public Company with Shareholders or Investors

Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor
Public Company has a communication policy with shareholders or investors

Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.
Public Company discloses communication policy of Public Company with shareholders or investors in official website.

II **Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris**
Aspect 2: Functions and Roles of Board of Commissioners

Prinsip 3
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.
Principle 3
Strengthening Membership and Composition of Board of Commissioners.

Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
Determination of the number of Board of Commissioners members should consider the conditions of Public Company

Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Statement

Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.

The communication policy with shareholders or investors shows the commitment of the Public Company in carrying out communication with shareholders or investors. The policy may include strategies, programs, and timing of communications, as well as guidelines that support shareholders or investors to participate in these communications. The communication between the Public Company and shareholders or investors is intended so that shareholders or investors get a clearer understanding of the information that has been published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, and the Implementation of Public Company Governance. In addition, shareholders or investors can also submit input and opinions to the management of the Public Company.

Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.

The disclosure of communication policy is a form of transparency on the commitment of the Public Company in providing equality to all shareholders or investors in implementing communications. The disclosure of this information also aims to increase the participation and role of shareholders or investors in implementing the Public Company communication program.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda di antara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.

The number of members of Board of Commissioners can affect the effectiveness of Board of Commissioners duties implementation. The determination of number of members of Board of Commissioners of a Public Company must refer to prevailing laws and regulations, which consists of at least 2 (two) people based on OJK regulation concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. In addition, it is also necessary to consider the conditions of the Public Company, which include the characteristics, capacity and size, as well as the achievement of objectives and the fulfillment of different business needs among Public Companies. However, too large number of members of Board of Commissioners has the potential to interfere with the effectiveness of Board of Commissioners' functions implementation.

Penjelasan Penerapan di WIKA Explanation of Implementation at WIKA

Telah terpenuhi.

Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemegang Saham Perseroan wajib memperlakukan Pemegang Saham secara adil, sesuai dengan *Code of Conduct* Perseroan (yang dapat diakses pada web www.WIKA.co.id), Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan.

Has been fulfilled.

In conducting its relations with Shareholders, the Company is obliged to treat Shareholders fairly, in accordance with the Company's Code of Conduct (which can be accessed on the website www.WIKA.co.id), the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations. Each Shareholder is entitled to obtain complete and accurate material information about the Company.

Telah terpenuhi.

Kebijakan terkait komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor terdapat pada *Code of Conduct* yang telah diunggah dalam *website* Perseroan, pada Menu *Home website* bagian *Good Corporate Governance* dan *Investor Relations* yang terdapat berbagai macam Manual Kebijakan, Komitmen dan Laporan Perusahaan dan dapat diunduh dari *website* Perseroan. Selain itu di dalam *website* Perseroan juga tersedia alamat penanggung jawab representatif serta nomor telepon Perusahaan yang dapat dihubungi.

Has been fulfilled.

Policies related to communication with Shareholders or Investors are contained in the Code of Conduct that has been uploaded on the Company's website, on the Home Menu, Good Corporate Governance and Investor Relations sections, there are various Company Policy Manuals, Commitments and Reports that can be downloaded from the Company's website. In addition, on the Company's website, there is also the address of the person in charge and the telephone number of the Company that can be contacted.

Telah terpenuhi.

Penentuan jumlah dan penetapan/pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perseroan, yang mengacu pada Peraturan yang berlaku dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015, Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*.

Has been fulfilled.

Determination of the number and appointment of Board of Commissioners is determined by the GMS and has taken into account the Company's condition, which refer to prevailing regulations and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015, the Company's Articles of Association and Board Manual.

No.

Prinsip
Principle

Rekomendasi
Recommendation

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
Determination of composition of Board of Commissioners members takes into account the required diversity, expertise, knowledge, and experience

Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Statement

Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

The composition of Board of Commissioner is a combination of characteristics both in terms of the organs of Board of Commissioners and members of Board of Commissioners individually, according to the needs of Public Company. These characteristics can be reflected in the determination of expertise, knowledge and experience required in the implementation of supervisory and advisory duties by the Public Company's Board of Commissioners. The composition that has taken into account the needs of Public Company is a positive thing, especially in relation to decision making in the context of implementing the supervisory function which is carried out by taking into account a wider range of aspects.

Penjelasan Penerapan di WIKA Explanation of Implementation at WIKA

Telah terpenuhi.

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan komposisi Komisaris Independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik dan No. 34 tahun 2014 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, memiliki komposisi yang cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menerapkannya di dalam Perusahaan, Dewan Komisaris mengacu pada Rencana Kerja Dewan Komisaris yang diturunkan kembali pada Keputusan Dewan Komisaris No. 114/DK/WIKA/2021 Tanggal 23 Desember 2021 tentang Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk /"WIKA" Tahun 2022 terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian saran oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka yang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan latar belakang keahlian dan riwayat pekerjaan anggota Dewan Komisaris. Komposisi anggota Dewan Komisaris merupakan hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Komposisi Dewan Komisaris WIKA yang ada saat ini telah memiliki latar belakang keahlian dan pendidikan yang beragam yang tentunya sejalan dengan kebutuhan perusahaan.

Has been fulfilled.

Determination of Board of Commissioners composition is determined by the GMS taking into account the Independent Commissioners composition in accordance with OJK Regulation (POJK) No. 33 of 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers/Public Companies and No. 34 of 2014, and OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 and has taken into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required based on the proposal of Dwiwarna A Series Shareholders, has a diverse composition, based on age, educational background, expertise and experience needed in carrying out its duties and responsibilities.

In implementing it within the Company, the Board of Commissioners refers to the Work Plan of Board of Commissioners which is cascaded in the Decree of Board of Commissioners No. 114/DK/WIKA/2021 December 23, 2021 concerning Submission of Work Plan and Budget of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk / "WIKA" of 2022 related to the implementation of supervisory and advisory duties by Board of Commissioners of Public Company in accordance with their respective capacities, expertise background and work history of members of Board of Commissioners. The composition of Board of Commissioners members is the right of the Series A Dwiwarna shareholder. The current composition of WIKA's Board of Commissioners has diverse expertise and educational backgrounds which are certainly in line with the needs of the Company

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation
-----	----------------------	-------------------------------

Prinsip 4
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Principle 4
Improving Quality of Duty Implementation and Responsibility of Board of Commissioners.

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
Board of Commissioners has self-assessment policy to assess Board of Commissioners performance

Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.
Self-assessment policy to assess Board of Commissioners performance is disclosed in Annual Report

Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Statement

Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan;

Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Board of Commissioners' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for collegial evaluation of Board of Commissioners performance. Self-assessment is carried out by each member to assess the implementation of Board of Commissioners performance collegially, and not to assess the individual performance of each member of Board of Commissioners. With this Self Assessment, it is hoped that each member of Board of Commissioners can contribute to improving the performance of Board of Commissioners on an ongoing basis.

This policy may include assessment activities carried out along with their aims and objectives, periodic implementation time, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by nomination and remuneration function of the Public Company, where these functions are mandatory in the OJK Regulations concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.

The disclosure of Self-Assessment policy on Board of Commissioner performance is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to give confidence, especially to shareholders or investors, on the efforts that need to be made to improve Board of Commissioners performance. With this disclosure, shareholders or investors know the check and balance mechanism on Board of Commissioners performance.

Penjelasan Penerapan di WIKA Explanation of Implementation at WIKA

Telah terpenuhi.

Kebijakan Penilaian individual Dewan Komisaris dalam bentuk *assessment* bertujuan untuk menilai kinerja individual dalam hal peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Tolak ukur yang digunakan dalam penilaian adalah:

1. Tingkat kehadirannya dan keaktifan dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada.
2. Kemampuan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris lainnya dan Manajemen.
3. Kompetensi individual dalam menyelesaikan permasalahan atau potensi permasalahan di Perseroan dalam konteks pengawasan.
4. Ketersediaan waktu dan perhatian dalam menyelesaikan permasalahan dan/atau potensi permasalahan Perseroan dalam konteks pengawasan.
5. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu.
6. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
7. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Perusahaan.

Has been fulfilled.

The Board of Commissioners' Individual Assessment Policy in the form of a self-assessment aims to assess individual performance in terms of improving the performance and quality of carrying out their duties and responsibilities. Benchmarks used in the assessment are:

1. Level of attendance and activeness in Board of Commissioners' Meetings and meetings with committees.
2. Ability to communicate with other Board of Commissioners and Management.
3. Individual competence in solving problems or potential problems in the Company in the context of supervision.
4. Availability of time and attention in resolving problems and/or potential problems of the Company in the context of supervision.
5. Involvement in certain assignments.
6. Commitment to advancing the interests of the Company.
7. Compliance with applicable laws and regulations and Company Policies.

Telah terpenuhi.

Direksi Perseroan bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyampaikan pertanggungjawaban atas rencana dan pencapaian kerja Perseroan yang dilaksanakan selama tahun buku berjalan yang dituangkan dalam Laporan Tahunan Perseroan yang dapat diperoleh langsung oleh Pemegang Saham melalui situs web Perseroan. Pertanggungjawaban Perseroan kepada Pemegang Saham juga disampaikan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris melalui RUPS Tahunan.

Has been fulfilled.

The Company's Board of Directors with Board of Commissioners submits the accountability of the Company's work plans and achievements carried out in the current fiscal year, and can be seen in the Company Annual Report that is available to the Shareholders via corporate website. The Company's accountability to Shareholders is also conveyed by Board of Directors together with Board of Commissioners through the Annual GMS.

No. Prinsip
Principle

Rekomendasi
Recommendation

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of a member of Board of Commissioners if involved in a financial crime.

Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.
Board of Commissioners or Committee that carries out the Nomination and Remuneration function prepares a succession policy in the Nomination process for members of Board of Directors.

Keterangan Rekomendasi OJK
OJK Recommendation Statement

Penjelasan Penerapan di WIKA
Explanation of Implementation at WIKA

Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris;

Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

The resignation policy for members of Board of Commissioners who are involved in financial crimes is a policy that can increase the trust of stakeholders in Public Companies, so that the integrity of the Company will be maintained. This policy is needed to assist the smooth running of legal process and so that the legal process does not interfere with business activities. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the Public Company. These policies may be included in the Guidelines or Code of Conduct that apply to Board of Commissioners.

Furthermore, what is meant by being involved in a financial crime is the status of being convicted of a member of Board of Commissioners from the authorized party. These financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as the Criminal Act of Money Laundering as referred to in Law No.8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering.

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. Based on OJK Regulation concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the Committee that carries out the nomination function has the duty to formulate policies and criteria required in the Nomination process for candidate members of Board of Directors. One of the policies that can support the Nomination process as referred to is the succession policy for members of Board of Directors. The succession policy aims to maintain the continuity of regeneration process or leadership regeneration in the Company in order to maintain business sustainability and the Company's long-term goals.

Telah terpenuhi.

Perseroan telah mengatur sistem pengunduran diri dan/atau pemberhentian Dewan Komisaris Perseroan melalui Anggaran Dasar Perseroan dan *Board Manual* dengan tetap mendasarkan kepada Asas *Presumption of Innocence*.

Has been fulfilled.

The Company has established a resignation and/or dismissal system for the Company's Board of Commissioners through the Company's Articles of Association, and Board Manual by continuing based on the Principle of Presumption of Innocence.

Telah terpenuhi.

Dalam menjalankan fungsinya sesuai regulasi untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi, Perseroan meratifikasinya ke dalam ketentuan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan pengesahan melalui Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 23/DK/WIKA/2020 Tanggal 16 April 2020 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Has been fulfilled.

In carrying out its functions in accordance with regulations when compiling the policies and criteria needed in the nomination process for prospective members of Board of Directors, the Company has ratified this in the provisions of the Nomination, Remuneration and Good Corporate Governance Charter, as legalized through the Copy of Board of Commissioners' Decree No. 23/DK/WIKA/2020 dated April 16, 2020 concerning PT Wijaya Karya Tbk (Persero) Nomination, Remuneration and Good Corporate Governance (GCG) Committee Charter.

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation
III	Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: Functions and Roles of Board of Directors	

Prinsip 5
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.
Principle 5
Strengthening Membership and Composition of Board of Directors

Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.
Determination of the number of Board of Directors members should consider the conditions of Public Company as well as effectiveness in decision making

Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
Determining the composition of members of Board of Directors takes into account the diversity of skills, knowledge and experience required.

Keterangan Rekomendasi OJK
OJK Recommendation Statement

Penjelasan Penerapan di WIKA
Explanation of Implementation at WIKA

Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.

As a corporate body authorized in managing the Company, the determination of number of Board of Directors greatly affects the performance of Public Company. Thus, the determination of number of members of Board of Directors must be done through careful consideration and must refer to applicable laws and regulations, which are based on OJK Regulation concerning Board of Directors and Board of Commissioner of Issuers or Public Companies consisting of at least 2 (two) people. In addition, determining the number of Board of Directors must be based on the need to achieve the goals and objectives of Public Company and be adapted to the conditions of Public Company, including the characteristics, capacity and size of Public Company and how effective Board of Directors decision making is to be achieved.

Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.

As with Board of Commissioners, diversity in the composition of members of Board of Directors is a combination of desired characteristics both in terms of the organs of Board of Directors and members of Board of Directors individually, according to the needs of Public Company. This combination is determined by taking into account the appropriate expertise, knowledge and experience in the division of duties and functions of Board of Directors in achieving the goals of the Public Company. Thus, consideration of the combination of characteristics referred to will have an impact on the accuracy of nomination process and appointment of individual members of Board of Directors or Board of Directors collegially.

Telah terpenuhi.

Penentuan jumlah dan penetapan/pengangkatan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perseroan, yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015, Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual.

Has been fulfilled.

Determination of the number and stipulation/appointment of Board of Directors is determined by the GMS and has taken into account the Company's condition, which refer to OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015, the Company's Articles of Association and Board Manual.

Telah terpenuhi.

Penentuan komposisi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik, serta POJK No. 34 tahun 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki komposisi cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara individual maupun kolegal.

Has been fulfilled.

Board of Directors composition is determined by the GMS in accordance with prevailing laws and regulations, OJK Regulation (POJK) No. 33 of 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers/Public Companies, and POJK No. 34 of 2014 and OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 and has taken into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required based on the proposal of Dwiwarna A Series Shareholders, has a diverse composition, based on age, educational background, expertise and experience needed in carrying out their individual and collegial duties and responsibilities.

No. Prinsip
Principle

Rekomendasi
Recommendation

Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.
Member of Board of Directors overseeing accounting or finance has expertise and/or knowledge in accounting sector.

Keterangan Rekomendasi OJK
OJK Recommendation Statement

Penjelasan Penerapan di WIKA
Explanation of Implementation at WIKA

Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan;

Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.

The Financial Report is a management accountability report on the management of resources owned by Public Company, which must be prepared and presented in accordance with generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia and also related OJK regulations, including laws and regulations in Capital Market sector which governs the presentation and disclosure of Public Company Financial Statements. Based on \ laws and regulations in Capital Markets sector which govern the responsibilities of Board of Directors for Financial Statements, Board of Directors is jointly responsible for the Financial Statements, signed by President Director and members of Board of Directors who are in charge of accounting or finance;

Thus, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statements will depend on the expertise and/or knowledge of Board of Directors, particularly members of Board of Directors in charge of accounting or finance. Having the qualifications of expertise and/or knowledge in accounting that at least the members of Board of Directors possess can provide confidence in the preparation of Financial Statements, so that these Financial Statements can be relied on by stakeholders as the basis for making economic decisions related to the said Public Company. Such expertise and/or knowledge can be proven by educational background, training certification and/or related work experience.

Telah terpenuhi.

Laporan Keuangan yang diunggah ke situs web Perseroan merupakan salah satu cara Perseroan dalam menjalankan praktik transparansi GCG. Selain itu, informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan tersebut mengandung unsur-unsur dan/atau yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan regulasi yang berlaku.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan memiliki latar belakang kompetensi di bidang keuangan.

Has been fulfilled.

Financial statements uploaded to the Company's website are a form of the Company's GCG transparency practice. In addition, the information presented in the Financial Statements contains elements and/or that are required by Financial Accounting Standards that are generally accepted in Indonesia and applicable regulations.

The Company's Director of Finance and Risk Management has a competency background in finance.

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation
-----	----------------------	-------------------------------

Prinsip 6
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
Principle 6
Improving the Quality of Duty Implementation and Responsibility of Board of Directors.

Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.
Board of Directors has selfassessment policy to assess Board of Directors performance.

Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.
Self-assessment policy to assess Board of Director performance is disclosed in Annual Report.

Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
Board of Directors has a policy regarding the resignation of a member of Board of Directors if involved in a financial crime.

Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Statement

Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan;

Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

As with the Board of Commissioners, Board of Directors' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for collegial evaluation of the performance of Board of Directors. Self-assessment is carried out by each member of Board of Directors to assess the performance of Board of Directors collegially, and not to assess the individual performance of each member of Board of Directors. With this Self Assessment, it is hoped that each member of Board of Directors can contribute to improving the performance of Board of Directors on an ongoing basis.

This policy may include assessment activities carried out along with their aims and objectives, periodic implementation time, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of Public Company, where the formation of these functions is mandatory in OJK Regulations concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies

Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.

The disclosure of Self Assessment policy on the performance of Board of Directors is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide important information on efforts to improve the management of Public Company. This information is very useful to provide assurance to shareholders or investors that there is certainty that the Company's management will continue to be in a better direction. With this disclosure, shareholders or investors know the check and balance mechanism on the performance of Board of Directors.

Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi;

The resignation policy of members of Board of Directors who are involved in financial crimes is a policy that can increase the trust of stakeholders in public companies, so that the integrity of the Company will be maintained. This policy is needed to assist the smooth running of the legal process and so that the legal process does not interfere with business activities. In addition, in terms of morality, this policy will build an ethical culture within the Public Company. These policies can be included in the Guidelines or the Code of Conduct that apply to Board of Directors.

Penjelasan Penerapan di WIKA Explanation of Implementation at WIKA

Telah terpenuhi.

Selain penilaian menggunakan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan *assessment* GCG, Perusahaan juga telah menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing Direktorat selama tahun 2024.

Has been fulfilled.

In addition to Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) and GCG assessment, the Company has also set Key Performance Indicators (KPI) for each Directorate during 2024.

Telah terpenuhi.

Self Assessment untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Has been fulfilled.

Board of Directors' self-assessment is disclosed in the Company's Annual Report in the Corporate Governance section of Board of Directors Performance Appraisal section.

Telah terpenuhi.

Untuk meningkatkan kepercayaan para *stakeholders* terhadap Perseroan melalui Integritas yang diterapkan, maka Perseroan memiliki Kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual Perseroan. Selain itu bagi Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti yang disebabkan meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

Has been fulfilled.

To increase stakeholders' trust in the Company's Integrity, the Company has a policy related to the resignation of Board of Directors members involved in financial crimes, as regulated in the Company's Articles of Association and Board Manual. Aside from that, for Directors who resign before or after their term of office ends, except for those who have passed away, they must submit accountability for actions that have not yet been accepted by the GMS.

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation
IV	Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholder Participation	

Prinsip 7
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.
Principle 7 :
Improving Good Corporate Governance Aspects through Stakeholders' Participation.

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.
Public Company has policy to prevent insider trading.

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud*.
Public Company has policy on selection and improvement of capability of suppliers and vendors

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.
Public Company has policy on selection and improvement of capability of suppliers and vendors

Keterangan Rekomendasi OJK
OJK Recommendation Statement

Penjelasan Penerapan di WIKA
Explanation of Implementation at WIKA

Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. A person who has inside information is prohibited from carrying out a Securities transaction using inside information as referred to in the Capital Market Law. Public Companies can minimize the occurrence of insider trading through preventive policies, for example by strictly separating data and/or information that is confidential and public in nature, as well as dividing the duties and responsibilities of managing the information in a proportional and efficient manner.

Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain. The anti-corruption policy is useful to ensure that the business activities of the Public Company are carried out legally, prudently and in accordance with the principles of good governance. The policy can be part of a Code of Conducts, or in a separate form. This policy may include, among others, programs and procedures to deal with corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in public companies. The scope of the policy must describe the prevention of the Public Company against all corrupt practices, either giving or receiving from other parties.

Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas *output* perusahaan;

Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. The policy on supplier or vendor selection is useful to ensure that Public Company obtains the required goods or services at competitive prices and of good quality. Meanwhile, the policy of increasing the ability of suppliers or vendors is useful to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/ fulfill goods or services needed by the Company will affect the quality of the Company's output. The implementation of these policies can ensure continuity of supply, both in terms of quantity and quality required by the Public Company. The scope of this policy includes criteria in selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to increase the ability of suppliers or vendors, and fulfillment of rights related to suppliers or vendors.

Telah terpenuhi.

Kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* telah diatur dalam *Code of Conduct*. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan yang telah diatur terkait hal tersebut.

Has been fulfilled.

The policy to prevent insider trading is regulated in the Code of Conduct. The Company is committed to complying with all the provisions that have been regulated in this regard.

Telah Terpenuhi.

Perseroan menetapkan kebijakan anti korupsi dan *anti fraud* yang dituangkan dalam *Code of Conduct*, prosedur-prosedur gratifikasi, dan prosedur lainnya serta dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh insan Perseroan agar tidak melakukan penyelewengan dan penyimpangan sejenisny.

Has been fulfilled.

The Company has established anti-corruption and anti-fraud policies as outlined in the Code of Conduct, gratification procedures, and other procedures, and has been conducting socialization to all people in the Company not to commit fraud and other irregularities.

Telah terpenuhi.

Kebijakan Perseroan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diatur di dalam *Code of Conduct* Perseroan atau Prosedur Perseroan yang telah disosialisasikan untuk menjamin Perseroan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif, kualitas yang baik, efisien, efektif dan menjamin *supply* yang kontinuitas oleh vendor.

Has been fulfilled.

The vendor or supplier selection and improvement policy has been regulated in the Company's Code of Conduct, or in the Company Procedures that can be accessed through the Company's website, to ensure the Company receives the goods or services needed at competitive prices, in good quality, in an efficient, effective and guaranteed continuous manner.

No.

Prinsip
Principle

Rekomendasi
Recommendation

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.
Public Company has policy on creditor's rights fulfillment.

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.
Public Company has whistleblowing System Policy.

Keterangan Rekomendasi OJK
OJK Recommendation Statement

Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.

Policy regarding the fulfillment of creditors' rights is used as guidance in making loans to creditors. The purpose of this policy is to maintain the fulfillment of rights and maintain creditor trust in the Public Company. The policy includes considerations in entering into agreements, as well as followup actions in fulfilling Public Company obligations to creditors.

Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.

A well-developed whistleblowing system policy will provide assurance of protection to witnesses or reporters for indications of violations committed by employees or management of Public Company. The application of this system policy will have an impact on the formation of a culture of good corporate governance. The whistleblowing system policy covers, among others, the types of violations that can be reported through the whistleblowing system, how to complain, protect and guarantee the confidentiality of reporter, handling of complaints, party who manages the complaint, and the results of handling and follow-up of complaints.

Penjelasan Penerapan di WIKA
Explanation of Implementation at WIKA

Telah terpenuhi.

Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan Kreditur yaitu Bank atau Lembaga Keuangan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kreditur. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen untuk menggunakan modal kerja dan fasilitas tersebut secara akuntabel, transparan dan efisien. Perseroan selalu senantiasa menyampaikan informasi material menyangkut hubungan dengan Kreditur kepada para investor/calon investor secara adil, benar dan akurat

Perseroan juga mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan kewajiban Perseroan terhadap Kreditur secara tepat waktu yang dituangkan dalam *Code of Conduct* Perusahaan. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain Kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Has been fulfilled.

The Company collaborates with Creditors, namely Banks or Financial Institutions to improve the Company's working capital, and uses the facilities provided by Creditors. Therefore, the Company is committed to using its working capital and facilities accountably, transparently and efficiently.

The Company always conveys material information regarding its relationship with creditors to investors/potential investors fairly, correctly and accurately. The Company is also highly committed to carrying out its obligations to creditors in a timely manner as outlined in the Company's Code of Conduct. Fulfillment of these obligations includes payment of interest, repayment of principal and other rights of Creditors in accordance with the provisions in the agreement agreed between the Company and the Creditor, and related Regulations.

Telah terpenuhi.

Dalam menerapkan, Perseroan memiliki mekanisme penegakan Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct (Whistleblowing System)* No. WIKA-LDSPM-01.02, tanggal 31 Januari 2019 yang kemudian diamendemen pada tanggal 17 November 2020 dengan No. WIKA-LDS-PM-02.01 Rev 00 Amd 02 yang mengatur mengenai cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.

Has been fulfilled.

The Company has a mechanism for Code of Conduct Complaints (*Whistleblowing System*) No. WIKA-LDSPM-01.02, dated January 31, 2019 that was later amended on November 17, 2020 by No. WIKA-LDS-PM-02.01 Rev 00 Amd 02, which regulates the method of complaints, protection and guarantees the confidentiality of whistleblowers, handling complaints, parties managing complaints, and the results of handling and follow-up of complaints.

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation
-----	----------------------	-------------------------------

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
Public Company has policy on long-term incentives for Board of Directors and Employees.

V **Aspek 5 : Keterbukaan Informasi**
Aspect 5: Information Disclosure

Prinsip 8
Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.
Principle 8
Improving Information Disclosure

Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan Informasi.
Public Company makes wider use of information technology in addition to Web site as information disclosure media.

Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Statement

Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang;

Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.

Long-term incentives are incentives based on long-term performance achievement. Long-term incentive plans have the premise that the Company's long-term performance is reflected by the growth in the value of its shares or other long-term targets. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and provide motivation to Board of Directors and employees to improve their performance or productivity which will have an impact on improving the Company's performance in the long term;

The existence of a long-term incentive policy is a real commitment of Public Company to encourage the implementation of long-term incentives to Board of Directors and Employees with terms, procedures and forms that are adjusted to the long-term goals of Public Company. Such policies may include, among others: the aims and objectives of providing long-term incentives, the terms and procedures for providing incentives, as well as conditions and risks that must be considered by Public Company in providing incentives. This policy can also be included in the existing remuneration policy of Public Company.

Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.

The use of information technology can be useful as a medium for information disclosure. The disclosure of information that is carried out is not only disclosure of information that has been regulated in the laws and regulations, but also other information related to the Public Company which is deemed beneficial for shareholders or investors to know. With the wider use of information technology in addition to Web sites, it is hoped that companies can increase the effectiveness of the Company's information dissemination. Nonetheless, the use of information technology should still pay attention to the benefits and costs of the Company.

Penjelasan Penerapan di WIKA Explanation of Implementation at WIKA

Telah terpenuhi.

Perseroan dalam memberikan insentif penghasilan atas penghargaan kepada Direksi dan Pegawai didasarkan kepada Prosedur Perseroan No. WIKA-HCE-PM-08.02 terkait dengan Prosedur Pemberian Jasa Produksi, di mana dalam Anggaran Jasa Produksi ditetapkan berdasarkan penilaian tingkat kesehatan perusahaan yang berpedoman pada Regulasi yang berlaku di antaranya: Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 Jo. Peraturan BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tanggal 4 Juni 2002.

Has been fulfilled.

The Company's income incentives for Directors and Employees is based on Company Procedure No: WIKA-HCE-PM-08.02 related to Production Service Provision Procedures, whereby the Production Service Budget is determined based on an assessment of the Company soundness level based on applicable regulations including: SOE Minister Regulation No: PER-02/MBU/06/2016 Jo. SOE Regulation No PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Remuneration for Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises and SOE Ministerial Decree No: KEP-100/MBU/2002 concerning SOE Soundness Level Assessment dated June 4, 2002.

Telah terpenuhi.

Selain *website*, Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media sosial lainnya seperti melalui Portal Internal, *E-mail*, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, serta *Call Center*.

CORPORATE SECRETARY
Website: www.WIKA.co.id
Twitter: @PTWijayaKarya
Facebook: PT Wjaya Karya
Instagram: ptwijayakarya
YouTube: PT Wijaya Karya
E-mail: adwijaya@WIKA.co.id

Has been fulfilled.

In addition to the website, the Company uses information technology and other social media applications through Internal Portals, E-mail, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Call Center.

CORPORATE SECRETARY
Website: www.WIKA.co.id
Twitter: @PTWijayaKarya
Facebook: PT Wjaya Karya
Instagram: ptwijayakarya
YouTube: PT Wijaya Karya
E-mail: adwijaya@WIKA.co.id

No. Prinsip
Principle

Rekomendasi
Recommendation

Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Annual Report of Public Company discloses the ultimate beneficiary of at least 5% (five percent) share ownership of the Company, aside from disclosure of the ultimate beneficiary of share ownership of Public Company through Major and Controlling shareholders.

Keterangan Rekomendasi OJK OJK Recommendation Statement

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.

The laws and regulations in Capital Market sector governing the submission of Annual Reports of Public Company, which stipulate the obligation to disclose information regarding shareholders who own 5% (five percent) or more of the shares of Public Company as well as the obligation to disclose information regarding the main and controlling shareholders of Public Company directly or indirectly up to the ultimate beneficial owner in ownership of the shares. In this Governance Guidelines it is recommended to disclose the ultimate beneficiary of share ownership of a Public Company of at least 5% (five percent), in addition to disclosing the ultimate beneficiary of share ownership by the major and controlling shareholders.

Penjelasan Penerapan di WIKA Explanation of Implementation at WIKA

Telah terpenuhi.

Laporan Tahunan 2024 menampilkan profil 20 pemegang saham terbesar per 31 Desember 2024 pada Bab Profil Perusahaan.

Has been fulfilled.

2024 Annual Report shows the profile of 20 top shareholders as of December 31, 2024 in the Company Profile Chapter

Penerapan Asean Corporate Governance Scorecards

Asean Corporate Governance Scorecard Application

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
A.	Hak Pemegang Saham		
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham		
A.1.1	<p>Apakah perusahaan membayar <i>dividen</i> (baik interim maupun final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; dalam arti, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) pembayaran dividen interim diumumkan dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada saat rapat umum pemegang saham untuk pembayaran dividen final? Jika perusahaan menawarkan <i>dividen Scrip</i>, apakah Perusahaan telah membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari.</p> <p>Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days.</p>	<p>Berdasarkan Hasil Keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 15 Mei 2024, untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan pembayaran dividen.</p> <p>Based on the Resolution of Annual GMS held on May 15, for the fiscal year ending December 31, 2024, the Company decided not to make dividend payments.</p>	376-377, 452-453
A.2	<p>Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara di RUPS, serta mendapatkan informasi terkait aturan-aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang berlaku di RUPS</p> <p>Right to participate effectively in and vote in general shareholderS meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.</p>		
A.2.1	<p>Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan dengan mata acara, untuk menyetujui remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk natura dan imbalan lainnya) atau kenaikan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-eksekutif?</p> <p>Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?</p>	Ya Yes	<p>Pemegang Saham Perusahaan memiliki kesempatan untuk menyetujui remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2023 melalui RUPS yang tercantum dalam agenda 3 RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 15 Mei 2024.</p> <p>The Company's Shareholders have the opportunity to approve the remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors for the 2023 fiscal year through the GMS listed in the agenda of the 3rd Annual GMS held on May 15, 2024.</p>
A.2.2	<p>Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk mengajukan calon anggota Direktur/Komisaris?</p> <p>Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?</p>	Ya Yes	449-450
A.2.3	<p>Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham memilih Direktur/Komisaris secara individu?</p> <p>Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?</p>	Ya Yes	449-450
A.2.4	<p>Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum rapat dimulai?</p> <p>Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?</p>	Ya Yes	455

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
A.2.5	Apakah risalah RUPS terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, serta mencatat pertanyaan yang diajukan pemegang saham dan jawaban yang diberikan? Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	Ya Yes	455
A.2.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk seluruh keputusan/setiap mata acara RUPS terakhir? Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	Ya Yes	456-461
A.2.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan yang hadir di RUPS terakhir? Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	Ya Yes	453, 463, 454-455
A.2.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Presiden Direktur (jika bukan anggota direksi dan Dewan Komisaris) menghadiri RUPS terakhir? Does the company disclose that all board members and the CEO (if not a board member) attended the most recent AGM?	Ya Yes	453, 463
A.2.9	Apakah perusahaan memperbolehkan pemungutan suara secara in-absentia? Does the company allow voting in absentia?	Ya Yes	454-455
A.2.10	Apakah pemungutan suara di perusahaan dilakukan melalui jajak pendapat (dan bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPS terakhir? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	Ya	455
A.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan penugasan pihak independen (pemeriksa) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara dalam RUPST? Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	Ya Yes	455, 463, 464
A.2.12	Apakah perusahaan mengumumkan hasil pemungutan suara untuk setiap keputusan yang diambil di RUPS/RUPSLB terakhir pada hari kerja berikutnya? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	Ya Yes	456-461, 464-467
A.2.13	Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari sebelumnya untuk seluruh RUPS dan RUPSLB? Does the company provide at least 21 days notice for all AGMs and EGMs?	Ya Yes	452, 462
A.2.14	Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan atas setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemberitahuan RUPS/surat edaran dan/atau pernyataan yang menyertainya? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	Ya Yes	456-461, 464-467

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan mata acara rapat umum dan/atau meminta diadakannya rapat umum dengan persentase tertentu? Does the company give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request for general meetings subject to a certain percentage?	Ya Yes	452, 462
A.3	Berfungsinya pasar dalam mengendalikan perusahaan secara efisien dan transparan Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner.		
A.3.1	Dalam hal merger, akuisisi, dan/atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah Direksi/Komisaris perusahaan menunjuk pihak independen untuk menilai kewajaran harga transaksi? In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/commissioners of the company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	Ya Yes	384
A.4	Pelaksanaan hak pemegang saham, termasuk pemegang saham institusi, difasilitasi oleh perusahaan. The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.		
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktik yang dilakukan untuk mendorong pemegang saham agar terlibat dengan perusahaan di luar rapat umum? Does the company disclose its practices to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings?	Ya Yes	451
A.5	Saham dan Hak Suara Saham dan hak suara		
A.5.1	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah perusahaan mengumumkan hak pemungutan suara yang melekat pada setiap kelas saham (misalnya melalui situs web perusahaan laporan/bursa efek/situs web regulator)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?	Ya Yes	449-451
A.6	Pemberitahuan RUPS Notice of AGM		
A.6.1	Apakah setiap keputusan yang diambil pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu hal saja, tidak ada penggabungan beberapa hal menjadi satu keputusan yang sama? Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	Ya Yes	449-451
	Apakah pemberitahuan RUPS/surat edaran memuat rincian sebagai berikut Does the notice of AGM/circulars have the following details:		

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
A.6.3	Apakah terdapat profil Direksi/Komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di emiten lain) yang dipilih/dipilih kembali? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?	Ya	222-232, 236-241
A.6.4	Apakah auditor yang diangkat/diangkat kembali teridentifikasi secara jelas? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	Ya Yes	457-458, 467-468
A.6.5	Apakah dokumen proksi tersedia dengan mudah? Were the proxy documents made easily available	Ya Yes	454
A.7	Terdapat larangan insider trading dan tindakan menguntungkan diri sendiri Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.		
A.7.1	Apakah Direksi/Komisaris harus melaporkan transaksi mereka atas saham perusahaan dalam waktu 3 hari kerja? Are the directors / commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	Ya Yes	727-728
A.8	Transaksi dengan Pihak Berelasi oleh Direksi dan Eksekutif Related party transactions by directors and key executives.		
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite yang terdiri dari Direktur/ Komisaris Independen untuk meninjau transaksi afiliasi material untuk menentukan apakah hal tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik bagi perusahaan dan pemegang saham? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	Ya Yes	581
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan anggota dewan (Direksi/Komisaris) untuk tidak ikut serta dalam diskusi terkait mata acara tertentu pada saat memiliki konflik kepentingan? Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	Ya Yes	386
A.8.3	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan mengenai pinjaman kepada direksi dan komisaris, baik terkait tidak diperbolehkannya praktik ini atau memastikan bahwa hal tersebut dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	Tidak No	pada laporan tahunan ini diterbitkan, WIKA sedang dalam proses penyusunan kebijakan tersebut In this annual report, WIKA is in the process of preparing the policy
A.9	Melindungi hak pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang Protecting minority shareholders from abusive actions		
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan harga pasar dan bersifat <i>arms length</i> ? Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	Ya Yes	385-386

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
A.9.2	Dalam hal transaksi dengan pihak berelasi membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan dibuat oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan? In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	Ya Yes	450
B.	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience		
B.1	Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, sebanding, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material retrospektif dan berwawasan ke depan yang akan dianggap penting oleh investor yang wajar dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara. Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision		
Informasi material terkait keberlanjutan harus spesifik. Material Sustainability-related information should be specified			
B.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik ESG yang material bagi strategi organisasi? Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Tahunan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 448 Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 7 Available in WIKA Annual Report for Fiscal Year 2024 Page 448 Available in WIKA Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Page 7
B.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai suatu permasalahan? Does the company identify climate change as an issue?	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Tahunan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 830-833 Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 160-165 Available in WIKA Annual Report for Fiscal Year 2024 Page 830-833 Available in WIKA Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Page 160-165
B.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka pelaporan atau standar keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terpadu, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)? Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 6 Available in WIKA Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Page 6
Jika sebuah perusahaan menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan secara publik, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang andal diungkapkan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses. If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form			
B.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan secara kuantitatif? Does the company disclose quantitative sustainability target?	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 18 Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Page 18
B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya? Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 21 Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Page 21

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
B.1.6	<p>Apakah perusahaan mengonfirmasi bahwa Laporan/Pelaporan Keberlanjutannya ditinjau dan/ atau disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan?</p> <p>Does the company confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?</p>	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 76 Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Page 76
B.2	<p>Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan.</p> <p>Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters</p>		
B.2.1	<p>Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan?</p> <p>Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?</p>	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 107 Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Pages 107
B.2.2	<p>Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan?</p> <p>Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?</p>	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 105-110 Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Pages 105-110
B.3	<p>Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa direksi dan dewan komisaris mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material secara memadai saat menjalankan fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi yang terkait dengan iklim.</p> <p>The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate- related physical and transition risks</p>		
B.3.1	<p>Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa setiap tahun direksi dan dewan komisaris meninjau apakah struktur modal dan utang perusahaan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan dan risk appetite terkait?</p> <p>Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?</p>	Ya Yes	363

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
B.4	<p>Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial.</p> <p>The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.</p>		
B.4.1	<p>Keberadaan dan ruang lingkup upaya perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan pelanggan?</p> <p>The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?</p>	Ya Yes	<p>Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 201, 215</p> <p>Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Pages 201, 215</p>
B.4.2	<p>Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?</p> <p>Supplier/contractor selection procedures?</p>	Ya Yes	762-763
B.4.3	<p>Upaya perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan promosi pembangunan berkelanjutan?</p> <p>The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?</p>	Ya Yes	<p>Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 125-128</p> <p>Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Pages 125-128</p>
B.4.4	<p>Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar?</p> <p>The company's efforts to interact with the communities in which they operate?</p>	Ya Yes	<p>Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 193</p> <p>Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Pages 193</p>
B.4.5	<p>Program dan prosedur antikorupsi perusahaan?</p> <p>The company's anti-corruption programmes and procedures?</p>	Ya Yes	<p>Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 129</p> <p>Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Pages 129</p>
B.4.6	<p>Bagaimana hak-hak kreditor dilindungi?</p> <p>How creditors' rights are safeguarded?</p>	Ya Yes	771
B.4.7	<p>Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas upayanya dalam menangani isu lingkungan/ekonomi dan sosial?</p> <p>Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?</p>	Ya Yes	<p>Perseroan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan</p> <p>The Company has published a Sustainability Report</p>
B.5	<p>Jika kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus diberikan kesempatan untuk memperoleh ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.</p> <p>Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.</p>	Ya Yes	<p>Tertuang dalam Kode Etik Perseroan</p> <p>Contained in the Company's Code of Conduct</p>
B.5.1	<p>Apakah perusahaan menyediakan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarkan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka?</p> <p>Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?</p>	Ya Yes	<p>Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 191</p> <p>Contained in WIKA Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Page 191</p>

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
B.6	Mekanisme untuk partisipasi karyawan harus diizinkan untuk berkembang. Mechanisms for employee participation should be permitted to develop.		
B.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik tentang kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on health, safety and welfare for its employees?	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 182 Contained in WIKA Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Page 182
B.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik tentang program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	Ya Yes	252-272
B.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	Ya Yes	252-272
B.7	Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan perorangan dan badan perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengomunikasikan kekhawatiran mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada direksi dan dewan komisaris, dimana hak-hak mereka tidak boleh diragukan karena melakukan hal ini? Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this?		
B.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan pengungkapan pelanggaran yang mencakup prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau laporan tahunan? Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour and provide contact details via the company's website or annual report	Ya Yes	729-737
B.7.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behaviour from retaliation?	Ya Yes	729-737
C	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency		
C.1	Transparansi tentang Struktur Kepemilikan Transparent ownership structure		
C.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham memperlihatkan identitas beneficial owner, memiliki 5% atau lebih saham? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	Ya Yes	273

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung oleh pemegang saham utama dan/atau substansial? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	Ya Yes	273
C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung oleh Direktur (Komisaris)? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	Ya Yes	273-278
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung oleh manajemen senior? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	Ya Yes	244-251
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian perusahaan induk/ <i>holding</i> , anak perusahaan, entitas asosiasi, perusahaan patungan, dan entitas/persuahaan bertujuan khusus (SPE)/ (SPV)? Does the company disclose details of the parent/ holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?	Ya Yes	279-293
C.2	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report		
Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut: Does the company's annual report disclose the following items:			
C.2.1	Tujuan perusahaan Corporate objectives	Ya Yes	164-206
C.2.2	Indikator kinerja keuangan Financial performance indicators	Ya Yes	64-65
C.2.3	Indikator kinerja non keuangan Non-financial performance indicators	Ya Yes	64-65
C.2.4	Kebijakan dividen Dividend policy	Ya Yes	104
C.2.5	Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman kerja relevan, dan jabatan Direktur lainnya di emiten) dari seluruh Direktur/Komisaris Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/commissioners	Ya Yes	236-243
Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Confirmation Statement			
C.2.6	Apakah Laporan Tahunan berisi pernyataan yang menegaskan kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode etik tata kelola perusahaan dan jika terjadi ketidakpatuhan, apakah terdapat identifikasi dan penjelasan atas permasalahan tersebut? Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	Ya Yes	747
C.3	Remunerasi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Eksekutif Utama Remuneration of Members of the Board and Key Executives		

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
C.3.1	Apakah struktur biaya untuk Direktur/Komisaris Independen Non-Eksekutif diungkapkan? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	Ya Yes	727, 557-562
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan secara terbuka [misalnya laporan tahunan atau dokumen lain yang dipublikasikan] rincian remunerasi masing-masing Direktur/Komisaris Independen Non-Eksekutif? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/commissioner?	Ya Yes	557-562
C.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang dan tunjangan lainnya) (misalnya penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja) untuk Direktur/Komisaris dan Presiden Direktur? Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	Ya Yes	557-562
C.3.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepada publik [misalnya laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing Direktur/Komisaris dan Presiden Direktur [jika yang bersangkutan bukan anggota Dewan]? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	Ya Yes	557-568
C.4	Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi (RPT) Disclosure of related party transactions (RPT)		
C.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT material? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	Ya Yes	727-723
C.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat, dan nilai untuk setiap RPT material? Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?	Ya Yes	385-396
C.5	Transaksi Saham oleh Direktur dan Komisaris Perusahaan Directors and commissioners dealings in shares of the company		
C.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam? Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	Ya Yes	745
C.6	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor External auditor and Auditor Report		
Jika firma audit yang sama digunakan untuk layanan audit dan non-audit Where the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services			
C.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are the audit and non-audit fees disclosed?	Ya Yes	708-712
C.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Does the non-audit fee exceed the audit fees?	Ya Yes	708-712
C.7	Media komunikasi Medium of communications		

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
C.7.1	Laporan per kuartal Quarterly reporting	Ya Yes	320
C.7.2	Web situs perusahaan Company website	Ya Yes	318-321, 451
C.7.3	<i>Analyst briefing</i>	Ya Yes	451
C.7.4	Media <i>briefing</i> /konferensi pers Media briefings /press conferences	Ya Yes	718-720
C.8	Penyampaian/penerbitan laporan tahunan/ keuangan tepat waktu Timely filing/release of annual/financial reports		
C.8.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 120 hari setelah tahun buku berakhir? Are the audited annual financial report / statement released within 120 days from the financial year end?	Ya Yes	855
C.8.2	Apakah laporan tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari setelah tahun buku berakhir? Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	Ya Yes	150
C.8.3	Apakah keabsahan dan kewajaran presentasi laporan keuangan tahunan telah diafirmasi oleh direksi/komisaris dan/atau pejabat perusahaan terkait? Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	Ya Yes	150, 151, 1854-855
C.9	Situs Web Perusahaan Company website		
C.9.1	Laporan keuangan (per kuartal terakhir) Financial statements/reports (latest quarterly)	Ya Yes	320
C.9.2	Materi <i>briefing</i> dengan analis dan media Materials provided in briefings to analysts and media	Ya Yes	320
C.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh Downloadable annual report	Ya Yes	321
C.9.4	Pemberitahuan RUPST dan/atau RUPSLB Notice of AGM and/or EGM	Ya Yes	321
C.9.5	Risalah RUPST dan/atau RUPSLB Minutes of AGM and/or EGM	Ya Yes	320
C.9.6	Konstitusi dasar perusahaan (anggaran rumah tangga perusahaan, memorandum dan anggaran dasar) Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	Ya Yes	321
C.10	Hubungan Investor Investor relations	Ya Yes	320
C.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan informasi rinci tentang kontak (telepon, fax, dan email) petugas/ unit yang bertanggung jawab terhadap kegiatan hubungan investor Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer / office responsible for investor relations?	Ya Yes	155

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
D. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Responsibilities of the Board			
Adanya kejelasan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, serta kebijakan tata kelola perusahaan Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy			
D.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/piagam Dewan Komisaris dan Direksi? Does the company disclose its corporate governance policy / board charter?	Ya Yes	533, 501-502
D.1.2	Apakah jenis-jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Direksi/ Dewan Komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed ?	Ya Yes	534-535
D.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris dinyatakan dengan jelas? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated ?	Ya Yes	479, 528
Visi/Misi Perusahaan Corporate Vision/Mission			
D.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang terbaru? Does the company have an updated vision and mission statement?	Ya Yes	175
D.1.5	Apakah direksi memegang peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setiap tahun? Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?	Ya Yes	137
D.1.6	Apakah direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi penerapan strategi perusahaan? Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	Ya Yes	137
D.2	Struktur Dewan Komisaris dan Direksi Board structure		
Kode Etik Code of Ethics or Conduct			
D.2.1	Apakah rincian kode etik diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	Ya Yes	722-726
D.2.2	Apakah semua Direktur/Komisaris Manajemen Senior, dan Karyawan diharuskan mematuhi kode etik tersebut? Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?	Ya Yes	725
D.2.3	Apakah Perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik? Does the company have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?	Ya Yes	724
Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Board Structure & Composition			
D.2.4	Apakah Direktur/Komisaris independen setidaknya berjumlah 50% dari Direksi/Dewan Komisaris? Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/ commissioners?	Ya Yes	130, 146

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
D.2.5	Apakah Perusahaan memiliki batasan masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun ¹ untuk Direktur/ Komisaris Independennya? 1 Masa jabatan lima tahun dipersyaratkan oleh undang-undang yang berlaku sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years ¹ each for its independent directors/ commissioners? 1 five years term must be required by legislation which pre- existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	Ya Yes	242
D.2.6	Apakah perusahaan telah menetapkan batas lima posisi dewan yang dapat dipegang oleh seorang Direktur/Komisaris Independen/Non-Eksekutif secara bersamaan? Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/ commissioner may hold simultaneously?	Ya Yes	505, 536-537
D.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat di lebih dari dua dewan perusahaan yang terdaftar di luar grup? Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?	Ya Yes	505, 536-537
Komite Nominasi Nominating Committee			
D.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi? Does the company have a Nominating Committee?	Ya Yes	596
D.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas Direktur/Komisaris Independen? Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/commissioners?	Ya Yes	602-603
D.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi adalah Direktur/ Komisaris Independen? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	Ya Yes	597
D.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan ketentuan acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	Ya Yes	597
D.2.12	Apakah kehadiran Komite Nominasi dalam rapat diungkapkan dan jika ya, apakah Komite Nominasi mengadakan rapat setidaknya dua kali dalam setahun? Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	Ya Yes	608-610
Komite Remunerasi/Komite Kompensasi Remuneration Committee / Compensation Committee			
D.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?	Ya Yes	596

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
D.2.14	Apakah Komite Remunerasi terdiri sepenuhnya dari Direktur/Komisaris Independen Non-Eksekutif dengan mayoritas Direktur/Komisaris Independen? Is the Remuneration Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	Ya Yes	596-600
D.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah Direktur/Komisaris Independen? Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?	Ya Yes	603
D.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan ketentuan acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Remuneration Committee?	Ya Yes	597
D.2.17	Apakah kehadiran Komite Remunerasi dalam rapat diungkapkan dan, jika ya, apakah Komite Remunerasi mengadakan rapat setidaknya dua kali dalam setahun? Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	Ya Yes	608-610
Komite Audit Audit Committee			
D.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit? Does the company have an Audit Committee?	Ya Yes	578
D.2.19	Apakah Komite Audit terdiri sepenuhnya dari Direktur/Komisaris Independen Non-Eksekutif dengan mayoritas Direktur/Komisaris Independen? Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	Ya Yes	582
D.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan Direktur/Komisaris Independen? Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	Ya Yes	582
D.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan ketentuan acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	Ya Yes	579-580
D.2.22	Apakah setidaknya satu Direktur/Komisaris Independen komite memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	Ya Yes	582
D.2.23	Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat setidaknya empat kali selama setahun? Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	Ya Yes	587-591
D.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk rekomendasi pengangkatan, dan pemberhentian auditor eksternal? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	Ya Yes	581
D.3	Proses Direksi dan Dewan Komisaris Board Processes		

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
D.3.1	Apakah rapat Direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun keuangan? Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	Ya Yes	587-521, 538-540
D.3.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan rapat setidaknya enam kali selama setahun? Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year?	Ya Yes	587-521, 538-540
D.3.3	Apakah masing-masing Direktur/Komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang diadakan selama tahun tersebut? Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	Ya Yes	521
D.3.4	Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimal 2/3 untuk keputusan Direksi/Dewan Komisaris? Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	Ya Yes	509, 538
D.3.5	Apakah Direktur/Komisaris Non-Eksekutif perusahaan mengadakan secara terpisah setidaknya satu kali selama setahun tanpa ada eksekutif yang hadir? Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	Ya Yes	509-521, 538-540
Akses Informasi Access to information			
D.3.6	Apakah dokumen rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada direksi dan dewan komisaris setidaknya lima hari kerja sebelum rapat direksi dan dewan komisaris? Are board papers for board of directors/ commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	Ya Yes	509-521, 538-539
D.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Does the corporate secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	Ya Yes	661
D.3.8	Apakah sekretaris perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi, atau praktik kesekretariatan perusahaan dan selalu mengikuti perkembangan yang relevan? Is the corporate secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	Ya Yes	663
Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Board Appointments and Re-Election			
D.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direksi/Komisaris baru? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	Ya Yes	476-477, 517-518
D.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses dalam pengangkatan Direksi/Komisaris baru? Did the company describe the process followed in appointing new directors/commissioners?	Ya Yes	476-477, 517-518

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
D.3.11	<p>Apakah semua Direktur/Komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan terdaftar di negara-negara yang undang-undangnya menetapkan masa jabatan 5 tahun²?</p> <p>2 Masa jabatan lima tahun dipersyaratkan oleh undang-undang yang berlaku sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011</p> <p>Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years² each?</p> <p>2 Five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011</p>	Ya Yes	477, 527-528
Remunerasi Remuneration Matters			
D.3.12	<p>Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi Direktur Eksekutif dan/atau Eksekutif Senior?</p> <p>Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?</p>	Ya Yes	458-459, 469-470, 557-562
D.3.13	<p>Apakah perusahaan memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja Direktur Eksekutif dan Eksekutif Senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan claw back dan bonus yang ditangguhkan?</p> <p>Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?</p>	Ya Yes	558
Audit Internal Internal Audit			
D.3.14	<p>Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah?</p> <p>Does the company have a separate internal audit function?</p>	Ya Yes	666-677
D.3.15	<p>Apakah kepala audit internal teridentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama kantor eksternal diungkapkan?</p> <p>Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?</p>	Ya Yes	666-677
D.3.16	<p>Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit?</p> <p>Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?</p>	Ya Yes	671
Pengawasan Risiko Risk Oversight			
D.3.17	<p>Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka manajemen risiko yang baik dan meninjau efektivitas kerangka tersebut secara berkala?</p> <p>Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?</p>	Ya Yes	678-706

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
D.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah melakukan peninjauan terhadap pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko? Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	Ya Yes	684, 685-687
D.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (misalnya keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)? Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	Ya Yes	699-702
D.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan memuat pernyataan dari Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai kelayakan pengendalian internal/sistem manajemen risiko perusahaan? Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	Ya Yes	686-687, 706
D.4	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris People on the Board		
Pimpinan Direksi dan Dewan Komisaris Board Chairman			
D.4.1	Apakah individu yang berbeda menjabat sebagai Komisaris Utama dan Direktur utama? Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	Ya Yes	236, 242
D.4.2	Apakah pimpinan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan Direktur/Komisaris Independen? Is the chairman an independent director/commissioner?	Ya Yes	222-232, 236-241
D.4.3	Apakah ada direktur yang merupakan mantan Direktur Utama perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?	Ya Yes	222-232
D.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab pimpinan Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan? Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed?	Ya Yes	479, 530
D.4.5	Jika pimpinan Direksi dan Dewan Komisaris tidak independen, apakah Direksi dan Dewan Komisaris telah menunjuk Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan? If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	Ya Yes	504, 534

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
D.5	Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Performance		
D.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk Direksi/Komisaris baru? Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners?	Ya Yes	521, 548
D.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan praktik serta program aktual yang mendorong Direktur/Komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional berkelanjutan? Does the company have a policy and actual practice and programs that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	Ya Yes	522, 549
Pengangkatan dan Kinerja Direktur Utama/Manajemen Eksekutif CEO/Executive Management Appointments and Performance			
D.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan suksesi Direktur Utama/Direktur Pelaksana/Presiden Direktur dan manajemen kunci? Does the company disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	Ya Yes	610
D.5.4	Apakah Direksi/Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direktur Utama/Direktur Pelaksana/Presiden Direktur? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	Ya Yes	121-122
Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris Board Appraisal			
D.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Ya Yes	563-565
Penilaian Direktur Director Appraisal			
D.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Ya Yes	563-565
Penilaian Komite Committee Appraisal			
D.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Komite Direksi dan Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Ya Yes	130, 146, 514, 611, 628, 644
Bonus Bonus Items			

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
(B)A.	Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of shareholders		
(B)A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan mendapatkan informasi mengenai aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	Ya Yes	449-450
(B)A.2.1	Apakah perusahaan mengumumkan pemberitahuan RUPS (dengan agenda terperinci dan edaran penjelasan), sebagaimana diumumkan kepada Bursa Efek, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat? Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting?	Ya Yes	452, 462
(B).B.	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience		
(B).B.1	Apakah perusahaan mengungkapkan cara mengelola risiko dan peluang terkait iklim? Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities?	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 160-165 Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Pages 160-165
(B).B.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutannya dijamin secara eksternal? Does the company disclose that its Sustainability Report / Sustainability Reporting is externally assured?	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 212-215 Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Pages 212-215
(B).B.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi masalah ESG dari pemangku kepentingan? Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concerns?	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 105-110 Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Pages 105-110
(B).B.1.4	Apakah perusahaan memiliki Unit/Divisi/Komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan? Does the company have a unit / division / committee who is specifically responsible to manage the sustainability matters?	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 97-100 Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Pages 97-100
(B).B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan Direksi/Dewan Komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan? Does the company disclose board of directors/ commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 102-105 Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Pages 102-105
(B).B.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi Direktur Eksekutif dan Manajemen Senior serta kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya? Does the company disclose the linkage between executive directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year?	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 93-94 Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Pages 93-94

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
(B).B.1.7	Apakah Sistem Pelaporan Pelanggaran di perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen? Is the company's Whistle Blowing System managed by independent parties / institutions?	Ya Yes	Terdapat dalam Laporan Keberlanjutan WIKA Tahun Buku 2024 Halaman 191-193 Contained in WIKA's Sustainability Report for Fiscal Year 2024 Pages 191-193
(B).C.	Pengungkapan dan transparansi Disclosure and transparency		
(B).C.1	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report		
(B).C.1.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun buku? Are the audited annual financial report /statement released within 60 days from the financial year end?	Ya Yes	318
(B).D.	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Responsibilities of the Board		
(B).D.1	Kompetensi dan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris Board Competencies and Diversity		
(B).D.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu Direktur/Komisaris Independen perempuan? Does the company have at least one female independent director/commissioner?	Ya Yes	234
(B).D.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan yang terukur untuk menerapkan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris dan melaporkan progress dalam mencapai tujuannya? Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives?	Ya Yes	572
(B).D.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Board Structure		
(B).D.2.1	Apakah Komite Nominasi terdiri sepenuhnya dari Direktur/Komisaris Independen? Is the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/commissioners?	Ya Yes	603
(B).D.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses identifikasi kualitas Direktur yang selaras dengan arahan strategis perusahaan? Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions?	Ya Yes	610
(B).D.3	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Board Appointments and Re-Election		
(B).D.3.1	Apakah perusahaan menggunakan firma rekrutmen profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti basis data Direktur yang dibuat oleh badan direktur atau pemegang saham) saat mencari kandidat untuk Direksi/Dewan Komisaris? Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/commissioners?	Ya Yes	554
(B).D.4	Struktur & Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Board Structure & Composition		

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
(B).D.4.1	Apakah Direktur/Komisaris Independen non-eksekutif membentuk lebih dari 50% dari Direksi/Dewan Komisaris untuk Perseroan dengan ketua independen? Do independent non-executive directors/commissioners make up more than 50% of the board of directors/commissioners for a company with independent chairman?	Ya Yes	554
(B).D.5	Pengawasan Risiko Risk Oversight		
(B).D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris mengidentifikasi risiko utama terkait dengan teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan? Does the company disclose that its Board identified key risk in relation to information technology including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework?	Ya Yes	404-419
(B).D.6	Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Performance		
(B).D.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko selevel direksi dan dewan yang komisaris yang terpisah? Does the company have a separate board level Risk Committee?	Ya Yes	612-629
Penalti Penalty			
(P).A.	Hak dan Perlakuan yang Adil bagi Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of shareholders		
(P).A.1	Hak-hak dasar pemegang saham Basic shareholder rights	Ya Yes	449, 751
(P).A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai memberikan perlakuan yang sama untuk pembelian kembali saham kepada semua pemegang saham? Did the company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchases to all shareholders?	Ya Yes	744 Perseroan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 02/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK 02/2013") The Company carries out share buybacks in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 02/POJK.04/2013 concerning Share Buybacks Issued by Issuers or Public Companies in Significantly Fluctuating Market Conditions ("POJK 02/2013")
(P).A.2	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diizinkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak dasar pemegang saham mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip-prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.	Ya Yes	751, 754 Pemegang saham termasuk pemegang saham institusi diperbolehkan untuk saling berkonsultasi terkait dengan pemenuhan hak-hak pemegang saham Shareholders including institutional shareholders are permitted to consult with each other regarding the fulfillment of shareholder rights

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
(P)A.2.1	Apakah ada bukti yang membatasi pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya? Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	Ya Yes	755 Tidak terdapat batasan yang mencegah adanya komunikasi antar pemegang saham There are no restrictions that prevent communication between shareholders
(P)A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan mendapatkan informasi mengenai aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.		Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (one share one vote). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting) Each share with voting rights issued has one voting right (one share one vote). Shareholders can use their voting rights when making decisions, especially when making decisions by collecting votes (voting).
(P)A.3.1	Apakah perusahaan memasukkan agenda tambahan dan yang tidak diumumkan ke dalam pemberitahuan RUPS/RUPSLB? Did the company include any additional and unannounced agenda item into the notice of AGM/EGM?	Ya Yes	452 Agenda RUPS disampaikan pada iklan pemanggilan RUPS The GMS agenda is conveyed in the GMS summon advertisement
(P)A.3.2	Apakah Pimpinan Dewan, Ketua semua Komite Dewan dan Direktur Utama tidak hadir dalam Rapat Umum terakhir? Was the Chairman of the Board and the Chairman of all Board Committees and the CEO absent from the most recent General Meeting?	Ya Yes	453, 463 Dewan Komisaris, Ketua Komite Audit dan Direksi menghadiri RUPS terakhir Board of Commissioners, Chairman of the Audit Committee and Board of Directors attended the last GMS
(P)A.4	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	Ya Yes	Semua pemegang saham WIKA memiliki hak suara yang sama All WIKA shareholders have equal voting rights

Apakah perusahaan gagal mengungkapkan:
Did the company fail to disclose the existence of:

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
(P)A.4.1	Perjanjian pemegang saham? Shareholders agreement?	Tidak No	<p>450</p> <p>Perseroan membatasi campur tangan Pemegang Saham dalam kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pengertian dalam campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Perseroan atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi.</p> <p>The Company limits the Shareholders' interference in the Company's operational activities that are the responsibility of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. The definition of interference includes actions or directions that directly or indirectly influence the Company's management actions or decision-making that is the authority of the Board of Directors.</p>
(P)A.4.2	Batas suara? Voting cap?	Tidak No	<p>778-779</p> <p>Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 ayat 4 huruf a; yang menyatakan bahwa "Para Pemegang Saham memiliki hak yang sama atas setiap 1 saham memberikan 1 hak suara". Turunan atas ketentuan Anggaran Dasar tersebut diimplementasikan melalui prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara yang terdapat dalam Tata Tertib RUPS, di mana Tata Tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi. Adapun dalam penerapannya memiliki tata cara sebagai berikut: Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.</p> <p>In accordance with the Company's Articles of Association Article 5 paragraph 4 letter a; which states that "Shareholders have the same rights for every 1 share to give 1 vote". Derivatives of the provisions of the Articles of Association are implemented through the voting procedure in making decisions on an agenda item contained in the GMS Rules of Procedure, where the GMS Rules of Procedure are given to Shareholders who are present and explained again by the GMS Chairperson at the opening of the GMS. The Company has appointed independent parties, namely the Securities Administration Bureau and Notary, to carry out the vote counting process and/or carry out validation. In its implementation, it has the following procedures: Voting is carried out after all questions have been answered and/or the question and answer time has run out. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a Shareholder owns more than 1 (one) share, then he is only asked to vote 1 (one) time and his vote represents all the shares he owns or represents.</p>

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
(P)A.4.3	Hak suara ganda? Multiple voting rights?	Tidak No	Perusahaan tidak memiliki multiple voting rights shares. The Company does not have multiple voting rights shares.
(P)A.5	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.		
(P)A.5.1	Apakah struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang terlihat jelas? Is a pyramid ownership structure and/ or cross holding structure apparent?	Tidak	Perusahaan tidak memiliki struktur kepemilikan piramida The company does not have a pyramid ownership structure.
			769
(P)A.6	Perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan wewenang harus dilarang. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.	Ya Yes	Larangan insider trading telah tertuang di dalam board manual Perseroan The prohibition on insider trading has been stated in the Company's board manual.
(P)A.6.1	Apakah ada yang pernah mendapatkan hukuman karena perdagangan orang dalam yang melibatkan Direktur/Komisaris, Manajemen, dan Karyawan dalam tiga tahun terakhir? Has there been any conviction of insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the past three years?	Ya Yes	Larangan insider trading telah tertuang di dalam board manual Perseroan The prohibition on insider trading has been stated in the Company's board manual.
			704
(P)A.7	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan penyalahgunaan Protecting minority shareholders from abusive action	Ya Yes	
			162
			386
(P)A.7.1	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, dan ketentuan yang berkaitan dengan transaksi material dengan pihak berelasi dalam tiga tahun terakhir? Protecting minority shareholders from abusive action Has there been any cases of non compliance with the laws, rules and regulations pertaining to material related party transactions in the past three years?	Tidak No	Seluruh transaksi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2024 dilakukan secara wajar (arm's length) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal. Transaksi Perseroan dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Perseroan dan bebas dari konflik kepentingan. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi seperti yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak- Pihak Berelasi dan Peraturan Bapepam dan LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" All transactions conducted by the Company in 2024 were conducted at arm's length and in accordance with normal commercial requirements. The Company's transactions were conducted based on the Company's needs and were free from conflicts of interest. The Company conducted transactions with related parties as regulated in PSAK No. 7 concerning Disclosure of Related Parties and Bapepam and LK Regulation No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 concerning "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies"

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
			386
(P)A.7.2	<p>Apakah terdapat transaksi dengan pihak berelasi yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan secara independen) kepada entitas selain perusahaan anak yang dimiliki sepenuhnya?</p> <p>Were there any RPTs that can be classified as financial assistance (i.e not conducted at arms length) to entities other than wholly- owned subsidiary companies?</p>	Tidak No	<p>Seluruh transaksi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2024 dilakukan secara wajar (arm's length) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal. Transaksi Perseroan dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Perseroan dan bebas dari konflik kepentingan. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi seperti yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak- Pihak Berelasi dan Peraturan Bapepam dan LK No.KEP- 347/ BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik"</p> <p>All transactions conducted by the Company in 2024 were conducted at arm's length and in accordance with normal commercial requirements. The Company's transactions were conducted based on the Company's needs and were free from conflicts of interest. The Company conducted transactions with related parties as regulated in PSAK No. 7 concerning Disclosure of Related Parties and Bapepam and LK Regulation No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 concerning "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies"</p>
(P)B.1	<p>Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati.</p> <p>The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.</p>	Ya Yes	<p>Tertuang dalam code of corporate governance WIKA tahun 2023-2025</p> <p>As stated in WIKA's code of corporate governance for 2023-2025</p>
(P)B.1.1	<p>Apakah pernah terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan/pekerjaan/konsumen/kepailitan/persaingan usaha atau lingkungan?</p> <p>Have there been any violations of any laws pertaining to labour/employment/ consumer/ insolvency/ commercial/competition or environmental issues?</p>	Tidak No	747, 748
(P)B.2	<p>Jika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses ke informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur.</p> <p>Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.</p>	Tidak No	321
(P)B.2.1	<p>Apakah perusahaan pernah menghadapi sanksi oleh regulator karena gagal membuat pengumuman dalam jangka waktu yang disyaratkan untuk peristiwa material?</p> <p>Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?</p>	Tidak No	<p>Perseroan tidak mendapatkan sanksi dari regulator terkait keterlambatan penyampaian informasi</p> <p>The Company did not receive any sanctions from the regulator regarding the delay in submitting information</p>
(P)B.2.2	<p>Apakah ada bukti bahwa perusahaan terlibat dalam kegiatan <i>greenwashing</i>?</p> <p>Is there any evidence that the company is engaging in greenwashing activities?</p>	Tidak No	<p>Tidak terdapat keterlibatan Perseroan dalam kegiatan <i>greenwashing</i></p> <p>There was no involvement of the Company in greenwashing activities</p>

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
(P) C.	Pengungkapan dan transparansi Disclosure and transparency		
(P)C.1	Sanksi dari regulator atas laporan keuangan Sanctions from regulator on financial reports	Tidak No	717
(P)C.1.1	Apakah perusahaan mendapatkan opini "wajar dengan pengecualian" untuk laporan audit eksternal? Did the company receive a "qualified opinion" in its external audit report?	Tidak No	Perseroan tidak mendapat opini "wajar dengan pengecualian" dari auditor eksternal The Company did not receive a "qualified opinion" from the external auditor
(P)C.1.2	Apakah perusahaan mendapatkan opini "tidak wajar" dalam laporan audit eksternal? Did the company receive an "adverse opinion" in its external audit	Tidak No	Perseroan tidak mendapat opini "tidak wajar" dari auditor eksternal The Company did not receive an "unqualified" opinion from the external auditor
(P)C.1.3	Apakah perusahaan mendapatkan opini "tidak memberi pendapat" untuk laporan audit eksternal? Did the company receive a "disclaimer opinion" in its external audit report?	Tidak No	Perseroan tidak mendapat opini "tidak wajar" dari auditor eksternal The Company did not receive an "unqualified" opinion from the external auditor
(P)C.1.4	Apakah perusahaan telah merevisi laporan keuangan tahun lalu karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi? Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	Tidak No	Perseroan tidak merevisi laporan keuangan tahun lalu The Company did not revise last year's financial statements
(P)D.	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Responsibilities of the Board	Ya Yes	Ya Yes
(P)D.1	Kepatuhan terhadap peraturan, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam pencatatan Compliance with listing rules, regulations and applicable laws	Ya Yes	wika selalu memenuhi Kepatuhan terhadap peraturan, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam pencatatan wika always fulfills Compliance with applicable regulations, provisions, and laws in recording
(P)D.1.1	Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pencatatan apa pun selain peraturan pengungkapan selama tahun terakhir? Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules over the past year?	Tidak No	perusahaan selalu mematuhi peraturan dan ketentuan pencatatan selama tahun terakhir the company always complies with the rules and provisions of recording during the last year
(P)D.1.2	Pernahkah ada contoh dimana Direktur/ Komisaris Non Eksekutif mengundurkan diri dan mengemukakan masalah yang berkaitan dengan tata kelola? Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	Tidak No	tidak pernah ada Direktur/Komisaris Non Eksekutif WIKA yang mengundurkan diri dan mengemukakan masalah yang berkaitan dengan tata kelola there has never been a Non-Executive Director/ Commissioner of WIKA who has resigned and raised issues related to governance
(P)D.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Board structure		
(P)D.2.1	Apakah Perusahaan memiliki Direktur/Non-Eksekutif/Komisaris Independen yang telah menjabat selama lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama? 1 Periode lima tahun diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Does the Company have any independent directors/commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years each (which ever is higher) in the same capacity? 1 Five years term must be required by legislation which pre-existed before the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	Tidak No	503, 533

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
(P)D.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi dengan benar deskripsi semua Direktur mereka sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif? Did the company fail to correctly identify the description of all their directors as independent, non-executive, and executive?	Tidak No	Perseroan mampu mengidentifikasi direktur/komisaris independennya The Company is able to identify its independent directors/commissioners
(P)D.2.3	Apakah perusahaan memiliki Direktur/Non-Eksekutif/Komisaris Independen yang menjabat di lebih dari lima dewan perusahaan publik? Does the company have any independent directors/non-executive/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies?	Tidak No	Perseroan tidak memiliki direktur/non eksekutif/komisaris independen yang menjabat di lebih dari lima dewan perusahaan terbuka The Company does not have any independent directors/non-executives/commissioners serving on more than five public company boards.
(P)D.3	Audit Eksternal Audit Eksternal		
(P)D.3.1	Apakah ada Direktur atau Manajemen Senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)? Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years)?	Ya Yes	Perseroan tidak memiliki direksi atau manajemen senior yang menjadi partner dari kantor akuntan publik yang melaksanakan pengauditan di tahun ini The Company does not have any directors or senior management who are partners of the public accounting firm that carried out the audit this year.
(P)D.4	Struktur dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Board structure and composition		
(P)D.4.1	Apakah pimpinan dewan pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Has the chairman been the company CEO in the last three years?	Tidak No	Direktur Utama Perseroan tidak pernah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir The Company's President Director has never been the company's CEO in the last three years.
(P)D.4.2	Apakah Direktur/Komisaris Non-Eksekutif menerima opsi, saham kinerja, atau bonus? Do non-executive directors/commissioners receive options, performance shares or bonuses?	Ya Yes	562

No.	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders	Keterangan Penyajian Description	Halaman Page
Apakah pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam: Do shareholders have the right to participate in:			
A.2.1	Perubahan pada anggaran dasar perusahaan? Amendments to the company's constitution?	Ya Yes	449-450
A.2.2	Otorisasi penambahan saham? The authorisation of additional shares?	Ya Yes	449-450
A.2.3	Pengalihan semua atau sebagian besar aset, yang pada dasarnya mengakibatkan penjualan perusahaan? The transfer of all or substantially all assets, which in effect results in the sale of the company?	Ya Yes	449-450
B.1.1	Apakah saham biasa perusahaan memiliki satu suara untuk satu saham? Does the company's ordinary or common shares have one vote for one share?	Ya Yes	449-450
B.3.1	Apakah Perusahaan memiliki kebijakan dan/atau aturan yang melarang Direktur/Komisaris dan karyawan untuk mendapatkan manfaat dari pengetahuan yang umumnya tidak tersedia di pasar? Does the company have policies and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge which is not generally available to the market?	Tidak No	451
B.4.1	Apakah Perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan Direktur/Komisaris untuk mengungkapkan kepentingan mereka dalam transaksi dan konflik kepentingan lainnya? Does the company have a policy requiring directors/commissioners to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest?	Ya Yes	526
D.2.6	Rincian kehadiran masing-masing Direktur/Komisaris dalam semua rapat Direktur/Komisaris yang diadakan selama tahun tersebut Attendance details of each director/commissioner in all directors/commissioners meetings held during the year	Ya Yes	521, 546-547

Penerapan 8 (Delapan) Prinsip Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021

Implementation of 8 (Eight) Principles of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) 2021

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners		
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of Board of Directors		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.11	<p>Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (<i>corporate resilience</i>) <p>To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out the leadership role and seeks to achieve the following governance outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> competitive and focused on long-term performance; ethical and responsible in conducting business; contribute positively to society and the environment; as well as ability to survive and grow (<i>corporate resilience</i>) 	Diterapkan Apply	Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (<i>Board Manual</i>) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang telah dimutakhirkan secara berkala. As stated in the Board of Directors and Board of Commissioners Work Procedure Guidelines (<i>Board Manual</i>) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, which has been updated regularly.
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
1.12	<p>Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.</p> <p>Board of Directors must ensure that the corporate mission, vision, goals, objectives, strategies and annual and mid-term plans are consistent with long-term goals, by making effective use of innovation and technology.</p>	Diterapkan Apply	Tertuang dalam penjelasan Visi dan Misi Perseroan Contained in the explanation of the Company's Vision and Mission

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 3 & 4 Recommendation 3 & 4			
1.13	<p>Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.</p> <p>Board of Directors ensures that the corporate implements an appropriate and effective risk management and internal control system that is aligned with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies and complies with applicable law regulations and standards.</p>	<p>Diterapkan Apply</p>	<p>Untuk memastikan nya Direksi telah mengeluarkan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur serta instruksi Kerja Manajemen Risiko , di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Manrisk WIKA-SMR-QM-01.01; Rev.04, tanggal 30 Juni 2021 2. Prosedur Sistem Manrisk WIKA-SMR-PM-01.01; Rev 05, tanggal 1 Nov 2022 3. IK Pelaporan Manrisk; WIKA-SMR-IK-02.02, Rev. 02, tanggal 1 Mei 2022 4. IK Kamus Risiko; WIKA-SMR-IK-02.01,Rev.02, tanggal 1 Mei 2022 5. IK Pengukuran Risk Maturity Level;Rev.02 WIKA-SMR- IK-02.03, tanggal 1 Mei 2022 <p>Untuk penguatan implementasi Manajemen Risiko, Direksi melakukan perubahan organisasi Divisi Manajemen Risiko sesuai SKSO Divisi Manajemen Risiko Nomor SK.01.01/A. DIR.01738/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Susunan Organisasi Divisi Manajemen Risiko PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.</p> <p>Direksi juga berupaya untuk mematuhi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada BUMN, serta ketentuan lain yang tidak bertentangan.</p> <p>To ensure that the Board of Directors issued policies, guidelines and procedures as well as work instructions for the risk management, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guidelines for Risk Management System WIKA-SMR-QM-01.01; Rev.04, June 30, 2021 2. WIKA-SMR-PM-01.01 Risk Management System Procedure; Rev 05, November 1, 2022 3. Risk Management Reporting IK; WIKA-SMR- IK-02.02, Rev. 02, May 1, 2022 4. Risk Dictionary IK; WIKA-SMR-IK-02.01, Rev.02, May 1 2022 5. Risk Maturity Level Measurement IK; Rev.02 WIKA-SMRIK-02.03, May 1, 2022 <p>To strengthen the implementation of Risk Management, Board of Directors made changes to the Risk Management Division organization in accordance with the Risk Management Division SKSO Number SK.01.01/A. DIR.01738/2023 dated December 1, 2023 concerning the Organizational Structure of Risk Management Division of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.</p> <p>Board of Directors also strives to comply with the Minister of SOE Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning the Implementation of Risk Management in SOEs, as well as other provisions that do not conflict.</p>

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.14	<p>Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.</p> <p>Board of Directors ensures the integrity of corporate accounting and financial reporting system and the timely and accurate disclosure of all material information about the corporate.</p>	Diterapkan Apply	<p>Perseroan mematuhi keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-346/BL/2011 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Terbuka. Selain itu, Laporan Keuangan Perseroan senantiasa diaudit oleh auditor independen, yaitu Kantor Akuntan Publik, sehingga pelaporan keuangan Perseroan dan pengungkapannya tepat waktu dan akurat atas semua informasi yang material tentang Perseroan.</p> <p>The Company complies with the Decree of the Chairperson of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. KEP-346/BL/2011 of 2011 which was amended by Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 dated August 22, 2022 concerning the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Open Companies. Moreover, the Company always audits financial statements through independent auditors, namely the public accounting firm, so that the Company's financial reporting and disclosure are on time and accurately over the material information concerning the Company</p>

Rekomendasi 5 Recommendation 5

1.15	<p>Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.</p> <p>Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared properly</p>	Diterapkan Apply	<p>Laporan Keberlanjutan WIKA disusun berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta GRI Standards 2021. Selain itu, WIKA juga melakukan pelaporan keuangan program pendanaan Usaha Mikro dan Kecil, yang kemudian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, untuk kemudian dilaporkan dan disahkan dalam RUPS.</p> <p>WIKA drafted Sustainability Report according to FSA Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies as well as the 2021 GRI Standards. Moreover, WIKA also reports financial of the Micro and Small Business funding program, which is then audited by Public Accounting Firm, to be further reported and ratified in the GMS</p>
------	--	---------------------	---

Rekomendasi 6 Recommendation 6

1.16	<p>Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.</p> <p>Board of Directors establish a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.</p>	Diterapkan Apply	<p>WIKA telah memiliki kebijakan Pengamanan Informasi, Pedoman TI, dan Prosedur TI yang disusun berdasarkan ISO 27001, ISO 20000 dan Framework COBIT. WIKA telah memiliki Master Plan TI untuk 5 tahunan dan diperbaharui secara berkala setiap tahun. Master Plan TI disusun berdasarkan Framework TOGAF.</p> <p>WIKA already has policy in securing information, IT guidelines, and IT procedures compiled based on ISO 27001, ISO 20000 and COBIT framework. WIKA already has Master Plan for 5 years and it is updated regularly every year. Master Plan IT is arranged based on TOGAF framework.</p>
------	---	---------------------	---

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 7, 8 & 9 Recommendation 7, 8 & 9			
1.17	<p>Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.</p> <p>For corporates that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting tools so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.</p>	Diterapkan Apply	<p>Perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>The Company does not carry out business activities based on sharia principles.</p>
1.18	<p>Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.</p> <p>The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles for the Directors individually which can be regulated in the Board of Directors Charter or by a decision letter of Board of Directors.</p>	Diterapkan Apply	<p>Tertuang dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk secara berkala. • Surat Keputusan Direksi No. SK.01.01/A.DIR.00760/2023 tentang SK Tugas dan Wewenang Direksi PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. <p>Stipulated in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Board Manual of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk periodically. • Decree of the Board of Directors No. SK.01.01/A.DIR.00760/2023 concerning the Decree on the Duties and Authorities of Board of Directors of PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
1.19	<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.</p> <p>Board of Directors has a policy regarding the resignation of a member of Board of Directors if they are involved in a financial crime and are proven to have made a mistake.</p>	Diterapkan Apply	<p>Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman GCG Perseroan.</p> <p>As stated in the Company's Articles of Association and GCG guidelines.</p>
1.2 Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya Performance Appraisal – Board of Directors and Members			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.21	<p>Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur.</p> <p>Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of Board of Directors and each individual director.</p>	Diterapkan Apply	<p>Hasil evaluasi Direksi dan individu Direksi menjawab untuk direkomendasikan atau tidak untuk meneruskan jabatannya secara individu.</p> <p>The evaluation results of the directors and individual directors addressed whether to be recommended or not to continue their positions individually.</p>
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
1.22	<p>Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.</p> <p>Board of Commissioners, with the consideration of Remuneration and Nomination Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of President Director and other members of Board of Directors.</p>	Diterapkan Apply	<p>Kriteria evaluasi sudah mempertimbangkan usulan Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG ("KNRG") dan mengikuti surat dari Deputi bidang SDM, Teknologi dan Informasi Nomor S-34/DSI.MBU/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Updating Talent Pool Direksi BUMN.</p> <p>The evaluation criteria have considered the Nomination, Remuneration and GCG Committee ("KNRG") proposal and followed the letter from the Deputy for Human Capital, Technology and Information Number S-34/ DSI.MBU/02/2023 dated February 10, 2023 concerning the Updating Talent Pool of SOE Board of Directors.</p>

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Board of Commissioners Roles and Responsibilities			
Rekomendasi 1, 2, 3, 4, 5 & 6 Recommendation 1, 2, 3, 4, 5 & 6			
1.31	<p>Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.</p> <p>Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the corporate mission, vision and strategy formulated by the Board of Directors. Board of Commissioners also reviews, advise and approve the business plans and long-term financial plans and corporate short-term financial plans. Board of Commissioners advise and monitor the Directors on their implementation management. Board of Directors and Board of Commissioners are involved in decisions that are very important for the corporate, regulated in the corporate articles of association.</p>	Diterapkan Apply	<p>Hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman GCG, dan <i>Board Manual</i> WIKA.</p> <p>This is part of the duties and responsibilities of Board of Commissioners as stated in the Company's Articles of Association, GCG Guidelines, and WIKA's Board Manual.</p>
1.32	<p>Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.</p> <p>The types of decisions that require the Board of Commissioners' approval must be disclosed in the annual report.</p>	Diterapkan Apply	<p>Telah diinformasikan dalam Laporan Tahunan pada Bab GCG, pembahasan Dewan Komisaris.</p> <p>Has been informed in this Annual Report in the GCG Chapter, discussion of the Board of Commissioners.</p>
1.33	<p>Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.</p> <p>By taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, Board of Commissioners proposes to, and to be decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners. In proposing the above, Board of Commissioners pays attention to diversity, nondiscriminatory elements and provides equal opportunities without distinguishing ethnicity, religion, race, intergroup and gender. Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of Board of Directors and members of Board of Commissioners is formal and transparent.</p>	Diterapkan Apply	<p>Rekomendasi ini dilakukan setiap tahun dan merupakan hal yang diminta oleh pemegang saham.</p> <p>This recommendation is made every year and requested thing by the shareholders.</p>
1.34	<p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.</p> <p>Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function formulates a succession policy in the process of nominating members of Board of Directors. Board of Commissioners review report on the implementation of development and succession plan submitted by the President Director in every year.</p>	Diterapkan Apply	<p>Hal ini tertuang dalam kebijakan Dewan Komisaris Nomor: 126/DK/WIKA/2019 tanggal 20 Desember 2019. Pada setiap tahunnya dilakukan pembahasan dengan Direksi dalam rapat Dewan komisaris.</p> <p>It is stipulated in the policy of the Board of Commissioners Number: 126/DK/WIKA/2019 dated 20 December 2019. Annually discussions are held by the Board of Directors in the Board of Commissioners meetings.</p>
1.35	<p>Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; Secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. <p>Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> submit to the GMS, which may be preceded by a recommendation from the Committee that carries out the remuneration function, the amount of remuneration for members of Board of Directors and members of Board of Commissioners in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporate and shareholders; periodically reviewing the remuneration system for the Board of Directors and the Board of Commissioners. 	Diterapkan Apply	<ul style="list-style-type: none"> Hasil reviu KNRG dan usulan manajemen disampaikan pada Dewan Komisaris yang kemudian menjadi usulan kepada RUPS/ Pemegang saham seri A. Bahan usulan didapatkan dari manajemen dan dilakukan diskusi dengan KNRG setiap tahun sekali. The KNRG review results and management proposals are submitted to the Board of Commissioners which then becomes a recommendation to the GMS/Series A shareholders. Proposal materials are obtained from management and held in discussion with KNRG once a year.

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.3.6	<p>Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.</p> <p>aBoard of Commissioners supervise the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.</p>	<p>Diterapkan Apply</p>	<p>Permintaan laporan pelaksanaan kepatuhan atas aturan baru dari manajemen. Kemudian ditindaklanjuti oleh KNRG dalam bentuk rapat. Apabila ada isu yang berisiko disampaikan menjadi agenda rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi.</p> <p>Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019.</p> <p>Request a report on the implementation of compliance with the new rules from management. Then it was followed up by the KNRG in the form of a meeting. If there are risky issues, they will be submitted to the agenda of the Board of Commissioners meeting attended by the Board of Directors. This is stated in the Board of Commissioners' Policy, Number: 103/DK/WIKA/2019 dated 04 October 2019.</p>
<p>Rekomendasi 7 Recommendation 7</p>			
1.3.7	<p>Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.</p> <p>Board of Commissioners monitors and directs corporates to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with corporate goals, objectives and strategies and comply with laws and regulations, codes of conduct and applicable standards.</p>	<p>Diterapkan Apply</p>	<p>Hal ini tertuang dalam kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 126/DK/WIKA/2019 tanggal 20 Desember 2019.</p> <p>Melalui rapat KNRG dilakukan pembahasan dengan divisi terkait/ yang membidangi.</p> <p>Apabila ada isu yang berisiko akan disampaikan menjadi agenda rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi.</p> <p>It is stipulated in the policy of the Board of Commissioners, Number: 126/DK/WIKA/2019 dated 20 December 2019.</p> <p>Through the KNRG meeting, discussions were held with the relevant divisions/in charge.</p> <p>If there are risky issues, they will be submitted to the agenda of the Board of Commissioners meeting attended by the Board of Directors.</p>
<p>Rekomendasi 8 Recommendation 8</p>			
1.3.8	<p>Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.</p> <p>Board of Commissioners supervises and direct the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.</p>	<p>Diterapkan Apply</p>	<p>Hal ini tertuang dalam kebijakan Dewan Komisaris Nomor: 126/DK/WIKA/2019 tanggal 20 Desember 2019.</p> <p>Melalui rapat Komite Audit ("KA") dilakukan pembahasan dengan divisi terkait/ yang membidangi.</p> <p>Apabila ada isu yang berisiko akan disampaikan menjadi agenda rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi.</p> <p>It is stipulated in the policy of the Board of Commissioners, Number: 126/DK/WIKA/2019 dated 20 December 2019.</p> <p>Through the Audit Committee ("KA") meeting, discussions were held with the relevant divisions/in charge.</p> <p>If there are risky issues, they will be submitted to the agenda of the Board of Commissioners meeting attended by the Board of Directors.</p>
<p>Rekomendasi 9,10,11 & 12 Recommendation 9, 10, 11 & 12</p>			
1.3.9	<p>Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.</p> <p>Board of Commissioners monitors, reviews and approves the annual report and corporate sustainability report and ensures their integrity, and supervise the process of corporate disclosure and communication.</p>	<p>Diterapkan Apply</p>	<p>Hal ini tertuang dalam kebijakan Dewan Komisaris Nomor: 126/DK/WIKA/2019 tanggal 20 Desember 2019.</p> <p>Melalui rapat KA dilakukan pembahasan dengan divisi terkait/ yang membidangi.</p> <p>Apabila ada isu yang berisiko akan disampaikan menjadi agenda rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi.</p> <p>It is stipulated in the policy of the Board of Commissioners, Number: 126/DK/WIKA/2019 dated 20 December 2019.</p> <p>Through the KA meeting, discussions were held with the relevant divisions/in charge.</p> <p>If there are risky issues, they will be submitted to the agenda of the Board of Commissioners meeting attended by the Board of Directors.</p>

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. Board of Commissioners charter is periodically reviewed.	Diterapkan Apply	Reviu piagam Dewan Komisaris termasuk organ dilakukan secara periodik minimal 3 (tiga) tahun sekali. Review of the Board of Commissioners charter including organs is conducted periodically at least once every 3 (three) years.
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Commissioners if they are involved in a financial crime and are proven to have made a mistake.	Diterapkan Apply	Mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Follow the applicable legal provisions.
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at the Board of Commissioners meetings.	Diterapkan Apply	Tercantum dalam ketentuan <i>Board Manual</i> dan ketentuan hukum korporasi. Stated in the Board Manual and provisions of corporate law.

Rekomendasi 13

Recommendation 13

1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialog that allows a wide range of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. In addition, there should also be opportunities for Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	Diterapkan Apply	Tercantum dalam ketentuan <i>Board Manual</i> dan Tata Cara Rapat Dewan Komisaris. Stated in the provisions of Board Manual and Board of Commissioners Meeting Procedures.
--------	---	---------------------	---

Panduan Manual

1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi. Details of the President Commissioner duties are disclosed in the annual report and corporate website.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Laporan Tahunan pada Bab GCG, Sub Bab Dewan Komisaris, pembahasan Rapat Dewan Komisaris. Stated in the Annual Report in Chapter GCG, SubChapter of the Board of Commissioners, Discussion of the Board of Commissioners Meeting.
1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. President Commissioner coordinates the division of supervisory roles among the members of Board of Commissioners, presides over Board of Commissioners meetings and represents the Board of Commissioners in dealings with external parties.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam keputusan Dewan Komisaris, Nomor: 85/DK/WIKA/2021 tanggal 01 Oktober 2021. Stipulated in the Board of Commissioners decision, Number: 85/DK/WIKA/2021 dated October 01, 2021.
1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris Utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan. Former President Directors and members of Board of Directors who are elected as members of Board of Commissioners cannot be directly appointed as President Commissioner. There is a 2 (two) year gap to be re-appointed as President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that a former President Director/Member of Board of Directors should be appointed as President Commissioner, the Board of Commissioners shall provide reasons and explanations in the Annual Report.	Diterapkan Apply	Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan No 5 Tanggal 4 Februari 2022. As stated in the Company's Articles of Association No. 5 dated February 4, 2022.

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.4 Pembentukan Komite Committee Formation			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.4.1	<p>Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.</p> <p>The Corporate has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee and Risk Management Monitoring Committee.</p>	Diterapkan Apply	<p>Dewan Komisaris WIKA telah membentuk Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai pelaksanaan ketentuan permen BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>WIKA's Board of Commissioners has established an Audit Committee, Nomination, Remuneration and GCG Committee, Risk Monitoring Committee and Integrated Governance as the implementation of provisions of the Minister of SOE Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.</p>
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
1.4.2	<p>Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.</p> <p>Board of Commissioners ensures that all members of Audit Committee are independent and other committees formed by the Board of Commissioners are the majority of independent parties, and all members of committee are competent, committed, and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan termasuk mengenai masa jabatan.</p> <p>Implementation has been carried out in accordance with the provisions including regarding the term of office.</p>
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
1.4.3	<p>Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.</p> <p>To ensure objective and independent monitoring of the Audit Committee's duties, President Commissioner may not be the chairman of Audit Committee, except in exceptional circumstances which must be explained in the annual report.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Implementation has been carried out in accordance with the provisions.</p>
1.5 Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Appraisal - Board of Commissioners and Members			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.5.1	<p>Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris.</p> <p>Board of Commissioners conducts an annual formal objective evaluation to determine the effectiveness of Board, Committees and each individual commissioner.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan.</p> <p>Implementation has been carried out in accordance with the provisions.</p>
1.6 Benturan Kepentingan Conflict of Interest			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.6.1	<p>Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai Direktur atau Komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.</p> <p>Board of Directors Members who have concurrent positions outside the corporate must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chairman of committee carrying out the nomination function, before accepting a new appointment as a director or commissioner of a publicly listed corporate, other directorships or other positions with significant time commitments.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Saat ini tidak ada yang menjalani rangkap jabatan.</p> <p>Implementation has been carried out in accordance with the provisions. Currently, no one is serving concurrent positions.</p>

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
1.6.2	<p>Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.</p> <p>Board of Commissioners monitors and manages the potential of conflicts of interest for management, members of Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have conflicts of interest do not participate in monitoring and making decisions on potential conflicts of interest involving Commissioners or Affiliation of the Commissioner concerned.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Ada penandatanganan Piagam Benturan Kepentingan yang dilakukan pembaharuan setiap tahun.</p> <p>Implementation has been carried out in accordance with the provisions. There is a signed Conflict of Interest Charter that is renewed every year.</p>
1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Competency Development for Board of Directors and Board of Commissioners Members			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.7.1	<p>Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.</p> <p>Board of Commissioners ensures that members of Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics and operations of the corporate, relevant laws and regulations and other applicable standards and obligations. Board of Directors through Corporate Secretary supports all members of Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their role on the Board.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Anggaran Dewan Komisaris salah satunya tentang pelatihan untuk peningkatan dan penyegaran pengetahuan.</p> <p>Implementation has been carried out according to the provisions. One of the Board of Commissioners' budget is about training to increase and refresh knowledge.</p>
2 Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners Composition and Remuneration			
2.1 Komposisi Direksi Board of Directors Composition			
Rekomendasi 1 & 2 Recommendation 1 & 2			
2.1.1	<p>Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.</p> <p>In determining candidates for directors, Board of Commissioners through the Remuneration and Nomination Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. Board of Commissioners through the Remuneration and Nomination Committee can use independent sources to determine qualified candidates.</p>	Diterapkan Apply	<p>Dilakukan rapat khusus pada KNRG untuk melakukan validasi atas usulan yang disampaikan Dewan Komisaris, manajemen dan pemegang saham mayoritas. Hasilnya diberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019.</p> <p>A special meeting was held at the KNRG to validate the proposals submitted by the Board of Commissioners, management and majority shareholders. The results are provided the recommendations to the Board of Commissioners. This is stipulated in the Board of Commissioners' Policy, Number: 103/DK/WIKA/2019 dated October 4, 2019.</p>
2.1.2	<p>Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.</p> <p>Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of Board of Directors include at least the knowledge, skills, and expertise required to appropriately fulfill the role of Directors and take into account the diversity of Board of Directors.</p>	Diterapkan Apply	<p>Kriteria evaluasi sudah mempertimbangkan usulan KNRG dan mengikuti surat dari Deputi bidang SDM, Teknologi dan Informasi Nomor S-34/DSI.MBU/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Updating Talent Pool Direksi BUMN. Usul KNRG kemudian menjadi dasar Dewan Komisaris sekaligus memastikan hal strategik terakomodir, misalnya keberagaman Direksi.</p> <p>The evaluation criteria have considered the KNRG's proposal and follow the letter from the Deputy for Human Capital, Technology and Information Number S-34/DSI.MBU/02/2023 dated February 10, 2023 concerning the Updating Talent Pool of SOE Directors. The KNRG proposal then becomes the basis for Board of Commissioners while ensuring that strategic matters are accommodated, such as the Board of Directors' diversity.</p>

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
2.13	<p>Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.</p> <p>The Corporate policy regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.</p>	Diterapkan Apply	<p>Mengacu pada lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan tertuang dalam Laporan Tahunan serta Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (<i>Board Manual</i>) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 41/DK/WIKA/2021 dan Nomor: SK.02.09/A.DIR.0617/2021.</p> <p>Referring to attachment SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 Concerning Guidelines for Governance of Public Companies and contained in the Annual Report and the Board of Directors and Board of Commissioners Board Manual of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. updated based on Joint Decree Number: 41/DK/WIKA/2021 and Number: SK.02.09/A.DIR.0617/2021.</p>
Rekomendasi 4 Recommendation 4			
2.14.	<p>Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.</p> <p>Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired composition of the Board. Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.</p> <p>Implementation has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the majority shareholder.</p>
Rekomendasi 5 & 6 Recommendation 5 & 6			
2.15.	<p>Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.</p> <p>Board of Commissioners/Committee that performs the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix that has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the expertise matrix and nomination criteria.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.</p> <p>Implementation has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the majority shareholder.</p>
2.16.	<p>Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners composition should be such that its members as a group reflect the diversity in terms of skills, expertise, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to appropriately fulfill the role of Board of Commissioners.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.</p> <p>Implementation has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the majority shareholder.</p>
Panduan Manual			
2.1.6.1.	<p>Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi.</p> <p>At least one Commissioner has previous experience in the main sector where the corporate operates.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.</p> <p>Implementation has been carried out in accordance with the provisions. This process is carried out by the majority shareholder.</p>
2.1.6.2.	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi.</p> <p>Determination of the number of Board of Commissioners members consider the corporation's condition.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.</p> <p>Implementation has been carried out in accordance with the provisions. This process is carried out by the majority shareholder.</p>

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 7 Recommendation 7			
2.1.7.	<p>Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.</p> <p>To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with term limits and disclosure of the term of membership of Board of Commissioners and their independence from a corporate perspective.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Dewan Komisaris melakukan supervisi dan penasehatan dalam rapat Dewan Komisaris yang menghadirkan Direksi.</p> <p>Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019.</p> <p>Implementation has been carried out in accordance with the provisions. Board of Commissioners supervises and advises in the Board of Commissioners meeting which presents the Board of Directors.</p> <p>This is stated in the Board of Commissioners Policy, Number: 103/DK/WIKA/2019 dated October 04, 2019.</p>
Rekomendasi 8 Recommendation 8			
2.1.8.	<p>Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris</p> <p>To facilitate the effective functioning of Boards of Directors and Board of Commissioners and to enhance investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous and transparent process for the appointment and removal of members of Boards of Directors and Board of Commissioners.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG dengan bahan dari manajemen. Penentuan kriteria dibuat transparan dan mengikuti ketentuan yang ada.</p> <p>Implementation has been carried out according to the provisions. This process is carried out by Nomination, Remuneration and GCG Committee with materials from management. Determination of criteria is made transparent and follows existing regulations.</p>
2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
2.2.1.	<p>Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.</p> <p>The remuneration policy for Board of Directors members consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The Board of Directors' remuneration must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of Board of Directors and the economic situation and corporate performance.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh KNRG dalam rapat khusus, dengan materi dari manajemen yang melibatkan konsultan independen, jika diperlukan. Hasilnya usulan remunerasi kepada pemegang saham seri A.</p> <p>Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019.</p> <p>Implementation has been carried out according to the provisions. This process is conducted by the KNRG in a special meeting, with material from management involving independent consultants, if required.</p> <p>The result is a remuneration proposal to the series A shareholders. It is stated in the Board of Commissioners Policy, Number: 103/DK/WIKA/2019 dated October 04, 2019.</p>
Panduan Manual			
2.2.1.1.	<p>Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat.</p> <p>The remuneration policy is reasonable and fair, both in structure and size, and is determined in the context of corporate values, internal reward structures, and encourages competition while remaining sensitive to stakeholder expectations and societal norms.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh KNRG dalam rapat khusus, dengan materi dari manajemen yang melibatkan konsultan independen, jika diperlukan. Hasilnya usulan remunerasi kepada pemegang saham seri A.</p> <p>Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019.</p> <p>Implementation has been carried out according to the provisions. This process is conducted by the KNRG in a special meeting, with material from management involving independent consultants, if required. The result is a remuneration proposal to the series A shareholders. It is stated in the Board of Commissioners Policy, Number: 103/DK/WIKA/2019 dated October 04, 2019.</p>

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
2.2.12.	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (<i>clawback</i>). The corporate has a remuneration policy for members of Board of Directors that is performance-based and aligned with the achievement of the long-term interests of the corporate, such as performance measures as follows: share ownership options, deferred bonuses, provision for returning part or all of bonuses/incentives that have been paid (<i>clawback</i>).	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh KNRG dalam rapat khusus, dengan materi dari manajemen yang melibatkan konsultan independen, jika diperlukan. Hasilnya usulan remunerasi kepada pemegang saham seri A. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019. Implementation has been carried out according to the provisions. This process is conducted by the KNRG in a special meeting, with material from management involving independent consultants, if required. The result is a remuneration proposal to the series A shareholders. It is stated in the Board of Commissioners Policy, Number: 103/DK/WIKA/2019 dated October 04, 2019.
2.2.13.	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. Board of Directors does not receive other facilities other than the facilities that have been provided based on the Corporate General Meeting of Shareholders.	Diterapkan Apply	Penetapan Remunerasi dan Fasilitas untuk Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. The determination of Remuneration and Facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 as amended by the Minister of SOEs Regulation No. PER-13/MBU/09/2021 concerning guidelines for determining the income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs.

Rekomendasi 2 Recommendation 2

2.2.2.	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and promotes long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. In addition, the position of President Commissioner and chairman as well as the membership in committees must also be considered.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh KNRG dalam rapat khusus, dengan materi dari manajemen yang melibatkan konsultan independen, jika diperlukan. Hasilnya usulan remunerasi kepada pemegang saham seri A. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019. Implementation has been carried out according to the provisions. This process is conducted by the KNRG in a special meeting, with material from management involving independent consultants, if required. The result is a remuneration proposal to the series A shareholders. It is stated in the Board of Commissioners Policy, Number: 103/DK/WIKA/2019 dated October 04, 2019.
--------	---	---------------------	---

Rekomendasi 3 Recommendation 3

2.2.3.	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the achievements, qualifications and competencies of the directors and commissioners with due regard to corporate operating performance, individual performance and market conditions, the Remuneration and Nomination Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing remuneration policies for members of Board of Directors and Board of Commissioners.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh KNRG dalam rapat khusus, dengan materi dari manajemen yang melibatkan konsultan independen, jika diperlukan. Hasilnya usulan remunerasi kepada pemegang saham seri A. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019. Implementation has been carried out according to the provisions. This process is conducted by the KNRG in a special meeting, with material from management involving independent consultants, if required. The result is a remuneration proposal to the series A shareholders. It is stated in the Board of Commissioners Policy, Number: 103/DK/WIKA/2019 dated October 04, 2019.
--------	---	---------------------	---

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
3.	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Working Relationship between Board of Directors and Board of Commissioners		
3.1	Sifat Hubungan Kerja Working Relations Characteristic		

Rekomendasi 1, 2 & 3 Recommendation 1, 2 & 3

3.1.1	<p>Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.</p> <p>There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as between members of Board of Directors and members of Board of Directors and members of Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to avoid leakage of confidential information.</p>	Diterapkan Apply	<p>Hal yang sifatnya khusus dan rahasia dibuat dalam Rapat Dewan Komisaris khusus.</p> <p>Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019.</p> <p>Matters of a special and confidential nature are made in a special Board of Commissioners meeting.</p> <p>It is stipulated in the Board of Commissioners' Policy, Number: 103/DK/WIKA/2019 dated October 4, 2019.</p>
3.1.2	<p>Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.</p> <p>In accordance with their respective duties and roles, Board of Directors works closely with Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan tertuang dalam board manual Perseroan.</p> <p>The implementation has been carried out in accordance with the provisions and is contained in the Company's Board Manual.</p>
3.1.3	<p>Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of working relationship between Board of Directors and Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.</p>	Diterapkan Apply	<p>Tertuang dalam:</p> <p>Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (<i>Board Manual</i>) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan secara berkala.</p> <p>Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Code of GCG</i>) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2023-2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.01.09/ADIR.01531/2023</p> <p>Stipulated in:</p> <p>Board Manual of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. which has been updated regularly.</p> <p>Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (<i>Code of GCG</i>) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 2023-2025, which has been updated based on Board of Directors Decree Number: SK.01.09/ADIR.01531/2023</p>

3.2 Akses informasi Dewan Komsaris Access to information on the Board of Commissioners

Rekomendasi 1 Recommendation 1

3.2.1	<p>Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.</p> <p>Board of Directors is responsible for ensuring that Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. Board of Commissioners itself ensures that it is properly informed. Board of Directors provides information to Board of Commissioners regularly, without delay and in a comprehensive manner on all matters relevant to the corporate. Board of Commissioners may at any time request Board of Directors to provide additional information.</p>	Diterapkan Apply	<p>Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan tertuang dalam board manual serta <i>code of conduct</i> perseroan.</p> <p>Implementation has been carried out according to the provisions and contained in the Company's board manual and code of conduct.</p>
-------	--	---------------------	---

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
3.3 Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structures on Corporate			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. Impact of ownership structure on the Corporation. Boards of Directors and Boards of Commissioners consider their responsibilities in the context of the corporation's shareholding structure and inter-shareholder relationships that may impact the management and operation of the corporation.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan tertuang dalam <i>board manual</i> Perseroan Implementation has been carried out according to the provisions and contained in the Company's board manual.
4. Perilaku Etis dan bertanggung jawab Ethical and responsible behavior			
4.1.1 Pernyataan ini dituangkan dalam This statement is stated in			
Rekomendasi 1 & 2 Recommendation 1 & 2			
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; 2. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; 3. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; 5. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; 6. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; 7. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. 8. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. 9. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. 10. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. 11. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. 	Diterapkan	Tertuang dalam <i>Code of Conduct</i> Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.02.09/ADIR.01288/2023

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
	<p>This statement is set forth in the Code of Business Conduct and Ethics which must clearly state the corporate expectation that each member of Board of Directors and Board of Commissioners and employees will:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Act in the best interests of the corporate; 2. Act honestly and with a high standard of integrity; 3. Be independent and act on full information, in good faith, with due diligence and prudence. 4. Comply with laws and regulations that apply to corporates and their operations; 5. Avoiding actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethics guidelines; 6. Not involved or participating in any activities that will cause a conflict of interest with the best interests of the corporate or which will have a negative impact on the corporate reputation; 7. Do not take advantage of property or information owned by the corporate, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes harm to the corporate and its customers. 8. Does not take advantage of his position or opportunities generated by his position for personal gain. 9. Avoiding the act of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for themselves or for other people that cause conflicts of interest/give benefits to third parties in violation of laws and regulations. 10. Respect differences of opinion and the rights of each member of Board of Directors, Board of Commissioners and employees. 11. Ensure the complete, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporate to regulators and in other public communications 	Apply	Stipulated in the PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Code of Conduct which has been updated based on Decree Number: SK.02.09/A.DIR.01288/2023.
4.1.2	<p>Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. Board of Directors establishes policies and practices on anti-money laundering and financing of terrorism, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, political involvement with reference to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.</p>	Diterapkan Apply	<p>Tertuang dalam code of conduct Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.02.09/A.DIR.01288/2023.</p> <p>Stipulated in the PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Code of Conduct which has been updated based on Decree Number: SK.02.09/A.DIR.01288/2023.</p>
4.2 Nilai – nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
4.2.1	<p>Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi Corporations articulate, foster and express corporate culture and values</p>	Diterapkan Apply	<p>Penerapan nilai-nilai dan budaya AKHLAK dalam seluruh kegiatan pekerjaan oleh seluruh pegawai Perusahaan yang telah diawali oleh sosialisasi penerapan AKHLAK yang diberikan langsung oleh Direktur <i>Human Capital</i> dan Pengembangan Perusahaan</p> <p>The implementation of AKHLAK values and culture in all work activities by all employees of the Company which has been initiated by the socialization of AKHLAK implementation given directly by the Director of Human Capital and Corporate Development.</p>
4.3 Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Code of Ethics, Values and Culture			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
4.3.1	<p>Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. Code of conduct and corporate code of ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including risk management system and remuneration structure, and enforced</p>	Diterapkan Apply	<p>Tertuang dalam <i>code of conduct</i> Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.02.09/A.DIR.01288/2023 Pakta Integritas Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Pernyataan Komitmen Kepatuhan terhadap <i>Code of Conduct</i> yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai</p> <p>Contained in the PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Code of Conduct which has been updated based on Decree Number: SK.02.09/A.DIR.01288/2023 Integrity Pact of Board of Directors, Board of Commissioners and Employees Statement of Commitment to Compliance with the Code of Conduct by the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees</p>

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
5.	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance		
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
5.11	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. Board of Directors periodically reviews on the design accuracy and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and the results of the review are conveyed to the shareholders through the annual report of corporate.	Diterapkan Apply	Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang terbit secara berkala setiap tahun memuat hasil reviu Direksi atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan Perusahaan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Annual Report and Sustainability Report which are published periodically every year contain the results of Board of Directors' review on the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control, and the Company's compliance with the principles of Corporate Governance and applicable laws and regulations
5.2	Manajemen Risiko Risk Management		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one in the same, disclosed transparently, incorporated into implementation of the Board of Directors' and Board of Commissioners' duties and responsibilities, as well as in discussions at Board of Commissioners' and Board of Directors' meetings.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Rapat Dewan Komisaris selalu berbasiskan risiko dalam pembahasan isu strategik. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019. Implementation has been carried out in accordance with the provisions. Board of Commissioners meetings are always risk-based in discussing strategic issues. This is stated in the Board of Commissioners Policy, Number: 103/DK/WIKA/2019 dated October 04, 2019.
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism in the monitoring of corporate risk management.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan fungsi/peran dan tupoksinya sudah dilaksanakan akan tetapi tidak oleh Komite Khusus/Komite Pemantau Manajemen Risiko Implementation of functions/roles and duties have been carried out but not by the Special Committee/Risk Management Monitoring Committee
5.3.	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. Board of Directors builds an integrated system of governance, risk management and compliance (GRC), by handling various uncertainties in an integrated manner with high integrity, to ensure that the corporate can achieve its goals	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan dibuktikan bahwa perusahaan telah menerima TOP GRC Award mendapat bintang 5 di tahun 2022 Implementation has been carried out in accordance with the provisions and is evidenced that the Company has received the TOP GRC Award for 5 stars in 2022.
Panduan Manual			
5.3.1.1	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. Board of Directors ensures coordination and capacity building among the main GRC systems which include governance systems, strategic management, performance management, risk management, compliance management and internal audit systems so that the corporate stays on the right track in achieving its goals.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Code of Corporate Governance, yaitu Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Code of GCG) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2023-2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.01.09.A.DIR.01531/2023 Stipulated in the Code of Corporate Governance, namely Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (Code of GCG) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 2023-2025, which has been updated based on the Board of Directors Decree Number: SK.01.09.A.DIR.01531/2023

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Board of Directors ensures that the division in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest	Diterapkan Apply	Tertuang dalam <i>code of conduct governance</i> Perseroan. Stipulated in the Company's code of conduct governance.
5.4.	Audit Internal Internal Audit		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. Board of Commissioners through the Audit Committee monitors and ensures that the internal audit function helps the corporate to achieve its goals by approaching an objective and disciplined to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Implementation has been carried out according to the provisions.
6.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency		
6.1	Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy		
Rekomendasi 1 & 2 Recommendation 1 & 2			
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi The corporate has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam <i>board manual</i> investasi & divestasi tanggal 27 Oktober 2022 Stipulated in the investment & divestment manual board of october 27, 2022
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' right to obtain regularly and timely material relevant information about the corporate must be fulfilled.	Diterapkan Apply	Perusahaan patuh pada ketentuan POJK No 42 tahun 2020 & POJK No 17 tahun 2022 Company comply with POJK provisions No 42 of 2020 & POJK No 17 of 2022
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Corporate discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that are not materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete, and provide investors with the right information to make the right investment decisions	Diterapkan Apply	Perusahaan patuh pada ketentuan PSAK, peraturan bursa X.K.2, Dan POJK No 14 tahun 2022 Companies comply with psak provisions, exchange regulations X.K.2, and POJK No 14 year 2022
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the termination and remuneration of the external auditor.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Rekomendasi penunjukan auditor eksternal dilakukan setiap tahun oleh Komite Audit Implementation has been carried out according to the provisions. Recommendations for the appointment of external auditors are carried out annually by Audit Committee

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
6.23	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks. The Corporate has issued a Sustainability Report which is an integral part of the Annual Report. The Corporate's Sustainability Report has presented the Corporate's sustainability performance which includes economic, social, environmental and governance aspects, which are presented in a 3-year comparison, so that it is expected to help shareholders and stakeholders understand the strategic goals of the corporate and its progress in creating sustainable value.	Diterapkan Apply	Laporan Keberlanjutan WIKA telah disiapkan dan diungkapkan dengan jelas dan akurat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, <i>Consolidated GRI Standards 2021</i> dan <i>GRI G4 Sector Disclosures Construction and Real Estate</i> . WIKA's Sustainability Report has been prepared and disclosed clearly and accurately in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies, Consolidated GRI Standards 2021 and GRI G4 Sector Disclosures Construction and Real Estate.
Rekomendasi 4 Recommendation 4			
6.24	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perseroan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The Corporate has issued a Sustainability Report which is an integral part of the Annual Report. The Corporate's Sustainability Report has presented the Corporate's sustainability performance which includes economic, social, environmental and governance aspects, which are presented in a 3-year comparison, so that it is expected to help shareholders and stakeholders understand the strategic goals of the corporate and its progress in creating sustainable value.	Diterapkan Apply	Laporan Keberlanjutan WIKA telah disiapkan dan diungkapkan dengan jelas dan akurat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, <i>Consolidated GRI Standards 2021</i> dan <i>GRI G4 Sector Disclosures Construction and Real Estate</i> . WIKA's Sustainability Report has been prepared and disclosed clearly and accurately in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies, Consolidated GRI Standards 2021 and GRI G4 Sector Disclosures Construction and Real Estate.
6.3 Diseminasi Informasi Information Dissemination			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
6.31	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide users with equitable, timely and relatively inexpensive access to relevant information.	Diterapkan Apply	Perusahaan patuh pada ketentuan POJK No 31 tahun 2015 tentang keterbukaan informasi The Company comply with the provisions of POJK No 31 of 2015 regarding information disclosure
Rekomendasi 2 & 3 Recommendation 2 & 3			
6.32	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporate ensures that an annual statement on the application of the General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia, including an explanation of the application of each Recommendation and Guide is available on the website for a minimum period of five years.	Diterapkan Apply	Hingga Tahun Buku 2023 perusahaan belum menerapkan pedoman umum governansi korporat indonesia Until 2023 Fiscal Year, the Company has not implemented the Indonesian general guidelines for corporate governance.
6.33	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal <i>cross listing</i> , kriteria dan prosedur <i>cross listing</i> , kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan <i>listing</i> untuk <i>listing</i> utama harus transparan dan didokumentasikan. For Corporate listed on the capital market in jurisdictions other than the jurisdiction of origin, the applicable laws and regulations on corporate governance must be clearly disclosed. In the case of cross listing, the criteria and procedures for recognizing the listing requirements for the primary listing must be transparent and documented.	Diterapkan Apply	Hingga akhir tahun buku 2023, Perusahaan hanya mencatatkan/memperdagangkan saham di Bursa Efek Indonesia, tempat domisili Perusahaan. Until the end of 2023 fiscal year, the Company only lists/trades its shares on the Indonesia Stock Exchange, where the Company is domiciled.

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
7.	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection of Shareholder Rights		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor The Corporation has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	Diterapkan Apply	Melalui <i>website</i> perusahaan dan <i>public expose</i> yang diselenggarakan tiap tahun Through the Corporate website and the public expose held in every year
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The Corporate which is the parent entity ensures that its corporate governance policies apply to its subsidiaries and entities under common control corporate investment is significant.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (<i>Board Manual</i>) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan secara berkala. Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Code of GCG</i>) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2023-2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor. SK.02.09/A.DIR.01288/2023 Contained in the Board of Directors and Board of Commissioners Work Procedure Guidelines (<i>Board Manual</i>) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. which has been updated regularly. Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (<i>Code of GCG</i>) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 2023-2025, which has been updated based on the Board of Directors Decree Number: SK.02.09/A.DIR.01288/2023
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The Corporate has rules and procedures governing acquisitions, acquisitions and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur in a transparent and under reasonable conditions and protect the rights of all shareholders according to the class.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam board manual investasi & divestasi tanggal 27 oktober 2022 Stipulated in the board manual of investment & divestment dated october 27, 2022
Panduan Manual			
7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. Corporations clearly disclose such rules and procedures so that investors understand their rights and entitlements to compensation.	Diterapkan Apply	Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 ayat 4 huruf a; yang menyatakan bahwa "Para Pemegang Saham memiliki hak yang sama atas setiap 1 saham memberikan 1 hak suara". Turunan atas ketentuan Anggaran Dasar tersebut diimplementasikan melalui prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara yang terdapat dalam Tata Tertib RUPS, di mana Tata Tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi. Adapun dalam penerapannya memiliki tata cara sebagai berikut: Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. In accordance with the Company's Articles of Association Article 5 paragraph 4 letter a; which states that "Shareholders have equal rights for every 1 share giving 1 voting right". This Articles of Association' provision is then translated by implementing a voting procedure in making decisions on an agenda contained in the GMS Rules, in which the GMS Rules are given to the Shareholders who are present and explained again by the Chairperson of GMS at GMS opening. The Company has appointed independent parties, namely the Share Registrar and Notary Public, to carry out the vote counting and/or validation processes. As for its application, the following procedures apply: Voting is carried out after all questions have been answered and/or the question and answer time is up. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder has more than 1 (one) share, then he/she is only asked to vote 1 (one) time and the vote represents all the shares he/she owns or represents.

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
71.3.2	Taktik yang mencegah pengambilalihan (<i>anti-take-over devices</i>) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. The anti-takeover devices should not be used to protect the management and Board of Commissioners from accountability.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam <i>board manual</i> investasi & divestasi tanggal 27 Oktober 2022 Stipulated in the board manual of investment & divestment dated october 27, 2022
7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment for Shareholders			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan 1. semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara. 2. pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The Corporation has rules and procedures that ensure 1. a. all shareholders of the same series in a class of shares must be treated equally, 2. b. disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to acquire influence or control disproportionate to their shareholding.	Diterapkan Apply	Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 ayat 4 huruf a; yang menyatakan bahwa "Para Pemegang Saham memiliki hak yang sama atas setiap 1 saham memberikan 1 hak suara". Turunan atas ketentuan Anggaran Dasar tersebut diimplementasikan melalui prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara yang terdapat dalam Tata Tertib RUPS, di mana Tata Tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi. Adapun dalam penerapannya memiliki tata cara sebagai berikut: Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya In accordance with the Company's Articles of Association Article 5 paragraph 4 letter a; which states that "Shareholders have equal rights for every 1 share giving 1 voting right". This Articles of Association' provision is then translated by implementing a voting procedure in making decisions on an agenda contained in the GMS Rules, in which the GMS Rules are given to the Shareholders who are present and explained again by the Chairperson of GMS at GMS opening. The Company has appointed independent parties, namely the Share Registrar and Notary Public, to carry out the vote counting and/or validation processes. As for its application, the following procedures apply: Voting is carried out after all questions have been answered and/ or the question and answer time is up. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder has more than 1 (one) share, then he/she is only asked to vote 1 (one) time and the vote represents all the shares he/she owns or represents.
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The Corporate has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and executed in such a way as to ensure that the conflict of interests have been properly managed, and protect the interests of the Corporate and shareholders.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam <i>board manual</i> investasi & divestasi tanggal 27 Oktober 2022 Stipulated in the board manual of investment & divestment dated october 27, 2022
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/ belum tersedia di pasar. The Corporate has and discloses the policies to prevent insider trading. The Corporate has clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that no one can benefit directly or indirectly from information that is not/ not yet available in the market.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam <i>code of conduct</i> Perseroan tahun 2023 Stated in the Company's code of conduct for 2023

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi The Corporation makes a summons to the GMS with the agenda and materials of the GMS as complete and early as possible (at least 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed through electronic means such as through the Corporation's website.	Diterapkan Apply	Perusahaan patuh pada POJK No. 15 dan 16 tahun 2020 tentang RUPS perusahaan terbuka di mana panggilan RUPS dan materi RUPS ditayangkan paling lambat 21 hari sebelum RUPS. The Company comply with POJK No. 15 and 16 of 2020 regarding the GMS of public Company which the summon and materials of the GMS published at least 21 days before the GMS
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The Corporate has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively in GMS.	Diterapkan Apply	Perusahaan patuh pada POJK No. 15 & 16 Tahun 2020 tentang RUPS perusahaan terbuka secara elektronik di mana Pemegang Saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The Company comply with POJK No. 15 & 16 of 2020 regarding public Company GMS electronically where Shareholders can participate and vote effectively at the GMS.
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of Board of Directors and Board of Commissioners	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Code of GCG) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2023-2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.01.09.A.DIR.01531/2023 Stipulated in the Guidelines for Implementation of Good Corporate Governance (Code of GCG) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 2023-2025, which has been updated based on the Board of Directors Decree Number: SK.01.09.A.DIR.01531/2023
Rekomendasi 4 Recommendation 4			
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The Corporation ensures transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Code of GCG) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2023-2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.01.09.A.DIR.01531/2023 Stipulated in the Guidelines for Implementation of Good Corporate Governance (Code of GCG) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 2023-2025, which has been updated based on the Board of Directors Decree Number: SK.01.09.A.DIR.01531/2023
Rekomendasi 5 Recommendation 3			
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the GMS minutes are announced to the public on the next working day.	Diterapkan Apply	Perusahaan patuh pada POJK No. 15 & 16 Tahun 2020 tentang RUPS perusahaan terbuka The Company comply with POJK No. 15 & 16 of 2020 regarding public Company GMS

No.	Uraian Description	Apply/Explain Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
8.	Pemangku Kepentingan Lainnya Other Stakeholders		
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement) Key Stakeholder Engagement		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang reguler, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Corporation through the Corporate Secretary conducts regular, transparent and effective communication with key stakeholders and engages them to understand their expectations and grievances as well as the Corporation's impact on them.	Diterapkan Apply	Perseroan menyediakan kanal pelaporan keterbukaan informasi publik pada website perseroan, dan kanal <i>whistleblowing system</i> (wbs.WIKA.co.id) The Company provides a public information disclosure reporting channel on the Company's website, and a whistleblowing system channel (wbs.WIKA.co.id).
8.2	Komitmen Keberlanjutan dalam Model Bisnis Sustainability Commitment in Business Models		
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including setting corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including among others developing and implementing corporate strategies, business plans, key action plans and risk management.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan Implementation has been carried out according to the provisions
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Stakeholder Protection		
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporate and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with the rights of stakeholders	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Code of GCG) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2023-2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor:SK.01.09.A.DIR.01531/2023 Stipulated in the Guidelines for Implementation of Good Corporate Governance (Code of GCG) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 2023-2025, which has been updated based on the Board of Directors Decree Number: SK.01.09.A.DIR.01531/2023
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritize sustainability.	Diterapkan Apply	Tertuang Dalam Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan Stipulated in the Company's Collective Labor Agreement





Tanggung
Jawab

Sosial dan Lingkungan

**Social and Environmental
Responsibility**



Tata kelola program keberlanjutan WIKA melibatkan integrasi setiap inisiatif ke dalam seluruh aspek operasional bisnis. Pendekatan ini memastikan bahwa program-program keberlanjutan sejalan dengan visi dan misi Perseroan serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

WIKA's sustainability program governance involves integrating each initiative into all aspects of business operations. This approach ensures that sustainability programs align with the Company's vision and mission while supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Tata Kelola Program Keberlanjutan Perseroan

The Company's Sustainability Program Governance



Tata Kelola Program Keberlanjutan WIKA dirancang dengan prinsip keberlanjutan, yang berpedoman pada peraturan yang berlaku serta praktik terbaik dalam pengelolaan program sosial dan lingkungan. Dengan komitmen tinggi terhadap implementasi program keberlanjutan yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan, tata kelola program ini mencakup perencanaan strategis, pelaksanaan, *monitoring*, hingga evaluasi yang mendalam untuk menjamin setiap program berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

WIKA menyusun rencana kerja keberlanjutan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip praktik usaha yang baik, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan. Tata kelola program keberlanjutan WIKA mencakup penyatuan setiap inisiatif dalam operasional bisnis secara menyeluruh. Integrasi ini memastikan program-program keberlanjutan selaras dengan visi dan misi WIKA serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

WIKA's Sustainability Program Governance is designed with sustainability principles, guided by applicable regulations and best practices in managing social and environmental programs. With a high commitment to implementing an integrated, targeted, and sustainable program, this governance encompasses strategic planning, implementation, monitoring, and in-depth evaluation to ensure that every program delivers tangible impacts on society and the environment.

WIKA's develops its sustainability work plan in accordance with prevailing laws and norms while upholding the principles of good business practices, social equity, and environmental justice. WIKA's sustainability program governance integrates each initiative comprehensively into its business operations. This integration ensures that the sustainability programs align with WIKA's vision and mission as well as the Sustainable Development Goals (SDGs).

Secara umum, program keberlanjutan WIKA, diimplementasikan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang merupakan komitmen Perseroan, terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan pelaksanaan TJSL WIKA mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan didasarkan pada pendekatan holistik yang menyelaraskan 4 (empat) pilar utama keberlanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.

WIKA menjalankan kebijakan TJSL dengan pendekatan yang terintegrasi, di mana setiap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan saling terkait dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Setiap inisiatif didasarkan pada analisis mendalam mengenai kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah WIKA beroperasi dan dikaitkan dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang. WIKA juga memastikan bahwa program TJSL yang dilaksanakan terarah dan sesuai dengan prioritas strategis Perseroan. Dengan demikian, setiap program memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan tantangan yang dihadapi masyarakat dan lingkungan.

Berpedoman kepada ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility*, serta *Sustainability Development Goals* dan juga praktik-praktik ESG, WIKA terus berupaya untuk merealisasikan inisiatif TJSL yang tidak hanya memberikan dampak langsung tetapi juga manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan menjalankan program TJSL yang terarah, dan terukur, WIKA berharap dapat terus menjadi agen perubahan yang aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa Perseroan tidak hanya meraih kesuksesan bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan.

DASAR PENERAPAN PROGRAM KEBERLANJUTAN PERSEROAN

Pelaksanaan program TJSL WIKA didasarkan pada regulasi yang berlaku, dan juga diselaraskan dengan Misi Perseroan serta aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Bab V, Pasal 74 ayat (1);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-1/MBU/03/2023 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
5. Pedoman ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility*;
6. ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan;
7. "Metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)", dan
8. Pedoman Internal WIKA.

In general, WIKA's sustainability programs are implemented through the execution of Social and Environmental Responsibility (SER) programs, which reflect the Company's commitment to sustainable development. WIKA's SER implementation policy is based on the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number Per-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises, which is grounded in a holistic approach that aligns with the four main pillars of sustainability: economic, social, environmental, and governance aspects.

WIKA carries out the SER policy through an integrated approach, where economic, social, and environmental aspects are interconnected in both planning and execution. Each initiative is based on an in-depth analysis of the needs of community and environment surrounding WIKA's operational areas, linked to long-term sustainability goals. WIKA also ensures that the SER programs implemented are focused and aligned with the Company's strategic priorities. As a result, every program has clear objectives that are relevant to the challenges faced by the community and environment.

Guided by ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility*, as well as *Sustainability Development Goals*, and ESG practices, WIKA's continues to make efforts to realize SER initiatives that provide not only direct impacts but also long-term benefits for all stakeholders. By implementing focused and measurable SER programs, WIKA's aims to remain an active agent of change in sustainable development while ensuring that the Company achieves business success and makes a significant contribution to social and environmental well-being.

BASIS FOR SUSTAINABILITY PROGRAM IMPLEMENTATION

WIKA's SER program is based on prevailing regulations and in line with the Company's Mission as well as Environmental, Social and Governance as follows:

1. Law Number 40 of 2007, Chapter V, Article 74 paragraph (1)
2. Law Number 32 of 2009 regarding Environmental Protection and Development;
3. Government Regulation no. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises.
5. ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility*;
6. ISO 14001:2015 regarding Environmental Management Systems.
7. Sustainable Development Goals (SDGs) Metadata;
8. WIKA's Internal Guidelines.

PRINSIP DAN TUJUAN PROGRAM KEBERLANJUTAN

Penerapan program TJSJ WIKA mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN, dimana terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi pedoman. Dengan berpedoman kepada prinsip ini, WIKA memiliki kerangka yang terukur sehingga program TJSJ dapat berjalan secara sistematis dan terpadu.

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; dan
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

WIKA mengikuti pedoman ISO 26000 sebagai referensi dalam mengembangkan dan melaksanakan program TJSJ. Standar ini membantu WIKA dalam membangun praktik-praktik keberlanjutan yang berdampak dan berkelanjutan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Program TJSJ WIKA bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perseroan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar Perseroan.

ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM KEBERLANJUTAN DI LINGKUP PERSEROAN

Langkah strategis WIKA dalam mewujudkan komitmen keberlanjutan, salah satunya dengan mengembangkan struktur tata kelola keberlanjutan yang disusun secara holistik dengan harapan dapat mendorong pelaksanaan program-program keberlanjutan yang telah ditetapkan secara terintegrasi, terarah, terukur, dan akuntabel sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Struktur tata kelola keberlanjutan WIKA ini memiliki fungsi dan tanggung jawab, diantaranya memastikan bahwa keberlanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional bisnis dan pengambilan keputusan.

Struktur tata kelola keberlanjutan didukung oleh kolaborasi lintas fungsi di seluruh tingkatan organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan keberlanjutan secara menyeluruh serta melibatkan berbagai elemen organisasi yang berperan strategis, mulai dari pengawasan hingga pelaksanaan di lapangan sebagaimana digambarkan pada diagram berikut.

PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF SUSTAINABILITY PROGRAM

WIKAs SER program refers to the Regulation of Minister of SOE, guided by 4 (four) principles. By referring to these principles, WIKAs has a measurable framework, thereby SER program can run in a systematical and integrated manner.

1. Integrated, namely based on risk analysis and business processes related to stakeholders;
2. Targeted, namely having a clear direction to achieve the Company's goals;
3. Measureable impact, namely having contribution and providing benefits which result in change or added value for stakeholders and the Company;
4. Accountability, namely being accountable so as to keep away from potential abuse and irregularities.

WIKAs follows ISO 26000 guidelines as a reference in designing and carrying out SER programs. This standard helps WIKAs in building sustainable practices that are impactful, sustainable and can be accounted for all stakeholders. WIKAs SER programs aims to:

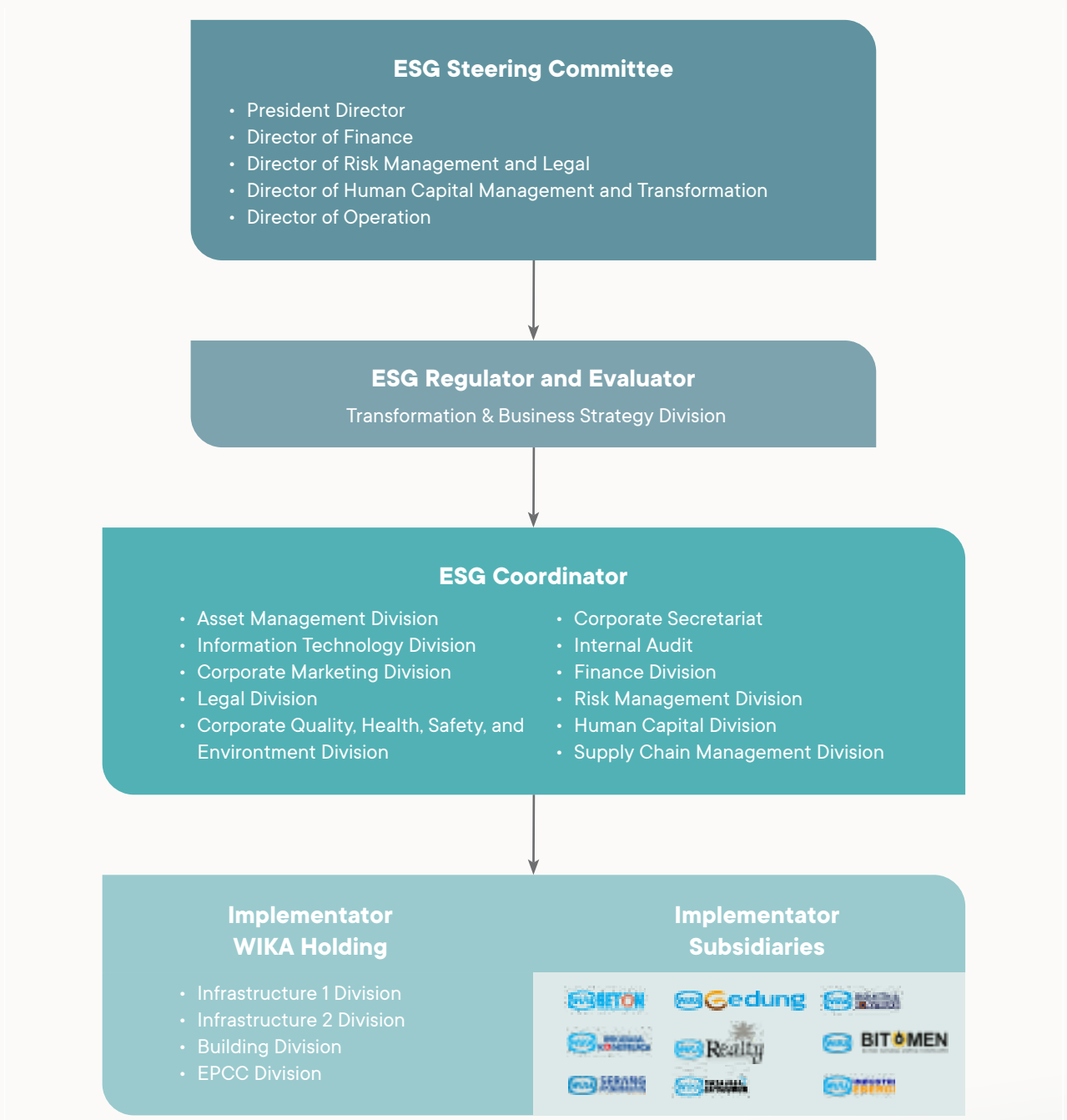
1. Providing benefits for economic, social, environmental development as well as legal and governance development for the Company;
2. Contribute to the creation of added value for the Company with integrated, directed, measureable impact and accountable principles;
3. Fostering micro and small business to be more resilient and independent as well as communities around the Company.

SUSTAINABILITY PROGRAM MANAGEMENT ORGANIZATION IN THE COMPANY

WIKAs strategic step in realizing its sustainability commitment includes developing a holistic sustainability governance structure. This structure is developed with the aim of driving the implementation of sustainability programs that are integrated, targeted, measurable, and accountable in alignment with sustainability principles. WIKAs sustainability governance structure has specific functions and responsibilities, including ensuring that sustainability becomes an integral part of business operations and decision-making processes.

This governance structure is supported by cross-functional collaboration at all organizational levels to ensure the comprehensive achievement of sustainability goals, and involves various organizational elements with strategic roles, ranging from oversight to field implementation, as illustrated in the following diagram.

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan WIKA WIKA's Sustainability Governance Structure



Tata kelola keberlanjutan dirancang untuk mendukung implementasi program-program ESG secara strategis serta memastikan bahwa setiap elemen organisasi memahami perannya dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Pembagian tugas yang terstruktur menjadi kunci untuk menciptakan sinergi di antara berbagai fungsi dalam organisasi, mulai dari pengawasan, pengaturan kebijakan, hingga pelaksanaan program di lapangan. Tabel di bawah ini menjelaskan rincian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing organ dalam struktur tata kelola keberlanjutan.

The sustainability governance is designed to support strategic implementation of ESG programs and to ensure that every organizational element understands its role in achieving sustainability goals. Structured division of tasks serve as the key to creating synergy among various functions within the organization, from supervision and policy formulation to program implementation in the field. The table below outlines the detailed roles and responsibilities of each entity within sustainability governance structure.

Organ Tata Kelola Governance Organ	Deskripsi Tugas Tasks Description
Steering Committee	<ol style="list-style-type: none"> Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ESG di seluruh organisasi. Memastikan inisiatif ESG selaras dengan tujuan strategis perusahaan, memberikan panduan. Meninjau laporan kinerja ESG secara berkala. <ol style="list-style-type: none"> Direct and oversee the implementation of ESG policies across the organization. Ensure ESG initiatives are aligned with the Company's strategic goals and providing guidance. Review ESG performance reports periodically
Regulator and Evaluator	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan kebijakan dan standar ESG yang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan regulasi Pemerintah. Menetapkan target dan indikator kinerja utama (KPI) ESG. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar ESG yang berlaku, baik lokal maupun internasional. Meninjau dan menyetujui rencana implementasi ESG yang diajukan oleh implementator. Memantau dan mengevaluasi laporan berkala dari implementator terkait kemajuan dan efektivitas implementasi ESG. Merumuskan arahan strategis dan membuat keputusan terkait dengan inisiatif ESG. <ol style="list-style-type: none"> Develop ESG policies and standards in accordance with needs and developments in government regulations. Set ESG targets and key performance indicators (KPIs). Ensure compliance with applicable ESG regulations and standards, both local and international. Review and approve ESG implementation plans submitted by the Implementer. Monitor and evaluate periodic reports from the Implementer regarding the progress and effectiveness of ESG implementation. Formulate strategic directives and making decisions regarding ESG initiatives.
Coordinator	<ol style="list-style-type: none"> Merancang dan mengembangkan program serta proyek ESG sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator. Mengoordinasikan implementasi lintas departemen dan divisi untuk memastikan integrasi ESG dalam operasional Perseroan. Menyusun laporan kemajuan dan evaluasi program ESG. Mengelola tim dan sumber daya yang dialokasikan untuk implementasi ESG. Memastikan bahwa semua aktivitas ESG dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal mengenai inisiatif ESG. Berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan terkait ESG. <ol style="list-style-type: none"> Design and develop ESG programs and projects in accordance with the policies set by the regulator. Coordinate the implementation across departments and divisions to ensure ESG integration into the Company's operations. Prepare progress reports and evaluations of ESG programs. Manage the team and resources allocated for ESG implementation. Ensure that all ESG activities are carried out in accordance with the established plan and schedule. Communicate with internal and external stakeholders regarding ESG initiatives. Participate in ESG-related training and developmen
Implementator	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan aktivitas dan tugas harian terkait ESG. Memastikan pelaksanaan ESG berjalan sesuai standar operasional yang ditetapkan. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaporan dan evaluasi. Mengidentifikasi dan melaporkan hambatan atau tantangan dalam implementasi ESG. Menyusun laporan implementasi ESG kepada koordinator. Berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan terkait ESG. Mengambil inisiatif dalam penyelesaian masalah operasional harian dalam batas kewenangan yang diberikan. <ol style="list-style-type: none"> Design and develop ESG programs and projects in accordance with the policies established by the Regulator. Coordinate cross-departmental and divisional implementation to ensure ESG integration into company operations. Compile progress reports and evaluations of ESG programs. Manage teams and resources allocated to ESG implementation. Ensure that all ESG activities are carried out according to established plans and schedules. Communicate with internal and external stakeholders regarding ESG initiatives. Participate in ESG-related training and development.

STRATEGI PENGELOLAAN PROGRAM KEBERLANJUTAN

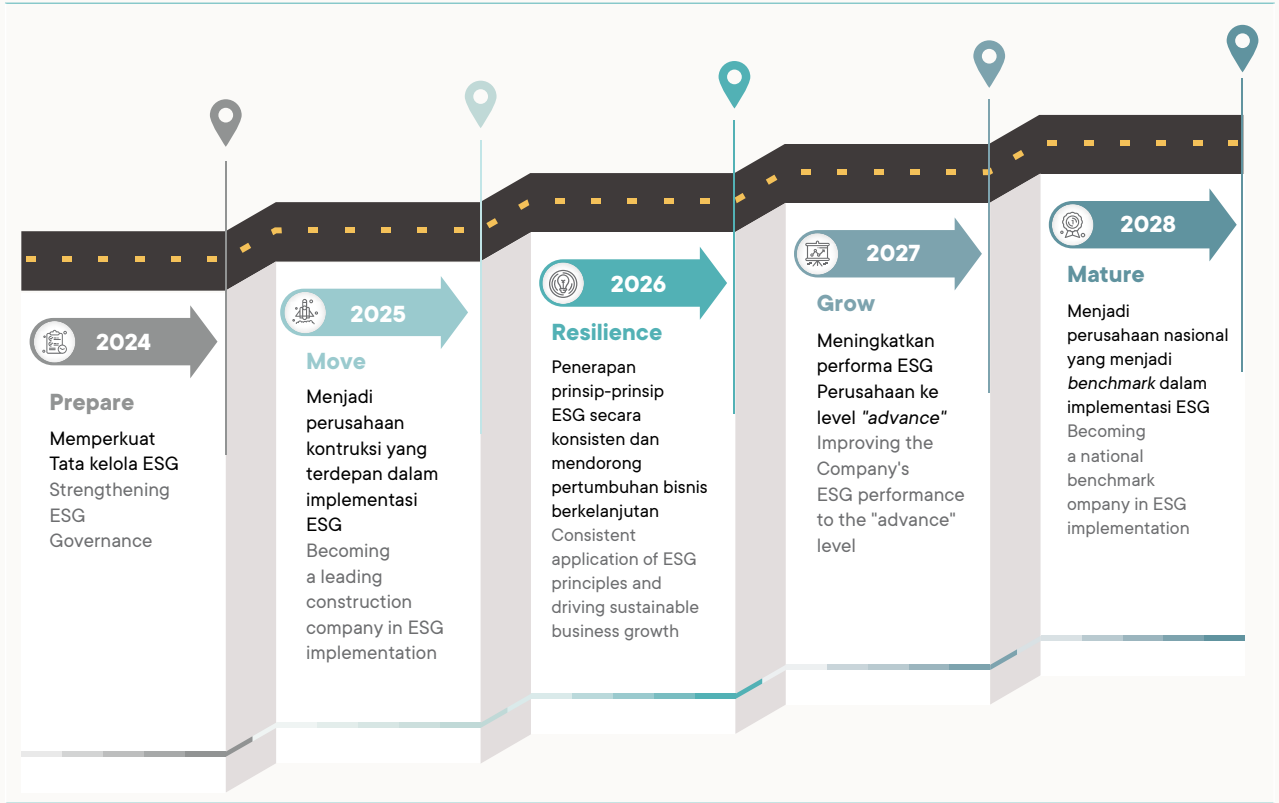
Langkah strategis WIKA untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dituangkan dalam peta jalan atau *grand roadmap* implementasi ESG. *Grand Roadmap* menjadi panduan dalam upaya pencapaian visi WIKA melalui pengintegrasian prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap aspek operasional dan strategi bisnis, dengan tahapan yang dirancang secara sistematis dari tahun 2024 hingga tahun 2028.

SUSTAINABILITY PROGRAM MANAGEMENT STRATEGY

WIKA's strategic steps to ensure long-term sustainability are outlined in ESG grand roadmap. The Grand Roadmap serves as a guide for achieving WIKA's vision by integrating sustainability principles into every aspect of operations and business strategy, with phases that are designed systematically starting from 2024 until 2028.

Tahapan ini menggambarkan komitmen WIKA terhadap penguatan tata kelola ESG serta langkah-langkah progresif menuju pencapaian keberlanjutan yang optimal. Berikut adalah penjabaran tahapan dalam *grand roadmap* ESG WIKA, yang dimulai dari penguatan fondasi tata kelola hingga mencapai posisi sebagai perusahaan nasional yang menjadi acuan dalam implementasi ESG.

These phases reflect WIKA's commitment to strengthening ESG governance and taking progressive steps toward achieving optimal sustainability. Below is a breakdown of the phases in WIKA's ESG Grand Roadmap, starting from strengthening governance foundations to establishing itself as a national benchmark company in ESG implementation.



Tahun Year	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Indikator Keberhasilan Success Indicators
2024 Prepare	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan komite/divisi <i>Sustainability</i> bagi lingkup WIKA secara <i>holding</i>. Implementasi kebijakan ESG beserta turunan kebijakan (level pedoman, prosedur, dan IK) terkait. Penyusunan <i>framework</i> keuangan berkelanjutan, termasuk panduan terkait (bagi skema <i>Green Bond</i>, <i>Sustainability Linked Bond</i>, dan/atau <i>Sustainability Linked Loan</i>). Meningkatkan <i>awareness</i> dan budaya ESG, melalui <i>training</i> dan sertifikasi karyawan. Penyusunan <i>white paper</i> identifikasi hak atas karbon dan analisis alokasi beban emisi berdasarkan proses bisnis konstruksi. 	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat komite/divisi <i>Sustainability</i> di lingkup WIKA. Tersedia dan disahkannya pedoman dan prosedur pengelolaan aspek-aspek ESG terintegrasi di level <i>holding</i>, yang diterapkan oleh divisi fungsional, divisi operasi, hingga anak perusahaan. Terdapat dan telah disahkan <i>framework</i> keuangan berkelanjutan (baik skema <i>Green Bond</i>, <i>Sustainability Linked Bond</i>, dan/atau <i>Sustainability Linked Loan</i>). Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi ESG kepada seluruh level karyawan, termasuk sertifikasi. Terdapat <i>white paper</i> identifikasi dan hak atas karbon dan analisis alokasi beban emisi berdasarkan proses bisnis konstruksi.
Memperkuat tata kelola ESG Strengthening ESG Governance	<ol style="list-style-type: none"> Establishment of a Sustainability committee/division for WIKA's as a holding. Implementation of ESG policies along with their derivatives (guidelines, procedures, and IK). Development of a sustainable financial framework, including related guidelines (for Green Bond schemes, Sustainability-Linked Bond, and/or Sustainability-Linked Loan). Increasing ESG awareness and culture through employee training and certification. Preparation of a white paper on carbon rights identification and emission burden allocation analysis based on construction business processes. 	<ol style="list-style-type: none"> Establishment of a Sustainability committee/division within WIKA's. Availability and ratification of integrated ESG management guidelines and procedures at the holding level, implemented by functional divisions, operational divisions, and subsidiaries. Existence and ratification of a sustainable financial framework (covering Green Bond, Sustainability-Linked Bond, and/or Sustainability-Linked Loan schemes). Implementation of ESG training and socialization across all employee levels, including certification. Availability of a white paper on carbon rights identification and emission burden allocation analysis based on construction business processes.

Tahun Year	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Indikator Keberhasilan Success Indicators
2025 Move Menjadi perusahaan konstruksi yang terdepan dalam implementasi ESG Becoming a leading construction company in ESG implementation	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan target kuantitatif pengelolaan ESG dan penguatan tata kelola ESG di seluruh divisi. Menetapkan target NZE (<i>Net Zero Emission</i>) dan penyusunan <i>roadmap</i> dekarbonisasi. Identifikasi dan analisis dampak risiko iklim (risiko fisik dan risiko transisi). Inventarisasi dan penajaman perhitungan <i>baselining</i> emisi cakupan 1, 2, dan 3 untuk lingkup <i>holding</i> dan proyek secara konsolidasi. <i>Baselining</i> jumlah konsumsi dan intensitas energi, air, dan limbah untuk lingkup <i>holding</i> dan proyek secara konsolidasi. Pengembangan konten terkait ESG <i>disclosure</i> di <i>website</i> perusahaan dan pengembangan ESG <i>Dashboard</i>. Perhitungan dampak kegiatan CSR, melalui SROI maupun Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup <i>holding</i> secara konsolidasi. Melakukan penilaian <i>performa/rating</i> ESG oleh lembaga <i>rating</i> ESG. <ol style="list-style-type: none"> Set quantitative ESG management targets and strengthen ESG governance across all divisions. Establish Net Zero Emission (NZE) targets and develop a decarbonization roadmap. Identify and analyse the impacts of climate risks (physical risks and transition risks). Inventory and refinement of baselining calculations for 1, 2, and 3 scope emissions for holding and projects on a consolidated basis. Baselining the amount of consumption and intensity of for energy, water, and waste for holding and project scope on a consolidated basis. Develop ESG disclosure content for the Company website and develop ESG Dashboard. Measure the impact of CSR activities through SROI or Community Satisfaction Index at holding level on a consolidated basis. Conduct ESG performance/rating assessments by ESG rating agencies. 	<ol style="list-style-type: none"> Ketercapaian <i>action plan</i> ESG sesuai standar, melalui kepatuhan terhadap ISO terkait, peningkatan nilai <i>Business Process ESG Maturity</i>, adopsi <i>Lean Construction</i>, dan sebagainya. Terpilihnya skenario dan tahun yang dijadikan target perusahaan dalam upaya inisiatif menuju NZE, melalui upaya dekarbonisasi. Terdapat hasil identifikasi dan analisis risiko terhadap dampak risiko iklim. Terdapat inventarisasi dan perhitungan <i>baselining</i> emisi cakupan 1, 2, dan 3 untuk lingkup <i>holding</i> dan proyek. Terdapat perhitungan <i>baselining</i> jumlah konsumsi dan intensitas energi, air, dan limbah untuk lingkup <i>holding</i> dan proyek Terdapat ESG <i>Dashboard</i> yang berfungsi sebagai <i>platform</i> laporan ketercapaian ESG WIKA. Terdapat hasil perhitungan dampak kegiatan CSR di lingkup <i>holding</i> secara konsolidasi melalui SROI dan/atau IKM. Skor <i>rating</i> kinerja ESG berada di kategori medium pada angka rata-rata industri sejenis berdasarkan penilaian dari lembaga S&P Global. <ol style="list-style-type: none"> Achievement of ESG action plan according to standards, demonstrated by compliance with relevant ISO, improvement in ESG Business Process Maturity scores, adoption of Lean Construction practices, and more. Selection of a scenario and targeted year for the Company's NZE initiative through decarbonization efforts. Availability of identification result and risks analysis related to climate risk impacts. Completion of inventory and calculations of baseline emissions scope 1, 2, and 3 for holding and project scope. Completion of baseline calculations for energy, water, and waste consumption and intensity for holding and projects. Development of an ESG Dashboard functioning as a platform for reporting WIKA's ESG achievements. Completion of CSR impact calculations at holding level on a consolidated basis using SROI and/or IKM. ESG performance rating achieving a medium category score, in line with the average for similar industries, based on assessments by S&P Global.
2026 Resilience Penerapan prinsip-prinsip ESG secara konsisten dan mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan Consistent application of ESG principles and driving sustainable business growth	<ol style="list-style-type: none"> <i>First issuance</i> untuk pendanaan berbasis ESG. Memasukkan risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko perusahaan dan merumuskan aksi adaptasi-mitigasi perubahan iklim bagi seluruh SBU. Diversifikasi portofolio produk hijau dan <i>building partnership</i> untuk percepatan pencapaian target keberlanjutan. Implementasi program efisiensi sumber daya (energi, air, dan limbah). <i>Piloting</i> program dekarbonisasi. Implementasi <i>Green Procurement</i>. <i>Piloting</i> sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi melalui ESG <i>platform</i>. <ol style="list-style-type: none"> First issuance for ESG-based funding. Integrating climate risks into the Company's risk management framework and formulating climate change adaptation-mitigation actions for all SBUs. Diversifying the green product portfolio and building partnerships to accelerate the achievement of sustainability targets. Implementing resource efficiency programs (energy, water, and waste). Piloting decarbonization programs. Implementing Green Procurement. Piloting a monitoring and evaluation system through an ESG platform. 	<ol style="list-style-type: none"> Terbitnya satu produk keuangan berkelanjutan yang dapat berupa <i>Green Bond</i>, <i>Sustainability-Linked Loan</i>, atau <i>Sustainability-Linked Bond</i>. Terdapat kajian <i>climate risk assessment</i> yang dimasukkan ke dalam matriks manajemen risiko. Adanya inovasi atas produk dan layanan berkelanjutan di WIKA melalui kemitraan strategis multi pihak. Adanya penurunan jumlah konsumsi sumber daya terkait (energi, air, dan limbah) dibandingkan dengan tahun <i>baseline</i>. Implementasi program dekarbonisasi untuk 2 (dua) proyek. Implementasi penilaian pemasok berdasarkan kriteria ESG dan sosialisasi ESG kepada pemasok. Implementasi <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja ESG melalui ESG <i>platform</i> untuk divisi fungsional. <ol style="list-style-type: none"> Issuance of a sustainable financial product, such as a Green Bond, Sustainability-Linked Loan, or Sustainability-Linked Bond. Completion of a climate risk assessment study incorporated into risk management matrix. Innovation in sustainable products and services at WIKA's through multi-party strategic partnerships. Reduction in resource consumption (energy, water, and waste) compared to the baseline year. Implementation of decarbonization programs for 2 (two) projects. Implementation of supplier assessments based on ESG criteria and ESG socialization to suppliers. Implementation of ESG performance monitoring and evaluation through ESG platform for functional divisions.

Tahun Year	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Indikator Keberhasilan Success Indicators
<p>2027 Grow</p> <p>Meningkatkan performa ESG Perusahaan ke level "advance" Improving the Company's ESG performance to the "advance" level</p>	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan penilaian performa/rating ESG. Implementasi penuh sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi melalui <i>dashboard</i> kinerja keberlanjutan. Penyusunan <i>Sustainability Report</i> dengan <i>framework</i> TCFD. Perluasan implementasi program dekarbonisasi. Diversifikasi portofolio produk hijau dan <i>building partnership</i> untuk percepatan pencapaian target keberlanjutan. <ol style="list-style-type: none"> Improvement of ESG performance assessment/rating. Full implementation of integrated monitoring and evaluation system through sustainability performance dashboard. Preparation of Sustainability Report with TCFD framework. Expansion of decarbonization program implementation. Diversification of green product portfolios and building partnerships to accelerate sustainability target achievement. 	<ol style="list-style-type: none"> Skor <i>rating</i> kinerja ESG berada di kategori medium pada angka di atas rata-rata industri sejenis berdasarkan penilaian dari lembaga S&P Global. Implementasi monitoring dan evaluasi kinerja ESG melalui ESG <i>platform</i> untuk divisi fungsional, divisi operasi dan proyek, serta anak perusahaan. Penerbitan <i>Sustainability Report</i> dengan <i>framework</i> TCFD. Implementasi program dekarbonisasi untuk 4 (empat) proyek. Adanya inovasi atas produk dan layanan berkelanjutan di WIKA, melalui kemitraan strategis multi pihak. <ol style="list-style-type: none"> ESG performance rating score is in medium category at a number above the average of similar industries based on assessments by S&P Global institution. Implementation of ESG performance monitoring and evaluation through an ESG platform for functional divisions, operational and projects divisions, and subsidiaries. Publication of Sustainability Report with TCFD framework. Implementation of decarbonization programs for 4 (four) projects. Innovation in sustainable products and services at WIKA's through strategic multi-stakeholder partnerships.
<p>2028 Mature</p> <p>Menjadi Perusahaan nasional yang menjadi <i>benchmark</i> dalam implementasi ESG Becoming a national benchmark company in ESG implementation</p>	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan <i>Sustainability Report</i> dengan <i>framework</i> IFRS S1 dan S2. Peningkatan penilaian performa/rating ESG. Adanya diversifikasi portofolio pembiayaan untuk percepatan revitalisasi dan peningkatan skala bisnis. Membentuk <i>business matching</i> untuk mendorong kolaborasi lintas sektor yang fokus pada keberlanjutan. <ol style="list-style-type: none"> Preparation of Sustainability Report using IFRS S1 and S2 frameworks. Improvement of ESG assessment/rating assessment. Diversification of financing portfolios to accelerate revitalization and scale up business operations. Establishing business matching to promote cross-sector collaboration focused on sustainability. 	<ol style="list-style-type: none"> Penerbitan <i>Sustainability Report</i> dengan <i>framework</i> IFRS S1 dan S2. Skor <i>rating</i> kinerja ESG berada di kategori <i>high</i> pada angka di atas rata-rata industri sejenis berdasarkan penilaian dari lembaga S&P Global. Diperolehnya 2 (dua) sumber pendanaan yang berasal dari produk keuangan berkelanjutan. Terpetakannya peluang <i>business matching</i> dan terjalannya kolaborasi antar anggota <i>holding</i>. <ol style="list-style-type: none"> Publication of a Sustainability Report using IFRS S1 and S2 frameworks. ESG performance rating score is in the high category, above the industry average, based on assessments by S&P Global institution. Obtaining 2 (two) funding sources from sustainable financial products. Mapping opportunities for business matching and establishing collaboration among holding members.

Pelaksanaan Program Keberlanjutan Perseroan

Implementation of the Company's Sustainability Program



Jaringan Irigasi Gumbasa
Gumbasa Irrigation Network

PROGRAM PENUGASAN KHUSUS

WIKA melaksanakan fungsi untuk kemanfaatan umum serta riset dan inovasi di tingkat nasional sebagai bagian dari penugasan khusus yang diamanatkan oleh BUMN. Dalam melaksanakan penugasan tersebut, WIKA senantiasa mempertimbangkan maksud dan tujuan, jenis kegiatan usaha, serta kapasitas yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-1/MBU/03/2023 mengenai Penugasan Khusus serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Pada tahun 2024 tidak ada penugasan khusus yang diterima WIKA.

Dalam pelaksanaan penugasan khusus, WIKA senantiasa memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan prinsip paradigma usaha (*business judgment rule*). Penugasan Khusus WIKA memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Penetapan
3. Pelaksanaan
4. Pelaporan

SPECIAL ASSIGNMENT PROGRAM

WIKA's carries out the function for public benefit as well as national-level research and innovation as part of special assignments entrusted by SOEs. In carrying out these assignments, WIKA's consistently takes into account its objectives and goals, types of business activities, and existing capacities. This is in accordance with the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number Per-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Program of SOEs. In 2024, WIKA's did not receive any special assignments.

In executing special assignments, WIKA's always adheres to the principles of Good Corporate Governance (GCG) and business judgment rule. WIKA's special assignments follow these stages:

1. Planning
2. Determination
3. Implementation
4. Reporting

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

WIKA berkomitmen untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian integral dari strategi bisnis dan operasionalnya. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan, tetapi juga sebagai wujud kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan upaya untuk mencapai keberlanjutan. Dalam perumusan program TJSL, WIKA berpedoman pada 4 (empat) pilar utama TJSL, yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, Pilar Lingkungan, dan Pilar Hukum & Tata Kelola.

Secara garis besar, ke 4 (empat) pilar utama tersebut, mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

WIKA, sebagai emiten terkemuka di bidang *Engineering Procurement & Construction* (EPC) dan Investasi, mengambil langkah sistematis dalam operasional bisnisnya untuk tidak hanya memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan nilai bersama. Komitmen ini tercermin dalam upaya WIKA untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadi fokus utama dalam setiap strategi dan kegiatan yang dijalankan. Melalui langkah-langkah sistematis dan komitmen yang kuat, WIKA memastikan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif yang luas dan mendukung visi pembangunan berkelanjutan. Dengan pemahaman bahwa pembangunan berkelanjutan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik, WIKA secara aktif berkontribusi pada sejumlah tujuan TPB.

Terutama, Tujuan (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Tujuan (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Di samping ketiga tujuan utama tersebut, WIKA juga mendukung Tujuan (7) Energi Bersih dan Terjangkau. Tujuan (10) Berkurangnya Kesenjangan dan Tujuan (13) Penanganan Perubahan Iklim. Tidak hanya itu, WIKA juga menempatkan Tujuan (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh sebagai bagian dari etika bisnisnya, dan juga kemitraan yang kuat juga dijalin untuk Tujuan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

PILAR TJSL WIKA

Pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) WIKA terdiri dari 4 (empat) aspek utama yang selaras dengan TPB. Dengan mengintegrasikan pilar-pilar tersebut ke dalam program TJSL, WIKA memastikan kegiatan TJSL dapat memberikan kontribusi lebih luas.

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

WIKA's is committed to implementing Social and Environmental Responsibility (SER) as an integral part of its business and operational strategy. This policy does not only reflect the Company's responsibility toward society and the environment but also demonstrates its compliance with applicable regulations and its efforts to achieve sustainability. In formulating its SER programs, WIKA's adheres to 4 (four) main SER pillars: Economic Pillar, Social Pillar, Environmental Pillar, and Legal & Governance Pillar.

In general, these four main pillars include 17 Sustainable Development Goals, namely (1) No Poverty; (2) Zero Hunger; (3) Good Health and Well-being; (4) Quality Education; (5) Gender Equality; (6) Clean Water and Sanitation; (7) Affordable and Clean Energy; (8) Decent Work and Economic Growth; (9) Industry, Innovation, and Infrastructure; (10) Reduced Inequality; (11) Sustainable Cities and Communities; (12) Responsible Consumption and Production; (13) Climate Action; (14) Life Below Water; (15) Life on Land; (16) Peace, Justice, and Strong Institutions; (17) Partnerships to Achieve the Goals.

As a leading issuer in the fields of Engineering, Procurement, & Construction (EPC) and Investment, WIKA's takes systematic steps in its business operations to not only meet market demands but also remain committed to delivering shared value. This commitment is reflected in WIKA's efforts to support the Sustainable Development Goals, which are a central focus in every strategy and activity undertaken. Through systematic actions and a strong commitment, WIKA's ensures that its programs create a broad positive impact and support the vision of sustainable development. Understanding that sustainable development is the key to a better future, WIKA's actively contributes to several SDG goals.

Particularly in Goals (8) Decent Work and Economic Growth; (9) Industry, Innovation, and Infrastructure; and (11) Sustainable Cities and Communities. In addition to these three goals, WIKA's also supports Goals (7) Affordable and Clean Energy; (10) Reduced Inequality; (13) Climate Action. Moreover, WIKA's places significant emphasis on Goal (16) Peace, Justice, and Strong Institutions as part of its business ethics and strong partnerships are also aligned for Goal (17) Partnerships to Achieve the Goals.

WIKA'S SER PILLARS

WIKA's Social and Environmental Responsibility (SER) pillars consist of 4 (four) main aspects that are in line with SDGs. By integrating these pillars into SER program, WIKA's ensures that SER activities can provide a wider contribution.

Pilar TJSL WIKA
WIKA SER Pillars



ANGGARAN PROGRAM TJSL TAHUN 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program TJSL, WIKA telah menetapkan anggaran yang memadai sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Penetapan anggaran ini mencerminkan keseriusan dan komitmen WIKA untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya, serta memastikan bahwa setiap program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, anggaran program TJSL WIKA sebesar Rp5.000.000.000,-

PENCAPAIAN PROGRAM TJSL TAHUN 2024

Penghargaan yang diraih oleh WIKA sepanjang tahun 2024 merupakan bukti nyata dari komitmen Perseroan dalam penerapan program TJSL. Penghargaan ini mencerminkan pengakuan atas upaya WIKA dalam menerapkan program TJSL secara konsisten dan berdampak. Berikut penghargaan yang diterima WIKA pada tahun 2024 atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan:

2024 SER PROGRAM BUDGET

In order to support its SER programs, WIKA's has allocated an adequate budget as outlined in the Company's Work Plan and Budget. This budget allocation reflects WIKA's earnestness and commitment to fulfilling its social responsibilities and ensures that each program is designed to be implemented effectively and efficiently. Referring to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises, WIKA's SER program budget was set at Rp 5,000,000,000.

SER PROGRAM ACHIEVEMENT IN 2024

The awards received by WIKA's throughout 2024 are a tangible proof of the Company's commitment to implementing SER programs. These awards reflect recognition of WIKA's consistent and impactful efforts in executing SER programs. The following are awards received by WIKA's in 2024 for implementing Social and Environmental Responsibility programs:

Penghargaan atas Pelaksanaan Program TJSL Tahun 2024 Awards for SER Programs in 2024

Ajang Penghargaan Event	Kategori Category	Pemberi Penghargaan Awarded by
Penghargaan Transparansi dan Penurunan Emisi Korporasi Terbaik Tahun 2024 Best Corporate Transparency and Emission Reduction Award 2024	Predikat "Green" untuk Transparansi Penurunan Emisi Korporasi "Green" Predicate for Corporate Emission Reduction Transparency	InvestorTrust
Penghargaan Transparansi dan Penurunan Emisi Korporasi Terbaik Tahun 2024 Best Corporate Transparency and Emission Reduction Award 2024	Predikat "Platinum" untuk Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi. "Platinum" Predicate for Corporate Emission Calculation Transparency	InvestorTrust
IDX Channel Anugerah ESG 2024 IDX Channel ESG Award 2024	Kategori Infrastruktur melalui pengimplementasian ESG dalam Strategi Transformasi WIKA. Infrastructure Category through implementation of ESG in WIKA's Transformation Strategy	IDX Channel
Anugerah Ekonomi Hijau Green Economy Award	Penggunaan Material Bangunan Ramah Lingkungan Use of Environmentally Friendly Building Materials	Detik.com
Predikat Konstruksi Berkelanjutan Sustainable Construction Predicate	PREDIKAT UTAMA FIRST PREDICATE untuk dua proyek strategis WIKA, yaitu Proyek Bendungan Sadawarna dan Proyek Pembangunan Jembatan Kretek 2 Lot 3. Use of Environmentally Friendly Building Materials	Kementerian PUPR Ministry of Public Works and Housing Regional
Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024 Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024	Gold Rank Gold Rank	National Center for Corporate Reporting (NCCR) bekerja sama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioner (ICSP) National Center for Corporate Reporting in collaboration with Institute of Certified Sustainability Practitioner (ICSP)
Indonesia CSR Award (ICA) 2024 Indonesia CSR Award (ICA) 2024	Predikat Platinum Platinum Predicate mencapai Subjek Inti 4D Lingkungan melalui Wikasatrian sebagai pusat kepemimpinan yang mengusung konsep alam dan pelestarian lingkungan dengan judul program "Wikasatrian Representation of Sustainability Ecosystem Development at the WIKA Leadership Center." for achieving Core Subject 4D Environment through WIKAsatrian as a leadership center promoting nature and environmental preservation, with the program title "WIKAsatrian Representation of Sustainability Ecosystem Development at the WIKA Leadership Center."	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)

STRATEGI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PELAKSANAAN PROGRAM TJLS

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan WIKA atas pelaksanaan program TJSL sepanjang tahun 2024 adalah langkah penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Proses ini tidak hanya membantu dalam mengukur kinerja dan pencapaian, tetapi juga memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Dengan demikian, WIKA dapat terus melakukan perbaikan yang diperlukan, memastikan bahwa setiap inisiatif TJSL memberikan dampak positif yang maksimal.

STRATEGY TO ADDRESS CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF SER PROGRAMS

Monitoring and evaluation conducted by WIKA's on the implementation of SER programs throughout 2024 is an important step in ensuring the effectiveness and sustainability of the programs. This process does not only assist in measuring performance and achievements but also provides valuable insights into factors that influence the success of the program. As a result, WIKA's can continue making necessary improvements, ensuring that each SER initiative has the maximum positive impact.

Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan sepanjang tahun 2024, WIKA telah memetakan sejumlah tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program, yakni sebagai berikut:

1. Kondisi keuangan Perseroan yang sedang dalam masa restrukturisasi sehingga program yang sudah direncanakan perlu untuk ditinjau kembali agar lebih efisien secara anggaran namun tetap memberikan dampak yang signifikan bagi penerima manfaat.
2. Belum maksimalnya integrasi pelaporan program TJSL yang dilakukan di masing-masing area operasinya.
3. Peningkatan *awareness* dari para *stakeholder* terutama karyawan Internal Perseroan untuk dapat berperan aktif dalam target keberlanjutan yang telah dicanangkan oleh Perseroan.
4. Belum maksimalnya penggunaan IT dalam *monitoring* kolektabilitas program PUMK.

Dengan memetakan tantangan-tantangan ini, WIKA merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasinya dan memastikan keberhasilan program TJSL yang lebih baik di masa mendatang. Adapun strategi WIKA dalam mengatasi tantangan adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada Dampak
 - a. Pengukuran SROI di 3 (tiga) Program TJSL
 - b. Evaluasi berkala terhadap peningkatan skala bisnis UMK yang menjadi Mitra Binaan
 - c. *Monitoring* dan evaluasi penyaluran yang tepat sasaran
2. Perbaikan Tata Kelola
 - a. Perkuatan Fungsi Manajemen Risiko (Manrisk)
 - b. Perkuatan fungsi ERP dengan mengadopsi SAP dan Digitalisasi Proses Keuangan
 - c. Peningkatan Kompetensi Pemahaman SROI
 - d. Peningkatan Kompetensi Pegawai TJSL
 - e. Perkuatan Implementasi ESG
3. Pemanfaatan Teknologi
 - a. Pengisian Portal TJSL BUMN secara rutin
 - b. Pemanfaat *Renewable Energy* Produk dalam kegiatan TJSL
 - c. Mendorong UMK Melalui Pojok UMK dan *Vending Machine*
 - d. Mendorong Pembuatan *Dashboard* PUMK dengan berkolaborasi dengan IT *Division*
4. Peningkatan *Engagement* Karyawan

Partisipasi dalam Program Relawan Bakti BUMN dan BUMN Hijau sebagai *Green Ambassador*. Selain itu, sebanyak 2.862 karyawan yang terlibat dalam kegiatan TJSL Perusahaan selama tahun 2024.
5. Peningkatan Kolaborasi Internal dan Eksternal

Sepanjang tahun 2024, WIKA telah melakukan 7 (tujuh) program kolaborasi dengan BUMN lain di 4 (empat) provinsi di seluruh Indonesia antara lain Kalimantan Timur, Jakarta, Yogyakarta, dan Likupang, Sulawesi Utara. Selain itu, Pada tahun 2024 juga dalam rangka HUT WIKA ke-64, TJSL WIKA melakukan seminar pencegahan stunting yang diselenggarakan serentak di 64 titik di seluruh Indonesia dengan melibatkan 6.400 balita dan ibu hamil.

Based on the monitoring and evaluation results throughout 2024, WIKA's has mapped several challenges faced during the program's implementation, as follows:

1. The Company's financial condition is undergoing restructuring; hence the planned programs need to be reviewed to be more budget-efficient while still providing significant impact for beneficiaries.
2. The integration of SER program reporting in each operational area has not been fully optimized.
3. Raising awareness among stakeholders, especially internal employees, to actively participate in the sustainability targets that have been launched by the Company.
4. Suboptimal use of IT in monitoring the collectability of PUMK program.

By mapping these challenges, WIKA then formulated strategic steps needed to address them and ensure the future success of SER programs. WIKA's strategy to overcome these challenges includes:

1. Focus on Impact
 - a. SROI measurement in 3 (three) SER programs
 - b. Periodic evaluations of business scale improvement of SMEs that are fostered partners.
 - c. Monitoring and evaluating targeted distribution
2. Governance Improvement
 - a. Strengthening Risk Management function
 - b. Strengthening ERP function by adopting SAP and digitalizing financial process.
 - c. Enhancing SROI understanding competencies
 - d. Improving SER employee competencies
 - e. Strengthening ESG implementation
3. Utilization of Technology
 - a. Regularly filling the SOE SER portal
 - b. Utilizing renewable energy products in SER activities
 - c. Encouraging SMEs through the SME Corner and Vending Machine
 - d. Encouraging the creation of a PUMK dashboard by collaborating with IT Division
4. Employee Engagement Improvement

Participation in SOE Volunteer Program and Green SOEs as Green Ambassadors. Additionally, 2,862 employees participated in the Company's SER activities during 2024.
5. Internal and External Collaboration Enhancement

Throughout 2024, WIKA conducted 7 (seven) collaboration programs with other SOEs in 4 (four) provinces across Indonesia, including East Kalimantan, Jakarta, Yogyakarta, and Likupang, North Sulawesi. In addition, for WIKA's 64th anniversary in 2024, WIKA's SER program held a seminar on stunting prevention simultaneously at 64 locations across Indonesia, involving 6,400 toddlers and pregnant women.

RENCANA STRATEGIS PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2025

STRATEGIC PLAN FOR SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS IN 2025



Penyusunan rencana kerja dan anggaran program TJSL dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Hal ini memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan memenuhi standar yang diharapkan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terbagi 4 (empat) Pilar utama yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, Pilar Lingkungan, dan Pilar Hukum Tata Kelola yang disesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara global. Adapun rencana strategis program TJSL WIKA untuk tahun 2025 yang juga menjadi bagian dari *Key Performance Indicator* (KPI) TJSL dari Kementerian BUMN, adalah sebagai berikut:

The preparation of work plan and budget for SER program is guided by the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises. This ensures that each program aligns with government policies and meets the expected standards for the implementation of social and environmental responsibilities, which are divided into four main pillars: Economic Pillar, Social Pillar, Environmental Pillar, and Legal & Governance Pillar, which are adjusted to Sustainable Development Goals globally. The strategic plan for WIKA's SER program for 2025, which is also part of Key Performance Indicators (KPIs) for SER from the Ministry of SOEs, are as follows:

No	Aspek Aspects
1	<p>Aspek Fokus pada Dampak, yaitu pengukuran dampak 3 (tiga) program TJSL dengan metode <i>Social Return on Investment</i> (SROI), minimal 1 (satu) di antaranya adalah program <i>Creating Shared Values</i></p> <p>Focus on Impact Aspect, which includes measuring the impact of 3 (three) SER programs using Social Return on Investment (SROI) method, with at least 1 (one) of them being a <i>Creating Shared Values</i> program.</p>
2	<p>Aspek Peningkatan Tata Kelola, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecukupan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pelaksanaan Program TJSL BUMN b. Peningkatan Kompetensi SDM <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan memiliki minimal 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi di bidang <i>Sustainability</i>. 2. Seluruh karyawan pengelola TJSL mendapatkan pelatihan terkait kompetensi TJSL. <p>Governance Improvement Aspect, which consists of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adequacy of Standard Operating Procedures (SOP) for SOE SER Programs b. Improvement of Human Resources Competencies <ol style="list-style-type: none"> 1. The Company has at least 1 (one) employee certified in the field of Sustainability. 2. All employees managing SER program receive training related to SER competencies.

No	Aspek Aspects
3	Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi, yaitu pemenuhan pengisian data dalam sistem informasi TJSL Kementerian BUMN Utilization of Information Technology Aspect, namely fulfilling data entry in the Ministry of SOEs' SER information system.
4	Aspek Peningkatan Kolaborasi, yaitu pelaksanaan kolaborasi program TJSL antar BUMN dan Pihak Lain Collaboration Improvement Aspect, namely the collaboration of SER program among SOEs and other parties.
5	Aspek Peningkatan <i>Engagement</i> Karyawan, yaitu pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan oleh seluruh karyawan BUMN Employee Engagement Improvement Aspect, namely the execution of social community activities by all SOE employees.

PROGRAM PENDANAAN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

WIKA memahami pentingnya dimensi pelaksanaan program Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PUMK) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Program Kemitraan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Komitmen WIKA untuk tumbuh dan berkembang harmonis bersama masyarakat merupakan refleksi dari kepekaan dan kepedulian Perseroan dalam upaya membangun masyarakat secara bersama-sama. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), WIKA menyadari bahwa keberhasilan operasional Perseroan tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif masyarakat.

Melalui program PUMK, WIKA berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di pasar. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berfokus pada pemberdayaan, WIKA tidak hanya berusaha untuk menciptakan dampak positif bagi pelaku UMKM, tetapi juga untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program ini mencerminkan visi WIKA dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

Program kemitraan merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari BUMN yang berbentuk dana bergulir atau pemberian pinjaman modal usaha dan sarana produksi. Adapun UMKM yang ingin memanfaatkan program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil Perseroan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga pendanaan atau perbankan;
3. diutamakan usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dengan bidang dan/atau mendukung bisnis BUMN;
4. diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN;
5. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar;
6. berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum; dan
7. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

FUNDING AND DEVELOPMENT PROGRAM FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES

Funding Program for Micro and Small Enterprises

WIKA understands the importance of Micro, Small, and Medium Enterprise Funding Program (PUMK) as a strategic measure to improve the economy of the people. Partnership Program is aimed at enhancing the capabilities of small businesses to become more resilient and independent. WIKA's commitment to growing and thriving harmoniously with the community reflects its sensitivity and care in working together to build society. As one of Indonesia's State-Owned Enterprises (SOE), WIKA recognizes that the Company's operational success cannot be separated from support and active participation of the community.

Through PUMK Program, WIKA is committed to supporting micro and small business owners in overcoming challenges and seizing market opportunities. With an integrated and empowerment-focused approach, WIKA strives not only to create a positive impact for MSME players but also to contribute to sustainable economic growth and overall community welfare. This program embodies WIKA's vision of improving the quality of life through local economic empowerment.

Partnership Program is aimed at enhancing the capabilities of small businesses to become more resilient and independent by utilizing funds from state-owned enterprises in the form of revolving funds/ business capital loans and production facilities. MSMEs that wish to utilize the Company's micro and small enterprise funding program must meet the following criteria:

1. Owned by Indonesian citizens;
2. Have not met the criteria or access to loans from funding institutions or banks;
3. Micro and small businesses that are in line with or support the business fields of SOE is prioritized;
4. Micro and small businesses located in the working areas of SOE is prioritized;
5. Independently operated, not subsidiaries or branches directly or indirectly owned, controlled, or affiliated with medium or large enterprises;
6. Formed by individuals and/or groups of individuals, unincorporated businesses, or legal entities; and
7. Have potential and business prospects to be developed.

Bentuk penyaluran dana program kemitraan adalah:

1. Pinjaman modal kerja atau pembelian aset dalam rangka peningkatan produksi dan penjualan dengan jangka waktu 2-3 tahun.
2. Pinjaman dengan jangka waktu 1 tahun untuk memenuhi pesanan rekanan mitra binaan dengan perjanjian pinjaman antara WIKA, Mitra Binaan dan Rekanan Mitra Binaan dengan kondisi yang ditetapkan oleh WIKA.

Adapun realisasi dana program PUMK tahun 2024 tercatat sebesar Rp7.120.000.000,- atau 34,73% dari Rencana Kerja Anggaran tahun 2024 sebesar Rp20.500.000.000,-

Pada tahun 2024, penyaluran program PUMK dapat diklasifikasikan berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah penyaluran, sebagai berikut:

The forms of distribution of Partnership Program Fund are:

1. Loan for working capital or asset purchase in order to increase production and sales with a term of 2-3 years.
2. Loan with a term of 1 year to fulfill order from fostered partner with a loan agreement between WIKA, Fostered Partner, and Partner of Fostered Partner with conditions determined by WIKA.

The realization of PUMK program funds in 2024 was recorded at Rp7,120,000,000 or 34.73% of 2024 Budget Work Plan of Rp20,500,000,000.

In 2024, PUMK Funding program distribution can be classified based on business sector and distribution area, as follows:

Penyaluran Program PUMK dan Jumlah Mitra Binaan Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2024 MSME Funding Program Distribution and Number of Fostered Partners Based on Business Sector in 2024

Sektor Usaha Business Sector	Realisasi 2024 2024 Realization	
	Jumlah Mitra Binaan Number of Fostered Partners	Nilai (Rp Juta) Value (Rp-million)
Peternakan Farm	1	120.000.000
Lainnya (BRI) Other (BRI)	1	7.000.000.000
TOTAL	2	7.120.000.000

Penyaluran Program PUMK dan Jumlah Mitra Binaan Berdasarkan Wilayah Penyaluran Tahun 2024 MSME Funding Program Distribution and Number of Fostered Partners Based on Distribution Area in 2024

Wilayah Area	Realisasi 2024 2024 Realization	
	Jumlah Mitra Binaan Number of Fostered Partners	Nilai (Rp Juta) Value (Rp-million)
Jawa Barat West Java	2	7.120.000.000

Program Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Komitmen WIKA dalam memberikan pembinaan berkelanjutan bagi mitra binaan merupakan upaya untuk memberdayakan UMKM secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang fokus pada tata kelola, relevansi kebutuhan, dan dampak yang terukur, WIKA mendukung pelaku usaha mikro dan kecil untuk terus berkembang, menjadi lebih mandiri, dan berkontribusi sebagai penggerak ekonomi di wilayah mereka masing-masing.

Program pembinaan yang dilakukan WIKA dirancang untuk mendorong pengembangan usaha kecil menengah yang tangguh dan berdaya saing tinggi, agar mereka dapat menjadi UMKM yang "naik kelas" dan semakin mandiri dalam operasionalnya. Pembinaan ini tidak hanya membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas mereka, tetapi juga bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bimbingan dan bantuan bagi para pengusaha dari golongan ekonomi lemah, dengan fokus yang kuat pada pencapaian tujuan berkelanjutan yang terintegrasi, terarah, dan terukur.

Coaching Program for Micro and Small Businesses

WIKA's commitment to providing continuous development for fostered partners reflects its efforts to comprehensively empower MSMEs. Through an approach focused on governance, relevance to needs, and measurable impact, WIKA supports micro and small business actors to grow, become more independent, and contribute as economic drivers in their respective regions.

The coaching programs conducted by WIKA are designed to promote the growth of resilient and highly competitive small and medium enterprises, enabling them to advance to a higher level and operate more independently. This program not only helps business owners enhance their capacity but also aims to optimize the implementation of coaching and assistance programs for entrepreneurs from economically disadvantaged groups, with a strong focus on achieving integrated, targeted, and measurable sustainable goals.

Selaras dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disalurkan untuk mitra binaan merupakan bagian integral dari program penyaluran dana TJSL yang dijalankan oleh WIKA. Penyaluran dana pembinaan ini diarahkan agar mitra binaan dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Sampai 31 Desember 2024 WIKA mencatat terdapat sebanyak 2 (dua) mitra binaan dengan surat dari Kementerian BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal: Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK"). Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 123 mitra binaan.

MEKANISME S PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Dalam rangka menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan, serta pengelolaan dampak, program TJSL Perseroan sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan program TJSL WIKA yang berpedoman pada rencana kerja, WIKA mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang tertuang pada pasal 16. Dimana WIKA senantiasa melakukan pengawasan secara intensif untuk mengetahui kondisi faktual mitra binaan, sekaligus menjadi bagian dari pembinaan, penagihan serta pelaporan. Pada tahun 2024 WIKA menunjuk KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) untuk mengaudit Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024.

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Bentuk nyata komitmen WIKA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan salah satunya diwujudkan dalam program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melalui program CSR, Perseroan berupaya untuk dapat terus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan wilayah operasi Perseroan, maupun wilayah lain di Indonesia.

In line with the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises, coaching funds distributed to fostered partners form an integral part of WIKA's SER fund disbursement program. These funds are directed to ensure that fostered partners can grow and develop into more independent and competitive businesses. As of December 31, 2024, WIKA recorded a total of 2 (two) fostered partners, as referenced in a letter from the Ministry of SOE No. S-721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022, regarding Cooperation Program for Micro and Small Business Funding ("PUMK Cooperation Program"). This number experienced a decrease compared to 2023, which recorded 123 fostered partners.

MECHANISM FOR REVIEWING THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM

In order to ensure the implementation, achievement of success, and impact management of the Company's SER program in line with priorities and/or objectives as outlined in WIKA's SER program work plan, WIKA adheres to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. Per-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises, stipulated in article 16, where WIKA consistently conducts intensive supervision to determine factual conditions of fostered partners, as well as being part of coaching, billing, and reporting. In 2024, WIKA appointed KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, and Partners (RSM Indonesia) to audit Micro and Small Business (SME) Funding Program Report for 2024 Fiscal Year.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM

A tangible form of WIKA's commitment to supporting sustainable development is reflected in its Corporate Social Responsibility (CSR) program. Through its CSR initiatives, the Company strives to continuously deliver maximum benefits, particularly to communities surrounding its operational areas as well as other regions across Indonesia.

Program TJSL yang dilakukan WIKA Tahun 2024 WIKA's SER Program in 2024

JANUARI
JANUARY



Program Sembako Awal Tahun
Early Year Basic Food Packages Program

FEBRUARI
FEBRUARY



Program Dukungan Pembangunan nasional (DPN) Yayasan
Pemberdayaan Cirebon, Al Akbar, Caruban Mulia
National Development Support Program (DPN) Cirebon
Empowerment Foundation, Al Akbar, Caruban Mulia

MARET
MARCH



Program Donor Darah Triwulan
Quarterly Blood Donation Program

MARET
MARCH



Program TJSL HUT WIKA 2024 (Elektrifikasi, Osmosis, Seminar
Pemberdayaan Wanita)
SER Program at 2024 WIKA Anniversary (Electrification, Osmosis,
Women's Empowerment Seminar)

MARET
MARCH



Program Penghijauan Lingkungan, Penanaman 6.400 Pohon
Environmental Greening Program, Planting 6,400 Trees

APRIL
APRIL



Program Ramadhan – Safari Ramadhan – Sembako Ramadhan
wilayah kerja WIKA
Ramadhan Program – Ramadhan Safari – Ramadhan Basic Food
Packages in WIKA working areas


Program TJSL yang dilakukan WIKA Tahun 2024 WIKA's SER Program in 2024

APRIL



Bantuan Mudik Asyik BUMN
Assistance for SOE Fun Homecoming

MAY



Program Tanggap Bencana - Bawean
Disaster Response Program at Bawean

JUNI




Bantuan Idul Adha Qurban
Eid al-Adha Qurban assistance

JUNI




Program Beasiswa WIKA
WIKA Scholarship Program

JULI



Kolaborasi BUMN Pelita Warna
Pelita Warna SOE Collaboration

AGUSTUS



Pameran Mitra Binaan Inacraft, Bazar Ramadhan, Vending Machine
Inacraft Partners Exhibition, Ramadhan Bazaar, Vending Machine

Program TJSL yang dilakukan WIKA Tahun 2024 WIKA's SER Program in 2024

AGUSTUS
AUGUST



Bantuan Kebakaran Manggarai
Manggarai Fire Assistance

AGUSTUS
AUGUST



Program Bantuan Sayap Ibu
Sayap Ibu Assistance Program

AGUSTUS
AUGUST



Program Kolaborasi Nata Kota
Nata Kota Collaboration Program

AGUSTUS
AUGUST



Program Perbaikan Jalan Desa
Village Road Improvement Program

SEPTEMBER
SEPTEMBER



Pojok UMKM
MSME Corner


OCTOBER
OCTOBER



Kolaborasi Beasiswa TNI Polri
TNI Polri Scholarship Collaboration


Program TJSL yang dilakukan WIKA Tahun 2024
WIKA's SER Program in 2024

NOVEMBER



Pelita Warna – Lapas Wanita Pondok Bambu
Peliita Warna – Women's Prison at Pondok Bambu

NOVEMBER



Pelatihan UMKM – Mitra Jasa
MSME Training – Mitra Jasa

DECEMBER



Program Aksi Tanam Pohon – Laswi
Tree Planting Action Program – Laswi

BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN

Sepanjang tahun 2024, WIKA merealisasikan anggaran TJSL Non PUMK sebesar Rp4.996.249.294,- mencapai 99,99% dari anggaran yang ditetapkan RKA.

COSTS INCURRED

Throughout 2024, WIKA realized a Non-PUMK SER budget of Rp4,996,249,294, reaching 99.99% of the budget set in the Work Plan & Budget (RKA).







Laporan
Keuangan
2024

Financial Report 2024



BUMN UNTUK
INDONESIA

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
FOR THE YEARS ENDED

TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND 31 DECEMBER 2023



Daftar Isi

**Halaman/
Pages**

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi

Directors' Statement Letter

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

**Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 WKA Tower 1&2 Jakarta 13340
T+6221-8047 9200
info@wika.co.id
www.wika.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

We are undersigned

Nama	:	Agung Budi Waskito	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340	:	Office Address
Nomor Telepon	:	021-8192808	:	Phone Number
Alamat Domisili	:	Perumahan Rafless Hills Blok C. 7 No. 22 RT 002 RW 015 Harjamukti Cimanggis, Depok 16454	:	Domicile Address
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Position

Nama	:	Adityo Kusumo	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340	:	Office Address
Nomor Telepon	:	021-8192808	:	Phone Number
Alamat Domisili	:	Premier Riviera Blok K No. 10 RT 005 RW 002 Jatinegara, Cakung Jakarta Timur 13930	:	Domicile Address
Jabatan	:	Direktur Keuangan / Finance Director	:	Position

Dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Menyatakan bahwa :

In the above position on behalf of the Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. state that :

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar ; | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements PT Wijaya Karya (Persero) Tbk</i> 2. <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with financial accounting standard in Indonesian</i> 3. a. <i>All information contained in the company's financial statements are complete and correct</i> |
|---|---|



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Jl. D1, Panjaitan Kur, F-10 WIKA Tower 1&2, Jakarta 12140
T: +6221 8067 9200
admin@wika.co.id
www.wika.co.id

- b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan

b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, do not omit material information and facts

We are responsible for the company's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This statements letter is made truthfully

Jakarta, 26 Maret 2025 / March 26, 2025

**Direktur Utama /
President Director**

**Direktur Keuangan /
Finance Director**

Agung Budi Waskito

Adityo Kusumo



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Nomor/Number : 00353/2.1030/AU.1/03/1155-1/1/IBR025

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya ("Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah mematuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("The Company") and its subsidiaries ("The Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated changes in equity, and consolidated cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

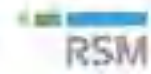
Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group, in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with those requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Untuk lebih jelasnya, silakan lihat halaman 103-104 dan 105-106.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan





Anne Muli Kusul, Aryanis, Murni W. Rizki

Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha

Selanjutnya yang diungkapkan dalam Catatan 56 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup telah mencatat rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.593 miliar yang mengakibatkan defisit sebesar Rp0,539 miliar. Selain itu, terdapat gagal bayar obligasi dan sukuk mudharabah yang jatuh tempo tanggal 18 Februari 2025 masing-masing sebesar Rp593,9 miliar dan Rp412,0 miliar. Kondisi tersebut, beserta hal-hal lainnya yang diungkapkan dalam Catatan 56 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut diuraikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dari dalam menemukakan opini, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Selain hal yang diuraikan dalam paragraf Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha, kami telah menentukan hal-hal yang diuraikan di bawah ini sebagai hal audit utama yang diumumkan dalam laporan kami.

1. Restructuring of Prisma Bank and Lembaga Keuangan

Pada tanggal 23 Januari 2024, Perusahaan dan PT Wijaya Karya Serang Panimbang (WSP) melakukan restrukturisasi pinjaman sebesar Rp24,94 triliun kepada bank dan lembaga keuangan. Berdasarkan PSAK 109 tentang "instrumen keuangan" dampak restrukturisasi adalah signifikan, sehingga Perusahaan dan WSP menghitung nilai wajar utang saat restrukturisasi dan mengakui keuntungan restrukturisasi bersih sebesar Rp4,49 triliun yang diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pengungkapan Grup mengenai utang bank dan lembaga keuangan dijelaskan dalam Catatan 26 dan 37 di laporan keuangan konsolidasian.

Material Uncertainty Related to Going Concern

We draw attention to Note 56 in the consolidated financial statements, which indicates that the Group incurred a net loss amounting to Rp2,593 billion during the year ended December 31, 2024 which resulting in a deficit amounting to Rp0,539 billion. Furthermore, there was a default on bonds and sukuk mudharabah which matured on February 18, 2025 amounting to Rp593,9 billion and Rp412,0 billion. These conditions, along with other matters as disclosed in Note 56 in the consolidated financial statements, indicate that a material uncertainty exists that may cast significant doubt on the Group's ability to continue its a going concern. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to the matter described in the Material Uncertainty Related to Going Concern section, we have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

1. Restructuring of Bank and Financial Institution Loans

On January 23, 2024, the Company and PT Wijaya Karya Serang Panimbang (WSP) restructured loans amounting to Rp24.94 trillion to banks and financial institutions. Based on PSAK 109 on "financial instruments" the impact of the restructuring is significant, therefore the Company and WSP calculated the fair value of the debt during the restructuring and recorded a net restructuring gain amounting to Rp4.49 trillion which was recognized in the current year's statement of profit or loss.

The Group's disclosures regarding bank and financial institution loans are described in Notes 26 and 37 to the consolidated financial statements.





Audit Abstrak **Arjuna Mawar & Rekan**

Kami melakukan prosedur audit atas hal-hal ini termasuk:

- Memahami secara menyeluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian Master Restructuring Agreement (MRA);
- Melakukan review dampak restrukturisasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam PSAK 109;
- Melakukan review atas perhitungan keuntungan restrukturisasi yang diakui oleh Perusahaan dan WSP dalam laporan keuangan, termasuk menilai kewajaran metode dan asumsi yang digunakan di dalam perhitungan yang dibuat oleh Penilai;
- Melakukan penelaahan secara rinci terhadap perhitungan amortisasi atas keuntungan restrukturisasi yang telah diakui, untuk memastikan bahwa amortisasi dilakukan secara sistematis menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan pelunasan pinjaman;
- Menelaah kepatuhan Perusahaan dan WSP terhadap persyaratan dan batasan (covenants) yang telah ditetapkan dalam perjanjian restrukturisasi, termasuk menganalisa rasio keuangan dan komitmen lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan restrukturisasi; dan
- Melakukan prosedur konfirmasi kepada masing-masing kreditor untuk memastikan keakuratan dan keberadaan saldo pinjaman serta persetujuan atas ketentuan baru hasil restrukturisasi.

We performed audit procedures on this matter including:

- Understand thoroughly the requirements stipulated in the Master Restructuring Agreement (MRA);
- Review the impact of restructuring based on the provisions stated in PSAK 109;
- Review the calculation of gain on restructuring recognized by the Company and WSP in the financial statements, including assessing the reasonableness of the methods and assumptions used in the calculations made by the Appraiser;
- Review in detail the calculation of amortization of gain on restructuring that have been recognized, to ensure that amortization is carried out systematically using the effective interest rate method until the loan is fully paid;
- Review the Company's and WSP compliance with the terms and covenants agreed upon in the restructuring agreement including analyzing financial ratios and other commitments that may affect the continuity of the restructuring; and
- Conduct confirmation procedures with each creditor to ensure the accuracy and existence of the loan balance and approval of the new provisions resulting from the restructuring.

7. Jumlah Terputihkan Nilai dan Beban Pemunutan Nilai Pos Pekerjaan Dalam Proses Konstruksi (PDPK)

PDPK merupakan biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan yang diakui sebagai aset, yang berhubungan langsung dengan kontrak dimana Grup dapat mengidentifikasi secara spesifik, menghasilkan atau meningkatkan sumber daya Grup yang akan digunakan dalam memenuhi (atau terus memenuhi) kewajiban pekerjaan dalam masa depan dan diharapkan dapat digulirkan. Grup menelaah penurunan nilai PDPK setiap kali peristiwa atau perubahan keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Rupa penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset, melebihi jumlah kepulihannya. Perhitungan manajemen atas estimasi penurunan nilai PDPK melibatkan asumsi dan pertimbangan yang signifikan. Grup menelaah estimasi penurunan nilai PDPK berdasarkan kendali masing-masing proyek dengan mempertimbangkan data historis, asumsi atau

2. Recoverable Amount and Impairment Expense of Constructing Work in Process (CWIP)

CWIP represents costs incurred in fulfilling contract with customers which recognized as an asset, that relate directly to a contract that the Group can specifically identify, generate or enhance resources of the Group that will be used in satisfying (or continuing to satisfy) performance obligations in the future and are expected to be recovered. The Group reviews the CWIP for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized when the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. The calculation of the management on the estimated impairment of CWIP involves significant estimates and judgments. The Group reviews the estimated impairment of CWIP based on the condition of each project by considering historical data,





Atma Rini Handayani, Arsyanto, Mulyana & Rekanan

ekspektasi kondisi masa depan. Perubahan probabilitas kegagalan untuk mengklaim dapat berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mencatat PDPK bersih sebesar Rp3.312 miliar, mencatat cadangan kerugian penurunan nilai atas PDPK tersebut sebesar Rp2.822 miliar.

Pengungkapan Grup mengenai PDPK dijelaskan dalam Catatan 2.k dan 15 atas laporan keuangan konsolidasian.

Kami melakukan prosedur audit atas hal ini termasuk:

- Memahami pengendalian dan proses manajemen untuk menentukan jumlah terpulihkan PDPK dan menilai risiko salah saji material yang melekat dengan memperimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam menentukan asumsi yang akan diterapkan.
- Kami fokus pada pos PDPK terbesar dengan nilai pengujian lebih dari 85%.
- Berdasarkan uji PCA, kami memeriksa dokumen pendukung PDPK.
- Mengevaluasi kewajaran cadangan penurunan nilai PDPK dengan menguji nilai terpulihkannya dan kerugian penghapusan.
- Memeriksa dokumen pendukung dan berdiskusi dengan Grup untuk cadangan penurunan nilai dan kerugian penghapusan nilai PDPK.
- Kami menguji penghentian pengakuan PDPK ke dokumen pendukungnya dan.
- Untuk estimasi cadangan penurunan nilai, kami mengevaluasi kecukupan cadangan penurunan nilai PDPK yang diterapkan oleh manajemen berdasarkan pengalaman gagal klaim masa lalu.

assumptions or expectations of future conditions. The changes in the probability of failure to claim could have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

As at December 31, 2024, the Group recorded net CWP amounting to Rp3,312 billion, recorded allowance for impairment losses on the CWP amounting to Rp2,822 billion.

The Group's disclosure regarding CWP are described in Notes 2.k and 15 to the consolidated financial statements.

We performed audit procedures over this matter including:

- Understand the management's controls and processes in determining the recoverable amount of CWP and assessed inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and the judgment used in determining assumptions to be applied.
- We focused on the highest CWP balances with a test amount of more than 85%.
- Based on the sampling test, we examined the supporting documents of the CWP.
- Evaluated the reasonableness of the allowance for impairment of CWP by testing its recoverable and loss on write-off amount.
- Checked the supporting documents and discussed with the Group for any allowance for impairment and loss on write-off of CWP.
- We have tested the CWP derecognition to its supporting documents, and
- For the estimation of the allowance for impairment, we evaluated the adequacy of the allowance for impairment of CWP applied by the management based on past experience of filed claims.





Audit Based Audit Assurance Memo & Opinion

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (entitas induk) terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2024, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan catatan atas investasi pada entitas anak (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari data berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan tahun 2024 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain. Dari opini kami ini, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Other Matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2024 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2024 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes on investment in subsidiaries (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which are presented as supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements, are presented for the purposes of additional analysis and are not required part of the above-mentioned consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information are the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above-mentioned consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information have been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the above-mentioned consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the above-mentioned consolidated financial statements taken as a whole.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The 2024 annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

003532.1639/AU.1703/1158-1/16/2025.

Y





Aspek Minda, Hati, dan Raga, Mawar & Bekim

Selubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain tersebut dapat mengakibatkan ketidaksesuaian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pertimbangan yang kami peroleh selama audit atau menguadring kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan tahun 2024, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan legal yang akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan keuangan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki alasan untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements, or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the 2024 annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations or Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

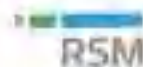
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.





Asim Abdullah, Ayaqita, Maura & Rafiq

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat dipertimbangkan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merencanakan dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemisuan, penghilangan secara sengaja, penyajian salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.





Irjen Makhfiel, Ajiudin, Mawar & Rehan

- Menyimpulkan ketepatan pengungkapan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan audit kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan audit kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeriksa bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan supervisi dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan hasil yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta pihak lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengendalian terkait.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable related safeguards.





Asli Makhzumil Aryanto, Mawar & Rekan

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kali dari oleh kami menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali perubahan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensinya merugikan atau mengomunikasikan hal tersebut akan dikecualikan secara wajar melalui manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Eishannoraz

Nomor dan Akuntan Publik: AP.1158
Public Accountant License Number: AP.1158

Jakarta, 26 Maret 2025 / March 26, 2025



**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	4, 50, 52, 54	3,361,002,876	3,233,071,377	Cash and Cash Equivalents
Bank Dibatasi Penggunaannya	5, 52, 54	2,392,793,739	--	Restricted Bank
Piutang Usaha - Neto	6, 50, 54			Trade Receivables - Net
Pihak Berelasi	52	854,345,376	1,594,510,658	Related Parties
Pihak Ketiga		1,475,905,515	1,715,811,308	Third Parties
Piutang Retensi - Neto	7, 50, 51, 54			Retention Receivables - Net
Pihak Berelasi	52	521,173,657	684,995,873	Related Parties
Pihak Ketiga		762,631,574	887,099,758	Third Parties
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Neto	8			Gross Amount Due From Customers - Net
Pihak Berelasi	52	1,030,278,774	1,171,733,490	Related Parties
Pihak Ketiga		713,227,265	1,291,315,942	Third Parties
Piutang Yang Belum Ditagih	9, 54	709,596,951	754,219,366	Unbilled Receivables
Piutang Lain-lain - Bagian Lancar	10, 54			Other Receivables - Current Portion
Pihak Berelasi	52	257,196,347	277,628,106	Related Parties
Pihak Ketiga		146,817,925	22,167,955	Third Parties
Persediaan	11	11,507,713,961	11,411,411,553	Inventories
Uang Muka	12	594,732,843	879,097,377	Advance Payments
Pajak Dibayar di Muka	29.a	1,309,123,489	1,567,878,116	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar di Muka	13	649,384,600	965,397,972	Prepaid Expense
Jaminan Usaha	14, 55	372,139,435	342,873,172	Business Guarantee
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi - Neto	15			Construction Work in Progress - Net
Pihak Berelasi	51	1,590,622,965	2,687,489,383	Related Parties
Pihak Ketiga		1,721,925,113	1,314,954,576	Third Parties
Aset Lancar Lain-lain	25, 54	267,906,166	--	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar		30,238,518,571	30,801,655,982	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Tanah untuk Pengembangan	16	1,438,576,137	2,103,448,150	Land for Development
Investasi pada Entitas Asosiasi	17	2,708,297,133	1,854,701,159	Investment in Associates
Investasi pada Ventura Bersama	18.a	11,388,953,837	12,022,211,820	Investment in Joint Venture
Properti Investasi - Neto	19	1,319,968,081	1,308,363,601	Investment Property - Net
Aset Tetap - Neto	20	5,330,447,409	8,115,699,672	Fixed Assets - Net
Aset Kerja Sama Operasi	21	256,993,010	267,839,243	Joint Operation Assets
Goodwill	22	4,847,052	4,847,052	Goodwill
Investasi Jangka Panjang Lainnya	23, 54	1,034,565,732	1,029,675,332	Other Long Term Investments
Aset Takberwujud	24	9,138,763,702	7,601,854,030	Intangible Assets
Aset Pajak Tangguhan	29.e	18,260,861	32,192,508	Deferred Tax Assets
Aset Tidak Lancar Lain-lain	25, 54	678,151,223	838,747,339	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		33,317,824,177	35,179,579,906	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		63,556,342,748	65,981,235,888	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
6/February 5, 201

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements
paraf:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
As of December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman Jangka Pendek	26, 54			Short Term Loans
Pihak Berelasi	52	350,000,000	12,259,484,231	Related Parties
Pihak Ketiga		203,143,727	5,353,649,981	Third Parties
Utang Usaha	27, 54			Trade Payables
Pihak Berelasi	52	1,154,633,412	2,582,665,010	Related Parties
Pihak Ketiga		4,899,633,937	6,757,179,206	Third Parties
Utang Lain-Lain	28, 54			Other Payables
Pihak Berelasi	52	750,726,379	803,545,789	Related Parties
Pihak Ketiga		268,968,621	138,738,600	Third Parties
Utang Pajak	29.b	316,513,193	757,470,516	Tax Payable
Uang Muka dari Pelanggan	30	1,284,705,478	602,422,968	Advances Received From Customers
Beban Akrua	31, 54	5,515,315,532	5,399,694,690	Accrued Expenses
Pendapatan Diterima di Muka	32	183,078,755	294,178,603	Unearned Revenue
Bagian Jangka Pendek dari				Current Portion of
Pinjaman Jangka Menengah	33, 54	--	1,545,000,000	Medium Term Notes
Liabilitas Sewa	36, 54	30,604,697	44,129,533	Lease Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang	37, 52, 54	1,651,001,043	189,334,468	Long Term Loan
Obligasi	38.a, 54	1,733,750,000	1,066,000,000	Bond
Sukuk	38.b, 54	681,225,000	643,800,000	Sukuk
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		19,023,299,774	38,437,293,595	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Kerja	34	272,215,830	269,871,182	Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	29.e	102,580,639	77,042,686	Deferred Tax Liabilities
Uang Muka dari Pelanggan	30	77,805,829	239,958,656	Advances Received From Customers
Uang Muka Proyek Jangka Panjang	35	856,918,850	1,390,091,889	Advances From Long Term Projects
Utang Lain-Lain	28, 54			Other Payables non current portion
Pihak Berelasi	52	15,689,064	--	Related Parties
Pihak Ketiga		363,183,184	108,251,812	Third Parties
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek				Long Term Portion Net of Current Portion
Pinjaman Jangka Menengah	33, 54	1,705,000,000	235,000,000	Medium Term Notes
Liabilitas Sewa	36, 54	9,821,237	110,642,777	Lease Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang	37, 52, 54	21,309,858,648	5,723,224,755	Long Term Loan
Utang Ventura Bersama	18.b	84,763,791	77,287,294	Joint Venture Payables
Obligasi	38.a, 54	6,272,696,110	7,602,943,200	Bond
Sukuk Mudharabah	38.b, 54	1,591,090,000	2,138,015,000	Sukuk Mudharabah
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		32,661,623,182	17,972,329,251	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		51,684,922,956	56,409,622,846	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Modal Saham				Share Capital
Nilai Nominal: Rp100 (nilai penuh) per Saham				Par Value: Rp100 (full amount) per Share
Modal Dasar				Authorized Capital
2024: 275.000.000.000 Saham				2024: 275,000,000,000 Shares
2023: 35.000.000.000 Saham				2023: 35,000,000,000 Shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				Issued and Fully Paid-Up - Capital
2024: 39.873.063.858 Saham				2024: 39,873,063,858 Shares
2023: 8.969.951.372 Saham	39	3,987,306,386	896,995,137	2023: 8,969,951,372 Shares
Modal Saham Diperoleh Kembali	40	(110,000)	(110,000)	Treasury Shares
Tambahan Modal Disetor	41	9,040,356,181	6,555,498,737	Additional Paid-In Capital
Perubahan Ekuitas Entitas Anak				Changes in Equity of Subsidiaries
Saldo Laba (Defisit)				Retained Earnings (Deficit)
Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya		335,759,957	335,759,957	Appropriated Retained Earnings
Defisit		(9,539,141,220)	(7,200,895,956)	Deficit
Cadangan Lainnya		4,041,487,282	4,041,487,282	Other Reserves
Sub Total		8,868,680,797	5,749,878,346	Sub Total
Kepentingan Non Pengendali	43	3,002,738,995	3,821,734,696	Non Controlling Interest
Jumlah Ekuitas		11,871,419,792	9,571,613,042	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		63,556,342,748	65,981,235,888	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
6/February 5, 201

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	
PENDAPATAN NETO	44	19,242,726,731	22,530,355,784	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	45	(17,724,124,343)	(20,668,209,416)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		1,518,602,388	1,862,146,368	GROSS PROFIT
Beban Usaha				Operating Expenses
Beban Penjualan	46	(20,059,121)	(10,271,158)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	47	(1,223,876,135)	(973,997,585)	General and Administrative Expenses
Penghasilan Lain-lain	48	5,445,683,621	663,475,459	Other Income
Beban Lain-lain	48	(3,734,348,804)	(5,369,804,305)	Other Expenses
Laba (Rugi) Usaha		1,986,001,949	(3,828,451,221)	Operating Profit (Loss)
Beban Keuangan	49	(3,282,890,829)	(3,206,109,247)	Finance Cost
Beban Pajak Penghasilan Final		(336,804,495)	(500,558,070)	Final Income Tax Expenses
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	17	(221,037,466)	(91,143,623)	Share in Loss of Associates
Bagian Rugi Ventura Bersama	18	(606,661,518)	(139,283,235)	Share in Loss of Joint Venture
		(4,447,394,308)	(3,937,094,175)	
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(2,461,392,359)	(7,765,545,396)	LOSS BEFORE INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan	29. c	(52,421,976)	(58,993,601)	Tax Benefit Expenses
RUGI NETO		(2,513,814,335)	(7,824,538,997)	NET LOSS
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penghasilan Komprehensif Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Other Comprehensive Income that Will not be Reclassified Subsequently to Profit or Loss
Pengukuran Kembali				Remeasurement on Defined Benefit Program
Program Imbalan Pasti		(76,437,795)	(74,776,977)	Related Tax
Pajak Penghasilan Terkait		(2,776,718)	381,187	
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income for the Years - Net of Tax
Tahun Berjalan Setelah Pajak		(79,214,513)	(74,395,790)	
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(2,593,028,848)	(7,898,934,787)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
RUGI NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KE:				NET LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		(2,266,814,142)	(7,128,264,152)	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	43	(247,000,193)	(696,274,845)	Non Controlling Interest
JUMLAH		(2,513,814,335)	(7,824,538,997)	TOTAL
TOTAL KERUGIAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		(2,338,245,264)	(7,196,039,754)	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	43	(254,783,584)	(702,895,033)	Non Controlling Interest
TOTAL		(2,593,028,848)	(7,898,934,787)	TOTAL
Rugi Per Saham Dasar (Nilai Penuh)	42	(117.63)	(794.68)	Loss per Share (Full Amount)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
6 February 5, 201

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements
paraf.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF
 CHANGES IN EQUITY**
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 KONSOLIDASIAN**
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Ekuitas yang Dapat Dibebaskan Kepada Pemilik Entitas Induk/
 Equity attributable to Owners of the Parent Entity

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan Di Issued and Fully Paid Capital		Modal Saham Diperdagangkan/ Treasury Stock		Tambahan Modal Additional Paid in Capital		Perubahan Ekuitas Change in Equity of Subsidiaries		Cadangan Lain-lain/ Other Reserves		Saldo Laba yang Penggunaannya Ditentukan Pemisahannya/ Unappropriated Earnings (Loss)		Saldo Laba (Defisit) Retained Earnings (Deficit)		Keperluan Non Non Controlling Interest		Total Ekuitas/ Total Equity			
	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
SALDO 31 DESEMBER 2022																				
Perubahan Ekuitas Entitas Anak																				
Seranan Modal Entitas Anak	43																			
Perubahan Ekuitas Entitas Anak	43																			
Rugi Neto Tahun Berjalan																				
Keuntungan Komprehensif Lain																				
SALDO 31 DESEMBER 2023																				
Perubahan Ekuitas Anak	1,6																			
Perubahan Ekuitas Entitas Anak	41																			
Perubahan Modal	43																			
Rugi Neto Tahun Berjalan																				
Keuntungan Komprehensif Lain																				
SALDO 31 DESEMBER 2024																				
Perubahan Ekuitas Anak	1,6																			
Perubahan Ekuitas Entitas Anak	41																			
Perubahan Modal	43																			
Rugi Neto Tahun Berjalan																				
Keuntungan Komprehensif Lain																				

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2022
 Change in Equity of Subsidiaries
 Paid in Capital of Subsidiaries
 Dividend
 Other Comprehensive Loss
BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2023
 Dividend of Subsidiaries
 Change in Equity of Subsidiaries
 Paid in Capital of Subsidiaries
 Addition Paid in Capital
 Net Loss for the Current Year
 Other Comprehensive Loss
BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2024

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		20,049,348,890	23,763,967,845	Receipts from Customers
Pembayaran Kepada Pemasok		(17,598,941,207)	(24,822,066,532)	Payment to Suppliers
Pembayaran Kepada Direksi dan Karyawan		(1,531,227,051)	(1,649,914,825)	Payments for Director and Employee
Pembayaran Pajak-Pajak	29	(967,633,760)	(608,867,606)	Payment of Taxes
Penerimaan Restitusi Pajak	29.d	116,676,285	151,731,170	Receipt of Tax Refund
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) dari Aktivitas Operasi		68,223,157	(3,165,149,948)	Net Cash Flow Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan Aset Takberwujud	24	(1,349,270,448)	(951,447,007)	Additional in Intangible Assets
Penambahan Jaminan Usaha	14	(29,545,611)	(3,065,520)	Additional Business Guarantee
Pembelian Aset Tetap	20	(300,320,021)	(164,643,906)	Acquisition of Fixed Assets
Penjualan Aset Tetap	20	2,052,896	2,098,100	Sales of fixed assets
Penjualan Aset Kerjasama Operasi	21	--	644,813,300	Sales of Assets in Joint Operation
Penempatan Saham Pada Entitas Asosiasi	17	(100,556,000)	--	Additional Investment In Associates
Pengembalian Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	18	--	80,421,739	Return of Long Term Payable to Associates and Joint Venture
Pengembalian Setoran Modal Entitas Asosiasi	17	--	50,000,000	Retrun of Paid Capital Investment in Associates
Pengembalian Investasi Ventura Bersama	18	978,441,093	280,081,297	Return of Investment in Joint Venture
Penambahan Investasi Ventura Bersama	18	(660,080,106)	(925,642,372)	Additional of Investment in Joint Venture
Penerimaan Bunga	9	76,064,249	34,359,838	Interest Received
Penempatan Bank Dibatasi Penggunaannya	5	(2,392,793,739)	--	Placement of Restricted Bank
Penambahan Uang Muka Investasi	12	(36,852,000)	(10,000,000)	Additional Advance in Investment
Penambahan Aset Lain-Lain	25	(5,006,619)	(11,935,903)	Additional of Other Assets
Penambahan Tanah untuk Pengembangan	16	(810,868)	(74,668,693)	Additional Land for Development
Penambahan Investasi Jangka Panjang Lainnya	23	--	(16,500,000)	Additional in Other Long Term Investments
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(3,818,677,174)	(1,066,129,127)	Net Cash Flows Used in Net Cash Flows Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Modal Disetor		6,087,913,160	--	Additional Paid in Capital
Biaya Emisi Penyertaan Modal Negara		(10,919,980)	--	Issuance Costs
Penerimaan Modal Disetor Pada Entitas Anak (Pembayaran) Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek - Neto	26	(119,387)	3,007,314,418	Additional Paid in Capital in Subsidiaries (Payment of) Proceed from Net Short Term Loans
Pinjaman Jangka Menengah				Medium Term Notes
Pembayaran Pinjaman	33	(25,000,000)	(20,000,000)	Payment of Bank Loans
Pinjaman Jangka Panjang				Long Term Loans
Penerimaan Pinjaman	37	885,060,532	951,718,470	Proceeds From Bank Loans
Pembayaran Pinjaman	37	(229,249,707)	(337,706,690)	Payment of Bank Loans
Pembayaran Liabilitas Sewa	35	(25,808,388)	(97,330,679)	Payment of Lease Liabilities
Pembayaran Obligasi	36.a	(671,000,000)	--	Payment of Bond
Pembayaran Sukuk Mudharabah	38.b	(509,500,000)	--	Payment of Sukuk Mudharabah
Pembayaran Dividen Kepada Kepentingan Non Pengendali	43	(5,685,895)	(22,648,825)	Payment Dividend of Non Controlling Interest
Pembayaran Bunga Pinjaman		(1,536,823,743)	(1,675,220,523)	Payment of Interest
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		3,987,533,592	1,806,126,171	Net Cash Flows Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		237,079,575	(2,425,152,904)	NET INCREASE (DECREASE) ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING		4,013,097	(11,468,839)	EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE
KAS DAN BANK PENGARUH DIVESTASI ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG		(113,161,173)	--	CASH AND BANK EFFECT THE DIVESTMENT OF INDIRECT SUBSIDIARY
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		3,233,071,377	5,669,693,120	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		3,361,002,876	3,233,071,377	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Tambahan Informasi Transaksi Non-Kas Disajikan di Catatan 55

Additional Information of Non-Cash Transaction Presented in Note 55

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Negara Widjaja Karja ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 29 Maret 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1961, dari perusahaan asing bernama "Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co." yang dinasionalisasi Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1971, status Perusahaan berubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan (Persero). Selanjutnya, Perusahaan dinamakan PT Wijaya Karya (Persero) berdasarkan Akta Perusahaan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972 dari Dian Paramita Tamzil, pengganti Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan perubahan naskah pendirian Perseroan Terbatas dari Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Akta No. 106 tanggal 17 April 1973. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 1973 dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/165/14 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 1973, tambahan Berita Negara No. 683.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta No. 7 tanggal 17 Januari 2024 dan Akta No. 37 tanggal 26 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan dibidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan, investasi dan pengelolaan usaha dibidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa.

1. General

1.a. Establishment of the Company

The State Owned Company Widjaja Karja ("the Company") was established on March 29, 1961 based on Government Regulation No. 64 Year 1961, from a foreign company named "Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co." which was nationalized by the Government of the Republic of Indonesia.

According to Government Regulation No. 40 Year 1971, the Company's status was changed from Perusahaan Negara into Perusahaan (Persero). Furthermore, the Company's name was changed to PT Wijaya Karya (Persero) in accordance with the Deed of Limited Liability Corporation No. 110 dated December 20, 1972 of Dian Paramita Tamzil, replacing Djojo Muljadi, S.H., Notary in Jakarta, and the change in the manuscript of establishment of Public Company of Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta was based on Deed No. 106 dated April 17, 1973. The Deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on May 8, 1973 in his Decree No. Y.A.5/165/14 and was published in State Gazette of Republic of Indonesia No. 76 dated September 21, 1973, Supplement No. 683.

The Articles of Association had been amended several times and was last amended by Deed No.7 dated January 17, 2024 and No. 37 dated June 26, 2024 made in presence of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, regarding increasing of authorized capital and issued and fully paid up capital.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the purpose and objective of the Company is to engage in construction industry, manufacturing industry, rental services, agency services, investment, agro-industry, energy industry, renewable energy and energy conversion, railway operation, port management, airport management logistics, trade, engineering procurement construction, area development and management, capacity building services in the field of construction services, information technology, engineering and planning services, investment and business management in the field of infrastructure and basic facilities (infrastructure) to produce goods and/ or services.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan beralamat di Jl. D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur dengan lokasi kegiatan utama di seluruh Indonesia dan luar negeri. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1961.

Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah pemegang saham utama dari Perusahaan.

1.b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 11 Oktober 2007, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-5275/BL/2007 untuk melakukan penawaran umum atas 1.846.154.000 lembar saham seri B dari total 5.846.154.000 lembar saham Perusahaan kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan harga penawaran Rp420 (nilai penuh) per saham yang eror didasarkan pada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) No. KD.01/3406/DPRRI/2007 tanggal 26 April 2007, Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. RIS-15/D2.MBU/2007, tanggal 14 Juni 2007 dan surat persetujuan Menteri Negara BUMN No. S-717/MBU/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang persetujuan program *Employee Stock Allocation (ESA)*, *Employee Stock Option Plan (ESOP)* dan *Management Stock Option Plan (MSOP)*. Pada tanggal 29 Oktober 2007 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

Sampai dengan tahun 2014, Perusahaan menerbitkan total 303.071.000 saham baru untuk pelaksanaan ESOP dan MSOP dan total modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi 6.149.225.000 saham.

Pada tanggal 3 November 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-631/D.04/2016 atas pernyataan pendaftaran dalam melakukan penawaran umum terbatas.

Pada tanggal 25 November 2016 seluruh saham Perusahaan yang diterbitkan melalui penawaran umum terbatas sebanyak 2.820.726.372 saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan penawaran umum tersebut, Perusahaan memperoleh tambahan modal saham sejumlah 2.820.726.372 lembar saham atau sebesar Rp282.072.637.

Pada tanggal 18 Desember 2023, Bursa Efek Indonesia menerbitkan pengumuman

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The Company's head office is located at Jl. D.I Panjaitan Kav. 9-10, East Jakarta, and its main activities are located throughout Indonesia and overseas. The Company started commercial operations in 1961.

The Government of Republic of Indonesia is the ultimate shareholder of the Company.

1.b. Public Offering of the Company's Shares

On October 11, 2007, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) in his letter No. S-5275/BL/2007 for its public offering of 1,846,154,000 shares of B series from total of 5,846,154,000 shares from the Company's shares, with par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp420 (full amount) per share based on the approval of Parliament of the Republic of Indonesia (DPR RI) No. KD.01/3406/ DPRRI/2007, dated April 26, 2007, the Extraordinary Shareholders Meeting No. RIS-15/D2.MBU/2007, dated June 14, 2007 and approval letter of the Minister of State Enterprises No. S-717/MBU/2007 dated October 8, 2007 about Approval of Program *Employee Stock Allocation (ESA)*, *Employee Stock Option Plan (ESOP)* and *Management Stock Option Plan (MSOP)*. On October 29, 2007, these shares were listed on the Jakarta Stock Exchange.

Until the year of 2014, total issued new shares of the Company for ESOP and MSOP are 303,071,000 shares and total issued and paid up capital to 6,149,225,000 shares.

On November 3, 2016, the Company obtained the notice of effectivity from Financial Services Authority (OJK) No. S-631/D.04/2016 for the registration statement in limited offering.

On November 25, 2016, all shares issued by the Company through the limited offering amounting 2,820,726,372 shares were listed in Indonesia Stock Exchange (IDX).

Based on the limited offering, the Company obtained additional share capital of 2,820,726,372 shares with a value Rp282,072,637.

On December 18, 2023, the Indonesian Stock Exchange published an announcement of the

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan dengan No. Peng-SPT-00021/BEI.PP2/12-2023. Perusahaan menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKAO1ACN1) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2023. Hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha Perusahaan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, BEI memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek Perusahaan di Seluruh Pasar terhitung sejak Sesi I Perdagangan Efek tanggal 18 Desember 2023.

Pada tanggal 30 April 2024, BEI menerbitkan pengumuman Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek dengan No. Peng-UPT-00002/BEI.PP2/04-2024. Pengumuman ini mencabut Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan dengan No. Peng-SPT-00021/BEI.PP2/12-2023.

Berdasarkan Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan No. S-52/D.04/2024 tanggal 28 Maret 2024, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II"). Berdasarkan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") tersebut, Perusahaan memperoleh tambahan modal saham sejumlah 30.903.112.486 lembar saham dengan nilai sebesar Rp3.090.311.249.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 saham Perusahaan sejumlah 39.873.063.858 dan 8.969.951.372 lembar saham telah dicatatkan pada BEI.

1.c. Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat keputusan No. S-290/D.04/2020 tanggal 14 Desember 2020 untuk melakukan penawaran umum atas:

Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

Jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.500.000.000 yang terdiri dari 3 seri:

- Seri A sebesar Rp331.000.000 dengan tingkat bunga 8,60% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp429.000.000 dengan tingkat bunga 9,25% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Temporary Suspension of Trading in Company Securities with No. Peng-SPT-00021/BEI.PP2/12-2023. The Company postponed the principal payment of the Wijaya Karya Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I 2020 Series A (SMWIKAO1ACN1) which was due on December 18, 2023. This indicates that there are problems with the Company's business continuity. Considering this, IDX has decided to temporarily suspend Company Securities Trading in all markets starting from Session I of Securities Trading on December 18, 2023.

On April 30, 2024, IDX announced the Revocation of the Temporary Suspension of Trading of Securities with No. Peng-UPT-00002/BEI.PP2/04-2024. This announcement revokes the Temporary Suspension of Trading of the Company's Securities with No. Peng-SPT-00021/BEI.PP2/12-2023.

Based on Notification of the Effectiveness of Statement No. S-52/D.04/2024 dated March 28, 2024, the Company has received an effective register statement regarding Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II"). Based on the Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II"), the Company obtained an additional share capital of 30,903,112,486 shares with a value Rp3,090,311,249.

As of December 31, 2024 and 2023, outstanding shares of the Company amounted to 39,873,063,858 and 8,969,951,372 shares had been listed on the BEI.

1.c. Public Offering of the Bond and Sukuk Mudharabah

The Company received an effective notice from the Chairman of the Financial Services Authority ("OJK") by its decision letter No. S-290/D.04/2020 dated December 14, 2020 to conduct a public offering of:

Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

The principal amount of bonds was Rp1,500,000,000 which consisted of 3 series:

- A series of Rp331,000,000 with an interest rate of 8.60% per annum and a term of 3 years;
- B Series of Rp429,000,000 with an interest rate of 9.25% per annum and a term of 5 years;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- Seri C sebesar Rp740.000.000 dengan tingkat bunga 9,85% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun.

Jangka waktu obligasi Seri A sudah diperpanjang (Catatan 38).

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

Jumlah pokok sukuk sebesar Rp500.000.000 yang terdiri dari 3 seri:

- Seri A sebesar Rp184.000.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 35,83% (setara bunga 8,60% per tahun) dengan jangka waktu 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp159.000.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 38,54% (setara bunga 9,25% per tahun) dengan jangka waktu 5 tahun;
- Seri C sebesar Rp157.000.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 41,04% (setara bunga 9,85% per tahun) dengan jangka waktu 7 tahun.

Perusahaan menerima penuh hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada tanggal 18 Desember 2020. Obligasi dan Sukuk Mudharabah dicatatkan pada BEI.

Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021

Jumlah pokok obligasi sebesar Rp2.500.000.000 yang terdiri dari 3 seri:

- Seri A sebesar Rp495.000.000 dengan tingkat bunga 8,50% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp745.500.000 dengan tingkat bunga 9,10% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun;
- Seri C sebesar Rp1.259.500.000 dengan tingkat bunga 9,75% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun.

Jangka waktu obligasi Seri A sudah diperpanjang (Catatan 37).

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021

Jumlah pokok sukuk sebesar Rp500.000.000 yang terdiri dari 3 seri:

- Seri A sebesar Rp134.300.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 37,28% (setara bunga 8,50% per tahun) dengan jangka waktu 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp211.600.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 39,91% (setara bunga 9,10% per tahun) dengan jangka waktu 5 tahun;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- C Series of Rp740,000,000 with an interest rate of 9.85% per annum and a term of 7 years.

The maturity period of Series A bonds has been extended (Note 38).

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

The principal amount of sukuk was Rp500,000,000 which consisted of 3 series:

- A series of Rp184,000,000 with nisbah revenue sharing ratio of 35.83% (equivalent to interest rate of 8.60% per annum) with a term of 3 years;
- B Series of Rp159,000,000 with nisbah revenue sharing ratio of 38.54% (equivalent to interest rate of 9.25% per annum) with a term of 5 years;
- C Series of Rp157,000,000 with nisbah revenue sharing ratio of 41.04% (equivalent to interest rate of 9.85% per annum) with a term of 7 years.

The Company has fully received the proceed from the issuance of its Bonds and Sukuk Mudharabah on December 18, 2020. Bonds and Sukuk Mudharabah are listed on the IDX.

Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021

The principal amount of bonds was Rp2,500,000,000 which consisted of 3 series:

- A series of Rp495,000,000 with an interest rate of 8.50% per annum and a term of 3 years;
- B Series of Rp745,500,000 with an interest rate of 9.10% per annum and a term of 5 years;
- C Series of Rp1,259,500,000 with an interest rate of 9.75% per annum and a term of 7 years.

The maturity period of Series A bonds has been extended (Note 37).

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021

The principal amount of sukuk was Rp500,000,000 which consisted of 3 series:

- A series of Rp134,300,000 with nisbah revenue sharing ratio of 37.28% (equivalent to interest rate of 8.50% per annum) with a term of 3 years;
- B Series of Rp211,600,000 with nisbah revenue sharing ratio of 39.91% (equivalent to interest rate of 9.10% per annum) with a term of 5 years;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- Seri C sebesar Rp154.100.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 42,76% (setara bunga 9,75% per tahun) dengan jangka waktu 7 tahun.

Perusahaan menerima penuh hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada tanggal 3 Maret 2021. Obligasi dan Sukuk Mudharabah dicatatkan pada BEI.

Jangka waktu sukuk Seri A sudah diperpanjang (Catatan 38).

Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat keputusan No. S-164/D.04/2021 tanggal 31 Agustus 2021 untuk melakukan penawaran umum atas:

Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

Jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.750.000.000 yang terdiri dari 3 seri:

- Seri A sebesar Rp571.000.000 dengan tingkat bunga 8,25% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp197.000.000 dengan tingkat bunga 8,55% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun;
- Seri C sebesar Rp982.000.000 dengan tingkat bunga 9,25% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

Jumlah pokok sukuk sebesar Rp750.000.000 yang terdiri dari 3 seri:

- Seri A sebesar Rp325.500.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 58,92% (setara bunga 8,25% per tahun) dengan jangka waktu 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp91.500.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 61,07% (setara bunga 8,55% per tahun) dengan jangka waktu 5 tahun;
- Seri C sebesar Rp333.000.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 66,07% (setara bunga 9,25% per tahun) dengan jangka waktu 7 tahun.

Perusahaan menerima penuh hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada tanggal 8 September 2021. Obligasi dan Sukuk Mudharabah dicatatkan pada BEI.

Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat keputusan No. SP-001/OBL/KSEI/0122

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- C Series of Rp154,100,000 with nisbah revenue sharing ratio of 42.76% (equivalent to interest rate of 9.75% per annum) with a term of 7 years.

The Company has fully received the proceed from the issuance of its Bonds and Sukuk Mudharabah on March 3, 2021. Bonds and Sukuk Mudharabah are listed on the IDX.

The maturity period of Series A sukuk has been extended (Note 38).

The Company received an effective notice from the Chairman of the Financial Services Authority ("OJK") by its decision letter No. S-164/D.04/2021 dated August 31, 2021 to conduct a public offering of:

Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

The principal amount of bonds was Rp1,750,000,000 which consisted of 3 series:

- A series of Rp571,000,000 with an interest rate of 8.25% per annum and a term of 3 years;
- B Series of Rp197,000,000 with an interest rate of 8.55% per annum and a term of 5 years;
- C Series of Rp982,000,000 with an interest rate of 9.25% per annum and a term of 7 years.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

The principal amount of sukuk was Rp750,000,000 which consisted of 3 series:

- A series of Rp325,500,000 with nisbah revenue sharing ratio of 58.92% (equivalent to interest rate of 8.25% per annum) with a term of 3 years;
- B Series of Rp91,500,000 with nisbah revenue sharing ratio of 61.07% (equivalent to interest rate of 8.55% per annum) with a term of 5 years;
- C Series of Rp333,000,000 with nisbah revenue sharing ratio of 66.07% (equivalent to interest rate of 9.25% per annum) with a term of 7 years.

The Company has fully received the proceed from the issuance of its Bonds and Sukuk Mudharabah on September 8, 2021. Bonds and Sukuk Mudharabah are listed on the IDX.

The Company received an effective notice from the Chairman of the Financial Services Authority ("OJK") by its decision letter No. SP-

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

tanggal 26 Januari 2022 untuk melakukan
penawaran umum atas:

Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II
Tahun 2022

Jumlah pokok obligasi sebesar
Rp1.750.000.000 yang terdiri dari 3 seri:

- Seri A sebesar Rp593.950.000 dengan tingkat bunga 6,50% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp425.150.000 dengan tingkat bunga 7,75% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun;
- Seri C sebesar Rp730.900.000 dengan tingkat bunga 8,30% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya
Karya Tahap II Tahun 2022

Jumlah pokok sukuk sebesar Rp750.000.000
yang terdiri dari 3 seri:

- Seri A sebesar Rp412.900.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 51,17% (setara bunga 6,50% per tahun) dengan jangka waktu 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp176.050.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 64,58% (setara bunga 7,75% per tahun) dengan jangka waktu 5 tahun;
- Seri C sebesar Rp161.050.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 69,17% (setara bunga 8,30% per tahun) dengan jangka waktu 7 tahun.

Perusahaan menerima penuh hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada tanggal 25 Februari 2022. Obligasi dan Sukuk Mudharabah dicatatkan pada BEI.

Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat keputusan No. S-214/D.04/2022 tanggal 27 Oktober 2022 untuk melakukan penawaran umum atas:

Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I
Tahun 2022

Jumlah pokok obligasi sebesar
Rp1.204.880.000 yang terdiri dari 3 seri:

- Seri A sebesar Rp479.800.000 dengan tingkat bunga 9,90% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp275.230.000 dengan tingkat bunga 10,50% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun;
- Seri C sebesar Rp449.850.000 dengan tingkat bunga 10,90% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

001/OBL/KSEI/0122 dated January 26, 2022 to
conduct a public offering of:

Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II
Tahun 2022

The principal amount of bonds was
Rp1,750,000,000 which consisted of 3 series:

- A series of Rp593,950,000 with an interest rate of 6.50% per annum and a term of 3 years;
- B Series of Rp425,150,000 with an interest rate of 7.75% per annum and a term of 5 years;
- C Series of Rp730,900,000 with an interest rate of 8.30% per annum and a term of 7 years.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya
Karya Tahap II Tahun 2022

The principal amount of sukuk was
Rp750,000,000 which consisted of 3 series:

- A series of Rp412,900,000 with nisbah revenue sharing ratio of 51.17% (equivalent to interest rate of 6.50% per annum) with a term of 3 years;
- B Series of Rp176,050,000 with nisbah revenue sharing ratio of 64.58% (equivalent to interest rate of 7.75% per annum) with a term of 5 years;
- C Series of Rp161,050,000 with nisbah revenue sharing ratio of 69.17% (equivalent to interest rate of 8.30% per annum) with a term of 7 years.

The Company has fully received the proceed from the issuance of its Bonds and Sukuk Mudharabah on February 25, 2022. Bonds and Sukuk Mudharabah are listed on the IDX.

The Company received an effective notice from the Chairman of the Financial Services Authority ("OJK") by its decision letter No. S-214/ D.04/2022 dated October 27, 2022 to conduct a public offering of:

Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I
Tahun 2022

The principal amount of bonds was
Rp1,204,880,000 which consisted of 3 series:

- A series of Rp479,800,000 with an interest rate of 9.90% per annum and a term of 3 years;
- B Series of Rp275,230,000 with an interest rate of 10.50% per annum and a term of 5 years;
- C Series of Rp449,850,000 with an interest rate of 10.90% per annum and a term of 7 years.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya
 Karya Tahap I Tahun 2022

Jumlah pokok sukuk sebesar Rp281.815.000 yang terdiri dari 3 seri:

- Seri A sebesar Rp109.325.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 66,00% (setara bunga 9,90% per tahun) dengan jangka waktu 3 tahun;
- Seri B sebesar Rp140.490.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 70,00% (setara bunga 10,50% per tahun) dengan jangka waktu 5 tahun;
- Seri C sebesar Rp32.000.000 dengan pendapatan bagi hasil nisbah 72,67% (setara bunga 10,90% per tahun) dengan jangka waktu 7 tahun.

Perusahaan menerima penuh hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada tanggal 30 November 2022. Obligasi dan Sukuk Mudharabah dicatatkan pada BEI.

1.d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 6 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
 Komisaris
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen

Ir. Jarot Widyo, SP
 Dr. Firdaus Ali, MSc
 Dr. Harris Arthur Hedar, SH., MH
 Ir. Adityawarman, MM
 Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Phd
 Rusmanto

Direksi

Direktur Utama
 Direktur Keuangan
 Direktur Manajemen Sumber Daya
 Manusia dan Transformasi
 Direktur Manajemen Risiko
 dan Legal
 Direktur Operasi I
 Direktur Operasi II

Agung Budi Waskito, ST., M. Tech
 Adityo Kusumo, ST., MBA
 Ir. Hadjar Seti Adji MEngSc
 Sumadi, SE., MM
 Hananto Aji, ST
 Harum Akhmad Zuhdi, ST

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 5 Agustus 2022 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0042229 tahun 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya
 Karya Tahap I Tahun 2022

The principal amount of sukuk was Rp281,815,000 which consisted of 3 series:

- A series of Rp109,325,000 with nisbah revenue sharing ratio of 66.00% (equivalent to interest rate of 9.90% per annum) with a term of 3 years;
- B Series of Rp140,490,000 with nisbah revenue sharing ratio of 70.00% (equivalent to interest rate of 10.50% per annum) with a term of 5 years;
- C Series of Rp32,000,000 with nisbah revenue sharing ratio of 72.67% (equivalent to interest rate of 10.90% per annum) with a term of 7 years.

The Company has fully received the proceed from the issuance of its Bonds and Sukuk Mudharabah on November 30, 2022. Bonds and Sukuk Mudharabah are listed on the IDX.

1.d. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

Based on Deed No. 8 dated June 6, 2024 made in presence of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2024 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
 Commissioner
 Independent Commissioner
 Independent Commissioner
 Independent Commissioner
 Independent Commissioner

Directors

President Director
 Director of Finance
 Director of Human Capital
 Management and Transformation
 Director of Risk Management
 and Legal
 Director of Operations I
 Director of Operations II

Based on Deed No. 4 dated August 5, 2022 made in presence of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and has received Notification of Changes in Company Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0042229 year 2022, the composition of the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2023 are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Ir. Jarot Widyoko, SP
Dr. Firdaus Ali, MSc
Satya Bhakti Parikesit, SH., MM., LLM
Dr. Harris Arthur Hedari, SH., MH
Ir. Adityawarman., MM
Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Phd
Rusmanto

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur *Human Capital
Management*
Direktur Operasi I
Direktur Operasi II
Direktur Operasi III
Direktur *Quality, Health,
Safety and Environment*

Agung Budi Waskito, ST., M. Tech
Adityo Kusumo, ST., MBA
Ir. Hadjar Seti Adji MEngSc
Hananto Aji, ST
Harum Akhmad Zuhdi, ST
Rudy Hartono, ST., MT
Ir. Ayu Widya Kiswari, MBA

Directors

President Director
Finance Director
Human Capital
Management
Director of Operations I
Director of Operations II
Director of Operations III
Quality, Health, Safety and
Environment Director

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 65/DK/WIKA/2023 tanggal 3 Juli 2023 dan No. 80/DK/WIKA/2023 tanggal 24 Juli 2023, susunan Komite Audit tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Based on Decree of the Board of Commissioners No. 65/DK/WIKA/2023 dated July 3, 2023 No. 80/DK/WIKA/2023 dated July 24, 2023, the composition of the Audit Committee as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Komite Audit

Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Anggota

Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Ph.D.
Ir. Adityawarman, MM
Roy Youmalista SE, MBA, Ak, CA
Rita Rufaida Ak, MBA

Audit Committee

Chairman
Vice Chairman
Member
Member

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.02.01/A.DIR.04640/2019 tanggal 28 Mei 2019, Sekretaris Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Mahendra Vijaya, ST., MT.

Based on Decree Directors No. SK.02.01/A.DIR.04640/2019 dated May 28, 2019, the Corporate Secretary as of December 31, 2024 and 2023 is Mahendra Vijaya ST., MT.

Jumlah pegawai Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 3.904 dan 3.999 (tidak diaudit).

Total number employees of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2024 and 2023 are 3,904 and 3,999, respectively (unaudited).

1.e. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak berikut:

1.e. Structure of the Subsidiaries

The Company has, either directly or indirectly, over 50% of ownership on the following subsidiaries:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha/ Scope of Business	Tahun Mulai Operasi Komersial/ Year of Commercial Activities	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Total Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
				2024 %	2023 %	2024 Rp	2023 Rp
Dikonsolidasi/Consolidated							
Kepemilikan Langsung/Direct Ownership							
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Indonesia	Industri Beton/ Concrete Industry	1997	60.00	60.00	7,238,366,935	7,631,670,664
PT Wijaya Karya Realty	Indonesia	Real Estate	2000	95.10	72.51	16,152,537,310	18,005,753,635
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Indonesia	Industri dan Konstruksi/ Industrial and Construction	2000	98.57	98.57	3,284,473,809	3,193,402,392
PT Wijaya Karya Rekrutmen dan Konstruksi	Indonesia	Konstruksi dan Mekanik Listrik/ Construction and Electrical Mechanical	1984	97.99	97.99	1,446,947,635	1,485,645,783
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Indonesia	Konstruksi dan Properti/ Construction and Property	2008	69.30	69.30	5,965,916,898	5,561,533,835
PT Wijaya Karya Bitumen	Indonesia	Tambang Aspal/Asphalt Mining	2013	100.00	100.00	347,727,718	378,916,666
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Indonesia	Jalan Tol/ Toll Road	2017	84.17	82.98	7,126,913,634	6,478,816,153
PT Wijaya Karya Tirta Jaya Jatiuhur	Indonesia	Pengelolaan air/Water Treatment	2021	83.78	88.38	1,829,244,758	1,233,196,887
Kerja Sama Usaha - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Balai Pustaka (Persero)	Indonesia	Pengembangan dan Pengelolaan Tanah/ Land Development and Management	2014	100.00	100.00	78,947,481	103,410,296

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN**

 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS**

 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha/ Scope of Business	Tahun Mulai Operasi Komersial/ Year of Commercial Activities	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Total Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
				2024 %	2023 %	2024 Rp	2023 Rp
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya Realty	Indonesia	Pengelolaan Lahan/ Land Management	2018	100,00	100,00	430,457,105	428,931,794
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Indonesia	Pekerjaan Konstruksi Fisik dan Bangunan/ Physical and Building Construction Work	2022	100,00	100,00	346,306,991	602,524,422
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Indonesia	Pembangunan Gedung Kuliah dan Infrastruktur/ Building Development and Infrastructure	2020	100,00	100,00	--	48,152,417
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Indonesia	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	2020	100,00	100,00	82,013,359	89,183,561
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Indonesia	Pekerjaan Pembangunan/ Development Work Paket 1 Pembangunan SGLC dan/ and ERIC Universitas Gajah Mada	2021	100,00	100,00	94,042,384	119,759,858
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Indonesia	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Development Construction Work Gedung 1 dan 2 ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis	2019	100,00	100,00	4,060,906	23,734,354
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Indonesia	Pekerjaan Pembangunan/ Development Work Hotel Domestik Terminal 3	2021	100,00	100,00	9,598,153	29,999,426
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Indonesia	Rumah Dinas Prajurit TNI-AD	2019	100,00	100,00	18,267,911	19,480,595
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Indonesia	Pekerjaan Pembangunan/ Development Work Paket 3 AGLC, ASLC, dan/ and IFCLC Universitas Gadjah Mada	2023	100,00	100,00	108,910,046	134,744,041
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Indonesia	Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat/ Construction Work for the Bank Indonesia Representative Office Building, West Papua Province	2024	100,00	0,00	155,393,071	--
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Indonesia	Pekerjaan Pengembangan Sistem Operasional INATEWS (Gedung Jakarta dan Bali)/ Construction Work for INATEWS Operational System Development (Buildings Jakarta and Bali)	2024	100,00	0,00	438,213,050	--
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya Rekamata Konstruksi	Indonesia	Pelaksanaan Pekerjaan Mobile Power Plant and Fixed Type Gas Engine Power Plant Package III/ Construction Work Mobile Power Plant and Fixed Type Gas Engine Power Plant Package III/	2012	51,00	51,00	232,833,278	202,257,970
			2014	70,00	70,00	155,830,899	136,396,731
			1994	99,50	99,50	470,008,529	469,276,543
			2017	100,00	100,00	362,966,228	347,605,939
			2019	100,00	100,00	157,844,894	164,292,421
			2016	99,31	98,52	427,408,137	951,900,085
			2000	56,73	56,73	890,589,297	683,555,970
			1997	99,90	99,90	213,955,671	204,890,969
			2021	49,00	99,99	2,809,725,286	2,750,931,512
			2018	99,86	99,86	99,042,836	59,525,752
			2010	100,00	100,00	295,348,696	261,393,065

*) Entitas anak/Subsidiary of PT Wijaya Karya Beton Tbk.
 **) Entitas anak/Subsidiary of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
 ***) Entitas anak/Subsidiary of PT Wijaya Karya Realty
 ****) Entitas anak/Subsidiary of PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi
 *****) Entitas anak/Subsidiary of PT Wijaya Karya Bitumen
 *****) Entitas anak/Subsidiary of PT Wijaya Karya Rekamata Konstruksi

PT Wijaya Karya Beton Tbk (“WIKI Beton”)

WIKI Beton sebelumnya merupakan bagian dari departemen produk beton milik Perusahaan sejak tahun 1974. Pada tanggal 11 Maret 1997 sesuai dengan akta WIKI Beton No. 44 tanggal 11 Maret 1997 dari Achmad Bajumi, S.H., selaku pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, WIKI Beton menjadi entitas anak Perusahaan.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta No. 75 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AHA.01.03-0148744 tanggal 19 Juni 2024.

Saham WIKI Beton dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 April 2014.

PT Wijaya Karya Realty (“WIKI Realty”)

WIKI Realty didirikan berdasarkan akta Imas Fatimah, S.H., No.17 tanggal 20 Januari 2000. Akta

PT Wijaya Karya Beton Tbk (“WIKI Beton”)

WIKI Beton was previously part of precast product division since in 1974. On March 11, 1997, in accordance with deed of WIKI Beton No. 44 dated March 11, 1997 of Achmad Bajumi, S.H., as replacement of Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta, WIKI Beton has become the subsidiary of the Company.

The Article of Association has been amended several times and was last amended by Deed No. 75 dated May 30, 2024 made in presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in South Jakarta and received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesian No. AHU-AHA.01.03-0148744 dated June 19, 2024.

WIKI Beton's shares are listed on the Indonesia Stock Exchange on April 8, 2014.

PT Wijaya Karya Realty (“WIKI Realty”)

WIKI Realty was established based on notarial deed No.17 dated January 20, 2000 of Imas

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C-20856HT01.01.TH2000, tanggal 15 September 2000.

Anggaran Dasar WIKA Realty telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 93 tanggal 29 Desember 2022, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Nomor AHU-AH.01.09-0038686 tanggal 26 Januari 2023

Berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas Saham Nomor 22 tanggal 19 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, menyetujui pengalihan saham WIKA Realty milik PT Hotel Indonesia Natour (HIN) sebanyak 16,566,614,132 saham kepada Perusahaan dan pengalihan saham HIPRO milik Perusahaan ke HIN.

Atas transaksi tersebut, persentase kepemilikan Perusahaan di WIKA Realty berubah dari 72.51% menjadi 95.10%.

PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (“WIKAIKON”)

WIKAIKON, sebelumnya bernama PT Wijaya Karya Intrade didirikan berdasarkan Akta Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., No. 16 tanggal 20 Januari 2000. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C-19656HT 01.TH 2000, tanggal 4 September 2000.

Anggaran Dasar WIKAIKON telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta No. 30 tertanggal 21 Mei 2024 dari Ryan Bayu Candra, S.H., Notaris di Jakarta. Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini telah menerima Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0030961.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024.

PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (“WIKARK”)

WIKARK sebelumnya bernama PT Catur Insan Pertiwi didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 21 tertanggal 28 Februari 1984 dari Soehardjono, SH., pengganti dari Ali Harsojo, SH. Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6005.HT.01.01TH.84 tertanggal 24 Oktober 1984.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Fatimah, S.H., The deed of establishment was approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No.C-20856HT01.01.TH2000 dated September 15, 2000.

The Articles of Association of WIKA Realty have amendments, most recently with Deed Number 93 dated December 29, 2022, made before Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, and have received the Notification of Company Data Changes from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter Number AHU-AH.01.09-0038686 dated January 26, 2023.

Based on Deed No. 22 dated December 19, 2024 made in precense of Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta City, approved the transfer of share of WIKAIKON amounting to 16,566,614,132 shares owned by PT Hotel Indonesia Natour (HIN) to the Company and transfer of share of HIPRO owned by the Company to HIN.

Due to this transaction, the Company's percentage of participation in WIKAIKON changed from 72.51% to 95.10%.

PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (“WIKAIKON”)

WIKAIKON, previously PT Wijaya Karya Intrade, was established based on Deed No. 16 dated January 20, 2000 of Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., replacement of Imas Fatimah, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. C-19656HT 01.TH 2000 dated September 4, 2000.

WIKAIKON's Article of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 30 dated May 21, 2024 of Ryan Bayu Candra S.H., Notary in Jakarta. The amendment to the Company's Articles of Association has received Approval for Amendment of the Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0030961.AH.01.02 of 2024, dated May 28, 2024.

PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (“WIKARK”)

WIKARK, previously PT Catur Insan Pertiwi, was established based on Notarial Deed No. 21 dated February 28, 1984 of Soehardjono, S.H., the substitute for Ali Harsojo, S.H., Notary in Jakarta. and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.C2-6005.HT.01.01TH.84 dated October 24, 1984.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Anggaran Dasar WIKA RK telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., No. 43 tertanggal 16 Juni 2023 tentang perubahan Anggaran Dasar dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0036172.AH.01.02 tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023.

**PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (“WIKI
Gedung”)**

WIKI Gedung didirikan berdasarkan akta No. 43 tanggal 24 Oktober 2008 dari Imas Fatimah, S.H., Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU.92223.AH.01.01.TH 2008, tanggal 1 Desember 2008.

Anggaran Dasar WIKI Gedung telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir terkait dengan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar WIKI Gedung sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dalam administrasi database Sistem Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 22 Mei 2023 No. AHU-0092341.AH.01.11.

Saham WIKI Gedung dicatatkan di BEI pada tanggal 30 November 2017.

PT Wijaya Karya Bitumen (“WIKI Bitumen”)

WIKI Bitumen, sebelumnya bernama PT Sarana Karya (Persero), didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 1 tanggal 1 September 1984. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-931.HT.01.01.TH 1986, tanggal 7 Februari 1986.

Berdasarkan akta No. 83 tanggal 30 Juni 2014 dari M. Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta, PT Sarana Karya (Persero) berubah nama menjadi WIKI Bitumen. Perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-05084. 40.20.2014 Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014.

WIKI Bitumen telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp100.000.000 atau 100.000 lembar saham yang dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 19 April 2024 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah dicatat

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

WIKI RK's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed Ryan Bayu Candra, S.H., No. 43 dated June 16, 2023 regarding the changes in articles of association and received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0036172.AH.01.02 year 2023 dated June 26, 2023.

**PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (“WIKI
Gedung”)**

WIKI Gedung was established based on notarial deed No. 43 dated October 24, 2008 of Imas Fatimah, S.H., The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU.92223.AH.01.01.TH 2008 dated December 1, 2008.

WIKI Gedung's Articles of Association was amended several times, the latest amendment related to WIKI Gedung's changes in Article 3 of Association as set forth in the Deed No. 3 dated May 16, 2023 made in the presence of Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., Notary in Jakarta, which recorded in the Legal Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter dated May 22, 2023 No. AHU-0092341.AH.01.11.

WIKI Gedung's shares are listed on the IDX on November 30, 2017.

PT Wijaya Karya Bitumen (“WIKI Bitumen”)

WIKI Bitumen, previously PT Sarana Karya (Persero), was established based on Notarial Deed No. 1 dated September 1, 1984 of Imas Fatimah, S.H. The deed of establishment was approved by Minister of Justice of the Republic Indonesia in his decision letter No. C2-931.HT.01.01.TH 1986 dated February 7, 1986.

Based on deed No. 83, dated June 30, 2014 of M. Nova Faisal, S.H., Notary in Jakarta, PT Sarana Karya (Persero) changed its name into WIKI Bitumen. Amendments to the articles of association was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-05084.40.20.2014 Year 2014, dated July 7, 2014.

WIKI Bitumen was amended several times, the most recent relate to the increase in issued and fully paid capital amounting to Rp100,000,000 or 100,000 shares, which documented in Deed No. 28 dated April 19, 2024, executed before Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., a Notary in East Jakarta, and has been recorded in the Legal Entity Administration System

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 24 April 2024 No. AHU-AH.01.03-0092826.

Persentase penyertaan saham Perusahaan di WIKA Bitumen sebesar 100%.

PT Wijaya Karya Serang Panimbang (“WSP”)

WSP didirikan berdasarkan akta Rita Utami Djauhari, S.H., No. 02 tanggal 17 Februari 2017. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0007805.AH.01.01.Tahun 2017.

Anggaran Dasar WIKA Serpan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir mengenai Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor yang seluruhnya disetor oleh Perusahaan yang dituangkan dalam Akta No. 08 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat di hadapan John Heri Azmi, S.H., Notaris di Kabupaten Lebak, dan telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0079040 tertanggal 2 April 2024. Atas transaksi ini, persentase kepemilikan Perusahaan di WSP berubah dari 82,98% menjadi 84,17%.

PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur (“WTJJ”)

WTJJ didirikan sesuai dengan Akta No. 5 tertanggal 15 Januari 2021 oleh Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0003230.AH.01.01.TAHUN 2021 tertanggal 18 Januari 2021.

Berdasarkan Akta Notaris No. 53 tanggal 21 September 2023 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham oleh Notaris Diharini, S.H., M.Kn. di Jakarta, WTJJ menerima tambahan setoran modal dari PT Tirta Gemah Ripah sebesar Rp9.000.000 dan jumlah tersebut akan dicatat sebagai peningkatan modal disetor penuh dan ditempatkan dalam rangka penerbitan saham baru sebanyak 9.000 saham.

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 12 Desember 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham oleh Notaris Lia Amalia, S.H., M.Kn. di Jakarta, WTJJ menerima tambahan setoran modal dari Perusahaan sebesar Rp18.993.000 dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk sebesar Rp28.667.000 dan jumlah

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with their letter dated April 24, 2024, No. AHU-AH.01.03-0092826.

The Company's shareholding percentage in WIKA Bitumen is 100%.

PT Wijaya Karya Serang Panimbang (“WSP”)

WSP was established based on notarial deed No. 02 dated February 17, 2017 of Rita Utami Djauhari, S.H., The deed of establishment was approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-0007805.AH.01.01.Tahun 2017.

The Articles of Association of WIKA Serpan was amended several times. The most recent related to Increase in Issued/Paid-Up Capital, which has been fully paid by the Company, which documented in Deed No. 08 dated March 28, 2024, made in presence of John Heri Azmi, S.H., a Notary in Lebak Regency, and has been recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to the Notification of Amendment to the Articles of Association Receipt Number: AHU-AH.01.03-0079040 dated April 2, 2024. For this transaction, the Company's ownership percentage in WSP has changed from 82.98% to 84.17%.

PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur (“WTJJ”)

WTJJ was established in conformity with Notarial Deed No. 5 dated January 15, 2021 by Notary Lia Amalia, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0003230.AH.01.01.TAHUN 2021 dated January 18, 2021.

Based on Notarial Deed No. 53 dated September 21, 2023 concerning Statement of Shareholders' Resolution by Notary Diharini, S.H., M.Kn. in Jakarta, WTJJ received an additional capital deposit from PT Tirta Gemah Ripah of Rp9,000,000 and the amount will be recorded as an increase in paid-up capital and placed in the context of issuing 9,000 new shares.

Based on Notarial Deed No. 10 dated December 12, 2024 concerning Statement of Shareholders' Resolution Meeting by Notary Lia Amalia, S.H., M.Kn. in Jakarta, WTJJ received an additional capital deposit from the Company of Rp18,993,000 and PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk of Rp28,667,000 and the amount is recorded as an

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

tersebut dicatat sebagai peningkatan modal disetor penuh dan ditempatkan dalam rangka penerbitan saham baru sebanyak 47.660 saham. Atas transaksi ini, persentase penyertaan saham Perusahaan di WTJJ berubah dari 88,38% menjadi 83,78%.

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Realty – (“WIKA-WR Laswi”)

KSO Perusahaan dengan WIKA Realty merupakan Ventura Bersama yang didirikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi Nomor: TP.01.03/A.DIR.4359/2018 dan Nomor: HK.02.09/A.DIR.WR.0965/2018 tanggal 16 Maret 2018.

KSO WIKA-WR Laswi didirikan berdasarkan kebutuhan untuk mengelola Kerja Sama Usaha (“KSU”) antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan WIKA-WR Laswi dalam rangka pemanfaatan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di lokasi Laswi, Bandung.

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – RS Vertikal Surabaya (“WIKA-WG RS Vertikal Surabaya”)

Pada tanggal 25 Oktober 2022, Perusahaan dan WIKA Gedung melakukan perjanjian kerja sama usaha berdasarkan perjanjian kerja sama Operasi No. 001/KSO-RSUPTV/X/2022.

KSO WIKA-WG RS Vertikal Surabaya bergerak dalam penunjukan penyedia jasa untuk pengadaan pekerjaan konstruksi fisik dan bangun RS UPT Vertikal Surabaya.

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – UIN Banten (“WIKA-WG UIN Banten”)

Pada tanggal 30 April 2021, Perusahaan dan WIKA Gedung melakukan perjanjian kerja sama usaha berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Usaha (PKSU) No. 215/Un.17/BA.I/KS.017/01/2020 terakhir diubah dengan PKSU No. 5085/Un.17/BA.I/KS.01.7/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.

KSO WIKA-WG UIN Banten bergerak dalam operasi terpadu paket pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung kuliah dan infrastruktur UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten (Proyek SBSN 6in1).

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – Paket 1 UGM (“WIKA-WG Paket 1 UGM”)

Pada tanggal 19 November 2020, Perusahaan dan WIKA Gedung melakukan perjanjian kerja sama usaha berdasarkan perjanjian kerja sama Operasi No. 19.001/XI/PPK-PIU/UGM/2020.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

increase in paid-up capital and placed in the context of issuing 47,660 new shares. For this transaction, the percentage of the Company's investment in shares of WTJJ changed from 88.38% to 83.78%.

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Realty (“WIKA-WR Laswi”)

The Company's KSO with WIKA Realty is a Joint Venture established based on the Joint Operation Agreement Number TP.01.03/A.DIR.4359/2018 and Number: HK.02.09/A.DIR.WR.0965/2018 dated March 16, 2018.

KSO WIKA-WR Laswi was established based on the need to manage the Business Cooperation (“KSU”) between PT Kereta Api Indonesia (Persero) and WIKA-WR Laswi in the context of utilizing land owned by PT Kereta Api Indonesia (Persero) in the Laswi location, Bandung.

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – RS Vertikal Surabaya (“WIKA-WG RS Vertikal Surabaya”)

On October 25, 2022, the Company and WIKA Gedung entered into a business cooperation agreement based on operational cooperation Agreement No. 001/KSO-RSUPTV/X/2022.

KSO WIKA-WG RS Vertikal Surabaya is engaged in appointing service providers to procure physical construction work and build the RS UPT Vertikal Surabaya.

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – UIN Banten (“WIKA-WG UIN Banten”)

On April 30, 2021, the Company and WIKA Gedung entered into a business cooperation agreement based on Business Cooperation Agreement (PKSU) No. 215/Un.17/BA.I/KS.017/01/2020 last amended by PKSU No. 5085/Un.17/BA.I/KS.01.7/12/2021 dated December 31, 2021.

KSO WIKA-WG UIN Banten is engaged in an integrated operation of the construction work package for the construction of the lecture building and infrastructure of UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten (SBSN 6in1 Project).

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – Paket 1 UGM (“WIKA-WG Paket 1 UGM”)

On November 19, 2020, the Company and WIKA Gedung entered into a business cooperation agreement based on operational cooperation Agreement No. 19.001/XI/PPK-PIU/UGM/2020.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

KSO WIKA-WG Paket 1 UGM bergerak dalam tender pekerjaan Paket 1 pembangunan SGLC dan ERIC Universitas Gadjah Mada.

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – Gedung 1 dan 2 ITB (“WIKAWG Gedung 1 dan 2 ITB”)

Pada 18 Oktober 2021, Perusahaan dan WIKAWG Gedung melakukan Kesepakatan Kerja Sama Operasi dengan No. PS.01.03/F.DPSR.00669/2021 dan telah diubah dengan Amendemen Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) No. PS.01.03/A.DIR.WG.3644/2022 tanggal 25 April 2022. Kerja sama usaha yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Usaha (PKSU) No. 0929/LUJ/ DIPA/PERJ/2022 terakhir diubah dengan PKSU No. 0929.ADD.1/LUJ/DIPA/PERJ/2022 tanggal 12 Agustus 2022.

KSO WIKA-WG Gedung 1 dan 2 ITB bergerak dalam bidang pembangunan Gedung 1 dan 2 ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis (SBSN ITB).

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – Hotel Domestik 3 (“WIKAWG Hotel Domestik 3”)

Pada tanggal 2 Mei 2019, Perusahaan dan WIKAWG Gedung melakukan perjanjian kerja sama usaha berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Usaha (PKSU) No. PJJ.14.10.00/05/2019/0154 terakhir diubah dengan PKSU No. PJJ.14.10/00/08/2022/A.0400 tanggal 22 Agustus 2022.

KSO WIKA-WG Hotel Domestik 3 bergerak dalam pembangunan hotel domestik terminal 3 BSH Bandara Soekarno-Hatta.

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – RS TNI-AD (“WIKAWG RS TNI-AD”)

Pada tanggal 26 Januari 2021, Perusahaan dan WIKAWG Gedung melakukan perjanjian kerja sama usaha berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Usaha (PKSU) No. 001/KSO/WIKAWG/RMD-SBSN/I/2021 terakhir diubah dengan PKSU No. 001/ADD1-KSO/WIKAWG/RMD-SBSN/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.

KSO WIKA-WG RS TNI-AD bergerak dalam pembangunan rumah dinas prajurit TNI-AD.

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – Paket 3 UGM (“WIKAWG Paket 3 UGM”)

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Perusahaan dan WIKAWG Gedung melakukan perjanjian kerja sama usaha berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Usaha (PKSU) No. 001/KSO/WIKAWG//PKT3-UGM/

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

KSO WIKA-WG Paket 1 UGM is engaged in in tenders for Package 1 work for the construction of SGLC and ERIC at Gadjah Mada University.

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – Gedung 1 dan 2 ITB (“WIKAWG Gedung 1 dan 2 ITB”)

On October 18, 2021, the Company and WIKAWG Gedung entered into an Operational Cooperation Agreement with No. PS.01.03/F.DPSR.00669/2021 and has been amended by Amendment to Operational Cooperation Agreement (KSO) No. PS.01.03/A.DIR.WG.3644/2022 dated April 25, 2022. Business collaboration carried out based on Business Cooperation Agreement (PKSU) No. 0929/LUJ/ DIPA/PERJ/2022 last amended by PKSU No. 0929.ADD.1/LUJ/DIPA/ PERJ/2022 dated August 12, 2022.

KSO WIKA-WG Gedung 1 and 2 ITB is engaged in the construction of Buildings 1 and 2 of the ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis (SBSN ITB).

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Hotel Domestik 3 (“WIKAWG Hotel Domestik 3”)

On May 2, 2019, the Company and WIKAWG Gedung entered into a business cooperation agreement based on Business Cooperation Agreement (PKSU) No. PJJ.14.10.00/05/2019/0154 was last amended by PKSU No. PJJ.14.10/00/08/2022/A.0400 dated August 22, 2022.

KSO WIKA-WG Hotel Domestik 3 is engaged in an integrated operation of the construction of a domestic hotel terminal 3 BSH Soekarno-Hatta Airport.

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – RS TNI-AD (“WIKAWG RS TNI-AD”)

On January 26, 2021, the Company and WIKAWG Gedung. Entered into a business cooperation agreement. Business cooperation undertaken under the Cooperation Agreement (PKSU) No. 001/KSO/WIKAWG/RMD-SBSN/I/2021 as amended with PKSU No. 001/ADD1-KSO/WIKAWG/RMD-SBSN/VI/2021 dated June 25, 2021.

KSO WIKA-WG RS TNI-AD is engaged in building official residences for TNI-AD soldiers.

KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – Paket 3 UGM (“WIKAWG Paket 3 UGM”)

On October 3, 2019, the Company and WIKAWG Gedung entered into a business cooperation agreement based on Business Cooperation Agreement (PKSU) No. 001/KSO/WIKAWG//PKT3-

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

X/2019 terakhir diubah dengan PKSU
No. 08.001/X/PPK-PIU/UGM/2019 tanggal 8 Oktober
2019.

KSO WIKA-WG Paket 3 UGM bergerak dalam tender
pekerjaan Paket 3 pembangunan AGLC, ASLC, dan
IFFLC Universitas Gadjah Mada.

**KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya
Karya Bangunan Gedung Tbk – BI Papua**

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perusahaan dan
WIKA Gedung melakukan perjanjian Kerja Sama
Operasi (KSO) NO. TP.02.01/A.DIR.WG.
05287/2023, dan N. TP.01.03/ E.BO.00983/2023.

KSO WIKA-WG BI Papua bergerak dalam Pekerjaan
pembangunan gedung kantor perwakilan Bank
Indonesia provinsi Papua Barat.

**KSO – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Wijaya
Karya Bangunan Gedung Tbk – BMKG**

Pada tanggal 31 Januari 2024, Perusahaan dan
WIKA Gedung melakukan perjanjian kerja sama
usaha berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Usaha
(PKSU) No.005/Contract.IOSDB/IDRIP-BMKG/2024.
KSO WG-WIKA bergerak dalam tender Paket
Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Sistem
Operasional INATEWS (Gedung Jakarta dan Bali).

**KSO Paket III - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk -
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi**

Berdasarkan amandemen ke 12 dan penegasan
kembali perjanjian internal konsorsium antara
Perusahaan, WIKA RK dan PT Wahana Idea Cipta
(WIC) yang sudah ditandatangani oleh semua pihak
pada tanggal 20 Mei 2024, WIC tidak lagi mengambil
bagian dalam kerja sama pelaksanaan pekerjaan
dalam konsorsium ini, sehingga total penyertaan
WIKA RK di KSO Paket 3 menjadi sebesar 100%.

Kepemilikan Tidak Langsung

**PT Wijaya Karya Komponen Beton (“WIKA
KOBÉ”)**

WIKA KOBÉ didirikan berdasarkan Akta Notaris
Karin Christiana Basoeki, S.H., No. 18 tanggal
10 Mei 2012. Akta pendirian ini disahkan oleh
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat
Keputusan No. AHU-25815.AH.01.01 tanggal
14 Mei 2012.

Akta tersebut mengalami perubahan terakhir dalam
Akta No. 6 tanggal 7 Oktober 2024, dibuat
dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., M.Kn. Notaris
yang berkedudukan di Jakarta mengenai perubahan
kepemilikan saham, sebagaimana telah memperoleh
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0260537
Tahun 2024 pada tanggal 8 Oktober 2024.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

UGM/X/2019 last amended by PKSU No.
08.001/X/PPK-PIU/UGM/2019 dated October 8,
2019.

KSO WIKA-WG Paket 3 UGM is engaged in
tenders for Package 3 work for the construction of
AGLC, ASLC, and IFFLC at Gadjah Mada
University.

**KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya
Karya Bangunan Gedung Tbk – BI Papua**

On August 31, 2023, the Company and WIKA
Gedung entered into a Joint Operation Agreement
(KSO) NO. TP.02.01/A.DIR.WG. 05287/2023, and
N. TP.01.03/ E.BO.00983/2023.

KSO WIKA-WG BI Papua is engaged in construction
work for the Bank Indonesia representative office
building for West Papua province.

**KSO – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – PT
Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – BMKG**

On January 31, 2024, the Company and WIKA
Gedung entered into a Joint Operation Agreement
(KSO) No.005/Contract.IOSDB/IDRIP-BMKG/2024.
KSO WG-WIKA is engaged in tendering for
Operational System Development Construction
Work Packages INATEWS (Jakarta and Bali
buildings).

**KSO Paket III - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk -
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi**

Based on the 12th amendment and the reaffirmation
of the internal consortium agreement between the
Company, WIKA RK, and PT Wahana Idea Cipta
(WIC), which was signed by all parties on May 20,
2024, WIC is no longer participating in the
collaboration within this consortium. As a result, the
total ownership WIKA RK in KSO Paket 3 now
stands at 100%.

Indirect Ownership

**PT Wijaya Karya Komponen Beton (“WIKA
KOBÉ”)**

WIKA KOBÉ was established based on Notarial
Deed No. 18 dated May 10, 2012 of Karin Christiana
Basoeki, S.H. The deed of establishment
was approved by Minister of Justice of the
Republic Indonesia in his Decision Letter
No. AHU-25815.AH.01.01 dated May 14, 2012.

The deed was last amended by Notarial Deed No. 6
dated October 7, 2024, drawn up before Tjhong
Sendrawan, S.H., M.Kn. A Notary domiciled in
Jakarta regarding changes in share ownership, as
has obtained approval from the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of
Indonesia No. AHU-AH.01.09-0260537 of 2024
dated October 8, 2024.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT Wijaya Karya Krakatau Beton (“WIKa Kraton”)

WIKa Kraton didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 16, pada tanggal 16 Desember 2013 dari Indrajati Tandjung, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU 02372.AH.01.01 Tahun 2014 tertanggal 17 Januari 2014.

PT Citra Lautan Teduh (“CLT”)

CLT didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 29 Oktober 1994 dari Nurhayati Suryasumirat, S.H., Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5921.HT.01.01.TH.95 tertanggal 11 Mei 1995.

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (“WIKa Pracetak Gedung”)

WIKa Pracetak Gedung didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 142 tanggal 23 Desember 2016 dari Sri Ismiyati, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0001918.AH.01.01 tertanggal 17 Januari 2017.

PT Wege Solusi Proklamasi (“WEGE SP”)

WEGE SP didirikan di Jakarta dengan Akta Perusahaan Terbatas PT Wege Solusi Proklamasi No. 85 tanggal 28 Mei 2019, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

PT Makassar Coastal City (“MCC”)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham milik PT Makassar Coastal City No. 100 Tanggal 25 September 2020, dari Notaris Rosida Rajaguguk Siregar, S.H., M.Kn., menyetujui konversi utang MCC menjadi saham (*debt to equity swap*) kepada WIKa Realty.

Sehingga kepemilikan saham WIKa Realty adalah 98,52% atau sebanyak 519.276 saham dengan nilai sebesar Rp519.276.000 dan dikonsolidasi.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham milik PT Makassar Coastal City No. 100 tanggal 20 September 2024, dari Notaris Ryan Bayu-Siregar, S.H., M.Kn., yang telah memperoleh surat keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0069337.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas MCC dan Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar MCC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03.0205591 tanggal 30 Oktober 2024. Para Pemegang Saham MCC

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

PT Wijaya Karya Krakatau Beton (“WIKa Kraton”)

WIKa Kraton was established based on Notarial Deed No. 16 dated December 16, 2013 of Indrajati Tandjung, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia in his Decision Letter No. AHU-02372.AH.01.01 Year 2014 dated January 17, 2014.

PT Citra Lautan Teduh (“CLT”)

CLT was established based on Notarial Deed No. 24 dated October 29, 1994 of Nurhayati Suryasumirat, S.H., The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia in his Decision Letter No. C2-5921.HT.01.01.TH.95 dated May 11, 1995.

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (“WIKa Pracetak Gedung”)

WIKa Pracetak Gedung was established based on Notarial Deed No. 142 dated December 23, 2016 of Sri Ismiyati, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0001918.AH.01.01 dated January 17, 2017.

PT Wege Solusi Proklamasi (“WEGE SP”)

WEGE SP established in Jakarta based on Limited Company Deed No. 85 dated May 28, 2019, made in the presence of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.

PT Makassar Coastal City (“MCC”)

Based on the Deed of Decision Statement the Shareholders of PT Makassar Coastal City No. 100 Dated September 25, 2020, from Notary Rosida Rajaguguk Siregar, S.H., M.Kn., approved the conversion of MCC's debt into shares (*debt to equity swap*) to WIKa Realty.

Thus WIKa Realty owns 98.52% or 519,276 shares with a value of Rp519,276,000 and consolidated.

Based on the Deed of Statement of Decision of Shareholders of PT Makassar Coastal City No. 100 dated September 20, 2024, from Notary Ryan Bayu-Siregar, S.H., M.Kn., who has obtained a decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0069337.AH.01.02 of 2024 dated October 30, 2024 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company MCC and Receipt of Notification of the Articles of Association of MCC from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-AH.01.03.0205591 dated October 30,

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

sehubungan dengan adanya pengurangan modal ditempatkan dan disetor, sehingga kepemilikan saham WIKA Realty adalah 99,31%.

PT Kurnia Realty Jaya (“KRJ”)

KRJ didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 14 Juni 2000 dari Sri Rahayu Sedyono M. S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18832.HT.01.01 Tahun 2001 tanggal 6 November 2001.

PT Hotel Indonesia Properti (“HIPRO”)

HIPRO didirikan berdasarkan Akta Notaris No.24 tanggal 28 April 2021 dari Titiek Irawati Sugianto, Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh persetujuan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0029191.AH.01.01 tanggal 28 April 2021.

Sesuai dengan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. S-496/MBU/102024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Aspirasi Pemegang Saham dan Surat Perusahaan No. TP.01.01/A.DIR.00021/2024 tanggal 18 Oktober 2024, penunjukan WIKA Realty untuk melakukan proses integrasi dan peningkatan bisnis hotel BUMN telah dicabut, dan selanjutnya akan dilakukan oleh HIN. Oleh karena itu, berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat WIKA Realty dalam Akta No. 06 tanggal 14 November 2024 dari Fessy Farizqoh Alwi S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0276306 tanggal 14 November 2024, WIKA Realty mengalihkan 50,99% saham HIPRO kepada Perusahaan. Kemudian pada 19 Desember 2024 Perusahaan mengalihkan saham tersebut kepada HIN.

Atas transaksi pengalihan saham tersebut, Perusahaan dan WIKA Realty kehilangan pengendalian atas HIPRO dan sisa kepemilikan WIKA Realty sebesar 49% diakui sebagai investasi pada entitas asosiasi (Catatan 17).

Transaksi ini merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali sehingga dampak pelepasan saham HIPRO sebesar Rp501.824.487 diakui sebagai selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendalian dan dicatat dalam tambahan modal disetor (Catatan 41).

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2024. MCC Shareholders in connection with the reduction in issued and paid-up capital, so that WIKA Realty share ownership is 99.31%.

PT Kurnia Realty Jaya (“KRJ”)

KRJ was established based on Deed No. 1 dated June 14, 2000 of Sri Rahayu Sedyono M. S.H., and has been approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia in his Decision Letter No. C-18832.HT.01.01 Year 2001 dated November 6, 2001.

PT Hotel Indonesia Properti (“HIPRO”)

HIPRO was established based on Notarial Deed No.24 dated April 28, 2021 from Titiek Irawati Sugianto, Notary in Jakarta. This deed has been approved and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree Letter No. AHU-0029191. AH.01.01 dated April 28, 2021.

In accordance with the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No. S-496/MBU/102024 dated October 11, 2024 regarding Shareholders' Aspirations and the Company's Letter No. TP.01.01/A.DIR.00021/2024 dated October 18, 2024, the appointment of WIKA Realty to carry out the process of integration and improvement of the BUMN hotel business has been revoked, and will then be carried out by HIN. Therefore, based on the Deed of Shareholders' Resolution Outside the WIKA Realty Meeting in Deed No. 06 dated November 14, 2024 from Fessy Farizqoh Alwi S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, which has obtained Receipt of Notification of Data Changes from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0276306 dated November 14, 2024, WIKA Realty transferred 50.99% of HIPRO shares to the Company. Then on December 19, 2024 the Company transferred those shares to HIN.

Due to the share transfer transaction, the Company and WIKA Realty lost control over HIPRO and WIKA Realty's remaining ownership of 49% recognized as an investment in an associate (Note 17).

This transaction is a business combination of entities under common control so that the impact of the divestment of HIPRO shares amounting to Rp501,824,487 is recognized as the difference in value of the restructuring transaction of entities under common control and recorded in additional paid-in capital (Note 41).

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT Senggigi Pratama Internasional (“SPI”)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat WIKA Realty dalam Akta No. 12 tanggal 13 Juni 2022 dari Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0000198 tanggal 1 April 2022, menyetujui pengalihan hak atas saham milik WIKA Realty di SPI sebanyak 15 lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.

Persentase penyertaan WIKA Realty di SPI berubah dari 100% menjadi 99,90%.

PT Wijaya Karya Aspal (“WKA”)

WKA didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 8 Februari 2017 dari Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014909.AH.01.01.2017 tanggal 29 Maret 2017.

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”.

2. Kebijakan Akuntansi Material

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

PT Senggigi Pratama Internasional (“SPI”)

Based on the Decision of Shareholders Outside WIKA Realty's Meeting in Deed No. 12 dated June 13, 2022 of Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta which was approved and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-AH.01.09-0000198 dated April 1, 2022, agree to transfer the rights of WIKA Realty's shares in SPI of 15 shares with a total nominal value of Rp15,000.

The percentage of WIKA Realty in SPI's investment changed from 100% to 99.90%.

PT Wijaya Karya Aspal (“WKA”)

WKA was established based on Notarial Deed No. 7 dated February 8, 2017 from Karin Christiana Basoeki, S.H., Notary in Jakarta. This Deed of Establishment has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0014909.AH.01.01.2017 dated March 29, 2017.

The Company and subsidiaries hereinafter are collectively referred to as “the Group”.

2. Material Accounting Policies

2.a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/ Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

2.b. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements had been prepared on going concern assumption and accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows using the cash basis. The basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs, except for certain accounts

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku Efektif

i. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024.

DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak memengaruhi substansi pengaturan dalam masing masing PSAK dan ISAK tersebut.

Berikut adalah amendemen atas standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, yaitu:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa Balik;
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan Amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok; dan
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah dan Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

which had been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Company. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. Effective Financial Accounting Standards

i. Statements of Financial Accounting Standard (“PSAK”) effective for the year beginning on or after January 1, 2024.

DSAK-IAI also ratified changes to the numbering of PSAK and ISAK which will be effective on January 1, 2024. This change does not affect the substance of requirement in each PSAK and ISAK.

The following are amendments of financial accounting standards (SAK) which effective for periods beginning on or after January 1, 2024, are as follows:

- Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements related to Classification of Liabilities as Current or Non-current;
- Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants;
- Amendments PSAK 116: Leases related to Lease Liability in a Sale and Leaseback Transaction;
- Amendments PSAK 207: Statement of Cash Flows and Amendment to PSAK 107: Financial Instrument Disclosure related to Supplier Finance Agreements; and
- Revision PSAK 409: Accounting for Zakat, Infaq, dan Sadaqah and Revision PSAK 401: Presentation of Sharia Financial Statements

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

ii. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran;
- PSAK 117: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen atas standar tersebut.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

ii. PSAK which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

New Standard and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability;
- PSAK 117: Insurance Contract; and
- Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 - Comparative Information.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 103: Business Combinations;
- PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
- PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;
- PSAK 109: Financial Instruments;
- PSAK 115: Income from Contracts with Customers;
- PSAK 201: Presentation of Financial Statements;
- PSAK 207: Statement of Cash Flows;
- PSAK 216: Fixed Assets;
- PSAK 219: Employee Benefits
- PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;
- PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;
- PSAK 236: Impairment of Assets;
- PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;
- PSAK 238: Intangible Assets; and
- PSAK 240: Investment Property.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the implementation those new standard and amendments to standards.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.e.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Grup dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Grup. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Group as described in Note 1.e.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, wherein the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights in which the Group has the practical ability to exercise (i.e., substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls other entities.

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Group and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities are eliminated in full.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity of the owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in cessation of control are equity transactions (which are transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

dimana kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya);

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- (a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;
- (b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);
- (c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;
- (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;
- (e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAK, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;
- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

2.e. Transactions with Related Parties

Related party represent a person or an entity who is related to the reporting entity:

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. Has control or joint control of the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) One entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

2.f. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup melakukan pencatatan dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
- iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

2.f. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group keep records by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Group is Rupiah.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp
Poundsterling Inggris (GBP)	20,332.61	20,021.57
Euro Eropa (EUR)	16,851.32	17,160.89
Dolar Amerika Serikat (USD)	16,162.00	15,853.00
Dolar Singapura (SGD)	11,919.34	11,765.64
Dolar Brunei (BND)	11,919.34	11,765.64
Dolar Australia (AUD)	10,081.88	10,345.69
Dirham Uni Emirat Arab (AED)	4,428.76	4,323.59
Ringgit Malaysia (MYR)	3,616.48	3,350.88
Dolar Kepulauan Solomon (SBD)	1,929.95	1,868.59
Dolar Taiwan (TWD)	478.15	496.26
Yen Jepang (JPY)	102.36	104.51
Dinar Aljazair (DZD)	119.50	117.79
Franc Africa (XOF)	25.71	26.11
Myanmar Kyat (MMK)	7.75	7.56

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.g. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat

2.g. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value.

In the case of a financial asset or financial liability are not measured at fair value through profit or loss, such fair value is added or deducted by transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of the financial asset or financial liability.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value.

In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

issuance of the financial asset or financial liability.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Group financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

(i) Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- (1) The financial assets is held within a business model whose objective to hold the financial assets to collect contractual cash flows (held to collect); and
- (2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit or loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified into amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

(ii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- (1) The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and
- (2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

(iii) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (i) Jumlah penyisihan kerugian; dan
 - (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.
- (d) Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan kontinjensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (a) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

This designation causes all gains or losses to be presented in other comprehensive income, except that dividend income continues to be recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings instead of through profit or loss.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortized cost, except for:

- (a) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
- (b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
- (c) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:
 - (i) The amount of the loss allowance; and
 - (ii) The amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 115.
- (d) Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

An entity may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- (a) Eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- (b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi dan dicatat sebagai keuntungan dari restrukturisasi pinjaman.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kredidnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- (b) A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group key management personnel.

Derecognition of Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss and recorded as gain arise from loan restructuring.

Impairment of Financial Assets

The Group recognizes expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then 12 months expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. Time value of money; and*
- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.*

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan bermaksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

2.j. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto kepada pemberi kerja diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits), and time deposits with maturity periods of 3 months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.i. Retention Receivables

Retention receivable represents the Group's receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivable's claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

2.j. Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents Group receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from employer is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the consolidated statement of financial position date.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2.k. Pekerjaan dalam Proses Konstruksi (PDPK)

PDPK merupakan biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan yang diakui sebagai aset, yang berhubungan langsung dengan kontrak dimana Grup dapat mengidentifikasi secara spesifik, menghasilkan atau meningkatkan sumber daya Grup yang akan digunakan dalam memenuhi (atau terus memenuhi) kewajiban pekerjaan dalam masa depan dan diharapkan dapat dipulihkan. Grup menelaah penurunan nilai PDPK setiap kali peristiwa atau perubahan keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat diperoleh kembali.

2.1. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan terdiri dari seluruh biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan penelaahan fisik persediaan pada akhir periode.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Persediaan - Aset Real Estat

Persediaan terdiri dari tanah yang sedang dikembangkan, tanah matang, bangunan yang sedang di konstruksi, bangunan jadi siap dijual (rumah tinggal, rumah toko (ruko) dan bangunan *strata title*) dan material; dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangkan dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

2.k. Construction Work in Progress (CWIP)

CWIP represents costs incurred in fulfilling contract with customers which recognized as an asset, that related directly to a contract that the Group can specifically identify, generate or enhance resources of the Group that will be used in satisfying (or continuing to satisfy) performance obligations in the future and are expected to be recovered. The Group reviews the CWIP for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.

2.1. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprises all costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Allowance for decrease in value of inventory is provided based on the physical check of inventory at the end of the period.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

Inventories - Real Estate Assets

Inventories consist of land under development, mature land, buildings under construction, the building ready for sale (houses, shop houses (ruko) and strata title building) and material; stated at the lower of cost or net realizable value. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business deducted by the estimated costs of completion and estimated selling expenses.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Biaya perolehan tanah dalam proses pengembangan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada kegiatan pengembangan real estat serta biaya pinjaman. Tanah dalam proses pengembangan akan dipindahkan ke tanah matang yang siap dijual pada saat tanah tersebut selesai dikembangkan dengan metode luas area. Untuk produk *high rise* dipindahkan ke unit bangunan.

Biaya pengembangan tanah, termasuk tanah yang digunakan sebagai jalan dan prasarana atau area yang tidak dijual lainnya, dialokasikan berdasarkan pembebanan secara proporsional estimasi jumlah beban prasarana untuk luas tanah yang terjual setelah memperhitungkan pengeluaran biaya prasarana kumulatif sampai dengan akhir tahun. Biaya perolehan unit bangunan yang sedang di konstruksi meliputi biaya konstruksi lalu dipindahkan ke unit bangunan yang siap dijual pada saat selesai dibangun dan siap dijual dengan menggunakan metode identifikasi khusus.

2.m. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, properti investasi diukur sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Tanah, bangunan, dan prasarana yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif akan direvaluasi

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Land acquisition costs in the development process include the cost of acquiring undeveloped land plus direct and indirect development costs that can be attributed to real estate development activities and borrowing costs. The land in the development process will be moved to mature land which is ready for sale when the land is completed with an area-wide method. For a product high rise transferred to building units.

The cost of land development, including land used as roads and infrastructure or other areas that are not sold, are allocated proportionally based on the imposition of the estimated total cost of improvements to the area of land that were sold after considering the cumulative spending on infrastructure costs by the end of the year. Cost of unit buildings under construction include the cost of construction and then moved into the property ready for sale when completed and ready for sale by using the specific identification method.

2.m. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes, or sale in the daily business activities.

Investment properties are recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment properties will flow to the entity and the cost of the investment properties can be measured reliably.

Investment properties are measured initially at its cost, including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are measured at fair value. A gain or losses arising from a change in the fair value of investment property are recognized in profit or loss, in the period in which they arise.

Land, building, and equipment that experience significant and fluctuating changes in fair value will be revalued annually, while assets that do

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

secara tahunan sedangkan aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan akan direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk dijual, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
- d. Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.n. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

not experience significant changes in fair value will be revalued at least every 3 (three) years.

Maintenance and repairment costs are charged to profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

The Group shall transfer a property to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment properties and there is evidence of the change in use, include:

- a. Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner occupation, for a transfer from investment properties to owner-occupied property;
- b. Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment properties to inventories;
- c. End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied properties to investment properties; and
- d. Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment properties.

Investment properties are derecognized on disposal or when the investment properties are permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.n. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan diakui dengan metode garis lurus, kecuali peralatan proyek diakui dengan metode jumlah angka tahun, setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa aset tetap. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.01.03./A.DIR 7677/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dan Surat Keputusan Direksi WIKA Beton No. SK.01.03/WB-0A.0001/2023 tanggal 25 September 2023 taksiran masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Bangunan	10-50	10-5	<i>Building</i>
Prasarana	10-40	10-4	<i>Infrastructure</i>
Perlengkapan kantor	3-4	33-24	<i>Office equipment</i>
Kendaraan	4-10	25-10	<i>Vehicles</i>
Peralatan Pabrik dan Proyek	4-25	25-4	<i>Project and Plant Equipment</i>

Lahan tambang disajikan sebesar harga perolehan, disusutkan dengan menggunakan unit produksi dimulai dari awal operasi komersial, penyusutan tersebut dihitung berdasarkan estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif dimulai sejak periode terjadinya perubahan.

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset Dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method, except for project equipment using sum of the year method, based on the estimated useful lives of the assets. Based on Directors's Decision letter No. 01.03./A.DIR 7677/2013 dated October 30, 2013 and WIKA Beton Board of Directors Decision letter No. SK.01.03/WB-0A.0001/2023 dated September 25, 2023, the estimated useful life of fixed assets are as follows:

Quarries are stated at cost less, the value of mining properties is depreciated using the unit of production method from the date of the commencement of commercial operation. The depreciation is calculated based on estimated mineable reserves. Changes in estimated reserves are accounted for on a prospective basis, from the beginning of the period in which the change occurs.

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under "Assets in Progress" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction.

Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2.o. Sewa

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

- a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b. Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c. Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful life, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.o. Lease

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- a. The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represents substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;
- b. The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- c. The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:
 - The Group has the right to operate the asset; or
 - The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal inepksi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks liabilitas sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentian jika Grup cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima. Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Periode penyusutan untuk aset hak guna dengan opsi beli yang dieksekusi tersebut mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa dengan:

- a. Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following: fixed payments, variable lease payments that depend on an index, amounts expected to be payable under a residual value guarantee and the exercise price under a purchase option, optional renewal period or penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received. After the commencement date, the Group shall measure the right-of-use asset applying a cost model.

If the lease transfers the ownership of the underlying asset at the end of the lease term, then the asset will be depreciated from the beginning of the lease term to the end of the underlying asset's useful life. The depreciation periods for the right-of-use assets with buy options executed should refer to the policy for the property, plant and equipment.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Group incremental borrowing rate. Generally, The Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

- a. *Increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;*

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
- c. Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

Grup menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah berdasarkan sewa per sewa.

Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Sewa aset bernilai rendah adalah sewa untuk perlengkapan umum seperti komputer, laptop, telepon genggam, dan perlengkapan kantor lainnya, serta aset lain yang harga barunya tidak lebih dari plafon nilai rendah yang ditetapkan oleh Grup.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian tersebut, diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

2.p. Aset Kerja Sama Operasi

Aset kerja sama operasi merupakan aset atas kerja sama dengan pihak ketiga dengan sistem Bangun Kelola Serah, Grup mencatat aset kerja sama operasi sebesar harga perolehan pada saat melakukan pembangunan. Aset tersebut dilakukan penyusutan selama masa perjanjian kerja sama.

2.q. Aset Takberwujud

Merek Dagang dan Hak Paten

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Nilai perolehan aset takberwujud yang diperoleh

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- b. Reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and
- c. Remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.

Lease liabilities remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Group apply the exemption for low-value assets on a lease-by-lease basis and for all other leases of low value asset.

Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets are those of general equipments which comprise of computers, tablets, mobile phones and small items of office supplies, and other assets which have value less than the maximum amount of low value set in the Group's policy.

Furthermore, payments associated with contracts included in those exception, are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

2.p. Joint Operation Assets

The assets of joint operation is an asset of the cooperation with a third party under the Build Operate Transfer system, the Group records the assets of joint operation at cost at the time of construction. The asset is depreciated during the term of the cooperation agreement.

2.q. Intangible Assets

Trademark and Patent

Intangible assets are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired from business combinations is

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

dari kombinasi bisnis pada awalnya diakui sesuai nilai wajar pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi, akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset takberwujud dengan umur tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa manfaat masih mendukung dan terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai.

Perangkat Lunak

Perangkat lunak diamortisasi selama umur manfaat ekonomis dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis.

Hak Pengusahaan Jalan Tol dan Pengelolaan Saluran Air

Grup telah menerapkan ISAK 112, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 112) dan ISAK 229, "Perjanjian Konsesi Jasa Pengungkapan" (ISAK 229).

ISAK 112 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 112 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 229 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jalan tol dan pengelolaan air. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

initially recognized at fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and if any, accumulated impairment loss. The useful lives of intangible assets are assessed to be either finite or indefinite.

Intangible assets with indefinite life are not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite useful life is reviewed annually to determine whether the useful life assessment continues to be supportable and when circumstances indicate that the carrying amount may be impaired.

Software

Software is amortized over its useful life using the straight-line method based on the estimated useful life.

Toll Road Concession Right and Water Channel Management

The Group has adopted ISAK 112, "Service Concession Arrangement" (ISAK 112) and ISAK 229, "Service Concession Arrangement Disclosure" (ISAK 229).

ISAK 112 determines the general principles in the recognition and measurement of rights and liabilities related to service concession arrangement. ISAK 112 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 229 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for the service concession agreement as an intangible asset model because it has the right (license) to charge users for public services. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the consideration received or to be received. The concession assets are toll road management rights and water management rights. During the construction period, the accumulated acquisition and construction costs

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Grup dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/ BPJT dan PJPK. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/ BPJT dan PJPK pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selama periode hak pengusahaan jalan tol dan pengelolaan saluran air, aset hak pengusahaan jalan tol dan pengelolaan saluran air dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup jika jalan tol dan saluran air diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah/ BPJT atau PJPK mengubah status aset konsesi atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Selain itu, Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi dan jasa yang dilakukan sesuai dengan "Pendapatan dari Kontrak Pelanggan", PSAK 115. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol atau peningkatan kapasitas jalan tol dan saluran air yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol dan saluran air, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol dan saluran air, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan, ditambah biaya

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023

(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

of toll roads are recognized as concession assets in progress. Amortization begins to be charged when the concession assets are ready for use.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) and Collaborative Project Authority (PJPK) for no consideration.

Concession assets granted to the Group are transferrable with approval from the Government/ BPJT and PJPK. These concession right assets will be transferred to the Government/ BPJT and PJPK at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

During the period of toll road concession rights and water channel management, toll road concession rights and waterway management rights assets may be excluded from the Group's consolidated statement of financial position if the toll roads and waterways are handed over (authorized) to other parties or the Government/BPJT or PJPK changes the status of concession asset. concession or no economic benefits can be expected from its use. Gains or losses arising from the termination or disposal of concession assets are recognized as gains or losses in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

In addition, the Group recognizes and measures revenue for construction and services performed in accordance with "Revenue from Customer Contracts", PSAK 115. When the Group provides construction or capacity building services, the consideration received or will be received by the Group is recognized at fair value.

The construction contract covers all construction costs for the construction of toll roads or capacity building for toll roads and waterways which include land acquisition, feasibility studies and other costs directly related to the construction of toll roads and waterways, including the costs of constructing access roads to toll roads and canals, water, alternative roads and required public road facilities, plus other borrowing costs

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

pinjaman lain yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut telah selesai dan aset konsesi telah siap untuk dioperasikan.

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset tak berwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya. Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Hak konsesi ruas jalan tol diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- i. Aset hak perusahaan jalan tol untuk jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas.
- ii. Aset hak perusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset jalan tol terdiri dari jalan dan jembatan, gerbang dan bangunan pelengkap jalan tol dan sarana pelengkap jalan tol dicatat sebagai aset hak perusahaan jalan tol yang dinyatakan sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

that are directly or indirectly used to finance the process of building these assets. Borrowing costs are capitalized until the construction process is complete and the concession assets are ready for operation.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract. Construction cost is the value of acquisition the construction contract.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

Toll road concession rights are amortized over the concession period using the following method:

- i. Toll road concession rights for toll roads and toll bridges are amortized using unit of usage method based on traffic volume.*
- ii. Toll road concession rights aside from toll roads and toll bridges are amortised using straight line method.*

Toll road assets consisting of roads and bridges, gates and complementary building toll roads and toll supplementary facilities are recorded as toll road concession rights which are stated at fair value at the date of revaluation less accumulated depreciation and accumulated impairment losses that occur after the date of revaluation.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Amortisasi aset jalan dan jembatan dilakukan dengan menggunakan metode unit produksi (jumlah lalu lintas kendaraan kendaraan) selama masa hak pengusahaan jalan tol (masa konsesi). Sedangkan aset hak pengusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan diamortisasi selama periode yang lebih pendek antara masa hak pengusahaan jalan tol (masa konsesi) dan umur manfaat aset.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaannya atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan diakui sebagai penghasilan lain-lain.

2.r. Penurunan Aset Nonkeuangan kecuali Goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup akan melakukan penilaian apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut atau unit penghasil kas dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pemulihan rugi penurunan nilai aset yang telah diakui periode sebelumnya dicatat jika terdapat indikasi penurunan nilai aset tersebut sudah tidak ada lagi atau menurun. Pemulihan rugi penurunan nilai aset diakui dalam laba rugi. Namun demikian, kenaikan nilai tercatat aset karena pemulihan rugi penurunan nilai hanya diakui sepanjang tidak melebihi nilai tercatat yang ditentukan (setelah dikurangi penyusutan dan amortisasi) jika rugi penurunan nilai aset tidak diakui pada tahun sebelumnya.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Amortization of assets roads and bridges were calculated using the unit of production (the amount of vehicle traffic vehicles) during the period of the concession (concession period). While the toll road concession rights assets other than roads and bridges are amortized over the shorter period between the period of concession (concession period) and the useful life of the asset.

Intangible assets are derecognized when removed or when there are no further future economic benefits are expected from its use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset is determined as the difference between the net disposal proceeds (if any) and the carrying amount of assets. Gains or losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized. Gains are recognized as other income.

2.r. Impairment of Nonfinancial Assets except Goodwill

At the end of the reporting period, the Group will assess whether there is an indication of assets impairment. If such indication exists, the assets of the Group estimates the recoverable amount of the asset's cash-generating unit the recoverable amount is the higher amount between the fair value less costs to sell and value in use. If the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of an asset should be reduced to its recoverable amount. Impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Recovery of impairment losses of assets which has been recognized in prior periods are recorded when there is indication of impairment of the asset no longer exists or decreases. Recovery of impairment losses of assets recognized in the profit or loss. However, the increase in the carrying value of assets due to the recovery of an impairment loss is recognized only if it is not exceed the carrying amount that would had been determined (after deducting depreciation and amortization) if no impairment losses of assets recognized in prior years.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2.s. Sukuk

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas: (a). aset berwujud tertentu; (b). manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; (c). jasa yang sudah ada maupun yang akan ada; (d). aset proyek tertentu; atau (e). kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah.

Grup sebagai Penerbit

Sukuk mudharabah diakui saat Grup menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal.

Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah dan disajikan dalam aset sebagai beban tangguhan, bukan sebagai pos lawan dari sukuk mudharabah. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah.

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban.

Karena bukan merupakan entitas syariah, Grup tidak menyajikan sukuk mudharabah sebagai dana syirkah temporer yang secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas, tetapi disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk mudharabah disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas.

2.t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan
 - Kontrak memiliki substansi komersial
 - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan

2.s. Sukuk

Sukuk are the sharia securities represented by a certificate or evidence of ownership of equal denomination and representing individual ownership interest in (not separated or divided): (a). particular intangible assets; (b).existing or future benefits of particular intangible assets; (c).existing or future services; (d).particular project assets; or (e).determined investment activity.

Sukuk mudarabah is sukuk using a mudarabah's contract.

The Group as Issuer

Sukuk Mudarabah is recognized when the Group becomes a party bound by the provisions of sukuk mudharabah issuance. Sukuk mudharabah is recognized at its nominal amount.

A transaction cost is recognized separately from sukuk mudarabah and is presented in assets as deferred expense, rather than a contra account of sukuk mudarabah. Transaction cost is amortized on straight-line basis over the terms of sukuk mudharabah.

A return entitled for the holder of sukuk mudarabah is recognized as a deduction of revenues, rather than an expense.

Since was not a sharia entity, the Group did not presenting sukuk mudarabah as a temporary shirkah funds separately from liabilities and equity, but presented in a separate liability of other liabilities. Sukuk mudarabah is presented at the last in the sequence of liabilities.

2.t. Revenue and Expense Recognition

In determining revenue recognition, the Group performs analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. Identify contracts with customers with certain criteria as follows:
 - The contract has been agreed by the parties involved in the contract
 - The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred
 - The contract has commercial substance
 - It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari sepanjang waktu:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

Kriteria berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan Konstruksi dan Beban Konstruksi
Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2. Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group performs;
- The Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and
- The Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date.

The following recognition criteria must also be met before revenue is recognized.

Construction Revenues and Construction Costs
Revenues related to construction contracts are recognized over time which accounted for using

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

yang dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada keadaan fisik kemajuan pekerjaan.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban non proyek (beban usaha).

Penjualan Barang dan Jasa

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

the percentage of completion method. Under this method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the physical state of progress of the works.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognized as a current provision in the consolidated financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognized as current year expenses in profit or loss.

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental on obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 115: Revenue from Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Direct and indirect costs of projects which can be allocated to a particular project, are recognized as an expense on the related projects, while the expenses that cannot be distributed or cannot be allocated to the project activities are recognized as non-project expenses (operating expenses).

Sales of goods and services

Revenue from the sale of goods is recognized when the control of goods has been transferred to the customer. Revenue from the rendering of service is recognized when the customer has received and consumed benefit from the services.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Hotel dan Restoran

Pendapatan hotel dan restoran diakui pada saat barang atau jasa diberikan kepada tamu hotel atau pengunjung restoran. Pendapatan uang pangkal dan iuran klub keanggotaan ditangguhkan (disajikan dalam akun Pendapatan Ditangguhkan) dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan periode keanggotaannya.

Real Estat

Grup memperoleh pendapatan real estatnya dari penjualan kavling, rumah dan kavling serta unit kondominium. Pendapatan dari penjualan proyek real estat ini diakui pada saat ketika Grup telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan yang biasa kepada pembeli dalam suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan tidak memiliki keterlibatan berkelanjutan yang substansial dengan properti.

Pengakuan Beban

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

2.u. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Hotel and Restaurant

Hotel and restaurant revenues are recognized when the goods or services provided to hotel guests or restaurant visitors. Revenue club tuition and membership fees are deferred (presented under Deferred Income) and recognized as income over the period of its membership.

Real Estate

The Group derives its real estate revenue from sale of lots, house and lot and condominium units. Revenues from the sale of these real estate projects are recognized at point in time which is when the Group has already transferred to the buyer the usual risks and rewards of ownership in a transaction that is in substance a sale and does not have a substantial continuing involvement with the property.

Expense Recognition

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental on obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 115: Revenue from Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

2.u. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Konstruksi yang termasuk dalam perolehan aset tertentu adalah proyek-proyek *pre-financing* yang pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

2.v. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset.

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang
 - i. Bukan kombinasi bisnis;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

Construction included in acquisition of certain assets is the pre-financing projects whose constructions time is required more than one year.

2.v. Income Tax

The tax expense is the combined amount of current tax and deferred tax which calculated in determining profit or loss in the period. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset.

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that had been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) *The initial recognition of goodwill; or*
- b) *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is*
 - i. *Not a business combination;*

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- ii. Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan
- iii. pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- ii. At the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss); and
- iii. At the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that had been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and
- b) The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:
 - i. The same taxable entity; or

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.w. Pajak Penghasilan Final

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 21 Februari 2022 yang merupakan perubahan (revisi) atas Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2008 yang telah diundangkan tanggal 23 Juli 2008 tentang Pajak atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagai pengganti Peraturan Pemerintah RI No. 140 Tahun 2000, Perusahaan sebagai pelaksana konstruksi sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2022 dikenakan tarif pajak final sebesar 2,65% untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang terhitung sejak peraturan pemerintah ini berlaku.

Pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPH) final atas penjualan tanah dan bangunan non subsidi dari 5% menjadi 2,5% berlaku efektif per tanggal 7 September 2016 atau 30 hari sejak diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau bangunan, dan Perjanjian Peningkatan Jual Beli Atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya.

2.x. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- ii. Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) Has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and
b) Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

2.w. Final Income Tax

Due to the enactment of Government Regulation Republic of Indonesia No. 9 Year 2022, which was enacted on February 21, 2022 which is the change (revision) of Government Regulation RI No. 51 Year 2008, which was passed July 23, 2008 on Tax on Income From Construction Services as a substitute Government Regulation RI No. 140 Year 2000, the Company as the contractor in accordance with Article 3 of Government Regulation No. 9 Year 2022 is charged at 2.65% final tax for contract payments or parts of contract which received after this regulation becomes effective.

The Government lowered the income tax (PPH) final over the sale of land and buildings other non subsidy from 5% became 2.5% effective on September 7, 2016 or 30 days from the enactment of Government Regulation (PP) No. 34 Year 2016 about Income Taxes on the Income from the Transfer of Land Rights and/or Building, and an Increase in the Sale of Land and/ or Buildings Along with the Revised Document.

2.x. Employee Benefits

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Grup memberikan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja No. 11/2020.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbalan hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang diukur dengan menggunakan metode yang sama dengan imbalan pascakerja, kecuali untuk pengukuran kembali liabilitas diakui dalam laba rugi.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

service.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-Employment Benefits

The Group also provides post-employment benefits as required under Omnibus Law No. 11/2020.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determined by discounting the benefit.

The Group not only record for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liabilities (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets and any change in effect of the asset are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- a) When the Group no longer can withdraw the offer of those benefits; and
- b) When the Group recognizes costs for a restructuring within the scope of PSAK 237 and involves payment of termination benefits.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Other Long-Term Employee Benefits

Other long-term benefits such as long service leave measured using the same method as post-employment benefits, except for the remeasurement of the liability recognized in profit or loss.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**2.y. Investasi pada Entitas Asosiasi dan
 Pengaturan Bersama**

Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* akan mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- i. Jika investasi menjadi entitas anak, Grup mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 103 dan PSAK 110;
- ii. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar; dan
- iii. Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2.y. Investments in Associates and Joint
 Arrangement**

Associates

Associates are entities in which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but has no control or jointly control over those policies (significant influence).

Investment in associates is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted by the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee will reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- i. If the investment becomes a subsidiary, the Group account for its investment in accordance with PSAK 103 and PSAK 110;
- ii. If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value; and
- iii. When the Group discontinues the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would had been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

If the Group's share of losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its carrying value in the associate or joint venture, the Group discontinues recognizing its share of further losses. The interest in an associate or a

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

lebih lanjut. Kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama adalah jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang ditentukan dengan menggunakan metode ekuitas ditambah dengan setiap kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

Kerugian yang diakui dengan menggunakan metode ekuitas atas selisih lebih investasi Grup pada saham biasa diterapkan untuk komponen lain dari bagian Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama dalam urutan terbalik dengan tingkat senioritasnya (yaitu prioritas dalam likuidasi).

Setelah kepentingan Grup dikurangkan menjadi nol, tambahan kerugian dicadangkan, dan liabilitas diakui, hanya sepanjang Grup memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika entitas asosiasi atau ventura bersama kemudian melaporkan laba, maka Grup mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui.

Grup mengakui kelebihan rugi tersebut sebagai pengurang kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi tersebut.

Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan atas dua atau lebih pihak yang memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

1) Operasi Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

joint venture is the carrying amount of the investment in the associate or joint venture determined using the equity method together with any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate or joint venture.

Losses recognized using the equity method in excess of the Group's investment in ordinary shares are applied to the other components of the Group's interest in an associate or a joint venture in the reverse order of their seniority (ie priority in liquidation).

After the Group's carrying value is reduced to zero, additional losses are provided for, and a liability is recognized, only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture. If the associate or joint venture subsequently reports profits, the Group resumes recognizing its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognized.

The Group recognizes the excess as a deduction of long-term interest in the associate entity.

Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classifies joint arrangement as:

1) Joint Operation

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

A joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- (a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- (b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- (c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama;
- (d) Bagian atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama; dan
- (e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2) Ventura Bersama

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama. Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

2.z. Biaya Emisi Obligasi dan Saham

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

2.aa. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- (a) *Its assets, including its share of any assets held jointly;*
- (b) *Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;*
- (c) *Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- (d) *Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and*
- (e) *Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

2) Joint Venture

The Group classifies joint arrangement as a joint venture whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers. A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

2.z. Bond and Shares

Bond issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds in order to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.

Share issuance costs are presented as a deduction of additional paid-in capital and not amortized.

2.aa. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculation diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain.

Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana Direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kepentingan dalam Pengaturan Bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama, apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
 - a. Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
 - b. Persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
 - c. Fakta dan kondisi lainnya, jika relevan.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

**3. Sources of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgments**

In the application of the Group accounting policies, the Directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources.

The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the Directors have made in the process of applying the Group accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Interests in Joint Arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
 - a. *The legal form of the separate vehicle;*
 - b. *The terms of the contractual arrangement; and*
 - c. *Other relevant facts and circumstances.*

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan sebuah ventura bersama.

Investasi pada Entitas Asosiasi

PT Wijaya Karunia Realtindo (WKR) merupakan entitas asosiasi dari WIKA Realty. Meskipun WIKA Realty memiliki 50% kepemilikan di WKR, WIKA Realty menilai apakah WIKA Realty memiliki pengendalian atas WKR dengan mempertimbangkan keberadaan perwakilan WIKA Realty di Dewan Direksi WKR yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan kegiatan WKR secara sepihak dan berkesimpulan WIKA Realty tidak memiliki kontrol tetapi hanya memiliki pengaruh signifikan terhadap WKR.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Pengakuan Pendapatan Konstruksi dan Beban Pokok Pendapatan

Grup mengakui pendapatan konstruksi dan beban pokok pendapatan dari proyek yang masih dalam progress pembangunan berdasarkan metode persentase penyelesaian. Asumsi yang penting diperlukan adalah dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase penyelesaian) dan jumlah estimasi pendapatan dan jumlah biaya pembangunan. Dalam membuat asumsi, Grup mengevaluasinya berdasarkan pengalaman di waktu yang lampau dan bantuan dari spesialis. Jumlah pendapatan konstruksi dan beban pokok pendapatan yang terkait disajikan di Catatan 44 dan 45.

Rugi Penurunan Nilai pada Aset Keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangement indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangement. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

Investments in Associates

PT Wijaya Karunia Realtindo (WKR) is an associate entity of WIKA Realty. Although WIKA Realty has 50% ownership in WKR, WIKA Realty assesses whether WIKA Realty has control over WKR by considering the presence of WIKA Realty representatives on the WKR Board of Directors who have the power to direct and WKR activities unilaterally and concludes WIKA Realty has no control but only has a significant influence on WKR.

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Revenue Construction and Cost of Revenue Recognition

The Group recognizes revenues from construction and cost of revenues from the construction and project in development stage based on percentage of completion method. Important assumption is required in determining the stage completion (percentage of completion) and the amount of estimated income and total development cost. In making assumptions, the Group evaluates them based on past experience and with the assistance of specialist. Total construction revenues and related cost of revenues are presented in Notes 44 and 45.

Impairment Loss on Financial Asset measured at Amortized Cost

The Group assesses its financial assets measured at amortized cost for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai piutang usaha, piutang retensi, dan tagihan bruto. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 6, 7, 8.

Penyisihan Penurunan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 11.

Penyisihan Penurunan Pekerjaan Dalam Proses Konstruksi

Rugi penurunan nilai diakui sebesar nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Perhitungan manajemen atas estimasi penurunan nilai PDPK melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan. Grup membandingkan jumlah terpulihkan dengan nilai tercatat untuk mengukur penurunan nilai PDPK. Grup menelaah estimasi penurunan nilai PDPK berdasarkan kondisi masing-masing proyek dengan mempertimbangkan data historis, asumsi atau ekspektasi kondisi masa depan.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan penggunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Group applies simplified approach using roll rate dan discounted cash flow to measuring account receivable, retention receivable and gross amount due from customers. The carrying amounts of financial assets are disclosed in Notes 6, 7, 8.

Allowance Impairment for Obsolescence of Inventories

Allowance for impairment for obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is reevaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 11.

Allowance Impairment for Construction Work in Progress

An impairment loss is recognized for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. The calculation of the management on the estimated impairment of CWIP involves significant estimates and judgments. The Group compares the recoverable amount with the carrying amount to measure the impairment of CWIP. The Group reviews the estimated impairment of CWIP based on the conditions of each project by considering historical data, assumptions or expectations of future conditions.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each of the Group's fixed assets is determined based on the expected use of the assets. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 20.

Pengukuran Nilai Wajar untuk Properti Investasi

Properti investasi Grup diukur pada nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam mengestimasi nilai wajar, Grup menugaskan penilai independen untuk melakukan penilaian. Penilaian tersebut didasarkan pada pendekatan pendapatan, biaya, dan data pasar. Nilai tercatat properti investasi diungkapkan dalam Catatan 19.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi aktual yang berbeda dari asumsi Grup akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Grup. Nilai tercatat liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 34.

Penurunan Nilai Goodwill

Menentukan apakah suatu goodwill mengalami penurunan nilai mengharuskan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana goodwill dialokasikan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi arus kas masa depan yang diharapkan timbul dari unit penghasil kas yang menggunakan tingkat pertumbuhan yang tepat dan tingkat diskonto yang sesuai untuk perhitungan nilai kini. Dimana aktual arus kas masa depan kurang dari yang diharapkan, kerugian penurunan nilai material mungkin timbul. Nilai tercatat goodwill pada akhir periode pelaporan disajikan pada Catatan 22.

Provisi Pelapisan Jalan Tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Grup mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas ini.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

recorded depreciation expense and decrease in the carrying amounts of these assets. The carrying amounts of fixed assets are disclosed in Note 20.

Fair Value Measurements of Investment Properties

The Group's investment property was measured at fair value for financial reporting purposes. In estimating the fair value, the Group engaged independent valuers to perform the valuation. Such valuation was based on income, cost, and market data approaches. The carrying amount of the investment properties are disclosed in Note 19.

Employee Benefits

The determination of employee benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions generally affect the recognized expense in profit or loss and other comprehensive income and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's employee benefit liabilities. The carrying amounts of employee benefits liabilities are disclosed in Note 34.

Impairment of Goodwill

Determining whether goodwill is impaired requires an estimation of the value in use of the cash generating units to which goodwill has been allocated. The value in use calculation requires the management to estimate the future cash flows expected to arise from the cash-generating unit using an appropriate growth rate and a suitable discount rate in order to calculate present value. Where the actual future cash flows are less than expected, a material impairment loss may arise. The carrying amounts of goodwill at the end of the reporting period are set out in Note 22.

Provision for Toll Road Overlay

In operating toll roads, the Group is obliged to maintain quality in accordance with the SPM (Minimum Service Standards) established by Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia, i.e., by performing toll road overlay regularly. The cost of this overlay is periodically provided based on estimated utilization of toll road by customers. The estimated net provision for toll road overlay is discounted to its present value that reflects management estimates against cost incurred to settle current provision.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

4. Kas dan Setara Kas

4. Cash and Cash Equivalents

	2024 Rp	2023 Rp
Kas/ Cash on Hand	26,664,911	35,757,419
Bank - Pihak Berelasi/ Bank - Related Parties (Catatan 52/ Note 52)	2,332,115,263	2,242,350,590
Bank - Pihak Ketiga/ Bank - Third Parties		
Rupiah		
PT Bank DKI	16,304,047	116,122,536
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8,377,106	10,322,186
PT Bank Central Asia Tbk	6,847,951	8,569,271
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	446,081	8,489,771
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5.000.000)/ Others (each below Rp5,000,000)	50,349,156	18,210,159
Sub Total	82,324,341	161,713,923
Mata Uang Asing / Foreign Currencies		
DINAR		
Bank CPA	46,541,036	20,081,283
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5.000.000)/ Others (each below Rp5,000,000)	8,656,407	3,485,691
Sub Total	55,197,443	23,566,974
Total Bank / Banks	2,469,637,047	2,427,631,487
Deposito Berjangka - Pihak Berelasi (Catatan 52)/ Time Deposits - Related Parties (Note 52)	681,700,918	594,794,176
Deposito Berjangka - Pihak Ketiga/ Time Deposits - Third Parties		
Rupiah		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	133,000,000	18,388,295
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	25,000,000	146,500,000
PT Bank DKI	25,000,000	10,000,000
Sub Total	183,000,000	174,888,295
	864,700,918	769,682,471
Total	3,361,002,876	3,233,071,377
Tingkat Bunga/ Interest Rates		
Rupiah	2.00% - 6.00%	1.80% - 6.00%
Jangka Waktu/ Maturity Period	1 - 3 Bulan/ Months	1 - 3 Bulan/ Months

Manajemen berkeyakinan semua saldo kas dan setara kas dapat digunakan oleh Grup.

Management believes all cash and cash equivalents can be used by the Group.

5. Bank Dibatasi Penggunaannya

5. Restricted Bank

Pada tanggal 31 Desember 2024, Bank dibatasi penggunaannya sebesar Rp2.392.793.739 merupakan giro yang ditempatkan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berasal dari penyertaan modal negara. Giro dalam bank ini hanya dapat digunakan untuk mendanai Proyek Strategis Nasional yang sedang dan akan dikerjakan oleh Perusahaan sesuai yang tercantum dalam Prospektus.

As of December 31, 2024, the restricted bank amounting to Rp2,392,793,739, which represents a current account held at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, originating from state capital participation. This current account can only be used to finance National Strategic Projects that are currently being and will be undertaken by the Company, as stated in the Prospectus.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

6. Piutang Usaha

6. Trade Receivables

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi/Related Parties (Catatan 52/Note 52)		
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	1,041,783,532	1,815,928,960
Sub Total	<u>854,345,376</u>	<u>1,594,510,658</u>
Pihak Ketiga/Third Parties		
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	1,985,701,017	2,235,461,514
Sub Total	<u>1,475,905,515</u>	<u>1,715,811,308</u>
Total	<u>2,330,250,891</u>	<u>3,310,321,966</u>

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of trade receivables based on currencies are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Rupiah	2,916,135,918	3,940,041,843
Dinar Al-Jazair/Algeria	82,652,751	82,652,751
Ringgit Malaysia	17,854,698	17,854,698
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar	6,251,479	6,251,479
New Taiwan Dollar	4,589,703	4,589,703
Sub Total	<u>3,027,484,549</u>	<u>4,051,390,474</u>
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	<u>(697,233,658)</u>	<u>(741,068,508)</u>
Total	<u>2,330,250,891</u>	<u>3,310,321,966</u>

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of trade receivables are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Belum Jatuh Tempo/Not Yet Due	1,086,640,516	1,057,182,808
1-3 Bulan/Months	370,999,129	714,681,875
3-6 Bulan/Months	75,098,475	273,041,888
6-12 Bulan/Months	363,798,299	696,547,404
> 12 Bulan/Months	1,130,948,130	1,309,936,499
Sub Total	<u>3,027,484,549</u>	<u>4,051,390,474</u>
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	<u>(697,233,658)</u>	<u>(741,068,508)</u>
Total	<u>2,330,250,891</u>	<u>3,310,321,966</u>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on accounts receivable are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Awal/Beginning Balance	741,068,508	618,905,718
Penambahan/Additional	222,405,925	348,190,615
Pemulihan/Recovery	<u>(266,240,775)</u>	<u>(226,027,825)</u>
Saldo Akhir/Ending Balance	<u>697,233,658</u>	<u>741,068,508</u>

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dari tidak tertagihnya piutang.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on trade receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible of receivables in the future.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Sebagian piutang usaha dijaminkan untuk fasilitas pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang (Catatan 26 dan 37).

Penambahan properti investasi di tahun 2024 sebesar Rp2.583.380 (Catatan 19) merupakan hasil konversi atas sebagian piutang usaha WPG kepada PT Samudra Bangun Raya dengan ruko yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Some accounts receivables had been pledged as collateral for facilities from short-term and long-term loans (Notes 26 and 37).

The addition of investment properties in 2024 amounting to Rp2,583,380 (Note 19) is the result of the conversion of part of WPG's trade receivables to PT Samudra Bangun Raya with a shophouse located in Bogor, West Java.

7. Piutang Retensi

7. Retention Receivables

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 52)/Related Parties (Note 52)	567,990,672	747,407,442
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(46,817,015)	(62,411,569)
Sub Total	521,173,657	684,995,873
Pihak Ketiga/Third Parties	884,476,755	985,759,162
Dikurangi/ Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(121,845,181)	(98,659,404)
Sub Total	762,631,574	887,099,758
Total	1,283,805,231	1,572,095,631

Rincian piutang retensi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of retention receivables based on currencies are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Rupiah	1,446,464,067	1,726,117,136
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar	2,990,934	2,990,934
New Taiwan Dollar	1,885,163	1,885,163
Ringgit Malaysia	1,127,263	2,173,371
Sub Total	1,452,467,427	1,733,166,604
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(168,662,196)	(161,070,973)
Total	1,283,805,231	1,572,095,631

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on retention receivable are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Awal/Beginning Balance	161,070,973	263,275,121
Penambahan/Additional	169,855,057	128,910,707
Penghapusan/ Write Off	--	(127,067,913)
Pemulihan/Recovery	(162,263,834)	(104,046,942)
Saldo Akhir/ Ending Balance	168,662,196	161,070,973

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang retensi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dari tidak tertagihnya piutang retensi.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on retention receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible of retention receivables in the future.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

8. Tagihan Bruto Ke Pemberi Kerja

8. Gross Amount Due from Customers

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya Konstruksi	62,914,683,832	46,154,825,138	Construction Cost
Laba yang Diakui	1,462,244,103	2,850,616,962	Recognized Profit
Sub Total	64,376,927,935	49,005,442,100	Sub Total
Penagihan	(62,405,200,526)	(46,355,392,628)	Progress Billing
Tagihan Bruto Pemberi Kerja	1,971,727,409	2,650,049,472	Due from Customer
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(228,221,370)	(187,000,040)	Allowance for Impairment Losses
Total	1,743,506,039	2,463,049,432	Total

Rincian tagihan bruto kepada pemberi kerja berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of gross amount due from customers based on customer are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 52)/Related Parties (Note 52)	1,132,501,733	1,264,283,864
Dikurangi/Less : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(102,222,959)	(92,550,374)
Sub Total	1,030,278,774	1,171,733,490
Pihak Ketiga/Third Parties	839,225,676	1,385,765,608
Dikurangi/Less : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(125,998,411)	(94,449,666)
Sub Total	713,227,265	1,291,315,942
Total	1,743,506,039	2,463,049,432

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on gross amount due from customers are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Awal/Beginning Balance	187,000,040	233,218,146
Penambahan/Additional	478,246,941	182,363,213
Pemulihan/Recovery	(437,025,611)	(228,581,319)
Saldo Akhir/Ending Balance	228,221,370	187,000,040

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas tagihan bruto ke pemberi kerja cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dari tidak tertagihnya tagihan bruto.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on gross amount due from customers is sufficient to cover possible losses on uncollectible of due from customers in the future.

9. Piutang Yang Belum Ditagih

9. Unbilled Receivables

	2024 Rp	2023 Rp
Pelanggan/Customer WIKA Beton	600,603,422	696,742,106
Pelanggan/Customer WIKA Bitumen	29,449,580	--
Piutang Perusahaan/the Company's Receivable	25,380,146	41,325,049
Pelanggan/Customer WIKA Ikon	21,149,060	16,419,229

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp
Pelanggan/Customer WIKA Rekon	18,553,269	11,122,275
Pelanggan/Customer WIKA Gedung	9,335,080	3,238,282
Pelanggan/Customer WIKA Realty	8,360,300	--
Pelanggan/Customer WIKA Tirta Jaya Jatiluhur	2,185,569	--
Pelanggan/Customer WIKA Serpan	246,726	218,541
Sub Total	715,263,152	769,065,482
Dikurangi/Less :Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(5,666,201)	(14,846,116)
Total	709,596,951	754,219,366

Akun ini merupakan piutang usaha yang belum ditagihkan selain dari aktivitas pelaksanaan proyek.

This account represents unbilled accounts receivables arising from activities other than project construction activities.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang belum ditagih adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on unbilled receivables are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Awal/Beginning Balance	14,846,116	15,741,936
Penambahan/Additional	24,931,569	58,670,478
Pemulihan/Recovery	(34,111,484)	(59,566,298)
Saldo Akhir/Ending Balance	5,666,201	14,846,116

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang belum ditagih cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dari tidak tertagihnya piutang yang belum ditagih.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on unbilled receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible of unbilled receivables in the future.

10. Piutang Lain-lain

10. Other Receivables

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 52)/Related Parties (Note 52)		
Dikurangi/Less :Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	1,615,608,885	1,639,205,432
Sub Total	(1,358,412,538)	(1,361,577,326)
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Dikurangi/Less :Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	161,457,496	29,859,647
Sub Total	(14,639,571)	(7,691,692)
Total	404,014,272	299,796,061

Pada tahun 2023, Piutang lain-lain PT Gesits Motor Nusantara dialihkan menjadi investasi pada entitas asosiasi melalui *debt to equity swap* sebanyak 65.000 saham dengan nominal Rp65.000.000 (Catatan 17).

As of 2023, other receivables to PT Gesits Motor Nusantara were transferred into investments in associated entities through a debt to equity swap of 65,000 shares with a nominal value of Rp65,000,000 (Note 17).

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang
lain-lain adalah sebagai berikut:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The movements of allowance for impairment losses
on other receivables are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Awal/Beginning Balance	1,369,269,018	204,561,375
Penambahan/Additional	11,111,297	1,176,783,529
Pemulihan/Recovery	(7,328,206)	(12,075,886)
Saldo Akhir/Ending Balance	1,373,052,109	1,369,269,018

Penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023, berdasarkan putusan BANI No. 45094/XI/ARB-BANI/2022 tanggal 29 Agustus 2023, PT Wijaya Karunia Realtindo ("WKR") sudah tidak memiliki hak atas uang muka yang telah dibayarkan kepada pemilik tanah. Atas putusan tersebut, WIKA Realty mencadangkan piutang lain-lain kepada WKR sebesar Rp1.137.032.096 (Catatan 53).

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dari tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Addition to the allowance for impairment losses on other receivables from related parties as of December 31, 2023, based on BANI decision No. 45094/XI/ARB-BANI/2022 dated August 29, 2023, PT Wijaya Karunia Realtindo ("WKR") no longer has the right to advances that had been paid to land owners. Based on this decision, WIKA Realty sets aside allowance for other receivables to WKR amounting to Rp1,137,032,096 (Note 53).

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on other receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible of other receivables in the future.

11. Persediaan

11. Inventories

	2024 Rp	2023 Rp	
Barang Jadi			Finished Goods
Produk Beton	533,890,001	680,771,402	Concrete Products
Produk Konstruksi Baja dan Otomotif	107,139,573	521,068,072	Steel Structure and Automotives Products
Persediaan Konversi Energi	58,036,055	49,085,273	Conversion Energy Inventories
Barang Assembly	3,339,552	24,755,064	Assembly Goods
Persediaan Aspal	1,225,433	1,334,468	Asphalt Inventories
Hotel	6,148,084	13,665,505	Hotel
Barang dalam Proses			Work in Process
Suku Cadang Otomotif dan Konversi Energi	550,517,267	275,871,591	Automotive Spareparts and Conversion Energy
Bahan Baku			Raw Materials
Beton dan Semen	465,682,886	304,043,507	Concrete and Cement
Konstruksi	19,912,218	244,641,261	Construction
Metal dan Otomotif	188,044,374	306,115,301	Metal and Automotive
Aspal	--	7,971,439	Asphalt
Suku Cadang			Spareparts
Peralatan Produksi	38,892,373	44,613,114	Production Equipments
Besi	11,331,649	--	Iron
Produk Komponen			Component Product
Suku Cadang Otomotif	694,898	833,548	Automotive Spareparts
Aset Real Estat			Real Estate Assets
Bangunan Dalam Konstruksi	4,333,999,041	6,161,148,284	Buildings Under Construction
Bangunan Jadi	2,778,607,997	961,726,820	Buildings
Tanah Sedang Dikembangkan	2,403,464,711	1,804,120,410	Land in Development
Tanah Matang	6,787,849	9,646,494	Land Available for Sale
Total	11,507,713,961	11,411,411,553	Total

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan penelaahan manajemen pada akhir periode, tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan milik Grup.

Bangunan dalam konstruksi dalam aset real estat terdiri dari:

Tamansari Emerald	
Tamansari Cendekia	
Urban Sky	
Tamansari Gangga	
Proyek Pasar Bendungan Hilir	
Tamansari Skyhive	
Tamansari Skyounge Makassar	
Tamansari Pulomas	
Tamansari Bintaro Mansion	
TOD Pasar Senen	
Tamansari Metropolitan Manado	
Tamansari Palembang	
Tamansari Skyounge Balikpapan	
Tamansari Iswara	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000.000)/ Others (each below Rp10,000,000)	

Total

Bangunan dalam konstruksi merupakan biaya perolehan bangunan rumah tinggal, rumah kantor, apartemen dan perkantoran yang masih dalam proses konstruksi setelah dikurangi dengan pengakuan beban pokok penjualan berdasarkan persentase penyelesaian proyek. Manajemen berpendapat tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian proyek.

Bangunan jadi terdiri dari:

Tamansari Skyounge Balikpapan	
Tamansari Iswara	
Tamansari Lagoon	
Tamansari Jivva	
Tamansari Jineng	
Tamansari Skyounge Makassar	
Tamansari Tera	
Tamansari Mahogany	
Area Komersil La Grande	
Tamansari Panoramic	
Unit Penjualan Asset/ Assets Selling Unit	
Tamansari Bale Hinggil	
Apartemen Sentra Land	
Tamansari La Grande	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000.000)/ Others (each below Rp10,000,000)	

Total

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Based on management's evaluation at the end of the period, there is no provision for impairment on inventories of the Group.

Buildings under construction of real estate assets consists of:

	2024 Rp	2023 Rp
Tamansari Emerald	785,073,379	784,855,792
Tamansari Cendekia	752,107,353	751,685,859
Urban Sky	697,122,368	717,547,395
Tamansari Gangga	695,733,459	697,122,368
Proyek Pasar Bendungan Hilir	354,139,236	695,446,645
Tamansari Skyhive	335,912,061	409,135,786
Tamansari Skyounge Makassar	287,338,976	424,363,710
Tamansari Pulomas	227,388,675	329,907,791
Tamansari Bintaro Mansion	129,803,252	219,923,654
TOD Pasar Senen	24,298,890	138,316,960
Tamansari Metropolitan Manado	13,027,430	24,298,890
Tamansari Palembang	10,486,897	4,305,006
Tamansari Skyounge Balikpapan	--	928,614,389
Tamansari Iswara	--	13,957,731
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000.000)/ Others (each below Rp10,000,000)	21,567,065	21,666,308
Total	4,333,999,041	6,161,148,284

Buildings under construction consist of acquisition cost of houses, home offices, apartments and offices under construction, net of costs of sales recognized based on the project's percentage of completion. Management believes that there are no constraints in the completion of the projects.

Buildings consists of:

	2024 Rp	2023 Rp
Tamansari Skyounge Balikpapan	927,024,346	--
Tamansari Iswara	708,169,218	--
Tamansari Lagoon	262,258,557	261,237,154
Tamansari Jivva	205,898,615	202,595,502
Tamansari Jineng	145,596,758	145,596,758
Tamansari Skyounge Makassar	116,920,416	--
Tamansari Tera	93,028,842	96,947,801
Tamansari Mahogany	74,486,488	74,842,366
Area Komersil La Grande	43,607,307	--
Tamansari Panoramic	42,190,795	42,190,795
Unit Penjualan Asset/ Assets Selling Unit	39,900,000	47,289,681
Tamansari Bale Hinggil	17,222,727	17,222,727
Apartemen Sentra Land	15,606,114	15,606,114
Tamansari La Grande	12,326,576	--
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000.000)/ Others (each below Rp10,000,000)	74,371,239	58,197,922
Total	2,778,607,997	961,726,820

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Bangunan jadi merupakan apartemen, kios, *counter*,
perkantoran, rumah dan *ballroom* yang telah selesai
pembangunannya dan siap untuk dijual.

Tanah sedang dikembangkan terdiri dari:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

A building represents apartments, kiosks, counters,
offices, houses and ballrooms which had been
completed and ready for sale.

Land in development consist of:

	2024 Rp	2023 Rp
Tamansari Parangloe	940,947,117	940,947,116
Kantor Pusat (Tanah Wanasari)	610,057,339	--
Tamansari Palembang	332,609,651	336,547,196
Tamansari Cyber	139,921,378	140,263,737
Tamansari Metropolitan Manado	135,610,409	137,745,351
Tamansari Gangga	110,306,080	110,306,080
Tamansari Grand Samarinda	49,602,365	50,298,018
Tamansari Sepinggan	37,339,663	37,339,663
Tamansari Kahyangan Kendari	24,908,912	24,908,912
Tamansari Puri Bali 2	22,161,797	25,764,337
Total	2,403,464,711	1,804,120,410

Laporan kemajuan tanah sedang dikembangkan
pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai
berikut:

The progress report on the land in development as of
December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024		
	Nilai tercatat / Carrying amount Rp	Nilai kontrak / Contract value Rp	Persentase Penyelesaian / Percentage of Completion %
Tamansari Parangloe	940,947,117	940,947,117	100.00
Kantor Pusat (Tanah Wanasari)	610,057,339	610,057,339	100.00
Tamansari Palembang	332,609,651	469,205,555	70.89
Tamansari Cyber	139,921,378	171,652,906	81.51
Tamansari Metropolitan Manado	135,610,409	145,597,840	93.14
Tamansari Gangga	110,306,080	220,032,582	50.13
Tamansari Grand Samarinda	49,602,365	61,048,025	81.25
Tamansari Sepinggan	37,339,663	101,556,000	36.77
Tamansari Puri Bali 2	22,161,797	61,048,025	36.30
Tamansari Kahyangan Kendari	24,908,912	27,718,556	89.86
Total	2,403,464,711	2,808,863,943	
	2023		
	Nilai tercatat / Carrying amount Rp	Nilai kontrak / Contract value Rp	Persentase Penyelesaian / Percentage of Completion %
Tamansari Parangloe	940,947,116	940,947,116	100.00
Tamansari Palembang	336,547,196	469,205,555	71.73
Tamansari Cyber	140,263,737	171,652,906	81.71
Tamansari Metropolitan Manado	137,745,351	145,597,840	94.61
Tamansari Gangga	110,306,080	220,032,582	50.13
Tamansari Grand Samarinda	50,298,018	61,048,025	82.39
Tamansari Sepinggan	37,339,663	101,556,000	36.77
Tamansari Puri Bali 2	25,764,337	61,048,025	42.20
Tamansari Kahyangan Kendari	24,908,912	27,718,556	89.86
Total	1,804,120,410	2,198,806,605	

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tanah dalam pengembangan merupakan tanah yang masih dalam proses pematangan, pembentukan kavling, pembentukan sarana dan prasarana sampai tanah tersebut siap dibangun.

Rincian tanah yang sedang dikembangkan pada tanggal 31 Desember 2024 beserta luas dan nomor HGB adalah sebagai berikut:

Lokasi / Location	Luas / Area m2 / sqm	Bukti Kepemilikan/ Ownership Evidence
Tamansari Parangloe	Makassar 810,000 54,000	HGB No 24022, 24023, 24024, 24025, 24026, 24027, 24028, 24029, 24030, 24031, 24032, 24033, 24034, 24035, 24036, 24037, 24038 atas nama/ on behalf of PT Dinamika Panca Gemilang Proses Penurunan Hak dan Balik Nama/ In Process of Transfer of Rights and Transfer of Name
Tamansari Palembang Tamansari Metropolitan Manado Tamansari Cyber	Palembang Manado Bogor 69,067 38,391 39,102	SHGB atas nama/ on behalf of PT Gema Sukses Jaya HGB atas nama/ on behalf of PT Graha Blessing Family SHGB No 1005, 1006, 1908 & 1910 atas nama/ on behalf of PT Cyberindo Persada Nusantara
Tamansari Gangga	Bali 12,174	SHGB No. 050-099 atas nama/ on behalf of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Tamansari Gangga Tamansari Grand Samarinda	Bali Samarinda 1,440 61,993	SHGB No. 46 atas nama/ on behalf of WIKA Realty SHGB Induk No 01 atas nama/ on behalf of PT Daksa Kalimantan Putra SHGB No 3122, 2106 atas nama/ on behalf of WIKA Realty dan Sertifikat Rincik atas nama WIKA Realty/ on behalf of WIKA Realty and Field Certificate on behalf of WIKA Realty
Tamansari Sepinggang	Balikipapan 22,590	SHGB No. 970 dan surat ukur no 379/ sepinggan/2000 atas nama Marlene Wijaya/ and measuring letter no 379/ sepinggan/ 2000 on behalf Marlene Wijaya
Tamansari Puri Bali 2	Depok 9,563	Sertifikat Rincik atas nama WIKA Realty/ Field Certificate on behalf of WIKA Realty
Tamansari Kahyangan Kendari	Kendari 32,816	HGB 00019 & 00020 dan sertifikat / and certificate M00479
Tanah Wanasari	Karawang 1,300,000	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Nomor 116 tanggal 16 Desember 2019 antara PT WIKA Realty dengan PT Rejeki Bersama Teman (RBT)/ Amendment and Restatement of the Cooperation Agreement Number 116 dated December 16, 2019 between PT WIKA Realty and PT Rejeki Bersama Teman (RBT).

Tanah matang terdiri dari:

	2024 Rp	2023 Rp
Tamansari Grand Samarinda	4,756,719	4,892,680
Tamansari Kahyangan Kendari	623,005	623,005
Tamansari Metropolitan Manado	536,889	536,889
Tamansari Pelabuhan Ratu	399,120	399,120
Tamansari Puri Bali	255,782	255,782
Tamansari Persada Bogor	216,334	216,334
Unit Penjualan Aset/ Asset sales unit	--	1,609,495
Tamansari Palembang	--	1,113,189
Total	6,787,849	9,646,494

Rincian tanah matang pada tanggal 31 Desember 2024 beserta luas dan nomor HGB adalah sebagai berikut:

Lokasi / Location	Luas / Area m2 / sqm	Bukti Kepemilikan/ Ownership Evidence
Unit Penjualan Aset/Asset sales unit	Aceh 878	HGB No. 2005 atas nama WIKA Realty/ on behalf of WIKA Realty
Tamansari Pelabuhan Ratu	Pelabuhan Ratu 7,188	HGB No.251 atas nama WIKA Realty/ on behalf of WIKA Realty

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The land under development represent a land which is in the maturation stage, the plotting of land, to build of facilities and infrastructure until the land is ready to built.

Details of the land being developed as of December 31, 2024 along with the area and number of the HGB are as follows:

Land available for sale consists of:

Details of land available for sale as of December 31, 2024 along with the area and number of the HGB are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Lokasi / Location	Luas / Area m2 / sqm	Bukti Kepemilikan/ Ownership Evidence
Tamansari Persada Bogor	Bogor	286	HGB No. 3634 atas nama WIKA Realty/ on behalf of WIKA Realty
Tamansari Grand Samarinda	Samarinda	7,485	SHGB No. 01 & Sertifikat Rincik atas nama WIKA Realty/ on behalf of WIKA Realty
Tamansari Palembang	Palembang	305	SHGB no. B.5244 atas nama PT Gema Sukses Jaya/ on behalf of PT Gema Sukses Jaya
Tamansari Kayangan Kendari	Kendari	904	SHGB No 51, SHM No. 651, 642, 645, 647, 536 atas nar on behalf of Kingbert Benly
Tamansari Puri Bali 2	Depok	300	SHGB No. 2871 dan 2872 atas nama WIKA Realty/ on behalf of WIKA Realty
Tamansari Metropolitan Manado	Manado	322	SHGB No.2830 atas nama/ on behalf of PT Graha Blessing Family
Tamansari Puri Bali	Depok	300	SHM No. 2341 atas nama/ on behalf of M. Ichsan

Jumlah persediaan yang dibebankan ke beban pokok pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.790.280.847 dan Rp6.411.853.315.

The amount of inventories charged to cost of revenues for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to, Rp5,790,280,847 and Rp6,411,853,315, respectively.

Sebagian persediaan real estat telah diasuransikan kepada PT Jasa Asuransi Indonesia, PT Zurich Insurance Indonesia, PT Asuransi Bintang Tbk, dan PT Mandiri Axa General Insurance dengan total pertanggungan masing-masing pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2,527,500 dan Rp2.900.688.

Some real estate inventories are insured to PT Jasa Asuransi Indonesia, PT Zurich Insurance Indonesia, PT Asuransi Bintang Tbk, and PT Mandiri Axa General Insurance as of December 31, 2024 and 2023 with total coverage amounting to Rp2,527,500 and Rp2,900,688, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses.

Sebagian persediaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang Grup (Catatan 26 dan 37).

Some inventories are used as collateral for the Group's short-term and long-term loans (Notes 26 and 37).

12. Uang Muka

12. Advance Payments

	2024 Rp	2023 Rp	
Investasi	221,454,202	301,142,141	Investment
Pemasok	113,971,630	166,344,810	Supplier
Subkontraktor	77,142,560	218,362,135	Subcontractor
Lain-lain	182,164,451	193,248,291	Others
Total	594,732,843	879,097,377	Total

Uang Muka Investasi

Advance Payment on Investment

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT PP Semarang Demak No. 15 pada 12 Januari 2023, uang muka investasi antara Perusahaan dengan PT PP Semarang Demak sebesar Rp24.900.000 telah direklasifikasi ke investasi pada entitas asosiasi (Catatan 17).

- Based on the Deed of Decision of the Shareholders' Meeting of PT PP Semarang Demak No. 15 on January 12, 2023, the advance for investment between the Company and PT PP Semarang Demak amounting to Rp24,900,000 has been reclassified to investment in associates (Note 17).

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- Pada 1 Juni 2023, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), Perusahaan melakukan setoran uang muka untuk kebutuhan operasional PSBI sebesar Rp11.142.141.
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT PP Semarang Demak No. 11 pada 30 Mei 2024, uang muka investasi antara Perusahaan dengan PT PP Semarang Demak sebesar Rp10.000.000 telah direklasifikasi ke investasi pada entitas asosiasi (Catatan 17).
- Pada 25 Juni 2024, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 80A/KLR-DIR/VI/2024, Perusahaan melakukan setoran uang muka ke PT PP Semarang Demak untuk menambah setoran modal sebesar Rp36.852.000.
- Uang muka ke PT Patra Wijaya Realtindo (PWR), merupakan uang muka WIKA Realty dan WIKA Gedung untuk peningkatan saham di PWR. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp200.000.000. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Para Pemegang Saham tanggal 22 November 2023, pemegang saham PWR sepakat untuk melakukan pengakhiran kesepakatan bersama atas uang muka setoran saham. Atas kesepakatan tersebut WIKA Realty mendapatkan pengembalian uang muka setoran modal tanggal 29 November 2023 dan 21 November 2023 sebesar Rp50.000.000. Sehingga saldo uang muka setoran saham sebesar Rp150.000.000 direklasifikasi menjadi piutang lain-lain (Catatan 10).
- Uang muka investasi pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp280.000.000 merupakan pembayaran tanda minat atas properti milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui Konsorsium 5 BUMN Karya yang terbentuk berdasarkan perjanjian Konsorsium tanggal 4 Oktober 2018 dengan No. 031-2/2018/077. Berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama No. 87 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang menyebutkan bahwa perjanjian penyelesaian tanda minat tersebut masih dalam proses penyusunan antara Konsorsium 5 BUMN Karya dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) – (“BPUI”). Nilai terpulihkan atas uang muka investasi tersebut sebesar Rp173.460.061. Manajemen memiliki keyakinan bahwa penurunan nilai yang dibentuk cukup berdasarkan estimasi terbaik pada tanggal pelaporan untuk menutup kemungkinan keterpulihan di kemudian hari.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- As of June 1, 2023, based on the Shareholders' Decision outside the General Meeting of Shareholders of PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), the Company made an advance payment for PSBI's operational needs amounting to Rp11,142,141.
- Based on the Deed of Decision of the Shareholders' Meeting of PT PP Semarang Demak No. 11 on May 30, 2024, the advance for investment between the Company and PT PP Semarang Demak amounting to Rp10,000,000 has been reclassified to investment in associates (Note 17).
- On June 25, 2024, based on Board of Directors Decree Number 80A/KLR-DIR/VI/2024, the Company made an advance payment to PT PP Semarang Demak to increase its capital contribution by Rp36,852,000.
- Advance payment to PT Patra Wijaya Realtindo (PWR), represents advance from WIKA Realty and WIKA Gedung to increase shares in PWR. The balance as of December 31, 2022 amounted to Rp200,000,000. Based on the Minutes of Shareholders' Agreement dated November 22 2023, PWR's shareholders agreed to terminate the mutual agreement regarding the advance payment for shares. Based on this agreement, WIKA Realty received a refund of the advance in share on November 29, 2023, and November 21 2023 amounting to Rp50,000,000. Therefore the balance of the advance payment for shares amounted to Rp150,000,000 was reclassified into other receivables (Note 10).
- As of December 31, 2024 and 2023, the investment advance amounting to Rp280,000,000 represents the payment for the expression of interest in the property owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) through a Consortium of 5 BUMN Karya, which was established based on the Consortium Agreement dated October 4, 2018, No. 031-2/2018/077. Based on Deed of Joint Agreement No. 87 dated March 15, 2024, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, a Notary in South Jakarta, which stated that the settlement agreement for the expression of interest is still in the drafting process between the Consortium 5 BUMN Karya and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) – (“BPUI”). Recoverable amount for the investment advance amounting to Rp173,460,061. Management believes that the impairment reserve is sufficient based on the best estimate at the reporting date to cover the possibility of non-recovery in the future.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Uang Muka Pemasok dan Kontraktor

Uang muka yang diberikan kepada pemasok dan subkontraktor sehubungan dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan proyek, serta pengadaan bahan baku dan material konstruksi di proyek.

Uang muka lain-lain

Uang muka lain-lain merupakan pembayaran dimuka oleh WIKA Realty untuk pembelian 14 (empat belas) unit Apartemen Sudirman Suite yang dikembangkan oleh PT Kantaraya Utama sebesar Rp33.973.667, pembayaran Kerjasama Pengembangan Tanah Cilegon dengan PT Lumbung Usaha Sejahtera sesuai dengan Perjanjian No. HK.02.09/A.DIR.WR.0254/2018 tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp24.473.848 dan uang muka pembelian properti investasi kepada PT Sari Indah Lestari yang telah dibatalkan sesuai dengan keputusan BANI No. 45084/X/ARB-BANI/2022 tanggal 4 Juli 2023 sebesar Rp90.000.000.

Advance Payment on Supplier and Contractor

Advances paid to suppliers and subcontractors in connection with contract of project work operation and procurement of construction raw materials and construction material at the project.

Other Advances

Other advances represent an upfront payment by WIKA Realty for the purchase of 14 (fourteen) units of the Sudirman Suite Apartment developed by PT Kantaraya Utama amounting to Rp33,973,667, payment for the Cilegon Land Development Cooperation with PT Lumbung Usaha Sejahtera in accordance with Agreement No. HK.02.09/A.DIR.WR.0254/2018 dated February 14, 2018 amounting to Rp24,473,848 and the down payment for the purchase of investment property to PT Sari Indah Lestari which has been canceled in accordance with BANI decision No. 45084/X/ARB-BANI/2022 dated July 4, 2023 amounting to Rp90,000,000.

13. Biaya Dibayar di Muka

13. Prepaid Expenses

	2024	2023	
	Rp	Rp	
Biaya Produksi	408,681,305	422,377,430	Production Expenses
Biaya Distribusi	95,328,963	29,814,451	Distribution Expenses
Biaya Usaha	91,683,055	180,412,420	Operating Expenses
Biaya Pengelolaan	47,794,522	323,875,453	Management Expenses
Lain-lain	5,896,755	8,918,218	Others
Total	649,384,600	965,397,972	Total

Biaya produksi dibayar di muka merupakan transaksi yang berhubungan langsung dengan proses produksi dalam hal ini pembangunan yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu.

Prepaid production expenses are transactions that are directly related to the production process in this case the development of which payment is made in advance.

Biaya pengelolaan dibayar di muka merupakan biaya untuk pembukaan kawasan baru yang akan dikembangkan oleh Grup.

Prepaid management expenses represent costs paid in advance for the opening of new areas to be developed by the Group.

Biaya usaha dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan seperti biaya pengusahaan proyek, tender dan biaya usaha lainnya.

Prepaid operating expenses represent costs incurred in connection to business activities such as cost of project concession, bid and other business expenses.

14. Jaminan Usaha

14. Business Guarantees

Jaminan usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp372.139.435 dan Rp342.873.172 merupakan pengurusan perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan jaminan milik KRJ yang akan dikembalikan kepada KRJ saat perizinan didapat.

Business guarantees for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp372,139,435 and Rp 342,873,172, respectively, is the processing of permits for Building Use Rights (HGB) on Land Management Rights (HPL) and the guarantee owned by KRJ's, then will be returned to KRJ when the permit is obtained.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

15. Pekerjaan dalam Proses Konstruksi

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 52)/Related Parties (Note 52)		
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	3,018,845,185	2,722,304,913
	<u>(1,428,222,220)</u>	<u>(34,815,530)</u>
Sub Total	<u>1,590,622,965</u>	<u>2,687,489,383</u>
Pihak Ketiga/Third Parties		
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	3,116,085,188	2,787,111,328
	<u>(1,394,160,075)</u>	<u>(1,472,156,752)</u>
Sub Total	<u>1,721,925,113</u>	<u>1,314,954,576</u>
Total	<u>3,312,548,078</u>	<u>4,002,443,959</u>

Rincian umur pekerjaan dalam proses konstruksi (PDPK) adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
1-3 Bulan/Months	1,669,752,986	2,893,409,332
3-6 Bulan/Months	197,038,585	95,220,651
6-12 Bulan/Months	56,594,144	55,582,931
> 12 Bulan/Months	<u>4,211,544,658</u>	<u>2,465,203,327</u>
Sub Total	6,134,930,373	5,509,416,241
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	<u>(2,822,382,295)</u>	<u>(1,506,972,282)</u>
Total	<u>3,312,548,078</u>	<u>4,002,443,959</u>

Akun PDPK merupakan klaim atas pekerjaan yang masih dalam proses adendum, proses arbitrase, dan proses mediasi.

Rincian dalam proses adendum yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Utama Karya (Persero).

Rincian PDPK dalam proses mediasi adalah PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Kaltim Amonium Nitrat, dan PT Jakarta Propertindo.

Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.09.03/R/S-776/D5/02/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Proyek LRT Jakarta Koridor 1 (Fase 1) Kelapa Gading - Velodrome Paket P102 Pekerjaan Utama. Sebagian besar klaim Perusahaan ke PT Jakarta Propertindo dikabulkan, sehingga Perusahaan tidak membebaskan klaim yang diajukan.

Berdasarkan Laporan BPKP Nomor PE.09.03/R/LHP-03/D502/2/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Penyesuaian Nilai Sisa Pekerjaan Paket 1 Proyek Pengembangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar (Catatan 53).

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

15. Construction Work in Progress

The aging of construction working in progress (CWIP) is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
1-3 Bulan/Months	1,669,752,986	2,893,409,332
3-6 Bulan/Months	197,038,585	95,220,651
6-12 Bulan/Months	56,594,144	55,582,931
> 12 Bulan/Months	<u>4,211,544,658</u>	<u>2,465,203,327</u>
Sub Total	6,134,930,373	5,509,416,241
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	<u>(2,822,382,295)</u>	<u>(1,506,972,282)</u>
Total	<u>3,312,548,078</u>	<u>4,002,443,959</u>

CWIP account represents claims for work that is still in the addendum process, arbitration process, and mediation process.

Details in addendum process, namely PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and PT Utama Karya (Persero).

Details of CWIP in the mediation process are PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Kaltim Amonium Nitrat and PT Jakarta Propertindo.

Based on Report Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Number PE.09.03/R/S-776/D5/02/2024 dated July 26, 2024 concerning the Results of the Evaluation of Obstacles to Smooth Development on LRT Jakarta Corridor 1 (Phase 1) Kelapa Gading - Velodrome Package P102. Most of the Company's claims to PT Jakarta Propertindo were granted, therefore the Company not charged the claims to expenses.

Based on Report BPKP Number PE.09.03/R/LHP-03/D502/2/2024 dated February 29, 2024 concerning the Results of the Evaluation of Obstacles to Smooth Development on the Adjustment of the Remaining Value of Package 1 of the Sultan Hasanuddin Airport Development Project in Makassar (Note 53). Most of

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Sebagian besar klaim Perusahaan ke PT Angkasa Pura I (Persero) tidak dikabulkan sehingga pada tahun 2024, Perusahaan mencadangkan klaim ke penghasilan dan beban lain-lain (Catatan 48).

Berdasarkan surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia perihal salinan otentik putusan BANI dalam perkara No. 45073/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 4 Mei 2023, sebagian besar klaim Perusahaan tidak dikabulkan sehingga Perusahaan pada tahun 2023, membebankan klaim kepada PT Chevron Pacific Indonesia ke penghasilan dan beban lain-lain (Catatan 48).

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai PDPK adalah sebagai berikut:

Saldo Awal/Beginning Balance
 Penambahan/Additional
Saldo Akhir/Ending Balance

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas PDPK cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dari tidak tertagihnya pekerjaan dalam proses.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

the Company's claims to PT Angkasa Pura I (Persero) were not granted therefore in 2024, the Company reserve the claims to other income and expenses (Note 48).

Based on a letter from the Indonesian National Arbitration Board regarding an authentic copy of BANI's decision in case No. 45073/IX/ARB-BANI/2022 dated May 4, 2023, most of the Company's claims were not granted therefore in 2023, the Company charged the claims to PT Chevron Pacific Indonesia to other income and expenses (Note 48).

The movements of allowance for impairment losses on CWIP are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Awal/Beginning Balance	1,506,972,282	135,202,189
Penambahan/Additional	1,315,410,013	1,371,770,093
Saldo Akhir/Ending Balance	2,822,382,295	1,506,972,282

The Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on CWIP is sufficient to cover possible losses on uncollectible of working in progress in the future.

16. Tanah untuk Pengembangan

16. Land for Development

	2024 Rp	2023 Rp
Tanah/ Land Wanakerta	614,202,646	614,202,645
Tanah/ Land M.T. Haryono II - Jakarta	314,010,473	329,590,473
Tamansari Gangga Ext. - Bali	108,868,461	108,868,461
Tanah/ Land M.T. Haryono III - Jakarta	82,528,750	82,528,750
Tanah/ Land Steady Safe	80,054,295	80,054,295
Tamansari Grand Samarinda	75,322,297	74,573,430
Tanah/ Land MT. Haryono - Samarinda	36,307,450	36,307,450
Tanah/ Land Skybox	25,000,000	25,000,000
Tanah/ Land Tanjung Lesung	20,870,050	20,870,050
Tanah/ Land Sinar Kasih	19,685,550	19,685,550
Tanah/ Land Pramestha	15,155,000	15,155,000
Tanah/ Land Antang	11,832,540	11,832,540
Tanah/ Land Bitung Manado	11,456,830	11,456,830
Tamansari Bukit Mutiara	10,389,457	10,389,457
Tanah/ Land Kalimantan Selatan	10,089,000	10,089,000
Unit Penjualan Aset/ Assets Selling Unit	2,522,138	2,460,138
Tanah/ Land Kampung Pasir	281,200	281,200
Tanah/ Land Wanasari	--	594,477,339
Tanah/ Land Patra Jasa - Jakarta	--	55,625,542
Total	1,438,576,137	2,103,448,150

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tahun 2024, WIKA Realty melakukan reklasifikasi aset tetap hak atas tanah (Catatan 20) menjadi Tanah untuk Pengembangan sebesar Rp10.089.000.

Pada tahun 2023, WIKA Gedung melakukan reklasifikasi aset tetap hak atas tanah (Catatan 20) menjadi Tanah untuk Pengembangan sebesar Rp10.089.000.

Rincian tanah untuk pengembangan berdasarkan luas tanah dan kepemilikan pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Lokasi / Location	Luas / Area m2 / sqm	Bukti Kepemilikan/ Ownership Evidence
Tanah / Land Wanakarta	Karawang 1,500,000	SK No. 06 /NOT/II/2019 SK No. 72/NOT/III/2019
Tanah / Land MT Haryono II	Jakarta 13,259	SHGB 303, 310, 421, dan/and 276 PPJB No. HK.02.09/A.DIR.WR.1062/2020 PPJB No. HK.02.09/A.DIR.WR.1061/2020
Tanah / Land Wanasari Tamansari Gangga	Karawang 1,300,000	PPJB No. HK.02.09/A.DIR.WR.5112/2019
Tanah / Land Steady Safe	Bali 10,880	SHM No. 3754, 3753, 3751 dan / and 3750
Tamansari Grand Samarinda	Jakarta 18,162	SHGB No. 9096
Tanah / Land Patra Jasa	Samarinda 833,060	SHGB No. 3122, 3167, 2651, 2108, 2107, 2106 dan/ and 01
Tanah / Land Pulo Mas	Jakarta 981	SHGB No. 283
Tanah / Land Skybox	Jakarta 46,815	SHGB No. 4792
Tanah / Land Sinar Kasih	Tangerang Selatan 20,564	SHGB No. 01965
Tanah / Land Pramestha	Jakarta 12,581	SHGB No. 307, 308, 309, 312, 442, 443, 7324, 239, 246, 262, 263, 414, 415, 479 dan/ and 485
Unit Penjualan Aset/ Assets Sales Unit	Bandung 2,730	SHM No. 1308, 1309, 1313, 1314, 1315
Tanah / Land Bitung Manado	Pelabuhan Ratu 291,940	SHGB No. 252 dan/ and 620
Tanah / Land Antang	TMR Bandung 50,800	SHGB No. 5297, 5296, 5295, 5294, 5293, 5292 dan/ and 5291
Tamansari Bukit Mutiara	Manado 29,197	PPJB No. HK.02.09/A.DIR.WR.1448/2018
Tanah / Land MT Haryono III	Makassar 20,918	SHGB No. 21679, 21680, 21681, 21682, 21683, 21684, 21685, 21686, 21687, 21688, 21689, 21690, 21691, 21692, 21693 dan/ and 21808
	Balikpapan 5,977	HGB No. 1.229
	Jakarta 2,415	SHGB No.7482, 8005, 8013, 8088, 8082, 8087, 8609, 8096, 8089
		8616, 8617
		550 SHGB No.7186

Sebagian tanah untuk pengembangan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang Grup (Catatan 26 dan 37).

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

As of 2023, WIKA Gedung reclassified fixed assets landrights (Note 20) into Land for Development amounting to Rp10,089,000.

As of 2023, WIKA Gedung reclassified fixed assets landrights (Note 20) into Land for Development amounting to Rp10,089,000.

The details of land for development based on land area and ownership as of December 31, 2024 are as follows:

Some lands for development are used as collateral for the Group's short-term and long-term loans (Notes 26 and 37).

17. Investasi Pada Entitas Asosiasi

17. Investments In Associates

Nama Entitas Asosiasi/ Name of Associates	Domisili/ Domicile	Bidang Usaha/ Type of Business	2024		Penambahan (Pengurangan/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Share in Current Year	Reklasifikasi/ Reclassification	Nilai Tertecat Akhir Tahun/ Carrying Value Ending Balance
			Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tertecat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance				
			(%)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jakarta River City	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	48.99	968,455,713	--	(181,876)	--	968,273,837
PT PP Semarang Demak	Semarang	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ Construction and development of toll road	24.90	299,862,743	100,556,000	(90,823,022)	10,000,000	319,615,721
PT Indo Benhil Karunia Jaya	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	30.00	188,565,272	--	(1,993,398)	--	186,571,874
PT Gesits Motor Nusantara	Jakarta	Industri Otomotif/ Automotive Industry	48.95	173,430,453	--	(55,119,722)	--	118,319,731
PT WIKA Realty Minor Development	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	31.08	83,237,110	--	(5,983,417)	--	77,253,693
PT Jasmarga Manado - Bitung	Jakarta	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ Construction and development of toll road	20.04	114,327,041	--	(81,634,557)	--	32,692,484
PT Hotel Indonesia Group	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	49.00	3,435,160	--	13,229,875	--	16,665,035
PT Hotel Karya Indonesia	Bali	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	29.80	16,056,683	--	51,930	--	16,108,613
PT Wijaya Karunia Realindo	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	50.00	3,838,973	--	--	--	3,838,973
PT WIKA Jabar Power	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant industry	20.44	2,591,010	--	(37,242)	--	2,553,768
PT Patra Wijaya Realindo	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	30.00	4,710,974	--	(2,944,041)	--	1,766,933
PT Hotel Indonesia Properti	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	49.00	--	964,077,440	4,398,004	--	968,475,444
Sub Total				1,858,540,132	1,064,833,440	(221,037,466)	10,000,000	2,712,136,106
Dikurangi/Less : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Allowance for Impairment Loss				(3,838,973)	--	--	--	(3,838,973)
Total				1,854,701,159	1,064,833,440	(221,037,466)	10,000,000	2,708,297,133

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2023										
Nama Entitas Asosiasi/ Name of Associates	Domisili/ Domicile	Bidang Usaha/ Type of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tertcatat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Share in Current Year	Reklasifikasi/ Reclassification	Nilai Tertcatat Akhir Tahun/ Carrying Value Ending Balance		
			(%)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp
PT Jakarta River City	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	48.99	968,789,623	--	--	(333,910)	--	--	968,455,713
PT PP Semarang Demak	Semarang	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ Construction and development of toll road	24.90	293,777,903	--	--	(18,795,160)	24,900,000	--	299,882,743
PT Indo Benhil Kanunia Jaya	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	45.00	188,567,759	--	--	(2,487)	--	--	188,565,272
PT Gesits Motor Nusantara	Jakarta	Industri Otomotif/ Automotive Industry	48.95	110,059,144	65,000,000	--	(1,619,691)	--	--	173,439,453
PT Jasamarga Manado - Bitung	Jakarta	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ Construction and development of toll road	20.04	186,122,241	--	--	(71,795,200)	--	--	114,327,041
PT WIKA Realty Minor Development	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	50.00	83,633,563	--	--	(396,453)	--	--	83,237,110
PT Hotel Karya Indonesia	Bali	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	29.80	16,012,249	--	--	44,434	--	--	16,056,683
PT Patra Wijaya Reallindo	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	30.00	4,710,074	--	--	900	--	--	4,710,974
PT Wijaya Kanunia Reallindo	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	50.00	3,840,033	--	--	(1,060)	--	--	3,838,973
PT Hotel Indonesia Group	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	49.00	1,680,156	--	--	1,755,004	--	--	3,435,160
PT WIKA Jabar Power	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant industry	20.44	2,591,010	--	--	--	--	--	2,591,010
Sub Total				1,859,783,755	65,000,000	--	(91,143,623)	24,900,000	--	1,858,540,132
Dikurangi/Less : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Allowance for Impairment Loss				--	--	--	(3,838,973)	--	--	(3,838,973)
Total				1,859,783,755	61,161,027	--	(91,143,623)	24,900,000	--	1,854,701,159

PT Hotel Indonesia Properti ("HIPRO")

Perusahaan dan WIKA Realty telah kehilangan pengendalian atas HIPRO (Catatan 1.e) dan nilai wajar dari sisa investasi pada HIPRO sebesar Rp964.077.440 diakui sebagai biaya perolehan awal atas investasi tersebut.

PT Hotel Indonesia Properti ("HIPRO")

The Company and WIKA Realty have lost control over HIPRO (Note 1.e) and the fair value of the remaining investment in HIPRO amounting to Rp964,077,440 is recognized as the initial acquisition cost of the investment.

PT Jakarta River City ("JRC")

Pada tanggal 30 Juni 2020, berdasarkan Akta No. 74 oleh Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., di Jakarta, JRC menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebesar Rp832.190.000 atau 832.190 lembar, melalui:

PT Jakarta River City ("JRC")

On June 30, 2020 based on Deed No. 74 by Notary Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., in Jakarta, JRC approved the increase in paid-in and issued capital amounted to Rp832,190,000 or 832,190 shares, through:

1. Konversi piutang usaha WIKA Realty sebesar Rp407.677.000 menjadi modal;
2. Setoran tunai dari PT Urban Jakarta Propertindo Tbk sebesar Rp424.513.000; dan
3. Selisih penyeteroran modal dengan saham yang diterbitkan sebesar Rp1.241 dicatat sebagai agio saham. Bagian agio saham milik WIKA Realty adalah sebesar Rp882.

1. Conversion of WIKA Realty's account receivables amounted to Rp407,677,000 into capital;
2. Cash deposit from PT Urban Jakarta Propertindo Tbk amounted to Rp424,513,000; and
3. The difference between paid-in capital and shares issued amounting to Rp1,241 is recorded as premium for shares. WIKA Realty's share of premium is amounted to Rp882.

Sehingga susunan pemegang saham JRC adalah sebagai berikut:

Therefore the composition of JRC shareholders is as follows:

- WIKA Realty memiliki 48,99% kepemilikan atau sebesar 961.677 lembar saham dengan nilai sebesar Rp961.677.000; dan
- PT Urban Jakarta Propertindo Tbk memiliki 51,01% kepemilikan atau sebesar 1.001.391 lembar dengan nilai Rp1.001.391.000.

- WIKA Realty has 48.99% ownership or 961,677 shares with a value of Rp961,677,000; and
- PT Urban Jakarta Propertindo Tbk has 51.01% ownership or 1,001,391 shares with a value of Rp1,001,391,000.

PT PP Semarang Demak

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT PP Semarang Demak No. 4 tanggal 12 Januari 2023 dari Notaris Dina Ismawati S.H., M.M., di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-

PT PP Semarang Demak

Based on the Deed of Decision of the Shareholders' Meeting of PT PP Semarang Demak No. 4 dated January 12, 2023 from Notary Dina Ismawati S.H., M.M., in Jakarta and has received Notification of Changes in Company Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

0010174 tanggal 20 Januari 2023, sehingga uang muka investasi sebesar Rp24.900.000 direklasifikasi menjadi investasi pada entitas asosiasi (Catatan 12).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT PP Semarang Demak No. 11 tanggal 30 Mei 2024 dari Notaris Dina Ismawati, S.H., M.M., di Semarang dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126687 tanggal 31 Mei 2024, Perusahaan meningkatkan kepemilikan saham sebesar Rp29.133.000, yang direklasifikasi dari uang muka investasi sebesar Rp10.000.000 (Catatan 12) dan penambahan pada tahun berjalan sebesar Rp19.133.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT PP Semarang Demak No. 7 tanggal 24 Juni 2024 dari Notaris Dina Ismawati S.H., M.M., di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0156718 tanggal 24 Juni 2024, Perusahaan meningkatkan kepemilikan saham sebesar Rp81.423.000.

Atas transaksi ini, persentase kepemilikan Perusahaan di PT PP Semarang Demak tidak berubah.

PT Indo Benhil Karunia Jaya ("IBKJ")

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 25 November 2021 yang dibuat di hadapan Doddy Natadihardja, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, KRJ mengalihkan 125.600 lembar saham IBKJ kepada Mitsubishi Estate Co., Ltd dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh IBKJ sebesar 60.000 lembar saham yang seluruhnya diambil bagian oleh KRJ. Sehingga susunan pemegang saham IBKJ adalah sebagai berikut:

- PT Kurnia Realty Jaya memiliki 30% atau sebanyak 188.400 saham dengan nilai sebesar Rp188.400.000; dan
- Mitsubishi Estate Co., Ltd memiliki 70% atau sebanyak 439.600 saham dengan nilai sebesar Rp439.600.000.

PT Gesits Motor Nusantara ("GMN")

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 41 tanggal 14 Desember 2022 dari Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, WIKA IKON melepaskan 53,93% saham WIMA kepada PT Industri Baterai Indonesia. Sisa penyertaan saham sebesar 46,04% dicatatkan sebagai investasi pada entitas asosiasi, pada nilai wajar berdasarkan laporan KJPP

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

0010174 dated January 20, 2023, therefore the advance of investment amounting to Rp24,900,000 was reclassified as an investment in associate (Note 12).

Based on the Deed of Decision of the Shareholders Meeting of PT PP Semarang Demak No. 11 dated May 30, 2024 from Notary Dina Ismawati, S.H., M.M. in Semarang and has received Notification of Changes in the Company's Data from the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126687 dated May 31, 2024, the Company increased its share ownership amounting to Rp29,133,000 which reclassified from advances payment for investment amounting to Rp10,000,000 (Note 12) and an additional increase in the current year amounting to Rp19,133,000.

Based on the Deed of Decision of the Shareholders' Meeting of PT PP Semarang Demak No. 7 dated June 24, 2024 from Notary Dina Ismawati S.H., M.M., in Jakarta and has received Notification of Changes in Company Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0156718 dated June 24, 2024, the Company increased its share ownership amounting to Rp81,423,000.

For this transaction, the Company's percentage of ownership in PT PP Semarang Demak has not changed.

PT Indo Benhil Karunia Jaya ("IBKJ")

Based on Deed No. 22 dated November 25, 2021 made in presence of Doddy Natadihardja, SH., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, KRJ transferred 125,600 shares of IBKJ to Mitsubishi Estate Co., Ltd and increased the issued and fully paid capital of IBKJ by 60,000 shares, all of which taken part by KRJ. So the composition of IBKJ shareholders is as follows:

- PT Kurnia Realty Jaya owns 30% or 188,400 shares with a value of Rp188,400,000; and
- Mitsubishi Estate Co., Ltd owns 70% or 439,600 shares with a value of Rp439,600,000.

PT Gesits Motor Nusantara ("GMN")

Based on Sale and Purchase Deed No. 41 December 14, 2022 from Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn. Notary in Jakarta, WIKA IKON released 53.93% of WIMA's shares to PT Industri Baterai Indonesia. The remaining investment in shares of 46.04% is recorded as investment in associate at fair value based on KJPP Independent Iskandar and

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Independen Iskandar dan Rekan No.
00390/2.011800/BS/03/ 0520/1/IX/2022 tanggal
17 November 2022 sebesar Rp161.724.643.

Berdasarkan Akta Notaris Dini Lastari Siburian, S.H.,
No. 15 tanggal 10 Maret 2023 dan Keputusan
Pemegang Saham di Luar Rapat WIMA
No. MJ.01.00/WIMA.A.PS.011/2023, WIKA IKON
menyetujui untuk meningkatkan modal dasar WIMA
sebesar 65.000 saham dengan nominal
Rp65.000.000 melalui *debt to equity swap*
(Catatan 10).

Berdasarkan Akta Notaris Dini Lastari Siburian, SH,
No.47 tanggal 22 November 2023 dan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal
14 November 2023 No.22, WIKA IKON menyetujui
untuk merubah nama PT WIKA Industri Manufaktur
menjadi PT Gesits Motor Nusantara.

PT Patra Wijaya Realtindo (“PWR”)

Modal dasar PWR berjumlah Rp12.500.000 yang
terbagi atas 12.500 saham dengan nilai nominal
Rp1.000.000 per saham. Jumlah modal
ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 12.500
saham atau sebesar Rp12.500.000 dengan
komposisi sebagai berikut:

- WIKA Realty memiliki 30% atau sebanyak 3.750
saham dengan nilai sebesar Rp3.750.000; dan
- PT WIKA Gedung memiliki 10% atau sebanyak
1.250 saham dengan nilai sebesar Rp1.250.000;

PT Jasamarga Manado Bitung

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Pemegang Saham No 1 tanggal 8 April 2022 dari
Windalina S.H., di Jakarta dan telah mendapat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-
0224183 tanggal 11 April 2022, jumlah modal
ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.362.284
saham atau sebesar Rp1.362.284.000 dengan
komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 20,04% atau sebanyak
273.000 saham dengan nilai sebesar
Rp273.000.000;
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 64,97%
atau sebanyak 885.043 saham dengan nilai
sebesar Rp885.043.000; dan
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
memiliki 14,99% atau sebanyak 204.241 saham
dengan nilai sebesar Rp204.241.000;

PT WIKA Realty Minor Development (“WRMD”)

WRMD yang bergerak dalam bidang usaha industri,
realti dan properti, dan jasa kecuali dalam bidang
hukum dan pajak.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Partners report No. 00390/2.011800/BS/03/0520/
1/IX/2022 dated November 17, 2022 amounting to
Rp161,724,643.

Based on Deed of Notary Dini Lastari Siburian, SH,
No. 15 dated March 10, 2023 and the the WIMA
Shareholdres Decision not in the Meeting
No. MJ.01.00/WIMA.A.PS.011/2023, WIKA IKON
agreed to increase the authorized capital of WIMA
by 65,000 shares with a nominal value of
Rp65,000,000 through a *debt to equity swap*
(Note 10).

Based on Deed of Notary Dini Lastari Siburian, SH,
No.47 dated November 22, 2023 and Decision of
the Extraordinary General Meeting of Shareholders
dated November 14, 2023 No.22, WIKA IKON
agreed to change name of PT WIKA Industri
Manufaktu to PT Gesits Motor Nusantara.

PT Patra Wijaya Realtindo (“PWR”)

The authorized capital of PWR amounted to
Rp12,500,000 composed of 12,500 shares with par
value of Rp1,000,000 per share. Total issued and
fully paid capital are 12,500 shares or amounted to
Rp125,000,000 with composition as follows:

- WIKA Realty owns 30% or 3,750 shares with a
value of Rp3,750,000; and
- PT WIKA Gedung owns 10% or 1,250 shares
with a value of Rp1,250,000.

PT Jasamarga Manado Bitung

Based on the Deed of Resolution of the
Shareholders' Meeting No. 1 dated April 8, 2022, by
Windalina S.H., in Jakarta, and having received the
Notification of Corporate Data Change Acceptance
from the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0224183
dated April 11, 2022, the total issued and fully paid-
up capital is 1,362,284 shares, or amounting to
Rp1,362,284,000, with the composition as follows:

- The Company owns 20.04% or 273,000 shares
with a value of Rp273,000,000;
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk owns 64.97% or
885,043 shares with a value of Rp885,043,000;
and
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
owns 14.99% or 204,241 shares with a value of
Rp204,241,000.

PT WIKA Realty Minor Development (“WRMD”)

WRMD operated on realty and property industry, and
services, except legal and taxation.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Modal dasar WRMD berjumlah Rp273.500.000 yang terbagi atas 273.500 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 273.500 saham atau sebesar Rp273.500.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- WIKA Realty memiliki 31,08% atau sebanyak 85.000 saham dengan nilai sebesar Rp85.000.000; dan
- MHG International Holding (Singapore) PTE. Limited memiliki 68,92% atau sebanyak 188.500 saham dengan nilai sebesar Rp188.500.000.

PT Hotel Karya Indonesia (“HKI”)

HKI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 29 Oktober 2018 dari Cintya Ayu Rishanty, S.H., M.Kn., Notaris di Bontang. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053574.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 9 November 2018. HKI yang bergerak dalam bidang usaha industri real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata, serta jasa kecuali dalam bidang hukum dan pajak.

Pada Tahun 2023 PT Hotel Karya Indonesia melakukan penyesuaian Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Sehingga Modal Dasar PT Hotel Karya Indonesia menjadi berjumlah Rp208.300.000 yang terbagi atas 208.300 lembar saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp1.000, Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 52.075 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp52.075.000 dengan rincian sebagai berikut:

- PT HK Realtindo memiliki 29,80% atau sebanyak 15.525 saham dengan nilai sebesar Rp15.525.000;
- PT PP Properti Tbk memiliki 10,60% atau sebanyak 5.500 saham dengan nilai sebesar Rp5.500.000;
- PT Waskita Karya Realty memiliki 29,80% atau sebanyak 15.525 saham dengan nilai sebesar Rp15.525.000; dan
- WIKA Realty memiliki 29,80% atau sebanyak 15.525 saham dengan nilai sebesar Rp15.525.000.

PT Hotel Indonesia Group (“HIG”)

Pada tanggal 11 Juni 2021 melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat HIG No. 02 yang dibuat di hadapan Notaris Kurniawati Tjandra, S.H., M.Kn., menyetujui PT Patra Jasa untuk melakukan pemindahan hak atas saham dengan cara menjual kepada WIKA Realty sebesar Rp1.562.675 yang mewakili kepentingan di dalam HIG sebesar 49%.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The authorized capital of WRMD amounted to Rp273,500,000 composed of 273,500 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital are 273,500 shares or amounted to Rp273,500,000 with composition as follows:

- WIKA Realty owns 31.08% or 85,000 shares with a value of Rp85,000,000; and
- MHG International Holding (Singapore) PTE. Limited owns 68.92% or 188,500 shares with a value of Rp188,500,000.

PT Hotel Karya Indonesia (“HKI”)

HKI was established based on Notarial Deed No. 10 dated October 29, 2018 from Cintya Ayu Rishanty, S.H., M.Kn., Notary in Bontang. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0053574.AH.01.01.Tahun 2018 on November 9, 2018. HKI is engaged in the business of self-owned or leased real estate industry and tourism areas, services except in the field of law and tax.

In 2023, PT Hotel Karya Indonesia made adjustments to the Authorized Capital, Issued Capital and Paid-up Capital. So that the Authorized Capital of PT Hotel Karya Indonesia amounted to Rp208,300,000 which is divided into 208,300 shares each with a nominal value of Rp1,000, the Authorized Capital has been placed and paid up as many as 52,075 shares with a nominal value of Rp52,075,000 with the following details:

- PT HK Realtindo owns 29.80% or 15,525 shares with a value of Rp15,525,000;
- PT PP Properti Tbk owns 10.60% or 15,525 shares with a value of Rp5,500,000;
- PT Waskita Karya Realty owns 29.80% or 15,525 shares with a value of Rp15,525,000; and
- WIKA Realty owns 29.80% or 15,525 shares with a value of Rp15,525,000.

PT Hotel Indonesia Group (“HIG”)

On June 11, 2021 through the Deed of Statement of Resolutions of the Meeting of Shareholders Outside the HIG Meeting No. 02 made before Notary Kurniawati Tjandra, S.H., M.Kn. approved PT Patra Jasa to transfer rights by selling to WIKA Realty Rp1,562,675 representing 49% ownership in HIG.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT Wijaya Karunia Realtindo ("WKR")

Modal dasar WKR berjumlah Rp50.000.000 yang terbagi atas 50.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 15.000 saham atau sebesar Rp15.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- WIKA Realty memiliki 50% atau sebanyak 7.500 saham dengan nilai sebesar Rp7.500.000; dan
- PT Kurnia Graha Kencana memiliki 50% atau sebanyak 7.500 saham dengan nilai sebesar Rp7.500.000.

Berdasarkan putusan BANI No. 45094/XI/ARB-BANI/2022 tanggal 29 Agustus 2023, WKR sudah tidak memiliki hak atas uang muka yang telah dibayarkan kepada pemilik tanah. Atas putusan tersebut, WIKA Realty melakukan pencadangan penuh atas investasi kepada WKR sebesar Rp3.838.973.

PT WIKA Jabar Power

Modal dasar PT WIKA Jabar Power berjumlah Rp144.000.000 yang terbagi atas 14.400.000 saham dengan nilai nominal Rp10 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 4.500.000 saham atau sebesar Rp45.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 20,44% atau sebanyak 920.000 saham dengan nilai sebesar Rp9.200.000;
- PT Sari Prima Energi memiliki 71,56% atau sebanyak 3.220.000 saham dengan nilai sebesar Rp32.200.000;
- PT Jasa Sarana memiliki 4% atau sebanyak 180.000 saham dengan nilai sebesar Rp1.800.000; dan
- PT Roda Manunggal Inti memiliki 4% atau sebanyak 180.000 saham dengan nilai sebesar Rp1.800.000.

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi Grup ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan ini mencerminkan jumlah yang terdapat dalam laporan keuangan entitas asosiasi yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

PT Wijaya Karunia Realtindo ("WKR")

The authorized capital of WKR amounted to Rp50,000,000 composed of 50,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital are 15,000 shares or amounted to Rp15,000,000 with composition as follows:

- WIKA Realty owns 50% or 7,500 shares with a value of Rp7,500,000; and
- PT Kurnia Graha Kencana owns 50% or 7,500 shares with a value of Rp7,500,000.

Based on BANI decision no. 45094/XI/ARB-BANI/2022 dated August 29, 2023, WKR no longer has the right to the down payment that has been paid to the land owner. Based on this decision, WIKA Realty made a full investment reserve to WKR amounting to Rp3,838,973.

PT WIKA Jabar Power

The authorized capital of PT WIKA Jabar Power amounted to Rp144,000,000 composed of 14,400,000 shares with par value of Rp10 per share. Total issued and fully paid capital are 4,500,000 shares or amounted to Rp45,000,000 with composition as follows:

- The Company owns 20,44% or 920,000 shares with a value of Rp9,200,000;
- PT Sari Prima Energi owns 71,56% or 3,220,000 shares with a value of Rp32,200,000;
- PT Jasa Sarana owns 4% or 180,000 shares with a value of Rp1,800,000; and
- PT Roda Manunggal Inti owns 4% or 180,000 shares with a value of Rp1,800,000.

Summarized financial information in respect of the Group's material associates is set out below. The summarized financial information below represents amounts shown in the associate's financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024			
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Pendapatan/ Revenues	Laba (Rugi)/ Income (Loss)
	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jakarta River City	2,018,662,901	42,135,880	--	(371,251)
PT PP Semarang Demak	6,033,686,529	4,607,691,895	76,881,984	(364,751,092)
PT Patra Wijaya Realtindo	868,497,000	867,209,000	--	(9,813,471)
PT Indo Benhil Karunia Jaya	573,476,065	5,266,750	--	(6,644,660)
PT Gesits Motor Nusantara	144,635,829	126,320,089	21,072,188	(112,604,129)
PT Jasamarga Manado - Bitung	4,339,915,336	4,169,520,013	55,074,241	(407,358,068)
PT WIKA Realty Minor Development	1,001,397,872	771,375,315	--	(19,251,663)
PT Hotel Karya Indonesia	58,732,902	4,356,874	--	174,206
PT Hotel Indonesia Group	76,154,445	45,831,994	101,968,606	26,999,746
PT Wijaya Karunia Realtindo	2,115,013,707	2,100,035,447	--	--
PT WIKA Jabar Power	4,734,076	214,576	--	(182,203)
PT Hotel Indonesia Properti	2,809,725,287	831,281,748	651,585,308	6,558,370

	2023			
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Pendapatan/ Revenues	Laba (Rugi)/ Income (Loss)
	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jakarta River City	2,018,494,929	41,596,657	--	(681,588)
PT PP Semarang Demak	6,069,245,308	4,794,384,581	669,354,193	(75,482,570)
PT Patra Wijaya Realtindo	903,640,000	953,637,000	--	2,250
PT Indo Benhil Karunia Jaya	573,476,065	5,266,750	--	(8,290)
PT Gesits Motor Nusantara	165,693,141	109,632,089	25,937,629	(3,308,868)
PT Jasamarga Manado - Bitung	4,551,816,000	3,974,060,000	54,038,000	(358,259,481)
PT WIKA Realty Minor Development	856,174,036	689,699,814	--	(792,906)
PT Hotel Karya Indonesia	58,558,696	4,356,874	--	177,736
PT Hotel Indonesia Group	28,665,467	25,342,762	28,612,015	3,581,641
PT Wijaya Karunia Realtindo	2,104,466,541	2,089,488,156	--	(2,120)
PT WIKA Jabar Power	4,925,911	219,442	--	--

18. Ventura Bersama

18. Joint Ventures

18.a Investasi pada Ventura Bersama

18.a Investment in Joint Venture

Nama Ventura Bersama/ Name of Joint Venture	Nama Proyek/ Name of Project	2024		Reklasifikasi/ Reclassification	Penambahan/ (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Portion in Current Year	Nilai Tertecat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance
		Porsi Bagi Hasil/ Portion of Shares	Nilai Tertecat Rp				
WIKA-CRIC-CRDC-CREC-CRSC	High Speed Railway Jakarta Bandung	30.00	5,056,846,468	--	430,471,281	--	5,487,317,749
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Transportasi, perdagangan, jasa industri, pembangunan, perkotaan dan pertanian/ Transportation, trade, service industry, construction, plantation and agriculture	33.36	4,504,007,097	--	--	(1,573,560,840)	2,930,446,257
WIKA-PPMKH-KHI	Tol Japek-Selatan 2A	45.00	2,032,629	--	290,711,707	73,437,384	366,181,720
PP-WIKA	Toll Road Development of Semarang-Demak 1B (VGF)	20.00	11,712,400	--	189,433,510	33,193,704	234,339,614
SRBGC-WIKA-Adhi Karya JO	Jalan Tol Serang Panimbang Seksi III	55.00	--	(31,818,345)	200,237,940	31,119,282	199,558,877
WIKA Gedung-Mutiara Masjur	Apartemen Prospero	60.00	182,694,744	--	504,090	230,742	183,429,576
WIKA-PENTA-Ocean Construction Co., Ltd - Toyo Construction Co., Ltd-PPP- PT Rinkal Nissan Construction Co.Ltd.- JAKON	Pelabuhan Patimban Paket	13.00	--	(14,628,317)	116,061,346	37,637,079	139,070,108
WG-Pemprov DKI	Pembangunan Sekolah 1	98.00	118,401,826	--	2,857,849	--	121,259,675
WIKA-PP-JAKON	Jalan Tol IKN Segmen KKT Karangsau-Sp. Tempadung	42.00	40,351,123	--	33,275,943	38,925,918	112,562,984
WIKA-Jakon KSO	SPAM Jaitukur I	80.00	1,885,050	--	78,996,904	22,983,479	103,864,623
WG-Pemprov DKI	Pembangunan Sekolah 5	98.00	91,936,403	--	6,329,651	--	98,266,054
WIKA-WASKITA-PP	Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3	25.00	10,411,070	--	10,618,710	67,033,833	88,063,613
WIKA-WASKITA-JAKON-PP	Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3B-2: Segmen KKT	45.00	--	--	5,249,832	60,037,614	65,287,446
WIKA-Bumi Karsa KSO	Bendungan Lau Simeme Paket I (MYC)	65.00	37,522,928	--	8,059,746	9,135,516	54,718,190
WIKA-JAKON	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancangan dan Bangun	60.00	--	--	--	53,338,608	53,338,608
WIKA-PP	RS PON	70.00	439,228	--	(439,228)	52,257,081	52,257,081
WIKA-Gemilang KSO	JDU SPAM Wosusokas 2	70.00	1,913,870	--	29,362,180	15,062,505	46,338,555
WIKA-Bina Nusa Lestari KSO	Irigasi Rentang Package LSS-07	60.00	2,505,284	--	16,869,313	25,347,609	44,722,206
WIKA-BIT	Sumbu Timur Lanjutan	70.00	--	--	1,954,104	29,661,310	31,615,414
Kamaga-WIKA-Jakon	JSS Paket 3	60.00	2,810,031	--	19,792,191	7,846,290	30,438,512
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk- PT Nindya Karya	KSO Venue PON Aceh	55.00	8,031	--	3,965,592	24,118,500	28,092,123
WIKA-HK-Branas	Proyek IKN Istana Negara	25.00	--	--	(28,132,906)	55,887,072	27,754,166
WIKA-Obayashi Corporation-JAKON-JFE Engineering Corporation	Jakarta Sewerage 1	19.00	959,740	--	197,161	23,179,248	24,396,149
WIKA-PP	Proyek IKN Istana Negara	45.00	--	--	(12,144,581)	35,053,264	22,908,683
WIKA-Minarta Dutahutama-Karta Utama Karyamarga	Banjir Kencing Drain Kudus	70.00	439,528	--	(4,740,603)	26,151,213	21,850,138
WIKA-Angghil Hieu Lumina	Fuel Farm Depot Doho Airport	70.00	2,230,051	--	(10,766,748)	27,057,923	18,521,226
WIKA-Jakon KSO	Pembangunan Stasiun Pompa Ancol Senting	70.00	1,457,672	--	12,420,102	312,077	14,189,851

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
**DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Nama Ventura Bersama/ Name of Joint Venture	Nama Proyek/ Name of Project	2024						
		Porsi Bagi Hasil/ Portion of Shares	Nilai Tertcat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance	Reklasifikasi/ Reclassification	Penambahan/ (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Portion in Current Year	Nilai Tertcat Akhir Tahun/ Carrying Value Ending Balance	Rp
WIKA-Persada	Waduk 230 L Dik Waduk Tembesi	70.00	--	--	21,716	13,913,037	13,934,753	
WIKA-PP	Kantor Presiden IKN	45.00	960,969	--	(15,312,319)	27,882,971	13,531,621	
Kunagga-WIKA-JAKON	JSS Paket 2	60.00	36,948,616	(958,605)	--	9,653,279	12,043,778	
WIKA-Ananda	Pembangunan Bendung Karet Sungai Juana	70.00	7,416,109	--	(2,986,947)	7,410,079	11,839,241	
WIKA-Adhi Karya KSO	Tol Patimban 4	52.00	736,573	--	237,619	10,565,286	11,559,478	
WIKA-MCC-NINDYA-WASKITA RNC-JAKON	Tol Cisumdamu Phase II	20.00	84,659,475	--	(11,615,142)	--	73,044,333	
WIKA-PUTRA-AGUNG	Pembangunan Bendungan Amerero Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Paket 1	65.00	49,299,207	--	(5,567,723)	20,100,874	63,832,358	
WIKA-DMT	Pembangunan Bendungan Pamukkulu	55.00	53,380,241	--	(5,547,090)	11,444,252	59,277,403	
WG-Pemprov DKI	Pembangunan Sekolah 2	98.00	53,987,056	--	(6,726,299)	--	47,260,757	
WG-PT Mahoni Citra	Tamansari Mahogany Konstruksi	60.00	36,948,616	--	--	--	36,948,616	
WIKA-VICENTE T. LAO	Construction of Clarins Bridge-Philippines	40.00	31,256,710	--	--	98,989	31,355,699	
WIKA-PP	Bandara BIJB	55.00	28,082,223	--	--	5,112	28,087,335	
WIKA-Waskita-Daelim	Karian Multiporse DAM	27.00	41,620,829	--	(17,551,629)	2,520,586	25,590,785	
KSO Pembangunan Hurlan Pekerja Konstruksi Gedung Tbk- PT Adhi	KSO Pembangunan Hurlan Pekerja Konstruksi (IKNJ) V	60.00	24,472,223	--	1,867,171	--	26,339,394	
WIKON-Ferrymadona Jaya-Yodya Karya	Bangunan Sekolah DKI	85.00	25,926,597	--	--	--	25,926,597	
WIKA-JAKON	Bendungan Cipanas Paket 3	70.00	25,312,965	--	226,666	(849,251)	24,690,380	
WIKA-Barata	Revitiliasi PG Rendeng Kudus	70.00	25,371,889	--	--	(1,723,314)	23,648,575	
WIKA-BASUKI	Bendungan Sukamahi	55.00	29,199,304	--	(8,391,292)	--	20,808,012	
WIKA-BRP	Bendungan Jragung Paket II	70.00	29,117,856	--	(57,376,782)	44,896,970	16,638,044	
WIKA-PNFMI	Dredging Turisna	70.00	11,123,960	--	(1,852,559)	4,532,507	13,803,908	
WIKA-DMP-WBE	Jalan Sp. Gorong-Muri	55.00	15,643,365	--	--	(2,622,823)	13,020,542	
WIKA-DMT-BARATA KSO	Pembangunan Bendungan Sadawarna Paket I	70.00	11,046,992	--	605,089	--	11,652,081	
WIKA-Y KARYA-PANDJI	Pengantian Jembatan Alalak	70.00	38,176,326	--	--	(26,723,306)	11,453,020	
WIKA-DMT	Pembangunan Bendungan Kuntil Kawangkoan, Minahasa Paket III	34.00	15,461,476	--	(4,829,742)	--	10,631,734	
WIKA-JAKON	Pembangunan Bendungan Cipanas Paket 1	75.00	52,374,765	--	(42,000,000)	--	10,374,765	
WIKA-ADHI-JAKON	Pembangunan Bendungan Miarikin di Kabupaten Kupang (Paket-1)	55.00	11,265,027	--	(5,951,923)	48,822	7,401,896	
WIKA-FORTUNA	Penyiapan Lahan Industri PKT Bontang	70.00	14,444,242	--	(8,391,587)	964,123	7,016,778	
WIKA-Passokorang	Irigasi Gumbasa	70.00	20,962,366	--	(19,983,666)	--	9,778,900	
WIKA-CHINA CAMC-ADHI	Bendungan Jenelata	17.50	13,485,046	--	(15,608,664)	7,128,085	5,004,467	
WIKA-RUDY JAYA	Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket IV di Kab. OKU Selatan	95.00	21,204,962	--	(22,018,881)	4,670,426	3,856,507	
WIKON-Borneo Energi Prima	OM Senipah	49.00	29,107,307	--	(28,994,727)	3,611,561	3,724,141	
WIKA-MINARTA	Works for Pasigala Raw Water Transmission System Rehabilitation	65.00	14,634,425	--	(8,656,331)	(2,989,630)	2,988,464	
WIKA-FIRDU	Jembatan Solibada	99.00	18,277,795	--	(1,174,904)	(14,941,117)	2,261,774	
WIKA-JAKON	Sudetan Kali Ciliwung-KBT Lanjutan	60.00	32,001,386	--	(30,087,514)	(682,128)	1,231,744	
WIKA-WRK	Paket III PLN	100.00	440,381,751	--	--	--	440,381,751	
WIKA-Multinas-Barata	Pabrik Gula Asembagoes	55.00	79,777,010	--	(18,088,486)	(61,688,524)	--	
WIKA-BBP-SPT	Sumbu Timur	68.00	41,225,045	--	(41,225,045)	--	--	
WIKA-PP	Patimban Port Development Project (I) Package 3: Connecting Bridge	60.00	39,109,591	--	--	(39,109,591)	--	
WIKA-Technip	Facilities Produksi Gas Matindock	76.00	32,390,368	--	(34,105,651)	1,715,283	--	
WIKA-Pemprov DKI	Jakarta International Stadium	51.00	25,442,843	--	(25,442,843)	--	--	
WIKA-DMT	Pembangunan Bendungan Kuntil	85.00	19,146,485	--	--	(18,146,485)	--	
WASKITA-WIKA	Pembangunan Jalan Tol Probolinggo Paket 1	49.00	14,551,224	--	--	(14,551,224)	--	
WIKA-MBJ KSO	Jalan Pelembuan-Bandara Pungkur Batam	70.00	12,830,122	--	--	(12,830,122)	--	
WIKA-NTL KSO	Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa KM. 43+800 sd KM 49+500 Antara Mojokerto- Sepanjang Lintas Surabaya-Solo	70.00	11,300,141	--	--	(11,300,141)	777,938	
WIKON-Binatama Akrindo	Jakarta International Stadium	90.00	10,833,826	1,240,090	--	--	(12,073,916)	
WIKA-PP	IKN-Basement	45.00	10,558,787	--	(11,634,317)	1,075,530	--	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10,000,000) Others (each below Rp 10,000,000)			365,004,278	--	(383,775,251)	173,153,142	154,382,170	
Subtotal			12,039,694,927	(46,165,177)	--	(606,660,098)	11,433,638,470	
Dikurangi / Less : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Loss			(17,483,107)	--	--	(27,201,505)	(44,684,612)	
Total			12,022,211,820	(46,165,177)	--	(606,660,098)	11,369,853,858	

Nama Ventura Bersama/ Name of Joint Venture	Nama Proyek/ Name of Project	2023						
		Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tertcat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance	Reklasifikasi/ Reclassification	Penambahan/ (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Portion in Current Year	Nilai Tertcat Akhir Tahun/ Carrying Value Ending Balance	Rp
WIKA-CRNC-CRDC-CRSC	High Speed Railway Jakarta Bandung	30.00	4,555,951,742	--	--	500,894,726	5,056,846,468	
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Transportasi, perdagangan, jasa industri, pembangunan, perkebunan dan pertanian/ Transportation, trade, service industry, construction, plantation and agriculture	39.12	4,885,088,709	--	--	--	4,504,007,097	
WIKA-WRK	Paket III PLN	98.00	473,181,369	--	(32,655,028)	455,410	440,981,751	
WIKA Gedung-Mutiara Masjur	Apartemen Prospero	60.00	181,921,439	--	159,025	614,280	182,694,744	
WG-Pemprov DKI	Pembangunan Sekolah 1	100.00	118,587,410	--	(165,584)	--	118,401,626	
WG-Pemprov DKI	Pembangunan Sekolah 5	100.00	92,993,387	--	(1,077,647)	20,763	91,936,403	
WIKA-MCC-NINDYA-WASKITA RNC-JAKON	Tol Cisumdamu Phase II	20.00	--	(64,965,369)	--	--	84,659,475	
WIKA-Multinas-Barata	Pabrik Gula Asembagoes	55.00	79,075,069	--	701,941	--	79,777,010	
WG-Pemprov DKI	Pembangunan Sekolah 2	100.00	47,701,505	--	6,286,045	(494)	53,987,056	
WIKA-DMT	Pembangunan Bendungan Pamukkulu	55.00	27,840,317	--	(11,593,485)	37,133,409	53,380,241	
WIKA-JAKON	Pembangunan Bendungan Cipanas Paket 1	75.00	52,305,367	--	--	69,398	52,374,765	
WIKA-PUTRA-AGUNG	Pembangunan Bendungan Amerero Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Paket 1	65.00	10,627,215	--	16,872,624	21,799,368	49,299,207	
WIKA-Waskita-Daelim	Karian Multiporse DAM	27.00	35,580,571	--	(1,651,365)	7,691,623	41,620,829	
WIKA-BBP-SPT	Sumbu Timur	68.00	--	(11,378,336)	23,224,972	29,379,409	41,225,045	
WIKA-PP-JAKON	Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangan - Sp. Tempadung	42.00	--	(41,798,656)	36,631,616	45,518,163	40,351,123	
WIKA-PP	Patimban Port Development Project (I) Package 3: Connecting Bridge	60.00	77,380,610	--	--	(38,271,019)	39,109,591	
WIJAYA KARYA-PANDJI	Pengantian Jembatan Alalak	70.00	35,346,334	--	2,829,992	--	38,176,326	
WG-PT Mahoni Citra	Tamansari Mahogany Konstruksi	60.00	36,948,616	--	--	--	36,948,616	
WIKA-Technip	Facilities Produksi Gas Matindock	76.00	238,487,563	--	(5,000,000)	(201,077,195)	32,390,368	
WIKA-JAKON	Sudetan Kali Ciliwung-KBT Lanjutan	60.00	15,510,002	--	2,224,051	14,167,333	32,001,386	
WIKA-VICENTE T. LAO	Construction of Clarins Bridge-Philippines	40.00	30,596,996	--	659,714	--	31,256,710	
WIKA-BASUKI	Bendungan Sukamahi	55.00	28,220,914	--	978,390	--	29,199,304	
WIKA - BRP	Bendungan Jragung Paket II	70.00	620,627	--	9,991,960	19,405,269	29,117,856	
WIKON-Borneo Energi Prima	OM Senipah	49.00	--	(23,890,736)	56,317,344	(3,319,301)	29,107,307	
WIKA-PP	Bandara BIJB	55.00	28,086,839	--	--	15,384	28,082,223	
WIKON-Ferrymadona Jaya-Yodya Karya	Bangunan Sekolah DKI	85.00	25,917,147	--	9,450	--	25,926,597	
WIKA-Pemprov DKI	Jakarta International Stadium	51.00	58,543,999	--	(33,101,156)	--	25,442,843	
WIKA-Barata	Revitalisasi PG Rendeng Kudus	70.00	25,369,280	--	3,033	(424)	25,371,889	
WIKA-JAKON	Bendungan Cipanas Paket 3	70.00	--	(17,204,954)	39,859,769	2,658,150	25,312,965	

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2023							
Nama Ventura Bersama/ Name of Joint Venture	Nama Proyek/ Name of Project	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tertcat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance	Reklasifikasi/ Reclassification	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Portion in Current Year	Nilai Tertcat Akhir Tahun/ Carrying Value Ending Balance
		(%)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi WIKA-RUDY JAYA	KSO Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (IKN) V Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket IV di Kab. OKU Selatan	60.00	8,037,610	--	15,981,368	453,245	24,472,223
WIKA-Passokorang	Ingasi Gumbasa	70.00	11,842,852	--	(3,773,336)	12,892,850	20,962,366
WIKA-FIRDU	Jembatan Sobada	99.00	18,277,795	--	--	--	18,277,795
WIKA-DMT	Pembangunan Bendungan Kuwil	85.00	20,894,725	--	(2,748,240)	--	18,146,485
WIKA-DMP-WBE	Jalan Sp. Goro - Muri	55.00	15,641,585	--	1,780	--	15,643,365
WIKA - DMT	Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoen, Minahasa Paket III	34.00	75,568	--	14,414,439	971,069	15,461,476
WIKA-MINARTA	Works for Pasigata Raw Water Transmission System Rehabilitation	65.00	12,148,133	--	(1,930,764)	4,417,056	14,634,425
WASKITA-WIKA	Pembangunan Jalan Tol Probolinggo Paket 1	49.00	14,543,763	--	7,461	--	14,551,224
WIKA - FORTUNA	Penyiapan Lahan Industri PKT Bontang	70.00	54,612	--	12,574,974	1,814,656	14,444,242
WIKA - CHINA CAMC - ADHI	Bendungan Jenelata	17.50	7,489,980	--	5,789,939	205,127	13,485,046
WIKA - MBJ KSO	Jalan Pelabuhan-Bandara Punggur Batam	70.00	--	--	(2,299,703)	15,119,825	12,830,122
PP - WIKA	Toll Road Development of Semarang - Demak 1B (VGF)	20.00	8,465,373	--	(3,770,092)	7,017,119	11,712,400
WIKA-NTL KSO	Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa KM. 43+800 sd KM 49+500 Antara Mojokerto -	70.00	5,180,747	--	4,843,513	1,275,881	11,300,141
WIKA-ADHI-JAKON	Pembangunan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang (Paket-1)	55.00	15,183,581	--	(6,016,917)	2,098,363	11,265,027
WIKA - PNFM	Dredging Turisna	70.00	--	--	2,371,326	8,752,634	11,123,960
WIKA-DMT-BARATA KSO	Pembangunan Bendungan Sadawama Paket I	70.00	3,877,297	--	1,471,920	5,697,775	11,046,992
WIKON-Binatama Akrindo	Jakarta International Stadium	90.00	32,825,668	--	(6,509,451)	(15,482,391)	10,833,826
WIKA-PP	IKN - Basement	45.00	--	--	29,152	10,629,636	10,658,787
WIKA-WASKITA-PP	Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3	25.00	--	--	2,935,771	7,475,299	10,411,070
WIKA-SPAM	Elevated Solo Balapan - Kadapiro Tahap 1 (Pallang Jodlo)	70.00	11,640,393	--	(8,389,623)	3,513,660	6,764,430
WIKA-ADP	Pengaman Muara Sungai Bogowonto	70.00	10,132,385	--	(4,718,427)	882,527	6,296,485
WIKA-BRL	Konstruksi Infrastruktur Jalan, Jaringan Utilitas	66.00	11,032,697	--	(4,858,188)	--	6,174,509
WG-JAKON	Proyek Pengembangan RSUD Kalideres	55.00	11,036,613	--	(7,420,871)	150,894	3,766,636
WIKA-Rabana- Klesri	Jaringan Pipelina Gresik Semarang	40.00	34,251,198	--	13,000,000	(43,687,042)	3,564,158
WIKA-KARAGA	Pembangunan Perpindahan Air Limbah Kota Pekanbaru Area Selatan (Paket SC-1)	80.00	18,162,924	--	(15,882,316)	--	2,280,608
WIKA- JGC	LPG Refrigerated Tuban, Pertamina	55.00	65,227,226	--	(65,122,486)	82,699	187,440
WIKA-HJTAMA-ADIPATRIA	Ingasi Rawas Kapuas	44.00	24,844,831	--	(24,844,831)	--	--
China Road and Bridge Corp- WIKA-PP	Toll Road Development of Solo-Kertosono Phase 1	25.00	11,290,769	--	(11,290,769)	--	--
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10,000,000)/ Others (each below Rp 10,000,000)			102,503,363	(288,493,918)	383,818,565	201,479,698	399,307,708
Total			11,636,484,615	(476,158,288)	1,057,497,020	(178,128,420)	12,039,694,927
Dikurangi/ Less : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Loss			--	--	(17,483,107)	--	(17,483,107)
			11,636,484,615	(476,158,288)	1,040,013,913	(178,128,420)	12,022,211,820

18.b Utang kepada Ventura Bersama

18.b Joint Venture Payable

2024							
Nama Ventura Bersama/ Name of Joint Venture	Nama Proyek/ Name of Project	Porsi Bagi Hasil/ Portion of Shares	Nilai Tertcat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance	Reklasifikasi/ Reclassification	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Portion in Current Year	Nilai Tertcat Akhir Tahun/ Carrying Value Ending Balance
		(%)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
WIKA-SRBGC-ADHI	Jalan Tol Serang Panimbang Seksi III	22.50	(31,818,345)	--	--	--	--
WIKA-PENTA-OC-TC-PP-RNC-JAKON	Pelabuhan Patimban Paket	13.00	(14,628,317)	14,628,317	--	--	--
WIKON-Binatama Akrindo	Jakarta International Stadium	90.00	--	--	--	--	--
WIKA-PP	Proyek IKN Istana Negara	45.00	(21,527,830)	--	(1,039,560)	--	(22,567,390)
WIKA - PP	RS PON	70.00	--	--	(47,500,000)	--	(47,500,000)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10,000,000)/ Others (each below Rp 10,000,000)			(9,312,802)	(281,489)	(5,100,694)	(1,420)	(14,696,401)
Total			(77,287,294)	46,165,177	(53,640,254)	(1,420)	(84,763,791)

2023							
Nama Ventura Bersama/ Name of Joint Venture	Nama Proyek/ Name of Project	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tertcat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance	Reklasifikasi/ Reclassification	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Portion in Current Year	Nilai Tertcat Akhir Tahun/ Carrying Value Ending Balance
		(%)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
WIKA-JAKON	Pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentong	70.00	(15,358,744)	15,358,744	--	--	--
WIKA-JAKON	Bendungan Cipanas Paket 3	70.00	(17,204,954)	17,204,954	--	--	--
WIKON-Borneo Energi Prima	OKI Seripah	49.00	(23,890,736)	23,890,736	--	--	--
WIKA - RUDY JAYA	Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket IV di Kab. OKU Selatan	95.00	(28,425,319)	28,425,319	--	--	--
WIKA-PP-JAKON	Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau - Sp. Tempadung	42.00	(41,798,656)	41,798,656	--	--	--
WIKA-MCC-NINDYA-WASKITA	Tol Cisumdawu Phase II	20.00	(64,965,369)	64,965,369	--	--	--
WIKA-PP	Proyek IKN Kantor Presiden	45.00	(77,471,918)	77,471,918	--	--	--
WIKA-JAKON	SPAM Jatiluhur 1	80.00	(168,892,852)	168,892,852	--	--	--
WIKA-PENTA-OC-TC-PP-RNC-JAKON	Pelabuhan Patimban Paket	13.00	(72,712,247)	--	54,837,805	3,246,125	(14,628,317)
WIKA-PP	Proyek IKN Istana Negara	45.00	(65,982,751)	--	23,183,449	21,271,472	(21,527,830)
WIKA-SRBGC-ADHI	Jalan Tol Serang Panimbang Seksi III	22.50	(68,063,065)	--	21,917,249	14,327,471	(31,818,345)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10,000,000)/ Others (each below Rp 10,000,000)			(36,482,937)	38,149,740	(10,979,722)	117	(9,312,802)
Total			(681,249,548)	476,158,288	88,958,781	38,845,185	(77,287,294)

KSO WIKA-CRIC-CRDC-CREC-CRSC
Pada 31 Desember 2024, KSO WIKA-CRIC-CRDC-CREC-CRSC mencatat saldo PDPK atas proyek High Speed Railway Jakarta Bandung milik PT Kereta Cepat Indonesia China (pihak berelasi) sebesar Rp5.012.143.482, yang merupakan klaim atas cost over run. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, klaim tersebut

KSO WIKA-CRIC-CRDC-CREC-CRSC
On December 31, 2024, KSO WIKA-CRIC-CRDC-CREC-CRSC recorded a PDPK balance for the Jakarta Bandung High Speed Railway project owned by PT Kereta Cepat Indonesia China (related party) amounting to Rp5,012,143,482, which is a claim for cost over run. Until the date of authorization of the consolidated financial statement,

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

masih dalam proses negosiasi. Manajemen akan melanjutkan upaya klaim melalui arbitrase pihak ketiga.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (“PSBI”)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PSBI No. 67 tanggal 21 November 2022 dari Notaris Mala Mukti S.H., LL.M., dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0086182. AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 November 2022, Perusahaan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp6.110.596.000 ke PSBI dengan persentase kepemilikan sebesar 39,12%.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PSBI No. 45 tanggal 10 Desember 2024 dari Notaris Mala Mukti S.H., LL.M., PSBI menerbitkan saham baru sejumlah 2.697.142 lembar saham sebesar Rp2.697.142.000 yang diambil seluruhnya oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Atas transaksi ini persentase kepemilikan Perusahaan di PSBI terdilusi dari 39,12% menjadi 33,36%.

Pada 31 Desember 2024, saldo investasi ventura bersama atau penyertaan modal di PSBI adalah Rp2.930.446.257 atau mencerminkan akumulasi penurunan nilai sebesar Rp3.180.149.743 jika dibandingkan dengan total penyertaan modal awal Perusahaan ke PSBI.

Ringkasan informasi keuangan dari entitas ventura bersama Grup ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan ini mencerminkan jumlah yang terdapat dalam laporan keuangan entitas ventura bersama yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

the claim is still in the negotiation process. Management will continue the claim through third party arbitration.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (“PSBI”)

Based on the Deed of Decision Statement of the Shareholders of PSBI No. 67 dated November 21, 2022 from Notary Mala Mukti S.H., LL.M., and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0086182. AH.01.02.TAHUN 2022 dated November 28, 2022, the Company has made a capital paid up amounted to 2,697,142 shares valued at Rp2,697,142,000, which were fully subscribed by PT Kereta Api Indonesia (Persero). Due to this transaction the Company's percentage of ownership in PSBI with percentage of ownership amounting to 39.12%.

Based on the Deed of Decision Statement of the Shareholders of PSBI No. 45 dated December 10, 2024, from Notary Mala Mukti S.H., LL.M., PSBI issued new shares amounting to 2,697,142 shares valued at Rp2,697,142,000, which were fully subscribed by PT Kereta Api Indonesia (Persero). Due to this transaction the Company's percentage of ownership in PSBI diluted from 39.12% into 33.36%.

As of December 31, 2024, the balance of joint venture investments or equity participation in PSBI was Rp2,930,446,257, reflecting an accumulated impairment of IDR 3,180,149,743 compared to the Company's initial capital contribution to PSBI.

Summarized financial information in respect of the Group's material joint ventures is set out below. The summarized financial information below represents amounts shown in the venture's financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

	2024			
	Aset/ Assets Rp	Liabilitas/ Liabilities Rp	Pendapatan/ Revenues Rp	Laba (Rugi)/ Income (Loss) Rp
KSO WIKA-CRIC-CRDC-CREC-CRSC	2,023,700,574	1,013,799,325	638,151,172	--
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	27,289,615,525	16,958,110,367	--	(3,948,364,433)
Lain-lain/ Others	17,808,998,729	15,429,388,594	20,162,534,283	1,686,167,851
Total	50,490,123,885	33,401,298,286	20,800,685,455	(2,262,196,582)

	2023			
	Aset/ Assets Rp	Liabilitas/ Liabilities Rp	Pendapatan/ Revenues Rp	Laba (Rugi)/ Income (Loss) Rp
KSO WIKA-CRIC-CRDC-CREC-CRSC	7,250,320,918	6,240,419,669	982,910,731	--
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	23,263,021,000	9,006,518,000	--	(974,135,000)
Lain-lain/ Others	10,369,454,766	3,977,008,630	6,899,090,880	227,861,229
Total	40,882,796,684	19,223,946,299	7,882,001,611	(746,273,771)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

19. Properti Investasi - Neto

19. Investment Properties - Net

	2024						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar/ Increase (Decrease) in Fair Value	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Diukur pada Nilai Wajar							Measured at Fair Value
Tanah	374,082,607	--	--	--	11,247,200	385,329,807	Land
Bangunan dan Prasarana	934,280,994	2,583,380	(2,451,000)	--	224,900	934,638,274	Building and Equipment
Total	1,308,363,601	2,583,380	(2,451,000)	--	11,472,100	1,319,968,081	Total
	2023						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar/ Increase (Decrease) in Fair Value	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Diukur pada Nilai Wajar							Measured at Fair Value
Tanah	395,144,852	--	--	(21,873,870)	811,625	374,082,607	Land
Bangunan dan Prasarana	1,583,801,714	--	(649,933,920)	--	413,200	934,280,994	Building and Equipment
Total	1,978,946,566	--	(649,933,920)	(21,873,870)	1,224,825	1,308,363,601	Total

Properti investasi Perusahaan berupa tanah, yang berlokasi di Bali, Surabaya, Samarinda dan Balikpapan. Sedangkan Bangunan Grup berlokasi di Jakarta, Tangerang, Karawang, Bandung, dan Surabaya yang merupakan area komersial, kondotel dan ruko.

The Company's investment properties are land, which are located in Bali, Surabaya, Samarinda and Balikpapan. While the Group's buildings are located in Jakarta, Tangerang, Karawang, Bandung and Surabaya, which are commercial area, condotel and commercial building.

Penambahan properti investasi di tahun 2024 sebesar Rp2.583.380 merupakan hasil konversi atas sebagian piutang usaha WPG kepada PT Samudra Bangun Raya dengan ruko yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat (Catatan 6).

The addition of investment properties in 2024 amounting to Rp2,583,380 is the result of the conversion of part of WPG's trade receivables to PT Samudra Bangun Raya with a shophouse located in Bogor, West Java. (Note 6).

Pengurangan properti investasi Perusahaan di tahun 2024 sebesar Rp2.451.000 merupakan penjualan tanah dan bangunan di Makassar dan di Sidoarjo dengan mekanisme set off terhadap Utang kepada PT Cipta Perkasa Sejati dan PT Sarana Logistik Indonesia.

In 2024, the Company's investment property decreased by Rp2,451,000 due to the sale of land and buildings in Makassar and Sidoarjo. The transaction was carried out through a set-off mechanism against liabilities to PT Cipta Perkasa Sejati and PT Sarana Logistik Indonesia.

Pengurangan properti investasi WIKA Realty di tahun 2023 merupakan pembatalan pembelian proyek CBD Cileduk berdasarkan putusan BANI No. 45084/X/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Juli 2023.

The decrease of investment properties WIKA Realty in 2023 is the cancellation of the purchase of the Cileduk CBD project based on BANI decision No. 45084/X/ARB-BANI/2022 dated July 27, 2023.

Pada tahun 31 Desember 2023, WIKA Bitumen melakukan reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap hak atas tanah Rp21.873.870 (Catatan 20).

As of December 31, 2023, WIKA Bitumen reclassified investment property into fixed assets landrights amounting to Rp21,873,870 (Note 20).

Berikut adalah nama Penilai, dan tanggal laporan penilaian atas perhitungan nilai wajar beberapa properti investasi pada 31 Desember 2024:

The following are the names of the Valuer, and the dates of the appraisal report on the calculation of the fair value of some investment properties as of December 31, 2024:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Nama Penilai / Name of Valuer	Partner/ Partner	Tanggal Laporan / Report date	Tanggal Penilaian / Valuation date	Entitas / Entities	Objek / Object	Nilai Wajar/ Fair Value
Didi Siregar & Rekan	Achmad Faisal Siregar, BA, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)	23 Sep 2024/ Sep 23, 2024	30 Sep 2024/ Sep 30, 2024	WIKA Realty	Sudirman Suites Residence/ Sudirman Suites Residence	282,136,800,000
Didi Siregar & Rekan	Achmad Faisal Siregar, BA, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)	23 Sep 2024/ Sep 23, 2024	30 Sep 2024/ Sep 30, 2024	WIKA Realty	Tamansari Hive/ Tamansari Hive	183,535,200,000
Didi Siregar & Rekan	Achmad Faisal Siregar, BA, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)	23 Sep 2024/ Sep 23, 2024	30 Sep 2024/ Sep 30, 2024	WIKA Realty	Tamansari Skykunge Tangerang (Kyriad)/ Tamansari Skykunge Tangerang (Kyriad)	88,175,000,000
Didi Siregar & Rekan	Achmad Faisal Siregar, BA, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)	23 Sep 2024/ Sep 23, 2024	30 Sep 2024/ Sep 30, 2024	WIKA Realty	Apartemen Tamansari Semarang/ Tamansari Semarang Apartemen	81,258,800,000
Didi Siregar & Rekan	Achmad Faisal Siregar, BA, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)	23 Sep 2024/ Sep 23, 2024	30 Sep 2024/ Sep 30, 2024	WIKA Realty	Hotel BW La Grande/ Hotel BW La Grande	53,440,300,000
Didi Siregar & Rekan	Achmad Faisal Siregar, BA, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)	23 Sep 2024/ Sep 23, 2024	30 Sep 2024/ Sep 30, 2024	WIKA Realty	Hotel BW Papilio/ Hotel BW Papilio	35,119,600,000
Didi Siregar & Rekan	Achmad Faisal Siregar, BA, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)	23 Sep 2024/ Sep 23, 2024	30 Sep 2024/ Sep 30, 2024	WIKA Realty	Kantor Tamansari Hive/ Tamansari Hive Office	19,070,100,000
Didi Siregar & Rekan	Achmad Faisal Siregar, BA, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)	23 Sep 2024/ Sep 23, 2024	30 Sep 2024/ Sep 30, 2024	WIKA Realty	Sportclub The Hills Tamansari Semarang/ Sportclub The Hills Tamansari Semarang	16,464,400,000
Didi Siregar & Rekan	Achmad Faisal Siregar, BA, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)	23 Sep 2024/ Sep 23, 2024	30 Sep 2024/ Sep 30, 2024	WIKA Realty	Sportclub Tamansari Pesona Bali/ Sportclub Tamansari Pesona Bali	1,796,300,000
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert)	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	8 Jan 2025/ Jan 8, 2025	WIKA Beton	Unit Kantor Tamansari Hive Office/ Tamansari Hive Office Unit	66,302,000
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert)	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	8 Jan 2025/ Jan 8, 2025	WIKA Beton	Kawasan Perumahan/ Residential Area	40,786,000
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert)	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	8 Jan 2025/ Jan 8, 2025	WIKA Beton	Tanah Bangunan Kantor/ Office Building Land	15,722,800
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert)	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	8 Jan 2025/ Jan 8, 2025	WIKA Beton	Unit Apartemen The Wave/ The Wave Apartment Unit	12,028,000
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert)	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	8 Jan 2025/ Jan 8, 2025	WIKA Beton	Unit Ruko di Bogor/ Shop House Unit in Bogor	4,480,000
Eri Andesta dan Rekan	Iqro Haikal Sulaiman S.E., MAPPI (Cert)	13 Sep 2024/ Sep 13, 2024	30 Sep 2024/ Sep 30, 2024	WPG	Unit Ruko Pasar Bogor/ Shop Pasar Bogor Unit	2,583,380
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert)	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	8 Jan 2025/ Jan 8, 2025	WIKA Beton	Tanah Bangunan Rumah Tinggal/ Residential Building Land	2,211,000
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert)	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	8 Jan 2025/ Jan 8, 2025	WIKA Beton	Tanah Kosong di Semarang/ Vacant Land in Semarang	1,314,400
Toto Suharto dan Rekan	Hery Wahyudianto, S.T., MAPPI (Cert)	31 Des 2024/ Dec 31, 2024	8 Jan 2025/ Jan 8, 2025	WIKA Beton	Tanah Kosong Tegal/ Vacant Land in Tegal	1,300,500
						764,143,228,000

Berikut adalah nama Penilai, dan tanggal laporan penilaian atas perhitungan nilai wajar beberapa properti investasi pada 31 Desember 2023:

The following are the names of the Valuer, and the dates of the appraisal report on the calculation of the fair value of some investment properties as of December 31, 2023:

Nama Penilai / Name of Valuer	Partner/ Partner	Tanggal Laporan / Report date	Tanggal Penilaian / Valuation date	Entitas / Entities	Objek / Object	Nilai Wajar/ Fair Value
Andang Kosasih, Maman, Agus dan Rekan	Ir. Andang Kosasih, MAPPI (Cert)	30 Sept 2023/ Sept 30, 2023	10 Okt 2023/ Oct 10, 2023	WIKA Beton	Unit Kantor Tamansari Hive Office/ Tamansari Hive Office Unit	65,922,700
Edi Andesta dan Rekan	Iqro Haikal Sulaiman, S.E., MAPPI (Cert)	30 Sept 2023/ Sept 30, 2023	18 Sep 2023/ Sep 18, 2023	WIKA Beton	Tanah Kawling Land	60,552,576
Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan	Muhammad Haikal, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)	30 Sept 2023/ Sept 30, 2023	10 Jan 2023/ Jan 10, 2023	WIKA Beton	Tanah Kawling dan Rumah Tipe 30/60/ Land Plot and House Unit Tipe 30/60	41,340,000
Andang Kosasih, Maman, Agus dan Rekan	Ir. Andang Kosasih, MAPPI (Cert)	30 Sept 2023/ Sept 30, 2023	10 Okt 2023/ Oct 10, 2023	WIKA Beton	Unit Apartemen Meriteng Atas/ Meriteng Atas Apartment Unit	11,964,500
Andang Kosasih, Maman, Agus dan Rekan	Ir. Andang Kosasih, MAPPI (Cert)	30 Sept 2023/ Sept 30, 2023	10 Okt 2023/ Oct 10, 2023	WIKA Beton	Unit Ruko Pasar Bogor/ Shop Pasar Bogor Unit	4,771,000
Andang Kosasih, Maman, Agus dan Rekan	Ir. Andang Kosasih, MAPPI (Cert)	30 Sept 2023/ Sept 30, 2023	10 Okt 2023/ Oct 10, 2023	WIKA Beton	Tanah Bangunan Rumah Tinggal/ Residential Building Land	2,209,000
Toto Suharto dan Rekan	Ir. Toto Suharto, M.Sc., MAPPI (Cert)	30 Sept 2023/ Sept 30, 2023	23 Okt 2023/ Oct 23, 2023	WIKA Beton	Tanah Kawling Land Plot	1,185,000
Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan	Muhammad Haikal, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)	30 Sept 2023/ Sept 30, 2023	10 Jan 2023/ Jan 10, 2023	WIKA Beton	Tanah Kosong Land	1,019,000
						188,962,776

Pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar properti tanah adalah pendekatan pasar.

Approach that is used in determining the fair value of land property is the market approach.

Pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar properti tanah dan bangunan adalah pendekatan pendapatan, pendekatan biaya, dan pendekatan pasar.

Approaches that are used in determining the fair value of land and building properties are the income approach, the cost approach, and the market approach.

Kenaikan nilai wajar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.472.100 dan Rp1.224.825 yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi Grup, dicatat pada selisih nilai wajar properti investasi pada penghasilan dan beban lain-lain (Catatan 48).

Increase in fair value for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp11,472,100 and Rp1,224,825, respectively, arising from changes in the fair value of the Group's investment properties, is recorded as the difference between the fair value of investment properties in other income and other expenses (Note 48).

Pendapatan sewa dan beban operasi langsung dari properti investasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Rental income and direct operating expenses from investment property recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan Sewa	122,508,759	101,847,114	Rental Income
Beban Pokok Pendapatan	(118,738,220)	(94,535,385)	Cost of Revenues

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

20. Aset Tetap - Neto

20. Fixed Assets - Net

	2024					Acquisition Cost
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Pelepasan Entitas Anak/ Divestment of Subsidiaries	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Tercatat						
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Hak atas Tanah	4,486,233,382	1,803,672	--	(98,251,187)	(1,783,057,362)	2,606,728,505
Lahan Tambang	60,329,605	--	--	--	--	60,329,605
Bangunan	2,644,083,818	6,091,265	(6,499,163)	(152,401,912)	(942,532,550)	1,548,741,458
Prasarana	563,450,924	12,544,088	(11,780,497)	(88,411)	--	564,126,104
Perlengkapan Kantor	402,702,736	11,946,719	(2,344,891)	(21,256,187)	(233,080,514)	157,967,863
Peralatan Pabrik dan Proyek	4,519,512,485	160,112,135	(35,731,809)	(86,895,443)	(342,212,354)	4,214,785,014
Kendaraan	11,994,367	--	--	--	(1,597,719)	10,396,648
Aset Tetap dalam Pembangunan	132,759,397	138,258,343	(7,953,181)	(22,336,838)	(194,070,578)	46,657,143
	<u>12,821,066,714</u>	<u>330,756,222</u>	<u>(64,309,541)</u>	<u>(381,229,978)</u>	<u>(3,496,551,077)</u>	<u>9,209,732,340</u>
Akumulasi Deplesi						Accumulated Depletion
Lahan Tambang	12,550,923	--	--	--	--	12,550,923
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Bangunan	967,108,108	94,152,670	(1,483,162)	(25,405,782)	(480,300,981)	554,070,853
Prasarana	300,675,444	23,356,792	(3,267,997)	88,410	--	320,852,649
Perlengkapan Kantor	334,593,299	18,345,377	(1,003,144)	(6,648,012)	(230,085,329)	115,202,191
Peralatan Pabrik dan Proyek	3,080,041,434	187,238,455	(23,389,335)	(57,304,263)	(318,872,323)	2,867,713,968
Kendaraan	10,397,834	94,232	--	--	(1,597,719)	8,894,347
Aset Tetap dalam Pembangunan	4,705,367,042	323,187,526	(28,143,638)	(89,269,647)	(1,030,856,352)	3,879,284,931
	<u>8,115,699,672</u>					<u>5,330,447,409</u>
Nilai Buku						Carrying Value
	<u>4,705,367,042</u>					<u>3,879,284,931</u>

	2023					Acquisition Cost
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan						Direct Ownership
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Hak atas Tanah	4,472,294,582	2,153,930	--	--	11,784,870	4,486,233,382
Lahan Tambang	60,329,605	--	--	--	--	60,329,605
Bangunan	2,637,064,111	3,292,625	--	--	3,727,082	2,644,083,818
Prasarana	549,717,730	11,168,228	--	--	2,564,966	563,450,924
Perlengkapan Kantor	354,108,122	44,330,339	(1,311,539)	--	5,575,814	402,702,736
Peralatan Pabrik dan Proyek	4,399,526,260	65,502,747	(10,666,707)	--	65,150,185	4,519,512,485
Kendaraan	12,379,587	--	--	(385,220)	--	11,994,367
Aset Tetap dalam Pembangunan	93,590,139	51,256,884	(74,230)	--	(12,013,396)	132,759,397
	<u>12,579,010,136</u>	<u>177,704,753</u>	<u>(12,437,696)</u>	<u>--</u>	<u>76,789,521</u>	<u>12,821,066,714</u>
Akumulasi Deplesi						Accumulated Depletion
Lahan Tambang	12,196,122	354,801	--	--	--	12,550,923
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Bangunan	860,585,184	106,312,648	--	--	210,276	967,108,108
Prasarana	267,885,581	32,789,863	--	--	--	300,675,444
Perlengkapan Kantor	312,846,708	22,696,713	(950,122)	--	--	334,593,299
Peralatan Pabrik dan Proyek	2,808,977,086	223,141,481	(8,203,370)	--	56,126,237	3,080,041,434
Kendaraan	10,685,759	97,294	(385,219)	--	--	10,397,834
	<u>4,273,176,440</u>	<u>385,392,800</u>	<u>(9,538,711)</u>	<u>--</u>	<u>56,336,513</u>	<u>4,705,367,042</u>
Nilai Tercatat						Carrying Value
	<u>8,305,833,696</u>					<u>8,115,699,672</u>

Aset tetap digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Grup.

Fixed assets are used to support the Group's operational activities.

Beban penyusutan dan deplesi dialokasikan ke beban pokok pendapatan dan beban administrasi dan umum dengan rincian sebagai berikut:

Depreciation and depletion expenses allocated to cost of revenues and general and administrative expenses, with the details are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 45)	304,747,917	347,253,410	Cost of Revenues (Note 45)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 47)	18,439,609	38,139,390	General and Administrative Expenses (Note 47)
	<u>323,187,526</u>	<u>385,392,800</u>	

Per 31 Desember 2024, Grup melakukan penjualan aset tetap dengan harga jual sebesar Rp2.052.896 dengan nilai buku bersih sebesar Rp358.205. Atas transaksi penjualan aset ini, Perusahaan memperoleh keuntungan penjualan aset sebesar Rp1.694.691 (Catatan 48).

As of December 31, 2024, the Group sold fixed assets at a selling price of Rp2,052,896 with a net book value of Rp358,205. From this asset sale transaction, the Group obtained a gain on the sale of assets of Rp1,694,691 (Note 48).

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan laporan penilai Independen yaitu KJPP Rizky Djunaedy dan Rekan, dengan KJPP Laporan No.00322/2.0017-00/PP/03/0362/1/X/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan pendekatan nilai pasar sebesar Rp72.087.440 yang bertujuan untuk memberikan nilai pasar dan nilai likuidasi dari aset yang dinilai guna rencana penjualan aset, yaitu mesin dan peralatan pabrik majalengka milik WIKON dengan nilai buku sebesar Rp44.110.042 dan penilaian pabrik fabrikasi baja dengan tanah seluas 56.875 meter persegi dan bangunan 30.505 meter persegi yang terdiri dari 51 SHGB atas nama Perusahaan dengan nilai pasar sebesar Rp228.075.062 dan nilai buku sebesar Rp223.796.124. Aset tetap yang tersedia untuk dijual direklasifikasi ke aset lain-lain (Catatan 25).

Pada tahun 2024, WIKA Gedung mereklasifikasi perlengkapan kantor menjadi aset takberwujud sebesar Rp13.412.687 (Catatan 24).

Berdasarkan Keputusan Direksi Diluar Rapat No. MJ.01.00/WIK.A.DIR.00071/2023, terkait dengan program restrukturisasi pinjaman WIKA IKON, para Pemegang Saham menyetujui penjualan aset tetap melalui mekanisme lelang. Pada tahun 2023, WIKA IKON melakukan penjualan aset dengan harga jual sebesar Rp2.098.100 dan nilai buku bersih sebesar Rp2.898.985. Atas transaksi penjualan aset ini, WIKA IKON mencatat kerugian penjualan aset sebesar Rp800.886 yang dicatat pada beban lain lain (Catatan 48).

Pada tahun 2023, WIKA Gedung melakukan reklasifikasi aset tetap hak atas tanah menjadi Tanah untuk Pengembangan sebesar Rp10.089.000 (Catatan 16).

Pada tahun 2023, WIKA Beton melakukan reklasifikasi aset lain-lain aset hak guna menjadi aset tetap peralatan dan bangunan neto masing-masing sebesar Rp7.476.577 dan Rp1.191.561 (Catatan 25).

Pada tahun 2023, WIKA Bitumen melakukan reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap hak atas tanah Rp21.873.870 (Catatan 19).

Aset tetap Grup kecuali tanah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Buana Independent, PT Asuransi Sinarmas Syariah, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, dan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.017.825.517 dan Rp989.128.080.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Based on the report of an independent appraiser, namely KJPP Rizky Djunaedy and Partners, with KJPP Report No.00322/2.0017-00/PP/03/0362/1/X/2024 on October 23, 2024 with a market value amounting to Rp72,087,440 approach which aims to provide market value and liquidation value of the assets assessed for the asset sales plan, namely Majalengka factory machinery and equipment owned by WIKON with book value of Rp44,110,042 and the assessment of a steel fabrication factory with a land area of 56,875 square meters and a building of 30,505 square meters consisting of 51 SHGB in the name of the Company with a market value of Rp228,075,062 and a book value of Rp223,796,124. Fixed assets available for sale are reclassified to other assets (Note 25).

On 2024, WIKA Gedung reclassified office equipment into intangible assets amounting to Rp13,412,687 (Note 24).

Based on the Board of Directors' Decision Outside the Meeting No. MJ.01.00/WIK.A.DIR.00071/2023, related to WIKA IKON's loan restructuring program, Shareholders approve the sale of fixed assets through an auction mechanism. For the year 2023, WIKA IKON sold assets with a selling price of Rp2,098,100 and a net book value of Rp2,898,985. Due to this asset sale transaction, WIKA IKON recorded a loss on sales of assets amounting to Rp800,886 which recorded in other expenses (Note 48).

On 2023, WIKA Gedung reclassified fixed assets landrights into Land for Development amounting to Rp10,089,000 (Note 16).

On 2023, WIKA Beton reclassified others asset right-of-use assets into net fixed assets equipment and buildings amounting to Rp7,476,577 and Rp1,191,561 (Note 25).

On 2023, WIKA Bitumen reclassified investment property into fixed assets landrights amounting to Rp21,873,870 (Note 19).

Fixed assets except land of the Group are insured fire risk and other risks with PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Buana Independent, PT Asuransi Sinarmas Syariah, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk and PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk with insurance coverage as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp2,017,825,517 and Rp989,128,080, respectively.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif sebesar masing-masing Rp19.888.909 Rp31.105.162, dicatat sebagai aset lain-lain (Catatan 25).

Berdasarkan penelaahan manajemen pada akhir tahun, tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas aset tetap milik Grup.

Aset tetap dalam pembangunan atas bangunan, peralatan proyek dan pabrik, dan prasarana merupakan pembangunan pabrik baru milik Perusahaan, WIKA Realty, WIKA Beton, WIKA IKON, dan WIKA Bitumen dengan rincian sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp	
Hak atas Tanah	29,835,804	33,107,431	Landrights
Peralatan Pabrik dan Proyek	16,821,339	26,880,015	Project and Plant Equipment
Lahan Tambang	--	8,435,245	Mining
Bangunan	--	64,336,706	Buildings
Total	46,657,143	132,759,397	Total

Persentase penyelesaian aset tetap dalam pembangunan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan progres sebesar 95%, adalah bangunan yang diestimasikan akan selesai pada 3 bulan. Tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian pembangunan aset tetap tersebut.

Persentase penyelesaian aset tetap dalam pembangunan WIKA Beton pada tanggal 31 Desember 2024 antara lain perlengkapan kantor 97%, tanah 84%, tambang 26%, bangunan 92%, dan peralatan 68%, yang diestimasikan akan selesai pada 12 (dua belas) bulan. Tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian pembangunan aset tetap tersebut.

Persentase penyelesaian aset tetap dalam pembangunan WIKA IKON pada tanggal 31 Desember 2024 dengan progres sebesar, antara lain bangunan 98,9%. Tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian pembangunan aset tetap tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp367.395.888.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the fixed assets insured.

As of December 31, 2024 and 2023 the carrying amount of fixed assets discontinued from active use amounted to Rp19,888,909 and Rp31,105,162, respectively, are recorded as other assets (Note 25).

Based on management's evaluation at the end of the year, there is no provision for impairment on fixed assets of the Group.

Fixed assets under construction of buildings, project and plant equipment, and infrastructure pertains to the construction of new factory of the Company, WIKA Realty, WIKA Beton, WIKA IKON and WIKA Bitumen with details as follows:

Percentage completion of the Company's fixed assets under construction as of December 31, 2024 with progress 95% are buildings that were estimated to be completed within 3 months. There are no obstacles in completing the construction of the fixed assets.

The percentage of completion of fixed assets under construction WIKA Beton as of December 31, 2024 includes office equipment 97%, land 84%, mine 26%, building 92% and plant equipment 68%, which is estimated to be completed in 12 (twelve) months. There were no obstacles in completing the construction of these fixed assets.

Percentage completion of WIKA IKON's fixed assets under construction as of December 31, 2024 consists of building 98.9%. There are no obstacles in completing the construction of the fixed assets.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group has property, plant and equipment with acquisition cost that had been fully depreciated and still in use amounting to Rp367,395,888, respectively.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

21. Aset Kerja Sama Operasi

21. Assets of Joint Operation

2024				
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Harga Perolehan				Acquisition Cost
Bangunan	462,983,670	--	462,983,670	Building
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Bangunan	195,144,427	10,846,233	205,990,660	Building
Total	267,839,243		256,993,010	Total
2023				
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Harga Perolehan				Acquisition Cost
Bangunan	1,023,706,760	--	462,983,670	Building
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Bangunan	103,401,234	(23,363,463)	195,144,427	Building
Total	920,305,526		267,839,243	Total

Aset kerja sama operasi adalah milik WIKA Realty, WIKA Gedung, dan WEGE SP.

- Aset kerja sama operasi milik WIKA Realty merupakan aset bersama atas kerjasama operasi proyek Tamansari Jivva yang terletak di daerah Klungkung, Bali dengan PT Dwa Investama.
- Bangunan Sarinah merupakan aset kerjasama dengan PT Sarinah (Persero). Perjanjian Kerjasama ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pengelolaan Obyek Build Operate Transfer Transformasi Gedung Sarinah No. Wika Realty KU.02.03/A.DIR.WR.2896/2022 dan No. Sarinah 016/DIREKSI/BA/III/2022 tanggal 1 Agustus 2022. Bangunan tersebut terletak di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Akta No.112 tanggal 11 Desember 2023 dibuat dihadapan Notaris Charles Hermawan, PT Sarinah (Persero) menggunakan hak opsi untuk mengakhiri kerja sama dengan nilai pengakhiran sebesar Rp644.813.300.

- Aset kerja sama operasi bangunan milik WIKA Gedung terdiri dari:
 - a. Hotel D'Braga yang terletak di atas tanah HGB No. 649, atas nama PT Sarinah (Persero) seluas 1.763 m² di Jalan Braga No. 10, Bandung, Jawa Barat, dimana pembangunan hotel tersebut merupakan kerjasama operasi antara WIKA Gedung dengan PT Sarinah (Persero), yang tertuang dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah Build, Operate and Transfer (BOT) yang telah diaktakan dengan Akta No.1 tanggal 10 Maret 2016 oleh Yunita Permatasari, S.H., Notaris di Jakarta.

Assets of joint operation belong to WIKA Realty, WIKA Gedung, and WEGE SP.

- Assets of joint operation owned by WIKA Realty are joint assets for the joint operation of the Tamansari Jivva project located in the Klungkung area, Bali with PT Dwa Investama.
- The Sarinah building is an asset in collaboration with PT Sarinah (Persero). The Cooperation Agreement is stipulated based on the Minutes of Management of the Build Operate Transfer Transformation Object of the Sarinah Building No. Wika Realty KU.02.03/A.DIR.WR.2896/2022 and No. Sarinah 016/DIREKSI/BA/III/2022 dated August 1, 2022. The building is located in the Sarinah Building, Central Jakarta.

Based on Deed No. 112 dated December 11, 2023 made before Notary Charles Hermawan, PT Sarinah (Persero) exercised the option right to terminate the collaboration with a termination value of Rp644,813,300.

- Asset of joint operation building owned by WIKA Gedung consists of:
 - a. D'Braga Hotel which located on HGB land No. 649, on behalf of PT Sarinah (Persero) covering an area of 1,763 sqm on Jalan Braga No. 10, Bandung, West Java, whereas the construction of the hotel is a joint operation between the Company and PT Sarinah (Persero), which is stated in the Build, Operate and Transfer (BOT) agreement which was notarized with Deed No.1 dated March 10, 2016 by Yunita Permatasari S.H., Notary in Jakarta.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Bangunan Graha Mantap merupakan aset kerjasama operasi antara WSP dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diaktakan dengan akta No. 85 tanggal 28 Mei 2019, oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Perjanjian Pendelegasian Pekerjaan Pengembangan Lahan Mandiri Proklamasi Nomor: HK.02.09/A.DIR.WG.6445/2019 tanggal 2 Agustus 2019. Bangunan tersebut dilakukan di atas tanah dengan luas lebih kurang 4.428 m2, dengan Sertifikat Hak Milik, No. 787 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terletak di kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- c. Bangunan Pertamina Mandalika *International Street Circuit* yang merupakan aset kerjasama WIKA Gedung dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) ("ITDC") berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 318/DIR/ITDC.01/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 (SPK). Bangunan tersebut terletak di ITDC Mandalika *Tourism Complex*, Kuta, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Catatan 53).

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- b. *Building Graha Mantap is an asset of joint cooperation between WSP with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk notarized by deed No. 85 dated May 28, 2019, by Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and Agreement on the Delegation of Land Development Work for Mandiri Proklamasi Number: HK.02.09/A.DIR.WG.6445/2019 dated August 2, 2019. The building was carried out on land with an area of approximately 4,428 sqm, with Certificate of Ownership, No. 787 on behalf of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, located in Pegangsaan, Menteng District, Central Jakarta City, DKI Jakarta.*
- c. *The Pertamina Mandalika International Street Circuit building which represent a collaboration asset WIKA Gedung with PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) ("ITDC") based on the Work Order No. 318/DIR/ITDC.01/X/2021 dated October 7, 2021. The building is located at ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta, Pujut, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara (Note 53).*

22. Goodwill

22. Goodwill

	2024 dan/ and 2023				
	Harga Perolehan/ Acquisition Cost	Nilai Aset Neto/ Net Asset Value	Goodwill	Penurunan Nilai Goodwill/ Goodwill Impairment	Goodwill Neto/ Goodwill Net
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
WIKA Rekon	21,395,496	8,834,291	12,561,205	(7,714,153)	4,847,052
Total	21,395,496	8,834,291	12,561,205	(7,714,153)	4,847,052

Akun ini merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Grup atas nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai.

Berdasarkan pengujian penurunan nilai yang telah dilakukan, Manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai *goodwill* telah memadai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

This account represents the excess of acquisition cost over the Group's interest in the fair value of the net assets of the acquired subsidiaries net of accumulated impairment.

Based on the impairment test which had been conducted, the Management believes that impairment on goodwill is adequate as of December 31, 2024 and 2023.

23. Investasi Jangka Panjang Lainnya

23. Other Long-term Investments

Akun ini merupakan investasi Grup dengan jumlah kepemilikan saham kurang dari 20% dan dicatat sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dengan rincian sebagai berikut:

This account represents Group's investment with share ownership of less than 20%, and recorded as a financial asset measured at fair value through profit or loss, with the following details:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2024						
Nama Entitas/ Name of Entity	Bidang Usaha/ Type of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar/ Increase (Decrease) in Fair Value	Saldo Akhir/ Ending Balance
		(%)	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Infrastruktur Jalan Tol/ Toll Road Infrastructure	18.29	655,200,000	--	(500,000)	654,700,000
PT Citra Marga Lintas Jabar	Pembangunan dan Pengusahaan Jalan Tol/ Construction and Development Of Toll Road	16.56	238,000,000	--	--	238,000,000
PT Bandara Internasional Batam	Pengelolaan Kegiatan Bandar Udara/ Airport Activities Management	19.00	113,000,000	--	6,000,000	119,000,000
PT Karya Logistik Nusantara	Logistik/ Logistic	13.95	15,000,000	--	--	15,000,000
PT Jasamarga Bali Tol	Infrastruktur Jalan Tol/ Toll Road Infrastructure	0.40	3,800,000	--	--	3,800,000
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	Industri Petrokimia/ Petrochemical Industry	0.11	2,425,732	--	--	2,425,732
PT Jasamarga Akses Patimban	Infrastruktur Jalan Tol/ Toll Road Infrastructure	0.88	1,500,000	--	--	1,500,000
PT Air Minum Indonesia	Pengelolaan Air Minum/ Drinking Water Management	14.00	140,000	--	--	140,000
PT Jasamarga Gedebage Cilacap	Pengusahaan Jalan Tol/ Toll Road Concession	10.00	609,600	--	(609,600)	--
Total			1,029,675,332	--	4,890,400	1,034,565,732

2023						
Nama Entitas/ Name of Entity	Bidang Usaha/ Type of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar/ Increase (Decrease) in Fair Value	Saldo Akhir/ Ending Balance
		(%)	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Infrastruktur Jalan Tol/ Toll Road Infrastructure	18.29	656,100,000	--	(900,000)	655,200,000
PT Citra Marga Lintas Jabar	Pembangunan dan Pengusahaan Jalan Tol/ Construction and Development Of Toll Road	16.56	237,000,000	--	1,000,000	238,000,000
PT Bandara Internasional Batam	Pengelolaan Kegiatan Bandar Udara/ Airport Activities Management	19.03	110,469,610	--	2,530,390	113,000,000
PT Karya Logistik Nusantara	Logistik/ Logistic	17.65	--	15,000,000	--	15,000,000
PT Jasamarga Bali Tol	Infrastruktur Jalan Tol/ Toll Road Infrastructure	0.40	3,800,000	--	--	3,800,000
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	Industri Petrokimia/ Petrochemical Industry	0.11	2,425,732	--	--	2,425,732
PT Jasamarga Akses Patimban	Infrastruktur Jalan Tol/ Toll Road Infrastructure	5.00	--	1,500,000	--	1,500,000
PT Jasamarga Gedebage Cilacap	Pengusahaan Jalan Tol/ Toll Road Concession	10.00	609,600	--	--	609,600
PT Air Minum Indonesia	Pengelolaan Air Minum/ Drinking Water Management	14.00	140,000	--	--	140,000
Total			1,010,544,942	16,500,000	2,630,390	1,029,675,332

Berikut tanggal laporan penilaian dalam menentukan nilai wajar investasi jangka panjang lainnya berdasarkan penilai Iskandar dan Rekan dengan Patner Radithe Pramudito, S.E., M.Ec. Dev., MAPPI (Cert.) pada tanggal 31 Desember 2024:

The following is the date of the appraisal report in determining the fair value of other long-term investments based on appraiser Iskandar dan Rekan with Partner Radithe Pramudito, S.E., M.Ec. Dev., MAPPI (Cert.) as of December 31, 2024:

Tanggal Laporan/ Report date	Tanggal Penilaian/ Valuation date	Entitas/ Entities	Nilai Wajar/ Fair Value
23 Des 2024/ Dec 23, 2024	31 Okt 2024/ Oct 31, 2024	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	654,700,000
23 Des 2024/ Dec 23, 2024	31 Okt 2024/ Oct 31, 2024	PT Bandara Internasional Batam	119,000,000

Berikut tanggal laporan penilaian dalam menentukan nilai wajar investasi jangka panjang lainnya berdasarkan penilai Iskandar dan Rekan dengan Patner Radithe Pramudito, S.E., M.Ec. Dev., MAPPI (Cert.) pada tanggal 31 Desember 2023:

The following is the date of the appraisal report in determining the fair value of other long-term investments based on appraiser Iskandar dan Rekan with Partner Radithe Pramudito, S.E., M.Ec. Dev., MAPPI (Cert.) as of December 31, 2023:

Tanggal Laporan/ Report date	Tanggal Penilaian/ Valuation date	Entitas/ Entities	Nilai Wajar/ Fair Value
25 Mar 2024/ Mar 25, 2024	30 Nov 2023/ Nov 30, 2023	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	655,200,000
28 Mar 2024/ Mar 28, 2024	30 Nov 2023/ Nov 30, 2023	PT Citra Marga Lintas Jabar	238,000,000
25 Mar 2024/ Mar 25, 2024	30 Nov 2023/ Nov 30, 2023	PT Bandara Internasional Batam	113,000,000

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Metode yang digunakan untuk pendekatan pendapatan adalah metode diskonto untuk pendapatan mendatang dan metode yang digunakan untuk pendekatan pasar adalah metode menghitung nilai dengan rasio penilaian dari perusahaan pembanding yang sahamnya telah memiliki nilai pasar.

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda yang bergerak dalam bidang jasa berupa perusahaan jalan tol Balikpapan - Samarinda, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PT Trans Pacific Petrochemical Indotama

PT Trans Pacific Petrochemical Indotama bergerak dalam bidang produksi produk aromatik dan bahan bakar minyak. Kepemilikan saham di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ini merupakan hasil konversi atas piutang Perusahaan di Wijaya Karya - Adhi Karya - Inti Karya Persada Teknik JO (WAIJO).

PT Jasamarga Bali Tol

PT Jasamarga Bali Tol yang bergerak dalam bidang perusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Bali, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha lainnya.

PT Citra Marga Lintas Jabar

PT Citra Marga Lintas Jabar yang bergerak dalam bidang jasa berupa jalan tol, yang meliputi penyelenggaraan proyek jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang di bidang jalan tol lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjalankan usaha di bidang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol.

PT Air Minum Indonesia

PT Air Minum Indonesia yang bergerak dalam bidang Sistem Penyediaan Air Minum yang meliputi kegiatan kelembagaan, pendanaan, dan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan serta usaha-usaha lainnya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha utama PT Air Minum Indonesia.

PT Bandara International Batam

PT Bandara International Batam bergerak dalam bidang pengembangan, pengoperasian dan pengelolaan bandar udara di bawah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The method used for the income approach is the discount method for future income, and the method used for the market approach is the method of calculating the value with the valuation ratio of the comparison company whose shares already have market value.

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda is engaged in the form of concession Balikpapan - Samarinda, which includes financing, technical planning, construction, operation and maintenance of highways, as well as other business in accordance with the legal provisions of the legislation.

PT Trans Pacific Petrochemical Indotama

PT Trans Pacific Petrochemical Indotama is engaged in the production of aromatic products and fuel oil. Shareholding in PT Trans Pacific Petrochemical Indotama represents the conversion of receivables of the Company in Wijaya Karya - Adhi Karya - Inti Karya Persada Teknik JO (WAIJO).

PT Jasamarga Bali Tol

PT Jasamarga Bali Tol is engaged in toll concession Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Bali toll road. It includes the financing, planning, engineering, construction, operation and maintenance of toll roads, as well as other business.

PT Citra Marga Lintas Jabar

PT Citra Marga Lintas Jabar, is engaged in toll road services, which includes implementing toll road projects, investing and supporting services in other toll road sectors based on applicable legal provisions, as well as conducting business in other fields related to toll road operation.

PT Air Minum Indonesia

PT Air Minum Indonesia is engaged in Water Supply System which includes institutional, financial and technical planning, construction, operation and maintenance as well as other businesses that are directly related to its main business activity of PT Air Minum Indonesia.

PT Bandara International Batam

PT Bandara International Batam is engaged in the development, operation and management of airports under the Indonesian Standard Classification of Business Fields.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT Jasamarga Gedebage Cilacap

PT Jasamarga Gedebage Cilacap bergerak dalam bidang usaha jalan tol, meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.

PT Jasamarga Akses Patimban

PT Jasamarga Akses Patimban bergerak dalam bidang infrastruktur jalan tol.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasamarga Akses Patimban No. 32 tanggal 16 Januari 2023 dari Notaris Cindy Annisa Mulia, S.H., M.Kn. di Jakarta. Perusahaan melakukan penempatan saham sebesar Rp1.500.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasamarga Akses Patimban No. 16 tanggal 27 Desember 2024 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. di Jakarta. Para pemegang saham lain melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor ke PT Jasamarga Akses Patimban sebesar Rp40.222.000.

Atas transaksi ini persentase kepemilikan Perusahaan di PT Jasamarga Akses Patimban terdilusi dari sebesar 5,00% menjadi 0,88%.

PT Karya Logistik Nusantara

PT Karya Logistik Nusantara bergerak dalam bidang usaha logistik.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Karya Logistik Nusantara No. 12 tanggal 2 Februari 2023 dari Notaris Rosida Rajaguguk-Siregar, SH., M.Kn., di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0011167.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 10 Februari 2023. Perusahaan melakukan penempatan saham sebesar Rp15.000.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Logistik Nusantara No. 55 tanggal 2 Juli 2024 dari Jimmy Tanal, SH., M.Kn., di Jakarta. Para pemegang saham lain melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor ke PT Karya Logistik Nusantara sebesar Rp22.500.000.

Atas transaksi ini persentase kepemilikan Perusahaan di PT Karya Logistik Nusantara terdilusi dari sebesar 17,65% menjadi 13,95%.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

PT Jasamarga Gedebage Cilacap

PT Jasamarga Gedebage Cilacap is engaged in toll road business, covering funding, engineering planning, construction, operation and maintenance of toll roads.

PT Jasamarga Akses Patimban

PT Jasamarga Access Patimban operates in the toll road infrastructure sector.

Based on the Deed of Establishment of PT Jasamarga Akses Patimban No. 32 dated January 16, 2023 from Notary Cindy Annisa Mulia, S.H., M.Kn. in Jakarta. The company placed shares amounting to Rp1,500,000.

Based on the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasamarga Akses Patimban No. 16 dated December 27, 2024, by Notary Rina Utami Djauhari, S.H. in Jakarta. Other shareholders increased the issued and paid-up capital to PT Jasamarga Akses Patimban by Rp40,222,000.

Due to this transaction the Company's percentage of ownership in PT Jasamarga Akses Patimban is 5.00% was diluted to 0.88%.

PT Karya Logistik Nusantara

PT Karya Logistik Nusantara is engaged logistics.

Based on the Deed of Establishment of PT Karya Logistik Nusantara No. 12 dated February 2, 2023 from Notary Rosida Rajaguguk-Siregar, SH., M.Kn., in Jakarta and has received Notification of Changes in the Company Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0011167.AH.01.01.TAHUN 2023 dated February 10, 2023. The Company will issue shares amounting to Rp15,000,000.

Based on the Deed Meeting of Shareholders of PT Karya Logistik Nusantara No. 55 dated July 2, 2024, by Jimmy Tanal, S.H., M.kn., in Jakarta. Other shareholders increased the issued and paid-up capital to PT Karya Logistik Nusantara by Rp22,500,000.

Due to this transaction the Company's percentage of ownership in PT Karya Logistik Nusantara is 17.65% was diluted to 13.95%.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

24. Aset Takberwujud

24. Intangible Assets

	2024				Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp		
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Hak Pengusahaan Jalan Tol - Seksi 1 (Catatan 53)	4,498,087,158	--	--	--	4,498,087,158	Concession Rights - Toll Section 1 (Note 53)
Pengelolaan Air	--	--	--	1,754,265,862	1,754,265,862	Water Treatment
Merek Dagang	114,830,544	--	(1,400,000)	--	113,430,544	Trademark
Perangkat Lunak	95,007,067	12,020,214	--	17,579,304	124,606,585	Software
Hak Paten	188,000,000	--	--	--	188,000,000	Patent
Aset Takberwujud dalam Pembangunan						Intangible Asset Under Development
Hak Pengusahaan dalam Penyelesaian - Seksi 2 (Catatan 53)	1,792,457,340	940,484,813	--	--	2,732,942,153	Concession Rights - Toll Section 2 (Note 53)
Pengelolaan Air (Catatan 53)	1,080,672,379	673,593,483	--	(1,754,265,862)	--	Water Treatment (Note 53)
	<u>7,769,054,488</u>	<u>1,626,098,510</u>	<u>(1,400,000)</u>	<u>17,579,304</u>	<u>9,411,332,302</u>	
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Hak Pengusahaan Jalan Tol - Seksi 1 (Catatan 53)	81,629,362	36,857,855	--	--	118,487,217	Concession Rights - Toll Section 1 (Note 53)
Pengelolaan Air	--	2,101,097	--	--	2,101,097	Water Treatment
Perangkat Lunak	31,727,580	23,820,156	--	4,166,617	59,714,353	Software
Hak Paten	53,843,516	38,422,417	--	--	92,265,933	Patent
	<u>167,200,458</u>	<u>101,201,525</u>	<u>--</u>	<u>4,166,617</u>	<u>272,568,600</u>	
Nilai Tertecat	<u>7,601,854,030</u>				<u>9,138,763,702</u>	Carrying Value
2023						
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp		
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Hak Pengusahaan Jalan Tol (Catatan 53)	4,498,087,158	--	--	4,498,087,158		Concession Rights - Toll Section 1 (Note 53)
Merek Dagang	114,830,544	--	--	114,830,544		Trademark
Perangkat Lunak	28,033,493	66,973,574	--	95,007,067		Software
Hak Paten	188,000,000	--	--	188,000,000		Patent
Aset Takberwujud dalam Pembangunan						Intangible Assets Under Development
Hak Pengusahaan dalam Penyelesaian - Seksi 2 (Catatan 52)	1,315,723,497	476,733,843	--	1,792,457,340		Concession Rights - Toll Section 2 (Note 53)
Pengelolaan Air (Catatan 53)	403,016,506	677,655,873	--	1,080,672,379		Water Treatment
	<u>6,547,691,198</u>	<u>1,221,363,290</u>	<u>--</u>	<u>7,769,054,488</u>		
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Hak Pengusahaan Jalan Tol - Seksi 1 (Catatan 53)	35,537,919	46,091,443	--	81,629,362		Concession Rights - Toll Section 1 (Note 53)
Perangkat Lunak	28,001,675	3,725,905	--	31,727,580		Software
Hak Paten	--	53,843,516	--	53,843,516		Patent
	<u>63,539,594</u>	<u>103,660,864</u>	<u>--</u>	<u>167,200,458</u>		
Nilai Tertecat	<u>6,484,151,604</u>			<u>7,601,854,030</u>		Carrying Value

Pada tahun 2024, WIKA Gedung mereklasifikasi perlengkapan kantor (Catatan 20) menjadi aset takberwujud sebesar Rp13.412.687.

On 2024, WIKA Gedung reclassified office equipment (Note 20) into intangible assets amounting to Rp13,412,687.

Merek dagang yang dimiliki oleh Winner terdiri atas WIKA Solar Water Heater (SWH) dan perjanjian jaringan distribusi ke seluruh Indonesia.

Trademark of Winner consists of WIKA Solar Water Heater (SWH) and agreement distribution channels throughout Indonesia.

Hak paten yang dimiliki oleh WIKA Bitumen dengan Sertifikat Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IDP00007529 merupakan paten atas proses pemurnian aspal buton sistem umpan-balik dengan *solid separator* dan *dryer* yang disempurnakan. Perlindungan Paten tersebut diberikan untuk 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal 3 Desember 2018.

The patent owned by WIKA Bitumen with a Patent Certificate from the Ministry of Law and Human Rights Number IDP00007529 is a patent for the buton asphalt purification process with a feedback system with an improved solid separator and dryer. Patent protection is granted for 20 years from the date of filing, which is December 3, 2018.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Beban amortisasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp101.201.525 dan Rp103.660.864 yang dialokasikan pada beban pokok pendapatan (Catatan 45).

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Amortization expenses for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp101,201,525 and Rp103,660,864, respectively, which are allocated to cost of revenues (Note 45).

25. Aset Lain-lain

a. Aset Lancar Lain-lain

Aset Lancar Lain-lain merupakan aset tersedia untuk dijual, yaitu pabrik di Balaraja dengan tanah seluas 56.875 meter persegi sebesar Rp267.906.166 milik WIKON, yang direncanakan akan dijual (Catatan 20).

b. Aset Tidak Lancar Lain-lain

	2024 Rp	2023 Rp
Aset Hak Guna-Bersih	476,372,115	668,176,636
Dana yang Dibatasi		
Penggunaannya	93,664,952	33,192,835
Beban Ditangguhkan	27,545,490	20,634,525
Peralatan dan Perlengkapan		
Operasional	25,966,288	30,612,551
Aset Tidak Digunakan	19,888,909	31,105,162
Beban Tanggahan		
Sukuk Mudharabah	6,724,030	10,187,686
Retensi Bank	--	11,355,681
Lain-lain	27,989,439	33,482,263
Total	678,151,223	838,747,339

• **Aset Hak Guna**

Mutasi aset hak guna untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Pelepasan Entitas Anak/ Divestment of Subsidiary	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	638,301,602	2,275,360	--	(240,324,434)	400,252,528	Land
Peralatan	128,838,269	--	--	--	128,838,269	Equipment
Bangunan	93,746,964	7,748,257	--	--	101,495,221	Buildings
	<u>860,886,835</u>	<u>10,023,617</u>	<u>--</u>	<u>(240,324,434)</u>	<u>630,586,018</u>	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Tanah	64,483,958	28,228,262	--	(92,712,220)	--	Land
Peralatan	98,811,920	17,747,928	--	--	116,559,848	Equipment
Bangunan	29,414,321	8,239,734	--	--	37,654,055	Building
	<u>192,710,199</u>	<u>54,215,924</u>	<u>--</u>	<u>(92,712,220)</u>	<u>154,213,903</u>	
Nilai Tercatat	<u>668,176,636</u>				<u>476,372,115</u>	Carrying Value

25. Other Assets

a. Other Current Assets

Other Current Assets is assets available for sale, is factory assets in Balaraja with a land area of 56,875 square meters amounting to Rp267,906,166 on behalf of WIKON, which are planned to be sold (Note 20).

b. Other Non Current Assets

Right-of-Use Assets-Net

*Restricted Funds
 Deferred Expenses
 Operating Equipment
 and Supplies
 Unused Asset
 Sukuk Mudharabah
 Deferred Expenses
 Bank Retention
 Others
 Total*

• **Right-of-use Assets**

The movements of right-of-use assets for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	629,663,807	8,637,795		--	638,301,602	Land
Peralatan	192,441,083	--	--	(63,602,814)	128,838,269	Equipment
Bangunan	94,288,398	860,403		(1,401,837)	93,746,964	Buildings
	<u>916,393,288</u>	<u>9,498,198</u>		<u>(65,004,651)</u>	<u>860,886,835</u>	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Tanah	48,889,654	15,594,304	--	--	64,483,958	Land
Peralatan	130,994,919	23,943,238		(56,126,237)	98,811,920	Equipment
Bangunan	22,230,840	7,393,757		(210,276)	29,414,321	Building
	<u>202,115,413</u>	<u>46,931,299</u>		<u>(56,336,513)</u>	<u>192,710,199</u>	
Nilai Tercatat	<u>714,277,875</u>				<u>668,176,636</u>	Carrying Value

Aset hak guna tanah merupakan sewa Hotel Grand Inna Kuta (GIK), Inna Sindhu Bali Beach, dan Inaya Putri Bali, milik HIPRO, dengan jangka waktu 20 - 33 tahun.

Right-of-use assets land represent the land lease of Hotel Grand Inna Kuta (GIK), Inna Sindhu Bali Beach and Inaya Putri Bali, belongs to HIPRO, with period of 20 - 33 years.

Sejak 14 November 2024, HIPRO tidak dikonsolidasi lagi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 1.e)

Since November 14, 2024, HIPRO no longer consolidated into the Company's consolidated financial statements (Note 1.e).

Aset hak guna tanah dan bangunan KSO Laswi merupakan aset bersama atas kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia yang menjadi kawasan bisnis terletak di Jalan Laswi, Kelurahan Kacapiring, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

The land and building use rights assets of KSO Laswi are joint assets in collaboration with PT Kereta Api Indonesia which is a business area located on Jalan Laswi, Kacapiring Village, Batununggal, Bandung City, West Java.

WIKA Beton melakukan reklasifikasi atas aset hak guna peralatan dan bangunan pada tahun 2023 menjadi aset tetap berupa peralatan dan bangunan masing-masing sebesar Rp7.476.577 dan Rp1.191.561 (Catatan 20).

WIKA Beton reclassified right-of-use assets plant equipment and building in 2023 into fixed assets in the form of equipment and building amounting to Rp7,476,577 and Rp1,191,561 (Note 20).

- Beban ditangguhkan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan kawasan-kawasan pada WIKA Realty yang masih dalam proses persiapan dan pengurusan perizinan.
- Peralatan dan perlengkapan operasional yang digunakan untuk operasional hotel yang antara lain terdiri dari sendok, garpu, piring, gelas, cangkir dan sejenisnya serta linen.
- Aset tidak digunakan merupakan alat proyek yang sudah tidak digunakan dan masih memiliki nilai manfaat.
- Retensi bank merupakan dana milik WIKA Realty yang ditahan oleh bank karena belum selesainya pengurusan sertifikat.
- Dana yang dibatasi penggunaannya WIKA Beton merupakan rekening giro yang penggunaannya dibatasi oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk terkait dengan pinjaman terhadap fasilitas Pembiayaan Investasi iB (Catatan 37).
- *Deferred expenses represent costs incurred for the development areas of WIKA Realty that are still in the process for preparation and administration.*
- *Operational equipment and supplies used for hotel operations which include spoons, forks, plates, glasses, cups and the like as well as linen.*
- *Unused assets are project tools that are no longer in use and still have value benefits.*
- *Bank retention is a fund belong to WIKA Realty held by bank due to the completion of the certificate management.*
- *WIKA Beton's restricted fund is a current account whose use is restricted by PT Bank CIMB Niaga Tbk in relation to loans to the iB Investment Financing facility (Note 37).*

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- Beban tanggungan sukuk mudharabah merupakan biaya emisi yang timbul dari penerbitan sukuk mudharabah (Catatan 38) dan akan diamortisasi secara garis lurus.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- Sukuk mudharabah deferred expenses represent issuance costs arising from the issuance of sukuk mudharabah (Note 38) and will be amortized on a straight-line basis.

26. Pinjaman Jangka Pendek

Rincian pinjaman jangka pendek kepada pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi/ *Related Parties*
Pihak Ketiga/ *Third Parties*

Total

26. Short-term Loan

Details of short-term loan to related parties and third parties are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
	350,000,000	12,259,484,231
	203,143,727	5,353,649,981
Total	553,143,727	17,613,134,212

Rincian pinjaman jangka pendek berdasarkan kreditor adalah sebagai berikut:

The details of short-term loans based on creditors are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Perusahaan/ The Company		
Pihak Berelasi (Catatan 52)/ Related Parties (Note 52)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	7,880,464,757
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	--	1,500,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	990,000,000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia Eximbank	--	734,000,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	500,000,000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	258,000,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	155,000,000
Sub Total	--	12,017,464,757
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	--	1,475,000,000
PT Bank HSBC Indonesia	--	982,067,514
PT Bank Pan Indonesia Tbk	--	750,000,000
PT Bank DKI	--	708,226,347
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	524,964,527
PT Indonesia Infrastructure Finance	--	500,000,000
PT Bank ICBC Indonesia	--	90,000,000
PT Bank Danamon Tbk	--	43,597,101
Sub Total	--	5,073,855,489
Sub Total	--	17,091,320,246
Entitas Anak/ Subsidiaries		
Pihak Berelasi (Catatan 52)/ Related Parties (Note 52)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	200,000,000	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	95,000,000	94,687,474
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	55,000,000	117,500,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	29,832,000
Sub Total	350,000,000	242,019,474
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bank DKI	203,143,727	243,190,579
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	36,603,913
Sub Total	203,143,727	279,794,492
Sub Total	553,143,727	521,813,966
Total	553,143,727	17,613,134,212

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan

Pinjaman jangka pendek Perusahaan telah di restrukturisasi menjadi pinjaman jangka panjang (Catatan 37) berdasarkan Akta Perjanjian Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit untuk Tujuan Restrukturisasi No.9 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta.

WIKA Beton

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 7 Juni 2024, WIKA Beton telah melakukan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan surat penawaran pemberian kredit No.CBG.CB5/SIC2.SPPK.270/2024 atas pemberian fasilitas kredit terdiri dari, Fasilitas KMK Transaksional sebesar Rp700.000.000 dan Fasilitas Non-Cash Loan sebesar Rp1.400.000.000, dengan tingkat bunga sebesar 8,00% - 8,25% per tahun.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas sejak 11 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2025.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang, persediaan, tanah dan bangunan (Catatan 6, 11, dan 20).

WIKA Beton diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* minimal sebesar 100%;
- *Debt to equity ratio* maksimal 300%; dan
- *Debt security cover ratio* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Beton telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan Rp56.687.474.

Pembayaran fasilitas utang bank yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp76.272.452 dan nihil.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pada tanggal 6 Juni 2024, WIKA Beton telah melakukan penandatanganan perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan nomor perjanjian fasilitas No.04/064-3/SP3/CB2.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The Company

The Company's short-term loans have been restructured into long-term loans (Note 37) based on the Deed of Addendum Agreement and Restatement of Credit Agreement for Restructuring Purposes No. 9 dated January 23, 2024 made in presence of Notary Fathiah Helmi, S.H., in Jakarta.

WIKA Beton

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On June 7, 2024, WIKA Beton has approved the extension of the credit facility to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the offer credit letter No.CBG.CB5/SIC2.SPPK.270/2024 for the provision of credit facilities consisting of, Transactional KMK Facility amounting to Rp700,000,000, Non-Cash Loan Facility amounting to Rp1,400,000,000, with interest rate at 8.00% - 8.25% per year.

The validity of the agreement according to the extension of facilities is from June 11, 2024 until June 10, 2025.

The loan is guaranteed by receivables, inventories, land and building (Notes 6, 11 and 20).

WIKA Beton is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio* of at least 100%;
- *Debt to equity ratio* maximum of 300%; and
- *Debt security cover ratio* of at least 100%.

As of December 31, 2024, WIKA Beton has complied with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil and Rp56,687,474, respectively.

Payments made for bank loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp76,272,452 and nil, respectively.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

On June 6, 2024, WIKA Beton entered into a facility agreement with PT Bank Syariah Indonesia Tbk formerly based on the facility agreement No.04/064-3/SP3/CB2.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Fasilitas kredit yang diberikan berupa fasilitas Modal Kerja Transaksional sublimit fasilitas *Trade Financing* yang terdiri atas fasilitas LC atau SKBDN dan Bank Garansi dengan limit sebesar Rp200.000.000.

Tingkat bunga yang digunakan akan ditentukan dan diatur lebih lanjut pada setiap penarikan pembiayaan melalui akad pembiayaan Musyarakah.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas sejak 6 Juni 2024 sampai dengan 6 Juni 2025.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang (Catatan 6).

WIKA Beton diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* minimal 100%;
- *Debt to equity ratio* maksimal 300%; dan
- *Debt security cover ratio* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Beton telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan Rp14.500.000.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKAGedung)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Berdasarkan Surat No. 04/130-3/SP3/CB2 Tanggal 8 November 2024 WIKAGedung menerima fasilitas kredit *Non-Cash Loan* dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Fasilitas *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* dengan limit maksimal masing-masing sebesar Rp300.000.000 dan Rp400.000.000.

Masa berlaku kredit sampai dengan 28 November 2025.

Selama masa pembiayaan WIKAGedung wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal 100%;
- *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 300%; dan
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 100%

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The credit facility provided is in the form of a *Transactional Working Capital Facility sub-limit Trade Financing Facility* consisting of LC or SKBDN *Facilities* and *Bank Guarantees* with a limit of Rp200,000,000.

The interest rate used will be further determined and regulated at each withdrawal of financing through a *Musyarakah financing agreement*.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is from June 6, 2024 until June 6, 2025.

The loan is collateralized with receivables (Note 6).

WIKAGedung is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio* of at least 100%;
- *Debt to equity ratio* at maximum 300%; and
- *Debt security cover ratio* at least 100%.

As of December 31, 2024, WIKAGedung has complied with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil and Rp14,500,000, respectively.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKAGedung)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Based on Letter No. 04/130-3/SP3/CB2 dated November 8, 2024 WIKAGedung received *Non-Cash Loan credit facility* from PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Cash Loan and *Non-Cash Loan facilities* with a maximum limit of Rp300,000,000 and Rp400,000,000, respectively.

The credit validity period until November 28, 2025.

WIKAGedung required maintaining financial performance indicators as follows:

- *Current Ratio* of at least 100%;
- *Debt to Equity Ratio* (DER) maximum of 300%; and
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 100%.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Gedung telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp55.000.000 dan Rp103.000.000.

Pembayaran fasilitas utang bank yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp119.886.818 dan Rp445.000.000.

PT Bank DKI

Pada tanggal 6 November 2023, WIKA Gedung telah melakukan penandatanganan perpanjangan perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank DKI berdasarkan perjanjian fasilitas No. 1763/SPPK/925/XI/2023.

Fasilitas *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* dengan limit maksimal masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan Rp200.000.000.

Tujuan fasilitas ini Untuk kebutuhan modal kerja WIKA Gedung melalui pembiayaan terhadap *supplier* dari obligor.

Masa berlaku kredit sampai dengan 7 November 2025.

Selama masa pembiayaan WIKA Gedung wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal 1 kali;
- *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 4 kali; dan
- *Debt Service Coverage* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Gedung telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp22.000.000 dan Rp26.500.000.

Pembayaran fasilitas utang bank yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp47.800.000 dan nihil.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Addendum perjanjian kredit Modal Kerja No. CBG.CB5/SIC2.SPPK.269/2024 tanggal 7 Juni 2024 WIKA Gedung memperoleh fasilitas kredit dengan persyaratan sebagai berikut:

- Fasilitas KMK Transaksional memiliki batas kredit sebesar Rp95.000.000 dengan jangka waktu dari 7 Juni 2024 hingga 10 Juni 2025. Tingkat bunga

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

As of December 31, 2024, WIKA Gedung has complied with the terms and conditions of the loans

The bank loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp55,000,000 and Rp103,000,000, respectively.

Payments made for bank loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp119,886,818 and Rp445,000,000, respectively.

PT Bank DKI

On November 6, 2023, WIKA Gedung has signed into a facility agreement extension with PT Bank DKI formerly based on the facility agreement No. 1763/SPPK/925/XI/2023.

Cash Loan and Non-Cash Loan facilities with a maximum limit of Rp50,000,000 and Rp200,000,000, respectively.

The purpose of this facility is for WIKA Gedung's working capital needs through financing to suppliers from obligors.

The credit validity period until November 7, 2025.

WIKA Gedung shall maintain financial performance indicators as follows:

- *Current Ratio* of at least 1 time;
- *Debt to Equity Ratio* (DER) maximum of 4 time; and
- *Debt Service Coverage* of at least 100%.

As of December 31, 2024, WIKA Gedung has complied with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp22,000,000 and Rp26,500,000, respectively.

Payments made for bank loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp47,800,000 and nil, respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on Addendum Credit Working Capital agreement No. CBG.CB2/SCD.SPPK.269/2024 dated June 7, 2024 WIKA Gedung obtain credit facility with the following terms and conditions:

- The Transactional Working Capital Facility has a credit limit of Rp95,000,000 with a term from June 7, 2024, to June 10, 2025. The interest rate

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ditetapkan sebesar 8,50% per tahun. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk menyediakan tambahan modal kerja.

- Fasilitas *Non Cash Loan* memiliki batas kredit sebesar Rp700.000.000 dengan jangka waktu dari 7 Juni 2024 hingga 10 Juni 2025. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk Bank Garansi dan *Letter of Credit* (L/C).
- Fasilitas *Supplier Financing* memiliki batas kredit sebesar Rp400.000.000 dengan jangka waktu dari 7 Juni 2024 hingga 10 Juni 2025. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk memberikan pembiayaan kepada pemasok/subkontraktor berdasarkan akseptasi faktur tanpa hak regres.
- Fasilitas *Invoice Financing* memiliki batas kredit sebesar Rp300.000.000 dengan jangka waktu dari 11 Juni 2023 hingga 10 Juni 2024 dan tidak diperpanjang. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk mempercepat penerimaan dana hasil penjualan atas proyek IKN, Bank Indonesia, dan Bank BUMN.

Joint collateral dan *cross default* dengan seluruh fasilitas kredit WIKA Gedung di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Selama masa pembiayaan WIKA Gedung wajib menjaga rasio keuangan yaitu *current ratio* minimal sebesar 100%, *leverage* maksimal 500% dan *EBITDA to interest* minimal sebesar 200%. Memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas perubahan modal kerja dan penggantian pengurus.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Gedung telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank Fasilitas KMK Transaksional per 31 Desember 2024 and 2023 masing-masing adalah sebesar Rp95.000.000 dan nihil.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. 108 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan persetujuan perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional No. COB3/4/057/R tanggal 28 Mei 2024 WIKA Gedung memperoleh fasilitas kredit dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Fasilitas *Cash Loan* memiliki batas kredit sebesar Rp200.000.000 dengan jangka waktu dari 30 Mei 2024 hingga 29 Mei 2025. Tingkat bunga ditetapkan sebesar 9,75% per tahun.
- b. Fasilitas *Non Cash Loan* memiliki batas kredit sebesar Rp550.000.000 dengan jangka waktu dari 30 Mei 2024 hingga 29 Mei 2025. Tingkat bunga ditetapkan sebesar 9,75% per tahun.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

is set at 8.50% per annum. The purpose of this facility is to provide additional working capital.

- The *Non-Cash Loan Facility* has a credit limit of Rp700,000,000 with a term from June 7, 2024, to June 10, 2025. The purpose of this facility is for Bank Guarantees and Letters of Credit (L/C).
- The *Supplier Financing Facility* has a credit limit of Rp400,000,000 with a term from June 7, 2024, to June 10, 2025. The purpose of this facility is to provide financing for suppliers/subcontractors based on invoice acceptance on a without recourse basis.
- The *Invoice Financing Facility* has a credit limit of Rp300,000,000 with a term from June 11, 2023, to June 10, 2024. The purpose of this facility is to provide financing for accelerating receipts and revenue earned for project IKN, Central Bank of Indonesia, and SOE Banks.

Joint collateral and *cross default* with all credit facilities WIKA Gedung in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

During the period of financing, WIKA Gedung is required to maintain the financial ratio of the current ratio of at least 100%, maximum leverage of 500% and *EBITDA to interest* at least 200%. Notify in writing to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk upon changes in working capital and change of management.

As of December 31, 2024, WIKA Gedung has complied with the terms and conditions of the loans

Balance of Transactional Working Capital Facility bank loan as of December 31, 2024 and 2023 is amounted to Rp95,000,000 and nil.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on Transactional of Working Capital Capital Agreement No. 108 dated May 30, 2016 made in the presence of Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and approval of the Extension of Transactional of Working Capital Capital Facility No. COB3/4/057/R dated May 28, 2024 WIKA Gedung obtain credit facility with the following terms and conditions:

- a. The *Cash Loan Facility* has a credit limit of Rp200,000,000 with a term from May 30, 2024, to May 29, 2025. The interest rate is set at 9.75% per annum.
- b. The *Non Cash Loan Facility* has a credit limit of Rp550,000,000 with a term from May 30, 2024, to May 29, 2025. The interest rate is set at 9.75% per annum.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang tagihan bruto dan tagihan termin yang telah diikat secara Cessie (Catatan 6).

WIKA Gedung diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* minimal 1 kali;
- *Debt to equity ratio* maksimal 4 kali; dan
- *Debt service coverage* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Gedung telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan nihil.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 18 Juli 2014 WIKA Realty menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. 078/PPWK/CBD/III/2014, dan telah diubah terakhir pada tanggal 7 Juni 2023 berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBG.CB1/SPD.SPPK.094/2023 dan Addendum XII Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/166/KMK/14 pada tanggal 9 Juni 2023. WIKA Realty memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja transaksi pinjaman khusus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebelumnya sebesar Rp200.000.000 dengan suku bunga sebesar 9,00% p.a., dan masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan tanggal 10 Juni 2024.
- Fasilitas *Non-Cash Loan* sebesar Rp80.000.000 bertujuan untuk Bank Garansi (BG) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan masa berlaku sampai dengan 10 Juni 2024.
- Fasilitas *Supplier Financing* sebesar Rp50.000.000 dengan tingkat bunga 8,25% per tahun, masa berlaku sampai dengan 10 Juni 2024.

Jaminan berupa (Catatan 11 dan 20):

- 18 (delapan belas) SHMSRS berlokasi di Tamansari Semanggi Apartemen dengan nilai Rp33.040.650;
- 8 (delapan) SHMSRS berlokasi di Tamansari Semanggi Apartemen dengan nilai Rp16.030.540;
- Sebidang tanah seluas 122.593 m², yang berlokasi di Tamansari Grand Samarinda, sebesar Rp27.128.810;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The loan is collateralized with receivables, gross amount due from customers, and installment receivables projects in Connective is Cessie (Note 6).

WIKA Gedung is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio* of at least 1 time;
- *Debt to equity ratio* at maximum 4 time; and
- *Debt service coverage* at least 100%.

As of December 31, 2024, WIKA Gedung has complied with the terms and conditions of the loans.

Balance of bank loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp200,000,000 and nil, respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On July 18, 2014 WIKA Realty received a working capital loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with Letter of Credit (SPPK) No. 078 / PPWK / CBD / III / 2014, and the latest modified on June 7, 2023 based on Letter of Credit (SPPK) No. CBG.CB1/SPD.SPPK.094/2023 with Addendum XII of Working Capital Credit Agreement No. CRO.KP/166/KMK/14 on June 9, 2023. WIKA Realty obtain credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with detail as follows:

- Working Capital Loan Facility loan of special loan transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp200,000,000 with an interest rate of 9.00% p.a and duration of the agreement is until the date of June 10, 2024.
- Non-Cash Loan Facilities of Rp80,000,000 aims for Guarantee Bank, and Letter of Credit with the validity period up to June 10, 2024.
- The Supplier Financing Facility of Rp50,000,000 with interest rate 8.25% per annum, period of validity until June 10, 2024.

Collateral (Notes 11 and 20):

- 18 (eighteen) SHMSRS located in Tamansari Semanggi Apartment with a value of Rp33,040,650;
- 8 (eight) SHMSRS located in Tamansari Semanggi Apartment with a value of Rp16,030,540;
- A plot of land covering an area of 122,593 sqm, located on Tamansari Grand Samarinda amounting to Rp27,128,810;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- Persediaan WIKA Realty berupa unit-unit properti yang telah diikat Jaminan Fidusia sebesar Rp283.800.000; dan
- *Joint Collateral* dan *Cross Default* dengan seluruh fasilitas kredit atas nama WIKA Realty di Bank Mandiri.

Atas seluruh jaminan yang diserahkan wajib diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta atas bangunan yang *insurable* diasuransikan dengan *Banker's clause* Bank Mandiri melalui perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri. Seluruh biaya yang timbul menjadi beban WIKA Realty.

Negative Covenant dalam perjanjian kredit Bank Mandiri antara lain:

- Memperoleh fasilitas kredit dari bank/ kreditor lain kecuali dalam transaksi dagang yang wajar. Namun apabila setelah memperoleh fasilitas kredit dari bank/kreditor lain seluruh *financial covenant* terpenuhi, maka WIKA Realty cukup memberitahukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah kejadian;
- Melakukan akuisisi, divestasi, atau merger, investasi diluar *core business* WIKA Realty;
- Memindahtangankan dan/atau menjaminkan barang jaminan, kecuali dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa apartemen, ruko, kios kantor; dan
- Mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan WIKA Realty, yang telah dijaminkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada pihak lain.

Financial Covenant dalam perjanjian kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk antara lain:

- *Current Ratio* $\geq 100\%$;
- *Debt Equity Ratio* a.d. *interest bearing* $\leq 250\%$; dan
- *Debt service Coverage Ratio* (atas dasar CFADS/(angsuran pokok + bunga) $\geq 110\%$.

Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar nihil dan Rp38.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2024, pinjaman tersebut telah lunas.

WIKA IKON

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pada tanggal 28 Februari 2023, WIKA IKON melakukan perjanjian dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan menandatangani fasilitas perbankan dengan No. 364/S/CBD/CB1/X/2023.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- WIKA Realty's inventories are in the form of property units that had been bound by Fiduciary Collateral amounting to Rp283,800,000; and
- Joint Collateral and Cross Default with all credit facilities on behalf of the Company at Bank Mandiri.

All guarantees submitted must be bound in accordance with applicable laws and regulations for insurable buildings insured with Banker's clause Bank Mandiri through a partner insurance company Bank Mandiri. All costs incurred are borne by WIKA Realty.

Negative Covenant in credit agreement of Bank Mandiri, among others:

- Obtain credit facilities from other banks/creditors except in fair trade transactions. However, if after obtaining credit facilities from other banks/creditors all financial covenants are met, then WIKA Realty only needs to notify PT Bank Mandiri (Persero) Tbk no later than 30 calendar days after the incident;
- Acquire, divest, or merge, invest outside WIKA Realty's core business;
- Transferring and/or pledging collateral, except in transactions of buying and selling or renting apartments, shop houses, office kiosks; and
- Bind as guarantor of debt or pledge WIKA Realty's assets, which had been pledged to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to other parties.

Financial Covenant in credit agreement of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk among others:

- *Current Ratio* $\geq 100\%$;
- *Debt Equity Ratio* a.d. *interest bearing* $\leq 250\%$; and
- *Debt service Coverage Ration* (based EBITDA/(principal+interest) $\geq 110\%$.

The bank loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil and Rp38,000,000.

As of December 31, 2024 the loan has fully paid.

WIKA IKON

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

On February 28, 2023 WIKA IKON made an agreement with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by signing the Agreement for Banking Facilities No. 364/S/CBD/CB1/X/2023.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit maksimal
Rp165.000.000 dengan bunga sebesar 8,5% per
tahun.

Masa berlaku kredit sampai dengan 24 Januari 2025.

WIKA IKON wajib memenuhi persyaratan menjaga
rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal 100%;
- *Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 500%; dan
- *Internal Rate of Return (IRR)* minimal 100%.

Fasilitas ini dijamin dengan tagihan termin atau
pembayaran yang akan diterima (Catatan 6).

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA IKON tidak
memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan, *Current
Ratio* dan *ISCR*. Bank BTN memberikan persetujuan
atas tidak terpenuhinya persyaratan keuangan ini
sesuai dengan Surat No. 364/S/CBD/CB1/X/2023
tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pemenuhan Rasio
Keuangan untuk Laporan Keuangan *Inhouse*
per 31 Desember 2024.

Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023
masing-masing sebesar nihil dan Rp29.832.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah
sebesar Rp29.832.000 dan Rp18.222.010.

PT Bank DKI

Berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit
Sementara No.2006/SPPK/925/XII/2024 tanggal
27 Desember 2024/ untuk fasilitas pinjaman kredit
modal kerja Aflopend (Restrukturisasi) sebesar
Rp181.143.726.

Masa berlaku kredit sampai dengan 31 Maret 2025.

Fasilitas ini WIKA IKON wajib menyerahkan piutang
usaha dan persediaan, serta wajib memenuhi
persyaratan menjaga rasio keuangan sebagai
berikut:

- *Current Ratio* minimal 100%;
- *Debt to Equity Ratio* maksimal 250%; dan

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA IKON tidak
memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan, *Current
Ratio* dan *DSCR*.

Pada tanggal 31 Desember 2023, WIKA IKON tidak
memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan, *Current
Ratio* dan *DSCR*. Bank DKI memberikan persetujuan
atas tidak terpenuhinya persyaratan keuangan ini
sesuai dengan Surat No. 1722/SPPK/925/X/2023

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

*Working Capital Credit Facility with a maximum limit
of Rp165,000,000 with an interest of 8.5% per year.*

The credit validity period until January 24, 2025.

*WIKA IKON is required to fulfill certain financial
ratios requirements as follows:*

- *Current Ratio is no less than 100%;*
- *Debt to Equity Ratio is no more than 500%; and*
- *Internal Rate of Return (IRR) at minimum of
100%.*

*This facility is guaranteed by the term bill or
payment that will be received (Note 6).*

*As of December 31, 2024, WIKA IKON did not meet
the required financial ratios, Current Ratio and ISCR.
Bank BTN gave its approval for the failure to meet
these financial requirements in accordance with
Letter No. 364/S/CBD/CB1/X/2023 dated October 24,
2023 concerning Fulfillment of Financial Ratios for
Inhouse Financial Reports as of December 31, 2024.*

*The bank loan balance as of December 31, 2024 and
2023 amounted to nil and Rp29,832,000,
respectively.*

*Payments made for the years ended December 31,
2024 and 2023 amounted to Rp29,832,000 and
Rp18,222,020.*

PT Bank DKI

*Based on the Temporary Credit Extension Approval
Letter No. 2006/SPPK/925/XII/2024 dated December
27, 2024, for the Aflopend working capital loan
(Restructuring) facility amounting to Rp 181,143,726.*

The credit validity period until December 31, 2024.

*Under this facility, WIKA IKON is required to pledge
its trade receivables and inventory, as well as comply
with the following financial ratio requirements:*

- *Current Ratio minimum of 100%;*
- *Debt to Equity Ratio maximum of 250%; and*

*As of December 31, 2023, WIKA IKON did not meet
the required financial ratios, Current Ratio and
DSCR.*

*As of December 31, 2023, WIKA IKON did not meet
the required financial ratios, Current Ratio and
DSCR. Bank DKI gave its approval for the failure to
meet these financial requirements in accordance with
Letter No. 1722/SPPK/925/X/2023 dated*

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pemenuhan Rasio
 Keuangan untuk Laporan Keuangan *Inhouse*
 per 31 Desember 2023.

Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023
 masing-masing sebesar Rp181.143.727 dan
 Rp216.690.579.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang
 berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-
 masing sebesar Rp36.996.000 dan Rp170.870.147.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan perpanjangan addendum 19 Surat
 Perpanjangan Fasilitas Kredit No. 246/AMD/CB/
 JKT/2021 tanggal 9 Juni 2022 dengan perpanjangan
 addendum 23 No. 10 tanggal 20 September 2023,
 WIKA IKON mendapatkan fasilitas dengan rincian
 fasilitas sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Bank Garansi/ <i>Bank Guarantee</i>	Facility Type
Plafon	Rp8,500,000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 2 Januari 2025 / <i>until January 2, 2025</i>	Time Period
Suku Bunga	9.00% p.a	Interest
Jenis Fasilitas	<i>Letter of Credit</i>	Facility Type
Plafon	Rp39,164,000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 2 Januari 2025 / <i>until January 2, 2025</i>	Time Period
Suku Bunga	9,00% per tahun/ <i>9.00% per year</i>	Interest
Jenis Fasilitas	Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus III/ <i>Special Transaction Loan Facility III</i>	Facility Type
Plafon	Rp226,000,000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 2 Januari 2025 / <i>until January 2, 2025</i>	Time Period
Suku Bunga	9,00% per tahun/ <i>9.00% per year</i>	Interest

Sampai dengan tanggal pelaporan perjanjian masih
 dalam proses perpanjangan.

WIKA IKON wajib memenuhi persyaratan menjaga
 rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal 100%;
- *Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 2,5 kali; dan
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA IKON tidak
 memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan,
Current Ratio, *Debt to Equity Ratio* dan *Debt Service
 Coverage Ratio*. Bank CIMB memberikan
 persetujuan atas tidak terpenuhinya persyaratan
 keuangan ini sesuai dengan Surat No.
 246/AMD/CB/JKT/2011 Perubahan ke-23 tanggal 20
 September 2023 tentang Pemenuhan Rasio
 Keuangan untuk Laporan Keuangan *Inhouse* per 31
 Desember 2024.

Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023
 masing-masing sebesar nihil dan Rp36.603.913.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

October 31, 2023 concerning the Fulfillment of
 Financial Ratios for *Inhouse* Financial Reports as of
 December 31, 2023.

The bank loan balance as of December 31, 2024 and
 2023 amounted to Rp181,143,727 and
 Rp216,690,579, respectively.

Payments made for the years ended December 31,
 2024 and 2023 amounted to Rp36,996,000 and
 Rp170,870,147.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Based on the extension of addendum 19 to Credit
 Facility Extension Letter No. 246/AMD/CB/
 JKT/2021 dated June 9, 2022 with extension to
 addendum 23 No. 10 dated September 20, 2023,
 WIKA IKON received a facility with details of the
 facility as follows:

Jenis Fasilitas	Bank Garansi/ <i>Bank Guarantee</i>	Facility Type
Plafon	Rp8,500,000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 2 Januari 2025 / <i>until January 2, 2025</i>	Time Period
Suku Bunga	9.00% p.a	Interest
Jenis Fasilitas	<i>Letter of Credit</i>	Facility Type
Plafon	Rp39,164,000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 2 Januari 2025 / <i>until January 2, 2025</i>	Time Period
Suku Bunga	9,00% per tahun/ <i>9.00% per year</i>	Interest
Jenis Fasilitas	Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus III/ <i>Special Transaction Loan Facility III</i>	Facility Type
Plafon	Rp226,000,000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 2 Januari 2025 / <i>until January 2, 2025</i>	Time Period
Suku Bunga	9,00% per tahun/ <i>9.00% per year</i>	Interest

Until the reporting date the agreement are still on
 the extension process.

WIKA IKON is required to fulfill certain financial
 ratios requirements as follows:

- *Current Ratio* is no less than 100%;
- *Debt to Equity Ratio* is no more than 2.5 times;
 and
- *Debt Service Coverage Ratio* at minimum of
 100%.

As of December 31, 2024, WIKA IKON did not meet
 the required financial ratios, *Current Ratio*, *Debt to
 Equity Ratio* and *Debt Service Coverage Ratio*.
 Bank CIMB gave its approval for the failure to meet
 these financial requirements in accordance with
 Letter No. 246/AMD/CB/JKT/2011 Amendment 23
 dated September 20, 2023 concerning Fulfillment of
 Financial Ratios for *Inhouse* Financial Reports as of
 December 31, 2024.

The bank loan balance as of December 31, 2024
 and 2023 amounted to nil and Rp36,603,913,
 respectively.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp36.603.913 dan Rp323.171.808.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Payments made for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp36,603,913 and Rp323,171,808, respectively.

27. Utang Usaha

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Utang Pemasok dan Utang Subkontraktor/
Supplier Payables and Subcontractor Payables
Utang Usaha/ *Account Payables-Supply Chain Financing*
Total

Utang subkontraktor merupakan utang kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang disubkontraktorkan, seperti pekerjaan *stressing*, pemasangan, biaya angkut, penurunan *beam*, biaya pematokan dan lain-lain.

Utang pemasok merupakan utang atas pembelian bahan baku untuk pelaksanaan pekerjaan/proyek, seperti pembelian semen, pasir, besi, *plat* sambung dan lain-lain.

Utang usaha *supply chain financing* merupakan utang usaha yang sudah dibayarkan oleh beberapa bank dan akan jatuh tempo pembayaran sampai dengan 180 hari dan tidak dikenakan bunga.

Rincian utang usaha berdasarkan subkontraktor dan pemasok adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi (Catatan 52)/ *Related Parties (Note 52)*
Pihak Ketiga / *Third Parties*
Total

Rincian utang usaha berdasarkan *supply chain financing* adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi (Catatan 52)/ *Related Parties (Note 52)*

Pihak Ketiga/ *Third Parties*
PT Bank DKI
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Sub Total
Total

27. Account Payables

Details of account payables are as follows:

2024 Rp	2023 Rp
5,303,165,430	7,076,608,118
751,101,919	2,263,236,098
6,054,267,349	9,339,844,216

Subcontractor payables represent payable third party for work at subcontractor, such as stressing, installation, freight costs, reduction in beam, and peg the cost of others.

Supplier payables represent payable on the purchase of raw materials for the execution of the work/ project, such as the purchase of cement, sand, iron, connecting plate etc.

Supply chain financing payables represent trade payables already paid by several banks and the payment will be due until 180 days and bears no interest.

Details of account payables to supplier and subcontractor are as follow:

2024 Rp	2023 Rp
445,976,135	589,240,157
4,857,189,295	6,487,367,961
5,303,165,430	7,076,608,118

Details of account payables to supply chain financing are as follow:

2024 Rp	2023 Rp
708,657,277	1,993,424,853
40,855,078	54,380,877
1,589,564	85,433,614
--	88,793,266
--	25,429,861
--	15,146,481
--	627,146
42,444,642	269,811,245
751,101,919	2,263,236,098

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Sesuai perjanjian MRA tanggal 23 Januari 2024, tentang Perjanjian Addendum dan Penyertaan Kembali Perjanjian Kredit untuk Tujuan Restrukturisasi, sebagian saldo utang usaha berdasarkan *supply chain financing* direklasifikasi ke bagian dari pinjaman jangka panjang (Catatan 37).

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

In accordance with the MRA agreement dated January 23, 2024, regarding the Addendum Agreement and Re-Inclusion of Credit Agreement for Restructuring Purposes, part of the trade payables balance based on supply chain financing was reclassified to part of long-term loans (Note 37).

28. Utang Lain-lain

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 52)	766,415,443	803,545,789
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	(750,726,379)	(803,545,789)
Bagian Jangka Panjang		
Pihak Berelasi	15,689,064	--
Pihak Ketiga		
Bunga Pinjaman Ditangguhkan	264,199,764	--
Utang Bagi Hasil	149,844,322	93,415,868
Utang Pengurusan Dokumen	103,217,174	93,650,772
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000.000)	114,890,545	59,923,772
Sub Total	632,151,805	246,990,412
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	(268,968,621)	(138,738,600)
	363,183,184	108,251,812
Bagian Jangka Panjang	378,872,248	108,251,812

Utang lain-lain sebagian besar merupakan titipan biaya pembuatan akta jual beli, sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama pembeli untuk unit-unit, titipan uang tanda jadi yang nantinya apabila sudah menentukan unit akan dialihkan ke uang muka dan utang kepada pihak ketiga.

Other payable mainly represents the cost of making deed of sale and purchase, certificate Hak Guna Bangunan on behalf of buyers for these units, money deposit that later will be transferred to advance payment when the unit is already determined and payables to other third parties.

28. Other Payables

Related Parties (Note 52)
Less Short Term Portion
Long Term Portion of Related Parties
Third Parties
Deferred Bank Loans
Profit Sharing Payables
Handling Document Payables
Others (each below Rp10,000,000)
Sub Total
Less Short Term Portion
Long Term Portion

29. Perpajakan

a. Pajak dibayar di Muka

	2024 Rp	2023 Rp
Perusahaan		
Pajak Penghasilan		
Pasal 28A	185,807,580	281,781,067
Final	14,403,723	22,870,649
Sub Total	200,211,303	304,651,716
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)	50,119,383	45,497,263
Pasal 22	3,491,408	1,145,404

a. Prepaid Taxes

29. Taxation

The Company
Income Taxes
Article 28A
Final
Sub Total
Subsidiaries
Income Taxes
Article 4 (2)
Article 22

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Pasal 23	16,376,559	--	Article 23
Pasal 25	2,066,001	98,964	Article 25
Pasal 28A	33,045,787	27,940,394	Article 28A
Final	35,454,648	46,965,882	Final
Pajak Pertambahan Nilai	968,306,548	1,141,578,493	Value Added Tax
PB-1	51,852	--	PB-1
Sub Total	1,108,912,186	1,263,226,400	Sub Total
Total	1,309,123,489	1,567,878,116	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2024 Rp	2023 Rp	
Perusahaan			The Company
Pajak Penghasilan			Income Taxes
Pasal 4 (2)	8,055,698	9,812,457	Article 4 (2)
Pasal 15	--	3,030	Article 15
Pasal 21	--	17,364,055	Article 21
Pasal 22	3,207,092	4,412,947	Article 22
Pasal 23	1,541,510	1,720,575	Article 23
Pasal 26	3,370	2,824	Article 26
Pasal 29	39,139,980	23,918,789	Article 29
Utang Pajak Luar Negeri	--	259,280	Foreign Tax Payable
Pajak Pertambahan Nilai	741,077	81,152,291	Value Added Tax
Sub Total	52,688,727	138,646,248	Sub Total
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Penghasilan			Income Taxes
Pasal 4 (2)	23,713,910	167,753,356	Article 4 (2)
Pasal 21	5,566,059	22,697,642	Article 21
Pasal 22	2,267,996	12,540,340	Article 22
Pasal 23	24,976,538	18,254,558	Article 23
Pasal 25	810,058	310,746	Article 25
Pasal 26	110,193	56,497	Article 26
Pasal 29	5,645,952	50,011,254	Article 29
Final	162,123,136	--	Final
Pajak Pertambahan Nilai	34,097,976	336,656,774	Value Added Tax
PB-1	4,512,648	10,543,101	PB-1
Sub Total	263,824,466	618,824,268	Sub Total
Total	316,513,193	757,470,516	Total

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

c. Income Tax Benefit (Expense)

	2024 Rp	2023 Rp	
Pajak Kini			Current Tax
Perusahaan	(694,104)	(10,503,802)	The Company
Entitas Anak	(24,311,808)	(43,963,152)	Subsidiaries
Penyesuaian Pajak Kini dari Periode Lalu			Adjustment in the Current Tax of Prior Year
Perusahaan	(204,371)	(7,366,995)	The Company
Sub total	(25,210,283)	(61,833,949)	Sub total
Pajak Tangguhan			Deferred Tax
Entitas Anak	(27,211,693)	2,840,348	Subsidiaries
Total	(52,421,976)	(58,993,601)	Total

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laba fiskal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp	
Rugi sebelum Pajak	(2,461,392,359)	(7,128,264,152)	Loss before Tax
Dikurangi:			Less:
Rugi Entitas Anak			Loss of Subsidiaries
sebelum Pajak Penghasilan	(1,444,853,035)	(3,347,245,457)	before Income Tax
Eliminasi	2,763,414,215	6,119,388,874	Elimination
Rugi sebelum Pajak - Perusahaan	(1,142,831,179)	(4,356,120,735)	Loss before Tax - the Company
Perbedaan Tetap			Permanent Differences
Bagian Rugi Entitas Ventura			Share in Loss of Joint
Bersama	647,223,305	111,214,720	Venturer
Bagian Rugi Entitas			Loss from Associated
Asosiasi	231,478,117	86,202,011	Entity
Rugi atas Penghasilan			Loss already
yang Dikenakan Pajak Final	267,284,757	4,206,449,004	Subjected to Final Tax
Total Perbedaan Tetap	1,145,986,179	4,403,865,735	Total Permanent Differences
Laba Kena Pajak	3,155,000	47,745,000	Taxable Income
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (Dibulatkan)	3,155,000	47,745,000	Estimated Taxable Income (Rounded)
Beban Pajak Kini	<u>694,104</u>	<u>10,503,802</u>	Current Tax Expense

Perhitungan pajak badan tahun 2023 yang dilaporkan pada pajak tahunan sama dengan perhitungan pajak pada laporan audit.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar pengisian SPT PPh Badan tahun 2024.

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu.

**d. Surat Ketetapan Pajak
 Perusahaan**

Pada 18 Desember 2023, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2020 sebesar Rp116.676.285 setelah dikurangi PPh yang terutang sebesar Rp5.890.820, selisih dengan nilai tercatat dibebankan sebagai penyesuaian pajak kini dari periode lalu sebesar Rp7.366.995. Perusahaan telah menerima pembayaran pada 10 Januari 2024.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Reconciliation between profit before income tax expense presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and fiscal income for the years December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Rugi sebelum Pajak	(2,461,392,359)	(7,128,264,152)	Loss before Tax
Dikurangi:			Less:
Rugi Entitas Anak			Loss of Subsidiaries
sebelum Pajak Penghasilan	(1,444,853,035)	(3,347,245,457)	before Income Tax
Eliminasi	2,763,414,215	6,119,388,874	Elimination
Rugi sebelum Pajak - Perusahaan	(1,142,831,179)	(4,356,120,735)	Loss before Tax - the Company
Perbedaan Tetap			Permanent Differences
Bagian Rugi Entitas Ventura			Share in Loss of Joint
Bersama	647,223,305	111,214,720	Venturer
Bagian Rugi Entitas			Loss from Associated
Asosiasi	231,478,117	86,202,011	Entity
Rugi atas Penghasilan			Loss already
yang Dikenakan Pajak Final	267,284,757	4,206,449,004	Subjected to Final Tax
Total Perbedaan Tetap	1,145,986,179	4,403,865,735	Total Permanent Differences
Laba Kena Pajak	3,155,000	47,745,000	Taxable Income
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (Dibulatkan)	3,155,000	47,745,000	Estimated Taxable Income (Rounded)
Beban Pajak Kini	<u>694,104</u>	<u>10,503,802</u>	Current Tax Expense

The 2023 corporate tax calculation reported in the annual tax is same as the tax calculation in the audit report.

Taxable income resulted from the reconciliation used as a base to fill the annual tax return form for years 2024.

Fiscal laws in Indonesia requires that each company calculate, determine and pay the amount of tax payable individually.

**d. Tax Assessment Letter
 The Company**

On December 18, 2023, the Company received a 2020 Corporate Income Tax Overpayment Assessment Letter amounting to Rp116,676,285 after deducting the PPh owed amounting to Rp5,890,820 the difference with the carrying value is charged as an adjustment in the current tax of prior year amounting to Rp7,366,995. The Company has received payment on January 10, 2024.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada 8 Juni 2023, Perusahaan menerima Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan
Nilai tahun 2020 sebesar Rp70.388.138 setelah
dikurangi PPh yang terutang sebesar Rp296.631
dan telah menerima pembayaran pada 5 Juli 2023.

WIKA Beton

Pada Juni 2023, WIKA Beton memperoleh Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan
Badan sebesar Rp7.616.157 dan PPN sebesar
Rp26.528.128 untuk tahun pajak 2021. WIKA Beton
sudah menerima restitusi atas lebih bayar tersebut.

Pada September 2023, WIKA Beton menerima
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh 21, PPh
22, PPh 23, PPh 26, PPh 4(2) dan PPN untuk tahun
pajak 2021 sebesar Rp3.514.323. WIKA Beton
sudah membayar atas kurang bayar tersebut.

WIKA Kraton

Pada Juni 2023, WIKA Kraton memperoleh Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak
Penghasilan Badan sebesar Rp1.346.426 dan PPN
sebesar Rp3.183.580 untuk tahun pajak 2021, 2022
dan 2023. WIKA Kraton sudah menerima restitusi
atas lebih bayar tersebut.

e. Pajak Tanggahan

Pajak Tanggahan dihitung berdasarkan beda waktu
antara nilai tercatat dari total aset dan liabilitas yang
dicatat berdasarkan laporan keuangan dengan
dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas.
Rincian aset pajak tanggahan dan liabilitas pajak
tanggahan adalah sebagai berikut:

	2023			Divestasi Anak Perusahaan/ Impact on Subsidiary Divestment	2024		
	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba (Rugi)/ Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Reklasifikasi/ Reclassification		Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba (Rugi)/ Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Reklasifikasi/ Reclassification
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tanggahan							
Perusahaan	--	--	--	--	--	--	
Entitas Anak							
Entitas anak WIKA Realty	11,844,624	--	--	(9,122,616)	--	2,722,008	
WIKA Bitumen	6,658,905	185,605	(156,747)	--	--	6,687,763	
Entitas anak WIKA Beton	7,653,312	(1,676,343)	42,338	--	--	6,019,307	
Entitas anak WIKA Rekon	4,566,128	(1,250,011)	(445,344)	--	--	2,831,763	
WIKA Beton	1,469,539	(3,700,160)	(986,862)	--	--	3,217,483	
Total	32,192,508	(6,479,899)	(1,546,615)	(9,122,616)	3,217,483	18,260,861	
Liabilitas Pajak Tanggahan							
Entitas Anak							
WIKA Realty dan Entitas Anak	(43,495,008)	102,186	(488,282)	(358,573)	--	(44,239,677)	
WIKA Serpan	(27,380,172)	(12,212,886)	188,571	--	--	(39,404,487)	
WIKA IKON	(6,167,506)	(8,425,163)	(1,033,434)	--	--	(15,626,103)	
WTJU	--	(195,931)	103,042	--	--	(92,889)	
WIKA Beton	--	--	--	--	(3,217,483)	(3,217,483)	
Total	(77,042,686)	(20,731,794)	(1,230,103)	(358,573)	(3,217,483)	(102,580,639)	

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

On June 8, 2023, the Company received of Value
Added Tax Year 2020 Tax Overpayment
Assessment Letter of Value Added amounting to
Rp70,388,138 after deducting the income tax
payable amounting to Rp296,631 and has received
payment on July 5, 2023.

WIKA Beton

In June 2023, WIKA Beton received a Tax
Assessment Letter for Overpayment of Corporate
Income Tax amounting to Rp7,616,157 and VAT
amounting to Rp26,528,128 for the 2021 tax year.
WIKA Beton has received restitution for the
overpayment.

In September 2023, WIKA Beton received Tax
Underpayment Assesment Letter Art 21, Art 22, Art
23, Art 26, Art 4(2), and VAT for fiscal year 2021
amounted to Rp3,514,323. WIKA Beton has paid
the underpayment.

WIKA Kraton

In June 2023, WIKA Kraton received an
Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) for
Corporate Income Tax amounting to Rp1,346,426
and VAT amounting to Rp3,183,580 for the 2021,
2022 and 2023 tax years. WIKA Kraton has received
restitution for the overpayment.

e. Deferred Tax

Deferred tax is calculated based on temporary
differences between the carrying value of the total
assets and liabilities are recorded based on the
financial statements and the tax bases of assets and
liabilities. Details of deferred tax assets and deferred
tax liabilities are as follows:

Deferred Tax Assets
The Company
Subsidiaries
Subsidiaries of WIKA Realty
WIKA Bitumen
Subsidiaries of WIKA Beton
Subsidiary of WIKA Rekon
WIKA Beton
Total
Deferred Tax Liabilities
Subsidiaries
Subsidiaries
WIKA Realty and Subsidiaries
WIKA Serpan
WIKA IKON
WTJU
WIKA Beton
Total

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2022		2023		Reklasifikasi/ Reclassification	2023	
	Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba (Rugil/ Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss	Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income			
Aset Pajak Tanggungan Perusahaan	--	--	--	--	--	--	Deferred Tax Assets The Company
Entitas Anak							Subsidiaries
WIKa IKON	4,368,786	(11,132,382)	596,090	6,167,506	--	--	WIKa IKON
Entitas anak WIKa Realty	15,982,246	(3,781,724)	(355,898)	--	11,844,624	--	Subsidiaries of WIKa Realty
WIKa Bitumen	35,030,469	(28,417,855)	46,291	--	6,658,905	--	WIKa Bitumen
Entitas anak WIKa Beton	7,332,045	305,771	15,496	--	7,653,312	--	Subsidiaries of WIKa Beton
Entitas anak WIKa Rekon	5,358,732	(1,196,640)	404,036	--	4,566,128	--	Subsidiary of WIKa Rekon
WIKa Beton	--	--	--	1,469,539	1,469,539	--	WIKa Beton
Total	68,072,278	(44,222,830)	706,015	7,637,045	32,192,508	32,192,508	Total
Liabilitas Pajak Tanggungan Entitas Anak							Deferred Tax Liabilities Subsidiaries
WIKa IKON	--	--	--	(6,167,506)	(6,167,506)	--	WIKa IKON
WIKa Beton	(14,633,503)	18,448,332	(345,290)	(1,469,539)	--	--	WIKa Beton
WIKa Realty dan Entitas Anak	(101,510,488)	58,015,480	--	--	(43,495,008)	--	WIKa Realty and Subsidiaries
WIKa Serpan	--	(27,400,634)	20,462	--	(27,380,172)	--	WIKa Serpan
Total	(116,143,991)	47,063,178	(324,828)	(7,637,045)	(77,042,686)	(77,042,686)	Total

30. Uang Muka Dari Pelanggan

30. Advances Received From Customers

	2024 Rp	2023 Rp
WIKa Realty	1,009,661,560	648,436,424
WIKa Beton	214,113,365	177,449,335
WIKa REKON	57,091,426	9,860,317
WIKa IKON	55,740,167	6,635,548
Perusahaan	14,216,046	--
WIKa Gedung	9,906,373	--
KSO WIKa-WR Laswi	1,782,370	--
Sub Total	1,362,511,307	842,381,624
Bagian Jangka Pendek/ <i>Current Portion</i>	(1,284,705,478)	(602,422,968)
Bagian Jangka Panjang/ <i>Non Current Portion</i>	77,805,829	239,958,656

Uang muka WIKa Realty merupakan uang muka atas penjualan *real estate* dan jasa konstruksi yang diterima dari konsumen dan pemberi kerja, namun belum memenuhi syarat pengakuan penjualan.

Advances of WIKa Realty represent advances from sale of real estate and construction services received from customers and employers, but not yet qualified to be recognized as sales.

Uang muka Perusahaan, WIKa Beton, WIKa Gedung, WIKa REKON, WIKa IKON, KSO WIKa-WR Laswi, dan WIKa Gedung merupakan uang muka yang diterima dari pembeli berdasarkan kontrak dan akan dikurangi secara periodik dengan tagihan progres.

Advances of the Company, WIKa Beton, WIKa Gedung WIKa REKON, WIKa IKON, KSO WIKa-WR Laswi and WIKa Gedung represent advances from customers based on contract and will be deducted on a periodic basis with progress billing.

31. Beban Akrua

31. Accrued Expenses

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya Produksi	2,056,666,570	1,906,740,364	Production Expenses
Biaya Usaha	1,730,492,596	2,014,154,926	Operating Expenses
Retensi	426,325,457	496,982,280	Retention
Biaya Distribusi	290,622,725	123,104,813	Distribution Expenses
Biaya Pemeliharaan	246,646,591	178,188,889	Maintenance Expenses

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Cadangan Pajak			
Penghasilan Final	180,543,100	257,912,915	Accrued Final Income Tax
Biaya Pengelolaan	157,992,698	192,661,254	Management Expenses
Biaya Pengadaan	8,489,226	74,461,427	Logistic Expenses
Lain-lain	417,536,569	155,487,822	Others
Total	5,515,315,532	5,399,694,690	Total

Biaya produksi yang masih harus dibayar merupakan biaya yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga maupun tenaga kerja proyek sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Accrued production expenses represent amount outstanding from third parties or project workers regarding to the field work.

Biaya usaha yang masih harus dibayar merupakan liabilitas yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan aktivitas umum dan administrasi Grup.

Accrued operating expenses represent obligation which were not yet billed from third party referring to the Group's public activity and administration.

Biaya distribusi yang masih harus dibayar merupakan biaya atas distribusi produk WIKA Beton dan produk WIKA IKON.

Accrued distribution expenses represent costs for the product distribution of WIKA Beton and WIKA IKON.

32. Pendapatan Diterima di Muka

32. Unearned Revenues

	2024 Rp	2023 Rp	
Beton dan Beton Pracetak	158,597,894	239,912,548	Concrete and Precast Concrete
Jasa Konstruksi	19,694,395	45,371,865	Construction Services
Penjualan Properti	4,786,466	8,894,190	Sales of Property
Total	183,078,755	294,178,603	Total

Beton dan beton pracetak merupakan kewajiban pengiriman pesanan yang harus dipenuhi sehubungan dengan tagihan kepada pelanggan telah dilaksanakan dan belum memenuhi kriteria pengakuan penjualan dari WIKA Beton.

Concrete and precast concrete is delivery order performance obligations in connection with bills to customers that has been implemented and has not yet met the criteria for recognition of sales from WIKA Beton.

Jasa konstruksi merupakan kewajiban prestasi dari WIKA IKON dan WIKA Beton.

A construction service is performance liabilities from WIKA IKON and WIKA Beton.

Penjualan properti merupakan uang muka dari pelanggan WIKA Realty.

Sales of property are unearned revenue from WIKA Realty's customers.

33. Pinjaman Jangka Menengah

33. Medium Term Notes

	2024 Rp	2023 Rp	
Surat Utang Jangka Menengah	1,705,000,000	1,780,000,000	Medium Term Notes
Bagian Jangka Pendek yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	--	(1,545,000,000)	Current Maturities of Medium Term Notes
Pinjaman Jangka Menengah Jangka Panjang	1,705,000,000	235,000,000	Long Term Portion of Medium Term Notes

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

WIKA Realty dan Entitas Anak

Berdasarkan Akta Notaris Vita Cahyojati, S.H., M.Hum. No. 9 dan No. 10 pada tanggal 26 Februari 2024 terdapat perpanjangan atas MTN IX Wika Realty Tahun 2019 dan Obligasi dengan Opsi Konversi I masing-masing menjadi 28 Agustus 2029 dan 20 Desember 2028.

Berdasarkan Addendum III No. 8 tanggal 25 Juli 2023 dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, menyatakan perpanjangan atas pelunasan pokok atas MTN VIII WIKA Realty menjadi 26 Juli 2028.

Berdasarkan Surat No: S-223/PNIM-DIR/INVVI/22 tanggal 28 Juni 2022 perihal permohonan restrukturisasi penundaan pembayaran MTN IV Hotel Indonesia Natour menjadi tanggal 28 Juli 2024.

HIPRO mendapatkan pengalihan atas pinjaman MTN IV Hotel Indonesia Natour 2017 dari PT Hotel Indonesia Natour (Persero) berdasarkan perjanjian pembaharuan Utang (Novasi) No. 22 tanggal 20 September 2021 sebesar Rp50.000.000.

Perusahaan telah kehilangan pengendalian atas HIPRO (Catatan 1.e). Oleh karena itu, pinjaman jangka menengah tersebut tidak lagi diakui.

Per 31 Desember 2023, pinjaman MTN yang jatuh tempo dalam satu tahun tersebut adalah MTN seri IX Obligasi dengan Opsi Konversi I dan MTN Seri IV.

Rincian dari MTN per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan/ Description	Rating/ Rating	Pokok/ Principal	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Total Bunga Total Interest
MTN VIII Wika Realty Tahun 2019	--	210,000,000	24 Juli 2019/ July 24, 2019	26 Juli 2028/ July 26, 2028	11.70%	141,000,000
MTN IX Wika Realty Tahun 2019	idBBB+	545,000,000	23 Agustus 2019/ August 23, 2019	28 Agustus 2029/ August 28, 2029	12.00%	261,600,000
Obligasi dengan Opsi Konversi I	BB+	950,000,000	19 Desember 2019/ December 19, 2019	20 Desember 2028/ December 20, 2028	11.20%	396,730,556
Total		1,705,000,000				799,330,556

Rincian dari MTN per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan/ Description	Rating/ Rating	Pokok/ Principal	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Total Bunga Total Interest
MTN VIII Wika Realty Tahun 2019	--	235,000,000	24 Juli 2019/ July 24, 2019	26 Juli 2028/ July 26, 2028	11.70%	105,300,000
MTN IX Wika Realty Tahun 2019	idBBB-	545,000,000	23 Agustus 2019/ August 23, 2019	28 Agustus 2024/ August 28, 2024	12.00%	327,000,000
Obligasi dengan Opsi Konversi I	--	950,000,000	19 Desember 2019/ December 19, 2019	20 Desember 2024/ December 20, 2024	11.20%	313,500,000
MTN IV PT Hotel Indonesia Natour Tahun 2017	--	50,000,000	28 Juli 2017 July 28, 2017	28 Juli 2024/ July 28, 2024	12.50%	30,312,500
Total		1,780,000,000				776,112,500

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

WIKA Realty and Subsidiary

Based on the Notarial Deed of Vita Cahyojati, S.H., M.Hum No. 9 and No. 10 dated on February 26, 2024 there was an extension of the MTN IX Wika Realty Tahun 2019 and Obligasi dengan Opsi Konversi I to Agustus 28, 2029 dan Desember 20, 2028, respectively.

Based on Addendum III No. 8 dated July 25, 2023 made before Vita Cahyojati, S.H., M.Kn., Notary in the City of South Jakarta, declared an extension of the principal repayment of MTN VIII WIKA Realty to July 26, 2028.

Based on Letter No: S-223/PNIM-DIR/INVVI/22 dated June 28, 2022 regarding the application for restructuring the postponement of MTN IV Hotel Indonesia Natour payments to July 28, 2024.

HIPRO obtained the transfer of the MTN IV Hotel Indonesia Natour 2017 loan from PT Hotel Indonesia Natour (Persero) based on the Debt Renewal Agreement (Novasi) No. 22 dated September 20, 2021 in the amount of Rp50,000,000.

The Company has lost control over HIPRO (Note 1.e). Accordingly, medium-term notes is no longer recognized.

As of December 31, 2023 current maturities of MTN loans represent MTN IX Series, Obligasi dengan Opsi Konversi I and MTN IV Series.

Details of MTN as of December 31, 2024 are as follows:

Details of MTN as of December 31, 2023 are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan MTN sebagai berikut:

The parties involved in the issuance of MTN are as follows:

Keterangan/ Description	Wali Amanat/ Trustee	Pemeringkat/ Rating Company	Underwriter/ Underwriter	Notaris/ Notary
MTN VIII Wika Realty Tahun 2019	PT Bank Bukopin Tbk	--	PT Asta Kapital Asia	Arry Soepratno, S.H.
MTN IX Wika Realty Tahun 2019	PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk	PT Pefindo	PT Ciptadana Capital	Arry Soepratno, S.H.
Obligasi dengan Opsi Konversi I	PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk	--	PT Bahana Sekuritas	Arry Soepratno, S.H.
MTN IV PT Hotel Indonesia Natour Tahun 2017	PT Bank Bukopin Tbk	--	RDPT Asanusa Jamkrindo	Lenny Janis Ishak, S.H.

Pinjaman ini dijamin dengan:

1. Pada Utang MTN VIII ada jaminan fidusia dari piutang penjualan (Catatan 6);
2. Pada Utang MTN IX tidak ada jaminan fidusia dari piutang penjualan (bersifat *Clean Basis*);

Collateral for this loan:

1. On MTN VIII Loan there is fiduciary guarantee from sales receivables (Note 6);
2. On MTN IX Loan there is no fiduciary guarantee from sales receivables (is *Clean Base*);

WIKA Realty wajib memenuhi kewajiban keuangan dalam akta penerbitan Utang MTN VIII berupa:

1. *Current Ratio* minimal sebesar 100%;
2. Rasio Total kewajiban terhadap total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) tidak lebih dari dua berbanding satu (2:1); dan
3. Rasio EBITDA terhadap beban keuangan bersih (*EBITDA Coverage Ratio*) tidak kurang dari satu koma lima berbanding satu (1,5:1).

WIKA Realty is required to meet financial obligations in the Deed of issuance of MTN VIII in the form of:

1. *Current Ratio* is at least 100%;
2. *Ratio of Total liabilities to total equity (Debt to Equity Ratio)* is not more than two to one (2:1); and
3. *The ratio of EBITDA to net financial expenses (EBITDA Coverage Ratio)* is not less than one point five to one (1.5:1).

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Realty telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2024, WIKA Realty has complied with the terms and conditions of the loans.

WIKA Realty wajib memenuhi kewajiban keuangan dalam akta penerbitan utang MTN IX berupa:

1. *Current Ratio* minimal sebesar 100%;
2. Rasio Total kewajiban terhadap total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) tidak lebih dari dua berbanding satu (3:1); dan
3. Rasio EBITDA terhadap beban keuangan bersih (*EBITDA Coverage Ratio*) menjadi minimal 1,0.

WIKA Realty is required to meet financial obligations in the Deed of issuance of MTN IX in the form of:

1. *Current Ratio* is at least 100%;
2. *Ratio of Total liabilities to total equity (Debt to Equity Ratio)* is not more than two to one (3:1); and
3. *The ratio of EBITDA to net financial expenses (EBITDA Coverage Ratio)* is at least 1.0.

WIKA Realty wajib memenuhi kewajiban keuangan dalam akta penerbitan Utang Obligasi dengan Opsi Konversi I berupa:

1. *Current Ratio* minimal sebesar 100%;
2. Rasio Total kewajiban terhadap total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) tidak lebih dari tiga berbanding satu (3:1); dan
3. Rasio EBITDA terhadap beban keuangan bersih (*EBITDA Coverage Ratio*) menjadi minimal 1,1.

WIKA Realty is required to meet financial obligations in the Deed of issuance of Bonds Payable with Convertible Option I in the form of:

1. *Current Ratio* is at least 100%;
2. *Ratio of Total liabilities to total equity (Debt to Equity Ratio)* is not more than three to one (3:1); and
3. *The ratio of EBITDA to net financial expenses (EBITDA Coverage Ratio)* is at least 1.1.

Pemakaian dana dari *Medium Term Notes* ini diperuntukkan sebagai pemakaian modal kerja pembangunan kawasan *realty*.

Use of funds from the *Medium Term Notes* is intended as the use of working capital for the construction of the *Realty* area.

Pembatasan yang dipersyaratkan dalam kontrak penerbitan MTN sebagai berikut:

The restrictions required in the MTN issuance contract are as follows:

1. WIKA Realty tidak dapat menjamin pinjaman kepada pihak lain tanpa persetujuan Bank BJB;
2. WIKA Realty tidak dapat menjaminkan harta kekayaan kepada pihak ketiga kecuali

1. WIKA Realty cannot guarantee loans to other parties without Bank BJB approval;
2. WIKA Realty cannot pledge assets to a third party unless 1) has been previously pledged, 2)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- 1) sudah dijaminakan sebelumnya, 2) jaminan sehubungan kegiatan sehari-hari, 3) harta kekayaan yang dijaminakan untuk *refinancing* tanpa persyaratan Bank BJB;
3. WIKa Realty tidak dapat memberikan *corporate guarantee* kecuali untuk kegiatan usaha dan entitas anak;
4. Melakukan penggabungan yang menyebabkan bubarnya Penerbit atau mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan melaksanakan kewajiban Penerbit;
5. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun aset tetap Penerbit sebanyak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset tetap, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari kepada pihak ketiga; dan
6. Mengubah bidang usaha utama Penerbit.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- guarantee in respect of daily activities, 3) assets pledged for refinancing without Bank BJB requirements;*
3. *WIKa Realty cannot provide corporate guarantee except for business activities and subsidiaries;*
4. *Merge which causes the Issuer to discharge or has a negative effect on the ability to perform the Issuer's obligations;*
5. *Selling or transfer in any way the Fixed assets of the Issuer as much as more than 50% (fifty percent) of the fixed assets, both existing and will exist in the future to third parties; and*
6. *Changes main business of the Publisher.*

34. Liabilitas Imbalan Kerja

34. Employee Benefit Liabilities

	2024 Rp	2023 Rp	
Imbalan Pascakerja	205,804,769	204,944,778	Post-employment Benefits
Imbalan Kerja			Other Long-Term
Jangka Panjang Lainnya	66,411,061	64,926,404	Employee Benefits
Total	272,215,830	269,871,182	Total

Imbalan Pascakerja

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk karyawan tetap, berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Pendanaan atas program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya, Dana Pensiun Aero Wisata, Dana Pensiun Hotel Indonesia, dan Dana Pensiun Natour. Selain itu Perusahaan dan SPI juga menyelenggarakan program imbalan pascakerja lainnya. Perusahaan menyiapkan dana untuk program ini yang dikelola oleh Koperasi Karyawan PT Wijaya Karya, sementara SPI dikelola oleh Dana Pensiun Aero Wisata.

Liabilitas imbalan pascakerja yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai Kini			Current Value
Liabilitas Imbalan Pascakerja	1,028,309,013	1,083,638,728	Post-employment Benefits
Nilai Wajar Aset Program	(863,086,616)	(913,433,039)	Fair Value of Asset Program
Defisit	165,222,397	170,205,689	Deficit
Dampak Batas Atas Aset	40,582,431	34,739,089	Effect of Asset Ceiling
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	205,804,828	204,944,778	End of the Year Net Liabilities

Post-Employment Benefits

The Group established defined benefit pension plan for permanent employees, based on years of service and salaries of the employees.

Funding for this pension program is managed by the Dana Pensiun Wijaya Karya, Dana Pensiun Aero Wisata, Dana Pensiun Hotel Indonesia and Dana Pensiun Natour. In addition, the Company and SPI also provide other post-employment benefit programs. The Company provides funds for this program which is managed by the Koperasi Karyawan PT Wijaya Karya, while SPI is managed by Dana Pensiun Aero Wisata.

Post-employment benefits liabilities included in the consolidated statement of financial position are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

Movements in post-employment benefits liabilities are as follow:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	204,944,778	95,463,460	Beginning Balance
Beban Imbalan Pascakerja	21,962,676	81,321,672	Post-employment Benefits Expense
Pembayaran Manfaat	(44,020,173)	(46,617,331)	Benefits Paid
Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti	22,917,547	74,776,977	Remeasurement on Defined Benefit Plans
Saldo Akhir	205,804,828	204,944,778	Ending Balance

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the plan assets were as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal Nilai Wajar Aset Program	913,433,039	969,507,118	Fair Value of Asset - Beginning
Kontribusi-Pemberi Kerja	23,832,027	21,665,479	Contribution-Employer
Kontribusi-Pegawai	4,349,450	3,954,045	Contribution-Employee
Penyesuaian	(15,053,701)	(13,685,183)	Adjustment
Imbal Hasil Aset Program	61,321,532	55,746,847	Interest Income on Plan Asset
Perubahan Pengaruh Aset	(39,617,819)	(36,016,199)	Changes of Impact on Assets
Pembayaran Manfaat	(85,177,912)	(87,739,068)	Benefits paid
Saldo Akhir Nilai Wajar Aset Program	863,086,616	913,433,039	Fair Value of Asset - Ending

Beban imbalan pascakerja yang diakui laba rugi adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits expenses which are recognized in profit or loss are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya Jasa Kini	9,352,957	36,416,984	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	(19,202,390)	(25,088,703)	Past Service Cost
Biaya Bunga	31,812,109	69,993,391	Interest Cost
Beban Imbalan Pascakerja	21,962,676	81,321,672	Post-Employment Benefits Expense

Rincian beban imbalan pascakerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Details of the post-employment benefits expenses which is recognized as other comprehensive income are as follow:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pengukuran Kembali:			Remeasurement:
Dampak Penyesuaian Dari Pengalaman	35,422,762	74,670,209	Effects Of Experience Adjustment
Imbalan Aset Program	--	(3,541,088)	Return on Plan Asset
Dampak Perubahan Asumsi Keuangan	(8,857,358)	--	Effects of Changes In Financial Assumptions
Penyesuaian atas Batas Aset Program	(3,647,857)	3,647,856	Adjustment due to Limitation Assets
Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti	22,917,547	74,776,977	Remeasurement On Defined Benefit Plans

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak didiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit is as follows:

	Dalam 1 Tahun/ Within 1 Years	2 - 5 Tahun/ 2 - 5 Years	Diatas 5 Tahun/ Over 5 Years
	Rp	Rp	Rp
Manfaat Pasti/ <i>Defined Benefit</i>	117,703,240	419,224,746	6,184,239,370

Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa tunjangan cuti besar dan satya karya. Grup memberikan ekstra hari cuti dan ekstra uang cuti untuk karyawan aktif setiap kelipatan 5 tahun masa kerja. Grup memberikan penghargaan satya karya kepada karyawan yang telah mencapai masa kerja tertentu.

Other Long-term Employee Benefit Program

The Group provides other long-term benefit in form of long service leave and long service award.

The Group provides extra leave and extra leave allowance for active employee every 5 years of service. The Group provides long leave award to employee that reached certain year of service.

Liabilitas imbalan jangka panjang lainnya Grup yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The Group's other long-term benefits liabilities included in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	64,926,404	67,977,863	<i>Beginning Balance</i>
Beban Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	15,398,246	8,713,676	<i>Other Long-Term Employee Benefits Expense</i>
Pembayaran Manfaat	(13,913,589)	(11,765,135)	<i>Benefits Paid</i>
Saldo Akhir	66,411,061	64,926,404	<i>Ending Balance</i>

Beban imbalan jangka panjang lainnya yang diakui laba rugi adalah sebagai berikut:

Other long-term benefits expenses which are recognized in profit or loss are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya Jasa Kini	4,356,037	4,006,186	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Jasa Lalu	--	(151,765)	<i>Past Service Cost</i>
Biaya Bunga	4,252,382	4,678,402	<i>Interest Cost</i>
Penyesuaian	--	825,736	<i>Adjustment</i>
Pengukuran Kembali Atas Program	6,789,827	(644,883)	<i>Remeasurement on Defined Plans</i>
Total	15,398,246	8,713,676	<i>Total</i>

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak didiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit is as follows:

	Dalam 1 Tahun/ Within 1 Years	2 - 5 Tahun/ 2 - 5 Years	Diatas 5 Tahun/ Over 5 Years
	Rp	Rp	Rp
Manfaat Pasti/ <i>Defined Benefit</i>	18,164,908	72,677,206	842,067,361

Program pensiun imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

The post-employment benefits and other long-term benefits typically expose the Group to actuarial risks such as: investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi pada deposito di bank, investasi saham, emas, real estat, investasi obligasi, dan lain-lain. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan real estat untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Analisa Sensitivitas

Sensitivitas dari nilai kini liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya per 31 Desember 2024 terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut:

	Perubahan Asumsi/ Changes in Assumption	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja/ Present Value of Benefit Obligation	
		Imbalan Pasca Kerja/ Post-Employment Benefits	Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya/ Other Long-Term Employee Benefits
Tingkat Diskonto/ Discount Rate	Kenaikan/Increase 1%	1,012,884,378	58,188,246
	Penurunan/Decrease 1%	1,043,733,648	75,426,174
Tingkat Kenaikan Gaji/ Salary Increase Rate	Kenaikan/Increase 1%	1,038,592,103	75,530,553
	Penurunan/Decrease 1%	1,018,025,923	58,197,533

Investment Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality government bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the program has investment in deposits in bank, shares, gold investment, real estate, debt investments, and others. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Longevity Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants during their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefits obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analyses below had been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

Sensitivity Analysis

The sensitivity of post-employment benefit and other long-term benefits liabilities as of December 31, 2024 to changes in the actuarial assumptions is as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perhitungan imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung oleh aktuaris independen masing-masing KKA Tubagus Syafril dan Amran Nangasan dan KKA Azwir Arifin dan Rekan Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp	
Tingkat Diskonto	6.08% - 7.08% p.a.	6.75% - 7.50% p.a.	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	6.00% p.a.	6.00%-8.00% p.a.	Salary Increment Rate
Tingkat Kematian	TMI IV	TMI IV	Mortality Rate
Tingkat Cacat	5.00% p.a.	5.00% p.a.	Disability Rate
Tingkat Pengunduran Diri	18-35 Tahun/ Years: 1% p.a. 36-54 Tahun/ Years: 0.05% p.a.	18-35 Tahun/ Years: 1% p.a. 36-54 Tahun/ Years: 0.05% p.a.	Resignation Rate
Tingkat Pensiun Normal	55, 56, 57, 58 Tahun/ Years	55, 56, 57, 58 Tahun/ Years	Normal Retirement Rate
Imbal Hasil Ekspektasian Aset Program	6.00% p.a.	6.00% p.a.	Expected Return on Plan Assets

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The calculation of post-employment benefits and other long-term employee benefits for the years ended December 31, 2024 and 2023 is calculated by independent actuaries KKA Tubagus Syafril dan Amran Nangasan and KKA Azwir Arifin dan Rekan, respectively. The main assumptions used in determining actuarial valuations are as follows:

35. Uang Muka Proyek Jangka Panjang

Uang muka proyek jangka panjang merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja atau pemilik proyek atas pekerjaan konstruksi yang memiliki jangka waktu penyelesaian proyek lebih dari satu tahun. Jumlah tersebut secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai dengan rincian sebagai berikut:

35. Advances from Long-term Projects

Advances from long-term projects represent advances received from the employer or owner of the construction project that has completion period of more than one year. The amount is deducted in proportion based on the physical progress achieved. Detail of advances from long-term projects are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Proyek/Project Apartemen Puncak MERR	65,122,550	65,122,550
Proyek/Project CHS Bunati Line 3	61,439,506	--
Proyek/Project Tol Harbour Road II Section 1 : Ancol - Pluit	57,724,389	63,870,019
Proyek/Project Rediversion MWRD Kaltim Prima Coal	55,733,436	--
Proyek/Project Jetty Wanam	54,330,519	--
Proyek/Project RSUD Klaten	49,686,400	--
Proyek/Project Pembangunan Bangunan Pendukung Kawasan Bank Indonesia di Karawang (PK-12)	45,075,000	--
Proyek/Project Gedung Bank Mandiri Cabang Masjid Agung	38,501,486	--
Proyek/Project Pembangunan KPwBI Prov Papua Barat	36,852,240	92,130,600
Proyek/Project CBD Surabaya	26,483,980	26,483,980
Proyek/Project MRT Jakarta	25,913,121	--
Proyek/Project D&B Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A	25,710,900	59,992,100
Proyek/Project Kantor PUPR Wing I IKN	25,633,064	--
Proyek/Project Rusun Paspampres IKN	24,741,808	244,437,424
Proyek/Project Jembatan Kaca Sukamahi PUPR	21,830,873	--
Proyek/Project Apartemen Nayumi	21,363,636	--
Proyek/Project Pembangunan Tower B Nuansa Cilangkap	20,979,730	--
Proyek/Project Kantor Bio Farma	19,892,025	45,021,413
Proyek/Project CHS Tanah Grogot 2	19,375,770	--
Proyek/Project Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani)	19,247,610	64,376,259
Proyek/Project Rancang dan Bangun (Design and Build) Modern Office di Menara Sjafruddin Prawiranegara (MSP) KOPERBI Jakarta	18,895,896	59,662,050

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp
Proyek/Project Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Area Gresik (Mandiri Gresik)	17,557,324	--
Proyek/Project Pembangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Sosial BI Papua Barat	14,508,000	22,320,000
Proyek/Project Apartemen The MAJ Collection	14,005,160	14,005,160
Proyek/Project Bandara Hang Nadim	13,688,281	23,703,001
Proyek/Project Pembangunan Cibubur Youth Center	3,927,331	33,717,150
Proyek/Project Manyar Smelter Gresik	1,725,400	21,327,933
Proyek/Project CHS Tanah Grogot	--	144,123,392
Proyek/Project Gedung Kemenko IKN	--	60,865,729
Proyek/Project Rumah Sakit Persahabatan	--	25,834,556
Proyek/Project Bandara Dhoho Kediri Lain-lain (di bawah Rp20.000.000)/ Others (each below Rp20,000,000)	56,973,415	301,434,861
Total	856,918,850	1,390,091,889

Konsekuensi apabila pekerjaan konstruksi tidak dapat diselesaikan tepat waktu adalah denda keterlambatan (yang umumnya sebesar 0,1% dari nilai awal kontrak perhari keterlambatan) sampai maksimal 5% dari nilai kontrak awal.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi saat ini masih mengacu pada jadwal pelaksanaan serta perubahan-perubahan yang telah disepakati dengan pemilik proyek sehingga kemungkinan denda dapat dihindari.

Consequences if the construction activities fail to be completed in punctual time shall be penalty for the delay (it shall be generally 0.1% of initial contracted value per delay day) until maximum of 5% of initial contracted value.

Implementation of the construction work is still referring to the implementation schedule and the changes that had been agreed with the owner of the project so that the possibility of fines can be avoided.

36. Liabilitas Sewa

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Rincian Liabilitas Sewa		
Berdasarkan Jatuh Tempo		
Tidak Lebih dari Satu Tahun	33,892,241	48,040,343
Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun	10,464,651	120,448,066
Sub Total	44,356,892	168,488,409
Dikurangi: Biaya Keuangan Masa Depan	(3,930,958)	(13,716,099)
Nilai Kini Pembayaran Minimum Sewa	40,425,934	154,772,310
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	(30,604,697)	(44,129,533)
Liabilitas Sewa Jangka Panjang-Neto	9,821,237	110,642,777

36. Lease Liabilities

Future minimum lease payment, as well as the present value of minimum finance lease payment as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Lease Liabilities Detail
By Due Date
Not Later than One Year
Later than One Year and not Later than Five Years
Sub Total
Less: Future Finance Charges

Present Value of Minimum Lease Payments
Portion that will Mature within One Year Current Maturity
Long-term Lease Liabilities-Net

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Grup mendapat pembiayaan dari PT Bringin Srikandi Finance, PT Orix Indonesia Finance, Koperasi Karyawan WIKA dan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia dengan rincian seperti dibawah ini:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The Group obtained financing from PT Bringin Srikandi Finance, PT Orix Indonesia Finance, Koperasi Karyawan WIKA and PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia with details as follows:

**WIKON
PT Astra Credit**

Tahun Mulai/ Starting Year	Nomor Kontrak/ Contract Number	Aset Sewaan/ Leased Assets	Total Unit	Periode Sewa/ Lease Period Tahun/ Years	Suku Bunga Interest Rate %	Total Nilai Kontrak/ Total Contract Amount Rp
2021	01.100.910.00.200934.3	Excavator Pc210 Super Long Arm	3.00	5	0.09	5,325,000
2021	01.100.910.00.200940.8	Excavator Pc210	10.00	5	0.09	13,100,000
2021	01.100.910.00.210551.2 & 210552.0	Bulldozer D85Ess-2	4.00	10	0.10	13,300,000

**WIKON
PT Astra Credit**

**PT BOT Finance Indonesia d/h PT Bumiputera
BOT Finance**

Tahun Mulai/ Starting Year	Nomor Kontrak/ Contract Number	Aset Sewaan/ Leased Assets	Total Unit	Periode Sewa/ Lease Period Tahun/ Years	Suku Bunga Interest Rate %	Total Nilai Kontrak/ Total Contract Amount Rp
2020	LJKT-201909-0010	Excavator 20 Ton	4.00	5	0.10	5,000,000
2021	LJKT-202010-0010	Excavator Pc210 Super Long Arm	6.00	5	0.10	10,650,000
2021	LJKT-202010-0003	Excavator Pc210	10.00	5	0.10	13,100,000
2021	LJKT-202104-0023	Excavator Hydraulic	2.00	5	0.09	4,750,000
2021	LJKT-202104-0024	Excavator Hydraulic	3.00	5	0.09	7,125,000

**PT BOT Finance Indonesia formerly
PT Bumiputera BOT Finance**

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia

Tahun Mulai/ Starting Year	Nomor Kontrak/ Contract Number	Aset Sewaan/ Leased Assets	Total Unit	Periode Sewa/ Lease Period Tahun/ Years	Suku Bunga Interest Rate %	Total Nilai Kontrak/ Total Contract Amount Rp
2019	WKI19041387-001	Trailer 18 Meter	1.00	5	0.10	340,000
2019	WKI19041387-001	Truck Water Tank	2.00	5	0.10	536,364
2019	WKI19041387-001	Trailer 12 Meter	2.00	5	0.10	540,000
2019	WKI19041387-001	Excavator 20 Ton	4.00	5	0.10	5,000,000
2019	WKI19041387-001	Truck Mounted Crane	4.00	5	0.10	5,049,091
2020	WKI19041387-002	Excavator 40 Ton	2.00	5	0.10	8,160,000
2021	WKI19041387-003	Stone Crusher	1.00	10	0.08	7,115,000
2021	WKI19041387-005	Excavator Kobelco Sk330-10	4.00	5	0.09	9,500,000
2021	WKI19041387-004	Bulldozer D85Ess-2	4.00	10	0.09	13,600,000

PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia

PT Surya Artha Nusantara Finance

Tahun Mulai/ Starting Year	Nomor Kontrak/ Contract Number	Aset Sewaan/ Leased Assets	Total Unit	Periode Sewa/ Lease Period Tahun/ Years	Suku Bunga Interest Rate %	Total Nilai Kontrak/ Total Contract Amount Rp
2022	32201000109	Compactoer Bw211D-40S	6.00	10	0.09	5,790,000

PT Surya Artha Nusantara Finance

**WTJJ
PT Astra Sedaya Finance**

Tahun Mulai/ Starting Year	Nomor Kontrak/ Contract Number	Aset Sewaan/ Leased Assets	Total Unit	Periode Sewa/ Lease Period Tahun/ Years	Suku Bunga Interest Rate %	Total Nilai Kontrak/ Total Contract Amount Rp
2023	01100103005488754	Toyota/ All New Avanza/ 1.5/ CVT	1.00	2	0.07	269,800

**WTJJ
PT Astra Sedaya Finance**

HIPRO

Merupakan liabilitas sewa kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atas sewa tanah lot S-3 seluas ± 91.278 m² dikawasan Pariwisata Nusa Dua untuk jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal 14 September 2012 sampai dengan 14 September 2032.

HIPRO

Represents lease liability to PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) for the lease of land lot S-3 with an area of ± 91,278 sqm in the Nusa Dua Tourism area for a period of 20 years starting September 14, 2012 until September 14, 2032.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan telah kehilangan pengendalian atas
HIPRO (Catatan 1.e). Oleh karena itu, liabilitas sewa
atas HIPRO tidak lagi diakui.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Perusahaan telah kehilangan pengendalian atas
HIPRO (Catatan 1.e). Oleh karena itu, liabilitas sewa
atas HIPRO tidak lagi diakui.

37. Pinjaman Jangka Panjang

37. Long-term Loan

	2024 Rp	2023 Rp
Perusahaan/ The Company		
Pihak Berelasi (Catatan 52)/ Related Parties (Note 52)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8,390,702,066	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2,056,377,342	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,911,163,588	--
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1,600,413,469	--
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia Eximbank	779,409,029	--
PT Indonesia Infrastructure Finance	535,636,890	--
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	275,417,569	--
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	165,030,247	--
Sub Total	15,714,150,200	--
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT BTPN Tbk	1,581,252,471	--
PT Bank HSBC Indonesia	1,060,229,260	--
PT Bank Pan Indonesia Tbk	797,533,455	--
PT Bank DKI	751,820,459	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	559,559,736	--
PT Bank ICBC Indonesia	189,067,833	--
PT Bank Danamon Tbk	132,716,273	--
Sub Total	5,072,179,487	--
Total	20,786,329,687	--
Dampak Restrukturisasi Pinjaman yang Belum Diamortisasi/ Impact of Unamortized Loan Restructuring	(3,944,586,059)	--
Amortisasi Dampak Restrukturisasi Pinjaman / Amortized Loan Restructuring Impact	425,194,425	--
Total	17,266,938,053	--
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Jangka Panjang/ Current Portion of Long Term Loan	(1,282,876,140)	--
Total Bagian Jangka Panjang / Long Term Portion	15,984,061,913	--
Entitas Anak/ Subsidiaries		
Pihak Berelasi (Catatan 52)/ Related Parties (Note 52)		
Pinjaman Sindikasi Milik WIKA Serpan / Syndicated Loan Belong to WIKA Serpan -		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1,950,998,629	1,952,951,582
Pinjaman Sindikasi Milik WTJJ/ Syndicated Loan Belong to WTJJ -		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1,082,966,370	532,132,061
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	376,317,600	490,571,600
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	205,792,067	212,223,276
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	46,580,050	--
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	30,000,000
Sub Total	3,662,654,716	3,217,878,519

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Pinjaman Sindikasi Milik WIKA Serpan/ Syndicated Loan Belong to WIKA Serpan -		
PT BPD Jawa Tengah, PT BPD Papua, PT BPD Sumatera Utara PT BPD Jawa Barat dan Banten, PT BPD Aceh Syariah, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT BPD Sumatera Utara Syariah, PT BPD Sumatera Utara dan Bangka Belitung PT Bank Mestika Dharma Tbk, PT Bank ICBC Indonesia BPD Sumatera Utara dan Bangka Belitung Syariah	2,203,165,459	2,205,370,829
PT Bank CIMB Niaga Tbk	348,867,058	451,913,144
PT Bank Victoria International Tbk	8,460,000	14,880,000
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	--	22,516,731
Sub Total	<u>2,560,492,517</u>	<u>2,694,680,704</u>
Total	<u>6,223,147,233</u>	<u>5,912,559,223</u>
Dampak Restrukturisasi Pinjaman yang Belum Diamortisasi/ Impact of Unamortized Loan Restructuring	(547,529,158)	--
Amortisasi Dampak Restrukturisasi Pinjaman / Amortized Loan Restructuring Impact	18,303,563	--
	<u>5,693,921,638</u>	<u>5,912,559,223</u>
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Jangka Panjang/ Current Portion of Long Term Loan	(368,124,903)	(189,334,468)
	<u>5,325,796,735</u>	<u>5,723,224,755</u>
Total Bagian Jangka Panjang/ Long Term Portion	<u>21,309,858,648</u>	<u>5,723,224,755</u>

Perusahaan

Pinjaman bank jangka panjang Perusahaan merupakan hasil restrukturisasi pinjaman bank jangka pendek (Catatan 26), berdasarkan Akta Perjanjian Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit untuk Tujuan Restrukturisasi No.9 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta, Perusahaan dan bank-bank dan lembaga keuangan melakukan menandatangani perjanjian addendum dan pernyataan kembali perjanjian kredit untuk tujuan restrukturisasi.

Saldo pinjaman jangka panjang yang direstrukturisasi sesuai perjanjian tersebut sebesar Rp20.798.469.596.

Pengelompokan pembayaran pinjaman bank adalah sebagai berikut:

- Tranche A sebesar Rp17.369.079.482 jatuh tempo hingga 23 Desember 2031;
- Tranche B sebesar Rp2.146.513.974 jatuh tempo hingga 23 Desember 2029; dan
- Tranche C sebesar Rp1.282.876.140 jatuh tempo hingga 23 Desember 2025.

Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:

- Tranche A dengan bunga 4% per tahun, di mana 0,5% akan dibayarkan secara tunai dan 3,50% ditangguhkan sampai dengan 23 Desember 2031;

The Company

The Company's long-term bank loans are the result of restructuring its short-term bank loans (Note 26), based on the Deed of Addendum Agreement and Restatement of Credit Agreement for Restructuring Purposes No. 9 dated January 23, 2024 made in presence of Notary Fathiah Helmi, S.H., in Jakarta, the Company and banks and financial institutions signed an addendum agreement and re-inclusion of the credit agreement for the purpose of restructuring.

The balance of the long-term loan restructured according to the agreement is Rp20,798,469,596.

The grouping of bank loan payments is as follows:

- Tranche A amounting to Rp17,369,079,482 due on December 23, 2031;
- Tranche B amounting to Rp2,146,513,974 due on December 23, 2029; and
- Tranche C amounting to Rp1,282,876,140 due on December 23, 2025.

The interest rates are as follows:

- Tranche A with an interest of 4% per annum, where 0.5% will be paid in cash and 3.5% will be deferred until December 23, 2031;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- b. *Tranche B* dengan bunga 4% per tahun, di mana 0,5% akan dibayarkan secara tunai dan 3,50% ditangguhkan sampai dengan 23 Desember 2029; dan
- c. *Tranche C* tidak dikenakan bunga.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* minimal 1x berlaku pada 31 Maret 2024 sampai dengan 30 September 2031;
- *Interest Coverage Ratio (ICR)* pada tahun 2024 sampai dengan 2027 belum berlaku, *ICR* minimum 1,2x berlaku pada tahun 2028 sampai dengan 2029, *ICR* minimum 1,4x berlaku pada tahun 2030 sampai dengan 2031;
- Menjaga ekuitas selalu positif; dan
- *Gearing ratio (GR)* maksimum 6x pada tahun 2024 sampai dengan 2027, *GR* maksimum 5,75x pada tahun 2028 sampai dengan 2029, dan *GR* maksimum 5x pada tahun 2030 sampai dengan 2031.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi seluruh *covenant*.

Dalam rangka restrukturisasi, Perusahaan memberikan jaminan kepada Kreditor berupa:

- Jaminan fidusia atas tagihan proyek yang belum dijaminan yang bersifat *pari-passu* bagi semua Kreditor;
- Jaminan gadai beberapa rekening bank; dan
- Jaminan berupa aset tetap dan kepemilikan saham pada entitas anak perusahaan kepada Kreditor.

**Pinjaman Sindikasi
WIKA Serpan**

Fasilitas Kredit Sindikasi 2

Berdasarkan Akta No.15 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris, Lenny Janis Ishak, S.H., M.Kn. di Jakarta, WIKA Serpan memperoleh fasilitas kredit sindikasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Berdasarkan Akta No.267 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris, Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan, WIKA Serpan melakukan restrukturisasi atas Perjanjian Kredit Sindikasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- b. *Tranche B* with an interest of 4% per annum, where 0.5% will be paid in cash and 3.5% will be deferred until December 23, 2029; and
- c. *Tranche C* is not subject to interest.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio* minimum 1x applies on March 31, 2024 until September 30, 2031;
- *Interest Coverage Ratio (ICR)* of 2024 to 2027 is not yet effective, *ICR* minimum 1.2x applies on 2028 until 2029, *ICR* minimum 1.4 times applies on 2030 until 2031;
- Maintain positive equity; and
- *Gearing Ratio (GR)* maximum 6x in 2024 to 2027, *GR* maximum 5.75x in 2028 to 2029, and *GR* maximum 5x in 2030 to 2031.

As of December 31, 2024, the Company has comply to all *covenant*.

In the context of restructuring, the Company provides guarantees to Creditors in the form of:

- *Fiduciary guarantee* for unsecured project bills which is *pari-passu* for all creditors;
- Guarantees for several bank accounts; and
- Collateral in the form of fixed assets and share ownership in subsidiaries to creditors.

**Syndicated Loan
WIKA Serpan**

Syndicate Credit Facility 2

Based on the Deed No.15 dated June 18, 2021 made by a Notary, Lenny Janis Ishak, S.H., M.Kn. in Jakarta, WIKA Serpan obtained a syndicated credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Based on the Deed No.267 dated June 27, 2024 made by a Notary, Jimmy Tanak S.H., Mkn., in Jakarta, the WIKA Serpan carried out a restructure regarding syndicated credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Sumatera

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Mestika Dharma Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Syndicate Loan	Facility Type
Plafon	Rp2,583,287,018	Limit
Jangka Waktu	20 tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman/ 20 years from the loan agreement signing date	Time Period
Tujuan	Untuk membiayai pembangunan jalan tol ruas Serang – Panimbang dan untuk menampung bunga Kredit Investasi Pokok selama masa konstruksi termasuk masa awal operasi/ to finance the construction of the Serang – Panimbang toll road and to accommodate the interest on Principal Investment Credit during the construction period, including the initial period of operation	Purpose
Suku Bunga	6% dengan porsi efektif dan deferred/ 6% with effective and deferred portion	Interest

Perjanjian fasilitas kredit sindikasi tersebut memiliki akad persetujuan antara lain:

- Menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) yang mencerminkan komposisi baki debet pembiayaan para kreditur dengan *self-financing* maksimum pembiayaan kreditur sebesar 70% dan minimum *self-financing* debitur sebesar 30%;
- Menjaga *Debt-Service Coverage Ratio* (DSCR) di atas 1 yang mulai dievaluasi sejak tahun 2026, Apabila DSCR kurang dari 1,0 namun Debitur tetap memenuhi kewajiban jatuh tempo dianggap tidak melanggar *covenant*;
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tetap menjadi pemegang saham mayoritas dengan minimal porsi 51%;
- Menjaga ekuitas selalu positif.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan WIKA Serpan yang diatur dalam perjanjian fasilitas kredit sindikasi adalah sebagai berikut:

- Memperoleh kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan atau pihak ketiga kecuali pinjaman yang telah berjalan, pinjaman dari pemegang saham dan pinjaman pemenuhan dana tunai; dan
- Mengubah nama perusahaan dan komposisi pemegang saham.

Pada 31 Desember 2024, WIKA Serpan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 pembayaran untuk fasilitas kredit sindikasi 2 masing-masing sebesar Rp2.583.287 dan nihil.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Mestika Dharma Tbk, PT Bank ICBC Indonesia and PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung with the following details:

The syndicated credit facility agreement has an affirmative covenant as follows:

- Maintain a *Debt to Equity Ratio* (DER) ratio that reflects the composition of the creditor's *self-financing* debit balance maximum creditor financing of 70% and minimum *self-financing* of debtors of 30%;
- Maintain *Debt-Service Coverage Ratio* (DSCR) above 1 times which will begin to be evaluated from 2026. If the DSCR is less than 1.0 but the Debtor continues to fulfill its maturing obligations it is considered not to have violated the covenant;
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk remains a major shareholder with minimum portion of 51%;
- Maintain equity always positive.

Items that are prohibited for WIKA Serpan, as stated in the syndicated credit facility agreement are as follows:

- Obtain credit or other loans from financial institutions or third parties except for existing loans, loans from shareholders and cash fulfillment loans; and
- Change the company name and shareholder composition.

As of December 31, 2024, WIKA Serpan compliance with the terms and conditions of the loans

For the years ended December 31, 2024 and 2023, there were payments for syndicated loan facility 2 amounting to Rp2,583,287 and nil, respectively.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Rincian saldo pinjaman fasilitas kredit sindikasi 2 per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The details of the syndicated credit facility 2 loan balance as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 52)/ Related Parties (Note 52)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	930,758,581	931,690,273
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	465,436,441	465,902,343
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	355,604,601	355,960,562
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	294,104,188	294,398,587
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	279,216,144	279,495,640
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	186,105,996	186,292,288
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	29,776,232	29,806,038
PT Bank Mestika Dharma Tbk	19,850,774	19,870,644
PT Bank ICBC Indonesia	19,850,774	19,870,644
Sub Total	1,649,945,150	1,651,596,746
Total	2,580,703,731	2,583,287,019

Fasilitas Kredit Sindikasi 3

Berdasarkan Akta No.16 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris, Lenny Janis Ishak, S.H., M.Kn. di Jakarta, WIKA Serpan memperoleh *restatement* fasilitas kredit sindikasi Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Aceh Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan Akta No.268 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris, Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan, WIKA Serpan melakukan restrukturisasi atas Perjanjian Kredit Sindikasi Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Aceh Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Unit Usaha Syariah dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Saldo pinjaman jangka panjang fasilitas kredit sindikasi 3 yang direstrukturisasi sesuai perjanjian tersebut sebesar Rp1.575.035.392 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Syndicate Credit Based on the Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Principle	Facility Type
Plafon	Rp1,575,035,392	Limit
Jangka Waktu	20 tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman/ 20 years from the loan agreement signing date	Time Period
Tujuan	untuk membiayai pembangunan jalan tol ruas Serang – Panimbang dan untuk menampung bunga Kredit Investasi	Purpose

Syndicate Credit Facility 3

Based on the Deed No.16 dated June 18, 2021 made by a Notary, Lenny Janis Ishak, S.H., M.Kn. in Jakarta, WIKA Serpan carried out a *restatement* regarding a syndicated credit facility based on the Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Principle from PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Aceh Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Business Unit Syariah.

Based on the Deed No.268 dated June 27, 2024 made by a Notary, Jimmy Tanal, S.H., Mkn., in Jakarta, WIKA Serpan submitted a *restructure* of syndicated credit facility based on the Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Principle from PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Aceh Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Unit Usaha Syariah and PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan and Bangka Belitung Business Unit Syariah are follows:

The balance of long-term loans of syndicated credit facility 3 restructured in accordance with the agreement amounted to Rp1,575,035,392 with details as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Pokok selama masa konstruksi termasuk masa awal operasi/
*to finance the construction of the Serang – Panimbang toll
road and to accommodate the interest on Principal
Investment Credit during the construction period, including
the initial period of operation*

Suku Bunga 6% dengan porsi efektif dan *deferred* / 6% with effective and *deferred portion* Interest

Perjanjian fasilitas kredit sindikasi tersebut memiliki akad persetujuan antara lain:

- Menjaga rasio DER yang mencerminkan komposisi baki debit pembiayaan para kreditur dengan *self financing*;
- Maksimum pembiayaan kreditur sebesar 70% dan minimum *self financing* debitur sebesar 30%;
- Menjaga *DSCR* diatas 1 kali selama masa pembiayaan;
- Perusahaan tetap menjadi pemegang saham mayoritas dengan minimal porsi 51%;
- Kenaikan biaya investasi dan kekurangan dana tunai wajib disediakan debitur dan/atau pemegang saham; dan
- Menjaga ekuitas selalu positif.

The syndicated credit facility agreement has an affirmative covenant as follows:

- *Maintain a DER ratio that reflects the composition of the creditor's self-financing debit balance;*
- *Maximum creditor financing of 70% and minimum self-financing of debtors of 30%;*
- *Keep DSCR above 1 time during the financing period;*
- *The Company remains a major shareholder with minimum portion of 51%;*
- *Increases in investment costs and cash shortages must be provided by debtors and/or shareholders; and*
- *Keeping equity always positive.*

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan WIKA Serpan yang diatur dalam perjanjian fasilitas kredit sindikasi adalah sebagai berikut:

- Memeroleh kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan atau pihak ketiga kecuali pinjaman yang telah berjalan, pinjaman dari pemegang saham dan pinjaman pemenuhan dana tunai;
- Mengubah nama WIKA Serpan dan komposisi pemegang saham.

Items that are prohibited for WIKA Serpan, as stated in the syndicated credit facility agreement are as follows:

- *Obtain credit or other loans from financial institutions or third parties except for existing loans, loans from shareholders and cash fulfillment loans;*
- *Change WIKA Serpan name and shareholder composition*

Pada 31 Desember 2024, WIKA Serpan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2024, WIKA Serpan compliance with the terms and conditions of the loans

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 pembayaran untuk fasilitas kredit sindikasi 3 masing-masing sebesar Rp1.575.035 dan nihil.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, there were payments for syndicated loan facility 3 amounting to Rp1,575,035 and nil, respectively.

Rincian saldo pinjaman fasilitas kredit sindikasi 3 per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The details of the syndicated credit facility 3 loan balance as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 52)/ Related Parties (Note 52)		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	611,527,791	612,139,931
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	408,712,257	409,121,378
Sub Total	1,020,240,048	1,021,261,309
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh Syariah	262,067,010	262,329,340
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	174,673,240	174,848,088
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Unit Usaha Syariah	101,936,914	102,038,953
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah	14,543,144	14,557,702
Sub Total	553,220,308	553,774,083
Total	1,573,460,356	1,575,035,392

Selisih antara nilai wajar dan nilai pinjaman jangka Panjang (fasilitas kredit sindikasi 2 dan 3) yang di restrukturisasi sebesar Rp541.172.335 dicatat sebagai keuntungan dari restrukturisasi pinjaman pada pendapatan lain-lain (Catatan 48).

The difference between the fair value and the value of the restructured long-term loans (syndicate credit facility 2 and 3) amounting to Rp541,172,335 was recorded as a gain on loan restructuring in the other income (Note 48).

WTJJ

Pinjaman sindikasi – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2022 dari Notaris, Ariani L. Rachim, S.H. WTJJ memperoleh fasilitas kredit sindikasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen.

WTJJ

Syndicated Loans – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Based on Deed No. 1 dated April 1, 2022 from Notary, Ariani L. Rachim, S.H. the WTJJ obtained a syndicated credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the agent.

Fasilitas pinjaman sindikasi dengan rincian sebagai berikut:

Syndicated loan facility with details as follows:

Jenis fasilitas	:	Pinjaman sindikasi/ Loan Syndicated	:	Type of facility
Jangka waktu	:	Maksimal 134 bulan dari Tanggal Perjanjian Kredit (termasuk periode ketersediaan Dana dan Masa Tenggang)	:	Time of period
		Maximal 134 months from date of The Loan Agreement (including the period of availability of Funds and Grace Period)		
Masa tenggang	:	Dimulai sejak tanggal Perjanjian Kredit sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah tanggal dimulainya masa operasi atau selambat-lambatnya 37 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit	:	Grace Period
		Starting from the date of the Credit Agreement up to 3 (three) months after the date of commencement of the operating period or no later than 37 months from the date of the Credit Agreement.		
Tujuan Fasilitas Kredit Investasi: (KI Pokok)	:	Membiayai total investasi atas Proyek Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan – Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I (PKS KPBU)	:	Purpose of Investment Credit Facility (KI Principal)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

*Financing the total investment of the Cooperation
 Agreement Project with the Company – Jatiluhur I
 Regional Drinking Water Supply System
 (PKS PPP)*

Tujuan Fasilitas Kredit Investasi: <i>Interest During Construction (KI IDC)</i>	Menampung beban bunga KI Pokok dan KI IDC selama masa tenggang/ <i>Credit Facility to accommodate the interest expense of KI Principal and KI IDC during the grace period</i>	: <i>Purpose of Interest During Construction (KI IDC) Investment</i>
Ketentuan lain dalam Fasilitas: Kredit Investasi (KI Pokok)	KI Pokok digunakan untuk membiayai maksimal 70% dari biaya proyek/ <i>KI Principal is used to finance a maximum of 70% of project costs</i>	: <i>Other terms of Investment Credit Facility (KI Principal)</i>
Ketentuan lain dalam Fasilitas: Kredit Investasi <i>Interest During Construction (KI IDC)</i>	KI IDC digunakan maksimal 70% dari beban bunga KI Pokok dan KI IDC selama masa tenggang/ <i>KI IDC is used to accommodate a maximum of 70% interest expense for Principal KI and KI IDC during the grace period</i>	: <i>Other terms of Interest During Construction (KI IDC) Investment</i>
Total Plafon	: Rp1,172,588,890 (KI sebesar/ <i>amounted Rp1,080,112,590 dan/ and</i> KI IDC sebesar/ <i>amounted Rp92,476,300</i>)	: <i>Total Limit</i>
Suku Bunga	: *) Selama masa konstruksi; suku bunga deposito periode 3 bulanan dalam mata uang rupiah ditambah Margin Masa Konstruksi/ <i>During the construction period; 3-month deposit interest rate in rupiah plus Construction Period Margin</i> *) Selama masa operasi; suku bunga deposito periode 3 bulanan dalam mata uang rupiah ditambah Margin Masa Operasi/ <i>During the operation period; 3-month deposit interest rate in rupiah plus Operational Margin</i>	: <i>Interest Rate</i>

Perjanjian fasilitas kredit sindikasi tersebut memiliki
 akad persetujuan antara lain:

- *Debt to Equity (DER)* maksimal sebesar rasio pembiayaan berdasarkan fasilitas kredit terhadap porsi ekuitas, dengan porsi 70% : 30% (tujuh puluh persen dibanding tiga puluh persen) pembiayaan kreditur sebesar 70% dan minimum *self financing debitor* sebesar 30%;
- *Debt Service Coverage Ratio (DCSR)* yaitu $EBITDA + Kas + Top\ up$ dibagi dengan (Biaya bunga + Angsuran Utang Pokok) minimal 1x, top up merupakan setoran dana dari pemegang saham debitor dilakukan tahun berjalan, yang dapat berupa setoran modal dan/atau utang pemegang saham;
- Menjaga posisi modal (*equity*) WTJJ selalu positif; dan
- Memenuhi kewajiban dana cadangan pembayaran utang pada rekening cadangan pembayaran utang dengan ketentuan (i) Selama masa konstruksi; minimal sebesar 1x bunga; dan (ii) Selama masa Operasi; minimal sebesar 1x bunga dan angsuran baki debet.

The syndicated credit facility agreement has an affirmative covenant as follows:

- *Debt to Equity (DER)* maximum of the ratio of financing based on credit facilities to equity portion, with a portion of 70%: 30% (seventy percent compared to thirty percent creditor financing of 70% and minimum debtor self-financing of 30%;
- *Debt Service Coverage Ratio (DCSR)* namely $EBITDA + Cash + Top\ up$ divided by (Interest Cost + Principal Installment) at least 1x, top up is a deposit of funds from debtor shareholders made in the current year, which can be in the form of capital and/or debt shareholders;
- *Maintaining WTJJ's capital position (equity) always positive; and*
- *Fulfill the obligation of the reserve fund for debt payments in the debt payment reserve account with the following conditions:(i) During the construction period; a minimum of 1x interest; and (ii) During the Operation period; a minimum of 1x interest and debit balance installments.*

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 24 Desember 2024, WTJJ menandatangani amandemen ketiga atas perubahan Periode Ketersediaan Dana (*availability period*) Fasilitas Kredit yang sebelumnya dimulai pada tanggal perjanjian kredit sampai dengan tanggal dimulainya masa operasi atau selambat-lambatnya dalam waktu 34 (tiga puluh empat) bulan, mana yang lebih dahulu terjadi, menjadi 34 (tiga puluh empat) bulan sejak tanggal perjanjian kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WTJJ telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.082.966.370 dan Rp532.132.061.

Sampai tanggal 31 Desember 2024, belum terdapat pembayaran untuk fasilitas kredit sindikasi.

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
("BTN")**

WIKA Realty

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin, S.H., M.Kn. yang telah diubah terakhir berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Kredit No.139 tanggal 30 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Frans Polim, S.H., dengan jangka waktu sampai dengan 28 Juni 2023. Rincian fasilitas kredit sebagai berikut:

- Fasilitas kredit modal kerja konstruksi dengan *plafond* Rp135.000.000;
- Tingkat suku bunga 9,25% p.a;
- Jangka waktu 5 tahun; dan
- Pinjaman bertujuan untuk membiayai Pembangunan Apartemen Tamansari Skylounge yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pinjaman ini dijamin dengan (Catatan 11):

- Tanah dan bangunan proyek Tamansari Skylounge Makassar yang berlokasi di Kelurahan Biringkanaya, Kecamatan Sudiang, Kota Makassar. Luas tanah adalah sebesar 7.379 m² dengan SHGB No. 30547/Sudiang;
- Fidusia yang berkaitan dengan aktivitas transaksi penjualan dan/atau aktivitas operasional proyek Apartemen Tamansari Skylounge Makassar; dan
- Asuransi kerugian *all risk* dengan nilai pertanggungan minimal sebesar plafon kredit atau sesuai dengan syarat *banker's clause* dari BTN.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

On December 24, 2024, the Company signed the third amendment to the change in the availability period of the Credit Facility which previously commenced on the date of the credit agreement until the date of commencement of the operating period or no later than within 34 (thirty-four) months, whichever occurs first, to 34 (thirty-four) months from the date of the credit agreement.

As of December 31, 2024, WTJJ is compliance with the terms and conditions of the loans

The long-term loan balance as of December 31, 2024 dan 2023 amounted to Rp1,082,966,370 and Rp532,132,061, respectively.

As of December 31, 2024, there has been no payment for the syndicated credit facility.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")

WIKA Realty

Based on the Deed of Credit Agreement No. 20 dated June 29, 2018 drawn up before the Notary Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin, S.H., M.Kn. which was most recently amended based on the Addendum to the Credit Agreement Deed No.139 dated September 30, 2020 drawn up before the Notary Frans Polim, S.H., with the period of up to June 28, 2023. Details of the credit facility are as follows:

- Construction credit facilities with *plafond* Rp135,000,000;
- Interest rate 9.25% p.a;
- Time period 5 years; and
- This Loan aims for Funding the construction of the Tamansari Skylounge Apartment located in Sudiang Village, Biringkanaya District, Makassar City, South Sulawesi Province.

Collaterals for this loan (Note 11):

- Land and building of Tamansari Skylounge Makassar project which is located on Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Land area is 7,379 sqm with SHGB No.30547/Sudiang;
- Fiduciary relating to the activity of sale transaction and/ or operational activities of Tamansari Skylounge Makassar Apartment Project; and
- All risk insurance with minimum coverage of credit limit or in accordance with banker's clause requirements from BTN.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Berikut adalah pembatasan rasio BTN:

- Rasio utang terhadap total modal (DER) maksimal 500%;
- Ekuitas yang positif;
- *Debt Service Coverage* di atas 100%; dan
- Rasio modal disetor terhadap total utang WIKA Realty (utang yang ada dan yang akan ada) di BTN minimal sebesar 10%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ranty Artilia, S.H., dengan jangka waktu sampai dengan 22 Februari 2025. Rincian fasilitas kredit sebagai berikut:

- Fasilitas kredit konstruksi dengan plafond Rp406.000.000;
- Tingkat suku bunga 9,25% p.a;
- Jangka waktu 6 tahun; dan
- Pinjaman bertujuan untuk membiayai Pembangunan Apartemen Tamansari Emerald yang berlokasi di Jalan Mansion Emerald Citraland, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Pinjaman ini dijamin dengan (Catatan 11):

- Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4975/Kelurahan Lidah Kulon seluas 2.972 m² Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.01.18.03.06913, dengan Nilai Hak Tanggungan Peringkat I (Gabungan) sebesar Rp609.000.000 pada proyek apartemen Tamansari Emerald yang berlokasi di Jalan Mansion Emerald Citraland, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4976/Kelurahan Lidah Kulon seluas 3.728 m² nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.01.18.03.06911 pada proyek apartemen Tamansari Emerald yang berlokasi di Jalan Mansion Emerald Citraland, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya; dan
- Fidusia/Cessie yang berkaitan dengan aktivitas transaksi penjualan dan/atau aktifitas operasional proyek Apartemen Tamansari Emerald Surabaya yang menjadi pembiayaan kredit konstruksi BTN. Yang diikat dengan akta pemindahan dan Penyerahan (Cessie) Sebagai Agunan, tertanggal hari ini, dengan nomor sesuai nomor akta ini, dibuat dihadapan Notaris.

Berikut adalah pembatasan rasio BTN:

- Rasio utang terhadap total modal (DER) maksimal 500%;
- Ekuitas yang positif;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The following are the restrictions ratio of BTN:

- *Debt to total capital (DER) ratio up to 500%*;
- *Positive Equity*;
- *Debt Service Coverage above 100%*; and
- *The ratio of paid up capital to total WIKA Realty's debt (existing and outstanding debt) in BTN is at least 10%*.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 28 dated February 22, 2019 made before the Notary Ranty Artilia, S.H., with a period of up to February 22, 2025. Details of the credit facilities are as follows:

- *Construction credit facilities with plafond Rp406,000,000;*
- *Interest rate 9.25% p.a;*
- *Time period 6 years; and*
- *This Loan aims for Funding the construction of the Tamansari Emerald Apartment located at Jalan Mansion Emerald Citraland, Lidah Kulon Sub-District, Lakarsantri District, Surabaya City, East Java Province.*

Collaterals for this loan (Note 11) :

- *Building Use Certificate number 4975/ Kelurahan Lidah Kulon with an area of 2,972 sqm Land Identification Number (NIB): 12.01.18.03.06913, with a Mortgage Value of 1 (Combined) of Rp609,000,000 in the Tamansari Emerald apartment project located in Tamansari Emerald apartment project located in Jalan Mansion Emerald Citraland, Kelurahan Lidah Kulon, Lakarsantri District, Surabaya City;*
- *Building Use Certificate number 4976/ Kelurahan Lidah Kulon covering an area of 3,728 sqm Land Identification Number (NIB): 12.01.18.03.06911 in the Tamansari Emerald apartment project located at Jalan Emerald Citraland Mansion, Lidah Kulon Village, Lakarsantri District, Surabaya City; and*
- *Fiduciary/Cessie related to sales transaction activities and / or operational activities of the Tamansari Emerald Surabaya Apartment project which is financing BTN construction loans. That is bound by the deed of Transfer and Submission (Cessie) As Collateral, dated today, with a number of this deed number, made before a Notary.*

The following are the restrictions ratio of BTN:

- *Debt to total capital (DER) ratio up to 500%*;
- *Positive Equity*;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- Rasio agunan minimal sebesar 125%;
- *Debt Service Coverage* di atas 100%; dan
- Rasio modal disetor terhadap total utang WIKA Realty (utang yang ada dan yang akan ada) di BTN minimal sebesar 10%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Realty telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp80.661.788 dan Rp81.203.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp19.969.519 dan Rp18.819.802.

Saldo bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan Rp89.074.231.

WIKA IKON

Pada tanggal 24 Oktober 2023, WIKA IKON melakukan perjanjian dengan BTN dengan menandatangani fasilitas perbankan dengan No. 364/S/CBD/CB1/X/202 untuk fasilitas Kredit Modal Kerja, SKBDN dan *Stand by Load* sebesar Rp165.000.000. Jangka waktu sampai dengan 24 Januari 2025.

WIKA IKON menjamin tagihan termin atau pembayaran yang akan diterima dari PT Adhi Karya (Persero) berdasarkan surat perjanjian pemborongan Nomor 001/SCM/KSDI/INF/Op1/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, tagihan termin atau pembayaran yang akan diterima WIKA IKON dan PT PP (Persero) Tbk berdasarkan Surat Perjanjian Subkontraktor No.1413/SPS/SCM/PP/EPC/719002/V/2023 tanggal 1 Mei 2023, tagihan termin atau pembayaran yang akan diterima WIKON dan KSO PP-WASKITA-WIKA berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan jasa Nomor Tp.01.03/PP-WASKITA-WIKA.KSO/PROBOWANGI.3/PPJ/006/VI/2023 tanggal 6 Juli 2023.

WIKA IKON wajib memenuhi persyaratan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal 100%;
- *IRR* minimal 100% dan
- *Debt Equity Ratio* maksimal 500%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA IKON telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- *The minimum collateral ratio of 125%;*
- *Debt Service Coverage above 100%; and*
- *The ratio of paid up capital to total WIKA Realty debt (existing and outstanding debt) in BTN is at least 10%.*

As of December 31, 2024, WIKA realty is compliance with the terms and conditions of the loans.

The long-term loan balance as of December 31, 2024 dan 2023 amounted to Rp80,661,788 and Rp81,203,000, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp19,969,519 and Rp18,819,802, respectively.

The short-term loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil and Rp89,074,231, respectively.

WIKA IKON

On October 24, 2023 WIKA IKON entered into an agreement with BTN by signing a banking facility with No. 364/S/CBD/CB1/X/202 for Working Capital, SKBDN and Stand by Load Credit facilities amounting to Rp165,000,000. The period is until January 24, 2025.

WIKA IKON guarantees the installment bill or payment to be received from PT Adhi Karya (Persero) based on the contract agreement letter Number 001/SCM/KSDI/INF/-Op1/VIII/2022 dated August 1, 2022, the installment bill or payment to be received by WIKA IKON and PT PP (Persero) Tbk based on the Subcontractor Agreement Letter No.1413/SPS/SCM/PP/EPC/719002/V/2023 dated May 1, 2023, the installment bill or payment to be received by WIKON and KSO PP-WASKITA-WIKA based on the Procurement of Services Agreement Letter Number Tp.01.03/PP-WASKITA-WIKA.KSO/PROBOWANGI.3/PPJ/006/VII/2023 dated July 6, 2023.

WIKA IKON is required to fulfill certain financial ratios requirements as follows:

- *Current Ratio is no less than 100%;*
- *IRR at minium of 110% and*
- *Debt Equity Ratio at maksimum of 500%.*

As of December 31, 2024, WIKA IKON is compliance with the terms and conditions of the loans.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada 2024, WIKA IKON melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang ke pinjaman jangka pendek (Catatan 26) sebesar Rp131.020.276.

Saldo pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp125.130.279 dan Rp131.020.276.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp5.889.997 dan Rp4.972.000.

Saldo bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp125.130.279 dan Rp21.836.713.

**PT Bank Syariah Indonesia Tbk
 WIKA Beton**

Pada tanggal 6 Juni 2024, WIKA Beton telah melakukan penandatanganan perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan nomor perjanjian fasilitas No. 04/064-3/SP3/CB2 jangka waktu sampai dengan 6 Juni 2025.

Fasilitas kredit yang diberikan berupa Fasilitas Modal Kerja Transaksional sublimit, Fasilitas Bank Garansi dengan limit sebesar Rp200.000.000.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa piutang usaha yang ada maupun yang akan ada dari nasabah diikat fidusia (Catatan 6).

Rasio keuangan yang harus diperhatikan adalah:

- *Current ratio* minimal sebesar 100%;
- DER maksimal 300%; dan
- DSCR minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Beton telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan Rp30.000.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp42.000.000.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 WIKA Gedung**

Limit Kredit Rp116.000.000
 Jangka Waktu Sampai 24 September 2030 termasuk masa penarikan dan *grace period* pokok selama 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

As of 2023, WIKA IKON reclassified long term loans to short term loans (Note 26) amounting to Rp131,020,276.

The long-term loan balance as of December 31, 2024 dan 2023 amounted to Rp125,130,279 and Rp131,020,276, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp Rp5,889,997 and Rp4,972,000, respectively.

The short-term loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp125,130,279 and Rp21,836,713, respectively.

**PT Bank Syariah Indonesia Tbk
 WIKA Beton**

On June 6, 2024 WIKA Beton entered into a facility agreement with PT Bank Syariah Indonesia Tbk formerly based on the facility agreement No.04/064-3/SP3/CB2 the period is until June 6, 2025.

The credit facility provided is in the form of a Transactional Working Capital Facility sub-limit, Bank Guarantees Facilities with a limit of Rp200,000,000.

Collaterals for the agreement are in the form of trade receivables from customer existing or future customers are bound by a fiduciary (Note 6).

Financial ratios that must be considered are:

- *Current ratio* minimum of 100%
- DER maximum 300%; and
- DSCR minimal 100%.

As of December 31, 2024, WIKA Beton is compliance with the terms and conditions of the loans.

The long-term loan balance as of December 31, 2024 dan 2023 amounted to nil and Rp30,000,000, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted Rp30,000,000 and Rp42,000,000, respectively.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 WIKA Gedung**

Credit Limit Rp116,000,000
 Time Period Until September 24, 2030, including the principal drawdown period and grace period of 6 months after signing the credit agreement

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tingkat Bunga 9,5 % per tahun
Agunan Sebesar Rp145.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
- Gadai Rekening Penampung Pendapatan dan *Debt Service Account* (Rekening *Escrow*);
- Fidusia Piutang Sewa dan Piutang Proyek Graha Mantap;
- Fidusia Hasil Klaim Asuransi atas Bangunan Proyek Graha Mantap; dan
- Fidusia Hasil Klaim Bank Garansi atas Bangunan Proyek Graha Mantap.

Debitur wajib menjaga rasio keuangan yaitu *current ratio* minimal 100%, *leverage* maksimal 500%, dan EBITDA minimal sebesar 200%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Gedung telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp85.063.600 dan Rp94.001.600.

Pembayaran pokok pinjaman bank yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.938.000 dan Rp7.030.500.

Saldo bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.417.600 dan Rp8.938.000.

WIKA Beton

Pada tanggal 7 Juni 2024, WIKA Beton telah menandatangani perjanjian pembiayaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Nomor Perjanjian CBG.CB5/SIC2.SPPK.270/2024.

Fasilitas jangka panjang yang diberikan berupa Fasilitas Pembiayaan Kredit Investasi (*Refinancing*) I Committed sebesar Rp500.000.000.

Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun sejak 11 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2029. Tingkat bunga sebesar 8,65% per tahun.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa piutang, persediaan, dan aset tetap (tanah, bangunan, mesin, dan peralatan) (Catatan 20).

Rasio keuangan yang harus diperhatikan adalah:

- DSCR minimal 1,20x;
- *Current Ratio* minimal sebesar 100%; dan
- DER maksimal 400%.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Interest Rate 9,5% per annum
Collateral Amounted to Rp145,000,000 with the details are as follows:
- Revenue Accounts and Debt Service Accounts (*Escrow Account*);
- Rent and Receivables for the Graha Mantap Project;
- Rent and Receivables for the Graha Mantap Project; and
- Bank Guarantee Claims on Graha Mantap Building Projects.

Debtors are required to maintain financial ratios, namely a minimum current ratio of 100%, a maximum leverage of 500%, and a minimum EBITDA of 200%.

As of December 31, 2024, WIKA IKON is compliance with the terms and conditions of the loans.

The long-term loan balance as of December 31, 2024 dan 2023 amounted to Rp85,063,600 and Rp94,001,600, respectively.

Payments made for bank loan facility principal for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp8,938,000 and Rp7,030,500, respectively.

The short-term loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp9,417,600 and Rp8,938,000, respectively.

WIKA Beton

On June 7, 2024, WIKA Beton signed a financing agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with Agreement Number CBG.CB5/SIC2.SPPK.270/2024.

The long-term facility provided is in the form of an Investment Credit Financing Facility (*Refinancing*) I Committed amounting to Rp 500,000,000.

The term of the agreement is 5 years from June 11, 2024 to 10 June 2029. The interest rate is 8.65% per year.

Collateral for the agreement is in the form of receivables, inventories and fixed assets (land, buildings, machinery and equipment) (Notes 20).

The financial ratios that must be considered are:

- DSCR of at least 1.20x;
- Minimum Current Ratio of 100%; and
- Maximum DER 400%.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Beton telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp291.254.000 dan nihil.

Pembayaran pokok pinjaman bank yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp29.746.000 dan nihil.

Saldo bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil.

**PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada)
 WIKA Realty**

Berdasarkan Surat Utang No. 77 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Stepanie Wilamarta, S.H., dengan jangka waktu sampai dengan 8 April 2024 atas surat penawaran Fasilitas Kredit No.122/MTOOL/ III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan Surat No. 205/Pers/ AOO/IX/2020 tanggal 18 September 2020. WIKA Realty memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mayapada, dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Pinjaman Tetap Angsuran (PTA Line)/ Fixed Installment Loans (PTA Line)	Facility Type
Plafon	Rp200,000,000	Limit
Jangka Waktu	5 tahun / 5 years	Time Period
Tingkat Bunga	11.00% per tahun/ per annum	Interest Rate
Tujuan Pinjaman	Tambahan Modal Kerja/ Additional Working Capital	Purpose

Persyaratan lain dalam perjanjian kredit Bank Mayapada antara lain:

1. Debitur wajib menggunakan fasilitas yang diberikan sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam akad Surat Utang dan Surat Penawaran Kredit.
2. Membuka dan mengoperasikan secara aktif rekening Debitur di PT Bank Mayapada Internasional Tbk.
3. Menginformasikan secara tertulis kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Adanya perubahan bisnis; dan
 - Perubahan alamat korespondensi dan nomor telepon, maksimal 1 (satu) bulan setelah perubahan.
4. Menyerahkan laporan sebagai berikut:
 - Laporan keuangan *inhouse* semesteran minimal 6 (enam) bulan sekali paling lambat 3 (tiga) bulan sejak periode pelaporan; dan

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

As of December 31, 2024, WIKA Beton is compliance with the terms and conditions of the loans.

The long-term loan balance as of December 31, 2024 dan 2023 amounted to Rp291,254,000 and nil, respectively.

Payments made for bank loan facility principal for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp29,746,000 and nil, respectively.

The short-term loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil, respectively.

**PT Bank Mayapada Internasional Tbk (Bank Mayapada)
 WIKA Realty**

Based on Debt No. 77 dated March 26, 2019 made before the Notary Stepanie Wilamarta, S.H., with a period of up to April 8, 2024 on the Credit Facility offer letter No.122/MTOOL/ III/2019 dated March 22, 2019 and deed of credit agreement No. 205/Pers/AOO/IX/2020 on September 18, 2020. WIKA Realty obtained credit facility from Bank Mayapada with the detail as follows:

Other terms in credit agreement of Bank Mayapada, among others:

1. Debtors must use the facilities provided in accordance with the objectives as stated in the Debt Agreement and Credit Offer Letter.
2. Open and operate a Debtor account actively at PT Bank Mayapada Internasional Tbk.
3. Inform PT Bank Mayapada Internasional Tbk in writing about the following matters:
 - Business changes; and
 - Change of correspondence address and telephone number, a maximum of 1 (one) month after the change.
4. Submit reports as follows:
 - Semiannual inhouse financial statements of at least 6 (six) months at the latest 3 (three) months from the reporting period; and

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- Laporan keuangan *Audited* minimal 1 (satu) tahun sekali paling lambat 6 (enam) bulan sejak periode pelaporan.

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia piutang WIKA Realty senilai Rp375.000.000 (Catatan 6).

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Realty telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan Rp22.516.730.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp22.516.730 dan Rp62.822.637.

Saldo bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan Rp22.516.730.

**PT Bank CIMB Niaga Tbk
WIKA Beton**

Pada tanggal 30 Juli 2021, WIKA Beton telah menerima persetujuan perjanjian pembiayaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan perjanjian No. 121/PP/CB/JKT/2021.

Fasilitas jangka panjang yang diberikan merupakan berupa Fasilitas Pembiayaan Investasi iB, Musyarakah Mutanaqisah, Fasilitas Pembiayaan Langsung, *On Liquidation Basis*, dan *Committed* (Fasilitas PI MMQ) sebesar Rp400.000.000. Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun sejak 30 Oktober 2021 sampai dengan 30 Juli 2026.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa piutang, persediaan, dan aset tetap (tanah, bangunan, dan mesin) (Catatan 6, 11, dan 20).

Rasio keuangan yang harus diperhatikan adalah:

- *DSCR* minimal 1,20x;
- *Current Ratio* minimal sebesar 1,00x; dan
- *DER* maksimal 4,00x.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Beton telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp175.000.000 dan Rp275.000.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan Rp70.000.000.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- *Audited financial statements must be at least 1 (one) year at the latest 6 (six) months from the reporting period.*

Collaterals for this loan WIKA Realty's fiduciary receivable guarantee is Rp375,000,000 (Note 6).

As of December 31, 2024, WIKA Realty is compliance with the terms and conditions of the loans.

The long term loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil and Rp22,516,730, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp22,516,730 and Rp62,822,637, respectively.

The short term loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil and Rp22,516,730, respectively.

**PT Bank CIMB Niaga Tbk
WIKA Beton**

On July 30, 2021, WIKA Beton has obtain approval of a financing agreement with PT Bank CIMB Niaga Tbk with agreement No. 121/PP/CB/ JKT/2021.

Long-term facilities provided are in the form of iB Investment Financing Facility, Musyarakah Mutanaqisah, Direct Financing Facility, On Liquidation Basis, and Committed (PI MMQ Facility) amounted to Rp400,000,000. The term of the agreement is 5 years from October 30, 2021 until July 30, 2026.

Collaterals for the agreement are in the form of receivables, inventories and property, plant, and equipment (land, buildings, and machinery) (Notes 6, 11 and 20).

Financial ratios that must be considered are:

- *DSCR* minimal 1.20x;
- *Current Ratio* minimum of 1.00x; and
- *DER* maximum 4.00x.

As of December 31, 2023, WIKA Beton has complied with the terms and conditions of the loans.

The long term loan balance as of Desember 31, 2024 dan 2023 amounted to Rp175,000,000 and Rp275,000,000, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp100,000,000 and Rp70,000,000, respectively.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Saldo bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp40.000.000.

WIKA IKON

Pada tanggal 20 September 2023, WIKA IKON melakukan perjanjian dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan menandatangani fasilitas perbankan dengan No. 10 untuk fasilitas Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus III sebesar Rp263.000.000. Jangka waktu sampai dengan 2 Januari 2025.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa persediaan dan aset tetap (Catatan 11 dan 20).

WIKA IKON wajib memenuhi persyaratan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- DER maksimal 500%;
- Current ratio minimal 100%; dan
- IRR minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA IKON tidak memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan, Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan ISCR. Bank CIMB memberikan persetujuan atas tidak terpenuhinya persyaratan keuangan ini sesuai dengan Surat No. 246/AMD/CB/JKT/2011 Perubahan ke-23 tanggal 20 September 2023 tentang Pemenuhan Rasio Keuangan untuk Laporan Keuangan Inhouse per 31 Desember 2024.

Pada 2023, WIKA IKON melakukan reklasifikasi pinjaman jangka pendek (Catatan 26) ke pinjaman jangka panjang sebesar Rp176.913.744.

Saldo pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp173.867.057 dan Rp176.913.744.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp3.046.087 dan Rp9.335.555.

Saldo bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp173.867.057 dan Rp29.485.524.

**PT Bank Victoria International Tbk
 WIKA Realty**

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Baru No. 069/COMKPO/ BIP/OL/III/2021 pada tanggal 24 Maret 2021, WIKA Realty memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Victoria International Tbk, dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

- Fasilitas kredit FLKM dengan plafond Rp32.000.000;
- Tingkat suku bunga 12,00% p.a;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The short term loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp40,000,000, respectively.

WIKA IKON

On September 20, 2023, WIKA IKON entered into an agreement with PT Bank CIMB Niaga Tbk by signing a banking facility with No. 10 for Special Transaction Loan Facility III amounting to Rp263,000,000. The period is until January 2, 2025.

Collaterals for the agreement are in the form of inventories and property, plant, and equipment (Notes 11 and 20).

WIKA IKON is required to fulfill certain financial ratios requirements as follows:

- DER maximum of 500%
- Current ratio minimum of 100%; and
- IRR at minimum of 100%.

As of December 31, 2024, WIKA IKON did not meet the required financial ratios, Current Ratio, Debt to Equity Ratio and ISCR. Bank CIMB gave its approval for the failure to meet these financial requirements in accordance with Letter No. 246/AMD/CB/JKT/2011 Amendment 23 dated September 20, 2023 concerning Fulfillment of Financial Ratios for Inhouse Financial Reports as of December 31, 2024.

As of 2023, WIKA IKON reclassified short-term loans (Note 26) to long-term loans amounting to Rp176,913,744.

The long term loan balance as of Desember 31, 2024 dan 2023 amounted to Rp173,867,057 and Rp176,913,744, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp3,046,087 and Rp9,335,555, respectively.

The short term loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp173,867,057 and Rp29,485,524.

**PT Bank Victoria International Tbk
 WIKA Realty**

Based on Letter of Approval for the Provision of New Credit Facilities No. 069/COMKPO/ BIP/OL/III/2021 dated March 24, 2021, WIKA Realty obtained credit facility from PT Bank Victoria International Tbk, with the detail as follows:

- Credit facilities FLKM with plafond Rp32,000,000;
- Interest rate 12.00% p.a;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- Sampai dengan 24 Maret 2026; dan
- Pinjaman bertujuan untuk tambahan modal kerja untuk mengakomodasi pengembangan usaha yang dikelola WIKA Realty di bidang properti.

Pinjaman ini dijamin dengan aset tetap (Catatan 20) dengan rincian sebagai berikut:

- Unit Kantor Tamansari Hive Office yang berlokasi di Jl. DI Panjaitan Kav.2 Kel. Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Unit Kantor Lantai Dasar No.I/A, LT: 217,96 m², SHMASRS No. 1085 a/n WIKA Realty;
- Unit Kantor Tamansari Hive Office yang berlokasi di Jl. DI Panjaitan Kav.2 Kel. Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Unit Kantor Lantai 2 No.2/A LT: 258,34 m², SHMASRS No. 1087 a/n WIKA Realty; dan
- Tanah Kosong Jl. Arus No.31, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dengan luas total 5.836 m², SHGB No.0303, 0421, 0276 dan 7285 a/n WIKA Realty.

Negative Covenant dalam perjanjian kredit Bank Victoria antara lain:

- Menggunakan fasilitas kredit yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai Perjanjian Kredit;
- Melakukan merger, akuisisi, dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan WIKA Realty;
- Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya adalah mengubah Anggaran Dasar WIKA Realty, terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Komisaris;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin/ penanggung (*Corporate Guarantor*) terhadap pihak lain dan/atau menjamin harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan;
- Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/afiliasi;
- Membayar dan membagikan dividen selama jangka waktu fasilitas kredit;
- Memperoleh kredit dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan pinjaman subordinasi dari pemegang saham;
- Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah utang Debitur kepada Bank Victoria;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- Until March 24, 2026; and
- This Loan aims for additional working capital to accommodate business development which manages by WIKA Realty in property sector.

Collaterals for this loan are fixed assets (Note 20) with detail as follows:

- Office Unit Tamansari Hive Office which is located on Street DI Panjaitan Kav.2 Kel. Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Office Unit First Floor No.I/A, LT: 217,96 sqm, SHMASRS No. 1085 a/n WIKA Realty;
- Office Unit Tamansari Hive Office which is located on Street DI Panjaitan Kav.2 Kel. Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Office Unit Second Floor No. 2/A, LT: 258,34 sqm, SHMASRS No. 1087 a/n WIKA Realty; and
- Empty Land Street Arus No.31, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur with total area 5,836 sqm, SHGB No.0303, 0421, 0276 and 7285 a/n WIKA Realty.

Negative Covenant in credit agreement of Bank Victoria, among others:

- Using the received credit facilities other than the previously agreed goals and purposes in accordance with the Credit Agreement;
- Performing mergers, acquisitions, and sales or transfers or relinquishing rights to the assets of WIKA Realty;
- Hold a General Meeting of Shareholders whose agenda is to amend WIKA Realty's Article of Association, especially regarding the capital structure and composition of shareholders, as well as the composition of the Board of Directors and Commissioners;
- Binding himself as a guarantor (*Corporate Guarantor*) against other parties and/ or guaranteeing the assets of the Debtor for the benefit of other parties, except those already existing at the time this credit facility is given;
- Paying off shareholder/affiliate loans;
- Paying and distributing dividends during the term of the credit facility;
- Obtaining credit in any form from other parties for both working capital and investment, except for customary trade transactions and subordinated loans from shareholders;
- Expanding or narrowing the business which may affect the repayment of the amount owed by the Debtor to Bank Victoria;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan, kecuali investasi lainnya yang telah ada saat ini;
- Mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kepada pengadilan Niaga;
- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain; dan
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, terkecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Realty telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.460.000 dan Rp14.880.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp6.420.000.

Saldo bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.885.000 dan Rp6.420.000.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 WIKA Industri Energi**

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja untuk Tujuan Restrukturisasi No. 21 tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H., di Jakarta, WIKA Industri Energi dan bank menandatangani perjanjian addendum perjanjian pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja untuk tujuan restrukturisasi, dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

- Fasilitas KMK *Co.Decline* Menurun dengan *plafond* Rp46.223.000, tingkat suku bunga 7% p.a, jangka waktu 20 November 2024 hingga 28 Februari 2034 dan pinjaman bertujuan untuk menampung *outstanding* KMK Buyer LC/SKBDN dan SCF A/P.
- Fasilitas Bank Garansi dengan *plafond* Rp4.432.000, jangka waktu 20 November 2024 s/d 3 Maret 2026 dan pinjaman bertujuan untuk meng-cover BG Eksisting dan hanya dapat digunakan untuk addendum atas proyek eksisting agar tidak terjadi klaim bank garansi.

Jaminan atas perjanjian berupa piutang usaha nomor perikatan PJF W10.00033815.AH.05.02 17 Januari 2024, piutang usaha dan tagihan kepada pemberi

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- *Making other investments and/ or run a business that is not related to the current business, except for other existing investments;*
- *Submitting a request for bankruptcy and/ or postpone payment to the Commercial court;*
- *Transferring part or all of the rights and/ or obligations of the Debtor based on the Credit Agreement to other parties; and*
- *Providing loans to other parties, except for normal trade transactions and day-to-day operations.*

As of December 31, 2024, WIKA Realty has complied with the term and condition of loans.

The long term loan balance as of Desember 31, 2024 dan 2023 amounted to Rp8,460,000 and Rp14,880,000, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp6,420,000, respectively.

The short term loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp Rp5,885,000 and Rp6,420,000, respectively.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 WIKA Industri Energi**

Based on the Deed Addendum to the Agreement on the Provision of Working Capital Credit Facilities for the Purpose of Restructuring No. 21 dated December 10, 2024 made before Notary Sri Ismiyati, S.H., in Jakarta, WIKA Industri Energi and the bank signed an addendum agreement to the agreement on the provision of Working Capital Credit facilities for the purpose of restructuring, with the detail as follows:

- *KMK Co.Decline Facility with plafond Rp46,223,000, Interest rate 7% p.a, time period November 20, 2024 to February 28, 2034, and Loan aims for accommodate outstanding KMK Buyer, LC/SKBDN and SCF A/P.*
- *Bank Guarabtee Facility with plafond Rp4,432,000, time period November 20, 2024 to March 3, 2036, and Loan aims to cover the existing BG and can only be used as an addendum to the existing project so that there is no guarantee bank claim.*

Collaterals for the agreement are in the form of receivables, binding number PJF W10.00033815.AH.05.02 January 17, 2024,

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

kerja maupun distributor yang telah dan/atau akan dibiayai oleh BRI, nomor pengikatan PJF W10.00637599.AH.05.01 19 Desember 2023, Persediaan, nomor pengikatan PJF W10.00033816.AH.05.02 17 Januari 2024, dan Bangunan dan Sarana Pelengkap yang berdisi di SHGB 4, nomor pengikatan PJF W10.00033817.AH.05.02 17 Januari 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Industri Energi telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp46.580.050 dan nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar nihil.

Saldo bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.350.000 dan nihil.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Business receivables and bills to employers and distributors that have been and/or will be financed by BRI, binding number PJF W10.00637599.AH.05.01 December 19, 2023, Inventory, binding number PJF W10.00033816.AH.05.02 January 17, 2024 Buildings and Facilities located at SHGB 4, binding number PJF W10.00033817.AH.05.02 January 17, 2024.

As of December 31, 2024, WIKA Industri Energi has complied with the terms and conditions of the loans.

The long term loan balance as of Desember 31, 2024 and 2023 amounted to Rp46,580,050 and nil, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to nil, respectively.

The short term loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 1,350,000 and nihil, respectively.

38. Obligasi dan Sukuk Mudharabah

38. Bond and Sukuk Mudharabah

a. Obligasi

a. Bonds Payable

	2024 Rp	2023 Rp	
Nominal	8,033,880,000	8,704,880,000	Nominal
Dikurangi:			Less:
Biaya Emisi yang Belum Diamortisasi	(27,433,890)	(35,936,800)	Unamortized Issuance Cost
	8,006,446,110	8,668,943,200	
Bagian Jangka Pendek dari Obligasi	(1,733,750,000)	(1,066,000,000)	Current Portion of Bond
Total Bagian Jangka Panjang	6,272,696,110	7,602,943,200	Long Term Portion

Rincian obligasi pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The detail of bonds as of December 31, 2024 are as follows:

Uraian / Description	Rating/ Rating	Jatuh Tempo/ Maturity	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Pokok/ Principal
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A	idCCC	18 Des/ Dec 2025	8.60%	231,000,000
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B	idCCC	18 Des/ Dec 2025	9.25%	429,000,000
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C	idCCC	18 Des/ Dec 2027	9.85%	740,000,000
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A	idCCC	3 Mar/ Mar 2026	8.50%	495,000,000
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri B	idCCC	3 Mar/ Mar 2026	9.10%	745,500,000
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri C	idCCC	3 Mar/ Mar 2028	9.75%	1,259,500,000
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B	idCCC	8 Sep/ Sep 2026	8.55%	197,000,000
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	idCCC	8 Sep/ Sep 2028	9.25%	982,000,000
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A	idD	18 Feb/ Feb 2025	6.50%	593,950,000
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B	idCCC	18 Feb/ Feb 2027	7.75%	730,900,000
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C	idCCC	18 Feb/ Feb 2029	8.30%	425,150,000
Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A	idCCC	3 Nov/ Nov 2025	9.90%	479,800,000
Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri B	idCCC	3 Nov/ Nov 2027	10.50%	275,230,000
Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri C	idCCC	3 Nov/ Nov 2029	10.90%	449,850,000
				8,033,880,000

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2024 Perusahaan tidak memenuhi syarat rasio *interest bearing debt to equity ratio*, dan perbandingan EBITDA dengan beban bunga pinjaman.

Berdasarkan *Covernote* Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.K.n., No. 004/KET-N/X/2024 tanggal 16 Februari 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dengan hasil menyetujui tanggal pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I WIKTA Tahap II 2021 Seri A menjadi 3 Maret 2026.

Berdasarkan *Covernote* Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.K.n., No. 014/KET-N/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dengan hasil menyetujui tanggal pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I WIKTA Tahap I 2020 Seri A menjadi 18 Desember 2025.

Rincian obligasi pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian / Description	Rating/ Rating	Jatuh Tempo/ Maturity	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Pokok/ Principal
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A	idCCC	18 Des/ Dec 2023	8.60%	331,000,000
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B	idCCC	18 Des/ Dec 2025	9.25%	429,000,000
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C	idCCC	18 Des/ Dec 2027	9.85%	740,000,000
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A	idCCC	3 Mar/ Mar 2024	8.50%	495,000,000
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri B	idCCC	3 Mar/ Mar 2026	9.10%	745,500,000
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri C	idCCC	3 Mar/ Mar 2028	9.75%	1,259,500,000
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A	idCCC	8 Sep/ Sep 2024	8.25%	571,000,000
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B	idCCC	8 Sep/ Sep 2026	8.55%	197,000,000
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	idCCC	8 Sep/ Sep 2028	9.25%	982,000,000
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A	idCCC	18 Feb/ Feb 2025	6.50%	593,950,000
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B	idCCC	18 Feb/ Feb 2027	7.75%	730,900,000
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C	idCCC	18 Feb/ Feb 2029	8.30%	425,150,000
Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A	idCCC	3 Nov/ Nov 2025	9.90%	479,800,000
Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri B	idCCC	3 Nov/ Nov 2027	10.50%	275,230,000
Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri C	idCCC	3 Nov/ Nov 2029	10.90%	449,850,000
				8,704,880,000

Selama tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A yang jatuh tempo 8 September 2024 sudah dibayarkan oleh Perusahaan sebesar Rp571.000.000.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan/ Description	Wali Amanat/ Trustee	Perusahaan Pemeringkat/ Rating Company	Underwriter/ Underwriter	Notaris/ Notary
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020	PT Bank Mega Tbk	PT Pefindo	PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

On December 31, 2024, the Company nonfulfillment for interest bearing debt to equity ratio, and a ratio of EBITDA to loan interest expense.

Based on the *Covernote* of Notary Humberg Lie, S.H., S.E., M.K.n., No. 004/KET-N/X/2024 dated February 16, 2024, a General Meeting of Bondholders (RUPO) was held for Sustainable Bonds I Wijaya Karya Phase II 2021 with the result of agreeing on the principal repayment date for Sustainable Bonds I WIKTA Phase II 2021 Series A to be March 3, 2026.

Based on the *Covernote* of Notary Humberg Lie, S.H., S.E., M.K.n., No. 014/KET-N/X/2023 dated October 20, 2023, a General Meeting of Bondholders (RUPO) was held for Sustainable Bonds I Wijaya Karya Phase I 2020 with the result of agreeing on the principal repayment date for Sustainable Bonds I WIKTA Phase I 2020 Series A to be December 18, 2025.

The detail of bonds as of December 31, 2023 are as follows:

On February 2024, Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Phase I Year 2021 Series A due on September 8, 2024 has been paid by the Company amounting to Rp571,000,000.

The parties involved in the issuance of bonds are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Keterangan/ Description	Wali Amanat/ Trustee	Perusahaan Pemeringkat/ Rating Company	Underwriter/ Underwriter	Notaris/ Notary
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021	PT Bank Mega Tbk	PT Pefindo	PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021	PT Bank Mega Tbk	PT Pefindo	PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022	PT Bank Mega Tbk	PT Pefindo	PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022	PT Bank Mega Tbk	PT Pefindo	PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

b. Sukuk Mudharabah

b. Sukuk Mudharabah

	2024 Rp	2023 Rp	
Sukuk Mudharabah	2,272,315,000	2,781,815,000	Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah Yang Akan Jatuh Tempo	(681,225,000)	(643,800,000)	Current Portion of Sukuk Mudharabah
Total Bagian Jangka Panjang	1,591,090,000	2,138,015,000	Long Term Portion

Rincian sukuk mudharabah pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The detail of sukuk mudharabah as of December 31, 2024 are as follows:

Uraian / Description	Rating/ Rating	Jatuh Tempo/ Maturity	Nisbah/ Nisbah	Pokok/ Principal
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B	idCCC(sy)	18 Des/ Dec 2025	38.54%	159,000,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C	idCCC(sy)	18 Des/ Dec 2027	41.04%	157,000,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A	idCCC(sy)	3 Mar/ Mar 2026	37.28%	134,300,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri B	idCCC(sy)	3 Mar/ Mar 2026	39.91%	211,600,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri C	idCCC(sy)	3 Mar/ Mar 2028	42.76%	154,100,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B	idCCC(sy)	8 Sep/ Sep 2026	61.07%	91,500,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	idCCC(sy)	8 Sep/ Sep 2028	66.07%	333,000,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A	idD(sy)	18 Feb/ Feb 2025	51.17%	412,900,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B	idCCC(sy)	18 Feb/ Feb 2027	64.58%	176,050,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C	idCCC(sy)	18 Feb/ Feb 2029	69.17%	161,050,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A	idCCC(sy)	3 Nov/ Nov 2025	66.00%	109,325,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri B	idCCC(sy)	3 Nov/ Nov 2027	70.00%	32,000,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri C	idCCC(sy)	3 Nov/ Nov 2029	72.67%	140,490,000
				2,272,315,000

Rincian sukuk mudharabah pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The detail of sukuk mudharabah as of December 31, 2023 are as follows:

Uraian / Description	Rating/ Rating	Jatuh Tempo/ Maturity	Nisbah/ Nisbah	Pokok/ Principal
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A	idA(sy)	18 Des/ Dec 2023	35.83%	184,000,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B	idA(sy)	18 Des/ Dec 2025	38.54%	159,000,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C	idA(sy)	18 Des/ Dec 2027	41.04%	157,000,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A	idA(sy)	3 Mar/ Mar 2024	37.28%	134,300,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri B	idA(sy)	3 Mar/ Mar 2026	39.91%	211,600,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri C	idA(sy)	3 Mar/ Mar 2028	42.76%	154,100,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A	idA(sy)	8 Sep/ Sep 2024	58.92%	325,500,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B	idA(sy)	8 Sep/ Sep 2026	61.07%	91,500,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	idA(sy)	8 Sep/ Sep 2028	66.07%	333,000,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA(sy)	18 Feb/ Feb 2025	51.17%	412,900,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA(sy)	18 Feb/ Feb 2027	64.58%	176,050,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C	idA(sy)	18 Feb/ Feb 2029	69.17%	161,050,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A	idA(sy)	3 Nov/ Nov 2025	66.00%	109,325,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA(sy)	3 Nov/ Nov 2027	70.00%	32,000,000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri C	idA(sy)	3 Nov/ Nov 2029	72.67%	140,490,000
				2,781,815,000

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2024 Perusahaan tidak memenuhi syarat rasio *interest bearing debt to equity*, dan perbandingan EBITDA dengan beban bunga pinjaman.

Berdasarkan *Covernote* Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.K.n., No.005/KET-N/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, diadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("RUPSU") atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A menjadi 3 Maret 2026.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk mudharabah adalah sebagai berikut:

Keterangan/ <i>Description</i>	Wali Amanat/ <i>Trustee</i>	Perusahaan Pemeringkat/ <i>Rating Company</i>	Underwriter/ <i>Underwriter</i>	Notaris/ <i>Notary</i>
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020	PT Bank Mega Tbk	PT Pefindo	PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021	PT Bank Mega Tbk	PT Pefindo	PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021	PT Bank Mega Tbk	PT Pefindo	PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021	PT Bank Mega Tbk	PT Pefindo	PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022	PT Bank Mega Tbk	PT Pefindo	PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Akad Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah dengan menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*). *Shohibul mal* menyerahkan dana sedangkan *mudharib* mengelola dana tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (*nisbah* bagi hasil). Akad mudharabah telah termaktub (*embedded*) dalam Perjanjian Penerbitan (Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah).

Nisbah merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perusahaan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perusahaan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Perusahaan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh Pemegang Sukuk.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

On December 31, 2024, the Company nonfulfillment for interest bearing debt to equity ratio, and a ratio of EBITDA to loan interest expense.

Based on the *Covernote* of Notary Humberg Lie, S.H., S.E., M.K.n., No. 005/KET-N/II/2024 dated February 16, 2024, a General Meeting of Mudharabah Sukuk Holders ("RUPSU") was for Sustainable Sukuk Mudharabah I Wijaya Karya Phase II 2021 Series A to be March 3, 2026.

The parties involved in the issuance of sukuk mudharabah are as follows:

Sharia contract used in the issuance of Sukuk Mudharabah using the mudharabah contract. The mudharabah contract is a cooperation agreement between the owner of the fund (*shahibul mal*) and the manager (*mudharib*). *Shohibul mall* hands over the funds while *mudharib* manages the funds. Profits are shared based on agreement (*profit sharing ratio*). The mudharabah agreement has been embedded in the Issuance Agreement (Sukuk Mudharabah Trustee Agreement).

Nisbah is a portion of Revenue Sharing which is the right and therefore must be paid by the Company to the Sukuk Mudharabah Holder in the form of a certain percentage of the Shared Revenue that the Company agrees to be paid to the Sukuk Mudharabah Holder. The Company does not deduct zakat on the Sukuk Mudharabah profit sharing obtained by the Sukuk Holder.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK selama periode utang obligasi dan sukuk mudharabah ini sebagai berikut:

- Perbandingan aset lancar dan liabilitas lancar (*current ratio*) tidak kurang dari 100%;
- Perbandingan total Liabilitas dengan total Ekuitas (*interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 2,50x; dan
- Perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,00x.

Selama tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo 18 Desember 2023 sudah dibayarkan oleh Perusahaan sebesar Rp184.000.000 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A yang jatuh tempo 8 September 2024 sudah dibayarkan oleh Perusahaan sebesar Rp325.500.000

39. Modal Saham

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.7 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta, menyetujui peningkatan modal dasar semula Rp3.500.000.000 menjadi Rp27.500.000.000. Akta tersebut telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0003965.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 17 Januari 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.15 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan sebesar Rp6.000.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.37 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta, menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETED II") sebesar Rp3.090.311.249, sehingga susunan pemegang saham pada Perusahaan per 31 Desember 2024 menjadi:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The Company is also required to maintain certain financial ratios based on annual financial reports that had been audited by a public accounting firm registered with the OJK during the bond and sukuk mudharabah period as follows:

- Minimum ratio of current asset and current liabilities (*current ratio*) is 100%;
- Maximum ratio of total liabilities to total equity (*interest bearing debt to equity ratio*) is 2.50x; and
- Minimum ratio of EBITDA to loan interest expense is 1.00x.

On February 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Phase I Year 2020 Series A due on December 18, 2023 has been paid by the Company amounting to Rp184,000,000 and Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Phase I Year 2021 Series A due on September 8, 2024 has been paid by the Company amounting to Rp325,500,000.

39. Share Capital

Based on the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.7 dated January 17, 2024 made in presence of Notary Fathiah Helmi, S.H., in Jakarta, approved an increase in the original authorized capital of Rp3,500,000,000 to Rp27,500,000,000. This deed has received Notification of Changes to Company Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0003965.AH.01.02.TAHUN 2024 dated January 17, 2024.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 15 Year 2024 dated March 28, 2024 concerning Addition of State Capital of the Republic of Indonesia to Company Share Capital, the Republic of Indonesia has added state capital participation to the Company's share capital amounting to Rp6,000,000,000 sourced from the Revenue Budget and State Expenditures for Fiscal Year 2024.

Based on the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.37 dated June 26, 2024 made before Notary Fathiah Helmi, S.H., in Jakarta, approved an increase in issued and paid-up capital through Pre-emptive Rights II ("PMHMETED II") amounting to Rp3,090,311,249, therefore the composition of shareholders in the Company as of December 31, 2024 are:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Total Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Total Modal Saham/ Total Capital Shares Rp	
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna) Pemerintah Republik Indonesia	1	0.00	0.1	Preferred Stock (Series A Dwiwarna) Indonesian Government
Saham Biasa (Seri B) Pemerintah Republik Indonesia	36,291,702,780	91.02	3,629,170,278	Common Stock (Series B) Indonesian Government
Direksi				Director
Agung Budi Waskito (Direktur Utama)	1,434,200	0.00	143,420	Agung Budi Waskito (President Director)
Adityo Kusumo	510,000	0.00	51,000	Adityo Kusumo
Hananto Aji	1,269,000	0.00	126,900	Hananto Aji
Harum Akhmad Zuhdi	1,269,000	0.00	126,900	Harum Akhmad Zuhdi
Hadjar Seti Adji	510,000	0.00	51,000	Hadjar Seti Adji
Sumadi	850,000	0.00	85,000	Sumadi
Masyarakat	3,575,518,877	8.97	357,551,888	Public
Total	39,873,063,858	100.00	3,987,306,386	Total

Selisih atas transaksi penerimaan penyertaan modal negara dengan modal ditempatkan dan disetor dicatatkan sebagai tambahan modal disetor (Catatan 41).

The difference between the transaction of receiving state capital participation and the issued and paid-up capital is recorded as additional paid-up capital (Note 41).

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders as of December 31, 2023 are as follows:

	Total Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Total Modal Saham/ Total Capital Shares Rp	
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna) Pemerintah Republik Indonesia	1	0.00	0.1	Preferred Stock (Series A Dwiwarna) Indonesian Government
Saham Biasa (Seri B) Pemerintah Republik Indonesia	5,834,849,999	65.05	583,484,999	Common Stock (Series B) Indonesian Government
Direksi				Director:
Agung Budi Waskito (Direktur Utama)	184,200	0.00	18,420	Agung Budi Waskito (President Director)
Masyarakat	3,134,917,172	34.95	313,491,718	Public
Total	8,969,951,372	100.00	896,995,137	Total

Mutasi saham beredar pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The movement of outstanding shares as of December 31, 2024, and 2023, are as follows:

	2024 (Lembar saham/)	2023 (Lembar saham/ shares)	
Saldo awal saham beredar	8,969,951,372	8,969,951,372	Beginning balance of outstanding shares
Penambahan			Additions
Penerbitan saham baru	30,903,112,486	--	Issuance of new shares
Total	39,873,063,858	8,969,951,372	Total

40. Modal Saham yang Diperoleh Kembali

40. Treasury Stock

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 37 ("UU No.40 Tahun 2007") dan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Based on Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies in Article 37 ("Law No.40 Year 2007") and Attachment of Decree of Chairman of Supervisory agency for capital market and financial

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No. KEP-401/BL/2008 Peraturan XI.B.3: Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perseroan Publik Dalam Kondisi Pasar yang berpotensi Krisis, Perusahaan memutuskan untuk melaksanakan Program Pembelian Kembali Saham (*Buyback*).

Pada tanggal 12 Maret 2020, Perusahaan melaporkan ke OJK tentang rencana pembelian kembali saham Perusahaan dengan nomor surat: SE.01.01/A.SEKPER.00306/2020 dengan periode pelaksanaan pembelian dari tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.

Pada tanggal saham-saham yang diperoleh kembali tersebut dicatat dengan menggunakan metode nilai nominal (*par value method*) dan disajikan sebagai berikut:

Periode <i>Buy Back</i> Tanggal 12 s/ d 31 Maret 2020	Total Saham/ Number of Shares	Nilai perolehan kembali/ <i>Buyback value</i>	Nilai Nominal/ Par Value	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital	<i>Buyback Period</i> March 12 until 31, 2020
		Rp	Rp	Rp	
	1,100,000	(917,558)	(110,000)	(807,558)	

Selisih hasil pembelian kembali sebesar Rp807.558 dicatat sebagai tambahan modal disetor pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Manajemen melakukan Program Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) untuk menjaga stabilitas harga saham mengingat pada saat aksi korporasi diumumkan, harga saham tidak mencerminkan kondisi fundamental dan prospek Perusahaan. Pembelian kembali juga mengikuti arahan dari OJK yang tertuang pada edaran Nomor 3/SEOJK.04/2020 pada 9 Maret 2020. Pembelian kembali saham diharapkan dapat membuat pergerakan harga saham menjadi positif.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

institution No. KEP-401/BL/2008 of Regulation XI.B.3: *Emiten Stock Repurchasor Public Company. in crisis potential market condition, the Company shall decide to implement Stock Buyback Program.*

On March 12, 2020, the Company reported to the OJK regarding the plan to repurchase the Company's shares with letter number: SE.01.01/A.SEKPER.00306/2020 with the purchase period from March 12, 2020 to March 31, 2020.

Reacquired shares shall be recorded using par value method and preserved as follows:

Gain from the buyback amounted to Rp807,558 recorded as additional paid in capital in the consolidated statement of changes in equity.

Management conducted a Share Buyback Program (*Buyback*) to maintain stock price stability, considering that when the corporate action was announced, the share price did not reflect the Company's fundamental conditions and prospects. The Buyback also follows the direction of the OJK as outlined in letter No. 3/SEOJK.04/2020 on March 9, 2020. Shares buyback hopefully can make stock price movements positive.

41. Tambahan Modal Disetor

41. Additional Paid In Capital

	2024 Rp	2023 Rp	
Agio Penawaran Terbatas 1	5,867,110,854	5,867,110,854	<i>Right Issue Premium</i>
Agio Penawaran Umum Saham	590,769,280	590,769,280	<i>Initial Public Offering Premium</i>
Opsi Saham (Esop/Msop) Tahap 1	9,829,400	9,829,400	<i>Stage 1 of ESOP/MSOP</i>
Opsi Saham (Esop/Msop) Tahap 2	8,281,950	8,281,950	<i>Stage 2 of ESOP/MSOP</i>
Agio Opsi ESOP/MSOP Tahap 1 Dan 2	63,381,648	63,381,648	<i>Premium From ESOP/MSOP Stage 1 and 2</i>
Biaya Emisi Saham	(15,798,010)	(15,798,010)	<i>Share Issuance Cost</i>
Biaya Emisi Penawaran Terbatas 1	(41,004,523)	(41,004,523)	<i>Share Issuance Cost</i>
Agio Penjualan Saham yang Diperoleh Kembali	96,962,538	96,962,538	<i>Premium From Buy Back Treasury Stocks</i>
Akuisisi WIKA Bitumen	(37,568,017)	(37,568,017)	<i>Acquisition of Wika Bitumen</i>
Selisih Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak	13,755,557	13,755,557	<i>Difference of Tax Amnesty Assets and Liabilities</i>
Penjualan saham Diperoleh Kembali	585,618	585,618	<i>Sales from treasury stock</i>

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Pembelian Saham			
Diperoleh Kembali	(807,558)	(807,558)	Buyback from treasury stock
Penerimaan Tambahan Setoran Modal	2,997,601,911	--	Receipt from Paid in Capital
Biaya Emisi Penyertaan			State Capital Participation
Modal Negara	(10,919,980)	--	Issuance Costs
Selisih Nilai Transaksi			Difference in Values of Restructuring
Restrukturisasi Entitas (Catatan 1.e)	(501,824,487)	--	Transaction of Entities Under (Note 1.e)
Total	9,040,356,181	6,555,498,737	Total

42. Rugi Bersih per Saham Dasar

42. Loss per Share

	2024	2023	
Rugi yang Digunakan			
Dalam Perhitungan	(2,266,814,142)	(7,128,264,152)	Loss Used in Calculation
Jumlah Rata-rata Tertimbang			Weighted Average Number (Rp)
Saham (Lembar)	19,270,988,867	8,969,951,372	of Shares (Shares)
Rugi per Saham (Rp)			Loss per Share (Rp)
(Nilai Penuh)	(117.63)	(794.68)	(Full Amount)

43. Kepentingan Non Pengendali

43. Non Controlling Interest

Mutasi saldo kepentingan non pengendali untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Movement on non controlling interest for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal Tahun	3,821,734,696	4,529,393,650	Balance at Beginning of Year
Setoran Modal Entitas Anak	28,667,000	19,281,000	Paid in Capital of Subsidiaries
Laba Neto Tahun Berjalan	(247,000,193)	(696,274,845)	Net Income for the Current Year
Penghasilan komprehensif lain	(7,783,391)	(6,620,188)	Other Comprehensive Income
Pembayaran Dividen Kepada			Payment Dividends to
Kepentingan Non Pengendali	(5,685,895)	(22,648,825)	Non Controlling Interest
Perubahan Ekuitas Entitas Anak	118,120,978	--	Changes In Equity of
Pelepasan Entitas Anak	(705,314,200)	(1,396,096)	Subsidiaries
Saldo Akhir Tahun	3,002,738,995	3,821,734,696	Divestment of Subsidiaries
			Balance at End of Year

Saldo kepentingan non pengendali pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Balance of non controlling interest as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
WIKI Beton	1,531,209,110	1,279,946,522
WIKI Gedung	802,142,634	759,363,604
WIKI Serpan	342,084,740	208,028,162
WIKI Realty	195,410,458	1,389,556,322
WTJJ	81,493,194	101,673,119
WIKI Rekon	47,755,989	16,641,283
WIKI Ikon	2,642,870	66,525,684
Total	3,002,738,995	3,821,734,696

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

44. Pendapatan Neto

44. Net Revenues

	2024 Rp	2023 Rp	
Infrastruktur dan Gedung	9,415,344,183	11,857,978,134	Infrastructure and Building
Industri	5,295,532,485	5,017,322,485	Industry
Energi dan <i>Industrial Plant</i>	3,334,976,765	4,101,581,408	Energy and Industrial Plant
Hotel	878,146,741	869,199,145	Hotel
Realty dan Properti	163,915,391	600,409,791	Realty and Property
Investasi	154,811,166	83,864,821	Investment
Total	19,242,726,731	22,530,355,784	Total

Rincian pemberi kerja pendapatan neto Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Details of the project owners of the Group's net revenues for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 52)/Related Parties (Note 52)	5,430,640,044	5,723,038,831
Pihak Ketiga/Third Parties		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bendahara RI	2,643,964,153	1,497,426,869
Badan Pengatur Jalan Tol	912,498,172	476,746,945
PT Dua Samudra Perkasa	625,755,850	775,225,823
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	592,827,789	814,076,636
Nasabah Hotel Indonesia Properti	536,697,090	558,494,452
PT Surya Khatulistiwa Sentosa	465,730,450	--
PT Chiyoda International Indonesia	328,760,460	588,645,034
Bank Indonesia	307,114,006	310,891,502
Unit Hotel WIKA Realty	278,834,019	269,457,561
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	246,386,567	264,039,167
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	241,156,713	225,952,609
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	240,249,201	137,528,919
Yayasan Kartika Eka Paksi	231,540,400	198,360,916
Bina Penataan Bangunan I dan Prasarana Strategis Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan	228,136,787	--
PT Kaltim Prima Coal	225,596,414	79,665,467
PT Jhonlin Baratama	215,693,104	--
PT Mitra Murni Perkasa	200,080,195	39,703,939
PT Sentosa Khatulistiwa Nusantara	195,816,250	--
RS Umum Persahabatan	174,151,222	253,256,534
PT Risland Sutera Property	173,335,780	102,631,596
PT Indah Kiat Pulp & Paper	168,505,297	85,705,697
PT Freeport Indonesia	163,699,108	439,299,339
PT Sirius Khatulistiwa Nusantara	146,166,150	--
Institut Teknologi Bandung	115,378,267	4,200
Universitas Jambi Ristek	111,562,003	87,028,651
KSO Brantas Abipraya - Guntur Satria Perkasa	103,299,329	68,003,126
PT Surya Dhoho Investama	101,783,407	2,051,653,643
Qingdao Bright Century	100,776,651	71,406,120
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	75,215,092	352,279,962
PT Mega Andalan Sukses	28,859,259	168,657,275
Dispora Pemprov DKI	25,358,570	146,844,133
PT Lintas Marga Sedaya	9,936,846	263,959,488

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalbar Ditjen	8,015,051	166,659,417
PT Citra Karya Jabar Tol	4,040,017	683,388,819
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Serayu - Opak	604,337	123,765,626
Nasabah Water Heater	277,910	123,109,590
PT Bintaro Serpong Damai	--	542,601,418
Nasabah Tamansari Pelabuhan Ratu	--	124,572,834
PT Trans Bumi Serbaraja	--	119,508,093
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bendahara Wilayah Jakarta	--	114,610,320
Lain-lain/ Others (Masing-masing di bawah Rp100.000.000/ each below Rp100,000,000)	3,584,284,771	4,482,155,235
Sub total	<u>13,812,086,687</u>	<u>16,807,316,953</u>
Total	<u>19,242,726,731</u>	<u>22,530,355,784</u>

Terdapat transaksi penjualan yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari pendapatan yaitu Kementerian PUPRA Bendahara Republik Indonesia.

There are sale transactions that exceed 10% (ten percent) of revenue namely Kementerian PUPRA Bendahara Republik Indonesia.

45. Beban Pokok Pendapatan

45. Cost of Revenues

	2024 Rp	2023 Rp	
Infrastruktur dan Gedung	8,817,186,738	10,961,444,919	Infrastructure and Building
Industri	4,899,226,719	4,652,857,245	Industry
Energi dan Industrial Plant	3,042,781,658	3,858,747,249	Energy and Industrial Plant
Realty dan Properti	710,931,795	381,449,189	Realty and Property
Hotel	112,963,421	727,676,604	Hotel
Investasi	141,034,012	86,034,210	Investment
Total	<u>17,724,124,343</u>	<u>20,668,209,416</u>	Total

Rincian beban pokok pendapatan Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Details of Group's cost of revenues for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Infrastruktur dan Gedung			Infrastructure and Building
Biaya Material	2,521,440,903	3,782,494,121	Material Costs
Subkontraktor	2,494,485,500	3,205,995,856	Subcontractor
Biaya Konstruksi Atas Proyek Konsesi	1,693,520,617	1,238,037,701	Construction of Cost of Concession Project
Biaya Upah	1,148,754,995	1,092,442,063	Wages
Biaya Tidak Langsung	549,098,658	898,257,946	Indirect Costs
Biaya Peralatan	409,886,065	744,217,232	Equipment Costs
Total Infrastruktur dan Gedung	<u>8,817,186,738</u>	<u>10,961,444,919</u>	Total Infrastructure and Building
Energi dan Industrial Plant			Energy and Industrial Plant
Biaya Material	1,696,421,874	1,823,409,234	Material Costs
Subkontraktor	808,544,165	1,217,025,459	Subcontractors
Biaya Tidak Langsung	284,724,540	394,640,259	Indirect Costs
Biaya Peralatan	142,102,337	291,743,529	Equipment Costs
Biaya Upah	110,988,742	131,928,768	Wages
Total Energi dan Industrial Plant	<u>3,042,781,658</u>	<u>3,858,747,249</u>	Total Energy and Industrial Plant

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Industri			Industry
Persediaan Awal			Finished Goods at Beginning of the Year
Barang Jadi	1,277,014,279	1,337,161,924	Finished Goods Production
Produksi Barang Jadi	3,046,889,934	3,428,513,475	Available Goods for Sale
Barang Tersedia Untuk Dijual	4,323,904,213	4,765,675,399	Finished Goods at End of the Year (Note 11)
Persediaan Akhir			Cost of Goods Sold
Barang Jadi (Catatan 11)	(703,630,614)	(1,277,014,279)	Project Implementation Costs
Harga Pokok Penjualan	3,620,273,599	3,488,661,120	Material Costs
Biaya Pelaksanaan Proyek	877,009,868	785,370,940	Material Industry
Beban Material	360,700,957	302,999,728	Direct Labour Costs
Material Industri	22,294,232	66,135,110	Total Industry
Beban Upah	18,948,063	9,690,347	
Total Industri	4,899,226,719	4,652,857,245	Hotel
Hotel	112,963,421	727,676,604	
Realti dan Properti	710,931,795	381,449,189	Realty and Property
Investasi	141,034,012	86,034,210	Investment
Total Beban Pokok Pendapatan	17,724,124,343	20,668,209,416	Total Cost of Revenues

Tidak terdapat transaksi pembelian yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari pendapatan.

There are no purchase transactions that exceed 10% (ten percent) of revenue.

Dalam beban pokok pendapatan terdapat penyusutan aset tetap dan aset hak guna dan amortisasi aset takberwujud dengan rincian sebagai berikut:

In the cost of revenue there is depreciation of fixed assets and right-of-use assets and amortization of intangible assets are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Penyusutan			Depreciation
Aset Tetap (Catatan 20)	304,747,917	347,253,410	Fixed Assets (Note 20)
Aset Hak Guna (Catatan 25)	45,976,190	40,756,125	Right-of- Use Assets (Note 25)
Amortisasi (Catatan 24)	101,201,525	103,660,864	Amortization (Note 24)
Total	451,925,632	491,670,399	Total

46. Beban Penjualan

46. Selling Expenses

Beban penjualan merupakan beban-beban sehubungan dengan penawaran jasa konstruksi dan penjualan produk diversifikasi lainnya beban untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.059.121 dan Rp10.271.158.

Selling expenses are expenses relating to the tendering of construction services and sale of other diversified products expenses for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp20,059,121 and Rp10,271,158, respectively.

47. Beban Umum dan Administrasi

47. General and Administrative Expenses

	2024 Rp	2023 Rp	
Personalia	916,057,907	736,736,970	Personnel
Fasilitas kantor	171,678,862	118,653,623	Office facilities
Penelitian dan pengembangan	65,005,291	36,324,256	Research and development

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Informatika	37,299,141	25,278,146	<i>Informatics</i>
Penyusutan	18,439,609	44,314,564	<i>Depreciation</i>
Administrasi Bank	15,395,325	12,690,026	<i>Bank Administration</i>
Total	1,223,876,135	973,997,585	Total

48. Penghasilan dan Beban Lain-lain

48. Other Income and Other Expenses

	2024 Rp	2023 Rp	
Penghasilan Lain-lain			Other Income
Keuntungan dari Restrukturisasi			<i>Gain arise from Loan</i>
Pinjaman (Catatan 37)	4,492,115,217	--	<i>Restructuring (Note 37)</i>
Pemulihan Penurunan Nilai	854,836,267	630,298,270	<i>Recoveries of Impairment</i>
Pendapatan Bunga Bank	76,064,249	29,321,974	<i>Bank Interest Income</i>
Selisih Nilai Wajar			<i>Increase in Fair Value of</i>
Properti Investasi			<i>Investment Property</i>
(Catatan 19)	11,460,100	1,224,825	<i>(Note 19)</i>
Selisih Nilai Wajar			<i>Fair Value Difference on</i>
Investasi Jangka Panjang			<i>Other Long Term Investments</i>
Lainnya (Catatan 23)	5,500,000	2,630,390	<i>(Note 23)</i>
Laba Selisih Kurs	4,013,097	--	<i>Gain in Foreign Exchange</i>
Penjualan Aset (Catatan 20)	1,694,691	--	<i>Sales of Fixed Assets (Note 20)</i>
Total	5,445,683,621	663,475,459	Total
Beban Lain-lain			Other Expenses
Kerugian Penurunan Nilai	(2,468,764,104)	(3,266,688,635)	<i>Impairment Loss</i>
Pembebanan Biaya			<i>Imposition of</i>
Dibayar di Muka	(312,128,319)	(215,762,547)	<i>Prepaid Expenses</i>
Beban Penurunan Nilai Uang			<i>Impairment of</i>
Muka Investasi	(106,539,939)	--	<i>Advance of Investment</i>
Beban Penurunan Nilai			<i>Impairment of</i>
Ventura Bersama (Catatan 18)	(27,201,505)	(17,483,107)	<i>Joint Venture (Noted 18)</i>
Penghapusan Pekerjaan			<i>Writte off Construction</i>
dalam Proses Konstruksi	--	(763,112,316)	<i>Work in Progress</i>
Pembatalan Pembelian			<i>Canceled Order of</i>
Properti Investasi	--	(258,624,953)	<i>Investment Property</i>
Pembebanan Persediaan	--	(63,446,550)	<i>Imposition of Inventories</i>
Rugi Selisih Kurs	--	(11,468,839)	<i>Loss in Foreign Exchange</i>
Kerugian Penjualan Aset Tetap	--	(800,884)	<i>Loss ons Sales of Fixed Aseets</i>
Lain-lain - Neto	(819,714,937)	(772,416,474)	<i>Others - Net</i>
Total	(3,734,348,804)	(5,369,804,305)	Total

Keuntungan dari restrukturisasi pinjaman terdiri dari Perusahaan sebesar Rp3.944.586.059, WIKA Serpan sebesar Rp541.172.336, dan WIKA Industri Energi sebesar Rp6.356.822.

Gain on loan restructuring in Company amounting to Rp3,944,586,059 and WIKA Serpan amounting to Rp541,172,336 and WIKA Industri Energi amounting to Rp6,356,822.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

49. Beban Keuangan

Beban keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024 Rp	2023 Rp
Bunga	2,804,558,305	3,206,109,247
Beban Amortisasi Diskonto	478,332,524	--
Total	3,282,890,829	3,206,109,247

49. Finance Cost

Financial expense for the years ended December
31, 2024 and 2023 consist of:

Interest Expense
Discounted Amortization Expense
Total

**50. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata
Uang Asing**

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, Grup
mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata
uang asing sebagai berikut:

**50. Monetary Assets and Liabilities
Denominated In Foreign Currencies**

As of December 31, 2024 and 2023, the Group has
monetary assets and liabilities denominated in
foreign currencies as follow:

	2024		2023		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Setara Rupiah/ Rupiah/ Equivalent	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Setara Rupiah/ Rupiah/ Equivalent	
Aset					Assets
Kas dan Setara Kas					Cash and Cash Equivalents
EUR	130,292	2,195,584	129,850	2,225,571	EUR
USD	2,319,383	37,485,869	4,590,132	70,761,476	USD
DZD	389,464,736	46,541,036	405,073,252	46,765,707	DZD
SBD	--	--	139	254	SBD
MYR	175,111	633,284	20,201	67,517	MYR
JPY	1,056,389	108,132	1,066,363	116,817	JPY
MMK	81,255,043	630,010	81,254,846	595,436	MMK
TWD	28,330	13,546	28,545	13,681	TWD
AED	64	282	64	267	AED
SGD	9,553	113,861	9,672	113,280	SGD
CFA	1,644,900	42,113	1,716,065	43,935	CFA
PHP	11,209,361	3,124,105	--	--	PHP
Piutang Usaha					Trade Account Receivables
DZD	691,654,820	82,652,751	701,695,823	82,652,751	DZD
USD	386,801	6,251,479	394,340	6,251,479	USD
MYR	4,937,038	17,854,698	5,328,361	17,854,698	MYR
TWD	9,598,957	4,589,703	9,248,585	4,589,703	TWD
Piutang Retensi					Retention Receivables
USD	185,060	2,990,934	188,667	2,990,934	USD
MYR	145,387,856	1,127,263	287,398,048	2,173,371	MYR
TWD	3,942,651	1,885,163	3,933,290	1,885,163	TWD
Aset Moneter Dalam Mata Uang Asing		208,239,813		239,102,040	Monetary Assets in Foreign Currencies

51. Informasi Segmen

1. Infrastruktur dan Gedung terdiri dari bidang usaha jasa konstruksi sipil umum yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dermaga, bandara, bendungan, irigasi, dan gedung.
2. Energi dan *Industrial Plant* meliputi bidang usaha jasa konstruksi bidang energi dan EPC serta jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Pada segmen ini termasuk investasi pada sektor kelistrikan yang mayoritas pendanaan dan operasinya dikendalikan oleh Grup.

51. Segment Information

1. Infrastructure and Building consists of civil construction services such as general construction and infrastructure example roads, bridges, harbours, airports, dams, irrigation, and building.
2. Energy and Industrial Plant consists of energy and EPC construction, field operations and maintenance services of the power plant. In this segment includes investments in the electricity sector with majority financing and its operation controlled by the Group.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

 For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- Industri terdiri dari usaha beton pracetak seperti tiang pancang, girder, bantalan rel kereta api, konstruksi baja, spare part otomotif, produk konversi energi dan industri pertambangan.
 - Realty dan properti terdiri dari usaha landed housing dan high rise building seperti apartemen serta pengelolaan gedung dan kondotel.
 - Hotel terdiri dari barang dan jasa diberikan kepada tamu hotel atau pengunjung hotel restoran.
 - Pendapatan investasi berasal dari penggunaan jalan tol dari aset konsesi.
- Industry consisting of a concrete precast of piles, a girder, rail pad, steel construction, automotive spare parts, energy conversion product and mining industry.
 - Realty and property consists of the business landed housing and high rise such as an apartment building and building and condotel management.
 - Hotels consist of goods and services provided to hotel guests or hotel restaurant visitors.
 - Investment revenue comes from the use of toll roads from concession assets.

	2024 (Dalam Jutaan / in Million)								
	Infrastruktur dan Gedung/ Infrastructure and Building	Energi dan Industri/ Energy and Industrial Plant	Industri/ Industry	Realty dan Properti/ Realty and Property	Investasi/ Investment	Hotel/ Hotel	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Penjualan	10.561.436	3.334.977	5.295.532	163.915	154.811	878.147	(1.146.091)	19.242.727	Sales
Beban Pokok Penjualan	(9.962.238)	(3.042.762)	(4.899.227)	(112.963)	(141.033)	(719.952)	1.146.091	(17.224.224)	Cost of Goods Sold
Laba Bruto	599.198	292.195	396.305	50.952	13.778	158.195	--	1.618.603	Gross Profit
Beban Usaha	(767.452)	(104.450)	(189.400)	(155.464)	(9.060)	--	(23.069)	(1.243.935)	General Expenses
Laba Ventura Bersama	1.264.241	--	1.586	231	(1.238.916)	--	(341.990)	(606.662)	Profit from Ventures
Bagian Rugi dari Entitas Asosiasi	--	--	--	--	(261.697)	--	30.660	(21.037)	Share in Loss of Associates
Beban Keuangan	(1.991.902)	(58.634)	(70.962)	(823.257)	(225.683)	(109.305)	(3.148)	(3.282.891)	Finance Costs
Beban Pajak Penghasilan Final	(336.804)	--	--	--	--	--	--	(336.804)	Final Income Tax Expenses
Pendapatan (Beban) Lain-lain	2.447.939	(743.393)	(46.041)	(354.763)	(2.942)	(20.438)	430.973	1.711.335	Other Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.219.150	(612.934)	88.316	(1.282.301)	(2.004.520)	37.472	93.426	(2.461.391)	Profit Before Income Tax
Penghasilan (Beban) Pajak	(77)	--	(39.841)	(230)	(12.267)	--	--	(52.421)	Current Tax
Laba (Rugi) Neto	1.219.073	(612.934)	48.475	(1.282.531)	(2.016.787)	37.472	93.426	(2.513.812)	Net Income (Loss)
Informasi Lainnya									Other Information
Jumlah Aset Segmen	55.807.402	4.566.544	10.546.521	15.343.189	4.701.827	1.107.686	(28.514.220)	63.556.343	Total Segment Assets
Jumlah Liabilitas Segmen	38.312.788	3.811.758	7.267.076	11.961.587	3.433.714	919.303	(14.021.302)	51.684.924	Total Segment Liabilities

	2023 (Dalam Jutaan/ in Million)								
	Infrastruktur dan Gedung/ Infrastructure and Building	Energi dan Industri/ Energy and Industrial Plant	Industri/ Industry	Realty dan Properti/ Realty and Property	Investasi/ Investment	Hotel/ Hotel	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Penjualan	12.760.695	4.101.591	5.017.222	800.410	83.885	869.199	(922.716)	22.530.356	Sales
Beban Pokok Penjualan	(11.884.161)	(3.658.747)	(4.652.857)	(391.445)	(88.034)	(727.677)	922.716	(20.668.209)	Cost of Goods Sold
Laba Bruto	876.534	242.834	364.465	218.965	(2.169)	141.522	--	1.862.147	Gross Profit
Beban Usaha	(659.197)	(106.894)	(49.104)	(140.510)	(20.528)	(8.026)	--	(984.259)	General Expenses
Laba Ventura Bersama	190.721	(241.095)	453	(177)	(57.446)	--	29.102	(139.269)	Profit from Ventures
Bagian Rugi dari Entitas Asosiasi	--	--	(1.620)	1.066	(86.202)	--	(4.388)	(91.144)	Share in Gain (Loss) of Associates
Beban Keuangan	(1.810.511)	(85.136)	(83.894)	(805.688)	(277.640)	(43.136)	--	(3.206.110)	Finance Costs
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(3.149.103)	(515.283)	(43.022)	(1.454.293)	(21.527)	(1.164)	(42.619)	(5.206.897)	Other Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(4.591.526)	(706.395)	187.178	(2.260.637)	(485.417)	89.186	(17.905)	(7.755.540)	Profit Before Income Tax
Penghasilan (Beban) Pajak	(18.944)	(29.322)	(63.440)	28.215	(6.631)	--	--	(58.954)	Current Tax
Laba (Rugi) Neto	(4.610.470)	(734.717)	123.738	(2.232.422)	(472.076)	89.186	(17.905)	(7.814.540)	Net Income (Loss)
Informasi Lainnya									Other Information
Jumlah Aset Segmen	46.092.624	4.143.734	10.633.207	14.176.315	5.124.034	3.855.847	(17.954.685)	65.981.236	Total Segment Assets
Jumlah Liabilitas Segmen	33.337.496	5.600.241	6.192.216	12.156.767	4.141.696	1.892.561	(6.821.302)	56.409.623	Total Segment Liabilities

Segmen Geografis

Data berikut menunjukkan distribusi dari seluruh pendapatan, laba bersih dan aset berdasarkan geografis:

	Dalam Jutaan/ in Million	
	Aset Segmen/ Segmen Assets	
	2024	2023
	Rp	Rp
Indonesia	63,556,343	65,742,025
Luar negeri	--	239,211
Total	63,556,343	65,981,236

Indonesia

Overseas

Total

	Dalam Jutaan/ in Million	
	Pendapatan/ Revenues	
	2024	2023
	Rp	Rp
Indonesia	19,242,727	22,528,969
Luar negeri	--	1,387
Total	19,242,727	22,530,356

Indonesia

Overseas

Total

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Dalam Jutaan/ in Million			
Laba Neto Tahun Berjalan/ Net Income for The Year			
	2024	2023	
	Rp	Rp	
Indonesia	(2,513,814)	(6,291,205)	Indonesia
Luar negeri	--	(1,533,334)	Overseas
Total	(2,513,814)	(7,824,539)	Total

52. Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi

**52. Balanced and Transaction of Related Parties
Transaction**

Sifat pihak berelasi

1. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham utama Perusahaan;
2. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas di mana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup;
4. Entitas yang merupakan investasi pada asosiasi dari Grup;
5. Entitas yang merupakan ventura bersama dari Grup;
6. Manajemen kunci yang meliputi anggota dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan; dan
7. Dana Pensiun Wijaya Karya adalah entitas yang didirikan oleh Perusahaan untuk mengelola program manfaat imbalan dan iuran pensiun Perusahaan.

Ikhtisar pihak-pihak yang berelasi dengan Grup adalah sebagai berikut:

Nature of Relationship

1. The Government of the Republic of Indonesia represented by Ministry of Finance, is the majority stockholder of the Company;
2. All entities that are owned and controlled by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia including entities where the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has significant influence: State-Owned Enterprise (SOE);
3. Related parties which main shareholder is the same with Group;
4. The entities which part of the investment in associates;
5. The entities which part of joint ventures;
6. Key management personnel includes Commissioners and Directors of the Company; and
7. Dana Pension Wijaya Karya is an entity cofounded by the Company to manage the Company's defined benefit and contribution pension plan.

The summary of parties having the special relations with the Group is as follows:

Pihak berelasi/ Related Parties	Sifat Pihak Berelasi/ The Nature of Relationship	Transaksi/ Transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening, Deposito Berjangka, Utang Usaha-Supply Chain Financing, Pinjaman Jangka Pendek, Pinjaman Sindikasi, dan Pinjaman jangka panjang/ Placement of Accounts, Time Deposits, Account Payable- Supply Chain Financing, Short Term Loans, Syndicate Loan and Loan Term Loan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening, Deposito Berjangka, Utang Usaha-Supply Chain Financing dan Pinjaman Jangka Pendek/ Placement of Accounts, Time Deposits, Account Payable- Supply Chain Financing and Short Term Loans
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening, Deposito Berjangka, Utang Usaha-Supply Chain Financing, Pinjaman Jangka Pendek, Pinjaman Sindikasi, dan Pinjaman jangka panjang/ Placement of Accounts, Time Deposits, Account Payable- Supply Chain Financing, Short Term Loans, Syndicate Loan and Loan Term Loan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening, Deposito Berjangka, Utang Usaha-Supply Chain Financing, Pinjaman Jangka Pendek, Pinjaman Sindikasi, dan Pinjaman jangka panjang/ Placement of Accounts, Time Deposits, Account Payable- Supply Chain Financing, Short Term Loans, Syndicate Loan and Loan Term Loan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening, Deposito Berjangka, Utang Usaha-Supply Chain Financing, Pinjaman Jangka Pendek, Pinjaman Sindikasi, dan Pinjaman jangka panjang/ Placement of Accounts, Time Deposits, Account Payable- Supply Chain Financing, Short Term Loans, Syndicate Loan and Loan Term Loan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia-Indonesia Eximbank	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening dan Pinjaman Jangka Pendek/ Placement of Accounts and Short Term Loans

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Pihak berelasi/ Related Parties	Sifat Pihak Berelasi/ The Nature of Relationship	Transaksi/ Transaction
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses Konstruksi, Pendapatan/Trade Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due From Customers, Construction Work in Progress, Revenue
PT Indah Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha dan Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja/Trade Receivables and Gross Amount Due From Customers
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Utang Pemasok dan Utang Subkontraktor, Pendapatan/Trade Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due From Customers, Supplier Payables and Subcontractor Payables, Revenue
PT Bio Farma (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha, Piutang Retensi dan Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pendapatan/Trade Receivables and Gross Amount Due From Customers, Revenue
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha dan Pendapatan/Trade Receivables and Revenue
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Utang Pemasok dan Utang Subkontraktor, Pendapatan/Trade Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due From Customers, Supplier Payables and Subcontractor Payables, Revenue
PT Bukit Asam Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha dan Pekerjaan dalam Proses, Pendapatan/ Trade Receivables, Working in Progress, Revenue
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Piutang Lain-lain, Pendapatan/ Trade Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due From Customers, Other Receivables, Revenue
PT Aneka Tambang Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Pendapatan/Trade Receivables, Gross Amount Due From Customers, Working in Progress, Revenue
PT Hutama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Pendapatan/Retention Receivables, Gross Amount Due From Customers, Working in Progress, Revenue
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja dan Pekerjaan dalam Proses/ Gross Amount Due From Customers and Working in Progress
PT Pelindo III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja dan Pendapatan/Gross Amount Due From Customers and Revenue
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Pendapatan/Gross Amount Due From Customers, Working in Progress and Revenue
PT Pelindo II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja dan Pekerjaan dalam Proses/ Gross Amount Due From Customers and Working in Progress
Lembaga Manajemen Aset Negara	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Lain-lain/Other Receivables
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Utang Pemasok dan Utang Subkontraktor/ Supplier Payables and Subcontractor Payables
PT Pindad (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Utang Pemasok dan Utang Subkontraktor/ Supplier Payables and Subcontractor Payables
PT Dahana (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Utang Pemasok dan Utang Subkontraktor/ Supplier Payables and Subcontractor Payables
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Utang Pemasok dan Utang Subkontraktor/ Supplier Payables and Subcontractor Payables
PT Pegadaian (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Utang Lain-lain/Other Payable
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Utang Lain-lain/Other Payable
PT Sarinah (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Pendapatan/Revenue
PT Timah Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Pendapatan/Revenue
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Pinjaman Jangka Pendek dan Pinjaman Sindikasi/Short Term Loans and Syndicate Loan
PT Indonesia Infrastructure Finance	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Pinjaman Jangka Pendek/ Short Term Loans
Koperasi Karyawan PT Wijaya Karya PT Jasmarga Toll Road Maintenance	Pemegang saham/ Shareholders Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Deposito Berjangka/ Time Deposits, Utang Lain-lain/Other Payable
PT Waskita Beton Precast Tbk	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha/ Trade Receivables, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja/ Gross Amount Due From Customers, Pendapatan/ Revenue, dan Piutang Retensi/ Retention Receivables
PT Angkasa Pura II (Persero)	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha dan Piutang Retensi/ Trade Receivable and Retention Receivables

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Pihak berelasi/ Related Parties	Sifat Pihak Berelasi/ The Nature of Relationship	Transaksi/ Transaction
PT Pertamina Patra Niaga	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha/Trade Receivables, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja/Gross Amount Due from Customers
PT Jasa Marga Toll Maintenance	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Retensi/Retention Receivables
PT Kaltim Amonium Nitrat	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Pendapatan/ Gross Amount Due From Customers, Working in Progress and Revenue
PT Kilang Pertamina Internasional	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja dan Pekerjaan dalam Proses/Gross Amount Due From Customers, Working in Progress
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Pekerjaan dalam Proses/ Working in Progress
PT Patra Jasa	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Lain-lain/Other Receivables
PT Gesits Motor Nusantara	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha/Trade Receivables, Piutang Lain-lain/Other Receivables
PT Solusi Bangun Beton	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Utang Pemasok dan Utang Subkontraktor/ Supplier Payables and Subcontractor Payables
PT Bank Raya Indonesia Tbk	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Penempatan Rekening/ Placement of Accounts
PT Pertamina Energi Terminal	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Usaha/Trade Receivables, Pendapatan/Revenue, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja/Gross Amount Due from Customers
PT PP Semarang Demak	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pendapatan/Trade Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due From Customers, Revenue
KSO HSR CC	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja, Pendapatan/Trade Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due From Customers, Revenue
KSO WIKA-CRBC-PP	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Usaha/Trade Receivables
KSO WIKA-HK-BAP	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Usaha/Trade Receivables
KSO WIKA-Jakon	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Usaha/Trade Receivables
KSO WIKA-BKU	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Usaha/Trade Receivables
PT Bandara Internasional Batam	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja dan Pendapatan/Gross Amount Due From Customers and Revenue
PT Wijaya Karunia Reallindo	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Lain-lain/Other Receivables
PT Wika Realty Minor Development	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Lain-lain/Other Receivables
PT Citra Marga Lintas Jabar	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Lain-lain/Other Receivables
PT Jakarta River City	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Lain-lain/Other Receivables, Utang Lain-lain/Other Payable
KSO Jineng	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Lain-lain/Other Receivables
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Lain-lain/Other Receivables
KSO WIKA - Jakon	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Utang Pemasok dan Utang Subkontraktor/ Supplier Payables and Subcontractor Payables
PT Kurnia Rejeki Gemilang	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Utang Lain-lain/Other Payable
PT Aero Wisata	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Utang Lain-lain/Other Payable
PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Pendapatan/Revenue, Piutang Retensi/Retention Receivables
KSO WIKA-PP	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Pendapatan/Revenue
KSO WEGA-Adhi Karya	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Pendapatan/Revenue
KSO WIKA - JAKON	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Pendapatan/Revenue
KSO WG-APIK	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Usaha/ Trade Receivables
KSO WIKA - PP - KMK - HKI	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Usaha dan Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja/ Trade Receivables and Gross Amount Due from Customers
KSO WIKA - Jaya Konstruksi Manggala Pratama	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Piutang Usaha dan Utang Usaha/ Trade Receivable and Trade Payable
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja/ Gross Amount Due from Customers
Konsorsium WIKA - Angkasa Pura - Incheon	Pengendalian Terbatas Pemegang Saham/ Limited Control Share Holder	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja/ Gross Amount Due from Customers
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja/ Gross Amount Due from Customers
PT Patra Wijaya Reallindo	Pengendalian Tidak Langsung Pemerintah Republik Indonesia/ Indirect Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia	Piutang Lain-lain/ Other Receivables

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties, including the following:

	2024 Rp	2023 Rp	Persentase terhadap Total Aset yang Terkait/ Percentage to Total Related Assets	
			2024 %	2023 %
Bank/Banks				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,496,271,359	1,455,078,764	2.35	2.21
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	347,726,799	392,799,666	0.55	0.32
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	291,877,318	209,271,556	0.46	0.32
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	149,360,632	71,986,939	0.24	0.32
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	6,971,153	16,272,988	0.01	0.02
PT Bank Mandiri Taspen	4,193,608	21,162,377	0.01	0.03
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia- Indonesia Eximbank	24,015	5,325,757	0.00	0.01
Mata Uang Asing/Foreign Currencies				
USD				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24,398,792	36,821,336	0.04	0.06
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,309,332	30,562,677	0.01	0.05
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	898,222	948,028	0.00	0.00
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	72,629	70,202	0.00	0.00
SGD				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	113,861	113,280	0.00	0.00
EURO				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,758,154	1,787,904	0.00	0.00
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	31,386	32,437	0.00	0.00
JPY				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	92,861	100,036	0.00	0.00
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15,142	16,643	0.00	0.00
Sub Total	2,332,115,263	2,242,350,590	3.67	3.34
Deposito Berjangka/Time Deposits				
Rupiah				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	205,000,000	95,000,000	0.32	0.14
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	140,000,000	44,500,000	0.22	0.07
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	135,630,000	220,773,777	0.21	0.33
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	124,608,781	64,608,781	0.20	0.10
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	45,500,000	121,000,000	0.07	0.18
Koperasi Karyawan PT Wijaya Karya	30,462,137	35,911,618	0.05	0.05
PT Bank Mandiri Taspen	500,000	13,000,000	0.00	0.02
Sub Total	681,700,918	594,794,176	1.07	0.89
Total	3,013,816,181	2,837,144,766	4.74	4.23
Bank Dibatasi Penggunaannya/ Restricted Bank				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,392,793,739	--	3.76	--
Piutang Usaha/Trade Accounts Receivables				
PT Pertamina Energi Terminal	207,761,633	--	0.33	--
PT Indah Karya (Persero)	102,480,900	102,538,997	0.16	0.16
PT Kaltim Amonium Nitrat	69,506,310	--	0.11	--
KSO High Speed Railway Contractor Consortium	62,437,120	109,016,180	0.10	0.17
KSO WG-APIK	53,575,052	--	0.08	--
PT Gesits Motor Nusantara	43,654,463	--	0.07	--
PT Hutama Karya Infrastruktur	27,771,216	6,366,562	0.04	0.01
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	27,592,228	51,587,945	0.04	0.08
PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak	25,680,534	394,070,010	0.04	0.60
PT Bukit Asam Tbk	21,994,035	20,977,665	0.03	0.03
PT Pertamina Bina Medika	21,161,820	11,000	0.03	0.00
PT Bio Farma (Persero)	17,493,104	51,444,865	0.03	0.08
KSO WIKA - CRBC - PP	14,447,323	49,173,849	0.02	0.07
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	10,524,773	31,481,346	0.02	0.05
KSO WIKA - Jaya Konstruksi Manggala Pratama	7,799,598	21,318,922	0.01	0.03
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	4,189,308	38,879,848	0.01	0.06
PT Jasamarga Toll Road Maintenance	4,108,885	36,430,423	0.01	0.06

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	Persentase terhadap Total Aset yang Terkait/ Percentage to Total Related Assets	
			2024 %	2023 %
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1,268,736	164,405,931	0.00	0.25
PT Pertamina (Persero)	599,427	275,511,520	0.00	0.42
KSO WIKA - Bakti Karya Utama	222,245	23,433,811	0.00	0.04
KSO WIKA - Utama Karya - Brantas Abipraya	--	25,361,100	--	0.04
PT Angkasa Pura II (Persero)	--	26,337,147	--	0.04
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp20.000.000)/ Others (each below Rp20,000,000)	317,514,822	387,581,839	0.50	0.59
Sub Total	1,041,783,532	1,815,928,960	1.63	2.78
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Allowance for Impairment Losses	(187,438,156)	(221,418,302)	(0.29)	(0.34)
Total	854,345,376	1,594,510,658	1.34	2.44
Piutang Retensi/Retention Receivables				
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	232,431,755	294,130,526	0.37	0.45
PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak	55,461,094	53,105,368	0.09	0.08
KSO High Speed Railway Contractor Consortium	48,724,524	45,724,875	0.08	0.07
PT Jasamarga Toll Road Maintenance	35,809,739	34,707,148	0.06	0.05
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	33,013,508	33,013,508	0.05	0.05
PT Bio Farma (Persero)	27,259,266	18,731,850	0.04	0.03
PT Angkasa Pura II (Persero)	25,843,980	32,996,439	0.04	0.05
PT Pertamina Geothermal Energy	20,786,752	9,246,339	0.03	0.01
PT Utama Karya (Persero)	4,327,836	149,763,055	0.01	0.23
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp20.000.000)/Others (each below Rp20,000,000)	84,332,218	75,988,334	0.13	0.12
Sub Total	567,990,672	747,407,442	0.90	1.14
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Allowance for Impairment Losses	(46,817,015)	(62,411,569)	(0.07)	(0.09)
Total	521,173,657	684,995,873	0.83	1.05
Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja/Gross Amount Due from Customers				
PT Pertamina Energi Terminal	227,232,751	--	0.36	--
PT Angkasa Pura I (Persero)	126,543,940	149,413,615	0.20	0.23
PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak	106,317,890	50,582,318	0.17	0.08
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	92,572,322	132,525,363	0.15	0.20
PT Indah Karya (Persero)	80,122,877	80,122,877	0.13	0.12
Konsorsium WIKA - Angkasa Pura - Incheon	75,589,014	125,016,842	0.12	0.19
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	75,142,249	4,398,847	0.12	0.01
PT Kilang Pertamina International	40,845,606	1,345,370	0.06	0.00
PT Pertamina Patra Niaga	36,141,628	--	0.06	--
KSO WIKA - PP - Karya Marga Konstruksi - Utama Karya Infrastruktur	25,658,125	--	0.04	--
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	19,964,717	22,383,129	0.03	0.03
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	17,482,489	89,010,102	0.03	0.13
PT Angkasa Pura II (Persero)	17,157,249	--	0.03	--
PT Bio Farma (Persero)	15,259,228	1,368,432	0.02	0.00
KSO High Speed Railway Contractor Consortium	14,161,012	72,679,386	0.02	0.11
PT Jasamarga Tol Road Maintenance	509,000	23,319,845	0.00	0.04
PT Utama Karya (Persero)	--	227,151,829	--	0.34
PT Aneka Tambang Tbk	--	113,005,058	--	0.17
PT Kaltim Amonium Nitrat	--	63,878,489	--	0.10
Lain-lain/Others (masing-masing di bawah Rp20.000.000) /each below Rp20,000,000)	161,801,636	108,082,363	0.25	0.16
Sub Total	1,132,501,733	1,264,283,864	1.79	1.91
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Allowance for Impairment Losses	(102,222,959)	(92,550,374)	(0.16)	(0.14)
Total	1,030,278,774	1,171,733,490	1.63	1.77

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	Persentase terhadap Total Aset yang Terkait/ Percentage to Total Related Assets	
			2024 %	2023 %
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi/ Construction Work in Progress				
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	1,280,826,033	1,279,124,219	2.02	1.94
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	436,770,053	85,725,065	0.69	0.13
PT Angkasa Pura I (Persero)	355,800,600	355,800,600	0.56	0.54
PT Bukit Asam Tbk	275,082,083	269,033,378	0.43	0.41
PT Kaltim Amonium Nitrat	203,244,615	195,004,606	0.32	0.30
PT Kilang Pertamina International	93,762,530	103,856,693	0.15	0.16
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	66,097,936	70,399,106	0.10	0.11
KSO High Speed Railway Contractor Consortium	51,748,996	--	0.08	--
PT Hutama Karya (Persero)	9,334,622	234,233,740	0.01	0.36
Lain-lain/Others (masing-masing di bawah Rp50.000.000) /each below Rp50,000,000)	246,177,717	129,127,506	0.39	0.20
Total	3,018,845,185	2,722,304,913	4.75	4.15
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Allowance for Impairment Losses	(1,428,222,220)	(34,815,530)	(2.25)	(0.05)
Total	1,590,622,965	2,687,489,383	2.50	4.10
Piutang Lain-lain/Other Receivables				
PT Wijaya Karunia Realindo	1,137,032,095	1,137,032,096	1.79	1.72
PT Patra Wijaya Realindo	126,527,778	150,000,000	0.20	0.23
PT WIKI Realty Minor Development	110,695,739	101,248,987	0.17	0.15
PT Citra Marga Lintas Jabar	42,030,988	50,653,622	0.07	0.08
PT Jakarta River City	38,682,432	38,462,451	0.06	0.06
Tamansari Jineng	24,885,754	28,539,343	0.04	0.04
PT Patra Jasa	8,500,000	8,500,000	0.01	0.01
Lembaga Manajemen Aset Negara	8,440,649	12,094,131	0.01	0.02
KSO WIKON - Binatama	--	15,000,000	--	0.02
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5.000.000)/ Others (each below Rp5,000,000)	118,813,450	97,674,802	0.19	0.15
	1,615,608,885	1,639,205,432	2.54	2.48
Dikurangi/Less: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Allowance for Impairment Losses	(1,358,412,538)	(1,361,577,326)	(2.14)	(2.06)
Total	257,196,347	277,628,106	0.40	0.42
Investasi pada Entitas Asosiasi/ Investment in Associates	2,708,297,133	1,854,701,159	4.26	2.81
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture	11,388,953,837	12,022,211,820	17.92	18.22

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	Persentase terhadap Total Liabilitas yang Terkait/Percentage to Total Related Liabilities	
			2024 %	2023 %
Pinjaman Jangka Pendek/Short Term Loan Perusahaan/the Company	--	12,017,464,757	--	21.30
Entitas Anak/Subsidiaries	350,000,000	242,019,474	0.68	0.43
Total	350,000,000	12,259,484,231	0.68	21.73
Pinjaman Jangka Panjang/Long Term Loan Perusahaan/the Company	15,714,150,200	--	30.40	--
Entitas Anak/Subsidiaries	3,662,654,716	3,217,878,519	7.09	5.70
Total	19,376,804,916	3,217,878,519	37.49	5.70
Utang Usaha/Trade Payable				
Utang Pemasok dan Utang Subkontraktor/ Supplier Payables and Subcontractor Payables				
KSO WIKA - Jaya Konstruksi Manggala Pratama	91,423,338	73,887,538	0.18	0.13
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	80,117,259	90,642,488	0.16	0.16
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	34,821,749	49,453,042	0.07	0.09
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	31,645,259	31,645,259	0.06	0.06
PT Solusi Bangun Beton	20,851,152	29,985,550	0.04	0.05
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	--	53,991,240	--	0.10
Lain-lain/Others (Masing-masing di bawah Rp20.000.000/Each below Rp20,000,000)	187,117,378	259,635,040	0.36	0.46
Sub Total	445,976,135	589,240,157	0.86	1.04
Utang Usaha/Account Payables- Supply Chain Financing				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	336,868,611	839,264,036	0.65	1.49
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	296,115,025	690,814,809	0.57	1.22
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	45,929,158	21,386,866	0.09	0.04
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	29,333,065	252,669,257	0.06	0.45
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	411,418	189,289,885	0.00	0.34
Sub Total	708,657,277	1,993,424,853	1.37	3.53
Total	1,154,633,412	2,582,665,010	2.23	4.58
Utang Lain-lain/Other Payable				
PT Pegadaian (Persero)	707,465,982	707,465,982	1.37	1.25
PT Jakarta River City	24,289,620	24,289,620	0.05	0.04
PT Kurnia Rejeki Gemilang	15,689,064	31,995,284	0.03	0.06
PT Aero Wisata	7,256,700	10,788,812	0.01	0.02
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	--	22,715,875	--	0.04
Lain-lain/Others (Masing-masing di bawah Rp10.000.000/Each below Rp10,000,000)	11,714,077	6,290,216	0.02	0.01
Dikurangi Bagian Lancar/Less Current Portion	(750,726,379)	(803,545,789)	(1.45)	(1.42)
Total	15,689,064	--	0.03	--

	2024 Rp	2023 Rp	Persentase terhadap Total Pendapatan yang Terkait/ Percentage to Total Related Revenues	
			2024 %	2023 %
Pendapatan/Revenue				
PT Pertamina Energy Terminal	951,684,636	597,416,752	4.95	2.65
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	903,189,680	1,108,397,643	4.69	4.92
PT Hutama Karya (Persero)	306,618,960	864,258,058	1.59	3.84
KSO WIKA - PP - Karya Marga Konstruksi - Hutama Karya Infrastruktur	229,069,898	3,093,855	1.19	0.01
PT Kilang Pertamina International	219,698,685	13,357,319	1.14	0.06
PT Bio Farma (Persero)	184,035,014	175,359,464	0.96	0.78
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	175,738,054	160,579,503	0.91	0.71
PT Angkasa Pura II (Persero)	143,846,342	2,433,126	0.75	0.01
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	135,851,806	83,068,512	0.71	0.37

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	Persentase terhadap Total Pendapatan yang Terkait / Percentage to Total Related Revenues	
			2024 %	2023 %
PT Pertamina Patra Niaga	124,819,633	--	0.65	--
KSO WIKA - Waskita - Jaya Konstruksi Manggala Pratama - PP	123,630,102	--	0.64	--
PT Hutama Karya Infrastruktur	120,102,190	28,179,574	0.62	0.13
KSO WEGE - Abadi Prima Inti Karya	110,811,240	--	0.58	--
PT Angkasa Pura I (Persero)	103,134,943	--	0.54	--
PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak	102,850,098	--	0.53	--
PT Pertamina Geothermal Energy	97,610,797	110,501,712	0.51	0.49
PT Adhri Karya (Persero) Tbk	70,233,888	116,891,749	0.36	0.52
KSO High Speed Railway Contractor Consortium	2,630,839	575,906,950	0.01	2.56
PT Aneka Tambang Tbk	--	224,648,263	--	1.00
PT Sarinah (Persero)	--	157,707,840	--	0.70
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	--	125,077,887	--	0.56
PT Jasamarga Toll Road Maintenance	--	100,147,441	--	0.44
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000.000) Others (Each Below Rp100,000,000)	1,325,083,239	1,276,013,183	6.89	5.66
Total	5,430,640,044	5,723,038,831	28.22	25.41

Total kompensasi yang diterima oleh direksi dan dewan komisaris adalah sebagai berikut:

Total compensation of the directors and board of commissioners are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Imbalan Kerja Jangka Pendek	29,825,408	30,839,300	Short Term Employee Benefits

53. Perikatan dan Kontinjensi Signifikan

53. Significant Commitments and contingencies

a. Perikatan Signifikan

a. Significant Commitments

Grup melakukan perikatan kontrak konstruksi dengan berbagai pihak. Kontrak signifikan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The Group has entered into a construction contract with other parties. Significant contracts during year 2024 are as follows:

Pemberi Kerja/ Owner	Nilai Kontrak / Contract Value	Nama Proyek / Name of Projects	Masa Pelaksanaan / Period of Time	
			Mulai / Started	Selesai / Ended
PT Citra Marga Nusapha Persada Tbk	5,022,599,598	Tol Harbour Road II Section 1 : Ancol - Pluit	01/12/2019	08/05/2025
PT Bukit Asam	4,493,640,000	Jasa Kontraktor EPC Pengembangan CHF, Rail Loop serta TLS 6 dan TLS 7	04/11/2024	27/06/2026
PT Pertamina Energy Terminal	3,574,783,104	Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty	08/03/2023	07/09/2025
PT Pertamina Energy Terminal	2,792,643,666	Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur Tahap 2 Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty	08/03/2023	07/09/2025
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2,087,842,704	PLTU Palu	16/12/2019	31/03/2025
Bandara Internasional Batam	1,964,864,865	Bandara Hang Nadim	21/11/2022	21/11/2025
PT Jasa Marga Japex Gelatan	1,621,180,946	Proyek Tol Japex Gelatan 2A	28/08/2023	26/02/2025
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	1,405,465,315	IKN Kantor Presiden	11/02/2022	17/10/2025
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	1,373,607,000	RS UPT Vertical Surabaya	27/10/2022	13/08/2025
Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - Di Yogyakarta	1,232,920,714	Proyek Toll Road Development Semarang - Demak 1B	27/02/2023	26/02/2026
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	1,207,763,063	IKN Istana Negara	11/02/2022	17/10/2025
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Bendahara Yayasan Kartika Eka Paksi	1,079,741,983	IKN SB 2	21/12/2023	12/06/2025
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Bendahara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	1,039,376,000	Gedung Kampus Unjani	22/12/2020	21/06/2025
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Bendahara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	945,590,370	Lingkar Sepaku 4	02/10/2024	24/05/2026
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Bendahara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum	862,918,136	Bendungan Tiga Dahaji Lanjutan	11/11/2024	31/12/2026
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Bendahara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum	726,593,248	Bendungan Jeneleta	29/06/2022	17/06/2028
Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	724,750,991	Proyek Pembangunan Bendungan Cijurej Paket III	31/08/2023	03/10/2028
Pompeangan Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian PUPR	713,427,224	Proyek Pelabuhan Patimban Paket 6	04/01/2023	23/08/2025
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	651,901,890	Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Basilika dan Gereja	20/12/2024	03/01/2026
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	640,030,151	Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun : Pembangunan Bangunan Gedung Wing 1 dan Kawasan Kantor Kementerian PUPR	28/12/2023	21/01/2025
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Besar Hambatan Provinsi Jawa Barat (PUPR)	620,312,104	Proyek Tol Patimban 4	28/07/2023	27/06/2025
Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	577,400,000	Revisitasasi (Pembangunan Kembali) Demaga Gosper di Integrated Terminal Surabaya	06/08/2024	28/05/2027
PT Pertamina Patra Niaga	573,153,861	Proyek Jakarta Sewerage System Package 1	18/04/2023	19/04/2029
PPK Air Minum Dan Sanitasi, Saterk Pelaksanaan Prasana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan	550,000,000	Rediversion MWRD	01/06/2024	31/12/2025
PT Kaltim Prima Coal	546,607,516	Proyek JSS Package 3	13/07/2023	12/10/2027
PPK Sanitasi I, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Directorate General Of Human Settlements, Ministry Of Public Works And Housing	510,000,000	CHS Tanah Grogot	18/10/2023	08/08/2025
PT Dua Samudera Perkasa				
SNVT Pembangunan Bendungan Bws Nusa Tenggara II				

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Pemberi Kerja/ Owner	Nilai Kontrak / Contract Value	Nama Proyek / Name of Projects	Masa Pelaksanaan / Period of Time	
			Mulai / Started	Selesai / Ended
PPK Jalan Bebas Hambatan Serang - Parimbang 1 Provinsi Banten	493,312,754	Tol Serang Seksi 3B	29/12/2023	24/01/2025
PT Pertamina Patra Niaga	475,400,000	Proyek Pembangunan Jetty 1 Baru di IT Manggis	31/07/2024	22/01/2026
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	405,419,189	RS Persahabatan	30/11/2022	22/07/2025
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bendahara	401,325,200	IPA Sepaku	25/07/2024	31/12/2026
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	381,139,824	Proyek Upper Cisokan Package 1 Lot LA & IB	09/10/2015	17/04/2026
Bank Indonesia	372,738,000	BI DKUT Gresik	08/08/2024	08/07/2025
Bank Indonesia	340,853,220	Kantor Perwakilan BI Papua Barat	08/09/2023	30/05/2025
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	334,630,410	Proyek Revitalisasi Rumah Suisun Wisma Atlet Kemayoran	28/08/2024	22/04/2025
Bank Indonesia	307,102,000	Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI)	08/09/2023	30/05/2025
PT Pulomas Jaya	300,650,000	Proyek PMJ Land Tower	11/12/2023	28/10/2025
PT Dua Samudera Perkasa	299,050,000	Jetty Wanam	01/07/2024	31/12/2025
PPK Irigasi Dan Rawa VI SNVT Pipa Cimanku Cisinggarung	298,838,784	Proyek Irigasi Rentang Package LSS-07	01/02/2023	10/11/2025
Balai Besar Wilayah Sungai Cimanku Cisinggarung Kementerian PUPR				
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	291,855,856	IKM Kantor Presiden Basement	11/02/2022	17/10/2025
Kementerian PUPR Cipta Karya	281,360,000	Stadion Surajaya Lamongan	28/12/2023	01/01/2025
PT Kilang Pertamina Internasional	279,300,000	EPC Restorasi Tangki Mogas 42T01 E/F/G/H PT. Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan	28/08/2023	26/12/2026
PT Dua Samudera Perkasa	277,500,000	CHS Busani Line 3	01/04/2024	30/09/2025
Ws. Parigi - Poso, Ws. Kaluku - Karana				
PT Surya Doho Investama	269,395,000	Proyek Doho Kediri	01/07/2023	18/04/2025
Kemen PUPR Ditjen SDA Balai Besar WII S. Bengawan Solo SNVT	263,071,509	Proyek Pembangunan Bendungan Karangngroco di Kabupaten Bojonegoro	18/09/2023	18/01/2027
Pembangunan Bendungan Bengawan Solo				
Tokushuka Medical Group	259,164,390	Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Harapan Kita - Tokushukai	21/11/2024	20/09/2026
PPK Sanitasi 1, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Directorate General Of Human Settlements, Ministry Of Public Works And Housing	258,687,626	Proyek JSS Package 2	13/07/2023	12/11/2027
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	248,432,000	RS Onkologi Klaten	29/11/2024	22/05/2026
Ditjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali - Juana SNVT	234,107,748	Proyek Rumah Pompa Drainase Kencing	15/12/2023	02/01/2025
Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Pemali - Juana				
Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan				
PPK Air Minum - Satek Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II	219,809,691	Proyek Spam Wosusokas 4	24/07/2023	14/01/2025
Bank Mandiri	219,500,000	Mandiri Kendari	03/11/2024	26/02/2026
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bendahara	215,768,192	Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN	15/11/2023	08/04/2025
PT Pertamina Geothermal Energy	209,608,580	Lumut Balai Unit Geothermal FCRS and Power Plant Project	28/12/2022	28/12/2025
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	207,887,000	Pengembangan Sistem Operasional Inatwets (Gedung Jakarta Dan Bali)	31/01/2024	30/01/2025
PT Waskita Karya (Persero)	194,000,000	LRT Jakarta Project Phase 1B - Trackwork Package	13/12/2023	31/05/2026
BWWS Pemali Juana				
KSO Waskita - Bumi Karasa - BBP - KPR	189,453,624	Proyek Bendungan Cibebet Paket 3	30/10/2024	30/10/2028
PUPR Direktorat Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	185,066,296	Jembatan Kaca Sukamahi	10/09/2024	31/12/2025
DKI Jakarta - Jawa Barat Satek Pip Wilayah V Javar Ppk 5.3 Jabar				
PT Dua Samudera Perkasa	185,000,000	CHS Tanah Grogot	18/10/2023	08/08/2025
PT Dua Samudera Perkasa	185,000,000	CCS Tanah Grogot Line 2	02/05/2024	31/10/2025
PPK Air Minum - Satek Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II	184,369,391	Proyek Spam Wosusokas 2	24/07/2023	14/01/2025
PT Telkom Landmark Tower	173,526,300	Pembangunan Gedung Fasilitas Pendukung TLT Tower 1	15/05/2024	15/09/2025
PPK Air Minum - Satek Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II	167,645,918	Proyek Spam Wosusokas 4	24/07/2023	14/01/2025
Ppk 3.4 Prov. Jawa Timur				
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	161,813,590	Relokasi Jalan Sei Duri - Mempawah Kalbar (Lingkar Kijing)	29/11/2021	31/05/2025
Penunda Sarana Jaya	155,250,000	Pembangunan Hunian Terjangkau Tower B Nuansa Cilangkap	26/05/2024	19/11/2025
KSO Wika - IK	153,831,258	Jembatan SBG Tol Serang - Parimbang 3B (WIKa)	15/12/2024	16/08/2025
Bank Indonesia	150,250,000	Proyek Pembangunan Bangunan Pendukung Kawasan Bank Indonesia di Karawang (PK-12)	10/01/2024	13/02/2026
Institut Teknologi Bandung	147,377,158	Pembangunan Gedung Labtek XV ITB	14/11/2023	05/02/2025
Pesisir Bukota Negara Ppk Pelaksana Ptpin I				
PT Jhonlin Baratama	145,000,000	HSD Tank 6x5000	02/05/2024	30/04/2025
Bank Mandiri	103,000,000	Kantor Bank Mandiri Gresik	23/08/2024	23/08/2025

Perusahaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Perusahaan melakukan perjanjian pemanfaatan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Laswi, Bandung - Jawa Barat, sesuai dengan sertifikat hak pakai No. 6 tahun 1988 seluas 206.400 m² atas nama KAI.

Kedua pihak telah menandatangani nota kesepakatan untuk pemanfaatan lahan dengan nomor TP.01.03/A.DIR.13154/2017 dan KL.701/X/31/KA-2017 tanggal 10 Oktober 2017 dengan jangka waktu 50 tahun terhitung setelah berakhirnya *grace period* selama 36 bulan.

PT Sarinah (Persero)

WIKa Gedung melakukan perjanjian bangun, guna, serah (BOT) dengan PT Sarinah (Persero) tentang pengembangan property di Jalan Braga No. 10 Bandung - Jawa Barat sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan No. 649 seluas 1.763 m² atas nama PT Sarinah (Persero).

Untuk melakukan kerjasama dengan WIKa Gedung, PT Sarinah (Persero) telah memperoleh persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam surat No. S-89/MBU/01/2016 tertanggal 25 Januari 2016 tentang Persetujuan Pendayagunaan Aset Milik PT Sarinah (Persero) di

The Company

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

The Company has an agreement with PT Kereta Api Indonesia (Persero) about utilization of land located in Laswi, Bandung - West Java based on use right No. 6 year 1988 with the area of 206,400 sqm on behalf of KAI.

Both parties have signed a memorandum of understanding for land development with number TP.01.03/A.DIR.13154/2017 and KL.701/X/31/KA-2017 dated October 10, 2017 with time period of 50 years after *grace period* of 36 months.

PT Sarinah (Persero)

WIKa Gedung has an agreement of build, operate, and transfer (BOT) with PT Sarinah (Persero) regarding the development of property in Braga No. 10 Bandung - West Java based on building right No. 649 with the area of 1,763 sqm on behalf of PT Sarinah (Persero).

To have a partnership with WIKa Gedung, PT Sarinah (Persero) had obtained approval from Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as General Meeting of Shareholders set forth in letter No. S-89/MBU/01/2016 dated January 25, 2016 regarding Approval of Utilization of Assets owned by PT Sarinah (Persero) on Street Braga No. 10

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jl. Braga No. 10 Bandung, Jawa barat. Sedangkan WIKA Gedung telah memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham yang tertuang dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat WIKA Gedung No: MJ.01.00/PS.WG.037/2015 tertanggal 13 November 2015 tentang Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat WIKA Gedung.

WIKa Gedung telah merencanakan jumlah investasi yang akan ditanamkan untuk membangun hotel dan fasilitas penunjang dengan investasi awal sebesar Rp81.192.000 dengan jangka waktu Pengelolaan selama 25 tahun. Sedangkan PT Sarinah (Persero) berhak atas pembayaran sewa lahan sebesar 3,33% dari nilai NJOP tanah setiap tahunnya sebagaimana tertera dalam Peraturan Kementerian Keuangan No: 33/PMK.06/2012 dan berhak mendapatkan Ruang Komersial seluas 132 m² selama masa berlakunya perjanjian kerjasama tanpa dikenakan biaya sewa ruang dan biaya jasa.

WIKa Gedung berkewajiban menyerahkan kembali dan mengalihkan objek BOT pada tanggal pengalihan bangunan dan penyerahan kembali tanah tanpa adanya kewajiban ganti rugi yang diberikan PT Sarinah (Persero) kepada WIKa Gedung sebagai bentuk penyerahan dan atau transfer yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini.

Pertamina Mandalika International Street Circuit

WIKa Gedung melakukan perjanjian Bangun, Sewa, Serah dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) ("ITDC") tentang Pembangunan *Paddock* di ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dengan nilai kerjasama sebesar Rp195.405.930.

Untuk melakukan kerjasama dengan WIKa Gedung, ITDC telah menetapkan WIKa Gedung sebagai mitra Kerja Sama berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 318/DIR/ITDC.01/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.

WIKa Gedung telah menyelesaikan pembangunan obyek kerjasama tersebut yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, pada tanggal 24 Desember 2021 dan ITDC memulai masa sewa atas Obyek Kerjasama tersebut hingga 30 Juni 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024, obyek kerjasama belum diserahkan kepada ITDC karena pembayaran termin terakhir dari nilai kerjasama belum dilunasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023, obyek kerjasama belum diserahkan kepada ITDC karena pembayaran termin terakhir dari nilai kerjasama belum dilunasi.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Bandung West Java. Whereas WIKa Gedung had obtained approval by the shareholders set out in the resolution shareholders outside meeting WIKa Gedung No: MJ.01.00/PS.WG.037/2015 dated November 13, 2015 about decision shareholders out meeting of WIKa Gedung.

WIKa Gedung has planned for the funding required to build the hotel and supporting facilities with an initial investment of Rp81,192,000, with the term of the management for 25 years. Whereas PT Sarinah (Persero) is entitled for the collection of land lease of 3.33% of the tax object value of land every year as stationed in regulation of the Ministry of Finance No: 33/PMK.06/2012, and is eligible to receive commercial space of 132 sqm during the period of the agreements without charged for rent and service.

WIKa Gedung is obliged to hand over and transfer the BOT object on the date of transfer of buildings and land without obligation of PT Sarinah (Persero) to provide compensation to WIKa Gedung arising from this agreement.

Pertamina Mandalika International Street Circuit

WIKa Gedung agreed into a Build, Lease, and Transfer agreement with PT Pengembangan Wisata Indonesia (Persero) ("ITDC") regarding *Paddock Development* at ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta, Pujut, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara with the value of cooperation is Rp195,405,930.

To cooperate with WIKa Gedung, ITDC had appointed WIKa Gedung as a Cooperation partner based on the Work Order No. 318/DIR /ITDC.01/X/2021 dated October 7, 2021.

WIKa Gedung has completed the construction of the object of cooperation as evidenced by the Minutes of Handover, on December 24, 2021, and ITDC started the lease period for the object of cooperation until June 30, 2023.

As of December 31, 2024, the object of cooperation has not yet transferred to ITDC due to outstanding receivable terms.

As of December 31, 2023, the object of cooperation has not yet transferred to ITDC due to outstanding receivable terms.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada akhir periode sewa dan setelah ITDC melakukan pembayaran penuh atas nilai kerjasama, maka kepemilikan atas obyek kerjasama akan secara otomatis beralih ke ITDC.

**WIKA Serang Panimbang (WSP)
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)**

WSP telah memperoleh penetapan hak pengusahaan jalan tol (Hak Konsesi) Serang-Panimbang yang diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.KU.03.01-Mn/02 tanggal 4 Januari 2017 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan PPJT pada tanggal 22 Februari 2017 dengan masa konsesi selama 40 (empat puluh) tahun, yang berlaku efektif sejak Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan.

PPJT mengalami perubahan pertama pada tanggal 8 Juni 2017 melalui Akta Notaris No. 6 dari Rina Utami Djauhari, S.H., perubahan kedua pada tanggal 3 Oktober 2018 melalui Akta Notaris No. 7 dari Rina Utami Djauhari, S.H., dan perubahan ketiga pada tanggal 09 Juli 2019 melalui Akta Notaris No. 22 dari Rina Utami Djauhari, S.H.

Berdasarkan Akta Notaris No. 18 tahun 2021 tanggal 11 Juni 2021 mengenai Amandemen IV Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Serang Panimbang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari S.H., Notaris di Jakarta yang di dalamnya termasuk perubahan masa konsesi menjadi 50 tahun.

Pada tanggal 28 November 2024, WSP telah mendapatkan Bank Garansi untuk jaminan pelaksanaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang jatuh tempo pada 31 Maret 2025 sebesar Rp85.753.710.

Perjanjian Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol

Menurut perubahan kedua PPJT dengan Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT), WSP selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) setuju dan berkewajiban untuk terlebih dahulu menyediakan dana pengadaan tanah untuk jalan tol.

Penggunaan dana BUJT terlebih dahulu dalam pengadaan tanah tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat dengan nomor S-679/MK.06/2018 tertanggal 6 September 2018. Dalam surat tersebut Kementerian Keuangan menyetujui penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional berupa jalan tol dan mendukung setiap kebijakan yang ditujukan untuk mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

At the end of the lease period and after ITDC makes full payment of the cooperation value, the ownership of the object of cooperation will automatically transfer to ITDC.

**WIKA Serang Panimbang (WSP)
Toll Road Concession Agreement (PPJT)**

WSP has acquired the right of toll road concession (Concession Right) Serang-Panimbang issued by the Government, in accordance with the Minister of Public Works Decree No.KU.03.01-Mn/02 dated January 4, 2017, followed by the signing of the PPJT for each toll road dated February 22, 2017 with concession period of 40 (forty) years, and effectively applied since Work Start Order has been issued.

PPJT firstly ammended on June 8, 2017 through Notarial Deed No. 6 from Rina Utami Djauhari, S.H., the second amendment on October 3, 2018 through Notarial Deed No. 7 from Rina Utami Djauhari, S.H., and the third amendment on July 9, 2019 through Notarial Deed No. 22 from Rina Utami Djauhari, S.H.

Based on Notarial Deed No. 18 of 2021 dated June 11, 2021 concerning Amendment IV of the Serang Panimbang Toll Road Concession Agreement made in presence of Rina Utami Djauhari S.H., Notary in Jakarta which includes amendment the concession period to 50 years.

On November 28, 2024, WSP has obtained a Bank Guarantee for implementation guarantee from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk which will mature on March 31, 2025 amounting to Rp85,753,710.

Land Acquisition Funding Agreement for Toll Road

According to PPJT's second amendment with Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT), WSP as a Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agree and obliged to provide land acquisition funds for toll roads in advances.

The use of BUJT funds in the land acquisition in advance was approved by the Minister of Finance through a letter No. S-679/MK.06/2018 dated September 6, 2018. In the letter the Ministry of Finance approved the use of business entity funds first for the construction of National Strategic Projects in the form of toll road and support any policy aimed at accelerating the completion of the National Strategic Project as long as it is carried out in accordance with applicable regulations.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pendanaan pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diatur dalam Peraturan Presiden No. 102 tahun 2016 dan tata cara pendanaan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.06/2017.

Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Rancang Bangun Dengan Kontrak Terima Jadi Paket 2 (Kontrak Paket 2)

Pada tanggal 4 Desember 2017, WSP dan PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menandatangani Kontrak Paket 2 berupa pembangunan konstruksi simpang susun jalan tol Serang Panimbang. Di dalam kontrak tersebut, lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh PTPP adalah:

- Perencanaan *detail engineering design* simpang susun untuk jalan tol Serang Panimbang sebanyak 7 unit; dan
- Konstruksi simpang susun sebanyak 5 unit.

Jenis Kontrak Paket 2 adalah kontrak terima jadi (*turn key*) dan bersifat gabungan *lumpsum* dan harga satuan dengan total nilai kontrak sebesar Rp600.916.000. Pembayaran atas nilai kontrak tersebut adalah secara sekaligus dengan ketentuan paling lambat 60 hari setelah Berita Acara Serah Terima Sementara.

Perjanjian Kontrak Paket 2 telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Perjanjian No.TP.01.03/A.DIR.WSP.001/2023 tanggal 6 Januari 2023, WSP dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sepakat untuk melakukan perubahan Kontrak Paket 2, pada beberapa hal dibawah ini:

- Penyesuaian Lingkup Pekerjaan;
- Penyesuaian Jenis dan Nilai Kontrak menjadi Rp974.074.602;
- Penyesuaian Jangka Waktu Pelaksanaan; dan
- Mengubah Serah Terima Pekerjaan

WIKA Realty

PT Bintang Express Sejahtera

Pada tanggal 18 Juli 2018, PT Wijaya Karunia Realtindo (Entitas Asosiasi) (WKR) mengikat diri dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk membeli tanah seluas 36 Ha senilai Rp3.036.000.000 di Rorotan, Jakarta Utara dari PT Bintang Express Sejahtera dengan pembayaran uang muka tanah bertahap.

Pada tanggal 29 Agustus 2023, berdasarkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 45094/XI/ARB-BANI/2022 yang dimohonkan oleh PT Bintang Express Sarana, diputuskan WKR (Termohon I) dan WIKa Realty (Termohon II) telah

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Land acquisition funding in the context of implementing the National Strategic Project is regulated in Presidential Decree No. 102 year 2016 and the procedures for funding land acquisition for National Strategic Projects are regulated in Minister of Finance Regulation No. 21/PMK.06/2017.

Construction Design Construction Service Contract with Turn Key Contract 2 (Package 2 Contract)

On December 4, 2017, WSP and PT PP (Persero) Tbk (PTPP) signed the Package 2 Contract in the form of construction of the interchange of the Serang Panimbang toll road. In the contract, the scope of work to be carried out by PTPP are:

- *Plan the detail engineering design of the interchange for Serang Panimbang toll road for 7 units; and*
- *Construction of interchanges for 5 units.*

The type of Package 2 Contract is a turn key contract and combination of lump sum and unit price with a total contract amounting to Rp600,916,000. Payment of the contract is a lumpsum with the clause no later than 60 days after the Minutes of Temporary Hand Over.

The Package 2 Contract Agreement has been amended, most recently based on Agreement No.TP.01.03/A.DIR.WSP.001/2023 dated January 6, 2023, WSP and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk agreed to amend the Package 2 Contract on the following matters:

- *Adjustment of Work Scope;*
- *Adjustment of Contract Type and Value to Rp974,074,602;*
- *Adjustment of Implementation Period; and*
- *Change the Handover.*

WIKa Realty

PT Bintang Express Sejahtera

On July 18, 2018, PT Wijaya Karunia Realtindo (Associate) (WKR) entered into a Sale and Purchase Agreement (PPJB) to purchase 36 Ha of land worth Rp3,036,000,000 in Rorotan, North Jakarta from PT Bintang Express Sejahtera with payment of money gradual ground level.

On August 29, 2023, based on the decision of the Indonesian National Arbitration Board No. 45094/XI/ARB-BANI/2022 requested by PT Bintang Express Sarana, it was decided that WKR (Respondent I) and WIKa Realty (Respondent II) had defaulted by not

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

wanprestasi dengan tidak memenuhi seluruh tahapan pembayaran uang muka tanah yang disepakati.

Dalam keputusan ini, atas jumlah uang muka tanah yang sudah dibayarkan WKR sebesar Rp1.066.000.000 adalah sepenuhnya menjadi hak PT Bintang Express Sarana.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima permohonan pembatalan untuk putusan Arbitrase tersebut.

Dalam upaya Permohonan Kasasi oleh PT Bintang Express Sarana atas Putusan Perkara Nomor: 583/PDT.SUS-ARB/2023/PN.JKT TIM tanggal 1 Desember 2023, dimana pada Tanggal 13 Februari 2024 telah terbit Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 yang memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon I dan II;
- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon I dan II;
- Membatalkan Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 583/PDT.SUS-ARB/2023/PN.JKT TIM; dan
- menguatkan Putusan BANI Nomor 45094/XI/ARB-BANI/2022.

WTJJ

Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I

WTJJ telah memperoleh hak pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I yang diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PB.02.01-Mn/2335 tanggal 20 November 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PKPBU) Sistem Penyediaan Air Minum Regional I pada tanggal 19 Februari 2021 dengan masa konsesi selama 30 (tiga puluh) tahun yang dimulai sejak tanggal penandatanganan.

PKPBU mengalami perubahan pertama pada tanggal 19 Agustus 2021 melalui penandatanganan Amendemen Kesatu Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Regional I No. TP.01.03/A.Dir/00057/2021.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

fulfilling all agreed stages of land down payment.

In this decision, the land advance payment that WKR has paid amounting to Rp1,066,000,000 is the full right of PT Bintang Express Sarana.

Based on the decision of the East Jakarta District Court on December 1, 2023 which stated that the East Jakarta District Court accepted the The nullifying of arbitral decision.

In response to the appeal filed by PT Bintang Express Sarana regarding the Decision on Case Number: 583/PDT.SUS-ARB/2023/PN.JKT TIM dated December 1, 2023, the Supreme Court of Indonesia issued a ruling on February 13, 2024, under Case Number: 234 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, which decided to:

- Accept the appeal requests from Appellants I and II;
- Grant the appeal requests from Appellants I and II;
- Overturn the East Jakarta District Court Decision Number: 583/PDT.SUS-ARB/2023/PN.JKT TIM; and
- Uphold the BANI Decision Number 45094/XI/ARB-BANI/2022.

WTJJ

Agreement of Cooperation between Government and Enterprises on Drinking Water Supply Systems Jatiluhur I Regional

WTJJ has obtained the concession rights for the Drinking Water Supply System Jatiluhur I Region issued by the Government based on the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing No. PB.02.01-Mn/2335 dated November 20, 2020 which was then followed up with the signing of the Government Cooperation Agreement with Business Entities (PKPBU) Drinking Water Supply System Jatiluhur I Region on February 19, 2021 with a concession period of 30 (thirty) years starting from the date of signing.

PKPBU had undergone its first amendment on August 19, 2021 through the signing of First Amendment of the Government Cooperation Agreement with Business Entities Drinking Water Supply System Jatiluhur I Region No. TP.01.03/A.Dir/00057/2021.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**Perjanjian Paket Rancang Bangun Sistem
 Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I
 dengan KSO WIKA - JAYA**

Berdasarkan Perjanjian Paket Rancang Bangun Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I No. TP.01.01/A.DIR.60/WTJJ/IV/2021 tanggal 16 April 2021, WTJJ menyerahkan pekerjaan perancangan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I kepada KSO WIKA – JAYA. Nilai dari perjanjian ini sebesar Rp1.357.040.000. Jangka waktu perjanjian ini dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian hingga ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Akhir Pekerjaan.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali amandemen yang terakhir pada tanggal 26 Juni 2023 melalui penandatanganan amandemen Perjanjian Paket Rancang Bangun Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I No. TP.01.03/WTJJ.Dir.00119/2023, telah di sepakati Total Nilai Pekerjaan sebesar Rp1.436.115.947.

b. Kontinjensi

Perusahaan

Klaim PT Angkasa Pura I

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP dengan Nomor PE.09.03/R/LHP-03/D502/2/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang melibatkan PT Angkasa Pura I dan Perusahaan disebutkan bahwa formula penyesuaian harga yang digunakan dalam perubahan kontrak (CCO-3) tidak mencerminkan harga pasar. Hal ini menyebabkan penundaan dalam penyelesaian Proyek Pengembangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar (PPUPG). Kedua belah pihak sepakat untuk menyesuaikan ketentuan kontrak dengan menggunakan harga pasar untuk sisa pekerjaan, di mana nilai akhir akan ditentukan berdasarkan nilai terendah antara usulan PT Wijaya Karya dan hasil evaluasi independen. Kesepakatan ini bersifat final dan tidak dapat direvisi lebih lanjut oleh Perusahaan.

Perusahaan menerima hasil putusan dan membebaskan klaim PT Angkasa Pura I.

WIKA Gedung

Gugatan WIKA Gedung kepada PT Maju Gemilang Serpong terkait Wanprestasi melalui BANI

WIKA Gedung membuat, menandatangani dan mengajukan Permohonan Mengadakan Arbitrase dan/atau Permohonan Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) Jakarta terhadap PT Maju Gemilang Serpong, sehubungan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Maju Gemilang Serpong atas Surat Perjanjian Kerja

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

**Design and Construction Package of Drinking
 Water Supply Systems Jatiluhur I Regional
 Agreement with JO WIKA - JAYA**

Based on Agreement of Design and Construction Package of Drinking Water Supply Systems Jatiluhur I Regional No. TP.01.01/A.DIR.60/WTJJ/IV/2021 dated April 16, 2021, WTJJ delegates the design and construction works of Drinking Water Supply Systems Jatiluhur I Regional to JO WIKA – JAYA. This agreement has value amounting to Rp1,357,040,000. The term of the agreement start from the signing of the agreement until the signing of Minutes of Handover of Final Results.

This agreement has been amended several times, the latest on June 26, 2023 through the signing of the amendment to the Jatiluhur I Regional Water Supply System Design and Build Agreement No. TP.01.03/WTJJ. Dir.00119/2023, has been agreed Total Work Value of Rp1,436,115,947.

b. Contingencies

The Company

PT Angkasa Pura I Claims

Based on the BPKP's Evaluation Report with Number PE.09.03/R/LHP-03/D502/2/2024 dated February 28, 2024, involving PT Angkasa Pura I and the Company, it was stated that the price adjustment formula used in the contract amendment (CCO-3) did not reflect market prices. This resulted in delays in the completion of the Sultan Hasanuddin Makassar Airport Development Project (PPUPG). Both parties agreed to adjust the contract terms by using market prices for the remaining work, where the final value will be determined based on the lowest amount between PT Wijaya Karya's proposal and the independent evaluation results. This agreement is final and cannot be further revised by the Company.

The Company accepted the results of the decision and charged PT Angkasa Pura I's claim.

WIKA Gedung

WIKA Gedung's lawsuit against PT Maju Gemilang Serpong regarding Default through BANI

WIKA Gedung made, signed and submitted a Request for Arbitration and / or Statement of Claim at the Indonesian National Arbitration Board (“BANI”) Jakarta against PT Maju Gemilang Serpong, in connection with the default action committed by PT Maju Gemilang Serpong on the Work Agreement Letter No. B-Residence-040/SPK/MGS/III/ 17 dated

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No. B-Residence-040/SPK/MGS/III/17 tanggal 6 April
2017 tentang Proyek Apartemen B Residence,
Serpong atas Pekerjaan Struktur dan Plumbing.

WIKA Gedung telah memenangkan proses di BANI
tetapi pihak PT Maju Gemilang Serpong sedang
mengajukan upaya pembatalan keputusan BANI.

Selanjutnya, berdasarkan penetapan No.42/Eks.
Arb/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Agustus 2023,
Pengadilan Negeri Tangerang sedang dalam proses
sita eksekusi dan pelelangan atas aset PT Maju
Gemilang Serpong.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, WIKA Gedung masih menunggu
putusan atas proses sita eksekusi dan pelelangan
atas aset PT Maju Gemilang Serpong.

**Gugatan WIKA Gedung kepada PT Alumindo
Cipta Persada terkait Wanprestasi**

Pada Maret 2023, WIKA Gedung menggugat
PT Alumindo Cipta Persada di PN Jakarta Selatan
atas wanprestasi yang dilakukan pemberi kerja.
Sampai dengan tanggal penerbitan laporan
keuangan konsolidasian, statusnya masih berproses
di pengadilan.

Total gugatan WIKA Gedung kepada PT Alumindo
Cipta Persada adalah sebesar Rp12.393.912.

WIKA Beton

Pemerolehan Aset Tanah

Sehubungan dengan pembelian Lahan seluas 50 Ha
di Desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy,
Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat untuk
pengembangan Pabrik Produk Beton di Subang,
WIKA Beton telah melaporkan Pengurus
PT Agrawisesa Widyatama ke Bareskrim Mabes
POLRI pada tahun 2017 atas dugaan tindak pidana
penipuan dan/atau penggelapan perjanjian jual beli
yang dilakukan oleh WIKA Beton dan PT Agrawisesa
Widyatama sebagaimana Laporan Polisi No.
LP/1342/XII/2017/Bareskrim tertanggal 7 Desember
2017. Pelaporan ini dilakukan karena PT Agrawisesa
Widyatama tidak melakukan pemecahan atas
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 722
seluas 1.996.977 m² sebagaimana telah
diperjanjikan, dan diketahui SHGB tersebut telah
diserahkan/dijaminkan kepada pihak lain.

Dalam Putusan No. 589/Pid-B/2020/PN.JktSel
tanggal 16 September 2020, memutuskan bersalah
saudara Muhammad Ali dengan pidana penjara
1 tahun. Atas putusan tersebut Muhammad Ali
mengajukan proses banding di Pengadilan Tinggi di

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

April 6, 2017 concerning the B Residence Apartment
Project, Serpong for Structural and Plumbing Work.

WIKA Gedung has won the process at BANI but
PT Maju Gemilang Serpong is submitting an effort to
cancel BANI's decision.

Furthermore, regarding resolution No.42/Eks.
Arb/2022/PN.Jkt.Brt dated August 25, 2023, Civil
Court of Tangerang is in process of seizure and
auction of assets belong to PT Maju Gemilang
Serpong.

For the year ended December 31, 2024, WIKA
Gedung is still waiting for the verdict on the process
of seizure and auction of assets belong to PT Maju
Gemilang Serpong.

**The Company's lawsuit against PT Alumindo
Cipta Persada related to Contract Default**

In March 2023, WIKA Gedung filed lawsuit against
PT Alumindo Cipta Persada at South Jakarta High
Court regarding default of contract from project
owner. As of the published date of consolidated
financial statements, the Company is still conducting
legal process.

The total claim from WIKA Gedung against
PT Alumindo Cipta Persada amounted to
Rp12,393,912.

WIKA Beton

Acquisition of Land Assets

Regarding the purchase of a 50-hectare land in
Karangmukti Village, Cipeundeuy District, Subang
Regency, West Java Province for the development of
a Concrete Product Factory in Subang, WIKA Beton
reported the Management of PT Agrawisesa
Widyatama to the Criminal Investigation Agency of
the Indonesian National Police (Bareskrim Mabes
POLRI) in 2017 for alleged criminal acts of fraud
and/or embezzlement related to the sales agreement
conducted by WIKA Beton and PT Agrawisesa
Widyatama, as documented in the Police Report No.
LP/1342/XII/2017/Bareskrim dated December 7,
2017. This report was made because PT Agrawisesa
Widyatama did not execute the division of the
Building Rights Certificate (SHGB) No. 722 covering
an area of 1,996,977 sqm as previously agreed
upon, and it was found that the SHGB had been
transferred or pledged to another party.

In Decision No. 589/Pid-B/2020/PN.JktSel
September 16, 2020, the South Jakarta District Court
found Muhammad Ali guilty of 1 year imprisonment.
Muhammad Ali filed an appeal against the decision
at the High Court in DKI Jakarta. For this, the High

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

DKI Jakarta. Atas hal tersebut, Pengadilan Tinggi dalam putusan No 441/PID/2020/PT.DKI tanggal 14 Desember 2020 menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun kepada saudara Muhammad Ali.

Selain itu WIKA Beton juga telah melakukan upaya-upaya penyelesaian non litigasi dengan mengajukan pembatalan sebagian sertifikat dari SHGB 722 melalui Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan telah terbit surat rekomendasi pembatalan sertifikat tersebut oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat kepada Kementerian Agraria dan tata Ruang/BPN Pusat dengan nomor MP.01.01/1083-32.600/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020.

Atas surat permohonan dan rekomendasi tersebut, telah terbit surat keterangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang menerangkan sampai dengan saat ini masih dalam proses penanganan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (Sebagaimana Surat Direktur Pencegahan dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tanggal 5 Februari 2021 Nomor SK. 06.03/28-800.38/11/2021).

Selanjutnya Atas Laporan WIKA Beton sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Sdr. Muhammad Ali (Direktur Utama Agrawisesa Widyatama) terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 jo. 55 KUHP dan dijatuhkan hukuman pidana 3 tahun penjara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 589/Pid.B/2020/PN Jkt. Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 441/PD/2020/PTDKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 571K/PID/2021.

Sdr. Burhanuddin (Komisaris Utama Agrawisesa) terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 jo. 55 KUHP dan dijatuhkan hukuman 3 tahun 10 bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1154/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tanggal 17 Maret 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 106/PID/2022/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1177/K.PID/2022.

Sebagai tindak lanjut proses pidana, WIKA Beton selanjutnya akan melakukan upaya upaya hukum lanjutan guna mendapatkan kepastian hukum atas lahan sehingga sertifikat lahan dapat diperoleh WIKA Beton.

Berdasarkan dokumen dan fakta-fakta serta tahapan proses yang telah WIKA Beton lakukan, WIKA Beton memiliki legal standing yang kuat dan proses perolehan sertifikat akan dapat diselesaikan.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Court in decision No 441/PID/2020/PT.DKI dated December 14, 2020 sentenced Muhammad Ali to a prison sentence of 3 years.

In addition, the WIKA Beton has also made non-litigation resolution efforts by proposing the cancellation of the certificate from SHGB 722 partially through the West Java Provincial BPN Regional Office and a recommendation letter of for that certificate cancellation has been issued by the West Java Provincial BPN Regional Office to the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/ Central BPN with number MP.01.01/ 1083-32.600/VII/2020 dated July 20, 2020.

On the request and recommendation letter, a statement letter from the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/ BPN has been issued which states that until now it is still in the handling process at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/ BPN. (As stated in the Letter of the Director for Prevention and Handling of Land Disputes and Conflicts at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ BPN dated February 5, 2021 Number SK. 06.03/28-800.38/11/2021).

Furthermore, based on WIKA Beton's report as explained earlier, Mr. Muhammad Ali (President Director of Agrawisesa Widyatama) has been proven legitimately and declared guilty of committing a criminal act under Article 378 jo. 55 of the Criminal Code (KUHP) and has been sentenced to 3 years in prison according to the South Jakarta District Court Decision No. 589/Pid.B/2020/PN Jkt. Sel jo. Jakarta High Court Decision No. 441/PD/2020/PTDKI jo. Supreme Court Decision No. 571K/PID/2021.

Mr. Burhanuddin (President Commissioner of Agrawisesa) has also been proven legitimately and declared guilty of committing a criminal act under Article 378 jo. 55 of the Criminal Code (KUHP), and has been sentenced to 3 years and 10 months, according to the South Jakarta District Court Decision No. 1154/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel dated March 17, 2022, jo. Jakarta High Court Decision No. 106/PID/2022/PT.DKI jo. Supreme Court Decision No. 1177/K.PID/2022.

As a follow-up to the criminal proceedings, WIKA Beton will further pursue legal efforts to obtain legal certainty regarding the land, allowing WIKA Beton to obtain the land certificate.

Based on documents and facts as well as the stages of the process that WIKA Beton has carried out, WIKA Beton has a strong legal standing and the certificate attainment process will be completed.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

**54. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko
Keuangan Dan Modal**

**54. Financial Instruments, Financial Risk And
Capital Management**

A. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

**A. Categories and Classes of Financial
Instruments**

	2024 Rp	2023 Rp	
Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi			Financial Assets Measured at Amortized Cost
Kas dan Setara Kas	3,361,002,876	3,233,071,377	Cash and Cash Equivalent
Bank Dibatasi Penggunaannya	2,392,793,739	--	Restricted Bank
Piutang Usaha	2,330,250,891	3,310,321,966	Trade Receivables
Piutang Retensi	1,283,805,231	1,572,095,631	Retention Receivables
Tagihan Bruto Pemberi Kerja	1,743,506,039	2,463,049,432	Gross Amount Due From Customer
Piutang yang Belum Ditagih	709,596,951	754,219,366	Unbilled Receivables
Piutang Lain-lain	404,014,272	299,796,061	Other Receivable
Aset Lain-lain*)	93,664,952	44,548,516	Other Assets*)
Total	12,318,634,951	11,677,102,349	
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)			Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Investasi Jangka Panjang Lainnya	1,034,565,732	1,029,675,332	Other Long Term Investments
Total	13,353,200,683	12,706,777,681	Total
Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi			Financial Liabilities at Amortized Cost
Pinjaman Jangka Pendek	553,143,727	17,613,134,212	Short-Term Loans
Utang Usaha	6,054,267,349	9,339,844,216	Trade Payables
Beban Akrua	5,515,315,532	5,399,694,690	Accrued Expenses
Pinjaman Jangka Menengah	1,705,000,000	1,780,000,000	Medium Term Notes
Liabilitas Sewa	40,425,934	154,772,310	Lease Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang	22,960,859,691	5,912,559,223	Long-Term Loan
Utang Lain-lain	1,398,567,248	1,050,536,201	Other Payables
Obligasi	6,272,696,110	7,602,943,200	Bond
Sukuk Mudharabah	1,591,090,000	2,138,015,000	Sukuk Mudharabah
Total	46,091,365,591	50,991,499,052	Total

*) Terdiri dari Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Retensi Bank

*) Consist of Restricted Funds and Bank Retention

B. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Grup adalah risiko suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Grup dijalankan secara hati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Grup.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko nilai tukar.

Selain pinjaman jangka panjang, Grup memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang

B. Financial Risk Management Policies and Objectives

The main risks arising from financial instruments held by the Group are interest rate, foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. The Group's operational activities are carried out carefully by managing those risks in order not to incur any potential losses for the Group.

i. Foreign currency risk management

Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in exchange rates. The Group's exposures to foreign exchange risk.

In addition to long-term loans, the Group has exposure in foreign currencies arising from its operational transactions. Such exposure arises because the relevant transaction is made in a currency other than the functional currency of the

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

fungsional unit operasional atau pihak lawan. Eksposur dalam mata uang asing tersebut jumlahnya tidak material.

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 diungkapkan dalam Catatan 50.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Pelemahan Rupiah sebesar 5% terhadap mata uang asing 31 Desember 2024 dan 2023 akan meningkatkan laba tahun berjalan dan ekuitas masing-masing sebesar Rp23.798.186 dan Rp11.952.905.

Penguatan Rupiah sebesar 5% terhadap matauang asing per 31 Desember 2024 dan 2023 akan memberikan efek kebalikan yang sama besarnya, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap sama.

ii. Manajemen risiko tingkat bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan utang sewa pembiayaan.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel dan dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditor untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru.

Eksposur Grup terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen keuangan pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun.

Kenaikan atau penurunan tingkat bunga 1% digunakan tingkat melaporkan risiko suku bunga

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

operating unit or the other party. The exposure in such foreign currency is immaterial.

The monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of December 31, 2024 and December 31, 2023 are disclosed in Note 50.

Foreign currency sensitivity analysis

A 5% weakening of the Rupiah against the foreign currency as of December 31, 2024 and 2023 would have increased profit and equity by Rp23,798,186 and Rp11,952,905, respectively.

A 5% strengthening of the Rupiah against the foreign currency as of December 31, 2024 and 2023 would have had the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remain constant.

ii. Interest rate risk management

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Group's exposures to interest rate risk relates primarily to short-term loans, long-term loans and finance lease liabilities.

To minimize interest rate risk, the Group manages interest expense through fixed rate and variable-rate debt combinations and by evaluating the tendency of the market interest rates. Management also conducts a review of the various interest rates offered by creditors to obtain favorable interest rates before making a decision to initiate a new debt obligation.

The Group's exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analyses below had been determined based on the exposure to interest rates for financial instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year.

A 1% increase or decrease in interest rates is used when reporting interest rate risk internally to

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Kenaikan tingkat bunga sebesar 1% terhadap per 31 Desember 2024 dan 2023 akan menurunkan laba tahun berjalan dan ekuitas masing-masing sebesar Rp235.140.034 dan Rp235.256.934.

Penurunan tingkat bunga sebesar 1% terhadap per Desember 2024 dan 2023 akan memberikan efek kebalikan yang sama besarnya, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap sama.

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank, tagihan bruto pemberi kerja, piutang usaha, piutang retensi dan piutang lain-lain. Grup menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi.

Eksposur Grup dan rekanan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan pihak lawan yang di review dan disetujui oleh komite manajemen risiko secara tahunan.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek-menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

key employees and represents management's assessment of possible changes in interest rates.

A 1% increasing of interest rate as of December 31, 2024 and 2023 would have decrease profit and equity by Rp235,140,034 and Rp235,256,934, respectively.

A 1% decreasing of interest rate as of December 31, 2024 and 2023 would have had the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remain constant.

iii. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in financial loss to the Group.

The Group's credit risk is primarily attributed to its cash in banks, gross amount due from customers, retention receivables and other accounts receivable. The Group places its bank balances with credit worthy financial institutions. Trade accounts receivable are entered with respected and credit worthy third parties and related parties.

The Group's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the risk management committee annually.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated statements of financial position, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

iv. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short-medium and long-term funding and liquidity management requirements.

The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek – menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut juga merinci ekspektasi jatuh tempo untuk aset keuangan non-derivatif Grup. Tabel disusun berdasarkan jatuh tempo kontrak tak terdiskonto dari aset keuangan termasuk bunga yang akan diperoleh dari aset tersebut. Diantarkannya informasi aset keuangan non-derivatif diperlukan dalam rangka untuk memahami manajemen risiko likuiditas Grup di mana likuiditas dikelola atas dasar aset dan liabilitas bersih.

Liquidity and interest risk tables

The ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, whom has established liquidity risk management framework suitable for the management of the Group's short – medium and longterm funding as well as and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The following table details the Group's expected maturity for its non-derivative financial assets. The table has been drawn up based on the undiscounted contractual maturities of the financial assets including interest that will be earned on those assets. The inclusion of information on non-derivative financial assets is necessary in order to understand the Group liquidity risk management as the liquidity is managed on a net asset and liability basis.

		2024						
		Tingkat Bunga Rata-rata Tertimbang Efektif/ Weighted Average Effective Interest Rate Rp	1-3 Bulan/ 1-3 months Rp	3 Bulan Sampai 1 Tahun/ 3 Months to 1Year Rp	Lebih dari 1 Tahun/ More Than 1 Year Rp	Jumlah/ Total Rp		
Aset							Assets	
Tanpa Bunga							Non-Interest Bearing	
Kas		--	26,664,911	--	--	26,664,911	Cash on Hand	
Piutang Usaha		--	--	1,940,844,033	--	1,940,844,033	Trade Receivable	
Piutang Retensi		--	--	1,452,467,427	--	1,452,467,427	Retention Receivables	
Piutang Lain-Lain		--	--	404,014,272	--	404,014,272	Other Receivable	
Jaminan Usaha		--	--	372,139,435	--	372,139,435	Business Guarantee	
Piutang yang Belum Ditagih		--	--	709,596,951	--	709,596,951	Unbilled Receivable	
Instrumen Suku Bunga Mengambang							Floating Interest Rate Instruments	
Kas di Bank		1.00% - 2.50%	2,732,444,255	--	--	2,732,444,255	Cash in Bank	
Bank Dibatasi Penggunaannya		1.00% - 2.50%	2,392,793,739	--	--	2,392,793,739	Restricted Bank	
Instrumen Suku Bunga Tetap							Fixed interest rate instruments	
Deposito Berjangka		4% - 11%	703,427,089	--	--	703,427,089	Time Deposits	
Piutang Lain-Lain		9.25%	404,014,272	--	--	404,014,272	Other Receivable	
Total			6,259,344,266	4,879,062,118	--	11,138,406,384	Total	
Liabilitas							Liabilities	
Tanpa Bunga							Non-Interest Bearing	
Utang Usaha		--	6,054,267,349	--	--	6,054,267,349	Trade Payable	
Utang Lain-Lain		--	1,398,567,248	--	--	1,398,567,248	Other Payable	
Beban Akrua		--	5,515,315,532	--	--	5,515,315,532	Accrued Expense	
Instrumen Suku Bunga Mengambang							Floating Interest Rate Instruments	
Pinjaman Jangka Pendek		3.96% - 11.25%	553,143,727	--	--	553,143,727	Short-Term Loan	
Instrumen Suku Bunga Tetap							Fixed Interest Rate Instruments	
Liabilitas sewa		8.4% - 13%	30,604,697	--	--	30,604,697	Lease Liabilities	
Pinjaman Jangka Menengah		9.75% - 11.50%	--	--	1,705,000,000	1,705,000,000	Medium-Term Loan	
Pinjaman Jangka Panjang		4.7% - 11%	--	--	21,309,858,648	21,309,858,648	Long-Term Loan	
Obligasi		8.60% - 9.85%	--	--	6,272,696,110	6,272,696,110	Bond	
Sukuk Mudharabah		8.60% - 9.85%	--	--	1,691,090,000	1,691,090,000	Sukuk Mudharabah	
Total			13,551,898,553	--	30,878,644,758	44,430,543,311	Total	
		2023						
		Tingkat Bunga Rata-rata Tertimbang Efektif/ Weighted Average Effective Interest Rate Rp	1-3 Bulan/ 1-3 months Rp	3 Bulan Sampai 1 Tahun/ 3 Months to 1Year Rp	Lebih dari 1 Tahun/ More Than 1 Year Rp	Jumlah/ Total Rp		
Aset							Assets	
Tanpa Bunga							Non-Interest Bearing	
Piutang Usaha		--	35,757,419	--	--	35,757,419	Cash on Hand	
Piutang Retensi		--	1,348,915,033	1,780,320,666	181,086,267	3,310,321,966	Trade Receivable	
Piutang Lain-Lain		--	184,574,307	746,454,484	641,066,840	1,572,095,631	Retention Receivables	
Tagihan Bruto Pemberi Kerja		--	--	22,167,955	--	22,167,955	Other Receivable	
Piutang yang Belum Ditagih		--	1,483,767,210	299,202,111	680,080,111	2,463,049,432	Business Guarantee	
Aset Lain-lain		--	--	754,219,366	--	754,219,366	Unbilled Receivable	
Instrumen Suku Bunga Mengambang							Floating Interest Rate Instruments	
Kas di Bank		0%	44,548,516	--	--	44,548,516	Cash in Bank	
Instrumen Suku Bunga Tetap							Fixed interest rate instruments	
Deposito Berjangka		1.00% - 2.50%	2,427,631,487	--	--	2,427,631,487	Time Deposits	
Piutang Lain-Lain		2.50% - 6.00%	769,882,471	--	--	769,882,471	Other Receivable	
Total			6,294,876,443	3,602,364,582	1,502,233,218	8,927,294,240	Total	

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2023					Jumlah/ Total Rp
	Tingkat Bunga Rata-rata Terimbang Efektif/ Effective Interest Rate Rp	1-3 Bulan/ 1-3 months Rp	3 Bulan Sampai 1 Tahun/ 3 Months to 1 Year Rp	Lebih dari 1 Tahun/ More Than 1 Year Rp		
Liabilitas						Liabilities
Tanpa Bunga						Non-Interest Bearing
Utiang Usaha	--	4,924,121,744	3,755,993,913	659,728,559	--	Trade Payable
Utiang Lain-Lain	--	942,284,389	--	108,251,812	1,050,536,201	Other Payable
Beban Akrual	--	5,399,694,690	--	--	5,399,694,690	Accrued Expense
Instrumen Suku Bunga Mengambang						Floating Interest Rate Instruments
Pinjaman Jangka Pendek	3,96% - 11,25%	17,613,134,212	--	--	17,613,134,212	Short-Term Loan
Instrumen Suku Bunga Tetap						Fixed Interest Rate Instruments
Liabilitas sewa	8,4% - 13%	44,129,533	--	110,642,777	154,772,310	Lease Liabilities
Pinjaman Jangka Menengah	9,75% - 11,50%	--	1,545,000,000	235,000,000	1,780,000,000	Medium-Term Loan
Pinjaman Jangka Panjang	4,7% - 11%	--	189,334,468	5,723,224,755	5,912,559,223	Long-Term Loan
Obligasi	8,60% - 9,85%	--	1,066,000,000	7,602,943,200	8,668,943,200	Bond
Sukuk Mudharabah	8,60% - 9,85%	--	459,800,000	2,138,015,000	2,597,815,000	Sukuk Mudharabah
Total		29,107,364,568	3,260,134,468	16,577,806,103	43,361,454,836	Total

C. Manajemen Permodalan

Grup mengelola modal untuk memastikan bahwa entitas dalam Grup akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman yang saling hapus dengan kas dan setara kas dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, tambahan modal disetor, saldo laba dan kepentingan nonpengendali dan dikurangi dengan modal saham diperoleh kembali.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari reviu ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pinjaman	31,431,788,485	34,857,317,167	Debt
Ekuitas	8,868,680,797	5,749,878,346	Equity
Gearing ratio	354%	606%	Gearing ratio

D. Pengukuran Nilai Wajar

Berikut hirarki nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang pada akhir tahun dicatat menggunakan nilai wajar, yaitu:

	2024 Rp	Tingkat I/ Level I Rp	Tingkat II/ Level II Rp	Tingkat III/ Level III Rp
Aset Keuangan yang Diukur Dengan Laba dan Rugi/ Financial Assets Through Profit and Loss				
Investasi Jangka Panjang Lainnya/ Other Long Term Investments				
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	654,700,000	--	--	654,700,000
PT Citra Marga Lintas Jabar	238,000,000	--	--	238,000,000
PT Bandara Internasional Batam	119,000,000	--	--	119,000,000

C. Capital Management

The Group manages its capital to ensure that entities in the Group will be able to continue as a going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Group capital structure consists of debt offset by cash and cash equivalents and equity shareholders of the holding consisting of capital stock, additional paid-in capital, retained earnings and non-controlling interests and deduct with treasury stock.

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The gearing ratio as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

D. Fair Value Measurements

The following is the fair value hierarchy of financial assets measured at fair value through profit or loss which at the end of the year is recorded using fair value, namely:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	Tingkat I/ Level I Rp	Tingkat II/ Level II Rp	Tingkat III/ Level III Rp
PT Karya Logistik Nusantara	15,000,000	--	--	15,000,000
PT Jasamarga Bali Tol	3,800,000	--	--	3,800,000
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	2,425,732	--	--	2,425,732
PT Jasamarga Akses Patimban	1,500,000	--	--	1,500,000
PT Air Minum Indonesia	140,000	--	--	140,000
	2023 Rp	Tingkat I/ Level I Rp	Tingkat II/ Level II Rp	Tingkat III/ Level III Rp
Aset Keuangan yang Diukur Dengan Laba dan Rugi/ <i>Financial Assets Through Profit and Loss</i>				
Investasi Jangka Panjang Lainnya/ <i>Other Long Term Investments</i>				
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	655,200,000	--	--	655,200,000
PT Citra Marga Lintas Jabar	238,000,000	--	--	238,000,000
PT Bandara Internasional Batam	113,000,000	--	--	113,000,000
PT Karya Logistik Nusantara	15,000,000	--	--	15,000,000
PT Jasamarga Bali Tol	3,800,000	--	--	3,800,000
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	2,425,732	--	--	2,425,732
PT Jasamarga Akses Patimban	1,500,000	--	--	1,500,000
PT Jasamarga Gedebage Cilacap	609,600	--	--	609,600
PT Air Minum Indonesia	140,000	--	--	140,000

**55. Pengungkapan Tambahan Atas Aktivitas
Investasi dan Pendanaan Nonkas**

**55. Supplemental Disclosures on Noncash
Investing and Financing Activities**

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, Grup melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

As December 31, 2024 and 2023 the Group has investment and financing transactions that did not affect cash and cash equivalents and hence not included in the consolidated statements of cash flows with details as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Penambahan Pinjaman Jangka Panjang Melalui Reklasifikasi			<i>Additional of Long-term Loan Through Reclassification</i>
Pinjaman Jangka Pendek	17,091,320,246	--	<i>Short-term Loan</i>
Utang Usaha	1,993,801,930	--	<i>Trade Payables</i>
Biaya Akrual	1,282,876,139	--	<i>Accrued Expenses</i>
Penambahan Investasi Ventura Bersama dan Pinjaman Jangka Panjang Melalui Perjanjian Novasi	754,798,000	--	<i>Additional Joint Venture Investment and Long-Term Loan Through Novation Agreement</i>
Pengurangan Investasi Ventura Bersama karena terkonsolidasi	440,981,751	--	<i>Reduction of Joint Venture Investment due to consolidation</i>
Perolehan Aset Tetap Melalui Utang Usaha dan Beban Akrual	30,436,201	13,060,847	<i>Addition of Fixed Assets Through Account Payables and Accrued Expenses</i>
Penambahan Properti Investasi Melalui Konversi Piutang Usaha	2,583,380	--	<i>Addition of Investment Properties Through Trade Receivables Conversion</i>
Penambahan Investasi Pada Entitas Ventura Bersama Melalui Konversi Beban Bunga	--	500,894,726	<i>Additional of Investment in Joint Venture Through Interest Expenses Conversion</i>
Penambahan Investasi pada Entitas Asosiasi Melalui Konversi Utang	--	65,000,000	<i>Additional Investment in Entities Association Through Debt Conversion</i>
Penambahan Uang Muka Investasi Melalui Piutang Lain-lain	--	11,142,141	<i>Addition of Advance Payment Investment Through Other Receivable</i>

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk periode/ tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023:

The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the period/ years ended December 31, 2024 and 2023:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Arus Kas/ Cash Flow		Perubahan Nonkas/ Non-cash Changes				2024		
	Rp	Rp	Amortisasi Biaya Langsung/ Amortized Related Cost	Penambahan Aset Hak Penguasaan Pengelolaan Air/ Additional Water Management Concession Rights	Keuntungan dari Restrukturisasi/ Pinjaman	Reklasifikasi/ Reclassification			Pelepasan Entitas Anak/ Divestment of Subsidiaries
Pinjaman Jangka Pendek	17,613,134,212	(119,387)	--	--	--	(17,059,871,098)	--	553,143,727	Short-Term Loans
Pinjaman Jangka Menengah	1,780,000,000	(25,000,000)	--	--	--	--	(50,000,000)	1,705,000,000	Medium Term Notes
Pinjaman Jangka Panjang	5,912,559,223	625,810,825	478,332,524	--	69,207,276	(4,492,115,217)	20,733,635,060	22,960,859,691	Long-Term Loans
Liabilitas Sewa	154,772,310	(25,808,388)	--	--	--	--	--	40,425,934	Lease Liabilities
Obligasi	8,668,943,200	(671,000,000)	8,502,910	--	--	--	--	8,006,446,110	Bonds Payable
Sukuk Mudharabah	2,781,815,000	(509,500,000)	--	--	--	--	--	2,272,315,000	Sukuk Mudharabah
Total Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	36,911,223,945	(575,616,950)	486,835,434	69,207,276	(4,492,115,217)	3,673,763,962	(535,107,988)	35,538,190,462	Total Liabilities from Financing Activities

	Arus Kas/ Cash Flow		Perubahan Nonkas/ Non-cash Changes		2023	
	Rp	Rp	Amortisasi Biaya Langsung/ Amortized Related Cost	Reklasifikasi/ Reclassification		
Pinjaman Jangka Pendek	14,782,732,938	3,007,314,418	--	(176,913,144)	17,613,134,212	Short-Term Loans
Pinjaman Jangka Menengah	1,800,000,000	(20,000,000)	--	--	1,780,000,000	Medium Term Notes
Pinjaman Jangka Panjang	5,121,634,299	614,011,780	--	176,913,144	5,912,559,223	Long-Term Loans
Liabilitas Sewa	252,102,989	(97,330,679)	--	--	154,772,310	Lease Liabilities
Obligasi	8,664,562,200	--	4,381,000	--	8,668,943,200	Bonds Payable
Sukuk Mudharabah	2,781,815,000	--	--	--	2,781,815,000	Sukuk Mudharabah
Total Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	33,402,847,426	3,503,995,519	4,381,000	--	36,911,223,945	Total Liabilities from Financing Activities

56. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan asumsi bahwa Grup akan melanjutkan operasi sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah mencatat rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.593 miliar yang mengakibatkan defisit sebesar Rp9.539 miliar. Selain itu, terdapat gagal bayar obligasi dan sukuk mudharabah yang jatuh tempo tanggal 18 Februari 2025 masing-masing sebesar Rp593,9 miliar dan Rp412,9 miliar.

Beberapa rencana manajemen untuk meningkatkan pendapatan antara lain:

- Bermitra dengan *Strategic Partner* yang memiliki pengalaman, SDM, dan kondisi finansial yang kuat;
- Mempertahankan hubungan baik dengan pemberi kerja baik Kementerian/Lembaga, BUMN maupun pihak swasta;
- Meningkatkan implementasi ESG, dan membangun ekosistem *green energy* yang selaras dengan inisiatif dan strategi transformasi bisnis;
- Penguatan *positioning* WIKA sebagai *Champion EPC* dan Fokus dalam proyek-proyek *Renewable Energy* dan Hilirisasi;
- Menerapkan *Owner Selection* dan *Project Selection* berbasis Manajemen Risiko dengan prinsip *Four Eyes Principle* dalam pelaksanaan tender secara prudent untuk memastikan *project delivery* dan *profitability*; dan

56. Going Concern

The consolidated financial statements had been prepared with an assumption that the Group will continue as a going concern. As of December 31, 2024, the Group incurred a net loss amounted to Rp2,593 billion during the year ended December 31, 2024 which resulting in a deficit amounted to Rp9,539 billion. Furthermore, there was a default on bonds and sukuk mudharabah which matured on February 18, 2025 amounting to Rp593,9 billion and Rp412,9 billion.

Several management plans to increase revenue include:

- Partnering with strategic partners who have experience, human resources, and strong financial conditions;
- Maintaining good relationships with employers, including Ministries/Agencies, State-Owned Enterprises (BUMN), and private entities;
- Enhancing ESG implementation and building a green energy ecosystem in alignment with business transformation initiatives and strategies;
- Strengthening WIKA's positioning as an EPC Champion and focusing on Renewable Energy and Downstream projects;
- Implementing Owner Selection and Project Selection based on Risk Management with the Four Eyes Principle in the tender process to ensure prudent project delivery and profitability; and

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- Melakukan sinergi antar divisi dan Entitas Anak secara optimal untuk meningkatkan daya saing secara Grup.

Manajemen juga melakukan efisiensi usaha dengan menerapkan kebijakan antara lain:

- Pemberlakuan sistem kerja hybrid (WFO 50%);
- Efisiensi biaya listrik dengan pembatasan operasional lift, eskalator dan air conditioner;
- Penyesuaian biaya pemasaran/ beban penjualan;
- Penyesuaian biaya konsumsi, transportasi dan informatika;
- Penyesuaian biaya konsultan, pelatihan, seminar, dan kursus-kursus;
- Peninjauan kembali remunerasi pegawai tahun 2025; dan
- Membuka kembali diskusi dengan para kreditur untuk mendapatkan keringanan pembayaran bunga dan pokok pinjaman.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa rencana yang disusun dan langkah-langkah yang dilaksanakan tersebut di atas dapat berjalan secara efektif. Kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya masih tergantung pada dukungan keuangan melalui Penyertaan Modal Negara dari pemegang saham Grup (Catatan 39), serta pencapaian kinerja keuangan yang memuaskan.

Efektivitas langkah-langkah tersebut tergantung pada eksistensi dari Manajemen serta kondisi ekonomi dan bisnis di masa depan dimana Grup beroperasi.

Oleh karena itu masih terdapat ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

57. Peristiwa Setelah Periode Laporan

Perusahaan

Berdasarkan Surat Perusahaan nomor SE.01.00/A.CORSEC.00069/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Informasi terkait Pembayaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor KSEI-0674/DIR/0225 tanggal 17 Februari 2025 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A.g

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- *Optimizing synergy between divisions and subsidiaries to enhance the Group's overall competitiveness.*

Management also implements business efficiency measures by adopting policies, including:

- *Implementing a hybrid work system (50% work from office);*
- *Reducing electricity costs by limiting the operation of elevators, escalators, and air conditioning;*
- *Adjusting marketing expenses/sales costs;*
- *Adjusting costs for consumption, transportation, and IT;*
- *Adjusting costs for consultants, training, seminars, and courses;*
- *Reviewing employee remuneration for 2025; and*
- *Reopening discussions with creditors to negotiate relief on interest and principal loan payments.*

Group Management believes that the plans prepared and the steps implemented above can run effectively. The Group's ability to maintain its viability still depends on financial support through State Capital Participation from the Group's shareholders (Note 39), as well as achieving satisfactory financial performance.

The effectiveness of these steps depends on the existence of the management along with the economic and business conditions in the future where the Group operates.

Hence there are still a material uncertainty that may cast significant doubt about the Group's ability to continue as going concern.

57. Events After Reporting Period

The Company

Based on Letter from the Company number SE.01.00/A.CORSEC.00069/2025 dated February 14, 2025 regarding Information on the Payment of Sustainable Bonds and Sukuk Mudharabah II Wijaya Karya Phase II Year 2022 Series A and Letter from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) number KSEI-0674/DIR/0225 dated February 17, 2025, regarding the Postponement of the Principal Payment of the Sustainable Obligation II Wijaya Karya Phase II Year 2022 Series A and the Sustainable Sukuk Mudharabah II Wijaya Karya Phase II Year 2022 Series A.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A (WIKAO2ACN2) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025. Hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha Perusahaan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, berdasarkan pengumuman dari BEI No. Peng-SPT00001/BEI.PP2/02-2025, memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek Perusahaan di Seluruh Pasar terhitung sejak Pra-Pembukaan Perdagangan Efek tanggal 18 Februari 2025, hingga pengumuman BEI lebih lanjut.

**Pinjaman Jangka Panjang
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")**

Berdasarkan surat CMU/01/0046 dari HSBC pada 31 Januari 2025 menyatakan bahwa Perusahaan telah melunasi seluruh fasilitas *Tranche A*, *Tranche B*, dan *Tranche C* sesuai dengan Perjanjian Kredit untuk Restrukturisasi No. 9 tertanggal 23 Januari 2024. Pelunasan pokok dilakukan pada 23 Januari 2025.

Dengan pelunasan ini, Perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban terhadap bank, dan HSBC tidak memiliki kepentingan atas dokumen jaminan yang sebelumnya diberikan oleh Perusahaan.

WIKON

**Pinjaman Jangka Pendek
PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Berdasarkan surat perubahan Nomor 002/AMD/CB/JKT/2025 tanggal 3 Januari 2025 atas perubahan pernyataan kembali Fasilitas Kredit Nomor 246/AMD/CB/JKT2011 tanggal 6 Juni 2011.

Masa berlaku kredit sampai dengan 1 September 2025.

**58. Informasi Keuangan Tambahan atas
Laporan Keuangan Entitas Induk**

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir (Lampiran 1-6), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun pada 31 Desember 2024 dan 2023, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The Company has postponed the principal payment of the Sustainable Sukuk Mudharabah II Wijaya Karya Phase II Year 2022 Series A and the Sustainable Bonds of II Wijaya Karya Phase II Year 2022 Series A, which were due on February 18, 2025. This indicates issues regarding the Company's ongoing business operations.

Considering this, based on announcement from IDX No. Peng-SPT00001/BEI.PP2/02-2025 has decided to temporarily halt the trading of the Company's securities across all markets starting from the Pre-Opening of Securities Trading on February 18, 2025 until further notice from the IDX.

Long Term Loans

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

Based on the letter issued by HSBC on January 31, 2025, to the Company confirms that the Company has fully repaid all facilities under *Tranche A*, *Tranche B*, and *Tranche C*, in accordance with the Credit Agreement for Restructuring No. 9, dated January 23, 2024. The principal repayment was completed on January 23, 2025.

Following this repayment, the Company no longer has any obligations to the bank, and HSBC no longer has any interest in the collateral documents previously provided by the Company.

WIKON

Short Term Loans

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Based on Amendment Letter Number 002/AMD/CB/JKT/2025 dated January 3, 2025, regarding the restatement amendment of Credit Facility Number 246/AMD/CB/JKT2011 dated June 6, 2011.

The credit validity period is until September 1, 2025.

**58. Supplementary of Financial Information on
The Parent Financial Statements**

The accompanying financial information (Attachments 1-6) of the Company (parent), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2024 and 2023, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes equity, and statements of cash flows for the years ended December 31, 2024 and 2023, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

“Informasi Keuangan Entitas Induk”) yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

(collectively referred to as the “Parent Financial Information”), which is presented as a supplementary information to the consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the consolidated financial statements.

59. Informasi Keuangan Tambahan (Tidak Diaudit)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia.

Kontribusi Pajak

Informasi keuangan tambahan menyajikan informasi terkait kontribusi Perusahaan dan Entitas Anak kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-32/DKU.MBU/08/2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
A. Pajak		
Pajak Penghasilan (PPh)	519,528,735	543,472,610
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	1,233,199,896	1,701,954,760
Bea dan Cukai	11,979,236	10,692,410
Pajak Pemerintah Pusat Lainnya	45,577,551	24,435,935
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2,349,932	3,917,758
Total Kontribusi Pajak (Total A)	1,812,635,350	2,284,473,473
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
PNBP Lainnya	7,907,819	6,250,000
Total Kontribusi PNBP (Total B)	7,907,819	6,250,000
Jumlah	1,820,543,169	2,290,723,473

59. Supplementary Financial Information (Unaudited)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards.

Tax Contribution

The supplementary financial information presents information related to the Company’s and Subsidiaries contribution to the Government of Indonesia as required by the Circular Letter of Ministry of State-owned Enterprises of The Republic of Indonesia No. S-32/DKU.MBU/08/2024, details as follows:

Tax A.
Income Tax
Value Added Tax (VAT) & Tax on Sales of Luxury Goods (PPnBM)
Custom and Excises
Other Central Government Taxes
Property Tax
Total Tax Contribution (Total A)
Non-Tax State Revenue (PNBP) B.
Other (PNBP)
Total PNBP Contribution (Total B)
Total

60. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada 26 Maret 2025.

60. Management Responsibility to the Consolidated Financial Statements

The Company’s Management is responsible for the preparation of the consolidated financial statements which were authorized to be issued by Directors on March 26, 2025.

LAMPIRAN 1

ATTACHMENT 1

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (PARENT)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	825,486,208	850,914,971	Cash and Cash Equivalents
Bank Dibatasi Penggunaannya	2,392,793,739	--	Restricted Bank
Piutang Usaha - Neto	814,889,318	1,578,565,470	Trade Receivables - Net
Piutang Retensi - Neto	687,943,830	967,572,608	Retention Receivables - Net
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Neto	1,957,937,497	1,831,613,606	Gross Amount Due From Customers - Net
Piutang Yang Belum Ditagih	25,380,146	41,325,049	Unbilled Receivables
Piutang Lain-lain - Bagian Lancar	160,480,792	222,964,889	Other Receivables - Current Portion
Persediaan	779,641,132	806,504,881	Inventories
Uang Muka	274,266,523	439,853,911	Advances Payment
Pajak Dibayar Dimuka	209,506,620	304,651,716	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar Dimuka	16,039,977	91,722,598	Prepaid Expense
Jaminan Usaha	29,604,021	31,597,589	Business Guarantee
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi - Neto	1,605,597,852	3,334,508,998	Construction Work in Progress - Net
Jumlah Aset Lancar	9,779,567,655	10,501,796,286	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - Bagian Tidak Lancar	9,815,672,582	10,257,125,255	Other Receivables - Non Current Portion
Investasi Pada Entitas Anak	12,022,101,701	10,538,345,918	Investment in Subsidiaries
Investasi Pada Entitas Asosiasi	373,416,379	494,338,496	Investment in Associates
Investasi Pada Ventura Bersama	11,099,902,104	11,006,349,989	Investment in Joint Venture
Investasi Jangka Panjang Lainnya	1,039,965,732	1,035,075,232	Other Long Term Investments
Aset Takberwujud	48,995,901	62,705,386	Intangible Assets
Properti Investasi - Neto	105,000,000	107,451,000	Investment Property - Net
Aset Tetap - Neto	324,608,538	343,145,289	Fixed Assets - Net
Aset Lain-Lain	58,123,381	52,653,843	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	34,887,786,318	33,897,190,408	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	44,667,353,973	44,398,986,694	TOTAL ASSETS

Draft/March 27, 2025

Paraf:

LAMPIRAN 2

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ATTACHMENT 2

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (PARENT)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As of December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
LIABILITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Pinjaman Jangka Pendek	--	17,091,320,246	Short Term Loans
Utang Usaha	1,779,053,954	4,885,193,584	Trade Payables
Utang Lain-Lain	65,426,566	68,710,563	Other Payables
Utang Pajak	61,984,049	138,646,248	Tax Payable
Beban Akrual	3,173,737,900	3,384,308,240	Accrued Expenses
Pendapatan Diterima Dimuka	11,946,790	7,051,248	Unearned Revenue
Bagian Jangka Pendek dari			Current Portion of
Pinjaman Jangka Panjang	1,282,876,140	--	Long Term Loan
Obligasi	783,950,000	1,066,000,000	Bonds Payable
Sukuk Mudharabah	738,400,000	643,800,000	Sukuk Mudharabah
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7,897,375,399	27,285,030,129	Total Short Term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			LONG TERM LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Kerja	172,361,122	141,664,780	Employee Benefits Liabilities
Uang Muka Proyek Jangka Panjang	234,507,038	597,545,812	Advances for Long Term Projects
Utang Ventura Bersama	115,796,995	--	Joint Venture Payables
Bagian Jangka Panjang Setelah			Long Term Portion
Dikurangi Bagian Jangka Pendek			Net of Current Portion
Pinjaman Jangka Panjang	15,984,061,913	--	Long Term Loan
Obligasi	7,222,496,110	7,602,943,200	Bonds Payable
Sukuk Mudharabah	1,533,915,000	2,138,015,000	Sukuk Mudharabah
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	25,263,138,178	10,480,168,792	Total Long Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	33,160,513,577	37,765,198,921	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal Saham			Share Capital
Nilai Nominal: Rp100 (nilai penuh)			Par Value: Rp100 (full amount)
per Saham			per Share
Modal Dasar			Authorized Capital
2024: 275.000.000.000 Saham			2024: 275,000,000,000 Shares
2023: 35.000.000.000 Saham			2023: 35,000,000,000 Shares
Modal Ditempatkan dan Disetor			Issued and Fully Paid-Up -
Penuh			Capital
2024: 39.873.063.858 Saham			2024: 39,873,063,858 Shares
2023: 8.969.951.372 Saham	3,987,306,386	896,995,137	2023: 8,969,951,372 Shares
Modal Saham Diperoleh Kembali	(110,000)	(110,000)	Treasury Stock
Tambahan Modal Disetor	9,553,645,116	6,579,311,198	Additional Paid-In Capital
Saldo Defisit	(2,060,202,892)	(842,408,562)	Deficit
Jumlah Ekuitas	11,480,638,610	6,633,787,773	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	44,641,152,187	44,398,986,694	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

LAMPIRAN 3

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ATTACHMENT 3

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (PARENT)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
PENDAPATAN NETO	5,690,441,788	9,328,543,123	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(5,245,314,009)	(8,692,024,504)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	<u>445,127,779</u>	<u>636,518,619</u>	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA			OPERATING EXPENSES
Beban Penjualan	(13,678,288)	(8,280,851)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(683,229,650)	(519,531,027)	General and Administrative Expenses
Penghasilan Lain-lain	4,615,893,324	290,670,150	Other Income
Beban Lain-lain	(2,553,773,153)	(2,583,951,128)	Other Expenses
Laba (Rugi) Usaha	<u>1,810,340,012</u>	<u>(2,184,574,237)</u>	Operating Profit (Loss)
Beban Pajak Penghasilan Final	(132,487,808)	(216,657,335)	Final Income Tax Expenses
Beban Keuangan	(1,941,981,961)	(1,757,472,432)	Finance Cost
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(231,478,117)	(86,202,011)	Share in Loss of Associates
Bagian Rugi Entitas Ventura			Share in Loss of Joint
Bersama	(647,223,305)	(111,214,720)	Venturer
	<u>(2,953,171,191)</u>	<u>(2,171,546,498)</u>	
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>(1,142,831,179)</u>	<u>(4,356,120,735)</u>	LOSS BEFORE INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan	(694,104)	(17,870,799)	Income Tax Expense
RUGI NETO TAHUN BERJALAN	<u>(1,143,525,283)</u>	<u>(4,373,991,534)</u>	NET LOSS FOR THE CURRENT YEAR
KERUGIAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE LOSS
Penghasilan Komprehensif			Other Comprehensive Income that
Lainnya yang Tidak Direklasifikasi			Will not be Reclassified Subsequently
ke Laba Rugi:			to Profit or Loss:
Pengukuran Kembali			Remeasurement on Defined
Program Imbalan Pasti	(74,269,047)	(69,054,158)	Benefit Program
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	<u>(1,217,794,330)</u>	<u>(4,443,045,692)</u>	TOTAL COMPREHENSIVE
TAHUN BERJALAN			LOSS FOR THE YEAR

LAMPIRAN 4
ATTACHMENT 4
**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (INDUK)
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (PARENT)
 STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital Rp	Modal Saham/ Diperoleh Kembali/ Treasury Stock Rp	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital Rp	Saldo Laba (Defisit) *) Retained Earnings (Deficit) *) Rp	Total Ekuitas / Total Equity Rp
SALDO 31 DESEMBER 2022	896,995,137	(110,000)	6,579,311,198	3,600,637,190	11,076,833,465
Rugi Neto Tahun Berjalan	--	--	--	(4,373,991,534)	(4,373,991,534)
Rugi Komprehensif Lain	--	--	--	(69,054,158)	(69,054,158)
SALDO 31 DESEMBER 2023	896,995,137	(110,000)	6,579,311,198	(842,408,562)	6,633,787,773
Tambahan Modal Disetor	3,090,311,249	--	2,374,333,918	--	6,064,645,167
Rugi Neto Tahun Berjalan	--	--	--	(1,143,525,283)	(1,143,525,283)
Rugi Komprehensif Lain	--	--	--	(74,269,047)	(74,269,047)
SALDO 31 DESEMBER 2024	3,987,306,386	(110,000)	9,553,645,116	(2,060,202,892)	11,480,638,610

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2022

 Net Loss for the Year
 Other Comprehensive Loss

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2023

 Addition Paid in Capital
 Net Loss for the Year
 Other Comprehensive Loss

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2024

*) Retained Earnings Include Actuarial Gain or Loss

*) Saldo Laba Termasuk Keuntungan Keuangan Aktuarial

LAMPIRAN 5

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2023 Rp	2024 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pelanggan	6,104,537,514	9,557,924,914
Pembayaran Kepada Pemasok dan Lainnya	(6,103,136,117)	(13,205,802,670)
Pembayaran Kepada Direksi dan Karyawan	(874,896,972)	(485,247,991)
Pembayaran Pajak-Pajak	(541,507,880)	(227,161,137)
Penerimaan Restitusi Pajak	116,676,285	151,731,170
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(1,298,327,170)	(4,208,555,714)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Jaminan Usaha	--	(1,680,869)
Penerimaan Dividen dari Entitas Anak	13,146,408	42,618,765
Pengembalian (Penambahan) Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Anak	12,375,260	(930,459,618)
Penempatan Bank Dibatasi Penggunaannya	(2,392,793,739)	--
Penempatan Saham pada Entitas Asosiasi	(100,556,000)	--
Pengembalian (Penambahan) pada Investasi Ventura Bersama	33,744,702	(233,097,438)
Penerimaan Bunga	50,300,105	3,215,813
Uang Muka Investasi	(155,857,787)	(10,000,000)
Penambahan Aset Takberwujud	(11,038,304)	(66,683,845)
Pembelian Aset Tetap	(1,091,811)	(13,452,453)
Pengembalian Aset Lain-Lain	--	21,740,559
Penambahan Investasi Lainnya	--	(16,500,000)
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(2,551,771,166)	(1,204,299,086)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Tambahan Setoran Modal	6,087,913,160	--
Biaya Emisi Penyertaan Modal Negara	(10,919,980)	--
Pembayaran Beban Keuangan	(1,063,242,477)	(226,583,708)
Pembayaran Obligasi	(671,000,000)	--
Pembayaran Sukuk Mudharabah	(509,500,000)	--
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	(11,659,503)	--
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek	--	4,252,859,316
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	3,821,591,200	4,026,275,608
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(28,507,136)	(1,386,579,192)
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	3,078,372	(4,558,218)
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	850,914,971	2,242,052,380
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	825,486,208	850,914,971

ATTACHMENT 5

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (PARENT)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Receipts from Customers
Payments to Suppliers and Others
Payment to Directors and Employees
Payment of Taxes
Receipt of Tax Refund
Net Cash Used for Operating Activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Additional Business Guarantee
Dividend Income from Subsidiary
Return of (Additional) In Long Term Payable to Investment in Subsidiaries
Placement of Restricted Bank
Addition Investment in Associate
Return (Additional) of Investment in Joint Ventures
Interest Received
Advance in Investment
Additional in Intangible Assets
Acquisition of Fixed Assets
Return of Other Assets
Additional in Other Investment
Net Cash Used for Investing Activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Receipt from Paid in Capital
State Capital Participation
Issuance Costs
Finance Charges Paid
Payment of Bond
Payment of Sukuk Mudharabah
Payment of Long Term Loans
Payment of Short Term Loans
Net Cash Provided by Financing Activities
DECREASE OF NET CASH AND CASH EQUIVALENT
EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Paraf:

LAMPIRAN 6

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (INDUK) PENGUNGKAPAN LAINNYA

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ATTACHMENT 6

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (PARENT) OTHER DISCLOSURE

Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Berdasarkan PSAK 227, Perusahaan memilih untuk menyajikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas entitas induk sebagai laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung, bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan informasi keuangan entitas induk adalah sama dengan kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

Sesuai dengan PSAK 227, Perusahaan mencatat penyertaan pada entitas anak dengan menggunakan metode biaya.

1. Separate Financial Statements

In accordance with PSAK 227, the Company elected to present the statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the parent entity as a separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by parent entity which recorded investments in subsidiary on direct equity ownership basis rather than basis of reported results and investee's net asset.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity's financial information are same as the accounting policies adopted in the preparation of the Group's consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiary.

In accordance with PSAK 227, the Company records investment in subsidiaries using cost method.

2. Daftar Investasi pada Entitas Anak

Entitas Anak/ <i>Subsidiaries</i>	Lokasi/ <i>Domicile</i>	Harga Perolehan/ <i>Acquisition Cost</i>	
		2024 Rp	2023 Rp
WIKA Realty	Indonesia	6,625,064,115	5,410,314,119
WIKA Serang Panimbang	Indonesia	1,809,138,107	1,659,125,320
WIKA Ikon	Indonesia	1,450,011,509	1,450,011,509
WIKA Gedung	Indonesia	663,300,000	663,300,000
WIKA Beton	Indonesia	522,928,000	522,928,000
WTJJ	Indonesia	421,023,000	402,030,000
WIKA Bitumen	Indonesia	302,862,500	202,862,500
WIKA Rekon	Indonesia	227,774,470	227,774,470
Total		12,022,101,701	10,538,345,918

2. Schedule of Investment in Subsidiaries

Paraf:

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.

Head Office

WIKA TOWER

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10

Jakarta Timur. 13340

www.wika.co.id

 @ptwijayakarya

 adwijaya@wika.co.id

 www.wika.co.id

Referensi Silang SEOJK No. 16 / SEOJK.04/2021: Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Ketentuan Umum General Terms	
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:	
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.	✓
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	✓
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.	✓
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company	✓
e. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	✓
f. Direksi: Board of Directors:	✓
<ul style="list-style-type: none"> bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and 	✓
<ul style="list-style-type: none"> bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai badan hukum tersebut. for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity. 	✓
g. Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	✓
<ul style="list-style-type: none"> bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan 1) for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and 	✓

KETERANGAN
DESCRIPTION

HALAMAN
PAGE

<ul style="list-style-type: none"> bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. 2) for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity. 	✓
<p>h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:</p>	✓
<ul style="list-style-type: none"> bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and 	✓
<ul style="list-style-type: none"> bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. 2) for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity. . 	✓
<p>Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.</p>	✓
<p>Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.</p>	✓
<p>Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.</p>	✓
<p>Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.</p>	✓
<p>Bentuk Laporan Report Format</p>	
<p>Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.</p>	✓
<p>Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.</p>	✓
<p>Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.</p>	✓
<p>Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).</p>	✓

KETERANGAN
 DESCRIPTION

HALAMAN
 PAGE

Isi Laporan Tahunan

Annual Report Contents

 Laporan Tahunan paling sedikit memuat:
 The Annual Report shall at least contain:

a. ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	90-101
b. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	102-104
c. laporan Direksi; report of the Board of Directors;	132-148
d. laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	118-131
e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	153-321
f. analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	323-407
g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	421-825
h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	827-848
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	856-1052
j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	150-151

Uraian Isi Laporan Tahunan

Description of Annual Report Contents

a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	90-101
• pendapatan/penjualan; income/sales;	90, 92
• laba bruto; gross profit;	90, 92
• laba (rugi); profit (loss);	90, 92
• jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	91
• total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	91
• jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	91
• laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	91
• jumlah aset; total assets;	94, 96
• jumlah liabilitas; total liabilities;	96
• jumlah ekuitas; total equity;	96, 97
• rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	98

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
<ul style="list-style-type: none"> • rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity; 	98, 99
<ul style="list-style-type: none"> • rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales; 	98, 99
<ul style="list-style-type: none"> • rasio lancar; current ratio; 	98, 99
<ul style="list-style-type: none"> • rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity; 	98
<ul style="list-style-type: none"> • rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and 	98
<ul style="list-style-type: none"> • informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry. 	98
<p>b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:</p>	102-104
<ul style="list-style-type: none"> • saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing: 	
<p>a. jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding;</p>	102-103
<p>b. kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;</p>	102-103
<p>c. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and</p>	102-103
<p>d. volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.</p>	102-103
<p>Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;</p>	
<p>dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:</p>	104
<p>a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;</p>	104
<p>b. rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;</p>	104
<p>c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;</p>	104
<p>d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and</p>	104
<p>e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;</p>	104
<p>dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and</p>	103

KETERANGAN
DESCRIPTION

HALAMAN
PAGE

dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut.	103
in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	
c. Laporan Direksi Board of Directors' Report	132-148
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
a. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	
• strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	135-137
• peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	137-138
• proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	137-138
• perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	141
• kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies;	138-140
b. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	142
c. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	143-146
d. Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	118-131
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
a. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	121-122
b. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan 2) views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	125-127
c. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	127-130
d. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Profile	153-321
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	
a. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	154, 162
b. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	155-157
• alamat; address;	155-157



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
<ul style="list-style-type: none"> • nomor telepon; telephone number; 	155-157
<ul style="list-style-type: none"> • alamat surat elektronik; dan e-mail address; and 	155-157
<ul style="list-style-type: none"> • alamat situs web; website address; 	155-157
c. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	158-162
d. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	164-206
e. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	207-211
f. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	212-213
g. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	214-215
h. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	216
i. profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	222-235
<ul style="list-style-type: none"> • nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities; 	222-232
<ul style="list-style-type: none"> • foto terbaru; recent photograph; 	222-232
<ul style="list-style-type: none"> • usia; age; 	222-232
<ul style="list-style-type: none"> • kewarganegaraan; nationality; 	222-232
<ul style="list-style-type: none"> • riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification; 	222-232
<ul style="list-style-type: none"> • riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on: 	222-232
j. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	222-232
k. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	222-232
l. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	222-232

KETERANGAN
DESCRIPTION

HALAMAN
PAGE

<ul style="list-style-type: none"> • hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and 	233
<ul style="list-style-type: none"> • perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed; 	233-235
<p>a. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:</p>	236-243
<ul style="list-style-type: none"> • nama dan jabatan; name and position; 	236-241
<ul style="list-style-type: none"> • foto terbaru; recent photograph; 	236-241
<ul style="list-style-type: none"> • usia; age; 	236-241
<ul style="list-style-type: none"> • kewarganegaraan; nationality; 	236-241
<ul style="list-style-type: none"> • riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification; 	236-241
<ul style="list-style-type: none"> • riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on: 	236-241
<p>a. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;</p>	236-241
<p>b. dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;</p>	236-241
<p>c. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and</p>	236-241
<p>d. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;</p>	236-241
<ul style="list-style-type: none"> • hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; 	242
<ul style="list-style-type: none"> • pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and 	236-241
<ul style="list-style-type: none"> • perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed; 	242-243

KETERANGAN
DESCRIPTION

HALAMAN
PAGE

dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	243
jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	270-272
nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	274-275
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	✓
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	✓
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	✓
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	
persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	275
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	✓
jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	276
a. kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	276
b. kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	276
c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	276
d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	276
informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	278

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
<p>nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.</p>	279-293
<p>kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);</p>	295-296
<p>informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbalance hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);</p>	297-306
<p>informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: 20) information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:</p>	307
<p>a. nama dan alamat; name and address;</p>	307
<p>b. periode penugasan; assignment period;</p>	307
<p>c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;</p>	307
<p>d. biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and</p>	307
<p>e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and</p>	307
<p>Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/alliances can be presented in tabular form.</p>	✓
<p>nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP</p>	307-309
<p>f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion</p>	324-401
<p>Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:</p>	
<p>tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:</p>	330-344
<p>a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;</p>	333, 335, 338, 340, 342
<p>b. pendapatan/penjualan; dan b) income/sales; and</p>	333-334, 336, 338-339, 340-341, 343

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
c. profitabilitas; profitability;	333-334, 336, 338-339, 340-341, 343
kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	345-360
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	346-350
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	350-353
c. ekuitas; equity;	353-354
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	354-358
e. arus kas; cash flows;	359-360
kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	360-361
tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	362
struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	362-364
bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	364
a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	364
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	364
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	364
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	364
bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	364-365
a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	364-365
b. tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	364-365
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	364-365
d. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	365
prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	367-368
perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	369-370
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	369-370

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. laba (rugi); profit (loss);	369-370
c. struktur modal (capital structure); atau capital structure; or	369-370
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	369-370
target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: 11) targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	370-372
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	370-372
b. laba (rugi); profit (loss);	370-372
c. struktur modal (capital structure); capital structure;	370-372
d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or	370-372
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	370-372
aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	374-375
uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	376-377
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	376-377
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	376-377
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	376-377
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	376-377
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	✓
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: 14) realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	379-383
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan a) in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	379-383
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	379-383
informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	379-383
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;	379-383

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;	379-383
c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);	379-383
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;	379-383
e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and	379-383
f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	384-394
pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan (1) a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	384-394
peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); (2) the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	384-394
untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; g) for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	384-394
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	384-394
untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; h) for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	394-395
dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	✓
perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	394-395
perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	395
Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik g. Issuer or Public Company Governance	421-825
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	
a. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	

KETERANGAN
DESCRIPTION

HALAMAN
PAGE

<ul style="list-style-type: none"> Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include: 	
<p>keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan (1) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and</p>	452-467
<p>keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; (2) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;</p>	452-467
<p>b. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;</p>	453, 455, 463, 464
<p>Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:</p>	476
<p>a. tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;</p>	479-483
<p>b. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form</p>	483-501
<p>c. pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; b) statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;</p>	501-502
<p>d. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;</p>	509
<p>e. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;</p>	✓
<p>f. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:</p>	521
<ul style="list-style-type: none"> kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and 	521
<ul style="list-style-type: none"> pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any); 	522-524
<p>g. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:</p>	524
<ul style="list-style-type: none"> prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and 	524
<ul style="list-style-type: none"> kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and 	524
<p>h. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.</p>	524
<p>Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:</p>	526
<p>a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;</p>	528-530

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	533
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	538
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	538-540
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	548
<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and 	548
<ul style="list-style-type: none"> • pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any); 	549-550
e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	563-565
<ul style="list-style-type: none"> • prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals; 	563-565
<ul style="list-style-type: none"> • kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and 	563-565
<ul style="list-style-type: none"> • pihak yang melakukan penilaian; dan party conducting the assessment; and 	563-565
f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	552
<ul style="list-style-type: none"> • prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and 	552
<ul style="list-style-type: none"> • kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; 	552-553
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: 4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	557
a. prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	557
b. prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	557
<ul style="list-style-type: none"> • prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners; 	557-558
<ul style="list-style-type: none"> • struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and 	558-560

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
<ul style="list-style-type: none"> • besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form. 	560-561
<p>Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:</p>	N/A
<p>a. nama; name;</p>	N/A
<p>b. dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;</p>	N/A
<p>c. periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;</p>	N/A
<p>d. tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and</p>	N/A
<p>e. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;</p>	N/A
<p>Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:</p>	578
<p>a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;</p>	582-585
<p>b. usia; age;</p>	582-585
<p>c. kewarganegaraan; nationality;</p>	582-585
<p>d. riwayat pendidikan; educational history;</p>	582-585
<p>e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:</p>	582-585
<ul style="list-style-type: none"> • dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member; 	582-585
<ul style="list-style-type: none"> • rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and 	582-585
<ul style="list-style-type: none"> • pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; 	582-585
<p>f. periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;</p>	582-585
<p>g. pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee;</p>	586
<p>h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);</p>	586-587
<p>i. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and</p>	587
<p>j. pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;</p>	591-595
<p>komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: 7) the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:</p>	596



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	603-605
b. usia; age;	603-605
c. kewarganegaraan; nationality;	603-605
d. riwayat pendidikan; educational history;	603-605
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	603-605
• dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	603-605
• rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	603-605
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	603-605
f. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	603-605
g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	606
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	606-607
i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	599-601
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); a statement that it has a guideline or charter;	603
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	608-609
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	610-611
m. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	✓
• alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and	✓
• pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; the party carrying out the nomination and remuneration function;	✓
komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	612-633, 634-645, 646-652
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	615-618, 238, 638-639, 236, 618 246, 249, 250, 647-648,
b. usia; age;	615-618, 238, 638-639, 236, 618 246, 249, 250, 647-648,
c. kewarganegaraan; nationality;	615-618, 238, 638-639, 236, 618 246, 249, 250, 647-648,

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
d. riwayat pendidikan; educational history;	615-618, 238, 638-639, 236, 618 246, 249, 250, 647-648,
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	615-618, 238, 638-639, 236, 618 246, 249, 250, 647-648,
<ul style="list-style-type: none"> • dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member; 	615-618, 238, 638-639, 236, 618 246, 249, 250, 647-648,
<ul style="list-style-type: none"> • rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and 	615-618, 238, 638-639, 236, 618 246, 249, 250, 647-648,
<ul style="list-style-type: none"> • pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; 	615-618, 238, 638-639, 236, 618 246, 249, 250, 647-648,
f. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	615-618, 238, 638-639, 236, 618 246, 249, 250, 647-648,
g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	619, 640, 648
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	619-620, 640, 648-650
i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	615, 637-638, 648
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	613, 636, 648
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	621-624, 641-643, 651-652
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	625-627, 643, 652
Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:	660
a. nama; name;	662
b. domisili; domicile;	662
c. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	662
<ul style="list-style-type: none"> • dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as company secretary; and 	662
<ul style="list-style-type: none"> • pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; 	662
d. riwayat pendidikan; educational history;	662
e. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	663
f. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	663-666
Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	666
a. nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	667



KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	667
• dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	667
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	667
c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	669
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	670
e. struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	671
f. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	671-673
g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	673
h. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	675
uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	678
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	679
b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	679-680
c. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	684
sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	685
a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	685
b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	699-702
c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	685-686
d. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	706
perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	714
a. pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	714-717
b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	714-717
c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company;	714-717

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); 14) information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	717
informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: 15) information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes:	722
a. pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics;	722-723
b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and	724-725
c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	725
uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); 16) a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);	727
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	727
a. jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	727
b. jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	727
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	727
d. harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	727
uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	
a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan a) share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	727
b. pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;	728
uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:	729
a. cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;	729-730
b. perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers;	730-731
c. penanganan pengaduan; complaint handling;	731-733
d. pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and	733
e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	
• jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; and	736-737

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
<ul style="list-style-type: none"> • tindak lanjut pengaduan; follow-up on complaints; 	737
<p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.</p>	✓
uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	738
<ul style="list-style-type: none"> a. program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and 	738-739
<ul style="list-style-type: none"> b. pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies; 	739
<p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.</p>	✓
<p>penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:</p>	750-775
<ul style="list-style-type: none"> a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or 	750-775
<ul style="list-style-type: none"> b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any). 	✓
<p>Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.</p>	✓
<p>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies</p>	827-848
<p>Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at least includes:</p>	✓
<ul style="list-style-type: none"> a. penjelasan strategi keberlanjutan; explanation of the sustainability strategy; 	✓
<ul style="list-style-type: none"> b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental); 	✓
<ul style="list-style-type: none"> c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief profile of the Issuer or Public Company; 	✓
<ul style="list-style-type: none"> d. penjelasan Direksi; explanation of the Board of Directors; 	✓
<ul style="list-style-type: none"> e. tata kelola keberlanjutan; sustainability governance; 	✓
<ul style="list-style-type: none"> f. kinerja keberlanjutan; sustainability performance; 	✓
<ul style="list-style-type: none"> g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; written verification from an independent party, if any; 	✓
<ul style="list-style-type: none"> h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan feedback sheet for readers, if any; and 	✓
<p>tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;</p>	✓

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
<p>Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;</p>	✓
<p>informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: information on the Sustainability Report in number 1) can:</p>	✓
<p>a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or</p>	✓
<p>b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;</p>	✓
<p>Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;</p>	✓
<p>Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:</p>	✓
<p>a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan contains all the information as referred to in number 1); and</p>	✓
<p>b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;</p>	✓
<p>Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and</p>	✓
<p>Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.</p>	✓
<p>Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report</p>	856-1052
<p>Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.</p>	856-1052



KETERANGAN
DESCRIPTION

HALAMAN
PAGE

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.

150-151

Consistent Transformation Toward Fit for Future

Konsisten Bertransformasi untuk Menuju Masa Depan yang Sehat

PT Wijaya Karya (Persero), Tbk

■ Kantor Pusat :

WIKA Tower 1 & 2
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10
Jakarta 13340 - Indonesia

■ Online

Email: adwijaya@wika.co.id
Website: www.wika.co.id

■ Phone & Fax

Phone: 021 - 806 79200
Fax: 021 - 228 93830

